Kumpulan Abstrak Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2018 - 2021

UNIVERSITAS ANDALAS

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Perpustakaan Universitas Andalas

2022

KUMPULAN ABSTRAK SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2018

345
ZEV
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA FISIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi Di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang)

ZEVANANDO, 1410112018, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV Hukum Pidana, 60 Halaman, Tahun 2018

ABSTRAK

Isu tentang KDRT mulai merebak di Indonesia seiring dengan di ratifikasinya Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Permasalahan yang dibahas yaitu : (1)Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di kepolisian ? (2)Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) ? (3)Bagaimana upaya yang dilakukan Penyidik dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ? Metode penelitian ini mengunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang, dimulai dari proses adanya laporan dari korban atau korban memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga ke kepolisian, setelah itu dilakukan penyelidikan apakah peristiwa tersebut peristiwa pidana, dan setelah dilakukan penyelidikan peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana maka dilanjutkan ketahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan penyidik melakukan upaya paksa yaitu penangkapan dan penahanan. Kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu kendala eksternal adalah korban berdamai tanpa adanya pencabutan laporan polisi dan saksi yang tidak mau memberikan kesaksian dikarenakan tidak mau mencampuri rumah tangga dari korban. Kendala Internal adalah tempat penyidikan. Pada saat proses penyidikan, banyaknya kasus KDRT perdamaian yang dilakukan korban dengan pelaku tanpa sepengetahuan penyidik yang mengakibatkan kasus KDRT tersebut menjadi tugakan oleh penyidik upaya yang dilakukan penyidik adalah meminta korban agar laporan yang ia adukan segera dicabut. Selain itu saksi tidak mau memberikan keterangan kepada penyidik dikarenakan tidak mau mencampuri rumah tangga dari korban upaya yang dilakukan penyidik terhadap hal itu adalah penyidik menyakinkan saksi tersebut bahwa keterangannya yang ia berikan sangat diperlukan penyidik dalam kelancaran proses penyidik.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Kekerasan dalam Rumah Tangga

347.05
ANN
p

PERJANJIAN KERJASAMA PENAMBANGAN PASIR DAN BATU (SIRTU) ANTARA PT. EXPO INDOMAS PERKASA DENGAN PEMILIK LAHAN TAMBANG DI DESA PALAYANGAN BALAH HILIR, NAGARI LUBUK ALUNG, KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ANNEKE DWI PUTRI DOLIS, BP. 1110112133, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS, 63 halaman, 2018

ABSTRAK

Semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat membuat duia industrimembutuhkan bahan baku mentah dalam waktu yang optimal. Satu di antaranya adalah kebutuhan sumber daya alam, seperti pasir dan batu. Bahan galian merupakan pasirdan batu dapat kita temukan di banyak tempat tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Salah satunya terdapat di daerah Sumatera Barat tepatnya di desa Palayangan Balah Hilir, Nagari Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Dengan perkembangan yang sangat pesat di sector ekonomi maka berdampak pada berkembang pesatnya hukum perjanjian dimana masyarakat saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Diantaranya yaitu Perjanjian Kerjasama Penambangan dimana perjanjian padaumumnya diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah proses terjadinya perjanjian kerjasama penambangan pasir dan batu antara PT.Expo Indomas Perkasa dengan pemilik lahan tambang,Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerjasama penambangan pasir dan batu antara PT.Expo Indomas Perkasa dengan pemilik lahan tambang dan apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penambangan pasir dan batu antara PT.Expo Indomas Perkasa dengan pemilik lahan tambang dan upaya penyelesaianya. Untuk menjawab persoalan diatas, penilitian yang harus dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu bagaimana aspek hukum atau peundang undangan yang berlaku berkenaan dengan masalah yang dibahas berdasarkan yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, yaitu Proses terjadinya isi perjanjian kerjasama diawali dengan proses negosiasi terlebih dahulu dengan para pihak dan kemudian baru dibuat surat perjanjian dan ditandatangani oleh para pihak, dan kemudian dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang telah di buat dan disepakati oleh para pihak. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat secara sepakat oleh kedua belah pihak. Mengenai kendala yang dihadapi dalam perjanjian kerjasama penambangan antara kedua belah pihak telah terjadi wanprestasi oleh pihak penambang atau penyewa yaitu terjadi keterlambatan dalam penyerahan uang sewa angkutan.

341
ARC
l

LEGALITAS PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA TERHADAP PIHAK ASING YANG MENGHALANGI UPAYA PEMBERANTASAN ILLEGAL, UNREGULATED, UNREPORTED (IUU) FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) (Studi Mengenai Masuknya Coastguard China ke ZEE Indonesia Dalam Upaya Pengamanan Kapal Nelayan Kway Fei 10078 di Laut Natuna)

Arcy Rahman Putra, 1310112171, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018, 73 Halaman

ABSTRAK

Indonesia mempunyai wilayah laut yang sangat luas, sehingga menjadi sasaran negara-negara tetangga untuk melakukan IUU Fishing di ZEE-nya. Akhir-akhir ini adanya tindakan IUU Fishing yang dilakukan olah kapal nelayan China di ZEE Indonesia serta diiringi dengan masuknya coastguard China yang memasuki ZEE Indonesia untuk melakukan pengamanan terhadap Kapal Nelayan China tersebut. Kejadian kasus ini sangat menarik untuk diteliti yang dikaitkan dengan Hukum Internasional dan Nasional yang berlaku. Sehingga penelitian ini diberi judul "LEGALITAS PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA TERHADAP PIHAK ASING YANG MENGHALANGI ILLEGAL, UNREGULATED, UNREPORTED (IUU) FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) (Studi Masuknya Coastguard China ke ZEE Indonesia Dalam Upaya Pengamanan Kapal Nelayan Kway Fei 10078 di Laut Natuna), dengan rumusan masalah bagaimana legalitas masuknya coastguard China ke ZEE Indonesia dalam upaya melindungi Kapal Nelayan Kway Fei 10078 dan bagaimana legalitas penggunaan kekuatan bersenjata terhadap pihak asing yang menghalangi upaya pemberantasan Illegal, Unregulated, Unreported Fishing di ZEE serta apakah tindakan semestinya yang dilakukan Indonesia terhadap tindakan China tersebut. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas masuknya coastguard China ke ZEE Indonesia dalam upaya melindungi Kapal Nelayan Kway Fei 10078 dan mengetahui legalitas penggunaan kekuatan bersenjata terhadap pihak asing yang menghalangi upaya pemberantasan Illegal, Unregulated, Unreported Fishing di ZEE serta untuk mengetahui tindakan semestinya yang dilakukan Indonesia terhadap tindakan China tersebut. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif yakni mencari ketentuan- ketentuan yang berlaku dan bahan-bahan kepustakaan. Berdasarkan analisa dan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa masuknya coastguard China ke ZEE Indonesia yang melindungi Kapal Kway Fei 10078 adalah illegal, karena kapal negara lain hanya diberi hak untuk berlayar saja tidak untuk melindungi kapal lain yang melakukan pelanggaran di wilayah ZEE negara lain sesuai pasal 58 UNCLOS 1982. Sebenarnya kapal suatu negara mempunyai imunitas di wilayah laut negara lain, tetapi jika dikaitkan dengan teori kapal negara adalah ekstrateritorial dari suatu negara tindakan pihak asing itu sudah termasuk kategori mengganggu integritas keamanan negara sehingga boleh dibalas dengan serangan bersenjata sebagai self defense, tetapi membalas dengan serangan senjata negara yang dirugikan tetap mempertimbangkan prinsip proportional dan necessary dalam menggunakan kekuatan bersenjata.

342
ATI
p

PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KECAMATAN PADANG SELATAN

Atika Yurisa, BP : 1410112151, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VII), 2018, 60 Halaman.

ABSTRAK

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain, adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil warga atas barang dan jasa publik, pelayanan administratif. Pengaturan mengenai Kartu Tanda Penduduk terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada asas-asas pelayanan publik, pemerintah wajib membangun manajemen pelayanan publik mengacu pada asas-asas pelayanan publik. Masyarakat selalu menuntut Pelayanan Publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan sering tidak sesuai dengan harapan, pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat, dan melelahkan. Padahal instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (sociological research) yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dalam hal pelaksanaan pelayanan publik dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik terdapat berbagai kendala, masalah utamanya adalah kosongnya blanko, selanjutnya dalam hal pelaksanaan pelayanan publik sendiri masalahnya adalah kurangnya petugas pelayanan.

Kata Kunci : Pelaksanaan Pelayanan Publik, Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

342
ABR
p

PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN PULAU KECIL UNTUK WISATA BAHARI DI KOTA PADANG

Abraham Hasudungan S, 1210112231, Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 56 halaman, 2018

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia, yang mempunyai 17.508 pulau. Kekayaan sumberdaya pesisir Indonesia yang menjadi salah satu sumberdaya yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi. Berbagai potensi kekayaan hayati dan non hayati tersebut memberikan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya. Secara konstitusional, seluruh kekayaan sumberdaya alam termasuk sumberdaya pesisir dikuasai oleh Negara untuk dikelola sedemikian rupa demi kesejahteraan rakyat. Namun ironisnya, pengelolaan oleh Negara tersebut menimbulkan konflik pemanfaatan antara masyarakat dengan pemerintah maupun pihak swasta. Seperti yang terjadi pada Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil Kota Padang. Pengelola pulau baik yang berasal dari masyarakat maupun pengelola swasta, tidak ada yang memiliki Izin Pemanfaatan. Berdasarkan hal ini penulis merumuskan dua permasalahan yaitu proses Pemberian Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil untuk wisata bahari oleh Pemerintah Kota Padang, hambatan dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil untuk Wisata Bahari oleh Pemerintah Kota Padang. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara dengan stakeholder terkait. Berdasarkan hasil penelitian, proses Pemberian Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil untuk Wisata Bahari masih belum sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kemudian hambatan dalam Pemberian Izin Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil untuk Wisata Bahari oleh Pemerintah Kota Padang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil masalah kewenangan, dan juga kurangnya kesadaran pihak pengelola pulau dalam mendaftarakan kegiatan usaha pemanfaatan pulau yang dikelolanya. Hal ini tentunya menjadi faktor yang mempengaruhi pemberian izin pemanfaatan kawasan konservasi taman pulau kecil oleh Pemerintah Kota Padang

Kata Kunci : Izin, Pengelolaan Pulau, Wisata Bahari

345
ADE
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ; KEKERASAN KELOMPOK BOKOHARAM DI NIGERIA

Adelsa Murena, 1410112108, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018, Pembimbing : Prof. H, Firman Hasan, S.H., LLM. Dan Dr. Delfiyanti, S.H., M.H.

ABSTRAK

Konflik besenjata yang terjadi dibelahan dunia baik itu konflik bersenjata Internasional ataupun konflik bersenjata non internasional selalu terdapat korban baik itu dalam bentuk materi maupun korban jiwa, Dalam hal ini Hukum Humaniter Internasional menetapkan bahwa dalam setiap konflik bersenjata yang melibatkan penduduk sipil, terutama perempuan dan anak-anak harus diberikan perlindungan hukum dalam bentuk apapun itu, termasuk dalam konflik bersenjata non internasional yang terjadi di Nigeria. Hukum Humaniter Internasional sebagai salah satu aturan yang dapat digunakan oleh semua negara untuk mengurangi penderitaan yang dialami masyarakat akibat konflik bersenjata yang terjadi diberbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional kepada perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dalam konflik bersenjata dan penerapan dari Hukum Humaniter tersebut telah diterapkan atau belum terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan oleh Boko Haram di Nigeria. Dan berdasarkan hal tersebut, penulis telah melakukan penelitian dengan metode penelitian normatif. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Hukum Humaniter Internasional yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan terhadap Orang-Orang yang menjadi korban perang, Protokol tambahan 1 tahun 1977, Protokol tambahan II tahun 1977, konvensi denhaag 1907 tentang Cara/metode berperang dengan baik, dan Konvensi Hak Anak 1989 serta Protokol tambahan tahun 2000. Bentuk-bentuk perlindungan Hukum tersebut diantaranya mereka harus mendapatkan perlindungan dengan baik tanpa adanya pembedaan agama, ras dan suku, perempuan harus dilindungi dari tindakan atau perbuatan yang tidak senonoh seperti pemerkosaan, pembunuhan,prostitusi, tidak boleh dijadikan sebagai sasaran operasi militer, mendapat bantuan spritual dan materi, mendapatkan pelayanan medis serta bentuk perlindungan hukum lainnya yang akan melindungi mereka.

Kata kunci:Perlindungan Hukum; Perempuan dan Anak-anak; Konflik bersenjata Non Internasional; Hukum Humaniter Internasional dan BokoHaram (Nigeria).

344.09
ADI
p

PELAKSANAAN FUNGSI POLMAS (POLISI MASYARAKAT) DALAM RANGKA TUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI KENAGARIAN PADANG TAROK KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM

Adia Pranata, 1410112122, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 62 Hlm +vi, 2018

ABSTRAK

Bhabinkamtibmas merupakan pengemban Polmas (Polisi Masyarakat) di desa/kelurahan, model polmas ini pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai mitra kepolisian dalam pemecahan masalah.Pelaksanaan fungsi Polmas di Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam belum berjalan secara efektif karena banyaknya terjadi tindak pidana dalam waktu yang berdekatan.Permasalahan yang dibahas ialah Bagaimana pelaksanaan fungsi Polmas dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban di Kenagarian Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam?dan Kendala apa yang dihadapi oleh Polmas dalam pelaksanaan fungsi Polmas tersebut?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode yang menuntut peneliti untuk terjun langsung ke lapangan dan melihat norma yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara semi struktur serta observasi ke lapangan agar di dapat data yang diinginkan.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi polmas di Kenagarian Padang Tarok ialah dengan dua metode yaitu THTS (Tiada Hari Tanpa Silaturahmi) dan DDS (Door To Door System) yang terus di gencarkan guna mendekatkan diri kepada masyarakat dan sebagai upaya untuk menekankan angka kejahatan di tengah masyarakat. Dalam melaksakan tugas tersebut kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas berupa kurangnya pemahamandari masyarakat setempat mengenai keberadaan Bhabinkamtibmas serta tidak adanya koordinasi antara Bhabinkamtibmas dengan perangkat nagari apabila ada ditemui suatu permasalahan di masyarakat tersebut.Namun begitu Bhabinkamtibmas di Kenagarian Padang Tarok terus berusaha memberikan pelayanan dan pemahaman kepada masyarakat dengan selalu berkoordinasi dan menjaga komunikasi dengan perangkat nagari agar tercapainya kemanan dan ketertiban yang di harapkan bersama.

342
ADI
p

PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA SAWAHLUNTO DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Adila Giffary, 1310112035, Fakultas Hukum, Univer sitas Andalas, 53 halaman, 2018

ABSTRAK

Seiring dengan dilaksanakanya program otonomi daerah, pada umumnya masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan dalam bentuk peningkatan mutu pelayanan masyarakat, dan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pengambilan kebijakan publik. Masyarakat Kota Sawahlunto pada umunya dan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto khususnya mendambakan pemerintahan yang cerdas dan profesional dalam pemerintahan, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Pemerintahan tersebut akan dapat terwujud apabila selalu melihatkan peran serta masyarakatnya, khususnya yang berkaitan langgsung dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Dalam pengambilan kebijakan publik tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentkan Peraturan Perundang-Undangan mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam rangka pembentukan peraturan Perundang-Undangan. Masyarakat sejak awal yakni dari perencanaan, persiapan dan pembahasan, sudah harus dilibatkan dengan cara meminta dan menampung masukan secara lisan maupun tulisan dengan tujuan peraturan yang dihasilkan nantinya benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut akan dikaji permasalahan pertama, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah kota Sawahlunto?. Untuk menjawab permasalahan tersebut diperlukan suatu metode yang tepat, dalam hal ini adalah metode yuridis sosiologis, dimana penulis melakukan penelitian di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto. Dari hasil penelitian terhadap pemebntukan peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 Kota Sawahlunto, ditemukan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Kota Sawahlunto adalah partisipasi aktif dan partisipasi pasif dari masyarakat Kota Sawahlunto.

347.05
ADI
p

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK) PERUBAHAN ATAS SISTEM INFORMASI DEBITUR

Aditya Rahman, 1110112080, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan: Hukum Perdata Bisnis, 64 Halaman, 2018

ABSTRAK

Kegiatan Perbankan merupakan salah satu usaha yang berfokus pada suatu ketahanan ekonomi suatu negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagaimana lingkup usaha perbankan, selain menghimpun dana dari masyarakat, kegiatan perbankan juga menyalurkan dana kepada masyarakat, yang mana disebut kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu pemberian tertentu dengan pemberian bunga. Para nasabah yang melakukan kegiatan perkreditan dengan pihak bank maka pihak bank akan memiliki informasi dari nasabah tersebut. Kemudian informasi tersebut dikembangkan dalam suatu sistem bernama Sistem Informasi Debitur yang dikelola oleh Bank Indonesia, dan saat ini telah diubah menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan dengan mencakup pelapor yang lebih luas dan dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana bentuk pengawasan terhadap pelapor yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan apa kelebihan dari Sistem Layanan Informasi Keuangan yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penulisan ini bersifat yuridis empiris, dimana data- data penelitian yang diambil melalui data primer yang diperoleh dari kantor Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sistem Layanan Informasi Keuangan dianggap dapat meningkatkan efektivitas dalam pengawasan yang dilakukan terhadap sektor jasa keuangan dengan adanya sistem yang andal, komprehensif, dan terintegrasi di sektor jasa keuangan, sanksi- sanksi yang diberikan terhadap pihak pelapor yang melakukan kesalahan terdapat dalam pasal 32-37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Dengan kelebihan yang ada dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan diharapkan agar tidak lagi terjadi kendala dalam ketidakakuratan laporan debitur dimana hal tersebut banyak sekali terjadi dalam sistem yang sebelumnya, yaitu Sistem Informasi Debitur yang dikelola oleh Bank Indonesia.

344.09
AFD
p

PERANAN NINIK MAMAK DALAM MENJATUHKAN SANKSI ADAT ATAS PERKAWINAN SESUKU DI NAGARI MINANGKABAU KECAMATAN SUNGAYANG KABUPATEN TANAH DATAR

Afdal Maulana, 1310111197, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2018

ABSTRAK

Perkawinan merupakan hak asasi setiap manusia yang dijamin dalam konstitusi. Bagi masyarakat Minangkabau perkawinan ditengah masyarakatnya bersifat Eksogami atau keluar suku, karena orang yang sasuku dianggap badunsanak. Nagari Minangkabau yang termasuk kedalam salah satu wilayah di Kabupaten Tanah Datar atau dikenal sebagai luhak nan tuo terdapat beberapa kasus perkawinan sasuku yang pernah terjadi. Peranan niniak mamak dalam menjatuhkan sanksi adat terhadap perkawinan sasuku di nagari Minangkabau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat salingka nagari. Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan di kemukakan adalah: 1) Apa penyebab terjadinya perkawinan sesuku di Nagari Minangkabau. 2) Apa peranan niniak mamak dalam menjatuhkan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di Nagari Minangkabau. 3) Apa pula peranan niniak mamak agar sanksi adat tersebut dapat berjalan efektif. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menemukan adanya dua kasus perkawinan sasuku yang disebabkan oleh kondisi hamil diluar nikah, dan perkawinan yang dilangsungkan diperantauan tanpa melibatkan niniak mamak. Peranan niniak mamak dalam menjatuhkan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sasuku dengan memberikan sanksi adat dibuang sapanjang adat melalui proses musyawarah dan mufakat dalam wadah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Peranan niniak mamak agar sanksi adat berjalan efektif dengan menghimbaukan penjatuhan sanksi adat kepada masyarakat agar dapat dikawal dalam pelaksanaannya. Saran yang dapat dikemukakan: agar niniak mamak dan pemuka adat membuat peraturan khusus dalam penjatuhan sanksi adat, niniak mamak harus memegang teguh aturan adat tanpa pandang bulu terhadap anak kemenakan, perlunya sosialisasi dan pendidikan adat salingka nagari dari niniak mamak terhadap masyarakat, niniak mamak harus mengawasi perkembangan anak kemenakan yang berada di perantauan.

Kata kunci: Niniak Mamak, Peranan, Perkawinan Sasuku, Sanksi Adat

343
AFD
p

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KESEHATAN KOTA BUKITTINGGI (Studi Pada Puskesmas Nilam Sari Kota Bukittinggi)

Afdalul Zikri, BP 1410111084, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 75 halaman, 2018

ABSTRAK

Salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia adalah untuk mesejahterakan rakyatnya, dan kesejahteraan adalah hak setiap Warga Negara Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yang berbunyi : "…. Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bedasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Upaya mencapai kesejahteraan tersebut adalah membuka lapangan pekerjaan. Salah satu pekerjaan yang layak disediakan pemerintah adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hak PNS adalah mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas. Pemerintah daerah Kota Bukittinggi selain memberikan gaji juga memberikan tambahan penghasilan kepada PNS Kota Bukittinggi yang sama halnya dengan tunjangan kinerja. Penulis menekankan kajian pada Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi (Studi Pada Puskesmas Nilam Sari Kota Bukittinggi) serta kendala dalam pemberian tambahan penghasilan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis sosioligis dengan demikian data-data hukum yang diperoleh melalui dua cara yaitu data primer diperoleh langsung di lapangan (field research) dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (library research.). Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemberian tambahan penghasilan belum berjalan dengan baik, permasalahan yang ditemukan secara yuridis adalah pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di Kota Bukittinggi belum tercapai, dikarenakan dalam tujuan pemberian tunjangan tambahan penghasilan tolak ukur yang dipakai dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi belum diatur secara jelas sehingga tujuan pemberian tunjangan tambahan penghasilan tersebut tidak tepat sasaran. Sedangkan non yuridis adalah bahwa PNS di Puskesmas Nilam Sari tidak mengetahui tolak ukur penilaian dalam kualitas kerja dan penilaian kerja.

Kata Kunci: Penghasilan, Tunjangan Tambahan Penghasilan

345
AFD
p

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN SUATU TINDAK PIDANA OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Afdol Guntur Nasution, BP 1410112131, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Program Kekhususan Sistem Peradilan Pidana(PK V). 2018. 76 Halaman.

ABSTRAK

Negara Hukum adalah Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap warga negaranya.Negara melalui undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menjamin hak asasi manusia sendiri. Namun yang terjadi pada masa sekarang ini, Negara cenderung gagal dalam perlindungan HAM tadi. Kegagalan perlindungan HAM paling nyata kita lihat masa sekarang adalah banyaknya kasus penyiksaan yang dilakukan aparat kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana. Disisi lain, penyidik dalam melaksanakan tugasnya sudah dipandu oleh Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebenarnya peraturan ini cukup mengawal tugas penyidik, namun saat ini, penerapan peraturan ini belum juga optimal. Dalam penulisan ini, penulis mengategorikan 2 permasalahan yaitu : Bagaimana pelaksanaan hak-hak tersangka yang mengalami tindakan kekerasan oleh polisi dalam proses penyidikan di wilayah hukum Polresta Padang, dan akibat hukum terhadap oknum penyidik kepolisian yang melakukan tindak kekerasan pada proses penyidikan di wilayah hukum Polresta Padang. Metode Penilitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang didasarkan pada data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian, pelaksanaan hak-hak tersangka yang mengalami tindakan kekerasan oleh polisi dalam proses penyidikan di wilayah hukum Polresta Padang tidak optimal dan cenderung menggunakan kekerasan dalam mengungkap informasi dari tersangka. Akibat hukum terhadap polisi yang melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka juga tidk diatur dengan jelas, padahal seharusnya dimungkinkan diberikan sanksi yang berat.

342
AFF
p

PELAKSANAAN TUGAS OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT TERHADAP PENCEGAHAN PRAKTEK MALADMINISTRASI DI SATUAN PENDIDIKAN SMA DI KOTA PADANG

Affan Supertovayo, BP 1410112001, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VII). 2018. 77 Halaman.

ABSTRAK

Ombudsman RI, menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI yaitu, lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan Pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta dan perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, pada Pasal 7 huruf g PP No. 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah bahwa tugas Perwakilan Ombudsman salah satunya yaitu melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan tugas Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat terhadap pencegahan praktek maladministrasi di satuan pendidikan SMA di Kota Padang ? 2) Apa kendala yang dihadapi oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat terhadap pencegahan praktek maladministrasi di satuan pendidikan SMA di Kota Padang serta bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (empiris). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan dianalisis dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa : pelaksanaan tugas Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat terhadap pencegahan praktek maladministrasi di Satuan Pendidikan SMA Di Kota Padang berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf (g) UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia masih belum optimal dikarenakan secara yuridis belum ada payung hukum secara vertikal operasional yaitu standar operasional prosedur (SOP) yang dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan bentuk-bentuk pencegahan maladministrasi di satuan pendidikan SMA Kota Padang dan adapun yang telah dilaksanakan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Terhadap Pencegahan Praktek Maladministrasi Di Satuan Pendidikan SMA Di Kota Padang, diantaranya: 1). Sosialisasi Dunsanak Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat. 2). Pertemuan berkala dengan Organisasi Perempuan Sumatera Barat. 3). Training of Trainer. 4). Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2017 Tingkat SMA/ Sederajat. 5). Koordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kota Padang dan Sumatera Barat ..

Kata Kunci: Ombudsman Republik Indonesia, Maladministrasi

345
AGU
p

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR

Agung Surya Darma, Nomor BP : 1310111034, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 82 halaman, 2018

ABSTRAK

Wilayah hukum Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar terdiri atas 41 Jorong dan 9 Nagari, yang merupakan daerah yang kerap dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan domestic, karena memiliki objek wisata pendakian Gunung Marapi, Gunung Singgalang dan terkenal dengan kain songketnya. Banyak kunjungan juga mengundang banyak Tindak Pidana khususnya Tindak Pidana pencurian sepeda motor , yaitu 15 kasus pencurian sepeda motor dari 28 kasus Tindak Pidana yang terjadi tahun 2016 dan 11 kasus Tindak Pidana pencurian sepeda motor dari 22 kasus Tindak Pidana yang terjadi pada tahun 2017. Adapun demikian, seharusnya ini menjadi perhatian khusus oleh Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar. Penelitian dilakukan di Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar yang merupakan sebagai pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah upaya Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana pencurian sepeda motor dan kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Sepeda Motor di wilayah hukum Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif melalui studi dokumen dan wawancara (data primer) yang kemudian dianalisa dengan menggunakan peraturan perundang- undangan serta teori-teori hukum yang ada (data sekunder). Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa berbagai upaya dalam pelaksanaan upaya penanggulangan Tindak Pidana di lapangan,yaitu dengan melakukan upaya pre-emtif, upaya preventif dan represif. Upaya pre-emtif yang dilakukan yaitu Himbauan kepada masyarakat agar waspada dan Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kendala yang kerap terjadi yaitu Kendala internal dan eksternal. Kendala internal yang terjadi yaitu: minim kualitas dan kuantitas anggota polisi, kekurang fasilitas transportasi, biaya operasional tidak mencukupi.adapun kendala eksternal yang terjadi yaitu: kurang kerjasama antara masyarakat, perangkat Nagari dan polisi, kurangnya alat bukti dalam penyidikan.

342
AHM
i

IZIN USAHA SUB PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGAWASANNYA DI KOTA PARIAMAN

Ahmad Fajar Trinanda, BP : 1310111014. Program kekhususan Hukum Administrasi Negara, 52 Halaman

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang banyak, baik itu SDA yang dapat diperbaharui maupun SDA yang tidak dapat diperbaharui seperti Minyak dan Gas Bumi (MIGAS). Perusahaan minyak terbesar yang dimiliki Negara Indonesia yaitu PT. PERTAMINA. PT. PERTAMINA telah mempunyai Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) yang telah tersebar di seluruh pelosok daerah di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman masyarakat kini mempunyai ide kreatif untuk membuat Pertamini. Pertamini merupakan pompa minyak yang sangat menyerupai pompa minyak yang dimiliki SPBU milik PT. PERTAMINA padahal Pertamini sama sekali tidak ada hubungannya dengan PT. PERTAMINA. Salah satu Kota di Indonesia yang banyak terdapat Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak atau Pertamini yaitu Kota Pariaman. Dari banyaknya Pertamini yang ada di Kota Pariaman maka permasalahan yang dibahas pada penelitian ini yaitu, izin usaha untuk menjadi sub penyalur Bahan Bakar Minyak dan pengawasan terhadap keberadaan sub penyalur Bahan Bakar Minyak di Kota Pariaman. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang mana mempunyai defenisi sebagai penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada. Berdasarkan kajian pokok permasalahan, penulis dapat mengetahui proses dalam memperoleh izin usaha untuk menjadi Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak agar secara hukum bisnis yang dijalani adalah legal. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Pertamini sama sekali tidak ada pengawasannya dari pemerintah Kota Pariaman maupun instansi yang berwajib, padahal pertamini ini sangat berbahaya, oleh sebab itu penulis ingin membahas lebih rinci. Seharusnya instansi yang berwenang segera menindak lanjuti dari UU No. 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memang melarang praktik penjualan bensin eceran. Di dalam Pasal 55 UU Migas disebutkan bahwa orang yang menjual bensin secara ilegal akan dihukum. Tak tanggung-tanggung, hukuman yang menghantui para penjual bensin eceran bisa berupa denda sebesar Rp 6 miliar dan kurungan selama enam tahun. Solusinya Pertamini ini harus segera ditertibkan, terlebih melakukan pembinaan kepada penjual Bahan Bakar Minyak secara eceran atau Pertamini tersebut.

Kata kunci: Izin Usaha, Sub Penyalur, dan Pengawasan.

346
AHM
h

HUBUNGAN KERJASAMA KEMITRAAN USAHA RITEL ANTARA PT. RETAIL MODERN MINANG DENGAN PEMILIK OUTLET MINANG MART DI KOTA PADANG

Ahmad Satriadi, 1310112136, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK II, Hukum Perdata, 2018, 94 halaman

ABSTRAK

Perkembangan industri ritel dapat dikatakan mengalami kemajuan yang cukup pesat seiring dengan perkembangan zaman, kecanggihan teknologi dan tingkat persaingan usaha. Perkembangan usaha ritel modern di Provinsi Sumatera Barat bisa dikatakan masih berada pada tahap perkembangan menengah. Salah satu gerai ritel besar resmi beroperasi di Kota Padang, yaitu Minang Mart. Kehadiran Minang Mart diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Sumatera Barat serta memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pengembangan dan pembinaan usaha kedepannya. Usaha ritel Minang Mart berbentuk kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha sebagai calon pemilik outlet Minang Mart. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang menekankan pada pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga menghasilkan data yang akurat. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kerjasama kemitraan Minang Mart melahirkan hubungan hukum kepada para pihak dalam bentuk perjanjian, hubungan pola kemitraan, serta hak dan kewajiban. Kendala utama yang terjadi pada kemitraan Minang Mart ini terdapat pada lambatnya proses pemenuhan barang berdasarkan permintaan masing- masing outlet. Padahal dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan mengatakan bahwa dalam hubungan kemitraan harus mengutamakan kemudahan pelaksanaan bagi para pihak yang bermitra serta saling memberikan informasi untuk menunjang pengelolaan dan pengembangan tiap-tiap mitra usaha. PT. Retail Modern Minang selaku pengelola utama Minang Mart selalu meningkatkan kualitas pendistribusian barang kepada masing-masing outlet Minang Mart untuk menghindari adanya permasalahan berikutnya.

Kata Kunci : Hubungan Hukum, Kemitraan, Minang Mart.

342
AKB
k

KEDUDUKAN PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

AKBAR AYATULLAH, 1410111130, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 64 halaman, 2018

ABSTRAK

Kehadiran Peraturan Bersama Menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini belum memiliki pijakan hukum yang kuat. Terutama dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Akibatnya keberadaan Peraturan Bersama Menteri saat ini masih menimbulkan ketidakjelasan mengenai bentuk dan kedudukannya dalam hierarki peraturan Perundang-undangan. Maka dari itu dalam skripsi ini Penulis mengangkat beberapa permasalahan untuk dibahas yaitu Bagaimanakah Kedudukan Peraturan Bersama Menteri dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta permasalahan hukum yang muncul berkaitan dengan Peraturan Bersama Menteri terhadap Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang hanya menggunakan sumber-sumber data sekunder (bahan kepustakaan). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan sejarah. Dari pembahasan Penulis berkesimpulan bahwa Peraturan Bersama Menteri memiliki dua sifat yang berbeda, pengaturan (regeling) dan penetapan (beschikking), kemudian memiliki dua model pengujian yaitu melalui Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara. Serta Penulis memberikan saran untuk pemerintah agar segera membuat pengaturan yang lebih jelas terhadap Peraturan Bersama Menteri, agar tercipta tertib peraturan perundang-undangan di Indonesia

Kata Kunci: Peraturan Bersama Menteri, Peraturan Perundang- undangan, Pengujian

342
AKE
p

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PAYAKUMBUH PERIODE 2014-2019

Akel Hirson, 1110112253, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68 Halaman, 2018

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelelenggaraan pemerintahan, hal ini dari pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang tertuang dalam Pasal 18 ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam menjalankan tugasnya memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi legislasi atau fungsi pembentukan peratuaran daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dengan adanya fungsi legislasi diharapkan DPRD dapat melahirkan peraturan daerah berkelanjutan dan diterima masyarakat.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsi legislasinya melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah bersama kepala daerah dan DPRD memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. DPRD Kota Payakumbuh periode 2014- 2019 sampai tahun kedua keanggotaannya telah menetapkan 27 (dua puluh tujuh) peraturan daerah tetapi hanya mampu melahirkan 3 (tiga) buah Peraturan daerah inisatif DPRD.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan sumber data utama adalah pengamatan langsung dilapangan, disamping itu didukung juga dengan wawancara bersama responden atau informan. Data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa DPRD Kota Payakumbuh belum maksimal mengunakan hak inisiatifnya dalam pembentukan Peraturan daerah. Dalam menjalankan pelaksanaan fungsi legislasinya DPRD Kota Payakumbuh telah melaksanakannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tetapi masih jauh dari harapan dalam mempergunakan hak inisiatifnya dalam pembentukan Peratuaran daerah. Permasalahan kurangnya Perda inisiatif DPRD Kota Payakumbuh disebabkan oleh tingkat pendidikan anggota DPRD yang beragam dan kurangnya kemampuan serta kurangnya pengalaman tentang legal drafing atau tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan setiap rancangan peraturan memiliki Naskah Akademik yang berguna untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap suatu masalah yang solusi atas permasalahan tersebut perlu dibentuk peraturan perundang-undangan.

347.05
ALB
p

PENGELOLAAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN GOR H.AGUS SALIM

Alberrio Hadiguna, 1310112133, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60 Halaman, Pembimbing: Syofiarti, S.H.,M.Hum dan Anton Rosari,S.H,M.H.

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan obyek retribusi yang digolongkan ke retribusi jasa usaha. Kajian ditekankan pada pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga terhadap pedagang di kawasan GOR H. Agus Salim Kota Padang. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan melihat norma hukum yang berlaku lalu menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Pihak yang berwenang dalam mengelola retribusi terhadap pedagang di GOR H. Agus Salim adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 166/Perj./BPAD-XII/2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi terhadap beberapa pedagang di kawasan GOR H. Agus Salim memiliki kendala. Realisasi besaran tarif yang harus dibayar oleh beberapa pedagang untuk berjualan di kawasan GOR H. Agus Salim tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang seharusnya.Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.Teknik pengumpulan data ialah wawancara dan studi dokumen.Data yang diperoleh diolah dengan metode editing dan tabulating dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penulisan ini penulis menyarankan agar melakukan pengawasan terhadap aktifitas pungutan baik dari oknum petugas maupun oknum lainnya oleh pejabat yang berwenang maupun masyarakat, melaporkan jika mendapati adanya tindakan pungutan ilegal yang terjadi kepada pihak yang berwenang seperti Satpol PP yang merupakan bagian perangkat daerah yang berwenang dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan meningkatkan rasa tanggungjawab kepada petugas pemungut retribusi saat melakukan pemungutan dengan menggunakan seragam dinas yang sudah disediakan.

342
ALD
p

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG

Aldi Fernanda, 1310111177, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 72 Halaman, Tahun 2018

ABSTRAK

Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di sebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karena itu, agar mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah dilakukan pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional. Pendaftaran tanah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftraran Tanah Secara Sistematis Lengkap. Jika telah melakukan pendaftaran dan mendapatkan sertipikat, pemegang hak atas tanah memiliki bukti yang kuat atas tanahnya tersebut. Masalah pokok pada penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, Apa saja hambatan dan solusi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap (PTSL) oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap di Kota Padang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 12 Tahun 2017. Namun dalam prakteknya di lapangan pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis belum berjalan sesuai dengan target yang di anggarkan di Kota Padang.Hambatan pendaftaran tanah secara sistematis di Kota Padang disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat mempengaruhi yakni kurang mengertinya masyarakat apa yang dikatakan PTSL, banyaknya masyarakat yang tidak memenuhi syarat dalam melaksanakan program kegiatan PTSL ini, ada nya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan PTSLseperti meminta bayaran/pungutan kepada masyarakat sedangkan sudah dikatakan program PTSL ini gratis/tidak dipungut biaya.

342
MUH
a

ANALISIS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Muhammad Afif Alfianda, 1410112087, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018

ABSTRAK

Peraturan Perundang-undangan yang baik tidak luput dari bagaimana proses pembentukan suatu undang-undang dilakukan dengan cara dan metode yang baku dan standar yang dapat mengikat semua lembaga atau pihak yang berwenang dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan. Dalam mewujudkan negara hukum, tentu diperlukan adanya suatu tatanan yang tertib, salah satunya di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentukan suatu peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah harus diaplikasikan sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pengundangannya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan harus melalui beberapa tahapan, yaitu melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Sebagai salah satu contoh peraturan perundang-undangan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan pada skripsi ini, yaitu: Pertama: Bagaimana Analisis Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Kedua: Bagaimana Politik Hukum Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk dapat memberikan solusi yang lebih baik kedepannya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Dimana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder ditambah dengan wawancara. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan tersebut ditemukan bahwa Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah ini, Pertama: tidak melalui tahapan pembentukan yang baik karena pada tahap penyusunan terdapat beberapa pasal yang multitafsir atau kurang jelas sehingga bertentangan dengan asas kejelasan rumusan, selain itu juga bertentangan dengan asas keterbukaan dikarenakan partisipasi masyarakat hanya sekedar ikut pada tahap perencanaan saja. Kedua: dari tahun ditetapkannya Perda ini yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2018 tidak ada satupun Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Walikota / Peraturan Kepala Daerah yang didelegasikan oleh Perda ini yang telah dibentuk, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penegakkan Perda tersebut.

345
ALH
S

STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA PERJUDIAN DITINJAU DARI SYARIAT ISLAM DALAM QANUN DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Alhamdi, 1410111082, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,71 halaman, 2018

ABSTRAK

Perjudian adalah tindak pidana yang sering dijumpai di lingkungan sekitar baik disengaja maupun tidak disengaja. Perumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana perjudian ditinjau dari syari'at Islam dalam Qanun dan hukum pidana di Indonesia. (2) Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian ditinjau dari syariat Islam dan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.yang dilihat dari beberapa literatur-literatur penelitian dan penjabaran. Teknik pengumpulan datanya studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Menurut hukum Islam bahwa tindak pidana perjudian dikenakan hukum takzir dan Pada Pengaturan tindak pidana perjudian ditinjau dari syari'at Islam dalam Qanun Propinsi NAD Nomor 13 Tahun 2009 tentang Maisir merupakan kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Hukum maisir secara tegas dinyatakan dalam Pasal 4 Qanun Propinsi NAD Nomor 13 Tahun 2009 tentang Maisir, bahwa maisir hukumnya haram, sehingga menurut Pasal 5 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan maisir. Sementara itu pengaturan tindak pidana perjudian ditinjau dari hukum pidana positif Indonesia terdapat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagaimana dirubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban, yang menyatakan bahwa semua tindak Pidana Perjudian sebagai kejahatan. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian ditinjau dari syari'at Islam diterapkan dengan uqubat (hukuman) terhadap pelakunya yang berupa 'uqubat cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali dan uqubat denda paling banyak Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Baital Mal. Sementara itu penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian ditinjau dari hukum pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yaitu pidana penjara selama-lamanya 10 tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya dua puluh juta rupiah.

345
MAL
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA"

M.ALif Rahman, Nomor BP : 1310111161, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 53 halaman, 2018

ABSTRAK

Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2017, 35 kasus di tahun 2015, 43 kasus di tahun 2016, dan 47 kasus di tahun 2017. Di Sumatera Barat terdapat sebuah Pusat Pealayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dikenal dengan nama P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang yang berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan kendala-kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Nan Gadang. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif melalui studi dokumen dan wawancara (data primer) yang kemudian dianalisa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang ada (data sekunder). Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan dan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Nan Gadang dilakukan dengan mekanisme yaitu: korban diidentifikasi, penanganan medis bagi korban yang mengalami luka-luka, proses rehabilitasi kesehatan, korban yang tidak mempunyai luka fisik dan diidentifikasi memerlukan konseling dan pemulihan psikis diberikan layanan rehabilitasi sosial dari proses konseling awal, konseling lanjutan, bimbingan mental dan spiritual serta pendampingan rujukan jika diperlukan, pemberian bantuan dan pendampingan hukum dari pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hingga selesai, dan terakhir pendampingan pemulangan atas keinginan dan persetujuan korban. Kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Nan gadang yaitu: kualitas dan kuantitas pengelola ,sarana dan prasarana yang terbatas, kurangnya koordinasi dengan P2TP2A tingkat kabupaten dan kota serta penganggaran dana yang masih minim yang ditandai dengan belum optimalnya perhatian kepala daerah.Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Nan Gadang yaitu : Mengoptimalkan layanan berbasis pelayanan ditingkat akar rumput (rukun warga, desa, kelurahan, dan kecamatan), Mengoptimalkan kerjasama dan penguatan jejaring kemitraan terpadu yang melibatkan pemerintah, organisasi non pemerintah yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dunia usaha, dunia industry, para tokoh masyarakat (adat, budaya, agama dan cendikiawan) dan stake holder lain yang relevan, serta melakukan penguatan strategi pengarustamaan gender dan pengarustamaan anak.

Kata Kunci : Perlindungan, Anak, KDRT

341
ROM
u

URGENSI PENGADOPSIAN UNITED NATIONS GUIDING PRINCILES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS DALAM HUKUM INDONESIA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA SEKTOR BISNIS

ROMA ALIYAFI, 1210113143, HUKUM INTERNASIONAL, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS, 2018

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia harus dilindungi dari pelanggaran oleh semua pihak, termasuk korporasi. United Nation Guiding Principles on Business and Humanright merupakan instrumen soft law hukum internasional sebagai salah satu upaya perlindungan hak asasi manusia di sektor bisnis. sifat soft law dari instrumen ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (nonlegally binding) sehingga dalam implementasi hanya bersifat sukarela (voluntary).Agar instrumen ini efektif dan memiliki kekuatan hukum mengikat (legally binding), instrumen ini memerlukan pengadopsian kedalam sistem hukum nasional. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penggunaan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Indonesia sebagai Negara berkembang yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan Negara penerima investasi (host country), Indonesia rentan terjadi pelanggaran HAM di sektor bisnis, hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus pelanggaran HAM yang berhubungan dengan operasional bisnis. untuk itu Indonesia sangat berkepentingan untuk mengadopsi instrumen ini ke dalam sistem hukum Indonesia. Harmonisasi legislasi pengadopsian instrumen ini dapat dimasukkan kedalam produk hukum nasional baik itu dari level Undang- Undang sampai peraturan daerah, sehingga perlindungan Negara terhadap pelanggaran HAM berjalan efektif.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, korporasi, bisnis, soft law

345
AME
s

STUDI KOMPARATIF TENTANG KETERANGAN AHLI FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA DAN SISTEM HUKUM INGGRIS

Amelya Syuhada Putri. 1410111073. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV Hukum Pidana. 109 Halaman. Tahun 2018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukum tentang keterangan ahli forensik sebagai alat bukti menurut sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Inggris baik dari segi pengaturannya, maupun persamaan dan perbedaan penerapan keduanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif, dengan membandingkan antara dua sistem hukum yang berbeda pada suatu negara. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasikan dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, diperoleh hasil bahwa : 1) aturan hukum tentang keterangan ahli forensik sebagai alat bukti di Indonesia diatur dalam Pasal 133 KUHAP, serta dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Perkapolri 10/2009"), dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian ("Perkapolri 12/2011"). Sedangkan di Inggris aturan tentang keterangan ahli forensik diatur dalam Criminal Procedure Rules PART 19 (19.1-19.9). 2) penerapan keterangan ahli forensik menurut sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Inggris memiliki persamaan dalam hal penerapannya yaitu , sama sama dapat membantu mebuat terang suatu perkara pidana, juga memiliki persamaan dalam menerima serta menolak saksi ahli yang akan memberikan keterangan di muka sidang pengadilan. Sedangkan perbedaan pada penerapan keterangan ahli forensik menurut sistem hukum kedua negara tersebut yaitu, terletak pada pengaturannya dan bagaimana ahli tersebut bertindak di muka sidang pengadilan. Melalui hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam perbandingan antara keterangan ahli forensik sebagai alat bukti menurut sistem hukum Indonesia dan menurut sistem hukum Inggris terdapat aturan hukum yang mengatur mengenai keterangan ahli forensik tersebut di masing-masing negara, serta juga ditemukannya beberapa persamaan dan juga perbedaan penerapan keterangan ahli forensik menurut masing-masing sistem hukum yang berlaku dikedua negara tersebut. Dengan ditemukannya persamaan dan perbedaan tersebut diharapkan agar penerapan keterangan ahli forensik sebagai alat bukti di Indonesia dapat dikaji ulang dan dilakukan banyak perubahan-perubahan demi kemajuan pembangunan hukum di negara kita, Indonesia.

345
AND
p

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP BIDAN YANG MELAKUKAN MALAPRATIK (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 963 K/PID.SUS/2013)

Andi Maulana, 1210113150, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 73 halaman – Tahun 2018, Pembimbing : Yoserwan, S.H, M.H dan Yusrida, S.H, M.H

ABSTRAK

Malapraktek adalah kelalaian seseorang dalam melaksanakan profesi atau jabatannya yang merugikan orang lain, baik fisik maupun materil. Salah satu contoh kasus yang di angkat untuk skrpisi yang dibuat oleh penulis adalah pertanggungjawaban pidana terhadap bidan yang malapraktik dikota padang. Dengan rumusan masalah 1) bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap bidan yang melakukan malapraktik. 2) apa saja bentuk perbuatan yang dilakukan oleh bidan yang melakukan malapraktik. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode hukum normatif, dan hasil pembahasan dari skripsi ini adalah : 1) menyatakan penuntutan penuntut umum dalam dakwaaan alternatif ke dua tidak dapat diterima, menyatakan terdakwa I dan III atas nama Desi Sarli dan Siska Malasari terbukti seara sah dan meyakinkan bersalah, dan dijatuhkan hukuman masing-masing satu (1) tahun dan delapan (8) bulan penjara, menyatakan terdakwa II atas nama Cici Kamiarsih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan jaksa penuntut umum serta dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, dan menetapkan barang bukti berupa satu (1) butir obat merk Gastrul, satu (1) lembar surat keterangan kelahiran, dan (1) lembar surat keterangan meninggal dunia. 2) Terdakwa I yang bernama Desi Sarli telah melakukan kesalahan dengan melakukan beberapa perbuatan pidana yaitu memberikan obat perangsang merk Gastrul sebanyak 2 butir yang merupakan obat keras, serta mengulur-ulur waktu persalinan korban bersama terdakwa III atas nama Siska Malasari Kesimpulan dam Saran dalam skripsi ini adalah Bidan wajib memenuhi kode etik profesinya agar tidak terjadi lagi kasus yang menyebabkan meninggalnya seseorang.

345
AND
p

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG)

Andre Rahman, 1310111255, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 73 + vi Halaman , Tahun 2018

ABSTRAK

Anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus atas perkembangan fisik mental spritualnya. Dengan perkembangan zaman yang begitu cepat seperti saat sekarang ini, banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak guna untuk memenuhi kebutuhannya, salah satu tindak pidana tersebut yaitu tindak pidana pencurian yang disertai dengan keadaan yang memberatkan. Permasalahan yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah a) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan? b) Apakah kendala hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan?. Penelitian ini dilakukan dalam lingkungan Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang didapat dari hasil penelitian langsung dilapangan (field research) dan data sekunder yaitu informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa a) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu berdasarkan pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan Undang-Undang yang telah ditetapkan dan non yuridis yaitu keadaan yang berkaitan dengan anak meliputi latar belakang, akibat, kondisi, keadaan sosial serta ekonomi anak korban. b) kendala hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan terdapat beberapa kendala, akan tetapi tidak terlalu menghambat jalannya persidangan yaitu: tidak hadirnya orang tua/wali; pengetahuan anak mengenai masalah hukum masih terbatas; singkatnya masa penahanan terhadap anak; dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tidak ada di Kota Padang.

345
AND
P

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH SATUAN LALU LINTAS TERHADAP PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS BERAKIBAT MATINYA ORANG (DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG)

Andre Yunanda, BP 1310111081, Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 90 hal+vii, 2018

ABSTRAK

Pelaksanaan penyidikan kecelakaan lalu lintas berakibat matinya orang dilakukan dengan acara peradilan pidana yang nantinya akan bermuara kepada vonis/putusan hakim di pengadilan. Kecelakaan lalu lintas tergolong menjadi 3, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat. Khusus perkara kecelakaan lalu lintas ringan, penyelesaian perkara dapat dilakukan diluar pengadilan/tanpa proses acara peradilan pidana sesuai dengan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Permasalahan yaitu, bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh satuan lalu lintas terhadap perkara kecelakaan lalu lintas berakibat matinya orang serta apa kendala yang dialami oleh penyidik Unit Laka Lantas Polresta Padang dalam rangka melaksanakan penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas berakibat matinya orang. Metode yang digunakan adalah metode yuridis-sosiologis. Hasil penelitian yaitu, pelaksanaan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas berakibat matinya orang seharusnya dilakukan dengan proses acara peradilan pidana, namun pihak kepolisian menerapkan pola penyelesaian kasus secara ADR (Alternative Dispute Resolution) dalam pelaksanaan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas berakibat matinya orang tanpa melanjutkannya kepada proses beracara pidana, yang seharusnya hanya dapat dilaksanakan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas ringan saja. Kendala yang ditemui yaitu kendala internal (kendala kepolisian dan kendala dasar hukum pelaksanaan (Alternative Dispute Resolution), dan kendala eksternal (kendala pelaku/tersangka yang mengalami luka berat, kendala tingginya permintaan pihak korban dan kendala masyarakat yang kurang antusias untuk menjadi saksi) saat terjadinya perkara kecelakaan lalu lintas berakibat matinya orang.

342
ANN
p

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PADANG

Anna Devega Yasrul , 1410111128, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018, 61 Halaman

ABSTRAK

Dasar hukum yang mengatur kepegawaian adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Dalam rangka memberikan pelayanan yang profesional, maka dibutuhkan juga Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah yang berkualitas. Untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kompetensi sumber daya manusia maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan pada Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dengan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Kebijaksanaan diklat PNS daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tetapi pada kenyataannya diklat teknis belum sesuai dengan PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS bahwasanya Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS. Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana pendidikan dan pelatihan teknis PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang. 2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian dengan melihat norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Disamping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh bahan hukum sekunder. Jenis penelitian ini deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen serta wawancara pada sekretaris BKPSDM Kota Padang. Dari hasil penelitian dapat diketahui pelaksanaan diklat PNS pada BKPSDM Kota Padang, belum dilakukan secara menyeluruh dari data yang didapatkan tidak semua dari jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan latihan, karena kurangnya kemauan dari diri PNS untuk mengikuti Diklat Teknis. Kendala dalam pelaksanaan Diklat Teknis pada BKPSDM Kota Padang, adanya sumber daya manusia, dan struktur birokrasi.

Kata Kunci : Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pegawai Negeri Sipil.

346
ANN
p

PELAKSANAAN SURRENDER PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG KOTA SOLOK

Annafi Albar, 1110112107, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 61 Halaman, 2018

ABSTRAK

Seiring meningkatnya pola pikir manusia dan bertambah pula kebutuhannya dalam menjalani kehidupan. Salah satu kebutuhan tersebut yang akan saya bahas disini yaitu kebutuhan tentang jaminan hidup seseorang dengan jasa asuransi. Untuk memenuhi kebutuhan itu membutuhkan biaya untuk mendapatkan jaminan kehidupan bagi pengguna jasa asuransi tersebut kepada perusahaan asuransi. Hal ini memungkinkan para pengguna jasa ini terkadang merasa terbeban dengan biaya yang wajib di setor kepada pihak perusahaan asuransi mengingat masih ada kebutuhan wajib lainnya seperti kebutuhan akan makanan sehari-sehari. Para pengguna jasa asuransi dapat melakukan surrender untuk menghentikan perjanjian dengan pihak asuransi. Berdasarkan latar belakang di atas yang dapat dijadikan sebagai rumusan masalah adalah bagaimana tata cara pelaksanaan surrender dalam kegiatan asuransi, apa saja hambatan pelaksanaan surrender dalam kegiatan asuransi, jenis penelitian yuridis sosiologis, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap pelaksanaan surrender dalam kegiatan asuransi, yaitu datangi Pihak Asuransi, isi dokumen, lengkapi syarat, menunggu sisa dana. Hambatan dalam pelaksanaan surrender asuransi kelengkapan bahan pengajuan surrender, dan prosedur pengurusannya memakan waktu yang cukup lama.

344.09
ANG
p

PUTUSAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENYELESAIAN DELIK ADAT ZINA MENURUT SISTEM KELARASAN KOTO PILIANG (Studi di Kenagarian Pandai Sikek)

Anggi Fito Juliand, 1310112047, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 106 Halaman, 2015

ABSTRAK

Tingginya jumlah kasus zina pada masyarakat akhir-akhir ini, membuat penegak hukum (Hakim, Jaksa, dan Polisi) dihadapkan pada posisi yang sulit. Aparat penegak hukum bahkan lebih memilih memberikan kebijakan untuk tidak memproses kasus zina tersebut dan melimpahkan penyelesaianya pada peradilan adat. Dalam penyelesaian perkara pidana adat zina tentang kompetensi mengadili perbuatan itu maka ilmu hukum menawarkan sebuah konsep yang diyakini mampu menjawab permasalahan kesenjangan rasa keadilan hukum dalam masyarakat adat. Konsep tersebut adalah "restorative justice" (keadilan restoratif) yang menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penyelesaian perkara pidana adat melalui lembaga adat justru mendapat tempat terhormat dalam kerangka keadilan restoratif. Melalui Pasal 18 b Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang", maka dari itu dalam proses penyelesaian perkara delik adat zina maka negara memberikan kewenangan kepada peradilan adat dalam menyelesaikan selama hukum adat tersebut masih dipakai dalam lingkup masyarakat adat khususnya masyarakat adat Minangkabau. Namun seperti yang kita ketahui, keberadaannya tidak mendapat tempat yang memadai dalam hukum perundang-undangan. Padahal hukum adat diyakini mampu menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan bagi para pihak yang berkonflik. Hal ini lebih mempertegas kompetensi dan kewenangan peradilan adat dalam menyelesaikan perkara pidana adat melalui Kerapatan Adat Nagari masing-masing nagari di Sumatera Barat. Dalam skripsi ini yang menjadi pembahasan penulis yaitu proses pelaksanaan penyelesaian perkara delik adat oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Pandai Sikek yang memakai Kelarasan Koto Piliang dan pelaksanaan penerapan putusan delik adat zina di Nagari Pandai Sikek yang memakai Kelarasan Koto Piliang. Dalam penelitian ini digunakan metode hukum pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi pembahasan yaitu deskriptif analisis dan teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu wawancara. Adapun hasil penelitian yang menjadi indikatornya adalah suatu proses penyelesaian kasus pidana adat zina di Nagari Pandai Sikek yang memakai sistem Kelarasan Koto Piliang yang mana bajanjang naiak batanggo turun dalam proses penyelesainya mulai dari penyelesaian di tingkat niniak mamak kaum, pasukuan higga di bawa pada peradilan adat nagari pandai sikek, hingga pada akhirnya di keluarkanlah sanksi atau putusan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku zina melalui skema peradilan adat pada Nagari Pandai Sikek yang sesuai dengan Adat Salingka Nagari Pandai Sikek. Maka dengan adanya penyelesaian ini diharapkan akan terciptanya suatu keadilan hukum dan kepastian hukum di tengah masyarakat Adat nagari Pandai Sikek.

345
ANN
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI EKONOMI DI KOTA PADANG

Annisa Anneke Putri, 1410112101, Fak. Hukum Unand, Jumlah Halaman 74, Tahun 2018

ABSTRAK

Kasus eksploitasi ekonomi banyak terjadi di Indonesia, salah satunya di Kota Padang. Eksploitasi ekonomi merupakan tindakan pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh suatu pihak tertentu terhadap orang lain untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, rasa keadilan serta kompensasi kesejahteraan. Eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 76(I) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan tindakan yang dilarang oleh negara. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Padang, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi ekonomi di Kota Padang, dan apa kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan di Kota Padang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan lapangan dan praktek yang terjadi dilapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian hukum yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang kepada anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi di Kota Padang sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan. Bentuk upaya yang diberikan yaitu dengan usaha prepentif, usaha represif dan rehabilitasi, dimana Satpol PP bertugas untuk melakukan razia rutin, anak jalanan yang terjerat razia akan diserahkan pada Dinas Sosial.

342
ANN
h

HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT , DEWAN PERWAKILAN RAKYAT , DEWAN PERWAKILAN DAERAH , DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Annisa Fioni, BP 1310111091, Fakultas Hukum Unand, 50 Halaman, 2018

ABSTRAK

Setiap anggota DPR memiliki Hak Imunitas yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. Hak Imunitas merupakan hak kekebalan hukum yang dimiliki setiap anggota DPR, yang mana anggota DPR tidak dapat dituntut di muka pengadilan. Beberapa waktu yang lalu, salah seorang anggota DPR berinisial "EHP" dipanggil oleh pihak kepolisian karena statemennya di media sosial. Perumusan masalah dari skripsi ini yaitu : Pertama, bagaimana pengaturan hak imunitas anggota DPR sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD? Kedua, bagaimana pemberian izin oleh Mahkamah Kehormatan Dewan terkait pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD? Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang dipakai adalah data sekunder, analisa data dengan metode kualitatif. Pembahasan permasalahan: pertama, sebelum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD hak imunitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan, Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD. Sesudah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD pengaturan hak imunitas diatur dalam Undang-Undang tersebut dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib. Kedua, Pemberian izin oleh Mahkamah Kehormatan Dewan terhadap anggota DPR yang dipanggil oleh penegak hukum Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 dan pada Pasal 2 ayat (2) huruf d,e,dan f Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Kesimpulan: pertama, Hak imunitas terhadap anggota DPR ialah anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat dalam rapat atau luar rapat, sesuai pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD,DPRD, dan karena sikap, tindakan, kegiatan yang berkaitan dengan wewenang dan tugasnya sebagai anggota DPR, maka tidak dapat ditindak pidana atau perdata. Kedua, Bagi setiap anggota DPR yang dipanggil oleh penegak hukum harus seizin Mahkamah Kehormatan Dewan.

345
ANN
p

PENJATUHAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)

Annisa Ul Hasanah, 1410112162, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV Hukum Pidana , 93 Halaman, 2018

ABSTRAK

Pidana penjara seumur hidup merupakan salah satu alternatif pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim yang dialternatifkan dengan pidana mati dan pidana penjara dalam waktu tertentu. Salah satu ketentuan dalam KUHP mengenai tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup yaitu ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana. Penjatuhan pidana penjara seumur hidup oleh hakim dilihat dari faktor penyebab penjatuhannya dapat dilihat dari pertimbangan hakim di dalam putusan, pertimbangan tersebut tidaklah cukup karena tidak ada standarisasi yang baku dalam hal hakim memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Sehingga hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan pidana atau disparitas pidana. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dalam tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan mengapa terjadi perbedaan pidana atau disparitas pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Metode penelitian dengan mempergunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, serta hal yang memberatkan yaitu latarbelakang terdakwa dan akibat yang ditimbulkan bagi keluarga korban. Penyebab terjadi disparitas pidana atau perbedaan pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang yaitu a) subjektifitas pelaku, b) hakim yang berwenang dalam persidangan, c) sadism perbuatan pelaku, d) rasa keadilan pelaku. Tidak ada aturan yang tertulis mengatur bagaimana seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup atau pidana dalam waktu tertentu dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

346
ARD
a

ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENYELESAIAN PERKARA TANAH MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B KOTA BUKITTINGGI

Ardila Fitri. 1410111013. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK I (Hukum Perdata).Halaman 64. Tahun 2018

ABSTRAK

Semakin banyaknya perkara yang terjadi dalam masyarakat, maka semakin besar peran negara melalui pengadilan untuk dapat menyelesaikan perkara yang diajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan Negeri kelas 1B Kota Bukittinggi juga menerima banyak pengajuan gugatan setiap tahunnya, terutama gugatan terhadap perkara tanah. Untuk menyikapi banyaknya perkara yang diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan, Mahkamah Agung memberdayakan penyelesaian perkara melalui Mediasi yang sesuai dengan prinsip dasar masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat, yang kemudian diintegrasikan oleh Mahkamah Agung ke dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pedoman Perilaku Mediator. Ketentuan ini diberlakukan sebagai cara untuk menghindari penumpukan perkara dan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan apa yang mereka inginkan dengan dibantu Mediator yang bersifat netral dan ditunjang dengan penerapan asas itikad baik. Pada faktanya, ketentuan ini belum terlaksana seperti yang diharapkan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai asas itikad baik dalam penyelesaian perkara tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi dengan melihat bagaimana prosedur penyelesaian perkara tanah di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi melalui mediasi, apa hambatan yang ditemui dan bagaimana upaya hakim dalam menghadapi. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian yang didapat adalah penyelesaian perkara tanah melalui mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi dilakukan dengan tahapan pra mediasi dan tahap mediasi. Jika mediasi berhasil dibuat sebuah Akta Perdamaian, jika gagal maka penyelesaian dilakukan pada tahap persidangan. Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas 1B tidak mencapai apa yang diharapkan. Tidak satupun perkara tanah yang mencapai keberhasilan dalam penyelesaiannya melalui mediasi. Faktor yang menghambat adalah itikad tidak baik para pihak, keterbukan hati para pihak untuk melakukan mediasi dengan sungguh-sungguh, jumlah hakim mediator yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan, hakim mediator yang memiliki kesibukan diluar aktivitas pengadilan, banyaknya andil kuasa hukum dalam pelaksanaan mediasi, dan sifat tanah sebagai objek perkara yang cenderung sensitif. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut adalah dengan memberikan pengawasan tidak hanya terhadap hakim, namun terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam Mediasi, pemberian pembinaan dan pelatihan kepada hakim mediator, dan dengan membatasi andil kuasa hukum dalam proses mediasi di Pengadilan.

342
ARF
p

PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B SOLOK

Arfad Sanjani Yuyan, 1310112067, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018, 82 Halaman

ABSTRAK

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak dari narapidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan. Seperti yang kita ketahui hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sudah mengalami over kapasitas dan salah satunya di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok, oleh karena itu pemerintah berupaya mendorong pemberian pembebasan bersyarat untuk mengatasi masalah over kapasitas Lapas. Di sisi lain peraturan perundang- undangan menetapkan pelakasanaan pembebasan bersyarat haruslah mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Untuk itulah dalam penulisan ini penulis mengemukakan berapa rumusan masalah, yakni: 1) Bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok? 2) Kendala apakah yang ditemui dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok? 3) Bagaimana upaya yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tersebut? Metode penelitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau empiris, dengan melakukan wawancara, studi dokumen, pengolahan dan pembahasan data, dan dianalisis secara kualitatif dengan menjabarkannya dalam penulisan secara deskriptif. Sebagai hasil penelitian yang penulis lakukan memperlihatkan bahwa Pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Solok telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun bila ditinjau dari tujuannya untuk mengatasi over kapasitas dinilai belum tercapai.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Lembaga Pemasyarakatan

345
ASY
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PEREMPUAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (KALAPAS) KLAS IIA BIARO BUKITTINGGI

ASYUNI FITRI, 1410111137, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60 Halaman, 2018

ABSTRAK

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Hukum memberikan perlindungan kepada setiap orang yang ada di Indonesia baik itu yang berada di masyarakat luar ataupun narapidana yang sedang menjalankan masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Apabila suatu tindak pidana terjadi kepada seseorang maka pasti ada pelaku dan korbannya. Seorang pelaku suatu tindak pidana saja memiliki perlindungan, apa lagi bagi korban tindak pidana sekarang juga telah dikeluarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 . Untuk itu permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah (1)Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana perempuan yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan (KALAPAS) Klas IIA Bukittinggi?(2) Bagaimana pelaksanaan bentuk- bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana perempuan yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan (KALAPAS) Klas IIA Bukittinggi?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis. Adapun hasil penelitian mengenai Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana perempuan yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan (KALAPAS) Klas IIA Bukittinggi yaitu adanya dua bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu pemisahan narapidana laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi hal tidak diinginkan dan setiap keperrkuan narapidana akan di urus oleh Petugas Lapas yang berjenis kelamin sama dengan narapidana. Adapun pelaksanaan dari perlindungan hukum tersebut terdapat penyimpangan dari aturan yang mana semua keperluan baik itu petugas maupun narapidana harus di urus yang berjenis kelamin sama, namun pada kenyataannya Kalapas yang seorang malah melanggar perlindungan tersebut dengan menjadikan narapidana perempuan sebagai tahanan pendampingnya. Tahanan pendamping ini bertugas untuk membantu bantu di ruangan Kalapas seperti mencuci pring, membuatkan kopi, membersihkan meja dan membersihkan ruangan Kalapas.

342
ATI
p

PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN PENIMBUNAN LAHAN MANGROVE DI KOTA TANJUNGPINANG

Atika Thahira 1410111038, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 103 halaman, 2018

ABSTRAK

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia dan perlu dijaga kelestariannya. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia berdampak terhadap lingkungan oleh karena itu perlu dikelola dengan baik. Tanjungpinang mempunyai ciri khusus yaitu wilayahnya tedapat hutan mangrove yang luas. Dalam pelaksanaan pembangunan untuk mendapatkan lahan yang potensial dan bernilai ekonomis hutan mangrove di timbun oleh karena terletak di wilayah pantai. Agar kegiatan penimbunan itu tidak mencemari dan/atau merusak lingkungan perlu diawasi. Kota Tanjungpinang sebagai daerah otonom mempunyai kewajiban melaksanakan urusan dibidang lingkungan hidup dalam rangka menyelenggarakan urusan lingkungan hidup tersebut salah satunya perlu dilakukan pengawasan dan mengendalikan kegiatan penimbunan lahan agar tidak tercemar dan rusak. Permasalahan yang terjadi di Kota Tanjungpinang adanya kegiatan penimbunan yang dilakukan tanpa izin penimbunan lahan, menimbun pohon bakau pesisir pantai dan laut yang tidak mentaati ketentuan Peraturan Daerah Kota Tajungpinang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penimbunan Lahan. Menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidup, walikota sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tentang peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup. Peraturan Daerah Kota Tajungpinang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin penimbunan Lahan adalah peraturan perundang-undang dibidang lingkungan hidup atas dasar Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang 32 tahun 2009 walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab kegiatan penimbunan lahan. dari permasalahan tersebut penulis merumuskan permasalahan penelitan dalam skripsi ini yaitu 1) bagaimana pelaksanaan pengawasan kegiatan penimbunan lahan mangrove di Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tajungpinang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penimbunan Lahan, 2) apa tindakan terhadap kegiatan penimbunan lahan mangrove yang melanggar Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penimbunan Lahan. Berdasarkan pertimbangan walikota tidak semua permohonan diberikan izin timbun, pengawasan dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup berdasarkan pengaduan masyarakat berdasarkan kasus, tanpa adanya pelimpahan kewenangan oleh walikota sedangkan yang berwenang melakukan pengawasan adalah Walikota Tanjungpinang.

Kata kunci : pengawasan, kegiatan penimbunan, mangrove

346
ATI
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NASABAH REKSADANA PT. ANTABOGA DELTASEKURITAS INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung nomor 2838K/Pdt/2011)

Atika Astari Hardy, BP 1110112150,Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK I (Hukum Perdata Murni). 60 Halaman. Tahun 2018

ABSTRAK

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Kasus PT. Antaboga Deltasekuritas merupakan salah satu contoh tidak ketatnya pengaturan dan pengawasan terkait penerbitan dan tata kelola Kontrak Pengelolaan Dana. Kasus reksadana yang diterbitkan oleh PT.Antaboga Deltasekuritas Indonesia ditawarkan sebagai produk investasi ritel yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu lolos dari pengawasan Badan Pengawasan Pasar Modal Lembaga Keuangan dan Bank Indonesia. Permasalahan yang dibahas yaitu: 1). Bagaimanakahperlindungan hukum terhadap pemenuhan hak nasabah reksadana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia? 2). Bagaimana pelaksanaan putusan Mahkamah Agung nomor 2838K/Pdt/2011 oleh Pengadilan Negeri Solo berkaitan dengan perlindungan hukum nabasah reksa dana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia? Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah penulis melakukan penelitian hukum yuridis normatif terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nasabah Reksadana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung nomor. 2838K/Pdt/2011. Penulis berkesimpulan bahwa dalam Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak nasabah reksadana PT. Antaboga Deltasekuritas Indonesia adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum. Selain itu, untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam hal reksadana harus ada pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari Pasar Modal dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara menyeluruh dan sistematis. Dalam Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung, hingga saat ini masih dalam tahapan pendataan aset yang dimiliki oleh Tergugat yang nantinya akan dikonversi dalam rupiah sehingga diketahui berapa jumlah harga aset yang dimiliki oleh Tergugat apakah telah memenuhi kewajiban Tergugat.

346
ATI
p

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH WAKAF LUBUK BEGALUNG DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG (Studi Kasus Perkara Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Pdg)

Atikah Jasmi , 1410111141, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018, 67 Halaman

ABSTRAK

Wakaf merupakan suatu lembaga hukum Islam yang telah banyak diterima di daerah Indonesia dan juga diterima oleh masyarakat hukum adat. Mengenai Perwakafan, pemerintah juga telah mengeluarkan berupa kebijakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Hak Milik, Tanah yang diwakafkan harus merupakan Tanah Hak Milik atau Tanah Milik yang baik seluruhnya maupun sebagian harus bebas dari beban ikatan, jaminan, sitaan dan sengketa, yang di perbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan/atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai sengketa batas tanah wakaf Lubuk Begalung. Dalam perkara nomor 14/PDT.G/2013/PN.PDG ini terdapat masalah dalam sengketa batas tanah wakaf yang dilakukan oleh para pihak. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa Faktor terjadinya sengketa tanah wakaf di Lubuk Begalung Kota Padang, Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Lubuk Begalung di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam sengketa batas tanah wakaf di Lubuk Begalung. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara. Menggunakan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Agar pelaksanaan wakaf dapat berjalan sesuai dengan harapan dan prosedur yang ada, maka perlu adanya peningkatan pengawasan dari tugas dan wewenang lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial dalam bentuk lembaga guna memajukan kesejahteraan umum. Masalah ini diselesaikan melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri Padang, kemudian pada tingkat banding perkara tersebut tetap dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena surat gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan.

345
AUD
p

PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG

Audia Saskia, 1410111088, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 58 Halaman, 2018

ABSTRAK

Salah satu dari pidana pokok adalah pidana penjara dimana menurut P.A.F Lamintang pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Menurut Pasal 14 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur mengenai hak- hak narapidana, salah satu hak dari narapidana adalah memperoleh pembebasan bersyarat. Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Muaro Padang sebagai salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Sumatera Barat juga memberikan Pembebasan Bersyarat sebagai hak dari narapidana. Untuk itulah dalam penulisan ini penulis mengemukakan berapa rumusan masalah, yakni: 1)Bagaimanakah pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang? 2)Apa kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang? Metode penelitian yang digunakan dalam penilitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan wawancara, studi dokumen, pengolahan dan pembahasan data, dan dianalisis secara kualitatif dengan menjabarkannya dalam penulisan secara deskriptif. Dari hasil penelitian penulis pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tahapannya sebagai berkut, Pertama pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di usulkan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan, lalu diteruskan kepada Kepala Kantor Kementrian Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudia usulan tersebut diteruskan kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan, dan apabila disetujui maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan atas nama Menteri. Kendala-kendala ditemukan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan Bersyarat seperti masalah terkait diri narapidana itu sendiri, keluarga yang tidak mau menjadi penjamin, dan lingkungan masyarakat yang sulit menerima Narapidana kembali.

345
AUL
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL (SATRESKRIM) POLRESTA PARIAMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

AULIA YERISKA PUTRI, 1410112078, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 67 Halaman, 2018

ABSTRAK

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gajala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.Salah satu kejahatan yang tejadi adalah pencurian. Selama lima tahun belakangan ini (2012-2017) terdapat satu kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian di Polresta Pariaman. Adapun yang menjadi masalah dalam tulisan ini adalah mengenai pelaksanaan penyidikan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, kendala apa yang ditemui penyidik dalam mengungkap tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dan upaya yang dilakukan penyidik dalam menghadapi kendala-kendala yang ditemui pada pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dan sifat penelitian adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian tidak berbeda dengan proses penyidikan tindak pidana umum lainnya, namun pada saat penyitaan tidak ditemukannya barang hasil curian yang dilakukan oleh tersangka sedangkan penyidik mengatakan bahwa tersangka melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Kendala yang dihadapi penyidik adalah tidak adanya saksi yang melihat atau mendengar pada saat kejadian berlangsung dan tempat kejadian perkara yang sudah diacak-acak oleh keluarga beserta masyarakat pada saat pencarian korban, dan barang hasil curian yang belum ditemukan oleh penyidik. Upaya dari kepolisian adalah dengan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Barang dengan Nomor :DBD / 03 / II / 2017 / Reskrim.

345
AND
p

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS TABRAK LARI DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA PAYAKUMBUH

Anda Andam Suri. 1210113043. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV(Hukum Pidana)65 Halaman.Tahun 2017

ABSTRAK

Lalu Lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan terjadinya ketidak disiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Dengan adanya masalah seperti ini tentu akan menimbulkan masalah dalam berlalu lintas, tidak hanya kecelakaan lalu lintas tetapi kecelakaan seperti tabrak lari pun dapat terjadi, karena kurangnya kesadaran dalam berlalu lintas maupun pemanfaatan yang semestinya.Unsur-unsur kecelakaan sendiri meliputi, pengemudi, pemakai jalan, kendaraan, jalan dan lingkungan. Sedangkan tabrak lari sendiri merupakan bagian dari kecelakaan, namun pengertiannya lebih spesifik, tabrak lari merupakan peristiwa kecelakaan dimana pelaku atau orang yang menabrak melarikan diri meninggalkan korbannya.Jelas tabrak lari tergolong sebagai tindak pidana, karena tindakan tersebut merugikan masyarakat umum, terutama bagi pengguna jalan. Berkaitan dengan itu, tabrak lari telah disinggung dalam Pasal 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UndangUndang No 22 Tahun 2009. Banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang terjadi di Kota Payakumbuh maka berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimana peranan Kepolisian polres Kota Payakumbuh dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Kota Payakumbuh. b) Apakah kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Kota Payakumbuh. c) Apa upaya Kepolisian mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrak lari di Kota Payakumbuh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis- sosiologis yaitu penelitian yang melihat bagaimana kenyataan dilapangan dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Peranan Kepolisian Polres Kota Payakumbuh dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari masih kurang efektif, dan perlu dilakukan peningkatan kinerja untuk lebih efektif dalam melakukan pengembangan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari.

346
ARI
i

IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PELAKSANAAN E-TILANG DI PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

Arif Fansuri, 1620112013, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 113 halaman, 2018

ABSTRAK

Semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi berbanding terbalik dengan ketaatan dalam berlalu lintas yang menyebabkan semakin banyaknya pelanggaran terhadap lalu lintas, maka pemerintah telah mengeluarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dengan menerapkan sistem bukti pelanggaran elektronik (e-tilang) yang diikuti dengan diterbikannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas. Namun terbitnya Perma Tilang dianggap telah mengabaikan asas praduga tak bersalah bagi pelanggar lalu lintas untuk mencari keadilan. Permasalahan dalam artikel ini adalah : 1) bagaimanakah implementasi asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sebelum menggunakan sistem tilang elektronik? 2) bagaimanakah implementasi asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem tilang elektronik?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sebelum diberlakukannya e-tilang yang mengacu kepada Perma tilang lebih memberikan perlindungan dan menjamin asas praduga tak bersaalah bagi pelanggar lalu lintas. Pengaturan dan praktek penegakan hukum yang demikian memberikan kemudahan sekaligus perlindungan kepada pelanggar lalu lintas. 2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem e-tilang yang berpedoman kepada Perma Tilang, kurang atau tidak dapat mengakomodir asas praduga tak bersalah sebagai suatu bentuk perlindungan kepada pelanggar lalu lintas. Hal ini disebabkan karena penegakan hukum dengan sistem e-tilang yang mengacu kepada Perma Tilang, tidak memberikan ruang bagi pelanggar lalu lintas sebagai Justitiabelen karena tidak dapat menghadiri sidang tilang. Untuk perbaikan penegakan hukum kedepannya perlu dilakukan peninjauan dan revisi terhadap Perma Tilang.

Kata Kunci: Lalu lintas, tilang, penegakan hukum, asas praduga tak bersalah.

346
ASH
p

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 0018/Pdt.G/2016/PA.Bkt)

Ashary Seftri Ilham, 1310111113, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018, 65 halaman

ABSTRAK

Kasus sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama Bukittinggi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 sebanyak 3 kasus meningkat 11 kasus pada tahun 2016. Pada saat ini banyak perselihan mengenai harta bersama yang berlanjut di Pengadilan Agama. Dalam hal pembagian harta bersama melalui pengadilan agama, pihak-pihak yang bersengketa menginginkan keadilan, agar mereka tidak kehilangan hak-haknya. Berdasarkan hal-hal tersebut, skripsi ini akan mengangkat pokok permasalahan tentang bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi Putusan Nomor : 0018/Pdt.G/2016/PA.Bkt, pokok permasalahan tentang bagaimana alasan-alasan terjadinya gugatan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa harta bersama tersebut. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Penelitian iini menghasilkan kesimpulan, alasan-alasan adanya gugatan karena kedua belah pihak telah bercerai dan meminta pembagian harta bersama namun salah satu pihak ingin menguasai harta itu sendiri, alasan lainnya salah satu pihak menuntut haknya atas harta tersebut. Pertimbangan hakim membenarkan objek gugatan merupakan harta bersama kecuali pada objek 3 yaitu 2 bangunan rumah dan 1 petak tanah, merupakan perjanjian bagi hasil antara tergugat dengan pemilik tanah, khusus 2 bangunan rumah di hibahkan kepada anak-anaknya dan 1 petak tanah merupakan milik tergugat. Kemudian pertimbangan hakim lainnya yaitu membenarkan alat bukti surat yang berupa fotokopi yang tidak dapat di cocokkan karena surat asli berada di tangan tergugat. Dengan demikian di harapkan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian di lakukan secara damai sehingga tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan.

Kata Kunci : Penyelesaian, Harta Bersama, Setelah Perceraian

344.09
BAY
e

EKSISTENSI PENJARA NAGARI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA ADAT DI NAGARI TIGO JANGKO (Studi Kasus Di Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar)

Bayu Endri Purnama, Nomor BP : 1310112027, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 halaman, 2017

ABSTRAK

Sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands), masyarakat Indonesia sudah menggunakan Hukum Adat sebagai The Living Law yang hidup dan tumbuh bersama masyarakat itu sendiri, untuk memenuhi kebutuhannya akan keadilan. Dalam penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran adat salingka nagari dan tindak pidana, terdapatlah sebuah Penjara Nagari di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo. Penjara tersebut didirikan guna untuk mengatasi pelanggaran aturan Nagari yang terdapat di Nagari Tigo Jangko. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis melalui studi dokumen dan wawancara yang kemudian dianalisa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang ada. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai latar belakang berdirinya Penjara Nagari, penerapan Penjara Nagari dan Kendala-Kendala dalam penerapannya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa apabila ditemukannya pelaku yang melakukan pelanggaran adat salingka nagari di Nagari Tigo Jangko, akan digiring ke Penjara Nagari dan dikurung serta dipertontonkan kepada masyarakat nagari, sementara unsur niniak mamak dan nagari melakukan musyawarah atas penyelesaian masalah tersebut. Karenanya terdapat kendala-kendala berupa sosialisasi, koordinasi, dan konsolidasi, dalam penerapan Penjara Nagari. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Penjara Nagari memberikan dampak yang positif dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran adat salingka nagari . Maka perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif agar Penjara Nagari dapat diterapkan dengan baik serta memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas.

347.05
BAL
p

PELAKSANAAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH MELALUI SISTEM PESAN BANGUN PADA PT. PRATAMA GRIYA MAKMUR KABUPATEN PASAMAN BARAT

BALDI PRAMANA, 1620123008, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Program Kenotariatan Universitas Andalas 2018

ABSTRAK

Pengertian rumah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, keberadaanya yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat menyebabkan tidak setiap orang bisa dengan mudah memilikinya, maka pemerintah memberikan peluang usaha kepada pihak swasta untuk terlibat dalam penyediaan rumah bagi masyarakat. Strategi pemasaran rumah yang saat ini sedang banyak digunakan, yaitu penjualan rumah dalam bentuk gambar (pre project selling). Transaksi tersebut dituangkan dalam bentuk Pengikatan Jual Beli (PJB) yang pada prakteknya menimbulkan berbagai masalah baik ditinjau dari isi PJB dan kualitas hasil pekerjaan dengan gambar rumah dalam brosur/ teknis bangunan tidak sama. Adapun terkait dengan isi PJB adalah upaya pengembang untuk menerobos aturan hukum dan perundang-undangan cara direktur perusahaan bertindak untuk dan atas nama pribadi dan bukan selaku direktur perusahaan, konsumen diwajibkan membayar harga kelebihan tanah yang sebelumnya tidak diperjanjikan dan terpikirkan, uang tanda jadi (downpaymant) yang semula bertambah besar dari harga yang ditawarkan pada browsur, konstruksi rumah tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar umum, keterlambatan penyerahan sertifikat, masalah fasum, dan sebagainya, sejatina hal ini menjadi tanggung jawab pengembang jika dikaji dari perundang- undang utamanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau peraturan teknis lainnya. Dari uraian diatas menarik diteliti permasalahan pelaksanaan pengikatan jual beli rumah melalui sistem pesan bangun pada PT. Pratama Griya Makmur Kabupaten Pasaman Barat antara lain 1). Bagaimanakah pelaksanaan pengikatan jual beli rumah antara konsumen dengan pengembang melalui sistem pesan bangun. 2). Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli rumah melalui sistem pesan- bangun yang berdasarkan PJB pada PT. Pratama Griya Makmur Kabupaten Pasaman Barat. Untuk membahas permasalahan peneltian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dengan mengunakan data yuridis empiris yaitu dengan mengunakan data sekunder dengan melakukan penelitian lapangan dan wawancara atau tanya jawab secara langsung dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan isi PJB yang disepakati. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli rumah melalui sistem pesan bangun pada PT. Pratama Griya Makmur Kabupaten Pasaman Barat selama ini dilakukan dengan menerobos aturan, yaitu pihak yang mewakili perusahaan dalam membuat PJB adalah pribadi direktur, bertindak untuk dan atas nama pribadi, didalam PJB sepesifikasi bangunan tidak dicantumkan, sanksi pembatalan perjanjian, hak dan kewajiban para pihak tidak dicantumkan secara implisit.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengikatan Jual Beli, Pesan Bangun

341
BER
a

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTEK ANTI DUMPING TEPUNG TERIGU DARI TURKI KE INDONESIA MENURUT HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

Berri Septianda, 1310112036, Hukum Internasional (PK VII), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 Halaman, 2018

ABSTRAK

Dumping merupakan suatu praktek perdagangan yang curang dengan menjual produk ke Negara lain dengan harga yang lebih murah dari negaranya sendiri. Praktek dumping dapat mengakibatkan kerugian bagi dunia usaha dan industri barang sejenis dalam negeri dan suatu negara yang melakukan praktek dumping dapat dikenakan bea masuk anti dumping (BMAD). Di Indonesia terdapat kasus impor produk tepung terigu dari Turki, dimana Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) menyelidiki bahwa pihak Turki diindikasi melakukan praktek dumping yang menjual produk dibawah harga normalnya dan menyebabkan kerugian industri dalam negeri. Tetapi, sampai saat ini pemerintah Indonesia belum menetapkan pengenaan bea masuk anti dumping terhadap produk tersebut dikarenakan adanya kepentingan nasional yang harus dipertimbangkan. Berdasarkan dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yaitu : 1. Apakah tindakan yang diambil Indonesia dalam menyelesaikan persoalan tuduhan praktek dumping tepung terigu oleh Turki? 2. Apakah akibat yang dihadapi Indonesia terhadap tindakan dalam menyelesaikan persoalan praktek anti dumping tepung terigu oleh Turki?. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian yaitu tindakan yang diambil Indonesia dalam menyelesaikan persoalan tuduhan praktek anti dumping terdapat beberapa tahapan, berawal dari prosedur permohonan penyelidikan yang diajukan industri dalam negeri kepada KADI, lalu mulailah proses penyelidikan oleh KADI yang ternyata diindikasi pihak Turki melakukan dumping, setelah itu hasilnya direkomendasikan kepada Menteri Perdagangan untuk menentukan berapa besarnya bea masuk yang dikenakan dan terakhir Menteri Perdagangan merekomendasikannya kepada Menteri Keuangan untuk penentuan penetapan atau tidaknya bea masuk anti dumping dan keputusan Menteri Keuangan tidak menetapkan bea masuk anti dumping dikarenakan adanya beberapa pertimbangan terhadap kepentingan nasional. Adapun tindakan yang telah diambil Indonesia mengakibatkan hal yang positif dan negatif, positifnya yaitu hubungan Indonesia dengan Turki dibidang perdagangan tetap baik, bagi konsumen dalam negeri banyaknya produk dapat mencukupi kebutuhan masyarakat, semakin bertambahnya pendapatan negara dan dapat mengurangi biaya produksi dalam negeri.

342
BUS
i

IZIN USAHA PETERNAKAN AYAM DAN PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Bustanul Sukri, 1210113135, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 Halaman, 2018

ABSTRAK

Sektor peternakan merupakan potensi yang dapat dikembangkan dengan baik di Kabupaten Pesisir Selatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bidang usaha peternakan telah membuka peluang bagi masyarakat seiring dengan itu juga terdapat pelanggaran perizinan usaha peternakan Untuk itu diperlukan pengaturan pengelolaan di bidang perizinan sebagai fungsi penertib dan fungsi mengatur agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat dan pemerintah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam upaya pengelolaan peternakan, pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan. Permasalahan dari skripsi ini yaitu : 1) Bagaimana proses pemberian izin usaha peternakan ayam dan pendaftaran peternakan rakyat oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan?, 2) Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam proses pemberian izin usaha peternakan ayam dan pendaftaran peternakan rakyat tersebut?. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara dengan pihak responden terkait. Berdasarkan hasil penelitian proses pemberian izin usaha peternakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah sesuai dengan peraturan- peraturan yang ada, akan tetapi peraturan tersebut belum mengatur mengenai pendaftaran peternakan rakyat dan belum terlaksana secara optimal, banyak pelaku usaha peternakan yang tidak mengurus izin usahanya khususnya didaerah paling selatan yang otomatis jauh dari daerah pusat. masyarakat sebagai pelaku usaha enggan untuk mengurus izin usaha peternakannya dengan alasan bahwa kontribusi pemerintah yang kurang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pelaku usaha dan tidak adanya kontrol pemerintah dalam mengatur pasar sehingga harga pakan ternak menjadi sangat mahal dan menyulitkan pelaku usaha peternakan. Tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah dalam hukum terkait dengan izin usaha peternakan serta kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap pelaku usaha peternakan dan keterbatasan jumlah personil dari pihak pemerintah dalam pelaksanaan perizinan usaha peternakan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kata Kunci : Perizinan, Izin Usaha, Peternakan Rakyat

345
CHI
p

PENGATURAN PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DAN PRAKTEKNYA DI INDONESIA

Chicha Melisa, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 83 halaman, 2018

ABSTRAK

Hak cipta merupakan hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklarasi setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan maraknya pelanggaran hak cipta di Indonesia, maka dibutuhkan upaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak cipta dari pemegang hak kekayaan intelektual si pencipta. Upaya hukum tersebut berupa penetapan sementara pengadilan.. Berdasarkan hal ini dilakukan penelitian dengan tujuan mengetahui bagaimanakah pengaturan penetapan sementara pengadilan atas pelanggaran hak cipta di Indonesia dan bagaimanakah tata cara penetapan sementara pengadilan atas pelanggaran hak cipta di indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Semua data tersebut dianalisis dengan cara kualitatif. Untuk membahas permasalahan hukum yang terkait pengaturan penetapan sementara pengadilan atas pelanggaran hak cipta, dan dari hasil penelitian didapat yaitu, penetapan sementara diatur dalam TRIPs Agreement Pasal 44-50 dan UU No. 28 Th 2014 Hak Cipta, UU No. 10 Th 1995 Kepabeanan, PP No. 28 Th 2008 Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan, dan disisi kebijakan terdapat regulasi khusus dalam pengaturan penetapan sementara, yaitu PERMA No. 4 Th 2012 Perintah Penangguhan Sementara dan PERMA No. 5 Th 2012 Penetapan Sementara. Dantata cara penetapan sementara dilakukan oleh pengadilan pencipta dapat merasakan keadilan, meski tahap sementara, sementara kasus yang dihadapi dan ditangani Pengadilan Niaga tetap berjalan dan menunggu hingga selesainya kasus pelanggaran tersebut selesai.

343.07
DWI
k

KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA PANGAN IMPOR SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KONSUMEN DI KOTA PADANG

Dwi Rahmadita, 1410111151, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 Halaman, 2018

ABSTRAK

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk membri perlindungan kepada konsumen. Berkaitan dengan suatu produk impor masuk ke dlam wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan, salah satunya kewajiban menerjemahkan label ke dalam bahasa Indonesia. Tujuan penggunaan label berbahasa Indonesia pada produk pangan impor adalah konsumen akan lebih mudah memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas dan kualitas produk impor serta kemudian dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengonsumsi. Pesatnya arus globalisasi membuat mudahnya produk impor masuk ke Indonesia sehingga perlindungan konsumen terhadap pemakai produk impor dipandang sangat penting. Pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di pasar adalah dengan adanya lembaga Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang memilki fungsi esensial yaitu untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen atas mutu, keamanan, dan manfaat produk obat dan makanan yang beredar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pencantuman label dan perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta sistem pengawasan dan upaya penanganan yang dilakukan. Secara terperinci metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dengan melakukan identifikasi terhadap aplikasi dari aturan tentang pelabelan dalam bahasa Indonesia terkait dengan persoalan perlindungan konsumen. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan Staf BBPOM Padang, Disperindag Sumbar, dan Dinas Perdagangan Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia di Kota Padang secara normatif telah terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan dalam UUPK khususnya yang berkaitan dengan hak-hak konsumen dalam Pasal 4 huruf a, c, dan h. Namun dalam kenyataannya, hak-hak konsumen tersebut belum dapat terpenuhi secara optimal dikarenakan masih ada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan wajib label berbahasa Indonesia pada pangan yang diimpor serta terdapat Tim Terpadu Pengawasan Pangan (T2P2) yang terdiri dari BPOM, Dinkes, Disperindang dan Polisi dimana titik berat berada pada pihak BPOM.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Label Berbahasa Indonesia, Pangan Impor,

344.09
DAS
p

PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT DALAM MEMBINA DAN MENGAWASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN NAGARI DI KECAMATAN X KOTO SINGKARAK

Dasril Sony, 1210113088, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018, 68 Halaman

ABSTRAK

Didalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, dan tiap-tiap Kabupaten dan Kota tersebut dibagi lagi ke dalam kecamatan. kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 226 ayat 1 Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Permasalahan yang dibahas, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan kewenangan Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari di Kecamatan X Koto Singkarak? (2) Hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan kewenangan camat tentang penyelenggaraan kegiatan Nagari di Kecamatan X Koto Singkarak? Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Pemerintah Kecamatan X Koto Singkarak telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pemerintah Nagari dan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Pembinaan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kecamatan kepada aparatur pemerintahan nagari diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan X Koto Singkarak. Pengawasan yang dilakukan oleh apatur pemerintah kecamatan dilakukan kepada aparatur pemerintahan nagari dan masyarakat berupa pengawasan secara langsung atau tidak langsung, pengawasan langsung yang dilakukan oleh aparatur Kecamatan turun langsung kepada aparatur pemerintah Nagari dan masyarakat dan pengawasan tidak langsung dilihat dari laporan-laporan yang dikumpulkan di Kecamatan. (2) Hambatan yang di hadapi oleh pemerintah Kecamatan X Koto Singkarak yaitu sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan kecamatan dan nagari yang belum memadai serta kemampuan yang belum sesuai dengan keahliaan pada bidang pekerjaan dan keterlambatan pemerintah nagari dalam menyerahkan laporan pertanggung jawaban kepada kecamatan serta keterbatasan anggaran di kecamatan dan nagari.

Kata Kunci: Kewenangan Camat, pembinaan dan pengawasan.

342
DEA
p

PENGGAJIAN PEGAWAI HONOR DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOTA PADANG

Dean Sulung Putra, BP 1410111011, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 halaman, 2018

ABSTRAK

Salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk mencapai kesejahteraan diperlukan peranan pemerintah, karena pemerintah sebagai unsur administrasi Negara harus memperhatikan kepentingan warga agar kesejahteraan tercapai. Salah satu bentuknya adalah dengan membuka lapangan pekerjaan. Pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi WNI. Wewenang pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan pembangunan di segala aspek termasuk didalamnya adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan pengangkatan Pegawai Honorer dan Tenaga Kontrak di daerah. Permasalahan penelitian ini tentang (1) Bagaimana Penggajian Pegawai Honor dan Kontrak di Lingkungan Sekretariat Kota Padang (2) Bagaimana kendala dan upaya penanggulangannya dalam pembagian penggajian pegawai honor dan tenaga kontrak di Lingkungan Sekretariat Kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris dengan demikian data-data hukum yang diperoleh melalui dua cara yaitu data primer diperoleh langsung di lapangan (field research) dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penggajian Pegawai Honor dan Kontrak didasarkan pada Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Sekretariat Kota Padang besaran Gajinya di atur berdasarkan rumpun/jenis pekerjaan. (2) Kendalanya yakni masih adanya pegawai honor dan sistem penggajianya tidak sesuai dengan standar penggajian yakni berdasarkan pangkat, golongan, beban kerja dan tanggung jawab kerja atau minimal setara dengan UMP Sumatera Barat, Upaya Penanggulangan yakni Konsisten Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkanan Pegawai Honor Menjadi PNS, mendata ulang Pegawai Honor di Sekretariat Kota Padang untuk masuk kedalam Klasifikasi Pegawai Honor Kategori 1 maupun Kategori 2 sesuai Surat Edaran MENPAN dan Pemerintah Daerah Kota Padang mengajukan penambahan anggaran APBD kepada DPRD Kota Padang agar Pegawai Honor dan Tenaga Kontrak tersebut mendapat gaji minimal sesuai dengan UMP Sumatera Barat.

342
DED
p

PENGUSAHAAN SUMBERDAYA AIR UNTUK PENYEDIAAN AIR BERSIH OLEH PT ADHYA TIRTA BATAM SEBAGAI PERUSAHAAN SWASTA DI PULAU BATAM

DeddyAshari, BP 1410112140, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68 halaman, 2018

ABSTRAK

PulauBatam merupakan salah satu yang memiliki kekhususan di bidang pengelolaan air oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.Dimana pengelolaan air di Pulau Batam dikelola oleh pihak ketiga yaitu Perusahaan Swasta. Permasalahan penelitian ini tentang (1) Hubungan hukum antara Badan Pengusahaan Batam dengan PT Adhya Tirta Batam sebagai Perusahaan Swasta di Pulau Batam (2) Proses penyediaan air bersih untuk masyarakat umum oleh PT Adhya Tirta Batam di Pulau Batam (3) Proses penyelesaian keluhan dan/atau keberatan masyarakat terhadap penyedian air bersih oleh PT Adhya Tirta Batam tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan Sumberdaya Air di Pulau Batam. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris dengan demikian data-data hukum yang di peroleh melalui dua cara yaitu data primer diperoleh langsung di lapangan (field research) dan data sekunde rmelalui penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pada awalnya Badan Pengusahaan Batam tidak mampu mengelola dan memproduksi air dengan baik. Kemudian Badan Pengushaan Batam melakukan kerjasama dengan PT Adhya Tirta Batam sebagai pengelola dan operator pelaksana penyediaan air bersih di Pulau Batam. Pengelolaan Air di Pulau Batam diberikan kepada PT Adhya Tirta Batam dengan Perjanjian Konsesi dengan jangka waktu 25 Tahun. (2) Proses Penyediaan air bersih oleh PT Adhya Tirta Batam melalui pipa jaringan. Pengeloaan dilakukan dari pengambilan air baku dari waduk yang di sediakan oleh BP Batam, air tersebut di olah menjadi air bersih melalui WaterTtreatment Plant (WTP). Kemudian air tersebut di ditribusikan kepada masyarakat d iseluruh Pulau Batam. Didalam skripsi ini dijalaskan tahap-tahap secara rinci termasuk persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan air bersih oleh PT Adhya Tirta Batam. (3) Dengan keterbasan air baku PT Adhya Tirta Batam telah mampu memberikan pelayanaan terhadap penyediaan air bersih di Pulau Batam. PT Adhya Tirta Batam melalui departement customer care memberian pelayanan keluhan pelanggan terhadap pengelolaan air.

345
DED
p

PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN MAKANAN YANG LAYAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG

Dedet Gustika Putra, 1410111034, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 59 Halaman, 2018

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi para Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan.Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana juga terkait dengan Hak Asasi Manusia. Salah satu hak yang wajib dipenuhi dan menjadi hak Narapidana adalah hak untuk mendapatkan makanan yang layak. Dalam pelaksanaan terdapat hambatan teknis seperti terjadinya kelebihan kapasitas sehingga mengakibatkan terjadi masalah kurangnya pelayanan dalam bidang kelayakan makanan. Penelitian ini dilakukan terhadap Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ini adalah: Bagaimana Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, Apa saja Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan sosiologis yuridis dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang- Undangan dan pelaksanaan di lapangan. Ada pun jenis data yang digunakan Primer, sekunder, dan data tersier dengan pendekatanan analisis data kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan mendapatkan makanan yang layak belum optimal dan memadai. Sedangkan kendala dalam melaksanakan hak untuk mendapatkan makanan yang layak terhadap narapidana dan dalam hal pengelolaanya itu kurangnya petugas juru masak yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam pengetahuan memasak. Sedangkan juru masak yang bertugas adalah warga binaan itu sendiri yang tidak memiliki keahlian atau keterampilan dalam pengetahuan memasak. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan hak untuk mendapatkan makanan yang layak terhadap Narapidana serta tidak memadainya sarana dan prasarana dan lingkungan yang buruk dan tidak layak. Disamping dalam rangka keperluan memperjelas hukum pemasyarakatan juga berkaitan dengan upaya menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi Narapidana dan kualitas kelayakan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.

346
DES
p

PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA TALU (Studi Kasus Putusan Nomor: 378/Pdt.G/2015/PA.Talu)

Desti Suryani.1410111032.Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK I Hukum Perdata.69 Halaman.Tahun 2018.

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Untuk melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalam Pasal 6 s.d 12 Undang-Undang Perkawinan. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Dalam Putusan Pengadilan Agama Talu Kelas II Nomor 378/Pdt.G/2015/PA.Talu menyatakan tentang pembatalan perkawinan karena paksaan dan ancaman. Yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Apa sebab terjadinya pembatalan perkawinan dilihat dari Putusan Nomor 378/Pdt.G/2015/PA.Talu? Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 378/Pdt.G/2015/PA.Talu? Dan Apa saja akibat hukum pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 378/Pdt.G/2015/PA.Talu terhadap para pihak? Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas. Hasil dari penelitian ini adalah pembatalan perkawinan yang terjadi karena paksaan dan ancaman. Dimana ayah Tergugat memaksa dan mengancam Penggugat untuk menikahi Tergugat karena telah menuduh Penggugat menghamili Tergugat sehingga hal ini bertentangan dengan asas perkawinan yang didasarkan pada persetujuan para pihak sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan hakim dalam menentukan perkara pembatalan perkawinan ini adalah berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan dapat dibatalkan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan ini adalah perkawinan menjadi tidak ada, dan status anak yang telah dilahirkan oleh Tergugat menjadi anak luar kawin sehingga mengikuti nasab ibunya.

Kata kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan

347.05
DEW
p

PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA PADANG)

Dewi Chyntia, 1110112202, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 halaman, 2018

ABSTRAK

Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk di gosokkan, di letakkan, di tuangkan, di percikkan, atau di semprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat dan zat tersebut tidak boleh mengganggu faal kulit atau tubuh manusia. Badan pengawas obat dan makanan atau disingkat dengan Badan POM adalah sebuah lembaga di indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di indonesia. Badan POM dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 103 Tahun 2001 yang kemudian diubah dengan Keppres No 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, (LPND). Badan Pengawas Obat dan Makanan disingkat dengan BPOM merupakan badan pemerintah non departemen, yang bertanggungjawab kepada Presiden dan dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan. Koordinasi yang dimaksud meliputi koordinasi dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah yang lainnya serta penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan yang dimaksud. BBPOM adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan unit pelaksana teknis BPOM di setiap wilayah Provinsi di Indonesia. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik sebagai wujud perlindungan konsumen di Kota Padang, 2.Apa saja kendala-kendala yang ditemui oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dala, melakukan pengawasan peredaran kosmetik di Kota Padang. Penelitian bersifat deskiptif,dengan menggunakan metode pendekan empiris yuridis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian melihatkan bahwa: 1.masih banyak di temukan kosmetik yang tidak sesuai dengan standar yang telah ada sehingga masih banyak masyarakat (konsumen) yang menggunakan kosmetik tanpa izin edar dan kosmetik palsu serta berbahaya. 2.Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan adalah sebagai berikut: a. Kurangnya kesadaran masyarakat; b. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menjalankan kewajibannya demi memenuhi hak konsumen; c. Kurangnya SDM di lembaga BBPOM Kota Padang.

347.09
DEW
p

PENGELOLAAN OBJEK WISATA HUTAN KOTA DAN TAMAN SATWA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOPERASI SERBA USAHA RIMBA LESTARI SEJAHTERA DI PASAMAN BARAT

Dewi Nofita.1410111157.Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK II Hukum Perdata Bisnis. 73 Halaman.Tahun 2018.

ABSTRAK

Pengelolaan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera, telah sepakat dan saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama tersebut diatur lebih rinci dalam akta perjanjian Nomor : 522/89/SPK/DIN.HUT-KSU.RLS-VIII/2016. Dalam perjanjian kerjasama pengelolaan objek wisata tersebut, biaya yang timbul akibat dibangunnya berbagai fasilitas dibebankan kepada Pemerintah Daerah Pasaman Barat, sedangkan biaya operasional hutan kota dan taman satwa dibebankan kepada Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera. Namun Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. Permasalahan yang dibahas yaitu: (1) Bagaimana pengelolaan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera di Pasaman Barat (2) Apa Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa di Pasaman Barat (3) Apa saja kendala dan penyelesaian dalam pengelolaan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera di Pasaman Barat. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis yang menekankan pada kenyataan di lapangan yang dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Pengelolaan objek wisata dilakukan dengan tahap penyusunan rencana pengelolaan, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi, budidaya pembibitan.(2) Tugas pokok Pemerintah Daerah membangun fasilitas, memberikan pekerjaan kepada pihak pengelola dan kewenangannya adalah menyerahkan pengelolaan kepada Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera, melakukan pembinaan dan pengawasan, dan memungut retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).(3) Kendala dalam pengelolaan objek wisata yaitu disebabkan faktor internal dan eksternal. Penyelesaian atau solusi dari kendala tersebut Pemerintah Daerah harus menambah sarana dan prasarana atau fasilitas objek wisata.

Kata Kunci : Perjanjian, Pengelolaan, Objek Wisata

341
DHE
a

ANALISIS AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TOTAXES ON INCOME TENTANG UPAYA TAX AVOIDANCE PENYEDIA LAYANAN KONTEN/INTERNET (OVER THE TOP)

DheaPuteriAnjani, 1310112037, HukumInternasional (PK VII), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 71 Halaman, 2017

ABSTRAK

Persetujuan penghindaran pajak berganda Indonesia Singapura pertama kali di sahkan pada tahun 1992 dan hingga saat ini belum ada mengalami perubahaan atau penambahan didalamnya. Perkembangan zaman yang pesat dan kemajuan teknologi informasi menjadikan masyarakat saat ini menggantungkan segala aktivitas dengan jaringan internet. Hal ini menyebabkan mulai bermunculannya perusahaan penyedia layanan konten/internet yang dapat menghasilkan pendapatan yang besar. Induk perusaaan layanan konten/internet untuk wilayah Asia Pasifik berdomisili di Singapura, hal ini yang mendasari penelitian ini mengacu pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Singapura. Dikarenakan belum adanya kejelasan tentang aturan perpajakan perusahaan Over The Top, banyak Perusahaan jenis tersebut yang melakukan upaya penghindaran pajak memanfaatkan berbagai kelemahaan hukum yang ada. Pada pembahasan skripsi ini akan dibahas aturan yang mengatur tentang perusahaan Over The Top dalam P3B Indonesia Singapura . Permasalahan yang dibahas terdiri atas: 1) Bagaimana pengaturan penghindaran pajak oleh perusaaan Over The Top dalam P3B Indonesia Singapura? 2) Apa saja yang menjadi faktor penyebab perusahaan Over The Top melakukan penghindaran pajak? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi dokumen dan mempelajari aturan hukum yang adakaitannya dengan materi atau objek penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa negara membutuhkan aturan hukum baru baik itu hukum internasional maupun hukum nasional untuk mengatasi permasalahan terkait perusahaan Over The Top

Kata kunci: p3b, penghindaran pajak,pajak berganda, perusahaan asing.

342
DIAN
k

KEKUATAN MENGIKAT REKOMENDASI KOMISI YUDISIAL BAGI MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

Dian Emalya. 1210113046. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK VI (Hukum Tata Negara). 61 + viii Halaman. Tahun 2018

ABSTRAK

Hakim memiliki posisi sentral dalam pengadilan. Putusan hakim dalam suatu perkara di pengadilan menggambarkan keadaan penegakkan hukum dan keadilan suatu negara. Untuk itu Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial membentuk suatu aturan yang disebut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagai hasil keputusan bersama agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengawasan hakim baik internal oleh MA maupun eksternal oleh KY. Dalam mengawasi hakim, KY dapat memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada MA apabila terdapat hakim yang melanggar KEPPH untuk selanjutnya segera ditindaklanjuti oleh MA apabila tidak ada perbedaan pendapat antar keduanya, namun rekomendasi KY tersebut akan berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh MA apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya rekomendasi tersebut tidak tercapai kata sepakat antara KY dan MA. Namun kenyataannya di tahun 2016 saja ada sekitar 22 laporan belum ditindaklanjuti oleh MA dari keseluruhan 54 rekomendasi sanksi yang diajukan oleh KY. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dan membandingkan perundang-undangan yang berlaku dengan permasalahan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan penjelasan secara eksplisit yang menegaskan bahwa usulan atau rekomendasi KY tersebut hukumnya mengikat dan wajib dilaksanakan oleh MA mengakibatkan rekomendasi tersebut banyak yang ditelantarkan atau tidak dijalankan oleh MA meskipun sudah lewat jangka waktu 60 hari. Maka perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial dan SKB tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berupa penambahan kalimat yang secara tegas menjelaskan bahwa usulan atau rekomendasi KY tersebut bersifat mengikat dan wajib dijalankan oleh MA, serta penambahan norma sanksi bagi MA atau membentuk instrumen hukum sebagai unsur pemaksa yang mengatur agar MA segera menjalankan rekomendasi KY.

Kata Kunci : Rekomendasi KY, Kode Etik, Hakim, KEPPH

341
DIAN
p

PENGATURAN PENGGUNAAN ROKOK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Dian Pertiwi Alty, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 71 halaman, 2018

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Merokok sangat berbahaya bagi kesehatan. Penggunaan rokok berdampak terhadap kesehatan orang lain disekitar perokok. Tindakan tersebut melanggar hak seseorang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi. Di dalam tataran hukum internasional telah dibentuk Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sebagai bentuk kepedulian masyarakat internasional terhadap penggunaan tembakau sebagai rokok. FCTC adalah perjanjian Internasional berbentuk konvensi yang mengendalikan penggunaan tembakau yang pengawasannya berada dibawah World Health Organization. Indonesia sampai saat ini belum meratifikasi FCTC, sedangkan banyak negara di dunia telah meratifikasi FCTC. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pengaturan penggunaan rokok menurut hukum Internasional? (2) Bagaimana respon Indonesia terhadap pengaturan penggunaan rokok secara Internasional ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah : (1) Pengaturan penggunaan rokok menurut hukum Internasional termuat di dalam FCTC .(2) Pemerintah Indonesia telah membentuk Rancangan Undang- Undang tentang Pertembakauan dan Peraturan Pemerintah sebagai respon terhadap pengaturan penggunaan rokok secara Internasional (3) Regulasi yang ada di Indonesia terkait pengendalian tembakau saat ini berbentuk Peraturan Pemerintah, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang Pengendalian Tembakau. Kesimpulan pada penulisan ini adalah : (1) FCTC telah menjadi hukum Internasional karena ia telah memenuhi syarat diratifikasi oleh minimal 40 negara. (2) Indonesia tidak meratifikasi FCTC karena masih banyak kepentingan terkait dengan produksi tembakau namun mengimplementasikannnya dalam Peraturan Pemerintah.

Kata kunci : Rokok, FCTC (Framework Convention on Tobacco Control), Kesehatan

347.09
DIA
p

PELAKSANAAN PENGALIHAN UANG KEMBALIAN KONSUMEN KE DALAM BENTUK SUMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG DI KOTA PADANG

Diana Rahmawati, 1210112160, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 58 Halaman

ABSTRAK

Praktek pengalihan uang kembalian konsumen diawali dengan pengalihan ke bentuk permen, kemudian saat ini uang kembalian konsumen dialihkan kedalam bentuk sumbangan. Undang – undang perlindungan konsumen tidak mengatur secara eksplisit tentang uang kembalian konsumen dan pengumpulan donasi. Tetapi aturan tentang pengumpulan donasi tertuang dalam Undang – Undang no 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan yang dilakukan oleh pelaku usahadan bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang. Metode yang digunakan dalam pembahasan rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian yuridis empiris dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta melaksanakan wawancara dengan pelaku usaha yang melakukan praktek pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha pada dasarnya tidak dilarang atau diperbolehkan demi mewujudkan kesejahteraan sosial asalkan melalui prosedur perizinan yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang. Pelaksanaan pengumpulan sumbangan dilaksanakan dengan cara-cara yang ditentukan dalam perundang-undangan pengalihan uang kembalian konsumen dan dilaksanakan secara terang-terangan dengan sukarela, tidak dengan paksaan, ancaman, kekerasan dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan kegelisahan di lingkungan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan telah dilaksanakan yaitu dengan tersalurnya dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan, adapun bantuan tersebut diprogramkan untuk disalurkan dalam setahun sekali dan adapun bantuan yang sifatnya berkala adalah penyaluran bantuan yang diprogramkan waktunya dan disalurkan padasekolah-sekolah yang telah dipilih dan memenuhi persyaratan untuk mkereima bantuan tersebut.

Kata Kunci : Konsumen, Pengumpulan Uang atau Barang, Sumbangan

345
DIA
p

PERANAN UNIT RESKRIM DALAM MELAKUKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM UNIT RESKRIM LUBUK BEGALUNG

Diana Devichairani Ady, 1310112053, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 70 halaman, 2018

ABSTRAK

Tindak pidana dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa tindak pidana hanya dapat dicegah dan di kurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Salah satunya adalah tindak penyalahgunaan pidana nakotika. Mengenai tindak pidana narkotika ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pengertian nakotika adalah "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini". Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat khususnya dikawasan Lubuk Begalung kota Padang sehingga untuk itu perlu adanya penanggulangan dari tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu dari kepolisian sehingga terciptanya rasa aman dan tentram. Salah satunya penegakan hukum dilakuan oleh kepolisian reskrim polsek Lubuk Begalung. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana peranan unit reskrim dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum reskrim Lubuk Begalung, 2. Apa saja kendala dan upaya peranan unit reskrim dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum reskrim Lubuk Begalung. Adapun metode yang dipakai penulis adalah yuridis sosiologis. Hasil pembahasan dan penelitian dari penulis yaitu : 1. Peranan unit reskrim dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum reskrim lubuk begalung yaitu berdasarkan undang-undang yang mengaturnya sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan. 2 Kendala dan upaya peranan unit reskrim dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum reskrim Lubuk Begalung yaitu : a Masih ada sebagian masyarakat yang masih menyembunyikan para pengguna penyalahgunaan narkotika sehingga menghambat proses penyelidikan dalam bentuk informasi, b. Dari hasil penangkapan yang dilakukan oleh unit reskrim Lubuk Begalung masyarakat masih membela dalam artian tidak mau memberitahukan orang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan tindak pidana narkotika sehingga terjadinya tumpang tindih antara kepolisian dengan masyarakat di kawasan lingkungan tersebut, c. Laboratorium Forensik Polri belum ada di Sumatera Barat untuk melakukan pemeriksaan barang bukti narkotika yang ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung, d. Anggaran operasional (pendanaan), e. Terbatasnya sarana dan prasarana, Tidak adanya dukungan dari Pemerintahan Daerah (PEMDA).

342
DIK
f

FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENYELEWENGAN KEUANGAN DAERAH PADA INSTANSI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

DIKI OKTA DWI PUTRA, 1310111089 , Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VII (Hukum Administrasi Negara), jumlah halaman 66, Tahun 2018

ABSTRAK

Inspektorat Daerah Kabupaten Solok memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah di lingkup Kabupaten Solok agar terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien, untuk itu diperlukan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabuaten Solok dalam mencegah terjadinya penyelewengan keuangan daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok. Inspektorat Daerah sebagai salah satu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah memiliki peran dan posisi yang strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal dan fungsional dapat aktif dan responsiv dalam mencegah penyelewengan keuangan daerah di linkungan Pemerintahan Daerah agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan serta meningkatkan kinerja aparatur Pemerintahan Daerah yang taat pada peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang dilihat disini adalah meskipun telah terdapat badan atau lembaga pengawasan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini pengelolaan keuangan, tetapi masih terdapat pengelolaan keuangan daerah yang sering ditemukan berupa penyelewengan, pemborosan, dan penggunaan yang tidak tepat sasaran. Adanya temuan terhadap penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran di Nagari Guguk Sarai IX Koto Sungai Lasi pada tahun 2017. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis sosiologis dengan demikian data-data hukum yang diperoleh melalui dua cara yaitu data primer diperoleh langsung di lapangan (field research) dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (library research). Adapun hasil penelitian sebagai berikut bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mencegah terjadinya penyelewengan keuangan daerah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok belum optimal, ini dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan tiap tahunnya tidak bisa mencakup seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Pemerintahan Kabupaten Solok.

Kata kunci : Pengawasan, Inspektorat, Keuangan Daerah

345
DIM
p

PELAKSANAAN INTEROGRASI TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRESTA PADANG

Dimas Aji Bagaskara .1410112159 .Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK IV (Hukum Pidana.67 Halaman.Tahun 2018)

ABSTRAK

Interograsi merupakan suatu metoda sangat berperan dalam proses penyidikan terhadap tersangka khususnya disini pelaku tindak pidana pemcurian. Untuk kelancaran hal tesebut tidak terlepas dari cara kerja dari aparat penegak hukum itu sendiri khususnya penyidik dalam melakukan interogasi terhadap tersangka tindak pidana pencurian dengan cara yang tepat dan sesuai dengan aturan yang ada . Baik berdasarkan KUHAP ataupun berdasarkan buku petunjuk lapangan POLRI tentang pemeriksaan tersangka. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan interogasi terhadap tersangka dalam proses penyidikan tindak pencurian, bagaimana peranan interogasi dalam menemukan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian, dan apakah yang menjadi kendala –kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam melaksanakan interogasi terhadap tersangka tindak pidana pencurian . Untuk itu dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metoda deskriptif yang bersifat yuridis empiris yang mengkaji bagaimana bagaimanakah suatu peraturan perundangan-undangan berlaku dalam prakteknya dilapangan. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan interogasi terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dengan menggunakan metoda atau teknik-teknik interogasi yang ada serta berdasarkan pada aturan KUHAP dan juga berdasarkan buku petunjuk lapangan POLRI tentang pemeriksaan . Interogasi dijadikan sebagai kunci pokok dalam menemukan alat bukti, dan kendala yang dihadapi oleh petugas penyidik/penyidik pembantu dalam melakukan interogasi adalah kekurangan dalam bidang sarana dan prasarana untuk keperluan interogasi, masalah kurangnya tenaga kepolisian yang lebih professional , dan kendala dari pihak tersangkanya sendiri yang sukar untuk berkerjasama dengan aparat penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencurian yang di lakukan. Saran yan penulis berikan yaitu adanya kerjasama yang baik antara aparat aparat penegak hukum dengan masyarakat, adanya badan control yang mengawasi prose situ berjalan mulai dari awal sampai akhir , serta adanya peningkatan profesionalitas kepolisian.

345
DIM
p

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA MOTOR (Studi Kasus Wilayah Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Agam)

Dimas Dwinofanto Putra, BP 1410112053, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Program Kekhususan Hukum Pidana (PKIV). 2018. 73 Halaman.

ABSTRAK

Banyak pengguna jalan tidak mematuhi peraturan berlalu lintas dengan baik terutama anak sekolah. Selain itu, perlengkapan berkendara mereka banyak yang tidak sesuai dengan standar.. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak pada saat ini sangat banyak terjadi, salah satunya di kawasan Polres Agam. Permasalahan yang terjadi adalah 1) Bagaimanakah peranan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak? 2) Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak? 3) Apa kendala-kendala yang ditemui oleh kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (empiris). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan dianalisis dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peranan kepolisian kepolisian lalu lintas dalam penegakan hukum yaitu tindakan berupa pencegahan, penyuluhan dan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas anak sebagai pengendara bermotor. Selain itu bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak yaitu tidak memiliki surat-surat kelengkapan berkendara seperti (SIM dan STNK), tidak menggunakan helm, mengendarai motor tidak sesuai standar kendaraan dan melanggar rambu lalu lintas. Tidak hanya itu, kendala yang ditemukan satuan lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yaitu kurangnya pemahaman terhadap ketentuan dalam aturan berlalu lintas yang baik dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor dengan bimbingan dari orang tua dan sosialisasi serta penyuluhan tentang peraturan lalu lintas.

Kata Kunci : Peranan, Kepolisian, Lalu Lintas, Pengendara Sepeda Motor, Pelanggaran, Penegakan Hukum, Anak

342
DIN
p

PEMANFAATAN ZONASI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT DALAM UPAYA PERENCANAAN WISATA PENDAKIAN GUNUNG KERINCI DI SOLOK SELATAN

Dino Wahyu Saputra, 1410111166, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VIII (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam), 60 Halaman + Lampiran + vii 2018

ABSTRAK

Pemanfaatan jasa lingkungan saat ini berkembang pesat di Negara Indonesia, salah satu potensi alam yang sangat menarik untuk dikembangkan adalah Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. TNKS merupakan Kawasan Pelestarian Alam diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang sangat cocok dijadikan salah satu destinasi wisata. Salah satu wisata yang menarik dikembangkan adalah wisata pendakian Gunung Kerinci yang saat ini dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Adapun permasalahan yang penulisangkat dalam penulisan ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan zonasi kawasan TNKS untuk jalur pendakian Gunung Kerinci di Solok Selatan oleh Balai Besar TNKS, 2) Kendala apa yang dihadapi dalam praktek pemanfaatan zonasi kawasan TNKS untuk jalur pendakian Gunung Kerinci di Solok Selatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara.Data yang diperoleh selama penelitian kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil wawancara penulis dengan instansi Pengelolaan Taman Nasional mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan rezonasi kawasan TNKS kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang hal ini diatur dalam Peraturan Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Setelah melalui beberapa tahapan yang diatur dalam Peraturan Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dapat mengembangkan wisata pendakian Gunung Kerinci di Solok Selatan setelah diterbikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : SK.495/KSDAE/SET/KSA.0/12/2017 yang merupakan izin untuk menurunkan atau mengubah zonasi pada Taman Nasional Kerinci Seblat.

Kata kunci : Pemanfaatan, Perencanaan, Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

342
DIO
p

PENGURUSAN PERIZINAN SEKOLAH FILIAL OLEH DINAS PENDIDIKAN DI KOTA PADANG

Dio Prasetya, 1410111042, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 halaman 2018

ABSTRAK

Pendidikan merupakan cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 serta ingin mencapai tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan tidak merata di seluruh wilayah. Oleh karena itu terjadi kesenjangan pendidikan antara daerah kota dan daerah pinggiran. Sekolah filial atau kelas jauh merupakan salah satu solusi dari permasalahan tersebut. Sekolah filial atau kelas jauh merupakan kelas yang dibuka diluar sekolah induk diperuntukkan untuk siswa-siswi yang tidak tertampung di sekolah tersebut baik karena keterbatasan kursi (ruangkelas) atau jarak tempat tinggal yang jauh.Penelitian ini membahas perizinan sekolah filial oleh Dinas Pendidikan di Kota Padang. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1.Bagaimana proses pengurusan perizinan sekolah filial oleh Dinas Pendidikan di Kota Padang. 2. Bagaimana pegawasan terhadap perizinan sekolah filial oleh Dinas Pendidikan di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (sosiologis). Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, studi dokumen dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini penulis menyimpulkan sekolah filial dibentuk karena permintaan masyarakat sekitar yang meminta dinas pendidikan agar mendirikan sebuah sekolah. Dinas pendidikan membuat izin operasional kepada sekolah yang bersedia membentuk sekolah filial. Dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian pada SMKN 3 dan SMPN 13 Padang filial sebagai studi kasus. Dalam hal pengawasan dilakukan rutin oleh bidang fungsional pengawas. Adapun dari hasil penelitian ini penulis menyarankan perlu adanya peraturan yang jelas sebagai standar operasional bagi sekolah filial untuk melakukan proses perizinan. Harus ada inisiatif lebih dari Dinas Pendidikan untuk pendirian sekolah filial ini. Untuk hal pengawasan penulis menyarankan agar lebih ditingkatkan lagi agar tidak terlantarnya proses belajar mengajar di sekolah filial.

Kata kunci :perizinan, sekolah, filial, pengawasan.

346
DYV
e

EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN FIAT PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PADANG DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT CEMPAKA MITRA NAGARI (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 16/EKS.HT/2013/PN.PDG)

DYVA MAULINA 1410112102

ABSTRAK

Salah satu bentuk pelayanan Bank Perkreditan Rakyat Cempaka Mitra Nagari dalam melaksanakan fungsi menyalurkan dana kepada masyarakat adalah dengan pemberian kredit kepada masyarakat. Untuk menjamin kredit yang diberikan oleh BPR Cempaka Mitra Nagari kepada debitur, pihak bank mensyaratkan adanya jaminan (collateral). Jenis kredit yang disediakan oleh BPR Cempaka Mitra Nagari terdiri dari kredit konsumtif, investasi dan modal kerja. Dalam pemberian kredit oleh BPR, harus disertai agunan yang dapat berupa hak tanggungan dan fidusia. Agunan kredit harus dilakukan pengikatan secara notariil. Salah satu bentuk pengikatan agunan adalah pemasangan hak tanggungan. Pemasangan hak tanggungan dilakukan terhadap jaminan berupa tanah dan/atau bangunan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakan pelaksanaan eksekusi terhadap objek hak tanggungan fiat Pengadilan Negeri dalam penyelesaian kredit bermasalah di BPR Cempaka Mitra Nagari. Apa faktor yang melatarbelakangi penyelesaian kredit melalui bermasalah yang diikat hak tanggungan eksekusi fiat Pengadilan Negeri. Apa saja hambatan dan kendala dalam pelaksanaan eksekusi obyek hak tanggungan fiat Pengadilan Negeri dalam penyelesaian kredit bermasalah di BPR Cempaka Mitra Nagari. Penelitian hukum menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah yang melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dilapangan. Dalam penulisan ini sumber data diperoleh dari Penelitian Kepustakaan (library research) dan Penelitian Lapangan (Field Research). Teknik pengumpulan data dilakukan Studi Dokumen dan Wawancara terstruktur. Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan menentukan bahwa apabila debitur cidera janji maka pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan secara umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Kecenderungan debitur melakukan perlawanan dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mendorong Bank untuk melakukan permohonan Eksekusi Fiat pengadilan Negeri dalam penyelesaian permasalahan kredit.

Kata Kunci : Eksekusi, Kredit Bermasalah, Hak Tanggungan

342
DED
p

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM NO.77/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST TERHADAP KASUS PAILIT PT BATAVIA AIR

Dedet Ranggil Saputra, 1310111180, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,61 Halaman, 2017

ABSTRAK

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (finacial distress) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Seiring dengan berjalannya dinamika perekonomian Indonesia yang fluktuatif, semua pihak yang menjalankan suatu usaha dihadapkan pada suatu tantangan baru, yaitu bagaimana menangani utang dan juga bagaimana menghadapi piutang dari pihak lain. Kasus kepailitan telah menimpa banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia salah satunya PT. Batavia Air. Adapun masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah, Pertama, bagaimana pelaksanaan putusan hakim No.77/Pailit/2012/Pn. Niaga.Jkt.Pst terhadap kasus pailit PT Batavia Air. Kedua, apa akibat pailit terhadap PT Batavia dalam putusan hakim No.77/Pailit/2012/Pn. Niaga.Jkt.Pst. Dalam metode penelitiannya skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan pelaksanaan dari putusan tersebut. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Kelas IA Khusus. Adapun hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa, Pertama, pada tanggal 31 Januari 2013, PT Batavia berhenti beroperasi karena dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Batavia Air terbukti mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan mempunyai dua kreditur yaitu ILFC dan Sierra. Akibatnya seluruh harta kekayaan Batavia Air disita yang pengurusan dan pemberasannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim Pengawas. Kedua, setelah adanya putusan pailit dari pengadilan niaga terhadap PT Batavia, maka pada hari itu juga dimulai jam 00,00 seluruh harta kekayaan PT Batavia disita yang pengurusannya dilakukan oleh Tim Kurator Turman M Panggabean. PT Batavia demi hukum kehilangan hak dalam pengelolaan harta kekayaan yang dimiliknya pada saat putusan pailit. Dalam menghindari terjadinya kepailitan perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama industri penerbangan udara, perlu adanya campur tangan pemerintah dalam hal regulasi struktur keuangan perusahaan, misalnya peraturan mengenai jumlah dana cadangan yang harus dimiliki perusahaan.

345
DIN
p

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING) OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KEIMIGRASIAN (Studi di Direktorat Jenderal Keimigrasian Republik Indonesia)

Dinda Balqis, 1410112155, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 85 Halaman, Pembimbing: Prof.Dr.H.Elwi Danil, S.H.M.H dan Iwan Kurniawan, S.H,M.H.

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 120 UU No. 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Penyelundupan manusia merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri maupun untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok, baik dengan menggunakan dokumen sah atau tidak, melalui tempat pemeriksaan imigrasi atau tidak. Penegakan hukum keimigrasian dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian berdasarkan Pasal 105 UU Keimigrasian. Dalam skripsi ini, permasalahan yang dibahas ialah: (1) Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia? (2) bagaimana pelaksanaan koordinasi antara PPNS Keimigrasian dengan penyidik Polri dan pelaksanaan penegakan hukum oleh PPNS Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia? dan (3) bagaimana kendala yang dihadapi oleh PPNS Keimigrasian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia serta solusi yang diberikan?. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data ialah wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh diolah dengan metode editing dan tabulating dan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa, (1) faktor penyebab terjadinya penyelundupan manusia diantaranya faktor keamanan, ekonomi, stabilitas politik dan keberhasilan imigran lain, (2) bentuk koordinasi antara PPNS keimigrasian dengan penyidik Polri diatur dalam Pasal 107 UU Keimigrasian, namun dalam prakteknya muncul permasalahan dimana penyidik Polri lebih banyak menangani kasus penyelundupan manusia, (3) kendala yang dihadapi PPNS Keimigrasian diantaranya, koordinasi dengan penyidik Polri, kurangnya kesadaran masyarakat, solusinya salah satunya ialah dengan memberdayakan Tim PORA dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

342
EDI
g

GAGASAN PEMBENTUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PERWAKILAN DI DAERAH

Edi Gustia Bahri, Nomor Bp. 1310111066 Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah Halaman: 78 Halaman, Tahun 2018

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin besar dan masif mengingat mewabahnya perilaku korupsi di berbagai lini penyelenggaraan negara di daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Keberadaan Kejaksaan dan Kepolisian di daerah dinilai masih belum efektif dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah. Gagasan mengenai pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah sebagaimana dimaksud sudah terbuka peluang manakala ditelisik dari ketentuan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, terkhusus Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. Perumusan masalah, bagaimana gagasan pembentukan KPK perwakilan di daerah ?. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan survei melalui angket/kuisioner, data yang didapat diolah melalui proses editing dan dianalisis dengan metode kualitatif (tidak menggunakan angka-angka ataupun rumus matematika). Pandangan KPK sejalan dengan pandangan masyarakat tentang gagasan pembentukan KPK perwakilan di daerah yang menyatakan bahwa kehadiran KPK perwakilan sudah sangat penting di daerah menimbang efektitas kinerja dari Kepolisian dan Kejaksaan di daerah melalui banyaknya aduan dari masyarakat yang menumpuk mengenai dugaan adanya tindak pidana korupsi di daerah dan jumlah penyidikan kasus dugaan tindak korupsi yang berbanding jauh dengan jumlah penuntutan yang sudah dilakukan. Pembentukan KPK perwakilan di daerah membutuhkan instrumen hukum tambahan guna memperkuat kedudukannya didaerah dengan mempertahankan sifat independensi dari KPK itu sendiri. Semua hal tersebut dapat diwujudkan melalui komitmen dari penyelenggara negara dalam melaksanakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap konsisten dengan semangat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan yang sudah dicita-citakan bersama serta peran masyarakat perlu dilibatkan dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

342
EDO
p

PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI AIR MANIS OLEH PPEMERINTAH KOTA PADANG

Edo Roberto, 1210113097, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VIII), 52 halaman – Tahun 2018, Pembimbing : Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H dan Darnis, S.H., M.H

ABSTRAK

Pemerintahan daerah menjalankan urusannya ada yang harus diperhatikan oleh Pemerintah, dimana urusan pemerintah ini terbagi menjadi dua urusan, yaitu urusan pemerintahan wajib, dan ada juga urusan pemerintah pilihan, dimana urusan pemerintah wajib, adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, dan urusan pemerintah, adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dimana pariwisata adalah termasuk urusan pemerintahan pilihan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Salah satu kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah kota padang adalah mengelola objek wisata Pantai Air Manis, yang tujuan dari pengelolaan tersebut adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan juga menjadikan objek wisata pantai air manis padang ini sebagai wisata yang dikenal oleh masyarakat luas. Dalam pengelolaan Objek Wisata Pantai Air Manis Kota Padang terdapat dua pihak yang mengelolanya yaitu dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang juga pihak kedua yaitu masyarakat setempat dikawasan Pantai Air Manis disebabkan dari pihak kedua memiliki lahan atau tanah disekitar kawasan objek wisata Pantai Air Manis. Dalam pengelolaan Pantai Air Manis Kota Padang Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Padang tentunya memperhatikan bagaimana pelaksanaan, pengewasan dan perencanaan, pada bagian pengelolaan tersebut diberikan penuh kepada Bidang Kasi Destinasi dan Daya Tarik Wisata. Dalam pengelolaan Pantai Air Manis Kota Padang terdapat kendala- kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Padang khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang yaitu berupa : a) masih adanya pungutan liar yang dilakukan warga setempat dikawasan pengelolaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, b) kurangnya rasa sadar dari pengunjung dan warga setempat tentang kebersihan lingkungan dikawasan Objek Wisata Pantai Air Manis, c) masih banyaknya pedagang kaki lima yang mendirikan lapak di depan kawasan Objek Wisata Pantai Air Manis sehingga merusak keindahan pantai, d) dan kendala-kendala lainnya. Untuk itu perlu cara mengatasi dari kendala-kendala tersebut dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang yaitu : a) melakukan tindakan tegas terhadap orang yang melakukan pungutan liar tersebut baik secara hukum perdata maupun secara hukum pidana, b) melakukan penyuluhan tentang kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dikawasan Objek Wisata Pantai Air Manis dan membuat pemberitahuan tentang kebersihan, c) memberi arahan untuk tidak berjualan dikawasan yang akan merusak keindahan pantai dan memberikan tempat untuk berjualan. Tujuan dari penanggulangan kendala-kendala tersebut adalah untuk meningkatkan rasa keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung.

342
ELS
p

PERLINDUNGAN UPAH TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING PT. BAKRI KARYA SARANA DI RSUP. M. DJAMIL PADANG

Elsa Onilia, BP 1410112073, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VII). 2018. 74 Halaman.

ABSTRAK

Mendapatkan pekerjaan merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan setiap orang juga berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Outsourcing di dalam Pasal 64-66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain disebut sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan dianalisis dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa : Pertama, Upah pekerja outsourcing PT. Bakri Karya Sarana di RSUP. M. Djamil Padang yang dimuat dalam perjanjian kerja adalah sebesar Rp.1.949.284,-, jumlah tersebut sesuai dengan Upah Minimum Provinsi yang ditentukan, etapi kenyataanya masih ada ketentuan yang dilanggar oleh perusahaan, seperti tidak membayarkan upah pekerja yang tidak bekerja karena sakit, tidak memberikan BPJS ke sebagian pekerja padahal upah pekerja sudah dipotong. Kedua, kendala yang dihadapi dalam perlindungan upah terhadap pekerja outsourcing PT. Bakri Karya Sarana di RSUP. M. Djamil Padang antara lain adalah sebagai berikut: kurangnya tenaga pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan pengawasan ketengakerjaan, minimnya anggaran untuk melakukan pengawasan ketengakerjaan, perusahaan masih melanggar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan/normanya yang mengatur kurang lengkap, upaya untuk mengatasi kendala adalah mengoptimalkan pengawasan ketenagakerjaan dengan cara menambah pengawas ketenagakerjaan, memaksimalkan anggaran untuk melakukan pengawasan ketengakerjaan.

Kata Kunci: Perlindungan Upah, Pekerja, Outsourcing.

346
ERA
p

PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DEGAN ALASAN ZINA YANG DIPUTUS DENGAN PERCERAIAN BIASA DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI KELAS I B (Studi Kasus Putusan Nomor 141/Pdt.G/2013/PA.Bkt)

Era Yulia, 1410112006, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata 83 Halaman, Tahun 2018

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan yang menyebabkan berakhirnya perkawinan dengan cara perceraian. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2013/PA.Bkt menyatakan tentang perceraian dengan alasan zina yang diputus dengan perceraian biasa. Yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan zina yang diputus dengan perceraian biasa di pengadilan agama Bukittinggi kelas I B? Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan zina yang diputus dengan perceraian biasa di pengadilan agama Bukittinggi kelas I B (Studi Kasus Putusan Nomor 141/Pdt.G/2013/PA.Bkt)? Bagaimana akibat hukum perceraian dengan alasan zina yang diputus dengan perceraian biasa? Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas. Hasil dari penelitian ini adalah Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan zina dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama dengan cara sumpah li'an yang kedua dengan cerai biasa dengan dialihkan ke alasan perceraian lain yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan Hakim untuk tidak memutus perkara perceraian dengan alasan zina ini tidak dengan li'an yaitu; 1. Pemohon hanya menuntut perceraian dengan perceraian biasa tidak dengan li'an terhadap Termohon, 2. Pokok permasalahan antara Pemohon dengan Termohon yaitu perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tuduhan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, 3. Perceraian dengan verstek karena Termohon tidak pernah hadir kepersidangan, 4. Kurangnya pemahaman tentang li'an oleh pihak yang berperkara, 5. Konsekuensi yang berat jika penyelesaian dengan cara li'an yaitu perkawinan putus untuk selama-lamanya. Akibat hukum perceraian dengan alasan zina jika lahir seorang anak akibat dari hubungan zina maka anak tersebut hanya mempunyai nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kata kunci: Perkawinan, Perceraian dengan alasan zina, Li'an

347.05
EVA
p

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SILINDER HEAD/DEXEL MOBIL DI BPSK KOTA PADANG (STUDI KASUS NO: 053/P3K/VIII/2015)

Eva Yani , 1410111133, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018, 73 Halaman

ABSTRAK

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Mengenai perlindungan konsumen, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan peluang bagi konsumen yang merasa dirugikan untuk mengggat pelaku usaha melalui jalur pengadilan (litigasi) atau diluar pengadilan (non litigasi). Permasalahan yang sering kali timbul dari adanya hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen yang berkaitan dengan perjanjian atau transaksi yang dilakukan. Dalam sengketa konsumen ini dasar gugatan yang diajukan konsumen yaitu dengan alasan konsumen merasa dirugikan tidak adanya tanggungjawab lebih lanjut atau solusi dari masalah tersebut. Pasal 49 ayat 1 menyebutkan bahwa BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Dalam penelitian ini, penulis memilih BPSK Kota Padang sebagai tempat penelitian. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen dalam hal perjanjian jual beli Silinder Head/Dexel Mobil antara Sumitro Siregar dengan Toko Maily Motor, 2). Bagaimana pertimbangan hukum dari Majelis terhadap putusan yang ditetapkan oleh BPSK Kota Padang dalam sengketa konsumen No: 053/P3K/VIII/2015, 3). Bagaimana pelaksanaan putusan para pihak dalam sengketa konsumen No: 053/P3K/VIII/2015. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dengan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan konsumen merasa dirugikan atas tidak adanya tanggungjawab lanjut pelaku usaha terhadap pembelian barang Silinder Head/Dexel Mobil. Penyelesaian sengketa konsumen dalam Perkara Nomor 053/P3K/VIII/2015 di BPSK Kota Padang diselesaikan dengan arbitrase, dimana kedua belah pihak melaksanakan putusan tersebut dan konsumen merasa sangat puas atas putusan yang ditetapkan BPSK Kota Padang.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, BPSK, Putusan No: 25/PTS/BPSK/PDG/ARBT/IX/2015

341
FAD
p

PENERAPAN LARANGAN TRANSHIPMENT IKAN DI LAUT INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DI TINJAU DARI KONVENSI HUKUM LAUT 1982

Fadhel Aditya Feonda, 1210112199, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Internasional (PK VII), 53 halaman – Tahun 2017, Pembimbing : Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H dan M. Jhon, S.H., M.H

ABSTRAK

Kasus illegal fishing kerap terjadi di laut Indonesia salah satunya menggunakan modus praktek transhipment. Modusnya, kapal itu menjual ikannya di laut lepas tanpa melaporkan hasil tangkapannya atau langsung membawanya ke luar negeri untuk dijual. Hal ini menjadi angka rugi yang tersamarkan dan dapat merugikan devisa negara serta merugikan nelayan kecil. transhipment yang terjadi di laut Indonesia dilakukan oleh kapal asing dan kapal lokal yang merugikan negara, rentan terjadinya illegal fishing, monopoli fishing ground, mempercepat over fishing, dan sebagainya, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis yakni, (1) Bagaimana penerapan larangan transhipment ikan di laut Indonesia terhadap upaya penanggulangan illegal fishing di tinjau dari Konvensi Hukum Laut 1982, (2) Bagaimana implikasi penerapan larangan transhipment ikan di laut terhadap penanggulanga illegal fishing dalam hukum nasional Indonesia. Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan. Metode ini adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa (1) Penerapan larangan transhipment ikan di laut Indonesia terhadap upaya penanggulangan illegal fishing ditinjau dari Konvensi Hukum Laut 1982, mencakup penerapan hukum di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan negara pantai dan kawasan laut dimana negara pantai memiliki hak berdaulat termasuk di ZEE. Bagi Indonesia untuk menghukum pelaku transhipment harus dilihat tempat terjadinya tindakan tersebut, (2) Penerapan larangan transhipment ikan di laut Indonesia memberikan implikasi dalam berbagai bidang seperti halnya pada negara yang mana meningkatkan devisa negara, kesejahteraan nelayan menjadi meningkat karena stok ikan yang melimpah dan naiknya nilai tukar nelayan, serta implikasi terhadap pemerintah yang semakin meningkatnya kerja sama dan integritas para penegak hukum dan pihak terkait dalam mengawasi dan mengadili kasus dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan lain-lain.

Kata kunci : pengaturan transhipment, penanganan illegal fishing, konvensi hukum laut 1982

342
FAD
k

KEDUDUKAN IDEAL LEMBAGA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Fadly Ilham. 1410111138. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Hukum Tata Negara (PK VI). 79 Halaman. Tahun 2018

ABSTRAK

Salah satu lembaga penegak hukum yang mempunyai peran strategis bagi penegakan hukum di Indonesia adalah Lembaga Kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan. Sedangkan Jaksa bekerja atas nama rakyat dalam melakukan tugasnya menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Kejaksaan sendiri sebenarnya adalah salah satu lembaga yang penting secara konstitusional karena lembaga ini adalah satu-satunya yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan (dominus litis) yang bertindak sebagai penegak hukum dan satu-satunya lembaga pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar) di wilayah kekuasaan kehakiman. Sebagai lembaga pemerintah, menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya dan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Namun, hal ini tidak senada dengan apa yang terjadi di lapangan, seringkali menurut banyak pandangan, pemerintah selaku eksekutif yang dipegang oleh Presiden yang mempunyai hak mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung, banyak melakukan intervensi di dalam kelembagaan Kejaksaan atau dapat dikatakan Kejaksaan tidak dapat bekerja secara mandiri. Dengan melihat uraian tersebut, penting kiranya mendudukkan kembali kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sehingga kita dapat mengetahui bagaimana seharusnya kedudukan ideal Kejaksaan untuk memperkuat independensi institusi Kejaksaan itu sendiri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis- normatif penulis memperoleh kesimpulan bahwasanya kedudukan Kejaksaan terkesan sangat mendua dalam sistem ketatanegaraan kita, ditambah lagi kurang efektifnya Komisi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan dan potensialnya pemilihan Jaksa Agung hanya menjadi politisasi Jabatan semata. Melihat kepada kesimpulan tersebut, maka penulis membagi kepada tiga hal yang harus benar-benar diperhatikan untuk mencapai kedudukan yang lebih ideal bagi lembaga Kejaksaan yaitu: 1) Memperjelas posisi Lembaga Kejaksaan di dalam Konstitusi 2) Perlu adanya sebuah aturan hukum setingkat Undang-undang untuk mengatur Komisi Kejaksaan 3) Perlu adanya campur tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemilihan Jaksa Agung melalui proses pemilihan yang terbuka dan transparan.

Kata Kunci : Indenpendensi, Kekuasaan Penuntutan, Lembaga Kejaksaan, Kedudukan Ideal

346
FAD
t

TANGGUNG JAWAB UD CEMPAKA MOBILINDO PADANG TERHADAP BARANG CACAT AKIBAT KELALAIAN DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN

Faldi Fahlevi, 1110112062, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK I (Hukum Perdata), 57 halaman, Tahun 2018

ABSTRAK

Dalam suatu perjanjian kerjasama perlu adanya hubungan timbal balik antara para pihak yang melaksanakan perjanjian. Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh UD Cempaka Mobilindo Padang dengan MNC Finance yakni perjanjian dalam hal pengadaan barang (mobil) sebagaimana permintaan konsumen yang ketentuan-ketentuan pelaksanaanya diatur dalam perjanjian tersebut. Adapun rumusan masalah dari skripsi ini yaitu Bagaimana Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama UD Cempaka Mobilindo Padang dengan MNC Finance Dalam Pembiayaan Konsumen serta Bagaimana tanggung jawab UD Cempaka Mobilindo Padang terhadap barang cacat akibat kelalaian dalam Pembiayaan Konsumen. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian pada UD Cempaka Mobilindo Padang. Adapun sumber data yang penulis gunakan yaitu data sekunder dan data primer. Data Sekunder diperoleh melalui studi dokumen atau dengan penelitian kepustakaan sehingga diperoleh data awal untuk menunjang pelaksanaan penelitian di lapangan. Sedangkan data primer dengan studi lapangan dengan teknik wawancara kepada nara sumber ataupun informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan pertama, Pelaksanaan perjanjian kerjasama UD Cempaka Mobilindo Padang dengan MNC Finance telah sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kedua, bentuk tanggung jawab dari UD Cempaka Mobilindo terhadap barang cacat dalam hal pengadaan barang yaitu berupa ganti kerugian dengan membeli kembali barang yang cacat tersebut sebagai mana yang telah diatur di dalam isi perjanjian.

345
FAD
p

PELAKSANAAN MEDIASI PENAL OLEH ADVOKAT SEBAGAI PENDAMPING KORBAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG)

Faldo Andrea.1410111070.Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK IV (Hukum Pidana.88 Halaman.Tahun 2018)

ABSTRAK

Mekanisme mediasi yang merupakan bagian dari alternative dispute resolution (ADR) selama ini hanya dikenal dalam ranah hukum privat. Kini mediasi mulai banyak dipraktikkan untuk menyelesaikan perkara pidana, khususnya tindak pidana KDRT, karena adanya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif. Advokat juga memiliki peranan dalam menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan. Penyelesaian melalui mediasi penal adalah langkah awal dari tugas advokat dan merupakan salah satu bentuk pemberian bantuan hukum. Adapun dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan masalah yaitu pertama, bagaimana pelaksanaan mediasi penal oleh Advokat sebagai pendamping korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di Lembaga Bantuan Hukum Padang. Kedua, apa kendala yang ditemui oleh advokat sebagai pendamping korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT dan upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris. Penelitian ini dilakukan dengan terjun lapangan untuk memperoleh data primer dan sekunder berupa hasil wawancara dengan narasumber, berupa buku dan dokumen terkait skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pelaksanaan mediasi penal dapat dilakukan pada tahap penyidikan. Dalam pelaksanaan mediasi penal, advokat dapat memberikan bantuan hukum yang terbagi atas tiga yaitu, bantuan hukum yang diberikan pada saat sebelum proses mediasi, pada saat proses mediasi, dan setelah proses mediasi. Akibat hukum dari mediasi penal ini hanya mengikat pihak yang bersangkutan. Hasil yang didapat dari mediasi penal yaitu berupa surat perjanjian perdamaian. Kendala yang ditemukan oleh Advokat dalam pelaksanaan mediasi penal yaitu tidak adanya dasar hukum yang kuat sehingga dianggap belum efektif dan mediator yang cenderung tidak mengerti akan tugasnya. Upaya yang dapat dilakukan oleh Advokat yaitu berusaha semaksimal mungkin menjadikan mediasi penal sebagai sarana yang efektif sehingga tidak merugikan korban, serta dapat menyampaikan hak-hak yang diinginkan korban. Dan juga mengusulkan kepada kepolisian untuk yang bertindak sebagai mediator haruslah seorang yang paham akan konteks KDRT.

345
FAR
p

PERANAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENANGGULANGAN KASUS PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BIARO BUKITTINGGI

Faradila, 1410111139, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 71 Halaman

ABSTRAK

Penyelundupan dapat diartikan yaitu pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang- barang terlarang termasuk narkotika. Kasus penyelundupan narkotika pernah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi pada tahun 2016 yang dilakukan oleh terpidana Febri Bin Syafri pgl Febri. Kemudian kasus ini diketahui oleh petugas lapas karena mencurigai gerak gerik dari salah satu pengunjung yang bernama Febri. Sehingga Petugas Lembaga Pemasyarakatan melakukan penggeledahan terhadap Febri dan ternyata ditemukanlah narkotika jenis sabu- subu di dalam barang bawaannya. Untuk itu permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana Peranan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi ? (2) Apa saja Kendala yang dihadapi oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengelolaan data dilakukan dengan cara editing terhadap data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan peranan Petugas Lapas dalam penanggulangan penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi sudah berperan tetapi belum maksimal, dapat dilihat dari upaya atau kinerja yang dilakukan oleh petugas Lapas dalam penanggulangan penyelundupan narkotika yaitu upaya preventif berupa memaksimalkan penggeledahan, membatasi dan melarang petugas yang lepas Dinas, meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu SDM petugas lapas dan melakukan pembinaan terhadap setiap narapidana serta upaya represif. Dan kendala yang dihadapai oleh Petugas Lapas dalam penanggulangan penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Biaro Bukittinggi adalah keterbatasan sarana dan prasarana penunjang program kerja, kurangnya mutu SDM petugas serta kurangnya jumlah petugas Lapas dan minimnya dana yang diberikan oleh pemerintah.

344.09
FAR
p

PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT DALAM PERLINDUNGAN PENYIARAN KONTEN BUDAYA LOKAL MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Faris Aziz Hazri, 1110112006, Fakultas hukum, Universitas Andalas, 2018, Pembimbing : Drs. Intihzam Jamil, SH, MS., Feri Amsari, SH, MH, LLM.

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia memiliki hak yang sebebas-bebasnya dalam pengembangan diri dengan mendapat Pendidikan dan pengetahuan tentang kebudayaan yang seluas-luasnya sesuai dengan isi pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur bahasa dan unsur teknologi merupakan unsur-unsur yang perkembangannya pesat dan beriringan. Dalam upaya mempertahankan kebudayaan itu sendiri unsur bahasa dan unsur teknologi saling terkait satu sama lain dimana dengan bahasa kita dapat berkomunikasi dengan baik antar manusia dan dibantu dengan kemajuan teknologi itu sendiri maka dapat di pertahankannya suatu kebudayaan dari generasi ke generasi. Teknologi radio saat ini merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Indonesia dalam pengaplikasian unsur bahasa dan unsur teknologi dalam upaya mempertahankan kebudayaan itu sendiri seperti halnya tertulis dalam pasal 4 Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Lembaga Penyiaran Swasta PT Radio Alsomk Jalo Maradio (Star Radio) merupakan salah satu lembaga penyiaran yang aktif dalam kegitan penyairan dikota Padang Sumatera Barat, dalam melakukan kegiatan penyiaran stasiun radio ini selalu menyiarkan segala sesuatu hal yang baru sehingga terlupakannya kepentingan mempertahankan konten budaya dalam melakukan penyiarannya dan berpendapat bahwa menyediakan konten acara tidak terkhusus dengan adat istiadat. Lembaga penyiaran star radio tersebut melakukan hal tersebut dikarenakan bahwa fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat yang tidak maksimal dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengawasa dan pengatur penyiaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hal tersebut dikarenakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat terkendala oleh pengadaan modal untuk menjalankan kewajibannya, dimana pada tahun 2018 ini KIPD Sumatera Barat tidak lagi mendapat kucuran dana dari pemerintah daerah, karena alesan tersebut lah Fungsi pengawasan dan pengaturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat tidak dapat melaksanakan perannya untuk melindungi penyiaran konten budaya lokal menurut Undang-Undang Dasar 1945.

341
FAU
p

PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PERWAKILAN DIPLOMATIK TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI MALAYSIA

Fauzi Gunawan, 131O11154, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018, 56 halaman) Pembimbing : Dr. Najmi. SH, MH dan Hj. Magdariza. SH, MH

ABSTRAK

Perwakilan Diplomatik Repubik Indonesia di negara penerima adalah mewakili Negara Indonesia untuk melindungi kepentingan negara dan Warga Negara Indonesia. Tindak pidana pembunuhan yang disangkakan terhadap Siti Aisyah di Negara Malaysia merupakan salah satu kasus yang menjadi pokok dalam pembahasan ini. Didasari hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk meneliti tentang "Perlindungan Hukum oleh Perwakilan Diplomatik terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana di Malaysia". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis (normatif) dengan menekankan aspek hukum berkenan dengan penerapannya. Jenis data yang digunakan data Sekunder melalui peraturan Internasional dan Nasional negara serta melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perwakilan Diplomatik yang berada di negara Malaysia telah mengupayakan dalam berbagai hal bantuan hukum terhadap warga negara Indonesia termasuk Siti Aisyah yang melakukan tindak pidana di negara Malaysia. Karena pentingnya suatu pemberitahuan kepada diplomat ataupun pos konsuler terhadap kasus hukum yang tengah dialami oleh warga negara di negara penerima, dan jika pemberitahuan tersebut tidak dijalankan akan terjadinya kesenjangan hukum bagi warga negara dikarenakan otoritas dari negara Malaysia tidak menjalankan kewajiban yang sebagaimana mestinya harus dilakukan oleh negara penerima yang terdapat pada Konvensi Wina 1963. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain harus adanya kerja sama semua pihak, mulai dari Warga Negara Indonesia yang menetap lama ataupun sementara di negara Malaysia dengan menjaga tingkah laku dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum agar tidak mendapatkan sanksi yang berakibat di hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku di wilayah hukum negara Malaysia, serta perwakilan diplomatik Indonesia yang bertugas melindungi kepentingan warga negara agar selalu memprioritaskan kepentingan negara maupun warga negara nya dan juga terhadap pemerintah Malaysia yang sebaiknya agar selalu konsisten dalam menjaga hubungan baik antar kedua negara dalam bidang apapun.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Warga Negara Indonesia, tindak pidana pembunuhan.

342
FAU
e

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN PT SARANA SUMATERA BARAT VENTURA MELALUI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PADANG

Fauzia Putri Utami, 141011207, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018, 65 Halaman

ABSTRAK

Modal ventura merupakan salah satu lembaga pembiayaanyang menjadi sumber pendanaan bagi masyarakat. Salah satunya PT Sarana Sumatera Barat Ventura (PT SSBV) Pada saat memberikan fasilitas pembiayaan, terlebih dahulu melakukan perjanjian pembiayaan yang diikuti dengan perjanjian pengikatan jaminan salah satunya adalah hak tanggungan. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tentu ada pasangan usaha yang melakukan wanprestasi sehingga perusahaan modal ventura pada akhirnya mengeksekusi dan menjual dengan sistem lelang jaminan tersebut sebagai pelunasan utang pasangan usaha yang didasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan. Lelang dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi hak tanggungan pada lembaga pembiayaan PT SSBV melalui KPKNL Padang. (2) Apa hambatan yang ditemui oleh lembaga pembiayaan PT SSBV pada pelaksanaan eksekusi hak tanggungan melalui KPKNL Padang serta upaya untuk mengatasinya. (3) Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa lembaga pembiayaan PT SSBV dalam melaksanakan eksekusi hak tanggungan merujuk pada peraturan perundang-undangan. Adapun hambatan yang ditemui oleh PT SSBVsejauh ini tidak ada, namun ada beberapa hal saat pengisian dokumen permohonan lelang yang dapat menjadi hambatan. Upaya untuk mengatasinya ialah menigisi semua data dengan teliti. Hambatan yang ditemui KPKNL Padang tidak ada namun kemungkinan yang dapat terjadi yakni adanya gugatan terhadap objek lelang. Upaya yang dapat dilakukan KPKNL Padang untuk mengatasinya ialah harus memastikan bahwa objek jaminan tersbut free and clear. Pihak PT SSBV selaku pihak penjual wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila PT Sarana Sumatera Barat Ventura dan KPKNL Padang menemukan hambatan dalam proses lelang hak tanggungan segera untuk dapat diatasi dengan menemukan solusi terbaik.

Kata kunci: Modal Ventura, Hak Tanggungan, Eksekusi.

345
FEB
p

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang No.15/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Pdg)

Febri Hardiman Fitra, 1410111101, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana), 70 Halaman, 2018

ABSTRAK

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan memiliki dasarpertimbangan tersendiri dengan memperhatikan kebutuhan terdakwa anak, Karena hukuman yang diberikan kepada terdakwa anak tetap harus memperhatikan kepentingan si anak yang sejalan dengan sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, dan juga memperhatikan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1) huruf e yang menegaskan bahwa Pidana Penjara merupakan alternatif terakhir yang seharusnya diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur? (2) Bagaimana hubungan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusanpidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidanapencabulan anak dibawah umur dengan teori pemidanaan? Penulis memfokuskan penelitian pada putusan pidana penjara yang diberikan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang No.15/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Pdg. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis empiris. Adapun hasil penelitian tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur adalah: seperti hal yang memberatkan dan yang meringankan, keyakinan Hakim, umur anak saat melakukan tindak pidana, alat-alat bukti dipersidangan, dan melihat saran ataupun hasil dari Penelitian Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Ditinjau dari hubungan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusanpidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidanapencabulan anak dibawah umur dengan teori pemidanaan hakim anak dalam hal ini menggunakan atau menerapkan teori gabungan.

Kata kunci: pertimbangan hakim, anak pelaku pencabulan, putusan pidana penjara

345
FEN
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL (Studi Kasus Polres Kota Payakumbuh)

Feni Fionita, 1210111041, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 51 + vi Halaman, Tahun 2018, Pembimbing : Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H. dan Tenofrimer, S.H., M.Si.

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraan. Pasal 59A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan pasal 90 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah 1. Bagaimana proses perlidungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual,2. Apa saja hambatan yang di temui oleh aparat penegak hukum dalam proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahtan seksual, 3. Bagaimana upaya aparat penegak hukum untuk mengatasi kendala dalam proses perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh diolah dengan metode editing dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Polres Kota Payakumbuh yaitu :Merahasiakan identitas korban,Memberikan keterangan tanpa tekanan,Bebas dari pertanyaan yang menjerat, Adanya upaya rehabilitasi,Korban berhak mendapat bantuan hukum,Pemeberian perlindungan dan perdampingan pada saat proses penyidikan,Berhak mendapatkan informasi perkembangan kasus,Mengawasi keselamatan anak dengan menjamin adanya penjagaan atau pengawasan dari pihak kepolisian.Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian adalah Sulitnya mengumpulkan bukti- bukti yang cukup,Keterangan korban yang tidak terus terang, Rasa takut dari pihak korban karna mendapat ancaman dari pelaku, Saksi yang tidak datang pada saat pemeriksaan,Sarana dan prasarana yang kurang memadai.Upaya dalam mengatasi kendala-kendalanya adalah yaitu:Memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan,Melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang undangan tentang perlindungan anak,Penangkapan terhadap pelaku, Menempatkan korban di ruangan khusus di PPA selama melakukan penyidikan.

345
FER
p

PELAKSANAAN PROSES PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

FERA MURSALINI, 1410111145, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 81 Halaman, 2018

ABSTRAK

Kejaksaan sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam bidang penuntutan mempunyai peran yang sangat penting dalam terciptanya keadilan, artinya lembaga kejaksaan dituntut untuk bersikap profesional dalam menangani setiap kasus tindak pidana, apapun bentuknya, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang. Dalam skripsi ini, perumusan masalah yang dibahas adalah: a). Bagaimana pelaksanaan proses penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang. b). Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang. c). Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan proses penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis (empiris) yaitu pembahasan yang dititikberatkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku serta melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: a) Proses penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang dimulai dari dikirimnya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari penyidik ke kejaksaan sampai dengan tahap penuntutan di persidangan oleh penuntut umum. b). Terdapat beberapa kendala yang ditemui penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang, diantaranya: terjadinya bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum, pada tahap pemeriksaan saksi penuntut umum tidak dapat menghadirkan salah seorang saksi. c) Upaya yang dilakukan penuntut umum untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana perdagangan orang, yaitu dimulai dari Jaksa Penuntut Umum memberikan dan menjelaskan petunjuk secara rinci dan jelas kepada penyidik mengenai hal apa saja yang kurang lengkap dari be rkas perkara tersebut, hingga mengenai pada tahap pemeriksaan saksi penuntut umum tidak dapat menghadirkan salah seorang saksi dimuka persidangan, penuntut umum melakukan upaya dengan membacakan keterangan saksi yang tertera di BAP saksi di persidangan.

Kata Kunci: Penuntutan, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kejaksaan.

345
FHA
p

PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Fhasradil Adha, 1410111121, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV, Hukum Pidana, 2018, 100 halaman

ABSTRAK

Dewasa ini anak sering menjadi korban kejahatan orang dewasa. Sebagai respon banyaknya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakahpidana kebiri kimia sesuai diterapkan di Indonesia jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan bagaimana pendapat para ahli dan tokoh masyarakat mengenai pidana kebiri kimia yang akan diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak? Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitianyuridis normatif yang menekan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pidana kebiri kimiawi di Indonesia tidak sesuai dengan konstitusi yang ada saat ini dikarenakan pidana kebiritidakhanya memberikan penyiksaanuntukmenimbulkanefek jera, tetapimenimbulkanefek lainbagipelaku tindak perkosaan anak.Pidana kebiri secara kimia dianggap tidak sesuai dengan Konvensi Internasional ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) dan CAT (Civil and Political Rights) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia. Pendapat para ahliterkait pemberlakuan pidana kebiri kimiawi terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak yakni dengan pidana kebiri kimiawi ini, akan mengakibatkan si penderita mengalami penyiksaan yang sangat menyakitkan baik dalam waktu dekat maupun waktu yang lama. Pidana kebiri kimiawi menunjukkan cara pikiran balas dendam yang merupakan hukuman yang sudah lama ditinggalkan, dan korban akan mengalami perubahan mental, psikologis, sosial, perubahan fungsi otot, osteoporosis, dan organ kognitif lainnya.

Kata Kunci :PidanaKebiri Kimia,TindakPidanaPerkosaan, Anak.

346
FIF
p

PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA MASYARAKAT SUKU TANJUNG NAGARI MANGGOPOH DENGAN PT. MUTIARA AGAM (KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 14/Pdt.G/2008/PN.LB.BS)

Fifi Ofianimalta: 1410111155 : Fakultas Hukum Universitas Andalas: 61 Halaman, Tahun 2018

ABSTRAK

Putusan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijrde) apabila terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum lagi. Putusan pengadilan tidak akan mempunyai arti bila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dapat dimohonkan eksekusi. Namun pada kenyataannya tidak semua keputusan tersebut dapat di eksekusi. Hal ini disebabkan karena objek atau isi putusan tidak jelas atau adanya perlawanan dari pihak ketiga atau karena putusan tersebut tidak memenuhi syarat. Bahkan dimungkinkan adanya usaha-usaha dari tereksekusi (pihak yang kalah) untuk menghambat atau menggagalkan eksekusi tersebut, salah satunya adalah berkaitan dengan adanya permintaan permohonan Peninjauan Kembali. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa dan membahas permasalahan yang telah dirumuskan, yakni untuk mengetahui pelaksanaan terhadap putusan hakim dalam sengketa tanah ulayat, kemudian untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam pelaksanaan putusan. Berkaitan dengan tujuan yang dirumuskan, maka dalam membahas permasalahan tersebut digunakan metode yuridis-empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Basung sudah melakukan upaya pelaksanaan putusan pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap lahan yang menjadi objek sengketa sesuai dengan surat perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sampai hari ini Pengadilan Negeri Lubuk Basung belum lagi melakukan eksekusi dari lahan objek sengketa di karenakan beberapa faktor penghambat, pada putusan Mahkamah Agung PT. Mutiara Agam di putuskan untuk kembali menyerahkan hak milik kepada penggugat atau dapat disebut sebagai pihak yang menang dalam pengadilan, jika PT. Mutiara Agam tidak mengindahkan kewajibannya seperti yang tertera dalam surat putusan dari Mahkamah Agung pada upaya hukum peninjauan kembali maka perbuatannya tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum seperti yang tertera dalam Pasal 1365, dan dapat di jatuhkan sanksi kembali kepada pihak tergugat yang kalah di Pengadilan Negeri Lubuk Basung. Sampai saat ini bangunan-bangunan beserta tanaman kelapa sawit yang berada di wilayah PT. Mutiara Agam itu sendiri masih tampak berdiri kokoh dan tetap menjalankan proses produksinya, yang sebagaimana mestinya lahan objek sengketa sudah kembali kepada pemiliknya sesuai dengan putusan pengadilan.

Kata kunci : Pelaksanaan Putusan, Tanah Ulayat.

342
FIK
p

PENGATURAN KAWASAN LINDUNG DAN PELAKSANAANNYA DI KOTA PADANG

Fikri Alkadri, 1210112186, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, , 57 halaman.

ABSTRAK

Ruang yang berada di suatu negara pada umumnya digunakan dalam pembangunan suatu negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dimana menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salahsatu bentuk penguasaan negara adalah dengan melaksanakan penetapan kawasan lindung dan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.Sementara kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Oleh karena itu penulis mengkaji mengenai; 1) Bagaimanakah pengaturan kawasan lindung dan pelaksanaannya di Kota Padang?, 2) Apa saja hambatan dalam peraturan pelaksanaan kawasan lindung di Kota Padang dan bagaimana penanggulangannya?. Penulis menggunakan metode penelitian yang bersikap pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padang, Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan penelitian memperlihatkan bahwa Pengaturan kawasan lindung sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 telah di laksanakan di Kota Padang dalam wujud Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030. Dalam pelaksanaan kawasan lindung terdapat hambatan, yaitu kepemilikan hak atas tanah dimana hutan Kota ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berstatus hak milik dan hak ulayat masyarakat. Hambatan lain adalah tindakan oknum yang melakukan perbuatan melawan hukum yang membantu pelaku penebangan liar (illegal logging) dan juga hambatan dari sarna dan prasarana dalam penegakan peraturan.

Kata kunci : Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Kawasan Lindung, dan Kawasan Budidaya.

345
FIT
f

FAKTOR PENYEBAB LARINYA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BUKITTINGGI

Fitri Mutia Sani.10111107. Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK IV Hukum Pidana.58 Halaman.Tahun 2018.

ABSTRAK

Dengan telah diaturnya hak dan kewajiban narapidana, serta telah dilakukannya program pembinaan oleh Lapas, harusnya membuat narapidana dapat hidup dengan tenang dan berproses dengan baik menuju manusia yang seutuhnya yang paham akan norma. Namun pada kenyataannya ditemukan berbeda, fungsi lembaga pemasyarakatan nampaknya baru sebatas harapan dalam undang-undang saja. Terbukti dengan masih banyaknya dijumpai pemberitaan yang justru menggambarkan keadaan terbalik dari apa yang diharapkan undang-undang. Banyak permasalahan yang timbul di dalam Lembaga pemasyarakatan salah satunya adalah narapidana yang melarikan diri. Hal ini tentunya disebabkan faktor-faktor, baik dari dalam maupun luar, tentunya yang berkaitan lansung dengan si narapidana. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) apakah faktor penyebab narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi? 2) Bagaimanakah upaya menanggulangi narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi?. Dalam penelelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis(Socio Legal Research) dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (Perundang-undangan) yang berlaku dikaitkan dengan prakteknya dilapangan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumen dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskiptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa faktor penyebab larinya narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi ada dua faktor, yaitu : faktor Eksternal dan Internal.1) faktor eksternal diantaranya kondisi bangunan lapas, kelemahan keamanan dalam lapas, kelalaian petugas dan kelebihan kapasitas, 2) faktor internal yaitu lari dari masalah dan tanggungjawab serta masa tahanan yang lama , dan merasa jenuh dan bosan. Sedangkan upaya yang dilakukan ada tiga yaitu upaya pre-metif, preventif dan represif. 1) Upaya Premetif merupakan upaya awal yang dapat dilakukan seperti penanaman moral yang baik untuk narapidana 2)Upaya preventif seperti berupa penambahan petugas dengan memberikan pelatihan serta memperbaiki bangunan dan fasilitas keamanan lapas, dan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3) Upaya represif yaitu penindakan, penjatuhan hukuman disiplin dan adanya bantuan keamanan.

342
FRE
p

PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK PADA PT.GOJEK INDONESIA DI KOTA PADANG

Frederick Estefan, BP 1110113154, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara ((PK VIII). 2018. 67 Halaman

ABSTRAK

Dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat modern pada saat sekarang ini telah lahir suatu inovasi yang diluncurkan oleh anak bangsa bernama Nadiem Makarim dan Michael Angelo Moran, mereka meluncurkan teknologi berbasis aplikasi yang dimana aplikasi tersebut digunakan untuk mengorder ojek via online, usaha tersebut bernama PT. GO- JEK Indonesia, PT GO-JEK online sangat mempermudah masyarakat untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lain hanya dengan cara menggunakan aplikasi berbasis jaringan internet. PT GO-JEK online di Kota Padang dalam menjalankan usahanya sebagai angkutan orang dan transportasi umum menggunakan kendaraan bermotor roda dua (2). Dalam pengoperasiannya PT. GO-JEK Kota Padang mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelengaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, sedangkan dalam pelaksanaan nya masih terdapat permasalahan dan kendala-kendala yang terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelengaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada PT GO-JEK Indonesia di Kota Padang?. 2) Apa saja kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada PT GO-JEK Indonesia di Kota Padang?. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersifat Yuridis Sosiologis, kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan PerMenhub nomor 108 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek pada PT GO-JEK Indonesia di Kota Padang belum berjalan dengan sesuai aturan. Hal ini disebabkan oleh PT. GO-JEK Indonesia dan driver yang tergabung pada PT. GO- JEK Indonesia yang merasa keberatan akan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018. Serta kurang tegasnya pemerintah dalam menegakkan peraturan yang sudah ada.

Kata Kunci: Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, PT. GO-JEK Indonesia Kota Padang.

345
FUA
p

PIDANA KERJA SOSIAL DALAM RKUHP DITINJAU DARI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Fuad Arsalan, 1310111045, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 92+ vii Halaman , Tahun 2018

ABSTRAK

Pembaharuan pemidanaan sebagaimana pembaharuan hukum pidana selalu mengikuti perubahan sosial. Pemidanaan, baik jenis, tujuan maupun pedoman pemidanaan akan dituntut untuk berubah dikala masyarakat mengalami perubahan. Perubahan sosial membawa dampak pada perubahan pemahaman terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Ada nilai-nilai yang tetap dipertahankan sebagai nilai sakral yang tidak berubah walau zaman berubah, ada juga yang termodifikasi dengan cara yang baru. berkembangnya pemikiran keadilan restoratif sebagai salah satu yg menandai perubahan pemahaman masyarakat dalam memandang suatu kejahatan dan pelaku kejahatan. pemikiran ini merupakan paradigma baru yang mencoba memberdayakan pelaku, korban dan masyarakat didalam proses pemidanaan yang bekerja dalam sistem peradilan pidana. pemikiran ini juga diadopsi oleh para perumus Rancangan KUHP dalam membentuk tujuan pidana pemidanaan yang efektif, manusiawi dan bersifat memulihkan keseimbangan masyarakat, rumusan ini terlihat dengan dikenalnya jenis pidana baru berupa pidana kerja sosial yang diatur dalam Rancangan KUHP Nasional. jenis pidana ini dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang mulai diragukan efektivitasnya , dalam pidana kerja sosial ini terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah di samping untuk menghindari efek destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan. Peranan masyarakat dibutuhkan secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. untuk itulah penilitian ini dilakukan. dengan metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : Rancangan KUHP 2015 memuat rumusan tujuan pidana dan pemidanaan dan perubahan pada jenis pidana yang akan dijatuhkan salah satunya diaturnya jenis pidana kerja sosial disertai dengan pedoman pemidanaan yang nantinya menentukan Pelaksanaan Pidana kerja sosial, menemukan perbandingan pengaturan dan pelaksanaan pidana kerja social di berbagai negara guna mencari persamaan dan perbedaan, serta kekurangan Rancangan KUHP dalam pengaturan kerja social yang wajib di sempurnakan oleh pemerintah. Kemudian melihat keterkaitan pidana kerja sosial dengan pemikiran pendekatan keadilan restoratif. Pada giliranya pendekatan keadilan restoratif sebagai salah satu tujuan pemidanaan merupakan pemikiran yang tepat diterapkan dalam proses pelaksanaan pidana kerja social karena dasar pemikiran dalam konsep ini sejalan dengan tujuan dari keadilan restoratif dan dimunculkannya ide tujuan pemidanaan baru dan pidana kerja sosial tersebut.

UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BUKITTINGGI DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN PENGEMIS DI KOTA BUKITTINGGI

Febraningsih, 1310111189, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65+i+vi hlm, 2017

ABSTRAK

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Jika dibiarkan terjadi secara terus menerus, bentuk pelanggaran akan mengancam ketentrama hidup bermasyarakat. Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota besar di Sumatera Barat. Kota ini seringkali dikunjungi karena pesona wisatanya yang khas dan penduduknya yang terkenal ramah. Selain itu kota ini juga menjadi salah satu pusat grosir terbesar di Pulau Sumatera yang membuat kota ini seringkali dikunjungi banyak orang disetiap harinya. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para pengemis yang berasal dari luar Kota Bukittinggi untuk mengemis di kota ini. Keberadaan para pengemis ini perlu mendapat perhatian yang serius karena jika tidak fenomena ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari yang dapat melahirkan masalah – masalah baru yang timbul sebagai gejala sosial dalam masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bukittinggi sebagai aparat penegak hukum, telah melakukan upaya penanggulangan pengemis sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam penulisan skripsi ini, masalah yang diteliti adalah :1) Upaya Satpol PP Kota Bukittinggi dalam melakukan penanggulangan pengemis 2) Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Bukittinggi dalam melakukan penanggulangan pengemis. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Satpol PP Kota Bukittinggi bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi telah melakukan upaya penanggulangan seperti penjaringan para pengemis, memberikan sosialisasi dan arahan untuk tidak mengemis, juga pengembalian pengemis ke daerah asalnya. Pemerintah juga melakukan himbauan kepada warga Kota Bukittinggi agar tidak memberikan uang kepada pengemis. Dalam upaya penanggulangan ini terdapat beberapa kendala yaitu anggaran yang kurang memadai, tidak tersedianya sarana untuk pembinaan lanjutan, sikap permisif akan pengemis juga sikap malas dan tidak mandiri dari pengemis sendiri yang membuat terkendalanya upaya penanggulangan pengemis.

347.05
FER
p

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM MELALUI PROGRAMPENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG

Feronika, 1620123022, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 130 Halaman

ABSTRAK

Tanah ulayat kaum merupakan tanah yang diperoleh secara turun temurun yang penguasaan dan pemanfaatanya diatur oleh Mamak Kepala Waris. Ini semuanya diperoleh tanpa surat menyurat atau secara tertulis, hanya dengan mengetahui batas-batas secara alami dengan tanah milik orang lain. Di Kota Padang khususnya di Kecamatan Bungus Teluk Kabung sebagian besar tanah yang ada merupakan tanah ulayat.Tanah ulayat dipergunakan untuk kepentingan kaumnya. Dalam rangka mewujudkan kehadiran Negara di bidang pertanahan dengan memberikan jaminan kepastian hukum Hak Atas Tanah sebagai bukti hak kepemilikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19UUPA, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.Salah satu cara yang ditempuh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasionaladalah melalui program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang dilaksanakan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang mendapat target 1.100 bidang. Rumusan masalah dalam Penulisan ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkapdi Kecamatan Bungus Teluk Kabung. 2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, pelaksanaan pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.sulit dilaksanakan dan tidak mencapai target hal ini karena ditemui beberapa kendala- kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum tersebut sehingga tanah ulayat kaum belum bisa didaftarkan ke Kantor Pertanahan.Kendala-kendala yang timbul diantaranya adalah mengenai subyeknya yaitu atas nama siapa sertipikat itu didaftarkan apakah atas nama Mamak Kepala Waris, atas nama salah satu anggota kaum atau atas nama Mamak Kepala Waris beserta anggota kaum karena pada umumnya dilapangan banyak yang mendaftarkan atas nama salah seorang anggota kaum tanpa diketahui oleh Mamak Kepada Waris beserta anggota kaum lainya. Kendala yang lainya adalah tidak dilibatkannya Mamak Kepala Waris, dan Kerapatan Adat Nagari dalam proses pendaftaran tanah tersebut.

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Tanah, Ulayat Kaum,

346
GEM
p

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERANGKATAN IBADAH UMRAH ANTARA BIRO PENYELENGGARA IBADAH UMROH DENGAN CALON JEMAAH (STUDI PADA PT. BUMI MINANG PERTIWI)

Gemi Rakha Ediwar. 1410112117. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Program Kekhususan Hukum Perdata Murni. Tahun 2018

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak dalam memberangkatkan jemaah umrah dalam setiap tahunya. Seiring dengan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk dapat melakukan ibadah umrah tersebut juga menimbulkan banyaknya masalah tidak berangkatnya calon jemaah umrah. Seperti yang terjadi pada PT. Bumi Minang Pertiwi selaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang gagal memberangkatkan calon jemaah umrahnya sebanyak 1.632 orang jemaah pada periode keberangkatan bulan November 2017 – April 2018. Perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Apa Penyebab Ketidak Berangkatanya Calon Jemaah Umrah Oleh PT. Bumi Minang Pertiwi, Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah Antara Calon Jemaah Umrah dengan PT. Bumi Minang Pertiwi, dan Bagaimana Upaya Penyelesaian Persoalan Yang Terjadi Terkait Tidak Berangkatnnya Calon Jemaah Umrah Oleh PT. Bumi Minang Pertiwi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, PT. Bumi Minang Pertiwi gagal memberangkatkan jemaah umrahnya ke Arab Saudi dikarekan tidak adanya tiket keberangkatan menuju Arab Saudi. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaksaan perjanjian perjalanan umrah antara calon jemaah dengan BMP adalah dengan dikeluarkannya surat peringatan dari Kementerian Agama yang menyatakan bahwa BMP telah wanprestasi terhadap perjanjian pemberangkatan umrah karena kelalainnya maka BMP diwajibkan untuk bertanggung jawab memberangkat kembali jemaah yang gagal berangkat dan tidak dibolehkan menerima jemaah umrah baru hingga diberangkatkan kembali jemaah yang gagal berangkat sebelumnya. Upaya Penyelesian yang dilakukan oleh BMP dengan memberangkatkan kembali jemaah yang gagal berangkat sebelumnya dengan tambahan sejumlah biaya yang dibebankan kepada jemaah tersebut melalui bantuan biro perjalanan umrah yang bermitra dengan BMP.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, Kementerian Agama, PT. Bumi Minang Pertiwi

342
GEN
p

PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MENGEMUDI DI KOTA PADANG

Geni Rilfa Ramadhan, 1110112157, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 Halaman, 2018

ABSTRAK

Hingga bulan April 2018 terdapat 9 penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Padang, namun 4 diantaranya belum memperpanjang izin sehingga melanggar ketentuan yang berlaku. Adapun pemasalahan yang penulis bahas yaitu bagaimana pelaksanaan pengawasan izin, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Proses Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kepariwisataan, Sarana Kesehatan, Sosial dan Ketenegakerjaan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, kemudian melihat penerapan prakteknya di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan izin terhadap penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi di Kota Padang yang masuk kedalam aturan izin untuk lembaga pelatihan kerja, belum sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016. Hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Padang tidak dilaksanakan secara berkala 6 bulan sekali. Akibatnya pengawasan izin dari penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi di Kota Padang hanya dilakukan saat masa berlaku izin selama 3 tahun akan habis. Tindak lanjut dari hasil pengawasan terhadap penyelenggara pendidikan dan pelatihan mengemudi di Kota Padang juga belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Tindak lanjut tersebut seharusnya dapat berupa sanksi administratif yang dimulai dari penghentian sementara pelaksanaan program pelatihan kerja, penghentian pelaksanaan program pelatihan kerja, atau pencabutan izin lembaga pelatihan kerja. Namun dalam praktiknya, lembaga pelatihan kerja di Kota Padang yang tidak memenuhi kewajibannya sudah terlebih dahulu bubar dikarenakan kepailitan dan kesulitan memenuhi berkas yang ada.

342
GEN
p

PERAN PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM PEMBANGUNAN SHELTER SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TSUNAMI

Geno Rilfa Ramadhan, 1110112159, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 57 Halaman

ABSTRAK

Negara Indonesia saat ini tercatat dengan daerah yang rawan bencana, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi terjadinya bencana sebelum atau setelah terjadinya bencana, agar hak konstitusi rakyat Indonesia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dari bencana. Sesuai isi Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Untuk itu pemerintah perlu mengantisipasi terjadinya bencana dengan mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi. Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No. 4 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana, sedangkan yang bertanggungjawab di Pemerintah kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD Kota Padang upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktur dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, salah satunya membangun struktur bangunan tahan gempa seperti Shelter. Adapun masalah yang diuji penulis adalah Peran Pemerintah dalam Pembangunan Shelter sebagai Upaya Penanggulangan Tsunami. Adapun tujuan tulisan ini adalah, Untuk mengetahui peran Pemerintah kota padang dalam pembangunan Shelter dan mengetahui kosekuensi hukum dan solusinya atas pembangunan shelter yang tidak memenuhi persyaratan hukum berlaku. Di Kota Padang bangunan shelter terletak di 74 lokasi zona merah terdampak tsunami. Terjadi bencana gempa dan tsunami. tidak semua shelter layak dijadikan tempat pengungsian apabila terjadi bencana gempa dan tsunami. Disebut tidak layak karena sarana dan prasarana belum memadai, termasuk faktor penunjang lainnya, seperti akses jalan menuju shelter, kapasitas shelter, serta daya tahan bangunan terhadap gempa. Hal tersebut jelas akan berdampak terhadap masyarakat apabila bencana itu terjadi, dan terlihat tidak adanya upaya maksimal pemerintah untuk meminimalisir risiko korban jiwa. Seharusnya adanya kordinasi yang jelas antar dinas yang melakukan pemeliharaan aset. sehingga dapat memastikan pemeliharaan yang dilakukan terhadap aset sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah dan swasta dan masyarakat untuk bersama sama dalam upaya penanggulangan resiko bencana tsunami, Dilakukannya revisi Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Panggulangan bencana, berkaitan tentang penanggulangan bencana secara spesifik, sebelum dan sesudah bencana itu terjadi khususnya tsunami yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas penyelamatan diri (shelter), juga memberikan Insentif dan Disentif dalam penyelenggaraan bangunan gedung di kawasan rawan tsunami di Kota Padang serta diharapkan pemerintah mempercepat dan konsisten dalam merealisasikan mengevaluasi kelayakan bangunan potensial shelter yang ada di kota padang.

342
GEV
p

PEMANFAATAN HUTAN MANGROVE UNTUK WISATA ALAM PADA KAWASAN MANDEH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Gevin Heri Putra, 1210113044, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 78 Halaman 2018

ABSTRAK

Dimanfaatkannya hutan mangrove di Kawasan Mandeh sebagai wisata alam maka akan berdampak pada daya tarik wisata di kawasan mandeh, sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatannya mengharuskan keterlibatan multi instansi dan sehingga perlu dikaji pemanfaatan hutan mangrove untuk Wisata Alam pada Kawasan Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan. Permasalahan yang dibahas, yaitu: (1) Bagaimanakah proses pemberian izin usaha Wisata Alam pada hutan mangrove Kawasan Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan ? (2) Bagaimanakah upaya penertiban terhadap pemanfaatan hutan mangrove sebagai usaha wisata alam pada Kawasan Mandeh Di Kabupaten Pesisir Selatan ? (3) Bagaimanakah upaya perlindungan terhadap hutan mangrove pada Kawasan Mandeh oleh pemerintah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan? Penelitian ini adalah yuridis empiris yang menekankan pada kenyataan lapangan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Penulisan ini bersifat deskriptif, yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai Pemanfaatan Hutan Mangrove Untuk Wisata Alam Pada Kawasan Mandeh Di Kabupaten Pesisir Selatan. Bedasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Belum ada proses perizinan terhadap kegiatan wisata alam di ekosistem hutan mangrove pada kawasan mandeh karena tidak adanya pengelola dan tidak ada kegiatan pembangunan fisik di wilayah ekosistem hutan mangrove teluk mandeh demi menunjang kegiatan wisata alam di ekosistem hutan mangrove Teluk Mandeh. Jika ada pengelola yang ingin memanfaatkan hutan mangrove Teluk Mandeh sebagai usaha wisata alam maka proses perizinan harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta. (2) Tidak adanya pengelola dan kebijakan-kebijakan mengenai pemanfaatan hutan mangrove untuk wisata alam pada Kawasan Mandeh maka tidak ada penertiban yang dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(3) Upaya perlindungan terhadap hutan mangrove pada kawasan mandeh yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bersifat preventif,persuasif dan represif dan upaya perlindungan terhadap hutan mangrove pada Kawasan Mandeh yang dilakukan UPT KPHP bersifat preventif dan persuasif.

Keyword : hutan mangrove, wisata alam, kawasan mandeh

347.05
GHA
i

IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN PADA PT BANK BCA TBK PADANG

GHALIB VERDITA PUTRA, 1410112040, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 Halaman, 2018

ABSTRAK

Dalam aktifitas bisnis, perjanjian sudah sangat sering digunakan. Perjanjian merupakan kegiatan dimana satu pihak atau lebih megikatkan dirinya dengan pihak lain atau lebih untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu dan berdasarkan kata- kata sepakat atau setuju. Perkembangan zaman membuat banyak perjanjian baru yang lahir bahkan perjanjian tersebut ada yang tidak diatur didalam KUH Perdata. Perjanjian yang tidak diatur didalam KUH Perdata biasa di sebut dengan perjanjian tidak bernama. Klausula baku merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak bernama. Klausula baku merupakan perjanjian yang isi dan bentuknya telah di tetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Klausula baku seringkali digunakan dalam dunia usaha khususnya dalam dunia perbankan. Klausula baku dianggap salah satu perjanjian yang efektif dan efisien dibandingkan perjanjian yang lain karena dibuat secara sepihak dan dapat diterbitkan secara masssal. Disisi lain, klausula baku bisa menimbulkan kerugian dan membebankan pihak konsumen karena konsumen tidak terlibat dalam pembentukan klausula tersebut. Didalam perbankan ada banyak sekali kegiatan perbankan yang menggunakan klausula baku, salah satunya penerbitan rekening tabungan beserta ATM, oleh karena itu Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia membuat sebuat peraturan yang bertujuan mencegah dan melindungi para nasabah dari klausula-klausula baku yang dapat merugikan nasabah.

346
GIA
p

PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI BERDASARKAN ALAS HAK SURAT KETERANGAN GANTI RUGI (SKGR) DI KOTA PEKANBARU

Gian Alan Trio, 1310112059, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 61 Halaman 2017

ABSTRAK

Pendaftaran Tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini. Tanah merupakan salah satu sumber penghidupan dan mata pencarian bagi manusia dan masyarakat sehingga menjadi kebutuhan manusia yang paling mendasar, dengan keyakinan betapa sangat dihargai dan bermanfaat tanah untuk kehidupan manusia, bahkan tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan. Adapun masalah yang dibahas dalam skripsi adalah, Pertama, bagaimana proses pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan alas hak tanah SKGR di Pekanbaru. Kedua, mengapa timbulnya sengketa dalam pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan alas hak tanah SKGR di Pekanbaru. Ketiga, bagaimana penyelesaian sengketa dalam pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan alas hak tanah SKGR Pekanbaru. Untuk menjawab permasalahan tersebut adapun metode yang dipakai dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian dilakukan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru dengan mewancarai pegawai BPN tentang proses pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan alas hak tanah SKGR, penyebab timbulnya sengketa pendaftaran tanah, dan penyelesaian sengketa dalam pendaftaran tanah pertama kali di Pekanbaru. Adapun hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa ,pertama, Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kedua, Suatu sengketa hak atas tanah itu timbul adalah karena adanya pengaduan/keberatan dari orang atau badan hukum yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara dibidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dimana putusan pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tertentu. Ketiga, penyelesaian sengketa secara mediasi dengan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Agar kasus sengketa dalam pendaftaran tanah pertama kali berdasarakan alas hak SKGR di kota Pekanbaru tidak terulang kembali, sebaiknya dalam proses penerbitan sertipikat tanah pihak dari kantor Badan Pertanahan Nasional Pekanbaru yang sebagaimana sebagai tim survei lapangan harus benar-benar memeriksa atas kebenaran dari tanah tersebut bukan hanya sebagai prngukur tanah tersebut.

Kata kunci: Pendaftaran Tanah, Pertama kali, SKGR.

341
GIF
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SEORANG YANG TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN(STATELESS PERSON) BERDASARKAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR) 1966 DI INDONESIA

Giffari Syarlas, 1310111138, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Internasional, 83 halaman, 2018

ABSTRAK

Stateless merupakan persoalan hilangnya kewarganegaraan atau absennya hubungan pengakuan antara individu dan suatu negara. Kewarganegaraan merupakan sebuah identitas yang juga memungkinkan seseorang untuk menggunakan hak yang melekat padanya.Hak-hak yang dimiliki oleh seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (stateless person) tersebut sering kali dilanggar oleh Negara asalnya. Berdasarkan latar belakang di identifikasi rumusan masalah sebagai berikut: 1.Bagaimana kedudukan hokum seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (stateless person) berdasarkan International Covenant on Civil and Political Rights 1966 di Indonesia? 2.Bagaimana perlindungan hukum terhadap seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan(stateless person) di Indonesia dikaitkandenganInternational Covenant on Civil and Political Rights1966? Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatakan perundang-undangan.Sumber data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan serta didukung dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang di dapat kemudian di analisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa International Covenant on Civil and Political Rights1966 (ICCPR) yang menganut prinsip non-diskriminasi dan tanpa pembedaan menyebabkan kedudukan hukum seorang yang berkewarganegaraan dengan seorang yang tak berkewarganegaraan sama serta hak-hak yang dimilikinya pun sama dan turut dijamin. ICCPR telah memberikan perlindungan hukum terhadap setiap orang dengan tidak membeda-bedakan status kewarganegaraan, agama, ras, maupun suku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kewarganegaraan, Stateless Person, ICCPR

341
GIL
d

DETERMINATION PROCEDURE FOR STATE ANALYSIS OF THE COUNTRIES AROUND THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982

Gilang Ahdi Ramadhan, 1110113059, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Pembimbing: Magdariza SH, MH,. Zimtya Zora SH, MH.

ABSTRAK

Hukum laut merupakan cabang hukum internasional.Semenjak berakhirnya perang Dunia II, hukum laut mengalami revolusi atau perubahan-perubahan mendalam sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Praktik masyarakat internasional membuktikan bahwa laut merupakan wilayah yang kompleks dan menimbulkan banyak permasalahan dalam pengukuran batas wilayahnya. Oleh karenanya Hukum Internasional mengatur secara tersendiri wilayah laut dan pemanfaatannya di dalam United Nations Convention Of The Law On The Sea tahun 1982 (Selanjutnya disebut UNCLOS 1982). Karena itu pentingnya penetapan tapal batas antar negara untuk mempertahankan kedaulatan (souvereignity) dan hak- hak berdaulat (souvereign rights) antar negara serta menyelesaikan semua persoalan yang berkaitan dengan hubungan international, negara perlu menetapkan perbatasan wilayah baik dimensi perbatasan darat maupun perbatasan laut dan udara.Kasus penetapan batas wilayah laut antara Australia dan Timor Leste. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan tipologi hukum yang digunakan dalam metode ini adalah pendekatan deskriptif, jenis data sekunder, serta analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan Penetapan garis batas wilayah teritorial diatur dalam Pasal 15 Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyatakan dalam hal pantai dua negara yang berhadapan satu sama lain,tidak satupun di antaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur. Serta kasus Australia dengan Timor Leste Dalam perundingan tersebut pihak timor Leste berusaha mendapatkan solusi yang adil dan merata mengenai apa yang menjadi hak mereka berdasarkan ketentuan hukum Internasional, karena Perjanjian yang dilakukan antara Timor Leste dan Australia mengenai Laut Timor dianggap tidak valid dan perlu ditetapkan kembali mengenai batas maritime antara kedua Negara karena meskipun terdapat aturan sementara mengenai pembagian sumber daya bersama di Laut Timor, akhirnya Pada Bulan Maret 2018 terjawab sudah tentang penetapan batas wilayah laut anra Australia dengan Timor leste di dalam perjanjian antar dua negara yang melakukan penetapan garis Tengah (Median Line).

345
HER
u

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KOTA PADANG

Herando Ramot Sidabalok, 1410111065, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV Hukum Pidana, 62 Halaman, Tahun 2018

ABSTRAK

Tindak pidana perjudian online merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang temasuk kedalam sebuah tindak pidana dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat termasuk Kota Padang. Perjudian online merupakan bentuk penyalahgunaan sarana media online dimana menggunakan taruhan melalui transfer duit tunai melalui Bank, seperti perjudian pada umumnya. Jika dibiarkan terus menerus tanpa adanya penanganan yang serius dari penegak hukum Kepolisian, masyarakat yang melakukan perjudian online tersebut akan menjadi kecanduan akan berdampak negative terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1)Faktor penyebab terjadinya perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang, dan 2) Upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian bersifat deskriptif, jenis data berupa data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di wilayah Kepolisian Resor Kota Padang adalah menggunakan upaya preventif dengan memblokir setiap situs perjudian online dan upaya represif melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap bandar utama dari penyedia layanan perjudian online. Kendala kepolisian dalam menanggulanginya adalah sulitnya kepolisian dalam menangkap bandar utama dari si penyedia layanan perjudian online tersebut, karena fasilitas yang dimiliki belum memadai atau kurangnya sarana/prasarana yang ada di Kepolisian Resor Kota Padang. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum akan meningkatkan kinerja sebagai pihak yang berwajib dan berwenang dalam menegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan hubungan dengan semua pihak demi memudahkan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.

Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Perjudian Online

345
HYA
p

PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA BERUPA PELAYANAN KESEHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG

Hyasintha Salim.1410111053.Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK V (Sistem Peradilan Pidana). 73 Halaman.Tahun 2018.

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi para Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan bertujuan membentuk warga binaan agar menjadi manusia yang lebih baik lagi dan memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana juga terkait dengan Hak Asasi Manusia. Salah satu hak yang wajib dipenuhi dan menjadi hak Narapidana adalah hak pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1995. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di LAPAS Klas II A Padang terdapat hambatan teknis seperti terjadinya kelebihan kapasitas sehingga mengakibatkan terjadi masalah kurangnya pelayanan dalam bidang kesehatan untuk Narapidana. Penelitian ini dilakukan terhadap Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Pelayanan Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ini adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, 2) Apa saja Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan belum optimal dan memadai. Pelayan kesehatan yang dilakukan di LAPAS Klas II A Padang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana biaya pengobatan yang harusnya ditanggung oleh negara malah dibebankan kepada narapidana. Sedangkan kendala dalam melaksanan pelayanan kesehatan terhadap narapidana yaitu kurangnya petugas kesehatan sehingga hanya dapat mengobati penyakit ringan, kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana, kurang lengkapnya obat-obatan yang ada di klinik serta tidak memadainya sarana dan prasarana kesehatan dan lingkungan yang buruk dan tidak layak. Diharapkan kedepannya untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana lebih memadai, sehingga kesejahteraan narapidana di dalam LAPAS lebih terjamin.

342
HAF
i

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR TAHUN 2017 DI KOTA PADANG

Hafiz Narazaky Zarfi, 1310111027, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 71 Halaman, 2017

ABSTRAK

Pungutan liar merupakan tindakan yang dilakukan untuk meminta bayaran oleh seseorang dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri, tanpa adanya aturan yang menetapkan besaran biaya, yang harus dibayarkan diluar prosedur yang semestinya. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar bertujuan untuk memberantas pungutan liar yang sangat meresahkan masyarakat. Peraturan presiden tersebut memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti peraturan presiden tersebut. Kota Padang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kota Padang telah mengeluarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2017 yang bertujuan tercapainya pemberantasan pungutan liar di wilayah Pemerintahan Daerah Kota Padang. Penulis merumuskan 2 rumasan masalah : 1) Bagaimana Implementasi Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2017 di Kota Padang? 2) Kendala apa saja yang dihadapi Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam mengimplementasiakan Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2017 di Kota Padang? Dalam merumuskan masalah tersebut penulis menggunakan metode yaitu yuridis empiris, terkait dalam pengumpulan data, wawancara dan studi dokumen dengan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti, Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Padang ada 4 hal yang menjadi objek penelitian. Pertama dari segi struktur organisasi telah sesuai dengan Lampiran Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017, dari segi pihak-pihak terkait ada 11 instansi yang tergabung dengan Satgas Saber Pungli Kota Padang, kemudian Satgas Saber Pungli Kota Padang Memiliki 10 tugas yang tercantum dalam penetapan Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017. Akan tetapi hanya 8 tugas yang telah terlaksana. Selanjutnya Satgas Saber Pungli belum memiliki Standar Operasional Prosedur (S.O.P) seperti yang dimiliki Satgas Indonesia dan Provinsi Sumbar akan tetapi dalam pelaksanaan pengimplementasian Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 masih terdapat kendala yang dialami Unit Satgas Saber Pugli Kota Padang, yakni belum adanya aturan tentang pemberantasan pungli secara spesifik serta kendala dari segi dana dan prasana yang dimiliki oleh Satgas Saber Pungli Kota Padang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam Implementasi Keputusan Walikota Padang Nomor 16 Tahun 2017 belum terlaksana secara maksimal.

Kata Kunci : Implementasi, Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Kota Padang

341
HAM
t

TINJAUAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) BERDASARKAN UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW (UNCITRAL) ARBITRATION RULES DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Hamda Satria Yudda, 1210112113, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 73 Halaman, Tahun 2018

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks perdagangan harus diyakini sebagai salah satu perkembangan peradaban dunia modern. Dalam kaitannya mengenai penyelesaian sengketa, UNCITRAL telah membuat suatu aturan yang dinamakan UNCITRAL Arbitration Rules. Pengaturan terkait Perdagangan Elektronik di Indonesia tertuang dalam beberapa instrumen hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa perdagangan elektronik menurut UNCITRAL Arbitration Rules? 2. Bagaimanakah implemetasi penyelesaian sengketa perdagangan elektronik menurut UNCITRAL Arbitration Rules dalam hukum nasional?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan analisa data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan yaitu UNCITRAL Arbitration Rules merupakan ketentuan hukum internasional yang mengkaji persoalan penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa yang diatur UNCITRAL Arbitration Rules diatur untuk memudahkan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa perdagangan elektronik. Implementasinya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 17 Ayat (1) yang menyatakan bahwa sengketa transaksi elektronik dapat berbentuk publik dan privat. Bentuk penyelesaian sengketa non litigasi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur dalam Pasal 38 Ayat (2) yang intinya adalah memberikan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk penyelesaian sengketa kedalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa dalam perdagangan elektronik hendaknya diselesaikan terlebih dahulu dalam lingkup non litigasi, karena sebagaimana karateristik perdagangan elektronik yang tidak mengenal batas wilayah hukum, penyelesaian sengketa non litigasi menjadi lebih fleksibel, praktis, serta efektif.

Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Perdagangan Elektronik, UNCITRAL Arbitration Rules

346
HAN
i

IMPLEMENTASI PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN

Hanifah Sonella, BP 1410111076, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII). 2017. 85 Halaman.

ABSTRAK

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan lingkungan di Indonesia yang disebabkan oleh polutan asing dengan jumlah yang melebihi ambang batas normal udara pada umumnya. Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi terdampak pencemaran udara yang disebabkan oleh asap kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Provinsi Riau tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat yang terpapar asap hasil kebakaran hutan tersebut. Kejadian kebakaran hutan di Provinsi Riau merupakan akibat dari tidak terlaksananya ketentuan tentang pemanfaatan hutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan serta Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan peran aktif dari seluruh pihak terutama dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (selanjutnya disingkat DLHK Provinsi Riau) untuk menanggulangi kebakaran hutan. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai peran DLHK Provinsi Riau dalam menanggulangi pencemaran udara akibat kebakaran hutan serta kendala yang dihadapi oleh DLHK Provinsi Riau dalam usaha penanggulangan pencemaran udara akibat kebakaran hutan di provinsi tersebut. Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah metode empiris (yuridis sosiologis) yang didasarkan kepada penelitian lapangan. Penelitian bersifat deskriptif. Jenis data terbagi menjadi dua, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang berasal dari buku-buku, dokumen resmi dan hasil laporan penelitian. Sumber data penelitian berasal dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber DLHK Provinsi Riau, BPBD Provinsi Riau an masyarakat serta studi dokumen. Cara pengolahan data dilakukan melalu proses editing, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan, peran DLHK Provinsi Riau adalah pencegahan terjadinya kebakaran hutan, penanggulangan kebakaran hutan dan pemulihan hutan yang terbakar, serta peran pengawasan secara aktif dan pasif. Kendala yang dihadapi DLHK Provinsi Riau dalam melakukan peran menanggulangi pencemaran udara antara lain kurangnya pemahaman masyarakat, sulitnya akses ke tempat kejadian kebakaran hutan dan untuk proses pemadaman dan pencegahan yang terbatas dan bukti-bukti yang kurang lengkap dalam proses penyelesaian permasalahan kebakaran hutan.

Kata Kunci: Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pencemaran Udara, Kebakaran Hutan

342
HAR
p

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. TELKOM Tbk DENGAN RUMAH SAKIT KHUSUS BEDAH ROPANASURI DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN KARYAWAN

Harsa Khairu, 1310112166, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2018, 74 Halaman

ABSTRAK

PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang memberikan jaminan kesehatan kepada karyawannya. Pemberian jaminan kesehatan kepada karyawan ini PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk bekerjasama dengan Rumah Sakit Khusus Bedah Ropanasuri. Rumusan masalah dalam penilitian ini adalah : 1) Bagaimana isi perjanjian kerjasama antra PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan Rumah SAKIT Khusus Bedah Ropanasuri dalam pelaksanaan jaminan kesehatan karyawan, 2) Apa saja kendala yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dan penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Yuridis Sosiologis yang dipergunakan untuk memecah obyek penelitian dengan meneliti data sekunder terhadap data primer di lapangan sehingga dapat menjawab permasalahan dan wawancara langsung dengan pihak- pihak terkait dengan perjanjian kerjasama tersebut. Hasil yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan adalah kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi karyawan dan pensiunan Telkom beserta keluarga oleh Rumah Sakit Ropanasuri,permasalahan yang timbul adalah belum optimalnya pemberian pelayanan kesehatan yang diberikan kepada karyawan Telkom di lapangan. Sehingga membuat hak jaminan kesehatan yang diberikan Telkom kepada karyawannya belum optimal.Untuk itu hendaknya dalam memberikan pelayanan kesehatan sebaiknya pihak Telkom dan Rumah Sakit Ropanasuri mempersingkat proses administrasi yang berbelit-belit, dan memberikan hak jaminan kesehatan yang sama dalam kasus gawat darurat dan perpanjangan rawat inap.

346
HAS
p

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Hasbi Sonta Dwi Putra, 1310112014, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK IX), 61 Halaman, Tahun 2018

ABSTRAK

Landasan utama pembangunan nasional dalam bidang pertanahan terdapat dalam pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Pendaftaran tanah merupakan persoalan penting dalam UUPA karena merupakan awal dari proses lahirnya bukti kepemilikan hak atas tanah. Pada Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan tujuan dan kegunaan dari pendaftaran dan sertifikat atas tanah tersebut untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan melalui dua cara yaitu secara sistematik (serentak) dan secara sporadik (berdasarkan permintaan). Pengetahuan mengenai tata cara pendaftaran secara sporadik pada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman tergolong rendah.Rekapitulasi data Tahun 2017, didapatkan bahwa jumlah tanah terdaftar di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebanyak 11.747,279Ha dari 103.356Ha (7,8%). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tata cara serta hambatan pendaftaran tanah secara sporadik di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum studi hukum yuridis empiris dan data dikumpulkan dengan cara wawancara serta dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa pendaftaran tanah di Kabupaten Padang Pariaman sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Namun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya sepertikurangnya anggaran pemerintah untuk mensosialisasikan manfaat dan tata cara pendaftaran tanah, kesalahan data dalam melakukan pendaftaran tanah, biaya yang besar, serta anggapan waktu yang lama dalam pengurusan sertifikat. Sehingga diharapkan pihak Kantor Pertanahan dapat melakukan sosialisasi terkait manfaat dan tata acara pendaftaran tanah serta memberikan informasi terkait program PTSL kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan kantor pertanahan lebih selektif dalam melakuan pengecekan ulang terhadap data yang diberikan oleh pemohon.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Sporadik, Kabupaten Padang Pariaman

345
LIS
u

UPAYA PENEGAKAN HUKUM MELALUI NON PENAL OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLSEK PADANG UTARA

Lisa Primasia Helyadi, 1410111136, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV Hukum Pidana , 75 Halaman, 2018

ABSTRAK

Anak sebagai generasi muda merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita bangsa. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberikan perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Seiring dengan perkembangan zaman, anak mulai sulit mendapatkan hak yang ia miliki. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Dalam Tahap Penyidikan Terhadap Anak Sebagai korban Eksploitasi di Polresta Padang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam tahap penyidikan terhadap anak sebagai korban eksploitasi di Polresta Padang dan apa saja kendala perlindungan hukum dalam tahap penyidikan anak sebagai korban eksploitasi di polresta padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum yang mana dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi masih belum maksimal. Hal senada juga diperkuat melalui Undang-Undang Republik indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Teori yang dipakai dalam skripsi iniyaitu teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum.Proses dan mekanisme penyeleseian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 3 (tahap) sebagai berikut 1) tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan 2) tahap penuntutan 3) tahap pemeriksaan di sidang pengadilan 4.) Tahap eksekusi Terdapat beberapa kendala yang dihadapi penyidik dalam memberikan perlindungan hukum yaitu kurangnya sarana dan prasarana. Kurang koorperatifnya korban saat melakukan penyidikan yang merasa mereka tidak menjadi korban eksploitasi.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Non Penal, Anak Berkonflik dengan Hukum.

342
HEM
i

INDEPENDENSI HAKIM KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Hemi Lavour Febrinandez, 1410112027, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 109 halaman, Tahun 2018

ABSTRAK

Arief Hidayat dan Patrialis Akbar dijatuhi hukuman pidana dan dinyakan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi pada saat masih menjadi Hakim Konstitusi. Seorang hakim konstitusi harus lah seorang negarawa dan berkepribadian tidak tercela terdapat pada Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Kemudian menjadi sosok individu independen yang terlepas dari intervesi pihak lain. Sehingga independensi hakim konstitusi berpengaruh pada saat hakim konstitusi memutus perkara di MK. Independensi hakim konstitusi tidak terlepas dari mekanisme rekrutmen hingga pada pengaruh dari kekuasaan lainnya pada saat memutus perkara di MK. Penelitian ini mengkaji tentang, pertama, bagaimana mekanisme rekrutmen hakim konstitusi ? Kedua, bagaimana independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara di Mahkamah Konstitusi ? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hokum normatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat hubungan antara independensi hakim konstitusi dengan mekanisme rekrutmen hakim konstitusi dan kode etik hakim konstitusi. Tidak terdapat keputusan dari Dewan Etik Hakim Konstitusi yang memutus bahwa salah hakim konstitusi telah melanggar prinsip independensi yang terdapat pada Peraturan MK Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dari hasil penelitian ini, harus dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan memberikan penjelasan dalam hal mekanisme pengisan atau rekrutmen hakim konstitusi dan persyaratan menjadi seorang hakim konstitusi. Pengawasan harus dilakukan kepada hakim konstitusi yang akan habis masa jabatannya dan kembali ingin menjadi hakim konstitusi.

Kata Kunci : Independensi, Trias politika, Hakim Konstitusi

342
p

PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK (ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA)

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut, Pengaturan mengenai Desa dan Desa adat tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam pemilihan Kepala Desa dan Desa adat dilakukan secara serentak oleh Kabupaten dan Kota, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari dinilai tidak sejalan lagi dengan Undang- undang Desa. Untuk itu, maka penulis di dalam tulisan ini menjelaskan bagaimana kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari terhadap Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Secara terperinci penulis akan menganalisis secara yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan, Hirarki perundang undangan telah jelas di atur di dalam pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tingkatan di dalam hirarki Perundang-undangan tidak boleh berbenturan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Pengawasan terhadap Peraturan Perundang-undangan dibentuk oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan Pemerintahan Pusat berhak untuk membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan yang ada di Atasnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman ketentuan peralihan Pasal 74 menjelaskan bahwa Wali Nagari yang dipilih berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya" . oleh karena itu status Wali Nagari yang terpilih tersebut sah dan tidak bertentangan dengan peraturan manapun.

342
HID
p

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH PENGAWAS MADRASAH TERHADAP KINERJA GURU DI MTsS AL-FURQAN KOTA PADANG

Hidayatil Husni, 1410112074, PembimbingI: Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn. Pembimbing II Hendria Fithrina, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VII) , 2018, 71 Halaman.

ABSTRAK

Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang tercantum pada alinea ke IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ...". Cita-cita mulia tersebut untuk membawa bangsa Indonesia ke dalam suatu keadaan yang dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang pada waktunya akan mampu meningkatkan kesejahteraan umum (rakyat Indonesia), salah satunya adalah melalui pendidikan. Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, cakap, kreatif, mandiri, dan mampu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Salah satu lembaga pendidikan yang kita ketahui adalah madrasah. Untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di madrasah, maka diperlukan adanya sebuah pengawasan. Pengawasan diperlukan agar.bisa melihat perkembangan dan kemajuan peserta didik, dan juga berjalan atau tidak berjalannya sebuah sekolah. Namun, fakta di lapangan khususnya madrasah MTsS Al-Furqan yang berada di Rawang, Tunggul Hitam Kota Padang, berdasarkan data lulusan siswanya hanya sedikit yang bisa masuk dan melanjutkan ke SMA negeri. Pengawas madrasah yang berada di bawah naungan kementerian agama Kota Padang memiliki kewenangan dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan atas kondisi siswa yang ada di MTsS Al-Furqan Kota Padang. Atas dasar itu penelitian ini dilakukan untuk mengemukakan permasalahan Pertama, Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan oleh Pengawas Madrasah terhadap Kinerja Guru di MTsS Al-Furqan Kota Padang. Kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengawasan oleh Pengawas Madrasah terhadap Kinerja Guru di MTsS Al-Furqan Kota Padang. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis yaitu untuk menguji apakah sesuatu telah berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan terjun langsung ke lapangan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengawas madrasah belum efektif melaksanakan kewenangannya dalam melakukan pengawasan di MTsS Al- Furqan Kota Padang. Hal ini terkait dengan terbatasnya sarana dan prasarana di MTsS Al-Furqan yang akan menghambat proses tujuan pembelajaran seperti yang diharapkan oleh pengawas madrasah.

Kata Kunci : Kewenangan, Pelaksanaan Pengawasan

342
HID
p

PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN REKOMENDASI PENERBITAN PASPOR HAJI DAN UMRAH DI BAGIAN PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG

Hidayatul Husna, 1410111004, Fakultas Hukum, 2018, 81 halaman

ABSTRAK

Pelayanan pengurusan rekomendasi penerbitan paspor Haji dan Umrah merupakan suatu bentuk dari pelayanan publik dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang dibantu pelaksanaan tugasnya oleh Kementerian Agama RI.Kementerian Agama RI merupakan satu-satunya instansi vertikal yang diberi kewenangan untuk mengurus rekomendasi penerbitan paspor bagi calon jamaah ibadah Haji dan Umrah.Rekomendasi penerbitan paspor diperlukan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan paspor ibadah Haji dan Umrah oleh jamaah untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara nonprosedural di luar negeri.Oleh karena itu,diwajibkan bagi setiap calon jamaah untuk melakukan pengurusan rekomendasi penerbitan paspor yang tidak termasuk ke dalam pengecualian berdasarkan Surat Edaran dari Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.: IMI-GR.01.01-2036 tentang Penerbitan Paspor Bagi Calon Jemaah Haji/ Umrah.Dalam hal pembuatan rekomendasi penerbitan paspor ini seringkali terjadi ketimpangan pelayanan antara Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan proses di lapangan.Oleh karena itu,permasalahan dalam penelitian ini adalah:1)Bagaimana pelayanan pengurusan rekomendasi penerbitan paspor Haji dan Umrah di Kemenag Padang? 2)Permasalahan apa yang ditemukan dalam pengurusan rekomendasi penerbitan paspor Haji dan Umrah di Kemenag Padang? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis,dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa:1)Pelayanan pengurusan rekomendasi penerbitan paspor Haji dan Umrah belum cukup baik dan harus ditingkatkan.2)Permasalahan dalam pengurusan secara hukum yaitu lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan,dari segi petugas terdapat ketidaksesuaian data pribadi calon jamaah antar dokumen,kerusakan pada mesin pembuatan surat rekomendasi dan fasilitas ruangan yang terlalu kecil.Dari sisi calon jamaah terkendala dengan pelayanan yang kurang memadai,berkas yang tidak lengkap/kurang sesuai,lamanya proses penyelesaian surat rekomendasi penerbitan paspor Haji dan Umrah,dan jumlah petugas penyusun dokumen Haji dan Umrah yang sedikit.

Kata kunci : Pelayanan Publik, Rekomendasi Penerbitan Paspor Haji dan Umrah

342
ALF
p

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KASET CD/VCD BAJAKAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA PARIAMAN.

Alfurqanul Hakim Pembimbing : 1. Yoserwan, S.H., M.H. 2. Siska Elvandari, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pendistibusian hasil pembajakan hak kekayaan intelektual di bidang hak cipta di kota pariaman cukup memperhatinkan, terutama pembajakan atas karya cipta di bidang musik. Pembajakan atas karya cipta musik ini dilakukan lewat berbagai media, baik itu berupa kaset, CD, VCD, DVD, MP3, dan sebagainya. Ini terlihat pada pasar-pasar tradisional di kota pariaman, Namun seperti tidak adanya upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort pariaman, dilapangan masih di temukan pedagang pedagang nakal yang masih menjajakan barang bajakan tersebut, namun di kepolisian resort kota pariaman tidak pernah adanya data mengernai kasus pembajakan CD/DVD tersebut, biasanya pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran CD/VCD bajakan ini dilakukan melalui razia dan atas aduan dari pihak yang dirugikan oleh Polresta Pariaman. Dari latar belakang tersebut penulis menuliskan rumusan permasalahan yang hendak diteliti antara lain : Pertama, bagaimana Penegakan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dalm pemberantasan CD/DVD bajakan di kota pariaman? Kedua, apa kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian resort kota dalam pemberantasan kaset, CD/DVD di kota Pariaman? Dalam penulisan skripsi ini penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis sosiologis. Data yang dikumpulkan berasal dari bahan- bahan primer atau memperoleh data langsung dari lapangan dan bahan sekunder atau berdasarkan pendapat- pendapat ahli dan para sarjana. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa : penegakan undang-undang nomor 28 tahuh 28 tentang hak cipta telah di tegakkan oleh kepolisian resort kota pariaman, dengan tidak melakukan apa-apa, karena tidak adanya aduan dari pihak yang dirugikan, walaupun pembajakan kaset CD/DVD di kota pariaman masih menjamur, kepolisian resort kota periaman tidak dapat melakukan penyelidikan tanpa adanya aduan dari pihak yang di rugikan, karena perubahan dari undang-undang nomor 19 tahun 2002 kepada undang-undang nomor 28 tahun 2014 merubah delik ini dari delik biasa kepada delik aduan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian resort kota pariaman ada beberapa faktor, yaitu : faktor tidak adanya aduan dari pihak yang di rugikan, faktor budaya masyarakat yang lebih memilih barang bajakan tersebut, karena harganya jauh lebih murah dari pada CD/VCD original/asli, sehingga peredaran CD/VCD bajakan ini sulit untuk diberantas.

343.07
HAM
p

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN LEASING MULTIGUNA OLEH PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Hamori Delines. 1410112038. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK II (Hukum Bisnis). Halaman 71. Tahun 2017

ABSTRAK

Dalam menjalankan perusahaan, PT Mandiri Tunas Finance memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, hal tersebut bukan tidak mungkin menimbulkan permasalahan-permasalahan, permasalahan disini adalah Bagaimana proses pencairan dana, Kendala-kendala yang timbul dalam pencairan dana kredit pada PT Mandiri Tunas Finance, Bagaimana Upaya PT Mandiri Tunas Finance mengatasi kendala yang timbul dalam hal pencairan dana kredit tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris), sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, dalam hal kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara pada pihak terkait. Adapun kesimpulannya ialah: kendala tersebut berupa, tidak adanya kebebasan pada PT Mandiri Tunas Finance untuk melakukan kegiatan ekonomi, terhambatnya proses perkreditan dikarenakan sistem offline dari perusahaan, sistem pendanaan yang berbelit dari Bank Mandiri sebagai perusahaan induk kepada PT Mandiri Tunas Finance yang dikarenakan proses yang berbelit-belit dari PT Mandiri Tunas Finane kepada Bank Mandiri dan Keterbatasan tenaga kerja dibidang kredit analisis pda masing-masing perusahaan, upaya tersebut berupa Memberikan kebebasan kepada PT Mandiri Tunas Finance dalam melakukan kegiatan ekonomi perusahaan selama tidak brtentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Melakukan SP terhadap Marketing dan penggantian jajaran Kepala Cabang Perusahaan apabila tidak mampu memenuhi pencapaian target tahunan, Mepercepat proses perkreditan dengan melakukan peninjauan terhada kinerja anak perusahaan oleh Bank Mandiri. Upaya tersebut dilakukan oleh Bank Mandiri dengan PT Mandiri Tunas Finance sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun saran-saran yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah: dibuat suatu ktentuan khusus dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai perusahaan grup terutama mengenai hubungan induk perusahaan dengan anak perusahaan, tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaan, kedudukan anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri sehingga dapat diaturnya perusahaan grup secara khusus, masing-masing pihak dapat dilindungi dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perusahaan grup menjadi jelas. Kewenangan dan tanggung jawab Bank Mandiri dicantumkan dengan jelas dalam anggaran dasar PT Mandiri Tunas Finance sehingga PT Mandiri Tunas Finance sebagai anak perusahaan benar-benar menjadi badan hukum yang mandiri, dan juga memperluas kewenangan PT Mandiri Tunas Finance dalam menjalankan persero.

Kata Kunci : Pencairan Dana, Kredit.

345
IND
p

PENANGGULANGAN PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM AKIBAT MINUMAN KERAS YANG DILAKUKAN ANAK OLEH POLISI POLRES KOTA PADANGSIDIMPUAN

Indah Kumala, BP 1310111199, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Program Kekhususan Hukum Pidana(IV). Halaman 82Tahun 2017 Pembimbing Efren Nova S.H., M.H danYusrida S.H., M.H

ABSTRAK

Dalam undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pegayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Penanggulangan Pelanggaran Ketertiban Umum Akibat Minuman Keras yang dilakukan Anak oleh Polisi Polres Padangsidimpuan sangat di perlukan untuk menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1)Apa factor penyebab terjadinya Pelanggaran Ketertiban Umum Akibat Minuman Keras yang dilakukan Anak oleh Polisi Polres Kota Padangsidimpuan 2) Bagaimana upaya Penanggulangan Pelanggaran Ketertiban Umum Akibat Minuman Keras yang dilakukan Anak oleh Polisi Polres Kota Padangsimpuan 3) Apa saja kendala yang dihadapi Polisi dalam Penanggulangan Pelanggaran Ketertiban Umum Akibat Minuman Keras yang dilakukanAnak Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini dilakukan di wilayah hokum Polres Kota Padangsidimpuan, bersifat Deskriptif Analitis dengan menggunakan pendekatan Yuridis-sosiologis, dengan teknik pengumpulan data, wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penanggulangan pelanggaran minuman keras yang dilakukan anak oleh Polisi Polres Kota Padangsidimpuan sangat diperlukan untuk penyelesaian penanggulangan pelanggaran ketertiban umum akibat minuman keras yang terjadi serta melakukan upaya preventif, upaya repserif, dan upaya penindakan untuk penanggulangan dan mengurangi pelanggaran ketertiban umum akibat minuman keras yang terjadi. Dalam penanggulangan ini pihak Kepolisian masih memiliki beberapa kendala, kendala-kendala tersebut seperti, tidak jeranya pelaku dalam mengkonsumsi minuman keras, kurangnya pegawasan orang tua terhadap anak, kurangnya kesadaran para remaja tentang hokum dan sangat kuatnya pengaruh negatif yang akan di dapat para remaja apabila melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.

342
IND
p

PELAKSANAAN KEBIJAKAN ELEKTRONIK TILANG (E-TILANG) DALAM PELANGGRAAN LALU LINTAS DI KOTA PADANG

Indri Aswin Kasoema. 1410112048. Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VII (Hukum Administrasi Negara). 98 Halaman. Tahun 2018.

ABSTRAK

Salah satu langkah pembaharuan dalam sistem pelayanan publik adalah melakukan perbaikan terhadap pelayanan di bidang ketertiban dan keamanan, yang dalam hal ini salah satunya diselenggarakan oleh kepolisian. Jika dilihat dari aspek penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas dari tahun ketahun semakin meningkat. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), untuk mengatasi dan meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut, Pemerintah dan juga Kepolisian kemudian menggagas suatu kebijakan terkait dengan pembaharuan sistem tilang dengan memberlakukan kebijakan elektronik tilang atau dikenal dengan istilah E-Tilang. Melalui kebijakan E-Tilang ini pelayanan publik yang diberikan dapat lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kebijakan E-Tilang ini merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi dan diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien. Secara eksplisit, kebijakan sistem tilang elektronik ini termaktub dalam Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa, untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Itu sebabnya dalam rumusan masalah tersebut pertama menjelaskan pelaksanaan dan pilihan hukum yang digunakan terhadap kebijakan E-Tilang dalam pelanggaran lalu lintas di Kota Padang, kedua kendala dalam penerapannya. Berdasarkan hasil penelitian secara yuridis masih terdapat ketidaksinkronan kerangka norma yang mengatur soal kebijakan E-Tilang dan juga sampai saat ini belum ada definisi jelas terkait dengan kebijakan E-Tilang tersebut. Di samping itu, dalam penerapannya kebijakan E-Tilang belum efektif di Kota Padang, karena terdapat kelemahan- kelemahan, misalnya belum tersosialisasinya kebijakan tersebut secara massif kepada masyarakat. Dengan adanya kebijakan E-Tilang dapat meminimalisir konflik kepentingan dan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Sehingga, perlu definisi yang jelas terkait dengan kebijakan E-Tilang serta perlu sinkronisasi dan harmonisasi antar regulasi. Itu sebabnya, perlu dibentuk Peraturan Bersama antara Kepolisian dengan Mahkamah Agung tentang Kebijakan E- Tilang di Indonesia.

Kata Kunci :Kebijakan, E-Tilang, LaluLintas.

347.05
IRM
t

TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENAWARAN UMUM

Irma Suryani Syair, 1410112084, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 93 Halaman, Tahun 2018

ABSTRAK

Dalam Penawaran Umum terdapat peran penting Notaris sebagai salah satu profesi penunjang Pasal Modal. Setiap Notaris yang berkegiatan di Pasar Modal wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Notaris di Pasar Modal tunduk pada ketentuan UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan OJK/Bapepam dan LK serta peraturan lainnya. Adapun masalah yang diteliti adalah mengenai (1) Bagaimana kewenangan Notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum dikaitkan dengan UUJN (2) Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya sehubungan dengan Penawaran Umum. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menjawab permasalahan dengan menggunakan literatur dan buku-buku dan sinkronisasi serta harmonisasi peraturan-peraturan terkait. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa kewenangan Notaris dalam Penawaran Umum adalah secara umum membuat akta otentik atas perjanjian-perjanjian berkaitan dengan Penawaran Umum dan Berita Acara RUPS dan Akta Perubahan Anggaran Dasar. Tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya adalah menjamin keabsahan akta yang dibuatnya dengan menjalankan tugas jabatan sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik Notaris. Tanggung jawab Notaris dapat muncul apabila akta yang dibuatnya menimbulkan permasalahan hukum. Tanggung jawab Notaris dalam hal ini dapat berupa tanggung jawabsecara perdata, tanggung jawab secara pidana, tanggung jawab secara administrasi tergantung kepada pelanggaran yang dilakukan Notaris.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Notaris, Penawaran Umum

341
IBN
a

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) DI INDONESIA DITINJAU DARI INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR).

Ibnu Fadillah Mirza, 1310112114, Hukum Internasional (PK VII), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 Halaman, 2018

ABSTRAK

Berkumpul dan berserikat merupakan hak yang dijamin keberadaannya dalam setiap diri manusia yang diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan diatur secara khusus dalam International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR), dalam perwujudan dari hak tersebut manusia berkumpul dan berserikat membentuk organisasi yang salah satunya disebut ormas, pengaturan ormas saat ini di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No 16 Tahun 2017, aturan tersebut didahului dengan dikeluarkannya Perppu No 2 Tahun 2017, dengan dikeluarkannya dan disahkannya aturan tersebut Pemerintah Indonesia telah melakukan pembatasan hak dalam ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia yang menimbulkan pro dan kontra. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana implementasi pengaturan tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional. 2) Bagaimana analisis hukum akibat hukum dikeluarkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2017 berkaitan dengan keberadaan Ormas di Indonesia ditinjau dari International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Untuk menjawab permasalahan diatas Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum, yuridis normatif. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pertentangan dalam beberapa pasal peraturan ormas terhadap implementasi aturan hukum internasional dan hukum nasional terhadap pengaturan ormas di Indonesia dan akibat hukum yang diterima Pemerintah Indonesia selaku negara peratifikasi ICCPR atas pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan hak dalam ICCPR melalui komite ham selaku pengawas atas pemenuhan dan implementasi hak yang diatur dalam ICCPR. Untuk itu Pemerintah Indonesia harus merevisi pasal-pasal dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2017 yang bertentangan dengan konstitusi serta kaidah hukum internasional serta adanya pembaharuan terhadap pengaturan ormas di Indonesia dan penambahan aturan dalam ICCPR mengenai pengawasan dan sanksi yang lebih tegas terhadap negara yang telah melanggar ketentuan dan pemenuhan hak yang diatur dalam ICCPR.

Kata kunci: Ormas, ICCPR, Undang-Undang Ormas

343.07
LIN
p

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP IKLAN YANG TIDAK BENAR DAN JELAS TENTANG KEGUNAAN DAN FUNGSI SUATU BARANG PADA PERKARA NOMOR: 81/P3K/XI/2014 DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PADANG

Iincoe Fransxeno Baslay, 1310111085, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK II (Hukum Bisnis), 65 Halaman, 2018

ABSTRAK

Cara pelaku usaha untuk menarik minat beli konsumen dalam menggunakan produk yang dimilikinya adalah melalui media iklan, melalui iklan inilah disebutkan karakteristik dan keunggulan dari produk barang atau jasa yang ditawarkan. Disinilah awal munculnya permasalahan, yaitu saat pelaku usaha membuat sebuah iklan yang disajikan tanpa memberikan seluruh informasi mengenai produk barang atau jasa yang bersangkutan, sehingga menimbulkan kesalahan dalam menerima informasi bagi konsumen dan menimbulkan kerugian. Keadaan tersebut dialami oleh JMK Minimarket berdasarkan kasus yang diajukan ke BPSK Kota Padang, mengenai pembelian alat elektronik CCTV, produk yang dibeli tersebut tidak berfungsi seperti yang ditawarkan dalam iklan. Pada perkara nomor: 81/P3K/XI/2014. Rumusan penulisan hukum ini adalah bagaimana bentuk penyelesaian sengketa konsumen pada perkara Nomor: 81/P3K/XI/2014 di BPSK Kota Padang dan bagaimana dasar pertimbangan dalam penetapan putusan oleh Majelis BPSK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkara ini di selesaikan melalui BPSK yang diajukan oleh Musniarti selaku karyawan CV. Fazela, dan bentuk penyelesaian sengketa yang dipilih adalah melalui konsiliasi, tergugat bersedia dan ingin menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pimpinan CV. Fazela secara informal (pimpinan dengan pimpinan), untuk mencari kesepahaman. Dengan hasil bahwa pihak Maxindo tetap tidak bersedia untuk memnuhi tuntutan penggugat, dengan berbagai alasan, pihak CV. Fazela kecewa dan tidak sepenuhnya puas dengan kesepakatan yang dibuat, namun pihak CV. Fazela tidak melanjutkan tuntutannya ke peradilan umum (litigasi) dengan berbagai pertimbangan yang sudah diperhitungkan dengan matang. Oleh sebab itu kedua belah pihak sepakat untuk membuat surat pernyataan dan ditandatangani oleh para pihak, bahwa persoalan tersebut sudah dianggap selesai, dan tidak ada yang perlu untuk dipermasalahkan lagi. Berdasarkan kesepakatan dan telah dibuatnya surat pernyataan tersebut, menjadi rujukan bagi majelis a quo untuk membuat putusan oleh majelis, setelah para pihak sepakat maka majelis menganggap perkara tersebut telah diselesaikan secara damai sesuai dengan persetujuan para pihak.

343.07
ILH
t

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN EFEK DALAM MELAKSANAKAN TRANSAKSI EFEK DENGAN CARA JARAK JAUH (REMOTE TRADING)

Ilham Alfatli, 1310111008, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Halaman 78, 2017

ABSTRAK

Undang-undang pasar modal No.8 Tahun 1995 memberikan pengertian Pasar Modal yaitu: "kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan peerdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek." Pasar modal sebagai suatau kegiatan penawaran umum dan perdagangan efek (saham) dari perusahaan publik dan merupakan tempat sarana investasi bagi investor. Pasar modal indonesia sebagai sarana tempat penjual dan pembeli dana jangka panjang yang disebut efek, pada saat ini telah berkembang secara fantastis dan dinamis. Para anggota bursa dalam pasar modal indonesia yang salah satunyab adalah perantara pedagang efek mempunyai peranan yang sangat penting dalam perdagangan efek. Seiring dengan perkembangan tekhnologi dibutuhkan suatu sistem untuk mempermudah transaksi perdagangan efek. Sehingga para perantara pedagang efek mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam menjalankan sistem tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan, sistem perdagangan efek secara manual sudah tidak lagi efektif. Maka dipergunakanlah sistem perdagangan jarak jauh (Remote Trading System) yang memberikan kemudahan transaksi dan membantu kerja perantara pedagang efek , guna menjaga eksistensi dan terlaksananya program perdagangan jarak jauh Bursa Efek Indonesia yang baik, maka setiap perusahaan efek yang menjadi Anggota Bursa Efek harus memenuhi semua persyaratan teknis, sumber daya manusia dan operasional yang mendukung pelaksanaan sistem Remote Trading. Dengan demikian setiap pearantara pedagang efek harus mengetahui dan melakasanakan kewajiban dan tanggung jawabnya agar tercipta transaksi efek yang transparan, efisien, dan wajar di Pasar Modal Indonesia.

345
ILH
u

UPAYA SATUAN RESERSE NARKOTIKA POLRESTA PADANG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR

Ilham Habibullah 1410112094, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 67 halaman – Tahun 2018, Pembimbing : Efren Nova S.H., M.H dan Riki Afrizal, S.H., M.H

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika melarang penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polresta Padang terus meningkat dari tahun ketahun yang menimbulkan kekhawatiran khusus penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar. Untuk itu perlu upaya satuan Reserse Narkotika Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : a. bagaimana upaya Satuan Reserse Narkotika Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di kota Padang, b. apa saja kendala-kendala yang di hadapi Satuan Reserse Narkotika Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yag dilakukan oleh pelajar di kota Padang. Dalam penulisan ini metode yang dipakai oleh penulis adalah yuridis sosiologis. Dalam hasil penelitian dan pembahasan yatiu : a. Satuan Reserse Narkotika Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di kota Padang adalah melakukan upaya preventif dan represif. b. kendala-kendala yang di hadapi satuan reserse narkotika polresta padang dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yag dilakukan oleh pelajar di kota Padang adalah kurangnya itikat baik dari masyarakat sekitar ketika di minta menjadi saksi tindak pidana narkotika, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk bekerjasama dengan Reserse Nakotika Polresta Padang ketika ada proses penangkapan atau pengrebekan, kurangnya fasilitas penunjang untuk mempermudah proses penangkap targe operasi, kurangnya personil dari Reserse Narkotika kota Padang sebagai penyidik tindak pidana narkotika dikawasan hukum Polresta Padang.

344.09
ILH
p

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (STUDI DI KUA KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG)

Ilham Sanitrya, 1110113185, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK III (Hukum Adat Dan Islam), 53 halaman, Tahun 2018

ABSTRAK

Pencatatan Perkawinan bertujuan untuk merealisasikan amanat yang termaktub dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Dalam perkawinan perlu adanya pencatatan perkawinan agar setiap perkawinan dapat dicatatkan di administrasi negara guna mendapatkan kepastian hukum sehingga status perkawinan diakui sah secara hukum dan agama serta mendapatkan perlindungan bagi hak-hak sebagai warga negara. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu apa saja peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan tidakk tercatat di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dan upaya apa yang dapat dilakukan jika perkawinan tidak tercatat sudah terlanjur terjadi. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode empiris sosiologis dengan melakukan penelitian pada pihak-pihak Kantor Urusan Agama dan pelaku perkawinan tidak tecatat. Adapun sumber data yang penulis gunakan yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen atau dengan penelitian kepustakaan untuk menunjang penelitian. Sedangkan data primer dengan studi lapangan dengan teknik wawancara kepada narasumber ataupun informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk depskriptif. Berdasarkan hasil peneitian dan pembahasan dapat disimpulkan pertama, Peran Kantor Urusan Agama di Kecamatan Lubuk Kilangan telah sesuai akan tetapi masih perlu ditingkatkan kedua Faktor perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Lubuk Kilangan yaitu, faktor ekonomi, tingkat pendidikan, tidak memiliki kartu tanda kependudukan, indikasi hamil di luar nikah dan poligami menjadi faktor utama dalam permasalah dalam penulisan skripsi ini dan upaya yang dilakukan jika perkawinan tidak tercatat terlanjut terjadi yaitu melakukan pencatatan perkawinan dengan cara itsbat nikah di Pengadilan Agama KLS I A Padang.

345
IMA
u

UPAYA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES TANAH DATAR DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (CURAS) DI KABUPATEN TANAH DATAR

Imam Palito AlamSyah, 1310111119, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 61 + vi Halaman , Tahun 2018

ABSTRAK

Kabupaten Tanah Datar merupakan suatu daerah yang mana banyak terjadi tindak pidana pencurian khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu 41 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari 10 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi tahun 2013, 5 kasus yang terjadi tahun 2014, 18 kasus yang terjadi tahun 2015 dan 8 kasus yang terjadi tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif melalui studi dokumen dan wawancara (data primer) yang kemudian dianalisa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang ada (data skunder). Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa berbagai upaya dalam pelaksanaan upaya menanggulangi tindak pidana, yaitu dengan melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan yaitu melakukan penyuluhan ke daerah-daerah yang rawan, memasang spanduk peringatan maupun menyebarkan brosur atau pamflet, meningkatkan kinerja kepolisian. Adapun upaya represif yang dilakukan yaitu melakukan patroli malam, melakukan penyelidikan terhadap pelaku, melakukan pengejaran, penangkapan serta penahanan terhadap pelaku tindak pidana. Kendala yang kerap terjadi yaitu kendala dalam upaya preventif dan represif, kendala preventif yang terjadi yaitu : dalam penyuluhan ke daerah rawan tindak pidana masyarakat yang hadir sedikit atau tidak terlalu mengindahkan perkataan polisi, masyarakat yang tidak menerapkan dikehidupan sehari-hari dari penyuluhan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, masyarakat yang cenderung kurang hati-hati dalam kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan kesempatan bagi pelaku tindak pidana. Adapun kendala represif yang terjadi yaitu identitas tersangka tidak diketahui, saksi yang melihat tindak pidana tidak ada, masyarakat tidak mau berurusan dengan pihak kepolisian, bukti yang terjadi pada saat tindak pidana tidak jelas, korban takut untuk melapor karena alasan dibawah tekanan atau ancaman, masih kurangnya personil dari pihak kepolisian. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi yaitu: penambahan dan peningkatan kualitas personil Satreskrim Polres Tanah Datar, kerjasama antara pihak kepolisian dan pemerintah untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

345
IND
p

PEMBUKTIAN TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN KELALAIAN MEDIK (NEGLIGENCE) DALAM PELAKSANAAN PRAKTEK KEDOKTERAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009

Indah Budi Yanti, 1410112136, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana), 161 Halaman, 2018

ABSTRAK

Beberapa tahun terakhir ini, laporan tentang kasus kelalaian medik semakin meningkat. Para penegak hukum dalam membuktikan kesalahan dokter tidak dapat melihat dari sisi akibat yang diderita oleh pasien saja, melainkan juga harus dilihat dari sisi kompetensi, keilmuan, dan disiplin profesi yang dimiliki oleh dokter. Semua hal itu harus dinyatakan secara jelas di sidang pengadilan supaya hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Kerja sama yang baik antar para penegak hukum juga dibutuhkan supaya penyelesaian kasus kelalaian medik dapat dilakukan dengan cepat dan lancar. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pembuktian terhadap dokter yang melakukan kelalaian medik (negligence) dalam pelaksanaan praktek kedokteran; (2) Apa saja kendala dalam pembuktian kelalaian medik (negligence) yang dilakukan oleh dokter? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis sosiologis. Adapun hasil penelitian pembuktian terhadap dokter yang melakukan kelalaian medik (negligence) dalam pelaksanaan praktek kedokteran yaitu Pertama, Meskipun di Indonesia sampai saat ini belum dapat dirumuskan hukum kedokteran secara khusus, hal itu tidaklah berarti bahwa profesi kedokteran di Indonesia bebas dari tanggung jawab hukum; karena aturan-aturan hukum yang berlaku secara umum (misalnya hukum pidana, perdata, administrasi dan sebagainya) tetap dapat diberlakukan terhadap profesi kedokteran, sejauh aturan khusus untuk itu memang belum dapat diwujudkan.; kedua, Hukum Kedokteran termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum dan dengan demikian berlaku asas-asas serta prinsip-prinsip Ilmu Hukum, sama sekali bukan prinsip-prinsip Ilmu Kedokteran, ; ketiga, kendala yang dihadapi adalah sulit mendapatkan barang bukti seperti rekam medik; rekam medik hanya dapat dibaca oleh ahlinya; dan kurangnya keterbukaan dalam kasus kedokteran. Pemeriksaan kasus kelalaian medik seharusnya dengan menjalin kerjasama yang baik antar semua pihak agar terselesaikan dengan lancar serta para penegak hukum seharusnya juga diberikan pendidikan mengenai kedokteran supaya tidak kesulitan dalam menyelesaikan kasus kedokteran.

Kata Kunci: Pembuktian, Dokter, Kelalaian Medik (Negligence), Praktek Kedokteran.

345
IND
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH (POLDA) SUMATERA BARAT

Indah Yolanda Fitri, 1410111071, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana), 69 halaman, 2018

ABSTRAK

Mempunyai pekerjaan adalah hak semua individu, akan tetapi sering kali tenaga kerja yang berkerja adalah seoranga anak yang bahkan masih berusia dibawah umur. Anak sebagai bagian dari masyarakat terkadang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bisa berbenturan dengan aturan hukum yang mengatur tatanan hidup masyarakat. Perbincangan sekarang ini dikalangan para pakar hukum dan HAM lebih banyak diletakkan pada anak sebagai korban daripada anak sebagai pelaku kehajatan. Penekanan anak sebagai korban adalah sesuatu pemikiran logis karena sudah merupakan keyakinan universal dikalangan masyarakat bahwa anak merupakan sosok individu yang lemah sejalan dengan perkembangan fisik dan usia biologis. Akan tetapi masih banyak saja oknum-oknum yang memanfaatkan anak demi mendapatkan keuntungan yang banyak. Undang- undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang melarang pengusaha mempekerjakan anak dibawah umur. Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum agar dapat tumbuh dengan wajar dan mempunyai masa depan yang baik. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah (1) Apakah faktor penyebab anak menjadi korban tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur di kepolisian daerah (polda) sumatera barat? (2) Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur di kepolisian daerah (polda) sumatera barat? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis (empiris). Adapun hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Di Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat yaitu Kepolisian Daerah Sumatera Barat hanya mempunyai kasus anak yang dipekerjakan sebagai PSK yang mana kasus anak yang bekerja sebagai pengamen, pengemis ataupun anak yang bekerja sebagai buruh tidak pernah sampai kasusnya di kepolisian. Anak yang bekerja sebagai PSK mendapat perlindungan hukum berupa panti rehabilitasi yang memberi keterampilan, bimbingan rohani dan mental serta kegiatan lainnya agar anak nantinya tidak mengulangi pekerjaannya lagi. Akan tetapi banyak dari anak yang sudah selesai menjalani rehabilitasi setelah itu anak tersebut kembali mengulangi pekerjaannya, sehingga berada di panti rehabilitasi menjadi sia-sia.

342
IND
p

PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATACARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IB PARIAMAN

Indah Permata Putri, 1410112007, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018, 68 halaman

ABSTRAK

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Untuk itu, Mahkamah Agung melalui PERMA No. 2 Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, memberikan terobosan baru dalam penyelesaian suatu perkara sederhana, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman dan apa yang menjadi kendala dalam penerapan PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan PERMA No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman dalam penyelesaian perkara perdata yang diajukan melalui gugatan sederhana sudah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman juga sudah melakukan tugas sebagaimana mestinya. Penerapan PERMA No.2 Tahun 2015 tentang di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman pada umumnya telah memudahkan para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum, namun terdapat kendala dalam penerapan PERMA ini, diantaranya yaitu masyarakat kurang mengetahui tentang gugatan sederhana, hal ini terbukti dengan sedikitnya perkara yang teregister sebagai perkara dengan materi obyek gugatan sederhana dan juga tidak ada sosialisasi ataupun penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat sehingga masyarakat kebanyakan masih memilih proses perdata biasa walaupun nilai sengketa yang diajukan kecil.

Kata kunci : Hukum Acara Perdata, Gugatan Sederhana

346
ING
p

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DENGAN POLA ARBITRASE PADA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA PADANG (Studi Kasus Nomor: 43/PTS/BPSK-PDG/ARBT/X/2014)

Ingka Permata Zoelma, 1410111043, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK 1 (Hukum Perdata, 89 Halaman Tahun 2018)

ABSTRAK

Pada masa sekarang banyak terjadi sengketa baik dalam kegiatan di dunia bisnis, perdagangan, sosial budaya, ekonomi dan lain sebagainya, namun dalam penyelesaiannya melalui proses pengadilan sering sekali dihindari, baik bagi pihak yang dirugikan ataupun pihak yang digugat. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering dianggap hanya memakan waktu, biaya yang mahal, tidak efesien serta banyak oknum- oknum yang cenderung mempersulit pencari keadilan. Berdasarkan pertimbangan ini maka para pihak lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang dirasakan lebih objektif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat pilihan penyelesaian di luar pengadilan yakni Alternatif Penyelesian Sengketa yang terdiri atas: Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sering ditempuh dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yaitu melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu penyelesaian sengketa yang diminati oleh pihak-pihak yang sedang dalam perkara perdata adalah arbitrase. Arbitrase menurut Pasal 1 angka 11 Kepmenperindag Nomor: 350/MPP/kEP/2001 yang dimaksud dengan Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Perumusan masalah dalam pembuatan skripsi ini adalah bagaimana Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pola Arbitrase pada BPSK Kota Padang dan bagaimana Kekuatan Hukum Sengeketa Konsumen Melalui Pola Arbitrase pada BPSK Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dijelaskan bahwa Pola penyelesaian sengeketa melalui pola arbitrase di BPSK Kota Padang dilaksanakan dengan cara cepat, sederhana dan tidak berbelit-belit dan hakim dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan azas dan ketentuan Hukum Acara Perdata pada umumnya. Dalam kekuatan hukum nya merupakan putusan yang final dan mengikat para pihak sehingga para pihak harus dengan etikad baik menjalankan hal yang sudah disepakati. Hal ini terlihat dengan begitu konsisten para pihak dalam melaksanakan putusan dan bertanggung jawab.

342
INT
a

ANALISIS KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BANTU YANG INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Intan Nilam Sari, 1410111055, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 89 halaman, 2018

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara bantu yang dibentuk melalui Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang di dalam Undang – Undang pembentukannya dinyatakan sebagai lembaga negara bantu yang independen dalam melaksanakan fungsinya tidak memposisikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai dengan "trias politica" dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Permasalahan yang terjadi mengenai kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang Independen sebagai lembaga negara bantu dan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara bantu setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam ranah eksekutif. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara bantu yang independen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia kemudian memahami dan mengerti apa yang menjadi permasalahan dasar mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tentang kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga bantu negara di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan. Tulisan ini menghasilkan penulisan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga bantu yang bersifat independen yang tidak terdapat dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif namun Komisi Pemberantasan Korupsi berada di dalam kekuasaan sendiri yang disebut dengan "indepent agencies". Akibat dari Komisi Pemberantasan Korupsi dimasukkan ke dalam cabang kekuasaan eksekutif, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dijadikan objek pengawasan oleh DPR yang dapat mengganggu sifat independensi yang diberikan oleh Undang-undang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang ebagai organ kekuasaan di luar konsep "trias politica" Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan kewenanganya sebagai lembaga independen tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

342
IQB
p

PELAYANAN IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA PARIAMAN

Iqbal Satria, BP : 1310111267. Program kekhususan Hukum Administrasi Negara, 62 Halaman

ABSTRAK

Perizinan adalah salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, pelayanan perizinan merupakan proses yang paling kompleks, birokrasi perizinan yang rumit menyebabkan banyaknya pelaku usaha yang tidak berizin. Sistem dan prosedur pelayanan perizinan yang baik merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan suatu upaya Pemerintah dalam melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan demi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah. Kepemilikan surat izin usaha perdagangan merupakan kewajiban seseorang yang akan menjalankan suatu usaha perdagangan, tetapi kenyataannya masih banyak terdapat pelaku usaha yang tidak mempunyai izin. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: pertama, bagaimanakah pengaturan pelayanan izin usaha perdagangan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman. Kedua, bagaimanakah mekanisme pelayanan izin usaha perdagangan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pariaman. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelayanan izin usaha perdagangan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pariaman berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, ada beberapa Pasal yang diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan akan tetapi belum diikuti oleh KP2TPM Kota Pariaman. Mekanisme pelayanan izin usaha perdagangan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pariaman telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang diwujudkan dalam SOP KP2TPM Kota Pariaman, tetapi masih terdapat sedikit perbedaan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberian izin usaha perdagangan yaitu kurang validnya data yang diberikan oleh pemohon izin, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jenis dan kriteria izin usaha perdagangan, minimnya fasilitas pendukung pelayanan perizinan.

Kata kunci: Perizinan, Surat Izin Usaha Perdagangan, KP2TPM

347.05
IRA
t

TINJAUAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN LELANG BARANG SITAAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Ira Asiska, 1620123015 Mahasiswa Prodi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa: "Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut". Permasalahan dalam tesis ini adalah: 1)Apa dasar hukum lelang barang hasil sitaan tindak pidana korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi?, 2)Bagaimana pelaksanaan lelang barang sitaan hasil tindak pidana korupsi yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?, dan 3) Apakah yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pelelangan barang tersebut dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?, Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Teori yang digunakan adalah teori pengawasan, teori kepastian hukum, dan teori kewenangan. Pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis-normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitan hukum yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (ordinary crimes), akan tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crimes). Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi masih belum tertutupi dan keresahan masyarakat masih tinggi terhadap penegakan hukumnya. Hasil Pelelangan benda yang dilakukan oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagaian dari barang sitaan yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan benda tersebut. Benda hasil sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk benda yang cepat rusak atau membahayakan, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau dimusnahkan.

Kata Kunci: Lelang Eksekusi, Barang Sitaan, Komisi Pemberantasan Korupsi,

344.09
IRF
f

FATWA HARAM ROKOK BERDASARKAN PUTUSAN MAJELIS TARJIH DAN TADJID MUHAMMADIYAH NOMOR 6/SM/MTT/III/2010 FATWA HARAM ROKOK DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (STUDI KASUS MUHAMMADIYAH WILAYAH SUMATERA BARAT)

Irfan Arifin, 1210111024, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 66 Halaman, Pembimbing : Hj.Dian Amelia S.H, M.H & Ali Amran S.H, M.H

ABSTRAK

Rokok di Indonesia bukan lagi benda asing untuk dikonsumsi, karena sudah menjadi suatu kebiasaan ditengah-tengah masyarakat. Sebagian orang telah menjadikan rokok sebagai kebutuhan hidup yang tidak bisa ditinggalkan. Aktivitas yang berkembang dewasa ini khususnya di Indonesia adalah perilaku merokok. Merokok dianggap sebagai hal yang biasa oleh masyarakat. Fenomena yang ada bahwa merokok tidak hanya menjadi komoditi kaum pria dewasa, bahkan diantaranya adalah kaum hawa dan yang lebih miris lagi, tidak sedikit jumlah anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar sudah konsumtif terhadap rokok. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, Apa latar belakang Muhammadiyah mengharamkan rokok. Kedua, Bagaimana keharaman rokok berdasarkan putusan majelis tarjih dan tajdid Muhammadiyah nomor 6/SM/MTT/III/2010 di lihat dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tenang kesehatan. Ketiga, Bagaimana Implementasi putusan majelis tarjih dan tajdid Nomor 6/SM/MTT/III/2010. Dalam penelitian ini, jenis penelitian adalah empiris. Metode pengumpulan datanya adalah dengan studi dokumen dan wawancara. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode Kualitatif. Hasil penelitian mengenai latar belakang Muhammadiyah mengharamkan rokok adalah mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai bagian dari tujuan syariah (Hukum Islam). Adanya beberapa dalil-dalil yang melandasi diambilnya keputusan ini, bahwa merokok hukumnya haram. Mengenai keharaman rokok berdasarkan putusan majelis tarjih dan tajdid muhammadiyah nomor 6/SM/MTT/III/2010 dilihat dari Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.. Muhammadiyah wilayah Sumatera Barat juga telah bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan dinas Pendidikan. Dalam salah bentuk pelaksanaan dari putusan haram rokok ini. Banyak mudarat yang ditimbulkan oleh rokok. Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah Islam.

347.05
IRM
p

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN USAHA PENGUMPULAN, PEMASOK, PENYEDIA DAN PENJUALAN BESI TUA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1707 K/PDT/2015)

Irma Aisyah, 1410111097, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 64 Halaman, 2018

ABSTRAK

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar tentunya memerlukan permodalan dalam kegiatan usahanya. Pemenuhan modal tersebut dapat diperoleh dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama dengan para pihak tentunya membutuhkan perjanjian agar mengikat para pihak yang bersangkutan secara hukum. Perjanjian ini harus didasari dengan itikad baik mulai dari sebelum diciptakannya perjanjian, hingga sampai berakhirnya perjanjian. Itikad baik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik). Perjanjian yang diteliti dalam penelitian ini adalah perjanjian antara pihak yang menyediakan modal dengan pihak yang menjalankan usaha pengumpulan, pemasok, penyedia dan penjualan besi tua. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam perjanjian usaha pengumpulan, pemasok, penyedia dan penjualan besi tua, 2). Apa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan asas itikad baik dalam suatu perjanjian usaha pengumpulan, pemasok, penyedia dan penjualan besi tua. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dengan analisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua pada awalnya diiringi dengan itikad baik. Pihak pertama memberikan modal kepada pihak kedua dan memberikan fee sebesar 20% dari modal kepada pihak pertama sebagaimana diperjanjikan. Namun pada bulan berikutnya perjanjian ini tidak sesuai dengan asas itikad baik, hal ini dikarenakan ada beberapa hambatan dan kendala dalam penerapan asas ini. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan asas itikad baik dalam perjanjian usaha pengumpulan, pemasok, penyedia dan penjualan besi tua yaitu keadaan ekonomi yang tidak mendukung dan berbagai keperluan lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

347.09
IZZ
p

PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PERKARA NOMOR 04/KPPU-I/2016 TENTANG PERJANJIAN PENETAPAN HARGA

Izzatul Madhani, 1210111028, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 91 Halaman, 2018

ABSTRAK

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah salah satu lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi jalannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah memberikan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini mengkaji tentang adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat tersebut yang dilakukan oleh 2 (dua) pelaku usaha yang memiliki posisi dominan di pasar penjualan skuter matik 110 – 125 cc di wilayah Indonesia yaitu PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor. Laporan dugaan adanya indikasi pelanggaran yang diajukan oleh Tim Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan secara tegas bahwa kedua pelaku usaha melanggar aturan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perjanjian Penetapan Harga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempersoalkan perjanjian penetapan harga dalam pasar penjualan skuter matik dan untuk mengetahui pertimbangan Majelis Komisi dalam menetapkan amar putusan dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan meneliti asas hukum persaingan usaha yaitu asas demokrasi ekonomi dan teori hukum dengan pendekatan per se illegal. Sumber data primer diambil langsung dari Draft Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan hasil wawancara dengan salah satu Dosen Hukum Universitas Andalas yang pakar di bidang Hukum Persaingan Usaha. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah hal yang melatarbelakangi diangkatnya kasus perjanjian penetapan harga ini karena timbulnya kecurigaan yang disebabkan oleh penguasaan pasar penjualan skuter matik secara dominan oleh kedua pelaku usaha dan menimbulkan inisiatif dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menyelidiki kasus tersebut.

Kata Kunci: Pertimbangan, Perjanjian, dan Penetapan Harga

345
IND
u

UPAYA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES KOTA SOLOK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI KOTA SOLOK

Indra Sanjaya.1410111009.Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK IV (Hukum Pidana.74 Halaman.Tahun 2018)

ABSTRAK

Pencurian hewan ternak merupakan tindak pidana yang menonjol dan cukup banyak kriminalitas di berbagai wilayah Sumatera Barat termasuk di wilayah Kota Solok. Tindak pidana pencurian hewan ternak merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan orang, yang dapat menimbulkan rasa tidak aman dan meresehkan masyarakat,Kepolisian juga merupakan aparat penegak hukum dimana dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang di atur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Aparat penegak hukum terutama Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak di Kota Solok, dimana bertujuan untuk menjaga keamanan dan tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apa saja penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak wilayah hukum Polres kota Solok, bentuk upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Kota Solok. Lalu apa kendala kepolisian dalam upaya penanggulangan tersebut dan bagaimana kepolisian mengatasi kendala yang ditemui. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan sekunder berupa buku, dokumen dan hasil wawancara dengan narasumber terkait skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak di wilayah hukum Polres Kota Solok, faktor internal: faktor ekonomi, faktor moral, faktor eksternal: faktor kelalaian masyarakat, faktor lingkungan tempat tinggal dan sosial (pergaulan) , dan faktor penegak hukum. Bentuk upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Kota Solok yakni dengan cara preventif dan represif. Upaya preventif ,member himbauan, memasang spanduk, melakukan razia, melakukan patroli dan upaya represif, menerima laporan, mencari saksi, melakukan penyelidikan,menindak pelaku tindak pidana Kendala yang dihadapi masyarakat kurang tanggap melapor, masyarakat enggan menjadi saksi, sulit mencari barang bukti dan jaringan pencurian tersebut luas, ada juga berapa saran diharapkan kepada aparat penegak hukum kedepannya agar bekerja sama dengan masyarakat seperti memberikan penyuluhan, kepolisian Resor Kota Solok agar dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak yang terjadi di Kota Solok, masyarakat diharapkan dapat membantu pihak kepolisian dalam hal dapat memberitahukan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pencurian hewan ternak.

345
DAV
p

PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT-OBATAN ILEGAL DI KOTA PADANG (Studi Kasus di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang)

David Jalmas, 1310112081, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 74 Halaman, Pembimbing: Tenofrimer, S.H.M.H dan Yandriza, S.H,M.H.

ABSTRAK

BPOM merupakan lembaga pemerintah yang melakukan pengawasan terhadap semua jenis produk termasuk obat dan makanan baik legal maupun ilegal, serta memiliki PPNS yang diatur dalam UU dan diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang obat dan makanan termasuk terhadap obat-obatan ilegal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan peranan PPNS Balai POM dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal di Kota Padang, permasalahan dalam skripsi ini adalah, 1).Bagaimana Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal di Kota Padang, 2).Kendala apa yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam pelaksaan perannya untuk menanggulangi tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal di Kota Padang, 3). Upaya apa saja yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal di Kota Padang.. Hasil penelitianmemperlihatkanbahwa. 1). Peran penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal di Kota Padang masihkurangmaksimalkarenabanyakkasus yang terjaditapi pelakunya sedikit yang di bawa keranah hokum hanya sanksi administrative sehingga tidak membuat efek jera bagi pelaku dan kemungkinan pelaku menjual lagi sediaan farmasi illegal tersebut, 2). Hambatan yang dihadapi penyidik PPNS BPOM di Padang dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik illegal, a). Faktor penegak hukumnya, b). Faktor sarana dan prasarana, c). Fakto rmasyarakat, d). Tersangka melarikan diri, e). Sering dikembalikannya berkas dari Kejaksaan kepenyidik pegawai negeri sipil. 3). Upaya yang Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggualngi Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan Ilegal Di Kota Padang, a). Upaya Prenfentif, b). Upaya Refresif

345
JER
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRES KOTA PADANG PANJANG (Studi di Polres Kota Padang Panjang)

Jerri Setiawan. 1410112156. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV Hukum Pidana. 64 Halaman. Tahun 2018

ABSTRAK

Permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang sudah menjadi ancaman bagi masyarakat, baik itu nasiaonal maupun internasional. Penyalahgunaan narkotikapun hampir setiap hari menjadi perbincangan. Pada pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menjelaskn bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Kota padang panjang yang terkenal dengan kota serambi mekah yang seperti diketahui kuat akan ajaran agamanya, tidak luput dari penyalahgunaan narkotika ini. Penyalahgunaan narkotika yang bersifat borderless artinya dapat terjadi pada siapa saja, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, bahkan orang tua sekalipun bisa menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hal tersebutlah penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polres kota Padang Panjang, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data dengan proses wawancara, adapun permasalahan yang penulis teliti adalah 1) Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, 2) Apa kendala yang dihadapi penyidik dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, 3) Untuk mengetahui bagaimana cara penyidik dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidanan penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian yang didapat penulis adalah 1) Pelaksanaan penyidikan yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP. 2) Kendala yang dihadapi oleh penyidik polres kota Padang Panjang adalah belum tercukupinya dana untuk melakukan penyidikan, sarana dan prasarana yang masih dinilai kurang, dan kurangnya kesadaran dari masyarakat akan bahaya narkotika. 3) Upaya yang dilakukan oleh penyidik narkoba polres kota Padang Panjang adalah dengan menggunakan dana dari para penyidik terlebih dahulu dengan melaporkan kepada atasan atas kekurangan dana, mempergunakan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal, memberikan sosialisasi tentang narkoba kepada masyarakat kota Padang Panjang.

346
JES
p

PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI ANTARA PT BANK MANDIRI CAB. SIMPANG KANDANG PADANG DENGAN NASABAH DEBITUR OLEH PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG (PERKARA NO. 89/PDT.G/2014/PN.PDG)

Jesshie Thirine, 1410112081, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata, 63 Halaman, Tahun 2018

ABSTRAK

Adanya perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki nilai strategis dalam perekonomian. Perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan jasa lainnya. Adanya pengucuran kredit yang dilakukan oleh bank pasti mengandung suatu risiko. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan cara mengalihkan resiko kepada pihak lain diluar diri manusia dalam hal ini adalah lembaga asuransi. Asuransi kebakaran merupakan salah satu dari jenis asuransi yang paling baik perkembangannya dan paling luas yang diterima masyarakat. Didalam perjanjian asuransi terdapat keterikatan, keterikatan itu dibuktikan dengan adanya polis. Apabila terjadi evenemen atas objek yang ditanggung didalam polis asuransi, maka tertanggung berhak atas uang ganti rugi. Tuntutan ganti kerugian oleh tertanggung kepada penanggung disebut klaim. Dalam skripsi ini perumusan masalah yang dibahas adalah : 1) Apa saja penyebab terjadinya sengketa klaim asuransi kebakaran pada PT. Bank Mandiri Cab. Simpang Kandang Padang. 2) Bagaimana penyelesaian sengketa klaim asuransi kebakaran di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. 3) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dalam mengeluarkan putusan no. 89/PDT.G/2014/PN PDG. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang menekankan pada norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara meneliti data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang melalui tahapan penelitian kepustakaan : 1) Penyebab terjadinya sengketa dalam klaim asuransi kebakaran disamping kurangnya pemahaman dan pengetahuan tertanggung mengenai kontrak asuransi, minimnya informasi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung terkait produk yang ditawarkan juga menjadi penyebab terjadinya sengketa. 2) Penyelesaian sengketa klaim asuransi kebakaran pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dengan putusan klaim asuransi kebakaran yang dituntut tertanggung tidak dapat dibayarkan. 3) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Padang telah bersifat final, tidak ada upaya hukum lain dan para pihak wajib melaksanakan ketetapan yang telah diputuskan

Kata kunci : kredit, jaminan, asuransi

345
JESS
p

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENADAHAN HASIL PENCURIAN SEPEDA MOTOR OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG

Jessica Gusti Rahmatanti.1410111103. Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK IV Hukum Pidana.82 Halaman.Tahun 2018.

ABSTRAK

Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang sulit diungkap karena pelaku dari penadahan itu sering berdalit bahwa barang yang diperoleh itu adalah hasil kejahatan. Dengan kata lain tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang tidak bisa berdiri sendiri, ,artinya dengan terjadinya tindak pidana penadahan harus adanya kolerasi hubungan dengan tindak pidana lain yang mendukung maka tindak pidana ini tidak bisa diwujudkan dan salah satu tindak pidana pendukungnya adalah tindak pidana pencurian. Oleh karena itu , maka pihak kepolisian harus jeli dalam sehingga tidak mudah terpengaruh dengan pengakuan tersangka tersebut. Upaya kepolisian sangat diperlukan mengungkap kasus tindak pidana penadahan. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian tentang upaya penanggulangan tindak pidana penadahan hasil pencurian kendaraan roda dua oleh satuan reserse kriminal resor kota padang. Pada penulisan ini terdapat 2 rumusan masalah yang akan dibahas. Pertama, Bagaimanakah Upaya penanggulangan tindak pidana penadahan hasil pencurian kendaraan roda dua oleh satuan reserse kriminal kepolisian resor kota padang? Dan yang kedua, Apakah kendala yang dihadapi oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan hasil pencurian kendaraan roda dua? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Sosiologis (Socio legal research) dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum(Perundang- undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan prakteknya dilapangan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumen dan wawancara , kemudian dianalisis secara kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian penulis dapat simpulkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana penadahan hasil pencurian kendaraan roda cukup efektif tetapi terkadang memiliki kendala-kendala yang membuat proses penanggulangan tindak pidana penadahan menjadi terganggu. Saran dari penelitian ini adalah Bagi Satuan Reserse Kriminal Resor Kota Padang untuk melakukan pengawasan dan koordinasi yang lebih optimal terhadap tindak pidana penadahan kendaraan roda dua agar tindak pidana ini setiap tahunnya mengalami pengurangan bukan peningkatan. Serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku agar memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan ini lagi.

345
JHI
p

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP AOP DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN PASAL 335 AYAT (1) KE-1 KUHP (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 1554 K/PID/2013)

Jhivo Wilanda.1410112125.Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK IV (Hukum Pidana). Halaman 84. Tahun 2018.

ABSTRAK

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar,dan pendidikan menengah. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian tentang guru bagian kesiswaan pada SDN Panjalin Kidul V bernama Aop Saopudin ketika mencukur rambut siswanya yang sudah gondrong. Hal ini membuat Aop berhadapan dengan hukum pidana. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah (1) Apakah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335 Ayat (1) KUHP terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/PID/2013. (2) Bagaimanakah pembuktian tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335 Ayat (1) KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/PID/2013. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan Undang-Undang (Statuta Approach), dimulai analisa terhadap putusan hakim, pasal-pasal dalam peraturan yang mengatur permasalahan kemudian dikaitkan dengan kasus yang akan diteliti. Teknik pengumpulan datanya studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dimana pertimbangan hakim yang mambatalkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka dan Pengadilan Tinggi Bandung dan mengadili sendiri perkara tersebut sudah tepat. Karena, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Perbuatan Aop terhadap siswanya sudah merupakan tugasnya sebagai guru, hal ini telah diatur dan dijamin oleh Undang- Undang serta Peraturan Pemerintah. Perbuatan tersebut termasuk kedalam alasan peniadaan pidana sebagai dasar pembenar yakni melaksanakan ketentuan Undang- Undang yang diatur dalam Pasal 50 KUHP. Serta alasan peniadaan pidana di luar Undang-Undang sebagai hak mendidik guru terhadap siswanya. Sedangkan Pembuktian terhadap unsur-unsur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi yakni tidak terpenuhi unsur paksaan yang melawan hukum dalam perbuatan tersebut. Serta alat-alat bukti yang ada dipersidangan tidak dapat meyakinkan hakim Mahkamah Agung untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Aop). Dimana dalam sistem pembuktian negatif wetellijk yang paling dominan adalah keyakinan hakim.

346
KAT
p

PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. AXA MANDIRI CAB. PADANG

Katrin Valencia Fardha, 1410111072, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata Murni, 73 Halaman, tahun 2018

ABSTRAK

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati konsumen karena asuransi ini memberikan pertanggungan atas kerugian/berkurangnya nilai secara financial atas objek pertanggungan kendaraan bermotor yang disebabkan karena menabrak, ditabrak, dicuri, terbakar dan tergelincir. Sengketa ini terjadi disebabkan atas kurang mengertinya dan memahaminya masing-masing pihak tersebut mengenai isi didalam polis yang menyebabkan tertanggung terlambat untuk melaporkan mengenai kehilangan kendaraan bemotor pada pihak penanggung. Proses Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Kehilangan Kendaraan Bermotor sesuai dengan POJK adalah diselesaikan pada LAPS yaitu Badan Media dan Arbitrase Indonesia tetapi dalam kasus ini tertanggung membawa kasus pada BPSK Kota Padang, sesuai dengan adanya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pihak yang merasa dirugikan dapat membawa sengketa pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. . Dan apabila para pihak merasa dirugikan atau menolak putusan BPSK maka dapat mengajukan pada Pengadilan Negeri. Dalam skripsi ini perumusan masalah yang dibahas adalah : 1. Bagaimana proses klaim asuransi yang diberlakukan oleh PT.Axa Mandiri Insurance terhadap tertanggung dalam hal objek yang diasuransikan “hilang” 2. Apa saja permasalahan yang muncul dalam proses klaim asuransi kehilangan kendaraan bermotor pada PT. Axa Mandiri Insurance 3.Bagaimana penyelesaian sengketa klaim asuransi kehilangan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologis empiris. Data penelitian meliputi data primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa perkara diselesaikan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dengan putusan pihak asuransi (penanggung) membayarkan ganti kerugian pada pigak tertanggung.

345
KEK
i

IMPLEMENTASI CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN, OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT TAHUN 1984 DALAM KASUS TERORISME DI INDONESIA

Keke Yona Fauziah, 1410112049, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018, Pembimbing: Prof. H, Firman Hasan, S.H., LLM. dan Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Larangan terhadap penyiksaan dan segala bentuk perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat bersifat absolut dan tanpa pengecualian. Larangan ini diatur dalam instrumen internasional hak asasi manusia dan tidak satu negarapun memperbolehkan penyiksaan terjadi di wilayah negaranya. Meskipun begitu, praktik penyiksaan masih terjadi di banyak negara termasuk Indonesia. Sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Menentang Penyiksaan, Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum untuk mencegah tindak penyiksaan terjadi di wilayah kekuasaannya. Selanjutnya, menjamin bahwa penyiksaan merupakan suatu kejahatan yang diatur dalam KUHP Indonesia. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Konvensi Menentang Penyiksaan di Indonesia dalam praktik penyiksaan yang digunakan terhadap terduga tindak pidana terorisme, serta upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mencegah terulangnya pelanggaran terhadap Konvensi ini dalam mengatasi kasus-kasus terorisme. Untuk tujuan penelitian, penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi Konvensi Menentang Penyiksaan di Indonesia belum implementatif dan efektif karena Indonesia belum memiliki regulasi hukum nasional yang mengatur tentang penyiksaan secara komprehensif dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi. Upaya Indonesia dalam mencegah terulangnya pelanggaran terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, terbilang lamban sehingga praktik penyiksaan masih terus terjadi. Dari hasil penelitian ini Indonesia perlu melakukan revisi terhadap KUHP dan membentuk Undang-undang khusus tentang penyiksaan. Indonesia juga harus segera meratifikasi protocol opsional sebagai mekanisme pencegahan praktik penyiksaan dengan melakukan kunjungan rutin ke tempat-tempat penahanan.

Kata Kunci: Implementasi, Konvensi Menentang Penyiksaan, Kasus Terorisme

342
KEV
p

PEMANFAATAN TANAH JALUR KERETA API UNTUK BANGUNAN PADA DAERAH ALAI PARAK KOPI KOTA PADANG

Kevin Pratama Putra. 1110113139. Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VIII (Hukum Administrasi Negara). 66 Halaman. Tahun 2018.

ABSTRAK

Salah satu persoalan yang belum selesai dalam rangka reforma agraria adalah soal pemanfaatan tanah Negara. Ternyata pada Pasal 63 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian memperbolehkan bangunan hunian asal tidak mengganggu pandangan bebas masinis. Kemudian pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) menjelaskan bahwa tanah yang merupakan prasarana dari PT KAI (Persero) merupakan salah satu yang dapat diusahakan dan dimanfaatkan. PT KAI (Persero) memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang berada pada kawasan Alai arak Kopi Kota Padang, hal demikian tentunya salah satu pemanfaatan aset yang dilakukan PT KAI (Persero) harus memperhatikan tata cara pemanfaatan tanah sesuai dengan UUPA, UU Perkeretaapian dan PP Penyelenggaraan Perkeretaapian. Tanah yang telah dilandasi suatu hak akan terjamin kepastian hukum mengenai subyek maupun obyeknya. Tanah tersebut harus dikelola dan digunakan sesuai dengan peruntukan pemberian haknya. Pada kenyataan tanah PT KAI (Persero) sekarang masih banyak yang belum dilandasi oleh suatu hak menurut ketentuan hukum pertanahan nasional melainkan masih berdasarkan pada pengaturan penguasaan tanah semasa zaman Hindia Belanda (Grondkaart), yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana proses pemanfaatan tanah untuk bangunan pada kawasan Alai Parak Kopi yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia DIVRE II Sumatera Barat? 2) Bagaimana kedudukan PT Kereta Api Indonesia DIVRE II Sumatera Barat sebagai operator penyelengara transportasi dalam pemanfaatan tanah? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak dalam hal tindakan sepihak yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia approach). Penelitian ini bersifat deskriptif, jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa : Pertama, Terdapat pemanfaatan tanah PT KAI (Persero) dengan masyarakat Alai Parak Kopi yang berujung pada perjajian sewa aset. Akan tetapi PT KAI (Persero) tidak dapat melakukan perjanian sewa menyewa menurut Pasal 44 UUPA hanya tanah hak milik yang dapat disewakan, PT KAI (Persero) adalah Badan Hukum yang tidak dapat mempunyai Hak Milik, yang bisa di berikan kepada pihak lain adalah terhadap tanah dengan Hak Pengelolaan tetapi bukan dalam bentuk sewa. Ketiga Bila berdasarkan perjanjian sewa aset telah di jelaskan kedudukan para pihak serta penyelesaian perselisihan yang mana ini termasuk kepada upaya represif, para pihak apabila terjadi sengketa untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Pemanfaatan tanah, jalur kereta api, untuk banguan, PT Kereta Api (Persero)

345
KHA
p

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI SATUAN RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG

Khalilur Rahman Hasibuan, 1410111149, Fakultas Hukum Universitas andalas, PK IV (Hukum Pidana), 76 Halaman, 2018

ABSTRAK

Anak sebagai subjek hukum juga memiliki hak-hak tertentu. Di dalam sistem peradilan pidana anak, anak memiliki hak-hak tertentu pada proses peradilan pidana. Salah satu hak anak dalam proses peradilan pidana adalah hak untuk tidak ditahan kecuali sebagai upaya terkhir sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf G Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dikaitkan dengan kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak, hak anak untuk tidak ditahan kecuali sebagai upaya terakhir seringkali terabaikan. Upaya diversi yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukannya penahanan terhadap anak justru seringkali tidak dilakukan dan diabaikan. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di satuan reserse narkoba kepolisian resor kota padang?, (2) Apa saja kendala dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hakanak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di satuan reserse narkoba kepolisian resor kota padang, (3) Apa saja upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di satuan reserse narkoba kepolisian resor kota padang? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis sosiologis. Adapun hasil penelitian terhadap pelaksanaan perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di satuan reserse narkoba kepolisian resor kota padang yaitu perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yakni perlindungan atas hak anak untuk tidak ditahan kecuali sebagai upaya terakhir belum dapat terpenuhi. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan terhdap hak anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resor Kota Padang terdiri dari kendala internal dan eksternal. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika terbagi atas upaya mengatasi kendala internal dan eksternal.

342
KHA
h

HUBUNGAN KERJA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERKAIT DENGAN PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

Kharina Aggita Putri, 1410112054, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 67 halaman, 2018

ABSTRAK

Keuangan Negara sebagai bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk menjaga agar pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dapat terlaksana atas prinsip transparansi serta dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, maka menetapkan adanya suatu badan yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.dimana hasil pemeriksaan keuangan dari BPK diserahkan kepada lembaga Negara diantaranya DPR, DPD, dan DPRD. Maka dari itu bagaimana pengaturan hubungan kerja antara DPD dan BPK terkait dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara dan bagaimana tindak lanjut laporan atas hasil pemeriksaan pengelolaan APBN oleh DPD. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan. Tujuan Penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan hubungan kerja antara DPD dan BPK terkait dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Negara, serta untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut laporan atas hasil penegelolaan ABPN oleh DPD. Tulisan ini menghasilkan penulisan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan mengalami perluasan yang subtantif dan mendasar. Perluasaan tersebut juga menyangkut hal yang berhubungan dengan pertanggung jawaban hasil pemeriksaan keuangan sesuai dengan Pasal 23E ayat (2). Dalam UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 285 disebut bahwa DPD menindak lanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan Melakukan Pembahasan sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan BPK tersebut menjadi pertimbangan DPD terhadap hasil pemeriksaan BPK RI tersebut disampaikan kepada DPR, sebagai bahan pertimbangan bagi DPR dalam pembahasan rancangan undang-undang yang terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbaik.

Kata Kunci : DPD, BPK, Hubungan Kerja

342
KUR
k

KONSTITUSIONALITAS HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH(STUDI KASUS: PUTUSAN MAKHAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018)

KURNIA INTAN, 1410111142, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 halaman, 2018

ABSTRAK

Salah satu lembaga yang termuat dalam konstitusi ialah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR mempunyai wewenang, tugas, dan hak-hak untuk menjalankan fungsi sebagai lembaga negara. Selain itu, anggota DPR juga mempunyai hak-hak anggota, salah satunya adalah hak imunitas. Hak imunitas yang dimiliki anggota DPR diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hak imunitas saat ini menjadi persoalan publik mengingat keistimewaan berlakunya Undang-Undang yang mengatur tentang hak imunitas. Pengaturan hak imunitas dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 telah di uji di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018. Putusan tersebut telah memberikan hak imunitas kepada anggota DPR untuk dapat menggunakan hak tersebut dalam rapat atau luar rapat mengenai pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang mana dalam hal itu anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstitusionalitas hak imunitas anggota DPR dan menganalisis putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Dalam Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018, hakim MK telah mengeluarkan putusan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, dimana Pasal 245 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2018 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: Makhamah Kontitusi, Hak Imunitas, Anggota DPR

342
LID
m

MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIF LEGISLATOR DAN NEGATIF LEGISLATOR DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (Studi Kasus : Putusan No 46/PUU-XIV/2016 dan Putusan No 132/PUU- XIII/2015)

Lidya Rahmi, 1410111131, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 80 Halaman, 2018

ABSTRAK

Pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap konstitusi merupakan mekanisme checks and balances oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Sebagai lembaga yang putusannya bersifat final dan mengikat (final and binding) dan tidak memiliki upaya hukum lain. Maka selayaknya putusan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia dapat menegakkan prinsip negara hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Namun konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan belakangan ini telah menuai perdebatan mengenai positif legislator dan negatif legislator. Konsistensi atau tidak konsistensinya hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan pengujian undang-undang tercermin pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No 132/PUU-XIII/2015 yang pokok permohonannya sama- sama berujung kepada Mahkmah Konstitusi untuk melakukan perluasan norma pada pasal-pasal di KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam apakah Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi menjadi positif legislator melalui putusannya, karena secara normatif kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang hanya sebatas negatif legislator yaitu penghapus atau pembatal norma. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No 132/PUU-XIII/2015 adalah putusan yang sama-sama ditolak namun kedua putusan ini adalah putusan yang meminta Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai positif legislator. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengandung pertimbangan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah negative legislator yang lebih menekankan penggunaan asas judicial restraint dan memilih tidak membuat norma dan menjadi positive legislator sebagai bagian dari penegakan hukum progresif. Dibuatnya putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum filosofis dan sosiologis yang tidak terlepas dari penafsiran hukum.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, positif legislator, negatif legislator, konsistensi.

346
LIR
p

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ADAT BATAK TOBA DI SAMOSIR (Studi pada masyarakat adat Batak Toba di Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara)

Liriccia Hot Halawila Samosir, 1310111080, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2017, 67halaman

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang terpenting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan pria dan wanita dalam perkawinan tersebut tetapi juga kedua orang tua dari kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Akibat dari perkawinan itu menimbulkan bermacam-macam hubungan, yaitu masalah hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, serta masalah harta benda. Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur masalah harta bersama apabila terjadi perceraiaan diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukum masing-masing yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum lainnya. Dalam masyarakat adat Batak Toba berlaku hukum adat, baik dalam memutuskan bercerai maupun pembagian harta bersama. Masyarakat adat Batak Toba tidak mengenal adanya perceraian karena sangat ditentang dan dilarang. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana ketentuan pengaturan harta bersama dalam hukum adat Batak Toba di Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara ?, 2) Bagaimana pembagian harta bersama dalam hukum adat Batak Toba di Sianjur Mula-Mula, Kabuparen Samosir, Sumatera Utara ?, 3) Bagaimana status dan kedudukan perempuan dalam hukum adat Batak Toba terhadap berakhirnya suatu hubungan perkawinan ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan sifat penelitian deskritif untuk menggambarkan fakta yang diteliti di lapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan 1) Pengaturan harta bersama dalam hukum adat batak Toba di Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara mengacu pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 2) Pembagian harta bersama dalam hukum adat Batak Toba di Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara disebabkan oleh dua hal yakni oleh perceraian (cerai hidup) dan oleh kematian (cerai mati). 3)Status dan kedudukan perempuan dalam hukum adat Batak Toba terhadap berakhirnya suatu hubungan perkawinan adalah bahwa perempuan tersebut harus Dipaulak (dikembalikan) kepada keluarganya, apabila belum maka ia masih berada dalam keluarga suaminya.

345
LOL
p

PELAKSANAAN HAK MENDAPATKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN PENYANDANG DISABILITAS PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi di Unit Prlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang)

Loly Yasnita, 1410112031, Fakultas Hukum Universitas Andalas , 2018, Pembimbing : Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H. dan Riki Afrizal, S.H., M.H.

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban mengatur tentang hak-hak terhadap saksi atau korban termasuk hak mendapatkan pendamping dan penerjemah bagi penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan. Dalam peneltian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Hak Mendapatkan Pendamping Dan Penerjemah Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Penyandang Disabilitas Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Padang). Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana pelaksanaan hak mendapatkan pendamping dan penerjemah serta kendala dalam pelaksanaan hak mendapatkan pendamping dan penerjemah bagi korban tindak pidana perkosaan penyandang disabilitas pada tahap penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksaan hak saksi atau korban dalam mendapatkan pendamping dan penerjemah bagi korban tindak pidana perkosaan penyandang disabilitas pada tahap penyidikan masih kurang maksimal dalam pelaksaannya. Hal ini dikarenakan tidak adanya koordinasi antara kepolisian dengan LPSK akan tetapi kepolisian bekerjasama dengan LBH kota Padang. LBH telah memeberikan bantuan hukum terhadap korban penyandang disabilitas dalam pemeriksaan berupa pendamping pada saat pemeriksaan yang memberikan informasi berkaitan dengan proses penyidikan. Lain halnya dengan penerjemah, penyidik tidak menhadirkan penerjemah pada pemeriksaan bagi penyandang disabilitas ini. Akibatnya penyidik kesulitan dalam menjalin komunikasi dengan saksi korban penyandang disabiltas. Hal tersebut menyebabkan kasus tidak dapat dilanjutkan karena tidak cukup bukti. Kendala dalam menhadirkan penerjemah dikarenakan adanya kendala dari pihak kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan korban itu sendiri. Oleh karena itu, diharapkan kepada penyidik pada tahap penyidikan khususnya terhadap penyandang disabilitas, perlu adanya persiapan yang matang dengan adanya keahlian dalam menhadapi serta memahami keadaan kondisi fisik dan psikis korban. Agar dapat memperoleh keterangan guna membuat terang kasus tindak pidana perkosaan tersebut.

341
HAF
p

PENGATURAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DITINJAU DARI INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS DAN EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS (Studi Kritis Terhadap Larangan Pemakaian Jilbab Di Tempat Keja Swasta Dalam Putusan European Court Of Justice Nomor C-157/18 Dan C-188/15) (M

Hafizh Almufra, 1310112142, Hukum Internasional (PK VII), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 83 Halaman, 2018

ABSTRAK

Pada tahun 2017 lalu European Court of Justice (ECJ) telah mengeluarkan putusan pada kasus nomor C- 157/15 dan C-188/15 dilatarbelakangi oleh pemecatan dua karyawan swasta yang mengenakan jilbab dari dua negara yang berbeda. Hal tersebut terjadi karena perusahaan mempunyai aturan internal yang melarang hal tersebut dan yang lainnya karena pengaduan dari klien perusahaan. Putusan tersebut menimbulkan pro-kontra karena ada yang pendapat yang menganggap melanggar Hak Kebebasan Beragama. Karena putusan ECG bersifat final, putusan kini telah berlaku bagi seluruh perusahaan swasta di Eropa. Berikutnya penulis melakukan penelitian mengenai pengaturan hak kebebasan beragama ditinjau dari International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan European Convention on Human Rights (ECHR) dikaitkan dengan larangan pemakaian jilbab di tempat kerja swasta di Eropa serta hubungan kedua putusan ECJ dengan ICCPR dan ECHR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis nomatif dengan metode pengmpulan data melalui studi dokumen. Data yang diperoleh selama penelitian kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif, sehingga disajikan dalam bentuk pemaparan dan uraian hasil penelitian. Hasil penelitian dari studi kepustakaan menunjukkan bahwa ICCPR lebih banyak membahas hak kebebasan beragama dibanding ECHR dan jika dikaitkan dengan pelarangan jilbab di tempat kerja swasta keduanya mengatur bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama namun ECHR kurang mempertegas hal tersebut dikarenakan faktor budaya di Eropa juga kurang definisi konkret mengenai agama didalam kedua perjanjian internasional. Putusan ECJ C-157/15 menyatakan bahwa pemecatan karyawan dalam kasus tersebut merupakan diskriminasi tidak langsung, sedangkan kasus C-188/15 menyatakan bahwa pemecatan karywan dalam kasus tersebut merupakan diskriminasi langsung. Kedua putusan tersebut tidak berpengaruh pada pengaturan hak kebebasan beragama ICCPR karena Uni Eropa tidak menandatangani ICCPR namun puusan tersebut memiliki pengaruh terhadap ECHR karena menambah pengaturan baru yang berkaitan dengan kebebasan beragama.

341
MRI
p

PERANAN NON GOVERNMENT ORGANIZATION (NGO) DALAM PROSES PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL (Studi Kasus: Investigasi Greenpeace tahun 2011 Terhadap Pemakaian Kayu Ramin Dalam Kandungan Bubur Kertas Oleh Perusahaan Asia Pulp and Paper Di Perawang Riau)

M Ridho V.A, 1310112015, Hukum Internasional (PK VII), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 72 Halaman, 2018

ABSTRAK

Organisasi internasional adalah subyek hukum internasional yang dalam arti luas meliputi organisasi internasional publik (Inter-Governmental Organizations-IGO) dan organisasi internasional privat (Non Governmental Organizations-NGO). Organisasi internasional publik adalah subyek hukum internasional sedangkan organisasi internasional privat bukan subyek hukum internasional kecuali ICRC. NGO berperan dalam perlindungan hukum lingkungan internasional dapat diIihat dari perlindungan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) oleh Greenpeace, kasus ini bermula ketika Greenpeace melakukan investigasi yang berlangsung selam 1 tahun. Hasil penelitian laboratorium menunjukkan bahwa sampel yang diambil mengandung ramin jenis kayu yang dilindungi dalam kategori Apendix II di daftar CITES. Permasalahan yang dibahas terdiri atas: 1) Bagaimna status dan kedudukan NGO dalam hukum internasional? 2) Bagaimana peranan NGO dalam perlindungan hukum lingkungan internasional di tinjau dari kasus pemakaian kayu ramin dalam kandungan bubur kertas oleh perusahaan Asia Pulp and Paper? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi dokumen dan mempelajari aturan hukum yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian. Hasil penelitian yaitu: Status NGO internasional dalam hukum internasional diatur dalam Pasal 71 Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang memberikan status konsultatif kepada NGO Internasional dan kedudukan NGO internasional dapat dilihat dari kontribusi NGO dalalam penegakan hukum lingkungan internasional ketika aturan yang telah dibentuk dilanggar oleh pihak yang terikat dalam aturan tersebut. NGO berperan dalam proses perlindungan hukum lingkungan internasional di tinjau dari kasus pemakain kayu ramin dalam kandungan bubur kertas oleh perusahaan APP (Asia Pulp and Paper), Greenpeace sebagai NGO advokasi berperan aktif melakukan kampanye terhadap perusahaan APP yang memakai kayu ramin kepada masyarakat agar memeberikan tekanan kepada Negara untuk menegakan hukum dan memberi sanksi terhadap perusahaan APP.

Kata Kunci: Non Government Organization, Perlindungan Hukum dan Hukum Lingkungan Internasional

345
MSE
p

PENYIMPANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PENYIDIK (Studi di Kepolisian Resor Pesisir Selatan)

M Setiawan Yundra, 1110115003, Program Kekhususan Sistem Peradilan Pidana, Universitas Andalas, 92 Halaman

ABSTRAK

Penyimpanan benda sitaan tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP pada Pasal 44 ayat (1) dan (2) adalah di Rupbasan. Namun tidak semua dapat disimpan di Rupbasan, sesuai penjelasan pada Pasal 44 KUHAP Penyimpanan dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang pada tingkat pemeriksaan termasuk oleh penyidik. Terkadang dalam proses penyimpanan ini penyidik menemui berbagai permasalahan seperti kerusakan terhadap benda yang disita. Adapun permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yaitu; 1) Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab penyidik Polri dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Pesisir Selatan, 2) Apa saja yang menjadi kendala penyidik Polri dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Pesisir Selatan, 3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam mengatasi kendala terhadap penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif. Hasil penelitian terhadap permasalahan tersebut adalah,1) Tanggung jawab penyidik terhadap pelaksanaan penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Pesisir Selatan dimulai dari proses penyitaan, penyimpanan, dan pengembalian benda sitaan. Dalam pelaksanaan tanggung jawab penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres dilaksanakan oleh Penyidik Reskrim dengan koordinasi bersama Sat Tahti, 2) Kendala proses pelaksanaan tanggung jawab penyidik dalam penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Pesisir Selatan adalah belum adanya gudang penyimpanan Khusus untuk menyimpan benda sitaan itu sehingga benda sitaan banyak disimpan di ruang terbuka yang menyebabkan banyak kendaraan bermotor rusak, 3) Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala itu adalah dengan melakukan penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di tempat penyimpanan sementara dan segera mempercepat pembangungan ruang penyimpanan benda sitaan di Polres Pesisir Selatan. Oleh karena itu pihak terkait diharapkan segera membangun ruang khusus untuk penyimpanan benda sitaan tindak pidana pencurian di Polres Pesisir Selatan agar benda sitaan atau barang bukti dapat tersimpan dengan baik dan memudahkan dalam pelaksanaan proses peradilan.

Kata Kunci : Penyimpanan Barang Bukti, Barang Bukti, Penyidik

346
MHA
p

PEMBAGIAN WARISAN BAGI PEWARIS YANG TIDAK MEMPUNYAI KETURUNAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.79/Pdt.G/2012/PN.AB).

M.HAFIZ ABDULLAH, 1520123070, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas, tahun 2018

ABSTRAK

Salah satu dasar hukum pembagian warisan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang- undang Hukum Perdata. Empat golongan ahli waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu golongan Pertama : suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852), Golongan Kedua : orang tua dan saudara kandung pewaris, Golongan Ketiga : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris, dan Golongan Keempat : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, dalam hal ini berlaku ketentuan golongan yang terdahulu menutup golongan kemudian dan sebaliknya. Jadi, jika ada ahli waris golongan pertama maka golongan kedua tidak dapat mewarisi, sebaliknya jika ahli waris pertama tidak ada maka golongan kedua menjadi ahli waris. Sebuah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 79/Pdt.G/2012/PN.AB memutuskan mengabulkan gugatan penggugat yang salah satu petitumnya menghilangkan hak seorang yang terdaftar atas nama pemegang sertipikat hak milik, karena pemegang sertipikat tersebut meninggal dunia, tidak meninggalkan anak dan suami. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, dan menganalisis pembagian warisan bagi pewaris yang tidak mempunyai keturunan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 79/Pdt.G/2012/PN.AB, mengetahui, dan menganalisis pertimbangan hakim mengenai pembagian warisan bagi pewaris yang tidak mempunyai keturunan pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 79/Pdt.G/2012/PN.AB. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang mana lebih ditekankan pada sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun, teori-teori ilmu hukum.

Kata kunci : Warisan, Pewaris, Keturunan.

345
MSA
k

KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN TANAH KAMPUS III IAIN IMAM BONJOL PADANG (Studi Kasus Perkara Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2016/PN-PDG)

M. SAKTI TEGAR EKA PUTRA, 1410111106, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 Halaman, 2018

ABSTRAK

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan negara. Dalam melakukan pembangunan tentunya negara memerlukan tanah dan agar tanah tersebut dapat digunakan tentu perlu dilakukan pengadaan. Dalam proses pengadaan tanah, kerap kali kita mendengar kasus korupsi yang menyelimutinya. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian tentang kasus pengadaan tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang yang menyeret Mantan Wakil Rektor II IAIN Imam Bonjol Padang, Prof. Salmadanis ke ranah hukum pidana. Pada penulisan ini terdapat 2 rumusan masalah yang akan dibahas, pertama apakah perbuatan terdakwa terkait dengan pengadaan tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum? Dan yang kedua, Apakah terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang tersebut? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan Undang-Undang (Statuta Approach), dimulai analisa terhadap putusan hakim, pasal-pasal dalam peraturan yang mengatur permasalahan kemudian dikaitkan dengan kasus yang akan diteliti. Teknik pengumpulan datanya studi dokumen dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian penulis dapat simpulkan bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah dinilai tidak tepat, karena perbuatan terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi diatas tidak memenuhi unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Implikasinya apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan. Disisi lain jika kita mengkaji putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang tersebut dengan teori pemisahan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban, karena hal tersebut tidak menjadi tanggungjawab terdakwa sebagai Ketua panitia pengadaan tanah, tetapi itu merupakan tanggungjawab dari panitia pengadaan barang dan jasa.

345
MYU
d

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PARIAMAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 6/Pid.Sus./2016/PN.Pmn).

M.Yudi Elviansyah. 1410111118 . Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV (Hukum Pidana). Halaman 125. Tahun 2018.

ABSTRAK

Anggota Kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika di pengadilan negeri pariaman terhadap perkara Putusan Nomor : 6/Pid.Sus./2016/PN.Pmn. (2) Bagaimana pembuktian di dalam persidangan terhadap perkara peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri dengan perkara Putusan Nomor: 6/Pid.Sus./2016/PN.Pmn. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan Undang-Undang (Statuta Approach), dimulai analisa terhadap putusan hakim, pasal-pasal dalam peraturan yang mengatur permasalahan kemudian dikaitkan dengan kasus yang akan diteliti. Teknik pengumpulan datanya studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif.Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap perbuatan terdakwa dalam kasus tindak pidana peredaran gelap Narkotika hanya melihat dasar pertimbangan yang bersifat yuridis di bandingkan non yuridis, yang mana hukuman yang di berikan terhadap terdakwa tergolong ringan. Seharusnya hakim perlu melihat pula dasar pertimbangan bersifat non yuridis pula yang termuat di dalamnya latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dampak perbuatan terdakwa dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Selaku anggota polisi yang telah melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika dan terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri seharusnya dijatuhi hukuman atau ancaman hukuman yang lebih berat karena telah melanggar kewajiban khusus dari jabatan yang mana sesuai dengan Pasal 52 KUHP. Sedangkan dalam pembuktian terhadap terhadap tindak pidana peredaran Narkotika yang di atur di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhinya unsur-unsur yang ada di dalamPasal 114 ayat (2) tersebut .

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Putusan Pemidanaan, Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika

345
MAR
i

IMPLEMENTASI PERMINTAAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI JENIS LOLA MERAH (TROCHUS NILOTICUS). (Studi Kasus di Direktorat Kepolisian Perairan Sumatera Barat)

Maria Lestari. 1410111132. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV Hukum Pidana. 66 Halaman. Tahun 2018

ABSTRAK

Pedoman dalam melaksanakan penyidikan dan tata cara permintaan ahli dalam tindak pidana umum diatur dalam Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Menajemen Penyidikan Tindak Pidana, namun dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi jenis Lola Merah belum ada aturan khusus yang mangatur pelaksanaan penyidikannya. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana tata cara permintaan keterangan ahli dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi jenis Lola Merah dan bagaimana kriteria ahli dalam dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi jenis Lola Merah. Metode yang penulis gunakan adalah metode yuridis sosiologis. Dari penelitian yang penulis lakukan, tata cara permintaan keterangan ahli dalam kasus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi jenis Lola Merah ini adalah sebagai berikut: a)Membuat permintaan tertulis kepada instansi di tempat ahli bekarja melalui atasannya dalam hal ini kepala Balai Konservsi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya(BKSDA) dengan melampirkan resume singkat tindak pidana yang terjadi serta bukti pendukung lainnya, b)Balasan surat dari BKSDA, kalau dia menyanggupi permintaan penyidik, maka BKSDA akan menugaskan personelnya untuk tugas tersebut, c)Pemeriksaan ahli dilakukan di tempat dan waktu yang telah ditentukan dalam surat/ permintaan tertulis, d)Ahli diambil sumpahnya sebelum dilakukan pemeriksaan. Kriteria ahli dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi jenis Lola Merah sebagai berikut:a)Seorang ahli harus mengenyam pendidikan dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, dalam kasus Lola Merah ini seorang ahli haruslah sarjana pertanian b)Memiliki sertifikasi ahli, dalam kasus Lola Merah ini lulus dalam Diklat pengendali ekosistem hutan tingkat ahli. Sehingga dapat diperoleh dalam hal tata cara permintaan keterangan ahli dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindingi jenis Lola Merah berpedoman pada SOP Kepolisian Perairan di wilayah perairan Sumatera Barat, berdasar pada Perkap No.14 Tahun 2012. Tidak ada kriteria ahli yang di cantumkan oleh pihak Kepolisian Perairan diwilayah perairan Sumatera Barat dalam kasus perdagangan satwa yang dilindungi jenis Lola Merah. Perlunya persyaratan yang jelas mengenai kriteria ahli yang dibutuhkan dalam penangganan kasus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi jenis Lola Merah, perlunya syarat tambahan dalam kriteria ahli seperti berpengalaman, kecakapan dan terampil dibidangnya, karena jika hanya berpendidikan dan memiliki sartifikasi ahli belum menetukan seseorang tersebut tersebut ahli dibidannya.

346
MHD
p

PEMBATALAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DI PENGADILAN AGAMA DEPOK (DALAM PERKARA NOMOR 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk)

Mhd. Aldino Saputra, 1310111166, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 halaman, 2018

ABSTRAK

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan setiap manusia, karena Perkawinan merupakan sarana untuk membentuk sebuah keluarga. Namun Perkawinan juga dapat dibatalkan apabila terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Hal ini diatur didalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Seperti dalam contoh kasus Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Depok dalam perkara Nomor 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk. yang mana sang suami telah murtad beberapa hari setelah perkawinan dilaksanakan. Berdasarkan uraian tersebut masalah yang dikemukakan yaitu apa saja alasan Pemohon mengajukan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Depok, Bagaimana dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara tersebut, apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara Pembatalan Perkawinan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan Teknik pengumpulan dokumen dan wawancara, berdasarkan data-data yang diperoleh penulis selama Penelitian maka hasil yang didapatkan adalah alasan Pemohon mengajukan Pembatalan Perkawinan yaitu yang mana Termohon yang semula Beragama Kristen Menjadi mualaf dan melangsungkan Perknikahan dengan Termohon, akan tetapi Termohon tidak bersungguh-sungguh menganut Islam dan kembali kepada keyakinannya yang lama, dengan demikian Pemohon mengajukan Pembatalan Perkawinan Tersebut, Dasar Majelis Hakim dalam memutus Perkara tersebut yaitu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah menyalahi ketentuan Syari'at dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, akibat hukum yang ditimbulkan dari Perkara tersebut yaitu Perkawinannya dibatalkan atau di anggap tidak pernah ada. saran yang diberikan yaitu agar seseorang lebih berhati-hati lagi memilih pasangan hidup, agar setiap orang tua lebih mengawasi pergaulan sang anak baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam memilih pasangan hidup sang anak, dan sang anak yang akan memilih pasangan hidup terlebih dahulu meminta restu kepada orang tua agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Kata Kunci: Pembatalan, Perkawinan, Akibat Hukumnya

342
MAH
p

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Maharani Gusti Nirwana, 1410112160, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 94 Halaman

ABSTRAK

Indonesia lahir sebagai negara yang merdeka dengan membawa semangat demokrasi. Oleh karena itu, cakupan dalam semangat tersebut adalah pelembagaan asas desentralisasi dalam sistem ketatanegaraan. Dalam sejarah dinamika pemerintahan daerah di Indonesia, desentralisasi telah beberapa kali mengalami pergeseran. Mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Nasional Komite Daerah hingga diterbitkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Terlihat jelas kemudian bagaimana konfigurasi politik begitu mempengaruhi arah politik hukum pembentukan suatu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemerintah daerah yang berdampak terjadinya sejumlah pergeseran kewenangan pemerintah daerah. Permasalahan skripsi ini adalah apa politik hukum pembentukan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan pergeseran kewenangan pemerintah daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta implikasinya terhadap kewenangan pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah yaitu; latar belakang filosofis, historis, sosiologis, dan perkembangan dan kebutuhan hukum. Tujuan yang hendak dicapai yaitu meluruskan cita-cita reformasi yaitu demokrasi menuju kesejahteraan bangsa. Konfigurasi politik dan karakter produk hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat dilihat dari interaksi politik selama proses penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan undang-undang ini. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terdapat pergeseran beberapa kewenangan pemerintahan daerah yang semula berada pada pemerintah kabupaten/kota kemudian ditarik pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Hal ini berdampak pada implikasi terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah.

344.09
MAS
i

IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NO 35 TAHUN 2012 TENTANG HUTAN ADAT BESERTA HAK ULAYAT TERHADAP HUTAN ADAT DINAGARI GUGUAK MALALO DAN PADANG LAWEH MALALO KABUPATEN TANAH DATAR

Masdial, 1310111175, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 71 halaman, 2018

ABSTRAK

Masyarakat adat memiliki posisi konstitusi di NKRI sebagaimana diatur didalam UUD 1945. Hak ulayat sebagai hak tradisional masyarakat hukum adat adalah kewenangan yang dimiliki masyarakat atas wilayah tertentu, bagi masyarakat adat Malalo Tigo Jurai hutan adat merupakan bagian dari wilayah masyarakat adat karena berada diatas tanah ulayat mereka. Pasca lahirnya Putusan MK No. 35 Tahun 2012 Tentang Hutan Adat, hasil uji material UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pengertian hutan adat berubah menjadi hutan yang berada di wilayah masyarakat adat. Berdasarkan uraian di atas masalah yang akan dikemukakan adalah 1) Bagaimana status hutan adat sebelum Putusan MK No. 35 Tahun 2012. 2) Bagaimana akibat hukum dari Putusan MK No. 35 Tahun 2012 bagi masyarakat adat Malalo Tigo Jurai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis dengan teknik observasi dan wawancara Berdasarkan analisis dari data-data yang diperoleh penulis selama penelitian, maka hasil yang didapatkan adalah, eksistensi masyarakat adat Malalo Tigo Jurai dalam pengelolaan sumber daya alam membawa masyarakat di dua nagari ini memiliki peranan strategis sebagai Nagari pionir Model Hutan Adat di Sumatera Barat. Peluang ini muncul pasca lahirnya Putusan MK No. 35/2012 tentang Hutan Adat hasil uji materi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Akibat hukum yang ditimbulkan Putusan ini memberikan kedaulatan bagi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan. Sebelumnya, pengertian hutan adat dalam UU Kehutanan adalah "hutan adat yang merupakan hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat", pasca Putusan MK No. 35/2012 maka pengertian hutan adat berubah menjadi, "hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat". Artinya ada peluang hukum yang memberikan masyarakat otonom dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang berada diatasnya. Saran yang diberikan adalah agar pemerintah Provinsi dapat segera mewujudkan harapan masyarakat Malalo Tigo Jurai untuk mengeluarkan kebijakan terhadap peraturan tentang tata cara pengakuan dan proses penetapan wilayah adat Malalo Tigo Jurai, agar masyarakat mendaftarkan tanah ulayat mereka untuk mendapatkan kekuatan hukum yang tetap sebagai bentuk perwujudan pengakuan dari Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Hak Ulayat, Hutan Adat dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

342
MAY
p

PENGAWASAN TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR CAMAT LEMBAH MELINTANG KABUPATEN PASAMAN BARAT

Maya Yulita, 1410111050, Fakultas Hukum Universitas Andalas , Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VII), 2018, 73 Halaman.

ABSTRAK

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Aparatur Sipil Negara diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan nasional. Namun dalam menjalankan tugasnya tidak sedikit Pegawai Negeri Sipil yang melanggar dan tidak taat pada peraturan perundang-undangan terutama berkaitan dengan menggunakan waktu kerja misalnya datang dan pulang kerja kurang tepat waktu, melakukan kegiatan lain pada saat jam kerja. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil serta kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (sociological research) yang bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh camat belum sepenuhnya berjalan efektif, lemahnya pengawasan terhadap pegawai negeri sipil terutama dalam menggunakan waktu kerja dan kurang tegas dalam memberikan sanksi apabila ada pegawai yang datang terlambat, pulang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan serta melakukan kegiatan lain pada waktu jam kerja.

Kata Kunci : Pengawasan, Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

342
MEI
k

KEDUDUKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN ASING BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING

Meizhura Ayu Karina, 1310111173, Fakultas Hukum Universitas Andalas,2018

ABSTRAK

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang didirikan Oleh Warga Negara Asing menimbulkan pro dan kontra di masyarakat karena unsur asing yang akan berkegiatan di Indonesia. Akan tetapi dengan dikeluarkannya peraturan ini menjadikan ruang gerak terhadap LSM asing semakin diperketat dan diperjelas. Setiap kegiatan yang dilakukan LSM asing di Indonesia memiliki tujuan kemanusiaan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat yang bersifat sukarela tanpa mencari keuntungan (nirlaba). Dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian terhadap: Pertama, Bagaimana kedudukan organisasi kemasyarakatan asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing? Kedua, Bagaimana akibat hukum pendirian Organisasi Kemasyarakatan Asing di Indonesia? Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan dan wawancara kepada Project Manager LSM Asing Arbeiter Samariter Bund (ASB). Hasil pembahasan dapat dilihat: Pertama, Organisasi Kemasyarakatan Asing yang berada di Indonesia diakui secara hukum sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing serta kedudukannya semakin diperjelas. Kedua, Hadirnya Organisasi Kemasyarakatan Asing di Indonesia banyak membantu Pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah kepada masyarakat yang sebelumnya luput dari perhatian Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

345
MEL
p

PELAKSANAAN HAK REMISI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG

Melati Dwi Putri.1310111047.Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK V (Sistem Peradilan Pidana). 67 Halaman.Tahun 2018.

ABSTRAK

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan didalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan remisi di LAPAS Klas II A Padang terdapat hambatan teknis seperti terjadinya kelebihan kapasitas sehingga mengakibatkan terjadi masalah keterlambatan dalam bidang pemberian remisi untuk Narapidana. Penelitian ini dilakukan terhadap Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ini adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, 2) Apa saja Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Hak Narapidana Berupa Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang tidak selamanya berjalan dengan lancar. Ada hal-hal yang membuat narapidana tidak mendapatkan hak remisi. Alasan narapidana yang tidak diberikan hak remisinya ialah pidana kurang dari 6 (enam) bulan, dikenai hukaman disiplin, dan dijatuhi pidana kurungan. Sedangkan pemberian remisi sebagai program pembinaan sangat mempunyai arti penting bagi narapidana karena itu merupakan suatu hal yang sangat diharapkan oleh narapidana. Permasalahan utama dalam pemberian remisi adalah karena di antara narapidana sering berkelahi, narapidana yang sering melawan petugas, narapidana yang tidak mentaati tata tertib yang telah ditentukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan. Yang pada dasarnya narapidana tersebut tidak menunjukkan sifat penyesalan dan tidak menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani pidananya dan untuk kelakuannya yang demikian maka tidak sepatutnya hak tersebut diberikan kepadanya. Diharapkan kedepannya untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam pembinaan narapidana sehingga narapidana dapat berkelakuan baik selama menjalaini masa pidananya dan mendapatkan haknya dan agar narapidana lebih bermutu apabila ia telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

341
MEL
t

TATANIAGA SATWA LIAR BERDASARKAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA DAN HUKUM DI INDONESIA

Melin Misdariza, 1310111040, Hukum Internasional (PK VII), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 79 Halaman, 2018

ABSTRAK

Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar baik ekspor maupun impor telah menjurus kepada tingkat kerusakan seperti perdagangan dan penyelundupan satwa liar. International Union for Conversation of Nature and Natural Resources (IUCN) menganjurkan pembatasan perdagangan spesies langka dengan melahirkan sebuah perjanjian internasional yaitu, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Ada dua tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu 1) mengetahui persyaratan untuk memperoleh izin ekspor dan impor satwa liar berdasarkan CITES dan hukum Indonesia, 2) mengetahui ancaman hukum pelanggaran izin menurut CITES dan hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Kesimpulan pada penulisan ini adalah 1) persyaratan izin ekspor dan impor satwa liar menurut hukum Internasional setiap orang yang ingin mengekspor dan impor satwa harus memperoleh sertifikat ekspor dan impor. Untuk mendapatkan sertifikat ekspor dan impor tersebut harus melalui persyaratan yang telah ditetapkan di dalam CITES yaitu satwa yang terdaftar didalam Appendix 1 terdapat dalam pasal III, satwa yang terdaftar dalam Appendix II diatur dalam Pasal IV,satwa yang terdaftar pada Appendix III. Menurut hukum di indonesia diatur Keputusan Menteri Kehutanan No 447/kpts-II/2003 tentang tata cara dan prosedur perizinan, pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa liar untuk jenis jenis dilindungi atau jenis yang termasuk dalam appendix I CITES. Pengeksporan satwa dilakukan dalam sistem kuota, akan tetapi satwa yang terdaftar pada Appendix I tidak terdapat pada sistem kuota hanya terdapat dilakukan untuk pemanfaatan. Pihak yang berwenang dalam izin dan sertifikat ekspor tumbuhan dan satwa liar yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan. 2) Ancaman hukum pelanggaran izin menurut cites dan hukum indonesia berupa pemberian penalti (sanksi) terhadap pelaku pelanggaran dan penyitaan terhadap perdagangan spesimen yang tidak sesuai ketentuan. Pemberian sanksi ditetapkan oleh negara anggota untuk menentukan status dari pemenuhan kewajiban undang-undang dan mendeteksi adanya pelanggaran dan tindakan ilegal yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban dan menjatuhkan sanksi bagi yang melanggar aturan nasional.

342
MEN
p

PENGAWASAN TERHADAP PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA APARATUR SIPIL NEGARA OLEH KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Mentari wahyudihati. 1410112130. Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VII (Hukum Administrasi Negara). Halaman 91. Tahun 2018.

ABSTRAK

Keberhasilan negara dalam pembangunan sangat tergantung pada kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan birokrasi pemerintahan. Salah satu hal terpenting untuk terwujudnya ASN yang berkualitas adalah diawali dengan pola sistem rekrutmen ASN, karena dari sistem rekrutmen dapat menekan terjadinya pratik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam birokrasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SIpil Negara memiliki konsep yang menekankan sistem merit dalam hukum kepegawaian di Indonesia sehingga mengamanatkan pembentukan lembaga nonstrukutral yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam mengawal berjalannya sistem merit. Salah satu kewenangan KASN dalam pengawasan ASN adalah mengawasi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Hal ini bertujuan untuk menekan terjadinya konflik kepentingan dalam pengisian JPT. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pengisian JPT Pratama oleh KASN dan kendala yang dihadapi oleh KASN dalam pengisian JPT pratama. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan data sekunder yang lebih luas meliputi bahan rujukan seperti dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau risalah perundang-undangan di bidang kepegawaian. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap pengisian JPT Pratama oleh KASN sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan adanya Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI). Hal yang menjadi kendala secara eksternal adalah tingkat kepatuhan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) dalam melaksanakan pengisian JPT Pratama. Kemudian kendala yuridis tidak adanya kekuatan secara kewenangan maupun secara kelembagaan sehingga perlu adanya penguatan kewenangan secara yuridis dengan dilakukannya revisi Undang-undang ASN dalam hal tindak lanjut dari rekomendasi, dan proses pengisian JPT yang tidak mematuhi mekanisme yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan penguatan lembaga KASN sehingga menjadi lembaga yang independen bukan sebagai sub ordinat dari Kemenpan RB. Sehingga tidak menjadi anomali dan mengahambat proses pengawasan ASN oleh KASN.

Kata Kunci : Komisi Aparatur Sipil Negara, Pengawasan, Rekrutmen

346
MIF
p

PENGELOLAAN DANA WAKAF OLEH YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) CABANG SUMATRA BARAT SEBAGAI NAZHIR BERBADAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Mifta Dwi Sartika, 1410112166, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK 1 (Hukum Perdata), 74 halaman, 2018

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari potensi wakaf yang sangat besar untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum, terutama dalam hal kemajuan perekonomian. Wakaf telah lama berkembang sejak zaman Rasulullah hingga zaman sekarang, namun wakaf juga sudah mulai berkembang dari yang awalnya hanya terbatas pada benda tidak bergerak dan benda bergerak saja, sekarang sudah ada wakaf benda bergerak berupa uang atau disebut juga wakaf tunai. Wakaf uang menurut fatwa MUI adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Untuk mengelola wakaf diperlukan nazhir agar dapat memanfaatkan dana wakaf secara produktif dan tepat guna. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji teori-teori atau aturan-aturan hukum Islam dan kemudian di selaraskan dengan hukum positif yang relevan untuk digunakan dan melihat secara langsung tingkat efektifitas penerapan hukum yang ada. Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan yang kemudian dibandingkan dengan penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh dari responden di lapangan yaitu dari kepala cabang ACT Sumbar dan para staf ACT Sumbar serta data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan hasil penelitian menjelaskan bahwa ACT Sumbar sebagai perpanjangan dari Global Wakaf Sumbar merupakan nazhir yang mengelola dana wakaf yang dikumpulkan dari wakif dan kemudian dikelola secara mandiri dan proses implementasian dilaksanakan dalam bentuk program wakaf langsung dan tidak langsung dan saat ini sudah terlaksana wakaf sumur di 3 wilayah di Sumbar. Dalam melaksanakan proses pengelolaan dan pengimplementasian dana wakaf, ACT Sumbar (Global Wakaf Sumbar) menemukan kendala-kendala baik dari dalam(intern) ACT Sumbar seperti kurangnya sumber daya manusia di kantor ACT Sumbar, juga fokus ACT Sumbar yang masih pada kemanusiaan, serta keterlibatan pihak ketiga yang terkadang sulit untuk dikendalikan. Kendala dari luar(ekstern) ACT Sumbar lebih kepada masyarakat yang belum paham akan wakaf khususnya wakaf produktif.

Kata Kunci : Wakaf, Nazhir

347.05
NIC
e

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE MENURUT PERATURAN MENTERI KEUANGAN No.130/PMK010/2012

Nico Mirza, 1110112207, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 Halaman, 2018

ABSTRAK

Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait dengan penarikan obyek jaminan fidusia khususnya penarikan kendaraan bermotor yang disebutkan di dalam pasal 3 Peraturan Meteri Keuangan No.130/PMK010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia yang berbunyi:"Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftarn Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada Perusahaan Pembiayaan".Namun, pada praktiknya masih banyak terjadi kasus-kasus pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan terhadap debitur wanprestasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut perumusan masalah yang menjadi pertimbangan oleh penulis adalah :"Bagaimana eksekusi jaminan fidusia pada PT Federal International Finance menurut PMK No.130/PMK010/2012 terhadap kredit macet khususnya kendaraan bermotor serta apa saja kendala yang di temui dalam eksekusi Jaminan Fidusia tersebut". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penarikan kendaraan bermotor terhadap debitur yang melakukan wanprestasi oleh perusahaan pembiayaan (PT.Federal International Finance) menurut perundang-undangan, serta kendala yang di temui dalam eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang melakukan wanprestasi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang - undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan kendaraan bermotor terhadap debitur yang telah melakukan wanprestasi yang dijamin dengan jaminan fidusia menurut Pasal 15 Undang–Undang Jaminan Fidusia dimana ketentuan tersebut harus mencantumkan adanya sertifikat fidusia untuk mengeksekusi terhadap barang jaminan fidusia, eksekusi atau penarikan dapat langsung dilakukan karna sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum tetap sama hal nya dengan putusan pengadilan, serta PT. Federal International Finance sebagai perusahaan pembiayaan dalam pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor debitur wanprestasi yang dijamin dengan jaminan fidusia telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

345
MIT
d

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA ORANG (Studi di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman)

MitraMarsepni, 1410111061, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2018, 99 Halaman

ABSTRAK

Di zaman modern ini setiap manusia pasti memiliki mobilitas yang tinggi, dimana segala macam aktifitas keseharian dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor yang semakin meningkat menjadikan masalah lalu lintas juga semakin bertambah, seperti terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalam keseharian banyak ditemukan pengemudi kendaraan bermotor yang tidak lagi memperdulikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lain, sehingga kecelakaan lalu lintas tidak dapat dielakkan. Kecelakaan lalu lintas terjadi dikarenakan kelalaian pengemudi dalam berkendara. Hal tersebut mengakibatkan pengendara dan korbannya luka-luka, bahkan ada yang meninggal dunia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kematian pada orang. 2) Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perbedaan penjatuhan pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kematian pada orang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelititian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penjatuhan sanski pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang yaitu berdasarkanPasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, juga menggunakan pertimbangan hakim (pertimbangan yuridis dan pertimbangannon yuridis) serta ditambah dengan keyakinan dan kewenangan hakim untuk menjatuhkan sanski pidana terhadap pelaku yang terbukti karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang. Dengan terlebih dahulu melihat fakta-fakta dalam persidangan, mendengar keterangan saksi dan terdakwa, serta alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Oleh karena itu para pengemudi harus berhati-hati dalam berkendara, harus memperhatikan keselamatan diri sendiri dan orang lain agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas.

345
MOC
u

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TAWURAN YANG DILAKUKAKN OLEH REMAJA DI WIAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG

Mochamad Solihin, 1310111222, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 + vi Halaman , Tahun 2018

ABSTRAK

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Dengan perkembangan zaman yang begitu cepat pada sekarang ini, banyak terjadi tindakan pidana yang dilakukan oleh remaja, salah satu tindak pidana tersebut yaitu tawuran.Tawuran merupakan bentuk kekerasan antar geng dalam masyarakat urban Indonesia dan perbuatan tersebut terjadi bukan akibat dari faktor pribadi, melainkan berasal dari pengaruh lingkungan disekitar serta prasangka dari masyarakat, tawuran itu sendiri dapat mengakibatkan kerugian bahkan kematian.Untuk menanggulangi tindak pidana tawuran di perlukan juga upaya dari masyarakat dan kepolisian sebagai aparat penegak hukum.Sehingga permasalahan yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah a) Apakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tawuran yang dilakukanolehremaja di wilayahhukumKepolisianResorkota Padang? b) Apakah kendala Kepolisian Reseor Kota Padang dalam penanggulanagan tindak pidana tawuran?. Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hokum Kepolisian Resor Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang didapat dari hasil penelitian langsung dilapangan (field research)dan data sekunder yaitu informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa; a) upaya kepolisian dalam penanggulangan tawuran yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukumKepolisianResorkota Padang yaitumelalui upaya yang dilakukan polisi dengan berkoordinasi dengan lingkungan keluarga remaja dengan cara memberikan pengajaran terhadap orang tua. Melalui upaya yang dilakukan polisi dengan berkoordinasi dengan pihak sekolah para remaja dengan cara memberikan saran-saran, upaya penyelesaian kasus tawuran pelajar juga dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Padang dengan memberikan pendidikan Hak Asasi Manusia pada pelajar. Upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi tawuran dengan cara menempatkan petugas di daerah rawan dan melakukan razia terhadap pelajar yang bolos dalam jam pelajaran maupun pelajar yang membawa senjata tajam. b) kendalaKepolisian Resor Kota Padang dalam penanggulanagan tindak pidana tawuran yaitu faktor lingkungan pergaulan pelajar, faktor keluarga, faktor sekolah dan dendam antar pelajar, faktor hukum dan faktor penegak hukum serta faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

341
MOH
w

WUJUD TANGGUNG JAWAB NEGARA MENGENAI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS LINGKUNGAN DI INDONESIA

Moh. Husain, 1410111047, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VI (Hukum Internasional), 81 Halaman + vii 2018 pembimbIng 1 Dr.H. Sukanda Husin, S.H. LL.M Pembimbing 2: Dr. Delfiyanti,. S.H, M.H

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan di darat laut dan udara memengaruhi kehidupan manusia secara jangka pendek dan jangka panjang termasuk pewarisan lingkungan hidup antar generasi. Kasus-kasus kerusakan lingkungan hidup yang terjadi membuat negara-negara harus membentuk peraturan hukum dan memperkuat upaya penegakan hukum. Indonesia belum memiliki pengadilan khusus lingkungan dan Indonesia dapat menerapkan upaya negara lain yang telah memiliki pengadilan khusus lingkungan dan Indonesia harus mentaati dan menerapkan prinsip tanggung jawab negara dalam mengatasi kerusakan serta menyusun norma-norma yang kuat agar penegakan hukum lingkungan menjadi kuat. Permasalahan yang dibahas yaitu wujud tanggung jawab negara mengenai perlindungan lingkungan hidup melalui pembentukan pengadilan khusus lingkungan di Indonesia dan pengaturan terkait pembentukan pengadilan khusus lingkungan di Indonesia. Metode penelian ini adalah yuridis normatif dengan analisis data secara normatif kualitatif, berkaitan dengan masalah yang akan dibahas lalu menganalisisnya. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan .Tangung jawab Negara sesuai yurisdiksinya dan secara teori terdiri atas teori resiko atau strict liability dan teori kesalahan ataufault theory.Secara hukum internasional tanggung jawab negara timbul karena perbuatan melawan hukum dan pelanggaran perjanjian. Negara juga dapat terhindar dari tanggung jawab jika dalam keadaan memaksa dan tindakan itu atas persetujuan negara yang dirugikan. Pengadilan khusus dan pembentukannya disebutkan dalam Undang-undang no 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 27 ayat (1) dan (2). kemudian implementasi teori strict liability melalui Pasal 81 Undang- undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup. Kasus lingkungan internasional yang terjadi yaitu kasus Trail Smelter Case 1941 (kasus Trail Smelter 1941) dan kasus lingkungan nasional yang terjadi seperti kebakaran hutan di kecamatan Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan oleh PT Bumi Mekar Hijau dan kasus PT Kalista Alam yang pembukaan lahan tanpa izin dan juga membuka lahan dengan cara membakar di Rawa Tripa, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Pembentukan pengadilan khusus lingkungan bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat pada kasus lingkungan hidup dan terkait kemampuan hakim dalam menyelesaikan kasus lingkungan. Pengadilan khusus juga menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam hal penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Kata Kunci: Wujud Tanggung Jawab Negara Indonesia; Perlindungan Lingkungan Hidup; Pengadilan Khusus Lingkungan Indonesia.

342
MUC
p

PENEGAKAN HUKUM OLEH SATLANTAS TERHADAP PENGEMUDIANGKUTAN UMUM YANG TIDAK MEMILIKI SIM A UMUM (Studi Kasus di Polresta Padang)

Muchni Zami Azdi, 1110112192, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018, 60 halaman

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan zaman, banyak sekali prilaku manusia dalam bermasyarakat telah mengabaikan norma-norma hukum yang berlaku, akibatnya terjadi kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat bahwa saat ini sedang terjadi kondisi anomi dalam masyarakat. Artinya, masyarakat sudah tidak percaya pada nilai dan norma yang berlaku sehingga mereka melakukakan pelanggaran- pelanggaran hukum itu sendiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengawasan bagi pengemudi yang dilakukan oleh Satlantas terhadap pengemudi angkutan umum yang tidak memiliki SIM A Umum di wilayah Polresta padang? 2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam penegakan hukum oleh Satlantas terhadap pengemudi angkutan umum yang tidak memiliki SIM A Umum di wilayah Polresta Padang? 3. Upaya apa yang dilakukan oleh Satlantas untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang tidaka memiliki SIM A Umum di wilayah Polresta Padang?. Adapun sumber data yang penulis gunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer dengan studi lapangan dengan teknik wawancara kepada narasumber ataupun informan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Sedangkan data sekunder diperoleh melaluistudi dokumen atau dengan penelitian kepustakaan sehingga diperoleh data awal untuk menunjang pelaksanaan penelitian dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa munculnya pelanggaran oleh pengemudi angkutan umum dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terutama supir angkutan umum akan pentingnya hukum itu sendiri dan rendahnya tingkat pendidikan seta rasa kepedulian supir angkutan umum tersebut. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Padang sudah mencakup upaya represif dan upaya preventif, ketiga kendala yang dihadapi oleh Satlanta Polresta Padang terbagi dalam kendala intern (dalam) dan ekstern (luar). Kendala intern merupakan kendala dari pihak kepolisian sendiri khususnya Satlantas mulai dari kurangnya SDM, Sarana dan Prasarana yang mendukung dll. Sedangkan kendala ekstern berasal dari masyarakat itu sendiri yang kurang peduli dalam penegakan hukum terutama pelanggaran terhadap syarat kelengkapan mengemudikan kendaraan bermotor umum.

345
MUH
p

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEDIA PERS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA PERS

Muhammad Arifin Fahreza, No.BP 1110113181, Program Kekhususan: Hukum Pidana, 138 halaman, tahun 2018

ABSTRAK

Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang berfungsi sebagai media control sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi. Seseorang dengan mudah bisa menuduh pers telah menghina atau mencemarkan nama baiknya, jika ia tidak suka dengan cara pers memberitakan dirinya. Hal ini menyebabkan pasal-pasal penghinaan sering disebut ranjau bagi pers, karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut pers atau wartawan. Perbuatan pencemaran nama baik memiliki pertentangan antara Undang-undang pers dengan undang-undang ITE dalam mengadili pihak media dalam kasus pencemaran nama baik melalui pemberitaan dalam media cetak yang terabaikan. Untuk itu penulisan hukum ini yang berjudul: ‘’Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Pers Di Tinjau Dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. Permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut Bagaimana pertanggungjawaban media pers dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media pers? Dan Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media pers?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisa data bersifat deskriptif kualitatif. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan dianalisis agar peneliti dapat memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikan dengan jelas.Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, maka media pres sebagai korporasi maupu perorangan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang sudah dilakukan apabila terbukti terlibat atau ikut serta melakukan tindakan melanggar hukum (tindak pidana pencemaran nama baik). Hakim dalam memutus perkara yang dihadapkan kepadanya adalah beradasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan, apabila hakim belum yakin dengan bukti yang dihadirkan, maka hakim dapat menggunakan keyakinannya dalam memutus sebuah perkara.

Kata Kunci: Pers, Tanggungjawab Pres, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

342
MUH
p

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PADANG MENGENAI KEWAJIBAN AYAH DALAM MENAFKAHI ANAK DALAM PERKARA NOMOR 0636/PDT,G/2014/PA.PDG DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG

Muhammad Rahim, 1210112145, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2018, 60 halaman

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam peristiwa hukum sepeti perkawinan, akibat dari perkawinan tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara suami dan istri, kewajiban dan hak antara suami dan istri tersebut tertuang dalam undang-undang. Pengaturannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam menjalani hubungan perkawinan tidak sedikit dari pasangan suami istri mengalami suatu masalah dan perselisihan yang berujung pada suatu perceraian. Akibat dari perceraian tersebut timbulnya salah satu kewajiban ayah terhadap anaknya yaitu nafkah untuk pendidikan dan pemeliharaan anak. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan bekas suami atau ayah diwajibkan memberikah nafkah atau pemeliharaan anak dan biaya pendidikan anak setelah adanya perceraian, dikarenakan hubungan antara ayah terhadap anak tidak terputus oleh perceraian antara ibu dan ayah dan hubungan ini juga diatur dalam undang-undang. Memahami pada permasalahan penelitian ini adalah (1)Bagaimana kewenangan hukum Pengadilan Agama dalam mengadili dan memutuskan perkara pemberian kewajiban ayah dalam menafkahi anak dalam putusan Pengadilan Agama Padang No. 0636/Pdt.G/PA.Pdg?. (2)Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Padang No 0636/Pdt.G/PA.Pdg?, (3)Bagaimana akibat hukum dari Putusan Pengadilan Agama Padang No. 0636/Pdt.G/PA.Pdg?. Adapun penelitian ini dilakukan dengan mengunakan metode normatif kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kewenangan pengadilan agama dalam memutus dan mengadili perkara pemberian kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya serta pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara ini

344.09
MUH
p

PENETAPAN ORANG TUA OLEH PENGADILAN AGAMA SEBAGAI WALI TERHADAP PENJUALAN HARTA ANAK KANDUNG YANG MASIH DI BAWAH UMUR (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Padang Kelas I A Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA.Pdg.)

Muhammad Syukri, BP 1410111016, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 85 Halaman

ABSTRAK

Orang tua berhak dan wajib mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan dengan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu agar tidak merugika nanak itu sendiri. Hal ini telah diatur dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan. Namun dalam melakukan transaksi jual beli tanah atau pun rumah, orang tua masih perlu mengajukan permohonan penetapan untuk menjadi wali bagi anak mereka sendiri di samping permohonan untuk ijin menjual. Penetapan yang akan diteliti berkaitan dengan permohonan perwalian dan ijin menjual ini adalah Penetapan Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA.Pdg. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan kedudukan orang tua sebagai wali dalam Penetapan Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA.Pdg. dan apa akibat hokum dari Penetapan Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA.Pdg. bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak pertama dan data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari pihak pertama. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dant ersier. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan sistematika data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menjadi walikarena cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, yaitu ingin menjual rumah yang di dalamnya terdapat hak anak mereka untuk kepentingan anak itu sendiri. Selain itu, rumah yang akan dijual juga tidak dalam sengketa. Namun sebenarnya, menurut KUHPerdata danUndang-Undang Perkawinan, hakim tidak perlu menetapkan Para Pemohon sebagai wali karena perwalian terjadi apabila anak yang masih belum dewasa tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Penetapan Nomor 0295/Pdt.P/2016/PA.Pdg. ini bersifat mengikatbagi para pihak dan dengan penetapan ini para pihak dapat melangsungkan transaksi jual beli tanah karena sudah memenuhi syarat yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Kata kunci:PenetapanPengadilan, Perwalian, Transaksi Jual Beli.

345
MUH
p

PERANAN UNIT POLISI SATWA K-9 DALAM MENCARI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NAROTIKA

Muhammad Zikri, 1410112029, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 73 halaman – Tahun 2018, Pembimbing : Dr. Aria Zurnneti S.H., M.H dan Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H

ABSTRAK

Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHAP), mengatur tentang tugas, tanggungjawab serta kewenangan dibidang penyelidikan. Dalam pengantar membahas tentang penyelidikan dalam membantu penyidik Kepolisian Republik Indonesia khususnya polisi satwa K9 guna menemukan barang bukti suatu tindak pidana. Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah Peranan unit polisi satwa K-9 dalam proses penyelidikan guna membantu penyidik untuk mencari barang bukti tindak pidana narkotika, 2. Apa- apa saja Hambatan-hambatan yang dialami unit polisi satwa K-9 dalam membantu proses penyelidikan guna membantu penyidik untuk mencari barang bukti tindak pidana narkotika. Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis Empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didalam skripsi ini, maka Peranan unit polisi satwa K-9 dalam proses penyelidikan guna membantu penyidik untuk mencari barang bukti tindak pidana narkotika adalah : 1. Sebagai Penyelidik Guna Membantu Penyidik Mencari Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika, 2. Melakukan Pelacakan Menggunakan Satwa (Anjing Pelacak) Oleh Polisi Satwa K-9 Dalam Mencari Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika. Dan Hambatan-hambatan yang dialami unit polisi satwa K-9 dalam membantu proses penyelidikan guna membantu penyidik untuk mencari barang bukti suatu tindak pidana narkotika ialah Faktor Internal: kurangnya anggaran veteriner dalam perwatan satwa berupa obatan-obatan yang digunakan untuk satwa agar satwa selalu fit dan maksimal dalam melakukan tugasnya. Kurangnya jumlah ransus satwa (kandang) dan ransus (kandang) yang belum layak, yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi anjing pelacak sehingga mengganggu kinerja anjing pelacak. Faktor Eksternal : a.Tempat kejadian yang sering tidak steril, b. tidak semua tempat atau lokasi tempat kejadian perkara yang dapat dimasuki oleh satwa (anjing), c. faktor cuaca. Berdasarkan hasil pembahasan skripsi ini, maka terdapat saran yang dikemukakan oleh penulis sebagai berikut: 1. Sebaiknya dalam proses penyelidikan tindak pidana narkotika unit polisi satwa K-9 guna menemukan barang bukti narkotika harus bekerja sama secara maksimal baik itu dari para pihak yang meminta bantuan kepada polisi satwa K-9, 2. Perlunya penyuluhan kepada masyarakat tentang penting sterilnya suatu tempat kejadian perkara, perlunya bantuan dari pemerintah pusat menyangkut biaya perawatan terhadap anjing pelacak, perlunya penambahan jumlah anggota yang ada di Unit Polisi Satwa K-9.

345
MUH
d

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENAWARKAN TEMPAT BERJUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A PADANG

Muhammad Jodi Pandoe, 1310112161, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018, 78 halaman

ABSTRAK

Fenomena perjudian bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat, sejak dulu sampai sekarang praktik perjudian sudah ada. Kejahatan ini banyak hal yang mempengaruhi diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian. Pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan agama dan kesusilaan, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Namun pada kenyataannya, justru perjudian berkembang pesat dan semakin marak dilakukan, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara transparan dengan cara sederhana ataupun secara modern. Untuk itu penulis tertarik meneliti permasalahan 1) Dasar pertimbangan hakim dalam putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja menawarkan tempat berjudi berdasarkan putusan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang, 2) Pembuktian dalam putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja menawarkan tempat berjudi di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, penelitian bersifat deskriptif, jenis data berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja menawarkan tempat berjudi berdasarkan putusan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang adalah Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Hasil penelitian dari Pembuktian Hakim Dalam Putusan Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Menawarkan Tempat Berjudi di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang adalah Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang menjelaskan, bahwa pembuktian dalam kasus perjudian haruslah mengacu pada pasal 184 KUHAP minimal adanya 2 alat bukti, alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

342
MUH
p

PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN PERIODE 2014-2019 TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN, PENINDAKAN, PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT DAN MAKSIAT

Muhammad Miftahur Rizky, BP: 1210112061, 60 Halaman

ABSTRAK

Pemerintah Kota Pariaman dan DPRD Kota Pariaman telah membuat banyak Peraturan Daerah, salah satunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat. Dimana dalam hal ini DPRD harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda yang telah dibuat untuk kenyamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Namun hingga saat ini masih bisa ditemukan pelanggaran terhadap Perda tersebut, sebagai contoh masih banyak Orgen Tunggal yang masih melaksanakan acara melewati batas waktu yang ditentukan dan juga masih bisa ditemukan warnet yang buka melewati batas waktu yang telah diatur didalam Perda. Penelitian ini akan mencoba merumuskan beberapa rumusan antara lain mengenai Pengaturan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda dan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Pariaman terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, dengan subjek penelitian anggota Komisi I DPRD Kota Pariaman dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2013 di Kota Pariaman terutama Komisi I belum optimal karena masih ditemukan pelanggaran seperti orgen tunggal dan warnet yang melebihi batas waktu yang ditentukan, selain itu DPRD memiliki hambatan baik itu kurangnnya inisiatif anggota DPRD melakukan pengawasan, kurangnya Sumber Daya dan anggaran, masih banyak warga yang belum tahu Perda tersebut dan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh DPRD dalam melakukan pengawasan adanya kesadaran DPRD untuk melakukan pengawasan, memaksimalkan kinerja aparat penegak, memberi pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya dan diharapkan masyarakat Kota Pariaman dapat menerima Peraturan Daerah yang telah dibuat dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat Kota Pariaman itu sendiri.

Kata kunci : fungsi pengawasan, pengawasan DPRD, Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013

345
MUS
p

PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR ROKAN HILIR

Mustaqim Almond.1410111022.Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK IV (HukumPidana. 67 Halaman.Tahun 2018)

ABSTRAK

Pembakaran hutan merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya membawa kerugian yang besar bagi kehidupan dan masyarakat yang hidup disekitar atau diluar wilayah pembaran tersebut, terutama di wilayah Riau khususnya Rokan Hilir. Tindak pidana ini merupakan kejahatan yang luar biasa terhadap kehutanan. Permasalahan penelitian ini tentang (1) bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian resor rokan hilir terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan yang terjadi di kabupaten Rokan Hilir (2) apakah kendala – kendala yang dihadapi penyidik kepolisian resor Rokan Hilir dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan di wilayah kabupatenn Rokan Hilir dan bagaimana solusinya. Penelitian ini dilakukan dengan metode sosiologis-empiris, yaitu penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data primer dan sekunder berupa buku, dokumen dan hasil wawancara dengan narasumber terkait skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Bentuk upaya penegakan yang dilakukan Polres Kabupaten Rokan Hilir sebelum dilakukannya penegakan hukum yakni dengan cara preventif yaitu memberi himbauan, memasang spanduk, melakukan razia, melakukan patroli dan penegakan hukum represif yang dilakukan yaitu, menerima laporan, mencari saksi, melakukan penyelidikan,menindak pelaku tindak pidana. Kendala yang dihadapi berupa kendala internal dan kendala ekternal, kendala ekternal yakni masyarakat kurang tanggap melapor, masyarakat enggan menjadi saksi, sulit mencari barang bukti jarak tempuh lokasi kejadian karhutla jauh, sulitnya jaringan komunikasi dilokasi karhutla lokasi kejadian karhutla sulit ditempuh baik dengan kendaraan roda,roda empat dan jalan kaki, sedangkan dari internal yakni adanya keterlambatan pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam menangani tindak pidana pembakaran hutan tersebut sehingga akibatnya tidak cukup bukti.

346
MUT
p

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PADA KORIDOR JALAN JENDERAL SUDIRMAN DAN KHATIB SULAIMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PADANG

Mutiara Syafri 1410111018, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 57 Halaman, Tahun 2018

ABSTRAK

Ruang yang berada di suatu negara pada umumnya digunakan dalam pembangunan suatu negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dimana menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk penguasaan negara adalah dengan melaksanakan tata ruang di wilayah negara. Pelaksanaan tata ruang dilakukan dengan diadakannya penaatan ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruag, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemanfaataan ruang ditujukan sebagai pelaksanaan atas rencana tata ruang guna tercapainya pola dan struktur ruang. Perihal lain yaitu otonomi daerah menyebabkan pengaturan tentang tata ruang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Salah satu pemanfaatan ruang yang melaksanakan otonomi daerah adalah Kota Padang pada kawasan Jenderal Sudirman dan Khatib Sulaiman. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya. Fungsi kawasan Jenderal Sudirman dan Khatib Sulaiman adalah pusat pemerintahan Kota Padang. Oleh karena itu penulis mengkaji mengenai; 1). Bagaimana pemanfaatan ruang pada kawasan Jenderal Sudirman dan Khatib Sulaiman sebagai kawasan perkantoran daerah Kota Padang. 2).Bagaimana pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan Jenderal Sudirman dan Khatib Sulaiman sebagai kawasan perkantoran daerah Kota Padang? Penulis menggunakan metode penelitian yang bersikap pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan pada Dinas Tata Ruang Kota Padang dan DPMPTSP Kota Padang. Berdasarkan penelitian memperlihatkan bahwa pemanfaatan ruang yang berada di Jenderal Sudirman dan Khatib Sulaiman telah terjadi perubahan pemanfaatan ruang. Perubahan pemanfaatan ruang ini dikarenakan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang tahun 2010-2030. Adapun pengendalian pemanfaatan ruang atas perubahan pemanfaatan tersebut diadakan penyesuaian fungsi lahan di kawasan Jenderal Sudirman dan Khatib Sulaiman dengan pengadaan peraturan zonasi, dan penyesuain pemberian izin terhadap bangunan bangunan maupun lahan di dalam kawasan pusat perkantoran pemerintahan Kota Padang.

Kata kunci : Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Kawasan Perkantoran

346
MAU
g

GUGATAN PEMBATALAN AKTA JUAL BELI OLEH AHLI WARIS DARI PERKAWINAN PERTAMA TERHADAP HARTA PUSAKA RENDAH (Studi Kasus Perkara Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Lbs)

MauliaPutri S, 1410111057, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018, 63 Halaman

ABSTRAK

Akta Jual Beli merupakan Akta autentik sebagai alat bukti terkuat mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat yang dapat menentukan secara tegas hak dan kewajiban sehingga menjamin kepastian hukum dan sekaligus dapat menghindari terjadinya sengketa. Jika terjadi sengketa seperti pembatalan akta autentik. Akta otentik Sebagai alat bukti yang terkuat dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan . Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Apa alasan dari Ahli Waris mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Jual Beli dari Perkara Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Lbs? (2) Apa Akibat Hukum dari pembatalan Akta jual Beli terhadap Ahli Waris dari Perkawinan Kedua? (3) Bagaimana Kedudukan Ahli waris dari perkawinan pertama setelah keluarnya putusan perkara Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Lbs? Peneltian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam buku hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum terhadap sengketa pembatalan akat jual beli tanah. Dalam hal ini dengan merujuk kepada peraturan pembatalan akta jual beli tanah. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembatalan akta jual beli tanah diakibatkan oleh adanya kecacatan hukum dan tidak terpenuhinya persyaratan yang dilakukan oleh dua belah pihak sehingga mengakibatkan tidak sah jaul beli akta tanah tersebut. Dalam pengajuan gugatan tersebut penggugat mendapat hasil dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengdilan Negeri Lubuk Sikaping berupa batalnya akta jual beli tanah dan sertifikat atas tanah tanah akan dikembalikan kepada penggugat. Dapat disimpulkan bahwa alasan ahli waris mengajukan gugatan pembatalan akta jual beli tanah adalah karena karena tanah tersebut merupakan harta bersama hasil cancang latiah taruko orang tua kandung penggugat, Akibat hukum dari pembatalan Akta Jual Beli terhadap Ahli Waris dari perkawinan kedua adalah mereka tidak mendapatkan hak waris dari harta bersama ayah kandungnya yang di peroleh dari perkawinan pertama, Setelah keluarnya putusan perkara Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Lbs maka kedudukan ahli waris dari perkawinan pertama dinyatakan sebagai pemilik harta peninggalan H. Alwi St Masohor dan Sahara (orang tua kandung penggugat).

Kata Kunci: Pembatalan Akta, harta pusaka rendah

345
MUH
f

FUNGSI VISUM ET REPERTUM DALAM PEMBUKTIANTINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG

Muhammad Thariq.1410112003.Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV (HukumPidana.71 Halaman.Tahun 2018.

ABSTRAK

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, dalam hal ini hukum pidana menganut asas “negatief wettelijk”, sebagai upaya menghindari kesewenangan dan kekeliruan penegak hukum dalam menjatuhkan pidana. Keberadaan alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan selalu berpedoman kepada hasil pembuktian. Dalam hal ini hukum pidana kita menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yaitu hakim baru dapat memidana seseorang apabila sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh pertimbangan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Salah satu alat bukti yang sah tersebut adalah surat yang diantaranya visum et repertum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah fungsi visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan yang juga berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan , yaitu dengan melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A padang, dan dokter forensik di RSUP DR. M. Djamil Padang dan melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembuktian tindak pidana pembunuhan.Visummempunyai arti penting karena yang dapat mengetahui secara medik apakah telah terjadi kekerasan melalu benda tajam atau tidak adalah dokter,yang kemudian hasil visum ini disesuaikan dengan alat bukti yang lainya untuk meyakinkan hakim akan terbukti atau tidaknya tindak pidana. Hakim akan mempertimbangkan terhadap visum et repertum apabila terdapat kesesuaian antara visum et repertum dengan alat bukti lainnya yang nantinya dapat menjadi dasar untuk membebaskan terdakwa dari penututan atau sebaliknya untuk menjatuhkan hukuman.

345
MUH
u

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi di Polresta Bukittinggi)

Muhammad Umar Islami, 1310112159, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 73 hlm, 2018

ABSTRAK

Tindak pidana perjudian adalah perbuatan melanggar hukum yang termasuk kedalam sebuah tindak pidana. Tindak pidana perjudian diatur dalam pasal 303 bis KUHP dan Undang-Undang lainnya yang mengatur tentang perjudian. Tindak pidana perjudian sudah menjadi kebiasan dan penyakit bagi masyarakat, maka dari itu perlu upaya penanggulangan oleh kepolisian khususnya tindak pidana perjudian diwilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi. Untuk itu penulis tertarik meneliti permasalahan 1) Faktor penyebab tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi, 2) Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi, 3) Hambatan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, penelitian bersifat deskriptif, jenis data berupa data primer, data sekunder dan data tersier, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kepolisian Resor Kota Bukittinggi adalah menggunakan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif merupakan upaya dalam mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, sedangkan upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana yang telah terjadi, khusunya tindak pidana perjudian. Dan yang menjadi kendala kepolisian dalam menanggulanginya adalah kurangnya dana operasional, fasilitas/sarana-prasarana, kurangnya pengawasan dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan diharapakan kepada masyarakat ikut berpartisipasi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian . Sebagai aparat penegak hukum kepolisian diharapkan untuk meningkatkan kinerja sebagai pihak yang berwajib dan berwenang dalam menegakan hukum dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan hubungan dengan semua pihak demi memudahkan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.

346
MUH
p

PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI DEBITUR BANK INDONESIADALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA

MUHAMMAD NATSIR, 1310111003, HUKUM PERDATA, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS, 2017

ABSTRAK

Dengan adanya SID Bank Indonesia yang sangat terpadu sehinggaakandiketahui informasi dan profil dari nasabahyang hendak megajukan kredit apakahtermasuk dalam daftar hitam atau tidak. Dalam beberapa kasus yangterjadi, setiap kali hal ini terjadi pihak banktidak akan langsung jujur dan terbukamengenai hal tersebut, untuk itu nasabah ataucalon debiturlah yang harus sigap dalammengecek Informasi Debitur Individual (IDI)pada SID. Kita akan meneliti mengenai pelaksanaan dari SID BI dalam sistem perbankan di Indonesia dan ketentuan peraturan Bank Indonesia dalam pengenaan sanksi dan penyelesaian masalah terhadap pihak bank yang melakukan kesalahan dalam laporan informasi debitur. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan bersifat deskriptif. Sumber datanya berasal dari data sekunder yaitu bersala dari bahan pustaka. SID berisikan data-data debitur perbankan. SID dapat diakses oleh bank lain atau lembaga keuangan lainnya dengan sistem online. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan seringkali hak-hak nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan friksi antara nasabah dengan bank. Dalam dunia perbankan ini, nasabah merupakan suatu unsur yang sangat berperan penting. Bank yang melakukan kesalahan akan dikenakan sanksi dari Bank Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan SID, hendaknya diperlukan suatu upaya yang sifatnya berkelanjutan melalui suatu edukasi kepada masyarakat menganai hak-hak nasabah agar tidak terjadi kerugian pada nasabah maupun pada bank itu sendiri. Dalam pemberian sanksi, akan lebih baik kiranya sanksi tersebut lebih dipertegas lagi dan sebaiknya pihak perbankan melakukan pengevaluasian pada para pegawai/karyawan yang bertugas dalam penginputan data debitur dalam SID agar tidak terjadi suatu kerugian.

Kata kunci: Pelaksanaan, sistem informasi debitur, perbankan.

345
NIN
p

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI POLRESTA PADANG

Nindy Ayu Saputri, 141011151, Fak. Hukum Unand, Jumlah Halaman 78, Tahun 2018

ABSTRAK

Prostitusi merupakan suatu kegiatan yang secara moral bertentangan dengan nilai agama dan nilai kesusilaan. Tumbuh sumburnya kegiatan prostitusi di dalam masyarakat merupakan bukti bahwa prostitusi masih menjadi ancaman bagi masyarakat. Kegiatan prostitusi tersebut tidak hanya menimpa perempuan dewasa tetapi juga terhadap anak. Anak yang telah menjadi korban prostitusi tentu saja akan mengalami gangguan mental dan jiwanya sehingga perlu diberikan perlindungan hukum oleh penegak hukum pada setiap tingakat pemeriksaan. Penelitian ini mendeskripsikan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi di wilayah hukum di Polresta Padang. Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah yurisdis sesiologis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, yaitu uraian yang penulis lakukan terhadap data yang terkumpul dan tidak menggunakan angka tetapi berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan ynag berlaku. Dari hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik terhadap anak korban prostitusi adalah memberikan pedamping khusus yaitu Pekerja Sosial bagi anak korban prostitusi dan pihak yang melapor atau korban memperoleh perlindungan hukum dari ancaman pihak atau pelaku prostitusi.Pola jaringan prostitusi di Kota Padang terbagi atas dua macam, yang pertama dengan pola penjaringan PSK. Kedua, dengan pola pendistribusian PSK dimana calon PSK tersebut cenderung ditemukan dari media sosial. Kesimpulan yang didapat yaitu telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku didalam masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak merupakan suatu upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

345
NAB
p

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI JALUR PENDAKIAN GUNUNG SINGGALANG , KENAGARIAN PANDAI SIKEK OLEH PENYIDIK POLSEK X KOTO, KABUPATEN TANAH DATAR

Nabilah Zhafirah, 1310112119, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 81 halaman , Tahun 2018

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berkembangnya masyarakat maka berkembang pula hobi masyarakat tersebut. Saat ini, muncul hobi baru oleh anak remaja di seluruh Indonesia dalam mengeksplorasi alam raya yang sangat kaya ini, salah satunya dengan melakukan olahraga mendaki gunung. Hal ini tentu saja juga diimbangi dengan kejahatan yang terjadi akibat dari berkembangnya hobi dari masyarakat, Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam olahraga mendaki gunung yang saya temui adalah pencurian dengan kekerasan di jalur pendakian Gunung Singgalang. Namun dengan maraknya kasus ini terjadi penulis tertarik mengambil kasus ini karena penyidikan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi di jalur Pendakian Gunung Singgalang Kenagarian Pandai Sikek yang kasusnya ditangani oleh Polsek X Koto dirasa belum optimal. Penelitian ini dilakukan di Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar dan di sepanjang jalur pendakian Gunung Singgalang Kenagarian Pandai Sikek. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang didapat langsung dari lapangan dengn metode wawancara dan data sekunder yaitu informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ada rangkaian penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya yang di tetapkan pada Undang-Undang. Kendala yang dihadapi oleh petugas penyidik Polsek X Koto dalam penyidikan sendiri adalah kurangnya anggaran dana, keterbatasan sarana prasarana, dan kurangnya komunikasi antara petugas penyidik Polsek X Koto dengan masyarakat sekitar. Adapun upaya petugas Polsek X Koto dalam mengatasi kendala yang di hadapi adalah dengan meningkatkan anggaran Polsek X Koto, mengadakan razia dan operasi, serta menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar.

345
NAD
f

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BUKITTINGGI TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN

Nadia Rahma, 1410111059, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018,Pembimbing : Prof. Dr. Ismansyah, SH, MH, dan Nelwitis, SH, MH,

ABSTRAK

Kejahatan terhadap kesusilaan adalah segala macam bentuk perilaku yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran. Salah satunya adalah perbuatan cabul, perbuatan cabul adalah suatu kejahatan yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang, yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Contohnya adalah perbuatan cabul yang dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan klas IIA Bukittinggi terhadap narapidana perempuan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu apakah faktor penyebab terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh kepala lembaga pemasyarakatan klas IIA Bukittinggi terhadap narapidana perempuan? dan bagaimana upaya penanggulangan dari penyebab terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan kepala lembaga pemasyarakatan klas IIA Bukittinggi terhadap narapidana perempuan?. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dan studi dokumen dan kepustakaan, pengolahan data dengan cara edit dan klasifikasi dan analisis data secara kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan yang menjadi faktor penyebab perbuatan cabul adalah: 1.Faktor kepribadian (psikogenesis), 2.Faktor lingkungan kerja (sosiogenesis), 3.Faktor perkembangan teknologi, 4.Faktor kesempatan dan peranan korban. Serta faktor lainnya adalah: a.Lemahnya pertahanan diri, b.Kurangnya dasar keimanan didalam diri, c.Pendidikan, d.Lingkungan atau tempat tinggal. Upaya penanggulangan perbuatan cabul dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventifnya yaitu: 1.Individu: menghindari pakaian yang dapat menimbulkan rangsangan seksual terhadap lawan jenis dan tidak berkomunikasi bersama orang lain yang tidak dikenal atau baru dikenal, 2.Penegak hukum: dengan memperketat standard operating procedures (SOP) kepada pegawai negeri sipil dan membina narapidana dengan lebih baik lagi, 3.Pemerintah: dengan mengadakan penyuluhan hukum dan penyuluhan agama. Upaya represifnya yaitu: 1.Pelaku: dinonaktifkan sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi dan dipindah-tugaskan kerjanya kedaerah lain, 2.Korban: dipindahkan masa binaannya ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dan Perempuan Tanjung Pati Payakumbuh. Sementara kendala dalam upaya penanggulangannya dilihat dari: 1.Internal: korban yang takut untuk mengatakan dan melaporkan kejadian perbuatan cabul yang telah dialaminya karena ini dianggap sebagai aib keluarga, kurangnya pengetahuan hukum si korban dan pelaku yang memiliki kedudukan jabatannya, 2.Eksternal: cara berpakaian sesuai zaman yang salah dan tidak lagi mengindahkan kesopanan, teknologi yang semakin tinggi dan semakin canggih untuk berkomunikasi, kesempatan untuk melakukan perbuatan cabul, dan lingkungan kerja yang mempermudah perbuatan cabul.

342
NAD
p

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) DALAM UPAYA PENGELOLAAN ASET NAGARI (Studi Pada Nagari Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten) Pesisir Selatan

Nadya Mifta Utami, 1410111123, Fakultas Hukum, 2018, 92 halaman

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa atau Nagari untuk Sumatera Barat, disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya Nagari yang belum dimanfaatkan, juga ketersediaan sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, masih banyak Nagari yang belum mampu mengelola potensi lokal yang dimiliki, salah satunya Nagari Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Dari hal tersebut kemudian Pemerintah Nagari Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan mendirikan BUMNag Painan Selatan Mandiri yang diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat dangan ikut berpartisipasi langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latarbelakang pendirian BUMNag Painan Selatan Mandiri serta mengetahui proses pendirian BUMNag Painan Selatan Mandiri. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu untuk menguji apakah sesuatu telah berjalan sesuai aturan perundang-undangan, maka dibuktikan dengan terjun langsung ke lapangan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa BUMNag Painan Selatan Mandiri secara pendirian masih terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya terkait pendirian suatu badan usaha. Dalam pelaksanaan usaha BUMNag masih ditemukan beberapa kendala baik dalam hal menjalankan kegiatan usaha maupun perannya terhadap Nagari dan kesejahteraan masyarakat Nagari. Selain itu, juga ditemukan bahwa keberadaan BUMNag ini bekum mampu menjadi pendorong dalam peningkatan perekonomian Nagari. Sehingga diharapkan agar proses pendirian BUMNag ini lebih difokuskan lagi dan disesuaikan dengan aturan-aturan terkait yang akhirnya mampu meningkatkan perekonomian nagari dan kesejahteraan masyarakat Nagari.

Kata Kunci : Pendirian, Badan Usaha Milik Nagari, Nagari

342
NAN
p

PEMBATASAN HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM MENGANGKAT KAPOLRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nanda Fazli, BP 1110111031, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68 hlm+i-vi

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyebutkan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, Keikutsertaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam memberikan persetujuan dalam pengangkatan seorang Kapolri sebagai pimpinan tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia melahirkan banyak pandangan dimana ada yang menilai bahwa hal ini membatasi ruang gerak Presiden dalam menggunakan Hak Prerogatifnya ataupun dengan penilaian bahwa hal ini merupakan bentuk penerapan prinsip check and balances antar lembaga Negara dalam sebuah Negara demokrasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dan dilakukan dengan pendekatan yuridis Normatif. Pendekatan tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan dan putusan pengadilan. Setelah semua data didapatkan, maka akan dilakukan pengolahan dan analisis data. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah Pertama Bagaimanakah Pembatasan Hak Prerogatif Presiden dalam mengangkat Kapolri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kedua Bagaimanakah Implikasi Yuridis dari keikutsertaan DPR RI dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Kapolri. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu data yang disusun secara sistematis dengan menggunakan kalimat sebagai gambaran dan pembahasan dari hasil penelitian hingga diperoleh kesimpulan. Dari Penelitian ini disimpulkan bahwa .(1) Pergeseran makna hak prerogatif dalam pengangkatan Kapolri tidaklah dimaknai bahwa hak presiden berkurang, namun perlunya intervensi dari cabang kekuasaan lain dalam hal ini DPR RI untuk menghindari kesewenang – wenangan penggunaan kekuasaan eksekutif oleh Presiden karena kuatnya kekuasaan yang dimiliki. Namun keikutsertaan DPR RI dalam pengangkatan Kapolri selama ini perlu menjadi perhatian dan beberapa koreksi agar tentunya hak prerogatif presiden juga tidak menjadi hilang atau dikurangi. (2) bahwa dengan adanya persetujuan DPR dalam mengangkat Kapolri berpotensi mempengaruhi pengabdian dan loyalitas kepada Presiden sehingga timbul anasir-anasir politis yang rawan dengan pola dan mekanisme transaksional seperti yang terjadi pada kasus Miranda Swaray Goeltom mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana penyuapan saat menjalankan fit and proper test di DPR.

346
NAN
p

PENDAFTARAN TANAH YANG BERASAL DARI ULAYAT NAGARI MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI NAGARI MUARO GADANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nanda Novia, BP. 1310111094, Hukum Agraria, Universitas Andalas, hlm 63, 2017

ABSTRAK

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur. Di Kabupaten Pesisir Selatan banyak terdapat tanah ulayat yang belum memiliki sertifikat tanah, rata-rata 80% tanah ulayat yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan belum memili sertipikat, maka dari pada itu pemerintah memberikan kemudahan dengan program PTSL agar memberikan kemudahan kepada masyarakt setempat dalam membuat sertifikat tanahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pendaftaran Tanah Yang Berasal Dari Ulayat Nagari Melalui Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Pesisir Selatan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif.Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Proses pengadaan alas hak atas tanah adalah dimana pemerintah telah membeli tanah ulayat sebanyak 1600 Hektar, yang diperuntukan oleh warga trans dengan pembagian 600 KK, telah terdistribusi sebanya 600 KK. Proses Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut merupakan ketentuan yang ditujukan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Pendaftaran Tanah Yang Berasal Dari Ulayat Nagari Melaui PTSL Di Kabupaten Pesisir Selatan semua dilakukan di nagari, mulai dari surat menyurat dan pemberian materai dilakukan oleh Nagari sedangkan badan BPN tinggal mengesahkan surat-suat yang telah diberikan oleh nagari, hal ini sangat membantu masyarakat dalam pengurusan tanah selain itu mereka merasakan senang dengan proses pengurusan tanah yang cepat

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Tanah Ulayat

346
NES
p

PERAN KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN KOTA PADANG DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN SERTIPIKAT HAK MILIK GANDA DI KOTA PADANG

Nesi Mongeri, 1520123048, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 109 hlm

ABSTRAK

Tanah merupakan suatu kebutuhan fundamental dari setiap Warga Negara saat ini, yang terlihat dari antusias setiap orang akan memperoleh dan mempertahankan tanah yang mereka inginkan dan mereka miliki. Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki nilai yang sangat tinggi secara derajat seseorang ditengah masyarakat. Dilihat secara mendalam, maka hak milik atas tanah memberikan kewenangan untuk menggunakannya bagi segala macam keperluan dengan jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu, sedangkan hak guna usaha hanya untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan pertanian (perkebunan), perikanan atau peternakan. Demikian pula dengan hak guna bangunan hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah milik orang lain atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Sebidang tanah yang mempunyai sertipikat ganda muncul dan menjadi akar pahit bagi hukum pertanahan yang ada di Indonesia. Permasalahan tersebut melahirkan rumusan masalah; 1)Bagaimana sampai munculnya sertipikat ganda yang merupakan alat bukti sah kepemilikan tanah atau penyebab timbulnya sertipikat hak milik ganda (overlapping) atas tanah di Kota Padang? 2) Bagaimana penyelesaian yang dilakukan pihak berwenang menyelesaikan masalah sertipikat ganda dan bagaimana peran Kementerian ATR/BPN Kota Padang dalam menyelesaikan permasalahan sertipikat hak milik ganda (overlapping) di Kota Padang? 3) Bagaimana akibat hukum dengan adanya sertipikat hak milik ganda (overlapping) atas tanah di Kota Padang?. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Empiris, bersifat perspektif analisis dengan objek kajian meliputi asas-asas hukum, efektivitas hukum di Masyarakat. Sumber data utama dalam penelitian hukum Empiris adalah aturan-aturan hukum dan fakta yang berkembang ditengah masyarakat. Teknik pengkajian dan pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi dokumenter, berkaitan dengan Sertifikat ganda di Badan Pertanahan Nasional. Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa faktor penyebab munculnya permasalahan sertipikat ganda adalah masyarakat itu sendiri yang kurang arif dan bijaksana menjaga tanah milik sendiri. Kelalaian dari pihak kelurahan dan BPN dalam pengukuran dan pemetaan yang tidak diperbaharui.

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Overlapping, Sengketa.

347.05
NIC
e

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI PENYELESAIAN KREDIT MACET STUDI PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG PADANG

Nico Hardi Harlan, 1410112139, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 Halaman, Tahun 2018

ABSTRAK

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan pokok menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dalam menyalurkan pinjaman, bank selalu mewajibkan pihak debitor untuk menyediakan jaminan yang dibebani dengan Hak Tanggungan. Dengan jaminan tersebut bank sebagai kreditor bisa mendapatkan hak utama (preferensi) bagi pelunasan suatu piutang apabila debitor wanprestasi. Akan tetapi, dalam proses eksekusi Hak Tanggungan pada kredit macet tidak semua berjalan lancar karena adanya beberapa hambatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi hak tanggungan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Padang dan hambatan - hambatan apa sajakah yang terjadi dan upaya pemecahannya dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Padang. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pelaksanaan eksekusi hak tanggungan pada PT. Bank Mandiri dilakukan dengan parate eksekusi. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dengan parate eksekusi dimaksudkan untuk memperoleh pelunasan piutangnya secara cepat dan efisien dengan prosedur yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yaitu pihak debitor atau pihak ketiga melakukan gugatan kepada pihak kreditor. Debitur yang menggugat kreditor setelah lelang karena merasa dirugikan dengan penjualan objek hak tanggungan melalui cara parate eksekusi, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Padang selaku kreditor telah melakukan upaya persuasif kepada debitor sehingga masalah Eksekusi tidak diteruskan ke pengadilan.

Kata Kunci : Eksekusi, Hak tanggungan ,Kredit Macet, Bank

342
NID
i

IMPLEMENTASI ASAS KEMANUSIAAN DALAM PELAYANAN TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN

Nidya Kusumaningtyas, 1310111078, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2017, 58 Halaman

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hal sangat penting bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial selanjutnya disebut dengan BPJS diselenggarakan untuk menjamin kesejahteraan kesehatan dan pekerjaan seluruh warga Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah tercantum bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa: "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Dalam pelayanannya BPJS harus memenuhi 3 asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yaitu: Kemanusiaan, Kemanfaatan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak pelayanan yang belum maksimal. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Implementasi asas kemanusiaan dalam pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, (2) Mengetahui kelemahan dari Implementasi asas kemanusiaan dari BPJS. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian yang peneliti peroleh, pertama, Implementasi asas kemanusiaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Undang- Undang BPJS dan Undang-Undang yang terkait dengan BPJS. Kedua, masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan pada pihak BPJS yang sedikit banyak telah merugikan peserta BPJS. Pada prinsip nya BPJS dapat menjamin dan melakukan pelayanan yang baik terhadap pasien atau peserta BPJS dan meminimalisir kerugian yang akan ditimbulkan dari kelemahan tersebut.

347.05
NIS
p

PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS OLEH PENGURUS IKATAN NOTARIS INDONESIAKOTA PADANG

Nisaul Hasanah, 1620123080, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tesis, 2018

ABSTRAK

Notaris merupakan sebuah profesi yang menuntut pemangku jabatan dan profesi tersebut memiliki kompetensi keilmuan dan kompetensi moral. Berdasarkan kode etik hasil perubahan tersebut menarik untuk melihat pengawasan dan penegakan kode etik terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik oleh pengurus wilayah IkatanNotaris Indonesia (INI). Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah 1).Bagaimanakah pengawasan dan penegakan kode etik terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik oleh pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang? 2). Bagaimanakah hubungan koordinasi antara pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang dengan Majelis Pengawas Notaris terhadap pelanggaran kode etik notaris? 3). Apakah permasalahan hukum yang timbul terkait pengawasan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik oleh pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang?.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian meliputi data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara kemudian data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian maka penulis berkesimpulan bahwa pengawasan dan penegakan kode etik terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang.Pengawasan dan penegakan kode etik notaries oleh Pengurus IkatanNotaris Indonesia kota Padang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah. Pengawasan dan penegakan kode etik dilaksanakan secara bertingkat dimana apabila terduga pelanggaran kode etik tidak puas dengan keputusan dewan kehormatan daerah, maupun wilayah maka dapat maka dapat mengajukan banding terhadap Dewan Kehormatan Pusat,dan jika belum terpuaskan dengan putusan Dewan Kehormatan Pusat maka bias diajukan banding ke Kongres. Hubungan koordinasi antara Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang dengan Majelis Pengawas Notaris melalui koordinasi secara berkala, dan rekomendasi yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Pusat. Sedangkan Permasalahan Hukum yang timbul terkait Pengawasan terhadap Notaris yang melakukan Pelanggaran Kode Etik oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang yaitu belum memadainya aturan-aturan terkait acara pemeriksaan notaries Oleh Dewan Kehormatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

Kata Kunci :Pengawasan, Pelanggaran, KodeEtik.

345
NOF
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH DIREKTORAT TINDAK PIDANA KEJAHATAN SIBER TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA

Nofri Ivandi Yunis. 1410112123.Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK IV (Hukum Pidana). 68 Halaman.Tahun 2018.

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari hubungan-hubungan sosial yang mengakibatkan adanya dampak positif dan negatif terhadap sesuatu yang baru dan juga dibutuhkan oleh sesama manusia. Pada era digital ini internet salah satu kebutuhan manusia yang di dalamnya terdapat semua yang di inginkan manusia modern, salah satunya peluang usaha dan pelampiasan hobi. Pada situasi tertentu kegiatan yang seharusnya menjadi kegiatan positif dapat berubah menjadi kegiatan negatif dan mungkin saja tindakan kriminal karna memanfaatkan teknologi sebagai salah satu penunjang untuk mempermudah kegiatannya tersebut. Salah satu kegiatan negatifnya yaitu perjudian online. Perjudian online sendiri sudah di atur pada Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan acaman berat yaitu kurungan selama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah). Jenis permainan yang kita jumpai dengan skala kecil yaitu domino atau poker, sedangkan skala besar bisa kita akses di situs 188bet.com, Bet365.com, KaptenKasino.com, sbobet.com. Permasalah penelitian adalah a)proses plekasanaan penyidikan oleh subdit cybercrime polda metro jaya terhadap tindak pidana perjudian online b) kendala-kendala yang dihadapi polda metro jaya di dalam proses penyidikan terhadap kasus tindak pidana perjudian online c) upaya yang dilakukan terhadap kendala yang di hadapi. Penelitian bersifat deskriptif dengan maksud mengethui fakta fakta hukum yang terjadi di lapangan dengan pendekatan yurudis sosiologis yaitu melihat langsung penyidikan tindak pidana perjudian online di wilayah hukum polda metro jaya. Hasil penelitian menunjukan bahwa a) proses penyidikan diawali oleh laporan masyarakat atau polisi langsung, dan dilanjutkan dengan menelusuri keberadaan situs tersebut dengan menggunakan program Domain dosier atau whois,sc hasil penelusuran tersebut menghasilkan pengetahuan untuk mengetahui siapa yang mendaftarkan, alamat pendaftar, serta email yang digunakan untuk mendaftar. b) kendala yang di hadapi adalah sistem komunikasi pelaku sulit di lacak, kurangnya sumber daya manusia kepolisian, rekening fiktif, server berada di luar indonesia, sarana prasarana kurang, kurangnya laporan dari masyarakat, barang bukti yang bersifat maya muda di hilangkan. adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala adalah menyimpan secepat mungkin alat bukti yang bersifat maya, melakukan kerja sama dengan pihak provider alat telekomunikasi, melakukan kerja sama dengan pihak perbankan. Untuk meningkatkan efektif dan efisiensi pemerantasan perjudian online di waktu yang akan datang maka perlu dilakukan langkah prefentif dan represif, beberapa langkah tersebut sebagai berikut, a)memerbanyak subdit cybercrime di Polda pada seluruh nusantara, b) melakukan upaya pencegahan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, c) pihak bank lebih berhati-hati dengan rekening fiktif sehingga orang akan takut untuk berjudi menggunakan rekening dengan identitas diri yang asli.

345
NOV
u

UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Nova Zaiti, 1310111035, Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universita Andalas, 57 Halaman, 2018

ABSTRAK

Narkotika mulai menjadi permasalahan serius di Indonesia sejak pertengahan tahun 1971. Narkotika sering kali menjadi permasalahan di identikan dengan remaja. Narkotika ini tidak saja berdampak pada remaja tetapi bisa berdapak pada semua orang, oleh karena itu pemerintah membentuk badan narkotika tidak hanya di nasional tetapi juga dibentuk di provinsi. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam sebuah srikpsi berjudul “upaya badan narkotika nasional provinsi sumatera barat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, penulis disini memakai atau perlu metode yang berfungsi sebagai pedoman. Metode yang digunakanc adalah yuridis sisiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan per undang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam memberantas tindak pidana narkotika dibagi menjadi beberapa bidang antara lain bidang pencegahan, bidang pemberdayaan, bidang pengawasan. Untuk itu pemerintah provinsi Sumatera Barat melakukan program-program kerja sama dan mempermudah bantuan anggaran Badan Narkotika Provinsi Sumatera Barat agar terlaksananya operasional Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat.

345
NOV
p

PERAN INSPEKTORAT KOTA PADANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Novaldi, 1310112049, Hukum Pidana, 86 Halaman

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan administrasi yang dapat menghambat usaha-usaha pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kerugian keuangan negara dan perekonomian negara adalah akibat nyata yang menjadi dasar pembenaran dilakukannya kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perilaku koruptif dalam kebijakan perundang-undangan pidana. Korupsi menghambat proses pembangunan nasional dengan berbagai akibat, antara lain merugikan perekonomian negara dan investasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri, tindakan pencegahan sangat penting diprioritaskan, Tindak pidana korupsi di indonesia sudah menyebar keseluruh badan yang ada pada pemerintahan dan pemberantasannya masih berjalan lambat, Inspektorat merupakan salah satu instansi yang diberikan tugas dalam pengawasan pada pada pemerintahan. Inspektorat memiliki posisi yang strategis untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi secara dini melaui pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah di Kota Padang dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh Inspektorat dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di pemerintahan Kota Padang serta mengetahui upaya Inspektorat mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintahan Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah belum berjalan sepenuhnya dengan baik, karena Inspektorat melakukan pemeriksaan jika ada laporan dari masyarakat ataupun LSM bahwa telah terjadi penyelewengan dana. Inspektorat melakukan pengawasan melalui pemeriksaan reguler dan pemeriksaan komprehensif sesuai dengan jadwal program yang telah ditentukan dan kendala yang dihadapi oleh Inspektorat dalam melakukan pengawasan berasal dari faktor internal maupun dari faktor eksternal yang terjadi dalam sistem pemerintahan serta cara inspektorat dalam mengatasi kendala dalam melakukan pengawasan ada kemajuan, sehingga dapat meminimaliasir kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintahan Kota Padang.

345
NOV
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH JAKSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PADANG

NOVIA SARI, 1310111038, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana), jumlah halaman 92, Tahun 2018

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat menghambat pembangunan negara dan membahayakan kestabilan politik suatu negara. Lembaga yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Negara Republik Indonesia, serta pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia berlandaskan pada Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Wikayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang? (2) bagaimanakah bentuk koordinasi fungsional yang dilakukan antara penegak hukum sesama penyidik tindak pidana korupsi oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Padang? dan (3) apakah hambatan-hambatan yang ditemui oleh jaksa dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologis yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian yang ini adalah, kewenangan lembaga kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang telah dilakukan seuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang berwenang dalam melakukan koordinasi untuk adalah (Komisi Pemberatasan Korupsi) KPK dan untuk di Kota Padang sendiri hal tersebut sudah dilakukan serta koordinasi antara Kejaksaan Negeri Padang dan Kepolisian di Kota Padang berbetuk pemberitahuan bahwa salah satu lembaga sudah mulai melakukan penyidikan dan jika salah satu telah mulai melakukan penyidikan yang lain tidak boleh lagi melakukan penyidikan terhadap kasus yang sama. hambatan yang paling utama dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang adalah kasus yang terjadi sudah lama dan baru diketahui, sehingga sulit untuk mengumpulkan alat-alat bukti dan menetapkan tersangkanya.

Kata kunci : Penyidikan, tindak pidana korupsi, oleh kejaksaan, di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang.

346
OCT
p

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG KEMITRAAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU PADA AREAL KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BUKIT BARISAN DI KABUPATEN TANAH DATAR

Octharie, 1310112148, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK II Hukum Perdata Bisnis, 83 Halaman, Tahun 2018

ABSTRAK

Hutan adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia yang wajib disyukuri. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan P.35/Menhut- II/2007 Tentang Hasil Hutan Bukan Kayu, yang dimaksud Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu sebagai segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dimanfaatkan bagi kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Provinsi Sumatera Barat, Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 Jo Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kemitraan Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanah datar. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang kemitraan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada areal kesatuan pengelolaan hutan lindung Bukit Barisan di Kabupaten Tanah Datar dan (2) Bagaimana bentuk wanprestasi dan upaya yang dilakukan para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang kemitraan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada areal kesatuan pengelolaan hutan lindung Bukit barisan di Kabupaten Tanah Datar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Dari rumusan masalah dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan perjanjian kemitraan ini masih belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan para pihak diakibatkan oleh beberapa faktor, bentuk perjanjian kemitraan ini berbentuk akta dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan saja dan dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi, dalam penyelesaian wanprestasi tersebut para pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah, dan apabila musyawarah tidak menemukan penyelesaian para pihak sepakat menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Kota Padang

344.09
PAN
p

PENGELOLAAN ZAKAT DI BANK MANDIRI SYARI'AH DI KOTA PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN (MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT)

Pandu Utama Pratilo, 1310111144, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK III (Hukum Perdata Adat dan Islam), 63 halaman, 2018

ABSTRAK

Zakat memiliki potensi yang besar untuk membantu perkonomian umat. Sebagaimana yang kita ketahui zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Hal ini telah ditetapkan dalam AL-Quran dengan jelas. Zakat tidak hanya berdimensi pada ibadah saja dalam konteks menegakan syariat Allah SWT, tetapi juga berdimensi sosial dan ekonomi. Dari kajian sosial dan ekonomi inilah kajian terpenting yang harus dikembangkan secara luas, dimana zakat yang di harapkan mampu mengatasi problematika kemiskinan dan kesenjangan sosial. Zakat sesungguhnya merupakan instrument kebijakan fiskal Islami yang sangat luar biasa potensinya. Potensi zakat ini jika digarap dengan baik, akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga dapat menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan. Ujung dari semua itu bermuara pada meningkatnya perkonomian bangsa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas pengelolaan zakat di Bank Mandiri Syariah di Kota Painan, Pesisir Selatan (Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011). Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pengelolaan zakat di Bank Mandiri Syariah di Kota Painan, Pesisir Selatan (Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011); 2) Apa kendala dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengaturan pengelolaan zakat di Bank Mandiri Syariah di Kota Painan, Pesisir Selatan (Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011); penelitian ini bersifat Deskriptif, dengan metode penelitian yang digunakan Yuridis Empiris atau Yuridis Sosiologis (socio legal research), sedangkan pokok pembahasan menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan prakteknya dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 1)Pengelolaan yang dilaksanakan Bank Syariah Mandiri adalah dengan memberikan bantuan dalam upaya mengentaskan kemiskinanan tidak hanya menggunakan konsumtif saja, tetapi juga menggunakan prinsip manfaat produktif, beasiswa, pendidikan agama, bantuan sarana keagamaan, dan kesehatan. Artinya para mustahik perorangan tidak saja menerima dana zakat, infaq dan shadaqah untuk dikonsumsi, tetapi juga diberi bimbingan dan modal usaha yang cukup agar mereka hidup produktif dan mandiri dan diharapkan bisa berubah menjadi muzaki baru. 2) Kendala yang di hadapi misalkan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terutama kepada nasabah yang mempunyai harta melebihi nisabnya dan wajib mengeluarkan zakat dan juga awam nya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana cara tata cara membayar zakat melalui fasilitas yang telah di berikan faktor geografis wilayah juga menjadi kendala dalam proses pengimpunan dana zakat.Serta upaya untuk mengatasi kendala seperti lebih disosialisasikan lagi kemudahan dan keindahan membayar zakat yang dimana merupakan suatu kewajiban bagi setiap kita muslim yang hartanya telah mencapai nisab atau telah lebih dari cukup.

341
PAN
l

LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Panji Anugraha, 1210112115, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS, PADANG, HALAMAN+viii, 2018

ABSTRAK

Terumbu karang merupakan salah satu dari komunitas dunia yang memiliki tingkat produktivitas tertinggi.Terumbu karang jumlahnya mengalami penurunan, hal ini bukan saja akan berdampak bagi manusia itu sendiri,namun juga menyulitkan pulihnya kondisi terumbu karang. Asosiasi ikan dan teurmbu karang sangat erat, sehingga eksistensi ikan di suatu wilayah terumbu karang sangat rapuh ketika terjadi perusakan habitatnya.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum ini dikumpulkan melalui studi pustaka. Setelah mendapatkan bahan hukum kemudian bahan hukum tersebut disusun secara sistematis yang kemudian di analisis secara kualitatif.Hukum lingkungan internasional tentang perlindungan terumbu karang diatur dalam hukum lunak(soft law) dan hukum keras(hard keras),hukum lunak lingkungan internasional adalah Deklarasi Stockholm 1972 dan hukum keras lingkungan internasional yaitu UNCLOS1982. Pengaturan hukum nasional mengenai perlindungan terumbu karang diatur dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,UU No.1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.Kasus MV Caledonian Sky yang merusak terumbu karang di wilayah Indonesia dan telah melanggar hukum lingkungan indonesia yang saat ini masih merundingkan nilai ganti rugi yang harus dibayarkan MV Caledonian Sky.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Lingkungan Hidup, Terumbu Karang

342
PAT
a

ANALISIS PENYIMPANGAN TENTANG SALINAN PUTUSAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REGISTER PERKARA NOMOR 754K/PID.SUS/2015

Pataka Dieki Al Muhri, 1410112107, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 132 halaman, 2018

ABSTRAK

Pasal 270 KUHAP mengamanatkan kepada Pengadilan untuk menyelesaikan Salinan Putusan yang dibuat oleh Panitera dan mengamanatkan kepada Jaksa untuk melakukan eksekusi yang telah berkekuatan Hukum tetap berdasarkan Salinan Putusan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, kewajiban Pengadilan dalam memberikan Salinan Putusan tidak terlaksana dengan baik maka Jaksa melakukan eksekusi tidak berdasarkan Salinan Putusan sehingga terjadi penyimpangan antara amanat Pasal 270 KUHAP dengan pelaksanaan di lapangan. Perkara dengan nomor register 754K/Pid.Sus/2015 adalah salah satu dari sekian perkara yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 270 KUHAP. Fokus dari penelitian ini adalah mengetahui apa kendala Panitera Pengadilan dalam menyelesaikan salinan putusan dan mengetahui dasar Jaksa mengeksekusi Terdakwa tanpa Salinan Putusan. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Tinggi Banten, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Lebak, Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa kendala Panitera dalam menyelesaikan perkara adalah Sumber Daya Manusia dan Fasilitas yang ada tidak sebanding dengan besarnya jumlah perkara yang ada. Jumlah perkara yang sangat besar dan selalu terlambatnya proses pembuatan Salinan Putusan mengakibatkan Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung membuat perjanjian lisan. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa sebelum Putusan lengkap diterima Penuntut Umum, pengadilan cukup mengirimkan halaman terakhir putusan yang memuat Diktum Putusan dan berdasarkan Diktum tersebut Penuntut Umum dapat melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut. Perjanjian tersebut menimbulkan multi tafsir karena menyimpangi Asas Hukum Lex Superior Derogat Legi Inferior, Hukum lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah dan Asas Kepastian Hukum. Hal ini disebabkan juga karena KUHAP yang sudah tidak dapat mengikuti perkembangan zaman dan oleh karena itu perlu adanya percepatan dalam pembuatan KUHAP dan instrumen hukum lain yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pada saat ini.

346
PAN
p

PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM DI KELURAHAN CENGKEH NAN XX KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG

PANJI SADOYO, 1310112153, Hukum Agraria dan SDA, Fakultas HukumUniversitasAndalas, 66 Halaman, 2018

ABSTRAK

Pentingnya pendaftaran tanah ulayat kaum,adalah sebagai jaminan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah. Pemerintah menjamin hak-hak atas tanah yang mana si pemegang hak benar-benar berhak atas suatu bidang tanah tersebut sesuai dengan data yuridis dan data fisik serta didukung dengan adanya atau tersedianya peta hasil pengukuran. Daftar umum bidang- bidang tanah ulayat kaum yang terdaftar diubah statusnya menjadi hak milik dan diatas namakan kepada Mamak Kepala Waris serta kepada pemegang hak tersebut diberikan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat yang lazim disebut sebagai sertipikat tanah. Ketentuan mengenai pendaftaran tanah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Kelurahan Cengkeh Nan XX merupakan kawasan perkotaan yang padat penduduk yang mana masih terdapat beberapa tanah ulayat kaum yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Padang. Dari uraian diatas yang menjadi persoalan dalam penelitian ini : 1) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran Tanah Ulayat Kaum di Kelurahan Cengkeh Nan XX Kota Padang ? 2) Apa saja kendala dalam pelaksanaan pendaftaran Tanah Ulayat Kaum di Kelurahan Cengkeh Nan XX Kota Padang dan cara mengatasi permasalahan tersebut ? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum di Kelurahan Cengkeh Nan XX belum sepenuhnya terlaksana. 2) kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum di Kelurahan Cengkeh tidak lepas dari pola pikir masyarakat akan di salah gunakan peruntukannya serta kurangnya sarana dan prasarana instansi pemerintah dibidang pertanahan di Kelurahan Cengkeh Nan XX.

345
PER
p

PERANAN KEPOLISIANDALAM MENANGGULANGI KENAKALAN ANAK DALAM LALU LINTAS KHUSUS SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) PADANG

Perdi, Nomor Bp. 121012080, Tahun 2018

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia memilik tugas yang luas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.Salah satu tugasnya sebagai aparat penegak hukum adalah terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor karena telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkuatan jalan yakni pada Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM akan tetapi kenyataannya tidak sedikit pengendara sepeda motor yang mengendarai sepeda motor berusia dibawah 17 tahun. Semakin meningkatnya kendaraan dijalan raya apalagi sepeda motor yang sering menimbulkan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas sering kali terjadi bahkan sudah menjadi hal yang biasa dikalangan masyarakat maupun anak sekolah.Permasalahan yang dilihat disini adalah bentuk kenakalan anak dalam lalu lintas khusus sepeda motor, peranan kepolisian dalam menanggulangi kenakalan anak dalam lalu lintas khusus sepeda motor dan kendala-kendala dan upaya-upaya yang dihadapi polisi lalu lintas dalam menanggulangi kenakalan anak dalam lalu lintas khusus sepeda motor diwilayah hukumPolresta Padang.Penelitian dilakukan dengan metode penelitan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui dua cara yaitu data primer diperoleh langsung di lapangan (field research) dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (library research). Adapun hasil penelitian Penulis yaitu bentuk-bentuk kenakalan anak dalam lalu intas khusus sepeda motor pada umumnya tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan , tidak memakai helm, melanggar rambu-rambu lalu linta, tidak memenuhu syarat- syarat berkendara, melampaui batas maksimum kecepatan, melawan arus, muatan berlebih. Perana kepolisian untuk menanggulangi kenakalan anak dalam lalu lintas khusus sepeda motor yaitu penegakan preventif merupakan tindakan pencegahan berupa edukasi, penyuluhan, dan sosialisas, represif merupakan langkah terakhir setelah penegakan preventif dan preemtif dilaksanakan, represif merupakan tindakan penindakan. Kendala dan upaya dihadapi kepolisian dalam menanggulangi kenakalan anak dalam lalu lintas khusus sepeda motor meliputi: preventif, dan represif.

345
PRI
p

PERANAN KEPOLISIA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR DI KOTA PADANG (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Padang)

Prima Asvendo, 1410111090, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,78 halaman, 2018

ABSTRAK

Pengroyokan yang dilakukan oleh geng motor merupakan tindak pidana yang menonjol dan mendominasi angka kriminalitas di berbagai wilayah Sumatera Barat termasuk di wilayah Kota Padang yang mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah Kota Padang beserta aparat yakni Polres Kota Padang. Tindak pidana pengroyokan geng motor adalah kejahatan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama yang dapat menimbulkan luka tubuh bagi korban dan rasa tidak aman. Peristiwa tersebut sangat menggangu tatanan norma dalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat ingin hidup aman dan jauh dari segala tindak pidana yang dapat menggangu rasa aman dari masyarakat tersebut, Maka perlunya aparat penegak hukum terutama Kepolisian dalam menanggulangi maraknya tindak pidana pengroyokan geng motor tersebut demi terjaganya keamanan dan tertib hukum dalam kehidupan masyarakat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apa saja bentuk bentuk upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Kota Padang. Lalu apa kendala kepolisian dalam upaya penanggulangan tersebut dan bagaimana kepolisian mengatasi kendala yang ditemui. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris, yaitu penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan sekunder berupa buku, dokumen dan hasil wawancara dengan narasumber terkait skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Bentuk upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Kota Padang yakni dengan cara preventif dan represif. Kendala yang dihadapi: tidak ada saksi yang melihat, kurang alat bukti, masyarakat lambat melapor.

345
PUT
f

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI KOTA PADANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (Studi di Polresta Padang)

Putra Mirza Triady, 1410112037, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 69 halaman – Tahun 2018, Pembimbing : Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H dan Yandriza, S.H., M.H

ABSTRAK

Tindak pidana atau kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Salah satu contoh tindak pidana yang masih terjadi di Indonesia khusunya di kota Padang. Tindak pidana perkosaan di atur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Untuk itu dilakukan upaya penanggulangannya oleh kepolisian agar tidak terjadi lagi atau mengurangi tindak pidana perkosaan tersebut apalagi tindak pidana perkosaan yang berada dikawasan kota Padang. Maka judul dari skripsi ini ialah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan dikota Padang dan upaya penanggulannya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : a. apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan dikota Padang ? b. bagaimana upaya penanggulangannya terjadinya tindak pidana perkosaan dikota Padang ? c. apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan dikota padang ?. Dalam skripsi ini penulis memakai metode dengan teori pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah faktor-fakor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan dikota Padang adalah tidak ada dari keluarga, pergaulan bebas, faktor IT (teknologi) dan faktor wanita itu sediri. Upaya penanggulanganya dilakukan secara preventif dan represif. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan dikota Padang adalah susah mencari saksi,kebanyakan korban tidak melaporkan kepolisi tentang tindak pidana perkosaan yang telah dialami oleh si korban, dan tidak adanya bukti dari korban perkosaan tersebut. Saran dari skripsi ini yaitu : 1. sebaiknya kepolisian memberikn sanksi keras terhadap pelaku tindak pidana perkosaan, 2. lebih dikuatkan lagi antara masyarakat dan instansi-instansi terkait seperti BIMAS (Bina Masyarakat) dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan.

345
ATK
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG

Atika Putri, 1410112071, Fak. Hukum Unand, Jumlah Halaman 64, Tahun 2018

ABSTRAK

Dimana pada era globalisasi seperti saat ini telah membawa perubahan terhadap lapisan kehidupan masyarakat sehingga banyaknya terjadi berbagai tindak pidana, terutama tindak pidana penghinaan. Dalam kasus ini tindak pidana penghinaan yang jelas merugikan nama baik seseorang, maka korban dapat melaporkan kepada aparat kepolisian yang mempunyai wewenang untuk mengungkap suatu tindak pidana penghinaan. Dalam penelitian ini dimaksud untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan penyidikan penghinaan, apakah hambatan-hambatan penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana penghinaan. Metode penelitian yang digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan bahan hukum berupa dokumentasi dan kepustakaan dari jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, maupun teori hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Dalam penulisan ini penulis memilih metode penelitian secara pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan melihat dan menganalisa secara kualitatif. Dalam melakukan penelitian, data diperoleh dari interview yang di dapat dari hasil wawancara dengan Penyidik Reskrim Polresta Padang, serta studi kepustakaan dari buku dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penghinaan diawali dengan penyelidikan kemudian dilanjutkan dengan penyidikan dan mencari bukti-bukti di TKP serta saksi yang melihat langsung tindak pidana penghinaan tersebut. Dalam melakukan penyidikan, penyidik mendapatkan beberapa hambatan seperti tidak ditemui saksi, barang bukti tidak jelas, butuh waktu lama. Pentingnya peran penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana agar kasus tersebut cepat diproses dan jelas sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penghinaan.

345
PUT
f

FUNGSI VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI DI POLRESTA PAYAKUMBUH)

Putri Hendini.1410111028.Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK IV (Hukum Pidana. 94 Halaman.Tahun 2018)

ABSTRAK

Maraknya terjadi tindak pidana perkosaan pada masa ini, membuat para penegak hukum harus melakukan pemeriksaan dalam hal ini. Pemeriksaan suatu perkara pidana bertujuan untuk mencapai tujuan hukum. Pada proses pemeriksaan ini dikenal adanya proses penyidikan, penyidikan yang bertujuan untuk mencari bukti pada tindak pidana perkosaan yang terjadi. Terkait dengan bukti tersebut, pada tindak pidana perkosaan dikenal adanya surat Visum et Repertum. Surat ini memberikan keterangan mengenai keadaan fisik korban tindak pidana perkosaan. Namun surat visum et repertum ini bukanlah satu-satunya bukti dalam kasus perkosaan. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian mengenai fungsi visum et repertum pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana perkosaan di Polresta Payakumbuh. Pada penulisan ini terdapat tiga rumusan masalah yang akan dibahas, pertama bagaimana fungsi visum et repertum pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana perkosaan? Dan yang ke dua apa kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana perkosaan? Dan yang ketiga apa upaya penyidik dalam mengungkap tindak pidana perkosaan? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis pendekatan dengan norma hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara semi terstruktur, kemudian dianalisis secara kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa fungsi visum et repertum dalam proses penyidikan tindak pidana perkosaan adalah sebagai alat bukti surat yang harus dicantumkan pada berkas perkara yang akan diserahkan kepada penuntut umum.

342
PUT
p

PENERTIBAN WANITA TUNA SUSILA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT

Putri Kumala Bintang, BP 1410112109, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VII). 2018. 70 Halaman.

ABSTRAK

Dalam mewujudkan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan mewujudkan pembangunan daerah menggunakan cara desentralisasi, yang dilaksanakan melalui asas otonomi daerah dan asas tugas pembantuan, daerah memerlukan Satuan Polisi Pamong Praja. Perangkat ini bertugas membantu pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non yustisial dan juga tindakan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Di Kota Solok, persoalan wanita tuna susila merupakan salah satu permasalahan sosial karena dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat disekitarnya. Permasalahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan penertiban Wanita Tuna Susila oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat?. 2) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penertiban Wanita Tuna Susila oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan bagaimana cara mengatasinya?. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersifat Yuridis Sosiologis kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kewenangan Satpol PP dalam melaksanakan penertiban wanita tuna susila di Kota Solok belum terselenggara dengan baik. Hal ini disebabkan adanya kebocoran informasi razia yang dilakukan oleh oknum Satpol PP, masih kurangnya tingkat kesadaran pemilik usaha Cafe dan Karaoke Keluarga untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kurangnya kualitas sumber daya aparatur Satpol PP, kendaraan operasional yang minim, dana operasional yang belum mencapai standar, serta tindakan kurang tegas pemerintah terhadap Cafe yang tidak memiliki izin. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mencari dan memberi sanksi kepada oknum Satpol PP yang membocorkan informasi razia, memberikan kesadaran kepada pemilik usaha Cafe dan Karaoke Keluarga untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan. Adanya pendidikan terhadap anggota Satpol PP dan Damkar ditujukan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam kegiatan operasional dan meningkatkan tanggung jawab personil Satpol PP. Serta adanya tindakan tegas yang berkelanjutan oleh pemerintah terhadap Cafe dan Karaoke Keluarga yang tidak memiliki izin usaha.

Kata Kunci : Penertiban Wanita Tuna Susila, Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 8 Tahun 2016

345
PUT
d

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG

Putri Mai Syarah, 1110112053, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 72 halaman, 2018

ABSTRAK

Salah satu tindak pidana yang marak dilakukan anak adalah tindak pidana narkotika. Setiap tindak pidana yang sampai di Pengadilan akan diproses dan mendapatkan keputusan. Berat ringannya suatu putusan perkara pidana didasarkan pada fakta yang ditemukan di persidangan dan juga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim. Pertimbangan- pertimbangan hakim yang tidak memiliki aturan baku inilah yang paling sering membuat polemik yang berbeda dari suatu putusan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika? Dan 2) Bagaimana penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika?.Metode penelitian yang digunakan metode pendekatan secara normatif. Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika lebih banyak dipengaruhi oleh rasa kemanusiaan seorang hakim, misalnya perlakuan yang sopan dari Anak di persidangan, kehidupan Anak serta yang paling utama adalah status seorang pelajar seorang anak, apakah masih duduk di bangku sekolah atau sudah tidak bersekolah lagi. Namun pada dasarnya pertimbangan hakim itu ada 2 (dua), Pertimbangan Yuridis (Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Ancaman maksimal hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum). Sementara pertimbangan sosiologisnya adalah (1) Hal yang meringankan (Anak mengaku bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak berlaku sopan di persidangan, Anak masih muda dan diharapkan ke depannya dapat merubah sikap perilakunya dan Anak belum pernah di hukum sementara (2) Hal yang memberatkan (Anak tidak lagi berstatus sebagai Pelajar dan perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika). 2) Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika adalah pilihan terakhir bagi hakim, jika anak tersebut melakukan tindak pidana berat dengan ancaman hukuman diatas 4 (empat) tahun penjara serta Anak tersebut telah berusia di atas 14 (empat) belas tahun.

345
PUT
p

PENERAPAN PERADILAN KONEKSITAS DALAM KASUS TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG

Putri Paradhita Sari, 1410111063, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018, Pembimbing : Efren Nova, S.H., M.H. dan Diana Arma, S.H., M.H.

ABSTRAK

Peradilan Koneksitas sebagaimana menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) KUHAP adalah tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Permasalahan dalam penerapan ketentuan peradilan koneksitas bahwa dalam prakteknya aturan koneksitas sering diabaikan, dimana dalam banyak kasus aparat hukum mengabaikan aturan-aturan KUHAP dalam perkara koneksitas. Dalam salah satu kasus tindak pidana penggelapan investasi para tersangka yang terlibat yaitu seorang anggota TNI bersama seorang warga sipil, yang mana berdasarkan ketetuan KUHAP Pasal 89 ayat (1) termasuk dalam kategori kasus koneksitas, akan tetapi kasus tersebut tidak diperiksa dan diadilli secara koneksitas. Dalam penelitian ini, penulis memilih Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan Pengadilan Militer I-03 Padang sebagai tempat penelitian. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana penerapan peradilan koneksitas dalam praktek penanganan kasus tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, 2). Apakah yang menjadi dasar pertimbangan tidak diterapkannya peradilan koneksitas dalam penanganan kasus tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dengan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan penerapan Peradilan Koneksitas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dalam praktek yang terjadi di lapangan belum pernah diterapkan, disebabkan penyelesaian yang diserahkan langsung pada masing- masing lingkungan peradilan yang berbeda tanpa melalui prosedur beracara koneksitas. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan tidak diterapkannya peradilan koneksitas dikarenakan kompleksitas permasalahan proses prosedur penyelesaian perkara koneksitas yang rumit sehingga dilakukannya mekanisme pemisahan pemeriksaan dan peradilan kepada masing-masing lingkungan peradilan.

Kata Kunci : Peradilan Koneksitas, Tindak Pidana, Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

342
PRA
p

PENERTIBAN PENAMBANG EMAS TANPA IZIN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI SILOKEK KABUPATEN SIJUNJUNG

Pradiutama Juliyansa, 1310111082, Hukum Administrasi Negara (PK VIII), Pembimbing I Syofiarti,SH.,M Hum. Pembimbing II Titin Fatimah,SH.,MH (62 halaman)

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang mempunyai kekayaan alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui Pada Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 bahwa “bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar - besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Masyarakat Sijunjung yang berada di aliran sungai silokek saat sekarang melakukan aktivitas penembangan dengan menggunakan alat berat yang mengakibatkan perusakan lingkungan, pencemaran tanah, pencemaran udara dan pertambangan rakyat tersebut tidak memiliki izin, maka perlu adanya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah daerah melalui penertiban dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Sumatera barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat dan istansi yang terkait lainnya. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Penambang Emas Tanpa Izin di Daerah Aliran Sungai Silokek”, berdasarkan judul diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Tindakan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Penambang Emas Tanpa Izin di Aliran Sungai Silokek ? 2) Apa Kendala - Kendala Pemerintah Daerah dalam Penertiban Penambang Emas tanpa Izin di Aliran Sungai Silokek ? Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang di dasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fakta yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Gubernur Sumater Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :180-149-2017 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegakan Produk Hukum Daerah yang Berkaitan dengan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan tugas melakukan Pengawasan, Penertiban dan mensosialisasikan tentang pemberian izin serta dampak yang timbul dari penambangan terhadap lingkungan hidup. Terdapat juga kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan penertiban tambang emas yaitu kebocoran informasi mengenai akan dilaksanakannya penertiban, sulitnya mencapai lokasi tambang di karenakan struktur jalan yang rusak dan anggaran dana untuk keamanan personi lSatpol PP dalam melakukan penertiban yang dirasa masih kurang.

Kata Kunci : Penertiban, PenambangEmasTanpaInzin

345
QUE
u

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG

Queentana Islami, 1410112157, Fakutas Hukum Universitas Andalas, 2018,

ABSTRAK

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipertegas dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian berbunyi : "Menyatakan suatu tindak pidana perjudian sebagai kejahatan". Dalam Pasal 2 Peratutan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang pelaksanaan Penertiban Perjudian dunyatakan bahwa "Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dengan Peraturan Pemerintah ini".Bedasarkan latarbelakang tersebut, maka perumusan masalah penelitian ini yaitu, 1). Apakah faktor penyebab remaja melakukan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang? 2). Bagaimanakah upaya Kepolisisan dalam penaggulangan tidak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang? Dan 3) Apakah kendala kepolisian dalam penanggulangan tidak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang? Penelitian ini merupakan penelitia yang bersifat deskriptif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, sifat penelitian deskriptif, tekhnik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan: 1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab remaja melakukan tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum kepolisian resor kota padang secara garis besar adalah : faktor internal, yaitu : faktor kepribadian dari remaja tersebut, faktor status dan peranan remaja di masyarakat. Sedangkan faktor eksternal yaitu : faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan tempat tinggal, kurangnya pengawasan dari orang tua dan masyarakat, faktor sosial ekonomi. 2) Upaya kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana perjudian yang di lakukan oleh remaja di wilayah hukum kepolisian resor kota padang adalah upaya preventif dan upaya represif. 3) Kendala kendala yang dihadapi oleh kepolisian resor kota padang dalam penagulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh remaja adalah karena kurangnya jumlah personil kepolisian, kurangnya dan operasional yang menyebabkan kurangnya fasilitas dan sarana prasarana sehingga kegiatan kepolisian tidak berjalan dengan efektif, kemudian kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang seharusnya peduli dan ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terahadap pelaku kejahatan khsusunya terhadap remaja yang melakukan tindak pidana perjudian, selain itu kurangnya pengawasan dari orang tua membuat anak jadi tidak terarah.

341
REZ
p

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN WILAYAH UDARA INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

REZI DIAN HAVISHA, 1310111114, PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM INTERNASIONAL, UNIVERSITAS ANDALAS, 60 HALAMAN

ABSTRAK

Negara memiliki kedaulatan yang penuh dan eksklusif terhadap ruang udara diatas wilayahnya, sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional. Negara yang berdaulat memiliki hak untuk mengatur rute terbang dan wilayah udaranya yang berhubungan erat dengan pertahanan dan keamanan negara, dimana tidak ada pesawat udara asing yang diperbolehkan memasuki wilayah udara suatu negara tanpa memiliki izin. Salah satu bentuk penegakkan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara adalah pencegatan. Pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat udara asing sering terjadi. Permasalahannya adalah 1) Bagaimana hukum internasional dan hukum nasional mengatur pelanggaran wilayah udara? 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara Indonesia?. Pendekatam masalah metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang berdasarkan konvensi-konvensi, peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan 1) Hukum udara internasional mengatur tentang pelanggaran wilayah udara dalam beberapa perjanjian internasional yaitu Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944, Hukum udara nasional mengatur tentang pelanggaran wilayah udara dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2015. 2) Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara Indonesia yaitu pencegatan dan pembayaran denda. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum internasional maupun hukum nasional kurang tegas dalam menentukan sanksi hukum bagi pesawat udara asing yang melanggar. Hal ini dapat menimbulkan masalah yang serius terkait dengan pertahanan dan keamanan negara.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Wilayah Udara, Hukum Internasional, Hukum Nasional

342
RIK
p

PELAYANAN TERHADAP PENGADUAN MASYARAKAT DI KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM SUMBAR SEBAGAI BENTUK PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT (YANKOMAS)

Riki Ilham, BP 1410112021, Hukum Administrasi Negara, Pembimbing Syofiarti, S.H., M.Hum. dan Titin Fatimah, S.H.,M.H.,82 halaman

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun1945 mengatur subtansi HAM dalam bab tersendiri yaitu bab XA dari pasal 28A hingga Pasal 28J meneguhkan komitmen Negara untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakan, dan memajukan HAM di Indonesia. Pasal 28I ayat 4 menyatakan bahwa perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah Negara terutama Pemerintah. Pasal 71 UU No.39 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan Hak Asasi manusia. Salah satu wujud nyata upaya pemerintah dalam pemajuan dan perlindungan HAM adalah dengan adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2015-2019. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) bahwa YANKOMAS adalah pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan permasalahan HAM yang dikomunikasikan maupun tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat selaku sekretariat Panitia RANHAM Provinsi Sumatera Barat memiliki peranan penting dalam Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS), yaitu pelayanan terhadap pengaduan dari masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Yang menjadi persoalan didalam penelitian ini adalah 1)Bagaimana pelaksanaan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat sebagai bentuk pelayanan komunikasi masyarakat (YANKOMAS) di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM SUMBAR? 2) Apa tindak lanjut jika Yankomas tidak dilaksakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat?. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologi, dengan teknik pengumpupulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Yankomas dilakukan melalui tahap Menerima dan menindaklanjuti komunikasi, Menelaah dugaan pelanggaran HAM, dan Melakukan koordinasi dan memberikan surat rekomendasi dan mediasi. Tindak Lanjut Jika Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) Tidak Dilaksakan Oleh Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Barat teguran secara lisan dari atasan yaitu dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dan teguran secara tertulis dari atasan yaitu dari Direktorat Jenderal Ham serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Hak Asasi Manusia, Komunikasi Masyarakat

345
RAF
a

ANALISIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor: 137/Pid.B/2016/PN.PYH)

Rafika Firmanila.1410111026. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV Hukum Pidana. 64 Halaman. Tahun 2018.

ABSTRAK

Pidana mati merupakan ancaman pidana maksimum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Di Sumatera Barat terdapat perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Donny Erianto Pgl. Doni terhadap Revo Mario. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Kelas II Payakumbuh dalam perkara ini menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Donny Erianto Pgl. Doni dalam Putusan Nomor: 137/Pid.B/2016/PN.PYH. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP dalam Putusan Nomor: 137/Pid.B/2016/PN.PYH dan bagaimanakah pembuktian dalam putusan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP dalam Putusan Nomor: 137/Pid.B/2016/PN.PYH. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing terhadap data yang tekah dikumpulkan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP berpijak pada teori absolut yakni untuk memberikan pembalasan yang setimpal kepada pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam pembuktiannya jaksa penuntut umum mengajukan beberapa alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa yang dijadikan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana maksimum berupa pidana mati kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

345
RAG
p

PERAN SATUAN LALU LINTAS (SATLANTAS) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES TANAH DATAR

Ragil Surya Prakasa, 1410112030, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana). Pembimbing : Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H., dan Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H.

ABSTRAK

Salah satu tugas kepolisian melalui unsur satuan lalu lintas (Satlantas) adalah penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari tidak luput dari permasalahan lalu lintas, salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Jalan berlobang, sarana kelengkapan jalan yang masih kurang dan kebiasaan buruk masyarakat pengguna jalan menjadi faktor utama kecelakaan lalu lintas. Dalam kurun waktu tiga tahun terjadi peningkatan dan penurunan jumlah kecelakan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Pada penulisan ini terdapat 3 (tiga) rumusan masalah yang akan dibahas. Pertama, Bagaimana Peran Satlantas Dalam Upaya Penanggulangan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar ?. Kedua, Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Satlantas Dalam Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar ?. Ketiga, Bagaimana Upaya Satlantas Dalam Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Untuk Terlaksananya Peran Satlantas Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan Satlantas Polres Tanah Datar. Dari hasil penelitian penulis dapat simpulkan bahwa Satlantas dalam upaya penanggulangan terhadap kecelakaan lalu lintas di Polres Tanah Datar adalah melalui upaya pre-emtif, upaya preventif, upaya persuasif dan upaya represif. Seperti melakukan penyuluhan tentang keselamatan lalu lintas, memberikan teguran secara lisan maupun tertulis kepada pengguna jalan raya yang tidak tertib dalam berlalu lintas, mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), menolong Korban, mengamankan Barang Bukti terkait kecelakaan lalu lintas dan diproses melalui penyidikan terkait telah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kendala yang dihadapi Satlantas adalah kurangnya jumlah personel Unit Laka Satlantas dan tidak memiliki mobil derek untuk evakuasi kendaraan, jarak TKP yang jauh dari Polres Tanah Datar, kurangnya informasi dari masyarakat terkait terjadinya kecelakaan lalu lintas dan masyarakat enggan menjadi saksi untuk pemerikasaan. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah memberdayakan anggota dari unit dan satuan lain dan berkoordinasi dengan dinas kebersihan atau dinas perhubungan, berkoordinasi dengan Polsek setempat dan pihak Rumah Sakit, memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mendatangi kediaman saksi.

Kata kunci: Penanggulangan, Kecelakaan Lalu Lintas, Satuan Lalu Lintas.

341
RAH
p

PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI AFGHANISTAN (2014) DITINJAU MENURUT HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL

Rahmat Rizki, 1110112061, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah halaman 62 lembar, Tahun 2018

ABSTRAK

Pengungsi merupakan salah satu permasalahan internasional yang sampai saat sekarang ini menjadi kendala, dikarenakan sudah melintasi batas negara dan merupakan tanggung jawab dunia internasional. Pada dasarnya, setiap pengungsi yang mencari suaka ke negara lain berhak mendapatkan perlindungan hukum serta keselamatan dan keamanan dari bahaya yang mengancam dan dijamin oleh negara tujuan. Organisasi internasional yang mengurusi permasalahan pengungsi tersebut adalah UNHCR yang berada dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Permasalahan pengungsi tersebut salah satunya berasal dari negara Afghanistan, dimana penyebab terjadinya pengungsi dikarenakan ada faktor politik, ekonomi, perang saudara dan perang terhadap negara lain. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui peran UNHCR dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi terkhusus pada pengungsi asal Afghanistan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan rumusan masalah 1. Bagaimana peran UNHCR dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi berdasarkan Hukum Pengungsi Internasional, 2. Bagaimana bentuk peran UNHCR dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi Afghanistan tahun 2014 berdasarkan hukum pengungsi internasional. Dari hasil kajian secara komprehensif terhadap objek penelitian penulis menemukan hasil sebagai berikut: Pertama, menurut Konvensi Pengungsi Internasional UNHCR sendiri memiliki tugas dalam mengkoordinasi bantuan, memberikan perlindungan serta mencarikan solusi bagi para pengungsi internasional dibawah mandat PBB sendiri. Kedua, dalam pelaksanaan implementasi dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi, UNHCR pada tahun 2014 mempunyai program penting untuk pengungsi Afghanistan yaitu Strategi Solusi untuk Pengungsi Afghanistan (SSAR), 5 program penting yang dilakukan UNHCR 1. Pemulangan sukarela, 2. Program perlindungan dan pentingnya layanan sosial, 3. Program mata pencaharian dan akses terhadap makanan, 4. Program tempat perlindungan, 5. Program pengembangan kapasitas.

Kata Kunci: Peran UNHCR, Perlindungan Hukum, Hukum Pengungsi Internasional dan Pengungsi Afghanistan.

342
RAH
p

PERUBAHAN DATA KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG

Rahmi Mardiyanis, 1410111144, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017

ABSTRAK

Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. KTP-el adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional. Dalam pelaksanaannya KTP-el memiliki berbagai permasalahan diantaranya terkait dengan kesalahan data yang terdapat pada KTP-el masyarakat, sehingga dengan adanya kesalahan data yang ada pada KTP-el tersebut sehingga pelayanan administrasi masyararakat menjadi terganggu dan imbasnya adalah pada hak-hak yang semestinya ia dapatkan menjadi tidak bisa ia dapatkan dan nikmati. Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan bagaimana perubahan data KTP-el dan kendala-kendalanya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Padang. Penelitian ini bersifat deskriptif dan dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh lansung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dan data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan elemen data Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Melakukan Perubahan Elemen Data Kartu Tanda Penduduk Elektronik, walaupun dalam pelaksanaanya dilakukan penyederhanaan. Penerbitan KTP-el yang baru dapat dilakukan setelah melakukan perbaikan pada elemen data yang mengalami kesalahan. Dalam melakukan perubahan elemen data Kartu Tanda Penduduk Elektronik ini terdapat kendala-kendala yang dihadapi antara lain adalah banyak pemohon yang tidak mempunyai bukti pendukung, ketersedian blangko KTP-elektronik, ketersediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang kurang serta gangguan jaringan atau koneksi .

Kata Kunci: Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Perubahan Data, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

346
RAK
p

PENERAPAN EKOLABEL DALAM PRINSIP ISO 14024 PADA PRODUK KAYU HUTAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Raka Haritsah Darman, 1110113128, Fakultas Hukum Universitas Andalas,85 halaman, Tahun 2018 Pembimbing: Dr. H. Sukanda Husin, S.H., LLM & Dayu Medina, S.H., M.H

ABSTRAK

Dalam dasawarsa terakhir kesadaran masyarakat dunia terhadap masalah lingkungan semakin meningkat. Hal ini disebabkan kondisi lingkungan yang semakin memburuk, seperti berkurangnya areal hutan, sungai dan saluran air yang semakin tercemar, dan kondisi udara yang semakin kotor akibat polusi dari aktivitas industri. Makin sadar akan keadaan tersebut, pada tahun 1992 berlangsung KTT mengenai lingkungan hidup di Rio de Janeiro, Brazilia, yang diberi nama KTT Bumi. Pertemuan ini melahirkan beberapa deklarasi penting, yang intinya menganjurkan agar kebijaksanaan pembangunan tidak melupakan masalah lingkungan. Untuk menghindarkan makin parahnya lingkungan karena aktivitas perekonomian dan demi pembangunan yang berkelanjutan, dunia internasional menyepakati sejumlah label atau “cap” untuk menandai bahwa suatu aktivitas produksi telah memiliki komitmen terhadap lingkungan. Di antara standar-standar lingkungan tersebut adalah yang dikeluarkan oleh ISO (International Standard Organization), berupa ISO 14000, yang terdiri dari beberapa komponen utama seperti ISO 14001 untuk standar EMS (Environmental Management System), ISO 14001 untuk EU (Environmental Auditing), dan ISO 14020 untuk EL (Environmental Labelling). Bagi para pelaku ekonomi Indonesia, paradigma baru di bidang lingkungan hidup itu menjadi semakin penting. Penelitian ini melihat beberapa ketentuan standar internasional yang harus dipenuhi dan kesiapan Indonesia menuju ke arah terpenuhinya standar tersebut.Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah. Bagaimana implementasi ISO 14024 sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup dalam kaedah hukum internasional ? dan bagaimana penerapan pemberian ISO 14024 terhadap produk kayu hutan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia ? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dalam kerangka perjanjian internasional khususnya dalam konteks kedudukannya, tujuan utama dari GATT/WTO adalah perdagangan bebas bukan merupakan badan perlindungan lingkungan dan tidak mempunyai mandat untuk mengatur lingkungan secara utuh. Namun seiring dengan perkembangan yang terjadi saat ini maka pemerintah baik internasional maupun nasional menerapkan ISO 14024 sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup dalam menghadapi hukum internasional. Penerapan ISO 14024 harus dilakukan secara permanen apabila Indonesia ingin tetap melaksanakan hubungan di bidang perdagangan dengan menerapkan ecolabeling. kedua Penerapan standarisasi lingkungan WTO dalam suasana hukum nasional sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU No.7 Tahun 1994 khusunya mengenai TBT yang mengatur mengenai standarisasi di tegaskan bahwa negara anggota dalam hal ini Indonesia diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan Peraturan perudang-undangan nasionalnya di bidang standarisasi.

345
RAN
p

PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTA PADANG PANJANG

Randi Satria Permana, 1410112138, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana), 73 halaman, 2018

ABSTRAK

Dalam proses pertumbuhan anak sering dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat, kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak. Dengan telah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA salah satunya pelaksanaan diversi, Konsep diversi ini sangatlah manusiawi bagi anak, karena anak tidak dibawa ke meja pengadilan ataupun proses pengadilan yang jelas akan dapat mengganggu perkembangan mental dan psikologis anak. Hal ini terlihat dari beberapa kasus yang masuk ke laporan polisi, penanganannya dilakukan secara damai dan secara kekeluargaan (diversi dan restorative justice) maka pandangan dari penyidik terhadap penerapan dan pelaksanaan diversi yang menangani perkara anak yang melakukan tindak pidana adalah hak-hak anak dapat terlindungi, menghindar anak dari label sebagai penjahat, dan anak terhindar dari pidana. Penyelesaian perkara diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polresta Padang Panjang telah dilaksanakan 1 kali pada bulan September 2017.. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas pelaksanaan diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polresta Padang Panjang. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polresta Padang Panjang; 2) Apa kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polresta Padang Panjang; Penelitian ini bersifat Deskriptif, dengan metode penelitian yang yang digunakan Yuridis Empiris atau Yuridis Sosiologis (socio legal research), sedangkan pokok pembahasan menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan prakteknya dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Penyelesaian perkara diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polresta Padang Panjang telah dilaksanakan 1 kali pada bulan September 2017. Hal ini terlihat dari beberapa kasus yang masuk ke laporan polisi, penanganannya dilakukan secara damai dan secara kekeluargaan (diversi dan restorative justice) dan mayoritas gagal..; 2) Kendala-kendala yang sering ditemui oleh penyidik dalam pelaksanaan penyelesaian perkara anak melalui proses diversi adalah tidak adanya kesepakatan antara pihak korban dan pihak tersangka baik sebelum proses diversi maupun setelah pelaksanaan prosesdivers

346
RAN
p

PENGELOLAAN TAMBANG BATU KAPUR BUKIT KARANG PUTIH INDARUNG OLEH PT SEMEN PADANG

Randy Farizki, 1410112068, Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 75 Halaman, 2018, Pembimbing : Syofiarti, S.H.M.Hum dan Darnis, S.H.M.H

ABSTRAK

Dalam pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, salah satu jenis sumber daya alam itu adalah batuan kapur yang digunakan oleh PT Semen Padang sebagai bahan baku pembuatan semen. Didalam pengelolaannya. PT Semen Padang memiliki standar operasi produksi (SOP) yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Semen Padang diantaranyaUndang Undang No 5 Tahun 1960 (UUPA), Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan peraturan terkait lainnya.dengan tujuan tercapainya hasil yang baik, keselamatan pekerja dan kelestarian lingkungan. Kegiatan pertambangan tentu memiliki dampak terhadap lingkungan disekitarnya baik secara fisik maupun secara sosial kemasyarakatan. Untuk itu dalam penulisan ini penulis mengemukaan beberapa rumusan masalah yaitu : 1.)bagaimana pengelolaan tambang batu kapur bukit karang putih Indarung oleh PT Semen Padang 2.)bagaimana dampak lingkungan disekitar lokasi tambang tersebut. Didalam penelitian ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis atau empiris dengan melakukan wawancara, studi dokumen, pengolahan dan pembahasan data,dan analisis secara kualitatif dengan menjabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian yang penulis dapatkan, pengelolaan tambang batu kapur bukit karang putih Indarung oleh PT Semen Padang dilakukan sesuai standar operasional produksi (SOP) yang baik yang terintegrasi dalam Sistem Manajemen Semen Padang (SMSP) yang mengacu kepada peraturan perundang undangan dan kegiatan ini menimbulkan dampak lingkungan baik secara fisik maupun secara sosial kemasyaraktan dan upaya untuk mengatasi dampak tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Pengelolaan, Pertambangan, Batu Kapur

345
RAN
p

PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi di Polres Tanah Datar)

Rangga Radifan Rachmadsyah Putra, BP 1310112125, 71 halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017

ABSTRAK

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, pihak penyidik harus memperhatikan ketentuan ketentuan khusus yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dewasa ini maraknya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya tindak pidana pencabulan. Terdapat perbedaan-perbedaan yang ditemui dalam penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini. Oleh karena itu penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah, yakni : 1) Bagaimana Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Polres Tanah Datar ? 2) Apa Kendala Yang Ditemukan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Tanah Datar ? 3) Apa Upaya Penyidik Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Polres Tanah Datar ? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, penelitian bersifat deskriptif, jenis data berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Sebagai hasil dari penelitian yang penulis lakukan memperlihatkan bahwa : a) selama proses penyidikan, peran penyidik anak berupa melakukan penangkapan dan penahanan anak , apabila waktu penahanan anak telah berakhir penyidik menyerahkan anak beserta barang bukti kepada kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan, terhadap anak yang menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) wajib didampingi oleh pekerja sosial, penasehat hukum, dan Badan Permasyarakatan (BAPAS). b) selama proses penyidikan, penyidik menemui kendala berupa susahnya pihak Polres Tanah Datar menghadirkan anak yang berperkara, anak yang berperkara merasa takut terhadap petugas Polres Tanah Datar, tidak adanya ruang tahanan dan ruang pelayanan khusus anak. c) terhadap kendala-kendala yang dialami oleh pihak Polres Tanah Datar, penyidik melakukan upaya-upaya berupa mendatangi domisili pihak-pihak yang berperkara dengan tidak menggunakan pakaian seragam untuk menghindari ketakutan anak-anak yang berperkara. Pihak Polres Tanah Datar mengupayakan biaya transportasi terhadap anak-anak yang berperkara untuk mendatangi Polres Tanah Datar untuk memberikan keterangan yang bertujuan demi kepentingan penyidikan. Berkordinasi dengan pemerintah daerah menghadirkan psikolog anak untuk membantu penyidikan. Berkordinasi dengan dinas sosial untuk mengatasi kekurangan pekerja sosial yang membantu proses penyidikan. Memisahkan anak dari tahanan orang dewasa dan membangun ruang tahanan khusus anak dan ruang pelayanan khusus anak.

345
RAU
p

PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA: Studi di Pengadilan Negeri Kelas 1.B Pariaman

Raudiya Oktariadi, BP: 1410112165. Program Kekhususan Hukum Pidana, 61 Halaman

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang dapat tumbuh dan berkembang serta memiliki tingkat kecerdasan yang baik sehingga dapat membawa bangsa ini kearah yang lebih maju. Tumbuh dan berkembangnya anak yang baik tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan anak itu sendiri. Terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari kontrol sosial dari orangtua dan lingkungan sekitarnya. Anak tetap harus dilindungi meskipun dia sudah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Yang menjadi permasalahan penulis yaitu: 1)Bagaimanakah dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Kelas 1.B Pariaman dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika? 2)Bagaimana dampak putusan pemidananaan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Kelas 1.B Pariaman terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika? Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, dan dari hasil penelitian menyatakan bahwa hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis pada putusan Nomor: 04/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pmn dan putusan Nomor: 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Pmn. Dalam menangani kasus anak dan dikaitkan dengan perlindungan anak, hakim wajib mendapatkan saran dari pihak lain. Maka ketika hakim menjatuhkan pidana terhadap anak, hakim haruslah memikirkan berbagai pertimbangan agar anak tidak kehilangan masa depan, dan jika dilihat dari putusan hakim dalam menjatuhkan pidana maka pidana penjara merupakan upaya terakhir. Tetapi dalam prakteknya hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berupa hukuman penjara.

342
RAU
d

DILAKUKAN DALAM RANGKA KETERTIBAN UMUM OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG

Raufil Herlambang Rauf, 1210113068, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018, 61 Halaman

ABSTRAK

Menurut Kementeran Sosial masalah sosial yang ada di Indonesia pada umumnya dan kota Padang pada khususnya adalah masalah anak jalanan yang salah satu kegiatannya adalah mengamen. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentram Masyarakat "setiap orang dilarang melakukan kegiatan ngamen di setiap perempatan jalan". Namun, sampai saat ini masalah pengamen di Kota Padang belum teratasi hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pengamen, khususnya di perempatan jalan Kota Padang. Hal ini tentu menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan bagi masyarakat atau pengguna jalan raya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tindakan dan kendala pemerintah Kota Padang dalam menertibkan pengamen di setiap perempatan jalan. Metode penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal approach) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan pada objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Pembinaan pengamen yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang dibantu oleh Satpol PP yang bertugas menempatkan beberapa anggotanya di tempat yang dianggap rawan menjadi tempat berkumpulnya pengamen dan penertiban pengamen yang berada di jalanan untuk dibawa ke kantor Satpol PP dan di data selanjutnya diberikan sanksi indispliner dan Dinas Sosial yang bertugasmelakukan pendataan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, sosialisasi, kampanye, dan penguatan lembaga sosial yang peduli serta melakukan rehabilitasi pada pengamen yang diamankan (2) Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Padang yaitu orang tua dari pengamen yang terkadang kurang mau berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Sosial dan pekerjaan patroli, orang tua pengamen juga keberatan anaknya akan dibawa ke tempat pembinaan padahal tujuan dari Dinas Sosial adalah meringankan beban orang tua pengamen dan razia yang dilakukan sering mendapatkan perlawanan Kata Kunci: penertiban, pengamen, pembinaan dan pengawasan.

345
RED
p

PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM TAHAP ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PARIAMAN (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman)

REDA SEPTA PRATAMA.1410112025.Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK IV (Hukum Pidana.53 Halaman.Tahun 2018.

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi yang penting dalam sistem peradilan pidana, karena keberadaannya menentukan tujuan yang dibangun, dengan proses pembinaan bagi narapidana, supaya narapidana tersebut setelah menjalani pidana dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat luas. Narapidana dalam status hukumnya merupakan seseorang yang bersalah (jahat) atas perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan masa lalu narapidana janganlah menjadikan masyarakat sekitar memberikan cap (stigma) jahat kepada dirinya. Karena itu mereka tidak boleh kehilangan kontak dengan masyarakat agar merasa sama dengan masyarakat dan tidak mengalami keminderan dalam bergaul nantinya selepas menjalani masa pidananya.hal inilah yang disebut sebagai asimilasi atau pembauran narapidana ke dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan tujuan pemidanaan yang sepeti inilah maka negara melalui peraturan perundang-undangan berupaya mengakomodasi upaya pembauran narapidana ke dalam lingkungan masyarakat ini. Beberapa peraturan yang dianggap sangat berpengaruh dalam pembauran narapidana adalah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan alasan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman ? kedua, apa kendala-kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman ? Pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Dengan pendekatan ini nantinya akan dapat dideskripsikan tentang pelaksanaan program asimilasi narapidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diatas. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh beberapa kesimpulan yaitu: pertama Pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman umumnya berbentuk asimilasi kerja dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan tempat pekerjaan yang telah disediakan, narapidana bisa melakukan pekerjaan yang mempunyai penghasilan dan ada juga dari pihak ketiga seperti CV dan PT. Pengajuan asimilasi ini sendiri dirasakan rumit dengan prosedural yang panjang kedua, Banyaknya kendala- kendala yang dihadapi, sehingga menghambat kelancaran program asimilasi. Kendala-kendala ini bisa berasal dari sisi prosedural, faktor lingkungan masyarakat sekitar, minimnya sarana dan prasarana pelatihan kerja.

KUMPULAN ABSTRAK SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2019

342
ABD
P

PEMBUBARAN PENGURUS KOPERASI SAWIT PERKASA TIMUR OLEH KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ROKAN HULU (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR 7/G/2018/PTUN.PBR.)

Abdillah Mabrur, 151111019, Fakultas Hukum, 2019, 80 halaman

ABSTRAK

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu lingkup peradilan yang ada dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dan diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya, yakni berupa sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara tersebut timbul karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan peundang- undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan pengadilan yang amarnya berupa pengabulan gugatan penggugat berakibat pada pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Salah satu contohnya ialah kasus pembubaran pengurus Koperasi Sawit Perkasa Timur oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu melalui penerbitan Surat Keterangan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu No.518/ Diskoptransnaker/ KUKM/429 tanggal 06 November 2017 dalam Putusan Nomor 7/G/2018/PTUN.Pbr. Berdasarkan hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengkaji kasus ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini: (1) Bagaimana pembubaran pengurus Koperasi Sawit Perkasa Timur oleh Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu? dan (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara a quo? Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif, sumber data didapatkan oleh penulis melalui studi kepustakaan dan pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Dari hasil penelitian, terdapat kesimpulan bahwa pembubaran pengurus Koperasi Sawit Perkasa Timur melalui penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kewenangan Diskoptransnaker di bidang koperasi dan prinsip-prinsip koperasi khususnya prinsip kemandirian dan prinsip pengelolaan koperasi secara demokratis. Penerbitan objek sengketa a quo juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak memberikan pertimbangan yang komprehensif bahkan hakim keliru dalam memberikan pertimbangan terhadap perkara a quo.

Kata kunci : pembubaran, pengurus, koperasi

347
ADI
p

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL TERHADAP PEMAIN SEPAKBOLA SEMEN PADANG FOOTBALL CLUB

Adittya Firmansyah, 151011017, Fakultas Hukum, 2019, 84 Halaman

ABSTRAK

Pemain sepakbola profesional merupakan pekerja/buruh dan terhadap mereka berlaku ketentuan UU Ketenagakerjaan baginya. Dalam pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Sepakbola merupakan salah satu olahraga yang banyak menggunakan kontak fisik ditambah kerasnya kompetisi sepakbola di Indonesia sehingga pertandingan yang dilakukan memiliki potensi dan resiko yang cukup besar untuk membuat pemain sepakbola akan mengalami cedera saat bertanding dan bahkan resiko meninggal dunia. Dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa: “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”. Pasal 13 ayat (1) UU SJSN juga menentukan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Pemain sepakbola Semen Padang FC merupakan pekerja/buruh yang bekerja pada PT. Kabau Sirah Semen Padang dan wajib untuk diberikan perlindungan jaminan sosial kepadanya. Namun pada faktanya PT. Kabau Sirah Semen Padang belum memberikan perlindungan jaminan sosial dengan baik sesuai undang-undang yang berlaku. Berdasarkan persoalan yang dimaksud maka permasalahaan pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan jaminan sosial nasional pemain Semen Padang FC oleh PT Kabau Sirah Semen Padang? 2) Apa yang menjadi kendala bagi PT Kabau Sirah Semen Padang dalam pelaksanaan pemenuhan jaminan sosial nasional pemain sepakbola Semen Padang FC dan bagaimana cara mengatasinya? Penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil: 1) Pelaksanaan pemenuhan jaminan sosial nasional terhadap pemain Semen Padang FC belum berjalan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dari 102 orang pemain Semen Padang FC hanya 30 orang pemain yang diikutkan dalam program jaminan sosial. 2) Kendala yang dialami PT. Kabau Sirah Semen Padang adalah masalah keuangan yang terbatas dan perusahaan yang masih menganggap jaminan sosial sebagai biaya tambahan bagi perusahaan. Kemudian kurangnya pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumbar karena terbatasnya jumlah pengawas dan dana operasional. Dari sisi BPJS Ketenagakerjaan, kendala yang dihadapi adalah terbatasnya kegiatan sosialisasi atau edukasi yang diberikan kepada pihak perusahaan.

Kata kunci : perlindungan, jaminan sosial, sepakbola, ketenagakerjaan

341
AZI
p

PENGATURAN PROFESI DOKTER ASING MENURUT MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON MEDICAL PRACTITIONERS DALAM KERANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Aizizia Puteri Imansyah, 1510112135, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 53 Halaman, Tahun 2019, Pembimbing: Dr. Najmi, SH., MH & Magdariza, SH., MH

ABSTRAK

Globalisasi adalah perubahan yang terjadi dari segala aspek yaitu sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Secara garis beras globalisasi diranah hukum internasional terkait juga terhadap perubahan dari aspek ekonomi, khususnya di bidang jasa. Didalam hukum internasional, terdapat hukum yang mengatur tentang jasa, yaitu Mutual Recognition Arrangement. Dalam pengaturan MRAs diatur juga secara khusus mengenai profesi dokter yaitu Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners. Dalam peraturan ini terdapat segala ketentuan yang mengatur bagaimana kedudukan profesi dokter yang akan melakukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contoh kasus yang sudah terjadi yaitu dimana profesi dokter asing dari Negara Singapura yang masuk ke Indonesia dalam rangka membagi ilmu tentang teknologi yang sebelumnya belum pernah digunakan oleh dokter Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi karena sudah sangat dibutuhkan teknologi yang lebih baru yang akan digunakan di Indonesia. Rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana pengaturan dokter asing menurut Mutual Recognition Arrangement On Medical Practitioners dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN? 2. Bagaimana implementasi MRA On Medical ractitioners dalam penggunaan dokter asing di Indonesia? . Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penilitian dan pembahasan yaitu : 1. Pengaturan tenaga medis asing menurut Mutual Recognition Arrangement dalam kerangka Masyarakat Ekonomi Asean yaitu: Ada 10 Pasal yang sudah tertulis dan sudah disetujui oleh 10 Negara Anggota ASEAN. Ke-10 Pasal tersebut dirasakan sudah sangat cukup untuk menghadapi berbagai macam permasalahan yang timbul apabila ada Negara yang tidak tunduk kepada perjanjian yang sudah disepakati. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu seperti yang sudah tertera dalam Pasal pertama yang tertulis dalam Mutual Recognition Arrangement adalah tentang tujuan dari adanya peraturan yang sudah disahkan oleh ke-10 Negara ASEAN. 2. Implementasi MRA On Medical Practitioners dalam penggunaan profesi dokter asing di Indonesia Mendapatkan informasi yang lebih baik terkait masalah kesehatan dan bertukar informasi tentang teknologi, dapat mendorong upaya peningkatan kualitas tenaga medis Indonesia secara terus menerus, dan meningkatkan efisiensi dan daya saing di tingkat Internasional.

Kata kunci: ASEAN, MEA, MRA on Medical Practitioners, Profesi Dokter.

347
ALF
p

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (Prudential Banking) DALAM PERJANJIAN KUPEDES PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. UNIT BUNDO KANDUANG KOTA PADANG

ALFI HIDAYAT, 1520123046, MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS ANDALAS

ABSTRAK

Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Penerapan Prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) pada dasarnya yaitu melaksanakan analisa kredit 5C (character, capital, capacity, collateral, condition of economy) 7C (personality, party, purpose, prospect, payment. Profitability, protection) dan 3R (return, repayment, risk bearing ability). Namun dalam praktek masih ditemukan kredit bermasalah (non performing loan) secara grafik mengalami peningkatan dari tahun 2015-2017 lebih dari 5% (lima persen) sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan bisnis di bidang mikro. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati- hatian (prudential banking) dalam perjanjian kredit KUPEDES BRI Unit Bundo Kanduang dan untuk mengetahui tanggung jawab Bank BRI Unit Bundo Kanduang dengan pihak debitur jika terjadi kredit bermasalah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma- norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dilapangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditemukan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking) di PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Bundo Kanduang Kota Padang belum diterapkan dengan maksimal oleh Petugas Kredit Lini sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Dalam praktek terdapat kelemahan yang dilakukan oleh Petugas Kredit Lini Bank dalam memprakarsa kredit yang tidak sesuai dengan analisa 5C,7P dan 3R, sehingga menimbulkan kredit bermasalah. Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada dasarnya disebabkan oleh ketidakhati-hatian Petugas Kredit Lini dalam melakukan analisa kredit dan disebabkan oleh usaha debitur tidak dikelola dengan baik. Tanggung jawab Bank BRI Unit Bundo Kanduang Kota Padang dalam menangani kredit bermasalah yaitu dengan menerapkan sanksi administrasi kepada Petugas Kredit Lini berupa larangan untuk melakukan proses pemberian kredit dan menurunkan tingkat NPL (non performing loan) debitur kelolaan Petugas yang bersangkutan. Penyelamatan kredit dilakukan melalui restrukturisasi. penyelesaian kredit secara damai dengan menjual agunan dibawah tangan dan penyelesaian melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Kata Kunci : Prinsip Prudential Banking, Kredit Bermasalah,Penyelesaian Kredit.

345
FAD
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN OLEH PENYIDIK POLRESTA PADANG (Studi di Polresta Padang)

Fadila Monika Andini, 1510112097, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program KekhususanHukumPidana(PK IV), 81halaman – Tahun 2019, Pembimbing : Dr. A. IrzalRias, S.H., M.H dan Nelwitis, S.H., M.H

ABSTRAK

Penadahan merupakan suatu tindak pidana yang marak terjadi. Dalam penegakan hukum tindak pidana penadahan ini ini, peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangatlah dibutuhkan, terutama penyidik untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana penadahan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penadahan di Polresta Padang,untuk mengetahui apasajakah kendala yang dihadapi penyidik dan solusinya dalam melaksanakan penyidikan penadahan di Polresta Padang. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort kota Padang.. Metode penelitian yang digunakan penulis antara lain dengan pendekatanyuridis empiris.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan masih belum terlaksana sesuai dengan aturan-aturan mengenai tata cara pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang terdapat dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak .Kendala yang dihadapi penyidik Polsek Padang Barat saat melakukan penyidikan tindak pidana penadahan yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia, Biaya Operasional,Posisi sindikat pencurian dan penadahan semakin luas dan semakin sulit diberantas,dan kurangnya saksi.

345
ANI
p

PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNNP) PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Anishya Yulia Anggraini, 1510111093, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV Hukum Pidana, 53 halaman Tahun 2019

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika yang telah bersifat transnasional yang dilakukan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan masyarakat, bangsa dan Negara. Pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diberi kewenangan khusus untuk memberantas dan mencegah tindak pidana narkotika.Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika maka BNN berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimanakah pelaksanaan koordinasi antara penyidik Badan Narkotika Nasional (BNNP) Provinsi Sumatera Barat dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penydikan tindak pidana narkotika? 2. Apakah kendala dalam melakukan koordinasi penyidik Badan Narkotika Nasional (BNNP) Provinsi Sumatera Barat dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan koordinasi yang terjadi antara penyidik BNNP Sumbar dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar yaitu berupa pengajuan assessment untuk rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika,yang diajukan oleh penyidik Polda Sumbar, dan saling memberitahu secara tertulis bahwa telah dimulainy apenyidikan. Dalam hal melakukan pencegahan narkotika BNNP Sumbar dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar berkoordinasi dilapangan untuk melakukan razia di tempat-tempat tertentu seperti, di tempat karaoke dan tempat-tempat hiburan malam. Adapun kendala dalam melakukan koordinasi antara BNNP Sumbar dengan penyidik Direktorat Reseres Narkoba Polda Sumbar yaitu dalam meminta personil penyidik ke Polda Sumbar, karena harus berdasarkan persetujuan pimpinan Polda Sumbar sehingga personil penyidik yang diminta terkadang mengalami proses yang sulit, karena banyaknya personil penyidik yang sedang bertugas, sehingga dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana narkotika BNNP Sumbar kurang maksimal.

346
ANN
k

KEABSAHAN PENETAPAN HAK TANGGUNGAN MENJADI SITA JAMINAN (STUDI KASUS NO:20/PDT.G/PLW/2010/PN.LP)

Annisa Fakhira Ramadania Sharen, 1410111060, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK 1 (Perdata Murni), 75 halaman, 2019

ABSTRAK

Kegiatan lembaga perbankan yaitu menghimpun dana melalui simpanan dan menyalurkannya kembali melalui kredit, dalam penyalurannya biasanya dibutuhkan suatu jaminan, jaminan yang umum dipakai dalam dunia perbankan yaitu jaminan hak tanggungan, hak tanggungan mempunyai suatu ciri-ciri yaitu memberikan kedudukan yang diutamakan bagi pemegangnya dan tidak dapat diletakkan sita eksekusi diatasnya. Dalam skripsi ini yang menjadi perumusan masalah yang dibahas adalah: (1) Apa yang melatar belakangi terjadinya perkara perdata nomor: 20/PDT.G/PLW/2010/PN.LP tentang Penetapan hak tanggungan menjadi sita jaminan. (2) Bagaimanakah keabsahan penetapan hak tanggungan menjadi sita jaminan dalam perkara no: 20/PDT.G/PLW/2010/PN.LP menurut Undang- Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menganalisis suatu permasalahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan latar belakang terjadinya perkara perdata nomor :20/PDT.G/PLW/2010/PN.LP tentang Penetapan hak tanggungan menjadi sita jaminan serta apakah hak tanggungan yang dijadikan sita jaminan dalam perkara perdata No :20/PDT.G/PLW/2010/PN.LP tersebut sah menurut Undang-Undang yang berlaku. Obyek hak tanggungan yang dijadikan sita jaminan oleh pengadilan Lubuk Pakam karena perkara antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita adalah sah, dikarenakan hak tanggungan yang dimiliki oleh Pelawan melanggar ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan dan dinyatakan cacat hukum. Dalam melakukan setiap perjanjian harus ada itikad baik dari para pihak sehingga tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari.

346
ABD
p

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS DARI HARTA BERSAMA DI KENAGARIAN PANTI SAMPAI KE PENGADILAN NEGERI LUBUK SIKAPING KELAS II KABUPATEN PASAMAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO.02/PDT.G/2005/PN-LBS)

Abdil Razi, 1510111164, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2019, 67 Halaman

ABSTRAK

Pembagian warisan merupakan suatu permasalahan yang rentan terjadinya konflik dalam sebuah keluarga. Sering kali keutuhan keluarga menjadi berantakan, fenomena ini terjadi diberbagai lapisan masyarakat. Perkara perdata No.02/PDT.G/2005/PN-LBS didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping karena penguasaan harta warisan secara sepihak oleh ahli waris. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas bagaimana penyelesaian sengketa harta warisan dari harta bersama dan juga peranan KAN dalam sengketa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif menggunakan data sekunder berupa dokumen serta peraturan terkait dengan warisan dan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian langsung dilapangan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa terjadinya sengketa pembagian harta warisan dari harta bersama adalah karena salah satu ahli waris tidak merasa puas dengan warisan yang didapatnya dan ingin menguasai lebih. Penyelesaian tahap pertama telah dilakukan dengan cara mediasi di KAN dan telah mencapai kesepakatan, namun penggugat tidak menerimanya dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Dari hasil persidangan diperoleh fakta bahwa penggugat bukanlah ahli waris yg sah dan harta warisan yang disengketakan merupakan hak dari tergugat. Pertimbangan hakim terlihat pada proses pembuktian di persidangan, dalam persidangan penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatanya sehingga gugatan penggugat ditolak secara keseluruhan.

Kata Kunci : pembagian harta warisan, peranan KAN, Penyelesaian sengketa di pengadilan negeri.

345
ABD
p

PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES PARIAMAN

Abdul Hafiz Alfani. 1510115001. Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Andalas. 69 Halaman.Tahun 2019

ABSTRAK

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana. Tidak semua perkara anak yang dapat dilakukan diversi. Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) masih terjadi, khususnya untuk wilayah hukum Polres Pariaman dari tahun 2014-2019 terdapat 8 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terhadap kasus tesebut penyidik dari Polres Pariaman ada yang berhasil melakukan diversi pada tahap penyidikan dan ada juga yang tidak berhasil diversi pada tingkat penyidikan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Pariaman? 2) Apakah faktor penyebab berhasil/tidak berhasilnya diversi oleh penyidik terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Pariaman? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melihat norma-norma hukum yang berkaitan dengan penelitian lalu kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi ditempat penulis melakukan penelitian. Sebagai hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa : (1) Polres Pariaman baru melaksanakan diversi pada tindak pidana pencurian, hal yang menjadi penyebab kenapa hanya tindak pidana pencurian yang dilakukan diversi oleh penyidik Polres Pariaman adalah karena ada dilema atau persoalan yang dialami oleh penyidik Polres Pariaman. (2) faktor penyebab berhasil/tidak berhasilnya diversi oleh penyidik adalah pertama; kesepakatan antara kedua belah pihak, pada saat penyidik melakukan upaya diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, terjadi suatu pertemuan antara kedua belah pihak dan pihak lain yang terkait untuk membicarakan secara bersama-sama untuk mencari jalan keluar yang terbaik, terutama untuk anak agar masa depannya dapat terjamin. kedua; penetapan dari pengadilan negeri, apabila diversi telah tercapai di tingkat penyidikan dan hasil kesepakatan telah dikirim oleh penyidik kepada pengadilan negeri namun tidak disetujui oleh pengadilan dengan alasan tertentu, maka hasil kesepakatan diversi batal dan kasus tersebut dilanjutkan ke proses lebih lanjut. ketiga; diskresi kepolisian, diskresi adalah suatu kekuasaan yang dimiliki oleh kepolisian yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan- pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.

346
ADI
p

PENGELOLAAN USAHA AIR MINUM NAGARI DI JORONG TANJUANG BATUANG SEBAGAI ASET NAGARI OLEH PEMERINTAH NAGARI DUO KOTO KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM

Adila Azani, 1510112172, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2018, 83 Halaman

ABSTRAK

Nagari sebagai desa adat diakui eksistensinya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Pasal 18B ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nagari memiliki harta kekayaan yang merupakan aset bagi nagari tersebut dimana pengelolaannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nagari dan meningkatkan pendapatan nagari. Nagari Duo Koto misalnya, salah satu nagari yang terletak di kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, memiliki aset berupa usaha air minum dengan menggunakan dana desa sebagai dana utama dalam pembangunannya. Namun, pengelolaan usaha air minum sebagai aset nagari tersebut belum dipayungi oleh peraturan nagari sebagaimana amanat Pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1) Mengapa pengelolaan usaha air minum di jorong Tanjuang Batuang Nagari Duo Koto belum diatur di dalam peraturan nagari? 2) Apa usaha yang sudah dilakukan pemerintah Nagari Duo Koto dalam mengelola usaha air minum di jorong Tanjuang Batuang Nagari Duo Koto? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil , yakni : 1) Usaha air minum di jorong Tanjuang Batuang belum di atur dalam peraturan nagari karena sumber dana pembangunan usaha air minum tersebut tidak sepenuhnya berasal dari dana desa, ada sumbangsih warga dan pemuda di dalamnya. Sehingga pemerintah nagari Duo Koto kesulitan dalam memberanikan diri mengatur masyarakat. Minimnya ilmu hukum yang dimiliki pemerintah nagari Duo Koto ditambah kurangnya peran pemerintah kabupaten atau provinsi dalam memberikan pelatihan terkait pembuatan peraturan nagari menjadi kendala pemerintah nagari Duo Koto menyelesaikan rancangan peraturan nagari. 2) Adapun usaha yang telah ditempuh pemerintah nagari Duo Koto adalah membuat kebijakan berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat jorong Tanjuang Batuang untuk menjadi pedoman sementara pengelolaan usaha air minum, mengangkat panitia pengurus yang bertugas mengelola usaha air minum tersebut, menjatuhi sanksi berupa pemutusan peyaluran air ke rumah warga yang melanggar ketentuan, dan membuat rancangan peraturan nagari sebagai payung hukum pengelolaan usaha air minum tersebut.

346
AND
p

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG DALAM PENANGGULANGAN ATAS DUGAAN PENCEMARAN AKIBAT TUMPAHAN PALM FATTY ACID DESTILLATE (PFAD) DI PERAIRAN TELUK BAYUR OLEH PT WIRA INNO MAS

Adnan Fawwaz Hadju, 1510112036, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2019, Jumlah Halaman 53 + viii

ABSTRAK

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan pasti memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatif ini dapat dilihat dari pencemaran yang terjadi akibat kegiatan industri yang dilakukan perusahaan. Industri kelapa sawit merupakan suatu usaha yang memiliki potensi besar untuk mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. PT Wira Inno Mas merupakan pabrik yang bergerak di bidang pengolahan sawit dan berada di kawasan Teluk Bayur Kota Padang. Dikarenakan adanya kelalaian dari pihak perusahaan, menyebabkan tangki penyimpanan minyak bocor dan menumpahkan sekitar lima puluh (50) ton PFAD ke perairan Teluk Bayur. Masayarakat yang tinggal di sekitar perairan Teluk Bayuar sangat dirugikan akibat kejadian ini. Sementara itu Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan penanggulangan pencemaran serta pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat berperan penting dalam mengawal peraturan perundang- undangan. Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan dengan mengemukakan permasalahan. Pertama, bagaimanakah penanggulangan pencemaran laut akibat tumpahan PFAD di perairairan Teluk Bayur oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Kedua, apa yang menjadi kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam menanggulangi pencemaran tanah akibat tumpahan PFAD oleh PT Wira Inno Mas dan bagaimana cara mengatasinya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan cara meneliti bahan hukum primer yang kemudian dilihat pelaksanaannya dilapangan. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif analisis serta dengan teknik wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sudah berperan dalam penanggulangan pencemaran akibat tumpahan PFAD di kawasan Teluk Bayur dan cepat tanggap dalam penanggulangannya. Kurangnya aparatur dibidang Penegakan Hukum Lingkungan menjadi kendala teknis bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam penanggulangan atas dugaan pencemaran ini.

Kata Kunci: Penanggulangan Pencemaran, Peran, PFAD

346.01
ADY
p

Pelaksanaan Perjanjian Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Uji Materil Perjanjian Kawin Di Kota Pariaman

Adya Agra, 1410112106, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 63 halaman, 2019

ABSTRAK

Perkawinan menyatukan dua manusia dengan kepribadian yang berbeda, untuk itulah diperlukan suatu dasar agar bilamana terjadi konflik di dalam perkawinan tidak ada pihak yang di rugikan dalam bentuk suatu Perjanjian Kawin. Penelitian dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Uji Materil Perjanjian Kawin di Kota Pariaman" memiliki rumusan masalah Faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang membuat akta perjanjian kawin?, Bagaimanakah pembuatan dan pendaftaran perjanjian kawin sebelum dan sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 di Kota Pariaman? Bagaimanakah pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Uji Materil Perjanjian Kawin di Kota Pariaman?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apa yang menyebabkan seseorang membuat akta perjanjian kawin, untuk mengetahui dan menganalisis pembuatan dan pendaftaran perjanjian kawin sebelum dan sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 di Kota Pariaman serta untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU- XIII/2015 Tentang Uji Materil Perjanjian Kawin di kota Pariaman.Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan dan Field Research atau Studi Lapangan..Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa; a. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Membuat Perjanjian Kawin adalah Menjamin keamanan dan kepentingan usaha/Masing-masing Pihak memiliki Usaha Sendiri. Kedua belah pihak ini mengkhawatirkan akan adanya risiko dari perilaku suami-istri selama perkawinan terhadap harta bersama mereka. Misalnya salah satu dari pihak berselingkuh;Kedua belah pihak tidak ingin adanya konflik di kemudian hari bilamana terjadi perceraian dan salah satu pihak menuntut pembagian harta. Putusan MK 69/2015 ini mengatasi keresahan dari para WNI yang menikah dengan pasangan berbeda kewarganegaraan. Putusan MK 69/2015 memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk dapat membuat suatu perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan atau yang biasa dikenal dengan Postnuptial Agreement, selama pasangan tersebut masih terikat di dalam perkawinan yang sah. Perjanjian Perkawinan ini harus disahkan oleh notaris atau pegawai pencatat pernikahan.dengan demikian Notaris dapat membuatkan Akta Perjanjian Kawin pada saat telah berlangsungnya perkawinan atas keinginan para pihak yang kemudian di daftarkan pada Kantor Pencatat Pernikahan dimana tempat pendaftaran perkawinannya berlangsung.

Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi, Uji Materil

345
ADZ
P

PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Padang)

Adzalia Grimaldi Indra. 1510112202. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV (Hukum Pidana). 75 Halaman. Tahun 2019

ABSTRAK

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 ditentukan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok yakni Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum serta sebagai pengayom masyarakat; memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu tugas Polri yaitu dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Padang. Permasalahan yang terjadi mengenai peran Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polresta Padang adalah pihak kepolisian di Polresta Padang telah melaksanakan fungsi dan tugas Polri sesuai dengan kedudukannya sebagai aparat penegak hukum berdasarkan prosedur yang telah diatur. Namun, kinerja pihak kepolisian di Polresta Padang dalam menjalankan perannya untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurun dapat dilihat dari laporan penyelesaian kasus yang telah dilakukan. Upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polresta Padang diantaranya adalah upaya preventif berupa patroli malam, sosialisasi kepada masyarakat, membentuk polisi masyarakat, memasang beberapa spanduk himbauan agar masyarakat lebih waspada dengan lingkungan sekitar serta upaya represif berupa taktik yang bertujuan untuk mengungkap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan agar dapat diproses sesuai hukum yang ada dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kendala yang dihadapi Polri dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polresta Padang adalah kurangnya sumber daya manusia, Anggaran yang kurang dalam melakukan penindakan kepada tersangka diluar kota atau diluar provinsi, tersangka sulit diketahui, kurangnya alat bukti, kegiatan ronda malam yang kurang aktif, dan kurangnya informasi dari masyarakat, sedangkan cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu dengan menambah jumlah personil penyidik serta meningkatkan kualitas penyidik dalam mengungkap kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi, menambah anggaran dana dalam proses pencarian tersangka yang berada diluar provinsi, mencari dan menerbitkan daftar pencarian orang, mengaktifkan ronda malam, dan melakukan pendekatan secara langsung ke masyarakat.

346
AFD
t

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN SEKUIRITAS DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL DENGAN KESANGGUPAN PENUH

Afdhal Maszilanda , 1210113070, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 Halaman, 2019

ABSTRAK

Penyimpangan dalam bentuk penjaminan yang biasanya disembunyikan ini tentunya secara langsung atau tidak langsung akan sangat merugikan investor. Penyimpangan tersebut dilakukan karena Underwriter sendiri sebernarnya meragukan mutu dari Emiten yang efeknya dipasarkan oleh Underwriter.. Adapun rumusan masalah ialah 1)Bagaimana bentuk tanggung jawab Underwriter terhadap Emiten dalam perjanjian full commitment?,2)Bagaimanakah bentuk penyimpangan yang terjadi dalam perjanjian full commitment?, 3)Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa atas penyimpangan yang terjadi?.Jenis penelitian yang dipakai pada penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi peraturan perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada uraian Tanggung jawab Underwriter dimulai sejak hari pertama ketika emiten berniat menawarkan sahamnya kepada masyarakat atau pembeli. Underwriter akan membantu menyiapkan penawaran umum, menyiapkan pernyataan pendaftaran sampai kepada proses penyampaian kepada Otoritas jasa Keuangan (OJK). Setelah dinyatakan efektif penjamin emisi kemudian melakukan persiapan untuk pemasaran efek. Penjamin emisi juga membentuk prospektus yang dibutuhkan dalam rangka pemasaran efek. Dalam perjanjian penjaminan emisi dengan syarat full commitment Underwriter menjamin bahwa dalam hal efek tidak terserap dan dibeli oleh pemodal atau investor maka Underwriter bertanggung jawab atas sisa efek yang tidak terjual tersebut susai dengan kontrak perjanjian yang telah dibuat. Penjamin emisi efek wajib mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjaminan emisi efek sebagai ana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dan KUH Perdata.Kategori Penyimpangan oleh Underwriter dalam proses penawaran pamar modal antara lain:Penjatahan saham yang dapat berakibat pada benturan kepentingan yaitu perusahaan efek sebagaimana penjamin emisi membeli atau memiliki efek untuk kepentingan rekening perusahaan efek atau untuk kepentingan rekening pihak terafiliasi. Akibat tindakan ini menyebabkan terjadinya kerugian bagi investor yang tidak terafiliasi. Tindakan ini pada dasarnya merupakan tindakan melawan hukum, namun terdapat pengecualian atas tindakan ini misalnya dalam rangka stabilisasi harga. Tindakan manipulasi harga yang dilakukan penjamin emisi dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan KUH Perdata.Penyimpangan bentuk penjaminan emisi oleh Underwriter dan Emiten. Penyimpangan ini terjadi apabila perjanjian yang diinformasikan dalam prospektus dikatakan dilakukan secara full commitment tetapi kenyataannya dilakukan dengan best effort atau pernjanjian lainnya. Tindakan seperti ini tentunya memberikan gambaran yang menyesatkan dan merugikan investor.

342
AFR
k

KEDUDUKAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI KOTA PARIAMAN)

Afriawery Achmad, 1510112010, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 62 halaman, 2019

ABSTRAK

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki pemrintahan terendah serta terdepannya sendiri yaitu Pemerintahan Nagari. Seperti yang telah diketahui masyarakat umum, nagari itu merupakan padanan dari desa. Dari segi pengaturan, tidak ada perbedaan antara Nagari dan Desa. Perbedaannya cuma terletak pada nomenklatur saja. Kendati pun demikian, secara prinsip Nagari dan Desa itu berbeda. Nagari merupakan sistem pemerintahan asli masyarakat hukum adat Minangkabau, sedangkan Desa lebih identik sebagai sistem pemerintahan yang diterapkan di Jawa dan Madura. Salah satu daerah yang menggunakan Pemerintahan Desa di Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Pariaman. Kota Pariaman memiliki Pemerintahan Desa sebanyak 55 Desa. Dalam Penulisan skripsi ini dilakukan penelitian terhadap: Pertama, Bagaimana kedudukan Pemerintahan Desa di Kota Pariaman sebagai bagian dari pemerintahan terendah dan terdepan di daerah tersebut? Kedua, Apa akibat hukum dari penggunaan Pemerintahan Desa di Kota Pariaman? Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan dan wawancara terhadap Kepala Desa Sikabu dan Kasubag Tata Pemerintahan Kota Pariaman. Hasil pembahasan dapat dilihat: Pertama, Kedudukan Pemerintahan Desa di Kota Pariaman sebagai bagian dari pemerintahan terendah dan terdepan di daerah tersebut sudah sangat jelas yang mana terendah menurut struktur pemerintahan dan terdepan menurut kedekatan emosional dengan masyarakat. Dasar hukum terbaru mengenai Pemerintahan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kedua, digunakannya Pemerintahan Desa di Kota Pariaman membawa dampak positif terhadap pembangunan daerah, dengan peran sebagai perpanjang tangan dari pemerintah untuk bisa dapat membangun daerah desa menjadi lebih baik. Serta pengaturan-pengaturan yang ada di Kota Pariaman merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

345
AGE
u

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI

Agel Maulana, 1410112013, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 62 halaman – Tahun 2019, Pembimbing : Dr.A. Irzal Rias SH., M.H dan Nelwitis SH., M.H

ABSTRAK

Perjudian di Indonesia merupakan suatu tindak pidana yang di atur dalam KUHP Pasal 303 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian- kejadian yang tidak dan atau belum pasti hasilnya. Adapun masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi kecanduan yang merupakan dampak dari rasa akan memang dalam permainan berikutnya. Sehingga dapat dikatakan, bahwa pecandu judi nantinya dapat bertindak di kuar batas kewajaran seperti menjual harta benda yang dimiliki guna dijadikan modal pada permainan-permaianan selanjutnya. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan di wilayah hukum kepolisian resor kota Bukittinggi dilakukan dengan cara yakninya, upaya Pre-Emtif, upaya Preventif dan upaya Represif. Upaya Pre-Emtif merupakan suatu upaya yang awalnya dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana termasuk tindak pidana perjudian. Sedangkan upaya Preventif merupakan lanjutan dari upaya Pre-Emtif yang mana dalam upaya ini ditekankan untuk menghilangkan kesempatan dilakukannya kejahatan dengan cara mengerahkan seluruh elemen masyarakat yang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian. Kemudian upaya Represif merupakan tindakan yang dilakukan dengan wujud penegakan hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana guna memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam melakukan upaya-upaya tersebut kepolisian resor kota Bukittinggi mempunyai beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. Salah satu diantaranya ialah sering bocor atau mudah diketahuinya razia yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan kurangnya kesadaran dari masyarakat yang masih menganggap tindak pidana perjudian merupakan hal yang biasa. Maka dari itu dalam penelitian ini diharapkan kedepannya pihak kepolisian resor kota Bukittinggi bisa lebih serius lagi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dan kesadaran yang serius juga diperlukan dari masyarakat setempat guna terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan khususnya kota Bukittinggi.

345
AGU
p

PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI POLRES KEPULAUAN MENTAWAI

Agung Satria Y 1210112020 Hukum Pidana Fakultas Hukum. Universitas Andalas 69 Halaman Tahun 2019

ABSTRAK

Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju dan modern memberikan dampak pada kondisi kehidupan terutama di Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, terkhusus pada anak-anak. Anak sebagai makhluk yang masih lemah memiliki posisi yang rentan dalam perkembangan zaman. Kondisi sikap dan perilaku anakpun banyak berubah, bagi anak yang mendapat lingkungan tempat tinggal dan pergaulan yang buruk maka kebanyakan anak juga ikut terseret arus buruk tersebut sehingga kadang tidak dapat menahan pengaruh buruk yang datang padanya dan pada akhirnya membawa anak untuk memiliki perilaku yang nakal. Kondisi seperti inilah yang mendorong anak melakukan kejahatan. Untuk menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, ada terobosan baru yang diciptakan oleh negara, yakni Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam UU SPPA dikenalnya istilah diversi dan restorative justice. Diversi ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana, sedangkan proses restorative justice adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, orangtua pelaku dan korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Penulis mengangkat topik penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana penerapan pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Kepulauan Mentawai? Dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan diversi pada tahap penyidikan di Polres Kepulauan Mentawai. Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode yuridis-sosiologis, pengumpulan data primer yang dilakukan langsung ke lapangan, dengan melakukan wawancara langsung kepada penyidik Reskrim Unit PPA Polres Kepulauan Mentawai. Data sekunder adalah yang diperoleh dari data kepustakaan. Adapun hasil penelitian sebagai berikut: pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh penyidik Reskrim Unit PPA Polres Kepulauan Mentawai dengan mengundang pihak BAPAS, pelaku beserta orangtua/wali, korban beserta orangtua/wali, dan tokoh masyarakat yang mana kemudian ditentukan hari dan waktunya untuk bersama-sama berkumpul mengupayakan diversi. Kendala yang ditemui penyidik adalah belum tersedianya sarana dan prasarana untuk tempat penahanan anak, dan korban beserta orangtua/walinya kebanyakan tetap ingin melanjtutkan perkara ke proses formal.

342
AHM
i

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG PENGISIAN KOLOM AGAMA BAGI PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN

Ahmat Rudi Hasibuan, 1510111018, Fakultas Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan telah menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Bagi para Aktivis HAM keputusan Mahkamah Konstitusi ini telah memberikan keadilan bagi para Penganut Aliran Kepercayaan, karena selama ini mereka kerap sekali mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat bahkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan. Akan tetapi penolakan datang dari Majelis Ulama Indonesia, yang berpendapat bahwasanya keputusan ini merupakan keputusan yang tergesa-gesa dan tidak menerapakan prinsip kehati-hatian, sehingga agama bisa diposisikan sama dengan Aliran Kepercayaan. Maka dapat dirumuskan dua rumusan masalah yang akan dicari jawabannya yaitu pertama, Bagaimana Keberadaan Para Penganut Aliran Kepercayaan di Indonesia di tinjau dari Persfektif Hak Asasi Manusia, dan kedua, Bagaimana Implikasi Yuridis yang timbul setelah dikeluarkanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif atau kepustakaan, sedangkan segi sifat pemaparannya adalah deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan perundang- undangan (statute approach). Berdasarkan penelitan ini perdebatan mengenai agama bagi Indonesia telah final yaitu dengan disepakatinya Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia. Oleh karena itu sebagai upaya Negara dalam melindungi dan menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negaranya, maka dirumuskan Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan keberadaan pasal tersebut Mahkamah Konstitusi menfasirkan secara tekstual/original intent bahwa kata “agama” dan “kepercayaan” adalah dua hal yang berbeda yang disetarakan. Keberadaan para penganut Aliran Kepercayaan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah diakui keberadaanya dan diberikan Hak-Hak Konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

342
ALD
t

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KESELAMATAN PEKERJA DI PT INCASI RAYA

ALDO WELLY GUNARDI, 1310111058 , Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VII (Hukum Administrasi Negara), jumlah halaman 62, Tahun 2018

ABSTRAK

Dalam berlangsungnya suatu perkerjaan, diperlukan adanya tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja. PT Incasi Raya merupakan perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, meskipun begitu masih terdapat kecelakaan kerja di perusahaan tersebut, kecelakaan kerja yang pernah terjadi pada saat musim panen kelapa sawit tahun 2010 di lokasi perkebunan yang ada di Pesisir Selatan, ada salah seorang pekerja yang tidak menggunakan alat perlindungan dalam melakukan proses memanen, ketika menggunakan gergaji mesin saat memotong buah kelapa sawit, debu yang dikeluarkan saat melakukan proses pengambilan kelapa sawit tersebut, menyebabkan kebutaan yang diderita oleh pekerja tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja di PT. Incasi Raya dan apa akibat hukum jika perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap keselamatan pekerja. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis sosiologis dengan demikian data-data hukum yang diperoleh melalui dua cara yaitu data primer diperoleh langsung di lapangan (field research) dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (library research). Adapun hasil penelitian bahwa dalam menjalankan norma-norma keselamatan kerja PT Incasi Raya terbukti lalai dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaaan alat kelengkapan diri yang digunakan pekerjanya. Pengawas lapangan harus mengawasi setiap pekerja agar menggunakan alat-alat keselamatan kerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur perusahaan dan juga perusahaan harus bertanggung jawab terhadap Standar Operasional Prosedur yang telah dibuat. Akibat hukum terhadap perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam hal manajemen keselamatan dapat berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, pencabutan izin. Namun sejauh ini PT. Incasi Raya tidak pernah mendapatkan sanksi administratif maupun sanksi pidana atas perihal tersebut. Saran kepada PT Incasi Raya agar memperhatikan jumlah pengawas yang ada di kebun karena pengawasan terhadap pekerja masih kurang, dan PT Incasi Raya dapat melakukan pemeriksaan kelayakan alat perlindungan diri yang telah diberikan secara berkala kepada para pekerjanya karena masih banyak kerusakan alat yang perlu perhatian dari perusahaan, serta akibat hukum yang timbul karena perusahaan tidak menjalankan tanggung jawabnya tidak sesuai dengan resiko keselamatan dan kesehatan para pekerja.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Perusahaan, Keselamatan Pekerja

345
ALO
a

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KESEMPATAN PERJUDIAN KEPADA UMUM DI PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR

Aloeng Indra. 1410111086. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV (Hukum Pidana). Halaman 70.Tahun 2019

ABSTRAK

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Perjudian secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana perjudian atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ket entuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi pidana yang di atur dalam Pasal 303 ayat (1) dan Pasal 303 bis ayat (1) KUHP. Adapun rumusan masalah yang penulis teliti ada 2 (dua), (1) bagaimanakah penerapan Pasal perjudian tentang tindak pidana memberikan kesempatan perjudian kepada umum studi kasus di Pengadilan Negeri Batusangkar. (2) bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana memberikan kesempatan perjudian kepada umum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan Undang-Undang (Statuta approach), dimulai analisa terhadap putusan hakim, pasal-pasal yang mengatur permasalahan dikaitkan dengan kasus yang akan diteliti. Teknik pengumpulan datanya dalam penelitian ini adalah metode yuridis Normatif untuk menghimpun data yang relevan terhadap tindak pidana memberikan kesempatan perjudian kepada umum untuk melakukan perjudian. Sifat Penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu untuk menjelaskan bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (law enforcement). Dari hasil penelitian ini penulis mendapat kesimpulan bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus memberikan kesempatan perjudian dalam 3 (tiga) kasus yang penulis teliti vonisnya ringan. Kasus pertama 6 bulan, kasus kedua 4 bulan, dan kasus ketiga 2 bulan. Sedangkan ancaman maksimal Pasal 303 ayat (1) ancaman pidananya 10 tahun dan pidana minimum dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP ancaman pidananya 4 tahun minimal, Jadi telah dilakukan perubahan ancaman pidana oleh Undang-Undang No. 7 tahun 1974. Seharusnya hakim harus melihat dampak dari perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat karena membuka tempat perjudian bagi khalayak umum dan harus di ancam dengan pidana minimum atau maksimal yang diatur dalam KUHP.

343.07
ALV
p

PELAKSANAAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRETASI DALAM PERJANJIAN ANGKUTAN SEMEN CURAH DAN/ATAU KLINKER RELASI INDARUNG – TELUK BAYUR ANTARA PT. SEMEN PADANG DENGAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Alvinda Atma Princessa, 1510112074, Fakultas Hukum, PK II(Hukum Bisnis), 70 halaman, 2019.

ABSTRAK

Menurut TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah bidang ekonomi yan didukung oleh kegiatan perdagangan atau perniagaan. Dalam kegiatan perdagangan atau perniagaan dibutuhkan sarana yang dapat menunjang mobilitas barang ataupun orang yang dikenal dengan sarana pengangkutan. Seperti halnya yang dilakukan PT. Semen Padang untuk menunjang kegiatan produksinya , PT. Semen Padang mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tentang pengangkutan semen curah dan/atau klinker relasi Indarung – Teluk Bayur yang mana PT. KAI bertanggung jawab mengangkut barang milik PT. Semen Padang berupa semen curah dan/atau klinker setiap hari kalender untuk memenuhi target tahunan yang sudah disepakati di dalam perjanjian kerjasama. Atas dasar itu, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian angkutan semen curah dan/atau klinker antara PTSP dengan PT. KAI,apa kendala dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, bagaimana bentuk pelaksanaan ganti rugi akibat wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut masih terjadi wanprestasi berupa keterlambatan dalam memenuhi prestasi dan pelaksanaan prestasi yang tidak sempurna dalam bentuk tidak tercapainya target angkutan tahunan yang sudah disepakati dalam perjanjian kerjasama yang disebabkan oleh adanya kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Kendala-kendala di lapangan berupa internal maupun eksternal seperti rusaknya sarana dan prasarana milik PT. KAI dan gangguan produksi yang dialami PT. Semen Padang. Pelaksanaan gantirugi akibat wanprestasi dalam perjanjian kerjasama ini dilakukan di akhir tahun oleh pihak yang dominan menyebabkan kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian di tahun tersebut, dalam hal ini PT. Semen Padang adalah pihak yang membayar denda ganti rugi kepada PT. Kereta Api Indonesia setiap tahun semenjak perjanjian kerjasama ini dilaksanakan dari tahun 2015.

Kata Kunci : perjanjian, pengangkutan, wanprestasi, ganti rugi.

341
AMI
p

PENGAWASAN TERHADAP PELANGGARAN BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK) OLEH WARGA NEGARA ASING DI KOTA PEKANBARU MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Amillia Rizki Wulandari, 1410111036, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 76 halaman, 2018

ABSTRAK

Pemerintah menerapkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan dengan harapan adanya peningkatan warga negara asing yang berwisata ke Indonesia dan dapat berkontribusi terhadap kenaikan devisa negara. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan ini mempermudah warga negara asing (dari negara tertentu yang ditentukan pemerintah Indonesia) yang akan masuk ke Indonesia karena tidak perlu mengajukan permohonan visa sebelumnya. Namun dalam pelaksanaanya kemudahan masuk tersebut disalahgunakan oleh warga negara asing yang tidak bertanggung jawab dan datang dengan tujuan mencari kerja atau memperbaiki keadaan ekonominya. Salah satu tempat terjadinya pelanggaran ini yaitu di dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru, dan mengantisipasi hal-hal demikian maka perlu dilakukan pengawasan oleh pihak yang berwenang. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan terkait hal tersebut, yaitu: 1. Bagaimana pengawasan terhadap pelanggaran bebas visa kunjungan oleh WNA menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia; 2. Bagaimana penerapan sanksi dan solusi yang dilakukan Pemkot Pekanbaru terhadap pelanggaran bebas visa kunjungan. Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris dengan melakukan wawancara ke Kantor Imigrasi dan meneliti bahan-bahan dari studi kepustakaan. Selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif yaitu dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan pendapat pribadi. Dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa pengaturan mengenai visa dan dokumen lainnya serta hal-hal terkait keimigrasian tidak diatur secara khusus dalam Hukum Internasional namun semuanya diatur dalam Hukum Nasional Indonesia. Termasuk di dalamnya mengatur bagaimana pengawasan terhadap kegiatan selama berada di dalam wilayah Indonesia, keluar-masuk wilayah Indonesia dan pelanggaran yang terjadi. Setelah itu ditemukan bahwa pemberisan sanksi terhadap pelanggar dapat berupa administratif ataupun pidana jika yang pengguna bebas visa kunjungan tersebut melakukan tindak pidana sehingga mendapat sanksi pidana, ditemukan juga berbagai kendala di lapangan dalam usaha melakukan pengawasan serta solusi yang dilakukan.

Kata kunci: Pelanggaran, Bebas Visa Kunjungan, Warga Negara Asing.

346
AMI
p

PENGAKUAN HAK MILIK MASYARAKAT ATAS TANAH PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG BERDASARKAN PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI NAGARI GANTUNG CIRI KABUPATEN SOLOK

Amiratul Ulya, 1510112177, Fakutas Hukum, 2019, 64 halaman

ABSTRAK

Hak milik atas tanah merupakan hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.35/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar ditetapkan sebagai kawasan hutan, tanah 6Ha memiliki Surat Keteranga Nomor : 0130/WU/1979 tanggal 19 Februari 1979 berada pada kawasan hutan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan masalah yaitu, Bagaimana proses penetapan kawasan hutan lindung di Nagari Gantung Ciri, Kabupaten Solok, Bagaimana pengakuan hak milik atas tanah masyarakat pada kawasan hutan lindung berdasarkan penunjukan kawasan hutan di Nagari Gantung Ciri, Kabupaten Solok, serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan lindung di Nagari Gantung Ciri, Kabupaten Solok. Penilian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tanah yang memiliki surat keterangan yang berada dalam kawasan hutan lindung diakui oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoledengan cara studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penetapan kawasan hutan di Nagari Gantung Ciri Kabupaten Solok dilakukan pada tahun 2013 dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 35/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar. Hak milik atas tanah masyarakat tidak diakui meskipun memiliki surat keterangan Nomor : 0130/WU/1979 tanggal 19 Februari 1979. Karena tidak ikut sertanya saksi memperkuat kekuatan hukum atas surat pernyataan tersebut. Peran serta masyarakat dapat dikatakan tidak ada karena kurangnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat.

Kata Kunci : Pengakuan, Hak Milik, Kawasan Hutan

345
AND
d

DISPARITAS PUTUSAN PIDANA PENJARA OLEH HAKIM DALAM KASUS PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL OLEH WARGA SIPIL (Studi di Pengadilan Negeri Painan)

Andina Kinanti, 1510111041, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 81 halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Senjata Api adalah senjata yang dipakai untuk menembakkan peluru dengan menggunakan tekanan atau ledakan yang mendesaknya. Senjata api ilegal adalah senjata yang kepemilikannya tidak sah menurut hukum. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian bersifat deskriptif dan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Painan. Permasalahan yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah a) Jenis pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Painan terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil, b) Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Painan dalam menjatuhkan disparitas putusan pidana penjara terhadap kasus pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil. Hasil penelitian menujukkan bahwa: 1) Jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal pada umumnya pidana penjara. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim hendaknya dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap kepemilikan senjata api ilegal oleh warga sipil hakim mempertimbangkan 2 hal yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti, barang-barang bukti. Pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, dampak penggunaan senjata api berdasarkan jenis senjata api, efek ke masyarakat, serta hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa. Beberapa saran yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu kepada aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku kepemilikan senjata api illegal endaknya mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap kasus kepemilikan senjata api ilegal, sehingga tidak terjadi lagi disparitas putusan pidana penjara oleh hakim. Agar terciptanya putusan yang seadil- adilnya dan masyarakat dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Sehingga dapat tercipta keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Bagi POLRI yang memberikan izin kepemilikan senjata api diharapkan memperketat pengawasan bagi pemilik senjata api yang sudah diberi izin. Diharapkan juga bagi kepolisian setempat melakukan razia terhadap orang yang berburu sehingga dapat mengetahui bahwa senjata api tersebut mempunyai surat izin kepemilikan dan penggunaan atau senjata api tersebut ilegal.

342
AND
m

MEKANISME PENGGANTIAN ANTAR WAKTU TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PERWAKILAN

Andra Yanto, 1510111155, Fakultas Hukum, 70 halaman

ABSTRAK

Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah proses penggantian Anggota DPR yang berhenti antar waktu untuk digantikan oleh calon Pengganti Antar Waktu yang diambil dari Daftar Calon Tetap Anggota DPR dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama. Dasar yuridis pemberhentian anggota DPR diatur dalam Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan instrumen organiknya diatur dalam Pasal 239 sampai dengan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik. Ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut menunjukkan besarnya peran partai politik dalam mekanisme PAW terhadap anggotanya yang menduduki jabatan sebagai anggota parlemen. Partai politik akan mengusulkan pemberhentian terhadap anggotanya yang ada di DPR apabila anggota tersebut diberhentikan dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan. Dalam tulisan ini yang menjadi rumusan masalah adalah 1.Bagaimana mekanisme penggantian antar waktu terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia? 2.Apa konsekuensi atau dampak penggantian antar waktu terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia?. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan undang-undang, konseptual, dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan tentang mekanisme PAW sebagai berikut; pertama partai politik mengusulkan kepada pimpinan DPR, Pimpinan DPR meminta verifikasi kepada KPU, Pimpinan DPR menyampaikan kepada Presiden untuk meresmikan PAW hasil rekomendasi KPU, Presiden membuat Surat Keputusan tentang PAW. PAW tersebut berdampak bagi diri pribadi anggota DPR yang di PAW dari segi kebebasan berpendapat, materiil maupun immateriil serta terhadap moral dan kepercayan padanya. Selain itu juga berdampak terhadap partai politik yang dapat menyebabkan perselisihan/konflik internal partai. Tidak hanya itu PAW juga mereduksi paham kedaulatan rakyat karena yang lebih menonjol terlihat adalah kedaulatan partai politik.

346
AND
p

PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN OLEH MASYARAKAT UNTUK PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Andri Firdaus, 1410112070, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Agraria Dan Sumber Daya Alam (PK VIII), 56 halaman – Tahun 2018, Pembimbing : Dr. Kurnia Warman, SH.,M.Hum dan Lerry Pattra, S.H., M.H

ABSTRAK

Pengawasan merupakan suatu upaya untuk melakukan pemantauan terhadap pembinaan yang telah diberikan serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran sekaligus untuk menghentikan lebih dini adanya pelanggaran agar terhindar akibat yang buruk. Pembukaan lahan adalah kegiatan yang dilakukan dalam usaha tani yang didalamnya terdapat perencanaan tata dan tata letak kegiatannya meliputi pengukuran area, pembangunan infra struktur dan pembersihan lahan sampai lahan siap ditanami. Proses pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Dan/Atau Kerukan Lingkungan Hidup. Namun sayangnya aturan tersebut aturan lainya tidak mengatur terkait izin kepada masyarakat, sehingga demikian terkesan memberikan peluang kepda masyarakat untuk melakukan pelanggaran dalam hal pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat dengan cara membakar. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses pembukaan lahan perkebunan oleh masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. 2) Bagaimana pengawasan Pemerintah terhadap pembukaan lahan perkebunan oleh masyrakat dalam pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Dharamasraya. 3) Bagaimana peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap pembukaan lahan perkebunan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Dari hasil penelitian dilapangan masih ada masyarakat menyalahi aturan yang berlaku, hal ini dikarenakan aturan yang kurang tegas serta elemen-elemen pendukung dalam pengawasan yang kurang. Sehingga efektifitas pengawasan itu kurang, maka dari itu perlunya ditingkatkan kembali segala bentuk kekurangan yang ada tersebut.

341
AND
p

PERANAN NEGARA DALAM PENERAPAN PRINSIP COST INTERNALIZATION DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT) DI BIDANG PENCEMARAN UDARA BERADARKAN DEKLARASI RIO 1992. (STUDI KASUS PABRIK PT. Lembah Karet)

Andri Hidayat, 1510111168, Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 59 halaman

ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan suatu bagian yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Pencemaran Lingkungan sebagaimana yang dimuat dalam Undang-undang No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 14 yaitu Pencemaran lingkungan hidup. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran lingkungan khususnya dalam pencemaran udara lahirlah sebuah peraturan internasional yang dengan yakni Deklarasi Rio pada tahun 1992. Dimana deklarasi ini melahirkan 10 prinsip yang dimana salah satunya adalah prinsip Cost Internalization. Prinsip ini dikenal juga dengan prinsip pencemar membayar yang terdapat dalam pasal 16 Deklarasi Rio.Prinsip ini lahir untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan norma hukum yang berlaku dan menghubungan dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Penelitian dapat disimpulkan Peranan negara dalam penerapan prinsip Cost internalization dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan rumusan masalah 1). Bagaimana peranan negara dalam menerapkan prinsip Cost Internalization dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 2). Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di lingkungan sekitarnya. Berdasrkan penelitian penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa. 1). Pemerintah sudah menerapkan sepenuhnya prinsip Cost internalization kedalam hukum nasional hal ini dapat dilihat dalam undang-undang No 32 tahun 2009 dimana pasal 43 yang mengatur tentang instrumen ekonomi Lingkungan Hidup. 2). Perusahan dalam hal ini PT. Lembah karet telah menerapkan sesuai dengan peraturan internasional dan hukum positif yang berlaku.

342
ANG
p

PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN GURU HONORER DI SEKOLAH DASAR NEGERI 27 KENAGARIAN SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK

Anggun Febriyanti, BP 1410111014, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 halaman, 2018

ABSTRAK

Salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Untuk mencapai kesejahteraan diperlukan peranan pemerintah, karena pemerintah sebagai unsur administrasi Negara harus memperhatikan kepentingan warga agar kesejahteraan tercapai. Salah satu bentuknya membuka lapangan pekerjaan. Pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi WNI. Wewenang pemerintah tersebut adalah penyelenggaraan pembangunan di segala aspek termasuk di dalamnya adalah Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer dan pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada Pegawai Honorer berdasarkan beban kerja dan tanggung jabatan dan resiko pekerjaan. Penulis merumuskan 2 masalah (1) Bagaimana Pemberian Gaji dan Tunjagan Guru Honorer Pada Sekolah Dasar Negeri 27 Kenagarian Sungai Nanam (2) Apa Kendala dalam Pemberian Gaji dan Tunjangan di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 27 Kengarian Sungai Nanam. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris dengan demikian data-data hukum yang diperoleh melalui dua cara yaitu data primer diperoleh langsung di lapangan dan data sekunder melalui data sekunder melalui penelitian kepustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Penggajian Guru Honorer di Sekolah Dasar Negeri 27 Kenagarian Sungai Nanam besar gajinya berdasarkan dari Dana Bos, dana bos diberikan untuk Sekolah berdasarkan banyaknya murid disekolah, dari dana yang tersedia 15% untuk Guru Honorer. (2) Kendala Guru Honorer di Sekolah Dasar Negeri 27 Kenagarian Sungai Nanam tidak menerima gaji sekali sebulan melainkan menerima gaji sekali tiga bulan denga jumlah yang tidak sesuai dengan pangkat, beban kerja dan tanggung jawab kerja dan resiko pekerjaan. Selain itu guru honorer tidak pernah mendapatkan tunjangan seperti yang tercantum di dalam UU ASN ad anya Gaji dan Tunjangan.

Kata kunci : Pemberian Gaji dan Tunjangan Guru Honorer di Sekolah Dasar Negeri 27 Kenagarian Sungai Nanam

346.01
ANI
p

PELAKSANAAN PERKAWINAN AMPANG PARIK DI NAGARI INDUDUR KECAMATAN IX KOTO SUNGAILASI KABUPATEN SOLOK BERDASARKAN PERATURAN NAGARI NOMOR 4 TAHUN 2007 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Anisha, 1510111108, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 65 halaman, 2019

ABSTRAK

Perkawinan Ampang Parik merupakan sebuah perkawinan yang mana orang luar yang ingin menikahi masyarakat asli suatu daerah harus membayar sejumlah uang. Sistem perkawinan adat secara umum di Minangkabau tidak dikenal model Perkawinan Ampang Parik, hanya ada di Nagari Indudur Kecamatan IX Koto Sungailasi Kabupaten Solok. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana sejarah terjadinya perkawinan Ampang Parik di Nagari Indudur IX Koto Sungailasi Kabupaten Solok? 2) Bagaimana sanksi adat terhadap orang yang melanggar ketentuan dalam perkawinan ampang parik? 3) Bagaimana pelaksanaan perkawinan Ampang Parik di Nagari Indudur IX Koto Sungailasi Kabupaten Solok jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, sifat penelitian deskriptif, teknik penggumpulan data dilakukan dengan study dokumen, pengamatan, wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni: 1) Sejarah terjadinya perkawinan ampang parik ini dikarenakan semakin berkurangnya jumlah penduduk Nagari Indudur sehingga perkawinan ampang parik merupakan suatu usaha yang dilakukan pemerintahan Nagari Indudur untuk melindungi masyarakat nagarinya agar tetap berada di Nagari Indudur dan tidak meninggalkan Nagari Indudur. 2) Sanksi bagi yang tidak membayarkan uang Ampang Parik ataupun tidak mencukupi syarat maka akan di berlakukan pasal 4 yaitu, dikenakan denda adat yang berlaku salingka nagari Indudur. 3) Pelaksanaan perkawinan ampang parik masih dilangsungkan dengan sangat baik dan masih dijalankan oleh masyarakat Nagari Indudur sampai saat sekarang ini.

347.05
ANN
p

PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR PABRIK KELAPA SAWIT PADA PT. RIMBO PANJANG SUMBER MAKMUR OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Annisa Septia Ayunda, Nomor Buku Pokok: 1510111063, Fakultas Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Dinas Lingkungan Hidup adalah dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Ditingkat daerah yaitu di Kabupaten Pasaman Barat, lembaga yang mengurus dan mengawasi masalah lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat. Mengenai kewenangan Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, dalam Pasal 5 huruf q menyebutkan bahwa : "Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi mengkaji dan menyiapkan serta penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi dan pembuangan air limbah ke air/sumber air." Dapat dilihat bahwa salah satu tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah mengawasi pembuangan air limbah ke air/sungai air. Dengan kata lain setiap pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Pasaman Barat harus melakukan pengelolaan air limbah sehingga tetap berada dibawah baku muku yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, sehingga limbah cair yang dihasilkan pabrik kelapa sawit tersebut dapat dibuang ke sumber air atau sungai tanpa mencemari sungai yang masih digunakan oleh masyarakat sekitar dalam kegiatan sehari-hari. Maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup harus mengawasi pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit salah satunya adalah PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur. Maka berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit pada PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur di Kabupaten Pasaman Barat? 2) Bagaimana pengawasan oleh Dinas Li gkungan Hidup terhadap pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit pada PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur di Kabupaten Pasaman Barat? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta staff PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Kata Kunci: Pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup, Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit

347.014
ANN
f

FUNGSI BADAN PENGAWAS KEJAKSAAN DALAM MENGAWASI SISTEM PENGAWASAN DIKEJAKSAAN BERDASARKAN PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-015/A/JA/07/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-O22/A/JA/03/2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Annisa Sry Devi BD, 1510111081, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 60 halaman, 2019

ABSTRAK

Dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berkedudukan, bertugas, berfungsi, serta berwenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan telah memperoleh kekuaan hukum tetap, dan wewenang lain. Walaupun pada kenyataannya kejaksaan tidak pernah disebut dalam Undang Undang Dasar 1945, namun pada hakekatnya pengertian kejaksaan dan jaksa agung sebenarnya telah termasuk dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman Pasal 24 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang- undang”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana fungsi Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam mengawasi kinerja Kejaksaan? 2. Apa kendala yang dihadapi oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan selama melakukan pengawasan?. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan jenis pendekatan undang-undang, historis, dan konseptual. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: dalam mekanisme pengawasan di Kejaksaan dilakukan melalui pengawasan melekat oleh pimpinan satuan kerja terhadap bawahannya dan pengawasan fungsional melalui pemeriksaan surat-surat serta inspeksi langsung ke berbagai unit Kejaksaan di tingkat pusat dan daerah. Banyak pelanggaran yang terjadi dikarenakan adanya rasa keengganan diantara para pegawai untuk melaporkan adanya penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh sesama pegawai, serta adanya dukungan kelompok atau dukungan di lingkungan kerja untuk melakukan pelanggaran, diiringi dengan faktor sanksi yang ringan karena masih adanya toleransi dalam pemberian sanksi.

344.09
APE
p

PELAKSANAAN GADAI TANAH DARI HARTA PUSAKO TINGGI DI NAGARI SUNGAI NANAM KABUPATEN SOLOK

Apelia Shinta, 1510112035, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK III (Perdata Adat dan Islam), 65 halaman, 2019

ABSTRAK

Gadai terhadap tanah dari harta pusako tinggi di Minangkabau disebut juga dengan istilah pagang-gadai, yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat mendesak yaitu untuk keperluan sebagai berikut: mayik tabujua diateh rumah(mayat terbujur diatas rumah), gadih gadang alun balaki (gadis dewasa belum menikah), rumah gadang katirisan (rumah gadang rusak berat), mambangkik batang tarandam (membangkit batang tarandam). Pagang-gadai yang ada di Minangkabau khususnya di Nagari Sungai Nanam adalah kegiatan sosial untuk saling tolong-menolong antara masyarakatnya. Gadai akan ditebus meskipun tidak terikat jangka waktu untuk menebusnya. Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 menegaskan tanah gadai yang sudah berumur 7 tahun atau lebih harus dikembalikan kepada pihak pemberi gadai tanpa ada uang tebusan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah latar belakang masyarakat Nagari Sungai Nanam melaksanakan gadai tanah dari harta pusako tinggi, bagaimana pelaksanaan gadai tanah dari harta pusako tinggi di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok, Bagaimanakah berakhirnya proses gadai tanah dari harta pusako tinggi di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek di lapangan dan dikaitkan pada aspek hukum yang berlaku tentang pelaksanaan gadai dalam masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok setelah berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 dalam praktek. Dari hasil penelitian latar belakang masyarakat melaksanakan gadai adalah 1) menikahkan anak perempuan yang sudah berumur, 2) biaya pengobatan saudara yang sedang sakit. Dari hasil penelitian masyarakat Nagari Sungai Nanam melaksanakan gadai tanah harta pusaka tinggi berdasarkan hukum adat setempat, yaitu dengan cara: 1) pihak penggadaikan menyamapaikan keinginan untuk menggadai harta pusaka tinggi kepada kaumnya, 2) mencari pihak yang akan menerima gadai, 3) menetukan besar jumlah uang gadai, 4) membuat surat perjanjian gadai, 5) pihak penerima gadai memberikan uang pinjaman kepada pemberi gadai. Dalam pelaksanaan gadai umumnya tidak disebutkan jangka waktu batas gadai. Pelaksanaan pengembalian tanah gadai adalah sesuai dengan yang diperjanjikan di awal yaitu tanah akan dikembalikan apabila si pemberi gadai sudah membayar uang pinjaman dari pihak penerima gadai. Dalam pelaksanaan gadai tanah harta pusako tinggi di Nagari Sungai Nanam Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 tidak efektif karena: 1) masyarakat masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat, 2) kurangnya sosialisasi penyuluhan hukum tentang Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 dari pemerintah kepada masyarakat Nagari Sungai Nanam.

Kata Kunci : Pagang Gadai, Harta Pusaka Tinggi, Prp No. 56/Prp/1960

344.09
APR
p

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGELOLA DENGAN PENGEMUDI GO-JEK DI KOTA PADANG DITINJAU DARI SUDUT PANDANG SISTEM BAGI HASIL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Apryandra Nesrian, 1210113009, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 Halaman

ABSTRAK

Semakin berkembangnya teknologi maka semakin banyak pula kreatifitas yang menghasilkan inovasi-inovasi terbaru. Salah satunya dalam bidang transportasi, dari transportasi yang biasa kita jumpai sampai transportasi online seperti yang pesat saat sekarang. Salah satu perusahaan yang mengoperasikan transportasi online yaitu PT Go-Jek Indonesia. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah, bagaimana sistem perjanjian kerjasama antara pengelola dengan driver Go-Jek yang diterapkan oleh PT Go-Jek Indonesia Cabang Padang dan, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara pengelola dengan driver Go-Jek yang diterapkan oleh PT Go-Jek Indonesia Cabang Padang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian yang diperoleh dari (1) sistem perjanjian kerjasama antara pengelola dengan driver Go-Jek yang diterapkan oleh PT Go-Jek Indonesia Cabang Padang, (2) pandangan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara pengelola dengan driver Go-Jek yang diterapkan oleh PT Go-Jek Indonesia Cabang Padang adalah (1) bahwa kontrak kerja yang diterapkan oleh PT Go-Jek Indonesia telah sesuai dengan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan kontrak yang digunakan perusahaan Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek juga telah sesuai dengan Pasal 1320, 1338, dan 1339 KUHPerdata terkandung asas kebebasan berkontrak, (2) bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan PT Go-Jek Indonesia juga telah sesuai dengan landasan filosofi sistem bagi hasil Islami. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu telah sesuainya perjanjian kerjasama yang ada dengan UU tentang Ketenagakerjaan dan KUHPerdata, serta sistem bagi hasil menurut hukum Islam menggunakan akad musyarakah al-i'nan, namun terdapat riba dalam penggunaan Go-Pay karena adanya diskon.

345
ARI
p

PENERAPAN PIDANA ADAT (TULOU) DALAM KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI SIKAKAP KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Arief Tharifi, 1510112050, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 81 halaman

ABSTRAK

Mentawai adalah sebuah kabupaten yang berbentuk kepulauan dan temasuk kedalam Propinsi Sumatera Barat, Mentawai memiliki keunikan dalam aturan hukum adat yang bernama Tulou sebagai denda adat yang diterapkan pada setiap pelanggaran aturan adat, bahkan juga diterapkan dalam perbuatan yang dianggap sebagai suatu perbuatan pidana dalam hukum positif Indonesia. Dalam dua tahun terakhir sangat banyak terjadi angka pelecehan seksual yang terjadi di wilayah Sikakap Mentawai, dimana masyarakat adat di wilayah tersebut menerapkan Tulou dalam penyelesaiannya Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (a) Bagaimanakah kedudukan hukum pidana adat Tulou pada kasus pelecehan seksual dalam masyarakat adat Sikakap Mentawai dan (b) Bagaimanakah penerapan hukum pidana adat Tulou pada kasus pelecehan seksual dalam masyarakat adat Sikakap Mentawai. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah didapati bahwa pidana adat Tulou masih digunakan oleh masyarakat Adat di Sikakap Mentawai. Tulou adalah sarana untuk membayar kesalahan dan memulihkan keadaan seperti semula atau lebih baik lagi setelah terjadinya pelanggaran yang membuat rusaknya hubungan harmonis dalam masyarakat ataupun alam dan lingkungan sekitar masyarakat Mentawai. Penerapan Tulou ditentukan oleh Penatua masing masing suku atau Uma sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Dalam kasus pelecehan seksual, masyarakat Sikakap Mentawai masih menggunakan Tulou dalam penyelesaian masalahnya, tetapi ada beberapa kekurangan dan hambatan dalam penerapan ini, baik dalam segi penerapan yang sudah tidak murni seperti ketentuan adat atau terkadang dalam penerapannya juga memiliki keterbenturan dengan pihak kepolisian yang menangani kasus yang sama sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

345
ARZ
p

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA MOTOR (Studi di Satlantas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota)

ARZEN APRILLIA.1310111266.Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK IV (Hukum Pidana). 60 Halaman. Tahun 2019

ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman menyebabkan kebutuhan akan kendaraan bermotor semakin meningkat sehingga juga menyebabkan peningkatan terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan terutama sepeda motor. Sehingga perlunya peran Kepolisian dalam melakukan penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut. Permasalahan dalam skripsi ini adalah, 1) Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor? 2) Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor?. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian dilakukan dengan pendekatan masalah yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data yang didapat langsung di lapangan dari hasil penelitian dan data yang diperoleh dari informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan penulis di Polres Kabupaten Lima Puluh Kota diperoleh data bahwa dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebagai pengendara sepeda motor, Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menjalankan peran dan tugasnya melakukan upaya penanggulangan dengan tindakan berupa; 1) Tindakan Preventif berupa himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua agar terus mengawasi anak-anaknya agar tidak mengendarai kendaraan bermotor, melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, serta memberikan nasehat dan teguran. 2) Tindakan Represif dilakukan dengan melakukan pemberian peringatan langsung terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, selanjutnya dilakukan penilangan. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak yang mengendarai kendaran bermotor berupa kurangnya kesadaran hukum dari anak itu sendiri, kurangnya pantauan dari orang tua dan kurangnya personil.

344.03
ASR
p

PERLINDUNGAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PROGRAM PT.TASPEN (Persero) Kota Padang

Asri Rahmi, 1510111123, Fakultas Hukum Universitas Andalas,Tahun 2019, 111 Halaman

ABSTRAK

Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 menjamin setiap orang memperoleh jaminan sosial, tidak terkecuali PNS sebagai unsur ASN yang memperoleh JKK sebagai salah satu haknya. Hak ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 92 ayat (1) UU ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. JKK khususnya bagi PNS di Indonesia pengelolaanya dilaksanakan oleh PT.TASPEN (Persero). Namun, faktanya masih banyak PNS yang tidak mengetahui adanya program JKK yang dikelola oleh PT.TASPEN (Persero) tersebut. Berdasarkan uraian latarbelakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1)Bagaimanakah perlindungan kecelakaan kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Program PT.TASPEN (Persero) Kota Padang? 2)Bagaimanakah hambatan dalam memberikan perlindungan kecelakaan kerja bagi PNS berdasarkan program PT.Taspen?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, sifat penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil , yakni : 1) JKK sebagai salah satu hak PNS diberikan PT.Taspen Padang kepada PNS yang mengalami kecelakaan kerja apabila PNS atau ahli waris dari peserta, atau Rumah Sakit yang telah melakukan kerja sama dengan PT.Taspen mengajukan klaim kepada PT.Taspen Padang baik melalui Call Center, telepon ke Kantor Cabang, maupun datang langsung ke Kantor Cabang. PNS yang bersangkutan akan dimintai berkas sebagai persyaratan administrasi oleh PT.Taspen Padang untuk kelengkapan data. Setelah ditinjau oleh PT.Taspen Padang dan kecelakaan tersebut benar merupakan kecelakaan kerja berdasarkan Pasal 8 JKK dan JKM dan Huruf G angka 1 SE JKK dan JKM, maka manfaat JKK akan diberikan dalam bentuk pembiayaan perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. 2) Adapun hambatan yang dialami PT.Taspen (Persero) dalam menjalankan program JKK disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal berupa kurangnya sosialisasi dari PT.Taspen (Persero) Cabang Padang, regulasi yang kurang sempurna yaitu Surat Edaran PT.Taspen tersebut belum mencukupi kebutuhan akan keadaan saat ini,perlu adanya revisi mengenai keadaan-keadaan tertentu sehingga memberikan kepastian hukum, kurangnya karyawan di PT.TASPEN (Persero) Cabang Padang, dan kurang kerjasama dengan pihak Rumah Sakit. Dan faktor eksternal yaitu lambatnya pengajuan klaim oleh PNS yang mengalami kecelakaan kerja.

Kata kunci : Perlindungan, Kecelakaan Kerja, PNS, PT.Taspen

341
AUL
p

PERANAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MELINDUNGI PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Aulia Hary Putra, 1310112105, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VI (Hukum Internasional), 58 halaman, 2018

ABSTRAK

Status keberadaan dan perlindungan terhadap pengungsi keratkaitannya dengan HAM, karena setiap orang yang telah memilih jalan untuk menjadi seorang pencari suaka bahkan menjadi pengungsi adalah mereka-mereka yang dengan jelas-jelas tidak mendapatkan perlindungan yang layak dalam persoalan HAM di negara asalnya. Seperti pengungsi Rohingya yang dating ke Indonesia untuk mencari suaka ini terdampar di beberapa wilayah di Indonesia seperti Aceh, Medan, Kepulauan Riau, hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Kondisi yang sangat memprihatinkan karena kelaparan membuat mereka dengan terpaksa menyerahkan diri ke pihak keamanan dan imigrasi Indonesia yang diharapkan dapat memberikan makan dan minum yang layak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas peranan pemerintah Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya di Aceh. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan perlindungan terhadap pengungsi di Indonesia menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional; 2) Bagaimana peranan pemerintah Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya di Aceh; Penelitian ini bersifat Kualitatif, dengan pendekatan masalah yang bersifat normatif didukung oleh penelitian empiris, sedangkan pokok pembahasan menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan prakteknya dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Menurut Hukum Internasional Pemberian status pengungsi berimplikasi pada harus dilakukannya prinsip-prinsip perlindungan terhadap pengungsi yang telah diatur di dalam Konvensi Jenewa mengenai Status Pengungsi tahun 1951. Konvensi tersebut mengatur prinsip dasar yang harus diterapkan di dalam penanganan pengungsi, sedangkan menurut hukum nasional Indonesia belum ada instrumen hukum yang komprehensif dalam menghadapi masalah ini, namun Indonesia memandang dan menyikapi persoalan ini sebagai persoalan HAM yang bersifat universal.; 2) Indonesia belum memiliki regulasi hukum yang jelas dalam menangani masalah pengungsi lintas batas negara. Di sisi lain, sampai saat ini Indonesia juga bukan merupakan negara yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1951 dan protokolnya tahun 1967 tentang pengungsi. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia tidak mempunyai kewajiban dan kewenangan dalam melakukan tindakan internasional mengenai pengungsi ini secara lebih lanjut. Indonesia hanya dapat menampung dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan sambil menunggu tindak lanjut dan proses dari pihak UNHCR.

344.09
AZI
p

PENGELOLAAN ZAKAT OLEH LAZNAS GLOBAL ZAKAT YAYASAN AKSI CEPAT TANGGAP (ACT) CABANG SUMATERA BARAT SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Azimatul Aini, 1510112001, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK III (Perdata Adat Dan Islam), 85 halaman, 2019.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari peran zakat yang sangat besar dalam Islam untuk memajukan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Zakat merupakan institusi resmi syariat Islam untuk menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi yang berkeadilan, sehingga pembangunan ekonomi mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Di Indonesia dikenal dua bentuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional) yang dibentuk oleh non pemerintah. Salah satu fungsi LAZNAS adalah untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Salah satu amil yang dikenal adalah Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang kemudian dengan perkembangannya membentuk LAZNAS Globla Zakat ACT sebagai pengelola zakat dengan mendistribusikan zakat di lingkup nasional dan internasional, kemudian timbul pertanyaan apakah pengelolaan zakat yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan UU Pengelolaan Zakat karena zakat perlu dikelola secara kolektif agar manfaat dari pendayagunaan zakat dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji teori-teori atau aturan-aturan hukum Islam dan kemudian di selaraskan dengan hukum positif yang relevan untuk digunakan dan melihat secara langsung tingkat efektifitas penerapan hukum yang ada. Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan, kemudian dibandingkan dengan penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh dari responden di lapangan yaitu dari staf ACT Sumbar, data sekunder diperoleh dari penelitan kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan wawancara, dan hasil penelitian menjelaskan bahwa ACT Sumbar sebagai perpanjangan tangan LAZNAS Global Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang mengelola dana zakat kemudian dikelola secara mandiri. Pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat akan disalurkan dalam bentuk program insidentil dan program reguler yang telah dibentuk oleh tim program ACT Sumbar. Saat ini telah terlaksana program insidentil di Sumbar berupa bantuan kebencanaan di Pasaman, Solok dan Pesisir. Program reguler berupa bantuan beasiswa dan paket pangan di Kecamatan Sikakap, Kabupaten Mentawai, Layanan Pendampingan Ekonomi kepada Bu Resi, pelayanan kesehatan secara berkala serta pendampingan gizi buruk di Padang. Dalam melaksanakan pengelolaan dan pendistribusian zakat, ACT Sumbar (LAZNAS Global Zakat Sumbar) menemukan kendala secara internal berupa belum adanya kantor LAZNAS Global Zakat Sumbar yang terpisah secara mandiri dan minimnya SDM. Kendala eksternal berupa muzaki lebih memilih menyalurkan zakatnya sendiri.

344.09
BAL
k

KEKUATAN HUKUM RANJI SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH SUATU SUKU DI KECAMATAN LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG SUMATERA BARAT

Balkis Belina Putri, 1510111127, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK 3 (Perdata Adat Islam), 62 halaman, 2018

ABSTRAK

Tanah adalah suatu hal yang memiliki peranan sangat penting bagi kehidupan manusia sepanjang masa, maka tanah sebagai warisan leluhur nenek moyang selalu dijaga keabadiannya. Ketentuan penguasaan tentang hukum pertanahan telah ada sejak dahulu, hukum adat telah menggariskannya sesuai dengan hukum adat daerah masing-masing . Permasalahan tentang tanah adalah masalah yang sangat sensitif bagi masyarakat minangkabau khususnya, karena tanah di minangkabau merupakan salah satu unsur dalam organisasi matrilineal. Penguasaan tanah dan kepemilikan tanah yang ada di berbagai persekutuan hukum atau masyarakat hukum adat yang ada di negara Indonesia menjadi hal yang harus dijadikan perhatian dalam pemberian perlindungan dan kejelasan hak-hak dalam hal penguasaan nya. Tanah ulayat merupakan tanah yang memang harus dijadikan fokus tujuan penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk awal mulanya, karena mengingat perlunya diterbitkan sertifikat sebagai alat bukti kepastian hukum yang dimiliki oleh suatu subjek hukum apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu, di daerah Minangkabau keharusan melampirkan ranji adalah suatu hal yang sangat penting sebagai pendukung alas hak dalam permohonan pendaftaran tanah dan dijadikan bukti pendukung alas hak apabila terjadi sengketa tanah. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1.Bagaimana proses penggunaan ranji sebagai alat bukti kepemilikan tanah ulayat kaum. 2. Bagaimanakah kekuatan dan kedudukan hukum ranji sebagai alat bukti kepemilikan tanah ulayat kaum suku di kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan, bahwa kekuatan dan kedudukan ranji sebagai alat bukti kepemilikan tanah sangatlah penting sebagai surat yang digolongkan sebagai surat dibawah tangan, yang mana kekuatan hukum nya dapat diakui kebenarannya sebagai bukti pendukung alas hak bagi suatu anggota kaum yang diwakilkan oleh mamak kepala waris untuk dijadikan alat bukti dasar dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, hal ini selaras dengan Surat Edaran Gubernur (SE) Gubernur Sumatera Barat No. 5932/4268/PUH83, tanggal 1 september 1983.

342
BAY
p

PROSEDUR PENETAPAN SIKAP DIAM BADAN DAN / ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

Bayu Rahmaddoni, BP: 1510111004, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 90 halaman, 2019

ABSTRAK

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu badan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Seiring perkembangan hukum setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah membawa perubahan yang siginifikan terhadap kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yang semula terbatas, menjadi diperluas, oleh sebab itu dilihat adanya perbedaan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menimbulkan perbedaan penanganan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara karena adanya perluasan konsep hukum yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terutama dapat dilihat Pasal 53 ayat (3) yang mengatur tentang fiktif positif dengan Pasal 3 Undang-Undang PTUN yang mengatur tentang fiktif negatif. Permohonan merupakan permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan tugasnya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sikap diam (Fiktif Positif) dengan adanya sesuai prosedur yang berlaku. Dalam penelitian ini, rumusan masalah sehubungan dengan prosedur penetapan sikap diam Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan adalah 1) prosedur penetapan sikap diam pejabat pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, 2) kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam memeriksa permohonan sikap diam. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1) prosedur penetapan sikap diam pejabat pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah untuk mengetahui cara proses beracara perkara Sikap Diam (Fiktif Positif). 2) kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam memeriksa permohonan sikap diam yaitu tidak sinkronnya amar putusan dari Panitera dengan Peraturan Mahkamah Agung dan tidak adanya Pedoman teknis-teknis dalam beracara yang detail dalam buku pedoman beracara (buku 2).

Kata Kunci : Sikap diam (Fiktif Positif)

342
BEL
o

OPTIMALISASI FUNGSI DEWAN PERS DALAM PENYELESAIAN PENYEBARAN BERITA BOHONG OLEH MEDIA MASSA PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Bella Utami, 1510111166, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Lahirnya sistem demokrasi menjadi langkah awal bagi kebebasan Pers di Indonesia. Pasalnya, kebebasan Pers didapatkan setelah berakhirnya kekuasaan orde baru yang secara dominan mengendalikan kebebasan Pers masa itu. Kehadiran lembaga Pers merupakan konsekuensi era perubahan dari kehidupan Pers yang dikendalikan oleh pemerintah menjadi Pers yang bebas tetapi tetap berpegang teguh pada aturan dan kode etik jurnalistik sehingga kontrol terhadap kehidupan Pers telah beralih pada mekanisme sosial dan hukum. Dewan Pers sebagai lembaga independen yang dibentuk guna mengembangkan dan meningkatkan kehidupan Pers nasional sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers menjadi garda terdepan dalam mengawasi segala bentuk penyalahgunaan kebebasan Pers. Salah satunya terkait pemberitaan di media massa yang berkaitan dengan fenomena penyebaran berita bohong pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Maraknya penyebaran berita bohong ini sejatinya belum dibarengi dengan kehadiran media- media yang berkualitas. Oleh sebab itu, dalam mengatasi persoalan di atas Dewan Pers berfungsi dalam memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelasaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan Pers sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Berdasarkan penjelasan di atas penulis merumuskan dua permasalahan yaitu : Pertama, bagaimana kedudukan Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Kedua, Bagaimana optimalisasi fungsi Dewan Pers dalam fenomena penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh media massa pada pemilihan Presiden 2019. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif dengan melihat pada aturan hukum melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Hadirnya Dewan Pers sebagai lembaga independen yang berupaya melaksanakan fungsinya terhadap publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers telah memberikan tempat bagi Dewan Pers sebagai penjaga kemerdekaan dan kebebasan Pers, penegak etika jurnalistik, dan mediator dalam penyelesaian persoalan antara Pers dan masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan di media massa.

342
BER
p

PENERTIBAN HEWAN TERNAK YANG LEPAS PADA JALUR HIJAU, TAMAN, DAN TEMPAT UMUM DI KECAMATAN IV JURAI OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Berliana Suzeta, 1510112021, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VII (Hukum Administrasi Negara). 85 halaman, 2019

ABSTRAK

Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, salah satunya Pasal 13 ayat (8) yang memberikan pengaturan mengenai larangan hewan ternak yang lepas di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan. Namun dibentuknya Perda tersebut ternyata tidak mampu merubah kebiasaan sebagian peternak di Kabupaten Pesisir Selatan salah satunya di Kecamatan IV Jurai yang ternaknya banyak berkeliaran di lingkungan sekitar sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Berdasarkan persoalan yang dimaksud maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana pelaksanaan penertiban hewan ternak yang lepas pada Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum di Kecamatan IV Jurai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, kedua apa tindak lanjut dari pelaksanaan penertiban Hewan Ternak yang lepas pada Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum di Kecamatan IV Jurai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni: 1) Penertiban hewan ternak oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dilakukan melalui prosedur penangkapan terhadap hewan ternak yang lepas pada jalur hijau, taman, dan tempat umum tidak terlaksana dengan optimal. Hal ini dikarenakan banyaknya faktor penghambat yang ditemukan dalam proses penertiban, diantaranya adalah regulasi, biaya pelaksanaannya, sarana dan prasarana, keterbatasan anggota Satpol PP, dan budaya hukum masyarakat. 2) Tindak lanjut pelaksanaan penertiban menurut Pasal 41 ayat (1) adalah hewan ternak yang lepas setelah dilakukan penangkapan akan dikenakan denda kepada pemilik ternak, selanjutnya menurut Pasal 41 (2) adalah apabila ternak yang tertangkap lewat 7 (tujuh) hari tidak dilakukan penjemputan maka ternak tersebut akan diserahkan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan untuk dilakukan lelang terbuka, hasil lelang tersebut akan diserahkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Namun setelah dikeluarkannya Perda tersebut belum pernah terjadi penyerahan hewan ternak tersebut ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

347.05
BER
m

MUSNAHNYA BENDA BERGERAK SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (Studi Kasus Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang)

Berqah Fitrah Utami, 1210113008, Hukum Perdata Bisnis (PK II), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, viii + 56 halaman

ABSTRAK

Hapusnya Jaminan Fidusia bersifat limitatif, namun dikhawatirkan bahwa penafsiran Pasal 25 Undang-Undang Fidusia sebagai suatu ketentuan yang menetapkan sebab-sebab berakhirnya Jaminan Fidusia akan membawa kesulitan. Pada prakteknya Bank Nagari untuk jaminan benda bergerak seperti hal kendaran bermotor umumnya diikat dengan jaminan fidusia dan diikat dengan surat penyerahan agunan serta kuasa menjual. Dalam kurun waktu perjanjian kredit, kredit yang diikat dengan jaminan fidusia tidaklah berjalan sebagaimana mestinya. Bank Nagari mendapati adanya masalah. Pada beberapa kasus, ada kendaraan yang dibawa oleh debitur keluar daerah. Dimana pihak Bank tidak mengetahui keberadaannya, dan ada juga kondisi kendaraan yang telah rusak parah. Jika mengkaji Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia diatas, maka tidak jelas atau adanya kekaburan pengaturan tentang musnahnya Jaminan Fidusia dan lebih lanjut juga terjadi ketidakjelasan pengaturan tentang tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian khususnya dalam hal perjanjian kredit bank. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan penelitian pada musnahnya benda bergerak dalam Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit bank. Oleh karena itu, penulis memfokuskan penelitian dalam pelaksanaan kerjasama penjaminan kredit melalui sebuah penelitian ilmiah dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk proposal penelitian dengan judul, MUSNAHNYA BENDA BERGERAK SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (Studi Kasus Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang). Dengan rumusan masalah, yaitu 1). Bagaimana akibat hukum atas musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia terkait perjanjian kredit Bank. 2). Kendala dalam penyelesaian atas musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia terkait perjanjian kredit bank. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang diakibatkan kendaraan tersebut dibawa kabur oleh debitur keluar daerah, dimana pihak Bank kesulitan untuk mencarinya karena berada diluar wilayah kerja Bank. Atas resiko yang terjadi tersebut Bank Nagari berusaha untuk mencari informasi kepada berbagai pihak, mengenai keberadaan kendaraan tersebut. Dan apabila kendaraan telah rusak atau tidak ada nilainya, maka penagihan tetap dilakukan terhadap debitur.

342
BIL
p

PEMUNGUTAN TARIF PROGRESIF PADA PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG

Billy Permana Yuza, 1310112122, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 66 Halaman, 2019

ABSTRAK

Pajak progresif berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya berdasarkan nama atau alamat yang sama. Pemungutan tarif progresif ini, terjadi beberapa permasalahan pada saat warga akan membayar pajak kendaraan bermotor mereka, dikarenakan mereka harus membayar nominal lebih banyak. Hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama warga tersebut tidak sesuai dengan yang ia miliki. Dikarenakan kendaraan bermotor yang sudah tidak dikuasai warga, tetap dihitung pajaknya. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana pemungutan tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor 2) Apa saja kendala yang ditemui dalam pemungutan tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor 3) bagaimanakah kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan Pemungutan pajak progresif dilakukan oleh UPTD PPD SAMSAT Kota Padang melalui kantor terpadu SAMSAT, SAMSAT Keliling dll. Objek PKB kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/ atau menguasai kendaraan bermotor. Dasar pengenaan PKB adalah nilai jual kendaraan bermotor. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pemungutan tarif progresif, seperti ketidaktahuan masyarakat mengenai tarif progresif, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, ketidaktahuan masyarakat akan norma dalam melakukan jual beli kendaraan bermotor. Pajak progresif memberikan ontribusi yang cukup terhadap pendapatan asli daerah kota Padang. Seperti pada tahun 2016 kontribusi pajak progresif sebesar 27% terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang.

346
BIM
p

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN DALAM PNGELOLAAN LINGKUNGAN DI KAWASAN WISATA BAHARI MANDEH

Bima Bhrnanda Baytar, 1410111122, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VIII (Hukum Agraria dan Sumber Daya Air), 56 Halaman + Lampiran + vii 2019

ABSTRAK

Kawasan Wisata Bahari Mandeh merupakan sebuah kawasan yang sangat potensial dijadikan sebuah kawasan pariwisata. Kawasan ini digencarkan pembangunan demi menunjang pariwisata itu sendiri, seperti pembangunan jalan dan penginapan. Untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat pembangunan, diperlukan pengelolaan lingkungan di kawasan ini. Pengelolaan lingkungan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengelolaan lingkungan sangat diperlukan agar pembangunan dan kegiatan di kawasan ini tetap berwawasan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Psisir Selatan merupakan sebuah organisasi perangkat daerah yang diamanatkan Undang-undang dalam melaksanakan beberapa kewenangan mengenai lingkungan di daerah. Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini adalah 1)Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengelolaan lingkungan di Kawasan Wisata Bahari Mandeh, 2) Apa kendala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengelolaan lingkungan di Kawasan Wisata Bahari Mandeh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh selama penelitian kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: a) Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengelolaan lingkungan di Kawasan Wisata Bahari Mandeh belum terlaksana seluruhnya sesuai peraturan perundang- undangan. Tupoksi yang telah selesai diantaranya daya tampung wisatawan dan protect marine area. RPPLH dan KLHS sedang dalam proses penyusunan. b) dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu : pergantian pejabat baik Bupati maupun Kepala Organisasi Perangkat Daerah, pola fikir masyarakat yang susah dirubah dan kurangnya anggaran yang disediakan untuk pengelolaan lingkungan.

346
BIM
k

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PENERIMAAN HARTA WARISAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46 TAHUN 2010 TENTANG ANAK LUAR KAWIN

Bima Dirgantara, 1410111085, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata (PK I), 66 Halaman – Tahun 2019

ABSTRAK

Anak luar kawin dalam arti luas meliputi anak zina, anak sumbang. Sedangkan anak luar kawin dalam arti sempit, artinya tidak termasuk anak zina dan anak sumbang, anak luar kawin dalam arti sempit ini yang dapat diakui. Sedangkan dalam islam anak luar kawin disebut sebagai anak zina. Anak luar kawin adalah anak yang terlahir tidak berdasarkan perkawinan yang sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 tahun 2010 tentang anak luar kawin, maka adanya hak anak luar kawin yang diakui yang didapatkan oleh sianak oleh karena itu judul skripsi yaitu : "kedudukan anak luar kawin dalam penerimaan harta warisan berdasarkan putusan MK nomor 46 tahun 2010 tentang anak luar kawin". Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1.Bagaimanakah proses penetapan dari anak luar kawin yang diakui melalui pengadilan?, 2. Bagaimanakah kedudukan anak luar kawin dalam penerimaan harta warisan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 tentang anak luar kawin ? Metode dalam skripsi ini ialah memakai pendekatan yuridis normative dan sosiologi. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu : 1. Proses penetapan dari anak luar kawin yang diakui yaitu: a. Pengakuan Anak, b.Pengakuan orang tua, c.Adanya saksi-saksi, d. Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melakukan tes DNA, e. Mengajukan Permohonan Kepada Pengadilan Negeri. Tujuan skripsi ini agar masyarakat tau tatanan atau proses penetapan anak luar yang diakui dan mengenai pewarisannya. 2. Kedudukan anak luar kawin dalam harta warisan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 tentang anak luar kawin Berdasarkan analisa penulis pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Anak Luar Kawin hak waris setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No 46 Tahun 2010 tentang anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hubungan keperdataan jangan dipahami seluas-luasnya, yakni hubungan keperdataan disini sepanjang tidak melanggar hukum islam bukan berarti hubungan keperdataan langsung memiliki hubungan nasab dan berhak memiliki warisan, karena dalam pembuatan undang-undang putusan mahkamah konstitusi harus dipahami dengan hukum islam. Oleh sebab karena itu maka putusan mahkamah konstitusi ini jangan disalah artikan terlebih lagi tentang mendapat waris. Karena seorang berhak mendapat waris apabila adanya perkawinan dan hubungan nasab jadi hubungan keperdataan bukan berarti hubungan nasab. Akan tetapi keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan efek pada ayah biologis untung bertanggungjawab secara materil atau non materil kepada anaknya.

340
BIM
p

PENGELOLAAN SAMPAH PADA KAWASAN WISATA ALAM LUBUK PARAKU KOTA PADANG

Bima Dwi Rizki, 1510111184, Fakultas Hukum, 2019, 63 halaman

ABSTRAK

UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Kota Padang No 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah telah menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengelola sampah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan mengarahkan masyarakat agar paham mengenai bagaimana pengelolaan sampah yang baik dan benar agar terciptanya lingkungan yang indah dan nyaman, ini sangat penting untuk kawasan wisata Lubuk Paraku ini. Berdasarkan pengamatan mengenai pengelolaan sampah pada Kawasan Wisata Lubuk Paraku tidak terlihatnya proses pengelolaan sampah yang mengakibatkan sampah berserakan di sembarangan tempat bahkan sampai ke sungai, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengelolaan sampah pada kawasan wisata alam Lubuk Paraku Kota Padang 2) Apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan sampah pada kawasan wisata alam Lubuk Paraku Kota Padang dan bagaimana cara mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif, menggunakan jenis data primer dan data sekunder, sumber data didapat penulis dari penelitian kepustakaan dan lapangan, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian dalam pengelolaan sampah pada Kawasan Wisata Lubuk Paraku belum sesuai dengan peraturan yang ada terbukti dengan tidak adanya sosialisasi pengelolaan sampah seperti cara pengurangan sampah dan penanganan sampah yang baik dan benar serta fasilitas penampungan sampah yang tidak tersedia disana. Kendala yang di alami dalam pengelolaan sampah yaitu kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan sampah kepada pihak pengelola Kawasan Wisata Lubuk Paraku, tidak adanya dana yang diberikan kepada pihak pengelola Kawasan Wisata Lubuk Paraku, tidak adanya sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Kawasan Wisata, Lubuk Paraku

341
BRY
p

PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KELAS I PADANG

Bryan Achmad Effindri, 1510112022, Fakultas Hukum, 2019, 70 halaman

ABSTRAK

Kantor Imigrasi Kelas I Padang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan perwujudan dari bentuk instansi pemerintah yang memberikan pelayanan dalam bidang keimigrasian berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pelayanan publik dalam pembuatan paspor merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi kepada masyarakat. Pelayanan tersebut harus berdasarkan dengan asas, prinsip dan standar pelayanan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di Kantor Imigrasi Kelas I Padang adanya pengaduan dan keluhan terkait pelayanan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Seperti kejelasan alur prosedur dan persyaratan dokumen-dokumen yang harus di lengkapi pemohon, antrian yang lama dan panjang serta sistem jaringan yang terganggu. Masyarakat dalam mengajukan permohonan pembuatan paspor merasa kesulitan dengan hal ini. Dalam penelitian ini, rumusan masalahnya adalah 1) pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Padang, 2) kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan paspor serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan publik dalam pembuatan paspor dan kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I Padang serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Padang dan masyarakat yang mengajukan permohonan paspor yang mengetahui dan memahami permasalahan yang akan penulis tulis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, pelayanan publik dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Padang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik berdasarkan asas, prinsip dan standar pelayanan.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Paspor, Kantor Imigrasi.

345
CAL
p

PELAKSANAAN HAK REHABILITASI PSIKOLOGIS BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi di Wilayah Hukum Polres Sijunjung)

Calvin Danovand, 1510111044, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana), 70 Halaman+ vi, 2019

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban mengatur tentang hak-hak terhadap saksi atau korban termasuk hak mendapatkan bantuan rehabilitasi psikologis bagi korban tindak pidana perkosaan. Seringkali para korban tidak mengetahui adanya dan langkah dalam mendapatkan bantuanhak rehabiltiasi Psikologis bagi tindak pidana perkosaan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Hak Rehabilitasi Psikologis Bagi Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Tingkat Penyidikan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Di Wilayah Hukum Polres Sijunjung). Rumusan masalah dalam penelitian adalah1) Bagaimana pelaksanaan hak rehabilitasi psikologis atas korban tindak pidana perkosaan di tingkat penyidikan oleh LPSK di Wilayah Hukum Polres Sijunjung, 2) Apa kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pemberian rehabilitasi psikologis terhadap korban tindak pidana perkosaan 3) Bagaimana upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksaan hak korban dalam mendapatkan rehabilitasi psikologis bagi korban tindak pidana perkosaan pada tahap penyidikan masih kurang maksimal dalam pelaksaannya. Koordinasi LPSK antara kepolisian dengan LBH kota Padang telah terlaksana cukup baik. Pelaksanaan bantuan hak rehabilitasi mengalami kendala- kendala yaitu terutama sekali dalam proses penyidikan penyidik tidak menghadirkan psikolog pada pemeriksaan bagi korban ini. Akibatnya penyidik kesulitan dalam menjalin komunikasi dengan saksi korban. Hal tersebut menyebabkan kasus tidak dapat dilanjutkan karena tidak cukup bukti. Oleh karena itu, diharapkan kepada penyidik pada tahap penyidikan mengetahui kondisi psikis dan memberi saran terhadap rehabilitasi korban. Selain itu perlunya kesungguhan pihak korban dalam melaksanakan rehabilitasi ke Rumah Sakit terkait.

343.09
CES
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR GELAP NARKOTIKA DI TINGKAT PENYIDIKAN

Cesia Ferdinda, 1510112163, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 80 halaman, 2019

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun untuk mengelabuhi pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak dibawah umur untuk dijadikan pengedar obat-obatan terlarang tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, dan ketidak mampuan untuk menolak serta melawan membuat anak di bawah umur menjadi sasaran bandar narkotika untuk mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Diperlukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan, 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan. Metode penelitian penulisan skripsi ini adalah metode yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Sifat dari penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Adapun jenis dan sumber data yang dilaksanakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Upaya melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pengedar narkotika, menjelaskan secara umum tentang sanksi pidana, akan tetapi tidak mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi anak yang menjadi pengedar narkotika. Namun pada dasarnya pelaku peredaran narkotika yang menyangkut anak sebagai pengedar narkotika tetap dijerat dengan pasal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang narkotika. Anak yang menjadi pengedar narkotika berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam proses penyidikan di Ditres Narkoba Polda Sumbar, dimulai tahap pemanggilan dan penangkapan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun pada tahap penahanan pelaksanaan perlindungan hukum belum berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Tahap pemeriksaan pelaksanaan anak harus didampingi oleh orang tua, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan penasehat hukum, namun tidak semua berjalan sesuai dengan aturan yang ada. 2. Kendala yang terjadi dilapangan dalam tahap pemeriksaan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dalam hal ini faktor penghambat yang terjadi pada aparat penegak hukum masih kurang memahami dengan adanya konsep diversi dan restorative justice, kedua di dalam proses pemeriksaan anak ruangannya terlalu kecil, ketiga dalam proses pemeriksaan tidak semua anak didampingi oleh orang tua atau walinya, dan fasilitas kurang mendukung seperti tahanan khusus anak yang kurang memadai. Saran dalam penelitian ini adalah : seharusnya para penegak hukum harus bisa lebih memahami dengan adanya konsep diversi dan restorative justice, penyidik hendaknya mengedepankan perlindungan hukum terhadap anak ditingkat penyidikan, menghindari sikap keras ataupun perkataan yang membuat anak mengalami tekanan batin, serta lebih memperhatikan kondisi sarana dan prasarana tempat penahanan anak agar memiliki ruangan yang cukup sehingga menampung anak sebagai pelaku serta mengurangi dampak negatif terhadap pribadi anak agar tidak terancam.

345
CIN
d

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG

Cindhy Derischa, 1510112181, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 77 halaman, 2019

ABSTRAK

Tindak Pidana Eksploitasi Anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui anak dibawah umur. Dengan kata lain anak-anak digunakan sebagai media untuk mencari uang. Dalam Undang-Undang terdapat 2 (dua) istilah mengenai eksploitasi anak, yaitu eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Permasalahan yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah a) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak di pengadilan negeri Klas 1A Padang, b) Jenis sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana eksplotasi anak di pengadilan negeri kelas 1A Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak hakim mempertimbangkan 2 hal yaitu pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yaitu berupa dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti, dan barang bukti. Pertimbangan non yuridis dibutuhkan oleh hakim karena masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif saja, pertimbangan non yuridis yaitu keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan faktor agama terdakwa. Selain itu keyakinan hakim juga merupakan faktor penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Serta terdapat hal yang meringankan dan memberatkan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Bentuk pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak pada umumnya berupa pidana penjara dan denda. Pidana yang dijatuhkan hakim hendaknya dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Beberapa saran berkaitan dengan skripsi ini yaitu kepada orang tua agar lebih memperhatikan bagaimana pergaulan anak, dan kepada aparat penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan putusan diharapkan seadil-adilnya sehingga bisa bermanfaat untuk segala pihak, serta kepada para penegak hukum dapat bekerja sama dalam menanggulangi tindak pidana eksploitasi anak. Kepada orang tua diharapkan untuk lebih memperhatikan pergaulan anaknya agar tidak terjadi tindak pidana eksploitasi anak dikemudian hari.

345
CIN
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA AKTA AUTENTIK MENYANGKUT BUKU NIKAH OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA BARAT

Cindy Wulandari, 1510112188, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 75 halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Di dalam masyarakat bisa terjadi tindak pidana pemalsuan surat. Salah satu bentuk pemalsuan surat yang terjadi ada pemalsuan buku nikah. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Permasalahan yang akan dibahas yaitu : (a) Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Akta Autentik Menyangkut Buku Nikah Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar? (b) Apakah Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Akta Autentik Menyangkut Buku Nikah Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar? (c) Apakah upaya mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Akta Autentik Buku Nikah Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar? Metode yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian adalah Metode Yuridis Empiris. Kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Akta Autentik Buku Nikah Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat yaitu sulitnya menemukan barang bukti, serta pihak tersangka yang sering diam dan tidak menanggapi pertanyaan penyidik. Upaya mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Buku Nikah oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar yaitu mengambil langkah atau tindakan berupa pengintaian terhadap tersangka untuk melakukan penyidikan pada kasus tindak pidana ini, dan penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar meminta kepada Kementerian Agama/Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan pemusnahan terhadap buku nikah yang sudah tidak berlaku atau palsu.

341
DED
p

PENGATURAN HUKUM TERHADAP MEREK TIGA DIMENSI BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL (STUDI KASUS ANTARA SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA AND CADBURY UK LTD TAHUN 2016)

DedekAmarta, 1410111093, Program Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Merek tiga dimensi (Three-dimensional Marks) merupakan sebuah konsep di dalam golongan merek non-tradisional .Merek tiga dimensi sudah banyak dikenal di Negara Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Juga Inggris. Sedangkan di Indonesia konsep merek tiga dimensi ini masih tergolong baru dan belum ada pengaturan yang mengatur secara jelas untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap tanda bentuk tiga dimensi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan: (1) menganalisis mengenai pengaturan hokum terhadap merek tiga dimensi berdasarkan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional, (2) menganalisis mengenai perlindungan terhadap merek tiga dimensi dalam studi kasus antara Societe Des Produits Nestle SA and Cadbury UK LTD Tahun 2016. Metode penulisan hukum yang penulis gunakan bersi fatnormatif, dimana penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari masalah diatas adalah : (1) Dalam ketentuan internasional mengatur mengenai merek 3 dimensi yaitu di dalam TRIPs mengacu pada ketentuan yang ada pada paris convention, dan dalam paris convention pada pasal 6 ayat (1) memberikan kesempata nuntuk Negara anggota untuk membuat pengaturan sendiri sesua dengan kebutuhan nasional masing-masing Negara anggota. Sedangkan pengaturan berdasarkan hukum nasional, sejak berlakunya Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis telah memberikan pengaturan yang lebih jelas tentang merek 3 dimensi, (2) Dalam kasus antara Societe Des Produits Nestle SA and Cadbury UK LTD Tahun 2016 dalam pendaftaran bentuk coklat nyamasih sulit untuk memberikan perlindungan dibawah merek 3 dimensi, dikarenakan tidak adanya daya pembeda produk dengan produk lainnya.

Kata Kunci : Pengaturan Hukum, Merek Tiga Dimensi Nestle, Cadbury dan Hukum Internasional

346
DEN
p

PENGAWASAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN SOLOK

DENI ANDREONO, 1410112158, Hukum Agraria dan SDA, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 81 Halaman, 2019

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan salah satu cara yaitu memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi salah satu sektor penting bagi pertumbuhan ekonomi untuk mensejahterahkan masyarakat, namun juga memiliki banyak dampak buruk apabila tidak dilakukan pengawasan secara baik dan tegas. Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan menghentikan lebih dini dampak buruk yang terjadi. Izin usaha pertambangan menjadi syarat utama bagi pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan permasalahan yaitu a) Bagaimana Pengawasan terhadap izin usaha pertambangan di Kabupaten Solok? b) Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan izin usaha pertambangan di Kabupaten Solok? metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dimana data primer didapatkan dengan melakukan wawancara dengan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat serta Pemegang IUP yang bersangkutan. Selanjutnya data sekunder melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian pengawasan izin usaha pertambangan mineral dan batubara dikabupaten solok dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang juga mengeluarkan IUP tersebut melalui Dinas ESDM Provinsi Sumatera barat setelah dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah. banyaknya pemegang IUP yang tersebar di seluruh Provinsi Sumatera Barat membuat instrumen pengawasan belum terlalu maksimal dikarenakan terbatasnya anggaran yang diberikan dan sedikitnya Inspektur Tambang yang bertugas untuk mengawasi pemegang IUP melaksanakan kaidah pertambangan yang baik Kemudian terdapat beberapa hal yang menjadi kendala terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan yaitu pembebanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi terhadap masalah yang timbul akibat pertambangan dimana pada dasarnya Pemerintah Kabupaten/kota merupakan instansi yang paling dekat dengan wilayah pertambangan, beberapa perusahaan yang belum melakukan kegiatan produksi, serta beberapa perusahaan yang belum mengangkat Ketua Teknik Tambang.

Kata kunci: Pertambangan,Pengawasan

343.09
DEW
p

PELAKSANAAN PENGAWASAN KEGIATAN INVESTASI DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Dewi Marisa Tri Putri, 1510112065, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 68 halaman

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakngi karena kurangnya pelaksanaan pengawasan kegiatan investasi daerah Kota Padang Panjang yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang. Dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyebutkan bahwa salah satu tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu mengawasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan ketentuan pennaman modal dan perizinan, serta fasilitas yang telah diberikan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan kegiatan investasi daerah di Kota Padang Panjang. 2) Tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Padang Panjang apabila perusahaan melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan penanaman modal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis- empiris, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yaitu: 1) Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Investasi Daerah di Kota Padang Panjang menggunakan cara pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan perusahaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang tidak menggunakan cara pengawasan secara langsung, karena DPMPTSP Kota Padang Panjang sudah merasa cukup melakukan pengawasan melalui pengawasan secara tidak langsung. 2) Tindakan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Padang Panjang apabila perusahaan melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan penanaman modal adalah memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, apabila peringatan pertama dan kedua diabaikan dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan sebelumnya diterbitkan.

Kata Kunci : Investasi, Pengawasan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

345
DHI
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI KEKERASAN DI POLRES SOLOK KOTA

Dhike Puti Mande, 1510111020, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 72 halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, tingkah laku manusia pun berkembang di dalam menjalankan kehidupan bermasyarkat. Perkembangan prilaku manusia pun dari segi hukum, ada yang sesuai dengan norma yang berlaku, dan ada pula yang bertentangan dengan norma yang berlaku. Kejahatan tidak dapat diberantas melainkan hanya dapat dikurangi. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pihak kepolisian selaku penyidik memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana termasuk tindak pidana pencurian disertai kekerasan. Penyelesaian kasus tindak pidana pencurian disertai kekerasan tidak sebanding dengan banyaknya laporan polisi terhadap kasus pencurian disertai kekerasan Polres Solok Kota. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian disertai kekerasan di Polres Solok Kota? 2. Apa saja kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian disertai kekerasan dan upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksaanan penyidikan tindak pidana pencurian disertai kekerasan di Polres Solok Kota? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat Deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian, pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dimulai dengan pengolahan TKP, lalu melakukan penangkapan terhadap tersangka, penahanan, dan penyitaan. Kendala yang dihadapi penyidik yaitu identitas pelaku yang tidak diketahui, saksi yang tidak ingin memberikan kesaksiaannya dan juga pelaku yang berhasil melarikan diri. Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala yaitu memaksimalkan kesaksian dari korban yang melihat ciri fisik dari pelaku, mendatangi rumah saksi untuk memberikan kesaksian dan juga melakukan kerja sama dengan kepolisian di wilayah hukum lain untuk membantu menemukan tersangka.

Kata kunci : Penyidikan, Pencurian disertai Kekerasan

345
DIN
p

PROSES PERMOHONAN RESTITUSI MELALUI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Dinna Fikriana, 1510112055, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2019, 85 Halaman

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang diatur dalam Pasal 351-360 KUHP. Diantaranya tindak pidana penganiayaan yang terjadi terhadap anak di tahanan Polsek Sijunjung oleh aparat kepolisian. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Adapun rumusan masalah yang penulis kaji yaitu bagaimanakah proses permohonan Restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan dan apa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam permohonan Restitusi terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan dan upaya penanggulangannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, yaitu uraian yang penulis lakukan terhadap data yang terkumpul dan tidak menggunakan angka tetapi berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian ini diketahui 1). Bahwa proses permohonan Restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap anak korban tindak pidana penganiayaan adalah dalam bentuk fasilitasi pengajuan Restitusi yang nantinya akan diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan permohonan Restitusi tersebut. 2). Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses permohonan Restitusi adalah bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, tuntutan pidana dari penuntut umum dan pertimbangan majelis hakim dalam pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, telah terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah tindak pidana penganiayaan. Oleh karena itu kematian korban bukanlah diakibatkan oleh perbuatan para terdakwa, oleh karenanya tuntutan Restitusi atau ganti kerugian yang diajukan oleh keluarga korban mengenai biaya penyelenggaraan jenazah tidak tepat dibebankan kepada para terdakwa. Mengenai tuntutan berupa biaya penghasilan Budri sebagai tulang punggung keluarga yang hilang karena korban sudah meninggal dan tuntutan itu bersifat immaterial dimana merupakan kejadian yang belum pasti terjadi di masa yang akan datang maka kerugian tersebut juga tidak dapat dibebankan kepada para terdakwa. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh LBH Padang selaku pihak yang berkoordinasi dengan LPSK adalah mengajukan gugatan secara perdata ke Mahkamah Agung yaitu gugatan mengenai ganti rugi secara immateril sebanyak Rp 500.000.000.

346
DIN
p

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI KOTA SOLOK

Diny Handayani, 1510111094, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2019, 87 Halaman

ABSTRAK

Pembahasan dalam tulisan ini berjudul Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang merupakan suatu studi di Kota Solok yang dilatar belakangi perlunya suatu kebijakan dan langkah terpadu mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga terlaksananya tertib administrasi dalam pengelolaan barang/jasa. Sehingga yang menjadi dasar permasalahan disini adalah mengenai proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Solok dan kendala dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Solok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan jenis pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan lapangan. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara yang kemudian di analisis secara kualitatif. Analisis dan hasil penelitian yang di peroleh yaitu proses pengadaan barang/jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Solok yang telah di jamin dengan Peraturan Perundang-Undangan, dalam pelaksanaannya tentu tidak terlepas dari kendala yang timbul. Kendala dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Solok terbagi dua yaitu kendala yuridis dan kendala teknis. Pertama kendala yuridis, belum dilaksanakannya sosialisasi terhadap Peraturan Walikota Solok Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang di Biayai APBD. Kedua, yang menjadi kendala teknis adalah ketidaksesuaian dokumen penawaran dengan kondisi barang/jasa yang ditawarkan di lapangan, keterlambatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membuat spesifikasi barang/jasa, tidak merata jumlah sumber daya manusia yang bersertifikasi di UKPBJ, kurangnya skill atau keahlian sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengadaan secara Elektronik.

Kata kunci : Pengadaan barang/jasa, Kota Solok

346
DWI
p

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) KOTO BARU KABUPATEN SOLOK

Dwi Febriyanda, BP:1310111149, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 hlm, 2019

ABSTRAK

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Masalah tanah adalah masalah yang sensitif bagi manusia pada umumnya dan masyarakat Minangkabau khususnya, karena tanah di Minangkabau merupakan salah satu unsur dalam oganisasi matrilineal. Dalam berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan sering kali terjadi permasalahan salah satunya mengenai sengketa tanah ulayat kaum.Penyelesaian sengketa tanah ulayat tersebut melibatkan baik pihak. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut masyarakat mempunyai cara tersendiri yaitu tanpa melalui jalur pengadilan atau non litigasi. Penyelesaian non litigasi dipilih oleh masyarakat salah satunya melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Salah satu kasus sengketa tanah ulayat kaum yang terjadi di Sumatera Barat adalah sengketa yang terjadi di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok. Permasalahan tersebut juga merupakan faktor yang sering dihadapi oleh KAN sendiri, salah satunya adalah faktor internal suku seperti permasalahan ini yang tidak mau menerima perdamaian karena para pihak menganggap bahwa merekalah yang berhak untuk tanahtersebut. Rumusan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini adalah bagaminana proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok serta apakah kendala yang dihadapi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis)yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber, yaitu lembaga kerapatan adat nagari (KAN) Koto Baru. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok dengan cara bajanjang naik, batanggo turun, mulai dari niniak mamak, suku, kemudian KAN. Dalam penyelesaian sengeta tanah ulayat maka KAN akan membentuk tim BP3 (Badan Penyelesaian Perkara) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat tersebut. Kemudian bentuk keputan oleh KAN adalah berupa putusan perdamaian antara kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui putusan perdamaian tersebut maka perkara tersebut bisa diajukan ke pengadilan negeri untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. 2) Kendala yang dihadapi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok yaitu Keputusan KAN tidak mempunyai kekuasan hukum memaksa dan mengikat bagi kedua belah pihak, rendahnya pengetahuan prosedur hukum, ketidakpatuhan para pihak yang bersengketa, serta rendahnya peran ninik mamak.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Tanah Ulayat, Kerapatan Adat Nagari (KAN).

340.9
DWI
P

PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA RUSIA ATAS DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP ATURAN PERLINDUNGAN PETUGAS KESEHATAN DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH TAHUN 2011 DITINJAU BERDASARKAN RESPONSIBILITY OF STATE FOR INTERNATIONALLY WRONGFUL ACTS DRAFT ILC 2001

Dwi Ayu Marliyah, 1310112060, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 65 halaman

ABSTRAK

Aturan menegenai perlindungan petugas kesehatan sering dilanggar disaat terjadi peperangan atau konflik bersenjata, terutam konflik bersenjata yang terjadi di Suriah yang melibatkan berbagai negara. Akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilaukan negara maka negara-negara itu harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan.Untuk itu penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah, yakni: (1) Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban Negara atas pelanggaran terhadap aturan perlindungan petugas kesehatandalam konflik bersenjata menurut draft ILC 2001?(2) Bagaimana pertanggungjawabannegara terhadap tenaga kesehatan yang tewas dalam dugaan terjadinya kejahatan perang di suriah tahun 2011?.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan kepustakaan.Dari hasil penelitianini dapat disimpulkan bahwa (1)pengaturan pertanggungjawabannegaraataspelanggaranterhadapaturanperlindunganpetugaskes ehatandalam konflik bersenjata telah diatur dalam Responsibility of State for Internasionally Wrongful Acts draft ILC 2001, dalan aturan ini pelanggaran yang dilakukan oleh negara telah diatur sedemikian rupa, dari jenis pertanggungawaban negara, isi dari tanggung jawab negara, hingga ganti rugi dari pelannggan yang dilakukan negara telah jelas di jabararkan dalam aturan i ni..(2)pertanggungjawabannegara terhadap petugas kesehatan yang tewas dan luka dalam dugaan terjadinnya kejahatan perang di suriah tahun 2011 tidak hanya melibatkan Suriah saja tetapi juga negara lain berupa Rusia. Menurut draft IlC 2001 pasal 17 negara-negara yang membantu seperti Rusia wajib bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang terjadi dari menghentikan konflik tersebut tersebut dan memastikan pelanggaran tersebut tidak akan terulang lagi. Dan pemberian ganti rugi terhadap yang dirugikan baik secara materi ataupun moral.

346
Dzi
P

PENGADAAN PEGAWAI TIDAK TETAP MELALUI SKEMA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

Dzikra Atiqa, 1510112024, Fakultas Hukum, 2019, 79 halaman

ABSTRAK

Pelaksanaan fungsi pemerintahan dilakukan dengan mendayagunakan instrumen- instrumen pemerintahan, salah satunya adalah instrument personil atau kepegawaian yang berpayung hukum pada UU Aparatur Sipil Negara. Permasalahan yang terjadi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah adanya kebutuhan tambahan pegawai, tetapi tidak bisa terpenuhi menurut UU ASN, kendala selanjutnya adanya hambatan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil yang melarang adanya pengangkatan pegawai honorer. Menjawab kebutuhan tersebut, SETDA Kabupaten Tanah Datar memakai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk pengadaan pegawai tidak tetap pada SETDA Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan persoalan itu, maka perumusan masalahnya adalah: 1) Mengapa pengadaan pegawai tidak tetap di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar menggunakan skema Pengadaan Barang dan Jasa? 2) Apa konsekuensi hukum penggunaan skema Pengadaan Barang dan Jasa dalam pengadaan pegawai tidak tetap di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar? Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yang bersifat deskriptif, menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder, sumber data yang didapatkan oleh penulis dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1. Alasan SETDA Kabupaten Tanah Datar menggunakan skema pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam pengadaan pegawai tidak tetap karena: pertama, merujuk pada penjelasan jasa lainnya yang terdapat pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang terdapat pada Pasal 4 Huruf D. Alasan ke dua adalah surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut dengan LKPP) kepada SETDA Kabupaten Tanah Datar yang berisi bahwa pengadaan pegawai tidak tetap melalui pengadaan jasa lainnya dapat dilakukan di SETDA Kabupaten Tanah Datar. 2. Konsekuensi hukumnya adalah pengadaan pegawai tidak tetap melalui skema pengadaan barang dan jasa ini sah, dan menimbulkan akibat hukum. Pegawai tidak tetap tidak mendapatkan fasilitas layaknya ASN seperti tunjangan, promosi, jaminan hari tua, serta jaminan sosial bagi pegawai tidak tetap yang tidak menyertakan jaminan sosial sebagai hak di dalam klausul perjanjian.

Kata kunci: Pengadaan barang dan jasa, pegawai tidak tetap, jasa lainnya

342
Egi
P

PENGANGKATAN ANGGOTA KEPOLISIAN MENJADI PEJABAT GUBERNUR

Egip Satria Eka Putra, 1510111162, Fakultas Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Pegangkatan perwira tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Pejabat (Pj) Gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara pada Pilkada 2018 yang lalu oleh Mendagri menuai polemik. Padahal Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah mengatur secara jelas perihal pengisian kekosongan jabatan gubernur, dimana yang diangkat sebagai pejabat gubernur adalah yang berasal dari jabatan pimpinan madya. Sedangkan dasar hukum yang dijadikan rujukan oleh Mendagri untuk menunjuk anggota Polri aktif menjadi pejabat gubernur merujuk pada Permendagri No. 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi kepala daerah. Dalam Pasal 4 ayat (2), memuat norma yang menyatakan bahwa yang menjadi pejabat gubernur berasal dari pejabat tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat/provinsi. Maka dari itu terdapat perluasan makna yang terdapat pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2018. Masalah yang akan dicari jawabannya adalah pertama, mengenai analisa hukum terkait pengangkatan anggota kepolisian menjadi Pejabat Gubernur, dan aturan norma apa yang seharusnya dalam Permendagri No.1 Tahun 2018, mengenai pengisian kekosongan jabatan Gubernur yang ditinggal sementara oleh Gubernur selama masa kampanye saat Pilkada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif atau kepustakaan, sedangkan segi sifat pemaparannya adalah deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan penelitian ini analisa hukum yang diperoleh adalah bahwa intitusi Kemendagri adalah institusi yang paling berwenang untuk mengisi kekosongan jabatan sebagai pejabat gubernur bukan dari Institusi Polri. Dan aturan norma yang seharusnya dalam Permendagri tersebut adalah berbunyi: “Pejabat Gubernur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya di lingkup pemerintah pusat, kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah Provinsi”. Dengan menghilangkan frasa “setingkat” dalam rumusan Permendagri tersebut.

Kata kunci : Polri , Pejabat Gubernur, ASN, Pilkada.

345
ELK
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTA PADANG

El Kamil, 1410111120, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 64 halaman – Tahun 2019, Pembimbing : Dr.A Irzal Rias.S.H, M.H., dan Riki Afrizal, S.H., M.H

ABSTRAK

Penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan. Salah satu tindak penadahan yang terjadi dikota padang khususnya adalah penadahan terhadap kendaran bermotor roda dua dimana akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penadahan yaitu korban mengalami kerugian, baik itu kerugian materil maupun inmateril. Untuk itu perlu dari penegak hukum yaitu kepolisian untuk melakukan Proses pelaksanaan penyidikan. Berdasarkan data yang di peroleh dari Satuan Reserse Kriminal Polresta padang kasus curanmor sangat banyak terjadi di kota padang , pada tahun 2016 sampai 2018 laporan yang masuk 3.143 dan kasus yang selesai hanya separuh saja. Data dari tahun 2016-2018 ada sekitar 145 kasus tindak pidana penadahan. Salah satu kasus yang berhasil di ungkap oleh Satuan Reskrim Polresta Padang berhasil menagkap Deny Febrindo (31) warga Kelurahan Dadok Tungul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polresta Padang, Deny Febrindo telah terbukti melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua, dengan barang bukti berupa satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna hitam, Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang ? 2.Apa-apa saja kendala dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua ?. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini adalah 1. Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang sebagai berikut: A).penyelidikan,terbagi dari beberap cara, yaitu peninjauan, pembuntutan, penyusupan, rencana pelaksanaa penggrebekan, dan B)penyidikan, dengan cara sebagai berikut, pemanggilan, penangkapan, penahan, penggeledahan, penyitaan, pemriksaan, penyeleseian dan penyerahan berkas perkara, penghentian penyidikan. 2. kendala dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua. 1) Pelaku Tindak Pidana Penadahan Berada di Luar Kota Padang 2), Barang Bukti yang Telah Mengalami Perubahan Fisik, 3) Satreskrim Kesulitan dalam Mendapatkan Keterangan Saksi 4) Pelaku Penadahan Menjual Kendaraan Roda Dua Melalui Media Sosial, 5). Tersangka Tindak Pidana Pencurian Tidak Memberikan Informasi Mengenai Penadah. 6) Pelaku tindak pidana penadahan menukarkan kendaraan roda dua dengan barang kejahatan lainnya. Upaya penyidik mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua oleh satuan reskrim polresta Padang dengan cara preventif dan represif.

342
ELS
p

PELAKSANAAN PROGRAM ANAK LAHIR PULANG BERSAMA AKTA (ALPA BETA) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCATATAN KELAHIRAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Elsa Haflani, 1510111050, Fakultas Hukum, 2018, 63 halaman

ABSTRAK

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen terpenting yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat, sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu identitas dan status kewarganegaraan. Identitas tersebut dituangkan dalam sebuah akta kelahiran. Namun saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap arti pentingnya akta kelahiran. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman mengeluarkan sebuah inovasi yang bekerjasama dengan Rumah Sakit Aisyiah Pariaman untuk membantu masyarakat agar dengan cepat mendapatkan dokumen kependudukan. Program ini bernama ALPA BETA (Anak Lahir Pulang Bersama Akta). Program ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program (ALPA BETA) dan bagaimana manfaat dan pengaruh program ini terhadap administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Program ini dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tertuang dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman dengan Rumah Sakit Aisyiah Pariaman sejak Januari 2018. Program ini diawali dengan diserahkannya dokumen persyaratan penerbitan akta kelahiran oleh pasien dan akan diproses oleh Disdukcapil. AJEK (Antar Jemput Administrasi Kependudukan) akan menjemput dan mengantarkan akta kelahiran tersebut kepada pasien ketika masih di rumah sakit. Program ini juga telah membantu dalam tertib administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, dan Disdukcapil harus tetap memperbaiki kualitas layanan demi tercapainya pelayanan yang maksimal kepada masyakarat.

Kata Kunci : Penerbitan Akta Kelahiran, ALPA BETA.

345
ELV
p

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN BENTUK PENELANTARAN RUMAH TANGGA: Studi Polresta Padang

Elvia Nensi, 1510112086, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 73 halaman ,Tahun 2019

ABSTRAK

Penerapan keadilan restoratif merupakan cara lain dalam peradilan pidana yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada prinsipnya keadilan restoratif merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian melalui cara mediasi penal. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana yang ada di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang salah satu cara penyelesaiannya dapat dengan penerapan keadilan restoratif, bukan semata- mata memberikan pambalasan kepada pelakunya, akan tetapi juga melindungi korban serta dapat menyelamatkan rumah tangga agar tetap dalam keadaan harmonis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantaran rumah tangga di Polresta Padang, apa kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantara rumah tangga dan upaya Polresta Padang mengatasi kendala penerapan keadilan restoratif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan bentuk penelantaran rumah tangga di Polresta Padang adalah pada tahap penyidikan. Kendala yang dihadapi dalam penerapan keadilan restoratif oleh penyidik Polresta Padang ialah dari faktor internal dan faktor eksternal artinya bisa datang dari korban kekerasan itu sendiri maupun dari keluarga korban dan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala dalam penerapan keadilan restoratif ialah melakukan pendekatan secara lansung dan memberikan pemahaman tentang keadilan restoratif kepada korban, keluarga, dan masyarakat.

Kata Kunci : Restoratif, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

347.05
END
p

PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA BUKITTINGGI

Endah Fajarwati, 1510111154, Fakultas Hukum 2019, 58 halaman

ABSTRAK

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang disebut sebagai mediator dimana mediator hanya memberikan saran-saran, nasihat-nasihat, dan masukan-masukan tanpa memberikan putusan untuk tercapainya damai diantara para pihak. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi mengatur bahwa setiap perkara perdata yang masuk ke lingkungan peradilan wajib untuk melalui proses mediasi terlebih dahulu, termasuk perkara ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama setelah adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sengketa ekonomi syariah pertama kali masuk ke pengadilan agama yaitu di Pengadilan agama Kota Bukittinggi pada tahun 2006. Penyelesaian kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi sejak saat itu hingga sekarang dinilai kurang berhasil, dibuktikan dengan sangat sedikitnya perkara ekonomi syariah yang berhasil diselesaikan melalui jalur mediasi. Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilannya. Meode penulisan yuridis empiris (sosial legal research), pendekatan masalah dengan melihat penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan, penelitian ini bersifat deskriptif, dilakukan dengan menggambarkan bagaimana penerapan peraturan perundang- undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan teknik wawancara dan studi kepustakaan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian diketahui bahwa mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah telah dilaksanakan oleh di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi namun belum maksimal dikarenakan faktor eksternal dan internal.

Kata Kunci : Mediasi, Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama

342.07
ERS
o

OPTIMALISASI PENGAWASAN DANA KAMPANYE MELALUI FORMULASI PENYINGKAPAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS

Ersa Satria Sinulingga, 15101110495, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 84 halaman, 2019

ABSTRAK

Formulasi Penyingkapan Publik atau yang dikenal dengan Public Disclosure adalah pengungkapan informasi kepada publik agar masyarakat mengetahui sebuah informasi publik penting. Salah satunya adalah dalam mengawasi dana kampanye. Pemasalahan pengawasan dana kampanye di Indonesia masih belum maksimal. Penelitian ini mengkaji, pertama, apa saja problematika pengawasan dana kampanye dalam pemilihan umum di Indonesia? Kedua, Bagaimana prosedur formulasi penyingkapan publik dalam pengawasan dan kampanye untuk mewujudkan pemilihan umum berintegritas di Indonesia? Pelaporan dana kampanye hadir sebagai salah satu bentuk bentuk tindak lanjut prosedur pembatasan dana kampanye dalam pengawasan dana kampanye di Indonesia. Namun, selama ini sering terjadi ketidakpatuhan dalam menyerahkan laporan dana kampanye dan manipulasi dalam laporan dana kampanye di Indonesia. Melalui penelitian ini dapat diketahui bagaimana sistem pengawasan dana kampanye dalam pemilihan umum di Indonesia serta bagaimana konsep penyingkapan publikdalam pengawasan dana kampanye untuk mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan di Indonesia. Dari hasil penelitian ini adalah mengatur kembali pengawasan dana kampanye melalui publikasi dengan metode penyingkapan publik (public disclosure) dalam mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan di Indonesia dan membentuk regulasi yang sesuai dengan perkembangan hukum pemilu yang berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Sistem Publikasi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu untuk mengoptimalkan pengawasan biaya kampanye, lalu perlu dibentuk aturan terkait ketentuan pembatasan pengeluaran dana kampanye dengan pembatasan pengeluaran biaya kampanye didasarkan pada wilayah pemilihan dan jumlah pemilih karena belum adanya pengaturan terkait hal ini. Lalu, menambahkan kewajiban peserta pemilihan umum, yaitu membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) penggunaan dana kampanye yang memuat anggaran kegiatan kampanye yang akan dilakukan. Tentunya gagasan yang masih memerlukan kajian ilmiah lebih lanjut ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh lembaga yang berwenang.

344.03
FAI
p

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS (PHL) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG

Faizul Abidin; 1210113130 ; Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 Halaman, Tahun 2018

ABSTRAK

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Kota Padang dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menggunakan Pekerja Harian Lepas (PHL) untuk menyokong kinerjanya. Bidang pekerjaaan yang dilakukan oleh Pekerja Harian Lepas tersebut rawan dengan resiko kecelakaan kerja, sehingga jaminan sosial terhadap PHL ini penting untuk dilaksanakan. Jaminan sosial merupakan hak pekerja sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (1, 2 & 3), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Nasional dan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan Program Jaminan Sosial terhadap Pekerja Harian Lepas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang, 2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Metode penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris/sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : (1) Pelaksanaan progam jaminan sosial terhadap Pekerja Harian Lepas (PHL) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang belum sepenuhnya sesuai dengan Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Para pekerja mendapatkan jaminan sosial berupa biaya pengobatan dan santunan jika terjadi kecelakaan kerja, namun secara formal pelaksanaan jaminan sosial ini belum dimuat dalam SOP (Standart Operational Procedure) khusus. 2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan progam jaminan sosial terhadap Pekerja Harian Lepas (PHL) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kota Padang ini adalah : Kurangnya sosialisasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang tentang informasi jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja Harian Lepas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang kurang dalam hal menggiatkan pelaksanaan jaminan sosial bagi Pekerja Harian Lepas, belum adanya SOP (Standart Operational Procedure) dan Anggaran khusus untuk program jaminan sosial pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang.

Kata Kunci : Jaminan Sosial, Pekerja Harian Lepas.

344.09
FAJ
d

DISTRIBUSI DANA ZAKAT KEPADA MUSTAHIK OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASONAL (BAZNAS) KABUPATEN AGAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

Fajri Aulia Afisna 1510111175, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 67 halaman, 2019

ABSTRAK

Zakat merupakan suatu ibadah wajib yang dituntut dari mereka yang mampu dan termasuk kedalam rukun Islam yang ke 3. Terkait hal Pengelolaan zakat adanya keterlibatan aktif dari pemerintah. Salah satu organisasi pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Agam, yang mana tugasnya untuk menghimpun dan mendistribusian dana zakat untuk disalurkan nantinya kepada mustahik yang membutuhkan. Permasalahan dari pendistribusian dana zakat yaitu disebabkan masih terbilang rendah kesadaran para muzakki untuk berzakat terutama untuk menyetorkan kepada BAZNAS Agam dan lebih memilih langsung memberikan kepada mustahik yang bersangkutan berakibat penerimaan untuk pendistribusian dana zakat kepada mustahik mengalami pasang surut setiap tahunnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas bagaimana proses pendistribusian dana zakat kepada mustahik oleh BAZNAS Agam serta kendala dan upaya menaggulanginya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Agam dan data sekunder berupa dokumen serta peraturan terkait dengan pengelolaan zakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam proses pendistribusian dana zakat telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat , akan tetapi dalam pendistribusiannnya masih banyak kendala yang dihadapi seperti minimnya penerimaan dana zakat untuk jumlah mustahik yang semakin tinggi untuk itu diperlukan peningkatan penerimaan dengan berbagai program yang telah dirancang untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan, selain itu kendala lainnya dalam pendistribusian zakat masih minimnya akses untuk mencapai tujuan pendisistribusian akibatnya para pengelola zakat harus bekerja dengan maksimal untuk sampai ke tempat tersebut, sebagai upaya penanggulangannya adalah dengan membentuk tim UPZ (Unit Pengelolaan Zakat) di setiap kecamatan / daerah agar proses pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik.

345
NAZ
k

KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI

Nazif Firdaus, 1720112048, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 137 halaman, 2019

ABSTRAK

Setiap tahun anak yang menjadi pelaku suatu tindak pidana selalu meningkat jumlahnya. Saat ini, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika oleh anak sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini dilaksanakan melalui pengupayaan diversi. Diversi menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang SPPA merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam rangka mengusahakan pelaksanaan diversi yang lebih baik, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dalam pelaksanaannya jusrtu membuat ketidakpastian hukum berkaitan dengan pengupayaan diversi terhadap anak. Dalam kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, terdapat 2 perkara tindak pidana narkotika anak. Salah satu perkara diselesaikan melalui upaya diversi, sedangkan terhadap perkara yang lain tidak ada pertimbangan untuk pengupayaan diversi. permasalahan dalam Tesis ini adalah: 1) bagaimanakah kepastian hukum terhadap pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkotika? 2) bagaimanakah pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkotika?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Tipe penelitiannya adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1. Penerbitan Perma Diversi Anak yang hanya mengharuskan hakim untuk melakukan upaya diversi dengan tidak melakukan konsilidasi dengan pengak hukum yang lain membuat ketidakpastian hukum dan merusak hakekat dari sistem peradilan pidana anak. 2. Pertimbangan Penyidik dan Penuntut Umum dalam pengupayaan diversi terhadap anak hanya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dan tidak mempunyai pedoman lain. Sedangkan pertimbangan hakim didasarkan kepada keyakinan hakim terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan anak, hakim menilai peranan anak dalam tindak pidana yang dia lakukan. Untuk perbaikan penegakan hukum di masa depan Mahkamah Agung perlu berkonsilidasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung untuk membuat peraturan bersama berkaitan dengan diversi tersebut mengingat dan menimbang berlakunya secara optimal sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Diversi, Tindak Pidana Narkotika

342
FAB
t

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XV/2017 PERIHAL VERIFIKASI PARTAI POLITIK OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM

Fabio Syadino, 1510111075, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, PK V (Hukum Tata Negara), 109 halaman, 2019

ABSTRAK

Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau yang selanjutnya dsiingkat Pemilu diatur mengenai verifikasi partai politik calon peserta pemilihan umum yang dituangkan dalam Pasal 173. Munculnya kecemburuan oleh partai politik baru calon peserta Pemilu akibat hanya memverifikasi partai baru dan tidak memverifikasi partai lama yang sudah ditetapkan di Pemilu 2014. Ketidakadilan dan diskriminasi ini berdampak pada digugatnya Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi. Setelah Mahkamah Konstitusi bersidang, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dengan mengabulkan permohonan pemohon Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mempunyai implikasi terhadap pelaksanaan verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan umum. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ada tiga. Pertama, Bagaimana pembentukan norma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu, Kedua, Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Ketiga, Implikasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terhadap verifikasi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sebagai implikasi pasca. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap KPU yang merupakan penyelenggara pemilu serta menguatkan dengan wawancara dengan Bapak Vifner selaku Komisioner KPU Sumatera Barat dan Bapak Faisal Rahman Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum dan HKI KemenkumHam Sumatera Barat. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dimana melakukan penelitian secara langsung ke lapangan melalui mewawancarai dengan Komisioner KPU, Komisioner Banwaslu, Kepala Sub Bidang pelayanan Administrasi Hukum dan HKI Kemenkumham Sumbar dan data diperoleh dari studi dokumen yang diperoleh dari KPU Provinsi Sumbar serta artikel, majalah, koran, jurnal, serta literatur buku dan perundang-undangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berimplikasi terhadap pelaksana yaitu KPU, adanya celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, terbenturnya putusan pengadilan dan undang-undang serta tujuan penyederhanaan partai politik tidak tercapai.

343.09
FAD
p

PERLINDUNGAN SITUS CAGAR BUDAYA ISTANA BUNG HATTA OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Fadhila Fitria, 1510111129, Fakultas Hukum, 2018, 55 halaman

ABSTRAK

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perlindungan Cagar Budaya yang ada di daerah masing- masing oleh Pemerintah Daerah merupakan cerminan usaha Pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat, karena Cagar Budaya merupakan warisan kebudayaan yang bersifat kebendaan yang harus dilindungi keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan daerah itu sendiri. Seperti diketahui Cagar Budaya yang ada di Indonesia banyak yang sudah rusak ataupun hancur. Karena tidak mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan Perlindungan Situs Cagar Budaya Istana Bung Hatta terkait dengan banyaknya terjadi kerusakan dan kehancuran pada Cagar Budaya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam perlindungan Situs Cagar Budaya Istana Bung Hatta dan kendala-kendala yang dihadapi dalam Perlindungan Situs Cagar Budaya ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan pihak/pimpinan Biro Umum Sekretariat Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dan pengurus Istana Bung Hatta yang mengetahui dan memahami permasalahan yang akan penulis tulis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan upaya perlindungan Situs Cagar Budaya masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengenai tugas dan wewenang dalam melakukan perlindungan Cagar Budaya. Walaupun sudah ada beberapa yang dilakukan sesuai dengan undang-undang tersebut, tetapi pada umumnya belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan Istana Bung Hatta dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga pengelolaannya berdasarkan pada aturan tentang pengelolaan barang milik daerah. Sehingga jika berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka pengelolaannya sudah sesuai dengan peraturan menteri tersebut. Juga Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat memerlukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan Cagar Budaya atau pengelolaan Cagar Budaya yang didalamnya mengatur mengenai perlindungan sebagai bentuk upaya mendukung perlindungan Cagar Budaya di Sumatera Barat.

Kata Kunci : Perlindungan, Situs Cagar Budaya, Istana Bung Hatta.

342
FAJ
p

PERBUATAN YANG DINILAI SEBAGAI POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Fajar Darmawan Adha, 150111024, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK V (Hukum Tata Negara), 82 Halaman, 201

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terdapat berbagai pengaturan mengenai jalannya pilkada. Mulai dari lembaga atau badan yang mengawasi jalannya pilkada, syarat ataupun kriteria pasangan calon kepala daerah, serta dimuat pula sanksi-sanksi jika terdapat pelanggaran akan jalannya pilkada tersebut. Pelanggaran yang diatur salah satunya adalah mengenai politik uang. Politik uang merupakan pelanggaran yang sering dilakukan oleh calon ataupun pasangan calon kepala daerah, namun sangat disayangkan pengaturan akan mengenai politik uang ini cukup minim sehingga terdapat celah hukum didalamnya. Seperti contoh, frasa dari politik uang tidaklah dicantumkan dengan tegas dalam UU Pilkada ini, ruang lingkup atau bentuk-bentuk politik uang juga tidak diatur dengan tegas didalamnya. Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas, maka diajukan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu,pertama,Apa yang dimaksud dengan politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan tindakan apa saja yang diatur sebagai perbuatan politik uang yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada?, kedua, bagaimana seharusnya penanganan yang ideal dalam mengatasi tindak politik uang?. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan berupa pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan didukung bahan hukum tersier. Hasil analisa menunjukkan bahwa sangat diperlukannya pengaturan yang jelas dan tegas mengenai politik uang, karena politik uang merupakan tindak pidana yang masif terjadi disetiap kontestasi pemilihan umum, politik uang merupakan perusak demokrasi, politik uang merupakan pelanggaran yang dianggap lumrah dimasyarakat khususnya masyarakat awam, karena sudah sangat sering terjadinya pelanggaran tersebut, dan politik uang merupakan salah satu cikal bakal maraknya terjadi korupsi di Indonesia. Hal- hal di atas perlu diantispasi atau diperbaiki guna demokrasi yang lebih baik lagi kedepannya. Penanganan yang perlu dilakukan adalah melalui: upaya progresif Hukum Tata Negara mulai dari pembatasan dana kampanye calon dan parpol, pengaturan progresif transaksi elektronik uang kampanye, pengaturan progresif bagi parpol untuk mencerdaskan konstituen dan anti politik uang. Kemudian bisa mencontoh tindakan pencegahan politik uang yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan di Provinsi Lampung, diantaranya dengan cara. Upaya pre-emtif, upaya preventif, dan upaya represif dan juga berupaya menghilangkan atau memperbaiki faktor-faktor penghambat lainnya dari penanganan politik uang tersebut.

345.07
FAK
p

PENGELOLAAN PASAR OLEH DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI KOTA SOLOK

Fakhri Muhammad, 1510111078, Fakultas Hukum, 2019, 58 Halaman

ABSTRAK

Pasar berdasarkanPasal 1 angka 4 Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah Pusat Perbelanjaan yaitu area tertentu yang terdiri satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan. Pasar Modern termasuk kedalam Pusat Perbelanjaan.Dalam pengelolaan Pasar Semi Modern dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah karena Pasar Semi Modern merupakan salah satu Aset Barang Milik Daerah dan Pemerintah Daerah berusaha untuk memberdayakan sarana dan prasarana pasar dan berusaha mengelola pasar dengan sebaik-baiknya. Mengingat bahwa Pasar Semi Modern dapat dikatakan sebagai sumber keuangan Kota Solok. Yang menjadi persoalan penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengeloaan Pasar Semi Modern sebagai pusat perbelanjaan di Kota Solok? 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Pasar Semi Modern di Kota Solok dan upaya menghadapi kendala tersebut? Penelitian ini bersifat deskriptis analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) Pengelolaan Pasar Semi Modern terdapat tiga tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pendistribusian, tahap pemungutan kewajiban pedagang2) Pengelolaan Pasar Semi Modern tidak terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan karena terkendala dengan masalah penempatan pedagang, struktur bangunan dan penataan pedagang dan upaya dari Pemerintah dan kantor pengelola pasar telah memberikan penyuluhan kepada para pedagang mengenai Pasar Semi Modern ini.

Kata Kunci : Pengelolaan, Pasar , dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

347.05
FAK
p

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA BILYET GIRO SEBAGAI WARKAT BANK MENURUT PERATURAN BANK INDONESIA (PBI) NO. 18/41/PBI2016 TENTANG BILYET GIRO (STUDI PADA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA SUMBAR)

Fakhrul Hidayat, 1410112036, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis (PK II), 63 halaman – Tahun 2019, Pembimbing : Hj. Zahara S.H., M.H dan Andalusia, S.H., M.H

ABSTRAK

Bilyet Giro menurut pasal 1 butir (3) PBI no 18/41/PBI/2016 adalah surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindahbukukan sejumlah dana kepada rekening penerima. Dengan demikian pembayaran bilyet giro adalah pembayaran dengan pemindahbukuan (booking transfer) dan bukan dengan uang tunai. Dasar pertimbangan penerbitan PBI No. 18/41/PBI/2016 ini adalah untuk meningkatkan perlindungan bagi pengguna Bilyet Giro dan meningkatkan daya tarik dari penggunaan Bilyet Giro dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan serta memberikan jaminan keamanan dan kepastian penggunaan Bilyet Giro. Dalam transaksi Bilyet Giro ini masih ada kasus-kasus dari pelanggaran yang terjadi, maka untuk itu perlu perlindungan hukum yang diberikan. Rumusan masalah: 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna Bilyet Giro menurut Bank Indonesia? 2. Apa kendala yang dihadapi dalam penggunaan Bilyet Giro sebagai warkat bank menurut Bank Indonesia?. metode penelitian yang dipakai ialah pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu : 1. Berdasarkan hasil analisis dan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak bank Indonesia provinsi Sumatra barat, dimana bank Indonesia tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada nasabah pemilik bilyet giro ababila terjadi kecurangan, karena bank Indonesia sendiri merupakan sebagai lembaga yang menyusun kebijakan terkait system pembayaran, bentuk perlidungan hukum yang diberikan oleh bank Indonesia kepada nasabah pengguna bilyet giro berada di level preventif, yakni melalui berbagai macam peraturan yang harus dipenuhi. 2. Berdasarkan analisa dan wawacara yang dilakukan penulis di bank indonesia perwakilan sumbar mengenai kendala yang dihadapi dalam penggunaan bilyet giro sebagai warkat bank menurut Bank Indonesia kantor wilayah sumatra barat mengatakan tidak ada karena para pelaku bilyet giro yang terlibat langsung ialah antara pihak bank dengan pemilik rekening giro perseorangan maupun perorangan, bank indonesia dalam kegiatan transaksi bilyet giro ini hanya bertugas sebagai pengawas yang bersifat pasif, dengan kata lain pelaku aktif bilyet giro melibatkan pihak pemilik rekening dan perbankanya masing masing. Oleh sebab itu kendala-kendala yang dirasakan terdapat kepada para pihak nasabah pengguna bilyet giro dengan bank terkait.

345
FAL
p

PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES TANAH DATAR

Falfandi Yulenda. 1410112008. Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV). Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 65 Halaman.

ABSTRAK

Lalu lintas merupakan sarana dan prasarana untuk melakukan aktifitas sehari-hari, pembangunan ekonomi juga berawal dari lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas menjadi permasalahan yang serius karena hamper setiap saat pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh pengemudi ataupun pengendara kendaraan bermotor. Pelanggaran tersebut juga dapat menyebabkan kerugian baik bagi orang lain ataupun diri sendiri yang dapat menyebabkan orang luka-luka ataupun kematian. Untuk itu dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas perlu dihadirkan barang bukti. Dijelaskan dalam peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pentingnya peningkatan sumber daya manusia agar keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dapat terwujud bahkan dapat menekan terjadinya angka kematian yang sia-sia akibat kelalaian dari pengendara yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Pasal 89 ayat (2) menyatakan bahwa " Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menahan sementara atau mencabut Surat Izin Mengemudi sementara sebelum diputus pengadilan ". Dalam prakteknya masyarakat yang ditilang apparat karena melakukan pelanggaran tidak terima akan tindakan kepolisian, sipelanggar cenderung mencari solusi cepat agar bisa langsung bebas dari tindakan tilang dari kepolisian dengan melakukan upaya " damai ditampat ", berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan permasalahan yaitu a) Bagaimana Pelaksanaan Penyitaan barang Bukti Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Tanah datar? b) Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penyitaan barang bukti terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres Tanah? metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dimana data primer didapatkan dengan melakukan wawancara dengan Kepolisian Resort Tanah Datar. Selanjutnya data sekunder melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian . Kemudian terdapat beberapa hal yang menjadi kendala terhadap kegiatan penyitaan barang bukti yang dilakukan yaitu adanya perlakuan dari si pelanggar yang tidak menerima tuduhan dan sangsi yang ditujukan kepadanya dimana pada dasarnya si pelanggar harus menerima tuduhan dan sangsi yang diterimanya atas perbuatan pelanggaran yang dilakukannya,

Kata Kunci : Pelaksanaan, Barang Bukti, Penyitaan, Pelanggaran Lalu Lintas

345
FAN
u

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Reserse Padang Panjang)

FANDI AFRINALDI. 1410112066. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV(Hukum Pidana. 88 Halaman. Tahun 2019

ABSTRAK

Anak bukan saja menjadi korban Tindak Penganiayaan, namun anak juga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana salah satu tindak pidana dimana anak sebagai pelaku adalah tindak pidana penganiayaan diwilayah hukum Polres Padang Panjang terdapat beberapa kasus. Adapun rumusan masalahnya 1)Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Padang Panjang 2)Bagaimana upaya Kepolisian dalam Penegakan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Padang Panjang ?Apakah kendala kepolisian dalam Penegakan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Yang Dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Padang Panjang?Adapun menggunakan metode yuridis sosiologis, sedangkan data yang digunakan ialah data primer dan sekunder. Terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Padang Panjang disebabkan karena perasaan dendam seorang anak yang mudah timbul, kelalaian orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak, pengaruh lingkungan tempat seorang anak bergaul, pendidikan, pemuasan kebutuhan yang belum tercapai, dan keadaan ekonomi. Untuk proses penanganan tindak pidana penganiayaan tersebut diperlukan kerja sama antara keluarga, masyarakat, pihak kepolisian serta pihak-pihak yang terkait untuk menekan jumlah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.Usaha penanganan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pihak kepolisian yaitu memberikan sosialisasi kepada anggota masyarakat tentang bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, memberikan pembinaan kepada anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan, mendirikan ruang dan pelayanan khusus dan membentuk unit pelayanan perempuan dan anak. Perhatian keluarga terhadap seorang anak sangat penting karena dapat mengontrol seorang anak untuk tidak melakukan tindak pidana penganiayaan. Setidaknya lembaga-lembaga yang terkait dan bertanggung jawab dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya di Kota Padang Panjang kiranya lebih berperan aktif dalam hal penegakan serta memikirkan langkah-langkah yang konkrit dan efisien. Kendala Kepolisian dalam penegakan terhadap tindak pidana penganiayaan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang Panjang diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak sebagai makhluk yang harus dilindung, kurangnya sosialiasi yang dimulai dari lingkungan terkecil, seperti keluarga, sekolah dan lingkungan tempat tinggal tentang perlindungan terhadap hak-hak anak, adanya pengaruh buruk perkembangan teknologi yang semakin pesat dan tidak ada tindakan penyaringan dari pemerintah untuk menampilkan sajian yang layak dinikmati oleh anak dan korban atau saksi masih sungkan untuk menceritakan cerita atau kejadian sebenarnya ke penyidik apabila tindak penganiaayaan yang dialami korban dirasa masih belum terlalu membahayakan jiwa korban.

346.07
FAN
p

PENGAWASAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI BIDANG KESEHATAN DI KOTA PADANG (Studi Kasus Rumah Sakit Hermina Padang)

Fani Paramitha, 1510111111, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis, 56 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP bertujuan untuk memudahkan proses perizinan dan non perizinan dalam penanaman modal. DPMPTSP merupakan instansi khusus yang bergerak dibidang penanaman modal yang diberi kewenangan melaksanakan kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang merupakan salah satu sumber dana dan jasa dalam pembangunan untuk negara yang sedang berkembang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap masalah dengan cara membandingkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan dengan produk hukum yang berlaku terhadap objek penelitian tersebut. Dalam skripsi ini perumusan masalah yang dibahas adalah : a) Bagaimana Pengawasan DPMPTSP terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri bidang kesehatan di Kota Padang, b) Apa kendala yang dihadapi oleh DPMPTSP terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri bidang kesehatan di Kota Padang dan apa upaya dalam mengatasi kendala tersebut. DPMPTSP Kota Padang memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan dikarenakan tidak sesuai dengan produk hukum yang menjadi landasannya yaitu Perwako No.28 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa DPMPTSP Kota Padang mengalami beberapa kendala perizinan dibidang kesehatan yang dimana Dinas Penanaman Modal belum mempunyai SDM yang mumpuni terkait pengawasan terhadap bidang kesehatan tersebut, sehingga terjadi benturan kewenangan dengan perizinan Dinas Kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan DPMPTSP Kota Padang untuk mengatasi masalah tersebut adalah Dinas Penanaman Modal akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait perizinan dibidang kesehatan, Dinas Penanaman Modal akan menanambah SDM yang mampu dan kompeten dalam perizinan bidang kesehatan serta Dinas Penanaman Modal meminta pemeritah agar merevisi peraturan walikota terkait wewenang yang dilimpahkan dalam pemberian izin sesuai dengan kemampuan Dinas Penanaman Modal agar tidak terjadinya benturan kewenangan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

342
FAN
p

PENGISIAN JABATAN SEKRETARIS DAERAH OLEH PELAKSANA HARIAN BUPATI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Fany Fiola, 1510112176, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2018, 86 Halaman

ABSTRAK

Pemerintahan Daerah menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Sekretariat Daerah.Kepala Daerah dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah yang untuk daerah Kabupaten disebut dengan Bupati dan Wakil Bupati. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda sebagaimana diatur di dalam Pasal 65 dan 66 UU Pemda. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan atau tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat digantikan oleh Wakil Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah yang menggantikan Kepala Daerah yang berhalangan sementara berkedudukan sebagai Pelaksana Harian (Plh). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Plh, Wakil Kepala Daerah tidak berwenang melakukan tindakan/ keputusan yang bersifat strategis, contohnya mutasi Pegawai Negeri Sipil. Namun di Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi pengangkatan PNS yakni Sekretaris Daerah oleh Wakil Bupati yang pada saat itu berkedudukan sebagai Plh Bupati Lima Puluh Kota yang dilakukan tanpa adanya sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dan tanpa adanya izin dari Bupati maupun izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimana konsekuensi hukum pengisian jabatan Sekretaris Daerah oleh Pelaksana Harian Bupati di Kabupaten Lima Puluh Kota? 2) Bagaimana penyelesaian pengisian jabatan Sekretaris Daerah oleh Pelaksana Harian Bupati di Kabupaten Lima Puluh Kota? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis- sosiologis, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawamcara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yakni : 1) pengisian jabatan Sekda yang dilakukan oleh Plh Bupati tidak sah sehingga Surat Keputusan Pengangkatan tersebut dicabut karena cacat wewenang dan cacat prosedurnya 2) pengisian jabatan Sekda yang dilakukan oleh Plh Bupati berakhir setelah dilakukan pencabutan terhadap SK pengangkatan Sekda oleh Plh Bupati.

Kata kunci : PNS, Sekda, Pelaksana Harian (Plh) Bupati, JPT

343.09
FAR
p

PENGAWASAN OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VI TERHADAP KETAATAN BAKU TINGKAT KEBISINGAN OLEH PT ANGKASA PURA II CABANG BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU

Farah Faadilah Wara.J, 1510112072, Fakultas Hukum, 2019, 74 halaman

ABSTRAK

Otoritas Bandar Udara memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara. Unit penyelenggara penerbangan PT Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau berada di bawah pengawasan Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah VI. Peningkatan aktifitas penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau berbanding lurus dengan peningkatan dampak pencemaran udara berupa kebisingan. Kebisingan akan memberikan dampak negatif pada lingkungan hidup jika melebihi baku tingkat kebisingan yang diatur dalam Kepmen LH No. 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengawasan Otoritas Bandar Udara Wilayah VI terhadap ketaatan baku tingkat kebisingan oleh PT Angkasa Pura II di Bandara Internasional Minangkabau? 2) Bagaimana kendala dalam pengawasan Otoritas Bandar Udara Wilayah VI terhadap ketaatan baku tingkat kebisingan oleh PT Angkasa Pura II di Bandara Internasional Minangkabau? Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dari wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yakni : 1) Pengawasan Otoritas Bandar Udara Wilayah VI terhadap ketaatan baku tingkat kebisingan di Bandar Udara Internasional Minangkabau dilakukan bersama Direktorat Jendral Perhubungan Udara. Pembagian wewenang untuk mengawasi dibidang pelestarian lingkungan hidup antara Direktorat Jendral Perhubungan Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara belum terlihat jelas. Sedangkan, Baku Tingkat kebisingan Di Bandara Internasional Minangkabau cukup tinggi terutama di apron area, melebihi Baku Tingkat Kebisingan <70dB pada hasil pemantauan tahun 2017. 2) Kendala yang dihadapi oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah VI dalam pengawasan ketaatan baku tingkat kebisingan oleh PT Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara Internasional Minangkabau berupa kendala yuridis dan kendala non-yuridis.

Kata Kunci : Pengawasan Otoritas Bandar Udara, Baku Tingkat Kebisingan, Bandar Udara Internasional Minangkabau.

341
FAR
t

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PENJAGAAN LAUT dan PANTAI (SEA and COAST GUARD) TIONGKOK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Farid Hilsak Mulyana, 1210112220, Fakultas Hukum Universitas Andalas , Tahun 2019, 85 Halaman

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 km. Pengakuan dunia Internasional atas status Indonesia sebagai negara kepulauan diperoleh pada Konferensi Hukum Laut Ketiga yang kemudian melahirkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (selanjutnya disingkat UNCLOS 1982) sebagai landasan hukum utama dalam hukum laut Internasional. Tindakan penjagaan pantai (sea and coast guard) Tiongkok di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atas claim "Nine Dash Line" tidak mempunyai legitimasi yang sah. Permasalahan yang Penulis bahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana Tinjauan Yuridis penjagaan laut dan pantai (Sea and Coast Guard) Indonesia serta Tindakan Coast Guard Tiongkok menurut Hukum Internasional dan Hukum Indonesia? (2) Bagaimana dampak dari tindakan kapal penjagaan pantai (Sea and Coast guard) Tiongkok terhadap hubungan Bilateral Indonesia dengan Tiongkok?. Metode pembahasan yang digunakan adalah pembahasan hukum normatif dengan tambahan data sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tindakan kapal penjagaan pantai (coast guard) Tiongkok di Perairan Natuna melanggar Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. Dampak dari tindakan kapal penjaga pantai (Sea and Coast Guard) Tiongkok terhadap hubungan Bilateral Indonesia dengan Tiongkok dikirimnya nota protes resmi oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Tiongkok melalui Kementerian Luar Negeri. Dengan demikian, kedepannya Pemerintah Indonesia harus meningkatkan keamanan dengan membangun pangkalan Militer di wilayah Natuna, apabila kejadian serupa kembali terjadi, pemerintah Indonesia harus membawa kasus tersebut ke Mahkamah Hukum Laut Internasional.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, UNCLOS 1982, Zona Ekonomi Eksklusif, Sea and Coast Guard, Nine Dash Line, Hubungan Bilateral

345.6
FAR
a

ANALISIS KASUS HACKING "OPERATION BUGDROP" DITINJAU DARI BUDAPEST CONVENTION ON CYBERCRIME

Farras Olif Jonamy, 1310112095, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 56 Halaman

ABSTRAK

Perkembangan teknologi saat ini sudah semakin pesat, dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai teknologi informasi dan komunikasi, membawa banyak dampak positif maupun negatif. Pada akhirnya, banyak manusia itu sendiri yang melakukan penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi komputer, yang kemudian meningkat menjadi tindak kejahatan di dunia maya atau lebih dikenal sebagai cyber crime. Salah satu contoh kasus cybercrime yang dibahas dalam skripsi ini adalah "Operation BugDrop". Pada pembahasan skripsi ini akan dibahas bagaimana pendekatan hukum internasional terhadap kasus ini dan apa yang terjadi di lapangan. Permasalahan yang dibahas terdiri atas : (1) 1. Bagaimanakah kasus hacking "Operation Bugdrop" ditinjau dari Hukum Internasional ? (2) Bagaimana akibat hukum dari kasus hacking "Operation Bugdrop" ditinjau dari Hukum Internasional ?penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan pada penulisan ini adalah (1) "Operation Bugdrop" merupakan salah satu contoh kasus cybercrime yang menimbulkan banyak kerugian. (2) Cybercrime sebagai salah satu tindak kejahatan yang harus diberantas dan dibuat aturan baru yang lebih relevan.

343.09
FEB
p

PENGAWASAAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SUNGAI JANIAH OLEH CAMAT GUNUNG TALANG KABUPATEN SOLOK

Febrio Pratama. 1510111188. Hukum Administrasi Negara. FakultasHukum Universitas Andalas. 89 Halaman.Tahun 2019

ABSTRAK

Camat Gunung Talang memiliki wewenang dalam pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok, peraturan bupati ini mulai berlaku pada tahun 2017. Pengawasan yang dilakukan oleh Camat bertujuan agar semua pengelolaan keuangan nagari dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun kenyataannya pada pertengahan tahun 2018 ditemukan adanya indikasi penyelewengan pengunaan Dana Nagari Sungai Janiah oleh mantan Bendahara Nagari Sungai Janiah, indikasi ini diketahui setelah yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatannya karena mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif DPD RI pada Pemilu 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan wewenang Camat dalam pengawasan pelaksanaan APBNagari Sungai Janiah, serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan pelaksanaan APBNagari Sungai Janiah oleh Camat Gunung Talang. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Gunung Talang dan Nagari Sungai Janiah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan narasumber yang kompeten dan relevan dengan topik yang dibahas, yaitu Camat Gunung Talang dan Sekretaris Nagari Sungai Janiah. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, pengawasan dilakukan dengan pembentukan tim evaluasi dan monitoring berdasarkan instruksi bupati, serta struktur keanggotaan tim ditetapkan dengan SK camat. Pelaksanaan pengawasan ini dirasa kurang maksimal dan efiktif karena salah satu pasal dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 25 Tahun 2016 yaitu Pasal 3 Ayat (2), yang menyatakan pelimpahan kewenangan disertai pelimpahan personil, sarana dan prasarana, serta pembiayan hingga saat ini tidak terealisasi, hal inilah yang menjadi pengahambat pelaksanaan wewenang bupati yang dilimpahkan kepada camat khususnya dalam pengawasan pelaksanaan anggran pendapatan dan belanja nagari.

344.09
FAT
k

KONSTITUSIONALITAS PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA BARAT SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PASCA REFORMASI

Fatratul Wahyudi, 1510112113, Fakultas Hukum Universitas Andalas PK V (Hukum Tata Negara), 71 Halaman

ABSTRAK

Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah hidup dan berkembang sejak dahulu hingga sekarang. Hingga masuknya otoritas negara kedalam Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat yang mengubah nagari menjadi desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, hingga Pemerintah di Sumatera Barat dalam mempertahankan eksistensinya mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Daerah Provinsi Tingkat I Sumatera, Namun Perda tersebut tidak mampu mempertahankan eksistensi nagari. Dalam karya Ilmiah ini dengan memakai metode yuridis normatif rumusan permasalahan yang akan dikaji adalah terkait 1) Bagaimana konstitusionalitas atau perkembangan peraturan perundang-undangan Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat sebagai Kesatuan Masyarakat Hyukum Adat Pasca Reformasi 2) Bagaimana peran Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat pasca reformasi. Dan hasil pembahasan dari rumusan masalah tersebut adalah pada pasca reformasi dengan jatuhnya rezim pemerintahan orde baru telah membawa perubahan dari sistem pemerintah sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah atau dikenal undang- undang otonomi daerah yang memberikan peluang bagi dihidupkannya kembali bentuk pemerintahan terendah asli jika masyarakat setempat menginginkannya, undang-undang ini yang menjadi landasan kembalinya sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dengan regulasi pertama yakni keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari, selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, hingga yang terakhir Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari. Peraturan daerah tersebut lahir karena perkembangan undang-undang yang berlaku tentang pemerintah daerah yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan-peraturan tersebut yang menjadi landasan dalam menjalankan Pemrintahan Nagari di Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan juga terdapat pengakuan dalam konstitusi terkait kesatuan masyarakat hukum adat pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”, maka dengan demikian Pemerintahan Nagari memiliki aturan dan regulasi yang jelas baik dalam konstitusi maupun peraturan perundang- undangan di bawahnya.

341.8
FAU
u

URGENSI RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL TENTANG PENGUNGSI BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PENGUNGSI SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Fauzan Helmi Hasibuan, 1510112128, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 134 Halaman, 2019

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusi negara merupakan dasar pembentukan peraturan. Undang-Undang Dasar terbentuk atas persetujuan bersama bangsa Indonesia yang dirumuskan menjadi satu kesatuan. Adanya amanat dalam Undang-Undang Dasar untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia kepada setiap individu adalah merupakan kewajiban pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus mematuhi segala ketentuan yang dimuat di dalam konstitusi negara. Indonesia memiliki sifat politik luar negeri bebas dan aktif.. Dalam perannya sebagai negara transit, Indonesia memiliki peraturan yang mengatur mengenai penanganan pengungsi yang ada yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Indonesia selama ini hanya berperan sebagai negara persinggahan bagi para pengungsi yang akan melanjutkan perjalanannya ke negara ketiga. Indonesia tidak menerima pengungsi untuk menetap tinggal di negaranya selamanya, hal ini dikarenakan Indonesia terkendala peratifikasian Konvensi dan Protokol Internasional mengenai Status Pengungsi. Sebenarnya Indonesia telah memiliki beberapa peraturan yang memungkinkan Indonesia untuk meratifikasi konvensi dan protokol internasional tesebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif penulis memiliki dua rumusan masalah yang ingin dibahas yakni mengenai 1) Bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan pengungsi di Indonesia, 2) Bagaimana urgensi sehingga pemerintah harus meratifikasi perjanjian dan protokol internasional tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, memang sudah seharusnya Indonesia sudah meratifikasi konvensi dan protokol internasional mengenai status pengungsi tersebut guna mendukung terwujudnya perlindungan bagi setiap manusia yang berada di wilayah Negara Indonesia, dan adanya ketidaksesuaian antara amanat dalam Perpres yang ada dengan apa yang menjadi hak dasar bagi pengungsi dikhawatirkan dapat menjadi dampak negatif bagi citra bangsa Indonesia di mata dunia internasional ke depannya.

341
FEB
P

PENERAPAN PRINSIP FAIR USE DALAM HAK CIPTA BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL (STUDI TERHADAP MENYANYIKAN ULANG (COVER VERSION) SUATU KARYA SENI MUSIK DAN PEMUBLIKASIANNYA DI JEJARING MEDIA SOSIAL)

Febrina Nesrita Fitriani, 1410111067, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 89 halaman, 2019

ABSTRAK

Fair use merupakan salah satu prinsip hak cipta yang dalam kondisi tertentu, memberikan izin kepada seseorang untuk menggunakan materi berhak cipta dengan cara yang wajar tanpa persetujuan pencipta. Prinsip fair use telah diakui oleh banyak Negara dan telah diterapkan dalam ketentuan hukum nasional negara, termasuk di Indonesia dan Amerika Serikat. Namun dalam perkembangannya fair use belum mengatur secara jelas mengenai penggunaan yang wajar terhadap karya seni musik, terutama dalam cover version sebuah lagu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan : (1) Penerapan prinsip fair use dalam hak cipta berdasarkan ketentuan hukum internasional dan nasional serta kaitannya dengan menyanyikan ulang (cover version) suatu karya seni musik, (2) Perbandingan penerapan prinsip fair use dalam hak cipta di Indonesia dan Amerika Serikat. Metode penulisan hukum yang penulis gunakan bersifat normatif, dimana penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari masalah diatas adalah : (1) penerapan fair use di dalam TRIPs berlaku dengan batasan, pertama tidak bertentangan dengan tata cara eksploitasi yang normal, kedua tidak merugikan kepentingan sah pemegang hak cipta, dan yang terakhir mengacu pada ketentuan dalam Bern Convention dan Rhome Convention. Sedangkan WIPO Copyright Treaty memberikan hak kepada Negara anggota untuk membentuk aturan sendiri. Dalam UUHC, tindakan fair use harus lah sesuai dengan UUHC serta tidak merugikan kepentingan yang wajar pencipta, (2) Jika dibandingkan, penerapan fair use di Indonesia masih belum memiliki faktor tegas mengenai kualifikasi tindakan fair use, sedangkan di Amerika Serikat telah menyediakan 4 faktor kualifikasi yang dicantumkan dalam US Copyright Act 1976 sebagai landasan dari tindakan fair use.

Kata kunci: Fair use, Penggunaan yang wajar, Cover version, Pembatasan dan Pengecualian hak cipta.

341
FEB
p

PELAKSANAAN HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (RIGHT TO SELF DETERMINATION) DALAM KASUS REFERENDUM KOSOVO TAHUN 1991 DAN REFERENDUM CATALUNYA 2017 DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Febry olan Putra, 1510111021, Fakultas Hukum Universitas Andalasa, 68 Halaman , 2019

ABSTRAK

Hak menentukan nasib sendiri (Right to self Determiantion) merupakan suatu hak yang dimiliki oleh bangsa atau dalam naskah aslinya disebut "People's" agar terbebas dari setiap tindakan penjajahan, konolialisasi, pendudukan, penguasaan dan eksploitasi asing Pasal 55 Piagam PBB dan dalam Resolusi PBB Nomor 1514 (XV), hak inilah yang digunakan oleh Kosovo dan Catalunya untuk mencapai kemerdekaanya melalui referendum hal dilatarbelakangi oleh tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh negara induknya, walaupun dilatarbelakangi oleh permasalahan yang sama, namun referendum tersebut menghasilkan sesuatu yang berbeda terhadap dua wilayah tersebut dengan hak tersebut Kosovo berhasil menjadi suatu negara yang berdaulat sedangkan Catalunya sampai saat ini masih menjadi wilayah integritas Spanyol, berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini merumuskan permasalahan yaitu: 1). Bagaimana pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri (Right to Self Determination) dalam kasus referendum Kosovo 1991 dan referendum Catalunya 2017?, 2). Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanan hak menetukan nasib sendiri (Right to Self Determination) antara referendum Kosovo 1991 dan referendum Catalunya 2017?, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Yuridis yaitu dengan mempelajari data-data sekunder atau data kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1). Ada perbedaan pelaksanaan antara hak menentukan nasib sendiri melalui referendum oleh Kosovo 1991 dan Catalunya 2017, Salah satunya adanya intervensi dari NATO dalam kasus pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri Kosovo 1991, 2). Sedangkan hambatan dalam pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri oleh kedua wilayah tersebut adalah tidak mendapatkan izin dari negara induknya, tidak mengetahui secara pasti bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan hak ini dan tidak mengetahui syarat dan dalam hal apa hak ini bisa dilaksanakan, namun hal ini bisa terjadi bukan murni karena ketidaktahuan wilayah tersebut akan tetapi memang karena sedikitnya aturan yang menyinggung hak ini ditambah lagi dengan sumirnya aturan tersebut.

Kata kunci : Hak menentukan nasib sendiri, referendum, Kosovo, Catalunya

347.05
FEB
p

PELAKSANAAN PRINSIP FREE PRIOR AND INFORMED CONSENT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HA KATAS TANAH PADA MASYARAKAT ASLI DI INDONESIA DI TINJU DARI HUKUM INTERNASIONAL.

Feby Nurhalimah 1510111080, Fakultas Hukum Universitas Andalas,2019, 70 Halaman, Pembimbing : Dr. Mardenis, S.H., M.SI. Dan Dr. DelfiYanti, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Penerapan prinsip Free Prior and Informed Cconsent (FPIC) merupakasn persoalan lama di Indonesia. Pemerintahan Indonesia mempunyai kewajiban secara hukum untuk melibatkan masyarakat sesuai dengan pasal 18B UUD 1945 yaitu mengakui dan menghormati komunitas adat/tradisional sesuai dengan hukum budaya tradisional mereka. Hal ini menjadi gagasan pengaturan dalam Free Prior and Informed Consent (FPIC). Namun terjadi pelanggaran hak masyarakat asli oleh perusahaan merupakan indikasi dari kegagalan komunikasi dan rendahnya tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skrip ini adalah bagaimana pelaksanaan prinsip Free Prior and Informed Consent (FPIC) dalam rangka perlindungan masyarakat asli atas tanah di Indonesia ditinjau dari hukum Internasional dan apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanan prinsip Free Prior and Informed Consent dalam rangka perlindungan masyarakat asli atas tanah di Indonesia. Penulisan ini menggunakan teknik penulisan yuridis normatif dimana pendekatan penelitian akan menggunkan kajian kepustaan atau library research. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1.) Pelaksanaan FPIC yang diatur dalam Pasal 3,4,5,10,18,19,20,26,28,32,34 pada Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on The Rights of Indigenous People/UNDRIP) dan Pasal 5,15,16 Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) 169 keduanya memberikan dasar pemikiran sekaligus dasar pengaturan atas kepemilikan tanah masyarakat asli. Masyarakat asli tidak boleh dipindahkan secara paksa hanya dimungkinkan sebagai tindakan pengecualian dan hanya dilaksanakan setelah memperoleh FPIC dari masyarakat asli yang bersangkutan, jika ini tidak diperoleh, maka prosedur yang sesuai harus diadakan, termasuk hak untuk kembali lagi ketanah mereka. 2.) Hambatan dalam pelaksanaan FPIC yaitu adanya intervensi dari pihak luar yang membuat adanya batasan dalam memenuhi hak masyarakat asli, kurangnya pengetahuan akan besarnya hak yang mereka miliki untuk mentukan nasib sendiri dalam menerapkan prinsip FPIC agar tidak terjadinya konflik dalam pembangunan.

Kata kunci : Pelaksanaan; Principle Free Prior and Informed Consent (FPIC) Perlindungan Hak Atas Tanah ; Masyarakat Asli di Iindonesia dan Hukum Internasional

345
FEN
p

PELAKSANAAN DISKRESI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN (Studi Di Wilayah Hukum Polres Kota Payakumbuh)

Fendro Purnama, 1510112040, Fakultas Hukum Universitas Andalas ,Tahun 2019 ,75 Halaman

ABSTRAK

Diskresi adalah kekuasaan/wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum. Lahirnya kewenangan diskresi pada Kepolisian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 18 Ayat (1) dan (2). Tindak Pidana Penganiayaan Ringan yang dilakukan oleh seseorang diatur dalam Pasal 352 KUHP. Diantaranya Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi di Kecamatan Mungo. Adapun rumusan masalah yang penulis kaji yaitu pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah hukum Polres Kota Payakumbuh dan pertimbangan Penyidik Kepolisian Resor Kota Payakumbuh dalam melakukan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan ringan. Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, yaitu uraian yang penulis lakukan terhadap data berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian ini diketahui. (1). Bahwa pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah hukum Polres Kota Payakumbuh ialah dengan adanya laporan suatu tindak pidana yang terjadi. Polisi yang mendapat laporan tersebut langsung menghubungi Bhabin Kamtibmas untuk menyelesaikan perkara tersebut di RT Kelurahan tempat terjadinya tindak pidana dengan cara kekeluargaan/damai. Tidak tercapainya kata kesepatakan damai di tingkat Kelurahan, maka korban tetap membuat laporan resmi ke Polres Kota Payakumbuh. Dengan adanya laporan resmi tersebut, ditunjuklah penyidik untuk memeriksa perkara ini penganiayaan ringan. Karena tindak pidana yang terjadi ialah tindak pidana ringan, maka penyidik menyarankan perkara ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan supaya lebih efektif. Polisi disini tidak berpihak ke siapapun, hanya sebagai penengah dalam perkara tersebut. Dengan tercapainya kata kesepakatan damai antar pihak, maka dibuatlah surat pernyataan damai dan diajukan ke Kapolres Kota Payakumbuh. Sehubungan dengan adanya surat pernyataan damai antar pihak yang berperkara, maka penyidik kepolisian Polres Kota Payakumbuh mengambil tindakan diskresi berupa tidak melanjutkan perkara tersebut ke tahap penuntutan. (2). Pertimbangan Penyidik Kepolisian Resor Kota Payakumbuh untuk melakukan diskresi terhadap tindak pidana penganiayaan ringan : a).Korban dan tersangka bertempat tinggal di daerah yang sama. b).Tersangka telah menyadari kesalahannya dan sudah minta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanya. c).Sudah dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan agar perkara selesai dengan solusi terbaik. d).Diskresi ditarapkan secara situsional. e).Menghindari terjadinya penumpukan perkara. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan diskresi adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, hukum tidak tertulis yang berlaku dimasyarakat, pendapat para ahli dan Yurisprudensi

Kata Kunci: Diskresi, Penyidik, dan Penganiayaan.

346.01
MOH
a

AKIBAT HUKUM PUTUSAN IZIN POLIGAMI DAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA PADANG DALAM PERKARA NOMOR 1073/Pdt.G/2018/PA.Pdg

MOHAMAD ZULFIKAR ALI, 1510111066, FAKULTAS HUKUM, 2019, 76 HALAMAN

ABSTRAK

Suami atau istri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama dan harta bawaan. Dalam pernikahan poligami maka akan timbul suatu sengketa mengenai harta bersama, sehingga diperlukan suatu aturan yang jelas mengenai penetapan dan pembagian harta tersebut. Lembaga peradilan akan menjadi media bagi suami istri yang bersengketa untuk menuangkan semua argumentasi dan masalah mereka. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses Proses Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Pdg 2) Akibat Hukum yang Timbul dengan Penetapan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1073/Pdt.G/2018/PA.Pdg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normaitf, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Hasil penelitian ini bahwa proses berperkara izin poligami di Pengadilan Agama Padang yaitu permohonan izin poligami, pemanggilan para pihak, upaya damai, sidang pemeriksaan, pembuktian, penetapan, biaya panjar perkara dan pelaksanaan poligami yang berpedoman pada Pasal 3-5 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 40- 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Pasal 55- 59 Kompilasi Hukum Islam serta Buku 2 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menurut hukum acara permohonan poligami di Pengadilan Agama Padang. Akibat hukum atas dikabulkannya perkara izin poligami yaitu istri kedua tidak berhak atas harta bersama istri pertama dan sebaliknya sebab keberadaan harta bersama tersebut terhitung sejak akad perkawinan dengan istri, suami harus menafkahi istri dan anak-anaknya sesuai kewajiban suami dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI.

Kata Kunci: izin poligami, harta bersama

341
FIN
t

TINJAUAN PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL TENTANG INTER- GENERATIONAL EQUITY RESPONSIBILITY DALAM RANGKA PENERAPAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT DI SEKTOR PERTAMBANGAN INDONESIA

Fina Izmi Canpil, 1510112025, Program Kekhususan Hukum Internasional (PK VI), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 78 halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam, salah satu Sumber Daya Alam yang banyak terdapat di Indonesia yaitu bahan tambang seperti emas, batubara, minyak dan gas bumi dan lain sebagainya. Untuk mengambil bahan tambang tersebut dari alam harus dilakukan dengan prosedur dan cara yang tepat agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Bahan tambang merupakan Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga harus diambil dengan proses yang ramah lingkungan agar tetap bisa dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Generasi sekarang memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan agar tetap bisa dimanfaatkan oleh generasi mendatang, hal ini merupakan salah satu prinsip yang termuat dalam hukum internasional yang disebut dengan prinsip tanggungjawab antar generasi atau prinsip Inter-Generational Equity Responsibility. Indonesia merupakan salah satu negara yang terikat dengan prinsip Inter-Generational Equity Responsibility, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan prinsip Inter- Generational Equity Responsibility secara sungguh-sungguh. Permasalahan yang akan dibahas yaitu : (a) Apa syarat penerapan prinsip Inter-Generational Equity Responsibility di Indonesia? (b) Bagaimana penerapan prinsip Inter-Generational Equity Responsibility dalam hukum pertambangan di Indonesia? Metode yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian adalah metode penelitian normatif. Syarat penerapan prinsip Inter-Generational Equity Responsibility di Indonesia ada 3 yaitu : pertama, terikat pada Deklarasi Rio (Soft Law). Kedua, mempunyai Peraturan Perundang-Undangan Nasional mengenai Lingkungan Hidup. Ketiga, mempunyai lembaga Lingkungan Hidup sebagai alat yang akan menjalani dan mengawasi Undang-Undang yang telah dibentuk agar terlaksananya prinsip Inter- Generational Equity Responsibility. Penerapan prinsip Inter-Generational Equity Responsibility dalam hukum pertambangan Indonesia yaitu kewajiban memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, kewajiban memiliki izin lingkungan dan memiliki Pejabat pengawas dan penegakan hukum lingkungan.

Kata Kunci : Tinjauan Prinsip Inter-Generational Equity Responsibility, Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, Hukum Pertambangan Indonesia.

342
FIS
p

PENGATURAN DAN TATA CARA PEMBERHENTIAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA (STUDI KASUS PEMBERHENTIAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PERIODE 2014-2019)

Fistho Frianda Yuland.1410112045.Fakultas Hukum Universitas Andalas.65 Halaman.Tahun 2019

ABSTRAK

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum selesai waktunya untuk menjabat dalam satu periode dengan sewaktu-waktu ia dapat diberhentikan. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan tata cara pemberhentian ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota menurut peraturan perundang-undangan terkait dan apakah pemberhentian Erisman sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang telah sesuai dengan peraturan yang mengatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan tata cara pemberhentian ketua DPRD kabupaten/ kota menurut peraturan perundang-undangan terkait dan untuk mengetahui pemberhentian Erisman sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang telah sesuai dengan peraturan yang mengatur pemberhentian ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, badan hukum atau badan pemerintahan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif yaitu berupa uraian terhadap data yang terkumpul berdasarkan peraturan perundang- undangan, pandangan dari para ahli dan diuraikan dengan kalimat-kalimat. Dalam hasil penelitian ini, pengaturan yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan pemberhentian terhadap ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015, dan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 4 Tahun 2015. Dalam pengaturan tersebut terdapat dua macam tata cara pemberhentian ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota yaitu, Pertama tata cara berdasarkan usulan partai politik. Kedua adalah tata cara melalui pengaduan kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota. Pemberhentian Erisman telah sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi aturan-aturan tersebut perlu ditinjau ulang dan diperbaiki agar kasus yang menimpa Erisman tidak terulang lagi dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia kedepannya.

342
FIZ
p

PENGAMBILAN SUMPAH ADVOKAT OLEH PENGADILAN TINGGI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36 PUU-XII/PUU- XIII/2015

Fiza Audila Sari, 1210112048, Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2019 Halaman, Pembimbing: Didi Nazmi, S.H., M.H dan Alsyam,S.H., M.H

ABSTRAK

Salah satu aktor penegak Hukum yang sangat penting adalah profesi Advokat. Pengaturan mengenai keberadaan Advokat baik sebagai individu maupun organisasi profesi yang dituangkan dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban, serta pengawasan pelaksanaan profesi. Sejak Undang- Undang Advokat diundangkan pada April 2003, ternyata tujuan dan sasaran yang hendak dicapai belum dapat dipenuhi, terutama dalam mewujudkan wadah tunggal Advokat, yaitu sebuah organisasi yang menjadi naungan untuk seluruh Advokat di Indonesia. Namun terbentuknya PERADI ternyata tidak otomatis membuat Advokat berada pada satu naungan organisasi, pada perkembangannya di internal organisasi Advokat itu sendiri timbul berbagai permasalahan salah satunya dalam pengambilan sumpah Advokat seperti yang dituangkan dalam pasal 2 mengenai pengangkatan Advokat yaitu sarjana hukum yang telah mengikuti pendidikan Advokat, telah lulus ujian Advokat , magang selama 2 tahun serta melaksanakan pengambilan sumpah dalam sidang terbuka oleh pengadilan tingi di wilayah domisili hukumnya.Dalam kasus ini Penulis merumuskan dua permasalahan yaitu: Bagaimana Pengambilan sumpah Advokat pasca Putusan Nomor 36/PUUXIII/2015 dan surat edaran Mahkamah Agung terkait sumpah advokat dan Bagaimana kedudukan organisasi Advokat pasca Putusan tersebut dan Surat edaran Mahkamah Agung? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan metode Yuridis Normatif. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengganti frasa pasal 4 ayat (1) tersebut karena menurut hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi tetap mengakui wadah tunggal advokat adalah Peradi, Akan tetapi, karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, bagaimana pun keputusan itu harus ditaati oleh semua pihak. Adapun saran dari penulis yaitu agar putusan mahkamah konstitusi tidak semakin dijadikan bahan pertikaian antara Peradi dan KAI, penulis beranggapan sebaiknya untuk merevisi undang-undang advokat ini melalui legislative review agar semakin jelas kemana tujuan dan bentuk Organisasi Advokat bangsa ini.

341
FRE
p

PENGATURAN PENGAMANAN BARANG BERBAHAYA (DANGEROUS GOODS) DI BANDAR UDARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Frendi Syafriadi, 1410112075, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 75 Halaman

ABSTRAK

Pengamanan terhadap barang berbahaya (dangerous goods) sejatinya memerlukan penanganan khusus dalam pemeriksaan, penempatan dan pengemasannya. Penting untuk diketahui adalah aturan terhadap pengamanan barang berbahaya di bandar udara serta harmonisasi aturan tersebut kedalam hukum nasional Indonesia. Permasalahan tersebut melahirkan rumusan masalah; Bagaimana pengaturan pengamanan terhadap barang berbahaya (dangerous goods) di bandar udara menurut hukum internasional dan hukum nasional ?, Bagaimana implementasi pengamanan terhadap barang berbahaya (dangerous goods) di bandar udara di Indonesia ?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analistis. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa pengamanan barang berbahaya menurut hukum internasional diatur dalam Konvensi Chicago 1944 yang kemudian secara khusus dijelaskan dalam Annex 18 The Safe Transport of Dangerous Goods by Air mengenai klasifikasi barang berbahaya, pembatasan barang berbahaya pengemasan serta pelabelan dan penandaan. Dalam perkembangannya, barang berbahaya juga diatur dalam 2018 Lithium Battery Guidance Document khusus mengenai pengisi baterai portabel (powerbank) dan baterai lithium cadangan. Ditingkat nasional, tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan sebagai aturan utama dan dikuatkan oleh peraturan pelaksana lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2017 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional dan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 015 Tahun 2018. Kemudian implementasi pengamanan terhadap barang berbahaya yang dilakukan oleh aviaton security di Indonesia diadopsi dari Annex 17 Security, Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference yang merupakan bahagian daripada Konvensi Chicago 1944.

Kata Kunci : Pengamanan, Barang Berbahaya (dangerous goods), Bandar Udara

345
FRI
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PUSAT TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TANPA IZIN EDAR

Frischa Elsafara 1510111048. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV (Hukum Pidana. 94 Halaman.Tahun 2018.)

ABSTRAK

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pusat merupakan sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana peredaran obat secara ilegal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yakni tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat yang tidak sesuai dengan standar obat diatur dalam Pasal 196, tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar diatur dalam Pasal 197, dan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat tanpa keahlian dan kewenangan diatur dalam Pasal 198. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah (1)Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Tanpa Izin Edar? (2)Apakah kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Tanpa Izin Edar? (3)Apakah upaya mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Badan Pengawas Obat dan Makanan Pusat Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Tanpa Izin Edar? Metode penelitian yang digunakan didalam penulisan ini bersifat yuridis sosiologis (empiris). Adapun hasil penelitian yaitu penyidik melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana, Meminta keterangan dari orang atau badan hukum, meminta keterangan dari saksi-saksi dan ahli, meminta barang bukti, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Kendala internal diantaranya Belum optimalnya pemberdayaan PPNS BPOM Pusat, Tidak adanya wewenang dari penyidik PPNS BPOM untuk melakukan penahanan, belum optimalnya kemampuan PPNS BPOM Pusat dalam hal membuktikan unsur pasal, tersangka/saksi mempersulit proses penyidikan. Upaya mengatasi kendala antara lain adalah, MOU dengan Polisi dan kerjasama dengan Polisi.

343.02
GAM
p

PELAKSANAAN FUNGSI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN WILAYAH SUMATERA BARAT MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN

Gamal Abdurrahman, 1210113075, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dr.Suharizal, SH., MH., Pembimbing I, Delfina Gusman, SH., MH., Pembimbing II Halaman : 65 halaman, 2019

ABSTRAK

Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggara publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggaraan Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara dan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti adalah: (Pertama) Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman, Dalam Meningkatkan Standar Pelayanan Publik dan Kompetensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di wilayah Sumatera Barat. (Kedua) Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi Ombudsman perwakilan wilayah Sumatera Barat. (Ketiga) Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan fungsi Ombudsman perwakilan Sumatera Barat. Metode penelitian penulis gunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis, data yang digunakan data primer dan sekunder, sedangkan alat pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Data dikumpul dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (Pertama) Keberadaan lembaga Ombudsman perwakilan wilayah Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan pelayanan publik telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku namun belum berjalan efektif, hal tersebut didukung dengan masih ada masyarakat yang belum mengetahui mengenai keberadaan Ombudsman khususnya di wilayah Sumatera Barat, dan tidak tahu kemana harus melakukan pengaduan apabila terjadi maladministrasi pelayanan publik terhadap masyarakat. (Kedua) Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat memiliki kendala antara lain: Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia di Ombudsman wilayah Sumatera Barat. Penulis menyarankan sebagai berikut: Mengingat peran lembaga Ombudsman wilayah Sumatera Barat begitu penting untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta penyalahgunaan wewenang atau jabatan, Seharusnya lembaga Ombudsman wilayah Sumatera Barat menjadi lembaga yang kuat agar rekomendasi yang dikeluarkan oleh lembaga Ombudsman wilayah Sumatera Barat memiliki kekuatan hukum yang tetap dan bersifat mengikat bagi para pihak sehingga rekomendasi tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh pihak yang bersangkutan.

Kata kunci : Ombudsman, Pelayanan Publik.

345
GHI
p

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DITINJAU DARI AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION 2006 (LOMBOK TREATY)

Ghina Naufaliza S, 1410112098, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 73 halaman, 2019

ABSTRAK

Arus globalisasi dan perkembangan teknologi turut mempengaruhi terbentuknya jenis kejahatan baru yang melewati batas negara, salah satunya adalah penyelundupan manusia. Kejahatan ini melanggar kedaulatan hukum negara yang dimasuki imigran gelap. Indonesia dan Australia adalah negara yang sering menjadi sasaran sindikat penyelundupan manusia, baik sebagai negara transit maupun negara tujuan. Dalam rangka menanggulangi kejahatan tersebut, Indonesia dan Australia melakukan kerjasama yang dituangkan dalam Lombok Treaty tahun 2006. Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian terhadap pengaturan tentang tindak pidana penyelundupan manusia menurut hukum internasional serta penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia ditinjau dari Lombok Treaty. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaturan tentang tindak pidana penyelundupan manusia menurut hukum internasional dan penanggulan tindak pidana penyelundupan manusia ditinjau dari Lombok Treaty. Penelitian ini menggunakan motode penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen. Data yang diperoleh selama penelitian kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif, sehingga disajikan dalam bentuk pemaparan dan uraian hasil penelitian. Hasil penelitian dari studi kepustakaan menunjukkan bahwa : 1) Penyelundupan manusia secara internasional diatur dalam Konvensi Palermo dan Smuggling Protocol. Aturan tersebut mengatur tata cara kerjasama yang harus dilakukan negara pihak dalam penanggulangan penyelundupan manusia, selain itu masing- masing negara diharuskan mengadopsi aturan hukum tersebut kedalam hukum nasionalnya. 2) Semua bentuk kerjasama penegakan hukum dalam Lombok Treaty oleh Indonesia dan Australia telah dilakukan, akan tetapi perbedaan kebijakan sering kali menimbulkan permasalahan dalam proses pelaksanaannya. Dibutuhkan iktikad baik dalam penyelesaian sengketa yang terjadi.

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, Lombok Treaty.

345
GIA
p

PERSEPSI NARAPIDANA TERKAIT DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Perkara: Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Bsk dan Putusan Nomor 115/Pid.B/2015/PN.Bsk).

Gian Vially Aritof, 1510111077, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2019, 84 Halaman

ABSTRAK

Putusan hakim di Indonesia terhadap Terdakwa atas suatu tindak pidana menjadi sesuatu yang ditunggu karena dimungkinkan terjadi penjatuhan pidana yang berbeda meskipun tindak pidananya sama, hal ini dikenal dengan istilah disparitas pidana. Adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana atau disparitas pemidanaan pada dasarnya adalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan, mempengaruhi pembinaan Narapidana, melemahkan rasa percaya masyarakat tehadap hukum dan aparat penegak hukum, serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah persepsi Narapidana terhadap disparitas pidana dalam putusan pemidanaan pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Perkara: Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Bsk dan Putusan Nomor 115/Pid.B/2015/PN.Bsk)? 2) Bagaimanakah dampak disparitas pidana terhadap pelaksanaan pembinaan Narapidana pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Batusangkar?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil , yakni : 1) Persepsi Narapidana terhadap disparitas pidana dalam putusan pemidanaan pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Perkara: Putusan Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Bsk dan Putusan Nomor 115/Pid.B/2015/PN.Bsk) yaitu merasa tidak adil atas putusan pemidanaan yang dijatuhi Majelis Hakim, membandingkan putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa lainnya dalam Tindak Pidana yang sejenis, melemahnya kepercayaan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia beserta aparat penegak hukumnya, dan memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana 2) Disparitas pidana tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembinaan Narapidana, baik pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan maupun tindak pidana lainnya. Semua Narapidana berperilaku baik, mematuhi ketentuan yang berlaku di dalam Rutan Kelas IIB Batusangkar, dan mengikuti semua program pembinaan yang ada. Hanya sebagian kecil Narapidana yang tidak menerima disparitas pidana.

Kata Kunci: Persepsi, Narapidana, Disparitas, Putusan Pemidanaan, Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.

345
GIT
p

PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL INDONESIA

Gitra Moraza, 1410112086, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, Pembimbing : Dr. Irzal Rias, S.H., M.H. dan Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL.

ABSTRAK

Sebagai salah satu bagian dari tindak pidana khusus, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal menjadi hal menarik untuk diteliti. Pengaturan terhadap Tindak Pencucian Uang di atur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Sedangkan Pasar Modal diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam prakteknya, pasar modal Indonesia diawasi oleh sebuah lembaga independen yang semula dilakukan oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) hingga setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan peran pengawasan tersebut dialihkan secara menyeluruh kepada OJK yang sekaligus diberi kewenangan dalam hal penyidikan. Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan OJK dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di pasar modal Indonesia dan apa kendala yang dialami OJK dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang di pasar modal Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis dan sifat penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) dan wawancara (field research). Data yang diperoleh selama penelitian ini kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif, sehingga disajikan dalam bentuk pemaparan dan uraian hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap kepala Bursa Efek Indonesia Sumatera Barat selaku lembaga penyelenggara pasar modal dan Kepala Divisi Pengawasan Pasar Modal OJK Sumatera Barat selaku lembaga pengawas pasar modal telah memberikan gambaran bagaimana suatu tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan melalui instrumen pasar modal Indonesia yang mayoritas modalnya berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian juga mengetahui sejauh mana efektifitas OJK dalam mengawasi dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pecucian uang di pasar modal Indonesia, serta apakah tidak terdapat tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain yang juga mempunyai peran penyidikan dalam bidang yang sama seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polisi Republik Indonesia.

342
GRE
k

KEWENANGAN PLT BUPATI TERHADAP MUTASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Grece Yuolanda Naipospos, 1510111118, Fakultas Hukum 2018, 60 halaman

ABSTRAK

Kabupaten Toba Samosir merupakan daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) serta didalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) bahwa sebuah Pemerintahan Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh Wakil Kepala Daerah . Pada tahun 2015 kondisi pemerintahan di Kabupaten Toba Samosir mengalami kekosongan jabatan kepala daerah dikarenakan Pandapotan Kasmin Simanjuntak selaku Kepala Daerah tersandung kasus korupsi maka dikeluarkannya SK Mendagri oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-880 tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Daerah dan sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 66 ayat (1) dijelaskan bahwa wewenang Wakil Bupati adalah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara sebagaimana diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kewenangan PLT Bupati terdapat dalam PP Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yakni Pasal 9 ayat (1) dan pada Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota bertanggung jawab kepada Menteri akan tetapi pada saat PLT Bupati tersebut menjabat yakni pada tanggal 22 April 2015 PLT Bupati Toba Samosir mengeluarkan keputusan mutasi terhadap salah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas pendidikan Kabupaten Toba Samosir. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kewenangan Pelaksana Tugas Bupati dalam mutasi jabatan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir dan untuk mengetahui implikasi hukum atas keputusan mutasi . Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan pihak Kepala SETDAKAB Toba Samosir , Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir , serta Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir yang mengetahui dan memahami permasalahan yang akan penulis tulis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa keputusan mutasi yang dikeluarkan PLT Bupati Toba Samosir tersebut tidak sah yang memutasi salah seorang PNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Selanjutnya Keputusan Mutasi yang dikeluarkan PLT Bupati Kabupaten Toba Samosir tidak diawasi oleh BKD Kabupaten Toba Samosir , sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba Samosir tidak mengetahui Keputusan Mutasi tersebut. Implikasi dari keputusan Mutasi oleh PLT Bupati Tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap PNS yang menerima Keputusan Mutasi dari PLT Kabupaten Toba samosir dapat melakukan upaya administrasi yaitu berupa banding administrasi kepada KASN karena merasa adanya kerugian materil dan imateril.

Kata Kunci : Kewenangan Pelaksana Tugas Bupati, Mutasi Pegawai Negeri Sipil, Implikasi Keputusan Mutasi

345.02
GUS
u

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA BERUPA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES PESISIR SELATAN

Gusti Randa Dwi Oktari 1410111105 Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas 74 Halaman Tahun 2019

ABSTRAK

Perubahan sosial yang demikian cepat, menyebabkan pengaruh orang tua, sekolah, dan agama menjadi tertinggal. Kenakalan anak dan remaja sudah canggih dan sulit dikontrol. Kenakalan remaja adalah tindak perbuatan sebagian para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama, dan norma-norma masyarakat, yang merugikan orang lain, ketentraman umum dan dirinya sendiri. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah-laku remaja.mMayoritas juvenile delinquency berusia di bawah 21 tahun. Perilaku kenakalan remaja menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Penggunaan narkotika di kalangan remaja dinilai memprihatinkan. Permasalahan narkoba di Indonesia bukan lagi dipandang sebagai kejahatan biasa melainkan sebuah kejahatan luar biasa. Organisasi kepolisian sebagai satu-satunya organisasi yang berhadapan langsung dengan kejahatan dalam masyarakat. Tugas dan wewenang polisi berkewajiban menegakkan hukum demi terciptanya keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjadi dorongan bagi kepolisian untuknmelakukan penegakan hukum atas permasalahan narkotika. Penulis mengangkat topik dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja berupa penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan? Dan Apakah kendala-kendala yang ditemui dari upaya kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja berupa penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan?. Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode yuridis-sosiologis, pengumpulan data primer yang dilakukan di lapangan, dengan melakukan wawancara langsung kepada Satresnarkoba Polres Pesisir Selatan. Data sekunder diperoleh dari data kepustakaan. Adapun hasil penelitian sebagai berikut: upaya yang dilakukan kepolisisan dalam menanggulangi kenakalan remaja berupa penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polres pesisir selatan oleh satresnarkoba polres pesisir selatan dengan melalui upaya preventif dan upaya represif. Kendala- kendala yang ditemui Kepolisian adalah Jarak tempuh dan durasi waktu yang kurang mendukung serta masih sangat kurangnya kerjasama masyarakat dalam membantu pihak kepolisian.

343.04
HAF
p

PENERAPAN PRINSIP KESEIMBANGAN PADA PERJANJIAN BAKU DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PERBANKAN DIGITAL (DIGITAL BANKING) OLEH BANK UMUM (STUDI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT)

Hafiz Aulia, 1510111035, Fakultas Hukum, 2019, 75 halaman

ABSTRAK

Prinsip keseimbangan merupakan hal yang sangat penting di dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital (digital banking) yaitu pada Mobile Banking dan Nagari Cash Management (NCM) terutama pada perjanjian baku dalam hal aktivasi layanan perbankan digital yang diselenggarakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari), hal ini diakibatkan karena kedudukan pihak Bank dengan nasabah dalam perjanjian baku cenderung selalu tidak seimbang.Walaupun demikian, melihat kondisi tersebut agar pihak Bank tidak semena-mena terhadap nasabah, maka ketentuan pencantuman klausula baku pada perjanjian baku ini telah diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan prosedur mendapatkan layanan Mobile Banking dan Nagari Cash Management (NCM) serta untuk mengetahui penerapan prinsip keseimbangan dalam penyelenggaran layanan perbankan digital (digital banking) pada Mobile Banking dan Nagari Cash Management (NCM). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan karyawan/ pimpinan PT. Bank Nagari yang mengetahui dan memahami permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ukuran prinsip keseimbangan yaitu dimaksudkan untuk menselaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal dalam hukum perdata, hal ini bertujuan agar kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian tidak saling dirugikan. Kendati demikian, jika ditelusuri lebih dalam masih ditemui beberapa klausula-klausula baku pada perjanjian aktivasi layanan Mobile Banking dan Nagari Cash Management (NCM) yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Kata Kunci :Prinsip Keseimbangan, Perjanjian Baku, Layanan Perbankan Digital (Digital Banking), Mobile Banking, Nagari Cash Management (NCM).

342
HAN
e

EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS II SOLOK

Hannum Klaritha, 1310111088, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 59 Halaman

ABSTRAK

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahakamah Agung (selanjutnya disebut dengan PERMA) No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perubahan PERMA mediasi ini merupakan perubahan ketiga. Sebelumnya, aturan proses mediasi diatur PERMA No.2 Tahun 2003 dan PERMA No.1 Tahun 2008. PERMA No.1 Tahun 2016 diterbitkan karena tingkat keberhasilan Perma No.1 Tahun 2008 belum sesuai harapan, dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi berdasarkan evaluasi di pengadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi dengan hasil kesepakatan dan kegagalan yang dicapai serta faktor penyebabnya menjadi bahan pertimbangan utama untuk menilai tingkat efektifitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan kefektivitasan dari PERMA mediasi ini dan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Solok. Metode yang digunakan dalam pembahasan tersebut adalah metode penelitian yuridis empiris dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dengan melaksanakan wawancara dengan hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri Solok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas serta penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Solok telah terlaksana dengan baik sebagaimana telah diatur dalam peraturan tersebut. Penerapan PERMA 2016 di Pengadilan Negeri Solok memang efektif tetapi pencapaian dengan perkara berhasil di mediasi itu tergantung kepada para pihak masing-masing. Keefektifan PERMA di Pengadilan Negeri Solok masih belum efektif hanya mencapai 6,5%. Hambatan Atau kendala dari peraturan mediasi tersebut yaitu dari para pihak dan tidak adanya dukungan advokat. Dalam hal proses mediasi penerapan itikad baik dalam PERMA No.1 Tahun 2016 mulai dikembangkan dan memiliki akibat bagi pelanggarnya. Iktikad baik yang ada di PERMA ini diharapkan dapat memperlancar suatu proses para pihak dalam menghasilkan kesepakatan.

346.02
HAR
p

PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN TERHADAP KEGIATAN ATAU USAHA YANG WAJIB UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Hardian Feril, 1510111169, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VII (Hukum Administrasi Negara), 86 halaman, 2019

ABSTRAK

Izin ligkungan merupakan keharusan bagi setiap orang dalam hal untuk melaksanakan kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup yang diatur lansung oleh UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan juga oleh PP No. 27 Tahun 2012 Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan: (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk kedalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL. Pada mulanya prosedur pemberian izin tersebt hanya berlangsung pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saja. Akan tetapi setelah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2008 Dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2018. pelaksanaan pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di laksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP). adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana prosedur pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di Kabupaten Pasaman Barat? 2) Apa saja Kendala-Kendala Dalam Pengurusan Izin Lingkungan Terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL di Kabupaten Pasaman Barat? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif, menggunakan jenis data primer dan data sekunder, sumber data didapat penulis dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa prosedur pemberian izin lingkungan terhadap kegiatan/usaha yang wajib UKL-UPL yang saat ini dilaksanakan pada DPMP2TSP juga ternyata menyertakan DLH tidak mencerminkan upaya memudahkan dan menyederhanakan dalam pelayanan publik. Justru berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis laksanakan, prosedur ini lebih rumit dibandingkan prosedur sebelumnya yang hanya melibatkan DLH saja.

Kata Kunci: Prosedur, Izin Lingkungan, UKL-UPL

343.09
HAR
p

PENGECUALIAN KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN ATAS PENGAMBILALIHAN SAHAM DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR 01/KPPU-M/2018

Haresna, 1510111016, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 88 halaman, 2019

ABSTRAK

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mewajibkan pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham dengan nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu untuk memberikan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pada perkembangannya hampir seluruh Putusan KPPU dalam perkara keterlambatan pemberitahuan atas penggabungan, peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham menyatakan terlapor terbukti bersalah dan memberikan hukuman denda keterlambatan. Putusan Nomor 01/KPPU- M/2018 menjadi putusan yang bebeda dengan menyatakan bahwa pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Erjaya Swasembada termasuk dalam pengecualian terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengecualian kewajiban pemberitahuan atas pengambilalihan saham kepada KPPU dan bagaimana pertimbangan KPPU dalam memutus Perkara Nomor 01/KPPU-M/2018. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pengecualian kewajiban pemberitahuan atas pengambilalihan saham kepada KPPU tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengecualian kewajiban pemberitahuan dapat didasarkan pada empat alasan. Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-M/2018 tidak memuat pertimbangan yang jelas untuk mengecualikan kewajiban pemberitahuan atas pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Erajaya Swasembada. Penulis memberikan saran untuk dimuatnya batasan-batasan dan mekanisme untuk menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengecualikan berlakunya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kata Kunci: Pengecualian Kewajiban Pemberitahuan, Pengambilalihan, KPPU

343.09
HAR
p

PENGAWASAN TERHADAP PEMANFAATAN TERUMBU KARANG DI PULAU UJUNG SEBAGAI OBJEK PARIWISATA PULAU-PULAU KECIL OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Harlita Novela, 1510111042, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 67 Halaman

ABSTRAK

Laut merupakan sumber kekayaan alam bagi Indonesia yang memberikan kekayaan hayati maupun non hayati, salah satunya adalah terumbu karang. Manfaat terumbu karang antara lain sebagai habitat ikan dan biota lainnya, pariwisata bahari, dan lain-lain. Untuk menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengelolaan Terumbu Karang telah diatur bahwa ruang lingkup pengelolaan terumbu karang dilakukan dalam wilayah laut kewenangan daerah salah satunya adalah pengawasan. Namun, pada fakta dilapangan masih banyak kapal dan perahu wisata yang lego jangkar sembarangan di perairan Pulau Ujung, Pariaman mengakibatkan terjadinya kerusakan ekosistem terumbu karang yang menjadi salah satu ancaman bagi pelestarian ekosistem terumbu karang. Sedangkan pada Pasal 30 huruf f Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Terumbu Karang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk membuang sauh/labuh//lego jangkar di lokasi terumbu karang atau di kawasan konservasi.Atas dasar itu penelitian ini dilakukan untuk mengemukakan permasalahan Pertama bagaimana pengawasan pemerintah terhadap terumbu karang di pulau ujung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Kedua apa saja kendala yang dihadapi dalam mengawasi kelestarian terumbu karang di Pulau Ujung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris dengan meneliti bahan kepustakaan dahulu yang dilanjutkan dengan penelitian langsung ke lapangan atau masyarakat. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Kemudian, data yang didapat dianalisis secara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian bahwa pengawasan telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yaitu berupa upaya represif yaitu operasi pengawasan berupa aksi patroli di kawasan-kawasan perairan Pulau Ujung dengan Kapal Pengawas, dan upaya preventif yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan dan pengawasan terumbu karang, namun pengawasan tidak maksimal terlaksana dikarenakan kendala yang dihadapi yaitu, keterbatasan anggaran, sedikitnya personil anggota, dan luas wilayah di kawasan perairan Pulau Ujung Kota Pariaman dan sekitarnya.

343.09

HEN

p

PEMBERIAN DAN PENGAWASAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH TERHADAP BADAN USAHA SWASTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2017

Hendrik Ari Wibowo, 1510112122, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 64 halaman, 2019

ABSTRAK

Pesatnya pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk menimbulkan persoalan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Pasal 33 Ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu upaya mewujudkan kemakmuran rakyat adalah dengan pemanfaatan kekayaan alam yang tersedia, termasuk air tanah. Air tanah memegang peranan penting dalam penyediaan kebutuhan air baku, industri, dan usaha perkotaan. Pemanfaatan air tanah dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah. Pengambilan air tanah secara tidak terkontrol menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas air tanah secara signifikan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana proses pemberian Izin Pengusahaan Air Tanah terhadap badan usaha swasta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2017 ? 2). Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait berkaitan dengan pemberian Izin Pengusahaan Air Tanah di Provinsi Sumatera Barat ? Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan Kasi Pengusahaan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan, studi dokumen yang diperoleh dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapati hasil bahwa proses perizinan air tanah sudah sesuai dengan perda yang ada. Sedangkan pengawasan sudah dilakukan namun belum maksimal. Kendala yang ditemukan diantaranya kurangnya kesadaran, kurangnya regulasi, tidak maksimalnya jumlah data, serta keterbatasan anggaran. Oleh karena itu penulis memiliki beberapa saran yaitu perlu segera dibentuk peraturan tentang air tanah secara sistematis serta peraturan teknis tentang pengawasan, peningkatan pengawasan, pemberharuan data, serta komitmen bersama dalam mengawasi perusahaan yang tidak memiliki izin.

345

HON

p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN KEBENCIAN BERDASARKAN SARA MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA PROVINSI RIAU

Honesta Prima, 1510112034, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 79 halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi selain memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum, contohnya adalah media sosial. Media sosial memberikan berbagai manfaat dan juga memiliki dampak negatif, salah satunya adalah penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan SARA. Untuk menangani tindak pidana tersebut, pihak kepolisian berwenang untuk melakukan penyidikan. Yang bertindak sebagai penyidik terhadap kasus tersebut adalah penyidik pada Ditreskrimsus Polda Provinsi Riau yang melaksanakan kewenangannya berdasarkan Pasal 7 KUHAP. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Provinsi Riau terhadap tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan SARA melalui media sosial? 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Provinsi Riau? Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Analisa dilakukan secara kualitatif. Adapun hasil penelitian sebagai berikut proses penyidikan terhadap tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian berdasarkan SARA melalui media sosial yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Krimina Khusus Polda Provinsi Riau menggunakan payung hukum dari UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari ketentuan KUHP dan KUHAP, dan beberapa pasal dalam UU ITE tetap mempertimbangkan ketentuan dalam KUHAP karena ada hal-hal yang tidak diatur dala UU ITE namun diatur dalam KUHP dan KUHAP. Namun penyidik mengalami kendala seperti kemampuan penyidik terbatas, barang bukti yang bersifat maya yang mudah dihilangkan, sarana dan prasarana yang masih kurang, pelaku menggunakan akun palsu atau nama samaran di media sosial dan anggaran yang tidak memadai. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengadakan pelatihan bagi penyidik, mengamankan barang bukti yang bersifat maya, meningkatkan sarana dan prasarana dan kerjasama dengan berbagai pihak.

343.02
HAR
p

PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN AKTA KUASA MENJUAL DALAM HAL PEMBERI KUASA MENINGGAL DUNIA DI PEKANBARU

HARMEN SYARIF, 1720123088, Program Studi Magister Kenotariatan, FakultasHukum, UniversitasAndalas, 2019, 122Halaman

ABSTRAK

Peralihan hak atas tanah yang menggunakan akta kuasa menjual sebagai dasar pembuatan akta jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru sangat banyak di minati oleh masyarakat di Pekanbaru, karena dari segi waktu, prosedur, dan biaya sangat praktis dan efisien. Menurut kitab Undang-Undang hukum perdata yaitu pasal 1795 pemberi kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si Pemberi Kuasa. Kuasa Menjual adalah suatu kemampuan dengan hak substitusi (hak yang dapat digantikan) yang diberikan oleh pemilik jaminan kepada penerima kuasa yang ditunjuk oleh pemilik jaminan, untuk menjual kepada pihak lain maupun dirinya sendiri dengan harga dan syarat yang dianggap baik oleh pemilik jaminan dan penerima kuasa. Pelaksanaan peralihan hak atas tanahnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tantang Pendaftaran Tanah. Dalam praktik dilapangan penggunaan peralihan hak atas tanah berdasarkan akta kuasa menjual tidak nampak perbedaan mana akta kuasa menjual yang masih berlaku atau tidak berlaku, karena di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru hanya memberikan syarat sebuah surat pernyataan yang isi suratnya menyatakan si pemberi kuasa masih hidup dan akta kuasa yang dibuat belum pernah dicabut yang ditandatangani oleh penerima kuasa. Dalam pasal 1813 sampai pasal 1819 KUHPerdata telah diatur cara berakhirnya pemberian kuasa. Berdasarkan uraian diatas , akan dikaji mengenai bagaimana kedudukan akta kuasa menjual dalam peralihan hak atas tanah, bagaimana proses peralihan hak atas tanah berdasarkan akta kuasa menjual dalam hal pemberi kuasa meninggal dunia di Pekanbaru, dan bagaimana akibat hukum peralihan hak atas tanah berdasarkan akta kuasa menjual dalam hal pemberi kuasa meninggal dunia di Pekanbaru, dan bagaimana akibat hukum peralihan hak atas tanah berdasarkan akta kuasa untuk menjual dalam hal pihak pemberi kuasa meninggal dunia di Pekanbaru. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dilakukan terhadap dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan. Akta Kuasa Menjual dijadikan dasar pada proses dibuatnya Akta Jual Beli balik nama dan sekaligus dijadikan alat pendaftaran peralihan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Proses peralihan hak atas tanah berdasarkan akta kuasa menjual dalam hal pihak pemberi kuasa meninggal dunia di pekanbaru tidak dapat dilakukan peralihan haknya ke Badan Pertanahan Nasional karena batal demi hukum sesuai pasal 1813, 1814,dan 1816 KUHPerdata. Akibat hukum peralihan hak atas tanah berdasarkan akta kuasa menjual dimana pihak pemberi kuasa meninggal dunia di pekanbaru adalah aktanya gugur dengan sendirinya, jika mau dilanjutkan peralihan haknya harus dilakukan terlebih dahulu proses turun waris ke ahli waris yang bersangkutan.

Kata Kunci : Peralihan Hak atas Tanah, Akta Kuasa Menjual, Pemberi Kuasa Meninggal Dunia dan Pekanbaru.

343.09
IHS
p

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI SEBAGAI KEPENTINGAN UMUM DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ihsan Kurnia, 1510111088, Fakultas Hukum, 2019, 61 Halaman

ABSTRAK

Pengadaan Tanah berkaitan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah merupakan kegiatan pengadaan tanah dengan memberikan ganti kerugian yang adil dan layak kepada pihak yang berhak. Salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah Sumatera Barat adalah pembangunan jaringan irigasi di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Selama pengadaan tanah tidak semua pihak yang terkena dampak menyetujui untuk menyerahkan tanahnya dengan alasan ganti kerugian yang diberikan terlalu kecil, dalam hal ini Tim Pengadaan Tanah melakukan sosialisasi kepada pihak yang terkena dampak. Apabila pihak yang terkena dampak dari Pengadaan Tanah tidak mensetujui maka uang dititipkan di pengadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan irigasi di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan? 2) Apa kendala yang dihadapi dalam proses pemberian ganti kerugian pada pengadaan tanah di Kecamatan Koto XI Tarusan dan bagaimana solusinya? Penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Jaringan Irigasi, Ganti Kerugian

346.06
IZD
t

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KESEPAKATAN ASEAN POLITICAL- SECURITY COMMUNITY DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Izdiharsyah Akbar1,Firman Hasan1, Sri Oktavia1 Prodi Ilmu Hukum1Fakultas Hukum Universitas Andalas1 (E-mail : Harsyah_A@hotmail.com)

ABSTRAK

ASEAN Political – Security Community (APSC) adalah perjanjian negara - negara ASEAN untuk menjamin terpeliharanya perdamain di kawasan Asia Tenggara, terjalinnya kerja sama di bidang yang berkaitan dengan politik. Perjanjian ini menimbulkan kerancuan pada regulasi dan pengimpelementasiannya. Ini disebabkan karena negara anggota ASEAN mempunyai visi dan misi, serta aturan hukum yang berbeda dalam menangani isu – isu politik dan kemanan. Dari hal itu, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana kerangka kerja. untuk menjawab pertanyaan tersebut metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan sumber data bertumpu pada data primer yaitu melalui wawancara dengan informan di lokasi penelitian. Sebagai data penujang digunakan data sekunder berupa perjanjian internasional dan instrument hukum lainnya. lokasi penelitian adalah pada kantor Sekretariat ASEAN di Jakarta dan Kantor Kementrian Luar Negeri. Diperoleh hasil bahwa kerangka kerja dari ASEAN Security – Community terbagi atas beberapa badan sektoral yang membawahi bidang tertentu melalui ASCO, AMM, SEANFWZ Commision, ADMM, ALAWMM, AMMTC, dan ARF. Tiap kesepakatan dari perundingan oleh badan – badan sektoral ini dijadikan sebagai dasar untuk tiap negara anggota ASEAN dalam merancang aturan hukum terkait dengan politik dan kemanan. Hambatan yang ditemukan yaitu kurangnya komitmen dari negara anggota ASEAN untuk melaksanakan perintah dari ASEAN Political – Security Community dan solusinya adalah anggota – anggota ASEAN harus lebih meningkatkan kerja sama di bidang politik dan keamanan.

Kata Kunci : Tinjauan, Kesepakatan, ASEAN Political – Security Community, Asia Tenggara

344.03
IFF
p

PROSES SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR KEMASAN BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DI SUMATERA BARAT

Iffah Zakya, 1510112091, Fakultas Hukum, 2019, 70 halaman

ABSTRAK

Halal merupakan suatu standar terhadap pangan yang diatur dalam hukum Islam dan wajib dipatuhi oleh seluruh muslim. Indonesia adalah negara berkembang yang berbentuk kepulauan. Lokasi dan kondisi geografis Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi para industri pangan. Banyaknya makanan dan minuman impor yang beredar di pasaran harus menjadi perhatian khusus pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya, khususnya konsumen muslim. Hal ini dikarenakan hak untuk dapat beribadah dengan sebaik-baiknya telah diatur secara mutlak dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Meskipun demikian, masih banyak produk makanan dan minuman impor yang beredar di pasaran dan tidak mencantumkan Label Halal pada kemasannya. Tujuan dari skripsi ini adalah (a) untuk mengetahui bagaimana proses sertifikasi dan labelisasi halal terhadap produk makanan dan minuman impor kemasan dan (b) untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen muslim yang dilakukan oleh pemerintahPemasalahan terletak pada kurangnya koordinasi antar lembaga dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait pada saat proses pemasukan produk ke wilayah Indonesia menjadi penyebab masih banyaknya ditemukan produk makanan dan minuman impor kemasan yang tidak memiliki label halal. Kendala lain yang ditemukan adalah masih kurangnya peraturan terkait dan kesadaran dari produsen pangan impor.

Kata kunci: Halal, Makanan dan Minuman Impor, Perlindungan Konsumen

342
IFZ
w

WEWENANG DAN TUGAS DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PASAL 249 AYAT (1) HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Ifziwarti, 1510111013, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 74 halaman, 2019

ABSTRAK

Penambahan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 249 ayat (1) huruf j yaitu:"melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah bertolakbelakang dengan apa yang telah diatur oleh konstitusi. Bahkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Skripsi ini terdiri dari dua rumusan masalah yakni, pertama; Bagaimana wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusayawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah?,kedua; Bagaimana implikasi dari penambahan wewenang dan tugas kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan permasalahan yang terkait, kemudian dengan asas-asas hukum atau doktrin yang ada, serta memperhatikan praktik yang terjadi sebagai sebuah kajian penerapan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan wewenang Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta menimbulkan persinggungan antara Dewan Perwakilan Daerah dan pemerintahan daerah, sehingga perlu Pasal 249 ayat (1) huruf j UU MD3 untuk di uji ke Mahkamah Konstitusi serta mendorong Dewan Perwakilan Daerah untuk segera membentuk dan merumuskan mekanisme harmonisasi antara produk hukum daerah dengan produk hukum nasional.

344.09
IKH
k

KEDUDUKAN PERADILAN ADAT SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NO 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI

Ikhsan Fadillah, 1510112164, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,PK V (Hukum Tata Negara)

ABSTRAK

Peradilan Adat adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebabkan timbulnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, dimana terdapat pengaturan mengenai Peradilan Adat yang berbeda dari Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat pengaturan yang lebih signifikan mengenai Peradilan Adat. Sehingga memungkinkan keberadaan Peradilan Adat terkhusus di Sumatera Barat cukup jelas. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini antara lain : Bagaimana Kedudukan peradilan adat berdasarkan Perda Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Provinsi Sumatera Barat dan Bagaimana Implementasi dari putusan peradilan adat dalam perkara di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data pendukung yaitu data sekunder melakukan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kedudukan dari Peradilan Adat yang tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari , belum diatur secara rinci mengenai peradilan adat oleh Peraturan Daerah sebelumnya, namun setelah lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 sudah diatur secara rinci mengenai peradilan adat Serta implementasi dari putusan peradilan adat memiliki berbagai macam dilema dalam pelaksanaan putusan tersebut, ada yang mematuhi dan ada juga yang tidak mematuhi dari putusan peradilan adat tersebut.

343.09
IKH
p

PENERTIBAN TAMBANG ILEGAL JENIS PASIR, BATU, DAN KERIKIL (SIRTUKIL) DI KECAMATAN V KOTO KAMPUNG DALAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Ikhsan Nofliardi, BP 1510111165, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2018, 91 halam**an**

ABSTRAK

Bahan galian tambang di Indonesia memiliki jenis yang sangat beragam. Seperti halnya Kabupaten Padang Pariaman daerah penghasil tambang, di Kecamatan V Koto Kampung Dalam khususnya sepanjang Sungai Naras terdapat lahan pertambangan Sirtukil. Agar ketertiban dalam setiap kegiatan pertambangan dapat terwujud, Pemerintah memiliki peran penting untuk mengatur jalannya kegiatan pertambangan. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memegang kuasa atas lahan pertambangan di wilayah Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengalihkan kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan yang semula Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terdapat pengertian mengenai Izin Usaha Pertambangan bahwa "Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan". Berdasarkan ketentuan tersebut berarti setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pertambangan wajib memiliki izin. Namun berdasarkan hasil pengamatan melalui surat kabar online serta hasil penelitian pendahuluan di lingkungan masyarakat masih banyak yang tidak memiliki izin atau ilegal. Kegiatan penambangan ilegal mestinya ditertibkan atau para pelaku penambangan ilegal mesti dikenai sanksi agar dapat memberikan efek jera serta dampak negatif terhindarkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penertiban tambang ilegal jenis Sirtukil di Kecamatan V Koto Kampung Dalam? 2) Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penertiban tambang ilegal jenis Sirtukil di Kecamatan V Koto Kampung Dalam? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif, menggunakan jenis data primer dan data sekunder, sumber data didapat penulis dari penelitian kepustakaan dan lapangan, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah pengamanan alat-alat penambangan, pemasangan plang larangan aktivitas penambangan, dan memberikan himbauan kepada pelaku tambang untuk tidak lagi melakukan aktivitas penambangan ilegal. Namun masih terdapat kendala-kendala yaitu kendala yuridis maupun kendala non yuridis.

345
ILH
d

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKANPUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SOLOK (StudiKasusPutusanNomor : 120/Pid.Sus/2016/PN.Slk).

Ilham Akbar Aulya. 14101112093 . Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV (HukumPidana). Halaman. Tahun 2019.

ABSTRAK

Tugas dari anggota Polisi ialah memelihara keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum,memberikan perlindungan, penganyoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun anggota Kepolisian yang seharusnya menjadi penegak hukum, telah melakukan perbuatan melawan hukum itu sendiri, dengan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sebagaimana didalam putusan perkara Nomor 120/Pid.Sus/2016/PN.Slk, didalam penelitian yang telah di lakukan, terdapat 2 (dua) rumusan masalah, (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Solok terhadap perkara Putusan Nomor: 120/Pid.Sus/2016/PN.Slk. (2) Bagaimana pembuktian di dalam persidanga terhadap perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dengan Perkara Nomor: 120/Pid.Sus/2016/PN.Slk. Didalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan undang-undang (statuta approach), dimulai analisa terhadap putusan hakim, pasal-pasal dalam peraturan yang mengatur permasalahan kemudian dikaitkan dengan kasus yang diteliti. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap anggota Kepolisian yang perbuatannya telah melawan hukum yaitu penyalahgunaan narkotika pada putusan Nomor: 120/Pid.Sus/2016/PN.Slk. sudah berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu melihat dari peraturan perundang-undangan, surat dakwaan, surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa di dalam persidangan. Dan dasar pertimbangan non yuridis yaitu berdasarkan kebijaksanaan dan keyakinan hati nurani seorang hakim, dalam melihat keadaan yang di golongkan antara lain latar belakang perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, sifat sopan dan santun terdakwa dalam persidangan. Selain hal-hal yang meringankan dan memberatkan juga. Selaku anggota Kepolisian yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri seharusnya dijatuhi hukuman atau ancaman hukum yang lebih berat. Sedangkan dalam pembuktian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang telah diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhinya unsur-unsur yang ada didalam pasal tersebut.

341
ILH
p

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN OLEH INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA (ITLOS) AKIBAT PENCEMARAN LAUT BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Ilham Firdaus, 1510112018, Hukum Internasional (PK VI) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 82 halaman, 2019

ABSTRAK

Permasalahan pencemaran lingkungan dari waktu ke waktu semakin lama semakin banyak dan semakin rumit, tidak saja pencemaran yang berasal dari benda bergerak diatas laut. Namun, juga termasuk benda tidak bergerak yang berasal dari darat. Di tingkat Internasional telah dibentuk Pengadilan yang memiliki wewenang khusus yang menangani masalah ini yakni ITLOS (International Tribunal for the Law of the Sea). ITLOS dibentuk atas amanat yang diberikan oleh UNCLOS 82. ITLOS tidak saja memiliki wewenang menangani masalah penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan Pencemaran Laut. Namun, ITLOS secara luas ITLOS memiliki kewenangan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perusakan terhadap laut. Seperti penangkapan ikan secara masif, dan juga delimitasi maritim. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan terkait hal tersebut, yaitu: 1. Untuk mengetahui sengketa apa saja yang dapat diselesaikan di ITLOS sebagai bahan pembahasan selanjutnya mengenai hak dan kewajiban ITLOS. 2. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan negara yang bersengketa lebih memilih penyelesaian sengketa dibidang Hukum Laut melalui International Court of Justice daripada International Tribunal for the Law of the Sea. 3. Untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan-ketentuan bagaimana mekanisme cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh ITLOS. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa pengaturan mengenai ITLOS dimana setelah beberapa tahun ITLOS berdiri, ITLOS telah membuat aturan khusus dimulai dari mengenai prosedur hingga putusan keluar dan tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh para pihak setelah putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka pada saat itu juga aturan itu adalah Rules of Tribunal dan Statuta ITLOS. Namun, dari aturan khusus yang telah dibuat oleh ITLOS ditemukan bahwa ITLOS tidak memiliki daya paksa atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya meskipun dalam aturan ITLOS itu dikatakan bahwa Final and Binding bagi para pihak, namun nyatanya putusan itu tidak memiliki daya paksa apabila tidak dilaksanakan oleh pihak yang diputus bersalah oleh Pengadilan. Kata kunci: ITLOS, Rules of Tribunal, Statuta ITLOS, Penyelesaian Sengketa Laut.

343.09
ILH
p

PELAKSANAAN HUKUM PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH MAKAN DI KOT PADANG

lham, 1410112065, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 71 halaman, 2019

ABSTRAK

Kota padang merupakan salah satu kota yang terkenal akan kulinernya. Semakin berkembangnya bisnis kuliner di Kota Padang telah mendorong tumbuhnya industry rumah makan di Kota Padang. Namun, ternyata semakin tumbuh dan menjamurnya bisnis rumah makan di Kota Padang juga telah menimbulkan masalah lingkungan hidup tersendiri bagi pembangunan Koata Padang, yakni pencemaran Lingkungan Hidup yang disebabkan oleh limbah rumah makan di Kota Padang. Contoh kasus limbah rumah makan yang berdampak bagi kesehatan dan fungsi lingkungan hidup adalah pembuangan air limbah Rumah Makan Udang Kelong di Tepi Laut Koata Padang. Sekita 10 Kepala Keluarga (KK) dan lima rumah dikawasan Purus, kecamatan Pdang Barat bertempat tinggal dibawah genangan air limbah Rumah Makan Udang Kelong yang tidak jauh dari lokasi tinggalnya masyarakat.. Dalam penulisan skripsi ini, rumusan masalah yang penulis uraikan sebagai berikut : (1) Bagaimana pelaksanaan hokum pengolahan limbah rumah makan di kota Padang?, (2) Bagaimana solusi terhadap kelemahan dan kendala yang ditemukan dalam pengolahan limbah rumah makan di kota padang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan meneliti bahan kepustakaan dahulu yang dilanjutkan dengan penelitian langsung ke lapangan atau masyarakat. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Kemudian, data yang didapat dianalisis secara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Padang dilakukan melalui pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawasan Dinas lingkungan Hidup Kota Padang dilakukan secara rutin kepada Rumah Makan yang telah mendapatkan izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan apabila ada limbah rumah makan yang berdampak bagi kesehatan dan fungsi lingkungan hidup maka dinas Lingkungan Hidup kota Padang memberikan sanksi administratif.(2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hokum pengolahan limbah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang ada beberapa hal, yaitu factor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana , dan faktor masyarakat. Saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah (1) Diharapkan agar dalam pelaksanaan industry rumah Makan Udang Kelong yang berada di tepi laut Kota Padang menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh Rumah Makan Udang Kelong (2) Dinas lingkugan hidup Kota Padang lebih intensif dalam melakukan pengawasan terhadap Rumah Makan yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Dinas lingkungan hidup Kota Padang harus melakukan pengawasan yang berskala dan berkelanjutan kepada Rumah Makan yang ada di Kota Padang.

345
ILH
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Barat)

ILHAM PRATAMA.1310111268.Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK V(Sitem Peradilan Pidana.149 Halaman. Tahun 2019

ABSTRAK

Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih maraknya kejahatan terhadap anak dijadikan sebagai sasaran predator seksual. Dimana anak menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual. Mengingat bahwa kegiatan eksploitasi seksual melibatkan anak merupakan suatu perbuatan melanggar hukum maka menjadi kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajaran di bawahnya untuk menangani masalah ini, yaitu dengan semaksimal mungkin menekan angka kriminalitas atau tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga perlunya Pelaksanaan penyidikan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Permasalahan dalam skripsi ini adalah, 1)Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh penyidik Direktorat Reserce Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat? 2)Apa saja kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak oleh penyidik Direktorat Reserce Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat? 3)Bagaimana upaya penyidik Direktorat Reserce Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengatasi kendala-kendala terkait dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak?.Penelitian ini dilakukan di lingkungan Direktorat Reserce Kriminal Umum khususnya unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Penelitian dilakukan di lingkungan dengan pendekatan masalah yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data yang di dapat langsung di lapangan dari hasil penelitian dan data yang diperoleh dari informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan. Adapun Proses penyidikan yang dilakukan dalam menangani tindak pidana eksploitasi seksual anak yang terjadi penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar khususnya unit PPA Polda Sumbar melalui beberapa tahap yaitu laporan polisi, proses penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan), proses pemeriksaan (tersangka, saksi), penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum.Hasil penelitian menunjukkan masih banyak kasus belum terungkap dikarenakan sulitnya pengungkapan jaringan eksploitasi seksual disebabkan beberapa faktor. Adapun kendala pelaksanaan penyidikan adalah Biaya operasional yang tersedia kurangnya dana sarana prasarana,sulitnyapenangkapan pelaku, kemajuan teknologi dan Kurangnya aktifnya korban,pengumpulan saksi sulit kurangnya kesadaran masyarakat, tingkat pengangguran yang tinggi. Adapun upaya penanggulangan kendala pelaksanaan penyidikan adalah meningkatkan anggaran dana, melakukan pendekatan terhadap masyarakat, melakukan razia sosialisasi tentang dampak buruk kemajuan teknologi.

345
IMA
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) OLEH UNIT RESKRIM BUKITTINGGI

Imam Wiradiputra, 1410111031, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 69 halaman – Tahun 2018, Pembimbing : Yoserwan S.H., M.H., LLM dan Nilma Suryani, S.H., M.H

ABSTRAK

Tindak pidana tidak mengenal siapa korban dan jenis pidana apa yang dilakuka,salah satu contoh tindak pidana yang masih terjadi di indonesia khususnya dikota Bukittinggi Sumatera Baratadalah tindak pidana Perjudian Khususnya Perjudian Toto Gelap (togel) seperti contoh kasus yang terjadi dikota Bukittinggi mengenai Perjudian Toto Gelap (togel).Tindak pidana perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Pasal 303Bis. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak dan atau belum pasti hasilnya. Perjudian Toto Gelap (togel) Judi togel merupakan suatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan hukum. Intinya judi togel adalah suatu perjudian yang menebak angka, jika angka yang dipesan itu berhadiah (tembus) maka dapat keuntungan, dilihat dari nominal uang yang dipasangkan angka tersebut. Dalam kasus perjudian totogelap ini, maka perlu adanya pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu kepolisian Khususnya oleh unit reskrim polres bukittinggi. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) oleh unit reskrim polres Bukittinggi, 2. Apakah kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) oleh unit reskrim polres Bukittinggi, 3. Bagaimana upaya penyidik mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian toto gelap oleh unit reskrim polres Bukittingi. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini adalah 1. Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana perjudian Toto Gelap (Togel) oleh unit reskrim polres Bukittinggi terbagi atas dua yaitu: penyelidikan dan penindakan, 2. Kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) oleh unit reskrim polres Bukittingi yaitu sulitnya mencari barang bukti, kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat, sulitnya menangkap bandar togel, tempat transaksi perjudian toto gelap (togel) tidak tetap atau berpindah-pindah, hukuman atau vonis masih terlalu ringan terhadap pelaku tindak pidana perjudian toto gelap (togel). 3. Upaya penyidik mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian toto gelap (togel) oleh unit reskrim polres bukittinggi dengan cara preventif dan represif.

345
IND
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMTARA BARAT (BNNP) DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Indah Delima Fitrah, 1510111061, Fakultas Hukum 85 Halaman.Tahun 2019

ABSTRAK

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotikda dalam beberapa tahun terakir di Sumatra Barat sangat cepat dan selalu meningkat. Untuk memberantas penyalahgunaan narkotika tersebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diamanatkan untuk dibentuk sebuah Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diberi wewenang khusus dalam pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai perwakilan didaerah provinsi dan kabupaten atau kota untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang didaerah provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah (1)Bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat (BNNP) dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika? (2)Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat (BNNP) dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika? (3)Apakah upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatra Barat (BNNP) dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika? Metode penelitian yang digunakan didalam penulisan ini bersifat yuridis sosiologis (empiris). Adapun hasil penelitian yaitu penyidik melakukan pemeriksaan kebenaran laporan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana, penangkapan, penyitaan, pemeriksaan tersangka dan saksi, penahanan, penyelesaian dan penyerahan berkas acara. Kendala-kendalanya kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan personil, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Upaya mengatasi kendala tersebut melengkapi sarana dan prasarana, penyidik BNNP bekerjasama dengan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : Pelaksanaan Penyidikan, Tindak Pidana Narkotika

348.04
IND
t

TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PERKARA DIKAITKAN DENGAN PENGGANTIAN KERUGIAN DI PASAMAN BARAT

Indah Rizki Putri, 1510111176, Fakultas Hukum, 2019, 109 halaman

ABSTRAK

Di daerah Kinali, kabupaten Pasaman Barat, provinsi Sumatera Barat terjadi kasus salah tembak oleh oknum polisi. Kasus bermula saat Polsek Kinali menerima laporan tindak pidana pengerusakan rumah diwilayah hukumnya pada 29 Januari 2006. Atas laporan itu Briptu Nofrizal yang diberi mandat untuk bertugas melayangkan tembakannya kepada seorang pria bernama Iwan Mulyadi, akibat penembakan itu, Iwan tidak bisa berjalan dan dinyatakan lumpuh total.Atas kejadian itu, Briptu Nofrizal dihukum 1,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada 4 Desember 2006. Kemudian keluarga melayangkan surat gugatan secara perdata ke PN Pasaman Barat. Hingga beberapa kali proses sidang mulai dari sidang tingkat pertama dengan putusan Pengadilan Negeri Pasaman No.04/PDT.G/2007/PN.PSB jo putusan Pengadilan Tinggi No.56/PDT/2009/PT.PDG jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2710/PDT/2010 dan peninjauan kembali dengan putusan Nomor 375 PK/Pdt/2015 hakim pengadilan mengeluarkan putusan yang isinya mengabulkan dan menguatkan sebagaian gugatan dari Iwan Mulyadi selaku penggugat, dan menghukum pihak kepolisian sebagai tergugat, untuk membayar ganti rugi immateril kepada Iwan sebesar Rp. 300.000.000-, (tiga ratus juta) Tetapi putusan MA yang telah Inkrachtitu dapat dilaksanakan pada 6 November 2018 yakni 12 (dua belas) tahun semenjak perkara bermula barulah pelaksanaan putusan terlaksana. Terlambatnya pemberian ganti kerugian terkendala jumlah uang yang tidak sedikit dan alur permohonan yang berbelit. Permasalahan yang menjadi alasan utamanya ialah tidak adanya aturan yang mengatur dengan jelas mengenai tanggungjawab negara dalam gugatan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum oleh aparatur negara. Penyederhanaan alur penggantian kerugian sangat diperlukan agar korban/wali segera mendapatkan haknya. Selain itu permasalahan siapa yang patut bertanggungjawab serta sejauhmana pertanggungjawaban negara terhadap suatu tindakan yang dilakukan atas nama negara perlu diatur agar tercipta kepastian hukum.

Kata kunci: Tindakan Kepolisian, Penggantian kerugian, Pelaksanaan Putusan.

344.04
INT
t

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DALAM PELAYANAN KLINIK KECANTIKAN ONLINE

Intan Fadilla, 1510112004, Fakultas Hukum, 2019, 83 halaman

ABSTRAK

Dewasa ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan, telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang canggih, perkembangan ini turut mempengaruhi jasa profesional dibidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga akibatnya bertambah besar dan kemungkinan untuk melakukan kesalahan sangat besar pula. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan hadirnya suatu layanan kecantikan online yang memanfaatkan smartphone dalam penyelenggaran kesehatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien tanpa tatap muka secara langsung sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan diagnosa.Pada standar operasional kesehatan dalam pendiagnosaan harus melalui beberapa tahapan-tahapan terlebih dahulu berupa tanya jawab (anamnesis) antara dokter dengan pasien, kemudian diikuti dengan pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum layanan klinik kecantikan online,apakah terjadi kekosongan hukum serta bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada dokter dalam hal kesalahan diagnosa. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer,sekunder dan tersier. Data diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan hukum layanan klinik kecantikan online tidak dapat di persamakan dengan klinik kecantikan konvensional karena klinik kecantikan online ini tidak memenuhi persyaratan minimum yang harus dimiliki oleh sebuah klinik sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 6 Ayat (1) PERMENKES No.9 Tahun 2014 tentang klinik. Serta ilegal karena tidak memenuhi syarat penyelenggaran praktik kedokteran sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang praktik kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, meskipun begitu layanan klinik kecantikan online ini merupakan penyelenggara sistem elektronik sehingga pihak terkait yang menyelenggarakan layanan klinik kecantikan ini tunduk dan patuh terhadap undang-undang ini serta jika terjadi kesalahan diagnosa yang merugikan pasien dapat dibebankan tanggung jawab kepada dokter berdasarkan hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi dan undang-undang perlindungan konsumen serta undang-undang kesehatan dan undang-undang praktik kedokteran dan dapat di berikan sanksi disiplin etik oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Dokter, Layanan Klinik Kecantikan, Online

344.04
IQB
p

PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LEMBAGA NEW PADOE JIWA BUKITTINGGI

Iqbal Nuril Hakim. 1410111156. Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana). 69 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Hukum tentang narkotika lahir dilator belakangi oleh maraknya penyalahgunaan narkotika, Undang – undang 35 tahun 2009 tentang narkotika memberikan hukuman bagi pelakunya, tidak hanya hukuman penjara tapi juga rehabilitasi pada penyalahgunaan narkotika. Didalam pasal 54 Undang – undang narkotika menyatakan bahawa. “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial’’. Pecandu narkotika merupakan korban karena kejahatan yang dilakukanya sendiri. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika serta adanya ketakutan akan dilaporkan ke pihak yang berwajib terlebih dahulu. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1). Pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Lembaga New Padoe Jiwa Bukittinggi, 2). Apa kendala dalam melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Lembaga New Padoe Jiwa Bukittinggi dan upaya mengatasi kendala dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Hasil dari penelitian yaitu : pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika ini sesuai dengan dengan peraturan yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika yaitu Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkotika. Bahwa dalam pelaksanaanya proses awal dari wajib lapor telah dilaksanakan untuk korban yang melaporkan diri baik diri sendiri ataupun dari pihak keluarga. Kendala yang dihapi petugas Lembaga New Padoe Jiwa didalam melaksanakan rehabilitasi yaitu keterbatasan dana, tidak adanya kerja sama antara pihak rumah sakit atau puskemas yag melakukan rehabilitasi medis dengan pihak Lembaga New Padoe Jiwa Bukittinggi yang melakukan rehabilitasi sosial. Lalu cara pihak Lemabaga mengatasi keterbatasan dana biasanya pihak Lembaga menggunakan dana talangan, lalu mengatasi kerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas pihak lembaga hanya memasukan klien yang ingin berobat kedalam kategori umum.

342
IQB
p

PENGELOLAAN DANA SIAP PAKAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK KEPERLUAN PENANNGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

IQBAL PRATAMA WIRDA, 1210111037, Fakultas Hukum Universitas Andalas (Hukum Administrasi Negara) Jumlah Halaman 54, Tahun 2019

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan penanggulangan bencana pada status tanggap darurat dengan sumber dana yang bernama dana siap pakai yang bersumber dari APBD dan kedudukan dana siap pakai dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bertujuan untuk meneliti peruntukan dan penggunaan ketentuan Dana Siap Pakai dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman serta bagaimana pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap Dana Siap pakai. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, yuridis sosiologis yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan menggunakan beragam teori yang digagas dan tercantum dalam undang-undang, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seharusnya pemerintah daerah harus membentuk peraturan perundang-undangan terkait tentang sumber dana siap pakai dalam APBN dan APBD berdasarkan asas otonomi yang diakui dan potensi bencana yang dimiliki Kabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dana siap pakai hanya bersumber pada salah satu pengelola keuangan baik itu Negara atau daerah. Dana siap pakai belum memiliki suatu kerangka acuan secara eksplisit, hanya sebatas pasal yang tercantum dalam undang-undang dan pengembangan jangka panjang dan menengah daerah Kabupaten Padang Pariaman.

KATA KUNCI : Pengelolaan, Peruntukan dan Penggunaan, Pertanggungjawaban

348.3
IRF
p

PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PEGENDARA SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN (studi di wilayah hukum Polres Painan)

Irfan Asmady, 1410111110, Fakultas Hukum, 58 halaman, 2018

ABSTRAK

Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian pasal 13 menyebutkan bahwa tugas kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Undang-undang ini menjadi pedoman bagi masyarakat agar tertib dalam berlalu-lintas. Pada Pasal 1 Angka 32 peran Polantas dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor di Painan Kabupaten Pesisir Selatan sangat diperlukan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman di dalam lalu lintas di masyarakat terutama mengendarai sepeda motor di Painan. Rumusan masalah di dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah Peran Polisi lalu lintas dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di kabupaten Pesisir Selatan 2) Apakah yang menjadi kendala pihak Polisi lalu lintas dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Painan, bersifat Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis, dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peran Polantas dalam upaya penegakan hukum terhadap pengendara sepeda motor di Painan sangat di perlukan penanggulangan seperti melakukan upaya preventif dan upaya represif untuk penanggulangan dan mengurangi kasus pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh pengendara sepeda motor di Painan, untuk mengurangi angka pelanggaran lalu litas oleh pengendara sepeda motor di Painan tentu tidak selalu berjalan dengan lancar, pihak Polantas memiliki hambatan-hambatan seperti tidak jeranya pengemudi dan menganggap melanggar peraturan lalu lintas aman asalkan tidak tertangkap oleh Polantas dan menganggap melakukan pelanggaran dapat menghemat waktu untuk mencapai tujuan saat berkendara, salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Polantas dalam upaya menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Paian adalah melakukan razia, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk saling mengingatkan kepada keluarga akan bahaya melanggar peraturan lalu lintas saat berkendara.

342
IRS
k

KEBIJAKAN LEGISLATIF TERHADAP OPTIMALISASI PIDANA DENDA DI INDONESIA

Irsal Habibi, 1510111052, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 129 halaman, 2018

ABSTRAK

Sanksi pidana merupakan salah satu masalah sentral yang selalu diperdebatkan dalam politik hukum pidana. Kebijakan penetapan sanksi pidana pada hakekatnya bertujuan untuk menanggulangi suatu tindak pidana. Melalui penetapan sanksi pidana diharapkan tercapai rasa keadilan bagi korban dan keluarganya serta masyarakat yang telah mengalami kerugian, sehingga diharapkan dapat dikembalikannya keseimbangan dalam masyarakat tersebut. Peranan badan pembuat undang-undang dalam hukum pidana dan penerapannya (pemidanaan) sangatlah penting sebagai serangkaian usaha untuk mengoperasionalkan sanksi pidana tersebut. Pidana denda sebagai sub sistem dari sanksi pidana selama ini belum optimal dioperasionalisasikan. Kebijakan legislatif terkait dengan sistem pidana denda menjadi salah satu faktor yang menghambat dapat dioperasionalisasikannya pidana denda. Dalam perkembangan ilmu hukum pidana saat ini, optimalisasi pidana denda menjadi salah satu perhatian pembentuk undang-undang melalui kebijakan legislatifnya. Pidana denda dipandang sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang mempunyai banyak manfaat dibandingkan dengan jenis sanksi pidana yang lainnya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimanakah kebijakan legislatif terhadap pengaturan pidana denda dalam sistem hukum pidana Indonesia? 2) bagaimanakah kebijakan legislatif terhadap optimalisasi pengaturan pidana denda dalam Rancangan KUHP Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan masalah melalui pendekatan undang-undang, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) pidana denda dalamsistem hukum pidana Indonesia, dirumuskan dalam empat pola yaitu pola perumusan secara alternatif, secara kumulasi, secara tunggal, dan secara kumulasi-alternatif, dalam sistem hukum pidana indonesia saat ini, tidak ada pola penjatuhan sanksi pidana denda yang sistematis dan tidak adanya sanksi pidana pengganti alternatif yang dapat mengoperasionalkan pidana denda secara optimal. 2) kebijakan legislatif terhadap sistem pidana Indonesia dalam Rancangan KUHP sebagai sistem hukum pidana Indonesia mendatang, menunjukkan pengaturan pidana denda yang lebih komprehensif, seperti pidana denda dapat menyesuaikan dengan perubahan nilai uang, pidana denda dibagi dalam beberapa kategori, dapat diupayakannya pengambilan harta kekayaan/pendapatan terpidana, dan pengaturan pidana pengganti denda yang lebih signifikan. Untuk perbaikan kedepannya, diharapkan kebijakan legislatif terhadap sistem pidana denda yang diakomodir dalam KUHP Nasional mendatang dapat diselaraskan dengan undang- undang pidana khusus (di luar KUHP).

344.09
JAC
p

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BIRO HAJI DAN UMRAH DI KOTA PADANG

Jacky Rahmat Kurnia, BP:1410111114, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 hlm, 2019

ABSTRAK

Rukun Islam kelima terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa setiap umat Islam yang mampu wajib melaksanakan ibadah haji. Selain ibadah haji juga terdapat ibadah umrah yang sering dilakukan oleh umat Islam. Pelaksanaan ibadah haji dan umrah selain dilaksanakan Pemerintah juga diserahkan kepada pihak penyelenggara ibadah haji dan umrah. Masyarakat dituntut teliti karena belum tentu semua pendirian biro perjalanan Ibadah Haji dan Umrah sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku.Proses penegakan hukum penting dilakukan demi terciptanya kenyamanan bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Hak para jemaah haji harus menjadi prioritas utama dalam usaha biro perjalanan Haji dan Umrah yang notabenenya melibatkan banyak orang. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang 1) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Biro Haji dan Umrah Di Kota Padang? 2) Tindakan yang diberikan pemerintah terhadap biro haji dan umrah di Kota Padang yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) Penegakan hukum terhadap biro haji dan umrah oleh Kementerian Agama Kota Padang dilakukan dengan cara penegakan hukum secara preventif berupa survey terhadap biro haji dan umrah serta melakukan pengawasan terhadap biro haji dan umrah di Kota Padang kemudian penegakan hukum represif yang dilakukan apabila ada pengaduan dari masyarakat dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh kementerian agama terkait pelanggaran yang dilakukan oleh biro haji dan umrah. 2) Tindakan yang diberikan Pemerintah terhadap biro haji dan umrah di Kota Padang yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu dengan cara memberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin penyelenggaraan atau pencabutan izin penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Agama. Kemudian terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Bumi Minang Pertiwi (BMP) Tour and Travel yang melakukan penelantaran jama'ah haji dan umrah maka PT. Tersebut dicabut izinnya sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah oleh Direktur Jenderal Kementerian Agama karena telah terbukti melanggar aturan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Biro Haji dan Umrah, Kementerian Agama.

348.3
JAN
i

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM ONLINE BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DI BIDANG KENOTARIATAN KOTA PADANG

Jannerivo H Mario JS, 1210112179, Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 102 halaman, 2019

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum. Pengaturan mengenai hal itu terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Badan hukum sebagai salah satu subjek hukum sudah memasyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Badan hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.Dalam membentuk suatu Badan Hukum. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diubah dalam rangka untuk meningkatkan tertib administrasi badan hukum perseroan dan untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak bagi perseroan di Indonesia. Berdasarkan hal ini penulis merumuskan dua permasalahan yaitu pembentukan Badan Hukum Perseroan Terbatas menurut Hukum Perusahaan yang berlaku di Indonesia, implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang berbasis Sistem Online Badan Hukum terhadap Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai Perseroan Terbatas (UU No. 1 tahun 1995) Perseroan Terbatas harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya UU NO. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, dan perkembangan tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga.

Kata Kunci : Implementasi, Sistem Online, Perseroan Terbatas.

344.9
JEA
p

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TRANSAKSI TANAH ADAT DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PADANG

Jeanny Casvarina, 1210113084, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada Hukum Adat. Hal ini terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu : "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada Hukum Agama". Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sudah berubah situasi dan kebutuhannya diadakan atau disediakan suatu lembaga pendaftaran tanah atau yang lebih dikenal dengan nama Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hak-hak atas tanah dibukukan dalam buku tanah dan diterbitkan sertipikat sebagai tanda bukti pemilikan tanahnya. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: 1)Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran transaksi tanah adat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang.2)Apakah Kendala- kendala dalampelaksanaan, dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis-sosiologis dengan deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Didaftarkan atas nama seseorang selaku pihak yang ditunjuk oleh anggota kerabat; atau Didaftarkan atas nama Mamak Kepala Waris (MKW). Kendala dari pihak masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah adat dan tidak adak bukti tertulis kepemilikan hak, terbatas tenaga pelaksana pendaftaran, terbatas biaya pendaftaranMemberikan suatu kebijakan, khususnya pendaftaran tanah adat melalui Proyen Nasional (Prona).

Kata Kunci: Transaksi tanah adat

348.3
JEF
P

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA LAYANAN GO-RIDE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi kasus PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa cabang Bukittinggi)

Jefri Syahril, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 100 halaman, 2019

ABSTRAK

Salah satu layanan ojek online yang paling diminati saat ini oleh masyarakat adalah Go-ride. PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan driver Go-jek sebagai pelaku usaha harus memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak dari konsumennya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Di kota Bukittinggi terdapat permasalahan yang menyangkut hak-hak dari konsumen Go-ride di kota Bukittinggi, seperti tindakan driver Go-jek yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan dari konsumennya, serta masalah data privasi dari pelanggan Go-jek yang sering disalahgunakan oleh driver Go-jek. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa layanan Go-ride menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa cabang Bukittinggi), dan apa kendala yang dihadapi oleh pengguna jasa layanan Go-ride, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa cabang Bukittinggi). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dari penelitian ini diperoleh yaitu: (1) upaya yang dilakukan dalam menjamin hak-hak konsumennya seperti yang tercantum didalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan proses seleksi mitra yang ketat, serta melalui Standar Operasional Prosedur dan peraturan yang dibuat oleh perusahaan. Upaya represif adalah dengan melalui penerapan sanksi serta bentuk tanggung jawab dari perusahaan, dan (2) kendala yang dihadapi oleh pengguna jasa layanan Go-ride di kota Bukittinggi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya antara lain adalah: kurangnya petujuk penggunaan aplikasi, masih adanya oknum driver Go-jek yang tidak mentaati Standar Operasional Prosedur, masih adanya oknum driver Go-jek yang memaksa untuk diberi penialaian baik atas pelayanan yang diberikan, tarif yang sering berubah, serta potensi penyalahgunaan data pelanggan. Pemerintah perlu membuat regulasi hukum khusus yang mengatur mengenai transportasi online. Didalam mengatasi hal tersebut diperlukan upaya dari semua pihak, baik pelanggan, driver Go-jek, PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa, serta pemerintah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, GO-RIDE, GO-JEK

343.09
JEF
p

PERAN INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION (IORA) DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN MARITIM DI KAWASAN SAMUDERA HINDIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA

Jefriman Saputra, 1310111102, Fakultas Hukum Universitas Andalas 68 halaman 2018

ABSTRAK

Indian Ocean Rim Association atau bisa disebut juga dengan IORA merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan, dan pemerataan perekonomiaan di wilayah Samudera Hindia. Dalam menjalankan tujuannya IORA hanya terfokus terhadap pembangunan dan pemerataan perekonomian di samudera hindia, namun kemanan maritim juga merupakan suatu masalah yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat bahwa wilayah Samudera Hindia merupakan jalur perdagangan perekonomian dunia, salah satu contoh kasus pemberontakan dan pembajakan kapal MV sinar kudus milik PT Samudera Indonesia di Teluk Aden wilayah laut lepas Somalia. Dari kasus di atas dapat kita lihat bagaimana"PERAN INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION (IORA) DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN MARITIM DI KAWASAN SAMUDERA HINDIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDONESIA". Berdasarkan dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana peran IORA dalam meningkatkan kemanan maritim diwilayah Samudera Hindia. 2. Bagaimana implikasi peran IORA terhadap keaman maritim Indonesia. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian yaitu: Peran IORA dalam meningkatkan keamanan maritime di Samudera Hindia baru muncul Pada pertemuan Tingkat Menteri ke-11 di Bengaluru India November 2011, kerjasama yang dihasilkan meliputi, Keselamatan dan Keamanan Maritim, Fasilitasi Perdagangan dan Investasi, Manajemen Perikanan, Mananjemen Resiko dan Bencana, Kerjasama Akademis, Sains, dan Teknologi, Promosi Parawisata dan Pertukaran Kebudayaan. Dalam perkembangan IORA sebagai organisasi regional samudera hindia, Indonesia sebagai negara anggota IORA berkesempatan menjadi pemimpin IORA untuk periode 2015-2017. Kepemimpinan Indonesia di IORA bertujuan untuk "Memperkuat kerjasama maritim di Samudera Hindia yang damai dan stabil". Adapun enam agenda prioritas IORA pada masa kepemimpinan Indonesia yaitu pada bidang keselamatan, keamanan maritim, fasilitas perdagangan, informasi, manajemen perikanan, manajemen resiko bencana alam, akademis, ilmu pengetahuan, teknologi, parawisata dan sosial budaya.

Kata Kunci : Indian Ocean Rim Association, Kemanan Maritim.

344.06
JUM
t

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DALAM MEMBERIKAN GANTI KERUGIAN TERHADAP KECELAKAAN TENAGA KERJA PADA PT. SEMEN PADANG (PERSERO) TBK

Jumratul Hamdi, 1310112045, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,56 halaman, 2019

ABSTRAK

Dalam setiap bidang kegiatan manusia selalu terdapat kemungkinan terjadinya kecelakaan, tidak ada satu bidang kerja yang dapat memperoleh pengecualian. Kecelakaan dalam industri sesungguhnya merupakan hasil akhir dari suatu aturan dan kondisi kerja yang tidak aman. Demikian pula halnya di PT. Semen Padang (Persero) Tbk telah terjadi beberapa kasus kecelakaan kerja yang masing-masingnya kecelakaan tersebut dikategorikan pada kecelakaan ringan, berat dan meninggal dunia. Pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PT. Semen Padang dalam memberikan ganti rugi terhadap kecelakaan tenaga kerja dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis melalui pengumpulan, penyusunan, analisis data kemudian dijelaskan dan selanjutkan disesuaikan dengan norma yang mengaturnya. Dari hasil penelitian ini tanggung jawab perusahaan dalam pelaksanaan ganti rugi terhadapa korban kecelakaan tenaga kerja PT. Semen Padang (Persero) Tbk sudah cukup baik dalam kasus kecelakaan kerja, dengan adanya perjanjian kerja, maka pekerja dari PT. Semen Padang (Persero) Tbk mendapatkan perlindungan dengan diikutkan BPJS tenaga kerja pada awal perjanjian kerja, adapun Kendala dan Upaya yang dilakukan oleh PT. Semen Padang (Persero) Tbk dalam melaksanakan tanggung jawab dalam pemberian ganti rugi terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja oleh PT. Semen Padang (Persero) Tbk adalah: a) Proses Prosedur, b) Pendataan, dan Upaya yang dilakukan PT. Semen Padang (Persero) Tbk dalam melaksanakan tanggung jawab pemberian ganti rugi terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah : a) Memberiakan asuransi, b) Memberikan santunan dan c) upah.

Kata Kunci: PT. Semen Padang (Persero) Tbk, Tanggung Jawab, Kecelakaan tenaga kerja

345
JUN
p

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN OLEH JAKSA DALAM HAL KELEBIHAN MASA PENAHANAN TERPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kota Padang)

Juni Waldi, No.BP 1310112031, Program Kekhususan: Hukum Pidana 71 halaman, tahun 2019

ABSTRAK

Penegakan keadilan terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang diterapkan sesuai dalam konteks keadilan sebagaimana diterima masyarakat. Kegagalan memfasilitasi keadilan melalui proses peradilan akan berujung pada kemarahan masyarakat kepada institusi penegak hukum. Pasca hadirnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak saja memuat tentang hak dan kewajiban yang menjadi tugas serta kewenangan penegak hukum, tetapi juga memuat batasan serta tata cara proses pidana untuk menjamin hak asasi manusia terhadap mereka yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum.. Proses penegakan hukum tidak saja membutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan akan tetapi juga membutuhkan instrument penggeraknya. Institusi-institusi penegak hukum yang merupakan kompenen dari sistem peradilan pidana atau lebih kita kenal dengan criminal justice system (CJS) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan kementerian hukum dan ham. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksana putusan pengadilan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Azhar selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang. Bapak Azhar Menjelaskan sering sekali terjadi keterlambatan dalam penyampaian petikan putusan pengadilan atau ekstrak vonis dari penuntut umum, sehingga Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang tidak memiliki dasar hukum lebih lanjut untuk melaksanakan penahanan, serta memindahkan terdakwa yang telah berubah status menjadi terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan. Kelebihan masa penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang terjadi pada tingkat kasasi disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal penyampaian ekstrak vonis oleh jaksa penuntut umum, sehingga pihak Rumah Tahanan Negara Kelas II B Padang tidak memiliki dasar kepastian hukum atas status tahanan. Putusan pengadilan dalam hal terjadinya kelebihan masa penahanan terhadap terpidana, Jaksa belum menyampaikan ekstrak vonis atau petikan putusan, sehingga Rumah Tahanan Negara Negara Klas II B Padang tidak bisa memenuhi pelaksanaan putusan. Keterlambatan jaksa dalam hal penyampaian ekstrak vonis atau petikan putusan ke Rumah Tahanan Negara Klas II B Padang disebabkan oleh keterlambatan mendapat salinan putusan dari panitera Mahkamah Agung.

341.48
KAM
i

IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA- CUMA BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

Kaminah Isnaini Ramadhani, 1410112085, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2019, Pembimbing : Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.H. dan Diana Arma, S.H., M.H.

ABSTRAK

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum, khususnya tersangka/terdakwa yang tergolong sebagai orang atau kelompok orang miskin dan buta hukum. Dalam penelitian ini, penulis memilih Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai tempat penelitian. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah implementasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara?, 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi terdakwa yang tidak mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara?, 3) Upaya apa yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam mengatasi kendala pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu?. Berdasarkan metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dengan analisis secara kualitatif diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu berjalan dengan baik karena dapat menyelesaikan 75% (tujuh puluh lima persen) perkara yang diterima setiap tahunnya. 2) Kendala yang dihadapi adalah: a) Kurangnya tenaga pekerja bantuan hukum pada LBH Jakarta; b) Kurangnya dana bantuan hukum; c) Hambatan untuk menjadi saksi a de charge dipersidangan; d) Kurangnya pengetahuan masyarakat tidak mampu tentang bantuan hukum; dan e) Hambatan dari pihak aparat penegak hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. 3) Untuk mengatasi kendala tersebut LBH Jakarta melakukan: a) Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dengan tepat; b) Meningkatkan ketersediaan pemberi bantuan hukum bagi masyarakat miskin; dan c) Meningkatkan sumber daya manusia.

Kata Kunci : Implementasi Pemberian Bantuan Hukum, Bantuan Hukum Cuma- Cuma, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

344.03
KET
p

PENERTIBAN ORGAN TUNGGAL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

(Ketty Dewinta Yudira, 1510112118, Fakultas Hukum, 2019, 65 halaman)

ABSTRAK

Dalam mewujudkan pembangunan daerah dengan menggunakan cara desentralisasi, yang dilakukan melalui asas otonomi daerah dan asas tugas pembantuan, daerah memerlukan Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang membantu pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta menyelenggarakan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan ketentraman masyarakat. Berdasarkan Peratunan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non yustisial dan juga tindakan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah. Di Kabupaten Pesisir Selatan persoalan organ tunggal merupakan salah satu permasalahan social karena dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat di sekitarnya. Permaslahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan penertiban Organ Tunggal oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Masyarakat dan Ketertiban Umum. 2) Apa saja hambatan- hambatan dalam pelaksanaan penertiban Organ Tunggal oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarakan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Masyarakat dan Ketertiban Umum. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini bersifat Yuridis Sosiologis kemudian dianalisa secara kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kewenangan Satpol PP dlam melaksanakan penertiban organ tunggal di kabupaten pesisir selatan belum terselenggara dengan baik. Hal ini disebabkan karena luasnya cakupan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, masih kurangnya tingkat kesadaran pemilik usaha Organ Tunggal untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sedikitnya jumlah personil Polisi Pamong Praja, kurangnya kualitas sumber daya aparatur yang mengikuti pendidikan danpelatihan, serta minimya prasarana. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah mandirikan posko-posko Polisi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, memberikan kesadaran kepada pemilik usaha hiburan Organ Tunggal akan pentingnya menjaga ketentraman umum, menambahkan personil Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan kegiatan pendidikan/pelatihan (Diklat) yang harus dilakukan oleh semua personil Satpol PP dan Damkar, menambahkan kendaraan operasional sesuai dengan yang dibutuhkan.

Kata Kunci: Penertiban, Organ Tunggal, Satuan Polisi Pamong Praja

342.07
KIK
d

DAMPAK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TERHADAP PEMENUHAN HAK MEMILIH WARGA NEGARA

Kiki Agustin, 1410111126, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK V (Hukum Tata Negara). 74 halaman, 2019

ABSTRAK

Hak memilih merupakan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Hak pilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Pemilihan Umum 2019 adalah pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden yang diadakan secara serentak. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-XI/2013 Tentang Pemilu Serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Dalam penelitian ini penulis mengangkat rumusan masalah yaitu; 1)Bagaimana Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Secara Nasional? 2)Apakah dampak Pemilihan Umum Secara Serentak Terhadap Pemenuhan Hak Memilih Warga Negara?. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan metode yuridis normatif diperoleh sebagai berikut: 1) Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan berbeda dari Pemilihan Umum Tahun 1999,2004, 2009 dan 2014 karena diselenggarakan dalam waktu bersamaan antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta dengan pemilihan Anggota Legislatif 2) Dilaksanakannya Pemilihan Umum Serentak Secara Nasional Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 memberikan Persentase partisipasi masyarakat sejumlah 80,90 persen, angka tersebut jauh dari target yang ditetapkan oleh KPU yakni sebesar 77,5 persen.

345
KIK
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA CUKAI ROKOK OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SOLOK

Kiki Novela Kasih, Nomor BP : 1310111190, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 64 halaman, 2018

ABSTRAK

Tindak pidana merupakan gejala sosial yang akan dihadapi masyarakat bahkan negara. Salah satunya adalah tindak pidana cukai yaitu penyelewengan cukai. Mengenai tindak pidana Cukai ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 pengertian cukai adalah “pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.Dalam hal ini cukai merupakan suatu pendapatan negara yang cukup besar dalam pembangunan nasional yang mana dalam pelanggarannya sangat merugikan negara. Untuk itu perlu adanya penanggulangan terhadap tindak pidana cukai yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu dari pihak kepolisian sehingga terciptanya pembangunan nasional yang lancar. Permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini adalah (a) pelaksanaan penyidikan tindak pidana cukairokok, (b) kendala – kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana cukai rokok dan (c) upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi kendala – kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana cukai rokok oleh Satreskrim Polres Solok. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan dan memaparkan hasil dari penelitian secara deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yudiris sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dilapangan.Upaya – upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi kendala – kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana cukai rokok oleh Satreskrim Polres Solok, (a) pelatihan khusus bagi penyidik dalam menghadapi kasus tindak pidana cukai rokok. (b) memberikan penghargaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap saksi yang terlibat dalam penyidikan tindak pidana cukai rokok.

Kata kunci: Penyelewengan Cukai Rokok

343.04
KRI
k

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENGAWASAN TRANSAKSI SAHAM YANG BERFLUKTUASI DI PASAR MODAL

Kristin Desi Butar-Butar. 1510112147. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK I Hukum Perdata. – Halaman 89, Tahun 2019.

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut dengan OJK adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang, menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan, memeriksa dan penyidikan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sektor Pasar Modal, dan sektor jasa keuangan lainnya dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Peningkatan ekonomi Indonesia melalui sektor pasar modal tidak selalu dalam kondisi yang aman, banyak faktor yang mempengaruhi munculnya resiko yang sangat tinggi dan mengancam stabilitas ekonomi nasional dan menyebabkan investor melakukan penarikan kembali modal yang telah ditanamkan pada perusahaan yang telah go-publik melalui Bursa Efek dimana keadaan ini disebut sebagai keadaan berfluktuasi karena nilai saham yang turun secara terus menerus dalam IHSG. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyelesaian OJK terhadap transaksi saham berfluktuasi di Pasar Modal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari pihak pertama dan data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data melalui penelitian secara langsung, studi dokumen dan wawancara dengan OJK bagian pengawasan pasar modal. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan OJK terhadap pengawasan transaksi saham berfluktuasi di Pasar Modal dengan mengeluarkan pengaturan melalui Peraturan OJK Nomor: 2/POJK.04/2013, SEOJK Nomor 22/SEOJK.04/2015 Tentang Pembelian Kembali Saham Yang Di Keluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam mempermudah emiten atau perusahaan dalam melakukan aksi korporasi pembelian saham kembali (buy back) setelah menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK dan Bursa Efek kemudian melakukan monitoring melalui Crisis Management Protocol dan mengunakan kebijaka auto rejection asimetris oleh BEI sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi BEI dengan Nomor: Kep-00113/BEI/12-2016.

Kata kunci : Fluktuasi, Buy back. Otoritas Jasa Keuangan.

344.03
KUR
p

PENGELOLAAN ZAKAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN MASYARAKAT LAINNYA OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PASAMAN

Kurnia Santi, 1510111158, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 82 halaman, 2019

ABSTRAK

Zakat adalah salah satu pilar dalam rukun Islam dan merupakan praktik ibadah yang mengandung dimensi sosial. Zakat juga menjadi salah satu dana yang berpotensial yang dapat dimanfaaatkan untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejateraan masyarakat. Zakat telah masuk kedalam ranah hukum positif dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adapun permasalahannya yaitu bagaimana pengelolaan zakat Aparatus Sipil Negara (ASN) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman, dan apa saja program-program BAZNAS Kabupaten Pasaman dalam pendistribusian dana zakat. Tujuannya untuk mengetahui pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman dan mengetahui bagaimana program-program BAZNAS Kabupaten Pasaman. Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian tentang pengelolaan zakat ASN oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman ini yaitu pengelolaannya, yang terdiri dari perencanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tahapan paling penting dalam Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman yaitu tahap pengumpulan dan pendistribusian. Penyaluran dana zakat dilakukan dengan membentuk program-program dalam pendistribusian zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyaluran dana zakat. Namun pemantauan setelah pendistribusian juga kurang maksimal dan kategori ASN yang harus membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Pasaman masih kurang jelas. Harapannya semoga kedepannya pola sosialisasi tentang zakat lebih inovatif dan transparan. Penditribusian juga diharapkan lebih merata untuk setiap daerah di Kabupaten Pasaman dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kabupaten Pasaman.

343.09
LID
p

PERAN KERJASAMA OPERASI PATROLI TERKOORDINASI KASTAM INDONESIA-MALAYSIA (OPERASI PATKOR KASTIMA) DALAM MEMINIMALISIR PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA DUMAI

Lidya Febrianti, 1510111156, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2019, 68 Halaman

ABSTRAK

Pakaian bekas impor dilarang keberadaannya di Indonesia karena akan mematikan industri tekstil dalam negeri. Jika pakaian bekas impor masuk ke Indonesia itu artinya tindakan penyelundupan. Dalam hukum regional Asia Tenggara untuk meminimalisir penyelundupan diatur dalam Asean Agreement On Custom. Dalam hal ini antara Bea Cukai Indonesia-Malaysia menjalin kerjasama untuk mencegah tindakan penyelundupan pakaian bekas berupa operasi Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia-Malaysia (Patkor Kastima). Permasalahan tersebut melahirkan rumusan masalah; Bagaimana peran Operasi Patkor Kastima dalam meminimalisir penyelundupan pakaian bekas dari Malaysia ke Indonesia?. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Bea Cukai kota Dumai tidak dapat memberantas pakaian bekas impor?. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap eksistensi perdagangan pakaian bekas impor?. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Operasi Patkor Kastima dalam meminimalisir penyelundupan pakaian bekas ke Indonesia yaitu dengan melakukan suatu patroli laut Indonesia-Malaysia dalam kerjasama mengamankan Selat Malaka yang merupakan jalur penting perdagangan dunia dan faktor yang menyebabkan Bea Cukai sulit dalam memberantas pakaian bekas impor yaitu: Masih adanya permintaan pakaian bekas dari konsumen, kurangnya SDM dalam patroli laut, kurangnya fasilitas transportasi laut, dan banyaknya pintu masuk ke Indonesia. Persepsi masyarakat Dumai tidak masalah dengan keberadaan pakaian bekas impor karena mempunyai cara khusus untuk mencuci sebelum digunakan.

Kata kunci: Operasi Patkor Kastima, Penyelundupan.

347.05
LIN
p

PENEBANGAN POHON DI TANAH ULAYAT DITINJAU DARI ASPEK TINDAK PIDANA KEHUTANAN (Studi : Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2017/PN.Lbb)

Linda Yunita,1210113103, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 61 Halaman, 2019

ABSTRAK

Hutan adalah salah satu komponen penting yang tidak dapat di pisahkan dari masyarakast Indonesia.Banyak dari mereka menggantungkan hidup dan ekonominya pada hasil dan sumber daya yang ada hutan tersebut.Sebagian besar masyarakat Sumatera Barat memiliki hak menguasai hutan ulayat,hutan yang diwarisakan secara turun temurun,tidak jarang dari mereka yang menggantungkan perekonomiannya dari hasil hutan.Namun pada kenyataannya pengelolaan hutan tersebut masih banyaknya kriminalisasi oleh pemerintah dan penegak hukum.Masyarakat sering dianggap telah melakukan perusakan hutan dan diadili secara pidana.Hal ini juga terjadi terhadap dua orang warga Kotomalintang,Kabupaten Agam yaitu Erdi Dt.Samiak dan Agusri Masnefi yang dituduh melakukan perusakan hutan dan didakwa dengan Pasal 82 UU Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan hukuman satu hingga lima tahun penjara serta denda Rp 500.000.000 hingga 2,5 miliar.Dalam penulisan ini penulis merumuskan dua permasalahan yaitu pertama,apakah penebangan pohon oleh pemilik ulayat bisa dikategorikan sebagai tindak pidana dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pemilik hutan ulayat?Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode Yuridis Normatif.Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 129/Pid.B/LH/PN LBB hakim tetap menjatuhkan hukuman terhadap kedua terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda masing- masing Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).Dalam mengadili suatu permasalahan dan menjatuhkan putusan hakim tidak memperhatikan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.Hakim tidak merujuk pada putusan MK 35/PUU/X/2012 yang menyatakan bahwa penguasaan hukum oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.Dalam hal ini penulis membuat apa yang menjadi dampak apabila hakim tidak memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.Adapun saran penulis agar hakim mempertimbangkan setiap kebiasaan yang ada di masyarakat dan mengetahui setiap pembaharuan hukum agar semakin jelas seta tidak keliru ketika mengadili dan menjatuhkan putusan.

342.07
LAR
s

SEBAGAI PEMILIH DALAM PEMILU DITINJAU DARI CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHIL 1989

Lara Mega Johar, 1510111036, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 85 Halaman, 2019

ABSTRAK

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, baik terhadap status kedudukannya maupun status kewarganegaraannya. Dalam Pasal 1 Convention on the Right of the Child anak didefinisan sebagai setip manusia dibawah umur 18 tahun. Di Indonesia ketentuan hak memilih seseorang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu pemilih adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun. Sementara itu, anak berkewarganegaraan ganda baru dapat memilih kewarganegaraan nya ketika berumur 18 tahun, untuk itu apakah anak berkewarganegaraan ganda yang berusia 17 tahun dan belum memilih kewarganegaraannya dapat dikatakan sebagai pemilih. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu bagaimana pengaturan hak anak berkewarganegaraan ganda sebagai pemilih dalam hak politiknya dan bagaimana sinkronisasi hukum nasional dengan Convention on the Right of the Child tentang hak anak berkewarganegaraan ganda sebagai pemilih dalam pemilu. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian normatif didukung dengan penelitian empiris. Setelah dilakukan penelitian dan analisis anak berkewarganegaraan ganda dapat menggunakan hak nya sebagai pemilih berdasarkan Pasal 21 Ayat (3) Universal Declaration Human Right, Pasal 25 (b) Convenan on Civil and Politic Right, Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 198 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi landasan hukum pemilihan umum serentak di Indonesia. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa sinkronisasi antara hukum nasional dengan Convention on the Right of the Child mengenai hak anak berkewarganegaraan ganda terdapat ketidaksesuaian dalam hal kriteria batasan usia seorang anak dan Convention on the Right of the Child tidak mengatur hak anak berkewarganegaraan ganda sebagai pemilih.

Kata Kunci : Anak Berkewarganegaraan Ganda, Pemilih dalam Pemilu, Convention on the Right of the Child

343.02
LAR
p

PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OLEH GUBERNUR SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG NOMOR 2/P/FP/2017/PTUN.PDG TAHUN 2017

Larasati Herena Abdila, BP: 1510112124, Fakultas Hukum, 68 halaman, 2019

ABSTRAK

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan adanya UU Pemerintahan Daerah tersebut, UU ini telah menarik kewenangan Pemerintah Kab/Kota dibidang pertambangan minerba sehingga kewenangan pertambangan minerba beralih kepada Pemerintah Provinsi. Pada tanggal 16 Juni 2017 Dirjen Mineral dan Batubara atas nama Menteri ESDM melalui Pengumuman Nomor : 1279.Pm/04/DJB/2017 menyatakan terdapat 26 IUP Non Clear And Clean diantaranya merupakan IUP Non Clear And Clean yang masih aktif dan belum habis masa berlakunya per tanggal 31 Juli 2017. Berdasarkan hal inilah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang yang selalu ikut mengawal proses evaluasi IUP mengajukan permohonan pencabutan IUP tersebut kepada Gubernur Sumatera Barat sebagai Pejabat yang berwenang mencabut IUP setelah lahirnya UU Pemda tersebut. Permohonan pencabutan IUP yang bermasalah dari LBH Padang ini tidak ditindak lanjuti oleh Gubernur Sumatera Barat sehingga LBH Padang menggugat Gubernur Sumatera Barat secara hukum dengan mengajukan Permohonan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut, Gubernur Sumatera Barat tidak melaksanakan putusan tersebut dengan sepenuhnya. Oleh karena itu, rumusan masalah sehubungan dengan pencabutan IUP oleh Gubernur Sumatera Barat pasca Putusan Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG Tahun 2017 adalah 1) Bagaimana kepatuhan Gubernur Sumatera Barat terhadap putusan tersebut? 2) Bagaimana akibat hukum dari Izin Usaha Pertambangan yang tidak dicabut izinnya berdasarkan putusan tersebut? Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1) Kepatuhan Gubernur Sumatera Barat terhadap putusan tersebut adalah tidak dapat atau tidak dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, 2) Akibat hukum dari Izin Usaha Pertambangan yang tidak dicabut izinnya berdasarkan putusan tersebut adalah tetap aktif beroperasinya perusahaan tambang yang IUP nya seharusnya dicabut.

345.02
LET
t

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KENAKALAN REMAJA OLEH GENG MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG

Letecya Annisa Df 1510112038. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV (HukumPidana.81 Halaman.Tahun 2018.)

ABSTRAK

Kenakalan remaja (Juvenile Deliquence) adalah perbuatan yang dilakukan oleh remaja yang bertentangan dengan norma-norma yang dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Pada dasarnya tindak kenakalan remaja merupakan kelainan tingkah laku, tindakan yang bersifat asosial yang ada dan bisa menjerumuskan kepada kejahatan yang lebih tercela. Begitu banyak jenis-jenis kenalan remaja dan salah satu yang paling meresahkan akhir-alhir ini adalah kenakalan yang dilaukan oleh remaja anggota geng motor. Sebutan geng motor ini selalu memberikan citra yang buruk yang biasanya identik dengan tindakan anarkis. Hal itu disebabkan karena remaja anggota geng motor tidak hanya melakukan pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum seperti pelanggaran lalu lintas tapi juga berkembang ke arah kejahatan yang dapat membahayakan masyarakat seperti perampokan, penganiayaan yang sampai merenggut nyawa orang lain. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah (1)Apakah yang menajdi faktor-faktor penyebab kenakalan remaja yang dilakukan oleh geng motor di Kota Padang? (2) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan kenakalan remaja yang dilakukan oleh geng motor? Metode penelitian yang digunakan didalam penulisan ini bersifat yuridis sosiologis (empiris). Adapun hasil penelitian yaitu faktor-faktor penyebab kenakalan remaja yang dilakukan oleh geng motor ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal nya adalah tingginya hasrat berkumpul dengan teman sebaya dan kontrol dari dalam diri remaja yang lemah. Faktor eksternalnya adalah faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah dan faktor dari lingkungan sekitarnya. Dan adapun upaya kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja oleh geng motor ada 3 metode yaitu metode pre-emtif dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah yang ada di kota Padang, selanjutnya metode preventif dengan melakukan patroli rutin, melakukan razia dan inspeksi mendadak dan yang terakhir adalah metode represif dengan menjatuhkan hukuman kepada remaja geng motor yang terbukti melakukan kejahatan, dengan cara mengumpulkan bukti dan melakukan penyelidikan dan penangkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

348.04
LID
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA UANG ELEKTRONIK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/8/PBI/2014 TENTANG UANG ELEKTRONIK

Lidyana Sari, 1410111064, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 Halaman, 2019

ABSTRAK

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk membeeri perlindungan kepada konsumen.Seiring dengan perkembangan zaman, pada saat sekarang ini uang merupakan suatu barang yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mendukung kehidupannya.Uang berkembang dengan sangat pesat, dimana dahulunya hanya terdapat dua jenis uang, taitu uang giral dan kartal, namun saat ini uang sudah berkembang menjadi uang yang berbasis edia elektronik atau biasa disebut dengan uang elektronik.Uang elektronik ini disimpan dalam sebuath server atau chip.Undang-undang Perbankan mewajibkan bahwa simpanan wajib disimpan dalam Lembaga Penjamin Simpanan(LPS), namun tidak hal nya dengan uang elektronik.Uang elektronik tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan karena memiliki nominal yang relative kecil.Permasalahan yang dibahas yaitu mengenai bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum atas transaksi uang elektronik yang dilakuakkan konsumen dalam transaksi elektronik.Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang digunakan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta di masyarakat (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem solution). Penelitian ini bersifat deskriptif analisa.Hasil penelitian penulis adalah pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.Sedangkan perlindungan hukumnya adalah perlindungan secara preventif dan represif, selain itu telah dibentuk divisi perlindungan konsumen oleh Bank Indonesia.

Kata Kunci :PerlindungannHukum, e-money, Pengawasan Bank Indonesia.

343.04
LON
p

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PENYELENGGARA LAYANAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (FINTECH LENDING)

Lonica Desia, 1510112100, Fakultas Hukum 2019, 67 halaman

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen memiliki tugas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Salah satunya adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang termasuk kedalam jenis jasa keuangan lainnya. Dilihat dari pengaturan yang mengatur Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi sudah dapat mencegah kegiatan yang merugikan para pihak, namun kenyataannya masih banyak terjadi hal – hal yang merugikan dan banyaknya Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang tidak terdaftar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan terkait kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi serta tindakan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatasinya. Selanjutnya metode penulisan yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif, dilakukan dengan menggambarkan bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan teknik wawancara dan studi kepustakaan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki sistem pengawasan offsite dan onsite. Otoritas Jasa Keuangan tidak mengalami kendala terhadap layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, namun terkendala pada peraturan yang mengatur kegiatan masih sedikit dan belum dapat menentukan secara pasti bagaimana penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang bagus dan sehat.

Kata kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi,

345.08
MUH
p

PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN DAN PENDAMPINGAN OLEH PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PADANG TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN

MUHAMMAD FAUZI ALSHAFAD, 1410112064, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 89 Halaman, 2019

ABSTRAK

BAPAS adalah salah satu lembaga yang berperan penting dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Peranan BAPAS diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam menangani kasus anak, BAPAS bertugas membuat surat laporan penelitian (Litmas) mengenai latar belakang kehidupan anak sehingga anak dapat melakukan tindak pidana. Balai Pemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bersifat wajib, hal tersebut tercantum dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pentingnya peran BAPAS ini salah satunya bertujuan agar terselenggaranya keadilan khususnya terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Permasalahan dalam skripsi ini adalah, 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian bimbingan serta pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Padang terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak? 2) Apa kendala- kendala dalam melaksanakan pembimbingan serta pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Balai Pemasyarakatan 1 Kelas 1 Padang?, 3) Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pembimbingan serta pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang?.Penelitian ini dilakukan di Bapas Kelas 1 Padang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data yang didapat langsung di lapangan dari hasil penelitian dan data yang diperoleh dari informasi- informasi dari bahan studi kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan penulis di Bapas Kelas 1 Padang diperoleh data bahwa pemberian bimbingan serta pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting untuk anak pelaku. Hasil penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah 1) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dengan tiga tahap, pertama tahap awal yaitu proses penyidikan oleh kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan, tahap lanjutan yaitu perkara yang melibatkan anak pelaku tindak pidana telah memasuki proses pesidangan, tahap akhir yaitu perkara yang melibatkan anak pelaku tindak pidana telah diputus oleh hakim. 2) Kendala yang dihadapi dalam melakukan pembimbingan serta pendampingan yaitu kurangnya sarana dan prasarana, minimnya dana, kurangnya koordinasi antara sesama aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pencabulan yang dilakukan oleh anak, keluarga klien anak yang kurang membantu dalam tahap penyidikan dan kurangnya. 3) Upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Padang dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan yang di lakukakan oleh anak yaitu menambah personil Bapas, dana, sarana dan prasarana, koordinasi, sumber daya manusia, faktor keluarga klien.

345
MAD
a

ANALISIS TERHADAP PERATURAN TENTANG PENCEGAHAN KEJAHATAN TERORISME MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL

M. Adha, 1410111153, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 83 halaman, 2019

ABSTRAK

Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diperlukannya undang-undang ini karena pemerintah menyadari tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana kejahatan luar biasa, sehingga membutuhkan penangganan yang luar biasa juga. Maka dari itu dalam skripsi ini Penulis mengangkat beberapa permasalahan untuk dibahas yaitu adalah Bagaimanakah Pengaturan tentang Pencegahan terhadap Kejahatan Terorisme di Indonesia menurut Undang-Undang Nomosr 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dan Apakah Pengaturan tentang Pencegahan terhadap Kejahatan Terorisme di Indonesia saat ini telah sesuai dengan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Untuk menjawab semua pertanyaaan tersebut, penulis menggunakan metode analisis secara normatif kulitatif yang menggambarkan mengenai keadaan atau perilaku nyata dari objek serta fakta-fakta data hukum yang dianalisis. Dari pembahasan Penulis berkesimpulan bahwa yang diperoleh adalah pengaturan tentang pencegahan kejahatan terorisme sudah mengelami banyak kemajuan dibanding dengan peraturan sebelumnya. Kemudian pengaturan tentang pencegahan terhadap kejahatan terorisme di Indonesia pada dasarnya sudah sesuai dengan International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism karena Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006. Serta penulis memberikan saran kedepannya penegak hukum agar menerapkan pola koordinasi antar lembaga yang berperan dalam penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme dan menyarankan pemerintah Indonesia mendesak pemerintah Amerika untuk mengurangi kejahatan terorisme.

343.02
MRI
p

PELAKSANAAN PENYIMPANAN BARANG BUKTI HASIL PENYITAAN MILIK ORANG LAIN UNTUK KEPENTINGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Di Kepolisian Resort Kabupaten Solok)

M Rizky Anugerah, 1310112032, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,75 Halaman, 2019

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara jelas mengenai aturan yuridis pelaksanaan penyimpanan barang bukti hasil penyitaan di kepolisian resor kabupaten solok, bagaimana realita pelaksanaan penyimpanan barang bukti hasil penyitaan di kepolisian resor kabupaten solok, dan juga bertujuan untuk mengetahui kendala yang ditemui penyidik kepolisian resor kabupaten solok dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan memaparkan dengan jelas hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis atau empiris, yaitu metode pendekatan penulis yang melihat dan mengkaji peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Adapun hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan penyimpanan barang bukti berpedoman pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti, pelaksanaan penyimpanan barang bukti hasil penyitaan di kepolisian resor kabupaten solok meliputi penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, pemusnahan, admistrasi dan pelaporan, realita pelaksanaan penyimpanan barang bukti hasil penyitaan di kepolisian resor kabupaten solok telah sesuai dengan aturan yuridis yang berlaku pada kepolisian. Namun dalam proses penyimpanan barang bukti masih ada kendala- kendala yang ditemui penyidik berupa belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana, kurangnya tenaga ahli dalam struktur keorganisasian SAT TAHTI.

346.07
MHD
p

PENGATURAN PERDAGANGAN SATWA LANGKA BERDASARKAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES (CITES) DAN IMPLEMENTASINYA BAGI INDONESIA (STUDI KASUS : PENYELUNDUPAN KAKAKTUA GOFFIN (CACATUA GOFFINIANA) TAHUN 2016)

Mhd Fadhli Irfani, 1210112082, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VI (Hukum Internasional), jumlah halaman 75, Tahun 2019

ABSTRAK

Indonesia yang dikenal dengan negara megabiodiversity ini mempunyai lebih dari 17.000 pulau serta mempunyai tujuh kawasan biogeografi yang penting. Banyak pulau yang terpencil selama ribuan tahun sehingga mengakibatkan tingkat kekhasan tumbuhan dan hewannya sangat tinggi. Salah satu spesies endemik yang tedapat di Indonesia adalah kakatua goffin (cacatua goffiniana), dimana populasi terkait spesies tersebut terus menurun dikarenakan maraknya perdagangan hewan Langka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif guna mengetahui bagaimana pengaturan perdagangan berdasarkan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) dan Implementasinya bagi Indonesia, terkait kasus penyelundupan kakaktua goffin (Cacatua Goffiana).Berdasarkan hasil penelitian, agar perdagangan tumbuhan dan satwa Langka dapat terkontrol maka lahirlah Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) yang dibentuk pada tahun 1973. Dalam CITES tersebut terdapat 3 appendiks guna mengatur perdagangan satwa langka. Indonesia juga meratifikasi CITES melalui Keppres No.43 Tahun 1978. Hasil ratifikasi tersebut juga dilanjutkan dengan pembentukan Undang-Undang No 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Langka. Kakatua goffin yang terdaftar dalam appendiks I CITES diatur secara ketat perdaganannya, sedangkan dalam hukum nasional spesies tersebut terdapat dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1999.

Kata kunci : Pengaturan, Perdagangan Satwa Langka, CITES, Implementasi, Penyelundupan Kakaktua Goffin di Indonesia

344.04
MAH
p

PEMBERIAN HAK-HAK NARAPIDANA DALAM MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS NARAPIDANA PENDERITA HIV/AIDS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang)

Maharani Meza Putri, 1510112033, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 64 halaman – Tahun 2019 Pembimbing : Dr. H. Irza Rias, S.H., M.H dan Nelwitis, S.H., M.H

ABSTRAK

Setiap narapidana berada di dalam lembaga pemasyarakatan mendapat jaminan terhadap salah satu hak narapidana yaitu hak mendapat pelayanan kesehatan. Seperti yang diatur pasal 14 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatakan bahwa "Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak". Hak narapidana ini dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satunya hak tersebut juga terdapat dalam narapidana yang terjangkit HIV/AIDS khususnya dilapas kelas IIA Padang. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana dan Pasal 16 ayat 3 Peraturan Pemerintahan No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara dan Permasalahannya yaitu 1. Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana khusus penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang sebagai Hak-Hak Narapidana 2.Apa saja Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana khusus penderita HIV/AIDS. Dan metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini yaitu yuridis sosilogis. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu:1. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Khusus Penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang sebagai Hak-Hak Narapidana 2.Apa saja Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Padang dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana khusus penderita HIV/AIDS. Dan metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini yaitu yuridis sosilogis. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu:1. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Khusus Penderita HIV/AIDS Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang Sebagai Hak-Hak Narapidana. 2. pelaksanaan Kesehatan Terhadap Narapidana Khusus Penderita HIV/AIDS Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang salah satunya adalah Persamaan perlakuan dan pelayanan yaitu screening, tahapan screening ini meliputi : Penyuluhan terkait HIV/AIDS, Pengecekan Darah, Pemberian obat. 2. Kendala-kendala oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana Penderita HIV/AIDS yaitu : kendala-kendala dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana penderita HIV/AIDS berupa : Kurangnya sarana dan prasana (fasilitas), Penjaminan dari keluarga, Kurangnya pemahaman dari petugas lapas terkait pengetahuan dari HIV/AIDS, Masih kurangnya seminar-seminar atau penyuluhan yang dilakukan oleh pihak lapas terkait HIV/AIDS.

348.3
MAR
p

PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN OLEH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Marcellina Siti Nabila, BP: 1510112103, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 87 halaman, 2019

ABSTRAK

Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan menjadi hal yang sangat penting sekarang ini. Di kawasan perkotaan ruang terbuka hijau memegang peranan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas sekaligus mendatangkan dan mengendalikan kenyamanan serta keserasian estetika kota. Kondisi ruang terbuka hijau di DKI Jakarta 2018 baru mencapai 7,56%, padahal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan perkotaan harus mempunyai ruang terbuka hijau minimal 30% yang terdiri 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pemerintah dalam menyediakan RTH, apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan RTH dan upaya pemerintah untuk mengatasinya. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Cipta karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Kehutanan DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta serta Dinas Kehutanan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau di DKI Jakarta masih belum tercapai 30% hal tersebut karena ada beberapa faktor yang menghambat proses penyediaan RTH yaitu faktor keterbatasan lahan, faktor keterbatasan anggaran, faktor lemahnya pengawasan serta kurangnya pastisipasi dari masyarakat. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk memenuhi RTH di kawasan perkotaan, namun hal tersebut masih jauh dari ideal.

341.48
MAR
t

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RESOLUSI MAJELIS UMUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA NOMOR A/HRC/19/41 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN HAK ASASI LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER DAN IMPLIKASINYA BAGI SISTEM HUKUM INDONESIA

Maryam Na'imah, 1510112041, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 86 hlm, 2019

ABSTRAK

Skripsi ini dimaksudkan untuk mempresentasikan ide tentang solusi atas permasalahan keberadaan LGBT dalam sistem hukum Indonesia. Pada hakekatnya, LGBT bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila menggambarkan bangsa yang beragama dan berketuhanan, dan tidak terdapat satu agama pun yang memperbolehkan adanya hubungan sesama jenis. Namun pada kenyataannya, LGBT di Indonesia tidak dapat dinyatakan ilegal karena tidak tersedianya aturan yang jelas dan khusus mengenai keberadaan LGBT di Indonesia. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan antara pria dan wanita. Namun tidak terdapat undang-undang mengenai larangan melakukan hubungan sesama jenis, dan hal ini membuat kaum LGBT masih memiliki celah bahwa keberadaan mereka tidak dilarang di Indonesia. Resolusi MU-PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Hak Asasi LGBT bersifat rekomendasi dan tidak mengikat. Pemerintah Indonesia melindungi hak asasi setiap warga negara, namun bukan berarti Indonesia mengakui identitas gender selain pria dan wanita, dan hubungan sesama jenis karena bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Dalam hal ini HAM bersifat partikular relatif, dimana Negara mengakui HAM selama tidak bertentangan dengan ideologi bangsanya. Adanya undang-undang khusus mengenai keberadaan LGBT di Indonesia menurut penulis dapat menjadi solusi agar Pemerintah Indonesia memiliki landasan yang jelas bahwa LGBT adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang melibatkan studi kepustakaan untuk mendapatkan penemuan hukum in concerto menggunakan literature buku–buku referensi, dan lain sebagainya. Penulis menyimpulkan: 1. Eksistensi kaum LGBT dalam hukum internasional dilindungi oleh Resolusi MU-PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Hak Asasi LGBT setelah dikeluarkannya LGBT dari daftar mental disorder oleh American Psyciatric Association. 2. Resolusi MU-PBB tersebut bersifat rekomendasi dan tidak mengikat, dan isi dari resolusi bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, sehingga tidak dapat diberlakukan di Indonesia.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, LGBT, Resolusi MU-PBB, Sistem Hukum Indonesia

345
MAU
a

ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) FIKTIF (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Tipikor Padang Nomor 01/Pid.Sus- TPK/2018/PN Pdg)

Maulana Fajri Adrian, 1510112096, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 71 halaman

ABSTRAK

Kasus tindak pidana korupsi surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif pada Dinas Prasjaltarkim Sumatera Barat telah menyebabkan kerugian negara cq kerugian daerah sebesar Rp 62.506.191.351,25 (enam puluh dua milyar lima ratus enam juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah dua puluh lima rupiah). Kasus ini menjadi sejarah buruk praktik tindak pidana korupsi di Sumatera Barat dan menjadi sorotan karena hanya menyeret seorang pegawai bernama Yusafni sebagai pelaku tunggal dan hal ini tentu bertentangan dengan konsep dasar bahwa korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Yusafni selaku pelaku tindak pidana korupsi kasus Surat Pertangggungjawaban Fiktif Dinas Prasjaltarkim Sumatera Barat ?, 2) Bagaimana analisis terhadap pidana tambahan dalam bentuk pidana uang pengganti yang seluruhnya dibebankan terhadap Yusafni, apabila memperhatikan Yusafni bukanlah aktor intelektual (intelektual dader) ?. Metode penulisan dalam skripsi ini secara Yuridis Normatif serta penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian di dalam skripsi ini yaitu 1) Terhadap pertimbangan yuridis terakit unsur penyertaan (deelneming) & unsur memperkaya diri, orang lain, dan korporasi tidak diuraikan dengan jelas dan tegas.2) Tidak ditemukan pertimbangan terkait pidana tambahan uang pengganti yang dibebankan terhadap terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan dalam pemulihan dan pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh penyertaan dalam tindak pidana korupsi perlu disesuaikan dengan peranan/keterlibatan para pihak unsur penyertaan, agar pidana uang pengganti yang dibebankan terhadap terdakwa/para terdakwa lebih proposional sesuai dengan keterlibatan dalam tindak pidana korupsi dan tingkat kesalahan dari masing-masing pihak yang terlibat.

Kata kunci : penyertaan, pertimbangan hakim, dan kerugian negara

343.04
MEL
p

PELAKSANAAN PERJANJIAN PADA PT. HOME CREDIT DI SERANG

Melisa, 1510112187, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 60 halaman, 2019

ABSTRAK

Tingginya tingkat kebutuhan akan barang-barang konsumtif di lapisan masyarakat dan terbatasnya kemampuan daya beli dari sebagian orang utuk membeli secara tunai dilain pihak membuat perusahaan pembiayaan konsumen (consumer finance) banyak diminati masyarakat. PT. Home Credit Indonesia merupakan salah satu Perusahaan Pembiayaan yang berfokus pada alat-alat elektronik, handphone, home living, barang-barang bangunan dan lain-lain. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen tiap bulannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen serta hubungan hukum dari berbagai pihak yang timbul akan perjanjian pembiayan dan penyelesaian masalah yang timbul jika terjadi wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Home Credit Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen pada perusahaan tersebut merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak PT. Home Credit Indonesia dan pihak konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen selalu di buat dalam bentuk tertulis dengan menggunakan perjanjian baku. Dapat disimpulkan bahwa lembaga pembiayaan konsumen merupakan alternative guna memperoleh barang-barang yang dibutuhkan konsumen, yang tidak sanggup membeli barang secara tunai oleh masyarakat dengan daya beli yang terbatas.

342
MER
a

ANALISIS TERHADAP PERGESERAN DELIK KORUPSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016

Merisa Anggraini Amja, Nomor Buku Pokok: 1510111183, Fakultas Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, MK mempunyai salah satu kewenangan, yaitu menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Setidaknya ada tiga putusan yang dikeluarkan oleh MK yang berkaitan dengan pengujian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terhadap UUD 1945, yaitu pertama, Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006 memutuskan kata "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dianggap tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, Putusan MK Nomor 44/PUU-XI/2013 dinyatakan ne bis in idem dengan putusan yang sebelumnya. Ketiga, Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 memutuskan kata "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut akan mengubah secara kualifikasi delik dari tindak pidana korupsi dari delik formil menjadi delik materiil. Konsekuensinya, jika akibat yang dilarang, yaitu "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" belum atau tidak terjadi meskipun unsur "secara melawan hukum" dan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi maka berarti belum terjadi tindak pidana korupsi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Faktor-faktor apakah yang mendorong perubahan Putusan MK terkait frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" ? dan (2) Bagaimana implikasi hukum Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap delik korupsi dalam UU Tipikor ?. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menganalisis data secara kualitatif. Dasar pertimbangan Hakim Konstitusi dalam merubah pendiriannya pada Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan mengkhususkan diri dengan mempertimbangkan realita kondisi hukum norma (law in text) dengan hukum yang terjadi dalam kenyataan (law in context). Maka konsep kerugian negara mengalami perubahan, yaitu penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi actual loss. Dilakukannya upaya sinkronisasi dan harmonisasi antar instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang baru dengan yang sebelumnya, sebagaimana UU AP telah mengubah cara pandang hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam cara penyelesaian berdasarkan hukum administrasi. Penyelesaian dengan hukum pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium). Sejak keluarnya Putusan MK Nomor 25/PUUXIV/2016 penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK banyak dinilai baik dari kalangan publik, akademisi hingga kalangan praktisi, walaupun akan mengalami kesulitan dalam perjalanannya.

344.09
MER
p

PERKAWINAN SEMARGA MASYARAKAT BATAK MANDAILING DI DESA HUTA PUNGKUT JAE KABUPATEN MANDAILING NATAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT

MERY PUTRIANI NASUTION, 1510111133, Universitas Andalas, 65 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Hukum perkawinan merupakan seperangkat aturan yang berkaitan dengan pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan yang terjalin diantara keduanya, disahkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan disertai dengan tradisi adat tertentu dari kedua belah pihak. Bagi Masyarakat suku Batak Mandailing di desa Huta Pungkut Jae Kabupaten Mandailing Natal perkawinan yang terjadi ditengah masyarakat bersifat eksogami dan perkawinan dilakukan dengan orang yang berbeda marga karena orang yang memiliki marga yang sama dianggap namariboto. Di desa Huta Pungkut Jae perkawinan semarga pernah terjadi. Penulis menguraikan pokok permasalahan yang akan dikaji yaitu: (1) Apa penyebab terjadinya perkawinan semarga? (2) Apa upaya yang dilakukan pemangku adat untuk mencegah terjadinya perkawinan semarga? (3) Apa akibat hukum perkawinan semarga dalam suku Batak Mandailing tersebut?. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dan data yang digunakan data sekunder dan data primer , dengan melakukan studi kepudtakaan juga melakukan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Penyebab terjadinya perkawinan semarga di desa Huta Pungkut Jae dipengaruhi oleh beberapa faktor diantanya; pengaruh migrasi yang menjadikan keterikatan terhadap hukum adat berkurang, kemudian mayoritas masyarakat desa Huta Pungkut Jae yang beragam Islam membuat masyarakat dapat mengesampingkan aturan hukum adat karena merasa bahwa dalam ketentuan hukum Islam tidak ada larangan mengenai perkawinan semarga. (2) Upaya yang dilakukan hatobangon (pemangku adat) dalam mencegah terjadinya perkawinan semarga dalam kasus yang terjadi di desa Huta Pungkut Jae yaitu; penyuluhan hukum yang dilakukan di balai desa dan mesjid sebagai bentuk pencegahan peristiwa tersebut tidak terulang kembali dan upaya untuk membuat peraturan desa walaupun belum terwujud. (3) Sanksi yang diberikan dalam kasus tersebut yaitu; pertama, inda margabung tidak diperbolehkan duduk dalam acara adat, tidak diperkenakan memberikan solusi atau bicara dalm forum adat (di sopo godang), kecuali hanya datang dalam acara pesta dan makan-makan saja. Begitu pula sebaliknya, jika yang bersangkutan mengadakan horja (pesta) maka tidak akan mendapat bantuan dari pihak Dalihan Na Tolu secara adat dan ipaasing, Bagi mereka yang melakukan perkawinan satu marga dengan diusir dari kediamannya walaupun ia diusir dan diasingkan namun tetap diberi bekal dan diberi nasehat agar suatu saat ia menyadari kesalahannya dan menanggap ini sebagai pembelajaran dari hukuman adat.

345
MES
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Di Polresta Padang)

Messy Maita Sari, 1310111079, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 84 halaman ,Tahun 2019

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan Hukum (rechstaat). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sesuai dengan pasal 28D ayat (1) Undamg-Undang Dasar 1945. Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik mengambil judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Di Polresta Padang). Penelitian ini dilakukan di Polresta Padang. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang didapat langsung dari lapangan dengn metode wawancara dan data sekunder yaitu informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Peranan LPSK dan penyidik dari bagian perlindungan perempuan dan anak (PPA) Kepolisian Resort Padang terhadap perlindungan korban sudah lebih baik dari sebelumnya walaupun keberadaan LPSK tidak ada di daerah khususnya Sumatera Barat. LPSK dengan cepat tangap datang ke lokasi untuk memberikan upaya perlindungan setelah diajukan surat permohonan,namun memang belum maksimal. Upaya-upaya perlindungan hukum yang telah diberika kepada korban perkosaan .Kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik di Polresta Padang dalam memberikan perlindungan hukum pada korban perkosaan antara lain Sarana dan prasarana di Polresta Padang yang kurang memadai dalam menangani korban perkosaan selama proses penyidikan. Upaya yang dilakuakn untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan menempatkan penyidik bagian perlindungan permpuan dan anak (PPA) Polresta Padang di suatu ruang yang memiliki bilik-bilik khusus agar korban merasa aman dan nyaman selama memberikan keterangan.

347.05
MHD
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PENYEWA LAHAN MILIK PT. KAI DIVRE II SUMBAR TERKAIT PENGAMBILALIHAN TANAH ASET DI KECAMATAN GUGUAK PANJANG KOTA BUKITTINGGI

MHD. Chairil Ambya, 1310112072, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata Murni (PK I), 75 halaman – Tahun 2019) Pembimbing : Linda Elmis S.H., M.H dan Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H

ABSTRAK

Dalam era globalisasi sekarang ini terdapat kecenderungan tanah dianggap sebagai komoditas dan lebih banyak dimanfaatkan untuk mendukung investasi skala besar, sedangkan fungsi sosial tanah dan peranannya sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat jauh dilupakan hingga pada akhirnya rakyat terutama golongan ekonomi lemah merasa diperlakukan kurang adil dalam penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Karena persoalannya tidak sama disetiap daerah, maka titik berat kebijaksanaanya diserahkan para penguasa daerah, hingga dapat lebih diperhatikan segi - segi dan coraknya yang khusus sesuai situasi dan kondisi daerah.. Rumusan masalah: 1. Bagaimana terjadinya perjanjian sewa antara masyarakat dengan PT. Kereta Api? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat penyewa tanah emplacement? 3. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi masyarakat penyewa tanah emplacement?. metode penelitian yang dipakai ialah pendekatan yuridis empiris dan sifat penelitiannya yaitu deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu : 1. Masyarakat yang menempati tanah emplacement stasiun milik PT. Kereta Api Indonesia tersebut terikat pada perjanjian kerjasama penggunaan aset dengan berdasarkan perjanjian sewa,perjanjian sewa masyarakat dengan PT. Kereta Api Indonesia menggunakan jenis perjanjian/kontrak baku yang berlangsung dalam jangka waktu satu tahun dan lima tahun untuk BUMN. 2. Bahwa dalam penanganan masalah penggusuran ini dapat dilakukan upaya preventif maupun upaya represif oleh para pihak dan pihak terkait (pemerintah) dalam rangka menjamin terselenggaranya hak dan kewajiban masing – masing pihak yang bersengketa. 3. Berdasarkan hasil analisis dan wawancara yang penulis lakukan pada beberapa narasumber,diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum secara preventif telah dilaksanakan oleh para pihak bersama DPRD namun dilakukan setelah penggusuran terlaksana dengan dikeluarkannya rekomendasi penundaaan penggusuran dari DPRD kepada PT. Kereta Api Indonesia sehingga menimbulkan keadaan ”Quo Vadis ”.

343.04
MIF
u

UPAYA KEJAKSAAN DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA KARENA TINDAK PIDANA KORUPSI: Studi di Kejaksaan Negeri Padang

Miftahul Fikri, 1510112155, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 84 halaman

ABSTRAK

Salah satu aspek keberhasilan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah keberhasilan mengembalikan kerugian keuangan negara. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, kejaksaan merupakan lembaga yang berperan penting dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tersebut. Adapun yang menjadi bahasan dalam skripsi ini adalah melihat upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Padang dalam mengembalikan kerugian keuangan negara karena tindak pidana korupsi. Dalam penulisan skripsi ini yang akan menjadi rumusan masalahnya adalah,1.Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi?. 2.Apa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana korupsi?. Metode penulisan dalam skripsi ini secara yuridis sosiologis, di mana pendekatan masalah melalui peraturan perundang-undangan dan teori yang ada dihubungkan dengan kenyataan dilapangan, dengan melalui penelitian lapangan (field research) pada Kejaksaan Negeri Padang. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu, upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Padang dalam mengembalikan kerugian keuangan negara karena tindak pidana korupsi dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu, tahap penyidikan dengan melakukan pelacakan aset dan penyitaan, tahap penuntutan dengan menjerat terdakwa dengan membebankan uang pengganti, dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi dengan upaya persuasif terhadap terpidana agar membayarkan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Padang yaitu, kurangnya dana atau fasilitas bagi kejaksaan untuk dapat optimal melakukan pelacakan aset dan penyitaan, kemudian sulit menemukan aset karena sudah tidak lagi atas nama tersangka. Dalam tahap penuntutan tidak ada kendala berarti selain membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Terakhir pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan, kejaksaan hanya bisa melakukan upaya persuasif kepada terpidana, karena tidak bisa melakukan pemaksaan jika terpidana tidak bersedia membayarkan.

Kata kunci : korupsi, keuangan negara, kerugian negara

345
MIF
p

PELAKSANAAN TUGAS JAKSA BIDANG INTELIJEN DI KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

Miftahul Irsyadi. 1510111181. Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Andalas. 70 Halaman.Tahun 2019

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah pelaksaan tugas Jaksa Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ? 2. Kendala-kendala apa saja yang ditemui oleh Jaksa Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi serta apa saja upaya menanggulangi hambatan tersebut ? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian ini bersifat Deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, Jaksa Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bukittinggi bertugas: pertama, melakukan Intelijen penyelidikan. Kedua, pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Kendala-kendala yang ditemui oleh Jaksa Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi yaitu Faktor keterbatasan sumber daya manusia (SDM), Terbatasnya anggaran dalam mendukung kegiatan Intelijen, Saksi atau informan tidak kooperatif dalam memberikan informasi. Upaya yang dilakukan Jaksa Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Bukittinggi dalam menanggulangi hambatan tersebut yaitu Jaksa pada seksi pidana khusus diperbantukan untuk penyelidikan pada seksi Intelijen Kejaksaan. Kejaksaan Negeri Bukittinggi menyampaikan permintaan penambahan anggaran kepada Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Menjalin komunikasi yang baik dan intensif serta memberikan jaminan dan perlindungan kepada saksi atau informan.

345
MIR
p

PENGAWASAN TERHADAP HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MAHKAMAH AGUNG

Miranda Pebtriezky, Nomor Buku Pokok: 1510112002, Fakultas Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Walaupun kekuasaan kehakiman tersebut dinyatakan merdeka tidaklah berarti para hakim dan badan peradilan itu mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang luar biasa tanpa batas. Bagaimanapun juga mereka tetap masih dibatasi oleh aturan-aturan hukum yang ada serta nilai-nilai moral dan etika yang hidup dan berkembang di masyarakat. Namun kondisi yang terjadi saat ini, masih banyak hakim yang mencoreng peradilan Indonesia terutama hakim yang terlibat kasus korupsi. Hal ini menyebabkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan para hakim semakin terpuruk. Oleh karena ketidakpercayaan publik terhadap hakim itulah, maka di pengadilan khusus di adakan Hakim ad hoc, salah satunya yaitu pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hakim ad hoc di adakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena rendahnya faktor kredibilitas lembaga yang mengadili perkara korupsi sebelumnya. Namun berdasarkan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat 19 Hakim yang sudah kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang 2005 hingga 2018. Dari 19 Hakim tersebut setidaknya ada 10 diantaranya yang merupakan Hakim ad hoc Tipikor. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan mengingat Hakim ad hoc Tipikor yang diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas lembaga peradilan namun kenyataannya justru ikut terjerumus ke dalam Tindak Pidana Korupsi. Terkait masih terjadinya korupsi di badan peradilan, Mahkamah Agung selaku pelaksana pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman mendapat sorotan dari berbagai pihak yang menilai bahwa kinerja Mahkamah Agung dalam melakukan fungsi pengawasan belum maksimal. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah 1) Bagaimanakah pengawasan terhadap Hakim ad hoc Tipikor oleh Mahkamah Agung 2) Bagaimana upaya optimalisasi pengawasan terhadap hakim ad hoc Tipikor oleh Mahkamah Agung. Untuk menjawab permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

343.09
MON
p

PENGAWASAN TERHADAP DOKUMEN KEIMIGRASIAN ORANG ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS I PADANG

Monica Claudya Suhendra, 1510111043, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 74 halaman, 2019

ABSTRAK

Dokumen Keimigrasian merupakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. Terhadap Dokumen Keimigrasian tersebut tidak sedikit orang asing melakukan pelanggaran di Kantor Imigrasi Kelas I Padang diantaranya adalah melanggar batas waktu izin tinggal (overstay) dan penyalahgunaan visa. Untuk itu diperlukan pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing. Untuk mewujudkan pengawasan Keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan Orang Asing di Indonesia Menteri Hukum dan HAM membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi terkait di tingkat Pusat maupun Daerah dan jumlah anggota Tim Pora tersebut berbeda di setiap tingkat Pusat maupun Daerah sesuai badan atau instansi terkait. Yang menjadi landasan utama pelaksanaan pengawasan terhadap Dokumen Keimigrasian orang asing adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif analitis, menggunakan jenis data primer dan data sekunder, sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan terhadap dokumen keimigrasian orang asing terdiri dari pengawasan administrasif dan pengawasan lapangan. Pengawasan adminstratif meliputi pemeriksaan tentang dokumen keimigrasian dan pengawasan lapangan dilakukan dalam bentuk pemantauan, patroli, pengumpulan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Dokumen Keimigrasian ditemukan pelanggaran yaitu penyalahgunaan visa berjumlah 13 orang, serta melanggar batas waktu izin tinggal (overstay) berjumlah 33 orang. Sehingga pelaksanaan pengawasan terhadap Dokumen Keimigrasian orang asing belum berjalan secara efektif, kelemahan dalam pengawasan bukan terletak pada sistem tetapi terletak pada keterbatasan jumlah petugas bagian pengawasan yaitu berjumlah 3 orang yang tidak sebanding dengan Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Padang. Dalam rangka penegakan hukum sebagai tindak lanjut dari pengawasan, penindakan merupakan satu hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan. Penegakan hukum terhadap orang asing yang melanggar penggunaan visa dan izin tinggal (overstay) di Kantor Imigrasi Kelas I Padang dilaksanakan oleh Seksi Penindakan yang pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu pengenaan sanksi berupa tindakan keimigrasian dalam bentuk administratif berupa pengenaan biaya beban, deportasi.

346.01
MAR
p

PEERAPAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KELAS II LUBUK SIKAPING MENURUT PERMA NO 1 TAHUN 2016

M. Arif Alwi Salam, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2019, PK I, 69 halaman

ABSTRAK

Mediasi merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh para pihak yang ingin menyelesaikan sengketanya di Pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata dan sesuai pula dengan Pasal 130 HIR dan 154 RBG. Untuk menyempurnakan pengaturan mengenai mediasi di Pengadilan maka Mahkamah Agung megeluarkan Pengaturannya, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan adanya Pengaturan tersebut Mahkamah Agung mengharapkan tingkat keberhasilan mediasi di tingkat pertama dapat meningkat sehingga mengurangi jumlah penumpukan perkara di tingkat Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sebagai salah satu Pengadilan Negeri tingkat pertama yang telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dalam kenyataannya masih belum dapat memberikan hasil sesuai yang diharapkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini dapat dilihat dari terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi hanya sebanyak Tiga perkara saja yang berhasil melalui proses Mediasi yaitu perkara nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lbs, 11/Pdt.G/2017/PN Lbs, 2/Pdt.G/2018/PN.Lbs dan selebihnya gagal. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas II Lubuk Sikaping dengan rumusan masalahnya yaitu : 1. Apakah penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping kelas II sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, 2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Kelas II B Lubuk Sikaping. Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah melalui pendekatan yang bersifat yuridis empiris, dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan datanya yaitu studi dokumen dan penelitian lapangan melalui wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Kelas II Lubuk Sikaping sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sedangkan kendalanya dapat dilihat dari faktor non teknis yaitu ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya mediasi dan ada pula faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi yaitu adanya itikad baik dari para pihak yang kemudian di dukung oleh sumber daya manusia atau hakim yang cakap sebagai mediator.

343.04
MUH
k

KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Muhammad Aulia Akbar, 1210113023, Hukum Tata Negara,Fakultas Hukum Universitas Andalas 2018

ABSTRAK

Otoritas Jasa keuangan lembaga negara independen yang bebas dari campur tangan pemerintah, yang mana OJK memiliki kewenangan, fungsi serta tugas dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan dalam sektor perbankan,pasar modal, perasuransian, dana pensiun lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainya. Hal ini di maksud di dalam Undang- undang 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adapun masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana kedudukan lembaga Negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Dan Bagaimanakah pemilihan komisoner Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?. Dalam penulisan skripsi ini penulis menerapkan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan atas studi dokumen, yaitu penelitian yang dilakukan atau di tujukan pada peraturan peraturan tertulis atau disebut juga dengan data sekunder. Sumber data yang digunakan penulis yaitu studi kepustakaan, merupakan metode pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berkaitan dengan status independensi Otoritas jasa keuangan bedasarkan undang- undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. kedudukan lembaga Negara independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dibentuk dengan proses yang tak seragam. Beberapa didirikan dengan dasar hukum undang-undang (lembaga negara kelompok kedua), sementara sebagian lainnya dibentuk atas dasar perintah keputusan presiden (lembaga negara kelompok ketiga). Pemilihan Komisioner yang diatur sesuai pada Pasal 11-16 UU OJK sudah cukup baik dan menjamin akunbilitas, dimana pihak legislasi yaitu DPR RI lah yang memilih Komisioner OJK berdasarkan usulan Presiden.

345
MUH
p

PENERAPAN ELEKTRONIK TILANG (E-TILANG) TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA PADANG

Muhammad Fadhel Raef Dato, 1410111033, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana, 75 Halaman, tahun 2018

ABSTRAK

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera bagi semua lapisan masyarakat. Peran aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia sangat penting dalam hal ini. Dengan kemajuan teknologi kepolisian menerapkan sistem elektronik tilang (E-Tilang) untuk mempermudah proses tilang dan mengurangi pemungutan biaya yang tidak pada tempatnya. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana penerapan pemakaian elektronik tilang (E-Tilang) adalah pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum Polres Kota Padang. Kedua, apa saja kendala dalam penerapan elektronik tilang (E-Tilang) terhadap pelanggaran lalu lintas diwilayah hukum Polres Kota Padang. Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah yuridis-empiris (sosiologis). Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut, pertama Penerapan sanksi elektronik tilang (E-Tilang) terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum polres Kota Padang, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 272 Ayat (1) menjelaskan bahwa, Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik. Untuk pembayaran tilang seluruh petugas lalu lintas telah dilengkapi aplikasi Elang (Elektronik Tilang) yang terpasang di ponsel pintar milik petugas. Aplikasi ini terhubung dengan sistem yang dibuat oleh bank BRI. Kedua, belumtersosialisasinya secara masif kepada masyarakat. Kepolisian baru melakukan sosialisasi pada tataran lalu lintas jalan raya, belum masuk ke dalam lapisan- lapisan masyarakat misalnya ke sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan di tengah- tengah masyarakat. Artinya berdasarkan kendala yang dihadapi efektifitas penerapan sanksi elektronik tilang (E-Tilang) di Kota Padang masih belum berjalan efektif. Itu sebabnya, perlu instrumen hukum dan sosial dalam rangka mengefektifkan penerapan tersebut. Sehingga kebijakan tersebut dapat mengurangi terjadinya praktik Conflict of Interest (COI) antara pihak Kepolisian dengan pihak-pihak lain dan tindakan-tindakan pungutan liar lainnya serta terkendala dalam hal teknologi, karena kemajuan tegnologi di Kota Padang belum merata.

346
MUH
p

PENENTUAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG- PEKANBARU (RUAS JALAN PADANG-SICINCIN)

Muhammad Fajri, 1510112084, Fakultas Hukum Unand, 2019, 80 Halaman, Pembimbing: Dr. Kurniawarman, S.H., M.Hum dan Darnis, S.H., M.H.

ABSTRAK

Sebagai perwujudan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Negara diberikan kuasa untuk menjalankan pemerintahan termasuk dalam pengelolaan terhadap bumi, air dan kekayaan alam Indonesia dengan tetap memperhatikan kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut dapat dimanifestasikan melalui pembangunan jalan tol sebagai upaya memberikan kenyamanan dan fasilitas-fasilitas untuk kepentingan umum. Agar tetap memperhatikan kemanfaatan bagi pemilik tanah, maka pemerintah memiliki solusi dengan melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Masalah yang timbul kemudian dari pengadaan tanah yaitu lambannya proses pembebasan lahan disebabkan masyarakat tidak mau memberikan tanahnya akibat ganti rugi yang diberikan pemerintah dinilai sangat kecil. Permasalahan yang menjadi objek penelitian diantaranya : (1) proses penentuan nilai ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum Jalan Tol Padang-Pekanbaru, (2) perananan tim penilai independen (appraisal) dalam penentuan ganti kerugian, (3) peran pengadilan dalam penentuan ganti kerugian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis ataupun empiris, jenis data yang digunakan yaitu data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan data sekunder, sumber data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan:

Kata kunci: Penentuan, Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah

342
MUH
p

PENGALIHFUNGSIAN LAHAN RUANG TERBUKA HIJAU UNTUK KEPENTINGAN PELEBARAN JALAN DI KAWASAN KHATIB SULAIMAN

Muhammad Fathur Rifqi, 150112102, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VII (Hukum Administrasi Negara), Jumlah halaman 60, Tahun 2019

ABSTRAK

Issue kemacetan merupakan salah satu issue yang dihadapi oleh hampir di setiap Kota di seluruh Indonesia, termasuk diantaranya Kota Padang. Kota Padang saat ini tengah menghadapi adanya issue peningakatan tingkat kemacetan di kawasan Jalan Khatib Sulaiman. Hal ini terjadi semenjak adanya Transmart sebagai salah satu pusat keramaian di Kota Padang yang mengakibatkan tingkat kemacetan di kawasan tersebut meningkat. Untuk menanggulangi permasalahan atau issue tersebut, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Peanataan Ruang Kota Padang melakukan upaya pelebaran jalan di sepanjang Jalan Khatib Sulaiman dengan cara membongkar media jalan yang merupakan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang Jalan Khatib Sulaiman dan mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi Ruang Terbuka Hijau menjadi Jalan. Pembongkaran media jalan yang merupakan Ruang Terbuka Hijau ini menuai Pro dan Kontra antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Hal ini dikarenakan menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang pembongkaran media jalan yang merupakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang tidak tepat. Ruang Terbuka Hijau dan Jalan sama-sama merupakan fasilitas publik atau kepentingan umum. Oleh karena itu, setelah dilakukan diskusi-diskusi antara kedua belah pihak maka disepakati bahwa media jalan dapat dibongkar dan dipersempit dari yang sebelumnya 5 meter menjadi 1 meter. Pertimbangan dari Dinas Lingkungan Hidup yaitu demi mewujudkan Program Walikota Padang yaitu Kota Padang menjadi Kota Pariwisata sehingga dalam hal ini urgensi Jalan lebih penting dibandingkan Ruang Terbuka Hijau. Menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang media jalan dapat dipergunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jika suatu saat dibutuhkan untuk kepentingan jalan, namun disisi lain media jalan menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau merupakan Ruang Terbuka Hijau Publik yaitu Jalur-jalur Hijau Jalan. Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ruang Terbuka Hijau dijelaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau Publik tidak dapat dialihfungsikan. Namun dalam prakteknya Ruang Terbuka Hijau Publik ini di alihfugsikan menjadi Jalan. Tindakan Pemerintah yang seperti ini akan menjadi preseden buruk bagi Pemerintah dalam melakukan kegiatan Pembangunan yang selanjutnya dan dikhawatirkan akan mengakibatkan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang.

Kata Kunci : Issue Peningkatan Kemacetan, Pelebaran Jalan, Pengalihfungsian Lahan Ruang Terbuka Hijau, Pro dan Kontra, Preseden Buruk.

345
MUH
f

FUNGSI VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Di Polres Kabupaten Padang Pariaman)

MUHAMMAD IKHSAN, 1510111090, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 95 Halaman

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin segala hak-hak warga negaranya yang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, Termasuk tindak pidana pembunuhan, pada kasus ini dibutuhkan hubungan kerja sama antara aparat penegak hukum dengan ilmu kedokteran dalam mengungungkap suatu kasus unuk mencari kebenaran materil. Seperti yang diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP yaitu yang berwenang meminta visum et repertum ialah penyidik, seorang dokter sama sekali tidak diperbolehkan memohonkan visum et repertum atau mencabutnya. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, mengetahui bagaimana cara mendapatkan Visum et repertum pada tindak pidana pembunuhan biasa pada tingkat penyidikan di Polres Kaupaten Padang Pariaman dan Untuk mengetahui fungsi visum et repertum pada tahap penyidikan dalam mengunggkap tindak pidana pembunuhan di Polres Padang Pariaman.Dalam penulisan ini, penulis menggunakan meyode yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.Visum et repertum sebagai alat bukti yang sah terdapat pada Pasal 184 ayat (1) jo pasal 187 huruf c KUHAP, dimana keterangan dokter ahli yang ditemukan didalam nya wajib dipercaya sepanjang belum adanya bukti lain yang melemahkannya. Visum et repertum adalah alat bukti otentik yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat oleh dokter yang berwenang dalam memeriksa korban tindak pidana pembunuhan. Visum et repertum juga sangat berfungsi dalam membuktikan suatu pekara pidana terkhusunya tindak pidana pembunuhan sepeti pada kasus yang diteliti oleh penulis, denga adanya visum et repertum ini dapat membantu mencari kebenaran materil dan unsur-unsur terjadinya tindak pidana pembunuhan.Dalam menemukan tersangka bukti visum et repertum ini merupakan alat bukti yang sangat diperlukan pada proses penyidikan. Kekuatan visum et repertum ini suatu hal yang dapat membuktikan bahwa tindakan tersebut menyatakan bahwa benar terjadi pembunuhan. Oleh sebab itu, visum et repertum mempunyai fungsi yang sangat penting bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan pada tahap penyidikan. Fungsi visum et repertum ini juga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhi putusan pada saat peradilan.

341
MUH
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ETNIS ROHINGYA KORBAN KEKERASAN DI MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Muhammad Ridwan, 1310112135, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 62Halaman

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak marak terjadi sebagaimana yang dialami anak-anak etnis Rohingya. Tindakan yang dilakukan oleh tentara Myanmar tergolong tindakan kejahatan Genosida. Sebagian besar korban dari kekerasan tersebut adalah anak-anak. Dari tahun 2012 hingga 2017 kekerasan terhadap anak-anak masih saja terjadi. Pada tahun 2017 ada 9.000 etnis Rohingya meninggal akibat kekerasan diantaranya 1.000 anak-anak etnis Rohingyayang menjadi korban kekerasan tersebut. Dari jumlah tersebut sebanyak 69% meninggal akibat senjata api, 15% dibakar hidup-hidup, 7% dipukul dengan benda tumpul, dan sebanyak 2% akibat ranjau darat. Kondisi yang dialami anak-anak etnis Rohingya membutuhkan perlindungan hukum. Dari kekerasan tersebut menimbulkan trauma yang mendalam terhadap anak-anak yang menyaksikan kekerasan yang terjadi. Akibatnya banyak anak-anak yang mengungsi ke negara bangladesh untuk mencari tempat yang lebih aman dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh negara Myanmar. Anak sebagai penerus bangsa seharusnya mereka mendapatkan perlindungan hukum baik Nasional Maupun Internasional. Pada pembahasan skripsi ini akan dibahas bagaimana pendekatan hukum internassional terhadap kasus ini dengan apa yang terjadi lapangan. Permasalaha yang dibahas : (1). Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak etnis Rohingya korban kekerasan di Myanmar berdasarkan hukum internasional? (2). Bagaimana upaya hukum untuk penyelesaian kasus kekerasan pada anak etnis Rohingya di Myanmar? penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan pada penulisan ini adalah (1). Perlindungan terhadap anak-anak yang mengalami kekerasan berdasarkan DUHAM dan Konvensi Hak Anak. (2) Penyelesaian kekerasan terhadap anak etnis rohingya harus dapat dihentikan dan menghukum pelaku kekerasan tersebut berdasarkan Statuta Roma 1998.

345
MUH
p

PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRES TANAH DATAR

Muhammad Rizky, BP 1310111201, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Sistem Peradilan Pidana (V), 86 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Anak merupakan bagian dari generasi mud a sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.Terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak tidak terlepas dari kontrol sosial dari orang tua dan lingkungan sekitarnya.Anak tetap harus dilindungi meskipun dia sudah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Kenakalan anak pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya lingkungan tempat tinggal, keadaan keluarga, kondisi ekonomi dan sosial, dan kenakalan ini dapat berdampak buruk bagi pribadi seorang anak seperti salah satunya penyalahgunaan narkotika. Yang menjadi permasalahan penulis yaitu: Bagaimana pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotikadan faktor-faktor yang menjadi pendorong dan menghambat penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Diskresi kepolisian merupakan kebijakan yang diambil polisi sebagai jalan keluar yang ditempuh berdasarkan penilaiannya sendiri terhadap permasalahan hukum yang belum diatur atau yang sudah diatur oleh Undang-Undang. diskresi kepolisian berdampak baik terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mana anak tersebut diposisikan sebagai korban terhindar dari efek negatif pemenjaraan. Tetapi disisi lain kebijakan pemberian diskresi oleh kepolisian berpeluangkan untuk penyalahgunaan wewenang. Sehingga perlu pengawasan atau pengendalian oleh pihak terkait agar pemberian diskresi tersebut tercapai tujuannya. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika hendaknya melihat syarat-syarat yakni pengguna narkotika adalah anak dibawah umur dan sebagai korban. Jangan sampai anak dimanfaatkan oleh bandar narkotika yang besar untuk mengedarkan barang haram tersebut dengan dalih anak di bawah umur akan diberikan diskresi oleh kepolisian. Pemahaman polisi dalam pemberian diskresi juga sangat penting guna optimalnya pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Serta pemberian diskresi merupakan perwujudan terhadap hak asasi manusia anak dan mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkotika oleh anak.

342
MUI
p

PERMASALAHAN HUKUM KEWENANGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH EKSEKUTIF (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN NOMOR 56/PUU-XIV/2016)

Muihsin Habib, 1410112147, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 73 halaman, 2019

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 telah membawa perubahan yang signifikan dalam hal pembatalan Peraturan Daerah di Indonesia. Diantara pasal-pasal yang diuji dalam putusan tersebut adalah perihal konstitusionalitas Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagai wakil pemerintahan Pusat dalam mencabut Perda yang diamanatkan oleh Pasal 251 ayat (1)dan (2) UU nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah . Berdasarkan putusan tersebut,Mahkamah menyatakan bahwa pencabutan dan pengujian Perda Oleh Kemendagri dan Gubernur adalah inkonstitusional melanggar Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pengujian dan pembatalan suatu Perda adalah ranah dan kewenangan lembaga yudikatif dalam hal ini adalah Mahkamah Agung. Penelitian ini mengkaji, pertama bagaimana putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengujian UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? Kedua, apa permasalahan yang timbul akibat dua putusan tersebut ? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi pustaka, dan membandingkan peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan permasalahan yang terkait, kemudian dengan asas- asas hukum atau doktrin yang ada, serta memperhatikan praktik yang terjadi sebagai sebuah kajian penerapan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri dan Gubernur tidak memiliki kewenagan executive review yang tidak terdapat pada UUD 1945 dan putusan menteri dan gubernur tidak dikenal dalam sistem perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada hierarki peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Permasalahan yang terjadi setelah putusan tersebut adalah terjadinya penumpukan kasus di Mahkamah Agung sebab semua peraturan perundang undangan dibawah Undang-undang hanya dapat diuji di Mahkamah Agung. Dari hasil penelitian ini, pemerintah harus mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap daerah yang akan mengeluarkan suatu Peraturan perundang-undangan.

346
MUH
p

PENYELESAIAN SENGKETA OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG (PERKARA NO. 32/PDT.G/2014/PN PDG)

Muhammad Naufal Hafizh, 1410111092, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata, 73 Halaman, tahun 2019

ABSTRAK

Sulitnya masyarakat untuk mendapatkan pinjaman uang dari bank menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam melakukan perjanjian pembiayaan konsumen terdapat jaminan yang pengikatannya secara fidusia untuk menjamin pihak kreditur bahwasanya debitur akan memenuhi segala kewajibannya sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam skripsi ini perumusan masalah yang dibahas adalah : 1) Penyebab terjadinya wanprestasi pada objek jaminan fidusia pada perkara No. 32/PDT.G/2014/PN PDG. 2) Bagaimana penyelesaian sengketa objek jaminan fidusia pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang 3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan No. 32/PDT.G/2014/PN PDG). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa : 1) penyebab terjadinya wanprestasi adalah Perusahaan PT. SMS dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen tidak melakukan pendaftaran atas objek jaminan fidusia,Kurangnya pengetahuan hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT sms, sehingga pada pelaksanaanya dianggap telah melakukan perampasan terhadap objek jaminan yang masih dikuasai oleh debitur,Budaya dan kebiasaan perilaku para pekerja dalam melaksanakan pendaftaran objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia yang telah lewat waktu terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konseumen disepakati, Penarikan objek jaminan fidusia dilakukan pihak PT. SMS untuk menutupi kerugian akibat debitur yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga berdampak pada keuangan perusahaan. 2) Penyelesaian sengketa klaim asuransi kebakaran pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dengan gugatan debitur diterima sebagian dan kreditur membayar ganti kerugian atas wanprestasi yang dilakukannya. 3) Berdasarkan pertimbangan hakim, PT.SMS Padang tidak melaksanakan prestasinya sehingga PT.SMS Padang dinyatakan telah melakukan tindakan wanprestasi.

Kata Kunci : Jaminan, Fidusia, Wanprestasi

343.09
NUR
p

PENGAWASAN TERHADAP PRODUK PANGAN OLAHAN OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI PADANG

Nurvalda Shafura Putri 1510112171, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 63 Halaman, Pembimbing : Dr. Azmi Fendri, S.H.,M.Kn. dan Titin Fatimah, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Pengawasan produk pangan olahan tanpa izin edar di Sumatra Barat merupakan kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang sesuai dengan ketentuan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Salah satu produk pangan olahan yang disita oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang adalah produk pangan jenis Milo impor ex-Malaysia, dikarenakan tidak memiliki izin edar di Indonesia. Sebagai Importir, harus memiliki izin edar sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimanakah Pengawasan Terhadap Produk Pangan Olahan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Padang dan Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Produk Pangan Olahan Tanpa Izin Edar Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di (BBPOM) Padang. Untuk menganalisis hal tersebut dilakukan penelitian yuridis empiris yang besifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data ialah studi dokumen, wawancara dan studi kepustakaan. Diperoleh hasil penelitian dalam hal Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Produk Pangan Olahan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Padang dilakukan secara pre-market dan post market. Penegakan hukum terhadap milo impor ex-Malaysia yaitu penindakan secara pro-justitia dengan nomor perkara 108/Pid.Sus/2018/PN.Pyh

Kata Kunci: Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Padang

348.3
NAB
k

KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI NEGARA DALAM FRASA EMPAT PILAR BERBANGSA DAN BERNEGARA (studi terhadap Putusan Mahkamah Kosntitsi Nomor 100/PUU-XI/2013)

Nabila Pratiwi, Nomor Bp. 1410111015, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah Halaman 51 , Tahun 2018

ABSTRAK

Dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik terdapat Frasa empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pertama kali digagaskan oleh Taufiq Kiemas selaku Ketua MPR periode 2009-2014. Dengan adanya frasa empat pilar berbangsa dan bernegara ini menimbulkan perdebatan dengan mencantumkan Pancasila kedalam frasa empat pilar tersbut. Dengan demikian beberapa orang mengajukan pegujian undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Perumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan Pancasila dalam frasa empat pilar bebangsa dan bernegara? 2. Implikasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/Puu-XI/2013?. Penulis melakukan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Pancasila sudah jelas kedudukannya dalam sejarah Indonesia. Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila tidak dapat diubah ataupun digeser kedudukannya sebagai ideologi bangsa. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan frasa empat pilar berbangsa dan bernegara, MPR dan lembaga negara lainnya menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan tidak lagi mensosialisasikan frasa empat pilar.

341
NAD
i

IMPLEMENTASI HUKUM PERLINDUNGAN PETUGAS MEDIS BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNAISONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA (Menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2286 Tahun 2016)

Nada Aliyah, 1410112168, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, Pembimbing: M.Jhon., S.H., M.H. dan Dayu Medina, S.H.,M.H

ABSTRAK

Keberadaan petugas medis memiliki peranan yang sangat penting dalam konflik bersenjata, akan tetapi kehadiran petugas medis sering kali luput dari perhatian para pihak yang bersengketa. Hal ini yang menjadikan perlindungan dan keselamatan petugas medis sering kali terabaikan, sehingga menyebabkan banyak petugas medis yang berada di daerah konflik menghadapi berbagai ancaman mulai dari pelarangan menjalankan tugas medis dalam memberikan bantuan medis sampai kepada serangan terhadap petugas medis, transportasi medis, dan rumah sakit juga ikut menjadi sasaran tanpa henti dan melanggar Hukum Humaniter Internasional beserta perjanjian internasional lainnya. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana pengaturan perlindungan petugas medis berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik bersenjata dan bagaimana implementasi hukum perlindungan petugas medis dalam konflik bersenjata menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2286 (2016). Metode penelitian yang digunakan adalah yurisidis normatif dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diketahui bahwa petugas medis dalam menjalankan tugasnya diatur dan dilindungi oleh Hukum Humaniter Internasional dimana dalam Pasal 24 Konvensi Jenewa I 1949 dan Pasal 12 Protokol Tambahan I 1977 secara nyata telah dijelaskan bahwa para pihak memiliki kewajiban untuk senantiasa menjamin agar petugas medis selalu dilindungi dan dihormati dalam keadaan apapun. Implementasi hukum perlindungan petugas medis menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2286 Tahun 2016 yaitu, sebagian besar implementasi dari resolusi ini sudah dilaksanakan secara utuh oleh para pihak yang ditujukan dalam resolusi, seperti tindakan pencegahan, akuntabilitas, pengumpulan serta pelaporan data tentang serangan terhadap petugas medis dalam konflik bersenjata. Walaupun masih terdapat beberapa hal yang belum terlaksana dengan baik, akan tetapi banyak upaya-upaya yang telah dihasilkan oleh para pihak untuk meningkatkan langkah-langkah efektif dalam menjamin perlindungan petugas medis dalam konflik bersenjata serta meningkatkan akuntabilitas para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap petugas medis.

Kata kunci: Implementasi; Perlindungan Petugas Medis; Hukum Humaniter Internasional; Konflik Bersenjata; Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2286 Tahun 2016.

348.3
NAD
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PELANGGAN PRODUK INDIHOME BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nadhira Hesty Utami, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 68 Halaman

ABSTRAK

Pada saat sekarang ini teknologi berkembang dengan semakin pesat. Kebutuhan manusia semakin tinggi untuk melakukan komunikasi dan memperoleh informasi terutama melalui media internet. Teknologi informasi dan komunikasi (Telekomunikasi) telah menjadi kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai perusahaan menghasilkan beragam layanan jasa internet salah satunya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk yang menyediakan layanan jasa IndiHome. Layanan tersebut tidak terlepas dengan adanya hambatan-hambatan yang dialami dalam penggunaannya sehingga konsumen dirugikan karena tidak mendapatkan jasa sesuai dengan yang diharapkan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna layanan IndiHome berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan apa kendala-kendala yang dihadapi oleh konsumen pengguna layanan IndiHome serta upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data ialah studi dokumen, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen pelanggan IndiHome dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan adanya syarat dan ketentuan yang disediakan oleh perusahaan yang dapat dibaca dan dipahami oleh calon pelanggan sebelum menyetujui kontrak berlangganan. Upaya represif adalah dengan disediakannya sarana bagi konsumen untuk menyampaikan keluhan seperti aplikasi myIndihome, media sosial berupa twitter, facebook, melalui email, call center 147, layanan walk in, musyawarah, pemberian kompensasi atau ganti rugi, serta melalui Pengadilan Negeri atau BPSK. Adapun kendala yang dialami oleh konsumen pengguna layanan IndiHome yaitu keluhan teknis berupa gangguan jaringan, gangguan fitur, kualitas layanan yang kurang sesuai dan masalah administrasi. Upaya yang dilakukan terhadap konsumen pelanggan IndiHome berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, PT. Telkom memiliki jaminan tingkat layanan Service Level Guarantee (SLG) dan mendapatkan kompensasi sesuai ketentuan Telkom jika jaminan tingkat layanan Service Level Guarantee (SLG) IndiHome tidak terpenuhi. Didalam mengatasi kendala tersebut diperlukan upaya dari semua pihak, baik konsumen, pelaku usaha serta pemerintah.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, IndiHome

346.07
NAD
p

PENERAPAN AKAD TABARRU' DALAM ASURANSI SUN LIFE CABANG PADANG

Nadia Mardhatillah, 1510112138, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 64 halaman, 2019

ABSTRAK

Asuransi Syariah memiliki karakteristik, yaitu akad tabarru'. Akad tabarru' merupakan akad hibah dalam bentuk pemberian iuran tabarru' dari peserta kepada dana tabarru' dengan tujuan tolong-menolong yang harus melekat pada semua produk asuransi syariah. Asuransi Sun Life Cabang Padang sebagai pelopor asuransi syariah juga memiliki akad tabarru' pada setiap produk asuransinya. Tujuan akad tabarru' tersebut ialah menghilangkan sesuatu yang haram pada asuransi konvensional. Penelitian ini meneliti Asuransi Sun Life Cabang Padang mengenai beberapa permasalahan yaitu: penerapan akad tabarru' dalam asuransi Sun Life Cabang Padang dan kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Tabarru' dalam Asuransi dan Reasuransi Syariah. Metode penelitiannya adalah yuridis empiris untuk menggambarkan penerapan akad tabarru' dalam Asuransi Sun Life Cabang Padang. Prosedur pengumpulan data adalah dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer, selanjutnya data ini akan dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Pada hasil penelitian, penerapan akad tabarru' dalam asuransi Sun Life Cabang Padang telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Kedudukan fatwa merupakan salah satu instituisi dalam Hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problematika yang dihadapi umat Islam. Bahwa umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan didalam bersikap dan bertingkah laku. Di dalam Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' dalam Asuransi dan Reasuransi Syariah. Akad tabarru' meupakan akad yang bertujuan untuk tolong-menolong yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Adapun kendala dalam penerapan akad tabarru' tidak ditemukan karena telah diatur didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Tetapi, dari segi sumber daya manusia (SDM) perlu ditingkatkan lagi profesionalismenya, sehingga dalam operasional asuransi syariah dapat berjalan secara konsisten atau tindak dalam mencuri bentuk.

Kata Kunci: Akad tabarru', Asuransi Sun Life Cabang Padang

348.3
NAD
p

PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN LUBUK BASUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

NADIA SRI MEILISSA, 1510112026, FAKULTAS HUKUM, 2019, 58 HALAMAN

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu pemberdayaan ekonomi Islam yang berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Apabila wakaf dikelola dengan baik dan profesional maka fungsi tersebut akan dirasakan manfaatnya. Nadzir memiliki kedudukan yang penting dalam pengembangan wakaf ini, karena jalannya suatu wakaf itu tergantung pengelolaan dari seorang nadzir, nadzir adalah pihak yang menerima wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh wakif. Pengembangan wakaf di Kecamatan Lubuk Basung kurang produktif karena pada umumnya peruntukan wakaf untuk membangun sebuah masjid, sekolah, dan sebagainya, tidak adanya pengembangan kearah yang lebih produktif. Penelitian ini memiliki rumusan masalah apa saja tujuan yang diharapkan oleh wakif dari wakaf tanah di Kecamatan Lubuk Basung, bagaimanakah peran nadzir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf di Kecamatan Lubuk Basung, dan apa saja kendala yang dihadapi nazdzir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Lubuk Basung. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian tujuan yang diharapkan oleh wakif adalah untuk beramal ibadah kepada Allah SWT dan mengharapkan pahala, peran nadzir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf di Kecamatan Lubuk Basung adalah dengan memanfaatkan tanah wakaf sesuai peruntukannya dan memanfaatkan tanah yang sudah produktif yaitu tanah yang ditanami pohon kelapa yang uangnya untuk pembangunan fisik Masjid Jihad. Untuk tanah wakaf pada jorong Bancah Taleh tidak ditemukan kendala oleh nadzir, kendala hanya ditemukan di Musholla An-Nur Jorong Balai Satu Manggopoh. Kendala-kendala tersebut adalah karena kurangnya dana hasil pengelolaan wakaf yang diterima oleh nadzir dan waktu penerimaan dana wakaf tidak bisa direncanakan secara sistematis karena hanya bersumber dari sumbangan-sumbangan pada hari besar saja.

345
NAD
p

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI

NADRA HUTRI KHAIRANI, 1410111046, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 93 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Kehamilan di luar nikah memuat persoalan yang sangat rumit dan kompleks bagi remaja yang merupakan salah satu dampak dari perilaku seks bebas yang melanda remaja dan akhir-akhir ini cenderung meningkat. Hubungan seks pranikah berdampak pada seperti kehamilan di luar nikah, kawin muda, anak-anak lahir diluar nikah, aborsi, penyakit menular seksual, depresi pada wanita yang terlanjur berhubungan seks dan lain sebagainya. Depresi yang dihadapi oleh anak yang mengalami kehamilan diluar nikah ditambah tekanan-tekanan psikologis dari lingkungan maupun keluarga, apabila tidak ditangani dengan cepat secara baik dan benar dapat menimbulkan tindakan-tindakan tak terduga yang melanggar hukum. Tindakan tersebut bisa berupa aborsi, bunuh diri, pembunuhan maupun pembunuhan terhadap bayi yang dilahirkan. Salah satu peristiwa baru baru ini yang menggegerkan daerah Kabupaten Agam, terutama daerah Kecamatan Lubuk dasung dan sekitarnya adalah penemuan mayat bayi pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2018. Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbb dengan terdakwa YN. Studi tentang sistem peradilan memperlihatkan bahwa hakim memainkan peranan yang penting didalam system peradilan pidana. Oleh karena itu, hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta dan alat bukti yang kuat, serta faktor-faktor pendukung lain untuk putusan terbaik bagi anak. Sehingga anak tidak dirugikan dan system peradilan dapat berpihak bagi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam penerapan sanksi pidana dengan perkara pembunuhan bayi nomor 04/Pid.Sus/2018/PN.LBB Hakim tunggal menjatuhkan putusan berupa penerapan atas Pasal 342 KUHP Jo Undang- undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak. Dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tanjung Pati di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Walaupun Tindak pidana tersebut merupakan pembunuhan berencana yang diancam 9 sembilan tahun, namun sanksi yang diberikan oleh hakim cukup ringan karena pelaku masih digolongkan anak dibawah umur dan juga adalah korban dalam perkara pencabulan. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara pembunuhan bayi nomor 04/Pid.Sus/2018/PN.LBB adalah pada fakta persidangan dan dalil dalil dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Tindak pidana yang dilakukan oleh anak (terdakwa) telah memenuhi unsur-unsur delik Pasal 342 KUHP. Namun Hakim kurang mempertimbangkan kondisi psikologis dan kondisi sosial anak (terdakwa) pada saat melakukan tindak pidana.

345
NAD
P

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI KELAS II (Studi Kasus Putusan Nomor: 87/Pid.B/2015/PN.Tjp)

Nadzir Rahmat Muhammad Al Amin, 1410111077, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada temuan dilapangan kadang kala dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian tersebut, anggota Kepolisian Republik Indonesia mengalami permasalahan. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Pertama, Bagaimana penjatuhan pidana terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II. Kedua, Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif yaitu Menggambarkan Penjatuhan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan juga menelaah kaidah- kaidah sosial yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penjatuhan pidana terhadap anggota kepolisan yang penulis teliti di Pengadilan Negeri Tanjung Pati Klas II adalah melalui proses pemeriksaan di persidangan dengan prinsip asas persamaan di muka hukum. Sekalipun yang melakukan tindak pidana penganiayaan itu anggota kepolisian maka ia tidak akan luput dari ancaman sanksi pidana seperti halnya masyarakat umum yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota Kepolisian yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan mengandung unsur sebagai berikut: pertama, unsur barang siapa., kedua, unsur melakukan penganiayaan., ketiga, unsur mengakibatkan luka berat.akibat hukum yang didapati oleh anggota kepolisian republik indonesia dijatuhi hukuman pidana selama 1 tahun.

345
NAN
p

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BUKITTINGGI (STUDIKASUS DI POLRESTA BUKITTINGGI)

Nanda Aulia, 1210113105, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Sistem Peradilan Pidana (PK V), 72 Halaman, 2019, Pembimbing : Dr. H. A. Irzal Rias, SH.,M.H. dan Nilma Suryani, S.H., M.H

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara hukum, penegasan sebagai negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Konsekuensi sebagai Negara hukum adalah kehidupan bernegara harus berdasar hukum. Sesuai dengan konsep negara hukum, maka penyelenggara negara tersebut diatas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berdasarkan hukum. Faktor kepatuhan hukum masyarakat terhadap lalu lintas kurang sehingga terjadi pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat bahkan menyebabkan kecelakaan dan sangatlah penting adanya peranan kepolisian dalam menangani masalah tersebut agar terjadinya kepatuhan dalam berlalu lintas.Untuk mengetahui apa peran kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lalu lintas dan angkutan jalan terhadap kendaraan bermotor. Maka penulis tertarik mengkajinya dan menuangkannya dalam sebuah skripsi. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum lalu lintas, Bagaimanakah peran polresta Bukittinggi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya. Upaya apa saja yang dilakukan oleh kepolisian. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis)yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber, yaitu SATLANTAS POLRESTA Bukittinggi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa banyak sekali pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh masyarakat. Peran polisi sangat penting dalam meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas di kota Bukittinggi agar terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendara.

346
NES
e

EFEKTIFITAS PEAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PADANG

Nesha Hendriyanti, 1410112019, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata, 60 Halaman, tahun 2019

ABSTRAK

Penulisan ini membahas tentang analisis yuridis empiris terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Padang dalam perkara perdata.Juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis kesesuaian antara PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Padang, serta tercapainya efektifitas. Kendala-kendala dalam menempuh prosedur Mediasi yang dilakukan oleh Para Pihak di Pengadilan Negeri Padang. Melalui penelitian yuridis empiris ini diperoleh kesimpulan, bahwa terdapat 4 poin yang berbeda dari Perma saat ini dengan Perma sebelumnya yaitu dari segi waktu yang lebih singkat, itikad baik Para Pihak, kewajiban Para Pihak menghadiri proses mediasi dengan atau tanpa kuasa hukum kecuali dengan alasan yang sah, serta kesepakatan sebagian Pihak yang terlibat dalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketa. Secara eksplisit, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi ini telah efektif bagi Pengadilan Negeri Padang dengan adanya peningkatan perkara yang berhasil di Mediasi dibandingkan perma-perma sebelumnya. Namun, terdapat hal-hal yang menghambat berjalannya pelaksanaan Mediasi yaitu 1) faktor Para Pihak, 2) faktor tidak adanya itikad baik, baik Para Pihak maupun kuasa hukum, 3) faktor kurangnya Mediator yang bersertifikat dari Mahkamah Agung, 4) faktor gedung pelaksaan Mediasi yang sementara, dan 5) faktor tidak adanya dukungan kuasa hukum dalam pelaksanaan Mediasi 6) faktor sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Padang untuk pelaksanaan Mediasi. Hal ini yang dianggap penulis bahwa pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Padang belum tercapai efektifitas berdasarkan Perma tentang Mediasi di Pengadilan Negeri Padang tersebut.

Kata kunci : Mediasi, Efektifitas, Pelaksanaan dan Mediasi

348.01
NOL
s

SISTEM IMBAL JASA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA PT POS INDONESIA (PERSERO) CABANG PADANG DENGAN AGENPOS SELAKU MITRA BISNIS

Nola Desi Putri, 1510112184, Fakultas Hukum, 2019, 71 halaman

ABSTRAK

Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. PT. Pos Indonesia (Persero) yang sempat mengalami keterpurukan karena teknologi yang kian maju, memperluas jaringan dengan mengadakan kegiatan mitra usaha dalam hal ini adalah keagenan, yang kemudian dikenal dengan Agenpos. Agenpos adalah unit pelayanan yang dikelola pihak lain (mitra) yang bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan layanan pos sesuai kesepakatan yang berlaku. Landasan hukum adanya kerjasama kemitraan keagenan pos ini ialah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kerja sama antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan Agenpos dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama kemitraan dengan sistem keagenan. Pada kerjasama kemitraan ini diterapkan sistem imbal jasa atas layanan yang diberikan oleh Agenpos. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana sistem imbal jasa dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang dengan Agenpos ? 2) Apa saja kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Padang dengan Agenpos? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif analitis, menggunakan jenis data primer dan data sekunder, sumber data didapat penulis dari penelitian kepustakaan dan lapangan, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sistem imbal jasa hubungan kemitraan tersebut tidak dituangkan secara jelas dan terperinci ke dalam suatu perjanjian tertulis, hanya jenis Agenpos Jasa Kurir yang memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis. Pada Agenpos Jasa Kurir sistem imbal jasa yang diterapkan ialah persenan sebesar 5% - 20% berdasarkan jenis produk jasa yang dijual sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian kerjasama kemitraan. Sedangkan untuk Agenpos Jasa Keuangan tidak memiliki perjanjian secara tertulis, sehingga sistem imbal jasanya tidak jelas yakni berkisar Rp 1000 – Rp 1500 per transaksinya. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan ini ada dua yakni kendala teknis terkait jaringan dan aplikasi error dan kendala tidak jelasnya besaran imbal jasa Agenpos Jasa Keuangan. Hendaknya, kerjasama keagenan untuk semua jenis Agenpos dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis, sehingga sistem imbal tertera dengan jelas.

Kata Kunci : Imbal Jasa, Kemitraan, Perjanjian

347.05
NOV
u

URGENSI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE (MLA) DALAM PENYELESAIAN KASUS PERDATA DI KAWASAN ASEAN DAN KEUNTUNGANNYA BAGI INDONESIA

Nova Aryanti, 1510112030, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 hal, 2019

ABSTRAK

Sengketa keperdataan dapat terjadi dimana saja tidak tertutup kemungkina antara negara-negara di kawasan ASEAN, namun dalam hal penyelesaian sengketa tersebut sering terdapat kesulitan-kesulitan yang dihadapi hal ini dikarenakan Negara-Negara ASEAN memiliki sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu salah satu upaya untuk mempermudah penyelesaiannya diperlukan adanya Mutual Legal Assistance (MLA). Hingga saat ini Indonesia hanya memiliki satu perjanjian bilateral dalam hal kerjasama di bidang peradilan yaitu perjajian antara Indonesia dengan Thailand atau MLA Indonesia dan Thailand yang ditandantangai pada tahun 1978 (Agreement on Judicial Cooperation between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand) 1978. Kesepakatan kerjasama tersebut didasarkan atas ASEAN Concord of 1976 yang ditandatangani di Bali dan merupakan dasar bagi dilakukannya kerjasama dalam bidang hukum antara Negara-negara ASEAN. Permasalahan tersebut melahirkan rumusan masalah; Bagaimana urgensi Mutual Legal Assistance (MLA) dalam penyelesaian kasus perdata di kawasan ASEAN dan keuntungannya bagi Indonesia?. Apa sajakah hambatan-hambatan Pemerintah Negara Anggota ASEAN untuk mewujudkan MLA dalam bidang perdata di kawasan ASEAN?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa MLA sangat penting untuk memudahkan pertukaran dokumen-dokuemen serta alat-alat bukti dan saksi-saksi antar negara, kehadiran instrument hukum berupa MLA diharapkan akan menjadi fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan dan menghapuskan rintangan yang sering dijumpai, namun ada beberapa hal yang menjadi penghambat bagi Negara-Negara di ASEAN dalam mewujudkan MLA ini diantaranya perbedaan sistem hukum yang menyebabkan kesulitan ketika harus saling menyesuaikan dengan sistem hukum negara lainnya dan keterbatasan yurisdkisi dimana suatu negara dalam melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut harus menghormati yurisdiksi negara lainnya.

348.3
NOV
p

PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATE PADANG PARIAMAN TERHADAP PENCATATAN KEMATIAN

Novi Sunarti, 1510111109, Fakultas Hukum 2019, 76 Halaman

ABSTRAK

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merupakan Instansi Pelaksana yang bertugas dan bertanggug jawab dalam pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diatur dalam Undang- undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Salah satu bentuk pelayanan disdukcapil terkait dengan pencatatan peristiwa penting yaitu pencatatan kematian. Pelayanan pencatatan kematian di Kabupaten Padang Pariaman masih dalam kategori rendah, dibuktikan dengan jumlah penerbitan akta kematian setiap tahunnya hingga tahun 2017. Akta Kematian sebagai akta autentik berguna bagi penduduk dan/atau warga sipil dan pemerintah, baik untuk kepastian hukum dan aspek pembangunan lainnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Padang Pariaman adalah kewenangan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Rendahnya pencatatan kematian di Kabupaten Padang Pariaman, penulis mengubungkan dengan bagaimana pelaksanaan kewenangan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman terhadap pencatatan kematian dan kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Adapun tujuan dari penulisan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan kewenangan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman terhadap pencatatan kematian. Metode penulisan yaitu yuridis empiris (social legal research), dengan melihat keadaan dilapangan lalu membandingkan dengan pengaturan yang ada. Jenis data, addata primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara serta teknik analisa data secara deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai data yang ditemukan. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan kewenangan Disdukcapil Kabupetan Padang Pariaman terhadap pencatatan kematian belum terlaksana secara optimal, dan dalam menjalankan kewenangan terdapat hambatan atau kendala yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan pencatatan kematian. Kendala atau hambatan diantaranya rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pencatatan kematian, sumber daya manusia Disdukcapil Kab. Padang Pariaman yang terbatas dan kecilnya anggaran terkait dengan pencatatan kematian.

Kata Kunci : Pelaksanaan Kewenangan, Pencatatan Kematian.

345
NOV
p

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH POLRES ASAHAN (Studi Kasus Kisaran)

Novita Elanda, BP 1310111182, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana). 61 Halaman. Tahun 2019

ABSTRAK

Peredaran Narkotika di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Pecandu Narkotika tidak hanya orang dewasa yang memiliki uang, namun Narkotika telah dikonsumsi oleh seluruh kalangan, kaya- miskin, tua-muda, laki-laki-perempuan. Di Kisaran sendiri peredaran Narkotika menjadi hal biasa oleh kelompok masyarakat tertentu dan bahkan ada suatu daerah di Kisaran tersebut, Narkotika sangat erat dengan kehidupan masyarakatnya.. Adapun permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah: 1). Apa program Polres Asahan dalam pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Kisaran? 2). Apa kendala yang dialami oleh Polres Asahan dalam penanggulangan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika? 3). Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Asahan dalam mengatasi kendala pelaksanaan program pemberantasan tindak pidana Narkotika. Metode penelitian yang penulis penelitian yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat dan menganalisa norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan tersebut menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan masalah yang temuan dilapangan. Setelah penulis melakukan penelitian hukum yuridis sosiologis terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh Polres Asahan di Kota Kisaran. Penulis berkesimpulan bahwa dalam dalam pencegahan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota Kisaran Polres Asahan melakukan program preventif dan program represif. Program Preventif berupa memberikan penyuluhan kepada setiap lapisan masyarakat. Program represif digunakan untuk memberikan hukuman dan menghilangkan kecanduan bagi para penyalahguna Narkotika. Sementara Kendala yang dialami oleh Polres Asahan kendala Eksternal berasal dari keluarga tersangka, Tersangka dan Masyarakat Program represif digunakan untuk memberikan hukuman dan menghilangkan kecanduan bagi para penyalahguna Narkotika. Sementara Kendala yang dialami oleh Polres Asahan kendala Eksternal berasal dari keluarga tersangka, Tersangka dan Masyarakat sekitar dalam memberikan informasi adanya transaksi dan/atau kegiatan penyalahgunaan Narkotika yang ada di lingkungan masyarakat setempat. Sementara kendala internal dialami dikarenakan minimnya personal satresnarkoba Polres Asahan yang memiliki kemampuan melakukan penyuluhan dan/atau melakukan operasi penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika itu sendiri. Upaya yang dilakukan oleh Polres Asahan dalam mengatasi kendala pelaksanaan program pemberantasan penyalahgunaa narkotika dapat terealisasi dengan baik, Polres Asahan melakukan kerjasama dengan Tersangka, keluarga tersangka dan dengan masyarakat setempat serta menempatkan anggota kepolisian di lingkungan narkotika itu sendiri.

Kata kunci: penanggulangan, penyalahgunaan, narkotika

345
NUR
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES PARIAMAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB PARIAMAN

Nuril Kurnia Sari MS, 1510112108, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana), 92 Halaman, 2019

ABSTRAK

Tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diatur dalam Undang- Undang nomr 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Peredaran narkotika tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat biasa tetapi juga dikendalikan oleh narapidana yang mendekam di lembaga pemasyarakatan. Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Dalam melaksanakan tugas pokok kepolisian mempunyai unsur pelaksana tugas pokok diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 salah satunya Satuan Reserse Narkoba yang diberi tugas melakukan tindakan penyidikan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika yang terjadi di luar lapas dan di dalam lapas mempunyai tata cara yang berbeda. Adapun rumusan masalah yang penulis kaji yaitu bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh Satuan Reserse Narkoba Kota Pariaman terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika di lembaga pemasyarakatan Klas IIB Pariaman, apakah kendala yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba Kota Pariaman dalam pelaksanaan penyidikan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman dan apakah upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Kota Pariaman untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian ini diketahui 1) Pelaksanaan penyidikan diawali dengan dilakukanya penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat dan meminta izin kepada Kalapas untuk dilakukanya proses penyidikan; melakukan penangkapan dalam hal ini tersangka tertangkap tangan; penggeldahan badan; penyitaan barang bukti; pemeriksaan, untuk melakukan pemeriksaan Satresnarkoba harus membuat Bon Narapidana yaitu peminjaman narapidana paling lama 1x24 jam jika dibutuhkan lebih dari 1x24 jam dapat diperpanjang melalui permohonan kembali dan terakhir penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus ini pihak Satresnarkoba tidak melakukan penahanan terhadap tersangka karena status tersamgka sebagai narapidana yang otomatis telah dilakukan penahanan terhadap tersangka. 2) Kendala yang dihadapi oleh Satresnarkoba Polres Pariaman dalam pelaksanaan penyidikan terhadap narapidana adalah: Protap Lembaga Pemasyarakatan, kondisi dan situasi Lembaga Pemasyarakatan; dan kebocoran informasi. 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu: Melakukan kerjasama dengan pihak Lapas Klas IIB Pariaman, melakukan patroli dan control case di sekitar Lapas Klas IIB Pariaman, Memetakan Jaringan-jaringan narapidana pengedar narkotika di Lapas Klas IIB Pariaman, dan menjalin kerjasama dengan masyrakat.

342
OKT
p

POLITIK HUKUM KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP PENENTUAN HARGA GAMBIR Studi Perbandingan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Sumatera Barat

OKTAF VI ANDO, 1210113148, Fakultas Hukum Universitas Andalas (Hukum Tata Negara) Jumlah Halaman 92, Tahun 2019

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pengaturan dan kedudukan komoditas gambir dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan bertujuan untuk meneliti arah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pengaturan Harga Gambir, dan apa saja kendala dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam proses pembentukan kebijakan penetapan harga komoditi gambir yang akan dibandingkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Sumatera Barat. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, yurudis, deskriptif yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan menggunakan beragam teori yang digagas oleh beberapa ahli ketatanegaraan tentang pemerintahan daerah dan sosial ekonomi pertanian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seharusnya pemerintah daerah harus membentuk peraturan perundang-undangan terkait tentang penentuan harga gambir berdasarkan asas otonomi yang diakui dan memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur daerahnya dengan jalan membentuk suatu industri pengolahan gambir yang memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam bertataniaga gambir. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa komoditas gambir belum memiliki suatu kerangka acuan secara eksplisit, hanya sebatas perencanaan yang dituangkan dalam rencana induk pengembangan industri nasional dan rencana pengembangan jangka panjang dan menengah daerah provinsi sumatera barat.

343.09
OKT
p

PERAN INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION DALAM PERLINDUNGAN TUNA DI KAWASAN SAMUDERA HINDIA BERDASARKAN AGREEMENT OF THE ESTABLISHMENT OF THE INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION TAHUN 1993

Oktri Rohim, 1310111258, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 58 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Samudera Hindia memiliki hasil laut yang sangat melimpah salah satunya adalah ikan. Ikan merupakan shared stocks yang tidak dapat dicegah kepindahannya dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya, meskipun ada juga yang menetap di suatu wilayah tertentu. Maka pemanfaatan dan pengelolaan ikan tersebut tidak dapat hanya diserahkan kepada suatu negara tertentu, akan tetapi harus melibatkan negara-negara yang berkepentingan terhadapnya. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara tentang sumber daya ikan tuna adalah membentuk organisasi yang bernama Komisi Tuna Samudera Hindia (Indian Ocean Tuna Commision (IOTC)). Berdasarkan data dari FAO (Food and Agriculture Organization), dari 600 spesies ikan di dunia 76 persen berada dalam kondisi eksploitasi penuh (Fully Exploited), eksploitasi berlebihan (over exploited), dan bahkan telah habis (depleated). Berdasarkan data FAO ikan tuna sirip biru berada dalam klasifikasi telah habis (depleated). Tujuan IOTC sendiri adalah untuk mengembangkan kerja sama antarnegara anggota melalui pengaturan yang tepat sehingga mendorong pembangunan yang berkelanjutan di bidang perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Peran Komisi Tuna Samudera Hindia (Indian Ocean Tuna Commission) dalam mengelola sumber daya ikan tuna di samudera hindia. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi in adalah jenis yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan telaah pustaka dan online library research, dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran yang dilakukan oleh Komisi Tuna Samudera Hindia (Indian Ocean Tuna Commission) dalam pengelolaan sumber daya ikan tuna di samudera hindia adalah sebagai inisiator dan fasilitator. Komisi Tuna Samudera Hindia (Indian Ocean Tuna Commission) mencarikan solusi jangka panjang dalam mengatasi IUU Fishing yaitu dengan cara mengumpulkan para anggota dalam suatu forum tahunan dan mengeluarkan resolusi-resolusiseperti skema pemantau Regional Observer Scheme, pelarangan alat pancing yang tidak ramah lingkungan, pelarangan Transipment kapal, mengatur kapasitas penangkapan (kuota) tiap negara. Keputusan diambil secara bersama-sama, sehingga bersifat mengikat dn diterapkan di tingkat nasional oleh negara anggota. Kata kunci : Perlindungan Tuna di Samudera Hindia, Komisi Tuna Samudera Hindia, dan Perjanjian Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia tahun 1993.

346
OLL
p

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TEMPAT PENGOLAH SAMPAH REDUCE-REUSE-RECYCLE DI KOTA PADANG (Studi Pada TPS 3R Melati Rawang, Kecamatan Padang Selatan)

Ollina Mardatila, 1510111085, Fakultas Hukum, 2019, 65 halaman

ABSTRAK

Lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang kehidupan masyarakat yang lebih baik. Salah satu cara untuk mencapai lingkungan hidup yang baikadalah menjaga lingkugan bebas dari sampah. Dengan terwujudnya lingkungan yang bebas dari sampah maka akan berkurang permukiman kumuh perkotaan. Kota Padang sebagai ibukota provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah sampah yang semakin meningkat setiap harinya sehingga akan mengancam umur dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah. Untuk mengatasi hal tersebut maka kota Padang menyediakan Tempat Pengolah Sampah Reduce-Reuce-Recycle (TPS 3R) di beberapa wilayah di kota Padang, salah satunya adalah Tempat Pengolah Sampah (TPS) 3R Melati Rawang, Padang Selatan. Pengelolaan Tempat Pengolah Sampah (TPS) 3R merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga danSampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah kota Padang nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Tempat Pengolah Sampah (TPS) 3R merupakan paradigma baru dalam pengelolaan sampah, dimana sampah langsung diolah di sumbernya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan pegawai/pimpinan Dinas Lingkungan Hidup kota Padang, Ketua Tempat Pengolah Sampah (TPS) 3R Melati Rawang, Padang Selatanyang mengetahui dan memahami permasalahan yang akan dikaji oleh penulis.Dari hasil penelitian diketahui bahwapelaksanaan TPS 3R Melati Rawang belum berjalan secara optimal yang disebabkan karena tidak adanyaBiaya Operasional dan Pemeliharaan (BOP) serta tidak ada pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.

346

OLV

i

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KOTA DUMAI

Olvi Sri Hilda Haswin, 1510111091, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2019, 86 Halaman

ABSTRAK

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai adalah instansi pemerintah yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. BPBD Kota Dumai adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Dumai termasuk kebakaran hutan dan lahan. Sebagai sebuah organisasi, BPBD Kota Dumai memiliki tugas dan fungsi dalam penanggulangan kebakaran hutan yang terjadi di Kota Dumai, tugas dan fungsi yang diamanatkan tersebut bertujuan untuk memperkecil resiko terjadinya kebakaran hutan yang telah digolongkan sebagai bencana nasional di Provinsi Riau termasuk Kota Dumai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi tugas dan fungsi BPBD Kota Dumai dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai. Maka berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :1) bagaimana implementasi tugas dan fungsi BPBD Kota Dumai dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai ? 2) Apa kendala yang di hadapi dalam penanggulangan bencana kebakran hutan dan upaya untuk mengatasinya?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil, yakni :1) tugas dan fungsi BPBD Kota Dumai yang diamanatkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Wali Kota Dumai No Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai belum terlaksana dengan baik karena beberapa tugas dan fungsinya yang belum terjalankan secara optimal antaranya: a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, b) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara, c) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana, dan d) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana. 2) adapun kendala yang dijumpai adalah: a) Penegakan hukum yang lemah, b)Terbatasnya sarana dan prasarana, c)Terbatasnya sumber daya manusia dan d)Kurangnya sosialisasi ketengah masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan diantaranya : a) Pengawasan dan penerapan sanksi hukum, b) pengadaan alat-alat pemadamana dan penunjang kegiatan, c)Peningkatan sumber daya manusia, dan d) Meningkatkan Sosialisasi

345

ORI

a

ANALISIS PENERAPAN PASAL 44 KUHP DALAM PUTUSAN HAKIM

Ori Jani Perdana, 1510112016, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hukum Pidana (PK IV), 52 Halaman, Tahun 2019.

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat.Pasal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana adalah Pasal 44 KUHP. Berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) KUHP, dikatakan bahwa apabila terbukti seperti apa yang dicantunkan dalam Ayat (1), maka Majelis Hakim dapat memerintahkan orang tersebut ke rumah sakit jiwa dalam masa percobaan selama satu (1) tahun. Ketentuan sanksi pada Pasal 44 Ayat (2) KUHP jelas merupakan jenis sanksi tindakan.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis penerapanpasal 44 KUHP dalam putusan hakim dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 44 KUHP dalam putusan hakim. Penelitian ini menggunnakan metode yuridis-empiris, yaitu penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak penganiayaan berat adalah gangguan kejiwaan yakni mendapat bisikan gaib. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 44 KUHP dalam pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Padang dimana ketidakmampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana berkaitan dengan keadaan dan kemampuan jiwa seseorang yang dianggap tidak normal dibandingkan dengan orang kebanyakan sehingga terhadap terdakwa yang memenuhi unsur Pasal 44 KUHP maka terdakwa tersebut dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Recht Vervolging). Adapun yang menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara An. Terdakwa ALI YUSUF Pgl USUF Alias KUCUI adalah selama persidangan pada diri terdakwa ditemukan alasan penghapus pidana sebagaimana termuat dalam unsur pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP dikuatkan dengan keterangan dari Ahli Kejiwaan (psikiater). Saran yang diberikan penulis yaitu diharapkan kepada aparat penegak hukum agar unsur Pasal 44 Ayat (1) dan (2) KUHP diterapkan dalam menangani perkara. Diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim agar dalam memutus perkara jika terdapat unsur Pasal 44 Ayat (1) dan (2) KUHP maka dapat dipertimbangkan dalam putusannya.

346.08
PUT
p

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN PADA BANK NAGARI PADANG DALAM RANGKA TERCIPTANYA TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Putri Nurul Ishlah Diandra 1510112200, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 80 Halaman, Pembimbing: Dr. Dahlil Marjon., S.H., M.H., dan Hj. Ulfanora., S.H., M.H.,

ABSTRAK

Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpeliharanya dengan baik dalam tingkat tinggi. Bank merupakan industri yang diatur dan diawasi secara ketat oleh regulator, serta semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha bank, dapat memberikan dampak yang besar terhadap resiko yang dihadapi oleh bank. Salah satunya resiko kepatuhan. Kepatuhan adalah taat pada perintah, aturan. Kepatuhan sudah menjadi suatu keharusan bagi bisnis perbankan. Kepatuhan terhadap hukum, norma-norma dan aturan-aturan membantu memelihara reputasi bank. Bank yang lalai dalam menjalankan fungsi kepatuhannya akan dikenakan resiko hukum dan sanksi-sanksi hukum yang berujung kehancuran pada lembaga itu. Dalam skripsi ini perumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana bentuk dan penerapan Fungsi Kepatuhan pada Bank Nagari Padang dalam Rangka Terciptanya Good Corporate Governance. 2) Bagaimana tanggungjawab direktur kepatuhan dalam penerapan fungsi kepatuhan pada Bank Nagari Padang dalam Rangka Terciptanya Good Corporate Governance. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian yang menekankan aspek hukum serta melakukan pendekatan ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang melalui tahapan penelitian kepustakaan: 1) bentuk dan penerapan fungsi kepatuhan pada Bank Nagari Padang yaitu pernyataan kepatuhan, kode etik kepatuhan, kebijakan kepatuhan dalam pembuatan, perubahan dan pencabutan keputusan direksi, sosialisasi, dan coaching, konseling, mentoring. 2) tanggungjawab direktur kepatuhan yaitu bertanggungjawab dalam kepatuhan bank, mewujudkan budaya kepatuhan dan mencegah agar keputusan direksi tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: bank nagari, fungsi kepatuhan, good corporate governance.

345
PAN
p

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMBAR

Pangesty Pravia Chintami, 1510111112, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV Hukum Pidana, 71 Halaman, Tahun 2018

ABSTRAK

Masalah penyalahgunaan narkotika saat ini telah menjadi masalah nasional maupun Internasional yang tidak pernah berhenti dibicarakan. Kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena tidak saja memberikan dampak yang buruk terhadap pengguna, melainkan juga berdampak secara sosial, ekonomi dan kultural. Pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diberi wewenang khusus dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkotika. BNN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN di wilayah provinsi maupun di kabupaten/kota. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang hendak dibahas adalah:1.Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh BNNP Sumbar? 2.Bagaimanakah koordinasi BNNP Sumbar dengan penyidik Polri? 3.Apakah kendala yang dihadapi oleh BNNP Sumbar dalam melaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh BNNP Sumbar dilakukan berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Bentuk koordinasi BNNP Sumbar dengan penyidik Polri yaitu apabila akan mengadakan razia gabungan, melakukan penyuluhan ke masyarakat atau instansi pendidikan, melakukan memberitahu secara tertulis bahwa dimulainya penyidikan. Kendala yang dihadapi oleh BNNP Sumbar dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan personil serta sarana dan prasarana. Terakhir upaya yang dilakukan BNNP Sumbar untuk mengatasi beberapa kendala tersebut seperti lebih sering lagi melakukan penyuluhan ke lingkungan masyarakat dan instansi pendidikan serta memaksimalkan kemampuan personil yang ada dan mencoba meminta penambahan personil dari Polri.

342
PAN
p

PELAKSANAAN HUKUM PENATAAN RUANG KAWASAN LINDUNG DI KOTA PADANG

Panji Iriandi, 1210113033, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, , 69 halaman.

ABSTRAK

Ruang yang berada di suatu negara pada umumnya digunakan dalam pembangunan suatu negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dimana menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk penguasaan negara adalah dengan melaksanakan penetapan kawasan lindung dan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.Sementara kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Oleh karena itu penulis mengkaji mengenai; 1) Bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan penataan ruang kawasan lindung di Kota Padang?, 2) Apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah dan upaya penanggulannya dalam penataan ruang kawasan lindung di Kota Padang ?. Penulis menggunakan metode penelitian yang bersikap pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Padang, Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan penelitian memperlihatkan bahwa Pengaturan kawasan lindung sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 telah di laksanakan di Kota Padang dalam wujud Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030. Dalam pelaksanaan kawasan lindung terdapat hambatan, yaitu kepemilikan hak atas tanah dimana hutan Kota ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berstatus hak milik dan hak ulayat masyarakat. Hambatan lain adalah masih berlangsungnya alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan budidaya dan juga hambatan dari sarana dan prasarana dalam penegakan peraturan.

Kata kunci : Pelaksanaan Penataan Ruang, Kawasan Lindung, dan Kawasan Budidaya.

343.09
PEN
p

PELAKSANAAN HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RENOVASI LAPANGAN MERDEKA DI KOTA SOLOK

Peni Apriya Eka Pratama, 1510111180, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2019, 66 Halaman

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Dalam Renovasi Lapangan Merdeka Di Kota Solok yang merupakan suatu studi di Kota Solok yang bertujuan untuk melihat proses Pengadaan Barang/Jasa dalam renovasi Lapangan Merdeka di Kota Solok dan melihat kesesuaian antara kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam renovasi Lapangan Merdeka di Kota Solok dengan aturan yang berlaku terkait dengan proses Pengadaan Barang/Jasa tersebut. Dasar permasalahan pada proses Pengadaan Barang/Jasa dalam renovasi Lapangan Merdeka di Kota Solok adalah mengenai prinsip efektifitas dan kedisiplinan yang belum maksimal dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan jenis pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Lembaga Pengadaan Barang/Jasa dan data sekunder berupa dokumen serta peraturan terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa untuk proses pengadaan barang/jasa seperti proses pemilihan pemenang tender sampai dengan pelelangan itu sudah sesuai dengan amanat peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku, namun terdapat kendala teknis seperti kontraktor/penyedia barang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu seperti yang telah disepakati didalam perjanjian sehingga diharapkan agar tim pengawas agar lebih tegas dan displin terhadap kinerja penyedia/kontraktor dalam melakukan kerjanya terhadap renovasi lapangan merdeka agar terhindar dari kecurangan serta mencapai hasil maksimal seperti yang diharapkan.

346.01
PRI
M

MALADMINISTRASI TERKAIT PEMBERIAN TUNJANGAN TERHADAP ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Prima Novrama Evrina, 1510112183, Fakultas Hukum, 2019, 74 halaman

ABSTRAK

Berkeluarga dan melanjutkan keturunan merupakan hak setiap manusia yang dilakukan melalui ikatan perkawinan. Hal ini terdapat dalam pasal 28B UUD RI Tahun 1945. Dalam perkawinan dapat terjadi perceraian sesuai dengan alasan- alasan putusnya perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perceraian Pegawai Negeri Sipil lebih dikhususkan karena ada peraturan yang khusus mengatur masalah pernikahan dan perceraian bagi PNS yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Dalam aturan tersebut dicantumkan bahwa PNS yang menceraikan istrinya berkewajiban memberikan sebahagian gajinya kepada mantan istri dan anak-anaknya dengan bagian masing-masing 1/3 (satu per tiga) bagian, dan jika tidak memiliki anak maka gaji untuk mantan istri mendapat 1/2 (satu per dua) bagian, hal ini berlaku sampai mantan istri menikah kembali. Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pemberian tunjangan istri dan anak pasca perceraian bagi PNS yaitu Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan masalah ini merupakan salah satu kewenangan dari Ombudsman yaitu terkait maladminitrasi pelayanan atau jasa. Kewenagan Ombudsman tersebut terdapat pada Pasal 6 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Di Ombudsman terdapat laporan mengenai PNS yang tidak membayarkan kewajibannya tersebut kepada mantan istri dan anaknya pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui maladminitrasi terkait pemberian tunjangan terhadap istri dan anak pasca perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan tindak lanjut pengawasan pemberian tunjangan istri dan anak Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian.Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan pegawai/ pimpinan Ombudsman Republik Indonesia kantor perwakilan wilayah Sumatera Barat dan mantan istri PNS. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Ombudsman melakukan pengawasan eksternal yaitu berdasarkan laporan dari mantan istri PNS dan Ombudsman telah meminta klrifikasi dan memberikan saran kepada instansi terkait dalam kasus tersebut.

Kata Kunci : Pengawasan Ombudsman,Pemberian Tunjangan, Perceraian PNS, Mantan Istri dan Anak PNS

345
PUT
a

ANALISIS YURIDIS DUALISME STATUS KELEMBAGAAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi tentang Putusan Mahkamah Konstisusi Nomor: 49/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017)

Putra Bahri Primansyah, BP: 1510112032, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 152 halaman, 2019

ABSTRAK

Amandemen UUD 1945 menyebabkan banyaknya lahir lembaga negara baru yang bersifat penunjang berbentuk Komisi, Dewan, Badan, atau Otorita yang disebut sebagai lembaga negara independen yang salah satunya yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Akan tetapi UUD 1945 tidak memberikan legitimasi hukum yang jelas kepada lembaga negara independen tersebut. Oleh karena itu dilakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk meminta tafsir mengenai status dan kedudukan komisi negara independen dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Normatif. Data diperoleh dari studi kepustakaan melalui buku, peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi dan hasil wawancara dengan Kepala Biro Hukum dan Staff Biro Hukum KPK. Hasil penelitian menunjukan bahwa perihal status dan kedudukan KPK sudah berkali-kali diputus oleh Mahkamah Konstitusi tetapi terjadi perbedaan tafsir antara putusan Nomor 49/PUU-XI/2013 ditambah dengan lima putusan Mahkamah Konstitusi lainnya yang menempatkan KPK secara kelembagaan berada diluar kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif bahkan dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi memberikan landasan konstitusional kepada KPK. Akan tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang berbeda yaitu dengan menempatkan KPK termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif. Terjadinya dualisme dan inkonsistensi dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut terjadi karena faktor yuridis dan ditambah dengan faktor lain seperti faktor konseptual dan praktis dalam memutus suatu perkara pengujian undang-undang.

341
PUT
p

PERLINDUNGAN DAN IMPLEMENTASI HAK CIPTA TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

Putri Adi Ratna Sari, 1310112070, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 72 halaman ,Tahun 2019

ABSTRAK

Sekarang terjadi banyak klaim terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia yang dapat merugikan kepentingan nasional karena apabila Ekspresi Budaya Tradisional tersebut tidak dilindungi maka semakin banyak budaya tradisional Indonesia di ambil alih oleh bangsa lain dengan cara pihak asing melakukan praktek "pencurian" dengan alasan melakukan berbagai studi dan bantuan. Disinlah faktor hukum memiliki peran untuk menetukan Ekspresi Budaya Tradisional dari sisi kewenangan perlindungan dan sisi hak dalam arti siapa yang memiliki ataupun memanfaatkannya. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian tentang 1) bagaimana perlindungan Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional menurut hukum Internasional dan hukum Nasional, 2) bagaimana implementasi dari Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. Penulis menggunakan pengkajian metode normatif untuk membahas permasalahan tersebut. Hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional telah ada pada hukum Internasional dan hukum Nasional hanya saja perlindungan tersebut tidak secara khusus membahas perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional. Dan implementasi dari Hak Cipta terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah, diantaranya Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata telah mengeluarkan formulir pencatatan warisan budaya tak benda, pemerintah telah memiliki Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pemerintah mengirimkan delegasi ke sidang-sidang Intergovermental Committee on IP and GRTKF yang diselenggarakan WIPO.

345
PUT
p

PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR DI KOTA PADANG

Putri Jamilah, 1510112020, Fakultas Hukum, 2019, 70 Halaman

ABSTRAK

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan penyidik yang berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu.Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai Penyidik, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik Polri memiliki kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sedangkan untuk PPNS kehutanan kewenangannya diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan pasal 30 Undang-undang No 18 tahun 2013. Tindak Pidana Penebangan Liar di rasakan semakin meningkat dan mengakibatkan kerugian yang besar terhadap Negara terutama dalam menghadapi pelaku penebangan hutan secara liar. Berdasarkan Realita di lapangan, banyak ditemukannya kasus penebangan liar contohnya seperti kasus penebangan liar yang terjadi dibeberapa titik di kota Padang diantaranya yaitu Bungus Teluk Kabung yang mana daerah tersebut merupakan kawasan lindung dan didominasi oleh ekosistem mangrove, terdapat adanya banyak pohon yang tumbang dan mati karena pembalakan liar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dalam menangani kasus tindak pidana penebangan liar dan untuk mengetahui kendala serta upaya dalam menangani kasus tindak pidana penebangan liar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang mengetahui dan memahami permasalahan yang akan penulis tulis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, berdasarkan hasil wawancara Pejabat PNS Dinas Kehutanan telah menyelesaikan pemberkasan, mulai dari mempordasi sampai dengan laporan penyidikan sampai ke gelar perkara. catatan kasus penebangan liar yang terdapat pada tahun 2016 di Kota Padang di kecamatan Bungus Teluk Kabung banyak pohon yang tumbang karena pembalakan liar dengan kondisi yang parah akibat pembalakan liar dan ditemukannya barang bukti berupa kayu yang bervolume 1,2 . Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan dalam menangani kasus tindak pidana penebangan liar di Kota Padang yaitu personil PPNS Dinas Kehutanan yang tidak memadai, kurangnya sarana dan prasarana, keterbatasan dana, dan kesadaran masyarakat yang masih kurang.

Kata Kunci : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan, Tindak Pidana Ilegal Loging

345
PUT
k

KAJIAN YURIDIS KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM INDUSTRI PERIKANAN DI BENJINA (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.TUL)

Putri Melati, 1510112182, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 81 halaman – Tahun 2019 Pembimbing : Efren Nova, SH.,M.S. dan Riki Afrizal, S.H., M.H

ABSTRAK

Pada penulisan ini penulis ingin mengkaji putusan hakim Nomor 112/Pid.Sus/2015/PN.TUL tentang kasus perdagangan orang dalam industri perikanan di Benjina. Terdakwa dalam kasus ini Hermanwir Martino yang merupakan pimpinan cabang PT. PBR Benjina yang memiliki kekuasaan untuk mengendalikan seluruh operasional di PT.PBR Benjina sehingga mengakibatkan para ABK mengalami eksploitasi waktu kerja dan dimasukkan ke ruang isolasi. Rumusan masalah pada penulisan ini. Pertama, Apakah perbuatan terdakwa terkait dengan perdagangan orang dalam industri perikanan di Benjina tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 10 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP ?. Kedua, Bagaimanakh pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang. dimulai analisa terhadap putusan hakim, pasal-pasal dalam peraturan yang mengatur permasalahan kemudian dikaitkan dengan kasus yang akan diteliti. Dari hasil penelitian dapat simpulkan bahwa pasal-pasal yang digunakan majelis hakim Pengadilan Negeri Tual dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dinilai sudah tepat karena perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur melawan hukum dalam. Kemudian dasar pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan putusan lebih rendah dari tuntutan penuntut umum yang menurut pandangan penulis, dasar pertimbangan hakim yang memperingan penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak mengandung unsur keadilan untuk para korban dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hakim dalam putusannya diharapkan juga mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis.

348.04
PUT
p

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NO.3/PDT.SUS_BPSK/2017/PN SWL TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT.BANK RAKYAT INDONESIA

Putri Mentari, 1310111103, Fakultas Hukum 2019, 60 Halaman

ABSTRAK

Pelaksanaan putusanexecutie adalahmelaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap. Berkaitan dengan proses eksekusi sering mengalami hambatan, prosedur dan proses untuk mendapatkan hak, hanya putusan yang bersifat condemnatoir yang dapat dijalankan putusannya. Dalam Putusan No.3/Pdt.Sus_BPSK/2017/PN Swl, pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan tersebut secara suka rela, Hambatan-hambatan yang terjadi bermacam-macam mulai dari biaya eksekusi sampai Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh pihak yang kalah untuk mengembalikan haknya, proses pelaksanaan eksekusi mulai dari aanmaning, sita eksekusi dan lelang, penelitian ini bertujuanUntuk mengetahui bagaimanakah proses pelaksanaan putusan di Pengadilan Negri Sawah Lunto Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan dan hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan NO.3/PDT.SUS_BPSK/2017/PN SWL, dan kenapa belum dilaksanakan sampai sekarang. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dan sifat menelitiannya yaitu Deskriptif. Teknikpengumpulan data berupa studi lapangan dengan melaksanakan wawancara dengan hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri Sawahlunto.Proses pelaksanaan putusan di Pengadilan Negri Sawahlunto sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan dari putusan tersebut tergantung kepada para pihak yang berperkara, akan melaksanakan putusan tersebut secara sukarela atau melakukan perlawanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan putusan perdata dengan nomor perkara No.3/Pdt.Sus_BPSK/2017/PN Swl tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT.BRI belum terlaksanaka, karna adanya beberapa hambatan-hambatan yang terjadi, seperti Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh BRI. Kesimpulan berproses acara di pengadilan, khususnya perkara perdata tidak akan ada habisnya, akan selalu ada perlawanan dari pihak yang dikalahkan maupun pihak yang menang, sehingga jalan terakir untuk menyelesaikan perkara tersebut akan kembali ke cara pertama yaitu perdamaian antara para pihak.

Kata Kunci : Pelaksanaan Putusan, Perbuatan Melawan Hukum.

348.04
PUT
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PENCURIAN SEPEDA MOTOR OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL POLSEK PADANG BARAT

Putri Yollanda, 1510112037, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana, Halaman 82, Tahun 2019

ABSTRAK

Pencurian sepeda motor merupakan kasus terbanyak yang dilaporkan masyarakat kepada Polsek Padang Barat. alam penegakan hukum pencurian sepeda motor ini, peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangatlah dibutuhkan, terutama penyidik untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kendaraan roda dua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan oleh kepolisian dalam menanggulangi pencurian sepeda motor di Polsek Padang Barat,untuk mengetahui apasajakah kendala yang dihadapi penyidik dan solusinya dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor di Polsek Padang barat. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Sektor Padang Barat. Metode penelitian yang digunakan penulis antara lain dengan pendekatan yuridis empiris.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan pencurian sepeda oleh penyidik Polsek Padang Barat masih belum terlaksana sesuai dengan aturan-aturan mengenai tata cara pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang terdapat dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak .Kendala yang dihadapi penyidik Polsek Padang Barat saat melakukan penyidikan tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia, kurangnya dukungan anggaran untuk penanganan perkara pidana,masyarakat kurang tanggap dalam hal melaporkan pencurian yang terjadi dalam kurun waktu satu kali dua puluh empat jam atau masyarakat tidak segera melapor kepada kepolisian sehingga sepeda motor yang dicuri sudah jauh dari jangkauan polisi, penyidik mengalami kesulitan dalam mencari barang bukti dan alat bukti dan juga sulit menemukan saksi atau petunjuk yang melihat pencurian sepeda motor yang terjadi.

344.09
QUR
p

PERAN PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HARTA PUSAKO BETO DI MASYARAKAT KERINCI

Qurratul Aini, 1510111142, Fakultas Hukum, 2019, 60 Halaman

ABSTRAK

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi antara satu dengan lainnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hariDalam menjalankan kegiatannya tentu saja dibutuhkan suatu peraturan supaya tidak terjadi penyimpangan. Indonesia memiliki kehidupan masyarakat yang kebiasaannya berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, dimana kebiasaan tersebut dinamakan dengan adat. Masyarakat Kerinci dalam menjalankan kegiatan sehari- hari harus sesuai dengan adat dan aturan yang berlaku termasuk jika terjadi sengketa didalam masyarakat. Sengketa yang terjadi selalu berhubungan dengan warisan harta. Terjadinya sengketa mengenai harta dalam masyarakat Kerinci diselesaikan oleh Lembaga Kerapatan Adat melalui Sidang Adat. Bedasarkan alasan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Apa penyebab timbulnya sengketa harta pusako beto dalam masyarakat Kerinci? 2) Bagaimana proses penyelesaian sengketa harta pusako beto dalam masyarakat Kerinci? 3) Apakah putusan yang dikeluarkan oleh peradilan adat dapat berjalan efektif di dalam masyarakat? Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis bersifat deskriptif, menggunakan jenis data sekunder dan data primer, sumber data yang didapat penulis dari penelitian kepustakaan dan lapangan, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, studi dokumen serta wawancara. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penyebab terjadinya sengketa adanya keinginan yang kuat untuk memilki harta tersebut, tidak jelasnya silsilah keturunan dalam suatu kaum, kesalahpahaman antara anak kemenakan yang kurang mendapatkan arahan oleh ninik mamak, dan tidak jelasnya batasan harta pusako beto yang berbentuk tanah karena tidak adanya bukti tertulis terhadap keberadaan harta tersebut. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui sidang keluarga (sidang kaum), jika tidak terjadi kesepakatan maka akan dilanjutkan pada sidang adat yang dilakukan oleh lembaga kerapatan adat yang didahului dengan adanya pengajuan gugatan dan diakhiri dengan adanya putusan. Pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kerapan Adat berjalan cukup efektif didalam lingkungan hukum adat dikarenakan adanya keterbukaan dalam penyelesaian sengketa kepada masyarakat hukum adat

Kata Kunci: Penyebab Timbulnya Sengketa, Proses Penyelesaian Sengketa, Pelaksanaan Putusan Di Dalam Masyarakat.

344.03
RAF
p

PEMBINAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK) DI RUMBAI KOTA PEKANBARU

Rafi Mufti Zulni, 1510112077, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dapat di bina di dalam lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui sanksi pidana dan tindakan. Salah satu lembaga tersebut adalah Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) yang salah satunya terletak di Rumbai Kota Pekanbaru. Rumusan masalah yaitu: Bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di Rumbai Kota Pekanbaru terhadap anak yang berhadapan dengan hukum? Apa kendala yang dihadapi oleh Balai Rehabilitasi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di Rumbai Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum? Apa upaya yang dilakukan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) di Rumbai Kota Pekanbaru untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum? Metode penelitian yaitu metode empiris, teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Analisa dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh BRSAMPK tersebut tidak hanya membina anak yang berhadapan dengan hukum saja tetapi juga anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Proses pembinaan disana dilakukan melalui tahap-tahap yang dimulai dari proses penerimaan sampai evaluasi dan monitoring. Mereka dibina sesuai dengan latarbelakang mereka dan juga kasus tindak pidana yang mereka hadapi. Kendala yang dihadapi oleh BRSAMPK ini yaitu keterbatasan nya fasilitas jumlah asrama, kurangnya sdm atau tenaga ahli, kurangnya sosialisasi serta pemahaman para pekerja sosial, kurang jelasnya daftar program kegiatan sehari-hari anak-anak disana, dan kemungkinan anak yang melarikan diri atau kabur dari lembaga tersebut. Upaya yang dilakukan oleh BRSAMPK tersebut untuk mengatasi kendala-kendala yaitu dengan cara mengakali dalam pengelompokkan anak-anak di asrama baik berdasarkan kasus, usia serta jenis kelamin, lalu untuk memenuhi tenaga ahli mereka mendatangkan pihak dari luar dan memanfaatkan kunjungan mahasiswa, dan memberikan pelatihan serta sosialisasi kepada para pekerja sosial disana untuk menambah pengetahuan dalam menangani anak yang berhadapan hukum, serta menambah pihak keamanan lembaga guna untuk menjaga lebih baik lagi keadaan lembaga serta meminimalisir kemungkinan adanya anak yang melarikan diri atau kabur dari BRSAMPK ini.

342
RAF
p

PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM MELAKUKAN PENGAMATAN TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUBUK BASUNG

RAFI WIRANATA.1310115002. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV (Hukum Pidana). 90 Halaman. Tahun 2019

ABSTRAK

Hakim Pengawas dan Pengamatan (Hakim Wasmat) dalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan dan diberi tugas khusus untuk membantu Ketua Pengadilan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Terkait tugas Hakim Wasmat dalam pembinaan narapidana, dalam skripsi ini dilakukan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung. Dengan rumusan masalahnya 1) Bagaimanakah pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan pengamatan terhadap pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung, 2) Apakah kendala yang dihadapi oleh Hakim Pengawas dan Pengamat terkait pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pengamatan terhadap pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung, 3) Apakah upaya yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk mengatasi kendala terkait pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pengamatan terhadap pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung, dengan metode penelitian Yuridis Sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) Hakim Pengawas dan Pengamat terakhir kali melakukan cheking on the spot pada tahun 2017 yang artinya pelaksanaan tugasnya tidak berjalan dari tahun 2018 sampai sekarang, sedangkan dalam aturannya diharuskan minimal cheking on the spot paling sedikit 3 bulan sekali sesuai dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. 2) Pelaksanaan tugas Hakim Wasmat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung belum berjalan maksimal dikarenakan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung hanya menugaskan satu orang Hakim Wasmat, tentu ini dirasa sulit karena jumlah narapidana sudah mengalami overcapacity, dan hakim wasmat tidak fokus dengan tugas pengamatannya mengingat tugas utama hakim mengadili perkara di pengadilan, kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti anggaran dan transportasi dalam melaksanakan tugasnya. 3) Upaya yang dilakukan oleh Hakim Wasmat untuk mengatasi hal ini adalah dengan membawa staff pembantu, menggunakan dana pribadi dan transportasi pribadi, mengurangi tugas di pengadilan negeri agar bisa terfokus dalam tugas pengamatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung.

345.02
RAF
p

PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang)

Rafiq Azian, 1410111099, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK V (Sistem Peradilan Pidana), 99 Halaman, 2019

ABSTRAK

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan Lapas dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika, apa saja kendala yang ditemui Lapas dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika, dan bagaimanakah upaya Lapas untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris), kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa peranan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika adalah memberikan program pembinaan dan layanan rehabilitasi narkotika. Namun terdapat beberapa kendala, yaitu: faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang bereaksi dengan melakukan upaya-upaya, yaitu: evaluasi terhadap sumber daya manusia, program pembinaan, sarana dan prasarana Lapas, mengadakan kerjasama dengan pihak luar, dan perbaikan sistem birokrasi Lapas.

Kata kunci: Peranan, Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan.

345.08
RAH
p

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II TANJUNG PATI SUMATERA BARAT

Rahmad Bakhri, 1410111149, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 57 halaman, 2019

ABSTRAK

Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai institusi penegak hukum teakhir dalam sistem peradilan pidana mempunyai peran penting untuk melakukan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan. Adapun tujuan dari pembinaan ini supaya anak tersebut menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan pembinaan Petugas Pemasyarakatan menemukan berbagai kendala, sehingga penulis merumuskannya kedalam 3 (tiga) rumusan masalah yaitu, Bagaimana pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Tanjung Pati terhadap anak didik pemasyarakatan, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan, dan bentuk upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemaysarakatan tersebut. Pada penulisan ini penulis menggunakan metode Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum dikaitkan dengan kenyataan dilapangan. Dari hasil penelitian, diketahui pelaksanaan pembinaan terhaap anak didik pemasyarakatan dilakukan dari segi kepribadian dan kemandirian. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan yakni letak dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang jauh dari ibu kota provinsi sehingga sulitnya akses bagi petugas pemasyarakatan, adanya pelabelan dari masyarakat umum tentang mantan anak didik pemasyarakatan, serta kurangnya perhatian dari orang tua. Dalam hal ini, Petugas Pemasyarakatan telah melakukan upaya diantaranya melaksanakan program-program berkelanjutan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang kondisi Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan peran masyarakat dalam pembinaan serta memberikan motivasi kepada orang tua tentang pentingya kasih sayang kepada anaknya selama menjalani masa pembinaan.

Kata Kunci: Lembaga Anak, Pembinaan, Pemasyarakatan,

341
RAH
P

PENGATURAN MARITIME SAFETY AND SECURITY OF THE INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION (IORA) DAN IMPLIKASI TERHADAP INDONESIA

Rahmi Muharramah, 1510111055, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 59 halaman 2019

ABSTRAK

Indian Ocean Rim Association (IORA) sebagai organisasi regional yang berada ditepian Samudera Hindia memiliki peran dan tanggung jawab dalam menciptakan stabilitas keamanan, ekonomi, sosial, politik, dan hubungan di antara sesama anggotanya sehingga Samudera Hindia dapat di awasi oleh IORA. Organisasi regional ini yang bertujuan untuk pembangunan dan pemerataan perekonomian di kawasan Samudera Hindia khususnya Negara anggota IORA, namun keselamatan dan kemanan maritim juga merupakan suatu masalah yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat bahwa wilayah Samudera Hindia merupakan jalur perdagangan perekonomian dunia. Berdasarkan dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yaitu : Bagaimana pengaturan maritime safety and security of the Indian Ocean Rim Association (IORA), Bagaimana implikasi pengaturan maritime safety and security terhadap Indonesia. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa dalam pengaturan maritime safety and security di Kawasan Samudera Hindia dapat diwujudkan melalui Organisasi Regional bernama Indian Ocean Rim Association (IORA) karena Organisasi Internasional bisa menjadi wadah dalam penyelesaian sengketa Internasional. Adapun area fokus dan prioritas utama IORA yaitu pada bidang keselamatan dan keamanan maritim, fasilitas perdagangan dan investasi, manajemen perikanan, manajemen resiko dan bencana, kerjasama akademis, ilmu pengetahuan dan teknologi, parawisata dan pertukaran budaya. Dalam perkembangannya, Indonesia sebagai negara anggota IORA berkesempatan menjadi pemimpin IORA untuk periode 2015-2017. Kepemimpinan Indonesia di IORA bertujuan untuk "Memperkuat kerjasama maritim di Samudera Hindia yang damai dan stabil".

Kata Kunci : Keselamatan dan Keamanan Maritim, Indian Ocean Rim Association.

346.04
RAH
p

PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI HIBAH WASIAT HARTA PUSAKA TINGGI KELUAR SUKU DI KOTO TUO BALAI GURAH AGAM

RAHMI MURNIWATI, 1510112042, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 Halaman, 2019

ABSTRAK

Warisan berkaitan dengan peraturan- peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang- barang harta (benda) dan benda yang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Selain di wariskan, harta kekayaan juga dapat diberikan kepada keturunannya atau pihak lain yang berasal bukan dari keturunannya dengan cara penghibahan harta kekayaan tersebut. Dalam hukum adat hibah terbagi dua yaitu Hibah Biasa dan Hibah Wasiat. Hibah menurut hukum adat Minangkabau erat kaitannya dengan Hukum Islam. Pelaksanaan Hibah tersebut mengacu kepada sistem Matrilineal, yang berarti sistem keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Selain itu, peralihan hak atas tanah melalui hibah harta pusaka juga dapat diberikan kepada ahli waris yang satu keturunan dengan ibu namun dapat juga diberikan kepada keturunan garis kesamping yaitu antara mamak kepada kemenakan. Praktek di lapangan khususnya di daerah Koto Tuo Balai Gurah Agam Minangkabau terjadi peralihan hak atas tanah melalui hibah harta pusaka tinggi keluar suku yang dilakukan oleh anggota suku Guci yang menghibahkan harta pusaka miliknya kepada salah seorang anggota suku Koto. Objek yang dihibahkan yaitu harta pusaka tinggi yaitu berupa sawah dan tanah miliknya.Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Apa alasan terjadiya peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat harta pusaka tinggi keluar suku di Koto Tuo Balai gurah Agam ? 2) Bagaimana proses peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat harta pusaka tinggi keluar suku di Koto Tuo Balai Gurah Agam? 3)Apa dampak peralihan hak atas tanah melalui hibah wasiat harta pusaka tinggi keluar suku terhadap keseimbangan masyarakat hukum adat di Koto Tuo Balai Gurah Agam? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, bersifat deskriptif analitis, dan analis data secara kualitatif. Hasil penelitian merumuskan: 1) alm ibu Aisyiah menghibah wasiatkan kan harta pusaka tinggi tersebut karena ia janda dan tidak memiliki keturunan sebagai penerusnya. Alm ibu Aisyiah tinggal bersama ibu Yoharna Ahmad dan menganggap sebagai keluarganya dengan alasan inilah alm ibu Aisyiah menghibah wasiat kan harta nya dan disebut Hibah Wasiat. 2) Surat Hibah harta pusaka tinggi dibuat alm ibu Aisyiah dengan tulisan tangan dan dan diatas kertas segel Rp.2000 tahun 1997, diketahui dan ditandatangani oleh mamak kepala waris suku guci dan disaksikan oleh ibu Elyawati yang merupakan anggota kaum suku koto yang sapayuang dengan ibu Yoharna Ahmad sebagai penerima Hibah tersebut. 3) Semenjak berlakunya hibah tersebut yaitu berlaku saat wafatnya ibu Aisyiah pada 11 September 2001 hingga sekarang harta pusaka yang dihibahkan berupa satu tumpak sawah dan sebidang tanah perumahan tersebut dikelola oleh ibu Yoharna Ahmad.

345
RAJ
p

PROSES IDENTIFIKASI FORENSIK OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP IDENTITAS MAYAT YANG DIDUGA KORBAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Padang)

Raja Imam Akbar Siregar, 1410111007, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,80 halaman, 2019

ABSTRAK

Penyidik dalam melaksanakan penyidikan bekerjasama dengan dokter forensik dalam mengungkap suatu tindak pidana dan merupakan usaha untuk mengetahui identitas seseorang yang ditunjukan untuk kepentingan forensik yaitu proses peradilan. Kewenangan Polri salah satunya adalah melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukkan penyidikan, salah satunya mengenai identitas seorang mayat yang diduga sebagai korban tindak pidana tidak ditemukan tanda pengenal atau identitas di tempat kejadian tersebut. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana proses identifikasi forensik dan kendala serta upaya penyidik kepolisian dalam mengungkap identitas mayat yang diduga korban tindak pidana. Adapun pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan deskriptif-analitis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa dalam proses identifikasi forensik terhadap korban tindak pidana yang tidak ditemukan tanda pengenal atau identitas adalah dengan mengambil sidik jari mayat, dengan tujun untuk mencocokan dengan data yang ada di Kepolisian Resor Padang dan data dari Polri, serta data pada inafis. Dalam proses identifikasi forensik terdapat kendala eksternal dari kepolisian yaitu belum terintegrasinya data kependudukan secara keseluruhan sehingga pada beberapa kasus data korban tidak ditemukan, karena korban tidak pernah melakukan perekaman e-ktp, stigma pemikiran masyarakat yang menganggap menjadi saksi akan menimbulkan kerugian, serta rendahnya pengetahuan masyarakat dan keluarga korban guna dari identifikasi forensik ini sendiri.

341
RAN
p

PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MEMPEROLEH AKSES DALAM ANGKUTAN UDARA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Rana Azizah, 1510112031, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 99 hlm, 2019

ABSTRAK

Setiap manusia memiliki kedudukan, kesempatan, dan hak-hak dasar yang sama dan wajib untuk dihormati dan dilindungi, khususnya bagi para penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan kemampuan. Secara khusus pengaturan hak-hak penyandang disabilitas telah diatur secara internasional pada United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD). Dalam kenyataan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan perlakuan diskriminasi salah satunya dalam pemenuhan hak memperoleh akses transportasi angkutan udara. Permasalahan tersebut melahirkan rumusan masalah; Bagaimana pengaturan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses dalam angkutan udara menurut hukum internasional dan nasional?. Bagaimana perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperolah akses angkutan udara?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses angkutan udara telah diatur secara jelas dalam hukum internasional yaitu Resolution 700 IATA, Annex 9 Chapter 8 ICAO, dan Document 9984 ICAO sedangkan dalam hukum nasional terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara. Namun terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara hukum internasional dengan hukum nasional yaitu definisi penyandang disabilitas, pemberitahuan awal, dan pembatasan jumlah dan jenis penumpang. Kemudia bentuk perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperolah akses angkutan udara dapat terlihat dengan adanya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang dapat dibagi menjadi aksesibilitas sebelum melakukan penerbangan, aksesibilitas saat di bandar udara, aksesibilitas saat di pesawat udara, dan aksesibilitas saat meninggalkan bandar udara. Perlindungan hak penyandang disabilitas dalam memperolah akses angkutan udara di Indonesia belum dapat dikatakan baik karena ini dapat terlihat dengan masih banyaknya kasus diskriminasi penyandang disabilitas dalam mengakses angkutan udara.

Kata kunci :Penyandang Disabilitas, Aksesibilitas, Angkutan Udara

342
RAN
i

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU- XIII/2015 TERHADAP PEMBATALAN PERATURAN DAERAH

Randa Andika, 1310111257, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 halaman, 2019

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan kewenangan pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga hanya Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan dalam membatalkan Perda Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal tersebut penulis akan menjelaskan Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 terhadap Pembatalan Peraturan Daerah dan bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 terhadap Pembatalan Peraturan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Hasil penelitian penulis menunjukkan dampak yang positif terhadap kepastian hukum mengenai kewenangan dalam membatalkan Perda Kabupaten/Kota, dimana sebelumnya menimbulkan dualism putusan pengadilan antara Pemerintahan Pusat dan Mahkamah Agung. Disisi lain dengan kewenangan Mahkamah Agung yang terlalu besar dalam membatalkan Perda Kabupaten/Kota berpotensi menyebabkan ketidakpastian dalam Pembatalan Perda Kabupaten/Kota karena Perkara Judicial Review Peraturan Daerah di Mahkamah Agung setiap tahunnya semakin meningkat sehingga menyebabkan Menumpuknya Perkara Peraturan Daerah di Mahkamah Agung. Selain itu siapakah yang bisa menjadi pemohon untuk judicial review di Mahkamah Agung kedepannya dan terjadinya Penambahan Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Kata Kunci : Implikasi, Peraturan Daerah, Judicial Review

346.01
RAN
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Perberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Provinsi Sumatera Barat)

Randi Yulia Mahagandi, Nomor BP : 1310111057, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 51 halaman, 2019

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau bias disebut kekerasan domestik (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat. Sebagian korban KDRT adalah perempuan. Di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2017, 35 kasus di tahun 2015, 43 kasus di tahun 2016, dan 47 kasus di tahun 2017. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan kendala-kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Nan Gadang. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif melalui studi dokumen dan wawancara (data primer) yang kemudian dianalisa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang ada (data sekunder). Dalam wawancara kepada pihak P2TP2A, terdapat beberapa pembahasan seperti: Sejarah pembentukan, profil, strukrur, divisi , proses penangangan korban, proses perlindungan hukum, kendala yang dialami, upaya mengatasi kendala dan jenis layananan yang diberikan disetiap kasus. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan dan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Nan Gadang dilakukan dengan mekanisme yaitu: korban diidentifikasi, penanganan medis bagi korban yang mengalami luka-luka, proses rehabilitasi kesehatan, korban yang tidak mempunyai luka fisik dan diidentifikasi memerlukan konseling dan pemulihan psikis diberikan layanan rehabilitasi social dari proses konseling awal, konseling lanjutan, bimbingan mental dan spiritual serta pendampingan rujukan jika diperlukan, pemberian bantuan dan pendampingan hukum dari pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hingga selesai, dan terakhir pendampingan pemulangan atas keinginan dan persetujuan korban. Kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Nan gadang yaitu: kualitas dan kuantitas pengelola, sarana dan prasarana yang terbatas, kurangnya koordinasi dengan P2TP2A tingkat kabupaten dan kota serta penganggaran dana yang masih minim yang ditandai dengan belum optimalnya perhatian kepala daerah. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) LimpapehRumah Nan Gadang yaitu : Mengoptimalkan layanan berbasis pelayanan ditingkatakan rumput (rukun warga, desa, kelurahan, dan kecamatan), Mengoptimalkan kerjasama dan penguatan jejaring kemitraan terpadu yang melibatkan pemerintah, organisasi non pemerintah yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, duniausaha, dunia industri, paratokoh masyarakat (adat, budaya, agama dan cendikiawan) dan stake holder lain yang relevan, serta melakukan penguatan strategi pengarustamaan gender.

345
RAN
p

PELAKSANAAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DI KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU

Rani Adriana, 1510112068, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana, 72 Halaman, Tahun 2018.)

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II Bab XXV Pasal 378 sampai Pasal 395 KUHP. Tindak pidana penipuan merupakan bagian dari tindak pidana umum yang berada di dalam KUHP sehingga penyelesaian tindak pidana penipuan harus mengacu dan berlandaskan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah mengatur mengenai proses suatu tindak pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan adanya suatu putusan Hakim. Namun di dalam pelaksanaannya, penulis menemukan ada beberapa kasus hukum menyangkut tindak pidana penipuan yang diselesaikan melalui mediasi penal sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pada tingkat penyidikan. Sedangkan penggunaan mediasi penal tidak diatur di dalam KUHAP. Oleh karena hal tersebut penulis ingin melakukan penelitian dengan rumusan sebagai berikut : 1) apakah yang menjadi pertimbangan penyidik Polri dalam menggunakan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penipuan di Polda Bengkulu, 2) bagaimanakah pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian Tindak Pidana Penipuan di Polda Bengkulu. Dalam kepenulisan ini pendekatan masalah yang Penulis gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Adapun hasil penelitian penulis di Kepolisian Daerah Bengkulu sebagai berikut: 1) pertimbangan penyidik Polri untuk melaksanakan mediasi penal ini agar dapat mengurangi penumpukan berkas perkara di tingkat penyidikan, mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian di luar pengadilan pertama kali muncul dari inisiatif kedua belah pihak, karena dengan adanya penyelesaian melalui jalur mediasi penal ini akan mempercepat proses penyelesaian perkara; 2) adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu hanya berdasarkan kepada Peraturan Kapolri No 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Impelementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Menyelenggarakan Tugas Polri dan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) dengan menggunakan model mediasi penal Informal Mediation dan Reparation Negotiaton Program.

345
RAN
p

PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TATA TERTIB DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB PARIAMAN)

RANI DELTA GAYATHREI.1510111060. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV (Hukum Pidana). 94 Halaman. Tahun 2019

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai tempat pembinaan dan pengamanan narapidana serta untuk menanggulangi berbagai macam tindak kejahatan dalam menurukan resiko terjadinya kembali kejahatan di masyarakat. Terhadap pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan alasan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana bentuk pelanggaran tata tertib yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman? Kedua, bagaimana penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman? Ketiga, Apa kendala yang dihadapai petugas Lembaga Pemasyaraktan dalam mengatasi pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana dan upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggulangi kendala tersebut ? Dalam penelitian ini bersifat Deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: Pertama, Bentuk pelanggaran di Lembaga Pemasyarkatan Klas IIB Pariaman di bagi menjadi tiga kelompok yaitu Pelanggaran Tata Tertib tingkat ringan, sedang, dan berat yang disebabkan oleh faktor dari lembaga pemasyarakatan dan narapidana itu sendiri. Kedua, Penerapan hukaman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tata tertib di Lembaga Pemasyarkatan Klas IIB Pariaman berupa hukuman disiplin tingkat ringan yaitu memberikan peringan secara lisan dan tertulis, hukuman disiplin tingkat sedang yaitu dimasukan kedalam sel pengasingan selama 6 hari seta menunda dan meniadakan hak-hak tertentu, Hukuman disiplin tingkat berat yaitu dimasukan dalam sel pengasingan 6 hari dan dapat di perpanjang 2 kali 6 hari serta mencabut hak-hak tertentu, dimasukan kedalam register F, memindahkan narapidana ke Lapas lain yang ada di Sumatera Barat.Penerapan hukuman disiplin ini bertujuan untuk mengurangi tingkat pelanggaran tata tertib. Ketiga, Kendala yang dihadapi petugas dalam mengatasi pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarkatan Klas IIB Pariaman yaitu: jumlah kamar sel yang terbatas, lokasi kamar sel yang jauh, ukuran kamar sel isolasi yang kecil, ketidakpastian kapan penambahan kamar sel, jumlah petugas penjagaan yang sedikit, kurangnya sarana dan prasarana, narapidan yang membangkang, keadaan narapidana yang tidak sehat. Sedangkan upaya dalam menanggulangi kendala yaitu: melakukan sosialisasi kepada petugas, melakukan pendekatan kepada narapidana, menempelkan pengumuman, melakukan piket standbay, melakukan razia kamar sel dan memindahkan narapidana ke Lapas lain yang ada di Sumatera Barat.

Kata Kunci: Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Pelanggaran, Tata tertib, Hukuman Disiplin.

348.04
RAN
p

PELAKSANAAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI PADANG

RANTI FITRIILMI EFENDI, 1510112011, FAKULTAS HUKUM, 2019, 72 HALAMAN

ABSTRAK

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim (pengadilan). Namun penyelesaian sengketa di pengadilan dalam segala tingkat peradilan membutuhkan waktu yang sangat lambat dalam penyelesaiannya. Pada pemeriksaan perkara perdata, jika para pihak memanfaatkan seluruh proses yang ada maka tahapannya terdiri dari memasukkan gugatan, menunggu panggilan hari sidang, mediasi, pembacaan gugatan, pembacaan jawaban, pembacaan replik, pembacaan duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Untuk menjawab kerumitan dan panjangnya proses tersebut, pemerintah perlu melakukan terobosan untuk mendorong akses masyarakat terhadap keadilan, termasuk dalam mengakses mekanisme penyelesaian perdata. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Gugatan Sederhana. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Gugatan Sederhana menjelaskan bahwa gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Penelitian mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Gugatan Sederhana ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Padang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang dan apakah kendala dan solusi dalam pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Padang telah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Gugatan Sederhana sesuai dengan ketentuan yang diatur didalamnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terkendala dengan kurangnya pemahaman pihak yang mengajukan gugatan menggunakan gugatan sederhana ini mengenai hal-hal yang menjadi syarat-syarat pengajuan gugatan sederhana.

346.08
RAT
p

PELAKSANAAN PENGAWASAN ASURANSI JIWASRAYA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT DI KOTA PADANG

Ratih Yatika Jr, 1510111023, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 64 halaman

ABSTRAK

Pertimbangan dalam pembentukan Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan dinyatakan bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan didalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil transparant dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan juga mampu untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan didalam sektor jasa keuangan agar mewujudkan perekonomian nasional yang baik diperlukan Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan secara terpadu, independen,dan akuntabel. Tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan asuransi jiwasraya oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dan peranan otoritas jasa keuangan Provinsi sumatera barat terhadap pengaduan konsumen dalam rangka memberikan perlindungan bagi pemegang polis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan fungsi pengawasan secara langsung melalui tugas pengawasan dan pemeriksaan berkoordinasi dengan kantor pusat Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal ini kantor pusat Asuransi Jiwasraya berada di Jakarta, dan peranan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat terhadap pengaduan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan memberikan pengaturan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan konsumen disektor jasa keuangan.

Kata kunci : Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan , Asuransi, Jiwasraya

344.03
RAT
p

PERANAN WOMEN CRISIS CENTER (NURANI PEREMPUAN) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi di Lembaga Nurani Perempuan Kota Padang)

Ratna Dianis, 1510111121, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Dewasa ini, kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas semakin marak terjadi, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman para penyandang disabilitas tentang betapa penting dan berharga dirinya. Oleh sebab itu didirikanlah sebuah lembaga yang mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan dan juga pendampingan bagi para penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual, lembaga tersebut adalah Women Crisis Center (Nurani Perempuan), Women Crisis Center (Nurani Perempuan) mempunyai peranan penting dalam membantu penyelesaian kasus kekerasan yang dialami oleh para penyandang disabilitas. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi iniyaitu: 1. Bagaimana peranan Women Crisis Center (Nurani Perempuan) terhadap perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual di Lembaga Women Crisis Center (Nurani Perempuan) Kota Padang? 2. Apa saja kendala dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas sebagai kekerasan seksual di Lembaga Women Crisis Center (Nurani Perempuan) Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian, Peranan yang dilakukan oleh Women Crisis Center (Nurani Perempuan) berupa pendampingan bagi korban di pengadilan, melakukan konseling, melakukan upaya untuk memastikan keadilan bagi korban, serta melakukan upaya pemulihan terhadap korban terutama pemulihan psikososialnya, serta memberdayakan korban dari keluarganya. Kendala yang dihadapi oleh Women Crisis Center (Nurani Perempuan) yaitu, sulitnya berkomunikasi dengan korban penyandang disabilitas, keterbatasan komunikasi dengan korban membuat pemulihan korban menjadi tidak maksimal, terbatasnya tenaga ahli atau saksi ahli, mengupayakan ditambahnya tenaga ahli maupun saksi ahli, memberikan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat tentang pentingnya pengetahuan kekerasan seksual dan dampak bagi korban kepada masyarakat dan keluarga, meningkatkan rasa kepeduliaan kepada anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan seksual.

345
RAU
y

YURISDIKSI PENGADILAN MILITER I-03 PADANG DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (Studi Kasus Putusan Nomor 116-K/PM.I-03/AD/XI/2018)

Raudatul Hakiki, 1510112123, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 78 halaman

ABSTRAK

Adanya dua pembagian kewenangan mengadili antara pelanggaran hukum pidana umum oleh peradilan umum dan pelanggaran hukum pidana militer di peradilan militer menimbulkan banyak pertanyaan terkait dengan independensi peradilan militer itu sendiri. Peradilan militer hanya menentukan Prajurit Militer sebagai subjek hukumnya saja, sehingga tindak pidana umum atau tindak pidana khusus diluar tindak pidana militer yang dilakukan tetap disidangkan di peradilan militer. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) apa dasar kewenangan Pengadilan Militer I-03 Padang dalam mengadili tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anggota TNI, 2) apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) bulan dalam Putusan Nomor 116-K/PM-I 03/AD/XI/2018, 3) apakah penjatuhan pidana penjara 5 (lima) bulan oleh hakim, telah memenuhi tujuan dari pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni : dasar kewenangan Pengadilan Militer I-03 Padang dalam mengadili tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah merujuk kepada Pasal 9 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa peradilan militer mengadili semua tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, baik tindak pidana yang terdapat dalam KUHP maupun diluar KUHP. Peradilan militer di sini hanya melihat Prajurit Militer sebagai subjek hukumnya saja, namun tidak melihat objek dari tindak pidana tersebut. Sehingga tindak pidana umum yang dilakukan tetap disidangkan di peradilan militer dan tunduk kepada KUHP, akan tetapi proses persidangannya tetap sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hakim dalam memutus perkara ini telah memperhatikan aspek yuridis dan siosiologis Terdakwa. Di antaranya sikap Terdakwa selama di persidangan, hal-hal yang dapat meringankan maupun memberatkan serta sebab-sebab Terdakwa melakukan tindak pidana. Tujuan penghukuman bukanlah untuk pembalasan, melainkan untuk pelaku agar dapat diterima kembali di masyarakat. Sehingga penjatuhan pidana penjara 5 (lima) bulan oleh hakim telah memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

344.04
RED
P

PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN (K3) OLEH PT. DIPLOMAD SURYA NUGRAHA PADA PROYEK REHABILITASI INTAKE DAN JARINGAN PIPA TRANSMISI AIR BAKU BATANG KARIMO DI KABUPATEN SIJUNJUNG SIMATERA BARAT

Redho Aulia Nugraha, 1210113051, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 81 Halaman

ABSTRAK

PT. Diplomad Surya Nugraha berdasarkan Surat Perjanjian Konstruksi Harga Satuan (SPK- HS Nomor. HK.02.03/04/BWS-SV-PJPA-WS.IAKR.ATAB-II/IV/2018 Tanggal 30 April 2018) melaksanakan Proyek Rehabilitasi Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Batang Karimo di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat. Guna kelancaran dan selesainya proyek sesuai jangka waktu yang ditetapkan, serta pemenuhan kewajiban peraturan perundang-undangan maka PT. Diplomad Surya Nugraha menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode pendekatan deskriftif analisis artinya penelitian ini nantinya akan menggambarkan bagaimana kepatuhan (ketaatan) penerapan aturan-aturan hukum K3 oleh PT. Diplomad Surya Nugraha pada proyek rehabilitasi intake dan jaringan pipa transmisi air baku Batang Karimo di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat. Subjek penelitian ini adalah Kepala SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air WS. IAKR Provinsi Sumatera Barat dan Direktur PT. Diplomad Surya Nugraha. Objek penelitian adalah penerapan aturan hukum K3 oleh PT. Diplomad Surya Nugraha. Jenis data yang digunakan adalah data primer (data yang langsung diperoleh dari wawanara di lapangan) dan data sekunder (data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan), dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan menggunakan penalaran atau logika kritis. Hasil penelitian adalah (1). Penerapan K3 pada proyek rehabilitasi intake dan jaringan pipa transimis air baku Batang Karimo di Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat oleh PT. Diplomad Surya Nugraha berdasarkan sifatnya dikategorikan menjadi: bersifat; 1). Preventif, diantaranya; a). membuat dokumen RK3K, b). rekrutmen pekerja sesuai kompetensi dan jenis pekerjaan yang dilaksanakan, c). melakukan perjanjian kerja (hubungan kerja) d). Mendaftarkan seluruh staf dan pekerja/buruh kedalam BPJS-Ketenagakerjaan guna mengikuti program JKM dan JKK e) Menyediakan peralatan, sarana penunjang K3 dan alat pelindung diri (APD) dan 2). Represif yakni melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan K3. (2). Kendala yang ditemui dalam penerpan K3 pada proyek tersebut yaitu terbatas jumlah tenaga kerja yang mempunyai kompetensi dan rendahnya kesadaran dari pekerja guna memakai alat pelindung diri.

Kata Kunci: Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja, Kecelakaan Kerja, Perjanjian Kerja/Hubungan Kerja dan Alat Pelindung Diri .

345
REF
p

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL (Studi putusan Nomor 853/Pid.B//2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag)

Refa Gianza Hearviano, 1510111084, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 98 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Peredaran senjata api di kalangan masyarakat sipil adalah fenomena global. Kurang tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat sipil merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Peredaran senjata api yang sangat mudah untuk didapatkan menyebabkan tidak terkontrolnya peredaran senjata api baik legal mapun ilegal sehingga menyebabkan kekhawatiran masyarakat dari segi keamanan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Dalam Putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag? 2. Apakah yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Dalam Putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan (library research) . Dari hasil penelitian, Penerapan sanksi pidana dalam putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag merupakan tindak pidana yang telah terbukti dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk memvonis terdakwa dengan tindak pidana tanpa hak untuk menyimpan dan membawa senjata api sebagaimana mestinya yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap kedua pelaku dalam putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang teungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana.

342.07
REZ
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU (Studi di Polres Bukittinggi dan Polres Tanah Datar)

Reza Fahlevi, 1510111001, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 60 halaman

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 1, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Deawan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam Prakteknya masih ada terjadi pelanggran tindak pidana pemilu seperti yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar dan Kota Bukittinggi yaitu pelanggaran jadwal kampanye dan menggunakan fasilitas pemerintah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (a) Bagaimanakah proses penyidikan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaku tindak pidana pemilu di Sumatera Barat dan (b) Apa saja hambatan yang dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyidik pelaku tindak pidana pemilu di Sumatera Barat. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah didapati bahwa kasus pelanggaran jadwal kampanye yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar menggunakan media cetak berupa tabloid dan di Kota Bukittinggi kasus tindak pidana menggunakan fasilitas pemerintah untuk melakukan kampanye, Serta hal lain yang menghambat penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu dalam hal mengumpulkan saksi- saksi yang bersedia dalam memberikan keterangan atas tindak pidana yang terjadi dan selanjutnya yakninya waktu penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terbilang singkat yaitu dalam 14 hari sejak keluarnya Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan harus di limpahkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Kejaksaan Republik Indonesia.

343.09
REZ
p

PELAYANAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PARIAMAN

Rezi Yosrialde Putra, 1510111010, Fakultas Hukum, 2019, 61 Halaman

ABSTRAK

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menjelaskan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kemudian tentang pencemaran lingkungan hidup. Selanjutnya UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan adalah membantu menyiapkan segala apa-apa yang diperlukan oleh seseorang atau orang lain. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu dan pada Peraturan Daerah Kota Pariaman No. 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa peran dan tugas dalam penyelengaraan pengelolaan sampah yaitu Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dan penyedia jasa layanan serta fasilitas yang tidak dimiliki oleh masyarakat dan sebagai penyediakan pelayanan fasilitas dalam pengelolaan sampah. Meskipun dalam peraturan perundang- undangan telah mengatur tentang persampahan dari memberikan pelayanan dalam pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan oleh pemerintah yang meliputi sebagai fasilitator dan penyedia jasa layanan serta memfasilitasi fasilitas yang tidak dimiliki oleh masyarakat namun pada kenyataannya Pemerintah Kota Pariaman masih terjadi berbagai kekurangan dalam penyedian pelayanan dalam pengelolaan sampah yang meliputi kurangnya fasilitas-fasilitas penunjang dalam pengelolaan sampah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kota Pariaman 2) Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam memberikan pelayanan dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan metode empiris sosiologis bersifat deskriptif-analitis, menggunakan jenis data primer dan data sekunder, sumber data didapat penulis dari penelitian kepustakaan dan lapangan, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian, pelaksanaan pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah oleh pemerintah kota pariaman telah berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan tetapi belum maksimal karena masih terjadi berbagai kekurangan namun dengan kekurangan tersebut tidak terjadi pencemaran karena sampah dari hasil kegiatan manusia tersebut masih dalam kadar atau batas baku mutu lingkungan hidup dan terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan serta solusinya.

Kata Kunci : Pelayanan, Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kota Pariaman

345
RHA
p

PERANAN SATUAN RESERSE NARKOBA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES PASAMAN

RHAVEI RANDA PRILANZA, 1410111096, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Definisi kepolisian menurut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Pasal 1 dan Undang- Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengenai tindak pidana narkotika ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pengertian nakotika adalah "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Peredaran narkotika sudah masuk di wilayah Kabupaten Pasaman dimana dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan setiap tahunya. Pada tahun 2016 sebanyak 21 kasus,dan pada tahun 2017 sebanyak 30 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 26 kasus. . Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana peranan Satuan Reserse Narkoba dalam pemberantasan tindak pidana peredaran Narkotika di wilayah hukum Polres Pasaman? 2. Apa Kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana peredaaran Narkotika di wilayah hukum Polres Pasaman? 3. Bagaimana solusi terhadap Kendala- kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Pasaman? Penelitian inin menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu pemeberntasan tindak pidana peredaran narkotika. Upaya preventif yaitu melakukan sosialiasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerahdan instansi- instansi pemerintahan upaya represif yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan di lakukan oleh Satuan Reserse Narkoba. Kendala yang ditemui berupa kendala internal kurangnya anggaran dana,sarana dan prasarana, dan jumlah anggota personil, dan belum ada laboratorium forensik.kendala eksternal luasnya wilayah dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengatasi kendala-kendala Satuan Reserse Narkoba mengajukan anggaran dana dan penambahan personil dan Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan serta dalam upaya dalam memberantas tindak pidana peredaran narkotika, diantaranya dengan memberikan informasi tentang keberadaan pelaku tindak pidana peredaran narkotika agar wilayah Kabupaten bersih dari narkotika.

344.03
RID
k

KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN AMDAL PADA PERTAMBANGAN BATU KAPUR PT. BAKAPINDO DI KABUPATEN AGAM

Rido Julianto, 1510111065, Fakultas Hukum, 2019, 54 halaman

ABSTRAK

UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup telah mengakomodir masyarakat untuk ikut berperan secara aktif dalam proses penyusunan AMDAL pada tahap penapisan hingga keputusan kelayakan. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan telah memberikan posisi strategis bagi masyarakat untuk memberi saran, pendapat maupun tanggapan namun pada kenyataannya partisipasi justru hanya sekedar sebagai prasyarat secara formalitas saja.Dalam hal ini PT.Bakapindo sebagai permrakarsa usaha dan/atau kegiatan tambang batu kapur,berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat yang terkena dampak langsung malah tidak dilibatkan dalam penyusunan AMDAL PT.Bakapindo. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL PT.Bakapindo di Nagari Kamang Mudik Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam 2) Apa akibat hukum jika masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan AMDALPT.Bakapindo di Nagari Kamang Mudik Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif, menggunakan jenis data primer dan data sekunder, sumber data didapat penulis dari penelitian kepustakaan dan lapangan, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan amdal berupa konsultasi publik,konslutasi publik dilakukan melalui tatap muka langsung dengan perwakilan masyarakat Nagari Kamang Mudik.

Kata Kunci: AMDAL, PT. Bakapindo , Keterlibatan Masyarakat

348.04
RIF
e

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG DALAM PERKARA NOMOR : 144/PDT.G/2012/PN.PDG MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN LEASING

Rifky Pernanda Putra. 1310112155.Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK II(Perdata Bisnis).91 halaman, tahun 2019

ABSTRAK

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat pengertian fidusia. Fidusia adalah : Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam pengusaan pemilikan benda itu.Jaminan fidusia ini wajib didaftarkan, Pendaftaran jaminan fidusia ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi kedua belah pihak, apalagi penerima fidusia, sehingga tercatat dalam buku pendaftaran akta fidusi yang dibuat notaris, dan perjanjian tersebut bersifat mempunyai kekuatan eksekutorial. Yang diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang fidusia. Dan juga dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu BAB V Pasal 18 ayat 1, diatur tentang perlindungan konsumen, Pelaku usaha dalam menawarkan barang barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk perdagangan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian tentang EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG DALAM PERKARA NOMOR : 144/PDT.G/2012/PN.PDG MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN LEASING Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Apa alasan konsumen memilih mengajukan gugatan biasa dibandingkan dengan mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK Nomor 12/BPSK/PDG/PTS/M/II/2012 ke pengadilan negeri dan (2) Bagaimana Pelaksanaan Esekusi Putusan Pengadilan Negeri Padang Dalam Perkara Nomor : 144/Pdt.G/2012/Pn.Pdg ?.Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris (Social Legal Research)yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada norma-norma hukum yang berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas dikaitkan dengan kenyataan yang dilapangan atau mempelajari yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini yang pertama alasan dari Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Nomor: 144/Pdt.G/2012/Pn.Pdg majelis hakim memutus bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan Pasal 14 dan 15 UU No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dan menghukum tergugat untuk mengembalikan kepada penggugat mobil avanza BA 1005 A. Akan tetapi eksekusi putusan 144/Pdt.G/2012/Pn.Pdg belum dapat dilaksanakan dikarenakan penggugat meninggal dunia, dan dialihkan kepada pihak keluarga, dan pihak leasing beritikad baik untuk menyelesaikan masalah ini yaitu dengan menawarkan pihak keluarga(anak Ibu Fatmiwati) untuk menyelesaikan masalah ini di kantor pihak leasing dan pihak ahli waris menyetujui penyelesaian di kantor pihak leasing. Namun pihak keluarga sampai saat ini tidak pernah datang lagi ke pengadilan untuk mengajukan gugatan eksekusi.

341
RIJ
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AWAK KAPAL MENURUT MARITIME LABOUR CONVENTION 2006 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Rijen Arresman, 13101112228, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VI (Hukum Internasional), jumlah halaman 64, Tahun 2019

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah lautan yang besar dari pada daratannya. Ini menjadi salah satu keuntungan di bidang perikanan dan transportasi laut untuk menjadi pemasukan negara. Pekerjaan di bidang perikanan pun menjadi salah satu profesi yang cukup di minati oleh warga negara kepulauan. Awak kapal merupakan salah satu komponen yang penting untuk dilindungi baik itu hak dan kewajibannya. Sebagaimana permasalahan yang di alami oleh para awak kapal dimana kurangnya kepastian hukum yang diterima serta minimnya implementasi dan pengawasan lapangan dari peraturan, menjadi salah satu masalah yang menunjukkan ketiadaan inovasi implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif guna mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadapad awak kapal menurut Maritime Labour Convention 2006 dan Implementasinya bagi Indonesia.Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya Maritime Labour Convention 2006 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No.15 Tahun 2016 Tenatng Pengesahan Maritime Labour Convention 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim). Hasil ratifikasi tersebut juga dilanjutkan dengan pembentukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2017 Tentang Persyaratan Dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan.

Kata kunci :awak kapal, MLC 2006.

346.08
RIR
p

PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA CV. ELANG PERKASA MOTOR DENGAN PT. ASURANSI CENTRAL ASIA DALAM PENGAJUAN KLAIM ASURANSI GEMPA (STUDI KASUS NO: 30/P3K/2013)

Ririn Afriani, 1510112048, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 67 Halaman, 2019

ABSTRAK

Perlindungan hukum merupakan produk Negara hukum.Perlindungan hukum berlaku untuk siapa saja khususnya konsumen.Konsumen merupakan setiap pengguna barang dan/jasa.Konsumen asuransi merupakan konsumen yang menggunakan jasa pengalihan resiko.Konsumen asuransi diberikan perlindungan hukum agar tidak adanya kesewenang-wenangan dari perusahaan asuransi.Perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif dan represif.Perlindungan secara represif dapat dilihat secara konkrit dalam penyelesaian sengketa konsumen.Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha membuat konsumen dirugikan.Penyelesaian sengketa yang diteliti dalam penelitian ini adalah penyelesaian sengketa antara konsumen yang memiliki pinjaman pada suatu Bank dan menjadikan polis asuransinya sebagai jaminan atas pinjamannya dengan perusahaan asuransi. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa antara konsumen tersebut dengan perusahaan asuransi, 2). Apa kendala dalam penyelesaian sengketa konsumen di BPSK. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dengan analisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsumen tidak mendapatkan informasi yang benar dan jelas terkait nama tertanggung di dalam polis asuransi gempa. Konsumen juga tidak mengetahui bagaimana pengajuan klaim asuransi gempa apabila polisi asuransinya dijadikan sebagai jaminan kepada Bank atas pinjamannya.Konsumenpun tidak aktif dalam meminta penjelasan kepada pelaku usaha terkait prosedur pengajuan klaim, besaran ganti rugi, dan kedudukannya sebagai tertanggung di dalam polis tersebut.Kendala penyelesaian sengketa ini adalah masalah pengetahuan hukum dari anggota BPSK karena sengketa konsumen dalam pemberian putusan khususnya dalam arbitrase membutuhkan pertimbangan hukum, serta tingkat pendidikan para pihak.

Kata Kunci :Perlindungan hukum, Asuransi, BPSK

345
RIS
p

PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI OLEH PENYIDIK POLRES PADANG PARIAMAN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi di Satuan Reserse Narkoba Polres Padang Pariaman)

Riska Sonia, 1510111096, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana), 80 halaman, 2019.

ABSTRAK

Penyitaan dilakukan untuk kepentingan dipengadilan. Terbuktinya tersangka atau terdakwa bersalah atau tidaknya tergantung dari alat bukti yang digunakannya dalam tindak pidana. Untuk itu alat bukti harus dilindungi dan dijamin keutuhannya oleh penyidik dengan melakukan penyitaan, seperti dalam hal tindak pidana narkotika. Dalam mendapatkan barang bukti tersebut, penyidik harus melakukannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh penyidik dalam melakukan penyitaan barang bukti. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh penyidik Polres Padang Pariaman. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaiamana pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh penyidik Polres Padang Pariaman dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika; 2) Apa saja kendala dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti oleh penyidik Polres Padang Pariaman dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis dengan menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskripsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh hasil sebagai berikut: 1) bahwa penyidik Polres Padang Pariaman dalam melakukan penyitaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika lebih sering menggunakan penyitaan dalam keadaan mendesak, karena sifat dari barang buktinya yang udah dimusnahkan atau disembunyikan oleh tersangka. 2) kendala yang ditemui penyidik dalam melakukan penyitaan yaitu sulitnya menemukan orang yang dijadikan saksi pada saat penangkapan langsung di tempat kejadian tindak pidana, kurangnya personil kepolisian dibagian Satresnarkoba Polres Padang Pariaman, belum tersedianya tes kit di Polres Padang Pariaman. Solusi dari sulitnya mencari saksi, penyidik meminta perangkat tertinggi dari suatu daerah tersebut sebagai saksinya seperti Wali Nagari, Wali Jorong, orang yang dituakan di daerah tersebut dan sejenisnya, penyidik harus bersikap profesional dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dan mengupayakan pengadaan tes kit di Polres Padang Pariaman.

Kata Kunci: Barang Bukti, Penyitaan, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

348.04
ROB
k

KEDUDUKAN REKONSTRUKSI BAGI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi di Wilayah Hukum Polresta Pariaman)

ROBBY ISWANDI.1310111209.Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK IV (Hukum Pidana). 73 Halaman. Tahun 2019

ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman menyebabkan semakin beragamnya motif dari tindak pidana, terkhusus terhadap tindak pidana pembunuhan. Namun perkembangan negatif ini juga memicu para penegak hukum untuk terus berkembang dalam mengembangkan aturan atau hukum yang berlaku maupun upaya penyelidikan dan penyidikan yang terus didukung oleh berkembangnya ilmu pengetahuan. Dan dalam hal tindak pidana pembunuhan, upaya rekonstruksi dalam tahap penyidikan terus berkembang untuk mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan guna mendapatkan kebenaran dan kepastian hukum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah, 1) Bagaimana kedudukan dan fungsi rekonstruksi bagi penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan? 2) Apa kendala yang dihadapi penyidik ketika pelaksanaan rekonstruksi dalam mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan ? 3) Apakah upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi kendala tersebut? Penelitian ini dilakukan di lingkungan wilayah hukum unit reserse kriminal polresta Pariaman. Penelitian dilakukan dengan pendekatan masalah yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data yang didapat langsung di lapangan dari hasil penelitian dan data yang diperoleh dari informasi- informasi dari bahan studi kepustakaan. Dari penelitian yang dilakukan penulis di Polresta diperoleh data bahwa rekonstruksi memiliki kedudukan yang sangat penting bagi penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana pembunuhan, selain memiliki kedudukan yang penting bagi penyidik penyidik, rekonstruksi juga memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam persidangan. Karena hasil dari rekonstruksi berupa berkas perkara dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang digunakan oleh hakim untuk memberikan keyakinan yang lebih dalam mengutus suatu perkara tindak pidana pembunuhan. Namun di dalam pelaksanaanya penyidik mengalami berbagai kendala mulai dari kurangnya edukasi terhadap masyarakat sekitar olah TKP mengenai rekonstruksi sehingga dijadikan tontonan atau dapat menghambat jalannya rekonstruksi, atau kendala dalam menghadirkan saksi dikarenakan takut untuk memberikan keterangan, dan hilangnya barang bukti. Tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi berbagai kendala yang disebutkan diatas diantaranya : 1) meminta izin dan berkoordinasi dengan pejabat pemerintah daerah yang akan dijadikan pelaksanaan rekonstruksi tersebut, dan memberikan edukasi singkat atau penyuluhan kepada warga sekitar mengenai rekonstruksi dan akan dilaksanakan di sekitar wilayah mereka. 2) Apabila barang bukti asli yang digunakan oleh tersangka pembunuhan hilang, atau tersangka tidak mau memberi tahu dimana barang bukti tersebut disimpan dengan alasan lupa, maka penyidik akan mengganti barang bukti tersebut dengan benda yang lain namun dalam bentuk yang sama dan sejenis.

348.04
ROH
p

PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR

Rohi Jasman, Nomor BP : 13101112041, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 58 halaman, 2019

ABSTRAK

Pada hakekatnya terdapat 3 tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfataan. Pungutan liar merupakan perbuatan yang tidak mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, maraknya pungli menjadi dasar pembentukan satgas saber pungli. Adapun rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan sapu bersih pungutan liar (saber pungli) oleh Satuan tugas sapu bersih pungutan liar (saber pungli) Provinsi Sumatera Barat?, Bagaimana kendala- kendala yang dihadapi oleh unit sapu bersih pungutan liar(saber pungli) dalam melaksanakan penegakan hukum? Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai instusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang di Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sumatera Barat Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Indonesia di dasari oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar mempunyai wewenang: Membangun system pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementrian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi, Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar, Melakukan operasi tangkap tangan, Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementrian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementrian/ lembaga dan kepala pemerintah daerah, Melaksanakan evalusi kegiatan pemberantasan pungutan liar, Struktur Organisasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sumatera Barat menjadikan Gubernur Provinsi Sumatera Barat sebagai penanggung jawab utama. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sumatera Barat diketuai oleh Inspektur Pengawas Daerah, Inspektur Provinsi sebagai Wakil I, dan Asisten Pengawas Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Barat sebagai Wakil II, Satgas Saber Pungli Provinsi Sumatera Barat terbagi menjadi 4 Pokja yaitu: Pokja Intelijen, Pokja Pencegahan, Pojka Penindakan dan Pokja Yustisi yang berperan untuk melakukan upaya pendeteksian, upaya preventif dan upaya represif. Kendala yang dihadapi oleh Satgas Saber Pungli Provinsi Sumatera Barat adalah terkait kurang optimalnya kerjasama antar setiap unit, anggaran yang belum memadai serta kesadaran masyarakat terkait tindak pidana pungutan liar.

343.09
ROZ
p

PENERTIBAN PENGGUNAAN MERKURI DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS DI KABUPATEN SOLOK

Roza Wispa Bunda, 151111076, Fakultas Hukum, 2019, 93 halaman

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia negara yang diberi anugerah oleh Yang Maha Kuasa kaya Sumber Daya Alam, salah satunya pertambangan. Di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa pertambangan emas yang menggunakan merkuri yang eksistensinya diakui oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat. Persoalannya, seluruh pertambangan emas dimaksud tidak satupun yang memiliki izin. Persoalan lainnya penggunaan merkuri sebagai bahan berbahaya dan beracun tanpa izin tentu saja akan berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Padahal, dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menetapkan bahwa ”setiap orang berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu yang menjadipersoalan dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimana proses penggunaan merkuri dalam kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Solok? 2) bagaimana penertiban penggunaan merkuri dalam kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Solok? 3) Apa yang menjadi kendala yang dihadapi dalam penertiban penggunaan merkuri dalam kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Solok dan bagaimana cara mengatasinya? Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yang bersifat deskriptif, menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder, sumber data didapatkan oleh penulis dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan merkurinya ilegal dengan pertambangan emas yang juga ilegal.Penertiban penggunaan merkuri dalam kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Solok belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan adanya banyak hambatan seperti tidak adanya regulasi yang mengatur dampak penggunaan merkuri dalam pertambangan, kurangnya koordinasi Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat dengan Tim Terpadu, kurangnya personil untuk turun kelapangan, dan adanya kebocoran disaat akan melakukan razia.

Kata Kunci: Penertiban, Merkuri dan Emas.

348.04
ROZ
p

PELAKSANAAN KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BPOM DENGAN PENYIDIK POLRI DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PANGAN OLAHAN TANPA IZIN EDAR DI SUMATERA BARAT

Rozi Putra Sandi 1410112152, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), (88) halaman – Tahun 2019, Pembimbing : Dr.A.Irzal Rias, S.H., M.H, dan Riki Afrizal, S.H., M.H

ABSTRAK

Koordinasi fungsionala adalah koordinasi yang dilakukan oleh pejabat atau sesuatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang tugasnya berkaitan berdasarkan asas fungsionalitas khususnya yang dibahas di skripsi ini yaitu koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyidik Polri, latar belakang membuat skripsi ini yaitu untuk melihat koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Polri dalam kasus tindak pidana pangan olahan, rumusan masalah pada skripsi ini berupa 1.bagaimana pelaksanaan koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Polri dalam menangani kasus tindak pidana pangan olahan 2. Apa kendala dan upaya dalam Pelaksanaan Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Penyik Polri Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pangan Olahan Di Sumatera Barat. Metode penelitian yang dipakai berupa metode pendekatan, sifat penelitian bersifat deskriptif, jenis sumber data berupa data primer dan sekunder, alat pengumpul data berupa studi dokumen atau studi kepustakaan dan wawancara, pengolahan dan analisi data dengan cara editing dan analisa kualitatif. Tindak pidana pangan olahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Pangan olahan Tanpa Izin Edar adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh suatu pihak dengan cara melanggar peraturan-peraturan yang telah di buat seperti pangan olahan yang tidak tercantum izin pada kemasannya. Dalam kasus Tindak pidana Pangan Olahan Tanpa Izin Edar ini, maka perlu adanya pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu PPNS BPOM dan Penyidik kepolisian di wilayah Sumatera Barat. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini adalah 1. Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana pangan olahan tanpa izin edar oleh PPNS BPOM dengan koordinasi dengan Penyidik Polri di wilayah Sumatera Barat, 2. Kendala yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana pangan olahan tanpa izin edar di wilayah Sumatera Barat yaitu sulitnya mencari barang bukti, kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat, kurangnya jumlah PPNS BPOM, kurang optimalnya kerjasama PPNS BPOM dengan instansi terkait, minimnya sarana dan fasilitas yang mendukung proses penyidikan, kurangnya pengetahuan masyarakat akan pangan olahan. 3. Upaya penyidik mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pangan olahan tanpa izin edar di wilayah Sumatera Barat dengan MOU dengan kepolisian, serta saling berkoordinasi antara PPNS BPOM dengan Penyidik Polri.

345
RUN
P

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ROKOK TANPA PITA CUKAI OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TELUK BAYUR

Runy Utami Putri, 1510111033, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 73 Halaman, 2019

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, rokok merupakan hasil tembakau yang termasuk barang kena cukai (BKC), yang ditandai dengan pelekatan pita cukai.Masalah dalam penelitian ini adalah terjadinya tindak pidana cukai di Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai Pasal 1: Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan penyidikan tindak pidana rokok tanpa pita cukai oleh PPNS pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitik.Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Data diolah dengan menggunakan metode kualitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksaan penyidikan oleh PPNS Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur, telah dilakukan dengan profesional. Hal ini bisa dibuktikan dari berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan, semuanya dimenangkan oleh Dirjen Bea dan Cukai. Walaupun dalam penyidikan yang dilakukan menemui beberapa kendala, namun kendala itu dapat diatasi oleh PPNS Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur.

344.04
RUT
a

ADOPSI FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL OLEH JEPANG DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ATAS KESEHATAN BAGI PEROKOK PASIF

Ruth Joan Wishaprila, 1510111099, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Adanya implikasi negative dari konsumsi rokok terhadap kesehatan, maka regulasi pembatasan perilaku merokok sangat dibutuhkan. Bentuk kepedulian WHO yaitu diresmikannya FCTC sebagai payung hukum pengendalian tembakau dunia. Jepang sebagai Negara maju, dimana Pemerintah sebagai pemegang saham atas Industri tembakau global terbesar ketiga yakni JT meratifikasi FCTC pada tahun 2004 sebagai payung hukum pengendalian tembakau di Jepang. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Pertama, Bagaimana adopsi FCTC dalam aturan pengadilan tembakau di Jepang. Kedua, Apakah kebijakan pemerintah Jepang terkait pengadilan tembakau sejak meratifikasi FCTC sudah sesuai dengan hak atas perlindungan kesehatan bagi perokok pasif atau SHS jika dibandingkan dengan aturan didalam FCTC. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif yaitu Menggambarkan kebijakan pemerintah Jepang yang mengadopsi FCTC dikaitkan dengan hak atas kesehatan bagi perokok pasif . Typologi penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan kajian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Jepang mengambil kebijakan untuk meratifikasi FCTC dengan mengencerkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pasal-pasal FCTC untuk menjaga agar kepentingan industri tembakau mereka tidak terlalu terdampak karna pemberlakuan kebijakan kontrol tembakau. Status pemberlakuan pembatasan perilaku merokok di Jepang dan dalam menciptakan kawasan bebas asap rokok masih terbilang belum terpenuhi dari banyaknya upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam merealisasikan kebijakan yang seharusnya diselaraskan dengan pasal 8 FCTC dalam melindungi hak atas kesehatan bagi perokok pasif.

346.01
RAH
p

PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO: 78/PDT.G/2017/PA.PP)

Rahimah Yasir, NIM. 1520123005, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2019, 100 Halaman

ABSTRAK

Anak merupakan titipan Allah SWT yang sangat luar biasa untuk orang tua, oleh karena itu orang tua mempunyai hak penuh untuk mendidik, mengasuh, menjaga serta memenuhi kebutuhannya sejak kecil sampai dia beranjak dewasa. Anak yang belum dewasa diwajibkan berada dalam kekuasaan orang tua, namun ada waktunya kekuasaan orang tua itu dicabut oleh pengadilan agama karena kelalaian atau kealpaan orang tua dalam mengurus anak tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal; ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan sangat buruk sekali, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam tesis ini adalah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (studi kasus Putusan No. 78/Pdt.G/2017/PA.PP), bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak (studi kasus Putusan No.78/Pdt.G/2017/PA.PP). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, yaitu meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode pengumpulan dilakukan dengan field research (wawancara) dan library research (penelitian kepustakaan). Berdasarkan hasil penelitian penulis, faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya pencabutan kekuasaan orang tua diantaranya adalah problematika ini telah terjadi pada anak-anak dibawah umur belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum melangsungkan perkawinan, orang tua yang digugat adalah orang tua yang sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anakdan berkelakuan buruk sekali, penggugat yang telah mengajukan diri sebagai wali telah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yaitu telah terpenuhi unsur-unsur pelanggaran yang terdapat pada Pasal 47 dan Pasal 49 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata Kunci : Pencabutan, Kuasa, Hak, Anak

345
RID
d

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN BERAT RINGANNYA PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG KERTAS RUPIAH DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1 A PADANG

Ridho Kurniawan, Nomor Bp.1410111148, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah Halaman 67,Tahun 2019

ABSTRAK

Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia uang memankan perannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah didalam suatu negara, maupun sebagai simbol pemersatu suatu bangsa. Uang sebagai barang yang bernilai tentunya banyak orang yang ingin memilikinya dengan cara masing-masing baik dengan yang benar maupun menyimpang. Pemalsuan uang merupakan suatu cara yang menyimpang, apabila cara menyimpang tersebut diadili, maka haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam memutus perkara pemalsuan uang, hakim mempertimbangkan beberapa hal. Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana pembuktian dalam tindak pidana pemalsuan uang kertas rupiah. 2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan pidana pejara terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang kertas rupiah di Pengadilan Negeri klas 1 A Padang. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan praktek yang terjadi dilapangan. Data yang digunakan dalam penulisan ini merupakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini memperlihatkan 1) Pada proses pembuktian hakim minimal harus mendapatkan 2 alat bukti, dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan kesalahannya, alat bukti ang didapat berupa uang palsu pecahan Rp 100.000 sebanak 6 buah dan pengakuan erdakwa pada saat dilakukan penggeledahan. 2) Dalam memutus perkara pemalsuan uang, hakim berpedoman kepada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan untuk memutus berat ringannya suatu putusan pidana, hakim dalam memutus mempertimbangkan baik dari segi yuridis maupun non yuridis, serta menurut keyakinan hati nurani hakim tersebut, apakah bersalah atau tidak. Hal yang menuru Hakim yang memberatkan terdakwa, karna perbuatan terdakwa berentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberanas peredaran uang palsu, dan yang meringankan hukuman terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya.

Kata kunci:Dasar, pemalsuan uang, pertimbangan hakim

343.09
RIO
p

PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BPOM DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENYERAHAN PSIKOTROPIKA DI LINGKUNGAN PUSKESMAS DI SUMATERA BARAT." (Studi Kasus Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang)

Rio Mardion, 1620112037, Magister Ilmu Hukum, Tahun 2016, Jumlah Halaman 142, Bimbingan Prof. Dr. Ismansyah, SH. MH dan Dr. Siska Elvandari, SH. MH

ABSTRAK

Kesehatan sebagai isu HAM dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Di sektor kesehatan adanya puskesmas dalam pelayanan kefarmasian menjamin Ketersediaan Psikotropika sesuai kebutuhan yang nyata dan digunakan sesuai dengan peruntukannya. Psikotropika berkhasiat sebagai obat, dalam perkembangan disalahgunakan karena peredaran secara illegal dan menjadi nomenklatur baru dalam kejahatan yang diatur Undang-undang No 5 tahun 1997. Penegakan hukum dalam kejahatan dalam Sistem peradilan pidana Indonesia terdapat 4 (empat) lembaga yang bersinergi yaitu Kepolisian (Penyidik), Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakat. pasal 56 UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. BPOM RI mengawasi obat dan makanan Pengawasan Selama Beredar dan Sebelum Beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan memenuhi standar. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan termasuk Balai Besar/Balai POM.Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yang dilakukan secara yuridis sosiologis, artinya penelitian terhadap permasalahan hukum yang dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial lainnyaDalam Puskesmas sebagai sarana pelayanan kefarmasian dapat menyalurkan Psikotropika dan Peran PPNS BPOM RI dalam melakukan pengawasan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sesuai aturan dalam pendistribusian dan penyerahan obat. fungsi dan peran BPOM RI dalam kekhususannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya Dalam pengawasan yang menujukan adanya dugaan adanya pelanggaran pidana dibidang obat termasuk Psikotopika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: - Peran, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, BPOM, Pengawasan, Penyalahgunaan, Penyerahan, Psikotropika, Puskesmas

346.05
SAI
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS PEREMPUAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK KARO

Saima Yati Br Lubis, 1510111114, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK 1 (Perdata Murni), 98 halaman, 2019

ABSTRAK

Adat merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dalam kurun waktu yang relatif lama sehingga menjadikannya sebagai suatu hukum tidak tertulis oleh suatu masyarakat adat. Indonesia memiliki sejumlah hukum adat yang penerapannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya dipengaruhi oleh faktor sistem kekerabatan. Satu diantara sistem kekerabatan yang dikenal di Indonesia adalah sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan laki-laki (ayah), salah satu suku yang menganut sistem kekerabatan ini adalah suku Batak Karo. Adapun akibat dari penerapan sistem kekerabatan ini dapat dilihat dalam hal pembagian harta waris, yang mana hukum adat Batak Karo hanya memberikan harta waris kepada anak laki-laki, sementara perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris. Dalam penulisan Skripsi ini penulis merumuskan 3 (tiga) permasalahan yaitu bagaimana perkembanagan hukum waris Batak Karo, apa alasan perempuan tidak mendapat harta waris dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris perempuan dalam hukum adat Batak Karo. Metode yang digunkan adalah metode yuridis sosiologis. Taknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan studi pustaka. Dari penelitian yang penulis lakukan di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo Provinsi Sumatra Utara diketahui bahwa perkembangan hukum waris Batak Karo dapat dilihat dari aspek agama dan hukum. Dari segi agama diketahui bahwa pelaksanaan pembagian harta waris tidak dilakukan berdasarkan hukum agama dan hanya dilaksanakan dengan hukum adat, perbedaan agama dalam satu keluarga bukanlah penghalang ahli waris memperoleh warisan. Dari segi hukum dapat dilihat dari Putusan MA No 179/K/SIP/1961 telah menetapkan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris memiliki kedudukan yang sama dan seimbang. Alasan-alasan yang mengakibatkan perempuan tidak medapat harta waris adalah karena perempuan tidak dapat meneruskan marga dan karena perkawinan unjuken yang mengakibatkan terputusnya hubungan perempuan dengan keluarganya. Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang ditawarkan oleh hukum adat Batak Karo yaitu bagi janda yang bercerai karena kematian dengan cara menikah kembali dengan laki-laki saudara suaminya atau menikah dengan laki-laki yang semarga dengan suaminya. Bagi anak perempuan yaitu dengan cara pemberian hibah, wasiat dan fasilitas pendidikan

344.03
SAR
p

PENEYDIAAN AKSESIBILITAS BERBENTUK FISIK DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI WILAYAH KOTA BUKITTINGGI

Sari WuLAN, 1510112158, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 76 halaman, 2019

ABSTRAK

Penyandang disabilitas merupakan masalah yang sangat kompleks. Adanya kecacatan tertentu saja dapat menimbulkan masalah mobilitas karena adanya keterbatasan pada fungsi organ tubuh yang tidak sempurna. Maka, untuk itu negara perlu memenuhi hak penyandang disabilitas demi mewujudkan kesempatan yang sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Salah satu hak yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tersebut adalah hak Aksesibilitas. Namun masih banyak terdapat sarana dan prasarana atau aksesibilitas yang belum memadai untuk penyandang disabilitas khususnya bangunan dan gedung serta jalan yang merupakan haknya di Wilayah Kota Bukittinggi. Ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu: 1.Bagaimanakah penyediaan aksesibilitas fisik berupa jalan dan gedung dalam rangka pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Wilayah Kota Bukittinggi? 2.Apakah kendala dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?.Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Data didapatkan dengan Wawancara dengan Kasi Pembinaan Jasa Konstruksi dan Penataan Bangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Kasi Perencanaan dan Pengawasan Jalan, Jembatan dan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Bukittinggi, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Bukittinggi dan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Bukittinggi. Dari Hasil Penelitian diketahui bahwa 1). Penyediaan Aksesibilitas fisik belum sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006, bangunan gedung yang ramah kaum Penyandang Disabilitas sudah dibangun seperti Hotel Rocky, Bunda, Pusako meskipun sangat minim yaitu hanya berupa Ram, Lift dan Toilet,dan jalan terutama trotoar dalam hal pemasangan guiding block dan warning block pada trotoar terkesan hanya untuk memperindah jalan, 2). Kendala dalam pemenuhan Aksesibilitas fisik khususnya bangunan gedung dan jalan diantaranya baru adanya undang-undang yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas, kurangnya pemahaman terkait perencanaan pembangunan dan mahalnya cost (biaya). Penyediaan Aksesibilitas fisik belum sesuai dengan standarisasi aksesibilitas, hal ini dikarenakan kendala, diantaranya baru adanya undang-undang yang mengatur tentang penyandang disabilitas yang dalam Pasal 97 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah untuk penyandang disabilitas,kurangnya pemahaman terkait perencanaan pembangunan dan mahalnya cost (biaya).

346.04
SEN
p

PELAKSANAAN PENINGKATAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK (Perumahan Dosen dan Karyawan Universitas Andalas Kel. Limau manis Selatan)

Senia Triwina.1310111071.Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK I (Hukum Perdata). 74 Halaman.Tahun 2019.

ABSTRAK

Rumah beserta tanah merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia memerlukan kepastian hukum sehingga harus dilakukan pendaftaran tanah untuk memperoleh jaminan atas tanah, sedang status tanah yang didaftarkan selain Hak Milik, terdapat hak lain yang lebih rendah seperti HGB, HP, HGU. Dalam pelaksanaan peningkatan HGB menjadi Hak Milik di Perumahan dosen dan karyawan Universitas Andalas Kel. Limau Manis Selatan terdapat hambatan seperti kurangnya pemahaman dalam memenuhi pesyaratan peningkatan HGB menjadi hak Milik, Proses peningkatan HGB menjadi Hak Milik yang lama, dan Biaya peningkatan HGB menjadi Hak Milik sehingga mengakibatkan kurangnya minat untuk meningkatkan tanah yang masih berstatus HGB menjadi Hak Milik. Penelitian ini dilakukan terhadap Pelaksanaan Peningkatan HGB menjadi Hak Milik di Perumahan Dosen dan Karyawan Universitas Andalas Kel. Limau Manis Selatan. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ini adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Peningkatan HGB menjadi Hak Milik di Perumahan Dosen dan Karyawan Universitas Andalas Kel. Limau Manis Selatan, 2) Hambatan-Hambatan dalam peningkatan HGB menjadi hak milik di perumahan dosen dan karyawan Unand Kel. Limau Manis Selatan, 3) Apakah akibat hukum dari peningkatan HBG menjadi hak milik di perumahan dosen dan karyawan Unand. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode wawancara dan metode observasi. Tujuan pelaksanaan perubahan hak atas tanah tersebut adalah untuk memperoleh keyakinan dan kepastian hukum yang pada akhirnya terwujud suatu ketenangan dan kemungkinan kecil terjadi sengketa.

345
SHI
p

PELAKSANAAN MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DI POLSEK LUBUK BEGALUNG KOTA PADANG

Shilvi Mardiah Ulfa, 1410112103, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV Hukum Pidana, 78 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat dan dialami oleh masyarakat adalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan.Penyelesaian pada konflik yang terjadi dalam masyarakat dilakukan dengan jalur "penal" dan "nonpenal".Mekanisme mediasi penal merupakan bagian dari alternative dispute resolution (ADR) yang mana bertujuan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan. Adapun dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan masalah yaitu Pertama, bagaimana pelaksanaan mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan berat di Polsek Lubuk Begalung. Kedua, apa yang menjadi pertimbangan Polsek Lubuk Begalung dalam melaksanakanmediasi penal terhadap kasus penganiayaan berat. Ketiga, apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian Polsek Lubuk Begalung dalam menangani kasus penganiayaan berat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis.Penelitian ini dilakukan dengan terjun lapangan untuk memperoleh data primer dan sekunder berupa hasil wawancara dengan responden, berupa buku dan dokumen terkait skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pelaksanaan mediasi penal dapat dilakukan pada tahap penyidikan melalui tindakan diskresi kepolisian yang tercantum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, dan Surat Peraturan Kepala Nomor: B/3022/ XII/ 2009/ Sdeops tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) terkait dengan sistem penyidikan tindak pidana polri. Hasil yang didapat dari mediasi penal yaitu berupa surat perjanjian perdamaian. Pertimbangan Polsek Lubuk Begalung melakukan upaya mediasi penal pada kasus penganiayaan berat yaitu korban dan tersangka cenderung memiliki hubungan keluarga, hubungan pertemanan dan saling bertetangga. Dan juga penyelesaian konflik melalui mediasi dapat menjalin hubungan baik antara para pihak baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

347.01
SIL
p

PENERAPAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 DALAM PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA PADA PENGADILAN NEGERI DI SUMATERA BARAT

Silvia Rosa, 1510111028, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK 1 (Perdata Murni), 83 halaman, 2019

ABSTRAK

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai dengan asas peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan serta tujuannya untuk mengurangi volume perkara pada Mahkamah Agung karena begitu banyaknya kasus perjanjian kredit antara bank dengan nasabah,yang mana dalam perjanjian kredit tersebut nasabah tidak melaksanakan kewajibannya yang disebut ingkar janji atau wanprestasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri di Sumatera Barat.Selanjutnya untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri di Sumatera Barat.Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara sedangkan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.Hasil penelitian penulis menunjukan bahwa Pengadilan Negeri di Sumatera Barat yaitu Pengadilan Negeri Padang sudah menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 sedangkan Pengadilan Negeri Painan dan Pengadilan Negeri Solok belum menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian gugatan sederhana.Hal ini dapat dilihat bahwa Hakim Pengadilan Negeri Painan adanya ketidaksesuaian dengan Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 sedangkan Hakim Pengadilan Negeri Solok adanya ketidaksesuain dengan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 dalam penyelesaian gugatan sederhana.

344.09
SIT
p

PENERAPAN SANKSI TERHADAP KEWAJIBAN SHALAT ZUHUR DAN ASHAR BERJAMAAH DI MASJID AGUNG PASIR PANGARAIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN ROKAN HULU

Siti Aisyah, 1510112129, Fakultas Hukum, 2018, 89 halaman

ABSTRAK

Bupati Rokan Hulu mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kewajiban Bagi Pegawai Muslim Untuk Shalat Zuhur dan Ashar di Masjid Agung Pasir Pangaraian (selanjutnya disebut Perbup No.18 Tahun 2011) untuk mengatur ASN yang berada pada Kabupaten Rokan Hulu. Perbup tersebut mewajibkan seluruh Pegawai ASN yang beragama Islam di lingkungan pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu untuk Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pangaraian. Berdasarkan Perbup yang dimaksud setiap Pegawai ASN yang melanggar kewajiban yang telah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi berupa pemotongan uang tambahan penghasilan. Namun faktanya, ditemukan adanya sanksi pemberhentian bagi Pegawai ASN. Berdasarkan persoalan yang dimaksud maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pangaraian bagi ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu 2) Bagaimanakah penerapan sanksi bagi Pegawai ASN yang tidak mengikuti kewajiban Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah di Masjid Agung Pasir Pangaraian. Penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil: 1) Pelaksanaan Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah diawali dengan pengambilan absen melalui fingerprint menjelang waktu shalat masuk. Rekap absen yang telah diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hulu, dikembalikan kepada Dinas masing-masing untuk mengetahui kehadiran Pegawai ASN dalam melaksanakan kewajibannya. Pelaksanaan Perbup No.18 Tahun 2011 pada masa Bupati Suparman tidak sebaik masa Bupati Achmad. Hal ini dapat dilihat dari persentase kehadiran dari 99% menjadi 50%. Menurunnya kehadiran Pegawai ASN dalam pelaksanaan kewajiban pada masa Bupati Suparman disebabkan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan Perbup No.18 Tahun 2011 semenjak terjadinya pergantian Bupati. 2) Penerapan sanksi bagi Pegawai ASN yang tidak mengikuti Shalat Zuhur dan Ashar berjamaah sampai dengan 3 kali dalam sebulan tanpa keterangan dikenakan sanksi pemotongan uang tambahan penghasilan oleh juru bayar satuan kerja sesuai dengan Dinas yang bersangkutan. Terdapat perbedaan dalam penerapan sanksi pada masa Bupati Achmad dengan masa Bupati Suparman, dikarenakan perubahan pola kepemimpinan.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Kewajiban Shalat Zuhur dan Ashar Berjamaah, Pegawai ASN.

347.01
SIT
l

LEGAL STANDING LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) DALAM BERACARA DI PENGADILAN NEGERI UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PADANG

Siti Hauri, 1210112007, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 halaman

ABSTRAK

Seiring perkembangan kebutuhan dan meningkatnya konsumeritas masyarakat pada saat ini, bermunculanlah produk-produk dalam berbagai bentuk di berbagai bidang yang beredar dalam pasaran, maka eningkat pula kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi yang dapat merugikan baik konsumen maupun produsen itu sendiri. Dari sanalah muncul Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang diberitugas oleh undang-undang untuk melindungi kepentingan konsumen. LPKSM juga diberi hak gugat (legal standing) agar dapat lebih lancar menjalankan perannya dalam melindungi konsumen. “Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Beracara di Pengadilan Negeri Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen di Kota Padang” memiliki rumusan masalah diantaranya bagaimana legal standing LPKSM dalam beracara di pengadilan negeri dan apa saja kendala LPKSM dalam menjalankan hak legal standingnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenailegal standing LPKSM dalam beracara di pengadilan negeri, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi LPKSM dalam menjalankannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris yakni penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer, di mana data primer diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, yaitu melalui wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun LPKSM aktif dalam berperan untuk melindungi hak konsumen, namun mereka belum pernah menggunakan hak gugat seperti yang diatur dalam Pasal 46 UUPK, dimana keterbatasan sumber daya manusia dan biaya yang menjadi penghambatnya.

Kata Kunci : Lpksm, Konsumen

344.09
SIV
p

PELAKSANAAN PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KECAMATAN SIPORA UTARA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Siva Syavana Irwanto, 1510112058, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK III (Hukum Perdata Adat dan Islam), 67 Halaman, 2019

ABSTRAK

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut hukum adat, perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena perkawinan akan dibawa sampai "kaken-kaken ninen-ninen" atau kakek-kakek nenek-nenek. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai dan bagaimana perbandingan pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang bagaimana pelaksanaan adat perkawinan di Mentawai dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan adat perkawinan di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek di lapangan dan dikaitkan pada aspek hukum yang berlaku tentang pelaksanaan perkawinan di Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum adat kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai ada lima tahap yaitu 1)Menemukan Pasangan 2)Persiapan 3)Tunangan 4) Masa Tunggu 5)Pesta Adat. Sistem perkawinan yang digunakan adalah eksogami, yaitu dalam melakukan perkawinan orang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya. Pelaksanaan perkawinan menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai masih belum efektif, karena masih terdapat pasal yang belum terlaksana sepenuhnya yaitu pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Dari data tiga tahun terakhir yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017 lebih banyak pasangan yang belum mempunyai akta perkawinan dibandingkan dengan pasangan yang telah mempunyai akta perkawinan. Ini disebabkan karena berbagai faktor yaitu: 1) terkendala dalam pengurusan berkas, 2) married by accident, 3) tidak mempunyai akta cerai, 4) aparat yang belum sidang dan 5) jarak tempuh yang jauh, sehingga perlu dilakukan penyuluhan terkait pentingnya pencatatan perkawinan terhadap masyarakat di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

341
SOF
a

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN THE ASEAN TRANSBOUNDRY HAZE POLLUTION DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM TERKAIT KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA

Sofia Aljanah 1510111009, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 72 Halaman, Pembimbing : Dr. Ferdi, S.H., M.H. Dan Dr. Delfi Yanti, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan timbulnya kabut asap lintas batas negara sesuai dengan perjanjian internasional Agreement ASEAN Transboundry Haze Pollution yang diratifikasi oleh negara Indonesia menjadi Undang-Undang No 26 Tahun 2014 tentang. Pengesahan ASEAN Agreement On Transboundary Haze Pollution. Masalah kabut asap akibat dari kebakaran hutan di Indonesia inilah menyababkan timbulnya berbagai masalah yan menyebabkan negara-negara tetangga merasakan imbas dari kebakaran hutan tersebut. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana analisis yuridis terhadap perjanjian The ASEAN Transboundry Haze Pollution dalam rangka penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan bagaimana implementasi The ASEAN Transboundry Haze Pollution terkait kebakaran hutan di Indonesia. Penulisan ini menggunakan teknik penulisan yurudis normative dimana pendekatan penelitian akan menggunakan kajian kepustakaan atau library research. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa, pertama The ASEAN Agreement Transboundry on Haze Pollution sudah di ratifikasi oleh Indonesia Indonesia meratifikasi The ASEAN Agreement Transboundry on Haze Pollution sebagai tujuan untuk mencegah terjadinya bencana kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan/lahan. Pencegahan ini dimulai dari kerja sama atau melakukan upaya upaya bersama dengan Negara-negara anggota ASEAN baik regional maupun Internasional. Kerja sama antar Negara di ASEAN dalam menangani dan mengurangi polusi lintas batas Negara akibat dari kebakaran hutan upaya yang dilakukan dengan mendirikan National Focal Points, memperbesar peran the ASEAN Specialized Meteorogical Center (ASMC), menetapkan prosedur pelaporan kebakaran, menetapkan indeks kualitas udara bersama (common air quality index) dan mengharmoniskan teknik sampel kualitas udara, mengembangkan system derajat bahaya regional, berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencegah dan memitigasi kebakaran hutan. Kedua implementasi The ASEAN Agreement Transboundry on Haze Pollution ini merupakan upaya dalam tindakan penegakan hukum untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan sarana penegakan hukum administrasi, kepidanaan, dan keperdataan sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pasal 3 dan 15 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 pasal 25 ayat (2).

Kata Kunci : Analisis Yuridis; Perjanjian The ASEAN Transboundry Haze Pollution; Penegakan Hukum; Kebakaran Hutan dan Indonesia.

344.09
SOL
e

EKSISTENSI PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SAKO DAN PUSAKO DI KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG

Solihandracem, 1510111153, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK III Perdata Adat dan Islam, 64 Halaman, 2019

ABSTRAK

Peradilan adat merupakan sebuah lembaga adat yang memiliki fungsi untuk penyelesaian sengketa sako dan pusako. Setiap permasalahan adat diselesaiakan secara adat terkhususnya di Kecamatan Kuranji . Peradailan adat diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat no 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Untuk melihat eksistensi peradilan adat di Kuranji maka perlu dilihat keberadaan peradilan adat dalam penyelesain sengketa sako dan pusako di Kuranji. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu Bagaimana ruang lingkup sengketa sako dan pusako di Kuranji, Bagaimana proses penyelesaian sengketa sako dan pusako di kuranji dan bagaimana eksistensi peradilan adat dalam penyelesaian sengketa sako dan pusako di kuranji. Dalam penelitian penulis menggunakan pendekan empiris, penelitian bersifat deskriptif data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwasanya ruang lingkup sengketa sako dan pusako di Kuranji didominasi secara mutlak oleh sengketa pusako. Proses penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Kuranji dimulai dengan memasukan permohoan, tiga kali persidangan untuk pemohon, tiga kali persidangan untuk termohon, pemeriksaan alat bukti,jika diperlukan perangkat Kerapatan Adat Nagari yang didalamya ada majelis peradilan adat memantau lokasi sengketa, dan terakhir putusan dikeluakan oleh peradilan adat. Eksistensi peradilan adat dalam penyelesaaian sengketa pusako sebagai peradilan pendahuluan, sebelum perkara tersebut masuk ke pengadilam tinggi.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran agar mesosialisasikan kepada masyarakat, sehingga penyelesaian sengketa melalui peradilan menjadi lebih baik. Dan untuk pemerintah semoga membuat aturan lebih terperinci sehingga adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa adat.

Kata Kunci : Peradilan Adat, Sako dan Pusako

342
STE
p

PELAKSANAAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA NO. 30/Pdt.G/2015/PN.Pdg

Stefani, 1310111185, Fakultas Hukum 2019, 60 Halaman

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Indonesia telah menyatakan bahwa Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Padang sudah melaksanakan peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk perkara perdata ini, Kejaksaan Negeri Padang sebagai penggugat belum bisa mengupayakan pengembalian uang pengganti kepada Negara. Dalam penulisan ini, penulis mencoba menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam proses penyelesain perkara perdata no. 30/Pdt.G/2015/PN.Pdg. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan kewenangan Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara perdata No.30/Pdt.G/2015/PN.Pdg pada sidang di Pengadilan Negeri Padang 2). Apakah hambatan yang ditemui Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara perdata No.30/Pdt.G/2015/PN.Pdg pada sidang di Pengadilan Negeri Padang 3). Bagaimanakah solusi terhadap hambatan yang ditemui Jaksa dalam menangani perkara perdata No.30/Pdt.G/2015.PN.Pdg pada sidang di Pengadilan Negeri Padang. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hal-hal yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa Jaksa Pengacara Negara sudah menjalankan kewenangannya di bidang perdata, namun pelaksanaannya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan yang ditemui Jaksa dalam melaksanakan tugas, seperti: Belum ada pengaturan mengenai penggantian hukuman uang pengganti ke pidana penjara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Koordinasi antara penegak hukum tidak berjalan dengan baik, Identitas tergugat tidak dapat ditemukan, Putusan verstek yang diberikan oleh majelis hakim, Upaya pengembalian uang Negara belum bisa diupayakan. Di samping adanya hambatan yang ditemui Jaksa sebagai Penggugat dalam kasus ini, Jaksa Pengacara Negara juga memberikan solusi-solusi terhadap hambatan- hambatan yang ada. Diantaranya: Melakukan koordinasi yang baik antara penegak hukum lainnya, Melacak keberadaan Tergugat sampai ditemukan, Bertindak tegas dalam hal eksekusi sita jaminan, Bertindak cepat dalam penanganan perkara perdata selanjutnya.

Kata Kunci : Pelaksanaan Kewenangan, Jaksa Pengacara Negara dan Perkara Perdata.

346.08
STE
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI AXA LIFE AKIBAT PENCABUTAN IZIN USAHA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Stefani Yulma, 1510111030, Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 66 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Pencabutan izin usaha asuransi jiwa PT. AXA Life Indonesia merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu perusahaan perasuransian yang dicabut izinnya oleh OJK adalah PT. AXA Life Indonesia, dikarenakan perusahaan tersebut melakukan penggabungan (merger) dengan PT. AXA Financial Indonesia. National Mutual International Pty. Ltd. sebagai pemegang saham pengendali PT. AXA Life Indonesia dan PT. AXA Financial Indonesia wajib memenuhi prinsip Kepemilikan Tunggal (Single Presence Policy) sebagaimana diatur pada Pasal 16 Ayat (1) juncto Pasal 85 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan pencabutan izin usaha asuransi jiwa PT.AXA Life Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimanakah status pemegang polis asuransi jiwa PT.AXA Life Indonesia setelah pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan. Untuk menganalisis hal tersebut dilakukan penelitian yuridis empiris yang besifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data ialah studi dokumen, wawancara dan studi kepustakaan. Diperoleh hasil penelitian dalam hal pelaksanaan pencabutan izin usaha PT. AXA Life Indonesia, OJK mengeluarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-2/D.05/2018 tentang Pencabutan Izin Usaha Asuransi Jiwa PT. AXA Life Indonesia. PT. AXA Financial Indonesia sebagai perusahaan penerima pengalihan pertanggungan portofolio bertanggung jawab atas kewajiban memberikan hak - hak pemegang polis asuransi jiwa PT. AXA Life Indonesia.

Kata Kunci : Pencabutan izin, OJK, Asuransi

348.04
ANI
p

PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNNP) PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PENYIDIK DIREKTORAT RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Anishya Yulia Anggraini, 1510111093, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV Hukum Pidana, 53 halaman Tahun 2019

ABSTRAK

Tindak pidana narkotika yang telah bersifat transnasional yang dilakukan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan masyarakat, bangsa dan Negara. Pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diberi kewenangan khusus untuk memberantas dan mencegah tindak pidana narkotika.Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika maka BNN berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimanakah pelaksanaan koordinasi antara penyidik Badan Narkotika Nasional (BNNP) Provinsi Sumatera Barat dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penydikan tindak pidana narkotika? 2. Apakah kendala dalam melakukan koordinasi penyidik Badan Narkotika Nasional (BNNP) Provinsi Sumatera Barat dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan koordinasi yang terjadi antara penyidik BNNP Sumbar dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar yaitu berupa pengajuan assessment untuk rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika,yang diajukan oleh penyidik Polda Sumbar, dan saling memberitahu secara tertulis bahwa telah dimulainy apenyidikan. Dalam hal melakukan pencegahan narkotika BNNP Sumbar dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar berkoordinasi dilapangan untuk melakukan razia di tempat-tempat tertentu seperti, di tempat karaoke dan tempat-tempat hiburan malam. Adapun kendala dalam melakukan koordinasi antara BNNP Sumbar dengan penyidik Direktorat Reseres Narkoba Polda Sumbar yaitu dalam meminta personil penyidik ke Polda Sumbar, karena harus berdasarkan persetujuan pimpinan Polda Sumbar sehingga personil penyidik yang diminta terkadang mengalami proses yang sulit, karena banyaknya personil penyidik yang sedang bertugas, sehingga dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana narkotika BNNP Sumbar kurang maksimal.

346.01
SUC
p

PELAKSANAAN KEWENANGAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DI KOTA PADANG

Suci Wulandari, 1510111172, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 74 Halaman, 2019

ABSTRAK

Program Keluarga Berencana merupakan suatu upaya terencana daalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas yang juga bagian dari pembangunan Nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas keluarga, meningkatkan keserasian, keselarasan, keseimbangan, serta tercapainya kesehatan reproduksi. menurut Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwa kebijakan dan program ditetapkan pemerintah daerah bersama dengan DPRD. Pelaksaan Program Keluarga Berencana (KB) dibawah kewenangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Namun, setelah era otonomi daerah (desentralisasi) diserahkan urusan KB ke pemerintah kabupaten/kota. Di Kota Padang perwakilan kabupaten/kota adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam urusan pemerintahan yang konkuren yang menjadi dasar pemerintah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan yang berkaitan dengan Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dengan terjadinya perubahan struktur organisasi yang dahulunya merupakan kewenangan BKKBN menjadi kebijakan kabupaten/kota masing-masing daerah. Dimana satu daerah kabupaten/kota berbeda-beda antar satu sama lainnya. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimana pelaksanaan kewenangan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Kota Padang? 2)Bagaimana implikasi hukum atas kewenangan Program Keluaraga di Dinas pemberdayaan perempuan,perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di Kota Padang? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis- sosiologis, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yakni : 1) Penyebab ketidak berhasilan kewenangan dalam program KB ini adalah karena sistem yang dibuat dalam rangka kegiatan dan juga perencanaanya yang tidak sesuai dengan yang di inginkan sebagaimana mestinya, kurangnya koordinasi antar lembaga pusat dan daerah serta dana dan sumber daya manusia yang minim menyebabkan program tidak dapat dicapai seperti apa yang diamanatkan dalam Undang- Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembagunan Keluarga.

Kata kunci : Kewenangan , KB , Otonomi daerah, desentralisasi

344.03
SUC
p

PELAKSANAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (Justice Collaborator) DAN PELAPOR (Whistleblower) DALAM TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA (Studi Pengadilan Negeri Padang)

Suci Nilam Sari, 1510111171, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019

ABSTRAK

Peredaran narkotika yang dilakukan oleh seseorang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tindak pidana narkotika terus meningkat setiap tahunnya, yang dimana, salah satu langkah efektif yang dapat digunakan untuk menembus kedalam jaringan kejahatan terorganisir adalah dengan menggunakan bantuan dari pelaku yang merupakan orang dalam dan terlibat secara langsung dalam kejahatan yang dilakukannya bersama-sama dengan pelaku lainnya. Oleh karena itu diperlukannya peran dari tersangka dan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan adanya suatu perbuatan tindak pidana, serta mencegah peredaran narkotika yang tak terkendali. Penelitian ini mendeskripsikan tentang bentuk perlindungan terhadap saksi pelaku (justice collaborator) dan pelapor (whistleblower), serta kendala dalam pemberian perlindungan tersebut studi di Pengadilan Negeri Padang. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan kuantitatif, yaitu uraian yang penulis lakukan terhadap data yang terkumpul dan tidak menggunakan angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian ini diketahui, 1. Bahwa bentuk perlindungan terhadap saksi pelaku (justice collaborator) dan pelapor (whistleblower) dilakukan dengan bertumpu kepada Undang-Undang, namun tidak terlaksana dalam pemberian perlindungan 2. Kendala dalam pemberian perlindungan terhadap saksi pelaku (justice collaborator) dan pelapor (whistleblower) terjadi karena kurangnya fasilitas yang ada di Pengadilan Negeri Padang, dan banyak pelaku yang tidak mau bekerja sama dalam mengungkapkan pihak lainnya yang terlibat dalam peredaran narkotika. Seharusnya Pengadilan Negeri Padang lebih efisien dan tegas dalam pemberian perlindungan sesuai dengan yang dijelaskan didalam Undang-Undang, sehingga dapat mengungkapkan tindak pidana lebih efektif.

342
SUP
k

KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DALAM MENJAGA SERTA MENEGAKKAN KEHORMATAN DAN KELUHURAN MARTABAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Supartinah, 1510112009, Hukum Tata Negara (PK V), Fakultas Hukum Universitas Andalas, vii + 77 halaman, 2019.

ABSTRAK

Dalam demokrasi modern, demokrasi yang dijalankan adalah melalui perwakilan, dimana rakyatlah yang memilih wakil-wakilnya menurut dasar demokrasi keputusan tertinggi dalam pemerintahan negara terletak di tangan rakyat melalui badan perwakilan. Wakil politik yang menjalankan fungsi sebagai badan perwakilan rakyat lembaga legislatif atau lembaga pembuat undang-undang yakni Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai beberapa alat kelengkapan, salah satunya adalah Mahkamah Kehormatan Dewan yang tugas dan wewenangnya menjaga dan mengawasi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan kewajibannya sehari-hari, berdasarkan kode etik atau peraturan internal yang sudah disepakati bersama. Adapun masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu bagaimana kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat Dewan Perwakilan Rakyat dan bagaimana implikasi Pasal 122 butir l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah produk perundang-undangan dan asas-asas hukum serta memperhatikan praktek hukum dari waktu ke waktu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran kode etik dapat memperlihatkan bagaimana peran Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai alat kelengkapan dewan yang berfungsi dan menindak adanya pelanggaran etik, terkait jumlah pelanggaran yang terjadi dalam setiap periode. Perubahan nama Badan Kehormatan menjadi Mahkamah Kehormatan Dewan belum dapat direalisasi secara optimal dalam memberi pengaruh terhadap penegakan kode etik DPR dan berlakunya Pasal 122 butir l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berpotensi merugikan hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran baik itu melalui lisan dan tulisan, hak pemajuan diri untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, hak untuk mendapatkan kebebasan berpendapat, hak untuk berkomunikasi, dan kemerdekaan pikiran.

345
SUR
p

PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B MUARO SIJUNJUNG

Surya Try Dharma Dahlan, 1210113090, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana), 63 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu wadah atau tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi para Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana juga menyangkut Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar dan pokok yang di bawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut juga berlaku bagi narapidana berhak untuk mendapatkan remisi, termasuk Narapidana kasus Narkotika. Penelitian yang dilakukan adalah Pelaksanaan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah : Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana pelaku tindak pidana narkotika di lembaga pemasyarakatan klas II B Muaro sijunjung, Apakah kendala dalam pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana pelaku tindak pidana narkotika di lembaga pemasyarakatan klas II B muaro sijunjung. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Adapun jenis data yang digunakan Primer, sekunder dan tersier dengan pendekatan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga pemasyarakatan klas II B muaro sijunjung berbeda dengan pemberian remisi narapidana kasus lainnya, dilihat dari hanya beberapa narapidana Narkotika yang mendapat remisi. Sedangkan kendala dalam pemberian remisi kasus narapidana Narkotika ini adalah sulitnya narapidana untuk berprilaku baik, mendapatkan surat keterangan sebagai justice collaborator dari aparat penegak hukum seperti kejaksaan, adanya keterlambatan eksekusi dari kejaksaan negri, adanya keterlambatan dalm hal pengajuan remisi.

345.08
SYA
p

DISPARITAS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 20/Pid-Sus-Anak/2016 dan 42/Pid-Sus-Anak/2016)

SYALDI ELGA, 1210113069, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 78 Halaman, 2019

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dengan demikian segala tingkah laku warga negaranya harus berpedoman pada norma hukum yang ada. Untuk itu Indonesia sudah seharusnya berupaya menciptakan warga negaranya sadar akan hukum, sehingga terwujud tertib hukum. Norma hukum dibuat untuk dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi pidana. Adapun yang menjadi persoalan dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran gelap narkotika ini salah satunya adalah disparitas dalam pemidanaan pada suatu putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan. Penerapan pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, yang dapat dikatakan bahwa figur hakim didalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 10 Januari 2018 jam 09:00 – 12:00 di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang maka diperoleh dua buah perkara pidana khusus anak tentang peredaran gelap narkotika. Adapun contoh disparitas pemidanaan yang akan diambil dari putusan tindak pidana peredaran gelap narkotika ini adalah terkait kasus pidana khusus anak peredararan gelap narkotika. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas antara lain :1. Apa penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika ?2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana anak pelaku peredaran gelap narkotika ? Pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan pengadilan dapat berpotensi menimbulkan disparitas pidana sebab interval antara ketentuan ancaman pidana minimum dan pidana maksimum terbuka lebar. Terjadinya disparitas pidana berimplikasi pada timbulnya pandangan negatif dari masyarakat terhadap dunia peradilan dan kejaksaan. Hakim dinilai bersifat subjektif dalam menjatuhkan pidana dan demikian pula bagi JPU dinilai tidak profesional dalam membuat tuntutan pidana. Hakim yang bersifat subjektif berarti menjatuhkan pidana tidak didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis, melainkan didasarkan pada pendapat pribadinya. Disparitas pidana juga berimplikasi pada ketidakadilan bagi para pencari keadilan sebab dalam perkara nerkotika dengan tingkat keseriusan yang sama dijatuhkan putusan yang berbeda oleh majelis hakim akan menimbulkan kontroversi. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam tindak pidana narkotika antara lain adalah tidak bekerjanya elemen-elemen SPP sebagaimana mestinya menurut aturan perundang- undangan yang berlaku. Perbedaan filosofi yang dianut oleh masing-masing hakim yang berbeda dapat menimbulkan disparitas pidana.

347.01
SYU
d

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA YANG BERUSIA LANJUT DI PERSIDANGAN PENGADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Padang Panjang)

Syukri Kurniawan, 1510111102, Fakultas Hukum, 2018, 68 halaman

ABSTRAK

Usia lanjut yang sering dikenal dengan lansia merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana di persidangan pengadilan. Dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. sebab pada terdakwa yang berusia lanjut tersebut patut dipertanyakan, apakah pelaku masih memenuhi syarat untuk dipidana dalam arti pelaku tindak pidana tersebut secara fisik dan psikis masih mampu aatau tidak dalam menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, dan kemunduran dapat berdampak pada psikologis lansia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa yang berusia lanjut di persidangan pengadilan dan untuk mengetahui kesesuaian antara pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa berusia lanjut dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim terhadap terdakwa yang berusia lanjut pada dasarnya tidak ada perbedaan atau perlakuan khusus yang mendasar apabila seseorang telah melakukan tindak pidana. Karena hukum pidana tidak membedakan status seseorang apabila melakukan tindak pidana. Adapun pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang berusia lanjut adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang dalam persidangan dan juga rasa keadilan. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa, antara lain hal yang memberatkan seperti perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban, terdakwa berbelit-belit sehingga mempersulit persidangan dan hal yang meringankan seperti terdakwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa berusia lanjut dan mempunyai tanggungan istri dan anak.

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan, Penjatuhan Pidana, Terdakwa, Lanjut Usia.

348.3
TEN
m

MEKANISME PENETAPAN DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI NAGARI KOTO TINGGI KURANJI HILIR KECAMATAN SUNGAI LIMAU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tengku Riri Syahputri Husni, 1410111154, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 64 halaman, 2019

ABSTRAK

Dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat melaksanakan Pemerintahan dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Penetapan Dana Desa dan Kendala serta Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif yang dipergunakan ialah sistem hukum, pendekatan hukum serta undang-undang yang terkait dengan desa dan melakukan wawancara langsung engan dilapangan sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada. Hasil yang diperoleh adalah pemerintah desa harus mengedepankan musyawarah untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksud berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur pemerintahan desa, baik itu kepala desa, sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Adapun yang menjadi Kendala dalam melakukan musyawarah penganggaran ini banyak masyarakat yang pola fikirnya masih minim, akan tetapi kedepannya pemerintahan nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir akan melakukan Sosialisasi manfaatnya dana desa, seperti melakukan penyuluhan bahwa dana desa ini bisa dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kebutuhan bersama-sama bukan untuk kebutuhan pribadi.

346
TIA
p

PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR REGIONAL PAYAKUMBUH TERHADAP LINGKUNGAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

Tia Febrina, 1510112092, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII), 69 halaman, 2019

ABSTRAK

Salah satu kewenangan pemerintah dalam skala provinsi atau kab/kota yakni mengenai pengendalian lingkungan hidup. Tugas Pokok Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang lingkungan hidup. Salah satu fungsi Dinas Lingkungan Hidup antara lain melakukan pengelolaan sampah. Pengelolaan dilakukan terhadap Tempat Pembuangan Akhir Regional Payakumbuh yang merupakan tempat pemprosesan akhir sampah, dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat bersama empat kabupaten/kota antara lain; Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh. Adanya Tempat Pembuangan Akhir ini memberikan dampak positif dan negatif terkait pengelolaannya. Disamping membuka lapangan pekerjaan baru serta akses jalan menuju lokasi Tempat Pembuangan Ahir menjadi perhatian pemerintah, sebaliknya sawah masyarakat menjadi gagal panen akibat air tanah yang tercemar dengan air lindi serta banyak sampah yang tercecer sepanjang jalan menyebabkan nilai estetika lingkungan menjadi menurun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi dengan Kepala seksi operasional TPA sampah regional, Kepala UPTD Persampahan serta masyarakat sekitar lokasi Tempat Pembuangan Akhir yang merasakan dampak langsung dengan dioperasikannya tempat pembuangan akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Pengelolaan terhadap Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional Payakumbuh pada dasarnya telah melaksanakan amanah dari undang-undang, namun penerapan teknologi dan pengelolan yang sesuai dengan perkembangan zaman perlu dilaksanakan untuk memperpanjang usia tempat pembuangan akhir.

346.02
TOP
p

PERJANJIAN PAROAN SAWAH (BAGI HASIL PADI) DI NAGARI TANJUNG BINGKUNG, KECAMATAN KUBUNG, KABUPATEN SOLOK

Topan Maulana Putra, 1510111051, Fakultas Hukum, 2019, 63 halaman

ABSTRAK

Di wilayah Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok masih banyak dilaksanakan perjanjian usaha bagi hasil tanah pertanian khususnya perjanjian bagi hasil pada tanaman padi, yang lebih dikenal dengan nama perjanjian paroan sawah (bagi hasil padi) yang selama ini didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tanah, kepercayaan inilah yang kemudian menjadi dasar utama bagi seorang penggarap untuk mendapatkan izin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya untuk dapat ditanami padi, mengenai isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban para pihak ditentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusahaan tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama, pada masyarakat Nagari Tanjung Bingkung lebih mengenalnya dengan sistem (mampaduo, mampatigo, mampaampek dan mampalimo). Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 1) Bagaimanakah perjanjian paroan sawah (bagi hasil padi) yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Tanjung Bingkung, 2) Apa saja kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian paroan sawah (bagi hasil padi) di Nagari Tanjung Bingkung. Sifat penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis, yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku, yang akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam norma masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1) Perjanjian paroan sawah (bagi hasil padi) di Nagari Tanjung Bingkung dilakukan dengan berdasarkan pada hukum adat setempat. 2) Kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian paroan sawah di Nagari Tanjung Bingkung adalah karena, alat ukur dalam penetapan imbangan bagian hasilnya tidak pasti, tidak terlaksananya hak dan kewajiban antara para pihak sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan perjanjian paroan sawah sehingga menimbulkan Wanprestasi, Faktor budaya yang sangat melekat pada masyarakat yang masih mempercayai penggunaan adat kebiasaan secara turun temurun. Dari hasil penelitian diharapkan perlunya diperkenalkan, diberitahukan dan ditingkatkan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil, karena mayoritas masyarakat belum mengetahui tentang adanya undang-undang ini. Dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil sebaiknya pemilik tanah atau calon penggarap haruslah membuka diri atau mengusahakan melaksanakan perjanjian bagi hasil pertanian dengan undang-undang yang sudah diterapkan oleh pemerintah yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil, sehingga masyarakat dapat meminimalisir Wanprestasi yang terjadi akibat perjanjian bagi hasil, sehingga terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum baik bagi penggarap maupun pemilik tanah.

348.3
TRI
t

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH KONSUMEN DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tri Kasia Alami, 1510111058, Fakultas Hukum, 2019, 66 halaman

ABSTRAK

Tindak pidana pencemaran nama baik diatur di dalam Pasal 310-311 KUHP, jika tindak pidana pencemaran nama baik itu dilakukan melalui media elektronik, diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan UU ITE. Pemberlakuan aturan tindak pidana pencemaran nama baik tidak terlepas dari kemajuan teknologi terutama mengenai penggunaan media elektronik. Penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat ini adakalanya berpotensi melanggar ketentuan tindak pidana pencemaran nama baik. Sebagai contoh kasus, yakni konsumen yang menyampaikan keluhan dan pendapatnya dianggap telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dalam penelitian ini rumusan masalah sehubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh konsumen adalah 1) keluhan konsumen yang disampaikan melalui media elektronik dilihat dari unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik, 2) penggunaan pasal menyangkut pencemaran nama baik yang diatur dalam undang-undang tentang ITE terkait dengan keluhan konsumen dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan, dengan metode pendekatan yuridis normative. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1) keluhan konsumen yang disampaikan melalui media elektronik tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dilihat dari ketentuan pasal 310-311 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. 2) penggunaan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 huruf d Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dan lebih paham mengenai aturan-aturan dalam menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat, kepada penegak hukum diharapkan untuk lebih bijak serta memperhatikan asas keadilan dalam menentukan aturan hukum yang harus dikenakan, serta bagi pembentuk undang- undang diharapkan untuk lebih memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

344.03
UMM
p

PELAKSANAAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN MUI) NOMOR: 98/DSN-MUI/XII/2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SYARIAH TERHADAP BPJS KESEHATAN

Ummi Syariah Dalimunthe, 1510112125, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 86 Halaman, 2019

ABSTRAK

Sistem Jaminan Kesehatan yang ditawarkan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan salah satu program pemerintah di dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 atas perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang diimplementasikan mulai 1 Januari 2014. Secara operasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI); Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Serta penerbitan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan. Ijtima' Ulama komisi fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Podok Pesantren At-Tauhidayah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya'ban 1436 H/ 7-10 Juni 2015 M mengeluarkan beberapa keputusan, salah satu diantaranya adalah Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se- Indonesia tentang Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Permasalahan yang ada dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diindikasi adanya riba, gharar, maysir di iuran dan akadnya. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, dalam fatwanya membahas Ketentuan Hukum, Akad dan Personalia Hukum, Iuran dan Layanan, Dana Jaminan Sosial Bernilai Negatif dan penempatan Pengembangan DJS Sanksi dan Perselisihan.

346.06
UMM
p

PENERAPAN ASAS PELAYANAN YANG BAIK DALAM PERIZINAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG

Ummi Khasanah Sitorus Pane, 1510111068, Fakultas Hukum, 2019, 68 Halaman

ABSTRAK

Salah satu jenis pelayanan yang mendasar adalah pelayanan disektor administrasi perizinan. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Padang membagi beberapa dinas-dinas untuk membantu menjalankan tugas dan kewajiban memberikan pelayanan, salah satunya yakni dinas lingkungan hidup. Pada dasarnya pelayanan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari baik dengan sesama masyarakat sekitar maupun dengan instansi pemerintahan., Pasal 10 ayat (1)Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat asas-asas umum pemerintahan yang baik yang salah satu asasnya adalah asas pelayanan yang baik. Asas pelayanan yang baik memiliki kriteria berikut pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas dan standar pelayanan. Namun dalam praktiknya masih ada kriteria tersebut yang belum terlaksana dengan baik. Ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian, yaitu: 1. Bagaimanakah penerapan asas pelayanan yang baik dalam perizinan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang? 2. Apa kendala yang dihadapi dan bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut dalam penerapan asas pelayanan yang baik dalam perizinan di Dinas Lingkungan Hidup? Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Data didapatkan dengan Wawancara dengan Kasi Penataan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1). Bahwa terkait dengan penerapan asas pelayanan yang baik yang berdasarkan 3(tiga) kriteria yang terdapat dalam undang-undang, sebagian besar Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sudah melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Walaupun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. 2). Kendala yang dihadapi yakni petugas terkait yang sedang melaksanakan tugas kedinasan lainnya atau cuti serta prosedur dan persyaratan yang panjang sehingga kurang dipahami oleh masyarakat. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi seperti, penugasan petugas (plt) yang sedang melaksanakan tugas kedinasan lainnya atau cuti dan mensosialisasikan prosedur dan persyaratan kepada masyarakat agar mudah dipahami. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang tidak berhenti berinovasi agar selalu memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas untuk masyarakat dan selalu berupaya agar nantinya hal itu bisa terwujud sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Agar pelayanan yang diberikan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah, Pelayanan, Perizinan.

346.06
UTA
t

TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANA TUGAS GUBERNUR OLEH ANGGOTA AKTIF KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Utari Harnesti Putri, 1510112079, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 71 halaman, 2019

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari lembaga negara merupakan pemelihara keamanan ketertiban masyarakat, pelindung pengayom dan pelayanan masyarakat, dan penegak hukum dalam rangka terpeliharanya keamanan. Tahapan pemilihan Kepala Daerah salah satunya dalah pejabat yang masih aktif harus menjalani cuti diluar tanggungan negara, konsekuensi terhadap pejabat yang masih aktif menjabat yang ingin kembali mencalonkan diri harus melaksanakan cuti diluar tanggungan negara. Pelaksana tugas Gubernur adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara karena pejabat defenitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tetap atau terkena peraturan hukum. Salah satu alasan Menteri Dalam Negeri menunjuk anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pelaksana tugas dikarenakan kekhawatiran akan kehabisan personil eselon I di internal Kementrian Dalam Negeri serta menjamin netralitas pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana legalitas pengangkatan anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Plt Gubernur berdasarkan fungsi, tugas dan wewenang Polri menurut UU No. 2 Tahun 2002 dan menurut persyaratan penunjukan Plt Gubernur? 2) Apa permasalahan hukum yang timbul dengan adanya Plt Gubernur oleh anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia?. Penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian secara yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa 1) Penunjukan anggota aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia mengisi jabatan Plt Gubernur adalah menyalahi aturan dan merupakan tindakan inkonstitusional dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas dan fungsi yang serupa dengan Kepala Daerah yaitu tugas dan fungsi dari Kementrian Dalam Negeri. 2) pengangkatan Plt Gubernur dari Kepolisian Negara Republik Indonesia menyalahi beberapa peraturan perundang- undangan serta merupakan tindakan politik praktis dikalangan Kepolisian.

342.07
NAB
p

PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA JALUR PERSEORANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

NABILA PRATIWI, 1410111015, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 51 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik terdapat Frasa empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pertama kali digagaskan oleh Taufiq Kiemas selaku Ketua MPR periode 2009-2014. Dengan adanya frasa empat pilar berbangsa dan bernegara ini menimbulkan perdebatan dengan mencantumkan Pancasila kedalam frasa empat pilar tersbut. Dengan demikian beberapa orang mengajukan pegujian undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Perumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana kedudukan Pancasila dalam frasa empat pilar bebangsa dan bernegara? 2. Implikasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/Puu-XI/2013?. Penulis melakukan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Pancasila sudah jelas kedudukannya dalam sejarah Indonesia. Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila tidak dapat diubah ataupun digeser kedudukannya sebagai ideologi bangsa. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan frasa empat pilar berbangsa dan bernegara, MPR dan lembaga negara lainnya menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan tidak lagi mensosialisasikan frasa empat pilar.

343.04
VIV
p

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI MAKAM BAGI ETNIS TIONGHOA OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG

Vivi Alisa, 1210112025, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VIII), 70 Halaman, Tahun 2019, Pembimbing Sri Arnetti, S.H., M.H dan Lerri Pattra, S.H.,M.H

ABSTRAK

Salah satu kebijakan pemerintah sebagai pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah adalah melalui penetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka Retribusi Pelayanan Makam yang termasuk kedalam golongan Retribusi Jasa Umum diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan kewenangannya Pemerintah Daerah harus mampu mengatur dan melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Makam sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang- undangan. Dalam kajian ini, yang menjadi ruang lingkup permasalahan adalah tentang bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan makam bagi etnis Tionghoa Padang, akibat hukum yang diberikan kepada ahli waris yang tidak membayar retribusi serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan atas keberatan ahli waris atas penetapan tarif retribusi. Kajian ditekankan kepada masyarakat pembayar retibusi di TPU Bungus yaitu warga etnis Tionghoa Padang yang memiliki keunikan makam dengan ukuran yang berbeda dari makam umat Islam pada umumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis empiris yaitu melihat kenyataan yang ada di dalam praktek di lapangan dan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasikan dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan retribusi pelayanan makam umumnya sesuai dengan yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yaitu yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 hanya saja denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran retribusi sebesar 2% tidak diberlakukan dalam praktik di lapangan yang mana tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi makam adalah sulitnya menghubungi ahli waris sehingga akibat hukum bagi ahli waris yang tidak membayar retribusi setelah melalui beberapa tahap pemanggilan adalah makam keluarganya akan dibongkar untuk diisi jenazah baru.

Kata Kunci : Pemungutan, Retribusi Makam, Etnis Tionghoa

345.08
VIK
p

PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK USIA SEKOLAH DI KOTA PADANG TAHUN 2018

Viko Primananda.1410112100.Fakultas Hukum Univeritas Andalas.PK IV (Hukum Pidana.63 Halaman.Tahun 2019)

ABSTRAK

Pada proses pemberantasan narkotika BNN Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas,fungsi, dan wewenang yang sama dengan Badan Narkotika Nasional yang bertujuan memberantas peredaran gelap Narkotika. Tekait dengan pemberantasan Narkotika tersebut maka dalam skripsi ini adalah bagaimanakah peranan menanggulangi penyalahgunaan peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi penyahgunaan dan peredaran gelap narkotika oleh anak sekolah. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam mengulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak sekolah di kota Padang. Pada penulisan ini terdapat tiga rumusan masalah yang akan dibahas, pertama bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam menangulangi tindak pidana narkotika bagi anak usia sekolah di kota Padang pada tahun 2018? Dan kedua apa yang menjadi kendala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam upaya menangulangi tindak pidana narkotika bagi anak diusia sekolah Di kota Padang pada tahun 2018? Dan yang ke tiga apa upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat mengatasi hambatan – hambatan yang terdapat dalam penanganan penyalahan narkotika bagi anak usia sekolah di kota Padang pada tahun 2018? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris penelitian yang dikonsepkan sebagai pranata sosial secara rill dikaitkan pada aspek kehidupan sosial serta hukum sebagai gejala sosial empiris yang berdasarkan data sekunder sebagai data awal dan dilanjutkan dengan data primer atau data yang diperoleh di lapangan. Teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara semi terstruktur, kemudian dianalisis secara kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa peran Badan Narkotika Nasional adalah sebagai sosialitatir, fasilitator, koordinator dalam pemberantasan narkotika dalam pemberantasan narkotika. Pada penelitian ini ditemukan bahwa BNN Provinsi Sumatera Barat menghadapi beberapa hambatan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, hambatan sumber daya manusia menjadi faktor paling berpengaruh sebagai hambatan, karena dengan keterbatasan sumber daya manusia turut menghambat fungsi BNN dalam melakukan penyuluhan, rehabilitasi dan upaya terpadu lainnya. Dengan temuan tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja BNN Provinsi Sumatera Barat berjalan cukup baik, namun sedikit terhambat dengan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki.

346.02
WAH
p

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Padang

Wahyu Wibisono, 1310111095, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2019, 72 halaman

ABSTRAK

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, rumah menjadi sarana bagi manusia guna melakukan berbagai macam aktifitas hidup. Akan tetapi belum semua kalangan masyrakat dapat menikmati rumah yang layak terutama bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Saat ini pemerintah menerbitkan suatu program fasilitas kredit perumahan dengan suku bunga rendah yaitu hingga 1% yang di tujukan kepada masyarakat yang belum memiliki rumah. Program ini diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Bank Indonesia No. 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Laoan To Value Untuk Kredit Properti, yang lebih lanjut mengatur tentang mekanisme penyaluran Kredit Perumahan dengan suku bunga rendah. Didasari hal tersebut penulis kemudian menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Padang". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan menekankan aspek hukumberkenaan dengan penerapannya dilapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer melalui studi lapangan (Wawancara) dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dari hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Padang secara prosedur telah menerapkan pelaksanaan Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah dengan cukup baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi penerapan tersebut bukan tanpa kendala, yang mana dapat diidentifikasi kendala yang ditemui dalam penerapannya mencakup seperti adanya itikad tidak baik dari debitur dengan memberikan data yang tidak benar ketika mengumpulkan persyaratan, debitur lalai terhadap kewajiban angsuran, hingga debitur wanprestasi melanggar isi perjanjian dengan mengalih fungsikan rumah yang diperolehnya.Solusi yang ditawarkan dalam penyelesaian masalah tersebut diantaranya yaitu member surat peringatan (somasi), melalui kantor pelayanan piutang dan lelang negara serta upaya hukum pengadilan.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Kredit Pemilikan Rumah

345
WAH
u

UPAYA DITRESKRIMUM POLDA SUMBAR DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI (Studi di Polda Sumbar)

Wahyudi Darni, 1310111226, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 95 halaman, 2019

ABSTRAK

Aborsi adalah penguguran kandungan, penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya secara paksa dan disengaja. Permasalahan yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah a) Bagaimanakah pengaturan mengenai tindak pidana aborsi dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia? b) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Sumatera Barat? c) Kendala apa saja yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Sumatera Barat?. Penelitian ini dilakukan dalam lingkungan Polda Sumbar. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang didapat dari hasil penelitian langsung dilapangan (field research) dan data sekunder yaitu informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa a) Pengaturan mengenai tindak pidana aborsi dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia yaitu pengaturan aborsi di dalam KUHP diatur di dalam Pasal 299, 346 – 349. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 75 – 77 serta Pasal 194. b) Upaya kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Sumatera Barat yaitu kepolisian bersifat pasif artinya bahwa kepolisian menunggu jika ada laporan yang masuk selanjutnya kepolisian melakukan penyidikan dibantu oleh saksi ahli yaitu dokter yang berwenang, setelah semua keterangan-keterangan pada proses penyidikan diperoleh dan dianggap sudah mencukupi maka berkas-berkas tersebut segera diproses dan selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan, lalu pihak Kejaksaan melimpahkan ke Pengadilan c) Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana aborsi di wilayah hukum Sumatera Barat yaitu lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pergaulan bebas, tidak adanya saksi, kurangnya barang bukti, teknelogi yang canggih sehingga menyulitkan polisi mencari pelaku yang menjual obat-obat atau sarana menggugurkan kandungan (via-online).

346.02
WAN
p

PELAKSANAAN BAGI HASIL ANTARA PDAM KOTA SOLOK DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PEMANFAATAN SUMBER MATA AIR SUNGAI GUNTUNG, NAGARI JAWI-JAWI, KECAMATAN GUNUNG TALANG, KABUPATEN SOLOK

WANI ISLAM SUHADA YUNDRA, 1510111047, Program Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2018, Pembimbing I Linda Elmis,S.H,M.H. ,Pembimbing II Misnar syam, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kota Solok dan Kabupaten Solok, latar belakang penelitian ini adalah pemanfaatan air bersih sungai guntung yang dilaksanakan oleh PDAM Kota Solok untuk penunjang kegiatan usaha maka, membentuk Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Solok Dengan Pemerintah Kota Solok Tentang Pemanfaatan Sumber Mata Air Sungai Guntung, Nagari Jawi-Jawi, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Untuk Melaksanakan Pemanfaatan Air Sungai Guntung, Nagari Jawi-Jawi, Gunung Talang, Kabupaten Solok. Pelaksanaan perjanjian kerjasama telah dilaksanakan pada Tahun 2002 dan berlaku hingga saat ini, permasalahan muncul ketidak sesuaian pembagian keuntungan yang seharusnya di peroleh Pemerintah Kabupaten Solok yang sudah diatur dalam perjanjian tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan. Tentu ini telah termasuk kedalam kategori Wanprestasi sehingga tujuan tidak tercapai, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan langsung kelapangan dengan melihat penerapan peraturan perundang undangan atau aturan hukum, Hubungkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Pada awalnya diteliti adalah data skunder, Dilanjutkan dengan penelitian data primer pihak yang terlibat konflik. Alat pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan mengenai bagi hasil keuntungan dilakukan sesuai dengan keuntungan yang peroleh dan perjanjian yang telah disepakati, ketidak penyesuaian bagi hasil dapat disesuaikan dengan pelaksanaan evaluasi perjanjian setiap tiga tahun sekali, kemudian terhadap konflik yang terjadi di dalam masyarakat yang mengakibatkan kerusakan fasilitas milik PDAM maka penyelesaian yang dapat di laksanakan yakni dengan musyawarah antara pihak masyarakat dengan PDAM di luar pengadilan. Perjanjian yang sudah lama dan dianggap tidak sesuai dengan keadaan saat sekarang dianggap tidak mampu lagi mengawasi pelaksanaan bagi hasil oleh PDAM Kota Solok .

Kata Kunci : bagi hasil, perjanjian kerjasama

343.09
WID
p

PEMELIHARAAN SALURAN DRAINASE PRIMER UNTUK PENCEGAHAN BENCANA BANJIR DI KOTA PADANG

Widuri Armita Rahim, 1510112006, Fakultas Hukum, 2019, 51 halaman

ABSTRAK

Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan“Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.Pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, negara berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat serta hak pelayanan kesehatan bagi warga negaranya. Pasal tersebut berhubungan dengan salah satu prasarana lingkungan yaitu saluran drainase. Untuk menciptakan saluran drainase agar berfungsi optimal, maka perlu dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan saluran drainase dilakukan agar terhindar dari bencana banjir dan mengurangi resiko penyakit. Namun fakta dilapangan khususnya pemeliharaan drainase primer yang berada di Kota Padang kondisinya memprihatinkan dan mengakibatkan banjir. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab atas pemeliharaan drainase primer. Atas dasar itu penelitian ini dilakukan untuk mengemukakan permasalahan Pertama, Bagaimana pemeliharaan saluran drainase primer untuk pencegahan bencana banjir di Kota Padang. Kedua, Apa kendala yang dihadapi selama proses pemeliharaan drainase primer tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris yaitu meneliti data sekunder pada tahap awal , untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan, atau terhadap masyarakat. Dari hasil penelitian didapat bahwa pelaksanaan pemeliharaan drainase primer sudah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam melakukan pemeliharaan terhadap drainase primer di kota padang, masih ditemukan beberapa kendala dalam melakukan pemeliharaan drainase.

Kata kunci : Kewenangan, Pemeliharaan Drainase

343.04
WID
p

PENYELESAIAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA PRIMER KOPERASI KEPOLISIAN RI (PRIMKOPPOL) MAPOLDA SUMATERA BARAT BAGI ANGGOTA POLISI YANG DIMUTASI

Widya Romadhani, 1510111064, Fakultas Hukum, 2019, 61 halaman

ABSTRAK

Mengenai perjanjian simpan pinjam pada Primer Koperasi Kepolisian RI MAPOLDA SUMATERA BARAT, ada klausula di dalam perjanjian tersebut yang menyatakan "Bahwa apabila pemberi kuasa pindah (dimutasikan) maka pemotongan gaji dilakukan oleh Bendahara satuan kerja (Bensatker) pada satuan kerja (Satker) yang baru". Namun, karena kerjasama antara Primkoppol di Polres – polres belum sinkron, maka kewajiban bagi anggota polisi yang dimutasi yaitu harus melunasi kewajiban - kewajibannya. Tetapi, Anggota polisi tersebut banyak yang melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang setiap bulannya kepada rekening koperasi dan banyak yang memohonan untuk mengangsur pembayaran. Dengan melihat prosedur pembayaran tersebut, tentu akan membuka peluang bagi anggota polisi tersebut untuk telat atau wanprestasi dalam melakukan pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Perjanjian Koperasi Simpan Pinjam pada Primer Koperasi Kepolisian RI (PRIMKOPPOL) MAPOLDA SUMBAR dan untuk mengetahui Penyelesaian Perjanjian Simpan Pinjam pada Primer Koperasi Kepolisian RI (PRIMKOPPOL) MAPOLDA SUMBAR apabila anggota Polisi di Mutasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (Library Research), studi Dokumen, populasi dan sampel, serta wawancara dengan Bendahara dan pengurus PRIMKOPPOL MAPOLDA SUMBAR untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Dari hasil penelitian ini berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Bendahara Satuan kerja (Bensatker) dan Pengurus PRIMKOPPOL, bahwa bagi anggota polisi yang dimutasi, yang sedang melakukan peminjaman pada PRIMKOPPOL banyak yang melakukan pembayaran melalui Transfer, dan ada beberapa yang melunasi pembayarannya.

Kata Kunci : Penyelesaian, Perjanjian Simpan Pinjam, Primer Koperasi Kepolisian RI (PRIMKOPPOL).

348.04
WIL
p

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung)

Wilda Musafir, 1410112164, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 62 halaman, 2019

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhdadap anak korban perkosaan diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Banyaknya kasus perkosaan terhadap anak menimbulkan kekhawatiran, karena anak korban perkosaan dapat menimbulkan penderitaan fisik dan juga psikis sehingga dapat mempengaruhi perkembangan korban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah ; 1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung? 2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung? 3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung? Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Dari hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa ; 1. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban perkosaan diantaranya berupa pendampingan psikologi dan rehabilitasi sosial guna memulihkan kembali kondisi mental, fisik, dan lainnya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat peristiwa yang dialaminya. 2. Dalam proses penyidikan anak harus didampingi oleh walinya serta bebas dari pertanyaan yang menjerat dan memberikan keterangan tanpa tekanan. 3. Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan unit PPA Polres Kabupaten Sijunjung bekerja sama dengan Dinas Sosial dan P2TP2A Kabupaten Sijunjung.

345
WIL
u

UPAYA UNIT RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN SEKTOR PADANG UTARA KOTA PADANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA

Willy Arsyadifeli, BP:1310111198, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 80 hlm, 2018

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Barat. Khususnya di Kota Padang, terdapat kecenderungan meningkatnya kasus pencurian terhadap kendaraan bermotor. Dalam mengatasi hal ini peran kepolisian sangatlah penting. Rumusan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Kepolisian Sektor Padang Utara, bagaimanakah upaya Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Padang Utara dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua serta apakah kendala yang di hadapi oleh Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Padang Utara dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber, yaitu kepolisan bagian reserse kriminal kepolisian sektor padang utara. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Kepolisian Sektor Padang Utara berupa faktor internal yaitu faktor pendidikan, ekonomi dan moral. Kemudian faktor eksternal berupa kelalaian pemilik kendaraan bermotor dan lingkungan tempat tinggal. 2) Upaya unit reserse kriminal Kepolisian Sektor Padang utara dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua adalah dengan cara upaya pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif merupakan upaya- upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan cara mendeteksi keadaan awal. Pencegahan dilakukan secara dini melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Upaya preventif kepolisan yaitu dengan cara melakukan patroli rutin, mengingatkan kepada pengguna atau pemilik sepeda motor agar memarkirkan kendaraanya pada garase rumah masing-masing, membuat spanduk- spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk peduli terhadap setiap kejahatan yang terjadi. Upaya represif yaitu melakuan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap jaringan pencurian sepeda motor serta mengoptimalisasikan kinerja dan fungsi dari Reskrim itu. 3) Kendala yang dihadapi oleh Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Padang Utara yaitu kurangnya anggota personil kepolisian dengan wilayah hukum yang luas, kurangnya kerjasama dari masyarakat serta sulit untuk mencari barang bukti hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

346.02
WIL
p

PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DI RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA BUKITTINGGI DALAM OPERASI BEDAH SEKTIO CAESAREA (SC)

Willy Pratama, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 79 halaman, 2019

ABSTRAK

Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis, termasuk disini salah satunya yaitu operasi bedah sektio caesarea (SC), hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Pesetujuan Tindakan Kedokteran dan Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2006 tentang Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran. Permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran di Rumah Sakit Islam Ibnu Bukittinggi dalam tindakan medis operasi bedah sektio caesarea (SC) adalah kurang baiknya komunikasi antara dokter dan pasien, pemberian informasi yang kurang jelas oleh dokter yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan, pemahaman sehingga pasien atau keluarganya mengiya – iyakan saja apa yang disampaikan oleh dokter. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran dalam tindakan medis operasi bedah sektio caesarea (SC) di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi, bagaimana kewenangan dan tanggung jawab Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi atas tindakan kedokteran operasi bedah sektio caesarea (SC) yang dilakukan terhadap pasien, dan apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan persetujuan tindakan kedokteran operasi bedah sektio caesarea (SC). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data penelitian meliputi data primer dan sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan studi pustaka. Analisis penelitian yang digunakan adalah secara kualitatif karena tidak menggunakan angka melainkan dengan uraian kalimat. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi bahwa dalam melaksanakan operasi bedah sektio caesarea (SC) dokter harus mendapat persetujuan tindakan kedokteran secara tertulis dalam bentuk formulir yang sudah disediakan Rumah Sakit, yang ditandatangani oleh dokter, pasien dan dua orang saksi yang terdiri dari satu saksi dari pihak Rumah Sakit dan satu saksi lagi dari pihak pasien. Persetujuan tindakan kedokteran merupakan dasar kewenangan dari dokter untuk melakukan operasi bedah sektio caesarea (SC), karena pasien ataupun keluarganya telah menyetujui bahwa akan dilakukan tindakan kedokteran.

343.09
WIL
p

PELAKSANAAN WEWENANG CAMAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA PADANG

Wilmina Karina Oktavia,, 1510111049, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 60 halaman, 2019

ABSTRAK

Camat di Kota Padang memiliki wewenang dalam pengawasan dan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Kepada Camat. Peraturan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 2014 tersebut diharapkan dapat menciptakan tertibnya pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Camat dan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang. Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran, seperti mendirikan bangunan tanpa IMB, merenovasi rumah dengan mengubah bentuk atau struktur bangunan tanpa mengurus IMB terlebih dahulu, serta membangun rumah yang tidak sesuai dengan IMB. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan wewenang camat dalam pengawasan dan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang? 2) Apa saja faktor penghambat pelaksanaan wewenang camat dalam pengawasan dan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan wewenang Camat dalam pengawasan dan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lubuk Bagaluang dan Kecamatan Padang Timur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan narasumber yang kompeten dan relevan dengan topic yang dibahas, yaitu Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana Kecamatan Padang Timur, Kepala Seksi Perizinan dan Pendapatan Kecamatan Lubuk Bagaluang, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dan Bangunan Kota Padang dan masyarakat. Camat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian IMB dibantu oleh Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana bersama Seksi Perizinan dan Pendapatan dengan tim pengawas sebanyak 3 (tiga) orang. Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tersebut terdapat beberapa faktor penghambat pelaksaannya yaitu jumlah pengawas yang sedikit dan kurang berkompeten dibidangnya serta kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya Izin Mendirikan Bangunan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Padang belum berjalan efektif, hal ini dikarenakan masih didapati pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan tim pengawas yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

345.02
WIL
p

PELAKSANAAN OPERASI PEMBERANTASAN PERJUDIAN OLEH POLRES PADANG PANJANG

Wilni Assari, 1510112148, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 55 halaman

ABSTRAK

Segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma- norma umum dan adat-istiadat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum inilah dikenal dengan istilah penyakit masyarakat. Pada pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, “mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”, dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan “yang dimaksud dengan penyakit masyarakat antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar. Penyakit Masyarakat yang mencolok di wilayah Polres Padang Panjang adalah perjudian. Bentuk perjudian yang terjadi diantara judi ceki koa yang paling banyak ditemukan, togel, dan judi online. Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Operasi Pemberantasan Perjudian oleh Polres Padang Panjang. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis-sosiologis, teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan studi kepustakaan dan teknik wawancara dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun permasalahan yang penulis teliti adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan operasi pemberantasan perjudian oleh Polres Padang Panjang, 2) Apa sajakah kendala dalam pelaksanaan operasi pemberantasan perjudian oleh Polres Padang Panjang. Hasil penelitian yang didapat penulis adalah 1) Pelaksanaan operasi pemberantasan perjudian oleh Polres Padang Panjang merupakan salah satu bentuk upaya preventif untuk menekan munculnya berbagai tindak kejahatan lain yang biasa muncul di masyarakat. Pelaksanaan operasi pemberantasan perjudian adalah bentuk operasi pengamanan kegiatan dan merupakan operasi kepolisian kewilayahan dengan sifat operasi tertutup. Pelaksaan dilakukan berdasarkan pedoman dasar manajemen operasi kepolisian yang meliputi adanya penetapan sasaran, waktu pelaksanaan operasi, cara bertindak yang dilakukan, pelibatan kekuatan, dukungan anggaran, dan pihak yang mengawasi dan mengendalikan. 2) Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi pemberantasan perjudian oleh Polres Padang Panjang lebih kepada faktor eksternal dari sisi masyarakatnya sendiri.

347.05
WIL
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA LAYANAN GO-JEK DI KOTA PADANG

Wilzian Akbar, 1310112108, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata (PK I), 61 Halaman – Tahun 2018, Pembimbing : Linda Elmis, S.H.,M.H. dan Misnar Syam, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat di era globalisasi ini terutama dibidang yang sangat penting yaitu bidang transportasi, maka transportasi menjadi sangat diperlukan masyarakat untuk bepergian kemanapun baik untuk menjalankan kegiatan sehari-hari didalam kota maupun diluar kota serta aktifitas lainya. Dengan meningkatnya kebutuhan pengguna transportasi tersebut menyebabkan suatu kota mengalami kemacetan, kemacetan pun akan menghambat masyarakat menjalankan aktifitasnya. Salah satu perkembangan transportasi yang mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan perkembangan teknologi di masa sekarang yaitu adanya ojek online, dengan nama PT.Go-jek Indonesia, go-jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja diberbagai sektor informal di Indonesia. Dalam perkembanganya go-jek telah resmi beropersi di 50 kota di Indonesia termasuk kota Padang, Perusahaan go-jek tersebut bermitra kepada driver (pengemudi ojek) di kota Padang, dan pemesanan ojek melalui go-jek harus menggunakan sebuah aplikasi pada smartphone atau telepon pintar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap Konsumen pengguna jasa layanan Go-jek di kota Padang apabila terjadi kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh Pengemudi ojek atau Driver? (2) Bagaimana upaya PT.Go-jek Indonesia cabang Padang untuk Mengoptimalkan Mutu Layanan terhadap Konsumen? Rumusan masalah tersebut menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen, dan wawancara. Hasil dari penelitian Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa layanan go-jek di kota Padang apabila terjadi kerugian-kerugian, maka pihak PT.Go-jek Indonesia cabang Padang melakukan permintaan maaf atas kerugian dan bersedia untuk memberikan bantuan keuangan jika pengguna aplikasi go-jek yang menggunakan layanan go-ride mengalami kecelakaan, menderita cidera atau meninggal saat dijemput oleh pengemudi atau driver PT.Go-jek Indonesia cabang Padang. Serta PT.Go-jek Indonesia cabang Padang berusaha meningkatkan mutu terhadap pelayanan agar konsumen pengguna jasa layanan go-ride tidak dirugikan.

348.04
WIN
p

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (DI PENGADILAN NEGRI KELAS I A PADANG)

Winda Dwiastuti, 1210113007, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 65 halaman

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian tidak jarang ditemukan dan dilakukan oleh anak dibawah umur. Seorang anak yang melakukan tindak pencurian tidak terlepas dari keadaan lingkungan sekitar. Anak dibawah umur bahwasanya berada dalam status hukum belum dewasa dan harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa. Masalahpun timbul bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis sosiologis, data didapatkan dengan melakukan studi dokumen yaitu putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang dalam perkara No. 26/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg dengan mengambil salinan putusan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi penulis. Hasil dari penelitian yang ini menunjukkan penerapan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di dalam perkara pidana No. 26/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg yaitu melanggar Undang-Undang KUHP Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Selain itu, sanksi pidana yang dijatuhkan pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang anak ini tidak dilihat dari alasan dan nilai yang dipertaruhkan melainkan benar atau tidaknya seorang anak tersebut melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh seorang anak dalam perkara pidana No 26/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sanksi pidana yang dijatuhkan tidak bertujuan menghancurkan masa depan anak melainkan untuk memberikan efek jera agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi seorang anak serta manusia yang lebih baik.

Kata kunci - pencurian, pencurian dengan pemberatan, anak.

344.04
WIN
p

PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KESEHATAN PEREMPUAN DI RUMAH SAKIT BUNDA MEDICAL CENTER PADANG DITINJAU DARI PASAL 76 UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGAKERJAN

Windi Try Adhitami, 1510111136, Fakultas Hukum, Universitas Andalas

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari banyak pekerja perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga yang diantaranya termasuk dibidang kesehatan. Pasal 5 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Ketentuan dalam pasal ini memberi peluang terhadap pekerja perempuan untuk bekerja sesuai dengan batas kemampuannya. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian untuk menulis skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KESEHATAN PEREMPUAN DI RUMAH SAKIT BUNDA MEDICAL CENTER PADANG". Permasalahan dalam penelitian ini adalah: i) Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap tenaga kesehatan perempuan di Rumah Sakit Bunda Medical Center Padang? ii) Apa saja kendala yang dihadapi dalam perlindungan terhadap tenaga kesehatan perempuan di Rumah Sakit Bunda Medical Center Padang dan mengatasinya?. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris. Sifat penelitian bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Rumah Sakit Bunda Medical Center Padang. Hasil dari penelitian yaitu dalam UU Ketenagakerjaan telah diatur mengenai perlindungan terhadap pekerja perempuan, khususnya pada tenaga kesehatan. Dalam kenyataannya Rumah Sakit Bunda Medical Center telah melaksanakan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat beberapa pasal yang belum dipenuhi oleh perusahaan mengenai tenaga kesehatan yang bekerja dimalam hari. Maka dari itu diharapkan kepada perusahan untuk memenuhi hak dan kewajiban tenaga kesehatan perempuan dalam bentuk perlindungan hukum maupun keselamatan dan kesehatan kerja khususnya yang bekerja pada malam hari.

Kata Kunci: Tenaga Kesehatan perempuan, malam hari.

347.01
WIR
p

PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN ALLE RECHTVERVOLGING) (Studi Kasus Tindak Pidana Penggelapan Sertipikat Nomor 53 Pid. B 2017 Pengadilan Negeri Bukittinggi)

Wirra Della.1510112083.Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK IV HukumPidana.106 Halaman.Tahun 2019.

ABSTRAK

Hakim mempunyai kebebasan mutlak menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Dalam memutus suatu perkara, terdapat tiga macam bentuk putusan hakim yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diatur oleh Pasal 191 Ayat (1), (2) dan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yang meliputi, putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah berdasarkan alasan- alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta adanya keyakinan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) serta apakah putusan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang membahas tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Adapun data sekunder yang diambil adalah Putusan Nomor 53 Pid. B 2017 Pengadilan Negeri Bukittinggi. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini, menemukan bahwa; (1). Putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan putusan yang diberikan apabila perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi bukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini adanya keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. (2). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas adalah adanya alasan pembenar sesuai dengan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHP yaitu dalam hal ini notaris melaksanakan ketentuan undang-undang serta melaksanakan perintah jabatan, serta adanya pengaturan undang-undang Jabatan Notaris dimana notaris hanya dapat dikenai sanksi perdata atau sanksi administrasi. (3). Kesesuaian penjatuhan putusan lepas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan sudah tepat, karena didasarkan oleh bukti-bukti yang ada serta didapat keyakinan hakim bahwa terdakwa melakukan hal tersebut berdasarkan perintah jabatan dan untuk melaksanakan undang-undang.

346.07
WIT
i

ILLEGAL TRANSHIPMENT HASIL PENANGKAPAN IKAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Witri Ramadhani, 1510111173, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 73 hlm, 2019

ABSTRAK

Skripsi ini dimaksudkan untuk mempresentasikan ide baru tentang solusi atas permasalahan illegal transhipment hasil penangkapan ikan di ZEE Indonesia. Kegiatan illegal transhipment telah merugikan negara Indonesia, tidak hanya soal kekayaan perikanan, Indonesia juga dirugikan soal pajak atau royalti dari hasil penangkapan ikan, karena adanya penggunaan BBM bersubsidi oleh kapal perikanan. Hak nya diambil namun kewajibannya tidak dilakukan yaitu melaporkan hasil tangkapannya. Terjadinya illegal transhipment disebabkan luasnya lautan Indonesia sehingga kapal asing yang melakukan transaksi di tengah laut tidak terdeteksi oleh pemerintah. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luasnya lautan tersebut tersimpan potensi kekayaan alam berupa ikan dan hasilnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Karena besarnya potensi perikanan di perairan Indonesia, menjadi sebuah ancaman bagi kedaulatan Indonesia dan menyebabkan laut Indonesia sering dimanfaatkan oleh perusahaan ikan dan nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan secara melawan hukum. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang melibatkan study kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas – asas dan dasar – dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah serta penemuan hukum in concerto menggunakan literature, buku – buku referensi, dan lain sebagainya. Penulis menyimpulkan : 1. Alasan masih terjadinya illegal transhipment dalam ZEE Indonesia adalah karena belum memadainya peraturan tentang larangan transhipment, kurangnya pengawasan aparat penegak hukum dan illegal transhipment sebagai salah satu bentuk corporate crime. 2. Upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia untuk mencegah illegal transhipment adalah dengan melakukan kerjasama internasional yang bersifat bilateral, sub regional, dan regional serta membuat peraturan tentang illegal transhipment, penambahan fasilitas untuk lembaga yang berwenang di laut , dan peningkatan penegakan hukum di laut. Penulis menyarankan agar hasil perikanan Indonesia tidak lagi dicuri oleh kapal asing maka perlu adanya penyelenggaraan penegakan hukum di laut terutama di ZEE Indonesia.

Kata kunci : Illegal Transhipment, Penangkapan Ikan, Kapal Asing, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

347.05
WER
g

GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR UTARA KOTA SOLOK OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK

WeriZakia

ABSTRAK

Kegiatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin menghadapi tantangan terutama aspek penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan tersebut. Hal ini dipahami karena ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah terbatas luas dan bidangnya. Bidang-bidang tanah relatif sudah terbagi habis penguasanya. Padahal kegiatan pembangunan terutama untuk kepentingan umum memerlukan pengadaan tanah.Jalan Lingkar utara termasuk kedalam kategori jalan arteri yang menghubungkan Kota Solok dengan Kabupaten Solok Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sawah Lunto/Sijunjung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang : 1) Bagaimanakah proses penentuan bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar utara Kota Solok oleh Pemerintah Daerah Kota Solok? 2) Bagaimanakah penyerahan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lingkar utara Kota Solok oleh Pemerintah Daerah Kota Solok? 3) Bagaimanakah penyelesaian sisa pengadaan tanah jalan lingkar utara yang belum selesai termasuk pembayaran penggantian kerugian?Metode pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang menekankan pada aspek–aspek hukum, dengan cara mempelajari bahan–bahan hukum primer dan hukum sekunder yang nantinya dijadikan pedoman dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang dibahas, sedangkan sebagai pendukung pendekatan utama digunakan pendekatan yuridis empiris, Hasil penelitian menunjukan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Jalan Lingkar Utara Kota Solok secara langsung antara Instansi Pemerintah Daerah Kota Solok dengan pemilik tanah atau kuasanya dengan cara pelepasan hak atas tanah, bangunan dan benda-benda yang terkait dengannya dengan prinsip musyawarah. hal tersebut telah sesuai dengan pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012.Dalam Penetapan Ganti Kerugian dilakukan dengan cara musyawarah antara Instansi Pemerintah melalui Tim Pengadaan Tanah dengan Pemilik Tanah dan kuasanya berdasarkan hasil penilaian dari tim appraisal, dasar penilaian yang digunakan adalah nilai pengganti wajar (Fair replacement Value) dan penggantian yang layak dan adil, hal tersebut telah sesuai dengan pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Kata kunci : GantiKerugian, Pengadaan Tanah dan Pembangunan Jalan.

348.04
YOG
p

PERAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN

Yoga Mohd Afdhal, 1210113101, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Sistem Peradilan Pidana (PK V), 78 Halaman, 2018, Pembimbing : Prof. Dr. Ismansyah, SH.,M.H. dan Iwan Kurniawan, S.H., M.H

ABSTRAK

Keterangan saksi merupakan alat bukti terpenting di dalam persidangan di pengadilan. Terkait dengan alat bukti saksi ini terdapat salah satu bentuk saksi yang tidak mempunyai kekuatan hukum di dalam persidangan yang dikenal dengan kesaksian testimonium de auditu. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum, kesaksian testimonium de auditu juga dipergunakan di sidang pengadilan baik oleh Penuntut Umum untuk membuktikan beberapa tindak pidana dan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Adapun perkara yang sering kali menggunakan kesaksian testimonium de auditu dalam persidangannya adalah perkara tindak pidana kesusilaan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penggunaan kesaksian testimonium de auditu di persidangan pengadilan perkara tindak pidana kesusilaan di pengadilan negeri kelas II B Sungai Penuh dengan rumusan masalah: 1.) Apa dasar atau alasan yang digunakan Penuntut Umum mengajukan saksi testimonium de auditu dalam perkara tindak pidana kesusilaan; 2.) Bagaimana pertimbangan hakim terkait saksi testimonium de auditu yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan perkara tindak pidana kesusilaan di pengadilan negeri sungai penuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan. Dari hasil penelitian dilapangan yang penulis lakukan diperoleh hasil sebagai berikut: dalam proses persidangan tindak pidana kesusilaan di pengadilan negeri kelas II B sungai penuh ternyata Penuntut Umum menggunakan saksi testimonium de auditu sebagai alat bukti tambahan dalam proses pembuktian tindak pidana kesusilaan. Adapun peran saksi testimonium de auditu hanyalah sebagai penguat alat bukti yang lain. Bagi hakim penggunaan saksi testimonium de auditu ini di persidangan dipandang sebagai bagian dari alat bukti petunjuk. Yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi hakim untuk memutuskan perkara tindak pidana tersebut.

345
YAF
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN TENAGA LISTRIK OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR (POLRESTABES) MEDAN

Yafila Kania Irianto, 1510112078, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 80 halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Tenaga listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat umum atau bagi kegiatan ekonomi yang mengandalkan tenaga listrik. Perkembangan teknologi dan kemajuan zaman membuat bukan hanya benda mati atau benda padat yang dapat menjadi objek suatu tindak pidana pencurian namun benda yang tidak berwujud seperti daya listrik juga dapat dijadikan sebagai objek suatu tindak pidana pencurian. Pencurian terhadap tenaga listrik diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Untuk menangani tindak pidana pencurian tenaga listrik tersebut, pihak kepolisian berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencurian tenaga listrik bekerjasama dengan PT. PLN (Persero). Beberapa laporan tindak pidana pencurian listrik yang masuk ke kepolisian hanya sedikit yang dapat masuk ke penyidikan. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian tenaga listrik di kota Medan? 2. Apa sajakah kendala penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian tenaga listrik di kota Medan?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris, yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural yang umumnya kualitatif yang berwujud terhadap kasus – kasus, dengan teknk pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Analisa dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana pencurian tenaga listrik ini didahului dengan penyelesaian oleh PT.PLN (Persero) dan apabila telah diberikan sanksi administratif namun tetap tidak selesai kasus akan dilimpahkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti berdasarkan aturan yang terdapat dalam KUHAP. Kendala yang dihadapi penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian tenaga listrik adalah kurangnya kerjasama antara PT.PLN (Persero) Area Medan dengan Polrestabes Medan dalam menyelesaikan tindak pencurian tenaga listrik di kota Medan, Alat bukti yang hilang atau rusak, dan PLN yang lebih mengedepankan penyelesaian dengan sanksi administratif dibanding melalui jalur hukum pidana.

343.09
YES
p

PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA DI ATAS TANAH ULAYAT KAUM UNTUK PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA DI KABUPATEN AGAM

YESI ARDILA, 1410112020, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018, Pembimbing: Dr. Kurnia Warman, S.H,. M.Hum dan Lerri Pattra, S.H., M.H

ABSTRAK

Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang penting demi memupuk kesadaran jati diri bangsa dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan yang berdasarkan Pancasila. Pasal 10 huruf m UU No 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah menjelaskan bahwa Cagar Budaya berkaitan erat dengan pengadaan tanah. Tanah sebagai alas berdirinya sebuah Cagar Budaya seharusnya memiliki status tanah yang jelas, sehingga hal itu dapat mempermudah dalam pelestarian cagar budaya itu nantinya. Salah satunya mengenai cagar budaya yang terdapat di atas tanah ulayat kaum caniago guguak berupa Rumah Gadang Angku Lareh yang berada di Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dijadikan sebagai objek wisata budaya. Atas dasar itu penelitian ini dilakukan untuk mengemukakan permasalahan Pertama, Bagaimana Proses Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Agam. Kedua, Bagaimana Proses Penetapan Benda Cagar Budaya di atas Tanah Ulayat Kaum untuk Perlindungan Warisan Budaya di Kabupaten Agam. Ketiga, Bagaimana Peran Pemerintah dalam Perlindungan Benda Cagar Budaya di atas Tanah Ulayat Kaum di Kabupaten Agam. Berdasarkan persoalan tersebut maka penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris atau penelitian pelaksanaan hukum dengan mengkaji dan menelaah bagaimana suatu produk hukum diterapkan di dalam masyarakat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Penetapan Benda Cagar Budaya di Atas Tanah Ulayat Kaum untuk Perlindungan Warisan Budaya di Kabupaten Agam kurang sesuai dengan perundang-Undangan yang belaku. Hal ini dikarenakan dalam proses penetapan, Pemerintah tidak melibatkan anggota kaum dalam melakukan pendaftran. Ini diketahui melalui wawancara yang dilakukan diketahui bahwa dalam hal pendaftaran dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dengan membentuk Panitia pendaftaran. Bahkan surat yang seharusnya diterima oleh pemilik Cagar Budaya berupa Surat Keterangan Status Cagar Budaya dan Surat Keterangan Kepemilikan berdasarkan Bukti yang Sah tidak diberikan oleh Pemerintah. Selain itu, ditemukan juga berbagai persoalan mengenai status tanah yang menjadi alas Cagar Budaya. Ini terbukti dengan tidak adanya proses pengembangan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh Pemerintah. Dengan kondisi yang tidak terawat tersebut menjadikan bagian-bagian fatal dari Rumah Gadang tersebut seperti atap, dinding, lantai, jendela, pintu, tiang dan bagian lainnya sudah tidak layak lagi dipergunakan. Selain itu, dengan status tanah yang merupakan Ulayat Kaum Pemerintah sulit untuk menyalurkan dana terhadap Cagar Budaya tersebut. Sehingga Cagar Budaya tersebut jauh tertinggal dari Cagar Budaya lainnya.

Kata Kunci: Penetapan, Benda Cagar Budaya, Tanah Ulayat Kaum dan Perlindungan Warisan Budaya

341
YOL
f

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG PENGAKUAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP YERUSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL DILIHAT DARI HUKUM INTERNASIONAL

Yola Gusri Yanifa, 1410111150, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 100 halaman, 2019

ABSTRAK

Amerika Serikat menjadi Negara pertama yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, sehingga menuai kecaman dari berbagai belahan dunia, karena dinilai menghambat upaya perdamaian yang dilakukan Timur Tengah dan pejuang perdamaian lainnya. Selain itu, pengakuan tersebut dinilai sebagai bentuk penentangan terhadap prinsip hokum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan : (1) Faktor pendorong Amerika Serikat member pengakuan terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel; (2) Legitimasi pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel menurut Hukum Internasional; (3) Dampak pengakuan tersebut terhadap status Palestina sebagai sebuah negara. Metode penulisan hukum yang penulis gunakan bersifat normatif, dimana penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, disebut sebagai penelitian hokum kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa : (1) Faktor-faktor yang mendorong Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel tidak terlepas dari pengaruh kelompok Yahudi yang mempunyai pengaruh besar dalam berbagai sektor penting Amerika Serikat seperti dalam persoalan politik, perekonomian, dan sosial. (2) Pengakuan Amerika Serikat ini pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun merupakan tindakan yang secara aktif mendukung pelanggaran terhadap Hukum Internasional terkait Yerusalem, seperti konsensus Internasional, prinsip-prinsip Hukum Internasional, dan resolusi PBB. (3) Status Palestina di mata Internasional belumlah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, dan dengan adanya pengakuan dari Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel maka akan semakin menghambat upaya Palestina mendapatkan haknya untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan negara lain.

345.08
YOL
p

PERANAN LEMBAGA PELAYANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (LPKTPA) KOTA PARIAMAN DALAM PENANGANAN DAN PEMBINAAN ANAK BERKONFLIK HUKUM

Yolanda Islamy 1510111059.Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV (Hukum Pidana. 82 Halaman.Tahun 2018.)

ABSTRAK

Lembaga Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (LPKTPA) Kota Pariaman merupakan bagian dari Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), yang melaksanakan penanganan kasus berupa bantuan hukum dan pembinaan yang bukan hanya kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan tetapi juga terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) mengatakan, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang hendak dibahas adalah 1.Bagaimanakah peranan yang dilakukan LPKTPA dalam menangani dan membina anak yang berkonflik dengan hukum? 2. Apa saja factor pendukung dan penghambat bagi LPKTPA dalam menangani dan membina anak berkonflik hokum ? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan anak berkonflik hukum, LPKTPA sudah melakukan perannya dengan baik dalam hal penanganan dan pembinaan anak berkonflik hukum. Pekerja sosial di LPKTPA dalam melakukan penanganan anak berkonflik hokum sudah berperan sebagaimana mestinya untuk pendampingan dan penyelesaian kasus sesuai dengan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, baik pendampingan dalam hal diversi maupun pendampingan untuk penyelesaian kasus di setiap tahap pemeriksaan perkara hingga pelaksaanaan putusan hakim. Dalam pelaksaanaan pembinaan anak berkonflik hukum, program-program yang telah dilakukan oleh LPKTPA bertujuan untuk pemenuhan hak-hak anak. Pemenuhan hak-hak anak ini telah dilakukan semaksimal mungkin dan sesuai dengan ketentuan hak-hak anak yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pembinaan anak berkonflik hukum, LPKTPA melakukan Rehabilitasi Sosial yaitu terapi psikososial, terapi mental dan spiritual, kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan vokasional, reunifikasi/reintegrasi dan terminasi. Yang menjadi factor pendukung bagi LPKTPA yaitu dukungan dan kerjasama dengan pihak lain dan perhatian masyarakat sekitar. Adapun yang menjadi factor penghambat yaitu kurangnya pekerja sosial professional, kurangnya dana lembaga, sarana dan prasarana kurang memadai dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat.

346.01
YOL
p

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENCABUTAN DAN PEMBATALAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR : STUDI PERKARA NOMOR 0057/PDT.P/2015/PA.BKT DAN 0182 /PDT.P/2016/PA.BKT

Yolanda Putri, BP 1510111038, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 64 hlm

ABSTRAK

Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar tercapainya tujuan perkawinan tersebut, maka pihak yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan salah satunya adalah syarat mengenai usia para pihak. Perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun. Dewasa ini marak terjadi perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang belum mencapai batas usia perkawinan. Hal ini terjadi karena beberapa hal atau faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut, salah satunya adalah batasan usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan adanya pengajuan Dispensasi Kawin ke Pengadilan. Permohonan Dispensasi Kawin juga ditemukan di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi dengan total 20 (dua puluh) perkara. Sebahagian besar permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar selalu dikabulkan oleh Majelis Hakim. Namun di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi ditemukan adanya satu perkara yang dicabut yaitu perkara Nomor 0057/Pdt.P/2015/PA.Bkt dan satu perkara yang dibatalkan yaitu perkara Nomor 0182/Pdt.P/2016/PA.Bkt. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Melalui penelitian diperoleh alasan- alasan dan pertimbangan Majelis Hakim dalam mencabut dan membatalkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kelas IB Bukittinggi.

Kata kunci : Pencabutan, Pembatalan, Dispensasi Kawin, Perkawinan dibawah Umur

346.08
YOS
p

PELAKSANAAN KERJASAMA BANCASSURANCE PT. BANK MUAMALAT DENGAN UNIT USAHA SYARIAH MANULIFE INDONESIA DALAM PEMASARAN PRODUK ASURANSI SYARIAH ZAFIRAH PROTEKSI SEJAHTERA

Yossiramah Sucia, 1510111167, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK II (Perdata Bisnis), 68 Halaman, 2019

ABSTRAK

Bancassurance merupakan aktivitas kerjasama bank dengan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi melalui bank. Kegiatan bancassurance berdasarkan prinsip syariah belum adanya ketentuan peraturan yang mengatur secara khusus sehingga masih mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia atau disingkat dengan SEBI No. 12/35/DPNP Perihal penerapan manajemen Resiko pada bank yang melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi(Bancassurance), yang berlaku pada bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional karena Fatwa DSN-MUI belum mengeluarkan pengaturan khusus terkait kegiatan bancassurance berdasarkan kerjasama bancassurance berdasarkan prinsip syariah dalam Peraturan Bank Indonesia. Pelaksanaan kegiatan usaha bancassurance bank muamalat sebagai bank syariah hanya menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh DSN-MUI yaitu Fatwa DSN –MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Pasal 10 (b) Undang-Undang Perbankan diatur bahwa bank tidak diperbolehkan melakukan usaha perasuransian. Pada penulisan ini penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu mengkaji teori- teori atau aturan-aturan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerjasama bancassurance dengan penerapan hukum yang ada. Perjanjian Kerjasama Bancassurance ini dilakukan dalam bentuk tertulis yang dilakukan oleh Direksi Bank Muamalat dengan Direksi Perusahaan Asuransi Manulife yang dilakukan dikantor Pusat Jakarta. Pelaksanaan kerjasama bancassurance dalam pemasaran produk ini terdapat beberapa kendala diantaranya permintaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan nasabah, apabila nasabah tidak membutuhkan asuransi yang ditawarkan oleh pihak bank, mengakibatkan turunnya permintaan produk dan menyebabkan kerjasama tidak dapat berlanjut karena dapat mempengaruhi sistem oprasional bank itu sendiri dan banyaknya peserta asuransi yang tidak memahami mengenai manfaat asuransi sehingga sering terjadinya klaim dari nasabah kepada pihak bank. Berdasarkan penelitian ini, perlu adanya ketentuan lebih lanjut mengenai regulasi dan pelaksanaan kegiatan bancassurance berdasarkan prinsip syariah untuk menghindari adanya pelanggaran prinsip syariah.

Kata Kunci : Asuransi Syariah, Kerjasama Bancassurance, Prinsip Syariah

344.06
YOV
p

PELAKSANAAN PELATIHAN KERJA PADA BALAI LATIHAN KERJA (BLK) PADANG DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN CALON TENAGA KERJA DI SUMATERA BARAT

Yovina Silvia, 1510112017, Fakultas Hukum, 121 halaman, 2019

ABSTRAK

Semakin sulitnya terserap tenaga kerja yang berpendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat kebawah sampai dengan yang tidak pernah merasakan pendidikan formal, khususnya di Provinsi Sumatera Barat membuat peran pemerintah pada lembaga Pelatihan kerja yaitu Balai Latihan Kerja (BLK) Padang di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) sebagai penyelenggara Pelatihan kerja tentu mempunyai dampak yang besar. Sasaran Pelatihan yaitu masyarakat yang kurang mampu, tidak melanjutkan sekolah dan putus sekolah yang semua biaya penyelenggaraannya ditanggung oleh pemerintah untuk dapat mengikuti Pelatihan kerja sehingga memiliki keahlian yang dapat menjembataninya untuk masuk kedalam dunia kerja. Evaluasi terhadap pelaksanaan Pelatihan yang telah diikuti sebelumnya dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan dinyatakan peserta lulus/kompeten dalam bidang/kejuruan yang telah diikutinya oleh LSP berdasarkan dari penilaian Pelatihan atau uji kompetensi Pelatihan yang telah dilaksanakan, maka memberikan nilai tambah baginya untuk dapat memasuki dunia kerja. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan Pelatihan kerja pada BLK Padang dalam meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat? 2) Apa yang menjadi kendala BLK Padang dalam menyelenggarakan Pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat?. Metode yang digunakan untuk penelitian adalah metode yuridis empiris, menggunakan jenis data primer dan data sekunder, sumber data didapat penulis dari penelitian kepustakaan dan lapangan, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa program Pelatihan diadakan tergantung dengan kejuruan yang ada, syarat yan harus dipenuhi calon peserta hanya KTP atau KK saat mendaftarkan diri, dan tidak ada batasan latar belakang pendidikan ataupun batasan umur bagi yang ingin mengikuti Pelatihan. BLK Padang berdiri sejak tahun 1969, data pada tahun 2017- 2018 terdapat sebanyak 2.480 peserta Pelatihan di BLK Padang, namun hanya 268 peserta yang terdata telah terserap dalam dunia kerja, diantara itu hanya 150 peserta yang bekerja sesuai dengan kejuruan/bidang Pelatihannya. Untuk mengetahui terserap atau tidaknya peserta dilakukan hanya dengan himbauan kepada peserta untuk melaporkan pekerjaannya kepada BLK Padang saat setelah lulus Pelatihan, melakukan pendataan terhadap para lulusan dengan menghubungi kontak mereka secara rutin dapat dilakukan oleh BLK Padang, karena jumlah lulusan yang dapat terserap dalam dunia kerja dapat menjadi ukuran keberhasilan bagi BLK Padang sebagai penyelenggara Pelatihan kerja.

Kata Kunci : Pelatihan Kerja, Balai Latihan Kerja, dan Tenaga Kerja.

345.08
YUL
p

PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PADANG

Yully Novita Sari, Nomor BP : 1310111233, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 59 halaman, 2018

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Anak saat ini sering sekali menjadi korban dari perbuatan tak manusiawi dan tak beradab ini. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak setidaknya telah memberikan perhatian secara normatif terhadap anak korban kekerasan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa hal ini merupakan tanggungjawab dari pemerintah untuk melindungi dan menanganinya. Secara lebih khusus PerDa Povinsi Sumatera Barat No.5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam Perda tersebut Pemerintah Daerah telah menunjuk suatu lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang untuk menyelenggarakan peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Padang. Permasalahan dari penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Padang 2). Apakah kendala-kendala yang dialami oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di kota padang 3).Bagaimanakah solusi terhadap kendala yang dialami Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Padang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan, yaitu penelitian yang objeknya langsung berasal dari P2TP2A Kota Padang dan beruapa data yang di dapat melalui wawancara dan informasi dari P2TP2A Kota Padang yang dilengkapi dan diperkuat dengan dokumen-dokumen yang ada di P2TP2A Kota Padang. Pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan yang di implementasikan dengan P2TP2A. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa peranan Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Padang dengan proses penyelesaian perkara yaitu: korban diidentifikasi, penanganan medis bagi korban yang mengalami luka-luka, proses rehabilitasi kesehatan, korban yang tidak mempunyai luka fisik dan diidentifikasi memerlukan konseling dan pemulihan psikis diberikan layanan rehabilitasi sosial dari proses konseling awal, konseling lanjutan, bimbingan mental dan spiritual serta pendampingan rujukan jika diperlukan, pemberian bantuan dan pendampingan hukum dari pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hingga selesai, dan terakhir pendampingan pemulangan atas keinginan dan persetujuan korban. Kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang yaitu: kualitas dan kuantitas pengelola , penganggaran dana serta sarana dan prasarana yang terbatas, dengan belum optimalnya perhatian kepala daerah. Solusi terhadap kendala yang dihadapi, ada beberapa starategi yang dilakukan P2TP2A Kota Padang yaitu: Mengoptimalkan kerjasama dan penguatan jejaring kemitraan terpadu yang melibatkan pemerintah, organisasi non pemerintah yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Kata kunci: perlindungan hukum, anak, korban, kekerasan seksual

348.3
ZIV
p

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DI KOTA PADANG DALAM MENEGAKKAN PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM DAN ASASLEGALITAS PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Ziva Maulia Volica Hosein, 1510111124, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60 Halaman, 2019

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum, setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law), sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusional bahwa setiap warga negara dan kedudukannya sama di depan hukum. Penulis memiliki dua rumusan masalah yang akan dibahas yaitu 1) Bagaimana peran LBH di Kota Padang dalam menegakkan prinsip-prinsip negara hukum berdasarkan asas persamaan di depan hukum dan asas legalitas pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 2) Apa kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang dalam memberikan bantuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan norma hukum yang berlaku dan menghubungan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan ditemui dalam penelitian. Dalam hasil penelitian dapat disimpulkan Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang dapat berperan dalam pemberian bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang adalah keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, verifikasi yang sulit. Upaya yang dilakukan oleh LBH di Kota Padang dapat dibagi menjadi dua bentuk pendampingan yaitu Litigasi dan Non Litigasi.

342
YUM
p

PRAKTIK JUDICIAL ACTIVISM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEMISAHAN KEKUASAAN

Yumni Nadhilah, 1510111002, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 78 halaman, 2019

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman yang menjalankan fungsi yudikatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya yaitu untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, lahir berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki kebebasan dalam melakukan interpretasi terhadap norma-norma Konstitusi yang didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Menariknya, Mahkamah Konstitusi sering mengeluarkan putusan yang kontroversial karena Hakim Mahkamah Konstitusi menerapkan doktrin judicial activism dalam putusannya. Judicial activism adalah suatu filosofi pengambilan putusan pengadilan dengan mengedepankan pandangan pribadi hakim sebagai dasar pertimbangan sehingga norma konstitusi ditafsirkan melampaui ketentuan- ketentuan kontekstual yang menjadi batas-batas prosedural dalam menafsirkan konstitusi. Sehingga hakim Mahkamah Konstitusi membuat hukum (judge making law) melalui putusannya. Praktik judicial activism dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak lazim dipraktikkan dalam negara dengan sistem civil law seperti Indonesia karena hakim Mahkamah Konstitusi dinilai telah melakukan diskresi yudisialnya yang bertentangan dengan prinsip bahwa hakim hanya dapat menjalankan fungsi untuk menerapkan hukum yang dibuat oleh para legislator. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimanakah praktik judicial activism dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi. Kedua, bagaimanakah implikasi praktik judicial activism dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap prinsip pemisahan kekuasaan? Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang, historis, dan konseptual. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada pengaturan yang melarang hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempraktikkan judicial activism. Hakim Mahkamah Konstitusi telah melakukan praktik judicial activism sejak awal dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang dibuktikan dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 sebagai putusan pertama yang memuat doktrin judicial activism. Praktik judicial activism dibutuhkan guna mengimplementasikan nilai-nilai dasar dari konstitusi secara progresif dan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Kaitannya dengan prinsip pemisahan kekuasaan, praktik judicial activism merupakan penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan mekanisme checks and balances terhadap Dewan Perwakilan Rakyat sebagai cabang kekuasaan legislatif yang berfungsi sebagai pembentuk undang-undang dalam sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia.

KUMPULAN ABSTRAK SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2020

342
ABD
p

PENINDAKAN TERHADAP KOSMETIK ILEGAL YANG BEREDAR DI KOTA PADANG OLEH BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI PADANG (STUDI KASUS TAHUN 2017-2018)

Abdi Kurniawan, 1610112016, Fakultas Hukum Universitas Andalas (Hukum Administrasi Negara, 69 Halaman, 2020)

ABSTRAK

Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM RI selaku badan yang dibentuk Presiden yang bertugas dalam pengawasan obat dan makanan memiliki kewenangan melakukan penindakan terhadap pelanggaran praturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan. Dalam pasal 4 huruf c Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada Badan POM dalam memberikan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku. Belakangan ini gaya hidup masyarakat yang mulai berubah dengan semakin konsumtif dalam beberapa hal membuat banyak oknum produsen dan distributor melakukan pelanggaran dalam bidang obat dan makanan salah satunya dalam produksi dan penjualan produk kosmetik ilegal yang kian marak dijumpai di masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan dalam penelitian ini, yang pertama adalah bagaimana upaya penindakan terhadap kosmetik ilegal yang beredar di kota padang oleh BBPOM di Padang, dan yang kedua adalah kendala apa yang dihadapi dalam menindak kosmetik ilegal yang beredar di kota padang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh: 1)upaya penindakan yang awal dilakuakan adalah upaya pre-emtif, upaya preventif, upaya resesif melalui operasi rutin dan operasi khusus dan penindakan langsung terhadap produk ilegal dengan penyitaan dan pemusnahan. Sesuai peraturan presiden Nomor 80 tahun 2017 pasal 4 huruf c penindakan juga memberikan sanksi administratif berupa surat peringatan. 2) hambatan yang dihadapi dalam menindak kosmetik ilegal yang beredar di kota Padang terdapat hambatan yuridis, non yuridis dan budaya hukum masyarakat sendiri.

Kata Kunci: Penindakan, Kosmetik, Badan POM RI

345
ADI
u

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DI WILAYAH HUKUM POLSEK PADANG SELATAN

Aditya Alif Pratama 1510111027, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 51 Halaman) Pembimbing Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.H dan Lucky Raspati, S.H., M.H

ABSTRAK

Pemalsuan mata uang sangat merugikan dan dapat mengganggu kestabilan ekonomi negara. Maka dari itu, pelaku pencetak uang palsu seharusnya dijatuhkan hukuman yang berat. Tindak pidana pemalsuan mata uang diatur dalam pasal 244 KUHP. Maraknya kasus uang palsu yang terjadi di Indonesia, salah satunya yang terjadi di kawasan Padang Selatan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menjawab : bagaimanakah upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan mata uang di wilayah hukum polsek Padang Selatan dan bagaimanakah upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan mata uang di wilayah hukum polsek Padang Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Empiris, dengan mencari data dengan langsung turun ke lapangan. Dari penelitian yang penulis lakukan di Polsek Padang Selatan, setiap kasus tindak pidana pemalsuan mata uang yang terjadi, yang tertangkap kebanyakan bukan orang yang membuat uang palsu itu sendiri, melainkan orang yang disuruh untuk mengedarkan atau membelanjakan uang palsu tersebut. Dalam melakukan upaya untuk memberantas tindak pidana pemalsuan mata uang tersebut, pihak Polsek Padang Selatan melakukan upaya Preventif dan Represif. Dalam melakukan upaya untuk memberantas tindak pidana pemalsuan mata uang, pihak kepolisian Padang Selatan terkendala karena : kebanyakan orang yang mencetak uang palsu tersebut selalu berpindah tempat setelah mengetahui informasi tertangkapnya orang suruhan tersebut, dan kurang atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberantas tindak pidana pemalsuan mata uang. Maka penulis memberi saran untuk masyarakat dan juga pihak kepolisian dapat bekerjasama dalam memberantas tindak pidana pemalsuan mata uang yang terjadi.

Kata Kunci : UPAYA KEPOLISIAN , TINDAK Pidana, Pemalsuan Mata Uang

345
SOF
p

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DI KOTA PADANG

Sofi Aprinda, 1610113108, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VII (Hukum Administrasi Negara, 72 Halaman, 2020

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, secara jelas menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak PNS yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tidak diberhentikan dengan tidak hormat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama bagaimana bentuk pelanggaran hukuman disiplin berat PNS di Kota Padang dan kedua bagaimana bentuk pelanggaran hukuman disiplin berat PNS di Kota Padang dan kedua bagaiman prosedur pemberhentian PNS terpidana tindak pidana korupsi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Kota Padang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik dan pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni: 1). Bentuk pelanggaran disiplin PNS yang dijatuhi oleh BKPSDM Kota Padang pada tahun 2017- 2019 sejumlah 57 kasus, dan pelanggaran yang paling sering dilakukan adalah pelanggaran yang mengakibatkan dijatuhkan hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. Terdapat 3 kasus PNS yang mendapatkan Pemberhentian Tidak dengan Hormat yang dikarenakan terlibat dalam tindak pidana korupsi. 2). Pemberhentian tidak dengan hormat PNS terpidana tindak pidana korupsi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Padang dilakukan membahas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap didalam Majelis Pertimbangan Pegawai dan kemudian Bidang P2IA BKPSDM Kota Padang mempersiapkan berkas pemberhentian tidak dengan hormat untuk diteruskan ke Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan agar peraturan mengenai Pemberhentian PNS beserta tata cara pemberhentian dapat dibuat serinci mungkin sehingga tidak menimbulkan kebingungan oleh pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan hukuman, melakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM agar menerbitkan data PNS yang dipidana karena tindak pidana korupsi, dan elakukan dengan segera pemblokiran data PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Pemberhentian tidak dengan hormat, Disiplin PNS, Tipikor.

344.03
VIO
p

PELAKSANAAN FUNGSI SERIKAT PEGAWAI DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN DISIPLIN BERAT DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA PADA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARAT

Vioni Fadhila Aryani, 1610111106, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 97 hlm., 2019

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serikat pekerja berfungsi sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Terkait dengan perjanjian kerja bersama, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) memiliki perjanjian kerja bersama yaitu Perjanjian Kerja Bersama antara PT. PLN (Persero) dengan Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Nomor 140-1.PJ/041/DIR/2010 dan Nomor DPP-002.PJ/SP-PLN/2010 Periode Tahun 2010-2012 (selanjutnya disebut PKB PLN) berserta lampiran dan addendumnya yang masih diberlakukan sampai saat ini. Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat (selanjutnya disebut PT. PLN (Persero) UIW Sumbar) terjadi pelanggaran terhadap peraturan disiplin berat yang terdapat dalam Lampiran PKB PLN tersebut. Dalam prosedur penyelesaian pelanggaran disiplin berat, serikat pekerja berfungsi sebagai tim investigasi dan tim advokasi. Serikat pekerja yang tercatat dan aktif pada PT. PLN (Persero) UIW Sumbar yaitu Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pegawai PT. PLN (Persero) UIW Sumbar. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi serikat pegawai dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin berat dalam perjanjian kerja bersama pada PT. PLN (Persero) UIW Sumbar? 2) Apa kendala yang dihadapi serikat pegawai dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin berat dalam perjanjian kerja bersama pada PT. PLN (Persero) UIW Sumbar?.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yaitu) Pelaksanaan fungsi DPD SP PT. PLN (Persero) UIW Sumbar sebagai tim investigasi dan tim advokasi dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin berat belum maksimal, karena sampai saat ini belum ada keputusan penjatuhan sanksi atau pembebasan dari dugaan pelanggaran disiplin. 2) Adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh DPD Serikat Pegawai PT. PLN (Persero) UIW Sumbar dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin berat periode 2018 yaitu terjadinya pergantian kepemimpinan, kurang terbukanya para pegawai yang menjadi terduga, dan PKB PLN yang sudah tidak memadai.

Kata Kunci: Fungsi, Dewan Pimpinan Daerah, Serikat Pegawai, Pelanggaran Disiplin Berat, Perjanjian Kerja Bersama, PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat.

345
ABD
t

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN KORBAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA (Studi Kasus Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2019/PN-Psb dan 79/Pid.Sus/2019/ PN-Psb)

Abdul Karim, 1610111120, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 147 halaman, tahun 2020

ABSTRAK

Anak merupakan anugerah dan titipan dari Allah SWT kepada setiap orang tua. Orang tua berkewajiban untuk melindungi, menjaga dan memenuhi hak-hak anak. Orang tua tidaklah menjadi pelaku kejahatan terhadap anaknya sendiri. Seperti yang terjadi di Pasaman Barat, orang tua menyetubuhi anak kandungnya sendiri. Perbuatan terdakwa Surya Adi dan Al Huda telah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan putusan pemidanaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan pidana dan pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana persetubuhan dengan korban anak yang dilakukan oleh orang tua (studi kasus putusan nomor 78/Pid.Sus/2019/PN-Psb dan 79/Pid.Sus/2019/PN-Psb). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan undang-undang (statuta approach). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari hasil penelitian, penerapan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan dengan korban anak yang dilakukan oleh orang tua dalam putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menerapkan pidana, hakim menggunakan asas lex sistematic spesialis. Pertimbangan hakim pada perkara nomor 78/Pid.Sus/2019/PN-Psb lebih cenderung kepada pertimbangan yuridis. Berbeda dengan perkara nomor 79/Pid.Sus/2019/PN-Psb, selain pertimbangan yuridis hakim juga memberikan pertimbangan non yuridis. Meskipun hakim telah mempertimbangkan secara yuridis dan non yuridis, namun putusan yang diberikan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan rasa keadilan bagi korban. Mempertimbangkan dampak fisik, psikis dan sosial yang akan diderita korban hingga akhir hidupnya, dan pelaku adalah orang tua kandungnya sendiri, maka seharusnya pelaku dihukum dengan hukuman yang maksimal.

Kata kunci: Putusan hakim, Persetubuhan, orang tua, anak korban, asas lex sistematic spesialis.

345
ABD
a

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DIIKUTI DENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA PUTUSAN NOMOR 70/Pid.B/2019/PN Pmn

Abdul Shiddiq Salim, 1510112142, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan dan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Menyadari betapa pentingnya peranan surat dakwaan, maka Jaksa Penuntut Umum diminta mampu menyusun surat dakwaan secara profesional, efektif, dan efisien guna mengoptimalkan tugas penuntutan. Kesamaan unsur Pasal 365 ayat (3) KUHP tentang delik pencurian dengan kekerasan dengan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang didahului, disertai, atau diikuti oleh suatu delik. Kesalahan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan bentuk surat dakwaan dan unsur pasal dapat menghambat ruang lingkup pemeriksaan Hakim di Pengadilan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan terhadap terdakwa kasus pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memutus dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan No. 70/Pid.B/2019 PN Pmn? Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif Normatif. Data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari wawancara dan data sekunder yang berasal dari literatur. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan Jaksa dari Kejaksaan Negeri Padang dan studi dokumen atau studi kepustakaan (library research). Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil : Dalam surat dakwaan Putusan No. 70 Pid.B/2019/PN Pmn Jaksa Penuntut Umum kurang tepat dalam pemilihan alternatif Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa karena kurang maksimal pada tahap pra penuntutan sehingga membatasi ruang lingkup pemeriksaan Hakim pada tahap pembuktian.

Kata kunci: Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum, Pertimbangan Hakim.

345
ADE
p

PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN BARANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Polda Sumatra Barat)

ADEK FERDIYAN, 1510111107, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2020

ABSTRAK

Memperdagangkan barang dagang yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan suatu tindak pidana yang mengakibatkan kerugian dalam hal pembangunan ekonomi. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang melakukan pembangunan dibidang ekonomi. Sehingga Indonesia menjadi salah satu sasaran tempat memperdagangkan barang dagang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Di provinsi Sumatra Barat sendiri peredaran barang dagang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) terjadi dalam skala yang besar. Direktorat Reserse khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatra Barat KBP Arly Jembar Jumhana mengatakan "kami sudah melakukan penangkapan tindak pidana peredaran barang dagang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebanyak 2 (dua) kasus dengan jumlah barang bukti dengan skala yang besar pada 4 tahun terakhir" yaitu, Kasusnya Besi tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 6000 batang pada tahun 2018, 30 ton gula kemasan illegal tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1)Bagaimanakah peran Polri dalam menaggulangi tindak pidana peredaran barang dagang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di wilayah hukum Polda Sumatra Barat ? 2)Apakah faktor yang menghambat upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana peredaran barang dagang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di wilayah hukum Polda Sumatra Barat ?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di peroleh hasil yakni : 1. Peran Polri dalam menaggulangi tindak pidana peredaran barang dagang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) di wilayah hukum Polda Sumatra Barat yaitu dalam bentuk tindak upaya represif berupa melakukakan mensegel PT Sumber Baru. 2. Faktor yang menghambat upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana peredaran barang dagang tidak memenuhi SNI di wilayah hukum Polda Sumatra Barat adalah faktor sarana dan prasarana karena tidak teralokasinya anggaran dana yang memadai untuk kepentingan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamanan dan penghitungan barang bukti yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

343.09
ADI
p

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG DALAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS MASYARAKAT SECARA INKUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS

ADINDA INDAH RAHAYU, BP 1610111fft8. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK WI (Hukum Administrasi Negara).84 Halaman. Tahun 2020

ABSTRAK

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang melaksanakan tugas pelaksana:m pengurangan risiko beneana inklusif berpedoman pada Peraturan Kepala Badan nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana. Dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas, kebijakan, progmm dan kegiatan dalam semua aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib menyediakan kemudahan akses dan mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas melalui pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas dilaksanakan melalui layanan pendidikan baik formal maupun informal, dan latihan-latihan, simulasi dan geladi bencana. Namun hal ini belum dilakukan secara menyeluruh, sistematis dan terstruktur. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lanjutan yang lebih menyeluruh dan terpadu dalam segi perencanaan dan aturan terkait, Berdasarkan alasan diatas akan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, Bagaimana Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Dalam Peningkatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat Secara Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas? Kedua, Apa kendala yang dihadapi oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah kota Padang dalam Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana Inklusif serta bagaimanakah solusi untuk mengatasi kendalatersebut? Dalam penelitian ini bersifat Deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan dapat mernperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan'. Pertama. pelaksanaan upaya peningkatan kapasitas pengurangan risiko inklusif bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan, penl,uluhan, sosialisasi, simulasi, geladi bencana. Kedua, Kendala yang dihadapi oleh BPBD kota Padang dalam upaya peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana inklusif bagi penyandang disabilitas yaitu: terbatasnya aturan, kurangrya proaktivitas pemerintah, minimnya sarana dan prasaran4 dan kurangnya perkembangan Unit Layanan Disabilitas (tlLD) Sedangkan upaya dalam menanggulangi kendala yaitu: perkuatan aturan dan kapasitas kelembagaan, pelatihan rutin secara berkala, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Risiko Bencana

343.02
ADI
p

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN MENJADI LAHAN USAHA DI KECAMATAN SUNGAI TARAB

Aditya Mufthi Abdillah, 1410111100, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 56 halaman, 2020

ABSTRAK

Alih fungsi lahan produktif hijau pertanian menjadi bangunan usaha banyak terjadi di beberapa wilayah Indonesia, salah satunya di Kabupaten Tanah Datar. Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Tanah Datar terjadi di Kecamatan Sungai Tarab, dimana lahan produktif pertanian pangan (sawah) dialih fungsikan menjadi cafe, salah satunya cafe Chanta. Alih fungsi lahan pertanian di Kabubaten Tanah Datar telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No. 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011- 2031 Pasal 4 ayat 5 huruf a "Membatasi alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman terutama pertanian lahan basah dengan menetapkan sawah beririgasi teknis sebagai lahan pertanian yang berkelanjutan". Alih fungsi lahan produktif hijau sektor pertanian menjadi bangunan usaha pada kenyataannya terjadi di Kecamatan Sungai Tarab. Rumusan Masalah: 1.Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam alih fungsi lahan pangan menjadi lahan usaha di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. 2. Bagaimana bentuk penegekan hukum dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi lahan usaha di kecamatan sungai tarab, kabupaten tanah datar. Pengendalian lahan pertanian merupakan salah satu kebijakan nasional yang strategis untuk tetap memelihara industri pertanian primer dalam kapasitas penyediaan pangan, dalam kaitannya untuk mencegah kerugian sosial ekonomi dalam jangka panjang mengingat sifat multi fungsi lahan pertanian. Dalam pemanfaatan lahan pertanian selalu dikalahkan oleh peruntukan lain seperti industri dan perumahan, yang mana laju alih fungsi lahan pertanian tersebut dari tahun ke tahun diperkirakan mencapai ratusan ribu hektar pertahun. Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan dampak langsung dan tidak langsung yang sangat besar. Agar pengendalian terhadap upaya alih fungsi lahan pertanian dapat efektif dan efisien di wilayah Kabupaten Tanah Datar, maka ditawarkan strategi sebagai berikut: Kebijakan pemerintah yang pro rakyat, Instrumen Hukum dengan sanksi yang berat bagi pelanggar, Instrumen Ekonomi, Instrumen Sosial dan Politik, Instrumen Pendidikan dan IPTEKS, Demi mengoptimalkan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif dapat juga dengan menerapkan sanksi-sanksi baik berupa administratif maupun pidana yang terdapat dalam Pasal 70 ayat (2) Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam kasus pengalihan fungsi lahan pangan berupa lahan sawah ini adalah pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis, sesuai dengan pasal 70 ayat (2) poin 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hingga saat ini belum ada langkah selanjutnya dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar terkait kasus pengalihan fungsi lahan pangan ini.

Kata Kunci : Alih Fungsi, lahan pangan, lahan usaha

347.0752
ADZ
k

KENDALA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI POLRES DHARMASRAYA

Adzhanil Prima Septy, 1510112185, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika telah menjadi permasalahan yang harus diberantas secara masif di Indonesia. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memusnahkan barang bukti narkotika pada tahap penyidikan. Penyidik BNN diberi wewenang untuk memusnahkan barang bukti narkotika tertera dalam Pasal 75 huruf k UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dilakukan sebelumnya harus ditetapkan status terhadap barang bukti tersebut oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya untuk dimusnahkan. Penelitian ini mendeskripsikan kewenangan penyidik kepolisian negara republik indonesia dalam memusnahkan barang bukti narkotika dan kendala yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Dharmasraya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, yaitu uraian yang penulis lakukan terhadap data yang terkumpul dan dilihat secara utuh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian ini diketahui 1. Pengaturan mengenai kewenangan penyidik kepolisian negara republik indonesia untuk memusnahkan barang bukti narkotika diatur dalam Pasal 26 PP Nomor 40 Tahun 2013 dan Pasal 21 Perkap Nomor 10 Tahun 2010 2. Kendala dalam memusnahkan barang bukti narkotika adalah barang bukti narkotika yang disita belum signifikan dan menurut pertimbangan Kejaksaan Negeri Dharmasraya belum layak untuk ditetapkan dimusnahkan, tidak mempertimbangkan pasal 45 ayat (1) jo ayat (4) KUHAP, dan Kejaksaan Negeri Dharmasraya tidak memperhatikan Surat Edaran Jaksa Agung nomor 018 tahun 2015 tentang penanganan terhadap barang bukti narkotika dan prekursor narkotika. Seharusnya kewenangan penyidik kepolisian negara republik indonesia harus diperjelas dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyidik dan Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya mempertimbangkan pasal 45 ayat (1) jo ayat (4) dan khusus untuk kejaksaan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 018 tahun 2015 dalam menangani barang bukti narkotika, supaya barang bukti narkotika tidak disalahgunakan oleh oknum aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Pemusnahan, barang bukti, narkotika dan penyidik

343.02
AFI
p

PERTANGGUNGJAWABAN INDUK PERUSAHAAN TERHADAP PERBUATAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Afif Setia Budi, 1510112015, Fakultas Hukum, 2020, 95 halaman

ABSTRAK

Perusahaan grup atau juga dikenal dengan konglomerasi merupakan salah satu trend bisnis yang perkembangannya begitu pesat. Tanggung jawab hukum merupakan permasalaha terbesar dalam praktek perusahaan grup. Permasalahaan ini muncul akibat belum adanya aturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang perusahaan grup, sehingga memunculkan celah hukum tersendiri dari diberlakukanya hukum perseroan yaitu UU No. 40 Tahun 2007 yang notabennya diperuntukan untuk perseroan tunggal dalam mengatur keterkaitan induk dan anak perusahaan pada perusahan grup. Tergabungnya anak perusahaan dalam perusahaan grup tidaklah menghapuskan status badan hukum anak perusahaan yaitu sebagai subjek hukum mandiri. Induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan, disisi lain induk perusahaan yang merupakan pemegang saham anak perusahaan mendapatkan kewenanagan untuk mengendalikan dan mengoordinasikan anak-anak perusahaan untuk mencapai tujuan kolektif dari perusahaan grup. Tidak hanya itu induk perusahaan juga mendapatkan keuntungan dengan berlakunya prinsip limited liability. Dalam beberapa kasus, doktrin hukum seperti piercing the corporate veil, Altrego maupun instrumentality mengalami kegagalan untuk membebani tanggung jawab hukum kepada induk perusahaan yang menjalankan peran sebagain pimpinan sentral perusahaan grup terhadap ketidakmampuan anak perusahaan untuk menyelesaikan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Dengan demikian, timbul permasalahan yaitu: Bagaimana hubungan hukum induk dan anak perusahaan dalam perusahan grup? Bagaimana tanggung jawab induk perusahaan terhadap perbuatan hukum anak perusahaan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan berpedoman kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa hubungan antara induk dan anak perusahaan dalam perusahaan grup merupakan hubungan antara induk perusahaan sebagai pemegang saham dengan anak perusahaan sebagai perseroan yang berbadan hukum mandiri. Selain itu dalam urusan pertanggungjawaban hukum induk perusahaan hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang ia miliki di dalam anak perusahaannya, induk perusahaan dapat dibebani tanggung jawab melebihin nilai sahamnya apabila induk perusahaan terbukti melanggar ketentuan pada Pasal 3 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Disarankan agar pemerintah membuat peraturan perundang-undangan khusus mengenai perusahaan grup, agar dapat menjamin keadilan bagi segala pihak terkait serta menghindai dominasi tanpa tanggung jawab.

Kata Kunci : Perusahaan Grup, Induk Perusahaan, Anak Perusahaan, Tanggung Jawab Hukum.

348.04
AGE
a

ANALISIS TERHADAP ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KE PENGADILAN NEGERI PADANG

Agesti Nurul Rezano, 1610112090, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016, 86 Halaman

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) dibentuk di Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari pelaku usaha. Melindungi konsumen dari sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. UUPK membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha di luar pengadilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang dilakukan secara mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase secara sukarela dari para pihak yang bersengketa. Putusan majelis bersifat final dan mengikat tetapi Pasal 56 ayat (2) UUPK menyatakan para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan. Perkara terbaru di Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2019 yang sudah diputus ada 3 perkara yaitu Perkara No. 15/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Pdg, Perkara No. 29/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Pdg, Perkara No. 92/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN. Pdg. 3 perkara diatas mengeluarkan putusan Pengadilan Negeri Padang yang membatalkan putusan BPSK Kota Padang tersebut. Dapat dilihat bahwa BPSK dalam memutus perkara tidak memperhatikan kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa konsumen para pihak sehingga diajukannya keberatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa yang menjadi pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menerima perkara untuk diselesaikan? 2) Apa yang menjadi alasan pengajuan upaya keberatan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh pemohon keberatan? 3) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan upaya keberatan di Pengadilan Negeri Padang? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil 1) Syarat untuk diselesaikan BPSK itu terpenuhi unsur pelaku usaha dan unsur konsumen. 2) Alasan pengajuan keberatan adalah BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa perjanjian yang disebabkan oleh cidera janji/wanprestasi yang merupakan kewenangan dari pengadilan negeri. 3) Pertimbangan hakim dalam perkara keberatan adalah hakim melihat pada perjanjian yang mengikat para pihak karena perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya.

Kata Kunci: BPSK, Sengketa Konsumen, Putusan Pengadilan

341
AGU
p

PENOLAKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGEKTA ARBITRASE INTERNASIONAL DITINJAU DARI CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARD (KONVENSI NEW YORK 1958)

Agung Prasetyo Azrun, 1410112096, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 93 halaman, 2020

ABSTRAK

Hubungan internasional antara subyek hukum internasional tidak selamanya berjalan dengan baik. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menuntut para pihak harus melaksanakan putusan dengan itikad baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaturan penolakan putusan arbitrase internasional dalam konvensi New York 1958 dan apa upaya yang dapat dilakukan terhadap penolakan putusan arbitrase internasional oleh salah satu pihak yang bersengketa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif yang memberikan gambaran secara analitis dan sitematis terhadap permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh. Pendekatan penelitian menggunakan konvensi, undang-undang dan contoh kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara studi kepustakaan. Pengaturan penolakan putusan arbitrase internasional terdapat dalam pasal V Konvensi New York 1958 sedangkan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 1999. Putusan arbitrase internasional bersifat “final and binding” menurut konvensi ini dan tidak mengatur upaya banding, sehingga sudah sangat jelas tidak ada upaya yang dapat dilakukan terhadapnya dan putusan harus dilaksanakan tanpa adanya penundaan.

Kata kunci : Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional, Penolakan Putusan Arbitrase Internasional, Konvensi New York 1958.

341.62
AGU
d

DUGAAN PELANGGARAN HUKUM HUMANITER DALAM PERANG ANTARA KOALISI ARAB SAUDI MELAWAN KELOMPOK HOUTHI DI YAMAN BERDASARKAN AZAS DISTINCTION PRINCIPLE

Agung Setiabudi, 1410111104, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2019, 52 Halaman

ABSTRAK

Hukum Humaniter Internasional dirancang untuk memastikan perlindungan minimal bahkan yang paling besar dalam perang dan mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip kemanusiaan, perang atau konflik yang terjadi di Yaman berlangsung sejak tahun 2011 telah memakan banyak korban dari penduduk sipil. Salah satu cara untuk melindungi penduduk sipil dalam suatu perang atau konflik yaitu dengan cara menegakkan prinsip pembedaan. Prinsip pembedaan memiliki tujuan utama untuk melindungi penduduk sipil dengan cara membedakan antara penduduk sipil dan kombatan. Penulis disini membahas tentang dugaan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh Koalisi Arab Saudi dengan kelompok Houthi di Yaman berdasarkan prinsp pembedaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan serta menggunakan penelitian sinkronisasi hukum positif dengan sifat penelitian deksriptif analitis yaitu penelitian dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi. Kemudian peneliti menggunakan data sekunder sebagai data utama dalam menyusun serta menganalisis permasalahan yang ada. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Hukum Humaniter Internasional secara tegas dan jelas memberikan pengaturan mengenai perlindungan kepada penduduk sipil diatur pada Konvensi Jenewa 1949 khususnya pada pasal 27 sampai 34 dan Protokol Tambahan I tahun 1977 pasal 48 mengenai pembedaan penduduk sipil dan kombatan, pasal 52 mengenai perlindungan obyek sipil dan obyek yang boleh diserang. Dalam konflik tersebut dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak koalisi Arab terhadap Houthi telah menewaskan warga sipil sebanyak 10.000 korban jiwa. Selain menyerang warga sipil pihak koalisi arab juga menghancurkan berbagai fasilitas sipil diantaranya 14 bandara, 10 pelabuhan, 512 jembatan, 125 pembangkit listrik, 164 tangki air, 167 stasiun komunikasi. Hal tersebut menandakan bahwa perlindungan warga sipil tidak terlaksana secara maksimal. Maka dari itu sangat dibutuhkan kesadaran dari para pihak untuk mengedepankan prinsip pembedaan sehingga dapat meminimalisir kerugian nyawa maupun fasilitas umum.

Kata Kunci : Hukum Humaniter Internasional, Prinsip Pembedaan, Perlindungan Penduduk sipil dan Obyek sipil, Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, Yaman

348.3
AGU
i

IMPLIKASI RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB No A/HRC/19/41 TAHUN 2011 TERHADAP KEDAULATAN NEGARA DALAM MENENTUKAN ATURAN-ATURAN HUKUM NASIONAL TENTANG LGBT (studi kasus penerapan aturan hukuman mati pada pelaku LGBT di Brunei Darussalam).

Agung Wanandri, 1510112139, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 hlm, 2020

ABSTRAK

Keberadaan kaum Lesby Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) sudah sejak lama menjadi perhatian dunia dalam perlindungan Hak Asasi Manusia. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Hak Asasi LGBT. Resolusi memberi rekomendasi-rekomendasi pada setiap negara anggota PBB akan pentingnya memberikan perlindungan atas tindakan diskriminatif terhadap kaum LGBT. Resolusi mendapat tentangan dari negara-negara yang tidak mengakui adanyanya resolusi ini. Brunei Darussalam dalam Syariah Penal Code Order 2013 memuat penerapan hukuman mati terhadap pelaku lgbt dinegaranya. Penerapan ini mendapat kecaman dari beberapa pihak dunia internasional yang menganggap bahwa Brunei Darussalam melanggar hak asasi manusia saat ingin menerapkan hukum syariah dan mendapatkan kecaman oleh masyarakat Internasional. Brunei Darussalam menunda pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku LGBT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya kekuatan mengikat suatu Resolusi Majelis Umum PBB itu hanya bersifat rekomendasi dan deklarasi. Tertuang pada pasal 10 Piagam PBB yang menjelaskan bentuk daya ikatnya berupa rekomendasi- rekomendasi. Suatu resolusi tersebut juga tidak bisa di jadikan suatu hukum primer yang bisa berdiri sendiri tetap hanya bersifat sebagai suatu hukum sekunder atau tambahan. Pada daya ikat Resolusi Majelis Umum PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Hak Asasi LGBT tersebut kepada Brunei Darussalam hanya bersifat rekomendasi dan tidak adanya sanksi terhadap Brunei Darussalam. Penundaaan hukuman mati tersebut juga bukan akibat daya ikat resolusi Melainkan karena desakan dunia internasional dan faktor politik ekonomi.

Kata kunci: Resolusi Majelis Umum, Piagam PBB, LGBT, Brunei Darussalam

343.02
AGU
p

PENGAWASAN IZIN PRAKTIK AKUPUNKTUR TERAPIS DI KOTA PADANG

Agustin, 1610111139, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 73 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Praktik Akupunktur Terapis merupakan salah satu pengobatan tradisional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang keterampilannya didapat melalui pendidikan/pelatihan akupunktur. Praktik ini banyak digunakan oleh masyarakat sebagai alternatif untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah tanpa melakukan operasi. Negara bertanggungjawab memberikan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Daerah Sumatera Barat khususnya Kota Padang masih banyak terdapat praktik akupunktur terapis yang berani belakukan pengobatan medis tanpa memiliki izin. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pengawasan izin praktik akupunktur terapis di Kota Padang apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis serta apa sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Padang terhadap Akupunktur Terapis yang melanggar di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu dengan menganalisis masalah yang ada dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku tentang Pengawasan Izin Praktik Akupunktur Terapis di Kota Padang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu melalui wawancara dan studi dokumen. Penelitian dilakukan pada Dinas Kesehatan Kota Padang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Izin Praktik Akupunktur Terapis di Kota Padang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang dan menggunakan Peraturan Meteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis, pengawasan secara berkala dilakukan 3 (tiga) kali dalam setahun menggunakan daftar checklist dengan melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Organisasi Profesi. Pengawasan diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan akupunktur, keselamatan pasien/klien, dan melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Bagian yang mengawasi pada Dinas Kesehatan Kota Padang yaitu Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional. Praktik Akupunktur ada 17 (tujuh belas) praktisi kemudian yang berizin ada 10 (sepuluh) dan yang tidak berizin ada 7 (tujuh) di Kota Padang. Pemerintah melarang Akupunktur Terapis melakukan praktik diluar izin dan melakukan praktik tanpa izin. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Kesehatan Kota Padang terhadap praktik akupunktur yang tidak memiliki izin dengan cara memberi sanksi administratif berupa teguran lisan/tulisan, penghentian kegiatan sementara, dan larangan melakukan pekerjaan sebagai pengobat akupunktur.

Kata Kunci : Pengawasan, Izin, Praktik Akupunktur

347.05
AHM
p

PELAKSANAAN PENGGUNAAN SURAT KUASA JUAL TERHADAP TANAH YANG TELAH DIJADIKAN JAMINAN HUTANG

AHMAD FACHRI, 1410112063, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK I (Hukum Perdata Murni) 54 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Pemberian kuasa pada masa sekarang ini sangatlah diperlukan, mengingat dinamika dan mobilitas anggota masyarakat yang terus berkembang. Melalui perantara seseorang dapat diwakili oleh orang lain dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Hal mewakili dewasa ini dianggap sudah lumrah dilakukan. Pemberian kuasa untuk menjual merupakan salah satu bentuk akta kuasa yang sering dijumpai di masyarakat. Pembuatan akta kuasa menjual dalam bentuk akta notaris merupakan suatu hal yang tidak asing dalam praktek notaris sehari-hari. Pemberian kuasa jual yang mengikuti suatu perjanjian utang piutang, perlu kajian yuridis lebih lanjut, mengingat konstruksi hukum dalam perjanjian utang piutang ini adalah, apabila debitor wanprestasi, maka kreditor berdasarkan kuasa jual yang telah diberikan kepadanya akan menjual obyek jaminan tersebut untuk mengambil pelunasan piutangnya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam peneltian ini adalah Apa Alasan Dibuatnya Kuasa Jual dan Bagaimana Pola Penjualan Objek Tersebut Menggunakan Surat Kuasa Jual. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian kuasa menjual untuk menjamin pelunasan utang pihak kreditur apabila debitor wanprestasi tidak dapat dilakukan mengingat hal tersebut mengandung resiko hukum bagi para pihak, khusus pemberi kuasa mengingat dengan kuasa menjual tersebut penerima kuasa dapat menjual setiap saat obyek kuasa terlepas dari terjadinya wanprestasi atau tidak. Sehingga hal ini tidak dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Oleh karena itu Notaris akan menolak untuk membuatkan suatu kuasa menjual.yang berkaitan dengan perjanjian utang piutang. Kuasa menjual dapat diberikan untuk mengeksekusi obyek Hak Tanggungan secara penjualan di bawah tangan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah. Perlindungan hukum bagi pemberi kuasa dalam pembuatan kuasa menjual dapat diberikan apabila akta kuasa menjual tersebut dibuat dalam suatu akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna.

Kata kunci: Kuasa Jual, Hak Tanggungan.

345.02
AHM
p

PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENYIDIK DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA PARIAMAN

Ahmad Fahmi, 1510111152, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana) 68 Halaman, 2019

ABSTRAK

Korupsi merupakan masalah serius, sebagai suatu kejahatan yang luar biasa, tindak pidana korupsi seakan menjadi suatu kebiasaan. Praktek korupsi yang semakin meningkat dengan pola yang lebih sistematis dan cangggih, sehingga perlu upaya yang serius dalam penanganan terhadap kasus korupsi tersebut. Dalam suatu pemberantasan tindak pidana korupsi, tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting yang harus dilalui untuk menuju suatu pembuktian dalam tindak pidana. Di dalam tahap penyidikan ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang mana penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian, KPK dan Kejaksaan. Oleh sebab itu penelitian ini memmbahas mengenai Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Sebagai Penyidik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Kota Pariaman. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Kepolisian sebagai penyidik kasus tindak pidana korupsi di Kota Pariaman 2) Apakah kendala yang di hadapi Kepolisian dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana korupsi di Kota Pariaman 3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk mengatasi masalah dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi di Kota Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Untuk proses penyidikan tindak pidana korupsi sendiri, sama seperti tindak pidana pada umumnya, hanya saja dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang berwenang melakukan penyidikan adalah institusi yang mendapat laporan atau yang melakukan penyidikan terlebih dahulu. Kendala- kendala yang dihadapai oleh Kepolisian dalam melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidan korupsi di Kota Pariaman adalah 1) kurangnya personil dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam melakukan penyidikan 2) kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan penyidikan 3) Kurang terbukanya saksi dan masyarakat dalam memberikan informasi. Maka saran penulis yaitu 1) Menambah personil dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 2) Menambah dan meningkatkan sarana dan prasarana 3) Melakukan pendekatan yang baik terhadap para saksi dan masyarakat agar dalam menacari informasi saksi bisa lebih terbuka.

Kata Kunci: Kewenangan Kepolisian, Penyidik dan Tindak Pidana Korupsi.

345
AHM
u

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA BALAP LIAR YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG

Ahmad Fauzi, 1610111138, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 51 halaman, 2020

ABSTRAK

Secara umum balapan liar adalah kegiatan memacu kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda dua dijalan raya tanpa adanya perlengkapan keselamatan yang dapat membahayakan pengemudinya dan orang lain di sekitar. Indonesia melalui Pasal 115 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah memberikan larangan tentang balapan liar yang berbunyi "Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain" dan pada pasal 297 disebutkan "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan sebagaimana dalam pasal 115 huruf b di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Upaya kepolisian sangat diperlukan dalam mewujudkan ketertiban sebagaimana peran Kepolisian sangat penting dalam bidang pemeliharaan, keamanan, ketertiban, penegakan hukum, pelindung dan pengayom masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu: 1) bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi balapan liar yang dilakukan oleh remaja 2) apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat bagi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana balap liar yang dilakukan oleh remaja dan bagaimana koordinasi kepolisian dengan pihak terkait dalam penanggulangan balapan liar. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polresta Padang, metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Skripsi ini bertujuan mengetahui bagaimana upaya-upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana balap liar yang dilakukan oleh remaja. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah diketahui bahwa upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana balap liar sangat penting dikarenakan banyaknya angka balapan liar yang terjadi di kota Padang yang dapat membahayakan pengguna jalan lain dan masyarakat sekitar sehingga upaya kepolisian ini juga harus disertai dengan dukungan masyarakat agar lancarnya kepolisian dalam menindak para pelaku balap liar agar terciptanya kehidupan yang tentram, nyaman dan tertib sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga kepolisian.

Kata Kunci: Kepolisian, Balap Liar, Remaja

343.02
AKB
p

PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KAWASAN HUTAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Akbar Rivandi Mata, 1310112140, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 99 halaman, 2020

ABSTRAK

Sebagai suatu kekayaan alam bangsa indonesia yang merupakan anugerah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, hutan memiliki peranan penting dan strategis dalam aspek pembangunan dan keberlangsungan hidup bangsa indonesia, yaitu sebagai penyangga sistem kehidupan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, hutan haruslah dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat indonesia. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan haruslah memperhatikan aspek lingkungan agar kelestarian hutan dapat terjaga. Pemanfaatan hutan untuk kegiatan diluar kehutanan salah satunya adalah pertambangan. Bahan-bahan mineral dan batubara yang dibutuhkan untuk kepentingan industri dan pertambangan juga terdapat sebagian berada dalam kawasan hutan. Praktek pertambangan tentunya sangat berpengaruh pada kelestarian hutan tersebut. Oleh karena itu pemberian izin usaha pertambangan yang berada dalam kawasan hutan haruslah dilaksanakan secara selektif agar dapat meminimalisir kerusakan yang berdampak pada lingkungan baik secara langsung maupun jangka panjang. Masalah pokok pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana penetapan wilayah pertambangan dalam kawasan hutan di Sumatera Barat 2. Bagaimana proses pemberian izin usaha pertambangan dalam kawasan hutan di Sumatera Barat dan 3. Bagaimana perolehan tanah untuk kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa penetapan wilayah pertambangan dalam kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat hanya mengacu pada peta wilayah pertambangan Pulau Sumatera, tidak ada perbedaan dalam penetapan wilayah pertambangan yang termasuk kawasan hutan maupun yang bukan kawasan hutan. Prosedur pemberian izin usaha pertambangan dalam kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan, dan izin usaha pertambangan yang telah diberikan tidak dapat dijalankan apabila belum melakukan pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan. Dan perolehan tanah untuk kegiatan pertambangan yang berada dalam kawasan hutan bersandarkan kepada izin pinjam pakai kawasan hutan.

348.04
AKH
p

PENYELESAIAN SENGKETA PINJAMAN MACET AKIBAT ANGGOTA WANPRESTASI DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) BHAKTI HUSADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Akhyar Fauzan, 1610111009 Fakultas Hukum Universitas Andalas 2020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penyelesaian sengketa pinjaman macet akibat anggota wanprestasi di (KPRI) Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota. Pinjaman yang dilakukan di KPRI Bhakti Husada menggunakan formulir yang dijadikan perjanjian oleh para pihak sebagai dasar untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Kasus dalam penelitian ini adalah mengenai anggota macet yang mutasi dan pensiun. Pinjaman macet diketahui ketika pembayaran yang dilakukan atau sistem pemotongan gaji yang dilakukan oleh pihak KPRI Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak bisa dilakukan, dan iktikad baik anggota dalam membayar tidak pula ada, sehingga berujung kepada pinjaman macet. Penulis meneliti dan mengkaji apa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yang berujung pada pinjaman macet dan bagaimana proses penyelesaian sengketa pinjaman macet yang terjadi akibat anggota wanprestasi di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, sifat penelitian besifat deskriptif dengan sumber yang berasal dari studi langsung di lapangan dan studi kepustakaan, dengan jenis datanya yaitu data primer dan sekunder. Adapun yang mejadi sampel dari penelitian penulis adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, studi lapangan dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan di Koperasi KPRI Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota didapat kesimpulan sebagai berikut : pertama, adapun faktor yang menyebabkan pinjaman macet adalah mutasi dan pensiun karena pemotongan gaji tidak bisa dilakukan dan juga iktikad baik anggota dalam mambayar tidak ada. Kedua, penyelesaian pinjaman macet mengenai mutasi yaitu dilakukan pertama dengan surat peringatan yang terdiri dari surat peringatan satu, dua dan tiga, selanjutnya pendekatan secara lisan, surat fasilitasi pembayaran, surat peingatan jatuh tempo Adapun cara penyelesaian anggota macet yang pensiun yaitu yang pertama diberitahu melalui telfon/sms/wa paling lama 3 (tiga) bulan, apabila tidak ada juga tanggapan maka ditarik simpanan anggota tersebut dan langsung di reschedule dibukukan sebagai pinjaman baru dan apabila terdapat sisa hutang dan tidak dibayarkan maka sisa hutang menjadi tanggung jawab ahli waris jika yang bersangkutan meninggal dunia.

345
ALD
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (ONLINE) (Studi di Polresta Padang)

Aldi Azhari, 1410112135, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 84 hlm, 2020

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti dan diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang makin canggih dan berkembang pesat. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan dengan menggunakan media elektronik (online) sebagai alat yang digunakannya. Kondisi ini dapat mendorong terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik (online). Untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan melalui media elektronik (online) diperlukan suatu upaya penegakan hukum tindak pidana, salah satunya pada tahap penyidikan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik (online) oleh Kepolisian Resor Kota Padang dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik (online) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang. Metode yang gunakan adalah metode yuridis sosiologis, dimana pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengan praktek di lapangan. Analisis data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik (online) oleh Kepolisian Resor Kota Padang dilakukan sama dengan tahapan proses penyidikan pada umumnya yaitu dalam KUHAP dan UU ITE dan perubahannya, namun terdapat perbedaan dan teknis khusus yang dilakukan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan, yaitu penyidik meminta bantuan ahli it dari Kominfo Pusat dan instansi-instansi terkait untuk membantu penyidik dalam proses pelaksanaan penyidikan. Kendala yang dihadapi di dalam penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik (online), yaitu sulitnya melacak juga mengungkap identitas si pelaku dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu dari nomor telepon, nomor rekening bank, dan sarana prasarana lain yang digunakan. Sulitnya membuka identitas nomor rekening pelaku karena perizinan birokrasi perbankan dan memerlukan waktu yang lama dalam prsosedur perizinan. Keterbatasan alat-alat khusus dan fasilitas yang dimiliki oleh Polresta Padang untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam melakukan penyidikan. .

Kata Kunci: Pelaksanaan Penyidikan,Tindak Pidana,Tindak Pidana Penipuan, Media elektronik (online)

345
ALD
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH APARAT SATLANTAS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS SATLANTAS POLRES PADANG-PARIAMAN)

Aldo Septian Radam , 1610113094, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 61 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Sejatinya Pasal 5 ayat (1) UU LLAJ menyatakan bahwa negara bertanggung jawab juga atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini dapat dipastikan hak setiap orang di jalan raya diakui dan dijamin adanya oleh hukum dan pemerintah bertanggung jawab atas semua hal itu. Tanggung jawab Negara dalam hal tersebut berbentuk adanya peran kepolisian dalam menegakan keamanan dan ketertiban terutama di jalan raya. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Pertama, Bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh satuan lalu lintas terhadap perkara kecelakaan lalu lintas di Padang Pariaman. Kedua, Bagaimana kendala dalam pelaksanaan penyidikan oleh satuan lalu lintas terhadao oerkara kecelakaan lalu lintas di Padang Pariaman. Ketiga, Bagaimana upaya Satlantas dalam hal mengatasi kendala tersebut. Typologi penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang membandingkan fakta di lapangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pelaksanaan penyidikan oleh satuan lalu lintas terhadap perkara kecelakaan lalu lintas Padang Pariaman dilaksanakan dengan proses acara peradilan pidana sebagaimana yang diatur KUHAP dan mengenai tata cara penanganan kecelakaan lalu lintaspenyidik berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.Kendala pelaksanaan penyidikan oleh aparat satlantas terhadap perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas, diantaranya yaitu kurang maksimalnya sumber daya penunjang pelaksanaan penyidikan, kejadian kecelakaan di malam hari, kurangnya peran serta masyarakat.Upaya satlantas mengatasi kendala pelaksanaan penyidikan terhadap perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas, diantaranya yaitu memaksimalkan sumber daya penunjang yang tersedia, melakukan penyuluhan tentang peranan masyarakat dalam membantu tugas kepolisian, melibatkan masyarakat dalam hal menangani kasus kecelakaan lalu lintas

Kata Kunci : kecelakaan, penyidikan, satlantas

342.07
ALF
w

WEWENANG PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Alfian Maulana, 1610112008, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah halaman 66, Tahun 2016

ABSTRAK

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan yang begitu besar kepada Bawaslu. Bawaslu tidak hanya sekedar menjadi lembaga pengawas melainkan juga bertindak layaknya lembaga peradilan. Hal demikian dapat dilihat pada rumusan Pasal 95 huruf b, c, dan d. Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran politik uang serta menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu tersebut maka sama halnya dengan tugas yang dimiliki oleh badan peradilan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukannya. Fungsi pengawasan dan fungsi peradilan yang dimiliki oleh Bawaslu, merupakan dua fungsi yang seharusnya dipisah pada dua institusi yang berbeda, sebab dwifungsi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan. Atas dasar itu, dalam skripsi ini akan membahas bagaimana wewenang Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Bagaimana idealnya wewenang Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu dalam penegakan hukum Pemilu. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dari hasil pembahasan permasalahan ini disimpulkan bahwa Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, melainkan juga menjalankan fungsi penegakan hukum. Dwifungsi tersebut menimbulkan persoalan seperti membuka peluang penyalahgunaan wewenang oleh Bawaslu, memberikan rasa tidak adil bagi para pihak yang berperkara di Bawaslu, sebab Bawaslu telah memiliki penilaian tersendiri dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan hasil pengawasan tersebut masih akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu dalam persidangan yang digelar sendiri oleh Bawaslu. Secara tidak langsung hasil pengawasan tersebut akan mempengaruhi putusan Bawaslu. Untuk mengatasi persoalan yang timbul maka ada beberapa alternatif yang dapat digunakan. Pertama, tetap mempertahakan Bawaslu dengan dwifungsinya dan didukung dengan anggota yang profesional serta berintegritas. Kedua, Bawaslu hanya sebagai lembaga pengawas dan Ketiga, Bawaslu sebagai lembaga penegak hukum. Dari berbagai alternatif teresebut idealnya Bawaslu hanya diberikan kewenangan penegakan hukum dengan menjadikan Bawaslu sebagai lembaga pengadilan khusus Pemilu.

344.04
ALI
p

PELAKSANAAN KREDENSIALING SEBAGAI DASAR PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BPJS KESEHATAN DAN FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN DI KOTA PADANG

Alifya Tyasa, 1610112075, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 64Halaman, 2020

ABSTRAK

Berkomitmen mencapai Universal Health Covarage (UHC), Indonesia membentuk Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional dan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS K). Demi mencapai tujuan kemanfaatan peserta dalam mengakses pelayanan kesehatan, BPJS K melaksanakan kredensialing untuk menilai dan menyeleksi Fasilitas Kesehatan, penilaian tersebut akan menjadi faktor utama pembentukan perjanjian kerjasama. Kenyataan yang terjadi pengaturan kredensialing tidak diatur secara rinci. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pelaksanaan kredensialing sebagai dasar pembentukan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan FKRTL di Kota Padang dan bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan FKRTL di Kota Padang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik dan pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni: 1). Pada tahun 2017 terdapat dua faskes yang tidak mencapai standar minimal penilaian kredensialing, sehingga perjanjian kerjasama tidak dapat dibentuk. Dalam pelaksanaan kredensialing, Permenkes No. 99/2015 tidak menyediakan pengaturan rinci mengenai kredensialing sehingga para pihak menghadapi kesulitan berupa ketidak jelasan tugas pihak penilai serta kurangnya pemahaman mengenai kredensialing. 2). Terdapat tiga Rumah Sakit yang perjanjian kerjasamanya berakhir pada tahun 2020 dengan alasan berbeda-beda. Mulai dari tidak memenuhi syarat akreditas, daluwarsa kontrak, hingga ketidak komitmenan penyelenggara, pelanggaran ini memberikan track record buruk kepada faskes, sehingga perjanjian kerjasama tidak diperpanjang kembali. Terdapat pasal perjanjian yang menyatakan bahwa dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak setelah tiga kali surat teguran. Kesepakatan ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak untuk memenuhi kebutuhan para pihak agar lebih efektif dalam penyelesaian masalah wanprestasi. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar peraturan mengenai kredensialing lebih dilengkap sehingga mempermudah penyelenggara dalam pelaksanaannya. Pasal perjanjian harus tegas dan tidak multitafsir, serta perlunya pemahaman itikad baik para pihak agar tercapai tujuan perjanjian kerjasama.

Kata Kunci: Kredededensialing, Jaminan Kesehatan, Perjanjian Kerjasama

347.05
AMA
u

UPAYA PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) DALAM EKSEKUSI GANTI RUGI HAK PAKAI ATAS TANAH. (STUDI KASUS NOMOR: 159/Pdt/Bth/2015/PN.Pbr)

Amara Furqani, 1610113111, Program Kekhususan Hukum Perdata (PK I), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 88 Halaman, Tahun 2020.

ABSTRAK

Tanah merupakan komponen yang selau berkaitan dengan manusia, Negara secara “kekuasaan” memberikan status hak-hak atas tanah salah satunya hak pakai kepada seseorang atau badan hukum. Meskipun telah diberikan status hak-hak atas tanah ini tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik atau sengketa antar masyarakat. Oleh sebab itu terdapat upaya hukum untuk menyelesaikan masalah ini, antara lain terdapat upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa khusunya upaya hukum perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang permasalahannya dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 159/Pdt/Bth/2015/PN.Pbr. Adapun rumusan masalah nya yaitu: 1) Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perlawanan pihak ketiga (derden verzet)? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara upaya perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dalam eksekusi ganti rugi hak pakai atas tanah dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 15/Pdt/Bth/2015/PN.Pbr? 3) Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan sebelum terjadinya oleh perlawanan pihak ketiga ataupun setelah terjadinya perlawanan pihak ketiga? Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sifat deskriptif, menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perlawanan pihak ketiga yaitu alasan kepemilikan hak pakai, alasan pelawan tidak pernah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara gugatan/putusan dan alasan perlindungan aset barang milik negara 2) Hakim dalam mempertimbangkan putusannya menerima bahwa Pelawan adalah pemilik objek sengketa tersebut namun pertimbangan dan amar putusannya tidak sesuai dan menyatakan bahwa Pelawan seharusnya melakukan upaya gugatan baru bukan upaya perlawanan pihak ketiga (derden verzet). 3) Pelaksanaan eksekusi sebelum terjadinya perlawanan pihak ketiga tidak dijalankan, setelah terjadinya perlawanan pihak ketiga eksekusi dilaksanakan dengan opsi mengembalikan tanah secara mekanisme eksekusi dari pengadilan.

348.3
AME
a

ASAS MATERI MUATAN DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERNUANSA SYARI'AT ISLAM DI KOTA PADANG

Amelia Maharani Harley, 1610112078, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 54 Halaman, 2020

ABSTRAK

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah pasca reformasi, membuat kepala daerah lebih leluasa dalam membuat suatu produk hukum daerah untuk membangun daerahnya sesuai dengan potensi daerah, adat dan budayanya. Sebagai daerah otonomi, Kota Padang memiliki norma budaya adat yang masih berlaku yaitu budaya adat Minangkabau berlandaskan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah dan terikat dengan hukum Islam. Kebijakan bernuansa syari'ah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang diantara lain yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an bagi Peserta didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Walikota Padang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Hafiz Al-qur'an. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu; Pertama, bagaimana produk hukum daerah bernuansa syariah Islam dibentuk di Kota Padang, dan Kedua; bagaimana asas materi muatan produk hukum daerah yang bernuansa syariah Islam di Kota Padang. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kaidah dasar, dan publikasi yang dibuat oleh pemerintah, buku-buku dan literatur. Berdasarkan penelitian, Pemerintah Kota Padang dapat membentuk produk hukum daerah bernuansa syari'ah Islam berdasarkan asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat kepada Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum dan ditinjau dari prespektif asas materi muatan, pembentukan dan pemberlakuan hukum atau peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan asas-asas materi muatan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar sesuai dengan citra hukum.

346.02
ANA
a

ANALISIS PERJANJIAN PENGADAAN ALAT KESEHATAN (PATIENT MONITOR) ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DR. RASIDIN PADANG DENGAN PT. MULIA HUSADA JAYA

Ana Yuliana Sabda, 1610111149, Fakultas Hukum, 2020, 69 halaman

ABSTRAK

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkam dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Salah satu bentuk perjanjian itu adalah perjanjian atau kontrak pengadaan barang dan jasa (procurement). Dalam pelaksanaannya, apa yang dicita-citakan, apa yang harus ada nanti (das sollen) dan apa yang menjadi kenyataan atau keadaan yang sebenarnya pada waktu sekarang (das sein) atau untuk singkatannya arti dari keduanya adalah yang ada dan yang seharusnya di lapang maupun pada praktiknya ditemukan berbeda. Sejumlah peraturan terkait pengadaan barang/jasa telah sedemikian rupa telah diperbaharui dan yang sekarang berlaku adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kontrak dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah dengan spesifikasi alat kesehatan yang melibatkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rasidin Padang dengan PT. Mulia Husada Jaya dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, penulis sangat ingin mengkaji permasalahan ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini: 1) Bagaimana keabsahan perjanjian pengadaan alat kesehatan antara RSUD dr. Rasidin Padang dengan PT. Mulya Husada Jaya? 2) Bagaimana akibat hukum dari perjanjian pengadaan alat kesehatan antara RSUD dr. Rasidin Padang dengan PT. Mulya Husada Jaya? Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis normative atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, yaitu peneliti menelaah bahan hukum sekunder kemudian melanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif dengan sumber data yang bersumber dari narasumber langsung dan dilengkapi dengan studi dokumen dari perpustakaan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi pertentangan terhadap kontrak yang disepakati kedua belah pihak. Hal ini terbukti bahwa terdapat kelalaian oleh pihak rumah sakit dalam mencantumkan aspek penting yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kata kunci: Perjanjian, Pengadaan barang/jasa Pemerintah, Alat Kesehatan

345
ANA
p

PERANAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Ananta Trifani, 1610111056, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Halaman, 2020

ABSTRAK

Pasal 54-59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan rehabilitasi seharusnya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan cara wajib lapor. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika disusun untuk memberikan kejelasan serta menguraikan secara tegas mengenai Institusi Penerima Wajib Lapor bagi pecandu narkotika serta bagaimana tata cara pelaksanaan wajib lapor, sehingga tujuannya dapat tercapai dengan optimal untuk mendukung keberhasilan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Permasalahan dalam skripsi ini adalah, 1)Bagaimanakah peran Institusi Penerima Wajib Lapor dalam penanggulangan kejahatan narkotika di kota Padang?.2)Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Institusi Penerima Wajib Lapor dalam proses penanggulangan kejahatan narkotika ? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Di Kota Padang terdapat 7 lokasi Institusi Penerima Wajib Lapor, diantaranya: 1)Puskesmas Seberang Padang 2)Puskesmas Andalas 3)Rumah Sakit Bhayangkara 4)RSUP Dr M Djamil Padang 5)Rumah Sakit HB Saanin Padang 6)Klinik Biddokes Polsa Sumbar 7)Klinik Pratama BNNP Sumbar. Berdasarkan penelitian dilakukan, diperoleh hasil, yakni : 1) Peranan Institusi Penerima Wajib Lapor dalam penanggulangan kejahatan narkotika di kota Padang belum terlaksana secara optimal, sehingga tujuan adanya aturan ini belum tercapai secara maksimal, dikarenakan dari tujuh Institusi Penerima Wajib Lapor yang ada masih adanya Institusi Penerima Wajib Lapor yang tidak aktif dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi para korban dan penyalahgunaan narkotika. 2) Ada beberapa kendala yang dihadapi Institusi Penerima Wajib Lapor dalam proses penanggulangan kejahatan narkotika, diantaranya yaitu : jumlah tenaga medis yang terlatih belum mencukupi, fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang, kesadaran dari pecamdu dan penyalahguna yang masih kurang, kurangnya perhatian dan motivasi dari keluarga, serta pandangan buruk dari masyarakat terhadap seorang penyalahguna narkotika.

Kata kunci : Institusi Penerima Wajib Lapor, Kejahatan Narkotika, Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika.

344.09
AND
p

PELAKSANAAN PERWAKAFAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN MASJID DI RIMBO KALUANG KECAMATAN PADANG BARAT KOTA PADANG

Andi Kamisal, 1510112189, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK III (Hukum Perdata Adat dan Islam), 63 halaman, 2020

ABSTRAK

Pelaksanaan Perwakafan Tanah tidak selamanya berjalan dengan lancar. Ada saja kendala dan permasalahan yang terjadi. Pelaksanaan perwakafan tanah di Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat adapun permasalahan yaitu tanah wakaf yang sudah diwakafkan berada diatas sertifikat tanah Hak Milik yaitu pada Masjid Al-Bahrain. Tidak hanya Masjid Al-Bahrain yang berpotensi menimbulkan konflik tetapi juga Masjid lain yang posisi hak atas tanahnya masih kabur. Pada satu sisi ada Undang-Undang wakaf yang menghendaki pendaftaran tanah melalui proses tertentu. Fakta nya banyak Masjid di Kelurahan ini yang belum mempunyai Akta Ikrar Wakaf seperti di Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda milik nya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai pelaksanaan perwakafan tanah untuk pembangunan Masjid di Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Rumusan masalah dalam penelitian i ni adalah (1) Bagaimana pelaksanaan perwakafan tanah untuk pembangunan Masjid di Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang, (2) Apakah kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan perwakafan tanah untuk pembangunan Masjid di Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang dan bagaimana solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang terjadi dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perwakafan tanah dilakukan secara lisan. Umumnya perwakafan tanah terjadi sebelum ada nya undang-undang yang mengatur persoalan perwakafan tanah milik. Bukti Hak Atas Tanah bahwa tanah sudah diwakafkan tidak ada satupun yang dipunyai oleh nazhir. Kendala perwakafan tanah yang terjadi berkaitan dengan beberapa hal yaitu perwakafan tanah yang terjadi dilakukan secara lisan dan disaksikan oleh masyarakat tanpa ada bukti tertulis serta tidak memberitahu kepada ahli waris dan keluarga. Pengangkatan Nazhir yang tidak teratur, nazhir kurang paham terhadap pengetahuan mengenai wakaf. Nazhir kurang berpartisipasi aktif dalam mendaftarkan AIW ke KUA kecamatan Padang Barat dan Sertifikat tanah wakaf yang tidak dipunyai oleh nazhir.

346.07
AND
p

PENGELOLAAN PASAR SEBAGAI KEKAYAAN NAGARI DI NAGARI BATIPUAH BARUAH, KECAMATAN BATIPUAH, KABUPATEN TANAH DATAR

Andri Putra, 1510112114, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Pasar Nagari sebagai salah satu harta kekayaan nagari memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan asli nagari. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari menyatakan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan harta kekayaan nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari berdasarkan peraturan nagari. Sehingga Wali Nagari sebagai pimpinan pemerintahan nagari berwenang untuk mengelola Pasar Nagari sebagai kekayaan nagari. Pengelolaan Pasar Pakan Salasa sebagai salah satu Pasar Nagari Batipuah Baruah tidak dikelola oleh wali nagari melainkan dikelola oleh KAN. Namun, dalam pelaksanaannya pengelolaan pasar dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat yang ditunjuk oleh wali nagari dan disepakati oleh ketua KAN. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu : 1. Bagaimana status pasar nagari di Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar? 2. Bagaimana Pengelolaan pasar nagari di Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris. Pengelolaan Pasar Pakan Salasa, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan merupakan kewenangan dari Wali Nagari Batipuah Baruah maka dapat dikatakan KAN sama sekali tidak berwenang melakukan pengelolaan. Namun KAN mengaku sebagai pihak yang berwenang atas pengelolaan Pasar Pakan Salasa yang menyebabkan Pemerintah Nagari Dan KAN pada posisi serba salah dalam melakukan pengelolaan yang maksimal, KAN berpendapat bahwa kewenangan pengelolaan pasar sejak dahulunya sudah merupakan wewenang dari KAN, selain itu pertimbangan Ketua KAN tidak menyerahkan pengelolaan kepada pemerintah nagari yaitu sebagian besar areal pasar telah dijual kepada perseorangan oleh pemangku adat (niniak mamak) sebelumnya. Sedangkan saat ini pasar beroperasi diatas bangunan aset nagari yang merupakan wewenang Wali Nagari. Untuk mengatasi hal tersebut wali nagari melakukan penunjukan salah seorang anggota masyarakat dengan mekanisme “minta tolong” karena penunjukan ini tanpa SK dan tanpa landasan hukum yang jelas untuk mengelola pasar agar pasar dapat beroperasi dan tetap terawat sampai dibentuknya panitia pengelola pasar.

343.02
AND
p

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA WILAYAH KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN BANDARA SULTAN SYARIF KASIM II PEKANBARU

Andryan Pratama Siregar, 1610111148, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 86 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menurut Undang-Undang mengenai Bangunan Gedung dan Penerbangan serta Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, menjelaskan pentingnya kepemilikan Izin Prinsip yang disetujui oleh Instansi terkait Penerbangan sebelum kutipan IMB diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Namun, kenyataan pada saat ini ditemukan bangunan yang memiliki kutipan IMB yang berdiri pada wilayah KKOP dengan tidak disertai Izin Prinsip sebagaimana yang dijelaskan di atas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan penerbitan IMB pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. 2) Bagaimana pengawasan terhadap IMB untuk bangunan yang berada di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan dianalisis menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa diterbitkannya Kutipan IMB pada bangunan yang berada pada wilayah KKOP tanpa adanya Izin Prinsip dari instansi terkait keselamatan penerbangan, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan Pasal 17 ayat (4) Perda Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Selain itu ditemukan juga fakta yang menyatakan adanya MoU antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Pangkalan Angkatan Udara Roesmin Nurjadin yang berisi mengenai larangan membangun di Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, namun terhadap daerah terlarang tersebut masih di temukan bangunan baru. Hal tersebut menunjukkan DPMPTSP Kota Pekanbaru belum menjalankan kegiatan Perizinan bidang bangunan gedung dengan baik. Pengawasan terhadap IMB dilakukan oleh tim pengawas DPMPTSP Kota Pekanbaru dengan menggunakan jenis pengawasan a-priori, yakni bentuk Pengawasan Administrasi yang dilakukan sebelum diterbitkannya KTUN. Namun kurangnya pengawasan internal di DPMPTSP Kota Pekanbaru, mengakibatkan masih adanya ditemui bangunan yang memiliki IMB dengan menyalahi aturan yang berlaku pada wailayah KKOP.

Kata Kunci: Izin Mendirikan Bangunan, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

346
ANG
p

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH MEDIATOR PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PADANG

Anggi Herman, 1610112034, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 73 halaman, 2020

ABSTRAK

Banyaknya penggunaan atas tanah menjelaskan bahwasanya terdapat banyak kepentingan masyarakat yang melekat dan ada pada tanah. Hal tersebut menimbulkan dinamika dalam masyarakat, yaitu munculnya sengketa pertanahan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai penyelenggara pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan tugas di bidang pertanahan. Salah satu tugas BPN tersebut adalah menyelesaikan sengketa tanah di dalam masyarakat. Sengketa tanah di BPN muncul ketika ada seseorang yang menyanggah pengajuan permohonan sertipikat tanah oleh pihak pemohon. BPN menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi oleh seorang mediator, mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan memang memberikan keuntungan bagi para pihak daripada menyelesaikan sengketa di dalam pengadilan. Mediator BPN berasal dari pejabat BPN itu sendiri, yaitu Deputi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, dengan dibentuknya Deputi ini menunjukan pertama, adanya keyakinan bahwa tidak semua sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan, kedua, bahwasanya penyelesaian sengketa pertanahan itu sudah menjadi hal yang sangat mendesak sehingga dibentuklah kedeputian untuk menyelesaikannya. Walaupun sudah ada alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi di BPN, ternyata masih terdapat keraguan masyarakat terhadap kekuatan putusan dari mediasi itu sendiri. Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, proses mediasi oleh mediator di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, kedua kekuatan hukum putusan mediasi oleh mediator di BPN Kota Padang, ketiga, pelaksanaan putusan mediasi oleh mediator tersebut dijalankan oleh para pihak. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: Pertama, proses mediasi pada BPN Kota Padang masih terdapat perbedaan dengan peraturan yang ada, namun BPN Kota Padang telah menerapkan proses mediasi dengan sangat baik sesuai dengan karakteristik masyarakat di Kota Padang. Kedua, kekuatan hukum putusan akta perdamaian mediasi oleh mediator pada BPN Kota Padang mengikat hanya sepanjang apa yang disepakati oleh para pihak. Ketiga, pelaksanaan putusan mediator oleh para pihak, apabila para pihak telah sepakat untuk berdamai itu berarti para pihak harus konsekuen dengan apa yang mereka sepakati, apabila satu pihak tidak melaksanakan maka BPN tidak mempunyai wewenang untuk menghukum.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Tanah, Mediator,Badan Pertanahan Nasional

343.02
ANJ
k

KEDUDUKAN REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP BADAN USAHA MILIK DAERAH TERKAIT PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Ombudsman Republik Indonesia)

Anjaz Muhammad Fauzan Hakim, 1410112119, Hukum Tata Negara (PK V), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 56 Halaman, Tahun 2020.

ABSTRAK

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga pengawas pelayanan publik yang bertujuan membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak masyarakat agar memperoleh pelayanan publik, keadilan, dan kesejahteraan. Tetapi keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik, masih terus terjadi dari berbelitnya birokrasi, pelayanan tidak maksimal, hingga praktek pungutan liar. Sudah menjadi tugas Ombudsman untuk memeriksa laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan mengeluarkan rekomendasi atas laporan tersebut yang ditujukan kepada terlapor. Dari uraian di atas maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai Kedudukan Rekomendasi Ombudsman Terhadap Badan Usaha Milik Daerah Terkait Pelayanan Publik (Studi Kasus Ombudsman Republik Indonesia), dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu ke-1 Bagaimanakah kedudukan rekomendasi Ombudsman dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang dikalukan oleh Badan Usaha Milik Daerah? ke-2 Bagaimana kekuatan hukum surat rekomendasi Ombudsman dalam upaya peningkatan pelyanan publik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah? Penulisan tulisan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris), dan bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa: Pertama kedudukan Rekomendasi Ombudsman terhadap Badan Usaha Milik Daerah terkait Pelayanan Publik adalah Rekomendasi Ombudsman sebagai kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh Ombudsman. Kedua rekomendasi Ombudsman memeliki kekuatan yang bersifat wajib dilakukan, apabila Rekomendasi Ombudsman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan maka Ombudsman akan melaporkan terlapor kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Ombudsman dapat mempublikasikan Surat Rekomendasi tersebut ke publik.

346.08
ANN
k

KLAIM ASURANSI TOTAL LOST ONLY (TLO) ATAS KECELAKAAN KENDARAAN AKIBAT KECELAKAAN OLEH PIHAK PT. MNC ASURANSI INDONESIA DI JAKARTA

Annisa, 1610111031, FakultasHukum Universitas Andalas, PK II (Hukum Perdata Bisnis) 71 Halaman,Tahun 2020

ABSTRAK

Dewasa ini, perkembangan dan pertumbuhan zaman membuat banyak perubahan. Perkembangan kendaraan bermotor salah satu bentuk perkembangan zaman. Seiring dengan beragam dan banyaknya kendaraan bermotor yang beredar menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan risiko yang harus dihadapi oleh manusia hal tersebut dapat menyebabkan suatu kerugian. Namun manusia sebagai makhluk ciptaaan Tuhan yang memiliki potensi yang lebih dari makhluk lainnya selalu mencari upaya untuk mengatasi peristiwa yang kemungkinan akan terjadi tersebut salah satunya dengan cara mengalihkannya kepada pihak lain diluar diri manusia itu. Lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain ialah lembaga Asuransi dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pengertian Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian dimana seseorang penanggung dalam menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian, karena kehilangan, kerusakan, atau ketiadaan keuntungannya yang diharapkan, dan yang akan dideritannya karena kejadian yang tidak pasti. Salah satu jenis asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi adalah asuransi kendaraan. PT.MNC Asuransi Indonesia adalah salah satu perusahan asuransi yang ada di Indonesia dengan kantor pusat di Jakarta. Ada dua tipe perlindungan yang ditawarkan oleh PT.MNC Asuransi Indonesia, yakni : 1. All Risk (memberikan perlindungan menyeluruh terhadap semua risiko) 2. Total Lost Only (memberikan perlindungan jika terjadi kerusakan senilai 75%). Penelitian ini dilakukan terhadap proses klaim jenis perlindungan Total Lost Only. Adapun permasalahan berkaitan adalah : pelaksanaan penentuan penilaian dari perhitungan 75% kerusakaan kendaraan akibat kecelakaan dalam klaim Total Lost Only (TLO) oleh pihak PT.MNC Asuransi Indonesia di Jakarta dan Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan klaim Total Lost Only (TLO) atas kerusakan kendaraan akibat kecelakaan oleh pihak PT.MNC Asuransi Indonesia di Jakarta. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan penulis analisa dengan mempergunakan analisa kualitatif. Dengan dilakukan penelitian telah berhasil menjawab permasalahan yang dikemukakan diatas, 1) Bahwa penilaian terhadap tanggungan risiko 75% (Total lost Only) atas kerusakan kendaraan akibat kecelakaan dilihat dari nilai perbaikan yang mencapai 75% dari harga kendaraan yang ada di pasaran atau nilai yang dipertanggungkan dalam polis, 2) tidak ada kebijakan dari perusahaan asuransi apabila kerusakan kendaraan tidak mencapai 75%, 3) Nasabah yang tidak cermat membaca klausula- klausula yang terdapat di dalam polis serta terkadang terdapat unsur itikad baik dalam laporan klaim, serta kurang rincinya penjelasan oleh pihak tertanggung dalam menjelaskan tipe perlindungan Total Lost Only menjadi beberapa kendala dalam proses klaim.

Kata kunci : Asuransi, Kecelakaan, Total Lost Only

344.03
ANN
p

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN CABANG DEPOK DENGAN RUMAH SAKIT UMUM HERMINA DEPOK

Annisa Azria Putri, 1610112031, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 89 hlm, 2020

ABSTRAK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum publik yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan di bidang kesehatan dan dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Salah satu fasilitas kesehatan lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatannya ialah Rumah Sakit Hermina Depok, dimana kerjasama tersebut dibuktikan di dalam dokumen Perjanjian Kerjasama Antara BPJS Kesehatan Cabang Depok dengan Rumah Sakit Umum Hermina Depok tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nomor 414/KTR/IV-09/1218. Dalam perjalanannya, pelaksanaan perjanjian kerjasama ini tidak dapat terhindar dari berbagai masalah-masalah. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Depok dan Rumah Sakit Umum Hermina Depok? 2) Apa saja kendala yang dihadapi Rumah Sakit Hermina Umum Depok dan BPJS Kesehatan Cabang Depok dalam melaksanakan perjanjian? 3) Apa saja solusi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Hermina Depok dan BPJS Kesehatan Cabang Depok untuk menghadapi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil 1) Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Depok dan Rumah Sakit Umum Hermina Depok 2) Kendala-kendala yang dihadapi Rumah Sakit Hermina Umum Depok dan BPJS Kesehatan Cabang Depok dalam melaksanakan perjanjian 3) Solusi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Hermina Depok dan BPJS Kesehatan Cabang Depok untuk menghadapi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian.

Kata Kunci : Perjanjian Kerjasama, BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, Rumah Sakit

346
ANN
p

PENYELESAIAN SENGKETA PENDAFTARAN TANAH PUSAKO TINGGI SECARA MEDIASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Annisa Saidatul Imaniah, 1610112096, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 65 halaman

ABSTRAK

Sumatra Barat masih kental dengan adat dan kesatuan masyarakat hukum adat, jadi masih banyak terdapat tanah ulayat salah satunya harta pusako. Harta pusako merupakan hart yang dimiliki secara turun temurun dan diakui oleh adat setempat salah satunya tanahyang dalam penggunaanya dan pemanfaatannya disahkan oleh hukum Perda Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Tanah pusako terbagi antara dua, yaitu tanah pusako tinggi dan tanah pusako rendah.. Penelitian ini mengkaji dan menjawab mengenai, Faktor penyebab terjadinya sengketa tanah pusako tinggi, tata cara penyelesaian sengketa yang dilakukan secara mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariama dan bagaimana tindak lanjut dan akibat sengketa pendaftaran tanah pusako tinggi apabila tidak tercapai kesepakatan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisi untuk dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah. Dari hasil penelitian diketahui faktor penyebab terjadinya sengketa tanah pusako tinggi karena tanah milik bersama(komunal) dari suatu kaum, pertambahan jumlah penduduk dan luas tanah tetap, tidak tercantumnya nama anggota keluarga lain dalam ranji dan pendaftaran tanah pusako tinggi tanpa sepengetahuan aggota kaum atau ahli waris.Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui Keputusan hak atas tanah dapat berupa pembatalan terhadap hak atas tanah, tanda bukti hak dan daftar umum lainya yang berkaitan dengan hak tersebut. Penerbitan keputusan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk Kepala Kantor Wilayah BPN, atau paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk Menteri, sejak laporan penyelesaian sengketa dan konflik diterima.Keputusan yang telah ditetapkan wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah untuk menunda pelaksanaanya

Kata kunci : Penyelesaian Sengketa, Tanah Pusako Tinggi, Mediasi

345
ARI
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROVINSI SUMATERA BARAT

Arifki Hamdani, 1310112172, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 56 halaman, 2019

ABSTRAK

Dalam upaya mengantisipasi maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kasus tindak pidana kekerasan seksual, maka dibentuklah Unit Pelaksa Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) lewat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak di setiap daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki fungsi menyelenggarakan layanan : pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Di Provinsi Sumatera Barat sendiri Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) beralamat di Jl. Rasuna Said No. 74. Menurut kepala bagian pengaduan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), terhitung sejak tanggal 31 Januari 2018 sudah banyak kasus yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat. Bahkan kasus yang tidak bisa diselesaikan pada tingakat Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat, dilimpahkan ke UPTD PPA Provinsi. Rumusan masalah : Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat?, Apa saja kendala dan upaya mengatasi kendala yang di hadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat dalammelakukan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan?. Dalam penelitian inipenulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Berikut proses penanganan dan perlindungan korban oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat : Korban baik yang datang sendiri, melewati proses rujukan atau penjangkauan akan di identifikasi terlebih dahulu yang meliputi proses screening, assessment dan rencans intervensi sesuai keadaan dan kebutuhan korban, Jika korban harus segera mendapatkan penanganan medis, karena luka- luka, maka korban masuk dalam tahapan proses rehabilitasi kesehatan yang meliputi layanan non kritis, pelayanan semi kritis, dan pelayanan kritis sesuai dengan kondisi korban, Jika korban memerlukan bantuan hukum, maka dilakukan setelah proses rehabilitasi kesehatan, Proses terakhir dari layanan untuk korban adalah proses reintegrasi social. Kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA adalah kuarang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait serta perilaku keluarga korban yang menghambat proses penanganan. Mengatasi kendala ini UPTD PPA berusaha mengoptimalkan koordinasi dan berusaha memberi pemahaman kepada keluarga korban.

346
ASL
p

PENGELOLAAN SAMPAH OLEH BANK SAMPAH UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PARIAMAN

Aslamal Hayati, 1610113119, Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum, Universitas Andalas,70 Halaman, 2020

ABSTRAK

Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi. Sesuai yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, sedangkan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termaksud manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainya.Walaupun sudah dijelaskan mengenai sampah dan bank sampah namun masyarakat masih kurang kesadaran dalam mengelola sampah terutama sampah plastik yang para masyarakat membuang sampah di lingkungan atau tanah yang kosong dimana akan menimbukan pencemaran lingkungan akibat hal tersebut. Serta adanya bank sampah ini juga akan meningkatakan perekonomian masyarakat serta membuat lingkungan bersih. Dari hasil penelitian ini dapat dik ketahui: 1) Pengelolaan sampah oleh bank sampah dikota pariaman, 2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan oleh nbank sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu empiris-sosiologis dimana data yang didapat langsung dari lapangan, teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian ini (1)pengelolaan sampah oleh bank sampah di Kota Pariaman belum terlaksananya dengan baik, dan (2) Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah ini yaitu kurangnya sarana dan prasarana, anggaran dan sumber daya manusia (sdm). Waluapun belum terlaksana dengan semestinya tetapi dengan adanya bank sampah ini sudah meminimalisir pembuangan sampah plastik ke TPA.

Kata kunci: Pengelolaan Sampah,Bank Sampah, Lingkungan Hidup

345
ATM
t

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU USAHA MEMPERDAGANGKAN BARANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg)

Atmajuwita Marsal, 1610112017, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 85 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Pelaku usaha yang memperdagangkan daging babi tanpa memberikan keterangan mengenai hal tersebut merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan. Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg adalah salah satu contoh kasus pelanggaran mengenai tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Apakah bentuk putusan pemidanaan oleh hakim dalam tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg? 2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pelaku usaha pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis. Dari hasil penelitian, 1. Bentuk putusan pemidanaan oleh hakim dalam tindak pidana pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg, dapat dikatakan cukup ringan, padahal akibat dari perbuatan tersebut berdampak besar bagi masyarakat 2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pelaku Usaha Pelaku Usaha Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Putusan Nomor: 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor- faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa. Dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pelaku usaha pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan seharusnya hakim lebih memerhatikan dan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kerugian masyarakat. Pada Putusan Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg, jelas kerugian yang diakibatkan pelaku bukanlah berupa materi yang dapat digantikan, akan tetapi kerugian yang tidak dapat digantikan, karena yang dirugikan berupa kepercayaan masyarakat.

345
AUL
p

PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN MEMANFAATKAN APLIKASI PAGA NAGARI OLEH KEPOLISIAN POLRES SOLOK KOTA

Aulia Rahman Riyanto, 1610111016, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana, 58 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Kemajuan teknologi pada zaman sekarang memunculkan terobosan baru oleh banyak instansi terutama instansi yang bergerak dalam bidang penegakan hukum, salah satunya kepolisian, disalah satu Polres di Sumatera Barat khususnya Polres Solok Kota, dalam memanfaatkan teknologi informasi Polres Solok Kota memunculkan inovasi baru yakni dengan membuat aplikasi penganduan yang dinamai sendiri oleh Polres Solok kota dengan nama paga nagari adapun tujuan dari aplikasi ini adalah untuk pengaduan jika terjadi tindak pidana ataupun hal lain yang dianggap darurat. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana penanggulangan kejahatan dengan memanfaatkan teknologi aplikasi paga nagari adalah penanggulangan kejahatan dengan aplikasi paga nagari. Kedua, apa saja yang menjadi kendala dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi paga nagari. Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah yuridis-empiris (sosiologis). Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut, pertama pemanfaatan teknologi informasi paga nagari dalam penanggulangan kejahatan oleh kepolisian di Polres Solok Kota, pelaksaanan pengaduan kejahatan di Polres Solok Kota telah dipermudah dengan adanya aplikasi paga nagari yang dipergunakan melalui kemajuan teknologi android, aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah baik dari kepolisian sendiri, maupun dari masyarakat dalam hal penanggulangan kejahatan. Kedua, belum maksimalnya pemakaian aplikasi ini oleh masyarakat karna masih kurangnya pengetahuan terkait dengan perkembangan teknologi, serta belum adanya undang-undang khusus yang mengatur terkait dengan inovasi yang dikembangkan oleh Polres Solok Kota ini. Itu sebabnya, perlu pengetahuan yang lebih dari masyarakat agar aplikasi paga nagari ini berjalan dengan baik dan efektif penggunaanya sehingga membantu dalam penanggulangan kejahatan.

347.05
AYU
i

IMPLIKASI PENYEDERHANAAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM DALAM PENGESAHAN BADAN HUKUM TERHADAP TINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA (EASE OF DOING BUSINESS) INDONESIA

Ayu Yulensi Putri,1610112057, Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Andalas,2016, 75 Halaman

ABSTRAK

Perseroan Terbatas mendapatkan status hukumnya setelah memenuhi syarat akta pendiriannya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.” Pemberian status hukum perseroan menurut Permenkumham No. 01 Tahun 2011 dilaksanakan secara manual dengan melakukan penyerahan berkas kepada kantor Kementrian Hukum dan HAM. Setelah dikeluarkannya Permenkumham baru No. 4 Tahun 2014 proses pengesahan perseroan terbatas ini dapat dilaksanakan melalui online dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disebut SABH, pemberlakuan sistem ini didasarkan pada Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M- 01.HT.01.01.2000 tentang Pemberlakuan SABH di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia. Munculnya inovasi dan kemudahan dalam pengesahan badan hukum perseroan ini maka memicu peningkatan terhadap iklim berusaha dan perkembangan ekonomi serta tingkat Ease Of Doing Bussines Indonesia. Berdasarkan kepada latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah pelaksanaan pengesahan perseroan melalui SABH telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 2) Bagaimana pengaruh dari penyederhanaan pengesahan perseroan melalui SABH terhadap tingkat Ease Of Doing Bussines Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen serta wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil 1) Pelaksanaan pengesahan badan hukum diatur dalam peraturan Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M- 01.HT.01-10 Tahun 2007, adanya peraturan ini memberikan batasan yang jelas terhadap orang yang dapat mengakses SABH. Pada pasal 2 Keptusan Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa yang dapat menggunakan jasa SABH hanya notaris dengan pemberian password tertentu, yang mana setiap notaris harus mendaftarkan dirinya kepada provider pada Kementrian Hukum dan HAM. 2) Penyederhanaan pengesahan Perseroan melalui SABH memberikan pengaruh yang baik terhadap peningkatan peringkat Ease Of Doing Bussines Indonesia karena membantu mengembangkan sektor usaha dan meningkatkan minat masyarakat terhadap kepemilikan Perseroan.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Sistem Administrasi Badan Hukum, Ease Of Doing Bussines.

348.3
AZH
p

PERKEMBANGAN PENGATURAN PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Azhari Fadil, 1610111051, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, PK V (Hukum Tata Negara), 68 halaman, 2020

ABSTRAK

Pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia telah banyak mengalami perubahan dalam konstitusi, mulai dari awal kemerdekaan, Indonesia menganut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), kemudian Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Konstitusi RIS 1949), Undang- Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), dan terakhir konstitusi Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). UUD 1945 sebelum amandemen pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden telah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan diantaranya yaitu memilih Soekarno menjadi Presiden seumur hidup dan Soeharto yang menjabat selama 32 Tahun di Indonesia yang memerintah secara otoriter. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pertama bagaimana perkembangan pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua adalah bagaimana pentingnya pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder, serta metode pengumpulan data berupa studi dokumen (kepustakaan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan mengetahui pentingnya pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hasil penelitian pada skripsi ini dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen terdapat perbedaan-perbedaan, baik bunyi Pasal maupun penerapan pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sangatlah penting, karena berangkat dari sejarah pemerintahan jika dipimpin oleh pemimpin yang sama dalam jangka waktu yang panjang maka dapat menimbulkan pemerintahan yang otoriter. Adanya pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 7 UUD 1945 setelah amandemen, maka terjadi check and balances antar lembaga-lembaga negara dan juga mencegah terjadinya kekuasaan absolut dari Presiden dan Wakill Presiden di Indonesia serta tidak menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam terkait pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

342.07
AZM
t

TINJAUAN HUKUM TERHADAP DUKUNGAN KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP SALAH SATU PASANGAN CALON STUDI PASAL 281 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

AZMIRAL HASSAN, 1410112022, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 75 Halaman, 2020

ABSTRAK

Dukungan kepala daerah terhadap Pasangan Capres dan Cawapres pada Pemilu 2019 merupakan strategi kampanye yang banyak menuai pro dan kontra. Kepala daerah sebagai pejabat negara berkewajiban melayani rakyat, namun di lain hal kepala daerah juga seorang individu yang berhak untuk menduduki jabatan politik seperti bagian dari partai maupun tim sukses pemilu. Maka dari itu, dalam skripsi ini Penulis mengangkat beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam hal kepala daerah yang memberikan dukungan kepada salah satu pasangan capres cawapres tertentu. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber-sumber data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan analitis. Dari pembahasan Penulis berkesimpulan bahwa Kepala daerah yang mendukung capres cawapres dengan menjabat sebagai tim kampanye mengabaikan etika sebagai pejabat. Di samping itu pengaturan mengenai dukungan kepala daerah secara khusus dan rinci dirasa perlu diadakan. Serta Penulis memberikan saran untuk kepala daerah untuk tidak menjadi bagian dari tim sukses capres cawapres untuk menghindari konflik kepentingan.

Kata kunci: Dukungan, Kepala Daerah, Pemilihan Umum

341
AZZ
p

PENGATURAN BIOPROSPECTING TERKAIT SUMBER DAYA GENETIK DI LAUT INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Azzhara Amini Asral, 1310112017, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 70 Halaman

ABSTRAK

Bioprospecting merupakan kegiatan penelitian Sumber Daya Genetik (SDG) laut yang terkonsentrasi untuk mendapat keuntungan komersial. Bioprospecting memicu berbagai masalah hukum terutama dalam hal pengaturan akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik. Sumber Daya Genetik laut perlu mendapatkan perhatian khusus karena saat ini keberlanjutannya terancam oleh degradasi pada ekosistem laut. Metode penelitian penulisan ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan bersifat deskriptif analistis yaitu berusaha menggambarkan pengaturan produk hukum nasional dan internasional dalam kapasitas menyeimbangi perkembangan zaman dan pelaksanaannya. Pada lingkup Internasional dibutuhkan suatu protokol tambahan di bawah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 karena UNCLOS 1982 tidak membahas bioprospecting atau penelitian ilmiah kelautan secara terperinci. CBD mengatur bioprospecting sebagai akses dan pembagian keuntungan. Indonesia sebagai Negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dengan sebagian besar wilayah laut memiliki posisi penting terkait bioprospecting yang terjadi. Namun aturan hukum nasional saat ini masih tidak memadai untuk menyelesaikan masalah hukum terkait kegiatan bioprospecting laut. Dan lagi Indonesia sedang mengalami isu lingkungan terutama memburuknya keadaan terumbu karang di laut Indonesia. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum khusus untuk bioprospecting laut yang tidak hanya mengatur akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik, tetapi juga penting untuk aturan tersebut membahas pengembangan berkelanjutan seperti upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya laut.

Kata Kunci: Bioprospecting, Sumber Daya Genetik laut, UNCLOS 1982, CBD, Indonesia.

346.04
ALD
p

PENDAFTARAN TANAH BEKAS SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG MENGGUNAKAN AKTA PERALIHAN HAK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI KOTA PEKANBARU

Aldi Rijaldi, 1820123005, Fakultas Hukum Unand, 2018, 110 Halaman

ABSTRAK

Ruang lingkup pendaftaran tanah merupakan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum atas seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia, terdapat satu kasus yang menarik dimana dalam proses terjadinya peralihan hak atas tanah melibatkan akta Notaris dalam peralihannya dan bagaimana proses pendaftaran tanah tersebut pada Badan Pertanahan Nasional, karena dari data yang penulis peroleh alas hak yang dialihkan merupakan Bekas Serifikat HGB yang sudah melampaui batas waktu. Permasalahan yang menjadi objek penelitian diantaranya : 1) Bagaimana status tanah bekas hak guna bangunan yang telah berakhir jangka waktunya jika dialihkan dengan menggunakan akta peralihan hak yang dibuat oleh notaris? 2) Bagaimana proses pendaftaran tanah bekas sertifikat HGB yang menggunakan akta peralihan hak yang dibuat oleh notaris pada BPN di Kota Pekanbaru?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat kesimpulan bahwa status atas tanah berdasarkan hak yang diberikan yaitu HGB yang telah berakhir jangka waktunya adalah kembali kepada negara dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru, HGB yang telah berakhir jangka waktunya, dapat dialihkan haknya kepada pihak lain dengan perbuatan hukum jual beli yang dibuat di hadapan Notaris sesuai dengan kewenangan notaris yang termuat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN sekaligus dengan permohonan hak baru yang menjadikan akta otentik tersebut yakni akta peralihan hak sebagai dasar permohonannya.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Akta Peralihan Hak dan Sertipikat Hak Guna Bangunan

343.04
ANI
k

KEDUDUKAN HUKUM DAN PELAKSANAAN PEMULIHAN KEUANGAN DAERAH PADA SEKTOR PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ANITA YULIANA Tim Pembimbing: Prof. Dr. Elwi Danil, SH. MH. (Pembimbing I) dan Dr. Yuslim,SH. MH. (Pembimbing II

ABSTRAK

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam perjalanan pemerintahan, sumber pendapatan daerah dari pajak dan retribusi telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan ekonomi, menggerakan roda pemerintahan, dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Namun tentu saja ada saja wajib pajak yang melalaikan kewajibannya sehingga pendapatan dari sektor ini tidak sesuai target, terjadinya defisit pada penerimaan Negara dan efek kebelakang adalah lesunya perekonomian Negara. Oleh sebab itu dibutuhkan penegakan hukum untuk membuat wajib pajak agar segera memenuhi kewajibannya. Salah satu lembaga yang sering digunakan untuk penyelesaian sengketa oleh Lembaga Negara, instansi pemerintahan pusat/daerah, BUMN/BUMD beserta turunannya adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dimana JPN bertindak sebagai mediator ataupun fasilitator. Rumusan masalah penelitian ini adalah; (1) Bagaimanakah kedudukan hukum Jaksa Pengacara Negara dalam pemulihan keuangan daerah pada sektor pajak dan retribusi diwilayah hukum Kabupaten Padang Pariaman? (2) Apakah kendala yang dihadapi Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam pemungutan pajak dan retribusi dalam rangka pemulihan keuangan daerah dan upaya mengatasinya di wilayah hukum Kabupaten Padang Pariaman.? Karena penelitian ini mengkaji kedudukan hukum Jaksa Pengacara Negara dalam pemulihan keuangan daerah, maka penelitian ini masuk kategori penelitian hukum yuridis empiris. Data penelitian dilakukan dengan studi lapangan berdasarkan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh data primer dan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Dari penelitian dapat disimpulkan bawah selain di dalam Undang-Undang Kejaksaan bahwa kewenangan jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara dipertegas lagi dalam Peraturan Presiden Ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya diatur kewenangan tersebut diperjelas lagi pelaksanaannya dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER- 025/A/JA/11/2015 tentang Petujuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. Dalam pemungutan pajak dan retribusi dalam rangka pemulihan keuangan daerah di wilayah hukum Kabupaten Padang Pariaman terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Negeri Pariaman yakni faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal bahwa pada Kejaksaan Negeri Pariaman kekurangan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan pendampingan penagihan dimana hanya terdapat dua orang Jaksa Pengacara Negara dan satu orang staff.

Kata kunci; Jaksa Pengacara Negara, Pajak, Retribusi, Pemungutan

343.04
ASR
p

PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL NON LOGAM SEBAGAI PAJAK DAERAH DI KOTA PADANG

Asri Jenita, 1620112023, Program Megister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 111 Halaman, 2019

ABSTRAK

Pengaturan pengusahaan pertambangan adalah bagian dari pelaksanaan penguasaan negara atas pertambangan. Pengaturan ini dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan agar pengusahaan bahan galian memberikan manfaat bagi rakyat dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan Negara dalam lingkup pengusahaan (hak pengusahaan) dapat dilimpahkan kepada badan hukum swasta atau perorangan dalam wilayah hukum pertambangan indonesia dengan suatu kuasa pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) atau perjanjian kerjasama. Sejak keberadaaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU Minerba) maka kegiatan pertambangan mineral batu bara yang dilakukan oleh setiap orang atau perusahaan harus didasarkan pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Pasal 1 angka 6 sebagai izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pemungutan pajak mineral bukan logam sebagai pajak daerah di Kota Padang? 2. Bagaimana pengalokasian penerimaan pajak mineral bukan logam untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan adalah memakai pendekatan yuridis empiris yang menekankan kepada kenyataan dilapangan dikaitkan dengan aspek hokum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian proses pemberian izin pertambangan mineral non logam di Kota Padang sudah sesuai dengan ketentuan baku mutu lingkungan hidup (Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009). Pemungutan pajak daerah mineral bukan logam menggunakan system pemungutan Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak. Pengalokasian pajak pertambangan mineral bukan logam adalah Pemerintah Kota Padang memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan dan infrastruktur perkotaan yang melalui usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2020.

Kata Kunci : Pemungutan, pajak, mineral non logam

341.62
BAR
p

PENEGAKKAN HUKUM ATAS SERANGAN TERHADAP PASUKAN UNITED NATIONS PEACEKEEPING FORCE (STUDI KASUS SERANGAN TERHADAP PASUKAN PENJAGA KEAMANAN PBB DI MALI UTARA)

Baroka Jagaddhita, 1510111104, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Pk Vii (Hukum Internasional)76 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

PBB menugaskan United Nations Peacekeeping Force untuk menghadapi konflik di Mali yang sudah terjadi sejak 2012-sekarang. Sejumlah kelompok orang yang terdiri dari pasukan perdamaian PBB dan penduduk sipil diserang oleh sekelompok pria bersenjata yang menewaskan sedikitnya 10 pasukan penjaga perdamaian PBB dari Chad dan melukai 25 lainnya dalam serangan hari Minggu disebuah pangkalan di Mali Utara. Sebagai pasukan penjaga perdamaian (peacekeeping force), agar dapat menjalankan misinya dengan baik, pasukan ini harus dilindungi dari setiap kekerasan senjata terhadapnya. Keharusan ini tersirat dalam Convention On the Safety of UN Personel pasal 7. Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai pengaturan tentang perlindungan pasukan PBB di Mali Utara dan penegakkan hukum atas serangan terhadap pasukan PBB di Mali Utara. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normative. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pengaturan tentang perlindungan Pasukan PBB di Mali Utara terdapat dalam IHL Rule 33, Konvensi Jenewa tahun 1949, Convention On the Safety of UN Personel pasal 7, dan Protokol Tambahan II tahun 1977 tentang perlindungan korban dalam konflik bersenjata non-internasional. Konflik Mali Utara ini termasuk Konflik Bersenjata Non-Internasional karena terjadi antara pasukan pemerintah dan pasukan pemberontak. Penegakkan hukum yang digunakan adalah penegakkan hukum oleh peradilan nasional , penegakkan hukum oleh Dewan Keamanan PBB dan penegakkan hukum oleh peradilan internasional. Terbunuhnya pasukan penjaga perdamaian tersebut menyebabkan adanya suatu pelanggaran aturan hukum Humaniter oleh penduduk sipil yang dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan perang. Jadi kejahatan di Mali Utara ini dapat di adili di Pengadilan ICC.

Kata kunci: Penegakkan Hukum, Pasukan United Nations, Peacekeeping Force, Mali Utara

345
BAY
a

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENECEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 13/PID.SUS/2019/PNPMN)

Bayu Amirulsani, 1510112067, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Pada masa sekarang ini, telah pesatnya perkembangan teknolgi, serta banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik pelanggaran yang berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), salah satunya menyangkut mengenai pencemaran nama baik. Putusan Nomor 13/PID.SUS/2019/PNPMN merupakan putusan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Pmn tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik? 2. Bagaimanakah Bentuk Pidana Percobaan Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN PNM? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan (library research) . Dari hasil penelitian. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap kedua pelaku dalam putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN Pdg dan putusan Nomor 129/Pid.Sus/2016/PN Kag berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang teungkap di dalam persidangan dan oleh Undang- undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Bentuk Pidana Percobaan Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN PNM adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses peradilan, bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam putusan ini tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pada 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang seharusnya juga mengacu pada Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) KUHP. Pada dasarnya terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan tersebut akan tetapi hal tersebut bukanlah suatu tindak pidana. Sehingga penjatuhan pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Hakim tidaklah tepat, seharusnya Jaksa mempert Hakim menjatuhkan pidana lepas yang artinya berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, memberikan pengertian putusan lepas sebagaimana yang diatur KUHP.

341.48
BEN
p

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Padang)

Benny Alfayet Pratama, 1510111119, Program Kekhususan Hukum Tata Negara (PK V), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Lembaga Bantuan Hukum adalah sebuah lembaga yang memberikan bantuan hukum pada semua pencari keadilan di seluruh Indonesia bahkan di dunia yang berdasarkan surat mandat Departemen Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana peranan Lembaga Bantuan Hukum terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia? 2. Bagaimana pelaksanaan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia Di Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara . Dari hasil penelitian, Peranan Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia yaitu pemberian bantuan hukum sebagai salah satu implementasi dari prinsip persamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law) baik secara individual dan struktural." Pelaksanaan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Kota Padang yaitu meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum adalah proses administrasi sebagai Pelaksana Bantuan Hukum yang dirasa rumit (verifikasi, akreditasi, pelaporan pertanggungjawaban sampai pada reimbursement anggaran), proses administrasi Pemohon Penerima Bantuan Hukum dimana harus menyerahkan SKTM, kurangnya koordinasi antara Lembaga Bantuan Hukum dengan Aparat Penegak Hukum.

348.3
BEP
e

EFEKTIVITAS E-TIKET DALAM PELAYANAN PUBLIK JASA TRANSPORTASI PT. KERETA API INDONESIA DIVISI REGIONAL II SUMATERA BARAT (DITINJAU DARI BEBERAPA ASAS DALAM UU PELAYANAN PUBLIK)

Beping Liaprilian, 1610113092, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 Halaman, Tahun 2020)

ABSTRAK

PT. Kereta Api Indonesia (KAI) merupakan satu-satunya BUMN yang menyelenggarakan pelayanan kereta api dan satu-satunya penyedia jasa pengkeretaapian dikarenakan semakin banyaknya jenis pelayanan yang diberikan untuk masyarakat khususnya dibidang transportasi. Pemberian pelayanan umum sebagaimana di atur dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 34 ayat (3) yaitu Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. PT. Kereta Api (Persero) Indonesia Divisi Regional II Sumatera Barat (Sumbar) yang selanjutnya disingkat menjadi PT. Kereta Api Divisi Regional II Sumbar menjadi salah satu tempat vital area perlintasan kereta api khususnya di Sumatera Barat. Bagaimanakah efektivitas E-Tiket dalam pelayanan jasa transportasi PT KAI Divisi Regional II SUMBAR dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan E-Tiket Pelayanan Jasa Transportasi PT KAI Divisi Regional II Sumbar dan bagaimana upaya penanggulannya (ditinjau dari beberapa asas dalam UU Pelayanan Publik). Dengan metode yuridis empiris yaitu dengan menganalisis masalah yang ada pada kenyataan sosial dengan norma hukum yang berlaku tentang Efektivitas E-Tiket Dalam Pelayanan Publik Jasa Transportasi PT. Kereta Api Indonesia Divisi Regional II Sumatera Barat (ditinjau dari beberapa asas dalam UU Pelayanan Publik). Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara yaitu wawancara, angket dan studi dokumen. Penelitian dilakukan langsung di PT. KAI Divisi Regional II Sumatera Barat. Hasil penelitian mengenai Efektivitas E-Tiket Dalam Pelayanan Publik Jasa Transportasi PT. KAI Divisi Regional II Sumbar disini yang ditinjau dari beberapa asas dalam UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik belum efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya minat dan pengetahuan pengguna layanan mengenai E-Tiket ini dan seharusnya pihak kereta api juga lebih mensosialisasikannya lagi kepada masyarakat. Tidak hanya pada kaum tertentu saja tapi semua pihak. Karena ini merupakan transportasi yang digunakan untuk semua kalangan baik dari yang muda sampai yang tua. Sebab sebagai penyelenggara jasa transportasi seharusnya memenuhi standarisasi prosedur yang terdapat dalam asas-asas dalam UU Pelayanan Publik.

Kata Kunci : Efektivitas E-Tiket, Hukum Pelayanan Publik, Kereta Api

341.48
BRI
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA (Studi Di Polres Kota Padang)

Briliandra Jasanusa Turman, 1510112073, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 57 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. Perlindungan HAM telah diatur pada Undang- Undang Dasar 1945 dan lebih khusus diatur pada Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Aparat penegak hukum seperti Polri memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum akan tetapi masih ditemukan kegagalan dalam dalam pemberian perlindungan hukum salah satunya terhadap tersangka dalam proses penyidikan, padahal hak-hak tersangka telah diatur didalam KUHAP. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Polres Kota Padang? 2. Apakah kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Polres Kota Padang? 3. Bagaimanakah upaya dalam pemberian perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan ditinjau dari aspek hak asasi manusia di Polres Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara dengan Penyidik Polresta Padang dan Penasehat Hukum LBH Padang. Dari hasil penelitian, Bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia di Polresta Padang belumlah seusai dengan peraturan perundang-undangan karena dapat dilihat dari adanya kasus-kasus pelanggaran hak tersangka seperti kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyidikan. Kendala terhadap perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan yaitu polisi memiliki karakter tertentu yang menghambat komunikasi yang disebabkan oleh kondisi perkerjaan mereka yang penuh stress dan berkaitan dengan konflik. Selain itu kendala yang sering terjadi dalam penyidikan yaitu penyidik tidak mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni. Situasi tersebut membuat polisi mengembangkan karakter atau cenderung bersifat negatif dalam berkomunikasi, seperti prasangka buruk, kecurigaan berlebihan, gaya yang opresif, agresif, dorongan untuk menonjolkan diri , sikap tidak menghargai, berkuasa dan tidak berempati. Upaya dalam pemberian perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan yaitu: 1. Upaya dalam pemberian pengawasan terhadap penyidik yang diduga melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, 2. Upaya dalam pemberian edukasi terhadap penyidik dalam melakukan penyidikan agar tidak adanya kesalahan dalam proses penyidikan sebagaimana yang telah diatur peraturan perundang-undangan, dan 3. Pemberian sanksi administrasi ataupun sanksi pidana bagi oknum polisi yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Tersangka

342
ARI
k

KEPASTIAN HUKUM KOORDINASI FUNGSIONAL ANTARA PENYIDIK KEPOLISIAN DAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PRAPENUNTUTAN (Kajian Terhadap Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Aridona Bustari, 1720112034, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 116 halaman, 2019

ABSTRAK

Prapenuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan hasil penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari Penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh Penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya bolak balik berkas perkara sehingga asas peradilan cepat dan kepastian hukum dapat tercapai. Dalam hal ini dibutuhkan koordinasi fungsional antara kedua instansi sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan lancar karena Penuntut Umum sebagai pengendali penuntutan (dominus litis) dapat mengarahkan jalannya Penyidikan sesuai dengan kebutuhan pembuktian nantinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan hukum peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang relevan, dengan pembahasan sebagai berikut 1) pengaturan koordinasi fungsional di institusi Kejaksaan berpedoman Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penangangan Perkara Tindak Pidana Umum yang bentuk koordinasi tersebut berupa konsultasi yang dituangkan ke dalam Berita Acara sesuai format surat yang telah diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/A/JA/02/2009. Hal ini bertolak belakang dengan Kepolisian yang tidak mengatur lebih terperinci ke dalam peraturan internalnya. 2) Pasal 138 Ayat (2) KUHAP terdapat kekosongan hukum yang mengakibatkan kepastian hukum tidak tercapai karena batas waktu penyidikan tambahan dalam Pasal ini tidak memiliki kekuatan hukum apabila dilanggar oleh Penyidik sehingga tidak tercapai kepastian hukum bagi korban ataupun tersangka.

Kata kunci : prapenuntutan, koordinasi fungsional, kepastian hukum.

344.09
IDZ
k

KAJIAN HUKUM TERKAIT PEMEKARAN NAGARI PERSINGGUNGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN HUKUM ADAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT

CH. Idzan Falaqi Harmer, 1610112025, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah Halaman (100), Tahun 2016

ABSTRAK

Nagari di Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat secara hukum nasional merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Dalam penelitian ini, mengkaji tentang persinggungan antara peraturan perundang-undangan dengan Hukum Adat di Provinsi Sumatera Barat terkait pemekaran nagari, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Melalui pendekatan konseptual, historis, komparatif dan yuridis penelitian ini berupaya untuk menemukan persinggungan peraturan perundang-undangan dengan hukum adat Minangkabau terkait pemekaran nagari, serta dampak dari persinggungan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nagari tak ubahnya seperti ungkapan sakarek ula-sakarek baluik, disebabkan belum terlaksananya prinsip otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana amanat reformasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan dan norma mengenai pemekaran atau pembentukan sebuah nagari baru menurut Hukum Adat Minangkabau belum sepenuhnya teradopsi di dalam ketentuan hukum nasional. Sehingga, nagari tak ubahnya seperti desa administratif yang hanya berbeda penamaan dengan Desa. Lalu, kejadian persinggungan norma antara Hukum Adat Minangkabau dengan Peraturan Perundang-undangan memberikan dampak yang cukup besar. Pemekaran nagari hanyalah dijadikan sebagai modal dan alat politik bagi sebagian kelompok pemangku kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan politik lokal, seperti: memperbanyak daerah pemilihan (dapil), syarat untuk memenuhi pemekaran sebuah kabupaten baru, dan peningkatan anggaran pemerintahan daerah melalui dana alokasi desa. Sehingga, semangat babaliak ka nagari belum sepenuhnya mampu mengembalikan hak dan kebutuhan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam menjalankan kehidupan bernagari, dengan mengedepankan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dan tanpa adanya intervensi dari pemerintah.

345
CHE
p

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TAHAP PENYIDIKAN (Studi di Kepolisian Resor Kota Padang)

Chentia Martha, 1510111125, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020,71 Halaman

ABSTRAK

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang telah diundangkan sejak Tahun 2014 tidaklah dapat dikatakan baru, meskipun demikian masih ada pihak-pihak yang belum mengetahui perihal undang-undang ini. Salah satu diantara pihak tersebut adalah korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mereka seringkali tidak mengetahui perlindungan hukum. Perlindungan hukum seperti apa yang seharusnya mereka peroleh baik dari Pemerintah, Kepolisian, Kejaksaan, Masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu perlu diteliti dan dianalisis lebih jauh mengenai pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan menyangkut perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu terdapat dua rumusan permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KDRT di tahap penyidikan di Polresta Padang. 2) Kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Resor Kota Padang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KDRT. Permasalahan yang dikemukakan diatas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan penulis yuridis sosiologis adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, pengambilan data penulis melakukan penelitian di Polresta Padang dan juga di perpustakaan Universitas Andalas. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut : Bahwa perlindungan korban KDRT menurut hukum pidana sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ada beberapa tahap, yakni tahap preventif melalui perlindungan, penempatan korban pada “rumah aman”, dan tahap kuratif baik kesehatan fisik maupun psikis, serta tindakan represif terhadap pelaku KDRT. Namun ketentuan Perlindungan Korban KDRT ditahap penyidikan oleh penyidik Polresta Padang belum diterapkan secara maksimal. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KDRT adalah, penyidik belum bisa menjamin keamanan dan perlindungan terhadap korban secara penuh, belum ada “rumah aman”, keluarga korban kurang kooperatif dengan penyidik, alokasi anggaran yang belum disediakan pemerintah, dan kurangnya koordinasi antar lembaga untuk perlindungan korban.

344.06
CIN
p

PENGATURAN TENAGA KERJA ASING TERAMPIL DI BIDANG JASA PARIWISATA DALAM KERANGKA ASEAN MENURUT MUTUAL RECOGNATION ARRANGEMENTS ON TOURISM PROFESSIONALS (MRA TP) DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Cindy Lawren Amelia, 1610111146, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 67 Halaman, 2020

ABSTRAK

Tenaga kerja asing merupakan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Tenaga kerja asing jasa pariwsata adalah orang yang bekerja di suatu wilayah diluar negaranya. Mutual Recognation Arragements On Tourism Professionals (MRATP) menjadi salah satu elemen penting dalam mobilisasi tenaga kerja professional pariwisata merupakan pendorong dala meningkatkan kualifikasi tenaga kerja pariwisata di kawasan ASEAN. Implementasi MEA Tahun 2015 menjadikan negara anggota ASEAN harus mempersiapkan kuantitas serta kualitas tenaga kerja professional pariwisata. Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN juga menggunakan tenaga kerja asing terampil untuk mengembangkan potensi wilayah Indonesi dan memerlukan keharmonisan yang berkaitan terhadap pengaturan tenaga kerja asing terampil dibidang jasa pariwisata. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah, (1) Bagaimana pengaturan tenaga kerja asing terampil di bidang jasa pariwisata dalam kerangka ASEAN menurut Mutual Recognation Arrangements On Tourism Professionals (MRATP), (2) Bagaimana implementasi pengaturan terhadap tenaga kerja asing di bidang jasa pariwisata di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan dapat menyimpulkan bahwa pengaturan MRATP terhadap fasilitas professional pariwisata TKA diakui oleh negara ASEAN harus memilliki sertifikat kompetensi pariwisata yang valid dan resmi terdapat dalam Pasal III dan IV MRATP. ASEAN Framework on Services (AFAS) dan MRAT telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan AFAS pada tanggal 30 Desember 1995. Implementasi pengaturan terdapat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi diBidang Pariwisata. Sertifikasi dan kompetensi akan menjadi poin tambahan untuk dapat bekerja di Negara Indonesia.

Kata Kunci : Tenaga kerja asing, jasa pariwisata, ASEAN, Mutual Recogantion Arragement on Tourism Professionals (MRATP)

343.09
CRI
p

PENERTIBAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN PADA KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI

Cris Dianti, 1610112073, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 84 Halaman, 2020

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menjelaskan tentang penguasaan negara terhadap penggunaandan pemanfaatan kekayaan alam. Ketentuan ini akhirnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 38 Ayat (3) Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menjelaskan bahwa penggunaan hutan dalam bidang pertambangan dapat dilakukan melalui izin pinjam pakai yang diberikan oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Namun peraturan tersebut ternyata belum berjalan secara optimal dan masih banyak ditemukan kegiatan pertambangan tanpa izin khususnya tambang emas. Kabupaten Merangin memiliki kawasan hutan yang banyak dijadikan sebagai tempat kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang membuat kawasan hutan menjadi rusak dan hancur. Berdasarkan persoalan yang dimaksud maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimanakah upaya penertiban pertambangan emas tanpa izin pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Merangin. 2) Bagaimanakah upaya penertiban pertambangan emas tanpa izin pada kawasan hutan produksi di Kabupaten Merangin. 3) Bagaimanakah koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam penertiban pertambangan emas tanpa izin pada kawasan hutan di Kabupaten Merangin. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik dan pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni: 1) Upaya penertiban pertambangan emas tanpa izin pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Merangin dilakukan oleh Polisi Kehutanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 51 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan dengan cara kegiatan preemetif, preventif, dan represif. Kegiatan penertiban tidak berjalan optimal yang disebabkan oleh keterbatasan jumlah polisi kehutanan dan kebiasaan masyarakat. 2) Upaya penertiban pertambangan emas tanpa izin pada kawasan hutan produksi di Kabupaten Merangin sama dengan penertiban pada kawasan hutan lindung, serta dibentuknya Tim Terpadu sesuai Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1235/KEP.GUB/ESDM-4.2/2019 untuk menanggulangi masalah, penertiban dan penghentian pertambangan emas tanpa izin. 3) Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam penertiban pertambangan emas tanpa izin pada kawasan hutan di Kabupaten Merangin dilakukan secara fungsional dan gabungan. Kegiatan Gabungan terdiri dari kegiatan Koordinatif dan Komando dalam bentuk Operasi Gabungan.

Kata Kunci: Penertiban, Pertambangan, Emas, Tanpa Izin, Kawasan Hutan.

346.02
DAN
t

TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR DALAM HAL KETERLAMBATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI REVITALISASI JAM GADANG

Dani Fajri, 1610113088,Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 halaman, 2020

ABSTRAK

Pekerjaan konstruksi tidak bisa dilakukan apabila tidak ada kontrak yang akan mengikatnya, kontrak yang dibuat oleh para pihak yaitu pemerintah sebagai pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi tidak selalu terlaksana dengan semestinya dan tidak sedikit muncul permasalan yang terjadi, seperti pada pekerjaan revitalisasi jam gadang yang berlokasi di Kelurahan Benteng Pasar Atas Kota Bukitinggi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa yaitu PT Citra Laksana Mandiri bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittingi yang sebelumnya telah menyepakati suatu perjanjian dengan nomor 30/SPK-DUPR-CK/VII-2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 16.499.206.000.00 yang dimulai pada tanggal 20 juli 2018 sampai dengan tanggal 29 desember 2018 atau sebanyak 163 hari. Permasalahan dalam penulisan ini adalah Berdasarkan uraian diatas permasalahan dalam tulisan ini adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pekerjaan kosntruksi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dengan PT Citra Laksana Mandiri. 2) Bagaimana bentuk tanggung jawab PT Citra Laksana Mandiri dalam hal keterlambatan pekerjaan konstruksi revitalisasi jam gadang. Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu PT Citra Laksana Mandiri selaku penyedia jasa telah lalai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan konstuksi revitalisasi jam gadang dan mengakibatkan pekerjaan tersebut tidak selesai dengan tepat waktu. Oleh karna itu si penyedia jasa harus membayarkan denda sebesar Rp 16.720.406.95 kepada penguna jasa dan harus menyelesaikan pekerjan tersebut. Saran penulis terhadap penyedia jasa yaitu mengkedepankan profesionalitas dalam melaukan sesuatu atau sebelum mengerjakan sesuatu agar tidak terjadi wanprestasi dan pekerjaan sesuai dengan terencana dan tepat waktu dan apabila ditemukan hal hal atau sesuatu yang diperjanjikan diluar kontrak maka pihak pemberi tugas segera memberkan peringatan dan apabila terjadi waprestasi, maka diselesakan dengan kesepaktan yang telah dibuat didalam kontrak.

347.05
DEB
p

PENITIPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL PADANG - PEKANBARU SEBAGAI KEPENTINGAN UMUM

Debby Khristina, 1820119009, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Penitipan ganti kerugian pada Pengadilan yang dilakukan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu solusi untuk mempercepat proses jalannya pembangunan. Ketidaksepakatan para pihak dalam hal ganti kerugian membuat Instansi dari pengelola proyek menggunakan mekanisme konsinyasi untuk menyelesaikan permasalahan ganti kerugian ini. Untuk itu, penelitian ini difokuskan pada tiga pokok permasalahan. Pertama, bagaimanakah proses penilaian dan penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru pada Ruas Jalan Padang-Sicincin? Kedua, bagaimana proses pengajuan keberatan terhadap penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian di Pengadilan Negeri Pariaman? Ketiga, bagaimana pelaksanaan penitipan ganti kerugian dalampengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru pada Ruas jalan Padang-Sicincin? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empirisdan untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dari penelusuran peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim Mahkamah Konstitusi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penilaian dan penetapan ganti kerugian pengadaan tanah dilaksanakan mulai dari proses penunjukan tim penilai, penilaian ganti kerugian oleh tim penilai, musyawarah, dan proses penetapan ganti kerugian. Penunjukan tim penilai ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan metode pengadaan langsung. Penilai melakukan penilaian dengan menggunakan Nilai Penggantian Wajar (Fair Replacement Value) dan mempedomani Juknis SPI 306. Hasil penilaian dijadikan dasar musyawarah penetapan ganti kerugian. Faktanya musyawarah yang dilakukan terjadi sebagaimana mestinya, namun harga yang ditetapkan oleh Penilai (Appraisal) seolah-olah hanya sebagai harga final yang mesti disepakati oleh Pihak yang Berhak, padahal harga yang direkomendasikan oleh Appraisal tersebut merupakan harga yang berkedudukan sebagai harga untuk melakukan negosiasi dengan masyarakat pemilik tanah. Proses Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Bentuk Dan/Atau Besarnya Ganti Kerugian Di Pengadilan Negeri Pariaman sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2016 dan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah. Pelaksanaan penitipan ganti kerugian tanah pada Pengadilan Negeri Pariaman juga dilakukan sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2016 dan dalam Pemberian Ganti Kerugiannya menunggu proses Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga bisa diberikan uang tersebut kepada Pihak yang Berhak menerimanya.

Kata Kunci: Penitipan Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum

344.03
DED
d

DAMPAK KELEBIHAN DAYA TAMPUNG DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUBUK BASUNG TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN SISTEM PEMASYARAKATAN

Deddy Desmawan Putra, 1410112088:Fakultas Hukum Universitas Andalas 52 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Sistem Pemasyarakatan adalah sistem yang bertujuan membentuk warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehinga dapat kembali diterima di masyarakat.Dalam mencapai tujuan Pemasyarakatan di Indonesia adanya faktor penghambat yaitu kelebihan daya tampung.Hal tersebut juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan di Sumatera Barat khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung.Penelitian ini dilakukan terhadap dampak kelebihan kapasitas terhadap tujuan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIB Lubuk Basung. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ini adalah dampak terjadinya kelebihan daya tampung di Lembaga Permasyarakatan Klas IIB Lubuk Basung dan upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Lubuk Basung dalam meminimalisasi dampak dari kelebihan daya tampung. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis.Hasil Penilitian Menunjukan kelebihan daya tampung di Lapas Kelas IIB Lubuk basung berdampak terhadap pembinaan dimana menimbulkan kendala terkait SDM dan Sarana Prasarana serta mengakibatkan beberapa kasus dan masalah.Upaya yang dilakukan Lapas Kelas IIB Lubuk Basung adalah berkoordinasi dengan Instansi terkait untuk tidak memindahkan Warga binaanya ke Lapas Kelas IIB Lubuk Basung.Diharapkan kedepanya Lapas Kelas IIB Lubuk Basung tetap optimal dalam pembinaan dan tetap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membantu pembinaan demi tercapainya tujuan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung.

Kata Kunci: Sistem Pemasyarakatan,Lembaga Pemasyarakatan,Kelebihan Kapasitas

345
DED
p

PERANAN SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES PAYAKUMBUH DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

Dede Hasgar, 1510112005, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 79 halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1 adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika, kepolisian melaksanakan tugas nya melalui Satuan Reserse Narkoba. Hal ini di atur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesi, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Peredaran Narkotika di wilayah Kota Payakumbuh didominasi oleh narkotika jenis Sabu-sabu dan Ganja. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana peranan Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Payakumbuh? 2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika dan bagaimana cara mengatasi nya? 3. Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbuh dengan BNN Kota Payakumbuh dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika. Upaya Represif yang dilakukan oleh Sates Narkoba Polres Payakumbuh adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk upaya represif adalah dengan razia dan bekerjasama dengan pemerintah kota Payakumbuh. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana, jumlah anggota, jaringan peredaran yang semakin meluas, modus operandi baru, dan masih ada masyarakat yang tidak peduli. Solusi nya adalah dengan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan juga mencerdaskan masyarakat tentang bahaya narkoba. Koordinasi dengan BNN juga dilakukan dengan mengutus anggota kepolisian sebanyak 4 orang untuk bertugas di BNN.

Kata Kunci: Kepolisian, Peredaran, Narkotika

346.01
DEN
p

PENETAPAN KEWAJIBAN NAFKAH TERHADAP ISTRI DAN ANAK – ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI PUTUSAN CERAI TALAK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 0785/Pdt.G/2017/PA.Sal

Deni Putra, 1610112061, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2020

ABSTRAK

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istriny, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan istrinya. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri, Majelis Hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri untuk memenuhi nafkah pasca bercerai talak. Hakim telah mengabulkan nafkah iddah termohon dalam konvensi selaku pemohon dan menghukum pemohon untuk membayarkan semua tuntutan dalam rekonvensi yang tercantum dalam amar putusan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: Pertama, bagaimana hubungan timbal balik antara putusnya perkawinan dengan hak dan kewajiban suami dan istri. Kedua, apa saja kewajiban suami terhadap istri dan anak-anak sebagai akibat cerai talak berdasarkan perkara nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Sal. Ketiga, bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban suami membayar nafkah terhadap istri dan anak-anak berdasarkan putusan cerai talak nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Sal. Adapun tujuan penulisan dan melakukan penelitian ini antara lain adalah, untuk mengetahui bagaimana hubungan timbal balik antara putusnya perkawinan dengan hak dan kewajiban suami dan istri, untuk mengetahui apa saja kewajiban suami terhadap istri dan anak-anak sebagai akibat dari cerai talak, selain itu juga untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban suami untuk membayar nafkah terhadap istri dan anak-anak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, dimana dalam hal ini data bersumber dari putusan nomor 0785/Pdt.G/2017/PA.Sal dari Pengadilan Agama Salatiga dan Peraturan- peraturan terkait dengan masalah Perkawinan. Dari data data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa hubungan timbal balik antara suami dan istri pasca bercerai talak adalah tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan dengan adanya perkawinan. Kewajiban mantan suami terhadap istri dan anak-anak adalah untuk membayarkan nafkah iddah kepada mantan istri dan bertanggung jawab atas nafkah anak sampai dia dewasa 21 tahun atau sudah menikah dan mampu unutk mengurus hidupnya sendiri. Selain itu juga prosedur pelaksanaan putusan hakim dan segala pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan kewajiban membayar nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Dan jika pihak suami tidak melaksanakan amar putusan hakim yang telah ditetapkan kepadanya, maka pihak istri dapat mengajukan gugatan sita eksekusi terhadap mantan suaminya agar dari hasil sitaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan nafkah iddah dan anak-anak yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim.

343.02
DIA
p

PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI KAWASAN WISATA KOTA PADANG OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT

Dian Ahmad Fauzi 1510112029, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 69 Halaman

ABSTRAK

Ombudsman Republik Indonesia memiliki fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik berasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pengawasan Ombudsman terhadap pelayanan publik di kawasan wisata Kota Padang merupakan suatu hal yang sangat penting, karena menyangkut kenyamanan dan hak masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik di kawasan wisata. Pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terdapat laporan dugaan penundaan berlarut dalam memberikan pelayananan di beberapa kawasan wisata Kota Padang. Diantaranya mengenai dugaan penundaan berlarut terkait penambahan ruas jalan pada jalan di depan Lapau Gadang Cimpago, Pantai Padang. Kemudian dugaan tidak memeberikan pelayanan terkait fasilitas, sarana, dan prasarana di kawasan Gunung Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan dan tindak lanjut Ombudsman terhadap pelayanan di kawasan wisata Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan pegawai/ pimpinan Ombudsman Republik Indonesia kantor perwakilan wilayah Sumatera Barat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, Ombudsman telah meminta klarifikasi kepada pihak Terlapor, dan pihak Terlapor sudah memberikan klarifikasi kepada Ombudsman bahwa penyediaan pelayanan terkait fasilitas, sarana, dan prasarana pada kawasan wisata Kota Padang sedang dalam dalam tahap proses pekerjaan. Oleh karena itu pihak Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat berpendapat tidak ditemukannya maladministrasi.

Kata kunci: Pengawasan, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumater Barat, Pelayanan Publik, Kawasan Wisata.

345
DIL
p

PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL (Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1B Bukittinggi)

Dilla Novita, 1610112009, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 67 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Peredaran Kosmetik Ilegal dikalangan masyarakat merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang merugikan banyak pihak. Hal ini dikarenakan kurang tertatanya pengawasan terhadap peredaran kosmetik illegal tersebut. Peredaran kosmetik yang sangat mudah untuk didapatkan menyebabkan tidak terkontrolnya peredaran kosmetik baik legal maupun illegal sehingga menyebabkan kekhawatiran masyarakat dari segi keamanan produk-produk kosmetik yang digunakan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu : 1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana peredaran kosmetik ilegal? dan 2. Apa saja faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya disparitas dalam pemidanaan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran kosmetik illegal tersebut terkait dengan kasus di Pengadilan Negeri Bukittinggi? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan (library research). Dari hasil penelitian kedua kasus, Majelis Hakim sama-sama menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan tindak pidana perdaran kosmetik illegal yang diatur dalam pasal Pasal 197 jo pasal 106 (1) Undang-Undang RI NO.36 tahun 2009 tentang kesehatan. Pada kasus pertama pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan Pada kasus kedua pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan denda sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana peredaran kosmetik illegal tersebut yaitu berdasarkan dua jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Adapun faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya disparitas dalam pemidanaan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran kosmetik illegal tersebut terkait dengan kasus di Pengadilan Negeri Bukittinggi beberapa diantaranya yaitu Masalah falsafah atau tujuan pemidanaan, Pedoman pemidanaan, Faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri. Namun demikian tetap pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas.

342.07
DIM
b

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBAGAI SUMBER UTAMA PENDANAAN PARTAI POLITIK (

Dimas Adytia Pratama. 1610111090, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2020

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan keuangan untuk partai politik. Namun permasalahan muncul ketika bantuan keuangan yang diterima terlalu kecil untuk mencukupi kebutuhan partai politik sehingga partai politik harus mencari dana untuk mencukupi kebutuhan partai yakni mencari sumbangan- sumbangan privat. Hal inilah yang menjadikan partai politik cenderung memperhatikan kepentingan penyumbang sehingga partai politik sebagai wahana memperjuangkan kepentingan rakyat menjadi tidak nyata. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Pertama, bagaimana pendanaan partai politik sebagai infrastruktur politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disingkat APBN) di Indonesia Kedua, bagaimana APBN sebagai sumber utama pendanaan partai politik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melalui studi kepustakaan yang didapatkan kemudian diolah secara sistematis dan dikaitkan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini diketahui pendanaan publik merupakan hal yang alamiah dan ongkos yang memang diperlukan untuk demokrasi yang dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk memberikan akses dana publik kepada partai politik karena partai politik menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Partai Politik. Namun saat ini bahwa sumber pendanaan partai politik masih didominasi dari pendanaan privat yang tentu akan mempengaruhi partai politik. Dengan APBN sebagai sumber utama akan membantu mencukupi kebutuhan partai dan menjauhkan partai politik dari kepentingan privat. Sebelum menerima bantuan dana publik ini, partai bisa diminta menyerahkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) di awal tahun sebagai pertimbangan yang diikuti dengan mengidentifikasi item belanja partai politik. Bantuan keuangan ini dapat dialokasikan kepada partai politik dalam bentuk langsung (tunai) maupun tidak langsung (barang ataupun fasilitas seperti iklan di media massa/elektronik, fasilitas gedung pertemuan, dan lainnya) yang diberikan persis sejumlah pengeluaran partai politik yang disesuaikan dengan jumlah APBN.

Kata kunci : Partai politik, Sumber pendanaan, Utama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

343.09
DIN
p

PENGAWASAN TERHADAP PELESTARIAN HARIMAU SUMATERA DI TAMAN HUTAN RAYA BUNG HATTA

Dina Sari Alfioda, 1510112186, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019

ABSTRAK

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa: "bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Undang-undang Dasar tersebut mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Dalam rangka menjaga kelestarian jenis satwa yang berada di dalam habitatnya agar selalu lestari dan terhindar dari ancaman kepunahan maka Pemerintah menerbitkan Undang-undang yang mengatur mengenai sumber daya alam hayati yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dikelola oleh Pemerintah. Di antara jenis satwa yang dilindungi salah satunya terdapat sub spesies harimau yaitu Harimau Sumatera yang keberadaanya hampir terancam punah. permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap pengawetan Harimau Sumatera di Taman Hutan Raya Bung Hatta? 2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan terhadap pengawetan Harimau Sumatera di Taman Hutan Raya Bung Hatta?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Data didapat dengan wawancara dengan Polisi Hutan/ PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam, serta dengan UPTD Taman Hutan Raya Bung Hatta di Dinas Pertanian Kota Padang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) Pelaksanaan terhadap pengawetan Harimau Sumatera di Taman Hutan Raya adalah dengan melakukan patroli rutin dalam 3 bulan sekali di kawasan Taman Hutan Raya serta dengan melakukan pembersihan jerat di sekitaran area kawasan Taman Hutan Raya dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan pemburuan Harimau Sumatera, 2) Dalam melakukan pengawasan terhadap pengawetan Harimau Sumatera terdapat kendala-kendala seperti terbatasnya sumber daya manusia, terbatasnya dana dan kurangnya sarana dan prasarana untuk keperluan dan kepentingan pengawetan. Dalam melakukan pengawasan terhadap pengawetan Harimau Sumatera BKSDA melakukan berbagai upaya seperti upaya preventif dan represif serta Sebagai tindak lanjut dari pengawasan terhadap pengawasan terhadap pengawetan satwa langka terdapat beberapa kendala- kendala yang dihadapi oleh BKSDA.

Kata Kunci : Pengawasan, Pengawetan, Harimau Sumatera

346.01
DIN
p

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK NAFKAH KEPADA ISTRI DAN ANAK DARI PERKARA REKONVENSI SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DIPENGADILAN AGAMA KELAS IB KOTA PAYAKUMBUH (Studi Kasus Perkara No. 86/Pdt.G/2020/PA.Pyk)

Dinda Dwi Utari, 1610111053, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 Halaman, 2020

ABSTRAK

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir bathin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut. Perceraian dapat terjadi karena talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri. Pada awalnya perkara No.86/Pdt.G/2020/PA.PYK. Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:(1) Bagaimanakah proses rekonvensi dalam cerai talak terhadap perkara No.86/Pdt.G/2020/PA.PYK. (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan rekonvensi terhadap perkara No.86/Pdt.G/2020/PA.PYK (3) Bagaimanakah pelaksanaan pemberian hak nafkah kepada istri dan anak dari perkara rekonvensi sebagai akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Kota Payakumbuh terhadap perkara No.86/Pdt.G/2020/PA.PYK?. Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan data primer sebagai data utama yang berupa data diambil langsung dilapangan melalui wawancara semi terstruktur dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Kota Payakumbuh yaitu Bapak Drs.Zainal Arifin,S.H.,M.A dan Ibu Drs.Hj. Yuhi, M.A serta pihak Termohon atau Penggugat Rekonvensi dalam perkara No.86/Pdt.G/2020/PA.Pyk. Sedangkan data sekunder berupa data yang penulis peroleh dari bahan kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan editing dan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif analisis sehingga diproleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak kepengadilan agama setelah itu menghadiri persidangan untuk melakukan mediasi, namun mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban replik, duplik pada tahap ini termohon mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) kemudian dilanjutkan dengan pembuktian dan kesimpulan. (2) Pertimbangan hakim dari segi yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian dari dari segi filosofis hakim memutuskan menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak dan kewarganegaraan, selanjutnya dari segi sosiologis hakim memutuskan atas dasar tanggung jawab suami atau bapak dari anak terhadap pemberian nafkah. (3) Pelaksanaan pemberian hak nafkah kepada istri dan anak dari perkara rekonvensi telah dilaksanakan sesuai dengan putusan berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Cerai Talak, Gugatan Rekonvensi, Hak Nafkah Istri dan Anak

345
DIT
p

PERAN RESKRIM POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR DI KOTA PADANG

Dita Putri Yuliani.1410111066.Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV (Hukum Pidana.74 Halaman.Tahun 2020

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangatlah meresahkan masyarakat yang pada umumnya sangatlah percaya dan yakin akan tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang untuk memberantas kejahatan tersebut. Akan tetapi semakin berkembangnya zaman dan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga dilakukan oleh kalangan pelajar. Pelajar yang pada umumnya berhak mendapatkan pendidikan yang cukup malah terlibat juga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengetahui peranan aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Padang, mengetahui faktor penyebab pelajar melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Padang dan mempelajari dan mengetahui faktor penghambat pihak aparat kepolisian dalam melaksanakan perannya dalam menanggulangi tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Kota Padang. Dilihat dari sifatnya penelitian ini penelitian yuridis sosiologis. Populasi dari penelitian ini adalah Kasat Reskrim dan Kanit Jatarnas. Metode penentuan sampel melalui purposive sampling. Data dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terstruktur. Pengelolahan data dilaksanakan editing data dan coding data. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Peranan aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sudah berjalan akan tetapi masih lemah proses penegakkan hukumnya, hal tersebut terlihat dari pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan semakin meningkat setiap tahunnya. Penyebabnya adalah dikarenakan faktor lingkungan, faktor ekonomi dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Hambatan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah kurangnya partisipasi masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut.

347.05
DWI
s

SENGKETA KEPEMILIKAN KEPULAUAN KURIL ANTARA JEPANG DAN RUSIA DITINJAU BERDASARKAN VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES TAHUN 1969

Dwi Eltesa Putri, 1510112046, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 hlm, 2019

ABSTRAK

Kepulauan Kuril menjadi permasalahan antara Jepang dan Rusia yang telah berlangsung lama. Sengketa yang terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang sejarah dan perbedaan penafsiran perjanjian yang sampai saat ini dipermasalahkan siapa pemiliknya karena Jepang dan Rusia bersikukuh dengan dasar klaimnya masing-masing sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan. Beberapa perundingan telah dilakukan, tapi sampai saat ini tidak membuahkan hasil. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat diteliti bagaimana status kepemilikan Kepulauan Kuril ditinjau dari Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 dan bagaimana penyelesaian sengketa untuk diterapkan terhadap sengketa Kepuluan Kuril. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwasannya beberapa perjanjian yang digunakan sebagai dasar klaim atas kepemilikan Kepulauan Kuril tidak memenuhi unsur-unsur pokok perjanjian, yaitu tidak berdasarkan kesepakatan para pihak, dan juga menganalisis berdasarkan prinsip-prinsip perjanjian internasional seperti pacta sunt servanda, pacta tertiis nec nocent net prosunt, dan asas rebus sic stantibus dalam perjanjian- perjanjian tersebut. Penyelesaian sengketa Kepulauan Kuril antara Jepang dan Rusia dapat ditempuh Arbitrase, Konsiliasi, dan Mahkamah Internasional mengingat berbagai pertemuan telah dilakukan oleh kedua pihak namun masih belum menemukan hasil.

Kata kunci: Kepulauan Kuril, Vienna Convention on the Law of Treaties, Jepang, Rusia

348.3
DWI
t

TANGGUNGJAWAB PT. JNE EXPRESS TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUSAKAN BARANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dwi Nitra Nofela, 16102074, Fakultas Hukum Universitas Andalas, ... hlm, 2020

ABSTRAK

Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan kehidupan sehari hari, selain itu pengangkutan juga melambangkan peradaban manusia, khususnya dalam bidang teknologi dan transportasi. Jasa pengangkutan barang salah satunya adalah jasa PT. JNE. JNE merupakan perusahaan dalam bidang kurir ekspres dan logistik. Sebagai perusahaan jasa pengangkutan JNE mempunyai hak dan kewajiban terhadap paket dan barang yang akan dikirim oleh konsumen. Dalam proses pengangkutan, jika terjadi kerusakan pada barang yang ditinjau dari undang-undang pasal 468 KUHD ayat 1 persetujuan pengangkutan untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkutnya mulai saat diterimanya hingga diserahkannya barang tersebut. Mengenai pelaksanaan perjanjian pegangkutan barang, tidak selamanya berjalan dengan lancar. Pengiriman dengan menggunakan servis YES (yakin esok sampai) dimana dari pihak penyedia jasa pengirimannya akan sampai pada tempat tujuan dalam waktu satu hari. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang 1) Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian pengiriman barang pada PT. JNE Express? 2) Bagaimana tanggung jawab PT. JNE Express terhadap kerusakkan barang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, diperoleh hasil sebagai berikut 1) Bentuk pelaksanaan perjanjian PT. JNE Express adalah Nomor resi yaitu form pengisian pengiriman barang. Selain nomor resi juga ada SSP (Syarat Standar Pengiriman) yang terdapat pada lembaran kedua dari Resi. 2) Tanggung jawab terhadap kerusakan barang dilakukan dengan bentuk penggantian berupa sejumlah uang yaitu maksimum 10 kali biaya pengiriman barang. Namun berbeda jika barang tersebut diasuransikan, maka pihak JNE memberikan bentuk ganti rugi berupa 10 kali biaya kirim beserta harga suatu barang yang rusak tersebut. Bersadarkan kesimpulan tersebut kemudian penulis menyarankan agar konsumen seharusnya mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan agar penyedia jasa juga dapat memberikan pemahaman dengan baik mengenai perjanjian pengiriman dan yang ada di perusahaan penyedia jasa tersebut.

Kata Kunci: Tanggungjawab, PT.JNE, Undang-Undang Perlindungan Konsumen

343.09
DWI
p

PENGAWASAN TERHADAP MUTU DAN KEAMANAN HASIL PENGOLAHAN IKAN DI KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dwiza Shabrina, 1610113038, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 72 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Perikanan merupakan salah satu hasil kekayaan alam, yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Salah satu kegiatan perikanan adalah pengolahan ikan. Untuk meningkatkan mutu dan keamanan hasil pengolahan ikan diperlukan pengawasan. Pengawasan terhadap mutu dan keamanan hasil pengolahan ikan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai tambah Produk Hasil Perikanan. Mutu dan keamanan hasil pengolahan ikan di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan diawasi oleh Dinas Perikanan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Bentuk Pengawasan terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Pengolahan Ikan di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan 2) Bagaimana tindak lanjut pengawasan terhadap mutu dan keamanan hasil pengolahan ikan di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif, jenis penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder dengan sumber datanya berasal dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan dianalisis menggunakan analisis data yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pertama, pengawasan yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan berbentuk : a.) upaya preventif berupa bimbingan dan fasilitasi kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan mutu dan keamanan hasil pengolahan ikan, b.) upaya represif dilakukan melalui pemantauan dengan cara pengambilan sampel ikan untuk diteliti dan evaluasi. Jika hasil yang diteliti menunjukkan sampel belum memenuhi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil pengolahan ikan maka dilakukan pembinaan yang berbentuk sosialisasi, penyuluhan dan peran serta masyarakat. Kedua, tidak adanya tindak lanjut yang dilakukan Dinas Perikanan dalam melakukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan hasil pengolahan ikan di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Idealnya jika pengolahan ikan telah memenuhi standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan harus diberikan apresiasi berupa rekomendasi penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan. Jika belum memenuhi, maka kepada pelaku usaha itu harus diterapkan sanksi.

Kata Kunci : Pengawasan, Mutu dan Keamanan, Pengolahan Ikan

343.09
DED
p

PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DI KOTA PADANG

Dedek Astani, 1820123024, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 94 halaman, 2020

ABSTRAK

Dalam kehidupan bernegara, setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Meskipun demikian, bukan berarti setiap orang bebas untuk berbuat apa saja, segala sesuatunya memiliki aturan hukum yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang mengatur. Dengan kata lain hukum harus ditegakkan agar tercipta kehidupan yang harmonis. Penegakkan hukum tersebut juga tidak terkecuali bagi PPAT, PPAT juga dapat dikenakan sanksi apabila melanggar aturan hukum. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas jabatannya PPAT harus mendapatkan pengawasan supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap jabatannya. Dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT harus berpedoman pada aturan tersebut, agar dapat menjalankan tugas jabatannya dengan baik. Namun ketika PPAT melanggar aturan, tidak tertutup kemungkinan adanya penjatuhan sanksi kepada PPAT tersebut, seperti pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian sementara, atau bahkan dengan teguran tertulis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Empiris yang dianalisis secara kualitatif. Untuk memperkuat hasil penelitian maka dilakukan wawancara dengan pihak terkait di tempat lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Kepala Kantor Wilayah BPN/ Kepala Kantor Pertanahan memiliki wewenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT, dimana Kepala Kantor Wilayah BPN/ Kepala Kantor Pertanahan membentuk Majelis Pengawas dan Pembina PPAT untuk membantu menyampaikan dan menjelaskan kebijkan yang telah ditetapkan oleh Menteri perihal pelaksanaan tugas jabatan sebagai PPAT. Kemudian meskipun sudah diberlakukannya Permen Nomor 2 Tahun 2 hukum tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. PPAT yang sedang menghadapi permasalahan hukum seakan-akan berjuang sendiri tanpa adanya pengawasan dari Majelis Pembina dan Pengawas PPAT. Bahkan PPAT yang memang sudah dinyatakan bersalah tidak mendapatkan sanksi dari BPN atau Majelis Pembina dan Pengawas PPAT. Dengan kata lain, pengawasan terhadap PPAT tersebut tidak ada dilakukan sama sekali. Selanjutnya, terdapat kendala dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT oleh BPN dan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT seperti : Belum adanya petunjuk teknis (juknis) / petunjuk pelaksanaan (juklak) bahkan belum adanya Standar Operasi Prosedur (SOP) yang jelas dan tegas mengenai pengawasan terhadap PPAT. kemudian tidak seimbangnya antara jumlah Majelis Pembina dan Pengawas PPAT dengan jumlah PPAT itu sendiri menyebabkan terkendalanya proses pengawasan oleh BPN dan Majelis Pembina dan PengawasPPAT.

Kata kunci : Pengawasan , BPN, dan Pelanggaran PPAT

346.08
EGI
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS DANA YANG DIINVESTASIKAN PADA PRODUK REKSADANA PT MINNA PADI ASET MANAJEMEN YANG DIBUBARKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Egi Rahmat Ibadurahim, 1610112084, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 66 halaman, 2020

ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk hidup yang hidup berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Manusia dalam perkembangannya yang terdiri dari individu-individu tersebut membentuk suatu struktur organisasi yang lebih kompleks yang dimana terdapat wilayah,penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat yang dinamakan dengan negara.Dalam negara ada suatu aktivitas ekonomi yang dinamakan investasi.Investasi salah satu caranya yakni melalui pasar modal melalui instrumen keuangan reksadana.Reksadana sangat berkembang di Indonesia. Namun, reksadana tidak luput dari permasalahan terutama pada proses pembubaran produk reksadana.Produk reksadana yang dibubarkan adalah produk reksadana keluaran PT.Minna Padi Asset Manajemen oleh Otoritas Jasa Keuangan.Produk tersebut dibubarkan karena melanggar ketentuan yakni menjanjikan timbal balik hasil yang tetap dan melanggar dari dari undang-undang perlindungan konsumen.Akibatnya, dana yang berada di produk reksadana tersebut ikut terancam karena proses pembubaran dan adanya indikasi pelanggaran hak dari konsumen produk reksadana tersebut.Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:pertama, para pihak yang terlibat dalam proses pembubaran, kedua perlindungan dari peraturan perundang-undangan terhadap proses pembubaran, ketiga upaya yang dapat dilakukan investor atas pemenuhan haknya dari produk reksadana yang dibubarkan.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.Sifat penelitian ini adalah deskriptif karena diharapkan penelitian ini dapat mendapatkan gambaran yang menyeluruh.Kesimpulan yang didapat adalah: Pertama, para pihak yakni investor, manajer investasi,bank kustodian, dan otoritas jasa keuangan mendapat hak dan kewajiban masing-masing dalam proses pembubaran reksadana. Kedua bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan yakni bersifat preventif dan represif yang terdapat pada undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang pasar modal, KUH perdata, dan peraturan otoritas jasa keuangan yang berkaitan tentang reksadana kontrak investasi kolektif dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Ketiga upaya hukum yang dapat ditempuh investor untuk pemenuhan haknya yakni upaya non-litigasi yakni melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan litigasi melalui pengadilan negeri.

Kata kunci:Perlindungan hukum,Investasi,Reksadana

343.09
ELF
f

FUNGSI DAN TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SUMATRA BARAT DALAM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

Elfika Rahmi, 1610111082, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK V Hukum Tata Negara

ABSTRAK

Menurut Pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden". Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia memiliki lembaga-lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, lembaga penyelenggara Pemilihan Umum terdiri dari KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum, DKPP, lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggara Pemilihan Umum diseluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilihan Umum memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggara Pemilihan Umum, dan menindak lanjuti temuan atau laporan kepada intani yang berwenang. Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memiliki wewenang untuk memutus pelanggaran administrasi sehingga temuan Pemilihan Umum tidak hanya bersifat rekomendasi tetapi tidak hanya bersifat keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak, Badan Pengawas Pemilihan Umum juga diberikan mandat dasar perupa pencegahan dan menindak tahapan pelanggaran Pemilihan Umum dan sengketa Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan pelanggaran Pemilihan Umum pelapor tindak pidana Pemilihan Umum telah ada dilakukan dikantor Badan Pengawas Pemilihan Umum yang diterima langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, kepolisian, dan kejaksaan, maka berdasarkan hal tersebut tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul fungsi dan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Barat dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Dari paparan penulis diatas maka ditariklah beberapa rumusan masalah yaitu. Pertama Bagaimana pelaksanaan fungsi dan tugas pokok badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu dalam Pelanggaran Pemilihan umum. kedua Apa saja persoalan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Umum. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang terjadi dilapangan yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang dikumpulkan dilapangan, data diperoleh melalui teknik wawancara yang diperoleh dikantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Barat. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas badan pengawasaan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam sentra penegakan hukum terpadu belum terlaksana dengan optimal. Hal ini disebabkan kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yaitu pertama perbedaan pemahaman terkait jangka waktu pelapor tujuhari sejak diketahui dan ditemukan, kedua kendala pelapor ke Badan Pengawas Pemilihan Umum yang menggunakan hari kerja, ketiga terkait tersangka yang merupakan anak dibawah umur, empat tidak adanya ancaman pidana bagi seseorang yang penyuruh melakukan, lima tidak adanya upaya paksa penghadiri saksi. Maka dari itu Badan Pengawasan Pemilihan Umum masih belum sepenuhnya untuk melakukan tindakan yang dikarnakan adanya keterbatasan dalam melakukan pelanggaran Pemilihan Umum.

343.04
EMI
p

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TANJUNG LOLO KECAMATAN TANJUNG GADANG KABUPATEN SIJUNJUNG

Emi Ramon, 1510112154, Fakultas Hukum, 2020, 66 halaman

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum oleh sebab itu setiap kebijakan serta prilaku alat-alat negara beserta segala rakyat Indonesia harus berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, hal ini tak terkecuali juga berlaku dalam menjalankan roda pemerintahan. Guna mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada alinea ke-4 yang berbunyi "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Oleh karena itu pemerintah harus menjalankan roda pemerintahanya sesuai dengan peraturan. Salah satunya ialah Pemerintahan Nagari Tanjung Lolo yang berada dalam kecamatan Tanjung Gadang kabupaten Sijunjung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintahan nagari dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Lolo. Maka berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Lolo? 2) Apa saja kendala yang ditemui dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Lolo? Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil, yakni 1) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Lolo pada umumnya sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ada walau dalam hal Pendapatan nagari Masih belum bisa dimaksimalkan oleh pemerintahan nagari tanjung Lolo 2) Dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tanjung Lolo Pemerintahan nagari cenderung tertutup dan kurang melibatkan masyarakat sehingga untuk peran aktif masyarakat dalm pengawasan maupun peran aktif dalam mensukseskan program- program pemerintahan nagari kurang.

Kata Kunci: Pemerintahan Nagari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

346.08
EMI
p

PELAKSANAAN ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU DI KABUPATEN TANAH DATAR

Emil Habibbul Azim, 1510112012, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK (II) Perdata Bisnis, 64 Halaman, 2019

ABSTRAK

Kementrian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2016 mengimplementasikan program asuransi yang khusus di peruntukan untuk ternak sapi/kerbau, program ini bernama Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K). Asuransi Usaha TernakSapi/Kerbau ini merupakan sebuah skema asuransi kerugian yang menanggung risiko atas kematian dan kehilangan hewan ternak sapi atau kerbau yang dikombinasikan dengan subsidi premi oleh pemerintah terhadap ternak sapi atau kerbau yang diikutsertakan. Pelaksanaan program asuransi ini tentunya ada syarat dan prosedur untuk mengikuti program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau ini, maka dari itu Penulis mengkaji dan membahas mengenai tata cara pelaksanaan dalam mengikuti program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau. Pada penulisan ini, Penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (socio legal research) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat pada teori dan aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku dikaitkan dengan fakta dan prakteknya dilapangan dengan melakukan penelitian.. Hasil penelitian dan pembahasan yang mengikuti program Asuransi Usaha ternak Sapi/Kerbau adalah peternak yang melakukan pembibitan dan/atau pengembangbiakan, sapi dan kerbau betina, masih produktif minimal umur 1 tahun dan maksimal 8 tahun, peternak skala kecil. Prosedurnya adalah tertanggung mendaftarkan diri melalui UPT Dinas Pertanian Bidang Peternakan Setempat, visitasi oleh Penanggung PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan petugas lapangan memasang eartag pada telinga sapi atau kerbau. Prosedur pembayaran klaim dilaksanakan dalam jangka waktu 14 hari kerja terhitung mulai tanggal persetujuan klaim oleh penanggung. Pembayaran klaim oleh penanggung lansung dibayarkan lansung ke nomor rekening tertanggung.

Kata Kunci: Asuransi, Usaha Ternak Sapi atau Kerbau, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

345
RID
p

PEMBARUAN HUKUM PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Ridhollah Agung Erinsyah, 1720112014, Magister Ilmu Hukum, UNAND, 2019, 183 halaman

ABSTRAK

Perkembangan negara yang semakin komplek menimbulkan berbagai permasalahan baru yang melibatkan korporasi, salah satunya tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi. Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi sudah dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap pengurus, korporasi, dan kepada pengurus serta korporasinya. Konsep penegakan hukum yang terus berkembang memunculkan suatu pendekatan atau metode penyelesaian permasalahan yang miniti beratkan kepada pemulihan serta pimbinaan dalam penerapan sanksi yang diberikan, pendekatan tersebut dikenal dengan keadilan restoratif. Akan tetapi konsep tersebut belum secara menyeluruh diterapkan dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia apalagi terhadap korporasi. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia? 2) Bagaimanakah konsep keadilan restoratif dalam pengembalian kerugian negara dari korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian bersifat deskriptif analisis. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Cara mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dan studi pustaka. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kesimpulan Penelitian: 1) Keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia sudah mulai diterapkan tetapi belum secara menye luruh atau baru sampai pada tahap sebagain, keadilan restoratif dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam Konvensi UNCAC Tahun 2003 (United Nations Convention Against Corroption) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Dalam beberapa kasus yang berkaitan dengan korporasi di Indonesia pernah diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif seperti dalam kasus PT. Bank Lippo TBK dan Khasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). 2) Konsep keadilan restoratif dalam pengembalian kerugian negara dari korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, belum ada aturan yang mengatur tentang bagaimana penerapan restoratif justice terhadap korporasi. Pendekatan keadailan restoratif memiliki banyak kesamaan dengan metode penyelesaian tindak pidana yang melibatkan korporasi di Amerika Serikat, metode tersebut dikenal dengan Defered Prosecution Agreement (DPA) dan Non Prosecution Agreements (NPA). Pada prinsipnnya DPA atau NPA merupakan kesepakatan antara jaksa dan korporasi untuk sepakat menunda ataupun tidak melakukan penuntutan asalkan korporasi tersebut memenuhi ketentuan yang ditetapkan, perjanjian tersebut dikenal sebagai Perjanjian Penangguhan Penuntutan (Defered Prosecution Agreement) atau Perjanjian Untuk Tidak Dituntut (Non Prosecution Agreements).

Kata Kunci: Pembaruan Hukum Pidana, Keadilan Restoratif, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi.

346.02
EMI
p

PENGAMBILALIHAN BLOK ROKAN DARI PT CHEVRON PASIFIC INDONESIA OLEH PT PERTAMINA (PERSERO) ATAS KONTRAK KERJA SAMA DALAM SISTEM KONTRAK BAGI HASIL (PRODUCTION SHARING CONTRACT)

Emillia Syaputri, 1610113001, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 77 Halaman, 2020

ABSTRAK

Kegiatan usaha migas merupakan salah satu aset yang sangat penting untuk memberikan manfaat besar bagi Negara Indonesia. Pengelolaan kegiatan usaha hulu migas dilakukan dengan kontrak kerja sama yang dijalankan berdasarkan Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contract (PSC) antara kontraktor dengan Pemerintah. Ironisnya, sebagian besar kontraktor pada industri hulu migas Indonesia masih didominasi oleh perusahaan minyak bertaraf Internasional, salah satunya Chevron. Sehingga, pada kasus blok migas yang kontrak kerja samanya akan berakhir seperti Blok Rokan, pemerintah Indonesia mengamati apakah layak perusahaan pelat merah Indonesia PT Pertamina mengelola blok migas tersebut. Pertengahan tahun 2018, pengelolaan Blok Rokan secara resmi dikelola oleh PT Pertamina setelah mengevaluasi penawaran perusahaan tersebut dengan beberapa pertimbangan, salah satunya terjadi perubahan skema kontrak yang baru. Perubahan skema kontrak pada Blok Rokan terjadi saat PT Pertamina mengambil alih blok tersebut. Sebelum kontrak Blok Rokan berakhir di tahun 2021, dalam proses peralihannya terdapat beberapa permasalahan berupa penurunan produksi yang semakin menurun selama masa transisi. Adanya permasalahan tersebut, peneliti akan mengkaji lebih lanjut mengenai perubahan skema kontrak pada proses pengambilalihan kelola Blok Rokan. Rumusan masalahnya yang akan diteliti adalah Pertama, Bagaimana sistem kontrak bagi hasil (PSC) setelah kontrak kerja sama PT Chevron Pasific Indonesia berakhir di Blok Rokan. Kedua, Bagaimana pengambilalihan Blok Rokan dari PT Chevron Pasific Indonesia oleh PT Pertamina atas ketidakberlanjutan kontrak kerja sama bagi hasilnya. Untuk menunjang hasil pembahasan dari masalah, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan adanya pergantian skema sistem kontrak bagi hasil (PSC) setelah kontrak kerja sama Chevron berakhir di Blok Rokan yang sebelumnya menggunakan skema cost recovery menjadi gross split sesuai dengan peraturan yang berlaku dan proses pengambilalihan Blok Rokan dari Chevron kepada PT Pertamina atas ketidakberlanjutan kontrak kerja samanya dilakukan dengan mengajukan permohonan proposal kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, pengajuan proposal dari para pihak dinilai sangat tidak wajar untuk diterapkan.

Kata Kunci: Production Sharing Contract, Blok Rokan, Gross Split.

345
EMI
p

PELAKSANAAN KEWENANGAN PENERIMAAN LAPORAN ATAU PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT

Emil Rizal, 1310112074, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76+ Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Sebagai salah satu institusi penegak hukum kepolisian merupakan satu dari empat subsistem sistem peradilan pidana. Kepolisian sebagai aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya akan selalu berhubungan dengan masyarakat. Hubungan antara kepolisian dengan masyarakat tersebut yaitu dalam bentuk peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana pidana yang dilaporkan atau yang sedang terjadi di masyarakat. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada kepolisian baik lisan maupun tulisan. Penerimaan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana merupakan salah satu kewenangan kepolisian yang diberikan oleh Undang-undang. Namun pada pelaksanaannya ditemukan adanya laporan atau pengaduan masyarakat yang ditolak oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Sumatera Barat dengan berbagai alasan tertentu yang mengakibatkan proses penegakkan hukum tidak terlaksana dengan baik serta berpotensi merugikan pelapor atau korban tindak pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan kewenangan penerimaan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu kepolisian berkewajiban menerima setiap laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana yang dilaporkan masyarakat dan 2) Kendala yang dihadapi oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumbar dalam menerima laporan atau pengaduan seperti kekurangan personil dan jabatan serta belum maksimalnya kapasitas di tubuh organisasi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

343.04
EZI
t

TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR KECAMATAN SEMBILAN KOTO YANG MUTASI TERHADAP TUNGGAKAN PINJAMAN (Studi Kasus : Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Bukit Gading, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya)

Ezi Nurman, 1610112058, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 78 Halaman, 2020

ABSTRAK

Pinjaman pada koperasi dikenakan bunga yang relatif rendah dibandingkan dengan pinjaman pada bank ataupun lembaga keuangan lainnya, sehingga pegawai negeri dapat terhindar dari jeratan-jeratan lembaga keuangan berbunga tinggi bahkan terhindar dari rentenir yang memberikan bunga yang tidak masuk akal, dengan demikian melalui kredit di koperasi dapat didorong kemampuan berusaha pegawai negeri sipil agar kesejahteraan dapat ditingkatkan. Salah satu koperasi yang bertekad mewujudkan tujuan tersebut adalah Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia Bukit Gading yang terletak di Jorong Silago, Kenagarian Silago, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah pelaksanaan simpan pinjam pada Koperasi Pegawai Negeri Bukit Gading ? (2) Bagaimanakah penyelesaian terhadap tunggakan pinjaman bagi anggota yang mutasi? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Koperasi Pegawai Negeri Bukit Gading, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya. Sumber data berasal dari lapangan dan kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, serta pengolahan data yang dilakukan secara analisis. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Proses peminjaman KP-RI Bukit Gading dilakukan melalui proses pengajuan permohonan, identifikasi, pencairan dana, dan pembayaran. (2) Pada anggota luar biasa terjadi tunggakan angsuran karena mutasi dan longgarnya aturan terhadap anggota luar biasa. (3) Rendahnya kesadaran anggota luar biasa untuk membayar tunggakan kredit dan lemahnya realisasi aturan oleh pengurus koperasi. Kata

Kunci: Koperasi, Tunggakan Pinjaman, Kredit Macet.

342.07
FAD
p

PEMBATALAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DARI PENGURUS PARTAI POLITIK DI DALAM PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG LARANGAN RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI PENGURUS PARTAI POLITIK

Fadilhamzah Zikril Hakim, 1610111040, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2020, 102 halaman

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, mulai dari 1999 sampai tahun 2002. Perubahan Undang-undang Dasar 1945 ini memunculkan lembaga- lembaga negara baru. Anggota Dewan Perwakilan Daerah terdiri dari 1/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Masing-masing provinsi terdiri dari 4 orang perwakilan yang menjabat sebagai dewan perwakilan daerah. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana konsep dewan perwakilan daerah menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apakah komisi pemilihan umum memiliki kewenangan dalam membuat peraturan untuk membatalkan pencalonan anggota dewan perwakilan daerah dari pengurus partai, dan bagaimana komisi pemilihan umum menjalankan kewenangannya dalam membatalkan pencalonan anggota dewan perwakilan daerah dari pengurus partai berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder serta metode pengumpulan data berupa studi dokumen (kepustakaan). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dewan perwakilan daerah menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, mengetahui kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam membuat peraturan untuk membatalkan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari pengurus partai, dan mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak boleh dari pengurus partai, karena mekanisme pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah harus perseorangan sebagaimana yang terdapat pada pasal 60a Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.26 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan pasal 22e ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa peserta pemilu anggota DPD itu perseorangan. KPU terlibat dalam hal ini karena dari kasus Oesman Sapta Odang, maka peran dari komisi pemilihan umum sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan di dalam pemilihan umum, terutama dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah yang tidak boleh dari pengurus partai politik.

Kata Kunci : Pemilihan Umum , Dewan Perwakilan Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi, Partai Politik.

345
FAR
f

FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL MILIK PERUSAHAAN RENTAL DAN UPAYA PENANGGULANGAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG

Farah Ghassani, 1610111004, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Pemenuhan kebutuhan ekonomi dan fasilitas khususnya mobil, merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat pada saat ini salah satunya dengan cara merental mobil. Rental mobil masih diminati dalam masyarakat karena tidak semua memiliki kendaraan pribadi maka adanya rental memudahkan untuk dapat memiliki kendaraan walau hanya sementara namun sangat berguna bagi masyarakat. Semakin tingginya kebutuhan itu maka semakin tinggi resiko terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana penggelapan mobil milik perusahaan rental. Dalam kenyataannya tindak pidana penggelapan mobil milik perusahaan rental masih terus terjadi, karena mobil yang seharusnya menjadi sumber mata pencaharian justru digelapkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah pertama, apa saja faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan mobil milik perusahaan rental di wilayah hukum Polresta Padang. Kedua, bagaimana bentuk penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengurangi tindak pidana penggelapan mobil milik usaha rental di wilayah hukum Polresta Padang. Ketiga, apa saja kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penggelapan mobil milik usaha rental di wilayah hukum Polresta Padang. Metode penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan mobil milik perusahaan rental di wilayah hukum Polresta Padang yaitu faktor dari dalam (intern) seperti faktor kebutuhan ekonomi dan faktor keinginan menguasai mobil, faktor dari luar (ekstern) yaitu faktor lingkungan sosial, faktor lemahnya sistem pengawasan, kendali dan keamanan dari pemilik usaha mobil rental, faktor adanya penadah. Bentuk penanggulangan yang dilakukan kepolisian yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Kendala yang dihadapi kepolisian yaitu masyarakat kurang tanggap dalam melapor, sulit mencari barang bukti karena mobil merupakan barang yang berjalan, dan jaringan-jaringan penggelapan yang luas.

Kata Kunci: faktor penyebab, penanggulangan, penggelapan, mobil rental

348.3
FAD
p

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK DI KOTA PADANG PANJANG

Fadel Muhammad, 1820112077, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 93 halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan daerah, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengambil dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 dan yang selanjutnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 15 Tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang merupakan peraturan yang mengatur permasalahan umum yaitu tentang rokok, hal ini menimbulkan konsekuensi logis kepada masyarakat, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana peran dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah tersebut. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan pada tesis ini, yaitu: 1. Bagaimanakah pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang 2. Bagaimanakah akibat hukum partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. 3. Bagaimanakah gagasan umum partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang bersumber dari data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari hasil penelitian yang penulis ditemukan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok di Kota Padang Panjang memang terlibat secara langsung, namun, keterlibatan nyata masyarakat hanya sebatas dalam pembentukan rancangan, memang dalam pembahasan masyarakat ikut serta namun hanya sebatas hadir dan memenuhi undangan dari DPRD Kota Padang Panjang. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah merupakan bentuk nyata dari prinsip otonomi daerah. Pembentukan peraturan perundang-undangan tanpa adanya partisipasi masyarakat dapat mengakibatkan peraturan tersebut cacat secara prosedural, oleh karena itu peraturan perundang-undangan yang dibuat tanpa adanya partisipasi masyarakat dapat saja dijadikan alasan untuk judicial review atau melakukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci; Masyarakat, Partisipasi, Peraturan Daerah

348.3
FAD
p

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROVINSI SUMATERA BARAT

Fadhil Syaputra, 1510111120, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 58 halaman, 2019

ABSTRAK

Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa anak adalah tunas penerus bangsa yang perlu dilindungi dari tindak pidana kekerasan.. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki fungsi menyelenggarakan layanan : pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Kekerasan Seksual dalam kamus besar bahasa Indonesia (1990) adalah pelecehan yang berupa bentuk pembedaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, dan mengabaikan. Pada tanggal 19 Juli 2017, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD PPA Provinsi Sumatera Barat. Pada tanggal 30 Januari 2018 dilantiklah kepala UPTD PPA pertama beserta pejabat Esselson dibawahnya yang bertanggung jawab kepada kepala dinas Provinsi Sumatera Barat. Melakukan jejaring dengan rumah sakit pemerintah atau swasta untuk perawatan dan pemulihan kesehatan korban, Memberikan Pemenuhan bantuan hukum, Menjaga kerahasiaan korban dan Memberikan kemudahan, keamanan dan keselamatan. Berikut proses penanganan dan perlindungan korban oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Sumatera Barat : Korban baik yang datang sendiri, melewati proses rujukan atau penjangkauan akan di identifikasi terlebih dahulu yang meliputi proses screening, assessment dan rencans intervensi sesuai keadaan dan kebutuhan korban, Jika korban harus segera mendapatkan penanganan medis, karena luka-luka, maka korban masuk dalam tahapan proses rehabilitasi kesehatan yang meliputi layanan non kritis, pelayanan semi kritis, dan pelayanan kritis sesuai dengan kondisi korban, Jika korban memerlukan bantuan hukum, maka dilakukan setelah proses rehabilitasi kesehatan, Proses terakhir dari layanan untuk korban adalah proses reintegrasi social. Kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA adalah kuarang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait serta perilaku keluarga korban yang menghambat proses penanganan. Mengatasi kendala ini UPTD PPA berusaha mengoptimalkan koordinasi dan berusaha memberi pemahaman kepada keluarga korban.

341.48
FAD
p

PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BATAM

Fadhli Dzil Ikram, 1410112002, Program Kekhususan Hukum Pidana, (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 113 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat LAPAS adalah tempat untk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Yang menjadi permasalahan adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Hak Narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam 2) Apa kendala yang dihadapi oleh petugas LAPAS dalam pelaksanaan Hak Narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Batam serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian Skripsi ini menggunakan metode Yuridis Sosioligis dengan Jenis Data Priner dan Sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa Studi Dokumen dan Wawancara. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sepenuhnya di Poliklinik LAPAS Kelas II Batam dengan petugas kesehatan sebayak 3 orang perawat. Pelayanan makanan dilaksanakan di Dapur LAPAS Kelas II A Batam yang mempekerjakan 20 orang narapidana sebagai juru masak dan diawasi oleh Koordinator dapur atau Asisten koordinator dapur. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia tenaga kesehatan di segi kuantitas dengan jumlah narapidana yang sakit serta sejak tahun 2008 belam ada dokter sehingga pelayanan kesehatan yang memerlukan keahlian dokter perlu rujukan ke luar LAPAS, Kurangnya Anggaran dari KEMENKUHAM juga menghambat pelayanan kesehatan seperti penyediaan fasilitas Laboratorium Poliklinik dan obat-obatan. Sedangkan kendala dalam pelayanan makanan adalah Sumber Daya Manusia tidak sesuai dengan kompetensi juru masak sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS – 498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara. Fasilitas dapur juga masih kurang untuk melaksanakan kegiatan memasak sehingga penyediaan makanan kurang efektif. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelayanan kesehatan diantaranya merekrut Kader sebagai pembantu petugas kesehatan dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Batam untuk Penyediaan obat-obatan dan JAMKESDA. Sedanngkan upaya untuk mengatasi kendala dalam pelayanan makanan adalah memberikan instruksi seperti daftar menu dan resep makanan serta pelatihan kepada narapidana yang menjadi petugas dapur.

345
FAD
P

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU MELALUI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) DI KOTA BUKITTINGGI

Fadli Kurnia Putra, 1610113064, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 51 halaman, 2020

ABSTRAK

Pemilihan Umum sebagai wujud dari demokrasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun didalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu yang dimana disini penulis membahas mengenai pelanggaran tindak pidana, menyangkut penegakan hukum tindak pidana Pemilu dibentuklah Sentra Gakkumdu yang diatur didalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018, Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi sebagai penegak hukum tindak pidana Pemilu wilayah hukum Kota Bukittinggi berkewajiban melakukan penegakan untuk teciptanya pemilihan umum sesuai cita-cita hukum. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Pertama, Bagaimana penegakan hukum tindak pidana Pemilu melalui Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi. Kedua, Apa kendala yang dihadapi oleh petugas Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu di Kota Bukittinggi. Ketiga, Apa Upaya yang dilakukan oleh petugas Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi dalam mengatasi kendala penegakan hukum tindak pidana Pemilu di Kota Bukittinggi.Typologi penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang lebih ditekankan pada penerapan hukum di lapangan, sehingga akan lebih banyak didasarkan pada pengumpulan data lapangan dengan maksud untuk mengkonstruksikan kenyataan dengan penerapannya.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bentuk penegakan hukum tindak pidana pemilu yang dilakukan Sentra Gakkumdu adalah dalam bentuk penanganan tindak pidana pemilu yang tata caranya diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan serta Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan proses nya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kendala yang dihadapi oleh Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi diantaranya yaitu kesulitan mendapatkan laporan dikarenakan tidak beraninya masyarakat untuk melaporkan, Gakkumdu kesulitan mencari saksi dikarenakan masyarakat tidak berkenan menjadi saksi, pelapor/ terlapor tidak hadir saat dipanggil, mutasi personil Gakkumdu, waktu penanganan Gakkumdu yang terlalu singkat. Upaya yang dilakukan Gakkumdu mengupayakan sosialisasi mengenai tindak pidana Pemilu, Menyangkut mutasi, pihak Gakkumdu untuk kedepannya akan mengkoordinasikan kepada pihak kepolisian agar tidak dilakukan mutasi saat terjadinya penanganan tindak pidana Pemilu.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pemilu, Sentra Gakkumdu

345
FAI
p

PERANAN LEMBAGA PEMASYARKATAN DALAM MENCEGAH PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI KALANAGAN NARAPIDANA

Fairus Fahmi, 1510111179, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 70 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, akan tetapi di Lapas juga dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan peredaran gelap narkotika. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah peredaran gelap narkotika di kalangan narapidana, dan bagaimanakah upaya Lembaga pemasyarakatan dalam mencegah peredaran gelap narkotika itu terjadi. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Adapun hasil dari penelitian ini penulis mendapatkan jawaban, bahwa para petugas Lapas telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas peredaran gelap narkotika di kalangan narapidana. Namun dikarenakan faktor sarana dan prasarana keamanan yang tidak mencukupi, dan faktor kurangnya petugas yang di tempatkan di Lapas ini membuat petugas Lapas kurang maksimal dalam mencegah peredaran gelap narkotika. Dengan adanya faktor-faktor tersebut maka penulis menyarankan agar Lapas meningkatkan keamanan baik dari dalam maupun dari luar, melakukan razia di dalam Lapas 1 kali dalam seminggu, test urine 1 kali sebulan dan juga mengoptimalkan kerja sama dengan instansi terkait seperti, Dinas Sosial, Lembaga Agama, dan Dinas Kesehatan agar lebih meminimalisir dan mencegah peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kata kunci : Narkotika, Pencegahan, Lembaga Pemasyarakatan.

348.3
FAJ
p

POLITIK HUKUM PROSES REKRUTMEN DAN KADERISASI DI PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

Fajri Putra Rahman, 1310111264, Fakultas Hukum Unand, 55 Hal, 2020

ABSTRAK

Partai politik merupakan institusi formal melakukan rekrutmen dalam rangka pengisian jabatan-jabatan politik. Kemampuan partai dalam merekrut anggota baik di tingkat pusat maupun daerah adalah salah satu aspek keberhasilan partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen. Namun,proses rekrutmen dan kaderisasi pada partai politik masih menjadi masalah penting untuk dikajji semenjak masa reformasi sampai sekarang Maka dari itu, dalam skripsi ini diangkat dua permasalahan yang penulis teliti yaitu pertama Bagaimana proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan yang kedua adalah Bagaimana politik hukum proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan objek penelitian, yang mana berdasarkan prinsip kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa, pengaturan mengenai Proses Rekrutmen Dan Kaderisasi menurut Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik hanya terdapat pada Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) saja, minimnya pengaturan mengenai sistem rekrutmen dan proses kaderisasi ini menjadi salah satu penghambat dalam menjalankan fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi. Dan partai politik senidri belum bisa menemukan sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang sesuai dengan amanat dari demokrasi itu sendiri. Padahal partai politik menjadi satu satunya sarana untuk seseorang mencalonkan diri menjadi calon legislatif maupun calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdapat pada Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3).

344.06
FAK
p

PENGANGKATAN PENYANDANG DISABILITAS MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

Fakhrul Agmi, 1610113048, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 69 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pasal ini memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas untuk bekerja pada instansi pemerintahan tanpa ada diskriminasi. Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan pelaksanaan manajemen ASN yang menggunakan sistem merit. Sistem merit berlaku mulai dari tahapan pengadaan hingga pensiun. Dengan diberlakukannya seistem merit ini memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam bekerja pada instansi pemerintah. Namun dalam penerapan pengadaan penyandang disabilitas menjadi CPNS pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Solok Selatan masih terdapat diskriminasi yang menyebabkan dibatalkannya pelamar penyandang disabilitas. Permasalahan yang dibahas yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan pengangkatan penyandang disabilitas menjadi CPNS pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Solok Selatan. 2) bagaimana kendala dalam pelaksanaan pengangkatan penyandang disabilitas menjadi CPNS dan upaya penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pelaksanaan penerimaan CPNS di Kabupaten Solok Selatan diawali dengan tahapan Perencanaan, Pengumuman lowongan, Pelamaran, Seleksi, Pengumuman hasil, Pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan masa percobaan calon pegawai negeri sipil. Jika merujuk pada kewajiban pemerintah mempekerjakan penyandang disabilitas dalam minimal 2% tidak terpenuhi dalam penerimaan ini. Aturan tersebut dinilai hanya formalitas karena tidak adanya sanksi tegas. Tidak terpenuhinya 2% ini karena minimnya aksesibilitas yang ada di Kabupaten Solok Selatan karena tergolong daerah baru, sehingga pembangunan lebih difokuskan pada pembangunan sarana umum dan prasarana lainnya. Adapun permasalahan diskriminasi yang timbul dapar terselesaikan secara mediasi. Upaya penyelesaian ini dianggap lebih efektif dan tidak memakan waktu lama agar permasalah dapat diselesaikan karena menggunakan prinsip kesepakatan.

Kata Kunci: Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, Penyandang Disabilitas

347.05
FAN
p

PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus: Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Sesi I Padang-Sicincin)

Fandi Kurniawan, 1510111025, Fakultas Hukum, 2020, 84 Halaman

ABSTRAK

Salah satu tahapan yang penting dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah mekanisme ganti kerugian. Pada mekanisme tersebut, terdapat tahapan yang disebut dengan musyawarah penetapan ganti kerugian.. Hal ini disebabkan adanya penolakan dan keberatan dari pemegang hak terhadap nilai atau besaran ganti kerugian yang ditetapkan Pemerintah. Rumusan masalah penelitian ini: (1) Bagaimana mekanisme ganti kerugian oleh Pemerintah kepada pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru yang dikhususkan pada pelaksanaan sesi I Padang-Sicincin (2) Bagaimana penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan Pemegang hak atas tanah terhadap keberatan nilai ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, Sesi 1 padang-Sicincin. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis untuk mengetahui peneraparan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum terhadap pemegang Hak Atas tanah yang terkena dampak dalam proses pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru Sesi I Padang-Sicincin. Data penelitian ini bersumber dari hasil wawancara pihak terkait sebagai sumber utama dan data kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan mekanisme pengadaan tanah dilakukan dalam 4 (empat) tahapan yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Mekanisme ganti kerugian oleh Pemerintah kepada Pemegang Hak Atas Tanah terdapat pada tahapan pelaksanaan yang terdiri dari (a) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, (b) Penilaian ganti kerugian, (c) Musyawarah penetapan ganti kerugian, e) Pengajuan Keberatan ke Pengadilan Padang Pariaman. (f) Pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak, (g) konsinyasi.. Penyelesaian sengketa dengan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Pariaman sebagai akibat tidak tercapainya Musyawarah penetapan ganti rugi yang dilakukan pada tanggal 25 hingga 26 Mei 2018. Namun Putusan 32/Pdt.G/2018/PN.Pmn menyatakan keberatan tidak dapat diterima (niet Ovantkelijke Verklaard) dengan pertimbangan cacat formil dan dinyatakan keberatan tidak jelas (Obscuur libel). Atas putusan tersebut, pemegang hak tidak mengajukan upaya hukum apapun atau mengajukan keberatan ulang. Pasca putusan 32/Pdt.G/2018/PN.Pmn, terdapat 7 pemegang hak dengan 9 bidang tanah seluas 1,78 Ha yang telah menerima ganti kerugian atas dasar kesukarelaan, sehingga 9 bidang tanah ini sudah dilepaskan haknya. Namun pemegang hak yang lain masih bersikukuh mempertahankan haknya.

Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Ganti kerugian, Pemegang Hak Atas Tanah.

345
FAN
p

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang)

Fanny Rahma Sari.1610111059.Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK IV (Hukum Pidana.105 Halaman. Tahun 2019)

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Adapun dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan masalah yaitu pertama, bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana Residivis Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang. Kedua, apakah kendala yang dihadapi oleh petugas ketika melakukan pembinaan terhadap narapidana residivis pelaku penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang. Ketiga, bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh petugas ketika melakukan pembinaan kepada narapidana residivis pelaku penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukanterhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan pelaksanaan pembinaan Narapidana Residivis Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang, secara umum sama dengan narapidana lainnya dilakukan melalui Pembinaan tahap awal, Pembinaan tahap lanjutan, dan Pembinaan tahap akhir serta program-program pembinaan yang meliputi dua bidang yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pembinaan terdahap narapidana residivis pelaku penyalahgunaan narkotika di LembagaPemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang yaitu pertama, tempat yang masih bergabung dengan gedung Rutan, kurang terpenuhinya sarana dan prasarana, pegawai-pegawai yang memiliki keahlian khusus dalam pelaksanaan seperti Pisikolog, dan stigma negatif narapidana itu sendiri. Kedua, pemberian pemahaman kepada narapidana oleh seorang petugas untuk menjadi wali dari narapidana dan bertindak sebagai pendamping, apabila narapidana mengalami kesulitan atau masalah. Ketiga, memberikan wali bimbingan narapidana yang berasal dari pihak Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri sebagai pengganti dari tidak adanya Pisikologi untuk membantu kejiwaan narapidana. Keempat, mengadakan program wirid mingguan dengan didatangkan Ustad.

Kata Kunci: Pembinaan, Residivis, Narkotika.

346.02
FAN
p

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENYIARAN IKLAN DI RADIO MODILLA KOTA SOLOK

Fanny Mulia Fatwa.H, 1610111088, Perdata, 64 halaman

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran) menyebutkan kebebasan berpendapat dalam penyiaran termasuk kedalam Ham. Terkait dengan perjanjian kerjasama antara pihak Radio dengan pihak pemasang iklan selalu terjadi pelanggaran perjanjian yang sudah disepakati. Dalam prosedur penyelesaian pelanggaran perjanjian antara pihak radio dengan pihak pemasang iklan dilakukan dengan cara bertemu atau menghubungi pihak yang bersangkutan untuk membicarakan masalah yang timbul akibat pelanggaran perjanjian. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan produk jasa di radio Modilla kota Solok? 2) Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di radio Modilla kota Solok? 3) Upaya yang ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi di radio Modilla kota Solok? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen wawancara dan observasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yaitu 1) Pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan di radio Modilla FM selalu menggunakan surat perjanjian atau kontrak yang di sebut surat pesanan iklan untuk melakukan perjanjian pemasangan iklan di radio tersebut 2) Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi didalam pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan di radio Modilla Fm berupa iklan yang sudah dipesan tidak diputarkan oleh pihak radio, pihak pemasang iklan tidak membayar biaya pemasangan iklan tepat waktu, pembatalan penyiaran iklan secara sepihak oleh pemasang iklan 3) Upaya yang ditembuh para pihak dalam menyelesaikan sengketa di radio Modilla Fm adalah dengan cara non litigasi atau diselesaikan diluar pengadilan.

Kata Kunci : Perjanjian, Penyiaran iklan dan Radio

346
FAR
d

DASAR KEWENANGAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM MENYELESAIKAN SUATU SENGKETA (Studi Kasus pada Perkara Nomor 229/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel)

Farah Sufi, 1610113086, Program Kekhususan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Alternatif penyelesaian sengketa telah banyak digunakan pada era modernisasi ini, terutama dalam bidang perdagangan. Hal ini dikarenakan kompleksnya permasalahan dalam bidang ekonomi dan semakin heterogennya pihak yang terlibat dalam lapangan usaha tersebut. Salah satu bentuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase ada yang berbentuk ad hoc dan bersifat tetap atau permanen. Seiring berjalannya waktu, banyak perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri mengenai kewenangan dan legalitas dari suatu lembaga arbitrase dalam beroperasi dan menyelesaiakan suatu sengketa Permasalahan tersebut dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 229/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut yaitu: 1) Bagaimana Persyaratan bagi suatu lembaga arbitrase agar memiliki wewenang dalam menyelesaikan suatu sengketa?; 2) Bagaimanakah dasar kewenangan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa berdasarkan kasus Nomor: 229/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sifat deskriptif, menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Syarat wewenang suatu lembaga arbitrase dalam menyelesaikan suatu sengketa ialah adanya klausula arbitrase dalam suatu perjanjian yang menghendaki adanya lembaga arbitrase dalam menyelesaikan perkara yang akan ataupun sudah terjadi dalam pelaksanaan suatu perjanjian tersebut (Kaidah Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999). Dan adanya pengesahan atau pengakuan dari lembaga pemerintahan yang berwenang dalam mendirikan suatu lembaga arbitrase(Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan).; 2) Hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum terhadap tidak berwenangnya BANI Sovereign dalam menyelesaiakan sengketa Penggugat dan Tergugat-8 ini, tidak mempertimbangkan isi putusan putusan yang diterbitkan BANI Sovereign. Melainkan mempertimbangkan bagaimana legalitas dan eksistensi dari pendirian BANI Sovereign ini, sehingga kewenangannya dalam menyelesaikan suatu sengketa arbitrase diragukan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Lembaga Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa

343.02
FAR
p

PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN RUANG UNTUK PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DI KOTA SOLOK

Farentika Utami, 1610111091, Fakultas Hukum, 2020, Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, 80 Halaman

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat (32) Nomor 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang dengan ketentuan Perundang-undangan. Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang suatu kawasan atau zona berdasarkan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang di Kota Solok diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Solok Nomor 14 tahun 2017 bahwa setiap orang pribadi atau badan yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan tertentu terlebih dahulu harus memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk. Namun faktanya dilapangan tidak sesuai karena masih ada masyarakat yang memanfaatkan ruang/tanah tanpa memiliki izin terlebih dahulu, dan masyarakat yang telah memiliki izin tidak memanfaatkan ruang/tanah tersebut sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh Dinas Penataan Ruang Kota Solok. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimana kesesuaian perencanaan peruntukan lahan pertanian di Kota Solok (2) Bagaimana proses pemberian izin pemanfaatan ruang untuk perlindungan lahan pertanian di Kota Solok (3) Bagaimana pengawasan izin pemanfaatan ruang untuk perlindungan lahan pertanian di Kota Solok. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ada dilapangan, dengan didukung oleh data primer yang diperoleh langsung dari narasumber dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Masih ada masyarakat yang memanfaatkan tanah nya tidak sesuai dengan peruntukan lahan atau rencana pola ruang yang telah ditetapkan RTRW (2) Proses pemberian izin telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan namun masih ada masyarakat yang memanfaatkan tanah tanpa memiliki izin dan tidak memanfaatkan izin sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh Pemerintah (3) Pengawasan dan pemberian sanksi yang dilakukan pemerintah belum berjalan efektif dan optimal.

Kata Kunci : Perizinan, Pemanfaatan Ruang, Lahan Pertanian

348.3
FAR
t

TANGGUNGJAWAB JASA PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KONSUMEN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NO. 402/PDT/2017/PT.DKI)

Farhan Juliando Jaswat, 1610113010, Fakultas Hukum, Universitas Andalas 70 Halaman, 2020

ABSTRAK

Dalam perjanjian pengangkutan, praktiknya mengenai hak dan kewajiban yang dilakukan oleh para pihak tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti halnya pada skripsi ini dilatar belakangi atas adanya kasus yang dialami Try Laksono yang mengirimkan barang melalui jasa pengiriman DHL Ekspress Indonesia namun tidak sampai. Adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimanakah tanggungjawab pelaku usaha jasa pengiiman barang apabila terdapat kerugian yang dialami oleh konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, kedua, Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan ganti kerugian yang diajukan konsumen pada putusan No. 402/PDT/2017/PT.DKI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: Pertama, bentuk tanggungjawab pelaku usaha jasa pengiriman terhadap konsumen yang dirugikan berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah dengan membayar ganti kerugian kepada Penggugat yakni kerugian materiil sebanyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebanyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Kedua, Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 402/PDT/2017/PT.DKI menerapkan asas kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1, menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 serta bentuk ganti kerugian akibat wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1239.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Jasa Pengiriman Barang, Perlindungan Konsumen

342
FAU
p

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT SELF EXECUTING DAN NON-SELF EXECUTING (Kajian Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang Tahun 2016-2019)

Fauziah, 1510111160, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK (Hukum Tata Negara), 152 halaman, 2020

ABSTRAK

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi kewenangan MK yang dominan dibandingkan dengan kewenangan MK lainnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah permohonan pengujian undang-undang yang masuk ke MK. Bahkan sejak tahun 2016 hingga caturwulan pertama tahun 2019 tercatat bahwa MK telah mengeluarkan 56 putusan yang mengabulkan permohonan perihal pengujian undang-undang. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 pada dasarnya merupakan implementasi dari penerapan sistem checks and balances di Indonesia. Karena melalui pengujian undang-undang, MK telah menjalankan fungsi kontrol terhadap produk legislasi yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Terkait dengan pelaksanaan putusan MK dikenal putusan yang bersifat self executing dan non-self executing. Adapun masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu, Pertama, Bagaimana sifat putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016-2019 dapat dikategorikan sebagai putusan yang self executing dan non-self executing? Kedua, Bagaimanakah pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat self executing dan non-self executing tahun 2016-2019? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif, melalui studi kepustakaan, menginventaris putusan MK kurun waktu antara tahun 2016-2019, menelaah peraturan perundang-undangan serta memperhatikan pelaksanaan terkait dengan putusan MK yang bersifat self executing dan non-self executing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK yang bersifat self executing terdapat dalam putusan legally null and void dan putusan inkonstitusional bersyarat. Sedangkan putusan MK yang bersifat non-self executing terdapat dalam putusan model penundaan pemberlakuan. Putusan MK kurun waktu tahun 2016 sampai 2019 terdiri dari 53 putusan self executing dan 3 putusan executing. Namun, diperlukan penyesuaian rumusan undang-undang oleh pembentuk undang-undang kedepannya. Berbeda halnya dengan putusan non-self executing yang pelaksanaan putusannya melalui perubahan undang-undang yang diuji. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum akibat pembatalan norma yang dilakukan oleh MK. Oleh karena itu, MK dalam putusannya secara langsung meminta perubahan undang-undang yang diuji kepada pembentuk undang-undang dalam kurun waktu tertentu. Dari 3 putusan MK yang bersifat non-self executing tersebut, hanya putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang telah dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedepannya diperlukan penyesuaian rumusan norma dan penyesuaian Program Legislasi Nasional DPR dengan Putusan MK. Serta diharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai kedudukan Daftar Kumulatif Terbuka dalam Program Legislasi Nasional.

346.02
FEL
t

TANGGUNG JAWAB PT. RAJASA LABA KARYA NUSANTARA TERHADAP KONSUMEN SETELAH AKAD DALAM JUAL BELI KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BERSUBSIDI DI KOTA PARIAMAN

Fellya Perdana Okta Fasril, 1610111052, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata, 70 Halaman, 2020

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi yang pesat mempengaruhi harga rumah menjadi tinggi, sehingga tidak semua masyarakat menempati rumah yang layak. Kondisi demikian membuat Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa menyediakan kredit pemilikan rumah bersubsidi dengan cicilan dan harga yang terjangkau. PT.. Dalam pembangunan rumah bersubsidi tidak terlepas dari tanggung jawab PT. Rajasa Laba Karya Nusantara sebagai pelaku usaha terhadap konsumen terutama setelah akad kredit. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur bagaimana tanggung jawab pelaku usaha diantaranya diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha berupa tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, kerusakan, dan kerugian konsumen. Perumusan masalah adalah: 1) Bagaimana tanggung jawab PT. Rajasa Laba Karya Nusantara terhadap konsumen setelah akad dalam jual beli kredit pemilikan rumah bersubsidi di Kota Pariaman,2) Apasaja kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. Rajasa Laba Karya Nusantara terhadap konsumen setelah akad, 3) Bagaimana solusi atas kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. Rajasa Laba Karya Nusantara terhadap konsumen setelah akad. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deksriptif. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan:1) Tanggung jawab PT. Rajasa Laba Karya Nusantara terhadap konsumen setelah akad adalah 100 (seratus) hari apabila terjadi kerusakan pada fisik bangunan rumah dan kelengkapannya setelah berita acara serah terima rumah ditandatangani. 2). Kendala dalam pelaksanaan tanggung jawabnya adalah kendala atas faktor eksternal yaitu konsumen tidak memberikan laporan terkait adanya kerusakan, konsumen memilih memperbaiki sendiri kerusakan tersebut tanpa melaporkan kepada PT. Rajasa Laba Karya Nusantara, serta konsumen mengosongkan rumah bersubsidi setelah akad. Kendala internal yaitu biaya lebih yang harus dikeluarkan oleh PT. Rajasa Laba Karya Nusantara untuk memperbaiki kerusakan tersebut, menyediakan tenaga buruh, dan juga kenaikan harga bahan bangunan. 3). Solusi terhadap kendala tersebut kendala eksternal harus ada komunikasi yang lancar antara konsumen dengan developer, konsumen harus selalu memperhatikan kondisi rumah yang dikosongkannya tersebut. Solusi atas kendala internal PT. Rajasa Laba Karya Nusantara harus mencadangkan dana lebih agar tidak mengganggu dana operasional lainnya.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Akad, Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi

345
FEN
k

KEDUDUKAN MANTAN NARAPIDANA KORUPSI YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD PADA PEMILIHAN UMUM 2019.

Feni Perosa, 1610111147, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 65 Halaman, 2020

ABSTRAK

Hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk dari Hak Asasi Manusia yang telah dijamin oleh Negara yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945. Hak memilih dan dipilih tidak boleh seorangpun untuk merusak, menghapus, bahkan mengurangi kecuali ada beberapa hal yang menyebabkan hak pilih dan memilih seseorang dihapuskan, dikurangi, atau dibatasi karena ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi dengan dikeluarkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota yang terdapat pada Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka, agar Parpol tidak menyertakan mantan terpidana korupsi, mantan terpidana Bandar narkoba, dan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak. Dengan dikeluarkan ketentuan PKPU tersebut menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat dan elit-elit politik yang diangap telah melangar hak memilih dan dipilih seseorang dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Oleh karena itu, diajukanlah Judicial Review kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang mana Mahkamah Agung mengeluarkan putusannya dalam Putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 dan Putusan MK Nomor 56/PUU- XVII/2019. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah pertama bagaimana pengaturan Pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilihan Umum 2019, kedua bagaimana implikasi putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 dan putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 terhadap mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari Peraturan Perundang-undangan dan data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa berdasarkan putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 bahwa mantan terpidana boleh mencalonkan diri sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan berdasarakan putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 bahwa mantan terpidana korupsi dapat mencalonkan diri apabila yang bersangkutan telah melewati masa tunggu selama 5 (lima) tahun dan secara terbuka dan jujur mengakui kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana serta implikasi dari putusan MA Nomor 46/P/HUM/2018 dan putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah bahwa mantan terpidana korupsi dilegalkan untuk mencalonkan diri dalam pemilu sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan harus melakukan peneyesuain isi PKPU dengan isi putusan MA dan MK.

348.04
FEM
a

ANALISA HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATASAN IMPOR HEWAN TERNAK BERDASARKAN PERJANJIAN WORLD TRADE ORGANIZATION (STUDI KASUS INDONESIA DAN BRASIL TAHUN 2014)

Fernasya Ayu Putrinada, 1610112076, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 116 Halaman

ABSTRAK

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi perdagangan internasional yang mengatur jalannya perdagangan internasional. Sebagai anggota WTO, Indonesia diberi hak untuk melaksanakan ekspor dan impor dengan anggota lainnya, serta diwajibkan menerapkan prinsip WTO ke dalam aturan nasionalnya. Sebagai negara agraris Indonesia mengupayakan memajukan kesejahteraan peternak dalam negeri dengan cara membentuk kebijakan perihal impor hewan ternak, kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan perjanjian WTO oleh negara lain. Pada tahun 2014 Brasil menggugat Indonesia ke Dispute Settlement Body (DSB) WTO atas kebijakan dagang Indonesia perihal impor daging ayam dan hewan ternak dengan nomor perkara DS 484. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah analisa hukum penyelesaian sengketa pembatasan impor hewan ternak berdasarkan perjanjian WTO, bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa kasus impor hewan ternak Indonesia dan Brasil Tahun 2014, dan bagaimanakah tantangan dan upaya dalam menyelesaikan sengketa kasus impor hewan ternak Indonesia dan Brasil Tahun 2014. Metode kepenulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, 1) Penyelesaian sengketa pembatasan impor hewan ternak diselesaikan melalui DSB dan terdapat aturan khusus yang digunakan untuk mengatur hal ini yakni Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 5 Ayat 7 Agreement on Agriculture dan Pasal 5 Ayat 1 Agreement on Sanitary and Phytosanitary. 2) Penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Brasil Tahun 2014 dibagi menjadi tujuh pertimbangan yakni perihal daftar positif impor, persyaratan penggunaan tertentu, rezim impor, persyaratan setifikasi sehat, label halal, pengangkutan langsung, dan tuntutan keseluruhan terhadap seluruh aturan impor. Panel memutuskan bahwa pertimbangan pertama sampai keempat bertentangan dengan perjanjian WTO. 3) Tantangan dalam penyelesaian sengketa dagang adalah perbedaan pandangan mengenai penerapan kebijakan dagang. Upaya yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak adalah membuktikan pernyataannya kehadapan majelis panel dan harus taat melaksanakan semua rekomendasi yang ditetapkan oleh panel.

Kata Kunci: Analisa Hukum; Penyelesaian Sengketa; Pembatasan Impor Hewan Ternak; dan Perjanjian WTO

342.07
FIR
p

PELAKSANAAN KEWENANGAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PADANG

Firdha Angraini, 1510112126, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK V (Hukum Tata Negara), 63 halaman, 2020

ABSTRAK

Sentra penegakan hokum terpadu (Gakkumdu) adalah forum antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan di tiap tingkatan. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Dalam Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 "Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu". Secara eksplisit dijelaskan dibentuknya sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh badan pengawas pemilu (Bawaslu), Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana kewenangan dan pelaksanaan kewenangan sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 di Kita Padang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum? Kedua, Bagaimana hambatan dan upaya penyelesaian hambatan pelaksanaan kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 di Kota Padang?. Metode Penelitian yang digunakan Yuridis Sosiologis. Hasil dari penelitian Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) telah menjalankan kewenangan dan pelaksanaan kewenangan dengan efektif sesuai dengan tugas dan funginya, sehingga ditemukan pelanggaran Pemilu dan laporan pelangaran Pemilu. Dimana jumlah temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebanyak 5 (lima) kasus sedangkan jumlah laporan dugaan pelanggaran Pemilu sebanyak 8 (delapan) kasus yang diterima oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Adapun hambatan yang dihadapi oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yaitu, hambatan secara yuridis dan non yuridis. Hambatan yuridis dalam penelitian terdapat 2 (dua) hambatan sedangkan hambatan non yuridis terdapat 5 (lima) hambatan

346
FIT
s

SISTEM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN MENURUT CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (CBD) DAN NAGOYA PROTOCOL DALAM RANGKA MELINDUNGI SUMBER DAYA GENETIK SEBAGAI BAGIAN DARI KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA

Fitria, 1610111067, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 77 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Saat ini, Indonesia menempati peringkat kedua dunia setelah Brazil dalam hal keanekaragaman hayati. Selain itu Indonesia juga memiliki daftar merah tentang tumbuhan yang terancam punah, salah satu penyebab punahnya yaitu perdagangan tumbuhan. Maka dari itu, keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh negara Indonesia haruslah dilindungi secara internasional dan nasional. Aturan mengenai perlindungan sumber daya genetik secara Internasional diatur dalam Convention on Biological Diversity, 1992 dan Nagoya Protocol, 2010. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis mengindentifikasi permasalahan dalam skripsi ini yaitu tentang bagaimana sistem pembagian keuntungan menurut Convention on Biological Diversity dan Nagoya Protocol serta apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menerapkan sistem pembagian keuntungan atas pemanfaatan keanekaragaman hayati. Metode yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu meneliti dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui peraturan perundang-undangan, buku- buku dan media elektronik. Pengaturan yang terdapat didalam Convention on Biological Diversity dan Nagoya Protocol memiliki tujuan agar setiap negara yang memiliki sumber daya genetik dapat melindungi, melestarikan sumber daya genetik serta mendapatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional masyarakat adat terkait pemanfaatannya. Aturan hukum nasional mengenai sistem pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 tentang Akses Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya.

Kata Kunci: Sistem Pembagian Keuntungan, Convention on Biological Diversity (CBD), Nagoya Protocol, Melindungan Keanekaragaman Hayati di Indonesia.

348.01
FLO
p

PERMASALAHAN DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BUKITTINGGI

Florent Filenty, 1610112066, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Halaman 73, 2020

ABSTRAK

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan merupakan salah satu bentuk dari Perda yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bukittinggi. Untuk menjalankan Perda ini maka diperlukannya aparat penegak hukum yaitu Satpol PP. Seiring dengan ditetapkannya Perda ini masih banyak terjadi pelanggaran baik dilakukan oleh warga masyarakat maupun badan hukum. Hal ini seharusnya diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan di dalam Perda. Akan tetapi kenyataannya pelanggaran tersebut hanya dikenakan denda yang pengaturannya ada di dalam ketentuan peraturan daerah yang bukan secara khusus mengatur mengenai persampahan. Berdasarkan uraian diatas adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimanakah penegakan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Bukittinggi. 2) Apakah permasalahan yang ditemui dan solusi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 di Kota Bukittinggi. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut secara akurat, digunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, dan Dinas Satpol PP Bukittinggi dapat diketahui bahwa 1) Penegakan dari Perda Nomor 5 Tahun 2014 didasakan pada pelanggaran pada Pasal 20 dan akan dikenakan ketentuan yang ada di dalam Pasal 59 ayat (1) dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat karena tergolong ke dalam tindak pidana ringan. Namun karena ancaman pidana yang terlalu berat, maka penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 merujuk pada Perda Nomor 3 Tahun 2015 dengan sanksi pidana yang tergolong tidak berat dan dikenakan sanksi administratif saja bagi pelanggar. Pelaksanaan patroli sebagai bentuk penegakan perda ini juga dilakukan oleh Satpol PP didampingi dengan DLH. Tercatat telah terjadi sebanyak 60 kasus pelanggaran dari tahun 2017 hingga awal 2020. 2) Permasalahan yang ditemui Satpol PP dalam penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 adalah kurangnya partisipasi masyarakat, koordinasi Satpol PP bersama DLH serta adanya substansi yang tidak dimasukkan di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Satpol PP dan DLH berupaya melakukan sosialisasi dan untuk penerapan sanksi pidana digunakan Perda lain yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

345.08
FUR
p

PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TAWURAN YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK REMAJA DI WILAYAH HUKUM POLRES PADANG PARIAMAN

Furqan Izani,1510112130,Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana, 60 Halaman, Tahun 2020)

ABSTRAK

Pada dasarnya tindak kenakalan remaja merupakan kelainan tingkah laku, tindakan yang bersifat asosial yang ada dan bisa menjerumuskan kepada kejahatan yang lebih tercela. Begitu banyak jenis-jenis kenakalan remaja dan salah satunya yang paling meresahkan akhir-akhir ini adalah tawuran. Tawuran merupakan bentuk dari kekerasan antar geng di Indonesia. Tawuran tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia saja. Padang Pariaman yang notabene hanya kota kecil pun merasakan dampak dari kenakalan remaja (tawuran). Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang di analisis secara kualitatif, yaitu uraian yang penulis lakukan terhadap data berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian ini di ketahui. (1). Bahwa pelaksanaan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana tawuran diwilayah hukum Polres Padang Pariaman ialah dengan adanya laporan terjadinya suatu tindak pidana yang terjadi. Petugas yang mendapatkan laporan langsung diterjunkan untuk mencegah dan membubarkan aksi nakal remaja tersebut. Remaja yang menjadi pelaku tawuran yang telah dikumpulkan di data dan dilakukanlah pembinaan dan pemanggilan orang tua. Pelaksaanaan pembinaan terhadap anak pelaku tawuran dengan diberikan sanksi berupa pemberian pelatihan fisik, dan juga pelaku tawuran membuat surat pernyataan di depan orang tua. Setelah dilakukan hal tersebut anggota akan menyelesaikan kasus tersebut dengan di diskresi yaitu tidak melanjutkan perkara ke pengadilan dikarenakan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana.(2). Kendala yang Dihadapi Polres Padang Pariaman dalam Pelaksanaan Diskresi Terhadap Tawuran dan Upaya Penanggulangannya. meliputi: (a) Faktor terhadap jumlah saksi mata dan pelaku, (b) Faktor masyarakat masih banyak kesadaran belum hukum, terbukti dalam pemeriksaan banyak saksi mata yang tidak ingin mengambil sikap (tutup mulut) dan (c) Faktor terbatas jumlah penyelidik sehingga proses penyelesaian kasus menjadi lama. Sedangkan dalam upaya penanganan tawuran antar pelajar dalam wilayah hukum Polres Padang Pariaman meliputi Upaya Represif dan Upaya Preventif.

345
FUA
k

KEPASTIAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS (Studi Kasus Perkara Nomor 38/Pid. Sus/2019/PN Pdg)

Fuad Ar Rahim, 1820112010, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 135 halaman, 2020

ABSTRAK

Putusan Hakim sangat berkaitan dengan bagaimana Hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti di persidangan serta keyakinan Hakim atas suatu perkara yang diadilinya. Meski Hakim mempunyai kekuasaan yang bebas atau merdeka untuk menjatuhkan putusannya, tetap saja putusan pidana penjara di bawah batas minimum khusus menimbulkan kontroversi ataupun perdebatan, terutama terhadap norma-norma hukum apa saja yang digunakan Hakim dalam memutus perkara tersebut, sehingga akhirnya Hakim mengenyampingkan ancaman minimum khusus yang secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Putusan berupa pidana penjara yang dijatuhkan di bawah batas minimum khusus ini dapat dianggap terlalu ringan dan dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku di kemudian hari serta dapat menciderai kepastian hukum sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini dapat dilihat dalam putusan pengadilan negeri padang Nomor perkara 38/Pid.Sus/2019/PN Pdg, Hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah minimum khusus terhadap Terdakwa. Permasalahan dalam Tesis ini adalah: 1) bagaimanakah dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pdg serta Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 71/PID.SUS/2019/PT PDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3289 K/Pid.Sus/2019 dalam memutuskan perkara tindak pidana persetubuhan anak yang dijatuhi hukuman dibawa minimum khusus?; 2) Bagaimanakah Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim terhadap Perkara Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Pdg dalam tindak pidana persetubuhan anak yang dijatuhi hukuman dibawa minimum khusus?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana penjara minimum khusus terhadap Terdakwa lebih didasarkan atas pertimbangan non yuridis yang kemudian pertimbangan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Hakim secara yuridis dengan memperhatikan rekonstruksi fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berpedoman kepada SEMA Nomor 1 Tahun 2017; 2) Pertimbangan Hakim terhadap penjatuhan pidana di bawah ancaman minimum khusus sebagaimana perkara di atas menimbulkan ketidakpastian hukum baik dalam tataran normatif maupun dalam tataran praktis. Untuk perbaikan penegakan hukum di masa depan Mahkamah Agung diharapkan dapat mencabut SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sehingga pedoman penjatuhan pidana dan penegakan hukum Hakim kembali mengikuti aturan dalam UU Perlindungan Anak sebagai lex specialis yang mengatur sanksi pidana terhadap tindak pidana terhadap anak.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Persetubuhan Anak, Minimum Khusus.

346
GEN
p

PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG PARA PIHAK MENINGGAL DUNIA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Geni Marfizola,1620123036, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Tanah merupakan sumber kehidupan, keberadaan tanah dalam kehidupan mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, juga harus dijaga kelestariannya. Dalam praktek, banyak dikalangan masyarakat awam, dimana jual beli hak atas tanah yang merupakan salah satu perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah hanya dilakukan dengan bukti selembar kwitansi biasa saja. Dalam praktek jual beli tanah apabila konsep terang dan tunai belum dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka transaksi tetap bisa dilakukan, namun notaris membuat instrumen lain, yaitu dengan membuat Perjanjian Berhubungan dengan hal tersebut, Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik meneliti thesis ini dengan judul "Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Para Pihak Meninggal Dunia Di Kabupaten Pesisir Selatan." Permasalahannya yaitu, Bagaimana Proses Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Untuk Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Kabupaten Pesisir Selatan, Bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam proses balik nama sertipikat hak milik berdasarkan pengikatan jual beli yang para pihaknya meninggal dunia di Kabupaten Pesisir Selatan, Bagaimana proses balik nama sertipikat hak milik berdasarkan pengikatan jual beli yang para pihaknya meninggal dunia di Kabupaten Pesisir Selatan. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis empiris yang menekankan pada kenyataan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian. Perlindungan hukum dan pelaksanaan terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli Yang Para Pihak Meninggal Dunia Di Kabupaten Pesisir Selatan ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik atau belum efektif.

Kata K unci: Peralihan Hak Tanah, Perjanjian Jual Beli, Meninggal Dunia

345
GER
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Gery Dikri Christian Sitompul, 1510111079, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah satuan lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1 adalah segala hal/ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana pembalakan liar (illegal logging), kepolisian melaksanakan tugasnya melalui Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman Barat. Pembalakan liar (illegal logging) menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 angka 5 yaitu tindak pidana yang melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisai. Banyaknya tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) merupakan suatu permasalahan penting di Kabupaten Pasaman Barat: Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Kabupaten Pasaman Barat? 2.Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Penyidik Kepolisian dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) Di Kabupaten Pasaman Barat? 3.Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Penyidik Kepolisian Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) Di Kabupaten Pasaman Barat? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan kendala-kendala yang dihadapi seperti kendala keterbatasan jumlah aparat penegak hukum khususnya penyidik yang berjumlah 2 (dua) orang sedangkan Luas wilayah dan kawasan hutan di Kabupaten Pasaman Barat lebih kurang mencapai 30.000 hektare, dalam melakukan penyidikan fasilitas dan prasarana aparat penegak hukum mengalami kesulitan karena minimnya jumlah sarana dan prasarana serta kurangnya kordinasi masyarakat setempat dengan aparat penegak hukum. Namun pihak Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman Barat berupaya mengatasi kendala tersebut dengan melakukan pendekatan dan pembinaan kepada masyarakat serta melengkapi sarana dan prasarana, meningkatkan jumlah penyidik dan memberikan sangsi berat bagi mereka yang melakukan pelanggaran.

Kata Kunci: Pembalakan Liar, Penyidikan, Kepolisian

343.09
GIF
p

PENEGAKAN KEDAULATAN UDARA INDONESIADI KEPULAUAN RIAU (Studi: Penurunan Pesawat Penurunan Pesawat Boing B777 Ethiopian Airlines ET-AVN)

Gifri Alhadi, 1510112053, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2020

ABSTRAK

Kedaulatan udara suatu negara telah diatur dalam Convention on Internasional Civil Aviation. Signed at Chicago 1944 dan Undang-Undang No 9 Tahun 2009. Pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan ruang udara Indonesia yang dilakukan pesawat sipil asing sering terjadi, pada senin 14 januari 2019 pesawat pemilik maskapai Ethopian Airlines ET-AVN memasuki wilayah kedaulatan udara Indonesia tanpa izin sehinggga harus dilakukan penurunan.Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai pengaturan kedaulatan udara Indonesia yang berada di Kepulauan Riau, penegakan atas pelanggaran kedaulatan udara oleh pesawat Boing B777 Ethiopian Airlines ET-AVN di wilayah Kepulauan Riau dan kendala penegakan kedaulatan di ruang udara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pengaturan mengenai pengaturan kedaulatan udara Indonesia yang berada di Kepulauan Riau diatur dalam Undang-UndangNomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Mengenai penegakan atas pelanggaran kedaulatan udara oleh pesawat Boing B777 Ethiopian Airlines ET-AVN di wilayah Kepulauan Riau sesuai dengan prosedur perundang- undangan. Kendala Penegakan Kedaulatan di ruang udara Indonesia terdapat kendala yaitu kendala penyelidikan, kendala regulasi, dan dampak pendelegasian FIR Singapura di Kepulauan Riau.

Kata kunci:Kadaulatan Udara, Interception, Force Down , Pencegatan, Ethopian Airlines ET-AVN

345
GIL
p

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DI POLRES AGAM

Gilang Adi Pratama, 1510112098, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 80 Halaman, 2020

ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus dilakukan oleh seluruh unsur negara. Tindak pidana pencabulan adalah kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Dalam melakukan penyidikan terhadsp anak pelaku tindak pidana pencabolan, penyidik wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena dikhawatirkan timbul perlakuan yang tidak semestinya terjadi didalam proses penyidikan.. Terdapat perbedaan antara proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal yang paling membedakannya adalah diaturnya mengenai penyidik anak dan prosedur-prosedurnya dalam proses menangani tindak pidana anak. Dalam praktiknya masih ada pelanggaran terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana seperti belum adanya ruangan khusus untuk anak dan penempatan anak yang masih disamakan dengan orang dewasa. Penulis mengangkat topik penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk pelaksanaan perlindungan hukum dalam tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Agam. (2) Apa saja kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Agam. (3) Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan di Polres Agam. Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode yuridis empiris. Adapun hasil penelitian sebagai berikut: Peenyidikan telah dilakukan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pengecualian mengenai belum adanya ruangan khusus untuk anak dan belum adanya penyidik anak. Kendala yang ditemui adalah tidak adanya penyidik anak, penyidik kesulitan mencari saksi, adanya pelanggaran jaminan oleh anak yang dijadikan tahanan kota, tidak adanya ruangan khusus anak. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak, Penyidikan, Pencabulan

346.01
GIL
p

PELAKSANAAN GUGATAN CERAI SECARA GHAIB DI PENGADILAN AGAMA KOTA PARIAMAN

Gilang Setia Pratama, 1210113118, Fakultas Hukum Unand, 81 Hal, 2020

ABSTRAK

Salah satu penyebab terjadinya cerai gugat ghaib ialah suami meninggalkan isteri dalam jangka waktu lama. Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Kota Pariaman menerima perkara Cerai Gugat Ghaib dengan alasan suami mafqud berjumlah 83 perkara. Dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Kota Pariaman mempunyai pertimbangan untuk suami mahqud. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1.Bagaimana Pelaksanaan Gugatan Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Kota Pariaman, 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat ghaib Hasil penelitian tergolong yuridis empiris yakni peneliti turun langhsung ke Pengadilan Agama Kota Pariaman dan menganalisa tentang pelaksanaan gugatan cerai ghaib di pengadilan Agama kota Pariaman. Sedangkan pendekatan menggunakan deskriptif kualitatif.sumber data utama yang digunakan adalah informasi melalui wawancara kepada narasumber,dan panitera pengadilan di Pengadilan Agama Kota Pariaman. Selanjutnya,dokumen perkara perceraian dan buku- buku yang berkaitan dengan penelitian sebagai sumber penunjang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memakai pasal 116 KHI dan pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan si istri yang ditinggalkan suaminya. Sedangkan akibat hukumnya ialah isteri mendapatkan talak bain sughra dengan mengikuti ketentuan iddah perceraian pada umumnya.

345
HAF
t

TUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang)

Hafiz Aulia Rahman, 1510111005, Fakultas Hukum, 2020, Halaman

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu penyimpangan yang terjadi pada saat ini, yang terutama anak dan anak korban tergolong anak di bawah umur. Aturan yang mendasari penyimpangan ini adalah Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah apa pertimbangan penuntut umum dalam menetapkan tuntutan pidana pada perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dan apa kendala yang mempengaruhi penuntut umum dalam menetapkan tuntutan pidana pada perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Untuk menganalisis hal tersebut dilakukan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data ialah studi dokumen, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dari penulisan ini skripsi ini adalah tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang memberatkan yaitu telah merusak masa depan korban dan menimbulkan trauma. Hal yang meringankan anak belum pernah dihukum, anak masihndalam pendidikan dan mengakui perbuatannya di depan persidangan. Kendala yang mempengaruhi dalam menetapkan tuntutan pidana yaitu karena faktor keluarga dan faktor pendidikan. Sarannya adalah Jaksa memperhatikan kondisi psikologis anak korban dan diharapkan pemerintah menanggulangi penyebaran pornografi di kalangan anak dibawah umur.

Kata Kunci : Pencabulan, Tuntutan, Jaksa Penuntut Umum.

343.02
GIT
p

PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DI KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG

Gita Khairun Nisa, 1610112103, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 122 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Salah satu usaha yang sedang marak berkembang adalah usaha jasa pencucian pakaian (laundry) sesuai dengan kritreria usaha mikro, kecil dan menengah, usaha jasa pencucian pakaian (laundry) ini termasuk salah satu bentuk usaha mikro yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dampak dari usaha jasa pencucian pakaian (laundry) ini adalah limbah cucian pakaian yang menyebabkan harus adanya peran pemerintah dalam menangani hal tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat ataupun lingkungan. Bentuk peran pemerintah tersebut adalah dengan adanya pemberian izin yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Sehingga nantinya usaha jasa pencucian pakaian (laundry) tidak menimbulkan keresahan ditengah masyarakat dan gangguan terhadap lingkungan. Sebelumnya pemerintah sudah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Pertama, Bagaimana pelaksanaan pemberian izin usaha mikro di Kota Padang. Kedua, Bagaimana kendala izin usaha mikro yang terkait dengan usaha jasa pencucian pakaian (laundry) di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif yaitu menggambarkan kebijakan pemerintahan yang dikaitkan dengan pemberian izin usaha mikro. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung turun kelapangan dan membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku serta penerapannya. Pelaksanaan pemberian izin usaha mikro dan kecil di Kota Padang sebelumnya diberikan oleh Camat namun sejak tahun 2018 pelayanan pemberian izin usaha mikro dan kecil diberikan melalui Lembaga OSS secara online. Adapun kendala yang menjadi penghalang dalam pemberian izin adalah kurangnya sosialisasi, kurangnya wawasan masyarakat dan tidak adanya sanksi. Untuk itu diharapkan agar pemerintah memberikan sosialisasi yang jelas kepada pelaku usaha mengenai tata cara mengurus izin usaha mikro serta diharapkan agar pemerintah menetapkan sanksi yang jelas bagi para pelaku usaha mikro yang tidak memiliki izin.

Kata Kunci : Pemberian izin, Usaha Mikro, Usaha Jasa pencucian pakaian (laundry).

346.02
GRE
p

PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JOGGING TRACK,TAMAN FITNESS DAN PEMATANGAN LAHAN YOUTH CENTER EX-GOR RAWANG KOTA PARIAMAN ANTARA DINAS PU KOTA PARIAMAN DENGAN CV.INOCI

Grend Sony Amartha, 1610112053, Fakultas Hukum, 2020, 67 halaman

ABSTRAK

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi,dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyebutkan terdapat dua pihak yang mengadakan kontrak kerja konstruksi, pertama pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan hukum sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi dan yang kedua adalah penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. Kedua belah pihak melakukan suatu perjanjian yang disebut dengan Kontrak Kerja Konstruksi. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana proses terjadinya kontrak kerja konstruksi antara Dinas PU kota Pariaman dengan CV.INOCI dalam proyek pembangunan jogging track, taman fitness dan pematangan lahan youth center ex-gor rawang Kota Pariaman, bagaimana Pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara Dinas PU kota Pariaman dengan CV.INOCI dan hambatan- hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara Dinas PU kota Pariaman dengan CV.INOCI. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan pertama, proses penyediaan jasa konstruksi yang diguakan adalah menggunakan metode tender. Kedua Pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang dilakukan oleh Dinas PU kota Pariaman dengan CV.INOCI dapat disimpulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun dalam pelaksanaan isi kontrak terdapat wanprestasi. Ketiga hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara Dinas PU kota Pariaman terjadi akibat kelalaian penyedia jasa sehingga tidak dapat menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan dan penyedia jasa dikenakan denda 1/1000 dari nilai kontrak per harinya selama paling lambat 50 hari kalender dihitung dari tanggal penyelesaian pekerjaan.

Kata Kunci: Kontrak Kerja Konstruksi, UUJK, Penyedia Jasa, Pengguna Jasa

342.07
HAA
l

LEMBAGA PEMANTAU LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PASCAREFORMASI

Haadii Muttaqi, 1610113005, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 64 halaman, 2020

ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi, sehingga dalam penyelenggaraanny harus tepat sesuai dengan asas-asas Pemilihan Umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Asas-asas Pemilihan Umum ini menjadi alasan atas keberadaan dari lembaga pemantau luar negeri dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Lembaga pemantau luar negeri yang bertugas memantau jalannya penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia mempunyai peranan yang penting. Peran dari lembaga ini telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang pemantau Pemilihan Umum yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalah yang akan diteiti adalah pertama mengenai pengaturan terkait lembaga pemantau luar negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia pascareformasi, kedua mengenai peran dari lembaga pemantau luar negeri dalam penyelenggaran Pemilihan Umum di Indonesia pascareformasi. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Keberadaan dari lembaga pemantau luar negeri dapat meningkatkan legitimasi Pemilihan Umum, namun di sisi lain, keberadaannya masih dianggap kurang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelengaraan Pemilihan Umum tersebut. Alasan ini muncul karena kedudukan dari lembaga pemantau luar negeri yang dapat dikatakan ambigu serta output yang dihasilkan oleh lembaga ini kurang memberikan andil besar dalam mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelengaraaan Pemilihan Umum di Indonesia. Maka dari itu, untuk mencegah hal tersebut terjadi maka perlu dilakukan rekonstruksi mengenai peraturan yang mengatur tentang lembaga pemantau luar negeri dalam Pemilihan Umum di Indonesia serta juga dengan mempertegas dan memperjelas peran dari lembaga pemantau luar negeri di Indonesia agar tercapai Pemiihan Umum yang jujur dan adil sesuai dengan amanat konstitusional.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Lembaga Pemantau Luar Negeri

343.09
HAB
p

PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT TERHADAP TINDAKAN MALADMINISTRASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA PADANG

Habib Solihin, 1610111020, Fakultas Hukum, 2020, 90 halaman

ABSTRAK

Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilakukan menjelang tahun ajaran baru. Melalui Peraturan Mendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru diatur mengenai tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Penyelenggaraan Pendidikan setiap satuan pendidikan memiliki kewenangan yang berbeda, Dalam rangka kepastian terjaganya efektivitas dan efisien manajeman pendidikan tersebut, dibutuhkan pengawasan dari lembaga pengawas pendidikan. Pengawasan secara internal dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenagannya pada Satuan Pendidikan, sedangkan pengawas pendidikan secara eksternal dilakukan Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan laporan dan pengaduan masyarakat terhadap Pelanggaraan Penyelenggaraan Pendidikan. Di Kota Padang penyelenggaraan Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang, tetapi dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan tersebut masih adanya terjadi permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari laporan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang masih banyak permasalahan dilapangan. Salah satu materi laporan yang diterima Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat adalah Tindakan Maladministrasi saat Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Tata cara pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang?, 2) Bagaimana Tindakan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap Maladministrasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang?, 3) Bagaimana Upaya Pencegahan terhadap Tindakan Maladministrasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (empiris). Penelitian ini bersifat diskriptif analitis, jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan dianalisis dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa masih terjadinya Tindakan Maladministrasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang yaitu berupa penyimpangan prosedur, permintaan imbalan, punggutan liar dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan sekolah dan penyelenggara pendidikan.

Kata Kunci : Penerimaan peserta didik baru, Maladministrasi, Pengawasan.

345
HAN
p

PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DAN PENGAWASANNYA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT

Hanif Fadhilah Lubis, 1510112062, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 85 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Pidana bersyarat adalah bentuk penerapan pidana sebagai mana diatur di dalam Pasal 14 a KUHP sampai Pasal 14 f KUHP, dengan segala peraturan pelaksanaanya yang berarti si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dasar atau alasan dalam pemberian pidana bersyarat adalah untuk memperbaiki diri terpidana agar dapat dibina lebih baik lagi dan menghindarkan dari lingkungan yang kurang baik, serta mendidik sikap mental dan sosial bermasyarakat yang lebih baik. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimanakah pelaksanaan pidana bersyarat dan pengawasannya terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan 2. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pidana bersyarat dan pengawasannya terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan wawancara. Adapun hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan adalah pelaksanaan dan pengawasan pidana bersyarat di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dilaksanakan hanya berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) yang dikeluarkan oleh Kajari dan diiringi dengan Surat Pemberitahuan Pemidanaan Bersyarat (P-51) yang ditembuskan kepada Penyidik atau Kepolisian dan Kepala Desa/Lurah, serta ditemukan beberapa kendala-kendala dalam pelaksanaan dan pengawasan pidana bersyarat yaitu belum adanya undang-undang atau pedoman yang baku dan jelas dalam pelaksanaan pidana bersyarat dan pengawasannya, lemahnya koordinasi antara lembaga dan pihak-pihak yang terkait, serta tidak adanya kewajiban wajib lapor terhadap terpidana.

Kata Kunci : Pidana Bersyarat, Tindak Pidana Penganiayaan, Kejaksaan.

346.02
HAN
P

PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA KIOS DI PASAR SEMI MODERN ANTARA PEDAGANG DENGAN DINAS PASAR KOTA SOLOK

Hanifah Adzro Yuzima, 1610111024, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata, 67 Halaman, 2020

ABSTRAK

Pasar merupakan suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi tukar-menukar barang atau jasa yang berfungsi menyediakan berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari. Pasar semi modern dikelola oleh pemerintah daerah yaitu Dinas Pasar Kota Solok dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Mengenai kios dan los di pasar semi modern Kota Solok bagi setiap para pedagang yang akan menyewa kios dan los haruslah mendapatkan izin melalui Dinas Pasar Kota Solok untuk mendapatkan hak sewa. Kepada calon pemegang hak sewa mengajukan surat permohonan secara tertulis, melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan menandatangani suatu perjanjian dengan Dinas Pasar Kota Solok. Pengelolaan Pasar Semi Modern Kota Solok diatur dalam Peraturan Walikota Solok No. 6 tahun 2015 tentang Sistem Dan Prosedur Penempatan Pedagang pada Pasar Raya Solok. Suatu perjanjian terdiri dari klausul-klausul perjanjian yang telah disepakati dan harus ditaati oleh kedua belah pihak. Perumusan masalah adalah 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kios antara pedagang dan Dinas Pasar Kota Solok, 2) Apa kendala- kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kios antara pedagang dengan Dinas Pasar Kota Solok dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: 1) Pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa kios antara pedagang dan Dinas Pasar Kota Solok adalah para pedagang yang menyewa kios di pasar semi modern tersebut harus mengikuti prosedur penempatan dan penataan serta menandatangani surat perjanjian hak sewa kios. Pada umumnya para pedagang yang melakukan sewa-menyewa di pasar semi modern tidak memenuhi klausul perjanjian yang telah disepakati. Pedagang bertanggungjawab penuh terhadap kios dan los yang telah ditempatinya seperti tidak menjadikan kios sebagai tempat tinggal/ gudang, memindahtangankan hak sewa kios kepada pihak lain baik sebagian maupun keseluruhannya dalam bentuk apapun, tidak membiarkan kios kosong (tidak berfungsi) atau tutup selama 30 hari berturut-turut kecuali dengan alasan yang dapat diterima oleh Dinas Pasar Kota Solok dan membayar retribusi kios. 2) Kendala dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa adalah tidak ada terjalinnya hubungan komunikasi yang baik dari pihak Pemerintah Kota Solok maupun Dinas Pasar Kota Solok dengan para pedagang mengenai pembangunan dan ukuran kios Pasar Semi Modern Kota Solok, tidak ada laporan dari para pedagang yang menyewa kios terkait hal tidak mempergunakan kios tersebut, kondisi sosial dan ekonomi, kondisi lingkungan pasar, besar tarif pembayaran retribusi kios dan tidak ada pengawasan yang berkala dari pihak dinas pasar sehingga terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para pedagang.

Kata Kunci : Pelaksanaan perjanjian, Sewa-menyewa, Kios Di Pasar Semi Modern Kota Solo

342
HAR
e

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI DAN TUGAS DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUPLIK INDONESIA DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT PERIODE 2014-2019

Harbi Putra, 1510112057, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK V (Hukum Tata Negara) 88 Halaman, 2020

ABSTRAK

Menurut amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat tiga lembaga perwakilan di Indonesia, yaitu Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan lembaga perwakilan untuk otonomi daerah seharusnya menjadi kamar kedua dalam lembaga perwakilan di Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah mencerminkan keterwakilan dari kelompok kepentingan masyarakat yang ada, baik secara politik, teritorial, ataupun fungsional. Namun, eksistensi Dewan Perwakilan Daerah perwakilan Sumatera Barat sering kali dipertanyakan. Dewan Perwakilan Daerah perwakilan Sumatera Barat dianggap tidak terlalu serius dalam dalam memeperhatikan kepentingan daerah yang diwakilinya. Hal ini bertolak belakang dengan amanat UUD 1945, dimana Dewan Perwakilan Daerah mestinya berperan lebih besar dalam memperjuangkan kepentingan daerahnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tentang fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta bagaimana pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sumatera Barat Periode 2014-2019. Dari hasil penelitian, pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan Sumatera Barat belum dilaksakanan secara efektif, dikarenakan belum adanya suatu produk kinerja fungsi parlemen Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang secara spesifik dapat dikategorikan sebagai pencerminan aspirasi masyarakat daerah Sumatera Barat.

345
HAR
p

PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PUPUK BERSUBSIDI DI NAGARI LASI, KABUPATEN AGAM

Harry Riyandi, 1510112175, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 84 halaman – Tahun 2020

ABSTRAK

Tindak pidana penggelapan pada umumnya ditegakkan dan diadili berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, di Nagari Lasi, Kabupaten Agam akibat marak terjadinya tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi mendorong niniak mamak untuk memberlakukan hukum adat yang bersifat pidana untuk menyelesaikan kasus penggelapan pupuk bersubsidi tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah a) Bagaimanakah bentuk-bentuk sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi di Nagari Lasi, Kabupaten Agam, dan b) Bagaimanakah tata cara penegakan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi di Nagari Lasi, Kabupaten Agam. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Penulisan ini bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil, yakni: 1) Bentuk-bentuk sanksi pidana adat yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi di Nagari Lasi, Kabupaten Agam berupa sanksi moral yakni permintaan maaf, pembayaran denda dan ganti kerugian, dan sanksi dibuang sepanjang adat. 2) Tata cara penegakan sanksi pidana adat terhadap tindak pidana penggelapan pupuk bersubsidi di Kab. Agam melalui jalur peradilan adat menggunakan sistem peradilan campuran. Maksud sistem peradilan campuran disini adalah dilakukan melalui jalur pengadilan negeri dan jalur pengadilan adat (musyawarah adat). Adapun suatu peradilan adat dapat dilaksanakan apabila telah diputus oleh hakim pengadilan negeri untuk menerapkan sanksi pidana adat. Adapun sanksi pidana adat itu sendiri diputus melalui peradilan adat (musyawarah adat) terpisah dari putusan pengadilan negeri.

Kata Kunci: Sanksi Pidana Adat, Tindak Pidana Penggelapan, Pupuk Bersubsidi.

346.07
HEN
p

PENGELOLAAN USAHA TAMBANG EMAS DI KECAMATAN DUO KOTO KABUPATEN PASAMAN

Hengki Firmansyah. 1410112167. Program Kekhususan Hukum Agraria dan SDA (PK VIII). Fakultas Hukum Universitas Andalas. Tahun 2020. 58 halaman.

ABSTRAK

Kegiatan pertambangan merupakan salah satu upaya manusia dalam memperoleh hasil alam untuk kemudian didayagunakan menjadi berbagai barang untuk menyokong kehidupan manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan penguasaan bumi dan kekayaannya pada negara. Pertambangan mineral dan batu bara merupakan salah satu bentuk kegiatan pertambangan, kemudian diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Untuk melakukan kegiatan pertambangan diperlukan adanya suatu izin yang disebut Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin ini diberikan dalam 2 bentuk izin yaitu IUP Eksplorasi kemudian IUP Operasi Produksi. Sumatera Barat yang memiliki corak khas tersendiri yang dikenal akan adanya kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut Nagari, yang memiliki kekayaan salah satunya adalah ulayat nagari. Di Kecamatan Duo Koto sendiri terdapat dua Nagari yaitu Nagari Cubadak dan Simpang tonang. Pada Perizinannya penerima IUP awalnya diberikan izin atas Nagari Cubadak yang kemudian diperbaiki menjadi Nagari Cubadak dan Simpang Tonang. Penamaan izin ini menjadi awal mula terjadi penolakan aktivitas tambang oleh Masyarakat nagari Simpang Tonang. Pada Penilitian dengan metode juridis empiris penulis menemukan permasalahan terkait izin bermula dengan keluarnya izin lingkungan berupa AMDAL oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman yang memberikan izin lingkungan yang hanya menyebutkan Nagari Cubadak, ini dikarenakan ketidaksamaan sumber daya antara pemerintah Kabupaten Pasaman dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Izin yang kemudian diperbaiki dan diikuti perubahan IUP Operasi Produksi. Atas kendala yang telah dialami pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten diharapkan kedepannya terwujud peningkatan sinergitas antara keduanya, agar di masa yang akan datang dapat dihindari terjadinya berbagai kendala dan dengan status tanah sebagai tanah ulayat diharapkan baik pemerintah maupun investor lebih meningkatkan perhatian atas hak-hak masyarakat hukum adat.

Kata Kunci :Pengelolaan Pertambangan, Perizinan, Tanah Ulayat.

345.08
HEN
u

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA MOTOR (Studi di Satlantas Polres Kabupaten Tanah Datar)

Hengky Hdayat, 1610111073, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana), 66halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor harus memiliki SIM dan telah cukup umur. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas yang terjadi juga dilakukan oleh anak yang mengendarai sepeda motor. Dalam skripsi ini permasalahan: 1) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor? 2) Apa saja kendala yang dihadapai kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor? 3) Bagaimanakah upaya mengatasi kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor? Penelitian ini dilakukan di wilayah Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Datar. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data yang langsung di dapat dari lapangan dari hasil penelitian penulis dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian yang penulis lakukan di Satlantas Polres Tanah Datar di peroleh data bahwa dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor, kepolisian lalu lintas Polres Tanah Datar menjalankan tugasnya dalam melakukan upaya menanggulangi dengan tindakan berupa: 1) Tindakan Preventif seperti pihak kepolisian melakukan penyuluhan di berbagai sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Tanah datar, memberikan spanduk himbauan kepada pengendara sepeda motor, melakukan penertiban bagi pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran, memberikan bus sekolah bagi para pelajar agar tidak menggunakan sepeda motor. 2) Tindakan Represif yang dilakukan dengan melakukan peringatan terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang kemudian pihak kepolisian melakukan penilangan. Kendala yang di hadapi pihak kepolisian satuan lalu lintas Polres Tanah Datar dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak yang mengendarai sepeda motor berupa kurangnya pengawasan dari orang tua, pengawasan guru, kurangnya kesadaran hukum dari si anak, kurangnya personil kepolisian lalu lintas, dan kurangnya kendaraan operasional.

347.05
HEN
p

PERUBAHAN STATUS TANAH HAK PAKAI SELAMA DIGUNAKAN MENJADI HAK GUNA BANGUNAN SEBAGAI ASET PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARAT

Henny Maulina, 1610112111, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK 8(Hukum Agraria dan SDA) 71 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Perubahan Status Tanah Hak Pakai Selama Digunakan Menjadi Hak Guna Bangunan Sebagai Aset Pada PT.PLN(persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat yaitu dengan adanya perubahan status tanah dari yang sebelumnya hak pakai selama dipergunakan menjadi hak guna bangunan. Hal ini terjadi setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN). Pada UU BUMN tersebut tidak dijelaskan secara tersurat mengenai kewajiban yang dilakukan oleh BUMN untuk melaksanakan perubahan status tanah sebagai aset. Adanya beberapa perbedaan antara kedua hak atas tanah tersebut yang kemudian menimbulkan 3 (tiga) permasalahan yaitu diantaranya, (1)aBagaimana Cara Perolehan Hak Pakai Selama Digunakan Bagi Aset PT. PLN(persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat?; (2) Bagaimana Proses Perubahan Status Tanah Hak Pakai Selama Digunakan Menjadi Hak Guna Bangunan Terhadap Tanah Aset Pada PT. PLN(persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat?; (3) Bagaimana Akibat Hukum Dari Perubahan Hak Pakai Selama Digunakan Menjadi Hak Guna Bangunan Terhadap Tanah Aset Pada PT. PLN(persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat?. Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak terkait. Yang kemudian menghasilkan kesimpulan berupa penjabaran jawaban atas rumusan masalah hasil wawancara. Terjadinya perubahan status tanah hak pakai selama digunakan menjadi hak guna bangunan sebagai aset pada PT.PLN(persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat yang diawali dengan diperolehnya status tanah hak pakai selama dipergunakan mengikuti amanat Undang-Undang pada saat peralihan atau konversi terhadap hak-hak barat setelah diberlakukannya UUPA. Proses perubahan status tanah tersebut, dilaksanakan sesuai standar prosedur dengan rincian persyaratan, jangka waktu proses penyelesaian, hingga biaya berdasarkan PP No. 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Perubahan status tanah tersebut berakibat munculnya beberapa peraturan, ketentuan, serta MoU untuk mendukung perubahan tersebut.

Kata Kunci : Tanah, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Selama Digunakan.

344.06
HER
p

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH OLEH BUPATI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Heru Pratama Vebri, 1510112144, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2019

ABSTRAK

Sekretaris Daerah merupakan Pejabat pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu memimpin Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 19 Gubernur selaku wakil Pemerintah yang berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian Aparatur Sipil Negara dan pembebasan dari jabatan bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini Bupati/Walikota hanya diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun. Di Kabupaten Pasaman Barat Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 821.22/591/BKPSDM-2018 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara atas nama MANUS HANDRI, S.H. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, yang mengakibatkan Surat Keputusan a quo digugat oleh Manus Handri, S.H. ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat? 2) Bagaimana pengangkatan kembali Sekretaris Kabupaten Pasaman Barat setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yakni: 1. Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat oleh Bupati Pasaman Barat melalui Surat Keputusan Nomor: 821.22/591/BKPSDM-2018 tidak memenuhi Syarat-syrat sahnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu syrat formil maupun materil. erdasarkan pejabat yang berwenang mengeluarkannya Surat keputusan Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan atributif Gubernur berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Pengangkatan kembali Sekretaris Daerah yang diberhentikan oleh Bupati setelah Putusan Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya mengalami hambatan dikarenakan telah diangkatnya Sekretaris Daerah baru pengganti Penggugat yang merupakan dampak dari ditolaknya gugatan penggugat tentang penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat a quo sehingga tidak adanya kepastian hukum dan kejelasan terkait status Penggugat. Melalui penelitian ini disarankan Kepala Daerah wajib mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membuat suatu kebijakan/keputusan dan adanya peraturan yang mengikat terhadap pelaksanaan putusan PTUN yang kuat dan jelas sehingga dapat memberikan kewajiban bagi pihak yang kalah untuk mematuhi putusan tesrebut dan memberi keadilan bagi pihak yang menang.

Kata Kunci: Surat Keputusan, Wewenang, Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan

343.04
HID
p

PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN UNTUK PARTAI POLITIK DARI PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PADA PEMILIHAN UMUM 2019 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

Hidayathul Hasanah, 1510112194, Fakultas Hukum,Universitas Andalas, PK V (Hukum Tata Negara), 55 halaman, 2020

ABSTRAK

Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik salah satu sumber keuangan partai politik adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah melalui APBN/ APBD. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa penggunaan bantuan keuangan partai politik dari pemerintah diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan partai politik serta diatur pula bahwa setiap partai politik harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tersebut. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu, pertama bagaimana pengaturan bantuan keuangan partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011? Kedua bagaimana pelaksanaan bantuan keuangan partai politik pada pemilihan umum 2019 di pemerintahan daerah Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (sociological research) yang dilakukan dengan cara memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melihat penerapan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan bantuan keuangan untuk partai politik telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perkembangan sistem politik di Indonesia, sehingga sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Saat ini jumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Padang masih belum mencukupi sehingga partai politik masih bergantung pada dana sumbangan baik perusahaan maupun perorangan. Diharapkan pemerintah dapat meningkatkan jumlah bantuan yang diberikan demi meningkatkan kemandirian partai politik.

342
HID
p

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN KOMISI NASIONAL DISABILITAS DALAM KESETARAAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Hidayati Murni, 1610111034, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 73 Halaman, 2020

ABSTRAK

Penggantian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 salah satu cara untuk mencapai tujuan negara yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena undang-undang tersebut sudah cukup layak diganti dengan alasan rentang waktu yang sudah cukup lama dan perkembangan mengenai penyandang disabilitas dari tahun ke tahun yang beragam persoalannya, dalam undang-undang tersebut juga terdapat amanat untuk membentuk suatu lembaga independen yakni Komisi Nasional Disabilitas, namun terhitung dari semenjak undang-undang tersebut diberlakukan sampai saat ini lembaga tersebut belum kunjung juga terbentuk. Komisi Nasional Disabilitas diatur oleh Peraturan Presiden sesuai dengan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Untuk itu penulis menulis judul tersebut di atas dengan mengangkat permasalahan pertama bagaimana kesetaraan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat penyandang disabilitas di Indonesia ? dan yang kedua bagaimana politik hukum pembentukan Komisi Nasional Disabilitas di Indonesia untuk kesetaraan pemenuhan Hak Asasi Manusia ? untuk menjawab permasalahan ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan secara yuridis normatif dengan penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang digunkan adalah data sekunder. Dari hasil penelitian, terdapatnya kelalaian dalam pembentukan komisi nasional disabilitas dan kurangnya transparansi dalam pembahasan perancangan peraturan presiden yang akan mengatur Komisi Nasional Disabilitas tersebut, sehingga sampai saat ini kesetaraan pemenuhan hak penyandang disabilitas belum dapat dirasakan oleh masyarakat disabilitas dengan sepenuhnya. Kementrian yang seharusnya melekat pada Komisi Nasional Disabilitas seharusnya bukan Kementrian di bidang sosial yang telah disosial yang telah ditetapkan, karena persoalan tersebut bukanlah permasalahan sosial sebaiknya kementrian yang melekat adalah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

346.06
HIL
p

PENEGAKAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN RESORT PADANG PARIAMAN

Hilda Rahman, 1610113055, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 70 halaman

ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam hal ini adalah penegakan hukum terhadap anggota Polri di lingkungan Resort Padang Pariaman yang melakukan pelanggaran disiplin. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi penegak hukum yang mempunyai tugas pokok yang diatur dalam Undang- Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran disiplin merupakan segala perbuatan dari anggota Polri yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai bentuk untuk mewujudkan anggota Polri yang profesional dan akuntabel dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Pertama, Bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri di lingkungan Kepolisian Resort Padang Pariaman. Kedua, Bagaimana Penegakan hukuman disiplin dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukuman disiplin terhadap yang melakukan pelanggaran disiplin di lingkungan Resort Padang Pariaman. Typologi penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang membandingkan fakta di lapangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin melalui tindakan disiplin berupa teguran lisan dan tindakan fisik seperti merawat lingkungan, piket secara berturut-turut paling lama 7 hari dan tindakan fisik yang bersifat pembinaan maupun hukuman disiplin, namun fakta menunjukkan bahwa proses pelaksanaan disiplin masih belum dilaksanakan secara optimal sehingga penegakan disiplin belum efektif dalam mencegah anggota Polri melakukan pelanggaran disiplin. Oleh karena itu perlu penjatuhan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan dan pengawasan yang baik terhadap pelanggar di lingkungan Resort Padang Pariaman.

Kata Kunci : Penegakan hukuman disiplin, Pelanggaran

342
HIL
P

PEMBINAAN TERHADAP HAKIM SETELAH DIPUTUSKAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM

Hilma Putri Handayani, 1610111085, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VIII) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 99 Halaman, 2020

ABSTRAK

Hakim yang telah diputus sanksi pelanggaran kode etik hakim dilakukan pembinaan terhadapnya sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembinaan Hakim Non-Palu. Dalam kasus salah satu hakim Pengadilan Negeri di Provinsi Jambi, setelah dilakukan pembinaan selama kurang lebih 2 (dua) tahun dalam hal disiplin kerja, peningkatan etos kerja, serta konduite berupa berkelakuan, kemampuan atau kepatuhan terhadap tata tertib aturan kepegawaian hanya bernilai "cukup", bahkan hakim yang bersangkutan kembali mengulangi pelanggaran hukuman disiplin pada tahun 2018, padahal tujuan dibentuknya SEMA sebagai petunjuk dalam melakukan pembinaan bertujuan untuk melakukan pembinaan, peningkatan kualitas hakim dan mengurangi data statistik hukuman disiplin. Masalah yang akan dicari jawabannya adalah pertama, bagaimana pengaturan pembinaan terhadap hakim yang telah diputus sanksi pelanggaran kode etik hakim oleh Mahkamah Agung, kedua bagaimana implikasi pembinaan hakim dalam kasus pelanggaran kode etik hakim oleh salah satu hakim Pengadilan Negeri di Provinsi Jambi. Untuk menjawab hal tersebut penulis akan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pembinaan terhadap hakim yang telah diputus sanksi pelanggaran kode etik hakim oleh Mahkamah Agung, dan mengetahui implikasi pembinaan hakim dalam kasus pelanggaran kode etik hakim oleh salah satu hakim Pengadilan Negeri di Provinsi Jambi. Setelah melakukan penelitian yang mendalam, pembinaan terhadap hakim yang bersangkutan tidak mencapai apa yang dicita-citakan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi statistik hukuman disiplin. Oleh karena itu, penulis berpendapat diperlukan penyempurnaan pengaturan pembinaan terhadap hakim yang telah diputus sanksi pelanggaran kode etik hakim sehingga tercapai tujuan dilakukannya pembinaan tersebut sebagaimana yang dicita-citakan oleh Mahkamah Agung.

Kata kunci : Pembinaan, Hakim, Kode Etik

347.05
HUS
p

PENYELESAIAN SENGKETA PAGANG GADAI TANAH PERTANIAN DI KELURAHAN ANDALAS KOTA PADANG

Husnul Fikry Dode, 1610112100, Program Kekhususan Hukum Perdata, PK I, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 67 Halaman, 2020

ABSTRAK

Tanah adalah elemen penting dalam kehidupan manusia, tanah juga merupakan elemen penting dalam membentuk negara dalam mencapai tujuan dari negara. Di dalam pencapaian tujuan tersebut terdapat keberagaman budaya masing-masing daerah yang merupakan salah satu faktor interventi bagi negara, salah satu kekuatan validitas atas keberagaman budaya daerah terlihat di daerah Sumatera Barat yang mempunyai tanah adat yang dikenal dengan tanah ulayat kaum. Tanah ulayat kaum terkadang digadaikan kepada pihak lainnya. Di dalam ketentuan adat mengatakan bahwa dijua indak dimakanbali, digadai indak dimakan sando yang maksudnya harta pusaka tidak boleh dijual dan bila digadaikan harus dikembalikan kepada penggadai semula. Pagang gadai tetap berlansung sampai dilunasinya tebusan tanpa ada jangka daluarsanya. Hal tersebut tampak berbeda jika ditinjau dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah pertanian khususnya pasal 7 yang menyatakan bahwa: barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini sudah berlansung selama 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan. Permasalahan tanah pagang gadai tersebut juga terjadi di Kelurahan Andalas Kota Padang. Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: Apakah penyebab terjadinya pagang gadai tanah di Kelurahan Andalas,Kota Padang? Bagaimana pelaksanaan pagang gadai tanah di Kelurahan Andalas, Kota Padang? Bagaimana proses penyelesaian pagang gadai tanah di Kelurahan Andalas, Kota Padang? Untuk menjawab permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian ini adalah yuridis empiris dengan data primer berupa data yang diambil lansung di lapangan melalui wawancara dengan responden dan narasumber, sedangkan data sekunder berupa data yang penulis peroleh dari buku-buku kepustakaan, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut: Penyebab terjadinya perjanjian pagang gadai di kelurahan tersebut belandaskan rasa tolong menolong, pelaksanaan pagang gadai dilakukan menurut pedoman sesuai dengan isi perjanjian yang tertera di surat pagang gadai, proses penyelesaian perjanjian pagang gadai dilaksanakan dengan proseses diluar pengadilan dan sesuai dengan kesepakatan menurut pedoman isi dari perjanjian pagang gadai yakni musyawarah dan mufakat, perjanjian pagang gadai yang penulis angkat terdiridari tiga macam perjanjian dengan terdiri dari satu perjanjian sudah melaksanakan proses penyelesaian, satu perjanjian sedang melakukan proses peneyelesaian dan satu perjanjian lagi masih dalam proses jangka waktu pagang gadai.

Kata Kunci :Penyelesaian Sengketa, Pagang Gadai, Tanah Pertanian

344.09
HUS
p

PEMBOLEHAN KAWIN SESUKU BEDA NAGARI DI NAGARI KOTO TANGAH KECAMATAN TILATANG KAMANG KABUPATEN AGAM

Husnatul Khaira, 1610113021, Program Kekhususan Hukum Perdata Adat dan Islam, Fakultas Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah menganalisa tentang pembolehan kawin sesuku di Nagari Koto Tangah. Dalam budaya Minangkabau perkawinan sesuku merupakan perkawinan yang dilarang, namun di Nagari Koto Tangah Kabupaten Agam terdapat pengecualian dimana di Nagari ini telah dibolehkan selama pasangan tersebut berasal dari nagari yang berbeda, karena tradisi ini agak berbeda dengan hukum perkawinan adat minangkabau pada umumnya, maka menarik dan menjadi fokus penulis untuk melakukan penelitian lebih mendalam apa yang menjadi dasar pembolehan kawin sesuku dan bagaimana pendapat tokoh masyarakat terhadap pembolehan kawin sesuku beda nagari di Nagari Koto Tangah ini. Untuk menjawab persoalan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil dari Penelitian dapat penulis simpulkan yaitu Penyebab terjadinya pembolehan kawin sesuku beda nagari di Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, disebabkan bahwa sesuku dengan nagari yang berbeda sudah merupakan suatu hubungan kekerabatan yang jauh dimana tidak lagi seharta pusaka, tidak serumah gadang, tidak sepenghulu dan aturan adat masing-masing nagari sudah berbeda sehingga jika terjadi perkawinan tidak akan menyebabkan rusaknya struktur kekerabatan. Pendapat tokoh masyarakat terhadap pembolehan kawin sesuku beda nagari di Nagari Koto Tangah Kabupaten Agam, bahwa dengan dibolehkan kawin sesuku beda nagari bukanlah suatu penentangan terhadap hukum adat Minangkabau melainkan merupakan suatu proses penyesuaian adat dengan tuntutan dinamika pertumbuhan zaman, dengan pertimbangan lebih mengutamakan kemaslahatan dari pada kemudaratan bagi anak nagari Koto Tangah.

Kata Kunci : Kawin, Sesuku, Beda Nagari, Pembolehan

345
HUT
p

PELAKSANAAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION UNTUK MENYELESAIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG

Hutri Azuria Sari. 1610112077. Fakultas Hukum. 88 Halaman. 2020.

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. Di Polres Padang Panjang dalam beberapa kasus tindak pidana KDRT diberlakukanAlternative Dispute Resolution atau ADR dalam menyelesaiakanya. Namun menurut hukum positif Indonesia saat ini, KDRT tidak dapat diselesaikan dengan cara ADR, karena KDRT bukanlah termasuk tindak pidana ringan. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana pertimbangan Kepolisian Resor Padang dalam menggunakan ADR sebagai upaya penyelesaian tindak pidana KDRT? Kedua, Bagaimana implementasi penggunaan ADR oleh Kepolisian Resor Padang Panjang dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT sehingga keadilan yang dicita-citakan dapat tercapai? Metode kepenulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data tersebut diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertama, yang menjadi pertimbangan Kepolisian Resor Padang Panjang dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT adalah atas dasar permintaan dari kedua belah pihak. Mempercepat penyelesaian perkara, sederhana dan biaya ringan. Mengurangi penumpukan berkas di tahap penyidikan. Menanmbah akses untuk memperoleh keadilan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kedua, Dalam mengimplementasikan ADR ada beberapa yang harus dilewati seperti penerimaan laporan, pemeriksaan saksi, gelar perkara, pelaksanaan ADR dan tindakan setelah ADR. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar dibuat aturan hukum yang jelas dalam menyelenggarakan ADR dalam tindak pidana KDRT.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, ADR, KDRT

345
IBN
U

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PADANG

Ibnu Rusyd,1310111145, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 halaman, 2020

ABSTRAK

Maraknya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak diberbagai daerah menuntut upaya yang lebih serius oleh lembaga-lembaga terkait, khususnya dalam tulisan ini berfokus pada Lembaga Kepolisian dalam meminimalisir Kejahatan tersebut . Hal ini menjadi sebuah pertanyaan untuk penulis masalah atau kendala apa yang menghambat kepolisian dalam menanggulagi kejahatan kekerasan terhadap anak. Maka dari itu, untuk menekan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perlu adanya perhatian khusus dari aparat penegak hukum demi perlindungan generasi muda dari segala macam hal yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan, dalam hal ini upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dalam penulisan skripsi ini penulis memfokuskan penelitian di wilayah hukum Kepolisian Kota Padang untuk selanjutnya disebut Polres kota Padang. Rumusan masalah : Bagaimana upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak? Apa yang menjadi kendala-kendala Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?. Dalam penelitian inipenulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Dalam penanggulang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, diantaranya Pre-emtif, Preventif dan Represif. Upaya Pre-emtif yaitu dengan memberikan Sosialisasi kepada masyarakat, Upaya Preventif yaitu berupa upaya pencegahan dengan melakukan kegiatan patroli ke daerah-daerah untuk mengantisipasi segala bentuk tindak kejahatan.Upaya Represif yaitu bentuk penanggulangan berupa penanganan terhadap kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian,kejaksaan,pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kota padang yaitu : pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu, kurangnya informasi yang bisa didapatkan penyidik tentang si pelaku, kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat, kendala dalam visum,kurang nya sarana dan prasarana

348.3
IKH
p

PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU POLITIK UANG (MONEY POLITIC) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Ikhsanul Oktrio Mirza, 1610113002, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 63 halaman, 2020

ABSTRAK

Pemilihan Umum adalah perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga Pemilihan Umum sebagai wadah untuk memilih wakil rakyat di pemerintahan secara langsung. Dalam hal ini di Indonesia ada dua bentuk pemilihan secara langsung pertama Pemilihan Umum dimana disini warga negara memilih secara langsung Presiden dan Wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Kedua Pemilihan Kepala Daerah dimana warga negara Indonesia memilih secara langsung Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dan juga Walikota dan Wakil Walikota daerahnya masing-masing. Kedua bentuk pemilihan langsung tersebut sudah memiliki aturan dalam pelaksanaanya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilukada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemilu, dalam kedua aturan tersebut menjelaskan mengenai bagaimana cara menyelenggarakan Pemilihan secara baik dan benar baik Pemilu maupun Pemilukada. Perumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: Pertama, Bagaimana pengaturan sanksi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pelaku money politic? Kedua, Apa akibat hukum ketidak sinkronan penjatuhan sanksi terhadap pelaku money politic di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu? Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan dan aturan perundang- undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Hasil pembahasan dapat disimpulkan: Pertama, Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pelaku money politic antara Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sinkron. Kedua, akibat ketidaksinkronan tersebut masyarakat bingung dalam melaksanakan aturan tersebut karena adanya tumpang tindih antara kedua aturan sehingga diperlukannya harmonisasi aturan.

Kata Kunci : Pemilu, Pemilukada, Money Politic.

344.03
IND
a

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN E-MONEYBRIZZI DALAM PEMBAYARAN JASA BUS TRANS PADANG

Indri Tri Novita, 1610112042, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Peraturan kebijakan menggunaan e-money Brizzi dalam pembayaran jasa bus Trans Padang merupakan program yang dicanangkan Dinas Perhubungan.Program ini pertama kali diterapkan pada pembayaran jasa Trans Padang dengan Brizzi. Brizzi merupakan salah satu produk kartu uang elektronik yang dikeluarkan oleh Bank Republik Indonesia (BRI) dan pada saat ini hanya Bank Rakyat Indonesia yang mampu menyediakan jasa transaksi non tunai. Pada dasarnya peraturan kebijakan ini hanya sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan yang ada. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu: 1)Apakah peraturan kebijakan penggunaan e-money Brizzi dalam pembayaran jasa bus Trans Padang sesuai dengan peraturan perundang-undangan?; 2) Apa permasalahan yang dialami pada pelaksanaan penggunaan e-money Brizzi dalam pembayaran jasa bus Trans Padang?; 3) Apa upaya Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan penggunaan e-money Brizzi dalam pembayaran jasa bus Trans Padang?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sifat deskriptif, menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Peraturan kebijakan ini bertentangan dengan hukum positif, Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan peraturan kebijakan ini dikeluarkan bukan karena keadaan penting dan mendesak; 2) kendala yang dihadapi yaitu perilaku masyarakat yang masih mempercayai uang tunai, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembayaran non tunai pada pelayanan publik, sarana dan prasarana yang kurang memadai, keterbatasan penerbit penyedia layanan transaksi non tunai, dan harga kartu yang menurut masyarakat cukup mahal; 3) upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang adalah melakukan sosialisasi dan meningkatkan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga lainnya.

KataKunci:e-money Brizzi, peraturan kebijakan, Trans Padang

343.02
INT
p

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MILIK ADAT MELALUI MEDIASI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG

Intan Rezkia Utami, 1610111025, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 74 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab mengenai tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa tanah milik adat melalui mediasi dan tindak lanjut dari proses mediasi yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kota Padang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode peneltian yuridis dan empiris dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang telah diperoleh dikumpulkan kemudian dianalisis yang akan dijadikan rujukan dalam memecahkan masalah. Tanah sebagai sumber daya alam yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Jumlah penduduk di Indonesia dari waktu ke waktu terus bertambah dan berkembang namun jumlah tanah yang ada bersifat tetap. karena jumlah tanah yang dibutuhkan meningkat hal ini mempengarui faktor harga dan nilai tanah. hal inilah yang menjadi banyaknya timbul konflik yang ada di Indonesia. Oleh karena itu perlu diperlukan penyelesaian secara tuntas salah satunya melalui sistem mediasi yang putusanya tidak ada pihak yang kalah maupun yang menang atau disebut juga dengan win-win solution sehingga tercipta lah keadilan antara kedua belah pihak. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa prosedur atau tata cara mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang untuk penyelesaian sengketa tanah dimulai dengan pemanggilan para pihak, kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan untuk memperoleh kebenaran data, selanjutnya para pihak dipertemukan untuk mencari jalan keluar dari sengketa tanah tersebut. Prosedur mediasi dan tindak lankjut dari proses mediasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Padang tidak bertentang dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang merupakan penyelesaian sengketa secara non-litigasi dengan pendekatan persuasif yang berdasarkan prinsip keadilan.

Kata Kunci : Sengketa Tanah, Win-Win Solution, Mediasi

341
INT
P

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APLIKASI BERBAYAR DENGAN SISTEM PINJAM AKUN PRIBADI (APPLE ID) MENURUT ATURAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Intan Permata Sari 1510111086, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 64 Halaman

ABSTRAK

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual seperti program komputer dilindungi pada aturan hukum internasional seperti TRIPs Agreement dan WIPO Copyright Treaty dan juga diatur dalam hukum nasional yaitu berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun pada praktek nya, permasalahan mengenai pelanggaran hak cipta terhadap program komputer ini marak terjadi di media sosial, seperti penjualan aplikasi berbayar dengan sistem pinjam akun pribadi (Apple ID). Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana analisis yuridis terhadap aturan hukum internasional seperti TRIPs Agreement dan WIPO Copyright Treaty dalam rangka penegakan hukum terkait perlindungan hak cipta terhadap aplikasi berbayar dan bagaimana implementasi hak-hak developer yang terkandung dalam Rights of Rental yang terdapat pada TRIPs Agreement dan WIPO Copyright Treaty terkait penjualan aplikasi berbayar di Indonesia. Penulisan ini menggunakan teknik penulisan yuridis normative dimana pendekatan penelitian akan menggunakan kajian kepustakaan atau library research. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa, pertama penjualan aplikasi berbayar dengan sistem pinjam akun pribadi (Apple ID) melanggar hak ekonomi yang telah dijamin bagi pihak developer aplikasi yang tercantum pada Article 11 TRIPs Agreement dan Article 7 WIPO Copyright Treaty tentang Rights of Rental karena aplikasi ini merupakan objek esensial yang dipinjamkan kepada user melalui layanan App Store yang disediakan oleh pihak Apple Inc. Dalam praktek penjualan ini, secara jelas oknum pelaku penjualan aplikasi berbayar dengan sistem pinjam akun pribadi (Apple ID) melanggar perjanjian lisensi dan menggunakan keistimewaan menggunakan keistimewaan menggunakan aplikasi berbayar tersebut untuk kegiatan komersil, sehingga royalti tidak secara langsung masuk ke pihak developer, melainkan ke oknum tersebut. Kedua implementasi TRIPs Agreement dan WIPO Copyright Treaty ini merupakan upaya dalam tindakan penegakan hukum untuk mencapai perlindungan terhadap hak cipta khususnya program komputer dan ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapannya sesuai dengan penegakan hukum secara kepidanaan, dan keperdataan sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 pasal 113 ayat (1).

Kata Kunci : Aplikasi Berbayar; TRIPs Agreement; WIPO Copyright Treaty; Apple ID; Rights of Rental.

348.3
IZZ
p

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PADANG

Izzatia Putri, 1510112197, Fakultas Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Selain masalah kemiskinan, salah satu masalah yang cukup dominan adalah kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah yang baik. Pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam rangka menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Terkait Pasal 53 huruf d yang melarang tiap orang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, terdapat ancaman pidana yang terdapat dalam Bab XVI Pasal 63 yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah Pertama, Bagaimana pengaturan dari Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah? Kedua, Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang? Ketiga, Apa kendala yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Metode yang digunakan Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian ini adalah adanya Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Kemudian Satpol PP juga telah memerkarakan pihak-pihak yang melanggar untuk kemudian diadili di Pengadilan Negeri Padang. Kedala yang dihadapi adalah susahnya memerkarakan masyarakat yang membuang sampah sembarangan karena harus melalui proses tangkap tangan dan kurangnya lahan untuk mengelola sampah.

342
JAB
A

ANALISIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA CERAI GUGAT KARENA FAKTOR BEDA PENGHASILAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA 1B PARIAMAN)

Jabal Thariq Mutakhari, 1610112102, Hukum Perdata Adat dan Islam, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Kasus Perceraian dari tahun ke tahun di Pengadilan Agama 1B Pariaman terus meningkat. Pada saat ini banyak terjadi cerai gugat karena faktor penghasilan. dan yang pada akhirnya diputus dengan alasan yang dikemukakan oleh PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode Normatif yaitu Penelitian hukum doktriner atau Penelitian kepustakaan. Metode Penelitian normatif yang bersumber pada Putusan Pengadilan dan juga dikuatkan dengan data pendukung Melalui Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama 1B Pariaman . Faktor beda penghasilan sebenarnya adalah sumber masalah dalam suatu percerain tetapi karena hal ini tidak terdapat pada alasan perceraian yang di kemukakan oleh peraturan perundang-undangan maka dalam hal ini hanya menjadi sebuah faktor perceraian dan tidak menjadi sebuah alasan dalam sebuah perceraian. Penghasilan istri yang lebih banyak di bandingkan suaminya mengakibatkan kearoganan sehingga melupakan tugasnya sebagai seorang istri dan kewajibanya dalam sebuah keluarga sehingga menggugat cerai suaminya yang dianggap tidak setara denganya. Islam membolehkan percerian tetapi Allah SWT membencinya, maka dari itu bentengilah sebuah keluarga dengan iman dan taqwa agar tercipta kerukunan dalam sebuah rumah tangga dan juga tidak terjadi hal yang sama dengan ini sehingga dapat mewujudkan tujuan pernikahan dan juga dapat menciptakan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah. Demikianlah dampak putusan mengenai cerai gugat karena faktor penghasilan oleh pihak yang memiliki permasalahan yang sama maupun yang tidak memilik permasalahan yang sama.

Kata Kunci : Cerai, Gugat , Penghasilan, Faktor

343.09
JAM
p

PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR PADA PT AGRO WIRA LIGATSA OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jamilah, 1510111185, Fakultas Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Dinas Lingkungan Hidup adalah dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.Kewenangannya diatur dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta merupakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan HidupDaerah. Selanjutnya kewenangannya juga diatur dalam Pasal 5 huruf q Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Dapat dilihat bahwa salah satu tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah mengawasi pembuangan air limbah kesumber air. Dengan kata lain setiap pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Pasaman Barat harus melakukan pengelolaan air limbah sehingga tetap berada dibawah baku mutu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup harus mengawasi pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit salah satunya adalah PT. Agro Wira Ligatsa. Maka berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1.) Bagaimana pengelolaan limbah cair pada PT Agro Wira Ligatsa di Kabupaten Pasaman Barat ? 2.) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam menanggulangi dampak limbah cair di kabuparen Pasaman Barat ? Data diperoleh dengan cara wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta staff PT. Agro Wira Ligatsa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.Pengelolaan limbah cair yang dilakukan oleh PT. Agro Wira Ligatsa masih melanggar Pasal 16 Permen LH No 5 Tahun 2014, sehingga limbah cair yang dibuang kesungai sampai sekarang masih mencemari sungai. Selanjutnya pengawasan Dinas Lingkungan Hidup memberikan sanksi berupa pembekuan izin lingkungan PT. Agro Wira Ligatsa yang beralamat di Simpang Tiga Alin Kecamatan Gunung Tuleh itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/302/BUP- PASBAR/2017 tanggal 13 April.

Kata Kunci: Pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup, Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit

347.01
JEN
H

HAK-HAK NARAPIDANA WANITA HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B PADANG.

Jenita Mainanda,1510112133, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2019, 68 Halaman

ABSTRAK

Pembahasan dalam tulisan ini berjudul Hak-Hak Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang yang merupakan suatu studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan di Kota Padang yang dilatar belakangi perlunya pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang sebagai bentuk realisasi dari Hak Asasi Manusia termasuk narapidana yang telah dipidana dan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan jenis pendekatan Undang -Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan lapangan Sedangkan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara yang kemudian di analisis secara kualitatif. Analisis dan hasil penelitian yang di peroleh yaitu berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang yang di jamin Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan WewenangTugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan dan aturan terkait lainnya. Hak-hak wanita hamil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa petugas harus menyediakan makan dan minum. Penyediaan ini harusmemperhatikan kandungan makanan, kebersihan, dan kesehatannya. Pada kenyataannya penyelenggaraan makanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang untuk narapidana wanita hamil. Penyelenggaraan makanan untuk narapidana wanita hamil lebih banyak porsinya dan bervariasi sesuai yang di anjurkan dokter. Pemberian makanan tambahan pada narapidana wanita yang sedang hamil selalu diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang selalu diberikan. Makanan tambahan berupa bubur kacang hijau dan buah yang bervitamin dan meringankan pekerjaan bagi wanita hamil. Cek kandungan pun tanggung jawab dari lembaga pemasyarakatan perempuan pada setiap bulannya. Dalam pelaksanaannya tentu tidak terlepas dari kendala yang timbul. Kendala dalam pelaksanaan hak-hak narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang diantaranya, pertama kurangnya pemasokan dana dari pemerintah sehingga fasilitas yang ada tidak menunjang dan memadai pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi naraidana wanita. Selain itu masih bergabungnya antara lapas narapidana wanita dengan narapidana laki-laki dengan narapidana wanita,karena itu terbatasnya ruang gerak untuk narapidana wanita hamil.

Kata kunci : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

341
JEN
p

PENGATURAN TENTANG LARANGAN PERBUATAN YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BERUPA PENYEBARAN INFORMASI PALSU OLEH PENUMPANG DI DALAM PESAWAT UDARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA (STUDI KASUS : FRANTINUS NIRIGI TERKAIT BOMB JOKES DI DALAM PESAWAT LION AIR)

Jeny Sonya Putri, 1310112079, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 86 halaman, 2020

ABSTRAK

Pesawat sebagai alat transportasi dengan teknologi tinggi menjadikan setiap jarak bukan suatu kendala lagi untuk ditempuh. Namun, tidak berbanding lurus dengan pengaturannya. Pelanggaran hukum penerbangan akibat dari kurangnya kesadaran dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyebaran informasi palsu tentang bom merupakan salah satu dari kasus tindakan yang sering terjadi yang penyelesaian kasusnya berakhir dengan cara musyawarah atau sekedar memberikan surat peringatan kepada pelaku. Fenomena itu tentu merupakan kemunduran hukum, dimana hukum dianggap sesuatu yang menyulitkan dan memilih menempuh cara mudah yang tidak menimbulkan efek jera kepada pelakunya. Untuk itu penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah, yakni: (1) Bagaimana pengaturan tentang larangan perbuatan yang membahayakan keselamatan penerbangan berupa penyebaran informasi palsu oleh penumpang pesawat udara menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional? (2) Bagaimana pengawasan dan penyelesaian kasus penyebaran informasi palsu Bomb Jokes yang dilakukan penumpang di dalam pesawat udara ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan kepustakaan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Hukum Internasional memiliki peran besar dalam penyelesaian kasus perbuatan yang membahayakan keselamatan penerbangan yang digunakan sebagai landasan yuridis oleh Indonesia dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan baru yang disesuaikan tidak hanya dalam wilayah nasional namun juga dalam wilayah Internasional. (2) pengawasan dan penyelesain kasus informasi palsu Bomb Jokes dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

345
JIM
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BEA DAN CUKAI TELUK BAYUR DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEREDARAN ROKOK ILEGAL

Jimmy Fatwa Jayadi,1610113061, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016, 61 Halaman

ABSTRAK

Rokok merupakan salah satu hasil tembakau yang termasuk dalam barang kena cukai (BKC), berdasarkan pada undang-undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai. Hal ini menyebabkan kenaikan harga pada rokok yang dikenakan cukai, adanya kenaikan harga ini menimbulkan dampak pada adanya tindak pidana cukai salah satunya rokok illegal tanpa cukai. Tindakan pemerintah dalam mengatasi tindak pidana cukai ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 1996 tentang penyidikan tindak pidana kepabean dan cukai pasal 1 mengatakan bahwa: penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeaan dan cukai dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil direktorat Jendral Bea dan Cukai. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh PPNS Bea dan Cukai Teluk Bayur dalam memberantas tindak pidana peredaran rokok ilegal? 2) Bagaimana bentuk hambatan PPNS Bea dan Cukai Teluk Bayur selama proses penyidikan dalam memberantas tindak pidana peredaran rokok ilegal? Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen serta wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwasanya direktorat jendral bea dan cukai sudah melakukan penyidikan secara prosedural. Dalam melakukan penyidikan direktorat jendral bea dan cukai menemukan beberapa kendala seperti perlawanan dari masyarakat dan koordinasi dengan instansi lain terkait penelusuran aset, namun demikian hal tersebut dapat ditangani dengan baik oleh dirjen bea dan cukai.

Kata Kunci : Penyidikan, Bea dan Cukai, Rokok Ilegal

348.3
JOD
k

KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Jodi Purnama Putra, Nomor Buku Pokok: 1610112063, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 90 Halaman, 2020

ABSTRAK

Dalam Pasal 18B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khsusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.” Salah satu Provinsi yang mendapat status Otonomi Khusus adalah Provinsi Papua dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mempertegaskan Status kekhususan yang diberikan kepada Provinsi Papua salah satunya adalah Perdasus (Peraturan Daerah Khusus) dan Perdasi (Peraturan Daerah Provinsi). Dalam hierarki aturan Perundang- undangan yang terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perdasus dan Perdasi ini sederajat dengan Perda lainnya. Dikarenakan ada dua macam Peraturan daerah pada Otonomi Khusus Papua seringkali Perdasi Papua mengambil muatan kewenangan Perdasus dan sebaliknya. Ini menimbulkan ketidakpastian muatan pengaturan perda dimana Perdasus sudah jelas muatannya mengenai hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Maka dari itu demi terciptanya kepastian hukum serta terciptanya tertib penyelenggaraan negara salah satu Peraturan Daerah tersebut harus dihilangkan dan Peraturan Daerah tersebut diamanahkan saja muatannya ke dalam satu Nomenklatur saja yaitu ke dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Papua, karena semangat dari Otonomi Khusus tersebut bisa lebih ditonjolkan ke dalam Perdasus, karena Perdasus merupakan jiwa serta semangat dari Otonomi Daerah Papua sehingga tertib penyelenggaraan negara itu tampak pada Peraturan Daerah Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Kemudian Perdasus bisa mengokohkan posisinya dalam hierarki aturan Perundang-undangan sehingga tidak ada lagi dua bentuk Peraturan Daerah pada Provinsi dengan Status Otonomi Khusus. Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu dengan menelaah produk aturan perundang-undangann serta menggunakan pendekatan historis yaitu pendekatan yang dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah. Kemudian dari hasil analisa dengan pendekatan yuridis normatif dapat disimpulkan sebaiknya Perdasi Papua dihilangkan saja dan Perdasus dikokohkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua satu- satunya dengan kewenangan muatan pengaturan yang lebih luas.

345
JUM
p

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi di Wilayah Hukum Polres Payakumbuh)

Jumadil Fajrio, 1410112043, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 94 hlm, 2020

ABSTRAK

Tindak pidana perjudian terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Barat. Khususnya di Kota Payakumbuh dengan berbagai macam jenis perjudian seperti domino, ceki, togel, kiu-kiu, koa, batu alik, klorok dan song. Pada tahun 2016 terjadi 5 (lima) kasus, tahun 2017 terjadi 6 (enam) kasus, kemudian pada tahun 2018 terjadi 13 (tiga belas) kasus. Proses penegakan hukum tindak pidana tersebut berada pada pihak kepolisian terutama pada penyidik kepolisian untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana perjudian. Rumusan masalah yang penulis kaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peranan kepolisian dalam penggulangan tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh?. Apakah kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh?, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) Peranan Kepolisian dalam penggulangan tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh adalah berupa upaya pre-emtif, preventif dan represif. Kepolisian melakukan penegakan hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana perjudian adalah lingkungan, ekonomi dan rendahnya pendidikan masyarakat. Tindak pidana perjudian yang terjadi terus meningkat setiap tahunnnya mewajibkan kepolisian khusunya Polres Payakumbuh lebih berperan aktif dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana perjudian 2) Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Payakumbuh adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kebocoran Informasi Penangkapan, kurangnya barang bukti perjudian, keterbatasan personil kepolisian, terbatasnya sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Kepolisian, Tindak Pidana, Perjudian.

345
KEV
u

UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA MASA PANDEMI COVID 19

Kevin Alver Perdana, 1510111146, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Pada masa pandemi Corona Virus atau Covid 19 di Indonesia, masyarakat dihadapkan dengan kondisi kerawanan sosial dan kerawanan keamanan. Salah satunya berdampak pada masyarakat Kota Padang dilihat dari menurunnya taraf perekonomian masyarakat akibat kebijakan PSBB untuk mengurangi penyebaran Corona Virus sehingga terjadinya banyak PHK, selain itu kebijakan asimilasi yang diberikan terhadap eks Narapidana juga berdampak dengan terjadinya residivis (pengulangan tindak pidana) terutama tindak pidana pencurian. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah Upaya Kepolisian Resort Kota Padang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19? 2. Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Padang Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Covid-19? Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi kepustakaan (library research). Dari hasil penelitian, Upaya Kepolisian Resort Kota Padang dalam penanggulangan tindak pidana pencurian pada masa pandemi Covid-19 yaitu, sebagai berikut: lebih menitik beratkan kepada pencegahan (upaya preventif) terjadinya bentuk pelanggaran hukum terutama yang dalam skripsi ini yaitu tindak pidana pencurian. Hal ini berdasarkan pada kebijakan PSBB, yang ditegaskan kembali melalui Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona. Maklumat tersebut merupakan inisiatif Polri dalam mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Penindakan langsung (upaya represif) terhadap pelaku tindak pidana tetap menjadi salah satu upaya terakhir dalam menanggulangi tindak pidana pencurian pada masa pandemi Covid 19. Hambatan yang dihadapi Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian selama masa pandemi Covid 19 dapat dilihat dari faktor internal yaitu, kurangnya jumlah aparat Kepolisian, kurangnya sarana dan prasarana, dan pembatasan prosedur pada masa pandemi akibat kebijakan PSBB, dari faktor eksternal yaitu, kurangnya partisipasi masyarakat.

341.48
KHA
p

PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL ATAS DUGAAN PELANGGARAN HAM BERAT OLEH PEMERINTAH CHINA TERHADAP ETNIS MUSLIM UIGHUR

Khairu Kasmina, 1510111177, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 77 halaman 2020

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap diri manusia oleh Tuhan YME tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, politik, bangsa dan termasuk juga hak hidup layak, merdeka dan selamat. Ini merupakan tugas negara untuk melindungi hak asasi warga negaranya dari pihak yang ingin mengganggu dan meniadakannya. Dalam penulisan ini adanya tindakan dugaan pelanggaran HAM berat oleh Pemerintah China terhadap etnis muslim Uighur. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah apa saja bentuk dari dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Pemerintah China terhadap muslim Uighur berdasarkan Statuta Roma 1998 dan bagaimana penegakan hukum internasional atas dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap muslim Uighur. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif yang menggunakan pendekatan Statute Approach sebagai acuan dasar dalam penelitian ini. Peristiwa kejahatan yang menimpa muslim Uighur telah menjurus kepada Genosida, usaha pembersihan etnis (ethnic cleansing) karena dilakukan dengan sistematis, dimulai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah China yang menyudutkan muslim Uighur. Kasus kejahatan kemanusiaan terhadap muslim Uighur seperti, pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, pemenjaraan, perkosaan, pemusnahan tempat beribadah dan ketidakbebasan menjalankan kepercayaan dalam beribadah yang dilakukan oleh pihak berkuasa dalam hal ini negara China. Perlunya peranan Dewan Keamanan PBB dalam memeriksa kasus ini berdasarkan yuridiksinya, karena fakta-fakta yang terjadi dalam kasus pembersihan etnis atau genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap muslim Uighur ini telah terpenuhi syarat materialnya yang di tetapkan dalam Statuta Roma 1998 khususnya pasal 6- 7 dan mengajukan kasus ini ke peradilan internasional International Criminal Court (ICC) yang diatur dalam Statuta Roma 1998.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, HAM Berat, Uighur.

341
KIN
a

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TERORISME INTERNASIONAL (studi : kasus penembakan massal pada dua Masjid di Selandia Baru)

Kintan savira, 1610111022, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 97 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Konsepsi Terorisme hingga kini masih belum menemui titik spesifikasi yang kongkrit. Abstraknya definisi terorisme membuat hampir segala bentuk tindak kejahatan yang merampas kehidupan manusia dan disertai kekerasan masuk dalam definisi terorisme. Walaupun belum ada konsepsi tunggal dari terorisme, ada beberapa unsur-unsur yang perlu dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatagorikan sebagai tindak kejahatan terorisme. dunia internasional kembali di hebohkan dengan penembakan secara brutal terjadi di dua masjid Selandia Baru. Pelaku Brenton Harrison Tarrant (28) secara keji menembaki jemaah Salat Jumat. Peristiwa ini terjadi di Masjid Al Noor dan Linwood Islamic Centre di Christchurch, Selandia Baru. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana Pengaturan Terorisme menurut Hukum Internasional. 2.Bagaimana penegakan hukum terhadap Terorisme pada penembakan massal di dua masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru 19 maret 2019 menurut Hukum Internasional. Metode pembahasan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif sering dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan prilaku manusia yang dianggap pantas. Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahuinya bahwa : 1. Pengaturan terorisme menurut Hukum Internasional yaitu terdapat pada konvensi Internasional seperti International Convention for These prevention, and Panisment of Terrorism tahun 1937 (Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Penghukuman Terorisme), International Convention for The Suppression of the Financing Terrorism tahun 1999 (Konvensi Internasional tentang Menentang Pendanaan untuk Teroris International. Terorisme di katakan sebagai kejahatan Transnasional. 2. Penegakan Hukum Internasional terhadap Terorisme pada penembakan massal dua Masjid di Selandia baru ini adalah di berlakukanya penegakan dengan hukum nasional , karena dari kasus nya sendiri pihak selandia baru sudah turun tangan dan sudah melakukan tindakan dengan kasus ini.

Kata kunci : Terorisme, kejahatan Transnasional, PBB

347.05
LIN
p

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM DI KANAGARIAN SURIAN KECAMATAN PANTAI CERMIN PROVINSI SUMATERA BARAT (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G/2018/PN KBR)

Lindri Wahyuni, 1610112112, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016, 70 Halaman

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria Pasal 1 ayat (3) mengatakan bahwa hubungan antara manusia dengan bumi (tanah) merupakan hubungan yang bersifat abadi. Tanah merupakan kepentingan pokok manusia., karena manusia membutuhkan tanah untuk menjalani kehidupannya. Perkembangan jumlah manusia yang ada di bumi ini menyebabkan persaingan untuk mendapatkan tanah semakin sulit menyebabkan tanah menjadi salah satu objek yang sering disengketakan. Terutama untuk tanah ulayat yang tidak bersertifikat. Tanpa adanya sertifikat kepemilikan menjadikan tanah tersebut mudah untuk di klaim oleh pihak lain. Kurangnya pengertahuan masyarakat mengenai pendaftaran tanah menjadi penyebab utama terjadinya sengketa. Padahal pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Sengketa yang terjadi kemudian diselesaikan melalui litigasi maupun non litigasi. Perkara dengan Nomor 28/PDT.G/2018/PN KBR awalnya diselesaikan melalui musyawarah Keluarga kemudian dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari dan terakhir ke tingkat Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa penyebab timbulnya sengketa tanah ulayat kaum di Kanagarian Surian Kecamatan Pantai Cermin Provinsi sumatera barat pada kasus dengan Nomor Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok? 2) Bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum dalam putusan Nomor 28/PDT.G/2018/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil 1) sengketa tanah adat sering terjadi karena kurangnya bukti kepemilikan yang sah, karena masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya. 2) Gugatan dinyatakan Gugur karena kedua belah pihak tidak hadir dipersidangan.

Kata Kunci : Sengketa Tanah, Minangkabau, dan Kepastian Hukum

344.03
LAE
p

PENERAPAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL OLEH PENYIDIK SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES BUKITTINGGI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

LAELA MUSTIKA, 1710112084, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Menurut penjelasan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, tanpa adanya unsur niat atau kesengajaan. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa "pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Namun kebijakan menempatkan korban ke tempat rehabilitasi tidak berjalan dengan baik. Sementara itu, penyidik Polri memiliki kewenangan dalam kasus narkotika sesuai ketentuan pasal 81 Undang-Undang Narkotika sehingga membuka peluang untuk menerapkan rehabilitasi medis dan sosial. Berdasarkan uraian diatas adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana penerapan rehabilitasi medis dan sosial oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, 2) Apa saja kendala yang ditemui Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi dalam menerapkan rehabilitasi medis dan sosial terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu Penerapan rehabilitasi medis dan sosial oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi terhadap korban penyalahgunaan narkotika adalah dengan mengajukan permohonan asesmen kepada tim asesmen terpadu, kemudian mengeluarkan surat rekomendasi rehabilitasi dari penyidik dan terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang merupakan anak dibawah umur selain diterapkan rehabilitasi akan dilakukan diversi. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi dalam menerapkan rehabilitasi yaitu kurang kooperatifnya pihak keluarga dalam penerapan rehabilitasi oleh penyidik dan tidak memadainya fasilitas panti rehabilitasi yang ada di Bukittinggi yang berada dibawah Instusi Pemerintah yang bekerjasama dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Bukittinggi. Dalam mengatasi kendala tersebut penyidik tetap melakukan penerapan rehabilitasi sekalipun tidak kooperatifnya pihak keluarga serta melakukan penyuluhan-penyuluhan narkotika kepada masyarakat. Dalam mengatasi terbatasnya fasilitas panti rehabilitasi, penyidik melakukan rujukan rehabilitasi ke panti rehabilitasi yang berada di Kota Padang agar tetap dapat diterapkannya rehabilitasi.

Kata Kunci : penyidik, korban penyalahgunaan narkotika, rehabilitasi

346.08
LAU
p

PELAKSANAAN PENGAJUAN KLAIM ASURANSI BAGI ANGGOTA KOPERASI YANG MENGALAMI RISIKO MENINGGAL DUNIA SEBELUM PINJAMAN LUNAS DI KOPERASI KELUARGA BESAR SEMEN PADANG (KKSP)

Laura Hikmah Izzatin Nissa, 1610111076, Program Kekhususan Hukum Perdata (PK II), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 67 halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Asuransi jumlah adalah suatu perjanjian dimana suatu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar uang secara sekaligus atau periodik, sedang pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran itu tergantung dari mati atau hidupnya seseorang tertentu atau lebih. Pada hakikatnya kehidupan dan kegiatan manusia mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat tidak kekal. Sifat yang tidak kekal merupakan sifat alami yang tidak dapat dipastikan. Kepastian tersebut dapat terwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang belum tentu menimbulkan rasa tidak aman dalam diri manusia. Risiko yang diderita dapat berupa seperti kerusakan, kerugian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, sehingga menyebabkan timbulnya pikiran manusia untuk berupaya menghindari dan mengalihkan risiko kepada pihak lainyang bersedia menanggungnya, dalam hal ini adalah pihak asuransi. Berdasarkan hal di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yaitu : 1) Bagaimanakah proses pengajuan klaim dan pelaksanaan pembayaran klaim asuransi bagi anggota koperasi yang meninggal dunia sebelum pinjaman lunas di Koperasi Keluarga Besar Semen Padang, 2) Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pengajuan klaim asuransi bagi anggota koperasi yang meninggal dunia sebelum pinjaman lunas di Koperasi Keluarga Besar Semen Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif dan data-data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian data yang didapat di analisis sehingga diperoleh hasil dan kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dalam asuransi jumlah bagi anggota yang meminjam dana, kewajiban pihak asuransi adalah memberikan dana santunan (ganti kerugian) bagi tertanggung (anggota koperasi peminjam) apabila tertanggung mengalami risiko sebagaimana yang dijamin pada ketentuan polis, meninggal dunia akibat sakit ataupun kecelakaan.

Kata kunci: Koperasi, risiko, asuransi jumlah

344.03
LAU
p

PELAKSANAAN PEMBERIAN KPR SEJAHTERA FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (FLPP) PADA KANTOR CABANG UTAMA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

Laura Rizky Ananta, 1610113036, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 Halaman, 2020

ABSTRAK

Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan perumahan yaitu kesenjangan antara jumlah terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan rakyat. Upaya penurunan backlog perumahan menjadi salah satu agenda utama Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat merupakan salah satu bank daerah yang ditunjuk untuk menjalankan program perumahan dengan produk KPR Sejahtera-FLPP. Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:(1) Bagaimana pelaksanaan pemberian KPR Sejahtera-FLPP pada Kantor Cabang utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat? (2) Permasalahan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan pemberian KPR Sejahtera-FLPP pada Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan upaya penyelesaiannya?. Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan data primer sebagai data utama yang berupa data yang diambil langsung dilapangan melalui wawancara semi terstruktur dengan pegawai Divisi Kredit Konsumer Bagian Kredit Personal Umum, pegawai Bagian Kredit Konsumer Seksi KPR Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dan Nasabah KPR Sejahtera-FLPP Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, sedangkan data sekunder berupa data yang penulis peroleh dari bahan kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif, di lakukan editing dan tabulating sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, di peroleh kesimpulan sebagai berikut: (1)Bahwa secara prosedur pelaksanaan pemberian KPR Sejahtera-FLPP telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016 Tentang Kemudahan Dan/Atau Bantuan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan hingga saat ini pemberian dan perjanjian KPR Sejahtera-FLPP berjalan sebagaimana mestinya. (2)Permasalahan dalam pelaksanaan pemberian KPR Sejahtera-FLPP pada Kantor Cabang Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dapat dilihat dari berbagai pihak yaitu: pihak debitur, developer, dan bank.

Kata Kunci: Kredit, Rumah, FLPP.

345
LAU
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR NANGGALO PADANG)

Laurensia Nurul Averina, 1710113063,Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 74 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian termuat pada Pasal 363 KUHP dikenal dengan pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (gequalificeerde deifstal). Dalam lingkup wilayah hukum Polsek Nanggalo Padang jenis tindak pidana pencurian yang banyak terjadi adalah kasus pencurian dengan pemberatan. Kasus yang ditangani oleh Polsek Nanggalo pada tahun 2018-2020 berjumlah 374 kasus pencurian dengan pemberatan. Oleh sebab itu, perlu upaya dari penegak hukum terutama dari pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan guna menyelesaikan kasus tersebut. Permasalahan yang menjadi objek penelitian adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polsek Nanggalo Padang? 2. Apa saja hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polsek Nanggalo Padang? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: pelaksanaan penyidikan di Polsek Nanggalo Padang terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan berjalan dengan sistematis sebagaimana diatur dalam KUHAP dan penyidik berpedoman kepada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan. Hambatan yang ditemui yaitu kurangnya saksi, pelaku mangkir dari panggilan polisi dan identitas samaran, sulit menemukan barang bukti, barang hasil curian berpindah tangan, barang curian dijual jauh dari tkp, penyidik tidak bisa melakukan kegiatan secara daring, kurangnya personil unit reskrim polsek nanggalo, kurangnya sarana dan prasarana dalam penyidikan, masyarakat main hakim sendiri.

Kata kunci: Penyidikan, Pencurian, Pemberatan

343.09
LIL
p

PELAKSANAAN KETENTUAN HUKUM ACARA GUGATAN WARGA NEGARA (CITIZEN LAWSUIT / CLS) (STUDI KASUS SWASTANISASI PENGELOLAAN AIR MINUM DI PROPINSI DKI JAKARTA)

Lily Maria Yulis, SS, SH Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang (NIM: 1820119001; email: liliput_ra@yahoo.com)

ABSTRAK

Gugatan Warga Negara atau yang dikenal dengan istilah Citizen Lawsuit (CLS) adalah sebuah mekanisme yang dapat ditempuh oleh warga negara dalam rangka memperjuangkan hak-haknya yang tidak dipenuhi atau dilalaikan oleh negara/pemerintah, dan/atau meminta tanggung jawab penyelenggara negara atas kewajiban hukumnya. Gugatan warga negara menjadi mekanisme yang memberdayakan pencari keadilan dan solusi bagi warga terdampak yang enggan menggugat, Melalui CLS diharapkan menghasilkan perubahan kebijakan yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Pelaksanaan gugatan CLS sendiri merupakan penyimpangan terhadap asas yang berlaku dalam hukum acara perdata yakni asas Point d'interest Point d'action, yang berarti pihak yang berkepentingan langsung adalah pihak yang berhak menggugat. Mekanisme ini merupakan adopsi dan adaptasi dari sistem hukum Common Law, yang diawali dalam perkara lingkungan hidup, yang berkembang dan banyak diterapkan dalam praktik peradilan melalui peradilan umum menyangkut beragam objek gugatan. Sampai saat ini di Indonesia sendiri belum ada aturan tertulis yang secara khusus mengatur tentang gugatan CLS dimaksud. Akibatnya dalam pelaksanaannya ditemukan inkonsistensi dalam penanganan perkara CLS, khususnya terkait penilaian terpenuhi atau tidaknya syarat formil dalam CLS. Kekosongan norma hukum terkait CLS ini menimbulkan problematika hukum tersendiri dalam proses penegakan hukum, terutama menyangkut kepastian hukum. Sebagaimana terlihat dalam contoh kasus gugatan CLS yang dijadikan objek penelitian dalam penulisan tesis ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) dalam Sistem Hukum di Indonesia (Studi Kasus Swastanisasi Pengelolaan Air Minum di Propinsi DKI Jakarta)". Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus serta mempergunakan data sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan gugatan CLS yang diajukan oleh warga dalam perkara dimaksud berupa putusan lengkap pada masing-masing tingkatan pengadilan, serta dokumen dan bahan referensi lain yang terdapat dalam perkara gugatan CLS lainnya sebagai bahan perbandingan. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan ketentuan hukum acara CLS di Indonesia ternyata tidak sepenuhnya tunduk ketentuan kepada HIR dan RBG, melainkan juga merujuk kepada praktik CLS di negara- negara anglo-saxon, serta dipengaruhi oleh penafsiran hakim yang menangani perkaranya. Terhadap kekosongan norma hukum terkait CLS di Indonesia diharapkan kedepannya akan adanya optimalisasi dari fungsi mengatur (regelende functie) yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang diberikan kewenangan secara atribusi oleh Undang-Undang untuk membentuk suatu peraturan dalam penyelenggaraan peradilan. Produk hukum Mahkamah Agung yang dinilai tepat untuk mengatur dan mengisi kekosongan hukum tentang gugatan CLS ini adalah PERMA (Peraturan Mahkamah Agung).

Kata Kunci: Gugatan Warga Negara, Hukum Acara Perdata, Hukum Tata Usaha Negara

347.01
LIS
p

PERBANDINGAN INDEPENDENSI HAKIM DALAM MEMBUAT SUATU PUTUSAN DI SIDANG PERADILAN UMUM DI INDONESIA DAN SIDANG PERADILAN JURY DI AMERIKA SERIKAT

Lisa Andriarti, 1510111046, Fakultas Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Salah satu lingkup kekuasaan kehakiman di Indonesia ialah peradilan umum. Dalam sidang peradilan umum hakim memiliki kewajiban untuk menemukan dan menetapkan hukum dalam suatu perkara, memiliki hak mutlak untuk menentukan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau tidak serta menentukan hukuman yang akan diterima oleh seorang terdakwa. Melihat kondisi tersebut, ternyata peranan hakim di Indonesia sangat besar, dan dikarenakan besarnya peranan yang dimiliki majelis hakim dalam persidangan di Indonesia, maka kemudian besar juga kemungkinan kecurangan yang akan terjadi, sehingga dapat mengakibatkan munculnya keraguan yang besar dari masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada di Indonesia saat ini. Salah satu sistem peradilan yang bisa dibandingkan dengan sistem peradilan umum Indonesia ialah sistem peradilan jury. Dimana sistem jury in mengikutsertakan masyarakat awam atau rakyat biasa dalam sidang peradilannya. Salah satu pengguna sistem jury ini adalah negara Amerika. Hanya saja dalam penerapannya sistem jury juga memiliki permasalahannya sendiri, salah satunya ialah kecenderungan jury untuk mengedepankan kepentingan kelompok dalam membuat suatu putusan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah 1) Bagaimana perbandingan independensi hakim dalam membuat suatu putusan di sidang peradilan umum di Indonesia dan sidang peradilan jury di Amerika ? 2) Bagaimana konsep sistem peradilan yang ideal di Indonesia?. Untuk menjawab permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun kemudian yang menjadi hasil penelitian ini ialah ternyata sistem peradilan umum sudah merupakan peradilan yang ideal untuk di terapkan di Indonesia selama integritas hakimnya bisa diperbaiki. Disamping itu jury tetap bisa diterapkan di Indonesia asalkan dasar kepercayaan jury dalam membuat keputusan diberi batasan tertentu dalam suatu peraturan perundang- undangan.

341
LIV
i

IMPLEMENTASI INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY (ISPS) CODE DALAM KETENTUAN HUKUM NASIONAL DI INDONESIA Studi Kasus di Belawan International Container Terminal (BICT)

Livia Zulmarni, 1610112124, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VI (Hukum Internasional) 89 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Transportasi laut mempunyai peranan penting bagi masyarakat, ekonomi, pertahanan, dan keamanan suatu negara. Pada saat ini transportasi laut tidak hanya menjadi penghubung antar daerah dalam suatu negara saja, tetapi juga dapat menjadi moda transportasi yang menghubungkan antar negara sehingga menjadi salah satu sarana penghubung dalam membangun hubungan kerjasama internasional. Hal ini pun mengakibatkan meningkatnya pelayaran internasional. Rawannya terjadi tindakan yang mengancam keselamatan dan keamanan pelayaran, menyebabkan IMO menetapkan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code. Kode internasional ini bertujuaan untuk mendeteksi ancaman keamanan serta menetapkan langkah untuk mencegah terjadinya insiden keamanan di kapal dan pelabuhan. Meski Indonesia telah memberlakukan ISPS Code, tetapi pelaksanaan ISPS Code belum merata karena masih adanya terjadi insiden keamanan di beberapa pelabuhan. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan bersifat normatif yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sekunder. Dalam tulisan ini, penulis membahas mengenai pengaturan keamanan pelabuhan dalam ISPS Code, pelaksanaan ISPS Code dalam ketentuan hukum nasional di Indonesia, serta manfaat ISPS Code bagi pengguna jasa pelabuhan. Aturan hukum nasional mengenai pelabuhan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan pemberlakuan ISPS Code di Indonesia terdapat dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ship and Port facility security / ISPS Code) di Wilayah Indonesia, serta pedoman pelaksanaan ISPS Code di Indonesia terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan.

Kata kunci: International Ship and Port Facility Code, Keamanan Maritim, Hukum Maritim

346
LOL
k

KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN TURAP DI RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN KOTA PADANG

Lolita Erza, 1610112028, Fakultas Hukum, 2020, 86 halaman

ABSTRAK

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat kasus penyimpangan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Turap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang Tahun Anggaran 2013. Diketahui adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.316.231.561, pekerjaan tidak sesuai kontrak senilai Rp.16.939.852, dan pekerjaan yang tidak dikerjakan senilai Rp.16.300.000 yang menyebabkan kerugian Negara/Daerah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Turap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang? 2) Bagaimana Pengawasan terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Turap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sifat penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil yaitu 1) Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Turap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang bahwa, terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan yang dilakukan secara fiktif. 2) Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Turap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sehingga terdapat kekurangan volume, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak, pekerjaan tidak dikerjakan dan kelebihan volume yang menyebabkan kerugian negara/daerah, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci: Pengadaan Barang dan Jasa, Pembangunan Turap, Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

347.01
LUC
p

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B KOTA SOLOK (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Solok)

Lucia Veronika Angela, 1610111013, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Halaman 82, 2020

ABSTRAK

Setiap narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan mendapatkan hak- haknya yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan hak-hak ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Salah satu hak yang didapatkan oleh warga binaan tersebut adalah remisi. Remisi pada dasarnya merupakan hak yang harus diberikan kepada setiap narapidana, namun demikian terdapat pengecualian pemberian remisi terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Berdasarkan uraian diatas adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana pelaksanaan pemberian hak remisi terhadap narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan klas II B kota solok. 2) apa saja kendala dalam pelaksanaan pemberian hak remisi terhadap narapidana narkotika serta upaya dalam mengatasinya di lembaga pemasyarakatan klas II B kota solok. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut secara akurat, digunakan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan klas II B kota solok dapat diketahui bahwa: 1) pelaksanaan pemberian hak remisi terhadap narapidana narkotika sudah sesuai dengan peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 3 tahun 20018 tentang syarat dan tata cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. 2) kendala yang dihadapi oleh petugas lapas adalah masih banyaknya petugas lapas yang belum paham akan pelaksanaan pemberian hak remisi terhadap narapidana narkotika serta perilaku narapidana yang masih banya melanggar aturan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Untuk menanggulangi kendala tersebut kepala lapas memberikan pelatihan mengenai pelakksanaan pemberian hak remisi terhadap narapidana narkotika kepada petugas lapas.

346.01
MAR
T

TRADISI MAISI SASUDUIK DAN PELAKSANAANNYA DALAM PERKAWINAN ADAT DI NAGARI KOTO BARU SIMALANGGANG, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

M Arif Anugrah Iyasa, 1610113020, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 74 halaman

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting bagi manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Perkawinan juga merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, yang menyangkut hubungan keperdataan. Perkawinan dalam konteks adat, dilaksanakan menurut tradisi yang turun temurun dari nenek moyang, yang menjadi landasan dalam prosesi turun temurun dalam perekatan hubungan satu sama lain. Ada banyak perihal cara perkawinan dan proses sebelum perkawinan pada masyarakat adat, salah satunya pada daerah Luhak Limapuluh Kota, ranah Minangkabau. Dilaksanakan dengan cara tradisi maisi sasuduik dalam proses peminangannya. Maisi sasuduik merupakan tradisi yang dilakukan dalam prosesi peminangan laki-laki terhadap perempuan dalam bentuk pemberian barang-barang kelengkapan kamar. Penelitian ini dilakukan atas dasar implementasi dan bagaimana prosesi sebenarnya di lapangan, bagaimana agama Islam memandang adat kebiasaan pada masyarakat, lalu bagaimana status menantu, status harta bawaan dan bagaimana pewarisan dari barang-barang sasuduik tersebut. Rumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana proses pelaksanaan tradisi maisi sasuduik, benda berwujud apa saja yang dijadikan objek dalam tradisi maisi sasuduik, dan apa akibat hukum dari tradisi maisi sasuduik. Penelitian ini dilakukan di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kabupaten Limapuluh Kota. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan Niniak Mamak, Datuak, Cadiak Pandai, Kepala KUA dan para praktisi suami-istri yang sudah melaksanakan tradisi maisi sasuduik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses maisi sasuduik memiliki tahapan diantaranya yaitu maresek, mahanta siriah, maminang, ka mungkin jo patuk, baiyo, Pelaksanaan Maisi Sasuduik (Penyerahan Barang), babako-babaki, akad nikah, malam bainai, dan baralek. Barang-barang yang diisi pada tradisi maisi sasuduik ini berupa kelengkapan kamar layaknya kamar perempuan, dan bisa juga diberikan dalam bentuk uang saja. Mengenai harta sasuduik ini termasuk kepada harta bawaan istri, dan masuk ke dalam warisan istri.

Kata Kunci : Pelaksanaan Maisi Sasuduik, Perkawinan Adat

347.01
MGI

t

TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN GRASI OLEH PRESIDEN TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

M. Gilang Ariesta Devega, Nomor BP: 1510112095, Program Kekhususan: Hukum Tata Negara, Halaman 62, Tahun: 2020

ABSTRAK

Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum dan menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan negara, maka seluruh komponen masyarakat wajib mematuhi dan menaati hukum, termasuk Presiden. Bahwa grasi merupakan kekuasaan Presiden, didasarkan atas ketentuan Pasal 14 (1) UUD 1945. Rumusan masalah adalah Pertama, bagaimana Politik Hukum Pemberian Grasi Oleh Presiden Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia? Kedua, bagaimana Pemberian Grasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Tipe penelitian adalah deskriptif analitis. Sumber data adalah data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan Pertama, politik hukum pemberian grasi oleh Presiden yaitu a) putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b) permohonan grasi belum lewat satu tahun terhitung sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c) permohonan grasi belum pernah diajukan sebelumnya; d) terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya mengajukan permohonan grasi kepada Presiden; e) grasi diajukan tertulis kepada Presiden; f) salinan permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan ke Mahkamah Agung; g) permohonan grasi dan salinannya dapat disampaikan terpidana melalui kepala lembaga permasyarakatan tempat terpidana menjalankan pidana. Kedua, pemberian grasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah; a) Presiden secara konstitusional mempunyai hak memberikan grasi kepada terpidana; b) Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; c) alasan kemanusiaan; d) pertimbangan terhadap keluarga terpidana; e) hukuman mati di berbagai negara cenderung berkurang; f) upaya pemerintah untuk mengadvokasi warga negara diluar negeri dari ancaman hukuman mati.

343.09
MIC
P

PEMBANGUNAN PEMBANGKIT PANAS BUMI DI GUNUNG TALANG BUKIT KILI, KECAMATAN LEMBANG JAYA KABUPATEN SOLOK DIKAITKAN DENGAN DOKUMEN UKL-UPL

M. ICHSAN ALFARIDZY.HR, 1510111132, Fakultas Hukum, 2019, 139 halaman

ABSTRAK

Bahan galian tambang di Indonesia memiliki jenis yang sangat beragam. Seperti halnya Gunung Talang Kabupaten Solok. Provinsi Sumatra Barat yang masuk dalam lingkaran cincin api (ring of fire) dunia mendapatkan berkah dengan adanya jajaran gunung berapi aktif yang menyumbangkan kesuburan tanah yang sangat cocok bagi pertanian.1Gunung Talang merupakan gunung berapi yang terletak di Kabupaten Solok, provinsi Sumatra Barat Indonesia. Gunung Talang memiliki potensi panas bumi berlokasi sekitar 9 km dari Arosuka Ibu kota Kabupaten Solok dan sekitar 40 km sebelah timur Kota Padang. Dalam melakukan aktivitas tambang harus memilki izin lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 yang mana jenis pertambangan panas bumi ini memiliki dampak penting sehingga harus dilengkapi dengan amdal terdapat dalam pasal 22 ayat (1) Undang –Undang No 32 Tahun 2009 :" Setiap usaha dan\ atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Namun Berdasarkan hasil pengamatan melalui surat kabar online serta hasil penelitian pendahuluan di lingkungan tim pemrakarsa dokumen yang ditunjuk oleh PT Hitay Daya Energi yaitu PT Bentang Cakrawala, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, dan tim pemrakarsa dokumen oleh PT Bentang Cakrawala bahwa proyek Pembangkit Tenga Listrik Panas Bumi Di Gunung Talang cuman memiliki dokumen UKL-UPL yang mana seharusnya juga dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana proses dalam penyusunan dokumen UKL-UPL dalam Pembangunan Pembangkit Panas Bumi di Gunung Talang 2) Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pembuatan dokumen UKl-UPL menurut Peraturan Perundang-Undanggan 3) Apa kendala yang ditemui oleh pemerintah dalam proyek Pembangkit panas bumi di Gunung Talang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis no rmatif bersifat normatif, menggunakan jenis data primer dan data sekunder, sumber data didapat penulis dari penelitian kepustakaan dan lapangan, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelittian diketahui bahwa proyek Pembangunan Tenaga Listrik Panas Bumi yang dilakukan oleh PT Hitay Daya Energi Melalui pemrakarsanya hanya membuat dokumen UKL-UPL sedangkan kegiatan ini memiliki dampak yang penting dalam jangka waktu yang panjang serta kurangnya sosialisasi secara intensif yang dilakukan oleh PT Hitay Daya Energi maupun Pemerintah sehingga masyarakat tidak sepenuh nya mengerti tentang dampak postiif dan negatifnya proyek tersebut.

343.04
MFI
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMINJAM ONLINE PADA PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING YANG BELUM BERIZIN DAN TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

M. Fiqri Haikal Mandala, 1610112085, FakultasHukum Universitas Andalas, PK II (Hukum Perdata Bisnis) 82 Halaman,Tahun 2020

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam Online Pada Perusahaan Fintech peer to peer lending yang Belum Berizin dan Terdaftar di OJK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan menggunakan layanan perusahaan pinjaman online peer to peer lending. Maka dari itu, untuk menghadapi permasalahan tersebut OJK telah membentuk Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI) yang menjelaskan bahwa perusahaan pinjaman online Fintech peer to peer lending harus mendaftarkan perusahaannya ke OJK agar mendapatkan izin dan diawasi langsung oleh OJK. Hal ini menimbulkan 3 (tiga) permasalahan yaitu, (1) Bagaimana kedudukan perusahaan fintech peer to peer lending yang belum terdaftar dan belum memiliki izin dari OJK?; (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap peminjam online pada perusahaan fintech peer to peer lending yang belum terdaftar dan belum memiliki izin dari OJK?; (3) Bagaimana upaya hukum dari OJK terhadap perusahaan fintech peer to peer lending yang belum terdaftar dan belum memiliki izin dari OJK?. Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu, Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam Online Pada Perusahaan Financial Technology Peer to Peer Lending yang Belum Berizin dan Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan diatur melalui POJK No. 77/POJK.01/2016 LPMUBTI yang menyatakan bahwa perusahaan fintech yang tidak terdaftar dan berizin adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi. Apabila terjadinya pelanggaran hukum, peminjam online dapat menyelesaikannya secara litigasi dan non-litigasi (arbitrase). Upaya hukum OJK melalui Satgas Waspada Investasi yaitu bagi peminjam agar lebih bijak memilih aplikasi fintech peer to peer lending, bagi pemerintah dan instansi terkait agar memperkuat koordinasi dengan satgas untuk mengawasi perkembangan fintech ilegal dengan mengeluarkan aturan khusus serta terjun secara langsung untuk membatasi pergerakannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perusahaan Fintech, Peminjam Online.

344.04
MHD
p

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BPJS KESEHATAN CABANG PADANG DENGAN OPTIK MUSTIKA TENTANG PELAYANAN KACA MATA BAGI PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Mhd Alfajri Jaya Putra, 1510111105, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Berdasarkan pasal 28 H Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat". Pemerintah berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dengan membuat sistem jaminan sosial terhadap masyarakatnya dengan menyelenggarakan program jaminan sosial yang dilakukan secara nasional khusunya untuk terjaminnya hak kesehatan orang misikin atau orang kurang mampu. Pada tahun 2004, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), kemudian lahirlah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan lain termasuk dengan Optik salah satunya adalah Optik Mustika. Kerjasama Optik Mustika dengan BPJS Kesehatan dituangkan dalam sebuah perjanjian dengan Nomor : 194/KTR/II-04/1216. Bentuk perjanjian antara BPJS Kesehatan dengan Optik Mustika adalah BPJS Kesehatan memberikan jaminan kepada peserta BPJS Kesehatan untuk membeli kacamata di Optik Mustika yang mana nantinya uang penjualan di Optik akan ditagihkan kepada BPJS kemudian di akhir bulan akan dibayarkan oleh BPJS kepada Optik. Rumusan yaitu, Pertama, Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Padang dengan Optik Mustika tentang pelayanan kacamata bagi peserta BPJS kesehatan. Kedua, Permasalahan apa saja yang ditemui di dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Padang dengan Optik Mustika tentang pelayanan kacamata bagi peserta BPJS Kesehatan dan bagaimana penyelesaiannya. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris, dengan teknik wawancara. Analisa dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Optik Mustika hanya dberlaku 1 tahun saja dan dapat diperbaharui sebelum perjanjian berakhir, Optik memberikan pelayanan kepada konsumen peserta BPJS Kesehatan yang sebelumnya menyelesaikan prosedur- prosedur pengajuan klaim, dan setelah itu BPJS wajib membayarkan uang biaya atas pelayanan dari Optik, pelayanan ini memiliki tiga tingkat, yaitu tingkat I, II, dan III, yang memiliki nilai ganti yang berbeda masing-masingnya. Dan permasalahan yang terjadi antara BPJS Kesehatan dengan Optik Mustika agar dilaksanakan penyelesaiannya sesegara mungkin sesuai dengan solusi penyelesaiannya, perjanjian bisa berakhir dengan putusnya perjanjian langsung dan juga bisa diberikan surat peringatan maksimal 3 kali setelah itu baru putsnya perjanjian kerjasama jikalau melakukan pelangaran yang tergolong berat. Untuk selanjutnya diharapkan antara kedua belah pihak yaitu Optik Mustika dan juga BPJS Kesehatan agar melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang telah diatur di dalam perjanjian kerjasamanya agar hubungan kedua belah pihak bisa baik dan juga dari tujuan diadakannya perjanjian ini dapat bisa tercapai sebagaimana mestinya.

Kata kunci : Perjanjian Kerja Sama, BPJS Kesehatan, dan Jaminan Sosial

345
MAR
p

PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAKMARDIAN FAJAR, 1610111105. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV (Hukum Pidana). 73 Halaman. Tahun 2020

ABSTRAK

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Anak dapat melakukan tindak pidana atau berkonflik dengan hukum seperti melakukan tindak pidana penadahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Diversi oleh Penuntut Umum Anak terhadap Anak yang melakukan tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Pariaman, kendala dalam pelaksanaan Diversi serta upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum Anak untuk mengatasinya. Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, pengumpulan data primer yang dilakukan dengan mengadakan wawancara semi terstruktur kepada Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Pariaman. Data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian sebagai berikut : pelaksanaan Diversi yang dilakukan oleh Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Pariaman dengan beberapa alur tahapan yaitu penunjukkan Penuntut Umum, koordinasi, upaya Diversi, musyawarah Diversi, kesepakatan Diversi, pelaksanaan kesepakatan Diversi, pengawasan dan pelaporan kesepakatan Diversi, dan penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan. Kendala yang ditemui Penuntut Umum adalah kesulitan dalam pemanggilan para pihak, Terjadinya perselisihan dalam proses musyawarah Diversi, korban dan keluarga korban sulit memaafkan Anak pelaku tindak pidana, terjadinya perselisihan selama proses Diversi, Kendala dari tokoh masyarakat. Dengan demikian, saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini sebagai berikut : diversi dalam perkara Anak sebaiknya perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga nantinya membantu menghilangkan stigma negatif terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan Anak dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, diperlukannya sarana dan prasarana untuk merealisasikan pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan, serta diperlukannya optimalisasi pembimbingan dari orang tua dalam tumbuh kembang pribadi Anak.

Kata kunci : Diversi,Penuntut Umum Tindak Pidana Penadahan.

347.05
MAR
p

PENYELESAIAN SENGKETA PENDAFTARAN TANAH SECARA SPORADIK DI KOTA SOLOK STUDI PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI TANJUNG PAKU

Maretha Usbah Winanda, BP:1610111045, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 79 halaman

ABSTRAK

Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah tentu akan menimbulkan permasalahan apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas penerbitan hak milik atas tanah yang selanjutnya disebut sengketa tanah. Salah satu kasus yang terkait dengan sengketa tanah yang ada di Sumatera Barat adalah sengketa tanah ulayat kaum yang terjadi di daerah Tanjung Paku Kota Solok. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi (1) bagaimana proses terjadi sengketa dalam Pendaftaran Tanah secara sporadik di Tanjung Paku Kota Solok; (2) bagaimana penyelesaian sengketa dalam proses Pendaftaran Tanah di Tanjung Paku Kota Solok; (3) bagaimana implikasi penyelesaian sengketa terhadap proses pendaftaran tanah di Tanjung Paku Kota Solok. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, dengan didukung oleh data primer yang diperoleh langsung dari narasumber dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Satu pihak merasa dirugikan atas pendaftaran tanah, dan kedua belah pihak merasa merekalah yang mempunyai hak atas tanah tersebut. (2) Proses penyelesaian sengketa tanah di Tanjung Paku Kota Solok pertama melalui mediasi di Kantor Pertanahan kemudian tidak mencapai kesepakatan lalu diselesaikan dengan cara bajanjang naik, batanggo turun, mulai dari niniak mamak, suku, kemudian Kerapatan Adat. Dalam penyelesaian sengeta tanah ulayat maka Kerapatan Adat memerintahkan tim BP3 (Badan Penyelesaian Perkara) untuk menyelesaikan sengketa tersebut, (3) Kerapatan Adat hanya memfasilitasi, memberi nasihat-nasihat sedangkan penyelesaian tetap diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak melalui musyawarah.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Pendaftaran Tanah, Sporadik, dan Kerapatan Adat.

346.08
MAU
p

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH UNTUK MODAL KERJA PADA WARUNG MIKRO BANK SYARIAH MANDIRI BUKITTINGGI CABANG PASAR AUR

Mauriska Ramadhani, 1610113006, Fakultas Hukum UNAND, 83 hlm, 2020

ABSTRAK

Setiap orang memiliki kebutuhan yang beragam, untuk memenuhi kebutuhan yang beragam itu dapat dilakukan dengan membuat suatu usaha. Untuk pengembangan usahanya, maka diperlukan sumber penyediaan dana untuk membiayai pengembangan usaha tersebut. Salah satunya dapat melalui pembiayaan di Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri menyediakan pembiayaan produktif yang ditujukan untuk pengusaha/pedagang/usaha mikro yang membutuhkan dana untuk modal kerja sebesar maksimal Rp.200 Juta dengan skema pembiayaan murabahah bernama warung mikro. Pembiayaan murabahah adalah produk yang sering digunakan, mudah dalam pengaplikasian, diperhitungkan dan memiliki risiko kecil yang pada praktiknya dilakukan menggunakan akad wakalah. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah; pertama; bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk modal kerja pada warung mikro Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur, kedua; bentuk kendala dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah untuk modal kerja pada warung mikro Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur dan cara penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara semi struktur dengan jenis wawancara berfokus. Studi dokumen dilakukan terhadap literatur dan dokumen yang ada pada Bank Syariah Mandiri menyangkut pembiayaan murabahah. Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri Bukittinggi cabang Pasar Aur telah melaksanakan pembiayaan murabahah untuk modal kerja pada warung mikro secara baik. Hal ini terlihat dari prinsip kehati-hatian yang diwujudkan dengan cara menetapkan persyaratan dan prosedur pembiayaan yang dijadikan dasar untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha nasabah layak untuk dibiayai. Dalam pelaksanannya telah sesuai dengan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Mengenai kendala dalam pelaksanaannya terjadi karena nasabah yang tidak tepat waktu dalam membayar angsuran, nasabah wanprestasi terhadap dana kebutuhan awal yang disepakati, pandemi COVID-19, dan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bank lain juga Rp200 juta. Untuk mengatasi kendala tersebut Bank Syariah Mandiri telah melakukan upaya melalui musyawarah, me-maintain nasabah-nasabah macet lewat komite internal BSM serta eksekusi benda jaminan.

Kata Kunci: Pembiayaan Murabahah, Modal Kerja, Warung Mikro

344.03
MEI
p

PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL BAGI PENGEMUDI SEPEDA MOTOR BERBASIS APLIKASI (OJEK ONLINE) DI KOTA PADANG (STUDI KASUS PADA PT.GOJEK INDONESIA DI KOTA PADANG)

Meidina Silmi Putri, 1610113051, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Salah satu cita-cita pendiri bangsa yaitu mewujudkan kesejahteran (rakyat) yang tertuang dalam alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikemukakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk dari cara negara dalam hal mewujudkan kesejahteraan yang merupakan salah satu cita-cita pendiri bangsa tersebut. Hal ini tidak terkecuali ditujukan untuk pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi (ojek online) dalam hal menghadapi perkembangan transportasi berbasis aplikasi yang semakin marak di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Padang. Bentuk kepedulian pemerintah yaitu dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Pertama, Bagaimana pemenuhan hak jaminan sosial bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi (ojek online) pada PT. GO-JEK Indonesia Cabang Padang. Kedua, Apa kendala dalam hal pemenuhan hak jaminan sosial bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi (ojek online) pada PT. GO-JEK Indonesia Cabang Padang. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif yaitu menggambarkan kebijakan pemerintahan yang dikaitkan dengan pemenuhan aspek jaminan sosial bagi pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi. Typologi penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang membandingkan fakta di lapangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sudah adanya program GO-JEK Swadaya sebagai pemenuhan hak jaminan sosial terhadap driver, namun hal itu belum maksimal teralisasikan. Beberapa kendala yang ditemui adalah belum adanya aturan yang mewajibkan PT. GO-JEK Indonesia untuk mewajibkan driver mengikuti program swadaya, kurangnya sosialisasi dan minimnya kesadaran driver itu sendiri untuk mengikuti jaminan sosial tersebut. Untuk itu diperlukannya aturan yang jelas serta peran semua pihak dalam hal pemenuhan hak jaminan sosial terhadap driver ojek online.

Kata Kunci : driver, GO-JEK, Jaminan Sosial

343.09
MEL
p

PENGAWASAN TERHADAP BANGUNAN RUMAH DI DAERAH SEMPADAN DANAU MANINJAU OLEH PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

Melia Rizki Ruswandi, 1610113028, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 95 Halaman

ABSTRAK

Untuk Menghindari ketimpangan dalam penyelenggaraan pembangunan maka diperukan adanya koordinasi pengawasan sejak dari perencanaan perumusan pembangunan hingga pelaksanaan teknis pengawasan. Danau Maninjau menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Agam dalam pengelolaannya. Pemerintah Kabupaten Agam mengeluarkan produk hukum daerah terkait upaya pelestarian Danau Maninjau tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Dan dalam pelaksanaanya, pemerintah daerah berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab.Agam 2010-2030. Semakin banyaknya bangunan rumah yang dibangun masyarakat ditempat yang bukan menjadi peruntukannya menunjukan adanya kelemahan dalam pengawasan dan pemberian izin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Berdasarkan latar belakang tersebut, Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pengawasan terhadap Bangunan Rumah Di Daerah Sempadan Danau Maninjau Oleh Pemerintah Kabupayen Agam? 2). Bagaimana upaya pemerintah dalam merealisasikan larangan pendirian bangunan rumah di Sempadan Danau Maninjau? Metode Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum. Sedangkan Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Semua data yang telah dikumpulkan yakni data primer dan data sekunder diolah secara kualitatif, dan mendapatkan mendapatkan kesimpulan yaitu: 1) Lemahnya pengawasan dan koordinasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam terhadap bangunan tanpa izin disepanjang tepian Danau Maninjau yang tidak memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis bangunan dan peraturan perundang-undangan. 2. Belum Maksimalnya Upaya pemerintah dalam merealisasikan larangan pendirian bangunan di sempadan Danau maninjau,telah diupayakan oleh pemerintah daerah agam dan instansi dinas terkait, Namun Ketidak konsistenan pemerintah dalam penerapan peraturan penataan ruang dan perizinan,kurangnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah daerah dibawahnya, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan izin mendirikan bangunan menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap bangunan rumah disepanjang tepian Danau Maninjau.

Kata Kunci : Pengawasan, Sempadan Danau, Bangunan Rumah

346.08
MER
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA KARTU KREDIT PERBANKAN DENGAN SISTEM ELECTRONIC FUNDS TRANSFER (EFT) DARI SEGI PERLINDUNGAN KONSUMEN

Mercy Monica Yolanda. 1610112086. Fakultas Hukum. 78 Halaman. 2020.

ABSTRAK

Perbankan merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting didalam kegiatan masyarakat khususnya di bidang financial, serta kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang, yang dapat terpenuhi lewat jasa – jasa perbankan. Jasa – jasa yang dilakukan oleh pihak bank menurut ketentuan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) harus sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu berdasarkan pada jenis banknya. Salah satu jasa yang dilakukan oleh pihak bank adalah transfer atau pemindahan uang. Saat ini perbankan Indonesia telah mengembangkan electronic banking system. Kegiatan transfer dana dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik tersebut dikenal dengan istilah Electronic Funds Transfer (EFT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan nasabah kartu kredit ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui hubungan hukum antara bank sebagai pemberi jasa EFT khususnya kartu kredit kepada nasabah. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, kaidah dasar, kebijaksanaan dan publikasi yang dibuat oleh pemerintah, buku-buku literatur, dan bahan lainnya yang tentunya berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan hukum terdapat peraturan yang melindungi para pihak yang melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan kartu kredit, yakni Pasal 2, Pasal 4, Pasal 18 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hubungan hukum antara bank sebagai pemberi jasa kartu kredit terhadap nasabah sebagai pemilik dan pengguna kartu kredit, terjadi pada saat penandatanganan aplikasi kartu kredit, dimana dasar dari hubungan tersebut adalah contractual liability, sehingga dari hubungan hukum tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak nasabah dengan pihak bank.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kartu Kredit, Konsumen

344.04
MIR
p

PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KLAS II B SOLOK

Miranti Yulia Putri: 1610111122 : Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Adanya Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan menjamin adanya hak narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun dalam praktiknya tidak semua Lembaga Permasyarakatan dapat menjalankan peraturan diatas faktanya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terdapat hambatan teknis seperti terjadinya overkapasitas sehingga mengakibatkan timbul masalah kurangnya pelayanan dalam bidang kesehatan terhadap Narapidana . Penelitian ini dilakukan terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Klas II B Solok sebagai Hak-hak Narapidana. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ini adalah: 1)Bagaimana Pelaksanaan Hak Narapidana mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Lembaga Permasyarakatan Klas II B Solok, 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan hak narapidana Mendapatkan pelayanan kesehatan di lembaga permasyarakatan klas II B Solok dan upaya mengatasinya. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan belum memadai. Pelayanan kesehatan di Lembaga Permasyarakatan Klas II B Solok belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana biaya pengobatan yang harusnya ditanggung oleh Negara malah dibebankan kepada narapidana. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tehadap narapidana yaitu kurangnya petugas kesehatan dan tidak adanya dokter umum sehingga hanya dapat mengobati penyakit ringan, kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap Narapidana, kurang lengkapnya obat-obatan yang ada di klinik serta tidak memadainya sarana dan prasarana kesehatan dan lingkungan yang buruk, kurang memadai dan tidak layak. Diharapkan kedepannya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana lebih memadai, dengan upaya menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi narapidana dan kualitas pelayanan kesehatan di Lembaga Permasyarakatan Klas B Solok.

345.02
MIS
p

PENGATURAN LARANGAN TERHADAP TINDAKAN TERORISME DALAM PENERBANGAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PEMBAJAKAN PESAWAT AFRIQIYAH AIRWAYS TAHUN 2016)

Misbahul Ferdian Marlef. 1610111075. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Program Kekhususan Hukum Internasional. 64 Halaman. Tahun 2020

ABSTRAK

Perkembangan zaman mempengaruhi mobilitas pergerakan manusia, dengan begitu, untuk mempermudah mobilisasi tersebut digunakanlah pesawat udara. Walaupun penerbangan itu hanya memerlukan waktu yang relatif pendek untuk sampai ke tempat tujuan, namun masih saja tetap terjadi tindakan kejahatan bahkan sampai aksi terorisme, seperti yang terjadi pada kasus pembajakan pesawat udara Afriqiyah Airways pada tahun 2016. Berdasarkan alasan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana pengaturan larangan terhadap tindakan terorisme dalam penerbangan menurut hukum internasional ? Kedua, Bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan teroris pada kasus pembajakan pesawat Afriqiyah Airways ?. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran, yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Hasil dari penilitian ini diperoleh kesimpulan : Pertama, berbagai upaya dilakukan dunia internasional untuk memberantas kejahatan penerbangan, seperti yang terdapat didalam pasal 11 Konvensi Tokyo 1963, Pasal 1 Konvensi The Haque 1970, Pasal 1 Konvensi Montreal 1971, serta Pasal 2,4 Konvensi Montreal 1999 yang melarang atas produksi, pengalihan dan kepemilikan bahan peledak tidak bertanda selain otoritas yang menjalankan fungsi militer atau polisi. Semua aturan yang terkandung didalam konvensi-konvensi tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi demi tujuan pemberantasan aksi terorisme dalam dunia penerbangan. Kedua, penegakan terhadap tindakan terorisme berupa pembajakan pesawat udara yang dialami maskapai Afriqiyah Airways telah memenuhi syarat-syarat tindakan melawan hukum baik dari Konvensi The Haque 1970 dan Konvensi Montreal 1971. Pengadilan Malta mendakwa pelaku dengan tuduhan sebagai tindakan terorisme (menggunakan aturan terorisme Malta) bukan aturan terkait pembajakannya saja, karena pelaku melakukan tindakan kejahatan penerbangan tersebut mempunyai tujuan atau unsur politik didalam melakukan tindakannya yang dimana itu merupakan ciri khas terorisme. Ancaman hukuman pidana jauh lebih berat menggunakan aturan terorisme, karena seperti kita ketahui, bahwa terorisme bukanlah tindakan melawan hukum biasa dan tindakan terorisme dipandang sebagai ancaman internsional. Pihak berwenang Malta tetap memperhatikan aturan-aturan yang terdapat didalam Konvensi The Haque 1970 dan juga Konvensi Montreal 1971 dengan melakukan menerapkan yurisdiksi udara negaranya, serta melakukan pencegahan awal dengan melakukan penahanan terhadap pelaku pembajakan.

Kata Kunci: Pengaturan, Larangan Penerbangan, Terorisme, Hukum Internasional

348.3
MUH
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PROVIDER TELEKOMUNIKASI TENTANG KEAMANAN DATA PRIBADI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK

Muhamad Aqila Liefde Aldi, 1610112004, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 102 halaman, 2020

ABSTRAK

Selama pemakaian jasa telekomunikasi jika terjadi kerugian terhadap konsumen, konsumen berhak mendapatkan pengganti kerugian dari pelaku usaha sebagai mana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, namun selam ini perlindungan data pribadi pengguna provider tidak terlaksana dengan baik. Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna provider telekomunikasi, kedua, kendala dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna provider telekomunikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: Pertama, Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna provider telekomunikasi dilihat dari segi perlindungan hukum preventif yaitu menyediakan system infomrasi bagi konsumen melalaui Portal Nasional Perlindungan Konsumen, melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum, membatasi penggunaan tiga kartu oleh pengguna provider dan menerapkan system standarisasi internasional (ITU, GSMA). Perlindungan repsesif oleh pihak telkomsel yaitu memberikan sanksi administrasi, sanksi hokum dan denda. Kedua, Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum yaitu kurangnya pemahaman dan anstisipasi dari konsumen betapa pentingnya menjaga dan melindungi data pribadi, Customer servise provider masih belum memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam menyelesaikan sengketa, konsumen kurang memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen, dan konsumen kurang memahami penyelesaian sengketa melalui customer service. Solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum yaitu memberikan edukasi kepada konsumen untuk mengantisipasi langkah awal untuk penanganan penyalahgunaan data pribadi, dan memberikan solusi dalam memecahkan masalah gangguan.

Kata Kunci: perlindungan hukum terhadap konsumen, keamanan data pribadi, perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik

342
MUH
t

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN PRESIDEN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM HAL PENGANGKATAN DAN PENERIMAAN DUTA DAN KONSUL

Muhammad Nursal, 1610111108, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, PK V (Hukum Tata Negara), 67 Halaman, 2020

ABSTRAK

Ada beberapa perubahan konstitusi penting yang terkait dengan Presiden yang salah satunya yaitu keterlibatan lembaga negara lain dalam pelaksanaan kewenangan Presiden, yakni memperhatikan pertimbangan DPR dalam pengangkatan duta besar dan penerimaan duta besar negara lain sesuai dengan Pasal 13 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil perubahan. Adanya pasal ini menyebabkan Presiden tidak lagi dapat leluasa dalam menentukan duta besar Indonesia untuk negara lain dan menerima duta besar negara lain karena semuanya harus memperhatikan pertimbangan DPR. Tujuan dari pertimbangan yang diberikan DPR ini memiliki fungsi yang cukup penting, supaya duta besar yang terpilih benar-benar mampu untuk membawa kepentingan Indonesia di dunia Internasional. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana mekanisme pengangkatan dan penerimaan duta dan konsul oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan, dan bagaimana persinggungan kewenangan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pengangkatan dan penerimaan duta dan konsul. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, dan data yang digunakan adalah data sekunder, serta metode pengumpulan data berupa studi dokumen (kepustakaan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengangkatan dan penerimaan duta dan konsul oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan, dan untuk mengetahui persinggungan kewenangan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pengangkatan dan penerimaan duta dan konsul. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perubahan substansi Pasal 13 ayat (2) pasca amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan suatu cara yang dianggap perumus perubahan konstitusi untuk menghindari kekuasaan eksekutif (executive heavy) yang otoriter, oleh karena itu dalam pengangkatan Duta Besar, DPR diberi hak untuk memberikan pertimbangan, peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengangkatan Duta Besar hanya sebatas memberikan pertimbangan-pertimbangan, sehingga kata “pertimbangan” pada Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Presiden.

345.08
MUH
p

PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI TINGKAT PENUNTUTAN (STUDI DI CABANG KEJAKSAAN NEGERI SOLOK DI ALAHAN PANJANG)

Muhammad Fadil, 1510111039, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Pelaksanaan diversi oleh penuntut umum, merupakan cara penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Bagi anak pelaku diversi bertujuan mewujudkan perdamaian pihak korban dengan anak pelaku guna penyelesaian kasus diluar proses peradilan dan upaya menjauhkan anak dari pemidanaan hilang kemerdekaan dan penjatuhan pemidanaan yang jauh dari kemanusiaan. Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah pelaksanaan diversi terhadap anak berhadapan dengan hukum di tingkat penuntutan pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang ? 2. Kendala dalam pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan pada Cabang Kejaksaaan Negeri Solok di Alahan Panjang ? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang telah dilaksanakan sesuai prosedur, tetapi ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Proses diversi diawali dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dilimpahkan oleh penyidik, jika berkas perkara memenuhi syarat diversi maka penuntut umum melakukan upaya diversi. Kendala yang dihadapi dalam pelasanaan diversi di tingakat penuntutan pada Cabang Kejaksaan Negeri Solok di Alahan Panjang belum tersedianya Ruang Khusus Anak, dan kurangnya pemahaman para pihak tentang pelaksanaan diversi. Upaya yang harus dilakukan yaitu diajukan pembuatan Ruang Khusus Anak sebagai tempat dilakukannya diversi, dan diadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai adanya pengaturan tentang diversi.

343.02
MUH
p

PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA PETERNAKAN AYAM PETELUR PADA WILAYAH PEMUKIMAN PENDUDUK DI KECAMATAN MUNGKA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Muhammad Iqbal, 1610113066, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 68 halaman

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Perizinan Usaha Peternakan Ayam Petelur Pada Wilayah Pemukiman PendudukDi Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Latar belakang dari skripsi ini adalah bagaimanakah Pelaksanaan Perizinan Peternakan Ayam Petelur pada wilayah yang bersinggungan dengan tempat-tempat pemukiman penduduk dan tempat umum lainnya di Kecamatan Mungka. Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pedoman Budidaya Ayam Pedaging dan Budidaya Ayam Petelur yang Baik telah mengatur bagaimana pendirian peternakan ayam petelur yang sehat dan aman salah satunya jarak peternakan ayam dan bangunan non peternakan yang minimal 25 meter dan dibatasi tembok 2 meter yang hanya memiliki satu jalur masuk. Di Kecamatan Mungka yang memang banyak lokasi peternakan ayam petelur pada kenyataannya banyak ditemukan kawasan peternakan yang berdekatan dengan rumah-rumah dan area umum. Bagaimanakah pelaksanaan Peternakan Ayam Petelur pada Pemukiman Penduduk Di Kecamatan Mungka dan Apa saja kendala dalam Perizinan Peternakan Ayam Petelur Di Kecamatan Mungka. Penelitian untuk tugas akhir ini menggunakan metode yuridis empiris, serta menggunakan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan fakta, Data yang digunakan terdiri atas data primer yaitu data yang didapatkan dari lapangan dan data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pelaksanaan Perizinan Usaha Peternakan Ayam Petelur di wilayah pemukiman di Kecamatan Mungka yang merupakan kewenangan dari Bupati Lima Puluh Kota yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan Peternakan Ayam Petelur di Kecamatan Mungka lebih banyak dilakukan dengan perizinan yang diurus belakangan sehingga sering ditemukan peternakan yang tidak sesuai pedoman Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 tahun 2014 tentang Pedoman Budidaya Ayam Pedaging dan Petelur yang Baik. Tetapi masyarakat tidak mengalamin kerugian dan terkena dampat yang signifikan oleh kegiatan peternakan ayam petelur pada wilayah pemukiman penduduk. 2) Kendala-kendala dalam Perizinan Peternakan Ayam Petelur di Kecamatan Mungka dilihat dari penerapan metode pengurusan secara OSS yang belum terlaksana dengan efektif karena masyarakat yang kurang memahami kerumitannya, selain itu permasalahan sistem juga terjadi. Tentunya perlu dilakukan pengembangan dan maintenance secara berkala untuk peningkatan sistem. Perizinan Peternakan Ayam Petelur merupakan hal yang tidak terlalu dipahami oleh masyarakat yang membuat masyarakat sering menghiraukan perizinan dalam beternak. Perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi baik secara langsung atau tidak langsung dalam hal perizinan peternakan ayam petelur terkhusus di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota.

346
MUH
p

PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN ALAHAN PANJANG KABUPATEN SOLOK KE BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN SEBAGAI JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT YANG MELEWATI KAWASAN HUTAN

Muhammad Iqbal, 1510112162, Fakultas Hukum, 2020, 70 halaman

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum, hukum sendiri mempunyai tujuan yaitu untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, serta kesejahteraan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Hal tersebut tidak terkecuali untuk kepentingan pembangunan. Walaupun sama-sama kita ketahui dikawasan hutan tersebut terdapat flora dan fauna yang juga membutuhkan ruang untuk hidup. Contohnya saja pembangunan yang menghubungkan Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dengan Alahan Panjang Kabupaten Solok yang melewati kawasan hutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembangunan yang ada dengan melihat peraturan perundang-undangan. Maka berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses pembangunan jalan Alahan Panjang menuju Pasar Baru Bayang sebagai jalan provinsi? 2) Bagaimana penyediaan tanah untuk pembangunan jalan Alahan Panjang menuju Pasar Baru Bayang sebagai jalan provinsi? 3) Upaya hukum apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi jalan sudah dalam tahap pengerjaan tapi tidak dengan perjanjian kerjasama kawasan hutannya? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil, yakni 1) Pembangunan Jalan Alahan Panjang menuju Bayang Utara secara teknis sudah sesuai dengan prosedur suatu pembangunan jalan yang ada, namun terdapat masalah dasar yang harus diselesaikan yaitu persoalan AMDAL yang harus segera diurus 2) Jalan yang menghubungkan antara Alahan Panjang Kabupaten Solok dengan Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan harus melalui Perjanjian Kerjasama untuk Hutan yang berstatus sebagai Hutan Konservasi, 3) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Dinas terkait sedang mengurus perjanjian kerjasama untuk kawasan Hutan Konservasi dan juga syarat lainnya agar dapat dilakukan pembangunan jalan Alahan Panjang Kabupaten Solok dengan Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan walaupun terjadi pertentangan aturan hukum.

Kata Kunci: Penyediaan Tanah, Kawasan Hutan, Pembangunan Jalan

346.01
MUH
k

KEDUDUKAN ITSBAT NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN PERMENDAGRI NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

Muhammad Nugraha Habibi, 1610113090, Fakultas Hukum,Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata, 74 halaman, 2020

ABSTRAK

Membuktikan bahwa seseorang telah menikah maka harus ada akta nikah atau akta perkawinan dengan cara mencatat di instansi yang berwenang. Pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak memiliki Akta Nikah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam perkawinan haruslah dicatatkan. Dengan demikian, solusi yang dapat diambil oleh sepasang suami istri yang menikah dibawah tangan adalah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Permohonan itsbat nikah untuk memperoleh akta nikah dalam kaitannya dengan pembuatan akta kelahiran anak banyak dijumpai di Negara Indonesia. Dalam praktik pencatatan kelahiran harus melalui beberapa prosedur yang telah di tetapkan dalam instansi. Dalam Pasal 3 ayat 1 huruf b Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Pembuatan Akta Kelahiran disebutkan bahwa, persyaratan pencatatan kelahiran anak harus melampirkan akta nikah. namun dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 4 ayat 2 Peraturan ini menyebutkan bahwasannya ketika ada seorang pasangan suami istri yang ingin membuatkan Akta Kelahiran anaknya tetapi tidak memiliki buku atau Akta Nikah maka dapat diganti dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri. Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimana kedudukan itsbat nikah setelah keluarnya Permendagri No 9 Tahun 2016, kedua bagaimana kedudukan perkawinan yang belum dicatatkan digunakan untuk membuat akta kelahiran. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui: Pertama, Kedudukan itsbat nikah setelah keluarnya Permendagri No. 9 Tahun 2016 secara de facto sebagai sumber hukum di Pengadilan Agama. Kedua, Kedudukan perkawinan yang belum dicatatkan dapat digunakan untuk membuat akta kelahiran dimana yang tercantum di dalam akta kelahiran tersebut hanya nama ibu.

Kata Kunci: Itsbat Nikah, Pencatatan Kelahiran

344.06
MUH
p

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK DENGAN HORMAT (STUDI KASUS PEMBERHENTIAN SYAFRI M., S.PT. BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 862/151/BKPSDM-2018)

Muhammad Qhadri, 1610112069, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VII) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 115 Halaman, 2020.

ABSTRAK

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat secara normatif diatur dalam Pasal 87 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Juncto Pasal 250 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Fokus penelitian ini studi terhadap kasus pemberhentian Syafri M., Spt. sebagai PNS oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/151/BKPSDM-2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS terhadap Syafri dari jabatan terakhirnya sebagai Fungsional Umum pada Inspektorat Kabupaten Tanah Datar yang diterbitkan tanggal 18 Mei 2018 yang berlaku surut sejak tanggal 30 Juni 2015. Namun karena kurang cermatnya Bupati Kabupaten Tanah Datar dalam menerbitkan keputusan, maka keputusan tersebut akhirnya dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang lewat Putusan PTUN Nomor 28/G/2018/PTUN.PDG pada tanggal 17 Desember 2018 dalam sidang terbuka untuk umum. Penelitian ini mengkaji pemberhentian PNS tersebut dengan mengacu pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan keputusan yaitu dari segi aspek kewenangan, prosedur dan substansi yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan rumusan masalah: Pertama, Bagaimana Pemberhentian PNS Tidak dengan Hormat. Kedua, Bagaimana konsekuensi hukum dari Pemberhentian PNS Tidak dengan Hormat. Untuk menjawab perihal tersebut penulis akan menggunakan metode yuridis normatif dengan 2 (dua) pendekatan yaitu: statute approach (pendekatan undang-undang) dan case approach (pendekatan kasus). Setelah melakukan penelitian mendalam, Surat Keputusan Pemberhentian PNS terhadap Syafri oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar diterbitkan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karena itu, penulis berpendapat diperlukan bagi pejabat yang berwenang untuk cermat dan hati-hati dalam menerbitkan keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Kata Kunci: Pemberhentian PNS, Tidak dengan Hormat

346.01
MUH
k

KEDUDUKAN ITSBAT NIKAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN PERMENDAGRI NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

Muhammad Nugraha Habibi, 1610113090, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata, 74 halaman, 2020

ABSTRAK

Membuktikan bahwa seseorang telah menikah maka harus ada akta nikah atau akta perkawinan dengan cara mencatat di instansi yang berwenang. Pada kenyataannya masih banyak orang yang tidak memiliki Akta Nikah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam perkawinan haruslah dicatatkan. Dengan demikian, solusi yang dapat diambil oleh sepasang suami istri yang menikah dibawah tangan adalah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Permohonan itsbat nikah untuk memperoleh akta nikah dalam kaitannya dengan pembuatan akta kelahiran anak banyak dijumpai di Negara Indonesia. Dalam praktik pencatatan kelahiran harus melalui beberapa prosedur yang telah di tetapkan dalam instansi. Dalam Pasal 3 ayat 1 huruf b Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Pembuatan Akta Kelahiran disebutkan bahwa, persyaratan pencatatan kelahiran anak harus melampirkan akta nikah. namun dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 4 ayat 2 Peraturan ini menyebutkan bahwasannya ketika ada seorang pasangan suami istri yang ingin membuatkan Akta Kelahiran anaknya tetapi tidak memiliki buku atau Akta Nikah maka dapat diganti dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri. Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimana kedudukan itsbat nikah setelah keluarnya Permendagri No 9 Tahun 2016, kedua bagaimana kedudukan perkawinan yang belum dicatatkan digunakan untuk membuat akta kelahiran. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui: Pertama, Kedudukan itsbat nikah setelah keluarnya Permendagri No. 9 Tahun 2016 secara de facto sebagai sumber hukum di Pengadilan Agama. Kedua, Kedudukan perkawinan yang belum dicatatkan dapat digunakan untuk membuat akta kelahiran dimana yang tercantum di dalam akta kelahiran tersebut hanya nama ibu.

Kata Kunci: Itsbat Nikah, Pencatatan Kelahiran

342.07
MUH
p

PENGATURAN HUKUM NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERKAIT HAK PILIH DAN HAK POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM

Muhammad Fachri Al-Masni, 1610112051, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 69 halaman, 2020

ABSTRAK

Pengaturan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait hak pilih dan hak politik dalam pemilihan umum telah diatur sejak awal kemerdekaan Indonesia. Berbagai macam aturan muncul guna membatasi hak pilih dan hak politik ASN, TNI, dan Polri. Namun penyalahgunaan wewenang oleh penguasa terhadap hak pilih dan hak politik ASN, TNI, dan Polri banyak terjadi dimulai pada masa Orde Lama ASN menjadi terpecah belah akibat kebijakan politik saat itu, serta dijadikannya TNI dan Polri sebagai kekuatan sosial dan politik pada zaman Orde Baru, dan pada era Reformasi ASN sering dijadikan alat untuk memenangkan pasangan calon pertahana dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah pertama bagaimana pengaturan hukum netralitas ASN, TNI, dan Polri terkait hak pilih dan hak politik dalam pemilihan umum, dan yang kedua adalah apa urgensi pengaturan hukum netralitas ASN, TNI, dan Polri terkait hak pilih dan hak politik dalam pemilihan umum. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, dan data yang digunakan adalah data sekunder, serta pengumpulan data berupa studi dokumen (kepustakaan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum netralitas ASN, TNI, dan Polri terkait hak pilih dan hak politik dalam pemilihan umum, dan mengetahui urgensi pengaturan hukum netralitas ASN, TNI, dan Polri terkait hak pilih dan hak politik dalam pemilihan umum. Hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa sejak awal kemerdekaan pengaturan pembatasan hak pilih dan hak politik ASN, TNI, dan Polri dibatasi karena ASN, TNI, dan Polri sering dijadikan kepentingan oleh penguasa. Pengaturan n hak pilih dan hak politik ASN, TNI, dan Polri sangatlah penting karena peran dari ASN, TNI, dan Polri sangat strategis dalam pembangunan, pertahanan keamanan, dan ketertiban. Pengaturan hak pilih dan hak politik ini juga menandai bahwa ASN, TNI, dan Polri wajib mengundurkan diri jika ikut mencalonkan diri dalam pemilihan umum.

Kata Kunci : Pengaturan Hak Pilih, Hak Politik, ASN, TNI, dan Polri

342.07
MUH
p

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA KOTA PADANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Muhammad Farhan Alqadri, Nomor Buku Pokok: 1610113084, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 Halaman, 2020

ABSTRAK

Dalam proses Pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur adanya peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik itu Provinsi ataupun Kota sangat penting. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, mandiri dan bebas dari pengaruh mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Serta pemilih pemula dalam mensukseskannya menjadi sangat penting. Lancar dan suksesnya pemilu dapat dilihat dari bagaimana partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya. Pada penulisan ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas, pertama bagaimana peran KPU Kota Padang meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kota Padang? kedua apa saja yang menjadi hambatan KPU Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kota Padang? Dalam penelitian ini ini penulis menggunakan metode pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen, populasi dan sampel serta wawancara dengan komisioner KPU Kota Padang divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Dari hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Padang telah melakukan perannya kepada pemilih pemula yang ada di Kota Padang dengan cara sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung kepada pemilih pemula dengan mitra kerjasama tetapi ditemukan tidak meratanya. Hambatan dari KPU Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula tersebut diantaranya kesibukan sehari-hari, perasaan tidak mampu, minder, dan keterbatasan dana dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada pemilih pemula. Dan kemungkinan terjadi di tengah pandemi covid-19 ini seperti dari partisipasi masyarakat turun sampai kepada kemungkinan terjadinya malpraktik.

343.09
MUH
p

PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN OLEH SATUAN TUGAS LAYANAN SERTIFIKASI HALAL (SATGAS LSH) TERHADAP MAKANAN CEPAT SAJI YANG DIPRODUKSI USAHA MIKRO DI KOTA PADANG

Muhammad Fawwaz Rizqy, 1610113074, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 43 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Islam mewajibkan umatnya untuk memperoleh makanan yang halal dan thayyib. Salah satu makanan yang menjamur di Indonesia saat ini adalah makanan cepat saji produksi usaha mikro. Hal tersebut menimbulkan persoalan mengenai kehalalannya. Dalam memberikan perlindungan, rasa tenang dan aman bagi masyarakat muslim dalam mengkonsumsi produk makanan tersebut serta menjalankan amanat Pasal 29 UUD 1945 pemerintah telah menerbitkan Undang- Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) yang mewajibkan seluruh produk yang beredar dan masuk ke Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Jaminan produk halal ini diselenggarakan oleh menteri agama dengan membentuk Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan JPH di daerah maka dibentuklah Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas LSH) sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/33453 Tahun 2019 tentang Penetapan Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Daerah. UUJPH telah berlaku efektif 17 Oktober 2019 diseluruh Indonesia tidak terkecuali di Kota Padang. Banyaknya produk makanan cepat saji produksi usaha mikro di Kota Padang berpotensi menimbulkan persoalan mulai dari proses pendaftaran hingga pengawasan. Berdasarkan hal diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : pertama, prosedur pendaftaran dan bentuk pengawasan yang ditetapkan dan dilakukan Satgas LSH terhadap makanan cepat saji produksi usaha mikro di Kota Padang; kedua, kendala yang dihadapi oleh Satgas LSH dalam melaksanakan pendafatran dan pengawasan tersebut; ketiga, upaya yang dilakukan Satgas LSH dalam mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan : pertama, prosedur pendaftaran yang ditetapkan Satgas LSH tidak efektif dan membingungkan serta memakan waktu yang lama kemudian pengawasan yang dilakukan belum sampai pada tahap pelaksanaan melainkan tahap perencanaan yakni pemetaan data; kedua, secara garis besar ada 7 kendala yang dihadapi oleh Satgas LSH diantaranya kesadaran pelaku usaha dan konsumen yang sangat minim terhadap pentingnya JPH, biaya pendaftaran relatif mahal, masih banyak usaha yang belum memiliki izin, dan lain-lain; ketiga, upaya yang dilakukan berupa memberikan konsultasi, konsolidasi, koordinasi, pembinaan dan sosialisasi terhadap instansi berkaitan, pelaku usaha dan masyarakat umum.

Kata Kunci : Pendaftaran dan pengawasan, Satgas LSH , Makanan Cepat Saji, Usaha Mikro

344.03
MUH
p

PENERAPAN APLIKASI PAGA NAGARI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KEPOLISIAN RESOR SOLOK KOTA

Muhammad Zakky Fauzan, 1610112048, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VII (Hukum Administrasi Negara, 59 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Kemajuan teknologi pada zaman sekarang memunculkan terobosan baru oleh banyak instansi terutama instansi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik dan penegakan hukum, salah satunya kepolisian, disalah satu Polres di Sumatera Barat khususnya Polres Solok Kota, dalam memanfaatkan teknologi informasi Polres Solok Kota memunculkan inovasi baru yakni dengan membuat aplikasi pelayanan yang dinamai sendiri oleh Polres Solok kota dengan nama paga nagari adapun tujuan dari aplikasi ini adalah pelayanan administratif secara online. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi aplikasi paga nagari. Kedua, apa saja yang menjadi kendala dalam pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi paga nagari. Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah yuridis-empiris (sosiologis). Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut, pertama, penerapan aplikasi paga nagari pada prinsipnya telah memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pihak Polres Solok Kota. Namun jika dibandingkan dengan asas-asas pelayanan publik yang terdapat dalam Pasal 4 UU No 25 Tahun 2009, maka maka ditemukan tidak seluruh asas yg terpenuhi dalam penerapan aplikasi paga nagari. Asas-asas yang terpenuhi yaitu: Asas kepentingan umum, Asas Kepastian Hukum, Asas kesamaan hak, Asas keseimbangan hak dan kewajiban, Asas keprofesionalan, Asas partisipatif, Asas persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, Asas keterbukaan, Asas akuntabilitas, Asas ketepatan waktu dan Asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Sedangkan asas yang tidak terpenuhi yaitu: Asas Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok Rentan. Kedua, Ditinjau dari segi regulasi dan penerapan aplikasi paga nagari tidak terdapat kendala yuridis hanya ada kendala non yuridis, yaitu mengenai proses sosisalisasi mengenai penerapan aplikasi paga nagari ini juga belum maskimal.

Kata Kunci: Aplikasi Paga Nagari, Pelayanan Publik.

348.3
MUH
p

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI

Muhammed Aulia Falen, 1510111071, Fakultas Hukum, 2020, Halaman

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dan yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari , namun fakta di lapangan masyarakat tidak mengetahui dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 2018. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat. Bentuk Partisipasi Ada dua, partisipasi langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Pelaksanaan Partisipasi ada dua, secara langsung berupa datang langsung ke DPRD atau melalui tulisan, secara tidak langsung melalui lembaga seperti LKAAM dan lembaga lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah pertama bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Daerah Provinsi Sumatera Barat, kedua pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, sedangkan data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari wawancarra salah satu Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sumatera Barat dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa adalah partisipasi masyrakat telah berjalan sesuai aturan namun kurangnya Pemerintah menginformasikan kepada masyarakat dan tidak berjalannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Saran dari saya untuk Anggota KAN lebih menginformasikan kepada masyarakat.

346.02
MUT
t

TANGGUNG JAWAB KONSUMEN DALAM HAL TERJADINYA LEWAT WAKTU (OVERTIME) DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI ADR GROUP TOURS & TRAVEL BATUSANGKAR

Muthia Al Khansa, 1610112054, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020

ABSTRAK

Kehidupan sehari-hari manusia tidak akan lepas dari yang namanya perjanjian, sama halnya dengan perjanjian sewa menyewa yang dilakukan antara ADR Group Tours & Travel Batusangkar dengan konsumen. Bentuk perjanjian sewa menyewa yang terjadi adalah perjanjian sewa menyewa lepas kunci atau tanpa supir. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak jarang terjadi ketidak sesuaian, salah satunya yaitu lewatnya waktu dalam pengembalian mobil sewaan oleh konsumen atau biasa disebut overtime. Overtime merupakan salah satu wanprestasi dimana wanprestasi adalah lalai atau tidak terpenuhinya prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan yang diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana menurut pasal tersebut Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinayatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang 1) Proses terjadinya perjanjian anatra ADR Group Tours & Travel Batusangkar dengan konsumen 2) Tanggung jawab konsumen dalam hal terjadinya lewat waktu atau overtime 3) Upaya dari ADR Group Tours & Travel Batusangkar apabila konsumen tidak memenuhi tanggung jawabnya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, diperoleh hasil sebagai berikut 1) Proses terjadinya perjanjian antara ADR Group Tours & Travel Batusangkar dengan konsumen adalah perjanjian sewa menyewa kedalam sebuah buku dan penyewa menyerahkan KTP atau KK sebagai jaminan, pada saat pengembalian mobil sewaan, pihak ADR akan menyerahkan kwitansi sebagai bukti pembayaan kepada konsumen. 2) Tanggung jawab konsumen dalam terjadinya lewat atau overtime adalah dengan pembayaran ganti rugi sebesar Rp 50.000,- atau lebih untuk pengembalian mobil dengan jangka waktu lebih dari satu hari 3) Upaya lain dari ADR Group Tours & Travel Batusangkar apabila konsumen tidak mau melakukan tanggung jawabnya adalah melakukan negosiasi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar sebaiknya perjanjian sewa menyewa tersebut dibuat secara tertulis supaya adanya kejelasan dan kekuataan hukumnya lebih kuat dan juga perlu adanya iktikad baik dari konsumen dalam pembayaran ganti rugi terhadap overtime tersebut.

Kata kunci: Perjanjian, Sewa Menyewa, Wanprestasi

343.09
MAD
p

PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA SEKTOR PARIWISATA DANAU KERINCI SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Madeleine Yeza Titania, 1610111095, Hukum Administarai Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 73 halaman

ABSTRAK

Ketentuan dasar yang mengatur tentang keuangan negara yaitu Pasal 23 A Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah setiap daerah memiliki hak dan kewajiban, salah satunya yaitu memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 95 dan Pasal 156 UU PDRD ditegaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam pelaksanaannya pemungutan retribusi pada sektor pariwisata Danau Kerinci yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas dan pihak pengelola. Namun dalam pelaksanaanya ada oknum yang memungut tarif retribusi melabihi apa yang telah diatur dalam Perda. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 1) Bagaimana Pemungutan Retribusi Daerah Pada Sektor Pariwisata Danau Kerinci sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah? 2) Apa kendala yang dihadapi dalam Pemungutan Retribusi Daerah Pada Sektor Pariwisata Danau Kerinci sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif analistis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yaitu 1) pemungutan retribusi pada sektor pariwisata Danau Kerinci sebagai sumber pendapatan asli daerah secara umum telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha namun. 2) adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci adalah terdapat oknum petugas ataupun pihak pengelola yang tidak bertanggungjawab memungut tarif retribusi melebihi apa yang telah diatur dalam Perda dan tidak menggunakan karcis resmi yang telah dicetak oleh BPKPD.

342
NAB
k

KAJIAN HUKUM DAN DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XVII/2019 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Nabila Rahma Johar, 1610112072, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 106 halaman, Tahun 2020.

ABSTRAK

Pemilihan Umum dianggap sebagai realisasi dari jaminan kedaulatan yang berada ditangan rakyat. Pada pemilihan umum tahun 2019 aturan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan umum adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini terdiri dari 573 pasal, diantara pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 383 ayat (2) dan Pasal 350 ayat (2) diajukan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap menghambat, menghalangi, dan mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dan menciptakan Pemilu yang sah. Hak pilih yang direalisasikan adalah guna memilih orang-orang yang dipercaya untuk duduk di lembaga-lembaga kekuasaan negara. Hal ini akan berujung pada kepercayaan publik kepada pemerintah dalam menjalankan roda kekuasaan pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama berbangsa dan bernegara. Jadi, hak pilih merupakan hak penting yang harus dijaga dimana jaminan atas hak ini dipertanyakan dalam perkara pengajuan pengujian undang-undang pemilihan umum. Dalam amar putusannya , Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan tiga permohonan dari pemohon. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji apakah dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian dari permohonan tersebut sudah melindungi hak pilih. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah pertama teori apa yang dijadikan dasar oleh pemohon dalam mengajukan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi, kedua bagaimana dasar pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dan ketiga bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari wawancara salah satu ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dasar-dasar yang digunakan pemohonan adalah mengenai teori hak pilih, dan pertimbangan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dilakukan berdasarkan beberapa teori interpretasi hukum dan konstitusi diantaranya interpretasi gramatikal,interpretasi teologis- sosiologis, interpretasi sistematika, dan penafsiran tekstual, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 ini menimbulkan beberapa dampak baik itu positif maupun negatif diantaranya dampak positif ialah memberikan kemudahan bagi warga negara dalam menggunakan hak pilihnya, dampak negatif ialah memungkinkan ditimbulkannya peluang-peluang bagi oknum tertentu untuk melakukan kecurangan-kecurangan yang dapat melanggar hukum.

346.02
NAD
p

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA BARISTA DENGAN PEMILIK COFFEE SHOP KOPI PAGI DI KOTA PADANG

Nadiratul Magfira, 1610113089, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Secara normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 27 ayat 2). Pengertian perjanjian kerja menurut Pasal 1601 a KUHPerdata adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu (si buruh), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Syarat sah suatu perjanjian kerja yaitu adanya kesepakatan dari para pihak. Hal ini berarti bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak. Dalam hal ini perjanjian kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalani. Perjanjian kerja dalam pelaksanaannya dapat dibuat dalam bentuk lisan dan secara tertulis. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yang timbul yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja antara barista dengan pemilik coffee shop kopi pagi di kota Padang; 2) Apa saja kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara barista dengan pemilik coffee shop kopi pagi di kota Padang; 3) Bagaimana cara mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian perjanjian kerja antara barista dengan pemilik coffee shop kopi pagi di kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dari data primer dan sekunder yang di kumpulkan penulis analisa dengan mempergunakan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil: 1) bahwa pelaksanaan perjanjian kerja antara barista dengan pemilik coffe shop kopi pagi menggunakan perjanjian kerja secara lisan dan perjanjian kerja secara tertulis. 2) Bentuk- bentuk kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja yaitu berasal dari faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar yaitu kondisi cuaca dan pandemic covid-19. Faktor kendala dari dalam berkaitan dengan kinerja dari pekerja, yaitu kurangnya kedisiplinan beberapa pekerja, kurangnya attitude,dan kurang maksimal dalam bekerja dan kurang pahamnya pemilik coffee shop mengenai perjanjian kerja. 3).Penyelesaian dari kendala yang ditemukan yaitu dengan cara dibicarakan secara baik-baik oleh para pihak atau dilakukan musyawarah dengan pekerja. Cara untuk mengurangi terjadinya kendala dalam pelaksanaan perjanjian yaitu dengan dilakukan evaluasi bulanan terhadap kinerja pekerja.

Kata Kunci : Perjanjian, Pekerja, Coffee Shop

343.04
NAD
p

PEMBIAYAAN DANA PENSIUN BERDASARKAN PRINSIP GOOD ISLAMIC PENSION FUND GOVERNANCE PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BELAKANG OLO PADANG

Nadya Harada, 1510111067, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 67 halaman, 2020

ABSTRAK

Dana pensiun syariah mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 2017, dengan telah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33 Tahun 2016 yang menjadi sumber pendanaan strategis bagi perekonomian nasional. Sampai saat ini dana pensiun syariah berkembang pada dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah. Lembaga keuangan syariah telah berkembang ke dunia Internasional, namun untuk memperkuat institut keuangan syariah dibutuhkan tindakan yang paling mendasar, yaitu menerapkan prinsip Good Islamic Pension Fund Governance (tata kelola dana pensiun syariah yang baik). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah dengan melihat fakta yang terjadi di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Belakang Olo Padang kemudian dengan peraturan perundang- undangan untuk menganalisisnya menjadi penelitian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pembiayaan dana pensiun berdasarkan prinsip Good Islamic Pension Fund Governance pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Belakang Olo Padang dan apa kendala yang dihadapi dalam pembiayaan dana pensiun berdasarkan prinsip Good Islamic Pension Fund Governance pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Belakang Olo Padang serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Prosedur pembiayaan dana pensiun dilakukan dengan cara yang sederhana, agar nasabah tidak mengalami kebingungan karena mayoritas nasabah pembiayaan pensiun adalah lansia. Adapun hasil penelitian diketahui bahwa PT Bank Syariah Mandiri Padang sudah menerapkan prinsip Good Islamic Pension Fund Governance dalam pembiayaan dana pensiun serta sesuai dengan akad yang tidak menyimpang dari Al-Qur'an dan Hadist.

345.08
NAL
p

PENEGAKAN HUKUM OLEH SATUAN POLISI LALU LINTAS POLRES SOLOK KOTA TERHADAP ANAK PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA KORBAN

Naldo Al Nasrul, 1510111054, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 86 halaman, 2020

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaanya, baik yang dapat maupun yang tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Permasalahan lalu lintas saat ini adalah pelanggran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur yang menyebabkan kematian. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah Penegakan hukum oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Solok Kota terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang oleh anak? 2. Apakah Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Solok Kota dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang oleh anak? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara . Dari hasil penelitian, Penegakan hukum oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Solok Kota terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang oleh anak, yaitu "pengupayaan penyelesaian kasus berdasarkan prinsip-prinsip dari ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dengan cara pengupayaan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Solok Kota dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang oleh anak, yaitu "sulitnya mencapai kesepakatan dari pihak keluarga korban yang meninggal dunia, menimbang bahwa pada dasarnya nyawa manusia yang meninggal tidak dapat dikembalikan.

Kata Kunci : Satuan Polisi Lalu Lintas, Anak, Pelanggaran Lalu Lintas

343.02
NAS
p

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) PADANG NOMOR 2/P/FP/2017/PTUN.PDG TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Nastasia Adinda Putri, 1510112087, Fakultas Hukum, 2020, 83 halaman

ABSTRAK

Untuk dapat melakukan kegiatan dibidang pertambangan, pemerintah berwenang memberikan Kuasa Pertambangan yang mana setelah UU No. 4 tahun 2009 keluar, kuasa pertambangan kini berupa Izin Usaha Pertambangan. Menurut Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwasanya setiap IUP harus berstatus/bersertifikasi Clear and Clean (CNC) agar usaha pertambangan tersebut dapat dilaksanakan. Di Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 26 (dua puluh enam) pemegang IUP Non-CNC dimohonkan untuk dicabut Izin Usaha Pertambangannya. Berdasarkan putusan PTUN nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG, permohonan pemohon diterima, serta mewajibkan Termohon untuk menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha pertambangan Non Clear and Clean yang masih aktif dan habis masa berlakunya terhadap 26 (dua puluh enam) Izin Usaha Pertambangan. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak keseluruhan IUP yang putuskan untuk dicabut, dieksekusi oleh Termohon. Dengan demikian, rumusan masalah yang timbul yakni bagaimanakah pelaksanaan putusan PTUN Padang nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG tentang pencabutan izin usaha pertambangan serta apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan PTUN Padang nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG tentang pencabutan izin usaha pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang mengenai pencabutan Izin Usaha Pertambangan dan mengetahui kendala apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan pegawai/ pimpinan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengetahui dan memahami permasalahan yang akan penulis tulis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, pelaksanaan putusan tidak bisa dilakukan secara sempurna jika dilihat dari amar putusan. Dimana yang menjadi faktor kendala putusan tersebut tidak dapat dilakukan secara sempurna adalah disebabkan dari dua faktor, yang pertama faktor internal, yakni berasal dari putusan itu sendiri dan berasal dari pemahaman pegawai Dinas ESDM mengenai konsen Clear and Clean itu sendiri. Dan yang kedua yakni faktor eksternal, yakni dimana kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kata Kunci : Pelaksanaan Putusan PTUN, Pencabutan IUP, IUP NON-CNC

341
NAU
p

PENGATURAN CRYPTO ASSET DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN PRAKTIK DI BEBERAPA NEGARA

Naufal Furqon, 1410111119, Program Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas

ABSTRACT

Crypto asset merupakan manifesta dari perkembangan teknologi dalam perdagangan internasional. Pada awalnya crypto asset dianggap sebagai ancaman dikarenakan program crypto aset adalah destralisasi yang berarti tidak dikuasai oleh siapapun termasuk negara. Namun seiring berjalannya waktu pertumbuhan crypto asset terus meningkat dan memberikan dampak positif menjadikan crypto asset mulai diterima dibeberapa negara sebagai aset digital maupun mata uang virtual. Dalam hal ini diperlukan aturan secara internasional untuk crypto asset yang mana ruang lingkup dari crypto asset adalah jaringan internet yang terkoneksi keseluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan : (1) Pengaturan terhadap crypto asset dalam perdagangan internasional ditinjau dari hukum internasional dan praktik dibeberapa negara; (2) Penggunaan crypto asset dalam perdagangan internasional ditinnjau dari hukum internasional dan hukum nasional; (3) Kendala-kendala dalam pengaturan crypto asset sebagai aset atau komoditas di Indonesia. Metode penulisan hukum yang penulis gunakan bersifat normatif, dimana penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa : (1) Pengaturan crypto asset dalam perdagangan internasional masih dipegang penuh oleh negara yang melegalkan (National Law). Setiap negara yang telah membuat aturan hukum terhadap crypto asset memiliki panduan pembuatan regulasi yang di terima dari organisasi internasional yang telah berfokus terhadap crypto asset. Belum ada ketentuan secara tegas pengaturan crypto asset yang bersifat universal seperti konvensi dan pada praktik negara yang telah membuat regulasi seperti Australia, Canada, Jepang dan Indonesia masih pada tahapan awal yang diharapkan dikemudian hari menjadi bentuk kesepakatan penuh terhadap pengaturan crypto asset yang selaras. (2) Penggunaan crypto asset dalam perdagangan internasional pada prakteknya bergantung pada penggunanya, dimana beberapa crypto asset layak dijadikan aset digital untuk jangka pendek maupun panjang karena nilainya yang begitu tinggi dan tidak dianggap alat pembayaran yang sah dalam transaksi di negara manapun namun dapat terlaksana apabila pihak dalam suatu transaksi memiliki kesepakan (Lex Mercatoria) menggunakan crypto asset sebagai alat tukar dan menerima segala resiko secara bersama (3) Kendala-kendala dalam pengaturan crypto asset sebagai aset atau komoditas di Indonesia adalah masih minimnya regulalsi dan kebijakan terhadap crypto asset masih dibutuhkan regulasi tambahan agar memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat bagi pengguna crypto asset.

Kata Kunci : Pengaturan, Crypto Asset, Perdagangan dan Hukum Internasional

345
NIC
u

Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Pengguna Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi)

NICO FRANSISCA. 1610112035. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV (Hukum Pidana). 104 Halaman. Tahun 2020

ABSTRAK

Narapidana pengguna narkotika merupakan narapidana yang harus diberikan pembinaan khusus agar dapat terbebas dari ketergantungan narkotika. Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjamin bahwa setiap narapidana pengguna narkotika wajib untuk diberikan rehabilitasi. Namum di Indonesia umumnya narapidana pengguna narkotika justru dimasukkan ke dalam lembaga Pemasyarakatan yang berisikan narapidana campuran yang dibina dalam satu lembaga pemasyarakatan. Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah program pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bukittinggi dalam pembinaan narapidana pengguna narkotika? Apa saja kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam pembinaan narapidana pengguna narkotika? Bagaimanakah solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam pembinaan narapidana pengguna narkotika?. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa program pembinaan narapidana pengguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi berupa: 1. Pembinaan tahap awal, seperti: 1) pembinaan kemandirian yang terdiri dari keterampilan dan pelatihan, 2) Pembinaan kepribadian terdiri dari pembinaan jasmani dan pembinaan rohani. 2. tahap lanjutan, 3. Tahap akhir. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam pembinaan narapidana pengguna narkotika yaitu kurangnya kemauan narapidana untuk mengikuti program pembinaan, kurangnya kualitas dan kuantitas petugas lembaga pemasyarakatan, kurangnya sarana dan prasarana pembinaan, dana atau anggaran yang terbatas, kelebihan muatan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam pembinaan narapidana pengguna narkotika yaitu: adanya kerjasama antar empat komponen yaitu narapidana, keluarga, masyarakat, dan petugas lembaga pemasyarakatan, melakukan kerjasama antara pengusaha dengan lembaga pemasyarakatan, meningkatkan sarana dan prasarana, melakukan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun non-pemerintah, melakukan pembenahan dan pengawasan birokrasi yang lebih baik lagi dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai fungsi lembaga pemasyarakatan.

345
NIK
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Polresta Padang)

Niko Anwar, 1510111187, Fakultas Hukum, 2020, 57 halaman

ABSTRAK

Banyak kasus tindak pidana yang ditemukan di dalam masyarakat dimana anak sebagai pelaku maupun korban tindak pidana. Kondisi yang demikian sangat memprihatinkan, sehingga perlu segera ditanggulangi oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Belum lagi di era modren saat ini, dimana kemajuan elektronik dan pergaulan lingkungan yang kadang bisa menjerumuskan anak menjadi seseorang yang berprilaku negatif, dari segi itu nantinya akan muncul tindak-tindak kejahatan yang mengakibatkan atau melibatkan anak-anak sebagai pelaku ataupun sebagai korban tindak kejahatan, salah satunya yaitu kejahatan seksual yang sedang marak sekali terjadi pada saat ini. Salah satu kasus yang terjadi di Kota Padang yang berkaitan dengan pencabulan dengan Anak Korban dibawah umur terjadi pada tanggal agustus 2018 sekitar pukul 20.00 wib di daerah limau manih, dimana tersangka yang berinisial AD (14) melakukan tindak pidana pencabulan terhadap DM (15) Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan yang menjadi permasalahan adalah 1) bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polresta Kota Padang 2) apa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak 3) apa upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi kendala penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian secara yuridis sosiologis dengan melakukan pendekatan yuridis sosiologis yang didukung secara empiris. Untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara langsung ke Kepolisian Resor Kota Padang, untuk mendapatkan data sekunder penulis menggunakan studi kepustakaan, peraturan perundang- undangan dan dokumen hasil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan tersangka dan korban dibawah umur serta korban juga penyandang tunagrahita telah dilaksanakan dengan peraturan yang berlaku serta telah berkoordinasi dengan pihak terkait, kendala yang dihadapi selama masa penyidikan adalah komunikasi, penggunaan bahasa sehari-hari, anak penyandang tunagrahita tidak dapat memberikan keterangan secara optimal dan tidak adanya tenaga ahli di Kepolisian Resor Kota Padang, kendaltersebut diatasi dengan bekerjasama dengan psikolog.

345
NOF
p

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll A Muaro Padang)

NOFRIZAL, 1510112044, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Halaman, 2019

ABSTRAK

Narapidana adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat, oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel tersebut terlebih lagi seorang narapidana yang hidupnya terisolasi dari masyarakat umum. Tindak pidana yang kerapkali menimpa narapidana di dalam penjara adalah tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan di dalamnya, baik yang dilakukan oleh sesama Narapidana, maupun uleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia seringkali mendapat kritikan tajam, karena dianggap tidak berhasil dalam menyelenggarakan pembinaan pada Narapidana dikarenakan masih banyak Narapidana yang melakukan kekerasan di dalam sel mengintimidasi sesama tahanan hal ini jelas menambah beban hukuman terhadap Narapidana itu sendiri. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah : 1) Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap Narapidana yang melakukan penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, 2) Apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap narapidana yang melakukan penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan? dan 3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam meminimalisir penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melihat norma-norma hukum yang berkaitan dengan penelitian lalu kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi ditempat penulis melakukan penelitian. Sebagai hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa:(1) Penegakan hukum bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan adalah dengan tiga tahap yakni Tahap Formulasi, Tahap Aplikasi Dan Tahap Eksekusi. (2) Faktor penghambat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan disebabkan oleh faktor penegak hukumnya sendiri. (3) Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam meminimalisir penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll A Muaro Padang yaitu dengan mengarahkan warga binaan dengan aktifitas pembinaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

346.06
NOL
p

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN PADA POLRES SOLOK AROSUKA

Nola Vanya Mouzard, 1610111063, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VII) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 Halaman, 2020

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan organisasi penegak hukum yang mempunyai tugas pokok yaitu melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Dengan tugas tersebut Polri mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut yang diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan wewenang dan tugas tersebut Polri berupaya menjadikan organisasi Polri adalah sebagai organisasi yang baik dan bersih seperti yang dicita-citakan. Untuk menunjang terwujudnya cita-cita tersebut, Polri sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang banyak di setiap daerahnya. Tetapi dengan wewenang dan tingkat kesadaran anggota kepolisian akan hukum yang rendah serta tidak sadarnya mereka sebagai panutan dan mitra dalam masyarakat menyebabkan banyaknya anggota kepolisian melakukan pelanggaran disiplin dalam setiap tugas yang diberikan sebagai anggota kepolisian. Oleh karena itu, masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah, (1) Bagaimana penerapan sanksi kedisiplinan terhadap anggota Kepolisian Polres Solok Arosuka, (2) Apa hambatan dalam menerapkan sanksi kedisiplinan anggota Kepolisian Polres Solok Arosuka. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder, dan menganalisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan pelanggaran disiplin anggota Polri Polres Solok Arosuka masih kurang dari harapan yang disebabkan faktor hukum, penegak hukum, masyarakat, dan faktor lingkungan. Hambatan yang ditemukan dalam penegakan pelanggaran anggota Polri Polres Solok Arosuka adalah tumpang tindihnya aturan, kurangnya kesadaran anggota Polri, faktor lingkungan, serta kurangnya kepedulian masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Kata Kunci : Polri, Pelanggaran, Disiplin

347.05
NOV
t

TANGGUNG JAWAB PEGADAIAN ATAS RUSAK DAN HILANGNYA BARANG GADAI DI PT PEGADAIAN (PERSERO) AREA PADANG

Novan Dervandy, 1510111008, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK II (Hukum Perdata Bisnis), 82 halaman, 2020

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi nasional saat ini sangat berkembang pesat. Hal ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak yakni masyarakat, swasta dan negara. Salah satu badan usaha milik negara yang mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yaitu PT Pegadaian. PT Pegadaian merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dengan melakukan jasa pemberian pinjaman uang/kredit kepada masyarakat dengan cara sistem gadai. Barang gadai selama dalam jangka waktu berlangsungnya perjanjian gadai terdapat berbagai risiko yang dapat terjadi. Risiko dapat diakibatkan oleh persitiwa atau kejadian seperti adanya barang jaminan yang rusak atau barang hilang. Permasalahan yang ditimbulkan dengan adanya peristiwa atau kejadian tersebut adalah bagaimana tanggung jawab dari pihak pegadaian terhadap barang gadai atau jaminan yang rusak atau hilang dan nasabah yang mengalami kerugian tersebut ingin mendapatkan pertanggungjawaban dari pegadaian dengan menuntut pihak pegadaian untuk mengganti kerugian yang dialaminya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata. Metode penulisan yang digunakan penulis adalah metode yuridis empiris, yaitu mengkaji teori-teori atau aturan-aturan hukum pegadaian terhadap pelaksanaan tanggung jawab atas rusak dan hilangnya barang gadai dengan penerapan hukum yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana tanggung jawab pegadaian atas hilang dan rusaknya barang gadai d PT Pegadaian (Persero) Area Padang dan upaya penyelesaian masalah pemberian ganti kerugian atas hilangnya barang gadai di PT Pegadaian (Persero) Area Padang. Hasil Penilitian ini menyimpulkan bahwa dalam hal terjadinya hilang atau rusaknya barang gadai selama barang gadai masih dalam perjanjian gadai di PT Pegadaian area Padang, maka pihak pegadaian bertanggung jawab penuh kepada nasabahnya, pertanggungjawabannya dengan cara ganti rugi yang disepakati oleh masing-masing pihak dan terhadap upaya penyelesaian ganti rugi dapat melalui musyawarah mufakat dan apabila tidak ditemukan kesepakatan maka para pihak dapat melalui pengadilan. Berdasarkan penelitian ini, diperlukan adanya prosedur dan aturan hukum yang jelas dan menyeluruh untuk pertanggungjawaban rusak dan hilangnya barang gadai di PT Pegadaian (Perseo) Area Padang sesuai aturan hukum pegadaian, sehingga penyelesaian masalah ganti rugi tidak menimbulkan kerugian bagi nasabah.

342.07
NUR
h

HAK POLITIK APARATUR SIPIL NEGARA DALAM HAL PENCALONAN SEBAGAI GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Nurazizah, 1610111136, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2020, 51 halaman

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul " Hak Politik Aparatur Sipil Negara dalam hal Pencalonan sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu: pertama, Bagaimana Hak Politik Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kedua, Hak Politik Aparatur Sipil Negara dalam hal Pencalonan sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya Pasal 119 dan 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengharuskan bahwa syarat mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan yang kemudian dianalisis kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriftif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat dari objek penelitian dihubungkan dengan undang-undang yang terkait. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bersifat membatasi keikutsertaan ASN untuk mengisi jabatan publik melalui Pemilu/Pilkada dan mewajibkan ASN yang ingin ikut dalam kontestasi dalam Pemilu/Pilkada harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak saat mendaftar. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dinyatakan bahwa syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

345.02
NUR
p

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERKARA PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP PENYITAAN OBJEK HAK TANGGUNGAN AKIBAT KASUS KORUPSI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 70/Pdt.BTH/2015/PN.Bit)

Nurhikmahdatul Ulfa, 1610112117, Program Kekhususan Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Hak tanggungan menjadi jaminan yang banyak digunakan dewasa ini. Hal ini dikarenakan hak tanggungan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan bentuk jaminan lainnya. Salah satu bentuk kelebihan dari jaminan hak tanggungan adalah pemegang hak tanggungan memiliki hak preferen. Maksud dari hak preferen ini adalah, pemegang hak tanggungan berhak memperoleh pelunasan piutangnya terlebih dahulu dibandingkan dengan debitur lainnya. Meski memiliki hak preferen, nyatanya pada masa sekarang hak tersebut dapat terganggu, salah satunya akibat disitanya objek jaminan oleh pengadilan akibat kasus korupsi. Permasalahan tersebut dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 70/Pdt.BTH/2015/PN.Bit juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.159/PDT/2016/PT.MND juncto Putusan Mahkamah Agung No.2701K/PDT/2017. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hakim mengenai permohonan perlindungan hukum kreditur dalam perkara perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan objek hak tanggungan akibat kasus korupsi?; 2) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur dalam hal objek hak tanggungan disita oleh pengadilan akibat kasus korupsi?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sifat deskriptif, menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Hakim dalam memutus perkara ini, lebih mempertimbangkan hak istimewa atau preferen dari kreditur pemegang hak tanggungan, meskipun upaya hukum yang dilakukan kreditur tanpa mengikuti aturan yang terdapat dalam UU Tipikor terlebih dahulu. Hakim dalam memutus perkara mengutamakan kepastian hukum bagi pemegang hak tanggungan untuk dilindungi secara hukum, sebagaimana diatur dalam UU Hak Tanggungan.; 2) Upaya hukum yang dapat dilakukan kreditur dalam hal objek hak tanggungan disita pengadilan akibat kasus korupsi yaitu, pertama mengajukan keberatan kepada pengadilan yang menetapkan penyitaan terhadap objek a quo saat proses peradilan pidana terkait kasus tersebut belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jika langkah pertama tidak berhasil, maka kreditur dapat melakukan upaya hukum kedua, yaitu mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) pada peradilan perdata.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Jaminan, Hak Tanggungan.

346
NUR
p

PENYELESAIAN SENGKETA PENYEDIAAN SUMBER DAYA AIR (Studi Kasus Penyediaan Sumber Daya Air Tiagan Nagari Sungai Tanang Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi)

Nurul Astri Haliza, 1610111011, Fakultas Hukum, 2019, 66 halaman

ABSTRAK

Air adalah sumber daya alam yang mutlak diperlukan bagi hidup dan kehidupan manusia. Kebutuhan manusia akan air selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan jumlah manusia yang selalu bertambah. Sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada Pasal 33 ayat 3 bahwa Bumi dan air dam kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. Lalu dijelaskan pada Peraturan turunannya pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan bahwa Hak menguasai oleh Negara yang memberi wewenang pada Pemerintah untuk mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air, menyusun, mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan, mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumbersumber air,Mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin pengusahaan air, dan atau sumber-sumber air, menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air. Yang tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional. Wewenang Pemerintah sebagaimana tersebut Undang-undang ini, dapat dilimpahkan kepada instansi-instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah dan atau badan-badan hukum tertentu. Pelimpahan wewenang disini adalah pada Badan Usaha Milik Daerah yakni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bukittinggi yang memanfaatkan mata air Nagari Sungai Tanang dalam memenuhi kebutuhan air bagi Masyarakat Kota Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penyelesaian sengketa yang terjadi antara Masyarakat Nagari Sungai Tanang dengan PDAM Kota Bukittinggi dan faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa. Sengketa ini berawal dari merasa tidak setuju nya masyarakat nagari Sungai Tanang dalam penyediaan air bagi Kota Bukittinggi yang mana dikelola oleh PDAM Kota Bukittinggi.

Kata Kunci : Sumber Daya Air, Masyarakat Nagari Sungai Tanang, PDAM

346.02
NOV
p

PERJANJIAN BAKU KREDIT PEMILIKAN RUMAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DI KOTA PEKANBARU

Nova Feroniza, SH, 1820123013, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 121 halaman, tahun 2020

ABSTRAK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris disebutkan : Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat di Indonesia menyebabkan besarnya kebutuhan masyarakat akan suatu permukiman yang layak. Adapun yang dibahas yaitu : Bagaimana proses perjanjian kredit pemilikan rumah yang dibuat oleh notaris di kota Pekanbaru, Bagaimana tanggung jawab notaris dalam proses perjanjian kredit pemilikan rumah yang dibuat oleh notaris di kota Pekanbaru, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen kepemilikan rumah berdasarkan perjanjian baku. Sifat penelitian bersifat deskriptif, dengan pendekatan masalah secara yuridis empiris, dimana menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan melakukan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh diolah dengan mengunakan teknik editing, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Proses Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Yang Dibuat Oleh Notaris Di Kota Pekanbaru. KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah. Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Yang Dibuat Oleh Notaris Di Kota Pekanbaru. Notaris dan aktanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena kedudukan akta notaris menjadi otentik disebabkan kedudukan notaris sebagai pejabat publik yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Akta/Perjanjian Kredit Notariil (Otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh dan atau di hadapan notaris. Pembuktian melalui akta notariil memiliki kekuatan yang berbeda dengan akta di bawah tangan, terhadap akta di bawah tangan beban pembuktian harus melalui proses persidangan biasa, dimana para pihak dihadapkan pada pemeriksaan saksi menyangkut kebenaran para pihak, kebenaran tandatangan dan kebenaran persetujuan para pihak dalam isi perjanjian, pembuktian dengan akta di bawah tangan menjadi sangat fatal lagi apabila ada pihak yang tidak mengakui kebenaran kehadirannya menurut waktu dan tandatangan dalam akta di bawah tangan tersebut, sehingga memerlukan beban pembuktian bagi pihak yang disanggah untuk memberikan bukti-bukti lain

Kata Kunci : Perjanjian Baku, KPR, Notaris

345
OKA
p

PROSES PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oka Yolanda Purwadinata, Nommor BP : 1310111044, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Tahun 2020

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara dengan tingkat Korupsi yang tinggi, sehingga memberi dampak yang mengakibatkan rusaknya perekonomian Negara. Korupsi di Indonesia telah menjadi hal yang lumrah dan membudaya sejak dulu, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, pada era Orde Lama, Orde Baru, bahkan berlanjut hingga era Reformasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi bertujuan untuk se-efisien dan se-efektif mungkin dapat mengurangi dan mengembalikan kerugian uang Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi tersebut.Penelitian ini mengkaji Proses Pembuktian Perkara Dalam Tindak Pidana Korupsi. penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana penanganan dan pembuktiannya memerlukan keahlian khusus dibidangnya. Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Surat dakwaan yang tidak di uraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut batal demi hukum. Berdasarkan Pasal 30 UU Kejaksaan, Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang. Oleh sebab itu dalam rangka penanggulangan maupun pencegahan tindak pidana korupsi harus dihapuskan sebab-sebab dan kondisikondisi yang menimbulkan tindak pidana korupsi serta menghapuskan hambatan-hambatan dalam penegakan supremasi hukum. Hambatan-hambatan yang membuat pengungkapan kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi semakin sulit diatasi, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan caranya yang cukup sulit untuk melakukan pembuktian yang memadai.

345
OKT
P

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA TAHAP PENYIDIKAN (STUDI DI POLRES KOTA BUKITTINGGI)

OKTRIA WINDA MARYADI. 1610111141. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV (Hukum Pidana). 78 Halaman. Tahun 2020

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Banyaknya terjadi kasus eksploitasi seksual terhadap anak menimbulkan kekhawatiran, karena akan menimbulkan penderitaan baik fisik dan juga psikis sehingga mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya anak. Berdasarkan alasan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan di Polres Kota Bukittinggi? Kedua, apa kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan di Polres Kota Bukittinggi? Ketiga, bagaimanakah upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan di Polres Kota Bukittinggi? Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Dalam penelitian ini bersifat Deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: Pertama, Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang diantaranya berupa pendampingan psikologi dan rehabilitas sosial guna memulihkan kondisi mental, fisik dan lainnya pada anak korban sebagai akibat dari suatu tindak pidana yang menimpa dirinya dan dalam proses penyidikan anak harus didampingi oleh orang tua/ wali yang dipercaya anak serta bebas dari pertanyaan yang menjerat dan memberikan keterangan tanpa tekanan. Kedua, kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual adalah tidak adanya penyidik khusus anak dan sarana prasarana yang belum memadai. Ketiga, dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual Unit PPA Polresta Bukittinggi bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Bukittinggi.

Kata Kunci: Eksploitasi Seksual, Anak Korban, Perlindungan Hukum, Penyidikan.

347.05
PRI
a

ANALISIS YURIDIS TRANSAKSI JUAL BELI TANAH ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 59/Pdt.G/2019/PN Pdg

Prima Danu Putra, 1510112115, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK I (Hukum Perdata), 60 halaman, 2019

ABSTRAK

Tanah memiliki fungsi ekonomi bagi manusia. Tanah dapat diperjualbelikan. Transaksi jual beli tanah sering berujung sengketa di Pengadilan. Seperti halnya perkara yang tercatat pada pengadilan Negeri Padang dengan nomor registrasi 59/Pdt.G/2019/PN Pdg merupakan gugatan Wanprestasi. Namun jika dianalisis berdasarkan dalil-dalil gugatan lebih mengarah pada perbuatan melawan hukum. Tergugat A dengan unsur kesengajaan menghambat akses menuju objek jual beli berupa tanah yang termuat di dalam akta jual beli nomor 53/2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dibuat dihadapan PPAT Nasrul, S.H. Tergugat A juga mengajukan pencatatan pemblokiran proses baliknama ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang atas sertifikat hak milik atas tanah yang diperjualbelikan Perumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana analisis yuridis terhadap sengketa jual beli tanah di dalam putusan nomor 59/Pdt.G/2019/PN Pdg; 2) Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 59/Pdt.G/2019/PN Pdg; Penelitian ini bersifat Kualitatif, dengan pendekatan masalah yang bersifat Normatif didukung oleh penelitian empiris, sedangkan pokok pembahasan menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, dikaitkan dengan prakteknya dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Putusan hakim terhadap perkara yang diregistrasi dengan nomor 59/Pdt.G/2019/PN Pdg berlabel wanprestasi. Tetapi dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat merupaka suatu tindakan perbuatan melawan hukum. Diperlukan pemisahan antara pengajuan gugatan Wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum; 2) Demi keadilan hakim mengeluarkan penetapan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Padang agar menghapus blokir proses baliknama sertifikat hak atas tanah kepada Penggugat dengan dasar hukum Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah. Majelis Hakim tidak mengabulkan sita jaminan (conservatoir beslag) dengan pertimbangan Pasal 261 ayat (1) hanya diberlakukan untuk benda-benda milik Tergugat. Sedangkan perkara a quo merupakan sebidang tanah milik Penggugat.

Kata Kunci : Tanah, Jual beli, Wanprestasi

347.05
PAT
s

SENGKETA PERBATASAN ANTARA INDONESIA DENGAN VIETNAM DI LAUT NATUNA UTARA BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982

Patricia Iqfha Sefni Ceria.1510112014. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK VII (Hukum Internasional). 66 Halaman. Tahun 2019

ABSTRAK

Indonesia dan Vietnam mepunyai batas laut Zona Ekonomi Ekslusif dengan klaim yang berbeda di Laut Natuna Utara sehingga terjadinya perhimpitan klaim pada Zona Ekonomi Ekslusif diwilayah tersebut, sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam sudah terjadi dari tahun 1963 hingga sekarang. Ketentuan mengenai Zona ekonomi ekslusif yang berhadapan atau berdampingan diatur dalam pasal 74 United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Permasalahan yang akan diteleti adalah latar belakang klaim laut Natura Utara oleh Indonesia dan Vietnam dan penyelesaian Sengketa Kepemilikan Natuna Utara antara Indonesia dan Vietnam berdasarkan UNCLOS 1982. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian dan pembahasan diketahui bahwa latar belakang Indonesia mengklaim Laut Natuna Utara adalah dengan berdasarkan aturan UNCLOS 1982 yaitu penarikan garis pangkal kepulauan dikarenakan indonesia adalah negara kepulauan dan latar belakang Vietnam mengklaim Laut Natuna Utara adalah berdasarkan sejarahnya ketika Perancis tahun 1930-an masih menjajah Vietnam saat itu kepulauan Spratly dan Paracel dibawah kontrol Perancis, setelah merdeka dari Perancis Vietnam mengklaim kedua pulau tersebut dan menganggap negaranya sebagai negara kepulauan, sehingga membuat negara Vietnam menggunakan garis pangkal kepulauan dalam menentukan Zona Ekonomi Ekslusif dan penyelesaian sangketea antara Indonesia dan Vietnam yang sudah dilakukan yaitu perundingan sebanyak 12 kali dan belum ada keputusan yang mengikat antara kedua negara mengenai batas Zona Ekonomi Ekslusif.

Kata kunci : UNCLOS 1982, Indonesia-Vietnam,Laut Natuna Utara

346.01
PUR
p

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH IDDAH DAN BIAYA MUT'AH PADA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B PAYAKUMBUH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 530/Pdt.G/2018/PA.Pyk)

Purnama Rahmi, 1410111002, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK Hukum Adat dan Islam , 62 Halaman 2019

ABSTRAK

Putusnya perkawinan karena perceraian terjadi karena dua hal yaitu talak dan gugatan perceraian. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya, maka suami memiliki kewajiban memberikan nafkah iddah dan biaya mut'ah kepada istri yang diceraikannya. gugatan mengenai nafkah iddah dan biaya mut'ah dapat diajukan oleh istri di Pengadilan Agama yang bersangkutan dengan adanya gugatan balik (Rekonvensi). Nafkah iddah dan biaya mut'ah yang dituntut istri tidak sepenuhnya dikabulkan sebagai putusan akhir. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara tegas mengenai besarnya pemberian nafkah setelah perceraian.Hakim diberi wewenang untuk berijitihad dalam mengambil sebuah keputusan. Penelitian ini memiliki rumusan masalah apa akibat hukum dari cerai talak berdasarkan putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA.Pyk,Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetukan nafkah iddah dan biaya mut'ah pada cerai talak berdasarkan putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA.Pyk dan Apa kendala yang muncul dari penetapan pembayaran nafkah iddah dan biaya mut'ah pada cerai talak berdasarkan putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA.Pyk dan cara penyelesaiannya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Akibat hukum dari cerai talak berdasarkan putusan Nomor 530/Pdt.G/2018/PA.Pyk ialah dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Biaya Mut'ah dan Nafkah Anak (Hadhanah). pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah iddah dan biaya mut'ah berdasarkan putusan tersebut adalah majelis hakim melihat dari kesanggupan dan kemampuan suami. Kendala yang ditemukan ialah didalam persidangan tarik menarik dalam menentukan besaran nafkah iddah dan biaya mut'ah tersebut. Penggugat Rekonvensi/ Termohon meminta nafkah iddah dan biaya mut'ah yang terlalu tinggi, sedangkan Pihak Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak sanggup untuk memenuhi hal tersebut. Untuk mencari jalan keluar hakim memberi kebebasan kepada para pihak untuk sepakat mengenai besaran nafkah iddah dan biaya mut;ah tersebut, dan hakim memiliki pertimbangan tersendiri kemampuan dan kesanggupan suami yang mana hal ini sudah diatur dalam pasal Pasal 80 ayat 4, Pasal 81 ayat 4 dan Pasal 160 KHI.

Kata Kunci: Nafkah Iddah, Mut'ah, Cerai Talak

345
MEG
k

KEDUDUKAN TESTIMONIUM DE AUDITU PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK : STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PADANG NOMOR : 45/PID.SUS/2018/PT.PDG

Mega Putri, 1720112036, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 111 halaman, 2019

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan testimonium de auditu pada perkara tindak pidana persetubuhan anak studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 45.PID.SUS/2018/PT.PDG. Perkara ini bermula dari Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN Slk, Hakim putusan tingkat pertama memutus perkara dengan mempertimbangkan saksi de auditu sebagai alat bukti petunjuk dengan memperhatikan relevansi saksi de auditu dengan alat-alat bukti lain. Namun Hakim Pengadilan Tinggi memutus hal yang berbeda, sehingga putusan hakim pengadilan tingkat pertama dibatalkan, dengan pertimbangan bahwa saksi de auditu bukanlah alat bukti. Untuk itu tesis ini mengangkat permasalahan mengenai batasan dalam penerimaan testimonium de auditu dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dan kedudukan alat bukti testimonium de auditu dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 45.PID.SUS/2018/PT.PDG. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah Teori Pembuktian Hukum Pidana dan teori Kepastian Hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang ditunjang dengan wawancara dengan aparat penegak hukum yang berkaitan dengan perkara yang diangkat dalam tulisan ini. Hasil dan analisis pada tesis ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak menetapkan batasan dalam penerimaan testimonium de auditu. Pada Putusan MK memang tidak membahas saksi de auditu secara khusus, namun saksi de auditu termasuk salah satu jenis saksi yang diperdebatkan. Berdasarkan putusan MK, saksi de auditu dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang ada relevansinya dengan alat-alat bukti lain dan perkara yang di persidangan. Frasa relevansi ini menjadi perdebatan, hal ini dikarenakan tidak ada batasan bagi hakim dalam menentukan relevansi tersebut. Sehingga untuk menentukan relevansi dituntut kelihaian dan kecerdasan hakim dalam menganalisis perkara. Namun pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 45.PID.SUS/2018/PT.PDG kedudukan alat bukti testimonium de auditu tidak diakui, dengan demikian putusan tersebut membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Menurut penulis hakim Pengadilan tinggi telah keliru dalam menerapkan asas pembuktian, dimana hakim pengadilan tinggi menetapkan putusan hanya berlandaskan Undang-Undang saja Positif Wettelijk Bewijstheorie. Hal ini bertentangan dengan asas pembuktian hukum Pidana Indonesia yang berpegang pada asas negatief wettelijk bewijstheorie. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 belum memberikan kepastian hukum dalam menentukan saksi de auditu dapat dijadikan alat bukti atau tidaknya.

Kata kunci : testimonium de auditu, Tindak Pidana Persetubuhan, Anak

346.06
PIP
p

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI RIAU TERHADAP KASUS PRAKTIK PUNGUTAN LIAR DI RUMAH TAHANAN KELAS I PEKANBARU (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pekanbaru)

Pipit Dermawati, 1610111092, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Halaman 77, 2020

ABSTRAK

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang disingkat dengan satgas saber pungli merupakan satuan yang dibentuk untuk mengatasi pungutan liar berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar kemudian diikuti dengan pembentukan satgas setiap provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Riau dengan di keluarkan Surat Keputusan Gubernur No. 1072/XI/2016 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Satgas saber pungli terdiri atas 4 fungsi diantranya fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Permasalahannya ialah dibentuknya satgas saber pungli di Provinsi Riau diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang bebas dari pungli namun prakteknya pungli masih banyak terjadi. Seperti kasus praktik pungutan liar yang terjadi di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru yang menyebabkan kaburnya ratusan tahanan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Riau terhadap kasus pungutan liar di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru?, 2). Apakah yang menjadi kendala Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap kasus praktik pungutan liar di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru?. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dengan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan belum optimalnya pelaksanaan tugas oleh satgas saber pungli Provinsi Riau dan tidak adanya pelaksanaan tugas oleh satuan tugas sapu bersih pungutan liar Provinsi Riau sebelum kejadian tersebut. Adapun kendala pelaksanaan tugas satgas saber pungli Riau ialah kondisi Rumah Tahanan yang jauh dari pusat kota, bersifat tertutup, informasi terbatas, dan adanya intimidasi apabila tahanan atau keluarga yang melaporkan. Satgas saber pungli memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan berbeda namun dalam satu tujuan yakni pemberantasan pungli. Dalam pelaksanaan tugas tersebut tentu tidak selalu berjalan baik, terlebih dengan maraknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum.

344.03
QOR
p

PEMENUHAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Qorri Kurnia Lestari, 1510111103, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2020, 51 Halaman.

ABSTRAK

Hak Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap manusia, kebebasan ini berupa penyampaian ekspresi baik lisan maupun tulisan melalui media apapun tanpa hambatan dari pihak manapun. Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". HAM yang telah diatur di dalam Pasal 28E angka (3) UUD 1945 ini diatur lebih lanjut di dalam Pasal 23 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan maupun tulisan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan negara". Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, menyampaikan pendapat tidak hanya melalui media cetak saja namun juga melalui media elektronik. Untuk menyikapi perkembangan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia membuat dan mengundangkan produk hukum berupa Undang-Undang di bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahaan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pengaturan terkait hak kebebasan berpendapat di media sosial di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019? 2). Bagaimana pemenuhan hak kebebasan berpendapat di media sosial menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan seperti buku-buku, dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yakni, jaminan atas kebebasan berpendapat sudah diatur dalam UUD 1945, namun pemerintah juga menerapkan batasan terhadap pelaksanaan hak tersebut yang salah satunya diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

346
RES
p

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN EMAS DALAM REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

Resti Fauzi, 1610112119, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VIII (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam), 61 Halaman, 2020

ABSTRAK

Reklamasi dan pascatambang merupakan upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan untuk memulihkan lahan terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini akan mengulas tentang pertambangan emas di Kabuapten Solok selatan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan tiga rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas di Kabupaten Solok Selatan?; 2) Bagaimana pemenuhan kewajiban perusahaan pertambangan emas dalam reklamasi dan pascatambang di Kabupaten Solok Selatan?; dan 3) Bagaimana tindak lanjut oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap perusahaan pertambangan emas yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang di Kabupaten Solok Selatan?. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1) Akibat pertambangan Emas di kabupaten Solok Selatan terjadi kerusakan lingkungan hidup berupa terdapatnya lubang – lubang bekas tambang yang terisi air di sepanjang hulu daerah aliran sungai Batang Hari, rusaknya sempadan sungai, rusaknya lahan pertanian masyarakat dan tercemarnya air sungai yang menyebabkan matinya ikan budidaya keramba masyarakat, 2) Perusahaan pertambangan emas di Kabupaten Solok Selatan sebagian besar tidak memenuhi kewajibannya, saat ini terdapat 2 IUP yang masih aktif, hanya satu perusahaan yang memenuhi kewajiban menyerahkan dokumen rencana dan menyediakan dana reklamasi dan pascatambang kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu PT Bumi Indonesia Bersinar., 3) Tidak dipenuhinya pasal 99 dan 100 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara oleh Perusahaan berakibat tidak adanya pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang, kemudian Tindak lanjut dari pemerintah terhadap perusahaan pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang dengan memberikan sanksi administratif berupa teguran, pembekuan izin dan pengehentian kegiatan dengan pencabutan izin usaha pertambangan belum mewujudkan upaya pemulihan lingkungan terhadap lahan bekas tambang.

Kata Kunci: Pertambangan emas, reklamasi dan pascatambang, kewajiban perusahaan.

344.06
RIF
p

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN BERAT PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SOLOK

Rifati Jihan Hanifa, 1610111046, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 68 Halaman

ABSTRAK

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan segala bentuk kewajiban dan menjalankan perintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Bentuk perwujudan ini tercantum dalam ketentuan UU Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014. Bagi PNS yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin. Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang- Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Pegawai yang tidak mematuhi disiplin akan mendapatkan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Ngeri Sipil. Permasalahan yang menjadi objek penelitian diantaranya: (1) Mekanisme atau pelaksanaan pemberhentian PNS yang melakukan pelanggaran disiplin berat pada Dinas Perhubungan Kota Solok, (2) Kendala dalam menerapkan sanksi disiplin dan bagaimana upaya Dinas Perhubungan Kota Solok dalam meningkatkan disiplin PNS. Tindakan indisipliner yang dilakukan pegawai, mulai dengan teguran secara lisan, peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis ataupun empiris. Selanjutnya jenis data yang digunakan yaitu data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan data sekunder, sumber data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, hasil penelitian menunjukan bahwa PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan pungutan liar. Proses penyampaian pemberhentian PNS yang melakukan Pungli tersebut disampaikan secara tertutup dimana penyampaian pemberhentian secara tertutup tidak sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) PP No. 53 Tahun 2010 karena dalam pasal tersebut tidak diatur proses penyampaian pemberhentian secara tertutup. Adapun Kendala dalam menerapkan sanksi disiplin antara lain yaitu kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dimana tidak adanya integritas pimpinan dalam menjalankan profesionalitas kerja.

Kata kunci: Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian, Kedisiplinan, Sanksi.

342
RAF
K

KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI DALAM PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG (Studi Kasus PT. Harapan Indah Jaya)

Rafif Wafi, 1610111006, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 68 halaman, 2020

ABSTRAK

Kejaksaan Republik Indonesia dapat memiliki kewenangan lain berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Adapun salah satu tugas dan wewenang lain Kejaksaan yang diatur oleh undang-undang adalah mengajukan permohonan untuk membubarkan Perseroan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (1) huruf a UU PT, Kejaksaan dalam mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas hanya dengan alasan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau melanggar kepentingan umum, namun di dalam UU PT tidak memberikan definisi tentang kepentingan umum yang dimaksud sehingga juga memberikan ketidakjelasan batasan terhadap alasan kepentingan umum yang digunakan oleh Kejaksaan, dan dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur telah mengajukan permohonan pembubaran PT. Harapan Indah Jaya dengan alasan melanggar kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji definisi kepentingan umum yang digunakan oleh Kejaksaan dalam mengajukan permohonan pembubaran Perseroan Terbatas dengan alasan melanggar kepentingan umum serta mengkaji dasar Kejaksaan Negeri Kotawaringin mengajukan permohonan pembubaran PT. Harapan Indah Jaya. Berdasarkan permasalahan di atas maka rumusan masalah pada penelitian adalah sebagai berikut: (1) Apa dasar kewenangan dan alas an Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dalam mengajukan pembubaran PT. Harapan Indah Jaya? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan pembubaran PT.Harapan Indah Jaya? (3) Bagaimana akibat hukum dari adanya penetapan pengadilan tentang pembubaran PT. Harapan Indah Jaya? Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif, sumber data didapatkan oleh penulis melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Kata Kunci : Kepentingan Umum, Kejaksaan, Pembubaran Perseroan.

346.02
RAF
p

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA MITRA USAHA PADA PHI PHI ISLAND THAI TEA DAN COFFEE DI KOTA BANDA ACEH

Rafiqa Humaira Bawarith, 1610113004, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 60 Halaman

ABSTRAK

Era globalisasi telah mendorong terciptanya berbagai macam perjanjian yang telah berkembang di Indonesia. Salah satu bentuk perjanjian yang sedang banyak dipraktekkan oleh para pelaku usaha dalam mengembangkan kegiatan bisnisnya saat ini, yaitu perjanjian kemitraan. Kemitraan merupakan suatu kerjasama dalam kegiatan bisnis dengan adanya strategi bisnis, yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan bersama dengan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Secara yuridis, pengertian kemitraan diatur dalam pasal 1 angka 13 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa kemitraan adalah kerjasama dalam keterikatan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. Phi Phi Island Thai Tea dan Coffee merupakan salah satu badan usaha yang bergerak di bidang pemasaran produk minuman, sebagai badan usaha yang telah terbukti berhasil memberikan keuntungan dan dapat digunakan serta dimanfaatkan, maka Phi Phi Island membuka peluang bagi orang perseorangan atau badan usaha untuk menjalin kerjasama dalam bentuk kemitraan yang berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian kemitraan antara Phi Phi Island dengan mitra usahanya di Kota Banda Aceh berbentuk perjanjian tertulis dan digolongkan sebagai akta di bawah tangan yang pembuatannya berdasarkan prinsip partij otonomi. Perjanjian kemitraan tersebut menimbulkan adanya hubungan hukum antara para pihak yang mengandung hak- hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana undang- undang bagi para pihak yang saling mengikatkan dirinya. Selain itu, perjanjian kemitraan yang diadakan harus mematuhi ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Akan tetapi pelaksanaan perjanjian kemitraan antara pihak Phi Phi Island dengan mitra usahanya masih ditemukan kendala berupa wanprestasi. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan ilmiah berupa skripsi menggunakan metode penelitian yuridis- empiris mengenai (1) bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama mitra usaha pada Phi Phi Island Thai Tea dan Coffee di Kota Banda Aceh dan (2) apa kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama mitra usaha pada Phi Phi Island Thai Tea dan Coffee di Kota Banda Aceh serta bagaimana bentuk penyelesaiannya.

Kata kunci : Perjanjian, kemitraan, mitra usaha

348.3
RAH
k

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Rahma Deska Putri, 1610113104, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 61 halaman, 2020

ABSTRAK

Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan, diawali dengan dibentuknya Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan telah diubah dengan Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dan Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hingga menjadi acuan dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa KOPRS dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan dikeluarkannya Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hingga dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati No.37 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pemda berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan hal tersebut dalam tulisan ini merumuskan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana penerapan azas-azas pembentukan perundang- undangan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2) Bagaimana pengaturan tentang Kode Etik dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Kode Etik pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembentukan peraturan bupati ini sesuai dengan pembentukan produk hukum daerah dan pembentukan peraturan perudang-undangan yang berlaku, serta urgensi apa yang mendasari dibentuknya peraturan bupati ini, dan bagaimana pengaturan mengenai kode etik pegawai ASN ini berdasarkan Peraturan Bupati yang dibentuk dengan Undang-Undang ASN. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kaidah dasar, publikasi yang dibuat oleh Pemerintah, Buku-buku dan Literatur. Berdasarkan penelitian ini, pembentukan peraturan bupati ini sesuai dengan kaidah pembentukan produk hukum daerah dan Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan bupati ini didasari oleh tidak adanya peraturan daerah tingkat provinsi yang mengatur tentang ASN, dan memperjelas pengaturan mengenai kode etik ASN serta perbandingannya dengan Undang-Undang ASN.

345.08
RAH
p

PERLINDUNGAN HAK ANAK DI MYANMAR BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD 1989

Rahmat Afdhal, 1510111182, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2019

ABSTRAK

Pada tahun 2016 terjadi penyerangan oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya, dalam penyerangan tersebut banyak memakan korban terhadap penduduk sipil yang seharusnya dilindungi dan juga terjadi pelanggaran terhadap hak anak seperti pembunuhan terhadap anak berumur 8 bulan, anak berusia 5 tahun dan seorang anak berusia 6 tahun ditikam sampai mati dirumahnya masing- masing. Tindakan-tindakan tersebut jelas telah melanggar Convention on the right of the Child 1989. Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai pengaturan perlindungan hak anak berdasarkan Convention on the Right of the Child 1989 dan penegakan hukum tentang perlindungan hak anak di Myanmar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pengaturan perlindungan hak anak berdasarkan Convention on the Right of the Child 1989 digolongkan menjadi 4 hak utama yaitu hak kelangsungan hidup (Survival Right), hak perindungan (Protection Right), hak tumbuh berkembang (Development Right), dan hak berpartisipasi (Participation Right). Penegakan hukum tentang perlindungan hak anak di Myanmar oleh pemerintah Myanmar tidaklah menjalankan perlindungan hak anak sesuai dengan Convention on the Right of the Child 1989 karena masih adanya pelanggaran-pelanggaran hak anak yang dilakukan. Karena pada tahun 1991, Myanmar telah meratifikasi Convention on the Right of the Child 1989.

343.02
RAH
p

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) PAKANDANGAN EMAS DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

RAHMAT PUTRA SYAHYU RAZAK, 1610112128, FAKULTAS HUKUM, 2020, 67 HALAMAN

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karena adanya badan usaha dan lembaga- lembaga keuangan yang saat sekarang ini banyak menggunakan label syariah. Melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Permendes , lahirlah suatu kebijakan tentang desa dalam memberikan pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan bagi kesejahteraan. BUMNag Pakandangan Emas menerapkan suatu prinsip yang berbeda pada Badan Usaha pada umumnya, yang biasanya menggunakan prinsip Konvensional. BUMNag Pakandangan Emas menerapkan prinsip syariah yang merupakan suatu hal yang sudah dicita-citakan sudah sejak lama oleh pemerintah dan masyarakat nagari. Sampai saat ini terdapat 3 unit usaha yakninya simpan pinjam, bagi hasil, bank sampah dan 4 akad yang sudah mulai dijalankan BUMNag Pakandangan Emas. Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, sifat penelitian besifat deskriptif dengan sumber yang berasal dari studi langsung di lapangan dan studi kepustakaan, dengan jenis datanya yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian yang dilakukan di BUMNag Pakandangan Emas Kabupaten Padang Pariaman didapat kesimpulan sebagai berikut : pertama, adapun latar belakang lahirnya BUMNag Pakandangan Emas merupakan suatu hasil musyawarah cadiak pandai dan tokoh-tokoh nagari, sekaligus sebagai tujuan dan cita-cita dari Nagari Pakandangan. Kedua, Prinsip yang diterapkan oleh BUMNag Pakandangan Emas sudah mengacu pada ketentuan undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah dalam melaksanakan kegiatannya. Ketiga, BUMNag Pakandangan Emas masih mengalami kendala terhadap kepercayaan oleh masyarakat serta promosi yang kurang maksimal.

Kata kunci: Prinsip Syariah, Hukum Perusahaan,BUMNag

345
RAH
p

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi di Pengadilan Negeri Padang)

Rahmawati, 1610111094, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 74 halaman

ABSTRAK

Kelalaian yaitu ketidakhati-hatian ataupun ketidaksengajaan dalam melakukan suatu perbuatan. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 359 – Pasal 361 KUHP. Dalam kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain diatur dan diancam pidana terhadap dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 310 ayat (4) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Namun, pada umumnya hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain? 2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana bersyarat yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat (wasmat)? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang didapat dari penelitian langsung di lapangan dan data sekunder yaitu informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian ini yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut: dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Selain pertimbangan tersebut hakim juga memiliki pertimbangan sendiri yang didasarkan kepada hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu adanya perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban, terdakwa belum pernah dihukum, serta terdakwa memiliki tanggungan dan tanggung jawab. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana bersyarat oleh hakim wasmat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebaiknya terdapat peraturan khusus yang secara tegas mengatur mengenai kriteria bagi terdakwa agar dapat dijatuhkan pidana bersyarat dan sanksi bagi hakim wasmat yang tidak melaksanakan tugasnya mengawasi dan mengamati terpidana bersyarat.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Kelalaian, Pidana Bersyarat

342.07
RAH
p

PERSINGGUNGAN KEWENANGAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM

Rahmi Suryanda Adha, 1510112003, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK V (Hukum Tata Negara), 67 halaman, 2020

ABSTRAK

Pemilu merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat yang telah dibuat sebagaimana cerminan dari negara demokrasi. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat haruslah mencerminkan prinsip kejujuran dan keadilan. Agar keadilan Pemilu dapat terlaksana maka, harus ada mekanisme hukum untuk mengawal proses Pemilu dan mekanisme hukum untuk menyelesaikan pelanggaran Pemilu. Salah satu mekanisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menyelesaikan sengketa administratif Pemilu dan kewenangan Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Berkaitan Pasal 407 dan Pasal 474 dan 475. Persinggungan kewenangan yang terjadi antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi timbul akibat Pasal 407, Pasal 474, Pasal 475. dimana Pasal 407 ayat (1) menyatakan "Bawaslu wajib menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/ atau kesalahan: dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan, perolehan suara peserta Pemilu". Sedangkan Pasal 474 dan Pasal 475 berisikan bahwa pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan penetapan hasil oleh KPU paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil diumumkan KPU. Kedua lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang sama dalam menyelesaikan perselisihan berkaitan perselisihan hasil Pemilu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana persinggungan kewenangan penyelesaian sengketa administratif oleh Bawaslu dan penyelesaian sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi? kedua, bagaimana persinggungan kewenangan antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi seharusnya diselesaikan?. Metode Penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persinggungan yang terjadi antara Bawaslu dan Mahkamah Kontitusi tersebut berkaitan dengan skema penyelesaian perselisihan hasil Pemilu yang dapat menimbulkan peluang bagi peserta Pemilu untuk mengajukan Permohonan kepada kedua lembaga tersebut. Seharusnya Mahkamah Konstitusi menjadi badan terakhir dalam menyelesaikan perselisihan dan sengketa Pemilu.

346.07
RAM
p

PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PEMASARAN PRODUK RITEL DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UMKM DI KOTA PADANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Rama Antonio Syaputra, 161011039, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 hlm, 2020

ABSTRAK

Keberadaan ritel memiliki pro and kontra dalam penerimaannya di masyarakat, di satu sisi ritel memberikan pelayanan dan fasilitas yang bagus, di sisi lain karena dominasi pasaran ritel yang dapat mengenyampingkan posisi pasar dari ritel tradisional dan UMKM. Sehingga dianjurkan oleh pemerintah bahwasanya harus adanya suatu siasat kerjasama dengan melakukan suatu perjanjian agar unit UMKM tetap dapat berkembang. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis empiris, yaitu merupakan pendekatan terhadap masalah yang ada dengan jalan memahami hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana kenyataan atau praktiknya dilapangan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara serta studi kepustakaan, adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan UMKM di Kota Padang salah satunya dengan ikut serta dalam pembuatan klausula perjanjian tertulis antara pihak UMKM dengan Toko Ritel Modern agar tidak terjadi suatu kecurangan didalamnya. Apabila dikaitkan dengan UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, unit UMKM sendiri telah difasilitasi oleh pemerintah dalam pengembangannya agar tidak dikesampingkan dengan banyaknya ritel modern di pasaran. Pada Bab V Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan adanya aspek yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menumbuhkan iklim usaha dan sebagian aspek tersebut telah dijalankan oleh pemerintah dalam peningkatan kualitas sehingga dapat memberdayakan UMKM. Praktiknya masih terdapat permasalahan yang memerlukan perhatian dari pemerintah dalam memberdayakan UMKM agar berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Perjanjian Kerjasama, Pemberdayaan UMKM, Ritel, Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

341.62
RAM
p

PERANAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA NUKLIR IRAN

Ramadhan Jaka Pratama, 1510112027, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 55 hlm, Tahun 2020, Pembimbing Prof. Firman Hassan, SH,LL.M & Dr. Jean Elvardi. SH.MH

ABSTRAK

Pada tanggal 8 Juni 2018 Indonesia telah terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2019-2020. Indonesia akan memulai masa tugasnya pada tanggal 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan badan terkuat di Perserikatan Bangsa- Bangsa yang mempunyai legitimasi untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara sedangkan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya hanya dapat memberikan rekomendasi kepada para anggota. Rumusan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana peranan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa terkait program nuklir Iran, (2) Bagaimana peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyelesaikan sengketa nuklir Iran. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan penelitian kepustakaan sebagai data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dalam setiap haluan politik luar negerinya Indonesia senantiasa memasukkan isu nuklir Iran sebagai perhatian atau fokus dari arah politik luar negeri Indonesia. Kehati-hatian Indonesia dalam menyelesaikan krisis nuklir Iran di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengharuskan Indonesia untuk bersikap ganda terkait resolusi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa- Bangsa. Adanya sikap ganda dan kontradiksi Indonesia terhadap dua resolusi tersebut tidak lain disebabkan oleh faktor domestik yaitu aspirasi masyarakat islam, kepentingan ekonomi dan teknologi, serta menja ga stabilitas politik dalam negeri, serta faktor lingkungan internasional. Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah mengeluarkan 4 Resolusi, yaitu (1) Resolusi 1969, (2) Resolusi 1737, (3) Resolusi 1747, dan (4) Resolusi 1803, (5) Resolusi 1929.

Kata kunci: Indonesia, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nuklir, Iran, Amerika Serikat

346.08
RAN
p

PENERAPAN PRINSIP ITIKAD BAIK (UTMOST GOOD FAITH) DALAM PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN TERHADAP MOBIL YANG DISEBABKAN OLEH KECELAKAAN DI PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) CABANG PADANG

Randa Pratama, 1610113037, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, Halaman 71, Pembimbing : Dr. Dahlil Marjon, S.H, M.H., dan Dr. Yasniwati, S.H, M.H.

ABSTRAK

Kehidupan dan kegiatan manusia pada hakekatnya mengandung hal yang tidak kekal dimana suatu hal yang kemungkinan akan terjadi menimpa manusia dan menimbulkan kerugian. Perkembangan kendaran bermotor salah satu bentuk perkembangan zaman, seiring dengan beragam dan banyaknya kendaraan bermotor yang beredar telah menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan risiko yang dihadapi oleh manusia juga semakin kompleks. Salah satu cara untuk mengatasi risiko dengan cara mengalihkannya kepada pihak lain di luar diri manusia. Asuransi merupakan alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Keterangan secara jujur akan menjadi prinsip yang sangat penting dalam ganti kerugian terhadap mobil yang disebabkan oleh kecelakaan. Dalam asuransi istilah demikian disebut dengan (Utmost Good Faith), yaitu setiap tertanggung berkewajiban memberikan informasi secara jelas dan teliti mengenai segala hal fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan serta tidak mengambil untung dari asuransi. Prinsip ini juga berlaku bagi penanggung (perusahaan asuransi mobil), yaitu berkewajiban dalam menjelaskan resiko yang dijamin maupun yang dikecualikan secara jelas dan teliti, yang dapat melalui agennya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Penerapan Prinsip Itikad Baik (Utmost Good Faith) dalam pelaksanaan ganti kerugian terhadap mobil yang sebabkan oleh kecelakaan di PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Padang. Adapun permasalahan berkaitan adalah: bagaimana kriteria penilaian kerusakan kendaraan akibat kecelakaan oleh pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Padang, bagaimana penyelesaian proses klaim asuransi apabila terbukti pihak tertanggung memanipulasi kerusakan atau adanya unsur kebohongan atau tidak beritikad baik. Untuk memperoleh data penelitian yang akurat digunakan metode penelitian yuridis sosiologis (socio legal reseach). Dari data premier, sekunder dan tersier dan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi dokumen yang dikumpulkan penulis analisa dengan mempergunakan analisa kualitatif dengan dilakukan penelitian telah berhasil menjawab permasalahan yang dikemukakan diatas, 1) Kriteria penilaian kerusakan kendaraan bermotor mengacu kepada Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) dengan metode analisa terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu: Physical Hazard dan Moral Hazard. 2) Dalam penyelesaian klaim asuransi apabila tertanggung terbukti melakukan melebih- lebihkan kerusakan atau memanipulasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 282KUHD batalnya suatu perjanjian asuransi, tidak berlanjut ke pengadilan. Sejauh ini tidak ada sanksi tegas mengenai azas itikad baik ini. Jika dikaitkan dengan KUHPidana manipulasi kendaraan termasuk kedalam unsur Penipuan.

Kata Kunci: Asuransi, Kecelakaan, Utmost Good Faith

344.06
RAN
p

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MEMPEROLEH KESEMPATAN KERJA DI PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA PADANG

Rania Salsabillah Br.Barus, 1610111077, Fakultas Hukum, Universitas Andalas. 84 Halaman, 2020

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang “Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Kesempatan Kerja Di Perusahaan Swasta Di Kota Padang”. Ada 3 permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yang pertama yaitu faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak – hak dari penyandang disabilitas oleh perusahaan swasta untuk mencapai target kuota 1% kedua perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terkait rekrutmen pekerja oleh perusahaan swasta di Kota Padang dan yang ketiga yaitu hambatan yang dialami pemerintah dan pengusaha untuk memberikan perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam rekrutmen pekerja di perusahaan swasta di Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mana menggunakan pendekatan perundang – undangan yang dikaitkan dengan fakta yang terjadi artinya dengan melihat keaadaaan nyata di wilayah penelitian. Data penelitian ini didapat dengan melakukan wawancara terhadap narasumber. Dalam penelitian ini data disajikan secara kualitatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Padang sudah melakukan sosialisasi Pasal 53 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenai perusahaan swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% dari jumlah pegawai atau pekerja. Pihak pemerintah dari Dinas Tenaga Kerja Kota Padang juga memberikan reward bagi perusahaan swasta yang sudah mempekerjakan penyandang disabilitas untuk memotivasi perusahaan swasta lainnya untuk melakukan hal yang sama. Hambatan yang dialami oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum penyandang disabilitas adalah belum ada sanksi yang menegaskan Pasal 53 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas karena belum ada peraturan pelaksanaanya. Peraturan Pelaksanaan yang dimaksud adalah aturan yang dibuat oleh eksekutif (pemerintah) atau badan lain dalam rangka melaksanakan Undang – Undang.

348.3
REF
e

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA TERKAIT PENGEMBALIAN HAK ULAYAT SETELAH BERAKHIRNYA HAK GUNA USAHA (STUDI DI NAGARI ALAM PAUH DUO)

Refa Swinta Maharani, 1610112049, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 72 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat." Secara Khusus, tanah diatur dalam Hukum Agraria yaitu berkaitan langsung dengan hak atas tanah. Dalam konteks hukum adat, tanah ulayat dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat. Di Nagari Alam Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, terdapat tanah yang statusnya adalah tanah bekas Hak Guna Usaha. Dalam hal ini, beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan ketentuan yang berbeda mengenai kedudukan status Tanah Hak Guna Usaha yang telah berakhir tenggang waktunya. Rumusan Masalah yang timbul yaitu: 1) Bagaimana Status Tanah Hak Guna Usaha yang Telah Berakhir Tenggang Waktunya? 2) Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya terkait Pengembalian Hak Ulayat Setelah Berakhirnya Hak Guna Usaha di Nagari Alam Pauh Duo? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, kemudian penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil: 1) Status Tanah Bekas Hak Guna Usaha menurut UUPA yaitu menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara, namun menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, tanah tersebut kembali menjadi tanah ulayat sebagaimana kedudukan tanah tersebut sebelum diperoleh Hak Guna Usaha diatasnya; 2) Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya Setelah Berakhirnya Hak Guna Usaha di Nagari Alam Pauh Duo dinilai belum cukup efektif untuk melindungi kedudukan tanah ulayat.

Kata Kunci : Hak Guna Usaha, Hak Ulayat, Nagari Alam Pauh Duo.

346
REF
p

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DENGAN MENGGUNAKAN BRIZZI DI PANTAI AIR MANIS DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Refky Maulana Putra, 1610113029, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Pantai Air Manis merupakan salah satu objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kota Padang. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kota Padang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Pada mulanya pemungutan retribusi dilakukan dengan sistem pembayaran tunai menggunakan karcis. Namun terhitung tanggal 23 November 2019, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang mengeluarkan kebijakan dengan menerapkan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Pantai Air Manis menggunakan e-money Brizzi. Penerapan penggunaan Brizzi digunakan untuk menekan kebocoran pendapatan daerah dan pungutan liar. Namun dalam pelaksanaanya banyak terjadi penyimpangan – penyimpangan seperti masih menerima pembayaran dengan sistem tunai. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan menggunakan Brizzi di Pantai Air Manis dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah? 2) Apa kendala yang dihadapi pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dengan menggunakan Brizzi di Pantai Air Manis dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 3) Bagaimana kontribusi objek wisata Pantai Air Manis sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah?. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis, dengan sifat deskriptif, menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Pantai Air Manis dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Pantai Air Manis masih terjadi penyimpangan seperti adanya pihak lain yang ikut memungut retribusi selain pihak yang diberikan kewenangan dalam memungut retribusi; 2) Adapun kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi adalah tidak ada dasar hukum yang mengenai implentasi penerapan transaksi non tunai, ketidaksiapan masyarakat dalam menerima transaksi non tunai, ketidaktegasan petugas karena masih menerima pembayaran tunai, 3) Terjadinya pandemic Covid-19.

Kata Kunci : Pemungutan Retribusi, Transaksi Non Tunai, Brizzi, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

344.06
REG
k

KEDUDUKAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA PAYAKUMBUH

Regy Alvionita, 1510111006, Fakultas Hukum, Universitas Andalas 2019, 92 Halaman, 2020

ABSTRAK

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh membutuhkan tambahan pegawai, dan hal tersebut tidak terpenuhi karena adanya larangan pengangkatan Tenaga Honorer dan Tenaga jenis lainnya dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Menjawab persoalan tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh mengangkat Tenaga Harian Lepas dengan perjanjian kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah kedudukan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh? 2. Bagaimanakah hak dan kewajiban Tenaga Harian Lepas di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh? Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder, sumber data yang didapat penulis dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1. Dengan berlakunya UU ASN mempengaruhi kedudukan dan perlindungan hukum Tenaga Harian Lepas sebagaimana dalam Pasal 6 UU ASN yang menyebutkan bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK sehingga secara otomatis kedudukan tenaga harian lepas hilang. Sementara berdasarkan UU Ketenagakerjaan kedudukan tenaga harian lepas sama dengan pekerja/buruh. Dalam hal ini ada perbedaan antara tenaga harian lepas dan pekerja/buruh, sebagaimana yang dijelaskan pada UU Ketenagakerjaan tersebut pekerja/buruh bekerja pada pengusaha sedangkan tenaga harian lepas bekerja pada instansi pemerintah yang membutuhkan bukan pengusaha. 2. Hak dan kewajiban Tenaga Harian Lepas yang berdasarkan perjanjian kontrak kerja tidak sesuai dengan UU ASN, seperti tidak mendapatkan fasilitas jaminan hari tua, tunjangan dan promosi sebagaimana layaknya ASN.

345.02
RET
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA INTERNET BANKING DARI KEJAHATAN CYBERCRIMESTUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR WILAYAH PADANG

Retno Adhilla Putri, 1510111098, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 109 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Pemanfaatan teknologi informasi dikenal dengan E-Banking yang memberikan banyak kemudahan dalam pelayanan pada nasabah sudah menjadi andalan dunia perbankan. Salah satu produk bank yang terkait dengan E-Banking adalah Internet Banking. Sebagai mana produk perkembangan teknologi lainnya yang memiliki dampak yang tidak hanya positif tapi juga negatif termasuk Internet Bankingdengan munculnya kejahatan Cybercrimeyakni kejahatan yang dilakukan terhadap sistem atau jaringan komputer yang menimbulkan kerugian secara finansial kepada nasabah bank.Oleh karena itu nasabah harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan serta sistem keamanan operasional bank. Dalam penulisan ini yang menjadi rumusan masalah adalah 1) bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap penggunaan Internet Banking dari kejahatan Cybercrime di PT BRI (Persero) Tbk kantor wilayah padang, 2) Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam transaksi melalui Internet Banking dari kejahatan Cybercrime di PT BRI (Persero) Tbk kantor wilayah Padang dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris (empiris research) yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji begaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya edukasi ataupun penjelasan regulasi bank pada nasabah tentang kemungkinan dampak penggunaan Internet Banking sehingga penerapan hukum preventif belum maksimal dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen no. 8 tahun 1999 pasal 4 tentang hak dan kewajiban konsumen. Berdasarkan hal tersebut maka perlu hendaknya pihak bank memberikan edukasi kepada nasabah terkait dengan Internet Banking, tidak hanya regulasi prosedur dan syarat pengaktifan dan penggunaan tapi juga bagaimana antisipasi keamanan dalam penggunaan Internet Banking agar tindakan Cybercrime tidak terjadi.

Kata Kunci: InternetBanking,Cybercrime

345
REZ
p

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG)

REZUARDI EKA SUCI, 1610111033, PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA, UNIVERSITAS ANDALAS, 92 HALAMAN

ABSTRAK

Ditengah upaya penegak hukum dalam pemberantasan narkotika, terdapat salah satu putusan yang menarik yaitu didalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG Majelis Hakim Pengadilann Tinggi memutus untuk membebaskan terdakwa bernama Nurhayati Kahar, panggilan Iyet di dalam kasus tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman. Putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Putusan tersebut justru berbanding terbalik dengan putusan pengadilan Negeri Pariaman Nomor 118/PID.B/2011/PN.PRM dimana putusan pengadilan menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Padang sudah relevan dengan fakta yang muncul di dalam persidangan. permasalahannya adalah 1.) Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG serta relevansinya dengan fakta di persidangan 2.) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap perkara tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG. 1) Dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG dimana hakim memberi putusan pembebasan terhadap terdakwa sudah relevan dan sesuai dengan bukti – bukti yang ada didalam persidangan. Putusan Majelis Hakim juga sudah tepat secara hukum sesuai dengan teori keadilan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yaitu “meletakkan sesuatu pada tempatnya”. 2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap perkara tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG yaitu makna “menguasai” dihubungkan dengan konsep bezit dalam Pasal 529 dan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dalam konteks tersebut, Pengadilan Tinggi Padang menyatakan bahwa “bezit tidak bisa dipakai dalam kasus ini karena istilah dalam Pasal 529 KUHPerdata itu bermakna penguasaan atas suatu benda dalam hukum perdata.Saran penulis yaitu Supaya tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan sanksi pidana yang menyebabkan ketidak adilan bagi terdakwa, seharusnya ada penjelasan secara tegas terhadap pasal 112 Undang – Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 tidak hanya secara tekstual (dengan hanya membaca teksnya), tetapi harus ditafsirkan secara kontekstual (dalam konteksnya).

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Narkotika, Putusan Bebas

341
RID
t

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PLAGIARISME KARYA CIPTA DI BIDANG SENI MUSIK SERTA KAITANNYA DENGAN PRINSIP ORIGINALITAS BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

Ridwan Abdullah, 1510112085, Program Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Prinsip Originalitas merupakan dasar dalam menciptakan suatu karya cipta. Setiap karya cipta harus memiliki unsur originalitas agar terhindar dari tindakan plagiarisme karya cipta, salah satunya Plagiarisme Musik atau Lagu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan : (1) Batasan suatu karya cipta dapat dikatakan plagiat berdasarkan prinsip originalitas menurut hukum internasional dan hukum nasional, (2) Perbandingan hukum terhadap penerapan prinsip originalitas dalam tindakan plagiarisme suatu karya seni musik di Indonesia dan Amerika Serikat. Metode penulisan hukum yang penulis gunakan bersifat normatif, dimana penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari masalah diatas adalah : (1) Berne Convention dalam article 8 menyebutkan standar orisinalitas yang tepat harus didasarkan pada kreativitas penulis, standar originalitas lainnya dapat ditentukan dengan beberapa doktrin dan prinsip yakni Sweat of the Brow doctrine (Industrious Collection), Skill, Judgment, and Labour doctrine,Principle of The Idea- Expression Dichotomy, dan Principle of The Independent Creation. Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat beberapa prinsip yang membatasi originalitas karya cipta yakni prinsip independent creations yang menyaratkan sebuah karya haruslah memiliki kreatifitas dan independen, (2) Jika dibandingkan, di Amerika Serikat, unsur originalitas berdasarkan §102 US Copyright Act 1976 suatu karya musik harus memiliki "at least a modicum" kreativitas, dan itu harus menjadi kreasi penulis yang independen, sedangkan pembuktian plagiarisme musik ditentukan dengan similarity and access test. Di Indonesia, dalam menilai tingkat originalitas karya dapat ditentukan dengan prinsip Independent creations dan prinsip Substansial similarity.

Kata Kunci : Originality and Plagiarism, Originalitas dalam hak cipta, Plagiarisme Musik atau Lagu, Originalitas dalam Lagu

348.3
RAI
p

PENGATURAN LARANGAN RESTRIKSI KUANTITATIF DALAM GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE (GATT) TERKAIT SENGKETA NIKEL ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA DI WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) TAHUN 2020

Rihan Alfarino, 1510112045, Program Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Indonesia mempercepat larangan ekspor nikel yang sebelumnya larangan tersebut diberlakukan pada tahun 2022 dan dipercepat pada tahun 2020, Uni Eropa merasa dirugikan atas kebijakan Pemerintah Indonesia, dan akhirnya Indonesia digugat ke dalam WTO dengan Nomor aduan DS592. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan : (1) Pengaturan larangan restriksi kuantitatif dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) terkait sengketa nikel antara Indonesia dan Uni Eropa Tahun 2020, (2) tantangan dan upaya Pemerintah Indonesia menghadapi sengketa nikel dengan Uni Eropa Tahun 2020. Metode penulisan hukum yang penulis gunakan bersifat normatif, dimana penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari masalah diatas adalah : (1) Dalam pelaksanaannya restriksi kuantitatif dapat dilakukan dalam hal untuk mencegah terkurasnya produk-produk esensial di negara pengekspor, untuk melindungi pasar dalam negeri, untuk mengamankan berdasarkan escape clause, dan untuk melindungi neraca pembayaran luar negeri. Kebijakan nikel di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan daya saing jual nikel dalam negeri. Dan tuduhan Uni Eropa terhadap restriksi kuantitatif di Indonesia berbagai tindakannya tidak konsisten dengan perjanjian yang di bahas khususnya pada Pasal XI Angka 1 GATT 1994, (2) Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi sengketa nikel tersebut yaitu Indonesia sudah siap menghadapi gugatan-gugatan oleh Uni Eropa dan Indonesia juga sudah mempersiapkan berkas atau data untuk memicu Indonesia memenangkan sengketa tersebut, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah ditempuh oleh kedua negara baru di tahap konsultasi.

Kata Kunci : Restriksi Kuantitatif, GATT, Sengketa Nikel, Indonesia, Uni Eropa, WTO

346.06
RIK
m

MEKANISME SELEKSI PERANGKAT NAGARI DI NAGARI LADANG PANJANG BARAT KABUPATEN PASAMAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI

Riki Permana, 1410112149, Program Kekhususan Hukum Universitas Andalas, 2019

ABSTRAK

Sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari disebutkan bahwa camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat nagari yang dikonsultasikan oleh wali nagari berdasarkan hasil penetapan tim seleksi perangkat nagari, rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan dapat didukung dengan hasil ujian tertulis atau hasil wawancara. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan seleksi perangkat nagari di Kabupaten Pasaman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, Bagaimana pelaksanaan seleksi Perangkat Nagari di Nagari Ladang Panjang Barat, Kabupaten Pasaman dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan seleksi perangkat nagari di Nagari Ladang Panjang Barat, Kabupaten Pasaman dan upaya mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan sifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menjelaskan mengenai seleksi perangkat nagari di Kabupaten Pasaman Bagaimana Tim sel melakukan seleksi, kewenangan yang dimiliki camat dan wali nagari dalam proses seleksi perangkat nagari. Dalam proses seleksi perangkat nagari dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari Disini penulis melihat kelemahan pada peraturan daerah tersebut berupa kewenangan wali nagari dan camat dalam seleksi perangkat nagari. Dengan adanya peraturan daerah ini penulis menemukan celah adanya indikasi kecurangan yang dapat dilakukan pada proses seleksi dalam perangkat nagari, nilai hasil ujian tertulis dan wawancara Sudirman Efendi lebih tinggi dari pada nilai Toni Aprilando tetapi Toni Aprilando mempunyai hubungan kekeluargaan dengan wali nagari dan camat maka camat dapat merekomendasikan Toni Aprilando yang akan menjadi perangkat nagari atau hasil tertulis dan wawancara adalah keputusan mutlak yang harus disetujui oleh wali nagari dan camat. Ini menimbulkan dua pandangan yaitu yang pertama hasil dari ujian tertulis dan wawancara berpengaruh dalam penerimaan yang kedua hasil dari ujian tertulis dan wawancara tidak berpengaruh dalam penerimaan perangkat nagari tersebut, seharusnya didalam seleksi perangkat nagari tidak diperbolehkan adanya unsur nepotisme.

348.3
RIM
p

PENGATURAN BELT ROAD INITIATIVE OLEH PEMERINTAH CHINA BERDASARKAN TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES (TRIMs) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Rima Rahmawati, 1610111102, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 89 Halaman, 2020

ABSTRAK

Penanaman modal asing atau investasi asing merupakan bentuk lain dari perdagangan Internasional. Penanaman modal asing dapat menimbulkan perbedaan kepentingan antara penanam modal (investor) dengan negara penerima modal (host country). Salah satu regulasi internasional yang mengatur penanaman modal asing adalah Trade Related Investment Measures (TRIMs). TRIMs merupakan salah satu kesepakatan dalam konvensi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Pada tahun 2013, lahirnya gagasan terbaru oleh Presiden China, Xi Jinping dalam pembangunan ekonomi melalui jalur darat dan jalur laut melalui kegiatan penanaman modal asing yaitu Belt Road Initiative (BRI). BRI dianggap memunculkan hambatan-hambatan kegiatan penanaman modal asing yang diindikasikan melanggar prinsip-prinsip fundamental TRIMs: National Treatment yaitu Local Content Requirement dan prinsip Transparant. Oleh karena itu masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah, (1) Bagaimana pengaturan penanaman modal asing (PMA) Belt Road Initiative (BRI) dilihat dari Trade Related Investment (TRIMs), (2) Bagaimana penerapan kebijakan Belt Road Initiative (BRI) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan dapat menyimpulkan bahwa China yang merupakan negara yang tergabung dalam anggota WTO, sebaiknya dalam kebijakan BRI menanamkan prinsip-prinsip di dalam WTO agar tidak menimbulkan kesenjangan dalam pemakaian barang- barang, tenaga ahli dan tenaga kerja yang didatangkan dari China dan kejelasan sistem pembayaran utang. Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung kebijakan BRI yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam perdagangan bebas, memerlukan suatu landasan hukum tersendiri dalam mengatur kebijakan BRI sehingga jelas pelaksanaan dan tidak menimbulkan pelanggaran hukum dalam praktik penanaman modal asing di Indonesia.

Kata kunci: Penanaman Modal Asing, BRI, WTO, TRIMs, Kebijakan

345.08
RIN
p

PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Padang)

Rina Oktavia, 1610112006, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana) 63 halaman Tahun 2020

ABSTRAK

Putusan Pengadilan Negeri Padang yang mengabulkan restitusi pertama kalinya di Sumatera Barat terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual tidak lepas dari peranan jaksa penuntut umum. Hak restitusi merupakan hak yang diberikan kepada anak korban tindak pidana. Hal ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat didalam pasal 71 D ayat (1). Dimana selama ini jaksa dalam banyak hal menghindari atau tidak memasukkan restitusi kedalam tuntutannya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana peranan jaksa penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan? Kedua, apa kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan? Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris). Sifat penelitian ini adalah deskriptif karena dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara lengkap dan jelas. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Pertama, peranan jaksa penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan yaitu tahap penuntutan dimulai dari penuntut umum menerima dan memeriksa berkas perkara dari penyidik dan berkas tersebut dinyatakan lengkap, penuntut umum membuat surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan tanpa adanya permohonan restitusi. Pihak korban yang saat itu dilindungi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat WCC Nurani Perempuan datang ke Kejaksaan setelah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk mengajukan restitusi. Pihak korban tanpa sepengetahuan jaksa penuntut umum menghubungi langsung LPSK untuk mengajukan permohonan restitusi sehingga pengajuan permohonan restitusi ini disampaikan di sidang pemeriksaan. Penuntut umum dengan cukup bukti memasukkan restitusi kedalam tuntutannya. Setelah putusan pengadilan yang inckrach, pelaku tetap tidak mau membayar restitusi tersebut, jaksa penuntut umum dengan usahanya tetap mengupayakan agar restitusi tersebut dibayar dan dipenuhi oleh pelaku. Kedua, kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana persetubuhan yaitu kurangnya kurangnya koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kondisi ekonomi pelaku, tidak adanya pengaturan tentang sanksi apabila tidak membayar restitusi, tidak adanya dukungan dari keluarga pelaku tentang pembayaran restitusi, tidak adanya upaya paksa.

Kata Kunci: Jaksa Penuntut Umum, Restitusi, Anak Korban

346.06
RIS
k

KEBIJAKAN PT. RIOKTA GLOBAL UTAMA TERHADAP RISIKO DALAM LAYANAN PENGIRIMAN BARANG KEPADA KONSUMEN

Ristinatalia Sihite, 1510111011, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 85 Halaman, 2020

ABSTRAK

PT. Riokta Global Utama atau yang dikenal dengan nama brand J&T Express merupakan salah satu perusahaan cabang dari PT. Global Jet Express, yang berlokasi di Sumatera Barat. PT. Riokta Global Utama sebagai pelaku usaha dalam bidang pengangkutan memiliki tanggungjawab terhadap konsumen sebagai pengguna jasa. Hubungan pengangkut dengan konsumen pemakai jasa pengangkutan barang selalu dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dimuat pada blanko pengiriman atau biasa disebut resi. Proses pengiriman barang oleh perusahaan pengangkut bisa menimbulkan berbagai macam risiko. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk pengaturan yang diberikan Pemerintah dalam hubungan pelaku usaha dengan konsumen. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana kebijakan perusahaan PT. Riokta Global Utama terhadap risiko dalam pengiriman barang kepada konsumen ditinjau dari perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan apakah upaya yang dilakukan PT. Riokta Global Utama sebagai pengangkut dalam memenuhi hak konsumen. Untuk menganalisis hal tersebut dilakukan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data ialah studi dokumen, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini adalah kebijakan yang diberikan oleh PT. Riokta Global Utama kepada konsumen yang mengalami risiko keterlambatan dengan memberikan konfirmasi serta permintaan maaf, seterusnya terhadap risiko kehilangan dan kerusakan barang, diberikan ganti rugi yang setara dengan kerugian konsumen, berupa pemberian ganti rugi jumlah nilai barang bagi konsumen berasuransi dan memberikan ganti rugi 10 x ongkos kirim kepada konsumen yang tidak berasuransi. PT. Riokta Global Utama berupaya memenuhi hak konsumen dengan memberikan pelayanan premium dan fasilitas yang dibutuhkan konsumen. Saran terhadap rumusan masalah ini adalah konsumen seharusnya lebih menyadari akan hak dan kewajibannya serta lebih paham terhadap informasi jasa pengangkutan yang digunakan. PT. Riokta Global Utama seharusnya memberikan pelayanan lebih dan mengasuransikan barang milik konsumen secara otomatis sehingga mengurangi terjadinya risiko dan wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang.

Kata Kunci : Risiko, PT. Riokta Global Utama, Konsumen.

342.07
RIV
p

PELAKSANAAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMIIHAN UMUM 2019 DI KOTA PADANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMIIHAN UMUM

Rivaldo Rifiyandrix, 1610113112, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 80 halaman, 2020

ABSTRAK

Pengaturan tentang verifikasi partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni terdapat pada Pasal 173 ayat (1). Frasa ‘yang telah ditetapkan’ pada pasal tersebut mengakibatkan partai politik yang telah lulus verifikasi pemilihan umum sebelumnya dapat menjadi peserta pemilu tanpa harus mengikuti verifikasi ulang. Pasal ini dianggap diskriminatif yang kemudian digugat oleh Partai IDAMAN. Gugatan diterima dan MK mengeluarkan PMK Nomor 53/PUU-XV/2017. Pasal tersebut dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Putusan ini menyebabkan semua partai politik harus melakukan verifikasi pada pemilu 2019. Urgensi verifikasi ulang ini terlihat saat ditemukannya dua parpol yang merupakan partai yang lolos verifikasi pada pemilu sebelumnya. Di Kota Padang, KPU Kota Padang menemukan beberapa kejanggalan berupa anggota fiktif dan keanggotaan ganda. Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini pertama bagaimana pengaturan verifikasi partai politik pada pemilihan umum 2019, dan yang Kedua bagaimana pelaksanaan verifikasi partai politik peserta pemilihan umum 2019 di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan verifikasi partai politik dan mengetahui bagaimana pelaksanaan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019 di Kota Padang. Hasil penelitian pada skripsi ini disimpulkan bahwa pada setiap proses verifikasi terdapat beberapa masalah, yaitu pada verifikasi administrasi keanggotaan KPU Kota Padang menemukan beberapa partai yang tidak memenuhi syarat, terdapat kesalahan data, bukan warga kota padang, keanggotaan ganda, dan berstatus ASN, TNI atau POLRI. Kemudian dalam verifikasi faktual keanggotaan ditemukan keanggotaan ganda, selain itu KPU Kota padang juga menemukan anggota parpol yang tidak mengakui status keanggotaannya, hal ini di tindak lanjuti dengan cara mencoret nama yang bermasalah tersebut. Masalah lainnya yaitu anggota parpol yang alamatnya tidak ditemukan. KPU Kota Padang meminta parpol menghadirkan anggota tersebut ke Kantor KPU Kota Padang, jika tidak hadir maka anggota tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Verifikasi Partai Politik

346.01
RIY
p

PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN BERDASARKAN KEPUTUSAN DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NO. 379 TAHUN 2018 DI KUA KECAMATAN PARIAMAN SELATAN

Riyad Dwi Rahayu, 1510112203, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK Hukum Perdata Murni**,**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan agama dan tata kehidupan masyarakat. Perkawinan diatur secara otentik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Lembaran Negara. Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja. Rumusan masalah adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Pariaman Selatan? 2) Apa faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di kantor urusan agama (KUA) di Kecamatan Pariaman Selatan ? 3) Bagaimana jika salah satu calon mempelai tidak dapat menghadiri bimbingan perkawinan pranikah? Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis,dengan teknik pengumpulan data penarikan populasi, jenis data adalah penelitian lapangan (field research) yang didapat langsung dari objek dengan melakukan observasi dan wawancara, dan penelitian kepustakaan. Berdasarkan penelitian disimpulkan: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah di Kecamatan Pariaman Selatan. (2) Untuk mengetahui Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah di kantor urusan agama (KUA) di Kecamatan Pariaman Selatan. (3) Untuk mengetahui efektifitas bimbingan pranikah dalam mengurangi perceraian di Kecamatan Pariaman Selatan .

Kata Kunci: Pelaksanaan Bimbingan, Perkawinan,Calon Pengantin

341.48
RIZ
h

HAK DAN KEBABASAN ATAS ORIENTASI SEKSUAL DALAM PERPEKTIF DAN BATASAN HAK ASASI MANUSIA

Rizkan Arif, 1510111007, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK V (Hukum Tata Negara) 61 Halaman, 2019

ABSTRAK

Fenomena Orientasi Seksual Menyimpang seperti Homoseksual dan Biseksual akhir-akhir ini mulai mengemuka di Indonesia, mulai dari peristiwa pernikahan sejenis dibeberapa daerah sampai tuntutan pelaku homoseksual dan biseksual yang tergabung suatu kelompok tertentu agar mendapatkan wadah hukum di Indonesia agar perilaku tersebut dilegalkan. Disorientasi seksual itu sendiri bersifat dalam keadaan tertarik kepada orang dari jenis kelamin yang sama (homoseksual) ataupun juga tertarik dengan jenis kelamin pria maupun wanita disebut dengan (biseksual). Penerimaan masyarakat terhadap kelompok berorientasi homoseksual dan biseksual masih kontroversial. Ketika ada laki-laki yang orientasi seksualnya terhadap laki-laki dan perempuan terhadap perempuan atau juga disebut sesama jenis masyarakat menganggap hal tersebut tidak wajar karena sudah jelas dalam aturan agama dan pemerintah yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana hak dan kebebasan atas orientasi seksual dalam perpektif dan batasan hak asasi manusia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hak dan kebebasan atas orientasi seksual dalam perspektif dan batasan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menggunakan jenis data primer, data sekunder, dan data tersier, sumber data didapat penulis dari penelitian kepustakaan, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi. Dari hasil penelitian, hukum Indonesia mengakui bahwa adanya penegakan Hak Asasi Manusia yang disertai pembatasan bahwa setiap orang yang memiliki Hak Asasi Manusia juga harus menghormati Hak Asasi Manusia orang lain, mengormati pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, memenuhi persyaratan moral, etika, tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai agama, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat demokratis.

347.05
RIZ
p

PENYERAHAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN NAGARI DI NAGARI SITUJUAH GADANG, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Rizki Ahmad, 1510112168, Fakultas Hukum, 66 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Manusia membutuhkan jalan dan akan terbantu jika ada jalan pintas untuk menuju lahan tersebut. Negara dapat memperoleh tanah untuk melakukan pembangunan dengan cara pengadaan tanah atau penyerahan tanah secara sukarela. Ketentuan mengenai pengadaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sementara itu ketentuan tentang penyerahan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sendiri. Lebih lanjut pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatur cara pembangunan desa yang berbeda dengan UUPA dan UU Pengadaan Tanah. Salah satu pembangunan jalan di Nagari Situjuah Gadang dilakukan dengan penyerahan tanah berdasarkan Permendagri Pembangunan Desa tersebut. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pembangunan jalan tersebut dengan melihat peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang dibahas adalah : 1) Bagaimana penyerahan tanah untuk pembangunan jalan; dan 2) Apa kendala hukum penyerahan tanah untuk pembangunan jalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini menemukan dan menjelaskan perbedaan antara das sein dan das sollen, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni 1) Penyerahan tanah untuk pembangunan jalan di Nagari Situjuah Gadang, Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan rangkaian dari pembangunan nagari dengan menggunakan APB Nagari dan swadaya masyarakat dalam bentuk tanah yang dilakukan dengan membuat Surat Pernyataan Hibah dan Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi atas Bangunan dan/atau Tanaman dan tidak diikuti pembuatan akta hibah; 2) Kendala hukum dalam penyerahan tanah untuk pembangunan jalan di Nagari Situjuah Gadang, ada perbedaan pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, dan perbedaan pengaturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan 3. Surat Pernyataan Hibah yang ada dalam penyerahan tanah untuk pembangunan jalan di Nagari Situjuah Gadang, tidak diikuti pembuatan akta dapat menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: penyerahan, tanah, pembangunan, jalan, nagari

346.02
RIZ
p

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TBS KELAPA SAWIT ANTARA SUPPLIER DENGAN PT BINA PRATAMA SAKATO JAYA KILIRAN JAO DI KABUPATEN SIJUNJUNG

Rizki Perdana, 1510111116, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 halaman, 2020

ABSTRAK

Buah kelapa sawit atau disebut juga sebagai tandan buah segar (TBS) merupakan hasil dari produksi pertanian kelapa sawit, kemudian buah kelapa sawit tersebut diolah menjadi Crude Palm Oil (Selanjutnya di singkat CPO), dimana hasil dari olahan CPO tersebut besar manfaatnya selain berguna untuk kelangsungan kehidupan masyarakat sehari-hari juga kelangsungan perekonomian di Indonesia. Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang industri pengolahan kelapa sawit yang diolah menjadi CPO adalah PT Bina Pratama Sakato Kiliran Jao yang terletak di kabupaten sijunjung, dan merupakan bagian dari PT. Incasi Raya Grup. Untuk mencukupi kegiatan ekspor tersebut maka produsen Indonesia mensiasati kebutuhan kelapa sawit melalui kerjasama dengan supplier kelapa sawit dalam negeri. Hal ini dikarenakan kurang tercukupi bahan mentah kelapa sawit untuk diolah menjadi barang jadi, dengan alasan tersebut dilakukanlah perjanjian jual beli TBS antara PT (perseroan terbatas) dengan supplier. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara Supplier dengan PT Bina Pratama Sakato Jaya di Kabupaten Sijunjung 2.Bagaimana solusi yang ditempuh para pihak dalam menghadapi wanprestasi.Penelitian bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan, Pada pelaksaanaan perjanjian jual beli antara Supplier dan PT. Bina Pratama Sakato Jaya terjadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penjual yaitu supplier dengan PT. Bina Pratama Sakato Jaya dimana pihak penjual tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Sehingga solusi yang di tempuh oleh para pihak dalam penyelesaian wanprestasi adalah diadakan nya pertemuan dan dilakukan negosiasi antara PT Bina Pratama Sakato Jaya dengan Supplier. Saran Kepada supplier hendaknya mematuhi perjanjian yang telah dibuat, melakukan perjanjian secara tertulis di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris karena apabila terjadi resiko atau wanprestasi salah satu pihak, dapat dipertanggung jawabkan secara hukum formal. Kepada para pihak yang melakukan perjanjian sebaiknya melakukan prestasi dengan itikad baik untuk menghindari persengketaan, dan mencantumkan atau menuliskan kesepakatan baru antara kedua belah pihak didalam perjanjian, sehingga apabila terjadi suatu persengketaan dapat menjadi acuan pembuktian untuk melakukan penyelesaian perselisihan.

341
RON
k

KONSEKUENSI HUKUM DAN RENCANA PERUBAHAN TERHADAP TREATY BETWEEN THE GOVERNMENT AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC INDONESIA ESTABILISHING AN EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE BOUNDARY AND CERTAIN SEABED BOUNDARIES 1997

Rona Fitriati Hasanah, 1610112070, Fak. Hukum Unand, 2020, 100 Halaman, Pembimbing: Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H dan Magdariza, S.H., M.H

ABSTRAK

Delimitasi batas maritim merupakan proses penentuan dan penetapan batas-batas maritim antar negara yang telah diatur dan merupakan perwujudan implementasi UNCLOS 1982. Ratifikasi UNCLOS 1982 oleh Indonesia menjadikan penetapan batas maritim dengan negara tetangga sebagai prioritas utama bagi Indonesia dalam rangka mengimplementasikan Konvensi tersebut. Perth Treaty 1997 adalah perjanjian bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia tentang delimitasi ZEE dan Landas Kontinen di Laut Timor. Pasca ditandatangani pada 14 Maret 1997, Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Perth Treaty 1997 karena merdekanya Timor Leste pada tahun 2002 menyebabkan perubahan fundamental pada objek perjanjian sehingga perlu dilakukan perubahan untuk menghindari perselisihan dan menciptakan kepastian hukum mengenai batas maritim kedua negara. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didukung dengan metoda penelitian empiris. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap Perth Treaty 1997 yang belum diratifikasi menurut Vienna Contvention 1969? 2. Bagaimana konsekuensi terhadap rencana perubahan Perth Treaty 1997 menurut UNCLOS 1982? Hasil penelitian dan pembahasan menemukan bahwa: 1. Menurut Vienna Convention 1969, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dapat membuat perjanjian baru dengan memutuskan instrumen status perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 59 ayat 1 (a) Vienna Convention 1969. 2. Menurut UNCLOS 1982, Perth Treaty 1997 merugikan Indonesia karena 4 (empat) hal, yaitu delimitasi landas kontinen tidak equitable, pendekatan natural prolongation tidak relevan, penetapan landas kontinen Australia lebih dari 200 mil menyalahi ketentuan Pasal 76 ayat 8 UNCLOS 1982, dan adanya perubahan fundamental pada objek perjanjian sehingga perlu dinegosiasikan ulang.

Kata Kunci: Konsekuensi Hukum, Perubahan, Treaty, Perth Treaty 1997.

348.3
ROV
k

KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Rovaldo Vara Berlin, 1610112064, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 80 hlm, 2020

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK adalah: “Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Namun dengan adanya perubahan undang-undang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen menjadi rancu atau tidak jelas. Oleh karena itu maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut. Dalam tulisan ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang didasarkan pada buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan yang berkaitan langsung dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan dijabarkan mengenai, pertama, bagaimana pengaruh kewenangan KPK terhadap kedudukannya sebagai lembaga negara independen? dan kedua, apa yang menyebabkan KPK dikategorikan ke dalam kekuasaan eksekutif? Hasil dari penelitian ini yaitu, pertama, terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan teori lembaga independen dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, seperti adanya intervensi pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, keberadaan Dewan Pengawas, serta status KPK dalam kewenangannya melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dimana hal-hal tersebut tidak sesuai dengan teori lembaga independen yang sesuai dengan pendapat para ahli. Kedua, bahwa pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 KPK diletakkan di dalam rumpun kekuasaan eksekutif dimana hal terse but sangat menyimpang dari tujuan awal pembentukan KPK sebagai lembaga negara independent.

341.48
ROY
p

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRES KOTA PADANG

Royan Hadyantama, 1610111089, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020, 86 halaman

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Banyaknya terjadi kasus kecelakaan oleh anak dan melihat begitu pentingnya perlindungan hukum terhadap anak agar selama menjalani proses peradilan anak tidak merasa terancam, tertekan jiwa dan mentalnya yang mana hal tersebut berdampak pada tumbuh kembang anak. Karena anak merupakan cikal bakal generasi penerus bangsa. Berdasarkan alasan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang padaa tahap penyidikan di Polres Kota Padang? Kedua, apa saja kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang pada tahap penyidikan di Polres Kota Padang? Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: Pertama, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang diantaranya berupa anak mendapat pendampingan penasihat hukum dan petugas BAPAS, didampingi oleh orang tua/ wali yang dipercaya oleh anak, dipisahkan dari orang dewasa, serta bebas dari pertanyaan yang menjerat dan memberikan keterangan tanpa tekanan. Kedua, kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya orang adalah terbatasnya jumlah penyidik anak, adanya anggapan bahwa anak harus dihukum setimpal layaknya orang dewasa sehingga sulit memulai proses diversi, dan identitas anak yang masih dipublikasikan oleh media, serta masa tahanan anak yang singkat sehingga ada beberapa hak yang tidak bisa diberikan kepada anak.

Kata Kunci : Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang, Anak Sebagai Pelaku, Perlindungan Hukum, Penyidikan.

341
ROZ
p

PENGATURAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) TERHADAP ORGANISME HASIL MODIFIKASI GENETIK DALAM HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN HUKUM LINGKUNGAN NASIONAL INDONESIA

Roza Gusra, 1310111219, Fakultas Hukum Unand, Hukum Internasional, 2020, 76 halaman

ABSTRAK

Prinsip Kehati-hatian salah satu prinsip dalam Deklarasi Rio1992. Dalam penerapannya, prinsip ini meminta kepada negara-negara untuk tidak menjadikan alasan ketidakpastian ilmiah sebagai alasan untuk tidak melakukan pengaturan. Organisme Hasil Modifikasi Genetik (OHMG) adalah organisme yang dihasilkan dari teknologi rekayasa genetika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Prinsip kehati-hatian terhadap OHMG dalam Hukum Lingkungan Internasional dan Hukum Lingkungan Nasional Indonesia. Metode Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif yang bersifat deskriptif analistis. Berdasarkan penelitian, Pengaturan Prinsip kehati-hatian terhadap OHMG dalam Hukum Lingkungan Internasional diatur dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992 (Convention on Biological Diversity / CBD) dan Protokol Cartagena. Dalam CBD Pengaturan Prinsip kehati-hatian masih bersifat umum dan belum menjelaskan bagaimana prosedur prinsip kehati-hatian tersebut dilaksanakan oleh negara-negara. Protokol Cartagena telah mendeskripsikan model pengaturan prinsip kehati- hatian terhadap OHMG dalam hukum nasional. Protokol Cartagena mendemonstrasikan langkah-langkah berupa Prosedur Persetujuan Berdasarkan Informasi Dini, Kajian Resiko, Manajemen Resiko, dan Partisipasi Publik sebagai panduan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Di Indonesia, pengaturan Prinsip Kehati-hatian secara umum diatur dalam Pasal 2 f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Sedangkan Pengaturan khusus prinsip kehati-hatian terhadap OHMG diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika. Dalam implementasi prinsip kehati-hatian, juga didukung oleh lembaga-lembaga yang telah dibentuk indonesia sesuai dengan amanat Protokol Cartagena. Penerapan prinsip Kehati-hatian terhadap OHMG bukan bermaksud untuk menghambat pengembangan teknologi, tetapi untuk memastikan bahwa dalam hal pengembangan suatu bioteknologi diperlukan suatu upaya yang mengatur apabila terdapat kapasitas berbahaya dalam penerapannya.

Kata kunci : Prinsip Kehati-hatian, Precautionary Principle, Bioteknologi, Organisme Hasil Modifikasi Genetik, Hukum Lingkungan Internasional, Hukum Lingkungan Nasional Indonesia

345
RIY
k

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA DI PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT

Riyan Hidayat, 1820112050, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 205 halaman, 2020

ABSTRAK

Menurut undang-undang secara prinsip Anak tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Meski demikian, jika dilihat dalam ketentuan UU SPPA dan UU Perlindungan Anak tidak ada satu ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan khusus terhadap kekuatan hukum dari keterangan Anak saksi atau Anak korban tersebut. Mengacu kepada Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Dalam tindak pidana tersebut, biasanya tidak ada saksi yang melihat dan mendengar sendiri peristiwa pidana yang dilakukan Pelaku kejahatan. Melainkan, hanya ada Anak (belum cakap hukum) sebagai saksi yang mengalami tindak pidana tersebut. Namun, sering kali kesaksian Anak tersebut hanya digunakan sebagai petunjuk saja atau hanya digunakan untuk memperkuat keyakinan Hakim karena keterangan yang diberikan Anak dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu keterangan saksi menurut KUHAP. Berkaitan dengan hal tersebut kita dapat melihat dan menganalisis mengenai penilaian hakim berkaitan dengan kekuatan pembuktian keterangan Anak Korban dalam tindak pidana asusila melalui putusan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim terkait keterangan saksi Anak korban dalam memutuskan perkara tindak pidana asusila di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat?; 2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian saksi Anak korban dalam perkara tindak pidana asusila di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan dara primer dan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Dalam pertimbangan hakim terhadap penyelesaian tindak pidana asusila terhadap anak diketahui bahwa hakim memberikan putusan atas dasar pertimbangan yuridis dengan pendekatan terlebih dahulu pada keyakinan hakim, namun juga ada hakim yang dalam pertimbangannya berfokus hanya kepada aturan mengenai dua alat bukti dalam KUHAP dan tidak menilai secara komprehensif persesuaian alat bukti lainnya sebagai suatu pertimbangan hukum hakim. 2. Kekuatan pembuktian keterangan saksi anak korban dalam tindak pidana asusila mempunyai kekuatan hukum yang beragam. Pertama didasarkan atas dapat tidaknya seorang Anak Korban disumpah di pengadilan, sehingga keterangan Anak Korban diakui memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dalam hal Anak Korban dapat disumpah dalam memberikan keterangan.

344.06
ROB
k

KEPASTIAN HUKUM PENYEDIAAN JASA PEKERJA SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN DAN IMPLEMENTASINYA DI PT. SEMEN PADANG

ROBIE BRILLIANDO SUKANDA, 1720123022, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2020

ABSTRAK

Persaingan dalam era globalisasi dunia usaha sangat ketat saat ini. Atas dasar itu, banyak perusahaan berusaha meningkatkan kinerjanya dengan mengetatkan biaya poduksi. Untuk itu perusahaan berupaya fokus menangani pekerjaan yang menjadi bisnis inti (core business), sedangkan pekerjaan penunjang diserahkan kepada pihak lain. Penyerahan pekerjaan kepada pihak lain tersebut dikenal dengan istilah alih daya (outsourcing). PT Semen Padang merupakan perusahaan yang mempekerjakan jasa pekerja outsourcing. PT Semen Padang memiliki 4,256 karyawan yang terdiri dari 1,297 karyawan organik dan pekerja outsourcing sebanyak 2,959 orang. Perusahaan ini dapat menjadi contoh untuk menilai pelaksanaan perjanjian penyediaan jasa pekerja untuk menguji kepastian hukum penyediaan jasa pekerja sebagai wujud perlindungan terhadap hak-hak tenaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan penyediaan jasa pekerja di PT. Semen Padang dengan hukum yang berlaku, untuk meneliti pemenuhan hak-hak pekerja dalam pelaksanaan penyediaan jasa pekerja di PT. Semen Padang; dan untuk mengungkapkan konsekuensi negatif dan positif penerapan penyediaan jasa pekerja terhadap hak-hak tenaga kerja di PT. Semen Padang. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan penyediaan jasa pekerja di PT. Semen Padang masih belum memiliki kesesuaian dengan hukum yang berlaku yang diakibatkan oleh tidak adanya kepastian hukum terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan penyediaan jasa pekerja; (2) Pemenuhan terhadap hak-hak pekerja dalam penyediaan jasa pekerja di PT Semen Padang terlaksana cukup baik dimana hal ini dapat dibuktikan dengan perlindungan hukum kepada pekerja dengan penetapan struktur nilai kontrak tenaga kerja outsourcing dengan tingkat kebahagiaan pekerja outsourcing diatas 70% dan PT. Semen Padang dapat menambah upaya perlindungan terhadap hak-hak pekerja dengan mempersyaratkan Perjanjian Kerja antara Penyedia Jasa Pekerja dengan Pekerja harus dilegalisasi di hadapan Notaris; dan (3) Penerapan penyediaan jasa pekerja terhadap hak-hak pekerja di PT. Semen Padang menimbulkan konsekuensi negatif berupa kecemburuan sosial antara para pekerja dan konsekuensi positif berupa efisiensi biaya.

Kata kunci : Penyediaan Jasa Pekerja, Perlindungan Hak, dan Ketenagakerjaan.

343.09
SAD
p

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DISEBABKAN OLEH PERTAMBANGAN EMAS DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Saddam Kardova, 1610113116, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2020, 63 halaman

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia negara yang diberi anugerah oleh Yang Maha Kuasa kaya Sumber Daya Alam, salah satunya pertambangan. Di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau terdapat beberapa pertambangan emas yang tidak menggunakan izin yang mana telah mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Hidup. Persoalannya, seluruh pertambangan emas dimaksud tidak satupun yang memiliki izin. Sehingga tidak terkendalinya kerusakan lingkungan hidup sekitar area tambang. Faktor utama dari pelaku karena alasan ekonomi. Padahal, dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menetapkan bahwa ”setiap orang berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu yang menjadipersoalan dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimana Kerusakan Lingkungan Hidup yang disebabkan tambang emas di Kabupaten Kuantan Singingi? 2) Apa Upaya Dinas Linkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam penanggulangan kerusakan yang di sebabkan tambang emas di Kabupaten Kuantan Singingi? Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yang bersifat deskriptif, menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder, sumber data didapatkan oleh penulis dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertambangan emas yang tidak memiliki izin sangat meresahkan yang berakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Upaya penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup yaitu berkodinasi dengan dinas ESDM Prov Riau untuk permasalahan kerusakan lingkungan, serta dalam upaya memperbaiki kerusakan yang disebabkan pertambangan emas, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya memperbaiki seperti rehabilatasi lahan bekas tambang, menanam bekas area tambang dengan tumbuhan dan mengelola lahan bekas tambang sebagai kolam ikan.

Kata Kunci: Penanggulangan, kerusakan dan Tambang Emas.

346
SAL
a

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP HAK ASUH ANAK PADA PERKARA PERDATA NO.799/Pdt.G/2019/PA.Pdg.

Salma Mullina, 1610113019, Hukum Perdata dan Islam, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2020

ABSTRAK

Banyaknya kasus perceraian yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama, tentunya tidak luput dari peranan hakim dalam memutus perkara. Salah satu masalah yang diselesaikan oleh pengadilan tersebut adalah mengenai hak asuh anak. Tentunya seorang Ibu menginginkan hak asuh anak jatuh ketangannya, namun disisi lain seorang Bapak juga menginginkan hak tersebut jatuh ke tangannya. Rumusan Masalah yang timbul yaitu: 1) Apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap hak asuh anak dalam kasus perceraian? 2) Bagaimana dampak putusan pengadilan terhadap anak yang hak asuhnya jatuh kepada ayah? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, kemudan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil 1) Dalam putusan perkara perdata nomor 799/Pdt.G/2019/PA.Pdg. Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang menjatuhkan Hak Asuh anak kepada Ayah dikarenakan Ibu tidak bisa diberi amanah untuk mengasuh anak dan telah meninggalkan anak yang masih kecil berumur kurang dari 2 tahun, oleh karena itu hakim memutuskan perlindungan sang anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpastisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya 2) Dampak yang ditimbulkan dari perceraian adalah kurangnya kasih sayang yang dirasakan anak, menjadi tidak percaya diri, mudah terhasut oleh hal-hal yang negatif, sehingga dapat memicu tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Kata Kunci : Hak Asuh Anak, Pertimbangan Hakim

342.07
SAN
p

PENERAPAN ASAS EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman)

Sania Monica, 1510111137, Fakultas Hukum, 2020, Halaman 56

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) harus berjalan mandiri, jujur, adil, kepastian hukum dan juga mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Apabila pilkada tidak dibuat lebih efektif dan efisien, dikhawatirkan sumber daya pemerintah lebih banyak terkuras membiayai prosedur demokrasi semata dan melupakan substansi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam tulisan ini yang menjadi masalah adalah: 1. Bagaimanakah penerapan asas efektif dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pariaman tahun 2018 ? 2. Bagaimanakah penerapan asas efisien dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pariaman tahun 2018 ?. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini ialah penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1. Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelengaraan pilkada Kota Pariaman tahun 2018 jika dibandingan dengan pilkada tahun 2013. Pada pilkada tahun 2013 tingkat partisipasi masyarakat berada pada angka 68%, sedangkan pada tahun 2018 tingkat partisipasi masyarakat naik menjadi 74%. Adapun pengaturan tentang sistem rekrutmen calon kepala daerah oleh partai politik yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Pasal 42). 2. Pada pilkada Kota Pariaman tahun 2018 adanya penciutan dana sebesar 2 Milyar, dari Rp.16.170.244.550 menjadi Rp.14.337.604.550. KPU menyatakan pengeluaran dana terbesar berada pada pengeluaran honor wajib bayar tunai panitia penyelenggara pilkada. Ketua KPU Kota Pariaman menyatakan bahwa tingkat efisiensi suatu pilkada tidak dapat diukur, karena dana yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pilkada bisa berubah seketika sesuai dengan kebutuhan pilkada tersebut, apakah dana itu berkurang ataupun bertambah.

Kata Kunci: Pilkada, Asas Efektif, Asas Efisien

341
SAR
p

PERLINDUNGAN TRADITIONAL KNOWLEDGE BIOFARMAKA DARI TINDAKAN BIOPIRACY DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

Sarifa Haura Syadza, 1610112001, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VI (Hukum Internasional) 110 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah salah satunya yaitu traditional knowledge biofarmaka sehingga rentan untuk dilakukan tindakan biopiracy. Perusahaan asing yang didominasi oleh Negara maju cenderung melindungi invensinya dan tunduk kepada ketentuan TRIPs tanpa memberikan benefit sharing kepada masyarakat adat di Indonesia. Negara berkembang justru tunduk kepada ketentuan yang terdapat didalam Convention on Biological Diversity dan Nagoya Protocol. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan bersifat normatif yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sekunder, yang merupakan bahan hokum primer, sekunder dan tersier melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan media elektronik. Dalam tulisan ini, penulis membahas mengenai pengaturan perlindungan terhadap traditional knowledge biofarmaka dari tindakan biopiracy di dalam Hukum Lingkungan Internasional, pengaturan hukum nasional tentang akses negara asing atau badan hukum asing untuk memanfaatkan atau mengkomersialisasikan traditional knowledge, serta tindakan Indonesia apabila terjadi pelanggaran oleh badan hokum asing. Aturan hukum nasional mengenai perlindungan sumber daya alam terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pencantuman asal-usul sumber invensi diwajibkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten untuk melindungi traditional knowledge biofarmaka di Indonesia, bahkan pemerintah telah mulai membentuk draf Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional, serta penerapan benefit sharing terdapat di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya.

Kata kunci: Traditional Knowledge Biofarmaka, Biopiracy, Hukum Lingkungan Internasional

345
SAT
m

MODEL PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (Studi Di Pengadilan Negeri Padang)

Satria Adi Saputra Yunior, 1510112071, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 71 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat. Tindak pidana pencurian ringan adalah salah satu jenis dari tindak pidana pencurian yang diatur pada Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Model penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam kasus tindak pidana pencurian ringan di Pengadilan Negeri Padang? 2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencurian ringan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan (library research). Dari hasil penelitian , 1. Model penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam kasus tindak pidana pencurian ringan di Pengadilan Negeri Padang, menunjukan kecendrungan hakim dalam memutus pelaku dengan pidana kurungan atau penjara, hal ini tentu kurang efektif jika ditinjau dari tujuan pemidanaan sendiri bahwa selain dari memberikan efek jera (teori absolut), pemidanaan sendiri juga bertujuan terhadap diri pelaku sendiri agar dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari. 2. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencurian ringan berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa. Dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencurian ringan seharusnya hakim lebih memerhatikan dan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mengefektifkan kembali pidana denda.

Kata Kunci : Pencurian, Tindak Pidana Pencurian Ringan, Model

346.02
SEP
p

PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL TERHADAP RESIKO TERJADINYA KERUSAKAN PADA CV. ANADA TOUR AND TRAVEL DI KOTA SOLOK

Septriza, 1610111081, Hukum Perdata Murni, Fakultas Hukum Universitas Andalas,67 Halaman, Tahun 2020, Pembimbing : Linda Elmis, S.H, M.H.,dan H. Syahrial Razak, S.H, M.H.

ABSTRAK

Pada saat ini perkembangan dan pertumbuhan zaman membuat banyak perubahan. Perkembangan kendaraan bermotor salah satu bentuk perkembangan zaman. Seiring dengan beragam dan banyaknya kendaraan bermotor yang beredar menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan risiko yang harus dihadapi oleh manusia hal tersebut dapat menyebabkan suatu kerugian. Perjanjian sewa- menyewa mobil sering digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dalam pelaksanaannya sering menimbulkan suatu permasalahan, dimana penyewa melakukan wanprestasi terhadap isi surat perjanjian sewa-menyewa yang telah disepakati antara pihak yang menyewakan mobil dengan pihak penyewa. Adapun permasalahan berkaitan dalam proses perjanjian sewa-penyewa adalah bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian sewa menyewa antara CV. Ananda Tour And Travel di Kota Solok dengan pemakai jasa dan Apa bentuk ganti kerugian antara pelaku usaha dan penyewa apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan rental. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan penulis analisa dengan mempergunakan analisa kualitatif. Dengan dilakukan penelitian telah berhasil menjawab permasalahan yang dikemukakan diatas, pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak kreditur (yang menyewakan) dan pihak debitur (pihak penyewa), setelah kata sepakat antara kedua belah pihak, maka perjanjian akan ditanda tangani oleh penyewa dituangkan dalam suatu surat perjanjian yang disepakati. Hak dan kewajiban para pihak sewa menyewa pada CV. Ananda Tour And Travel berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata. Perjanjian sewa menyewa pada CV. Ananda Tour And Travel dijalankan berdasarkan Asas Pacta sunt servanda bahwa perjanjian yang dibuat secara sah maka mengikat kepada para pihak untuk memenuhinya. Pada pelaksanaan sewa menyewa mobil, permasalahan yang terjadi adanya kerusakan yang terjadi pada mobil oleh penyewa dikarenakan kecelakaan yang terjadi karena keadaan memaksa. Upaya yang ditempuh untuk penyelasaiannya oleh pemilik rental mobil untuk menyelesaikan yang diakibatkan oleh penyewa pada perjanjian sewa-menyewa mobil melalui upaya penyelasaian diluar pengadilan yaitu negosiasi.

Kata kunci : Perjanjian sewa-menyewa, Wanprestasi, ganti kerugian, Asas Pacta Sunt Servanda

345
SHA
i

IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TATA TERTIB DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB SOLOK)

Shania Intan De Hutri, 1610111037, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hukum Pidana, 73 Halaman, Tahun 2020.

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Mengenai pengaturan tata tertib, Lembaga Pemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam praktiknya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok sudah melaksanakan aturan tersebut namun belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, terjadinya over kapasitas yang menimbulkan beberapa masalah seperti sulitnya petugas dalam mengawasi perilaku narapidana dan jumlah narapidana yang tidak seimbang dengan jumlah petugas lapas. Selain itu kurangnya kesadaran narapidana dalam mematuhi aturan tata tertib dalam Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan alasan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Pertama, bagaimana bentuk pelanggaran tata tertib yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok. Kedua, bagaimana pelaksanaan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok. Ketiga, apa kendala yang dihadapai petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggulangi pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana dan upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggulangi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan. Pertama, bentuk pelanggaran di Lembaga Pemasyarkatan Klas IIB Solok dibagi menjadi tiga kelompok yaitu pelanggaran tata tertib tingkat ringan, sedang, dan berat. Kedua, penerapan hukaman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tata tertib di Lembaga Pemasyarkatan Klas IIB Solok berupa hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat. Namun dalam pelaksanaannya kurang terlaksana dengan baik. Ketiga, kendala yang dihadapi petugas dalam mengatasi pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarkatan Klas IIB Solok yaitu jumlah petugas penjagaan yang sedikit, kurangnya sarana dan prasarana, narapidana yang tidak mau mentaati aturan, sedangkan upaya dalam menanggulangi kendala yaitu melakukan sosialisasi kepada narapidana, menciptakan suasana kekeluargaan antara petugas dan narapidana, melakukan razia kamar sel dan memindahkan narapidana ke lapas lain yang ada di Sumatera Barat.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Pelanggaran, Tata tertib, Hukuman Disiplin.

347.05
SIT
a

AKIBAT HUKUM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO.101 KELURAHAN BANDAR BUAT TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG DALAM SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI PADA PERKARA PERDATA NO.89/B/K/Pdt.G/1983/PN.Pdg Jo No.159/G/B/K/1985 PT.Pdg.

Siti Lauriyanti Imran, 1610113091, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 97 halaman, 2020

ABSTRAK

Pengertian pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan cacat hukum sertipikat hak milik No.101 Kelurahan Bandar Buat yang objek tanahnya sedang terdaftar sebagai Perkara Perdata NO.89/B/K/Pdt.G/1983 PN.Pdg Jo No.159/G/B/K/1985 PT.Pdg serta untuk mengetahui akibat hokum dan kerugian yang timbul dalam penerbitan sertipikat hak milik No.101 Kelurahan Bandar Buat yang objek tanahnya sedang terdaftar sebagai Perkara Perdata NO.89/B/K/Pdt.G/1983 PN.Pdg Jo No.159/G/B/K/1985 PT.Pdg. Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian tentang akibat hukum penerbitan sertipikat hak milik No.101 Kelurahan Bandar Buat terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Padang dalam sengketa tanah pada perkara perdata NO.89/B/K/Pdt.G/1983 PN.Pdg Jo No.159/G/B/K/1985 PT.Pdg yaitu karena rekayasa antara Agus Mudar bersama Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang maka prosedur penerbitan sertipikat yang cacat hukum tanpa cek fisik dan cek yuridis, apalagi obyek yang diajukan penerbitan sertipikat sedang dalam proses berperkara di Pengadilan Tinggi serta akibat hukum dan kerugian yang timbul dalam penerbitan sertipikat hak milik No.101 Kelurahan Bandar Buat adalah terjadinya jual beli tanah dan proses balik nama setipikat secara melawan hukum serta kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Diharapkan dalam penerbitan sertipikat seharusnya dilakukan tindakan pengecekan data secara fisik dan yuridis terhadap tanah secara benar tanpa adanya rekayasa sehingga tidak merugikan pihak lain yang bersangkutan.

346
SON
p

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS PENERIMA PERALIHAN PROTOKOL NOTARIS DI KOTA PADANG

Sony Syaputra, 1610113016, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60 halaman, 2020

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Sebagai pejabat umum notaris dituntut untuk bertanggung jawab atas akta otentik yang dibuatnya. Tindak lanjut dalam menjalankan tugas dan jabatan notaris salah satunya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya dalam protokol notaris. Dalam hal notaris telah berakhir jabatannya, protokol notaris dapat dialihkan kepada notaris lain agar tetap terjaganya keotentikan minuta akta yang ada pada protokol notaris. Namun peralihan protokol notaris di Kota Padang apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Apakah pelaksanaan peralihan protokol notaris di Kota Padang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? (2) Bagaimana pertanggungjawaban notaris penerima peralihan protokol notaris?. Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan data primer sebagai data utama berupa data yang diambil langsung dilapangan melalui wawancara semi terstruktur dengan beberapa notaris di Kota Padang, sedangkan data sekunder berupa data yang penulis peroleh dari bahan kepustakaan. Kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah notaris di Kota Padang, dengan sampel yaitu Notaris Hamrina Hamid, S.H., Notaris Desrizal Idrus Hakimi, S.H., dan Notaris Husna Prima Ramadhani, S.H. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di kantor notaris yang menjadi sampel penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Bahwa peralihan protokol notaris telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (2) Notaris penerima peralihan protokol notaris telah bertanggung jawab penuh dalam menjaga protokol notaris yang telah dialihkan kepadanya. Dalam hal terjadi permasalahan terkait protokol notaris yang telah dialihkan kepadanya, notaris penerima peralihan protokol notaris berhak mengambil sikap dengan tetap menjaga kerahasiaan akta tersebut seusai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Notaris, Protokol Notaris, Peralihan.

343.09
STE
p

PENGGUNAAN SUMBER AIR BATANG TABIK SEBAGAI HARTA KEKAYAAN NAGARI DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Stefano Dwinanta, 1610112024, Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam Fakultas Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Kembalinya terbentuk Sistem Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, menyebabkan kewenangan mengatur penggunaan ulayat nagari beralih dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) kepada Pemerintahan Nagari. Secara yuridis, berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Pemerintah Nagari memliki kewenangan sepenuhnya dalam mengatur penggunaan sumber air yang merupakan ulayat nagari. Akan tetapi, Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU Sumber Daya Air), kewenangan pengelolaan sumber daya air bukanlah kewenangan Pemerintah Desa/Nagari sepenuhnya. Isu utama penelitian ini, apakah isi kewenangan Pemerintahan Nagari dalam mengatur penggunaan sumber air Batang Tabik. Penelitian ini memfokuskan telah 3 (tiga) permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana kewenangan Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang dalam penggunaan Sumber Air Batang Tabik?; (2) Bagaimana penggunaan Sumber Air Batang Tabik Di Nagari Sungai Kamuyang?; (3) Bagaimana Hubungan kelembagaan antara Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang dengan KAN dalam Penggunaan Sumber Air Batang Tabik sebagai Harta Kekayaan Nagari?. Jawaban diatas diperoleh dengan penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Empiris dan bersifat Deskriptif. Terjadi benturan antara UU Desa dengan UU Sumber Daya Air dalam pemberian kewenangan Pemerintah Nagari dalam mengelola dan mengatur penggunaan Sumber Air Batang tabik. Air Batang tabik dimanfaatkan oleh masyarakat nagari, pemandian wisata alam, dan suplai air PDAM Kota Payakumbuh. Pemerintah Nagari selaku menjalankan pengelolaan yang diawasi oleh Badan Musyawarah Nagari (Bamus). Hasil keuntungan menjadi Pendapatan Asli Nagari (PAN) yang dituangkan ke APBNag. Konflik KAN dengan Pemerintah Nagari persoalan perebutan hak untuk mengelola Sumber Air Batang Tabik hanya masa lalu, saat ini hubungan tanpa ada masalah, konflik tersebut hanya masa lalu.

Kata kunci : Ulayat Nagari, Sumber Daya Air, Kewenangan, Water Resource.

342
SUC
p

PENGAWASAN IZIN TRAYEK TRAVEL ANTAR JEMPUT ANTAR PROVINSIRUTE PEKANBARU – PADANG

Suci Ananda Putri, 161011008, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, lalu lintas dan angkutan jalan berperan penting sebagai bagian dari sistem transportasi nasional. Untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan pemerintah menerbitkan UU No. 22/2009. Di Kota Pekanbaru terdapat beberapa angkutan travel melakukan pelanggaran yaitu tidak memenuhi izin trayek untuk rute Pekanbaru – Padang. Padahal, dalam Pasal 26 Perda Kota Pekanbaru No. 2/2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa "perizinan angkutan umum terdiri dari izin usaha angkutan, izin trayek, dan izin operasi". Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimana Pengawasan Izin Trayek Travel Antar Jemput Antar Provinsi yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap Travel Rute Pekanbaru – Padang? 2) Bagaimana Tindak Lanjut Pengawasan Izin Trayek Travel Antar Jemput Antar Provinsi yang dilakukan Dinas Perhubungan Terhadap Travel Rute Pekanbaru – Padang? Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder, sumber data didapatkan oleh penulis dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah melakukan razia lapangan dan bekerjasama dengan pihak Satlantas Kepolisian dan pelaksanaan pengawasannya belum optimal. Dan Dinas Perhubungan Provinsi Riau juga melakukan tindak lanjut dari pengawasan yaitu dengan memberi peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan pencabutan izin.

Kata Kunci: Pengawasan, Izin, dan Travel.

348.3
TED
d

2 IMPLEMENTASI HAK-HAK TAHANAN YANG DITAHAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PADANG PANJANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang)

Teddy Fajri Khaer, 1510112112, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana), 2020

ABSTRAK

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia, dimana manusia juga diberikan karunia akal pikiran dan hati nurani. Indonesia sebagai Negara hukum wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga Negara dari kemungkinan adanya pelanggaran dalam penggunaan kewenangan tersebut.dalam rangka perlindungan hak asasi manusia, dilingkungan peradilan dikenal asas praduga tak bersalah yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang masih ada hak-hak tahanan yang tidak terpenuhi sepenuhnya oleh aparat penegak hukum.permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai hak tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kendala yang dihadapi oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang dalam implementasi hak tahanan yang di tahan dalam Rutan tersebut. Metode yang diguanakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada dasarnya semua hak-hak tahanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi tanggung jawab dari petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang sudah terpenuhi, akan tetapi pemenuhan hak-hak tahanan tersebut belum dapat diimplementasikan secara sempurna, hal ini disebabkan karena masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang .Kendala yang dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang dalam pelaksanaan dan penerapan hak tahanan yaitu anggaran keuangan Rumah Tahanan Negara untuk memenuhi hak- hak Tahanan, sehingga petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Panjang untuk membagi anggaran seperti pemenuhan hak makanan untuk para tahanan, kemudian anggaran untuk mendatangkan rohaniawan untuk tahanan selain islam. Seharusnya dilakukan pengawasan terhadap proses implementasi hak-hak tahanan dan pengaturan yang jelas terhadap kewajiban RUTAN untuk memberitahukan hak-hak tahanan dan seharusnya pemerintah menambahkan kapasitas Rutan dan LAPAS agar hak untuk hidup layak tahanan sebagai manusia tidak terlanggar dan seharusnya pemerintah menambah anggaran keuangan kepada Rumah Tahanan agar implementasi hak-hak tahanan terpenuhi sepenuhnya.

Kata Kunci: Hak-Hak Tahanan, Rumah Tahanan Negara

343
TEG
p

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP AKSI UNJUK RASA YANG ANARKIS (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG)

Tegar Putra Yumanda, 1610112043, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Sejatinya unjuk rasa haruslah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, tetapi dalam pelaksanaannya unjuk rasa tidaklah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti aksi unjuk rasa yang anarkis terjadi pada tanggal 25 September 2019 di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Pertama, Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Polresta Padang. Kedua, Apa saja kendala dalam penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Polresta Padang. Ketiga, Bagaimana upaya kepolisian dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Polresta Padang. Metode penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang membandingkan peraturan yang berlaku dengan fakta yang terjadi dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis oleh Polresta padang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dengan berpedoman kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentag Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dengan pelaksanaan yang sesuai dengan Prosedur Tetap 1/X/2010 meskipun ada beberapa yang berbeda. Kendala penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis oleh Polresta Padang, diantaranya yaitu kurangnya kesadaran hukum, kurangnya pemahaman tentang tata cara berunjuk rasa yang benar, kurangnya koordinasi, kekhawatiran kepolisian dalam mengambil tindakan, kurangnya profesionalisme kepolisian dan jumlah anggota kepolisian yang tidak seimbang dengan pengunjuk rasa. Upaya kepolisian dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis di wilayah hukum Polresta Padang, diantaranya yaitu melakukan penyuluhan, memaksimalkan rapat koordinasi, meningkatkan profesionalitas kepolisian dan evaluasi.

Kata Kunci: anarkis, penegakan hukum, kepolisian

345
TEG
u

UPAYA UNIT RESERSE KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLSEK PAUH (\

Tegar Rahman Bastanna, 151011072, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2019

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, yang disingkat P4GN, untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat. Pelaksanaan tugas polisi dalam pencegahan baik itu tindak pidana narkotika maupun tindak pidana lainnya diutamanakn melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian. Di Kecamatan Pauh, terhitung semenjak Bulan Januari sampai November 2019 sudah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebanyak 12 kasus. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 1)Bagaimanakah upaya Unit Reskrim Polsek Pauh dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polsek Pauh ? 2)Apakah Kendala-kendala Unit Reskrim Polsek Pauh dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika? 3)Bagaimana upaya-upaya Unit Reskrim Pauh dalam mengaatasi kendala-kendala yang dihadapi terhadap penyalahgunaan narkotika? Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, sifat penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di peroleh hasil yakni : 1. upaya unit reskrim dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di polsek pauh yaitu upaya pre-emtif berupa memberikan himbauan berbentuk slogan atau poster, upaya preventif berupa penyuluhan hukum , lalu upaya terakhir yaitu upaya represif berupa penyelidikan dan penyidikan. 2. Kendala-kendala Unit Reskrim Polsek Pauh dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yaitu : a. kurangnya partisipasi dari masyarakat, b. Karena biaya atau anggaran, c. Terbatasnya jumlah personil yang khusus di bidang narkoba, d. Sarana dan prasarana terbatas. 3. Upaya Unit Reskrim Polsek Pauh dalam Mengatasi Kendala-kendala yang di hadapi terhadap Penyalahgunaan Narkotika yaitu : a. Memberikan penegasan terhadap unit reskrim Polsek Pauh untuk menindak suatu tindak pidana dengan adil, b. Meningkatkan mutu kepolisian, c. Membentuk dukungan masyarakat, d. Memberikan pemahaman hukum melalui sosialisasi. Melalui penelitian ini disarankan unit reserse krimal harus meningkatkan lagi mutu dan kinerja anggotanya, membina masyarakat sehingga masyarakat memiliki pemahaman akan hukum dan masyarakat ikut bekerjasama dengan unit reserse kriminal Polsek Pauh.

343.04
TEJ
p

PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG BERSUMBER DARI NON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN PASAMAN

Teja Permana Putra, 1510111170, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK V (Hukum Tata Negara) 56 Halaman, 2020

ABSTRAK

Dalam prinsip pokok pengelolaan keuangan partai politik tertera prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang mana prinsip transparansi mengharuskan partai politik bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan keuangan partai politik dan prinsip akuntabilitas merupakan pelaksanaan pertaggungjawaban dalam suatu kegiatan partai politik. Dalam penelitian ini yang menjadi masalah adalah: pertama bagaimana pengelolaan keuangan partai politik yang bersumber dari non APBD di Kabupaten Pasaman? kedua bagaimana pertanggungjawaban keuangan partai politik yang bersumber dari non anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Pasaman? Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan pengurus partai politik di Kabupaten Pasaman. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: a. Dalam kontek daerah Pasaman pengelolaan keuangan partai yang bersumber dari luar anggaran pendapatan dan belanja daerah belum dilakukan secara efektif sehingga publik tidak dapat mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan partai politik dilakukan b. Minimnya laporan tentang pemasukan dan pengeluaran dari partai politik tempat penulis melakukan penelitian. Untuk itu perlu diperhatikan tentang laporan pengelolaan keuangan partai politik yan bersumber dari non anggaran pendapatan dan belanja daerah.

348.3
TRI
p

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

Tri Anino Vensky, 1610113033, Fakultas Hukum Universitas Andalas,...Halaman, 2020

ABSTRAK

Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik. Masalah perizinan di Kota Padang berbelit terutama tentang perizinan pendirian toko, namun fakta di lapangan yang dibangun gudang. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik. Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Kota Padang. Bentuk Partisipasi Ada dua, partisipasi langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik. Pelaksanaan Partisipasi ada dua, secara langsung berupa datang langsung ke DPRD atau melalui tulisan, secara tidak langsung melalui lembaga seperti LKAM dan lembaga lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah pertama bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Daerah Kota Padang, kedua pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penlitian Yuridis Empiris, sedangkan data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari wawancarra salah satu Kepala Bagian Perundang Undangan DPRD Kota Padang dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa adalah kurangnya penegakan hukum atau penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak berjalannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik. Saran dari saya untuk pelayanan publik di Kota Padang adalah sebagai berikut memaksimalkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang dengan masyarakat bekerjasama dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2017.

343.09
ULZ
p

PELAYANAN PUBLIK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHAYANGAN DALAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI (Pasca Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh)

Ulzana Zizi Rahma,1610112101, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2020

ABSTRAK

Pendistribusian air di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh terhadap setiap rumah warga di Kota Sungai Penuh belum merata dimana air yang didapatkan warga tidak jernih atau keruh setelah mengalami beberapa hari air mati, kemudian warga harus menunggu jadwal berganti giliran untuk mendapatkan air bersih, hal ini diakibatkan karena terbaginya dua manajemen PDAM kurang optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu dengan menganalisis masalah yang ada dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku tentang pelayanan pendistribusian air bersih. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka. Penelitian dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khanyangan Kota Sungai Penuh dan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kerinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh mempunyai kewajiban untuk mengoperasikan sarana pelayanan air minum dan air limbah secara optimal sesuai Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh, apabila dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) Perusahaan Daerah Air Minum tidak dapat memenuhi aliran air setelah mendapat laporan dari pelanggan, maka PDAM wajib menyediakan kebutuhan air melalui cara lain dengan memperhatikan kualitas, kuantitas, dan kontiunitas. Sedangkan air yang didapatkan warga tidak jernih atau keruh setelah mengalami beberapa hari air mati, kemudian warga harus menunggu jadwal berganti giliran untuk mendapatkan air bersih. Kendala yang dihadapi oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh yaitu cakupan pelayanan belum memenuhi target program 100-0-100, tingkat kehilangan air tinggi, tingkat penagihan piutang rendah, biaya produksi tinggi, tarif yang belum menutupi biaya produksi, masih membeli air curah dengan harga tinggi dari PDAM Tirta Sakti Kerinci. Upaya yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh dalam menghadapi kendala yaitu lebih meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan sistim distribusi dan meningkatkan sistim pelayanan.

Kata kunci : Pelayanan Publik, PDAM, Air Bersih

342
UTA
a

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TERKAIT PENGUJIAN PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Utari Amilisa Putri, 1610112052, Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 89 Halaman, 2020

ABSTRAK

Pada tanggal 23 Februari 2018, dilakukanlah sebuah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, Husdi Herman, dan Yudhistira Rifky Darmawan. Undang-Undang yang dilakukan pengujian oleh para pihak tersebut adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang selanjutnya disebut dengan UU MD3. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dilakukan pengujian oleh para pemohon, maka keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018. Dimana dalam putusan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon, yaitu menyatakan bahwa Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah pertama apa pertimbangan Mahkamah Kostitusi dalam menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2 terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa pemanggilan paksa yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 tidak merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan kewenangan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 menimbulkan implikasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat bukanlah lembaga superioritas yang merangkap menjadi lembaga penegak hukum, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki kewenangan melakukan pemanggilan paksa kepada setiap warga negara. Implikasi lain yang timbul adalah fungsi pengawasan tetap dijalankan dalam konteks proses dari pelaksanaan hak angket yang bertujuan untuk mengawasi eksekutif dalam melaksanakan undang-undang.

Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi; Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat; Pemanggilan Paksa.

347.05
UTA
p

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG HAK TANGGUNGAN SEBAGAI PEMBELI BERITIKAD BAIK DALAM MENGUASAI OBJEK HAK TANGGUNGAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 285/Pdt.G/2017/PN.Pbr)

Utari Andini, 1610113093, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 83 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang berarti adanya kepastian hukum hak pemenang lelang atas objek yang dibelinya melalui lelang. Dalam proses lelang yang telah dilakukan akan menimbulkan akibat hukum yaitu peralihan hak objek lelang dari penjual kepada pemenang lelang. Dalam peralihan hak objek lelang ternyata menimbulkan permasalahan, seperti tidak dapat dikuasainya objek lelang oleh pemenang lelang. Perlindungan hukum diberikan kepada pemenang lelang yang beritikad baik dalam mengikuti proses lelang yang di selenggarakan oleh KPKNL tanpa menyalahi aturan hukum yang berlaku. Masalah yang ditemukan salah satunya terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 285/Pdt.G/2017/PN.Pbr yaitu dimana Pemenang lelang hak tanggungan tidak bisa menguasai objeknya. Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang akan diteliti yaitu: 1) Apa kriteria pemenang lelang hak tanggungan yang beritikad baik?; 2) Bagaimana Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemenang lelang yang tidak bisa menguasai objek?; 3) apa kendala dan solusi agar pemenang lelang dapat menguasai Hak Tanggungan dan memiliki peralihan Hak milik?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan sifat deskriptif menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu: 1) Kriteria pemenang lelang yang beritikad baik yang dikaitkan dengan penguasaan objek Hak Tanggungan yaitu pemenang lelang harus mengetahui syarat-syarat pembelian serta peralihan dari objeknya, serta mengikuti prosedur lelang tanpa menyalahi hukum.; 2) Perlindungan hukum bagi pemenang lelang eksekusi hak tanggungan diatur secara preventif dan represif.; 3) Kendala yang dihadapi adalah objek lelang tidak bisa dikuasai oleh pemenang lelang, Upaya yang bisa dilakukan oleh pemenang lelang yaitu diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR tentang eksekusi pengosongan objek lelang melalui eksekusi riil.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Lelang Hak Tanggungan, Itikad Baik

345.08
VAL
p

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PEDOFILIA DI TINGKAT PENYIDIKAN POLRES AROSUKA SOLOK

Vallen Putra.1410111045.Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK IV (Hukum Pidana.65 Halaman.Tahun 2020)

ABSTRAK

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada saat ini sangat marak terjadi pada anak. Anak sebagai korban dari pelaku tindak pidana pedofilia. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini menjadi momok yang perlu ditanggulangi agar anak-anak di bawah umur tidak menjadi trauma psikis yang dapat mengganggu mental dan kepribadiannya. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia di tingkat penyidikan polres arosuka solok. Pada penulisan ini terdapat tiga rumusan masalah yang akan dibahas, pertama bagaimanakah bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia di tingkat penyidikian Polres Arosuka Solok? kedua apakah kendala-kendala yang ditemui Polres Arosuka Solok dalam memberi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia di tingkat penyidikan Polres Arosuka Solok? dan yang ketiga apa saja upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia di tingkat penyidikan Polres Arosuka Solok?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis pendekatan dengan norma hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia pada tingkat penyidikan di Polres Arosuka Solok secara umum belum dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia pada tingkat penyidikan di Polres Arosuka Solok tidak adanya pemberian perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda dan beberapa kendala diantaranya kesulitan dalam mendapatkan keterangan dari korban di karenakan mental anak tersebut. Untuk mengatasi kedala dan hambatan yang di hadapi tersebut Unit PPA Polres Arosuka Solok sudah melakukan beberapa tindakan antara lain berkeja sama dengan instasi terkait untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak korban pedofilia.

Kata kunci : pedofilia,

345
VIN
p

PERANAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG

Vinny Putri Alda, 1610111097, Fakultas Hukum, 2020, 64 halaman

ABSTRAK

Kitab Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan secara tersurat konsep dan definisi saksi mahkota. Namun, didalam praktiknya kesaksian dari saksi mahkota seringkali diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian tindak pidana narkotika. Hal ini juga terdapat pada persidangan tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kelas 1 A padang dengan nomor perkara 167/Pid.Sus/2020/PN Pdg dan kasus dengan nomor perkara168.Pid.Sus/2020/PN Pdg. Dalam kedua putusan tindak pidana narkotika tersebut ditulisakan bahwa atas kedua terdakwa dilakukan pemisahan perkara splitsing. Splitsing adalah pemisahan berkas perkara pidana dengan terdakwa yang berbeda dimana suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa yang bersangkutan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penggunaan saksi mahkota sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian. Berdasarkan hal tersebut penulis sangat ingin mengkaji permasalahan ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini: 1) Bagaimana peranan keterangan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang? 2) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi mahkota dalam memutus perkara tindak pidana narkotika di pengadilan kelas I A Padang? Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan dibandingkan dengan norma-norma atau ketentuan yang berlaku dilapangan. Penelitian Ini bersifat dekskriptif yaitu menggambarkan keadaan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti dan dilengkapi dengan studi dokumen dari perpustakaan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pada praktiknya keterangan saksi mahkota tidak terlalu memiliki kekuatan karena hakim menganggap bahwa keterangan saksi mahkota sama saja dengan keterangan terdakwa. Penggunaan keteranan saksi mahkota biasanya merupakan pilihan dan jika tidak digunakan tidak menimbulkan masalah lain.

Kata kunci: Peranan, Keterangan saksi mahkota, pembuktian, narkotika

343.09
VIO
p

PENYEDIAAN JALUR EVAKUASI BENCANA TSUNAMI DI KELURAHAN LOLONG BELANTI KECAMATAN PADANG UTARA KOTA PADANG

Violitha Arman, 1610112118, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 66 Halaman, 2020

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengharuskan setiap daerah memiliki perencanaan penanggulangan bencana. Salah satunya dengan cara mengembangkan rencana jalur evakuasi tsunami di wilayah berdampak bencana tsunami. Pemerintah Kota Padang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang dan Badan Penanggulanagan Bencana Daerah Kota Padang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengembangan jalur evakuasi bencana tsunami. Dengan adanya jalur evakuasi Pemeritah Kota Padang dapat menjamin pemenuhan hak masyarakat dengan melindungi masyarakat dan mengurangi resiko dari dampak yang akan ditimbulkan jika bencana benar-benar terjadi. Namun dalam pelaksanaanya Pemerintah Kota Padang belum maksimal dalam upaya penyediaan jalur evakuasi bencana tsunami khususnya di Kelurahan Lolong Belanti tepatnya di Jalan Belanti Raya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1)Bagaimanakah upaya Pemerintah Kota Padang dalam pelaksanaan penyediaan jalur evakuasi bencana tsunami di Kelurahan Lolong Belanti 2)Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam upaya penyediaan jalur evakuasi bencana tsunami di Kelurahan Lolong Belanti. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik dan pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni: 1) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam penyediaan jalur evakuasi bencana tsunami di Kelurahan Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang belum terlaksana secara maksimal 2) Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang sebagian besar berasal dari masyarakat sehingga menghambat laju pembangunan jalur evakuasi bencana tsunami di lokasi tersebut.

Kata Kunci : Bencana, Jalur Evakuasi, Tsunami

345
WAH
p

PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK BUMI DAN GAS (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Padang)

Wahyudi Rusdianto, 1510111130, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 74 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sering terjadi di masyarakat, hal ini tentu sangat merugikan baik bagi Pemerintah (Negara) maupun bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena tujuan pemberian subsidi tidak tepat pada sasarannya yaitu; langsung atau tidak langsung membantu golongan masyarakat yang kurang mampu menjalankan aktifitas sehari-hari. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas di wilayah hukum Polresta Padang? 2. Bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas di wilayah hukum Polresta Padang? 3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi Dan Gas di wilayah hukum Polresta Padang? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi kepustakaan (library research). Dari hasil penelitian, penegakan hukum oleh penyidik terhadap penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Polresta Padang dengan tindakan preventif (pencegahan), dengan melakukan pengawasan serta himbauan kepada masyarakat dan sosialisasi melalui media spanduk dan selanjutnya dilanjutkan kepada tindakan represif (penindakan), mulai dari menerima laporan melakukan penyelidikan hingga penyidikan yang selanjutnya berkas acara diserahkan kepada penuntut umum. Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum oleh penyidik Polresta Padang adalah kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tidak memadai, upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukumnya adalah melengkapi infrastruktur yang ada, membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat, dan sebagainya. Penegakan hukum oleh Penyidik terhadap tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah hukum Polresta Padang masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan. Pengupayaan dalam menagani hambatan- hambatan dalam proses penyidikan tersebut harus diberikan secara maksimal, karena penegakan hukum tersebut bertujuan untuk menegakkan keadilan, ketertiban, dan perlindungan terhadap warga negara serta untuk menciptakan rasa aman.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

345.02
WIW
i

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME. (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019) .

Wiwa Chindy Filliandri, 1510111161, Fakultas Hukum, 2020, Halaman 52

ABSTRAK

Peranan perwakilan rakyat dalam sebuah negara atau daerah bukanlah untuk mengurangi kewenangan dari para eksekutif tetapi dipandang sebagai upaya untuk menjamin tercapainya kepentingan rakyat dalam suatu kebijakan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang mengawasi peraturan daerah dan kinerja pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah serta kinerja aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai peran strategis dalam mengawasi pemerintah daerah, memberikan arti bahwa wakil rakyat tersebut adalah sungguh menjadi alat kontrol bagi para aparat pemerintah daerah didalam menjalankan kewenangannya untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan sehingga terwujudnya Good Governance. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kinerja Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan aparatur Pemerintah yang bebas bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 menurut UUD 1945 dan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kinerja Pemerintahan Daerah. Permasalahan ini ditulis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (socio legal research) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan gejala-gejala masyarakat. Kontrol merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan serta mengajak dan mengarahkan aparat pemerintah untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Kontrol yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat ataupun aparat pemerintah daerah yang berperilaku menyimpang. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Kota Pariaman dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja serta reses.

347.05
WIR
p

PERLINDUNGAN UPAH BAGI PEKERJA YANG BEKERJA PADA KANTOR NOTARIS DI KABUPATEN KAMPAR

Wira Ramadhani, Nomor Bp: 1720123078, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Jumlah Halaman: 91.

ABSTRAK

Pengupahan merupakan sisi yang paling rawan dan paling utama di dalam hubungan industrial. Di satu sisi upah adalah merupakan hak bagi pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa dan/atau tenaga yang diberikan, di lain pihak pengusaha melihat upah sebagai biaya. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh atas jumlah penghasilan yang diperolehnya, maka ditetapkan Upah Minimum oleh Pemerintah yang harus diterapkan oleh pemberi kerja. Permasalahannya; 1). Untuk mengetahui permasalahan dan mengkaji bentuk hubungan kerja antara Notaris dan pekerja yang bekerja pada Kantor Notaris di Kabupaten Kampar, dan 2). Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan upah pekerja yang bekerja pada Kantor Notaris di Kabupaten Kampar. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang melihat penerapan peraturan terkait dengan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di beberapa Kantor Notaris Kabupaten Kampar. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1). bentuk hubungan kerja antara Notaris dan pekerja yang bekerja pada Kantor Notaris di Kabupaten Kampar, Notaris lazim menggunakan perjanjian kerja secara lisan, namun sesuai UU Ketenagakerjaan walapun hanya menggunakan perjanjian kerja secara lisan setidaknya membuat surat pengangkatan bagi pekerja dan ini tidak dibuat oleh Notaris. 2). perlindungan upah pekerja yang bekerja pada Kantor Notaris di Kabupaten Kampar, bahwa upah belum sepenuhnya diberikan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu UU Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 949/XI/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019.

Kata Kunci : Perlindungan, Upah, Pekerja, Notaris, dan Kantor Notaris.

346.07
YOG
p

PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI PADA JUAL BELI DI MINIMARKET KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG

Yoga Juhafliandi, 1610111128, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK Perdata, 51 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Dalam menyelenggarakan transaksi, konsumen hendaknya dibiasakan memberi/menerima tanda bukti pembelian berupa secarik kertas yang didalamnya tertulis dengan jelas mengenai jenis barang yang dibeli dan harganya serta keterangan lain yang perlu. Hal ini perlu untuk menghindari kemungkinan perselisihan di kemudian hari. Dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 mengenai larangan pencantuman klausula baku tersebu, khususnya yang diatur dalam huruf (b), bertujuan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha. Klausula seperti ini dapat disalahgunakan oleh pelaku usaha sehingga dapat merugikan konsumen. Klausula tersebut merugikan konsumen apabila barang yang sudah dibeli oleh konsumen kemudian sampai dirumah terdapat cacat tersembunyi atau salah beli barang, maka konsumen yang tidak mengetahui hak-haknya akan dirugikan oleh pelaku usaha. Pada saat terjadi demikian pelaku usaha bebas dari tanggung jawab denggan dalih adanya klausula baku tersebut. Berkaitan dengan pelanggggaran pencantuman baku yang mengakibatkan konsumen sering dirugikan, namun tidak terdapat pengaduan dari konsumen maupun tindakan lebih lanjut dari pihak yang berwenang, sehinggga pelaku usaha masih mencantumkan klausula baku tersebut.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah 1)Apa faktor yang mendorong pelaku usaha minimarket di kecamatan Padang Timur kota Padang memcantumkan klausula barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalika tersebut?2)Bagaimana pelaksanaan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang dalam mengawasi pencantuman klausula barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau di kembalikan (klasula eksonerasi) ? Penelitian bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil:1)Faktor atau alasan pelaku usaha minimarket di Kecamatan Padang Timur Kota Padangmencantumkan klausula eksonerasi adalah beralasan yang mana alasanya adalah untuk keamanan dan kesesuaian data di minimarket tersebut .2)Pelaksanaan kewenangan BPSK Kota Padang dalam mengawasi pencantuman klausula eksonerasi tidak terlaksana dikarenakan tidak ada aturan lanjutan mengenai kewenangan BPSK tersebut.

Kata Kunci : Klausula Eksonerasi, jual beli, minimarket.

343.09
YOG
p

PENGATURAN TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA MENURUT UNCLOS 1982

Yogi Saputra. 1310111231. Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Andalas. 51 Halaman. 2020

ABSTRAK

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebagai bagian wilayah kedaulatan yurisdiksi nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang ZEEI dalam rangka implementasi UNCLOS 1982, sumber daya alam hayati maupun non hayati akan berdampak segi positif dan segi negatif yang mana pada segi positif dapat meningkatkan perekonomian rakyat yang berada diperairan, pengelolaan dan pengawasan yang terjamin, dari segi negatifnya dapat menimbulkan akibat berupa eksplorasi dan eksploitasi secara illegal yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan perairan, lingkungan laut di Zona Ekonomi Eksklusif dan dapat merugikan potensi ekonomi negara. Maka diperlukan peran pemerintah dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan tersebut sehingga tidak terjadinya tindak pidana perikanan dan terlaksananya penerapan pemanfaatan dan pengelolaan perikanan tersebut menurut UNCLOS 1982.Oleh karena itu penulis merumuskan masalah, yaitu : 1) Implementasi pemanfaatan dan pengelolaan perikanan di ZEE Indonesia menurut UNCLOS 1982. 2) Proses penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran perikanan di ZEE Indonesia?. Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Yuridis Normatif.

Kata Kunci : Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), UNCLOS 1982, Pemanfaatan dan Pengelolaan Perikanan.

342.07
YOL
h

HAKEKAT PEMAKNAAN KATA "DEMOKRATIS" DALAM PEMILIHAN KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PERUBAHAN UNDANG- UNDANG DASAR 1945 (STUDY KONSTITUSIONAL TERHADAP PASAL 18 AYAT 4 UNDANG-UNDANG DASAR 1945)

Yollanda Khairina, 1310111195, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 66 Halaman, 2020

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat dua pendapat dalam frasa "dipilih secara demokratis", yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yaitu pendapat pertama bahwa pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung dan pendapat kedua pemilihan kepala daerah dapat dilakukan oleh DPRD. Apabila melihat penafsiran pasal-pasal lain dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan pemilihan umum, maka pemilihan kepala daerah tidak sama dengan pemilihan umum, seperti pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD adalah juga dapat dianggap demokratis yang juga mencerminkan kedaulatan rakyat yang bercirikan Pancasila, sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dan tidak langsung telah menjadi perdebatan panjang di tengah kehidupan masyarakat demokratis di Indonesia. Dari kajian ini menyatakan bahwa terdapat beberapa hal positif di satu sisi, dan beberapa hal negatif di sisi yang lain pada setiap sistem pilkada langsung dan pilkada tidak langsung. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan dari kedua sistem pemilihan kepala daerah, penelitian ini berkesimpulan bahwa pilkada langsung memiliki maslahat yang lebih besar daripada pilkada tidak langsung. Beberapa maslahat tersebut antara lain: menguatnya kedaulatan rakyat dan menghindari ketidakadilan di tengah masyarakat luas sebagai bagian dari aspek pembelajaran politik dan pemerintahan. Kedua, membangun masyarakat sadar hukum dan penegak hukum yang bertindak tegas dan bersifat nonpartisan yang pada akhirnya menciptakan sikap hormat rakyat pada pemimpin. Dalam bidang sosial ekonomi, kepercayaan publik dan investor swasta pada sistem dan hasil pilkada akan meningkat karena adanya stabilitas politik yang penting bagi perekonomian. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk seluruhnya dengan melihat pertimbangan hukum MK(Mahkamah Konstitusi) antara lain: a. Bahwa substansi pengaturan yang membatasi dua kali dalam rentang waktu sepuluh tahun adalah pengaturan yang cocok dengan kebutuhan dan paham konstitusionalisme yang menuntut pembatasan lingkup dan masa kekuasaan. b. Bahwa walaupun Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis, namun Mahkamah tidak begitu saja percaya pada kenyataannya pemilihan kepala daerah benar-benar berlangsung secara demokratis.

Kata kunci: Demokrasi, Pemilihan secara langsung, Pemilihan secara perwakilan.

345
YOS
p

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DI PENGADILAN NEGERI PADANG KELAS 1A

YOSEFIE SRI DEVI, 1610112020, PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA, UNIVERSITAS ANDALAS, 84 HALAMAN

ABSTRAK

Kecelakaan Lalu Lintas merupakan salah satu penyebab kematian terbesar setelah penyakit. Faktor dari kecelakaan lalu lintas tersebut karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Kecelakaan Lalu Lintas merupakan delik biasa dimana delik harus tetap diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban), sehingga banyaknya perkara kecelakaan yang masuk untuk diproses di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan alasan yang logis dan pertimbangan yang matang. permasalahannya adalah 1) Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibakan matinya orang lain di pengadilan negeri padang? 2) Apa bentuk putusan hukum terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain di pengadilan negeri padang? 3) Apa kendala dan upaya yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain di pengadilan negeri padang? Pendekatan masalah metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan, wawancara secara langsung, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan 1) Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain di pengadilan negeri padang berdasarkan pertimbangan yuridis dan nonyuridis, 2) Bentuk putusan hukum terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang adalah pidana penjara dan denda, 3) tidak adanya kendala yang dihadapi oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain karena hakim bebas memutus sepanjang tidak keluar dari surat dakwaan yang ada dan hakim hanya terikat oleh undang-undang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain dilakukan sesuai dengan teori pertimbangan hakim.

Kata kunci : Pertimbangan hakim, Kecelakaan lalu lintas, Kealpaan

346.04
YOS
p

PENGATURAN HUKUM TERHADAP LAGU YANG DI COVER PADA PLATFORM YOUTUBE DITINJAU DARI WIPO COPYRIGHT TREATY 1996 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Yosi Yosita, Nomor BP : 1310111140, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 halaman, 2020

ABSTRAK

Saat ini tengah menjadi trend bagi banyak penyanyi dan content creator untuk membuat video menggunakan lagu yang sedang hits. Seperti meng-cover lagu dan membuat berbagai konten video yang di unggah pada situs unggah video milik YouTube dengan menggunakan lagu hits tersebut. Namun, beberapa pihak menggunakan lagu hits tersebut tanpa meminta izin kepada sang pemilik lagu. Sedangkan banyak dari pemilik akun YouTube tersebut telah mengkomersilkan video mereka dengan sistem yang disebut monetisasi. Salah satu masalah terkait pelanggaran hak cipta dan masalah izin cover yang ada di Youtube adalah kasus yang melibatkan Jerinx dari band Superman is Dead dengan seorang penyanyi dangdut bernama Via Vallen. Perumusan permasalahan sebagai berikut : Pengaturan hukum terhadap lagu yang di cover pada platform YouTube di tinjau dari Wipo Copyright Treaty 1996, Pengaturan hukum terhadap lagu yang di cover pada platform YouTube di tinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan Harmonisasi antara Wipo Copyright Treaty 1996 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait pengaturan hukum lagu yang di cover pada platform YouTube. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, Penulis melakukan penelitian kepustakaan diberbagai perpustakaan. WIPO Copyright treaty 1996 mengatur hak bagi pencipta untuk mengklaim ciptaan dan keberatan atas modifikasi tertentu dan tindakan merugikan lain, dalam hal ini meng-cover sebuah lagu dapat dikaitkan dengan aturan ini, karena meng-cover atau membawakan ulang sebuah lagu adalah men-aransemen dan bisa disamakan dengan memodifikasi yang diatur dalam Pasal 6bis Ayat (1) WIPO Copyright Treaty 1996. Dalam membawakan ulang lagu orang lain di YouTube tetap harus memperhatikan hak moral bagi penciptanya karena hak ekonomi merupakan hak ekslusif yang melekat pada pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaanya, ini diatur didalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. WIPO Copyright Treaty 1996 dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sama-sama bertujuan untuk melindungi hak-hak dari pencipta suatu karya mulai dari hak ekonomi hingga hak moral nya. Terkait dalam hal pengaturan hukum terhadap lagu yang di cover pada platform YouTube, kedua aturan ini memiliki harmonisasi dalam pengaturan nya.

Kata Kunci : Hak Cipta, Lagu, Cover, YouTube, WIPO Copyright Treaty

343.09
YUL
t

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS INFORMASI LABELMENYESATKAN PADA KASUS AIR MINERAL SMS OLEH PT AGRIMITRA UTAMA PERSADA

Yulia Fitri, 1610112019 Fakultas Hukum Universitas Andalas 2020

ABSTRAK

Konsumen kerap kali dijadikan sebagai objek aktifitas bisnis oleh pelaku usaha guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan hak-hak konsumen maupun kewajiban dari pelaku usaha itu sendiri. Mengkaji hal tersebut penulis belajar dari kasus Air Mineral SMS oleh PT Agrimitra Utama Persada yang bergerak dibidang produksi dan pemasaran Air Mineral Dalam Kemasan yang dalam kegiatan usahanya mencantumkan label berupa informasi menyesatkan. Tindakan ini dilakukan dengan menggunakan label pada kemasan "SMS air minum berasal dari mata air pegunangan singgalang", sedangkan yang sebenarnya sumber bahan baku yang digunakan berasal dari air PDAM Lubuk Bonta, Padang Pariaman. PT Agrimitra Utama Persada sebagai perusahaan produksi Air Mineral Dalam Kemasan nomor satu di Sumbar diketahui mencantumkan informasi menyesatkan dalam hal pencantuman label dan dianggap melanggar hukum. Setiap perbuatan melanggar hukum harus ada bentuk pertanggung jawabannya. Adapun pihak yang terkait dalam kasus ini adalah BBPOM Padang yang mempunyai tugas dalam hal pengawasan dianggap lalai karna tidak mengetahui adanya suatu produk yang beredar dan dipasarkan sejak tahun 2003 yang mencantumkan label "SMS air minum berasal dari mata air pegunangan singgalang" tanpa didaftarkan ke pihak BBPOM itu sendiri. Permasalahan dalam penulisan ini adalah : pertama, Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas informasi label menyesatkan pada kasus Air Mineral SMS oleh PT Agrimitra Utama Persada. Kedua, Bagaimana upaya pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Padang terhadap informasi label menyesatkan belajar dari kasus Air Mineral SMS oleh PT Agrimitra Utama Persada. Penelitian bersifat derskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan jenis data primer dan sekunder, yang berasal dari studi di lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa :Pertama, tanggung jawab pelaku usaha yaitu secara hukum perdata mengganti kerugian dan selain itu juga tanggung jawab secara hukum pidana dan hukum administrasi. Kedua, bentuk pengawasan BPOM adalah pengawasan pre-market dan post-market berupa standarisasi, penilaian, pengawasan setelah beredar, pengujian laboratorium, dan penegakan hukum oleh BPOM.

Kata Kunci : Informasi menyesatkan, Label, Konsumen

346.01
YUL
p

PELAKSANAAN PERKAWINAN OLEH WALI YANG TIDAK BERHAK DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANG BARAT

Yulia Selfiana Dewi, 1510111186, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata Murni, 64 Halaman, Tahun 2019

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum terhadap status dan kedudukan anak yang lahir setelah adanya perkawinan, dan juga terhadap harta benda masing-masing pihak. Dalam perkawinan Islam mengatur seharusnya yang menjadi wali saat akad perkawinan adalah wali nasab, namun karena adanya wali yang tidak berhak timbul permasalahan siapa yang akan menikahkan anak perempuan tersebut. Di Indonesia yang menjadi wakil pemerintah terkait adanya permasalahan wali yang tidak berhak adalah wali hakim yaitu petugas Kantor Urusan Agama. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap masalah dengan cara membandingkan beberapa fakta yang terjadi dilapangan dengan produk hukum yang berlaku terhadap objek penelitian tersebut. Dalam skripsi ini perumusan masalah yang dibahas adalah 1).Bagaimana pelaksanaan perkawinan oleh wali yang tidak berhak menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat. 2) Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perkawinan oleh wali yang tidak berhak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan perkawinan untuk anak luar kawin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat, dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perkawinan. Untuk anak luar kawin yang menjadi wali dalam perkawinannya adalah wali hakim, karena wali nasabnya sudah menjadi wali yang tidak berhak dalam perkawinannya, namun dalam prakteknya ada satu kasus wali yang tidak berhak menikahkan anaknya. Kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan perkawinan oleh wali yang tidak berhak yaitu. orang tua(wali yang tidak berhak) memaksa menikahkan anaknya, dan Pemalsuan identitas oleh wali yang tidak berhak. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu, lebih teliti sejak pemeriksaan berkas administrasi, dan mengkonfirmasikan pada para pihak jika diketahui adanya dokumen yang tidak lengkap atau ketidaksusaian akta nikah orang tua dengan akta lahir anak, selanjutnya melakukan pendekatan persuasif kepada pihak wali, dan memberikan edukasi terkait permasalahan wali dan syarat perkawinan, sekaligus sosialisasi terkait adanya wali yang tidak berhak, bahwasannya wali yang tidak berhak tidak sah untuk menjadi wali dalam perkawinan.

Kata Kunci: Perkawinan, Wali Yang Tidak Berhak

345
YUL
t

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/PNPdg)

Yulia Trisanti, 1610112045, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 70 halaman, 2020

ABSTRAK

Secara umum pencurian adalah mengambil barang milik orang lain secara tidak sah atau tanpa seizin pemilik. Dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana disebutkan " diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri." Dalam Pasal 365 ayat (2) angka 2 KUHPidana disebutkan bahwa diancam dengan pidana paling lama duabelas tahun jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dan pada ayat (2) angka 4 menyebutkan apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu: 1) bagaimanakah penerapan unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/PNPdg 2) bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus- Anak/2019/PNPdg. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen. Skripsi ini bertujuan mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam perkara Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2019/PNPdg. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah diketahui bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan hakim mempertimbangkan banyak hal, termasuk hal- hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan putusan. Dan dalam memberikan putusan, hakim sudah bertindak sesuai dengan Undang-undang serta aturan hukum yang mengatur.

Kata Kunci: Tindak Pidana Anak, Dasar Pertimbangan Hakim

348.3
YUN
m

MANFAAT OPERASI ZEBRA TERHADAP KETAATAN PENGGUNA LALU LINTAS DALAM MEMATUHI PASAL 77 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PADANG PANJANG

Yunilis Suci Mindasari, 1610112104, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas,79 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Fakta yang ditemukan masih banyak dari pengendara kendaraan bermotor yang belum memiliki SIM,hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki SIM. Peranan Kepolisian masih belum terlalu maksimal untuk menghimbau masyarakat untuk memiliki SIM. Salah satu upaya Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti aturan lalu lintas adalah dengan cara mengadakan kegiatan rutin operasi zebra.Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimanakah manfaat operasi zebra terhadap ketaatan pengguna lalu lintas dalam mematuhi Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Padang Panjang? 2.Apa saja kendala yang ditemui oleh Polres Padang Panjang dalam menegakkan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 selama pelaksanakan operasi zebra di Kota Padang Panjang? Metode penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang membandingkan fakta di lapangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pelaksanaan operasi zebra yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Padang Panjang memiliki manfaat dalam meningkatkan kesadaran pengguna lalu lintas untuk memiliki SIM dikarenakan dalam pelaksanaan operasi zebra banyak didapati pengguna lalu lintas yang belum memiliki SIM. Kendala yang ditemui oleh Kepolisian Resort Kota Padang Panjang dalam menegakkan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 selama pelaksanakan operasi zebra, diantaranya yaitu masih ditemukan masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya mematuhi Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masih belum maksimalnya penegakan pasal ini oleh pihak Kepolisian. Untuk mengatasi kendala-kendala dalam menegakkan aturan saat operasi zebra diharapkan kepada Kepolisian Resort Kota Padang Panjang untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai arti penting memiliki SIM. Diharapkan juga kepada kepolisian untuk bersikap profesional dalam menegakkan hukum, termasuk menindak anggota kepolisian yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci : operasi zebra, pengguna lalu lintas, SIM, satlantas

343.09
ZHI
p

PENGAWASAN TERHADAP PEMELIHARAAN ALAT PENERANGAN JALAN PADA KAWASAN PEJALAN KAKI DI SEPANJANG PANTAI PURUS KOTA PADANG

Zhilvia Assura, 1610112022, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara

ABSTRAK

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak." Tanggung jawab negara atas fasilitas pelayanan umum yang layak, dapat diartikan negara berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana umum yang memadai dan berkualitas dalam pelayanannya bagi masyarakat. Kenyataannya, alat penerangan jalan pada kawasan pejalan kaki (disebut juga lampu hias) di sepanjang Pantai Purus Kota Padang terkesan tidak terawat, mengalami kerusakan, dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kerusakan yang terjadi ialah besi kerangkeng pelindung lampu yang patah, terlepas, dan lampu yang hilang. Kondisi dimaksud tentu menimbulkan asumsi negatif terkait dengan pengawasan dan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, 1) Bagaimana bentuk koordinasi pemerintah dalam pemeliharaan alat penerangan jalan pada kawasan pejalan kaki di sepanjang Pantai Purus Kota Padang? 2) Bagaimana bentuk pengawasan terhadap pemeliharaan alat penerangan jalan pada kawasan pejalan kaki yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang? 3) Bagaimana tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Jenis data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1) Kewenangan pemeliharaan alat penerangan jalan pada kawasan pejalan kaki di sepanjang Pantai Purus Kota Padang merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Padang No. 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga tidak lagi diperlukan adanya koordinasi. 2) Bentuk pengawasan: Inspektorat Kota Padang melakukan pengawasan internal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang melakukan pengawasan preventif, Satpol PP Kota Padang melakukan pengawasan preventif dan pengawasan represif. 3) Tidak adanya tindak lanjut pengawasan alat penerangan jalan pada kawasan pejalan kaki di sepanjang Pantai Purus oleh Pemerintah Kota Padang.

Kata Kunci : Pengawasan, Pemeliharaan, Lampu Hias, Alat Penerangan Jalan

345
ZIK
p

PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BUKITTINGGI

Zikra Mulya, BP: 1210112019, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 109 Halaman 2020

ABSTRAK

Dalam proses pembinaan narapidana ini dikenal adanya masa pembebasan bersyarat. DalamUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1995Pasal 14 ayat (1) huruf k tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap Narapidana sebagai upaya pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi, kendala-kendala yang ditemui dan upaya mengatasi dan penanggulangan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang bersifat yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi ditemukan beberapa kendala yaitu lamanya proses pengajuan, tidak adanya penjamin narapidana, narapidana melanggar hukum disiplin dalam Lembaga Pemasyarakatan, tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan terutama kelengkapan dokumen administratif. Upaya yang bisa dilakukan adalah memperkuat Peranan Kantor Wilayah Hukum dan HAM.Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi juga perlu memberikan suatu penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada narapidana maupun keluarganya yang datang berkunjung. Kesanggupan menerima dari pihak kelurahan sebaiknya tidak merupakan syarat mutlak atau syarat yang mempengaruhi narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat, karena hal itu menghambat dan merugikan bagi narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

341
ZUH
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FILM DARI TINDAKAN MEMPOSTING CUPLIKANNYA MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Zuhdi de Alfarisy, 1510112152, Fakultas Hukum Universitas Andalas) IV bab + 60 halaman

ABSTRAK

Pada dasarnya, suatu karya cipta yang dihasilkan melalui buah pikiran seorang manusia merupakan sesuatu hal yang harus dilindungi. Perlindungan tersebut disebut sebagai perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual, salah satu yang dilindungi adalah Hak Cipta. Perlindungan ini memberikan kepastian hukum atas semua tindakan yang melanggar hak dari pencipta atas suatu karyanya. Perlindungan ini diatur berdasarkan Hukum Internasional yaitu Berne Convention maupun TRIPs Agreement. Sedangkan untuk hukum nasional, perlindungannya diatur berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak cipta yang sering terjadi adalah pembajakan melalui media sosial. Dalam skripsi ini memuat contoh perilaku pembajakan tersebut seperti yang dilakukan oleh publik figur dalam negeri yang melakukan perekaman terhadap ciplikan film yang sedang tayang di bioskop lalu mengunggahnya ke media sosial pribadi sehingga ditonton oleh banyak orang. Yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tindakan mencuplik sebagian film menurut hukum internasional dan nasional. 2. Bagaimana metode penyelesaian sengketa dari tindakan pembajakan terhadap film. Skripsi ini dimaksudkan untuk mempresentasikan bentuk perlindungan yang diberikan berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional terhadap Hak Cipta serta penyelesaian sengketa dalam Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang melibatkan studi kepustakaan untuk mendapatkan penemuan hukum in concerto menggunakan literatur, buku-buku referensi, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan data sekunder, penelitian ini bertujuan untuk mengehtahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap cuplikan film melalui media sosial. Penulis menyimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap tindakan pengambilan film menurut hukum internasional dan hukum nasional 2. Metode penyelesaian sengketa dari tindakan pembajakan film yang dilakukan melalui media sosial. Selain itu juga melihat mengenai kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya perlindungan terhadap hak cipta.

Kata Kunci : Hak Cipta, Pembajakan, Postingan film melalui media sosial.

346.02
ZUL
t

TANGGUNG JAWAB LAZADA TERHADAP BARANG YANG RUSAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DI KOTA PADANG

Zulfadli, 1310112063, Skripsi S-1, Hukum Bisnis ,Pembimbing : Hj. Ulfanora, S.H,M.H dan Misnar Syam, S.H,M.H

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi yang berbasis internet memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai praktik jual-beli secara langsung namun seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi memberikan dampak positif bagi pelaku usaha untuk melakukan praktik jual-beli secara Online tanpa harus betemunya pelaku usaha dengan konsumen menjadi lebih efisien yang disebut dengan Electronic Commerce (E-commerce). E-commerce merupakan bentuk perdagangan secara digital dengan menggunakan Internet. Dalam praktik jual beli ini menimbulkan suatu hubungan hukum antara pihak-pihak. Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan Lazada yakni dalam melakukan penjualan barang di Lazada, pelaku usaha harus melakukan pendaftaran untuk menjadi seller. Ini berfungsi agar antara pelaku usaha mengetahui apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha. Hubungan hukum antara Lazada dengan pembeli yakni saat pembeli melihat barang yang ditawarkan di Lazada dengan memperhatikan jenis dan harga barang, kemudian muncul ketertarikan pembeli untuk membeli barang, maka timbullah suatu hubungan hukum antara Lazada dengan pembeli. Dengan adanya hubungan hukum tersebut menimbulkan suatu peristiwa hukum sehingga timbul Prestasi dan Wanprestasi. Dalam pembelian barang di Lazada sering terjadi kerusakan Barang saat diterima terlihat rapi, waktu dibuka dan dipakai terdapat kerusakan pada barang dan pada kasus lain barang yang diterima rusak atau komponen dari barang tersebut tidak lengkap sehingga mengakibatkan konsumen atau pembeli merasa tidak puas dan dirugikan. Dalam permasalahan imi Lazada bertanggung jawab memberikan ganti kerugian terhadap kerusakan tersebut dengan meninjau kembali mengenai barang tersebut.

Kata kunci :Hubungan Hukum, Tanggung Jawab, Perlindungan Konsumen

KUMPULAN ABSTRAK SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2021

345
ANN
t

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ASIMILASI NARAPIDANA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN PANDEMIK COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERTA KAITANNYA DENGAN TUJUAN REINTEGRASI SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG PEMASYARAKATAN (Studi PERMENKUMHAM No.10/2020)

Annisa, 1710112040, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 77 halaman – Tahun 2020

ABSTRAK

Ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana non-alam mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menyelamatkan narapidana di dalam Lapas dari penyebaran Covid-19. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui proses asimilasi dan Menkumham ini di dasarkan oleh Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Asimilasi yang dilaksanakan pada saat adanya pandemic Covid-19 ini berbeda dengan proses asimilasi yang ada pada tahun sebelumnya. Asimilasi masa pandemi ini merupakan asimilasi dilaksanakan dari rumah dikarenakan adanya kebijakan untuk PSBB, dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan membandingkan dan mempelajari norma hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut ; 1. Bagaimanakah pengaturan dan pelaksanaan Hak Asimilasi dalam sistem Pemasyarakatan dan Pada Masa Pandemi Covid-19? 2.Bagaimanakah kaitan Pengaturan dan Pemberian Hak asimiliasi pada masa pandemi dengan pencapaian tujuan pemasyarakatan berupa reintegrasi sosial ?. Adapun hasil penelitian ini yaitu diketahui bahwa pelaksanaan dan pengawasan asimilasi di tengah pandemic Covid-19 ini dlaksanakan dari rumah melalui system dalam jaringan dengan memanfaatkan berbagai platform online. Pelaksanaan asimilasi di tengah adanya pandemic Covid-19 ini dilaksanakan dengan pengawasan dari Bapas. Tujuan akhir dari asimilasi dapat tercapai jika semua pihak menjalankan peran dengan benar serta pemberian hak asimilasi di tengah pandemic ini terkait tujuan reintegrasi social adalah langkah yang tepat dan sesuai mengingat narapidana perlu pembiasaan hidup dengan Pola Tatanan Kehidupan Baru (New Normal Life).

Kata kunci: Hak Narapidana, Asimilasi, Narapidana, Covid-19, Reintegrasi Sosial, Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan.

343.04
ABD
P

PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP YOUTUBER YANG MENDAPATKAN PENGHASILAN DARI APLIKASI YOUTUBE

Abdul Mujtahid Fichairi, 1610113115, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 Halaman, 2021

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tidak eksplisit menjelaskan bagaimana sistim pelaporan pajak penghasilan terhadap youtuber, akan tetapi hanya mengatur mengenai subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan dan tarif pajak penghasilan secara umum. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama bagaimana sistim pelaporan pajak penghasilan terhadap youtuber yang mendapatkan penghasilan dari aplikasi youtube, kedua bagaimana tindakan pemerintah khususnya Dirjen Pajak Indonesia terhadap youtuber yang belum mendaftarkan atau melaporkan pajak penghasilannya dari aplikasi youtube, dan ketiga bagimana penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan pelaporan pajak penghasilan terhadap youtuber. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik dan pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh hasil, yakni: 1). Sistim perhitungan pajak untuk youtuber menggunakan metode self assessment system yang merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER- 17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto. Penghasilan youtuber merupakan penghasilan pribadi yang bisa dikategorikan menurut Lampiran I Peraturan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto. 2). Direktorat Jenderal Pajak melakukan pendataan potensi penerimaan pajak terhadap objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk salah satunya yaitu terhadap youtuber yang mendapatkan penghasilan dari aplikasi youtube yang belum melaporkan pajaknya. 3). Hambatan dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap youtuber yaitu kurangnya pengetahuan yang mendalam tentang cara pemungutan dan pembayaran pajak yang menyebabkan youtuber mengesampingkan kewajiban dan kepatuhannya, Oleh karena itu, pemerintah dalam penyelesaiannya perlu meningkatkan kualitas pelayanan pajak. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan agar peraturan mengenai pajak penghasilan youtuber beserta tata cara pelaporan dapat dibuat serinci mungkin sehingga tidak menimbulkan kebingungan oleh wajib pajak dalam membayarkan pajaknya serta melakukan peningkatan kualitas pelayanan pajak agat dapat memberikan rasa nyaman, aman, mudah, lancar, dan memberikan kepastian hukum.

346.06
AFI
p

PENYERAHAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN TAHUN ANGGARAN DI DESA NARAS I KOTA PARIAMAN

Afitra Busrizal, 1710112044, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021

ABSTRAK

Mengacau kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan aturan pelaksananya yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi PP Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa, Permendagari Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perwako Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, secara tertulis mewajibkan kepala desa dalam waktu paling lama 3 bulan disetiap akhir tahun anggaran wajib menyerahkan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Badan Permusyawaran Desa sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Namun di Desa Naras I proses penyerahan tersebut belum berjalan dengan baik, maka penelitian ini bertujuan mengetahui 1) Bagaimana proses penyerahan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Naras 1 Kota Pariaman 2) Bagaimana pembinaan dan pengawasan di Desa Naras 1 terkait laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa 3) Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang terlambat diserahkan. Untuk menjawab permasalahan diatas Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis, sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Naras I, Badan Permusyawaratan Desa Naras I, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPM dan Desa) Kota Pariaman dan Kantor Camat Pariaman Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi kendala utama adalah Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa Naras I sehingga berpengaruh pada lambatnya laporan kinerja penyelenggara pemerintahaan serta kurangnya penguasaan teknologi dan informasi dari perangkat Desa Naras I. Untuk itu hendaknya pemerintah segera melakukan sosialisasi khusus tentang pentingnya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan melibatkan ahli yang terkait untuk menjelaskan sanksi didapat bila melakukan pelanggaran.

Kata kunci: Kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

345.08
AFR
p

PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PADANG DALAM PENDAPINGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Afrida Sri Melani, 1610123058, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 66 Halaman, 2021

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sering menimpa anak dan setiap tahun mengalami peningkatan. Di Kota Padang pada tahun 2017 terdapat 10 kasus, 20 kasus pada tahun 2018, pada tahun 2019 menjadi 23 kasus dan yang terbaru pada tahun 2020 mencapai 25 kasus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara mutlak telah memberikan perlindungan khusus pada anak, diantaranya memberikan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual. Melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pendampingan Pusat Layanan Terpadu telah ada lembaga yang berperan penting dalam memberikan pendampingan anak korban kekerasan seksual yaitu P2TP2A. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah: 1) Bagaimana peran P2TP2A Kota Padang dalam memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual 2) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Kota Padang dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual 3) Bagaimanakah solusi terhadap kendala yang ada oleh P2TP2A Kota Padang dalam memberikan pendampingan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Adapun hasil dari penelitian ini P2TP2A memberikan layanan pendampingan berupa pendampingan medis, psikologis dan advokasi hukum dan dalam memberikan pendampingan berperan sebagai pembela, mediator, pemungkin/fasilitator dan motivator. Terdapat kendala yang dihadapi P2TP2A diantaranya kurangnya anggaran operasional, tidak tersedianya rumah aman (shelter), urangnya SDM, waktu pelaksanaan yang tidak sesuai rencana, korban atau kelurganya yang tidak terbuka, adanya tindakan di luar izin P2TP2A, korban atau keluarga korban mengekspos kasus, rendahnya kesadaran masyarakat dalam potensi terjadinya kekerasan seksual yang menimpa anak, serta menganggap kekerasan seksual merupakan aib. P2TP2A juga telah menemukan solusi terhadap kendala yang dihadapi diantaranya bekerjasama dengan pihak yang dapat mendukung anggaran operasinal, pengajuan dana kepada pemerintah untuk rumah aman (shelter), memberikan pelatihan kepada anggotanya, memberikan pemahaman dan masukan kepada korban maupun keluarganya, serta memberikan pemahaman dan sosialisasi daruratnya kekerasan seksual kepada masyarakat.

Kata Kunci:P2TP2A, Pendampingan, Kekerasan Seksual

343.02
AID
i

IMPLEMENTASI PENCANTUMAN LABEL HALAL DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DI KOTA PAYAKUMBUH BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Aidil Akbar, 1610112012, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 73 Halaman, 2020

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal secara jelas menyatakan bahwa setiap produk yang masuk,beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun, penulis menemukan di Kota Payakumbuh masih banyak depot air minum yang tidak mencantumkan sertifikat halal, bahkan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal yang diperkuat juga melalui hasil wawancara penulis dengan Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Payakumbuh. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama bagaimana proses sertifikasi dan labelisasi halal terhadap depot air minum isi ulang yang dilakukan oleh Badan Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) dan kedua apa saja bentuk kendala dalam sertifikasi dan labelisasi halal depot air minum isi ulang di Kota Payakumbuh. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, dan sifat dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan: Proses sertifikasi dan labelisasi halal terhadap depot air minum isi ulang yang dilakukan oleh Bimas Islam kurang efektif dan memakan waktu yang cukup lama. Secara garis besar ada 8 kendala yang dihadapi oleh Bimas Islam dalam melaksanakan sertifikasi halal diantaranya kurangnya biaya untuk melakukan penyuluhan, rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha depot air minum isi ulang akan sertifikasi halal, dan lain-lain.

Kata Kunci : Sertifikasi, Halal, Bimas Islam, depot air minum isi ulang, BPJPH

343.04
AIS
k

KEDUDUKAN AKUNTAN PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

Aisha Fadilla, 1710113025, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, 67 halaman

ABSTRAK

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sangat penting dilakukan untuk mengetahui kejelasan keuangan negara yang digunakan oleh pemerintah. Salah satu lembaga negara yang independen yang berwenang dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD NRI 1945 adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun BPK mempunyai wewenang dalam memeriksa keuangan negara pada seluruh pengelola keuangan negara, didalam Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa adanya pemeriksaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh akuntan publik pada pengelola keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu pertama, Bagaimana kedudukan Akuntan Publik dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan? kedua, Bagaimana implikasi hukum hasil pemeriksaan Akuntan Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal pemeriksaan keuangan negara? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menggunakan kajian kepustakaan dengan dukungan data sekunder berupa buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini melihat dan mengkaji terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan akuntan publik dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai auditor independen dan implikasi hukum atas laporan hasil pemeriksaan oleh akuntan publik, BPK akan melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut BPK menghasilkan kesimpulan yang menyatakan bahwa akuntan publik telah sesuai/tidak sesuai dengan standar dalam melaksanakan pemeriksaan. Hasil evaluasi atas hasil pemeriksaan tersebut dapat digunakan oleh BPK sebagai dokumen perencanaan pemeriksaan BPK dan pertimbangan untuk menetukan entitas yang akan diperiksa oleh BPK. Adapun saran yang diberikan oleh penulis diantara, perlu adanya pembaharuan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan akuntan publik sebagai auditor independen dan perlu disusun suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh BPK atas laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik yang mana peraturan perundang-undangan ini memuat tentang jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan proses penyerahan hasil evaluasi tersebut.

345
ALM
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT TANGKAP YANG DILARANG DI WILAYAH LAUT SUMATERA BARAT OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIKANAN (Studi di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat)

Al Muchlis Fizra Anhal, 1710113011, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat dipastikan bahwasanya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tugas untuk menjaga ekosistem laut, melaksanakan pengawasan dan perlindungan laut, dan bertanggung jawab melakukan penegakan hukum kelautan dan perikanan. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Pertama, Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang di wilayah laut Sumatera Barat oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan. Kedua, Apa saja kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang di wilayah laut Sumatera Barat oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan. Tipologi penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang membandingkan fakta di lapangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang di wilayah laut Sumatera Barat oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang terdapat dua faktor yaitu faktor internal kurangnya personil penyidik yang bertugas, sedangkan faktor eksternal antara lain masih rendahnya peran serta masyarakat dalam membantu memberikan laporan terkait tindak pidana perikanan, keterbatasan waktu masa penahanan tersangka.

Kata Kunci : Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana Perikanan.

346.08
ALH
p

PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT GAGAL BAYAR KLAIM ASURANSI PENDIDIKAN OLEH AJB BUMIPUTERA BUKITTINGGI MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA BUKITTINGGI (Nomor Perkara: 08/BPSK/PERKARA/IX/2019)

Al Hamda Belva Purnama P, 1710111014, Program Kekhususan Perdata (PK I), Fakultas HukumUniversitas Andalas, Halaman 75 , Tahun 2021

ABSTRAK

Asuransi merupakan salah satu sarana pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Tertanggung merujuk kepada polis akan melakukan proses klaim ke perusahaan asuransi. Kenyataannya terdapat kurang lebih 10 (sepuluh) tertanggung asuransi pendidikan Bumiputera Kota Bukittinggi tidak bisa melakukan klaim dikarenakan perusahaan asuransi melakukan gagal bayar klaim. Adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana proses terjadinya gagal bayar klaim asuransi pendidikan oleh AJB Bumiputera Kota Bukittinggi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui BPSK Kota Bukittinggi, kedua, bagaimana kekuatan putusan dan penerapan putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi terhadap gagal bayar klaim asuransi pendidikan AJB Bumiputera Kota Bukittinggi (Nomor Perkara : 08/BPSK/PERKARA/IX/2019). Metode penelitian yang digunakan adalah empiris yuridis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: Pertama, asuransi merupakan perjanjian antara penanggung dengan tertanggung yang dituliskan dalam bentuk polis. Gagal bayar terjadi karena penanggung melakukan wanprestasi yang menyebabkan terjadinya sengketa dengan tertanggung, penyelesaian dapat dilakukan melalui BPSK. Kedua, putusan BPSK bersifat final dan mengikat. Putusan BPSK dalam Perkara Nomor: 08/BPSK/PERKARA/IX/20019 tidak dijalankan oleh Penanggung karena adanya tumpang tindih peraturan perundangan-undangan.

Kata kunci: Asuransi, Gagal Bayar, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

346.02
AMA
t

TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG PERUMAHAN (DEVELOPER) PT. SINAR BODHI CIPTA DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) SUBSIDI DI KOTA TANJUNGPINANG

Amanda Febriyeni, 1710111096, Fakultas Hukum Universitas Andalas, ... hlm, 2021

ABSTRAK

Perkembangan zaman yang begitu cepat membuat keinginan masyarakat untuk memiliki rumah tinggi. Karena hal itu pemerintah merancang program untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki rumah dengan pembiayaan berupa suku bunga rendah, cicilian ringan jangka panjang dan subsidi yang diterbitkan oleh Bank pelaksana baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah. Sebelum proses jual beli rumah konsumen dan pengembang perumahan (developer) akan menyepakati dan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Banyak sengketa yang terjadi karena isi perjanjian tidak memihak kepada konsumen karena pengembang perumahan tidak melibatkan pihak konsumen untuk melakukan perundingan maupun negosisasi Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 1) Bagaimana prosedur dalam pengikatan jual beli yang dilakukan oleh pengembang perumahan (developer) PT. Sinar Bodhi Cipta dan konsumen rumah subsidi? 2) Bagaimana bentuk pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi oleh pengembang perumahan PT. Sinar Bodhi Cipta? 3) Bagaimana bentuk tanggung jawab pengembang perumahan (developer) PT. Sinar Bodhi Cipta dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) rumah subsidi di kota Tanjungpinang ? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan maka diperoleh hasil sebagai berikut:) mempersiapkan semua dokumen penting sebagai syarat dalam pembelian rumah KPR subsidi, harus disesuaikan dengan yang asli 2) perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, ketika salah satu pihak melaksanakan perjanjian dengan itikad buruk, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atau pembatalan perjanjian ke pengadilan 3) tanggungjawab yang dilakukan oleh PT. Sinar Bodhi Cipta adalah sesuai dengan jangka waktu yang diberikan selama masa pemeliharaan rumah yakni sekitar 100 hari setelah konsumen menerima kunci.

Kata kunci : Tanggungjawab, pengembang perumahan (developer), Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), rumah subsidi

345
AND
k

KETERANGAN SAKSI KORBAN YANG MENGALAMI SAKIT JIWA DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN (Studi Kasus : Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Bsk)

Andre Ray 1710112075, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Progam Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 62 halaman,-
Tahun 2021 Pembimbing : Dr.A.Irzal Rias.S.H,.M.H dan Iwan Kurniawan.S.H.,M.H

ABSTRAK

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dan juga merupakan alat bukti yang utama dalam pembuktian kesalahan terdakwa, karena dapat dikatakan tidak ada satupun perkara pidana yang luput dari pembuktian keterangan saksi ini. Syarat sah suatu keterangan saksi adalah pengucapan sumpah sebelum pemberian keterangan dipengadilan. Namun KUHAP memberikan pengecualian dalam pasal 171 huruf b menyatakan bahwa seseorang dapat memberikan keterangan dalam persidangan tanpa sumpah yakni orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali, keterangan orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa dianggap tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sehingga keterangan orang sakit jiwa ini digunakan hanya sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti jika terdapat kesesuaian antara keterangan tersebut dengan alat bukti yang sah lainnya. Tetapi dalam aturan KUHAP tidak menjelaskan secara rinci siapa saja yang dapat dikatakan sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa ini, yang mana pada keadaan tertentu keterangan yang diberikan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa ini bisa jadi merupakan alat bukti yang penting dan dikhawatirkan jika keterangan ini tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti maka tujuan hukum tidak akan tercapai, maka berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1). bagaimana kebijakan hakim dalam menentukan kapasitas kecakapan mental seseorang untuk mengikuti persidangan yang tepat untuk diidentifikasikan dalam aturan pasal 171 KUHAP ? (2). bagaimana kekuatan nilai pembuktian keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki sakit jiwa terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Batusangkar dan studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian dalam penulisan ini adalah dalam menentukan kapasitas mental seseorang hakim dapat dibantu oleh keterangan saksi ahli yang dapat disampaikan secara lisan dipengadilan ataupun secara tulisan yang tertuang dalam surat otentik yang selanjutnya disebut sebagai Visum et Repertum psychiatricum yang dapat menjadi acuan atau pedoman bagi hakim dalam membuat putusan saat memeriksa suatu kasus yang melibat Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Nilai pembuktian keterangan yang diberikan oleh orang sakit ingatan atau sakit jiwa bukan merupakan alat bukti yang sah melainkan hanya sebagai petunjuk dan penyempurna alat bukti sah lainnya jika terdapat persesuaian antara keterangan tersebut dengan alat bukti sah lainnya.

Kata Kunci: Keterangan, Pembuktian, Saksi Korban, Sakit jiwa

344.06
ANG
t

TANGGUNG JAWAB PT. FAMILY RAYA CERIA SEJATI TERHADAP KERUSAKAN DALAM PENGIRIMAN BARANG DI KOTA PADANG

Anggi Sapwan Azyuri Hasibuan, 1610111079, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Bisnis, 73 Halaman, 2021

ABSTRAK

PT. Family Raya Ceria Sejati Kota Padang perusahaan yang bergerak dibidang pengangkutan umum dan barang yang sudah banyak dikenal luas oleh masyarakat kota Padang dan kota Jambi, pihak pengangkut berkewajiban untuk mengantarkan barang- barang yang akan dikirimkan dengan selamat berarti yang dimaksud ialah bahwa PT. Family Raya Ceria Sejati Kota Padang diwajibkan untuk bertanggung jawab atas barang- barang yang akan dikirimkan dengan selamat sampai ke tangan penerima barang dan juga untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat untuk tetap setia menggunakan jasa pengiriman barang menggunakan bus tersebut. Perumusan masalah Pertama adalah Bagaimana pelaksanaan pengangkutan barang melalui PT. Family Raya Ceria Sejati Kota Padang. Kedua, bagaimana bentuk tanggung jawab yang diberikan PT. Family Raya Ceria Sejati terhadap terjadinya kerusakan dalam pengiriman barang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan yang pertama Pelaksanaan pengiriman barang melalui PT. Family Raya Ceria Sejati Kota padang dilaksanakan dengan sesuai prosedur yang dibuat oleh PT. Family Raya Ceria Sejati perjanjian yang harus disepakati oleh pengirim barang, memberitahukan isi barang yang akan dikirimkan, setelah adanya perjanjian kemudian barang akan dikirimkan oleh bus hingga sampai ke tangan penerima barang. Kedua, Penyebab terjadinya kerusakan dalam pengiriman barang oleh PT. Family Raya Ceria Sejati Kota Padang seperti bagasi penuh, faktor cuaca, faktor kerusakan bus, faktor pengemasan yang kurang baik, kecelakaan, dan kerusakan jalan, tetapi menurut hasil penelitian yaitu akibat bagasi bus penuh dan menimpa barang, faktor kondisi jalan, cuaca buruk dan kelalaian pihak pengangkut barang. Tanggung jawab yang diberikan oleh PT. Family Raya Ceria Sejati Kota Padang terhadap terjadinya kerusakan barang yaitu pihak pengangkut hanya mengganti sebesar ongkos dan hal itu diluar perjanjian, pihak pengangkut barang juga tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang dan menghindar

Kata Kunci: Tanggung jawab, Kerusakan, Pengiriman Barang

348.3
ANN
p

PELAKSANAAN PASAL 15 AYAT (3) UU JAMINAN FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MK NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI KOTA PADANG

Annisa Tri Wulandari, 1710113042, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 107 Halaman, 2021

ABSTRAK

Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam pelaksanaan perjanjian fidusia, apabila debitur wanprestasi akan dapat dilaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia secara langsung. Menurut Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu pelaksanaaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan. Permasalahan muncul ketika adanya ketidakjelasan mekanisme eksekusi beserta prosedur untuk menentukan suatu tindakan telah masuk dalam kategori “cidera janji” dan adanya frasa “atas kekuasaan sendiri” dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia berpotensi menyebabkan terambilnya hak milik pribadi secara sewenang-wenang dan secara paksa tanpa melalui mekanisme dan prosedur hukum yang jelas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. 2) Bagaimana pelaksanaan dan implementasi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 oleh kreditur pada perusahaan pembiayaan di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data pada penelitian ini adalah data yang diperoleh di lapangan dan dipertajam dengan menganalisa bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini: 1). Latar belakang keluarnya Putusan MK Nomor 18/XVII/2019 ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait penentuan cidera janji debitur pada perusahaan pembiayaan. Selain itu, putusan MK tidak serta merta menghilangkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan cidera janji. Putusan tersebut hanya memberikan pemaknaan jika terdapat perselisihan yaitu wanprestasi (cidera janji), maka penentuan cidera janji tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh debitur dan kreditur, serta debitur sudah sukarela dan beritikad baik menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan kepada kreditur sejak awal ditandatangani perjanjian tersebut. 2) Pelaksanaan Putusan MK Nomor 18/XVII/2019 terutama Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia pasca keluarnya putusan MK tersebut telah dipatuhi dan dirasakan efektif dampaknya oleh kreditur. Proses bisnis dan mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada perusahaan pembiayaan di Kota Padang (Capella Multidana, Toyota Astra Finance, dan Andalan Finance) telah berjalan sesuai dengan putusan tersebut. Dalam implementasi pelaksanaan Putusan MK Nomor 18/XVII/2019, seluruh pihak yang terkait harus mematuhi putusan tersebut. Sebagai konsekuensinya, perusahaan pembiayaan di Kota Padang memiliki strategi dengan menentukan klausul cidera janji secara mendetail dari sebelumnya

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Wanprestasi, Eksekusi, Perjanjian

342.07
ANN
p

PELAKSANAAN PROSES SELEKSI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KOTA BUKITTINGGI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020

Annisya Tri Ramadhani, 1710112023, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021

ABSTRAK

Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah adalah implementasi dari kedaulatan rakyat di negara demokrasi yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan. Penyelenggara yang dimaksud terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan lembaga penyelenggara pemilu terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP. Penyelenggara Pemilu mengatur jalan dan menetapkan peserta Pemilu, menetapkan pemilih, melakukan pemungutan suara, menghimpun rekapitulasi perolehan suara hingga menetapkan pemenang dari Pemilu, sehingga Penyelenggara Pemilu memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk menyukseskan Pemilu maupun Pilkada. Komisi Pemilihan Umum sebagai tonggak penyelenggara pemilihan memiliki wewenang membentuk peraturan KPU yang berguna untuk mengatur pelaksanaan dari kegiatan pemilihan dan dapat membentuk PPK, PPS, dan KPPS yang bersifat sementara. Pada proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS memberikan persyaratan dan formulir untuk keikutsertaan dalam keanggotaan penyelenggara tersebut. Namun, persyaratan tersebut belum menjadi tolak ukur dan jaminan dalam proses seleksi di lapangan, adanya perekrutan yang tidak merata pada Pemilu Serentak 2019 menjadi pertanyaan bagaimana pelaksanaan perekrutan pada Pilkada 2020 yang disertai dengan Pandemi Covid-19. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu pertama, Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dalam penerapan ketentuan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah pada proses penyeleksian? kedua, Bagaimana proses pelaksanaan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan sumber data yang didapat berasal dari hasil wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Penyelenggara Pemilihan Umum khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah. Pelaksanaan sosialiasi pada tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS merupakan wadah yang sangat penting agar partisipasi dari masyarakat meningkat. Kegiatan sosialisasi seperti Orientasi Tugas, Bimbingan Teknis, dan Rapat Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh KPU kepada PPK, PPS, dan KPPS untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Terjadinya Pandemi Covid-19 berakibat pada perubahan pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS yang mengharuskan KPU Kota Bukittingi mengikuti dan mempedomani peraturan tentang pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19.

345
TEG
p

PEMENUHAN HAK NARAPIDANA BERUPA HAK MENDAPATKAN KUNJUNGAN KELUARGA MELALUI VIDEO CONFERENCE PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SULIKI

Tegar Aprialdo Putra, 1710111078, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 80 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembinaan bagi Narapidana ada hak-hak Narapidana yang wajib untuk dipenuhi. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga, penasehat hukum dan orang tertentu lainnya,hal ini diatur pada Pasal 14 huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Mengingat kondisi ditengah pandemi COVID-19 sekarang ini, maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur terkait kebijakan kunjungan bagi Narapidana ditiadakan dan diganti dengan kunjungan online berbasis Video Conference. Terhadap penerapan kunjungan online ini terdapat beberapa hambatan yang dijumpai oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Berupa Hak Mendapatkan Kunjungan Keluarga Melalui Video Conference Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki?, Apa Saja Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Berupa Hak Mendapatkan Kunjungan Keluarga Melalui Video Conference Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki Dan Upaya Mengatasinya?. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Untuk data yang diperlukan bersumber dari data primer dan data sekunder yang diambil dari studi terhadap dokumen dan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan pelayanan kunjungan bagi Narapidana yang belum terlaksana secara optimal sesuai intruksi Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Belum optimalnya pelaksanaan hak ini disebabkan karena beberapa kendala seperti gangguan koneksi internet, minimnya sarana dan prasarana, SOP yang ditetapkan secara mandiri oleh pihak lapas dan keluhan dari pihak keluarga Narapidana yang kurang setuju dengan layanan kunjungan online tersebut. Dengan demikian maka sangat berpengaruh bagi pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Suliki dalam hal mendapatkan kunjungan keluarga baik secara teknis maupun secara psikologis.

346.08
ARG
p

PENYELESAIAN SENGKETA JAMINAN FIDUSIA OLEH ADIRA FINANCE MUARA ENIM TERHADAP DEBITUR CIDERA JANJI

Argi Putra Finalo, 1710113057, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 64 Halaman, 2020

ABSTRAK

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak berupa bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang no 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai bangunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Hukum di Indonesia juga mengatur penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan atau yang biasa kita sebut jalur non litigasi. Hal ini terjadi karena penyelesaian konflik melalui peradilan selalu sangat formal, berbiaya mahal, dan memakan waktu yang cukup lama. Hal ini dapat mendatangkan putus asa kepada para pihak yang menginginkan penyelesaian sengketa secara cepat,hukum di indonesia membuka peluang bagi penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan. Walaupun telah diatur demikian, pada kenyataannya masih banyak terjadi kasus debitur cidera janji pada perjanjian jaminan fidusia. Yang mana debitur lalai dalam melakukan kewajibannya yaitu pembayaran tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjiannya. Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia oleh Adira Finance Muara Enim terhadap debitur cidera janji? 2.Apa Akibat Hukum bagi debitur cidera janji dalam perjanjian jaminan fidusia di Adira Finance Muara Enim? Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yaitu menyelidiki hal-hal terkait dengan hukum secara langsung dan pelaksanaan dari norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1. Penyelesaian Sengketa jaminan Fidusia yang dilakukan Adira Finance Muara enim adalah dengan cara melakukan alternatif lain yaitu mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Setelah dilakukannya mediasi pihak Adira Finance akan Mengeksekusi unit Jaminan Fidusia tersebut.2.Akibat hukum bagi debitur yang melakukan cidera janji atau wanprestasi di Adira Finance Muara Enim adalah dan debitur harus membayar ganti rugi dan dilakukannya eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

345
ARI
k

KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Arian Miftah Adila, 1610111028, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 117 Halaman

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana khusus yang penanganan terhadapnya juga dilakukan dengan cara-cara yang khusus. Salah satu kekhususan itu terlihat dari keberadaan Pengadilan Tipikor yang ditugaskan khusus untuk memeriksa dan mengadili seluruh perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor. Namun pada kenyataannya tidak semua perkara korupsi yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Tipikor, berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Peradilan Militer, khusus untuk anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan korupsi diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer atau Pengadilan Tinggi Militer, Pasal tersebut menyatakan bahwa seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI diperiksa di Pengadilan-Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini ialah 1. Pengadilan manakah yang sesungguhnya berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia? dan 2. Bagaimanakah pengaturan terhadap pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI? Dengan melihat fakta bahwa terdapat lebih banyak dan lebih tinggi peraturan-peraturan yang menghendaki Pengadilan Tipikor untuk memeriksa TNI yang terlibat korupsi maka Pengadilan Tipikor lah yang sesungguhnya lebih tepat melaksanakan pemeriksaan dan mengadili anggota TNI yang melakukan Korupsi. Dari hasil penilitian ini ditemukan beberapa peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih di antaranya terdapat kumpulan peraturan perundang- undangan yang menghendaki pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memeriksa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI dilaksanakan oleh Pengadilan Tipikor yakni terdapat pada Pasal 27 ayat (1), Pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pada Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR VII/2000 tentang Peran TNI dan POLRI , Pada Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor dan Pada Pasal 4 ayat (1), Pasal 18, Pasal 25 ayat (4) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Sedangkan kumpulan peraturan perundang-undangan yang menghendaki pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan oleh Pengadilan-Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer terdapat pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Pasal 74 ayat (1) dan (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Agar terwujudnya hukum positif yang baik, maka seharusnya pembuat Undang- Undang yakni Presiden bersama DPR sesegera mungkin membuat Undang- Undang Peradilan Militer yang baru yang sesuai dengan TAP MPR VII/2000.

Kata kunci: Pengadilan, Korupsi, TNI, Kompetensi Absolut

346
ARI
p

PELAKSANAAN PROSES PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA MASA COVID-19 OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PADANG

Arini Savitri, 1710111092, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, PK VII (Hukum Administrasi Negara), 69 Halaman, 2021

ABSTRAK

Pelaksanaan proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Hal tersebut mendorong pemerintah dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengeluarkan kebijakan salah satunya dalam proses pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin melalui media elektronik yaitu Surat Edaran Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemanggilan, Pemeriksaan, dan Penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Melalui Media Elektronik Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil pada masa covid-19 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang? 2) Kendala apa yang ditemukan dalam proses pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil pada masa covid-19 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa: 1) Pelaksanaan Proses penjatuhan hukuman disiplin oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang (BKPSDM Kota Padang) pada masa covid-19 melalui media elektonik belum terlaksana sebagaimana mestinya, namun dilaksanakan penegakan hukuman disiplin secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan. 2) Kendala yang ditemui pada pelaksanaan proses penjatuhan hukuman disiplin oleh BKPSDM Kota Padang pada masa covid-19 ada 3 (tiga) yaitu dari pihak BKPSDM Kota Padang dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin memakan waktu yang lama. Kedua, keterbatasan pemahaman pegawai dalam menggunakan media elektronik untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut. Ketiga, dari instansi terkait terhadap kurangnya Pemahaman atasan langsung terhadap fungsi pembinaan, dan juga terhadap kasus atau permasalahan yang sampai ke BKPSDM Kota Padang belum terpenuhi norma dan prosedur yang harus diselesaikan di tingkat instansi masing-masing terlebih dahulu.

Kata Kunci : Hukuman disiplin, Pegawai Negeri Sipil, Covid-19

343.09
ANI
p

PENGAWASAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT DI KANTOR BERSAMA SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) PADANG

Arisa Nabiilah, 1710112005, 98 halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021

ABSTRAK

Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga rumusan masalah yang akan diteliti adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat di Kantor Bersama Samsat Padang. 2) Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan publik di Kantor Bersama Samsat Padang. 3) Bagaimana tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap permasalahan pelayanan publik di Kantor Bersama Samsat Padang. Penelitian ini dilakukan secara deskriptis analitis yaitu menggambarkan secara tepat pengawasan terhadap pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat di Kantor Bersama Samsat Padang. Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap pelayanan publik di Kantor Bersama Samsat Padang dilakukan dalam dua bentuk pengawasan yaitu berdasarkan laporan masyarakat dan inisiatif Ombudsman sendiri serta melakukan kegiatan upaya pencegahan maladministrasi. 2) Kendala yang dihadapi Ombudsman Perwakilan Sumatera barat dalam melakukan pengawasan pelayanan publik di Samsat Padang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. 3) Tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman di Kantor Bersama Samsat Padang atas laporan masyarakat pada tahun 2018 hingga tahun 2020 yang berjumlah enam laporan meliputi dua laporan ditemukan maladministrasi dan empat laporan lainnya tidak ditemukan maladministrasi, keenam laporan masyarakat tersebut dapat diselesaikan/ditutup dengan diberikan saran perbaikan pada tahap pemeriksaan laporan sehingga tidak ada pemberian tindakan korektif sedangkan sidak pelayanan publik telah disampaikan saran perbaikan secara langsung kepada pihak Kantor Bersama Samsat sebagai tindak lanjut dari sidak pelayanan publik tersebut.

Kata Kunci: Pengawasan, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Pelayanan Publik, Kantor Bersama Samsat.

343.09
SAF
p

PENGAWASAN PENGOPERASIAN JEMBATAN TIMBANG DI TANJUNG BALIK KABUPATEN 50 KOTA

Safira Lidia Dinanti, 1610111061, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, 78 Halaman, Tahun 2021

ABSTAK

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan dalam Pasal 4 huruf (b) untuk membina dan menyelenggrakan lalu lintas jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar harus menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lalu lintas dan jalan. Salah satu bentuk sarana yaitu berupa alat angkut Truk, sedangkan yang dimaksud dengan prasarana merupakan jalan serta jembatan timbang sebagai alat pengawasan dan pengamanan jalan. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor atau dikenal dengan Jembatan Timbang adalah unit kerja yang saat ini berada di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu. Dengan demikian, setelah berpindah kewenangan dari Dinas Perhubungan ke Kementerian Perhubungan dengan dikordinasikan oleh Badan Pengawasan Transportasi Darat Wilayah III Sumatera Barat selaku petugas penegak hukum, di Jembatan Timbang memiliki peraturan perundang-undang yang harus dijalankan dan ditaati oleh operator kendaraan, baik secara individual, kelompok, organisasi. Bagi yang melanggar ketentuan ini, tentu akan mendapatkan atau menerima sanksi hukum terhadap yang dilanggarnya. Seperti salah satu diantara aturan tersebut adalah penanganan ketentuan kelebihan muatan maka bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi hukum. Sehubungan dengan hal tersebut timbul beberapa permasalahan: (1)Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Pengoperasian Jembatan Timbang di Tanjung Balik Kabupaten 50 Kota, (2)Kendala yang ditemui dalam Pengawasan Pengoperasian Jembatan Timbang di Tanjung Bali Kabupaten 50 Kota. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelelitian hukum yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan jawaban bahwa prosedur penimbangan truk masuk ke lorong jembatan timbang kemudian akan di dapat hasil apakah muatan tersebut over dimensi dan di cocokkan dengan surat-surat. Karena menggunakan kemajuan teknologi e-money dan dokumen digital sehingga mempersulit pembukuan administrasi. Berdasarkan hal tersebut disarankan agar pemerintah tetap menyediakan transaksi manual karena tidak semua sopir dan pemilik truk mengerti perkembangan teknologi.

Kata Kunci: Pengawasan, Jembatan Timbang, Tanjung Balik Kabupaten 50 Kota

346
ATI
p

PELESTARIAN BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA DI KAWASAN KOTA LAMA OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG

Atikah Rahmadini Maiman, 1710111085, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, 87 halaman

ABSTRAK

Negara bertugas untuk memajukan kebudayaan yang ada di Indonesia dan membebaskan masyarakat untuk mengembangkan dan memelihara nilai-nilai budayanya terdapat pada Pasal 32 UUDRI 1945. Kawasan Kota Lama merupakan pusat sejarah Kota Padang dan menyimpan banyak sejarah. Bangunan gedung cagar budaya pada kawasan Kota Lama harus mendapatkan perhatian dan dilestarikan untuk mempertahankan nilai sejarah Kota Padang. Pemerintah Kota Padang sudah melakukan upaya dalam pelestarian bangunan gedung cagar budaya di kawasan Kota Lama, namun dari penampakan masih banyak yang terbengkalai dan dibiarkan begitu saja. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : (1) Bagaimana upaya Pemerintah Kota Padang dalam pelestarian bangunan gedung cagar budaya di kawasan Kota Lama Padang?; (2) Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam pelestarian bangunan gedung cagar budaya di kawasan Kota Lama Padang? Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer yaitu penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Padang dan dari hasil penelitian ditemukan bahwa upaya yang dilakukan Kota Padang berbeda antara bangunan gedung cagar budaya hak milik Kota Padang dengan yang bukan hak milik Kota Padang. Untuk hak milik Kota Padang yaitu dengan cara melakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan, sedangkan untuk yang bukan hak milik Kota Padang yaitu dengan cara pemberian informai kepada pemilik bangunan, pemasangan plakat tanda cagar budaya, pembagian urat edaran tertulis kepada penghuni bangunan, soialisasi dengan penghuni bangunan, pemberian surat teguran tertulis, pengawasan, dan melakukan pendataan dan penertiban tiap tahun, merencanakan proyek revitaslisasi,. Upaya tersebut dapat dikatakan belum maksimal dalam hal ini disebabkan oleh, faktor biaya (APBD), faktor kurangnya SDM, tidak adanya tim ahli cagar budaya, faktor kepemilikan, dan faktor kesadaran para pemilik.

Kata Kunci : Pelestarian, Bangunan Gedung, Cagar Budaya, Kawasan Kota Lama, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

342.07
AUL
p

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP OLEH KPUD SUMATERA BARAT DALAM PILKADA GUBERNUR 2020 DI KOTA PADANG

Aulia Gustira, 1710111027, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021

ABSTRAK

Pemilihan Umum Kepala Daerah yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945. Penyelenggaraan Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Setiap Pemilu yang ada di Indonesia pasti ada kendalanya salah satunya tentang Pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT). Untuk menanggulangi permasalahan tentang Pemutakhiran Data Pemilih ini diperlukan Peran dari KPU dalam pelaksanaannya, sehingga tahap Pemutakhiran Data Pemilih tidak terjadi kesalahan. Namun dalam pelaksanaanya mengenai Pemutakhiran Data dan Penyusunan DPT dalam menyelenggarakan Pilkada Provinsi Sumatera Barat 2020 khususnya di Kota Padang masih mengalami beberapa kekurangan, yaitu masih terdapat permasalahan Pemilih yang berhak memilih tidak terdaftar dalam DPT serta Pemilih Ganda yang masih terdaftar di dalam DPT yang seharusnya pemilih Ganda tersebut sudah dihapus sebelum menetapkan Hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran KPU dalam melakukan proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan DPT serta faktor yang mempengaruhi kualitas hasil Pemutakhiran Data dan Penyusunan DPT dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2020 di Kota Padang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik dan pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yakni : 1. Dalam DPT yang telah ditetapkan masih terdapat Daftar Pemilih Ganda dengan total adalah 464 Pemilih Ganda di Kota Padang dan tidak terdaftar dalam DPT menimbulkan banyak pemilih yang menggunakan KTP di saat hari pemungutan suara dengan total keseluruhan adalah 2.589 Pemilih di Kota Padang. 2. faktor yang mempengaruhi kualitas hasil Pemutakhiran Data dan Penyusunan DPT ini seperti adanya tindakan anggota PPDP yang dalam melakukan Pencoklitan tidak menemui seluruh pemilih yang ada didalam daftar pemilih dan kurang partisipasinya masyarakat dalam tahap Pemutakhiran Data Pemilih ini sehingga mengakibatkan beberapa kesalahan dalam Penyusunan DPT. Berdasarkan hasil penelitian penulis menyarankan Ketika proses pemutakhiran data di Kota Padang, di harapkan kepada PPDP sebagai ujung tombak pemutakhiran data melakukan tugas dengan maksimal dan masyarakat lebih partisipatif dalam menyeleksi daftar pemilih sewaktu ditempel di Kantor Lurah sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekelirun dapat dilakukan perbaikan secepat mungkin.

345
AVI
p

PENEGAKAN KEADILAN RESTORATIF MELALUI MEDIASI PENAL OLEH KEPOLISIAN SEKTOR KURANJI TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN

Avira Friszia, 1710113060, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 Halaman,Tahun 2021

ABSTRAK

Keadilan restoratif merupakan salah satu pendekatan hukum pidana dalam menyelesaikan suatu perkara pidana yang memiliki tujuan untuk pemulihan keadaan semula dan keadilan bagi para pihak. ADR adalah mediasi penal. Mediasi penal merupakan suatu bentuk penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan dengan mempertemukan para pihak yang berperkara untuk melakukan musyawarah agar tecapainya suatu kesepakatan yang dituliskan dalam surat perjanjian dan ditandatangi oleh para pihak,tujuan dari mediasi ini adalah untuk tercapainya keadilan bagi para pihak dan menghindari pelaku dari sistem peradilan pidana. Di wilayah hukum Polsek Kuranji dari tahun 2017 hingga 2020 terdapat 61 kasus tindak pidana ringan, 38 kasus diantaranya diselesaikan dengan mediasi penal oleh Kepolisian Sektor Kuranji, namun ada beberapa kasus yang dalam pelaksanaannya tidak tercapai tujuan dari mediasi penal tersebut. Berdasarkan alasan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama bagaimana penegakan keadilan restoratif melalui mediasi penal yang dilakukan oleh Polsek Kuranji terhadap tindak pidana ringan? Kedua apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan keadilan restoratif melalui mediasi penal yang dilakukan oleh Polsek Kuranji terhadap tindak pidana ringan? Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dan studi dokumen. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa penegakan mediasi penal oleh Polsek Kuranji dilakukan dengan didasarkan pada peraturan Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, lalu untuk prosedur mediasi penal di Polsek Kuranji dilakukan berdasarkan standar operasional dari pimpinan Polsek Kuranji, hal ini dikarenakan belum ada aturan yang mengatur mengenai standar operasional prosedur mediasi penal tersebut. Prosedurnya yaitu adanya laporan dari pihak korban kepada pihak kepolisian, lalu kepolisian melakukan penyelidikan apabila kasus tersebut termasuk tipiring maka akan diupayakan mediasi penal dengan syarat disetujui oleh para pihak, apabila bila disetujui maka mediasi penal dilakukan dengan dihadiri oleh pelaku,korban serta perwakilan masyarakat untuk mengikuti musyawarah mencari solusi penyelesaian dan kesepakatan, apabila tercapai maka dibuatkan surat yang ditandatangani oleh para pihak. Lalu kendala-kendala yang dihadapi oleh Polsek Kuranji adalah pelaku yang tidak mengakui perbuatannya, kurangnya pengawasan kepolisian,pihak korban menolak dilakukannya mediasi penal,pihak korban dan pelaku belum menemukan kesepakatan, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai proses penyelesaian mediasi penal.

Kata Kunci: Tindak Pidana Ringan, Mediasi Penal, Kepolisian.

343.09
AZM
p

PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA NAGARI OLEH INSPEKTORAT DAERAH DI NAGARI TIKU UTARA KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM

Azmeldi Gusra, 1610112013, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 56 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara Hukum hal ini dicantumkan dalam UUD 1945 salah satunya ialah mengatur tentang otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian hak, wewenang, dan kewajiban tersebut diharapkan agar daerah dapat melakukan pembangunan atas dasar kemauan dan kemampuan daerah itu sendiri. Pengelolaan Keuangan Dana Nagari yang selanjutnya disebut sebagai Desa Adat dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Agam terhadap pengelolaan Dana Nagari di Nagari Tiku Utara melalui beberapa tahapan yaitu penyusunan rencana pengawasan, pelaksanaan pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, pemantauan dan pemuktahiran. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana bentuk pengelolaan dana nagari di Nagari Tiku Utara? 2) bagaimana pengawasan pengelolaan dana nagari oleh Inspektorat Daerah yaitu di Nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Dana Nagari di Nagari Tiku Utara telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana pengelolaan Dana Nagari tesebut ditujukan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pengawasan Dana Nagari Yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Agam dapat disimpulkan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan kurangnya jumlah sumber daya manusia di kantor Inpektorat Kabupaten Agam sehingga pengawasan terhadap pengelolaan Dana Nagari tidak terlaksana secara optimal dan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Pengawasan, Dana Nagari, Inspektorat Daerah

345
BAY
p

PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUMAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP PENADAH KAYU HASIL TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT

Bayu Fernanda, 1610111043, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 83 Halaman, 2020

ABSTRAK

Tindak pidana penadahan hasil pembalakan liar telah diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan pada Pasal 4 yang berbunyi “Pembalakan liar adalah segala kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”. Penadah kayu tidak dibunyikan di dalam Undang- Undang Nomor 13 tahun 2013 secara eksplisit, tetapi ada pasal yang unsur-unsur pelanggarannya sebagai penadahan kayu yaitu Pasal 12 huruf k, l, dan m. Salah satu permasalahan adalah proses penegakan hukum yang belum bisa menyentuh segala pihak yang terlibat dalam kegiatan pembalakan liar, polisi hanya bisa menjerat supir yang membawa kayu, padahal pembalakan liar sendiri melibatkan banyak pihak baik itu dari si penebang sampai kepada si penadah kayu. Pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: Pertama, bagaimanakah peran penyidik kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penadahan hasil tindak pidana pembalakan liar di wilayah hukum Polda Sumatera Barat? Kedua, bagaimanakah alasan hukum penyidik dalam menetapkan penadahan kayu hasil tindak pidana pembalakan liar sebagai tersangka dalam kasus pembalakan liar? Ketiga, apakah kendala dalam menetapkan tersangka penadahan hasil tindak pidana dalam pengembangan kasus pembalakan liar? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Dalam melaksanakan peran sebagai penyidik kepolisian, Subdit IV Reskrimsus Polda Sumatera Barat telah melakukan upaya pemberantasan berupa penyelidikan dan penyidikan, untuk meminimalisir peredaran kayu ilegal kepolisian melakukan kerjasama dengan instansi pemerintahan dan kepolisian di daerah tempat terjadinya kasus pembalakan liar, melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang kehutanan dan undang-undang terkait. Dalam menetapkan tersangka penadahan penyidik kepolisian dari Subdit IV Reskrimsus Polda Sumatera Barat memakai dasar hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf c dan Pasal 87. Kendala dalam menetapkan pelaku penadah sebagai tersangka pada kasus pembalakan liar dari faktor internal adalah kurangnya dana, fasilitas prasarana, anggota dan kurangnya pengetahuan penyidik dalam menentukan jenis-jenis kayu sebagai alat bukti. Pada faktor eksternal yang menjadi kendala adalah adanya modus operandi baru, kurangnya saksi, alat bukti, serta kerja sama dengan masyarakat. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan peran aktif bukan hanya dari kepolisian tetapi peran dari masyarakat serta instansi pemerintahan terkait juga diperlukan. Polisi juga diharapkan harus memiliki satuan tugas khusus yang dapat bergerak serentak untuk menangkap pelaku pembalakan liar yang menggunakan modus operandi baru yang nanti akan berakibat kepada kerugian negara.

Kata kunci: penyidik, polisi, penadah kayu, dan pembalakan liar

346
BOB
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI

Bobby Kurniawan, 1710113047, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 80 halaman, 2021

ABSTRAK

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) adalah suatu balai bertanggung jawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya, termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan, dan lembaga-lembaga konservasi. Apabila terjadi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi maka BKSDA berwenang melalukan penyidikan hal ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati Ekosistem (UU KSDAHE). Tindak pidana perdagangan satwa menurut UU KSDAHE Pasal 21 adalah memperjualbelikan satwa yang dilindungi secara liar dan illegal, baik yang memperjualbelikannya dalam keadaan hidup untuk dipelihara maupun dalam bentuk hewan yang sudah diawetkan. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh BKSDA Sumbar terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi? (2)Apakah kendala yang dihadapi BKSDA Sumbar terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi? (3)Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan BKSDA Sumbar terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi?. Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini bersifat yuridis sosiologis (empiris). Adapun hasil penelitian yaitu penyidik melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan satwa, meminta keterangan dari orang atau badan hukum, meminta keterangan dari saksi dan meminta barang bukti, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Kendala yang dihadapi oleh BKSDA Sumbar adalah kurangnya personil penyidik dari BKSDA Sumbar, kurangnya anggaran yang dimiliki BKSDA Sumbar, kurangnya kesadaran masyarakat akan satwa yang dilindungi dan perdagangan satwa tersebut terjadi di pasar gelap. Upaya untuk mengatasi kendala pelaksanaan penyidikan ini BKSDA Sumbar melakukan sosialisasi kepada masyakat, melakukan patroli ke daerah rawan perdagangan satwa yang dilindungi dan penyidik BKSDA berkoordinasi dengan penyidik Polri.

Kata Kunci: Penyidikan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Tindak Pidana Perdagangan Satwa.

344.03
BUN
p

PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA MASYARAKAT AKIBAT KERUSAKAN LINGKUNGAN DI SEKITAR TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR PADANG KARAMBIA PAYAKUMBUH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

Bunga Jilandri Putri, 1710111023, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 80 halaman, 2021

ABSTRAK

Lingkungan hidup adalah satu kesatuan dari suatu ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia. Masalah lingkungan merupakan salah satu isu penting dalam globalisasi maka semua pihak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan secara proporsional. Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu dalam hal pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berperan untuk memberikan kompensasi atas kerusakan lingkungan. Salah satu wilayah yang menjadi kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam pemberian kompensasi adalah kawasan TPA Regional Payakumbuh. Sehingga rumusan masalah yang akan diteliti adalah: 1) Bagaimana pemberian kompensasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat yang menerima dampak dari pencemaran TPA Regional Payakumbuh. 2) Apa yang menjadi kendala dalam pemberian kompensasi akibat pencemaran lingkungan kepada masyarakat di kawasan TPA Regional Payakumbuh. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara jelas pemberian kompensasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat akibat dampat dari TPA Regional Payakumbuh. Jenis penlitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Dalam melakukan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak dari longsor yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir Regional Payakumbuh oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, pemberian kompensasi diberikan dalam bentuk ganti rugi. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tidak memberikan kompensasi dalam bentuk relokasi, pemulihan lingkungan dan biaya kesehatan dikarenakan tidak adanya masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Tempat Pembuangan Akhir Regional Payakumbuh, melainkan hanya lahan yang dimiliki oleh masyarakat. 2) Dalam melakukan pemberian kompensasi kepada masyarkat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mempunyai kendala yang menghambat terlaksananya pemberian kompensasi tersebut, yaitu kendala yuridis. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam pemberian kompensasi akibat dampak negatif dari Tempat Pembuangan Akhir.

Kata Kunci : Kompensasi, Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup.

341.48
CER
p

PEMENUHAN HAK LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI KOTA PADANG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Ceria Jumiatul Suci, 1710113090, Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, 59 Halaman,Tahun 2021

ABSTRAK

Hak lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia. Tanggung jawab negara dalam memenuhi hak lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan dalam penelitian ini adalah; Pertama, Bagaimana implementasi pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Padang?, Kedua, Apa saja kendala dalam pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Padang ?, Ketiga, Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Padang ?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah; Pertama, Pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat belum terpenuhi dengan baik. Kedua, kendala dalam pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Padang adalah kurangnya sarana prasarana, kurangnya pengawasan dari pemerintah serta penerapan sanksi yang belum tegas. Ketiga, Upaya pemerintah daerah dalam pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah melakukan pengawasan terhadap pelanggaran dan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan masyarakat dan pelaku usaha dengan bantuan satpol pp, menyediakan wadah aspirasi masyarakat atas adanya dugaan pencemaran lingkungan, memberikan pendidikan lingkungan hidup, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang perlindungan hak lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat melalui program bank sampah. Saran, Pertama, agar Pemerintah Kota Padang memberikan kepastian hukum dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran dan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pelaku usaha, Kedua, agar Pemerintah Kota Padang lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran dan pencemaran lingkungan, Ketiga, agar Pemerintah Kota Padang dapat menambah anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam bidang lingkungan hidup.

Kata Kunci : Pemenuhan HAM, Hak Lingkungan Hidup

346.02
CHA
p

PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INTI PLASMA ANTARA PT. TASMA PUJA DENGAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) KAMPAR DI KABUPATEN KAMPAR

Chairiza Devira Ramadhanty, 1710111091, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 halaman, 2021

ABSTRAK

Koperasi Unit Desa (KUD) Kampar diwajibkan untuk melakukan perawatan terhadap kebun kelapa sawitnya, namun perawatan terhalang dilakukan karena pinjaman kredit dari Bank Danamon tidak cair akibat krisis moneter yang mengakibatkan terbengkalainya kebun selama lebih kurang 9 tahun. Hal ini mendorong KUD Kampar untuk menjalin kerjasama dengan PT. Tasma Puja yang diwujudkan dengan dibuanya perjanjian pemeliharaan dan pengkaplingan kebun plasma Nomor: 01/KUD-K/TASPU/XI/2007. Pada pelaksanaan perjanjian, petani KUD Kampar melakukan wanprestasi yaitu tidak mengirimkan tandan buah segar setiap bulannya kepada pabrik PT. Tasma Puja yang mengakibatkan perusahaan tidak bisa memotong hasil penjualan untuk pembayaran hutang petani atas biaya pemeliharaaan yang dilakukan oleh PT Tasma Puja. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan pada perkebunan kelapa sawit inti plasma antara PT. Tasma Puja dengan KUD Kampar di Kabupaten Kampar? 2) Apa kendala yang ditemui dan penyelesaiannya dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan pada perkebunan kelapa sawit inti plasma antara PT. Tasma Puja dengan KUD Kampar di Kabupaten Kampar? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara dengan jenis data yang diproleh adalah data primer dan data sekunder, yang dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Perjanjian kemitraan antara PT. Tasma Puja dengan KUD Kampar telah sesuai dengan ketentuan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata 2) Kendala yang ditemui yaitu petani KUD Kampar melakukan wanprestasi tidak mengirimkan tandan buah segar setiap bulannya kepada pabrik PT. Tasma Puja yang mengakibatkan tidak bisa dilakukan pemotongan angsuran hutang petani. KUD Kampar selaku pihak yang bertanggungjawab tidak mengambil tindakan dari perbuatan wanprestasi petani, susai dengan perjanjian. Penyelesaian wanprestasi yaitu PT. Tasma Puja hanya mengirimkan laporan bulanan yang berisikan hutang petani sebagai surat peringatan untuk dilakukannya pembayaran atas hutang petani KUD Kampar sekaligus sebagai peringatan bagi KUD Kampar untuk melakukan prestasinya.

Kata Kunci: Perjanjian, Kemitraan, Inti Plasma

343.09
CIC
u

UPAYA PELESTARIAN HUTAN MANGROVE/HUTAN BAKAU OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN DI DESA SIMPANG APAR KOTA PARIAMAN

Cici Hanifa, 1610111131, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2021

ABSTRAK

Hutan memiliki peran dalam peningkatan sumber daya alam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak 130 kaki selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi sungai. Hutan mangrove termasuk ke dalam hutan yang keberadaannya dilindungi oleh undang- undang. Di Desa Simpang Apar Kota Pariaman memiliki hutan mangrove, padakenyataannya terjadi penebangan pohon di kawasan hutan mangrove sehingga, pelestarian dan perlindungan hutan mangrove belum berjalan dengan baik. Masalah yang akan dicari jawabannya adalah pertama, bagaimana upaya pelestarian hutan mangrove/hutan bakau oleh Dinas Lingkungan Hidup di desa Simpang Apar Kota Pariaman . kedua, apa hambatan dan solusi dalam upaya pelestarian hutan mangrove/hutan bakau didesa Simpang Apar Kota Pariaman. Ketiga, bagaimana tindaklanjut dari upaya penanggulangan kerusakan hutan mangrove di desa Simpang Apar Kota Pariaman. Untuk menjawab hal terebut penulis akan menggunakan metodeyuridis empiris yaitu melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam lapangan.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa upaya pelestarian hutan mangrove oleh DLH bekerjasama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan dan organisasi TDC melakukan kegiatan reboisasi hutan mangrove, sosialisasi pada masyarakat dan pembangunan trekking hutan mangrove. Hambatan dari upaya peletarian di ketahui rendahnya pemahaman masyarakat terkait hukum dan kurangnya pengawasan hutan mangrove, solusi: membuat pemerintah harus lebih mehimbau mayarakat dalam memahami terkait Undang-Undang pelarangan dan perusakan hutan. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pariaman mengatakan kedepannya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Polres, BPBD dan Satpolpp dalam pengawasan disekitar kawasan hutan mangrove. Dalam penanggulangan perusakan hutan mangrove sepakat dilakukan pemberhentian pengerjaan disekitar hutan mangrove.

Kata Kunci : Pelestarian, Mangrove, Dinas Lingkungan Hidup.

348.04
CIN
a

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KEHILANGAN BARANG BAGASI TERCATAT PADA PT. LION MENTARI AIRLINES (STUDI PUTUSAN NOMOR 605/PDT.SUS-BPSK/2012)

Cindy Ishlaha, 1710112124, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2021

ABSTRAK

Pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan penumpang dan/atau pengirim, dimana pengangkut dan penumpang dan/atau pengirim saling mengikatkan diri. Salah satu transportasi atau pengangkutan angkutan udara. Masalah kerusakan atau hilangnya barang bawaan penumpang dalam bagasi tercatat pada maskapai penerbangan nasional merupakan hal yang sudah seringkali terjadi, baik disebabkan oleh kesalahan manusia (human error), kesalahan sistem bahkan bisa disebabkan oleh kelalaian penumpang. Salah satu kasusnya yaitu hilangnya koper salah satu penumpang yang disimpan dalam bagasi tercatat pada penerbangan Lion Air tanggal 4 Agustus 2011 tujuan Jakarta – Semarang dengan nomor penerbangan JT-0506 dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor. 605/Pdt.Sus-BPSK/2012. Pada kasus tersebut Pihak Lion Air sanggup mengganti kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) sesuai Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara. Sedangkan BPSK Kota Semarang mengeluarkan putusan untuk menghukum Lion Air mengganti rugi kehilangan koper Herlina sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) atau setengah dari nilai barang yang ada di koper. Pihak Lion Air menganggap putusan ini tidak adil dan hanya berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan pemaparan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa dalam kehilangan barang bagasi tercatat? 2) Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan terhadap Putusan Nomor. 605/Pdt.Sus-BPSK/2012? 3) Bagaimana bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap kehilangan barang bagasi tercatat? Pada penelitian ini penulis penulis menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dari literatur yang terkait dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menguraikan fakta dengan memperbandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil yaitu : 1) Prosedur penyelesaian sengketa dapat dilakukan 2 cara, yaitu melaui non litigasi seperti mediasi, konsiliasi atau arbitrase, serta melalui litigas. 2) Majelis BPSK telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan penerbangan untuk menentukan jumlah ganti rugi yang akan diberikan kepada penumpang dan melihat dari sisi aspek lainnya serta didasarkan pula pada nalar majelis dalam memberikan keadilan baik untuk pihak penumpang maupun pihak maskapai penerbangan, selama penumpang meminta ganti rugi yang sewajarnya. 3) Tanggung jawab terhadap hilangnya barang bagasi tercatat yang dimiliki penumpang yang masih berada di dalam pengawasan maskapai dari mulai saat check-in sampai penumpang mengambil barang bagasi kembali di conveyor belt.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Kehilangan, Barang Bagasi Tercatat

341.48
CIN
k

KEPASTIAN HUKUM TERKAIT LEGALITAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA

Cindy Nazly Monica, 1710111053, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2021

ABSTRAK

Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma diatur dalam KUHD, sedangkan Persekutuan Perdata diatur dalam KUHPerdata. Pada tanggal 1 Agustus 2018 Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan sebuah produk hukum baru yang mengatur prosedur pendaftaran persekutuan dengan diterbitkannya Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Prosedur pendaftaran dalam dua aturan ini memiliki cara yang berbeda sehingga kepastian hukum yang menjadi tujuan awal pembentukannya tidak tercapai. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma dan persekutuan perdata setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018, Bagaimana kepastian hukum terkait legalitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni dengan melihat pada peraturan perundang-undangan dan menganalisa dengan buku-buku, jumal dan literatur lain. Adapun hasil dari penelitian ini pertama, bahwasannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 memberikan regulasi yang jelas terkait pendaftaran badan usaha bukan badan hukum yaitu dengan pengajuan nama berdirinya usaha sampai pendaftaran usaha yang akan diberikan izin oleh kementerian hukum dan ham untuk menjadi sebuah usaha saat dikeluarkannya SKT, kedua kepastian hukum dari Permenkumham tersebut berdasarkan aturan pembentuknya sudah sesuai namun bila disandingkan dengan aturan lain yang memuat substansi yang sama maka tidak sesuai karena kedudukan KUHPerdata dan KUHD berada diatas Permenkumham. Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka penulis menyarankan pemerintah untuk membentuk aturan yang setara dengan KUHD dan KUHPerdata dan memuat pasal yang mencabut ketentuan tersebut serta memberikan edukasi secara langsung mengenai prosedur pendaftaran kepada segala lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, KUHPerdata, KUHD, Permenkumham

343.04
WIL
p

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN FINTECH PEER TO PEER LENDING TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL SUMATERA BARAT

Wilna Oktavia Putri, 1610111129, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2021

ABSTRAK

Fintech Peer to Peer Lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Peer-to-Peer (P2P) Lending merupakan fasilitas kredit tanpa agunan untuk memperoleh pinjaman, dengan kemudahannya dalam memperoleh pinjaman banyak menimbulkan masalah hukum. Di Otoritas Jasa Keuangan Regional Sumatera Barat yang mengajukan pengaduan berstatus sebagai lender atau sebagai pemberi pinjaman yang menginvestasikan dananya ke fintech lending tetapi fintech lending ini tidak mengembalikan dana sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Metode penelitian adalah yuridis empiris, yaitu menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen fintech peer to peer lending terdaftar di kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional Sumatera Barat. Apa kendala yang dihadapi OJK Regional Sumatera Barat dalam penyelesaian sengketa konsumen fintech peer to peer lending terdaftar dan apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian sengketa oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional Sumatera Barat hanya sampai tahap penelaahan pengaduan dan ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan Pusat dengan menunjuk fasilitator sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa, yang menjadi fasilitator dalam hal ini adalah pejabat/pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang memenuhi persyaratan. Pada sengketa konsumen ini pihak penyelenggara atau Fintech Lending telah membayar ganti kerugian terhadap konsumen dan hal ini telah di konfirmasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Pusat dan kendala dalam penyelesaian sengketa konsumen membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyelesaian sengketa karena semua Fintech Lending berpusat di Jakarta, solusinya dengan mengharuskan Fintech Lending yang akan melakukan usahanya harus memiliki kantor pemasaran atau cabang di tingkat Provinsi. Selanjutnya masih banyak masyarakat yang mengajukan pengaduan terkait Fintech Illegal, mengatasi hal tersebut OJK mengadakan sosialisasi ke masyarakat agar lebih bijak dan berhati hati dalam melakukan pinjaman online. Penyelesaian sengketa di lakukan sampai tahap penelahaan pengaduan oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional Sumatera Barat. Kendala yang di hadapi Otoritas Jasa Keuangan prosesnya butuh waktu lama karena diteruskan ke Otoritas Jasa Keuangan Pusat. Diharapkan kepada konsumen untuk lebih hati hati dalam menginvestasikan dananya.

Kata Kunci : Penyelesaian sengketa, Fintech P2P Lending, Otoritas Jasa Keuangan

345.02
DAZ
k

KEDUDUKAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

D. Aziz Abdullatif, 1610113098, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan perangkat baru yang hadir dalam tubuh KPK pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasan pembentukannya adalah karena secara ketatanegaraan, KPK yang sebelumnya dianggap tidak dapat dikontrol oleh kekuasaan pemerintahan atau lembaga manapun, sehingga sangat bertentangan dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Dibentuknya Dewan Pengawas KPK yang dipilih langsung oleh Presiden melalui panitia seleksi, membuat KPK harus melaporkan segala aktifitasnya kepada Dewan Pengawas, khususnya dalam melakukan penyadapan, penyitaan dan penggeledahan. Kontroversi tersebut mengakibatkan kedudukan dari Dewan Pengawas KPK menjadi tidak sesuai dengan konsep dan teori Komisi Negara Independen. Atas dasar itu dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai bagaimana Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menganalisis dari dua aspek. Pertama, bagaimana mekanisme pengisian jabatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?. Kedua, bagaimana Tugas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kedudukan Dewan Pengawas KPK menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sangatlah tidak sesuai dengan konsep dan teori Komisi Negara Independen dan dapat mengancam indepensi KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya memberantas tindak pidana korupsisangat berbeda dengan lembaga pengawas lainnya yang sudah lebih dulu lahir dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang begitu transparan, akuntabel, dan memuat itikad baik dalam pemilihan perangkatnya. Hasil penelitian ini juga diketahui bahwa tugas Dewan Pengawas terlalu super power, yang mengakibatkan segala langkah dan gerak dari KPK itu bergantung kepada izin dari Dewan Pengawas, selain itu objek yang diawasi Dewan Pengawas KPK juga multitafsir dan mengakibatkan ketidakpastian hukum, karena Dewan Pengawas juga merupakan satu kesatuan dari KPK itu sendiri.

341
DHI
p

PENGATURAN PENGGUNAAN ROBOT PEMBUNUH (KILLER ROBOT) SEBAGAI AUTONOMOUS WEAPON SYSTEM BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Dhiyaul Okasha Rafifa, 1710113052, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2021

ABSTRAK

Robot pembunuh atau killer robot merupakan senjata baru yang memiliki autonomous weapon system di dalam programnya sehinggga dapat mendeteksi dan menyerang target tanpa adanya intervensi lebih lanjut dari manusia. Robot tersebut memiliki dampak positif karena semua kecanggihan yang ditawarkan dalam senjata teknologi ini, namun disisi lain robot pembunuh juga mamberikan dampak negatif yang akan merugikan manusia. Hal ini dikarenakan robot pembunuh merupakan sebuah isu baru yang hingga saat ini belum terdapat adanya pengaturan dan pembatasan yang jelas mengenai pengembangan dan penggunaannya dalam sebuah konflik bersenjata. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas: 1) Bagaimana pengaturan penggunaan robot pembunuh (killer robot) sebagai autonomous weapon system berdasarkan hukum humaniter internasional? 2) Apa saja upaya yang dilakukan masyarakat internasional dalam mengantisipasi penggunaan robot pembunuh (killer robot) di masa yang akan datang? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sekunder, yang merupakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan media elektronik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: 1) Pengaturan penggunaan robot pembunuh (killer robot) sebagai autonomous weapon system berdasarkan hukum humaniter internasional sudah diatur, tetapi belum tegas dan spesifik. Pengaturan itu dapat dilihat dalam Konvensi Den Haag Tahun 1907, Konvensi Jenewa Tahun 1949, Protokol Tambahan I (AP I) Tahun 1977, maupun Convention on Certain Conventional Weapon (CCW) Tahun 1980; 2) Upaya yang dilakukan masyarakat internasional dalam mengantisipasi penggunaan robot pembunuh (killer robot) di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan cara membuat aturan yang jelas terhadap penggunaan robot pembunuh. Apabila penggunaan robot pembunuh menyalahi ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional, maka terdapat dua pertanggung jawaban yang dapat dijadikan sanksi yaitu: Pertanggung Jawaban Negara (State Responsibility) dan Pertanggung Jawaban Individu (individual responsibility).

346.07
DAR
p

PELAKSANAAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KIOS ANTARA PIHAK PEDAGANG DENGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DI PASARPUSAT KOTA PADANG PANJANG

Dara Amalia, 1710112085, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan HukumPerdata Murni (PK I), 69 halaman – Tahun 2021

ABSTRAK

Pasar merupakan suatu kawasan dimana masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi. Di Pasar Pusat Kota Padang Panjang yang dikelola langsung oleh pemerintah dalam hal ini berada dibawah wewenang Dinas Perdakop dan UKM. Pengelolaan tersebut harus dengan tujuan utama demi kesejahteraan masyarakat. Mengenai tempat usaha berupa kios yang berada di Pasar Pusat Kota Padang Panjang dimana setiap pedagang harus mendapatkan izin dari Dinas Perdakop dan UKM untuk mendapatkan hak sewa,yaitu dengan menandatangani perjanjian sewa. Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang. Terdapat klausal-klausal yang harus ditaati oleh kedua pihak tanpa ada yang merasa diberatkan. Penulis dalam melakukan penelitian merumuskan masalah yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan asas keseimbangan dalam perjanjian sewa menyewa kios antara pedagang dan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Pasar Pusat Kota Padang Panjang? 2. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan yang timbul dari pelaksanaan perjanjiaan sewa menyewa kios di pasar pusat Kota Padang Panjang. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1. Asas keseimbangan dalam suatu perjanjian tidak mutlak ditentukan oleh kedudukan para pihak, tetapi juga terdapat aspek lain untuk dapat mengetahui apakah suatu perjanjian dapat dikatakan seimbang yaitu dengan tidak adanya pihak yang mendominasi pihak lain dan adanya harmonisasi isi perjanjian serta dilihat apakah ada keadilan bagi para pihak. 2. Pedagang bertanggung jawab terhadap kios yang ditempatinya yang salah satunya seperti tidak menelantarkan/mengulang-sewakan kios pada pihak ketiga kecuali dengan sepengetahuan pihak pertama. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Perdakop dan UKM yaitu kurangnya pemahaman mengenai hak sewa oleh pedagang sehingga menimbulkan permasalahan seperti perubahan fisik pada bentuk kios dan keterlambatan membayar uang sewa. Pada dasarnya, permasalahan yang timbul karena kurangnya pengawasan dan kontroling secara berkala dari Dinas Perdakop dan UKM di Pasar Pusat Kota Padang Panjang sehingga terjadinya pelanggaran.

Kata Kunci: Asas Keseimbangan, Perjanjian, Sewa Menyewa

341
DEB
p

PENGATURAN INDIKASI GEOGRAFIS DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Deby Septia, 1610111143, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68 halaman, Padang 2021

ABSTRAK

Indonesia banyak memiliki produk-produk yang bercirikan indikasi geografis. yang salah satunya produk yang dihasilkan dari alam yang menunjukkan asal aslinya barang diwilayah Negara anggota atau suatu daerah diwilayah negara anggota dimana kualitas, reputasi atau ciri-ciri benda tersebut memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan suatu hasil karya intelektula manusia berupa ide yang mewujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan karya ilmu pengetahuan, sastra, seni, desain kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas tanaman.. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa : Indikasi geografis yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Sangat pentingnya pendaftaran produk dengan indikasi geografis. Masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaturan Hak Indikasi Geografis dalam Hukum Internasional?, bagaimana penerapan ketentuan TRIPs terkait Indikasi Geografis dalam Hukum Nasional?. Tipe penelitian hukum yuridis normatif adalah pendekatan yang berdasarkan bahan hukum. Sumber data yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang dirperoleh studi kepustakaan atau library research dan bahan yang di kumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Cara untuk pendaftaran hak yang dimiliki pendaftar, siapa pihak yang memengang hak tersbut akan mendapatkan keuntungan dari pendaftaran komoditas. Indikasi geografis diatur dalam beberapa perjanjian atau konvensi internasional anatara lain Konvensi Paris, The Madrid, perjanjian The Lisabon dan perjanjian TRIPs. Pemerintahan Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan agreement estabilishing The World Trade Organization (persetujuan pembentukan organisasi perdagngan dunia). Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah suatu instrument hukum yang melindungi indikasi gegrafis di Indonesia. Dan juga Pengaturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang indikasi geofgrafis yang terdapat Pasal 3 dan Pasal 11 syarat dan tata cara permohonan. Pemeriksaan substansif dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 permohonan pemeriksaan substantif dengan mengisi formulir permohonan rangkap 2 dalam bahasa Indonesia oleh pemohon kuasanya.

Kata Kunci : Indikasi Geografis, Hukum Nasional, Hukum Internasional

345
DEF
u

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN KOTA PADANG OLEH DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA SUMATERA BARAT

Defrian Anggara, 1710113100, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana), 103 Halaman, 2021

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau serta panjang pantai 81 juta Km2 Tindak pidana di bidang perikanan diatur dalam BAB XV Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Penanggulangan tindak pidana yaitu meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Ditpolairud Polda Sumbar sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab dalam penanggulangan tindak pidana illegal fishing yang terjadi di wilayah Perairan Kota Padang. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumbar terhadap tindak pidana illegal fishing di wilayah Perairan Kota Padang? 2. Apa kendala yang dihadapi oleh Direkotrat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumbar dalam menanggulangi tindak pidana illegal fishing di wilayah perairan Kota Padang? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 1. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Barat melakukan upaya preventif seperti penyuluhan, patroli, dan memudahkan urusan admnisitratif. Upaya represif yaitu menerapkan sistem peradilan pidana seperti menerima laporan atau menangkap tangan, menghentikan kapal, pemeriksaan kapal, penggeledahan kapal, penangkapan kapal, membawa atau mengawal kapal, penyitaan atau penyegelan barang bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, dan penyerahan tersangka dan barang bukti untuk menanggulangi tindak pidana illegal fishing di perairan Kota Padang. 2. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara dalam menanggulangi tindak pidana illegal fishing seperti kurangnya anggara, jarak tempuh yang jauh dengan kapal yang terbatas, kemajuan teknolohi dan tumpang tindih wilayah perairan. Dan beberapa kendala umum seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya dan nilai strategis sumber daya kelautan, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Upaya yangdapat dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Barat untuk mengatasi kendala tersebut berupa peningkatan anggaran tiap tahunnya, melakukan pengajuan alat pendukung, melakukan koordinasi dengan DKP Sumbar untuk melakukan patroli, melakukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci : Penanggulangan, Illegal Fishing, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumatera Barat

348.3
DEN
p

PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DI DESA LUBUK GIO KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU)

Derry Setiawan 1710113051, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Tata Negara, 60 Halaman, 2021

ABSTRAK

Pemerintahan Desa merupaka perwujudan dari Otonomi Desa, dimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa bekerja sama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarkatnya. Pembentukan BPD bertujuan mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan mendorong terciptanya mitra kerja yang harmonis antara BPD dan Kepala Desa. Dalam hal ini BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja Kepala Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Gio Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi BPD dan apa saja faktor yang menjadi kendala belum optimalnya pelaksanaan fungsi BPD di Desa Lubuk Gio Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Jenis Penelitian ini adalah Yuridis Empiris dan metode yang digunakan adalah Metode Analisis Kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian dianalisa secara Deskriptif Kualitatif yaitu suatu analisa dengan menggambarkan secara rinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lubuk Gio Kabupaten Seluma Provinsi Bengkuluini masih lemah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa fungsinya yang belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan mekanisme Undang-Undang tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang BPD dan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma tentang BPD. Karena faktanya dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Lubuk Gio Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu masih belum memahami dengan jelas apa yang menjadi fungsinya sebagai wakil masyarakat desa.

342
DES
p

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU- XVII/2019 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DI KOTA PADANG

Deselas Tiramadhani, 1710112064, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 90 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materil atas Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terkait dengan Eksekusi Jaminan Fidusia, khususnya berkaitan dengan kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam antara debitur dengan pihak Perusahaan Pembiayaan sebagai kreditor. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (PMK No. 18/PUU-XVII/2019) tentang Eksekusi Jaminan Fidusia mengubah ketentuan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia sepanjang objek tersebut tidak diserahkan secara sukarela oleh debitur, sebagaimana dijelaskan pada amar PMK No. 18/PUU-XVII/2019. Namun, pada praktiknya masih saja ditemukan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak mengindahkan ketentuan PMK No. 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimana pelaksanaan PMK No. 18/PUU-XVII/2019 pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang; kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang dan Pengadilan Negeri Padang dalam Pelaksanaan PMK No. 18/PUU-XVII/2019; ketiga, bagaimana upaya Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang dan Pengadilan Negeri Padang untuk mengatasi kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan PMK No. 18/PUU-XVII/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: pertama, PMK No. 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia belum terlaksana secara maksimal pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Padang terbukti dengan masih ditemukannya Perusahaan Pembiayaan yang menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan eksekusi objek jaminan dan bukan melalui proses permohonan eksekusi jaminan fidusia ke Pengadila Negeri Padang; kedua, secara garis besar ada 4 kendala yang dihadapi oleh Perusahaan Pembiayaan maupun Pengadilan Negeri Padang diantaranya debitur tidak memahami bahwa dirinya telah wanprestasi, debitur yang tidak kooperatif, proses berperkara di pengadilan yang panjang, menyita energi dan juga biaya, Pengadilan Negeri kesulitan menemukan Objek Jaminan Fidusia, dan lain-lain; ketiga, upaya yang dilakukan berupa permintaan bantuan pengamanan lapangan kepada pihak Kepolisian RI, pemberian pemahaman mengenai cedera janji oleh kreditor kepada debitur, menggunakan barang yang senilai dengan Objek Jaminan Fidusia yang diperkarakan untuk pelunasan utang debitur.

Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan Fidusia, Perusahaan Pembiayaan, Pengadilan Negeri

348.04
DEY
k

KEADAAN DARURAT (STATE OF EMERGENCY) SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020

Deyza Lucian Valentino, 1710111015, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 75 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Dalam konstitusi Indonesia terdapat dua model keadaan darurat (state of emergency), Pertama terdapat dalam Pasal 12 dan Kedua dalam Pasal 22 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mengahadapi Covid-19 Pemerintah menggunakan model kedaruratan dalam Pasal 22, yakni dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangan Pandemi dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penangan Pandemi Corono Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasioan dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu Keuangan Covid-19). Namun, dalam konsepsi keadaan darurat kedua pasal tersebut memiliki konsekunsi hukum yang berbeda. Untuk itu, dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Konsepsi keadaan darurat negara baik dalam Pasal 12 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta Bagaimana Kedudukan Perppu Keuangan Covid-19 dalam konsepsi keadaan darurat negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan penelusuran kepustakaan. Hasil penelitan menunjukan konsepsi keadaan darurat dalam Pasal 12 dapat mengesampingkan norma - norma yang diatur dalam konstitusi. Sedangkan Pasal 22 tidak secara mutlak dapat mengesampingkan norma - norma yang diatur dalam konstitusi, hal ini juga mempengaruhi kedudukan Perppu Keuangan Covid-19 sebagai Perppu biasa yang harus tunduk kepada norma konstitusi.

346
DIK
p

PEMANFAATAN RUANG SEMPADAN SUNGAI BATANG AGAM SEBAGAI TAMAN MULTIGUNA DI KOTA PAYAKUMBUH

Diki Wahyudi 1610112071, Fakultas Hukum Unand, xx Halaman, 2021

ABSTRAK

Dalam rangka penataan kembali kawasan sempadan sungai batang agam yang sering terjadi longsoran tebing dan banjir, maka peran pemerintah dalam hal pembangunan dan pengawasan kawasan ini sangatlah penting. Selain itu, keterbatasan lahan yang ada dengan penataan kembali kawasan sempadan sungai batang agam ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjadikan kawasan tersebut memiliki berbagai kegunaan (multiguna) yang bermanfaat baik bagi masyarakat sekitar. Akan tetapi pembangunan kawasan sempadan sungai yang merupakan kawasan lindung juga harus menjadi perhatian pemerintah agar kawasan lindung tersebut tidak rusak dan hanya dimanfaatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah 1)Bagaimana Penataan Ruang Sempadan Sungai Batang Agam yang dilakukan oleh pemerintah kota Payakumbuh? 2) Bagaimana cara pemerintah membangun taman multiguna Batang Agam di daerah sempadan sungai yang merupakan kawasan lindung? 3) Bagaimana Pengawasan Ruang Sempadan Sungai Batang Agam yang dilakukan oleh pemerintah kota Payakumbuh? Metode penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif. Data-data yang sudah dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, hingga akhirnya mendapatkan kesimpulan yaitu: 1)Kawasan sempadan sungai batang agam ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat melalui Perda dan untuk menjaga fungsinya dilakukan normalisasi dan penataan kawasan sempadan sungai berupa taman multiguna. 2)Pembangunan taman multiguna nyatanya bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 38 Tentang Sungai yang menghendaki sempadan sungai bebas dari bangunan apapun di atasnya. 3)Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan upaya pengawasan secara berkala terhadap kondisi sungai dan sempadannya, namun output dan tindak lanjut dari pengawasan tersebut belum mampu mengubah kebiasaan masyarakat dengan masih terus ditemukannya pelanggaran yang dilakukan masyarakat yang merusak sungai dan sempadannya.

Kata Kunci : Pemanfaatan, Sempadan Sungai, Taman Multiguna

345
DIN
u

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG

Dina Afrilia, 1610111064, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 64 Halaman, 2021

ABSTRAK

Pemerasan adalah perbuatan yang bermaksud menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kepada orang lain agar dapat memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu. Tindak pidana pemerasan yang terjadi di Kota Padang terjadi di tempat- tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari seperti di pasar raya, angkot, pantai dan juga parkir liar. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kasat Reskrim Polresta Padang, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 telah terjadi kasus tindak pidana pemerasan sejumlah 316 kasus. Dalam hal ini pihak Polresta kota Padang berwenang untuk menanggulangi tindak pidana pemerasan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah 1.Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polresta Padang? 2.Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polresta Padang? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yaitu: 1) Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polresta Padang, yaitu dengan (a) Upaya preventif, melaksanakan himbauan-himbauan kepada masyarakat, melakukan sosialisasi atau penyuluhan, melakukan pengawasan dan penjagaan serta patroli secara rutin (b) Upaya Represif, melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi pemerasan, melakukan penangkapan pelaku serta menyita barang bukti, melaksanakan penegakan hukum pihak satreskrim dengan melakukan perlindungan kepada tersangka dengan cara mendata tersangka yang kemudian ditindaklanjuti dan diproses tindak pidana tersebut. (2) Kendala-kendala yang menghambat kepolisian dalam upaya tindak pidana pemerasan yaitu kurangnya respon dari masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan kepolisian, pelaporan masyarakat dan korban tindak pidana pemerasan masih kurang banyak, tidak diketahui oknum pelaku sehingga menyulitkan kepolisian dalam penegakan hukum serta kurangnya kesadaran dan efek jera dari pelaku.

Kata Kunci : Kepolisian, Penanggulangan, Tindak Pidana Pemerasan

346
DIN
k

KEPASTIAN HUKUM KEKUATAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN DALAM SENGKETA TANAH ULAYAT KAUM (Studi Kasus Nomor: 3043 K/Pdt/2000)

Dinda Junita Daswan, 1610111030, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 91 Halaman, 2021

ABSTRAK

Putusan hakim atau putusan pengadilan itu adalah setiap putusan pengadilan yang tertuang dalam bentuk tertulis sebagai suatu pernyataan oleh hakim dimana hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, diucapkan di persidangan dan mempunyai tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara kedua belah pihak. Eksekusi adalah pelaksanaan dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dijalankan secara paksa karena pihak yang kalah di dalam perkara tidak mau menjalankan putusan pengadilan sebagaimana mestinya. Ternyata di dalam kasus yang penulis teliti, penulis menemukan ternyata ada putusan yang telah ingkrah, tetapi para pihak tidak melaksanakan putusan tersebut, dan mengadakan perdamaian antara kedua belah pihak. Perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak disahkan dan dibukukan oleh Notaris. Rumusan masalah sebagai berikut (1) Apa penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat kaum antara Kaum Suku Balaimansiang dengan Kaum Suku Jambak (Studi Kasus Nomor: 3043 K/Pdt/2000) 2) Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum antara Kaum Suku Balaimansiang dengan Kaum Suku Jambak (Studi Kasus Nomor: 3043 K/Pdt/2000) (3) Bagaimana kepastian hukum kekuatan eksekusi putusan pengadilan dalam sengketa tanah ulayat kaum (Studi Kasus Nomor: 3043 K/Pdt/2000). Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Jenis data sekunder yang diolah melalui editing dan koding kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Penyebab terjadinya kasus sengketa tanah ulayat ini ada 2 (dua) penyebab, yaitu penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat sebelum dibawa ke Pengadilan dan penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat yang akan diselesaikan melalui non litigasi. (2) Proses penyelesaian sengketa tanah ulayat dalam kasus ini dilakukan melalui dua cara yaitu pertama melalui litigasi dan kedua melalui non litigasi, dengan objek yang sama yaitu tanah ulayat juga. (3) Kepastian hukum kekuatan eksekusi putusan pengadilan dalam sengketa tanah ulayat kaum (Studi Kasus Nomor: 3043 K/Pdt/2000) adalah putusan perdamaian itu tidak bisa dilakukan pada tingkat kasasi tetapi hanya dapat dilakukan pada tingkat yudex factie yaitu dalam pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap harus dijalankan.

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Eksekusi, Sengketa Tanah Ulayat Kaum

345
DIV
p

PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE OLEH KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI

Diva Aulia Nabila, 1610113056, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 59 halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Tindak pidana dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu di hadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bahkan Negara. Perjudian online adalah semua bentuk permainan judi yang dimainkan melalui internet. Seperti yang kita ketahui, aktivitas perjudian itu sangat dilarang, akan tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas perjudian online. Di Kota Bukittinggi, terdapat banyaknya kasus perjudian online yang semakin marak. Perjudian online itu sendiri diatur dalam Undang-Undang yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan uraian diatas, adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polres Bukittinggi. 2) Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di wilayah hukum Polres Bukittinggi. 3) Apakah kendala yang dihadapi oleh aparat Kepolisian Kota Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online. Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut secara akurat digunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa 1) Faktor penyebab tindak pidana perjudian online di Kota Bukittinggi adalah adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu sendiri adalah faktor yang ada dalam diri sendiri, berupa niat melakukan tindak pidana perjudian online, kurangnya pemahaman agama dan kurangnya kesadaran terhadap hukum. Dan faktor eksternal adalah faktor dari lingkungan, serta faktor ekonomi yang menyebabkan seseorang melakukan perjudian online. 2) Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat Kepolisian dalam menanggulangi perjudian online di Kota Bukittinggi adalah dengan cara upaya preventif dan represif. 3) Kendala yang dihadapi aparat Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online adalah aparat penegak hukum butuh waktu untuk melakukan penyelidikan, butuh informasi dari informan-informan, terkait tentang siapa yang melakukan judi online tersebut, dan bagaimana cara melakukan perjudian online, dan dimana tempat melakukan aktivitas perjudian online tersebut serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perjudian online.

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Perjudian Online

346.01
DON
p

PENCATATAN ANAK ANGKAT KEDALAM ADMINISTRASI (KARTU KELUARGA) DI KOTA PADANG PANJANG

Dones Bahtera, 1710112150, Fakultas Hukum, 2020, 64 Halaman

ABSTRAK

Setiap orang harus memiliki data kependudukan yang jelas sebagai salah satu bukti tertulis dan keabsahan hukum mengenai identitas diri, keluarga, dan asal usul seseorang, sebagaimana terdapat dalam beberapa landasan yuridis yaitu Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Di Kota Padang Panjang pengetahuan masyarakat akan data kependudukan terutama Kartu Keluarga bagi anak angkat masih kurang, hal ini dibuktikan dengan masih adanya orang tua angkat yang tidak menjalankan prosedur pengurusan sampai tahap pendaftaran pengadilan tanpa melanjutkannya ke tahap pendaftaran administrasi kependudukan . Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Proses pencatatan anak angkat ke dalam administrasi (Kartu Keluarga) di Kota Padang Panjang (2) Hal-hal yang menghambat serta alasan orang tua tidak melanjutkan proses pencatatan anak angkat ke dalam administrasi (Kartu Keluarga) di Kota Padang Panjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis dengan metode Deskriptif. eknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non- probability sampling dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data ini adalah metode wawancara. Analisis data yang dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif yang digunakan meliputi penggolongan data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, proses pencatatan anak angkat ke dalam administrasi (kartu keluarga) di Kota Padang Panjang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimulai dari penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri kemudian dilanjutkan dengan pengurusan administrasi kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hambatan-hambatan serta alasan orang tua tidak melanjutkan proses pencatatan anak angkat ke dalam administrasi (Kartu Keluarga) di Kota Padang Panjang adalah pada tahap penetapan pengadilan yang memiliki banyak persyaratan dan pada tahap pendaftaran dan pencatatan ke dalam kartu keluarga adalah keinginan orang tua angkat yang menginginkan status anak angkat dibuat menjadi anak kandung didalam kartu keluarga, dan didaftarkan apabila si anak sudah siap secara mental.

Kata Kunci :Pengangkatan Anak, Administrasi Kependudukan, Pencatatan

345
DWI
k

KEBERADAAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PROSES PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DWI RIZKA YUNNI, 1710113119, 66 Halaman, FakultasHukumUniversitasAndalas, 2021

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang bersifat serius, terorganisir yang telah menimbulkan masalah dan ancaman serius bagi sebuah bangsa dan masyarakatnya, termasuk di Indonesia. Salah satu persoalan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah minimnya saksi guna mengungkap tindak pidana korupsi, oleh karena itu diperlukan bantuan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) dimana saksi pelaku yang mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana tertentu khusus nya tindak pidana korupsi. Secara normatif Justice Collaborator diatur dalam hukum positf Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.Tetapi dalam penerapan nya Justice Collaborator banyak mengalami kendala yang seperti ketentuan hukum Indonesia dianggap belum akomodatif terhadap status Justice Collaborator.Berdarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dikaji adalah: 1). Apa yang menjadi dasar pemikiran lahirnya ketentuan Pasal 10 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Justice Collaborator) dalam Undang-UndangNomor 31 Tahhun 2014 tentang LPSK? 2). Apa yang menjadi kriteria penegak hukum dalam menetapkan seseorang sebagai Saksi Pelaku (Justice Collaborator) dalam kasus tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan menghubungkan hukum positif dan melihat kenyataan yang terjadi dilapangan.Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen dan melakukan wawancara.Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil yakni, pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih terdapat banyak kelemahan- kelemahan terhususnya terhadap perlindungann bagi seorang saksi pelaku, maka karena itu dilakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang terhusus membahas Justice Collaborator pada Pasal 10. Terdapat pun kriteria untuk menetapkan seseorang sebagai Justice Collaborator yaitu bukan merupakan “pelaku utama” dan bersedia untuk bersedia untuk berdikap kooperatif untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Justice Collaborator.

346.07
DWI
p

PENGALIHAN KREDIT (OVER CREDIT) LEASING PADA PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICE (TAF) CABANG PADANG (Perkara Nomor 168/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Pdg) (

Dwika Meisya Hasanah, 1610113067, Fakultas Hukum Universitas Andalas,62 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Pengalihan kredit (over credit) adalah perpindahan hak milik atau jual beli yang dilakukan oleh debitur kepada pihak lain atas barang/benda yang sedang dalam proses kredit. Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang No.42 Tahun 2009 melarang untuk melakukan pengalihan terhadap objek jaminan fidusia tanpa seizin kreditur. Pada kenyataan nya masih ada debitur yang melakukan pengalihan tanpa sepengetahuan kreditur.Salah satunya dalam perkara Nomor 168/Pdt.Sus- BPSK/2019/PN Pdg dimana debitur PT.Toyota Astra Financial Service (TAF) yaitu Hendri Budiman yang melakukan pengalihan kredit tanpa sepengetahuan kreditur yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang penyelesaian nya berakhir di pengadilan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pengalihan kredit (over credit)leasing pada PT.Toyota Astra Financial Service? Apa saja kendala yang terjadi dalam proses pengalihan kredit (over credit)leasing di PT.Toyota Astra Financial Service?. Metode penelitian pada penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini pelaksanaan pengalihan kredit pada PT.Toyota Astra Financial Service (TAF) telah terlaksana dengan baik namun masih ada kendala yang muncul seperti pada proses administrasi dan masih ada kreditur yang melakukan pengalihan kredit tanpa sepengetahuan pihak PT.Toyota Astra Financial Service (TAF). Kesimpulannya Tahapan over credit yang dilakukan dan dilaksanakan pada PT. Toyota Astra Financial Services (TAF) cabang padang masih belum terlaksana dengan baik, masih ada debitur yang melakukan pengalihan kredit tanpa sepengetahuan pihak debitur. Hal ini menyebabkan permasahalan dikemuadian hari yang mengakibatkan kerugian bagi debitur dan permasalahan pengalihan kredit tanpa sepengetahuan pihak leasing terjadi dikarenakan kurang nya pengetahuan serta pemahaman debitur mengenai pengalihan kredit. Sebaiknya para debitur untuk melakukan pengalihan kredit secara resmi melalui pihak leasing. Karena pengalihan kredit secara resmi tidak begitu sulit dan rumit seperti yang dipikirkan oleh masyarakat pada umumnya dan juga pihak kreditur harus memberikan pemahaman kepada para debitur mengenai pengalihan kredit serta menjelasaskan mengenai hak dan kewajiban debitur agar tidak terjadi hal yang dapat merugikan para pihak dikemudian hari.

Kata Kunci : Pengalihan kredit (over credit), Jaminan Fidusia, Leasing

344.06
DYN
p

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI STUDI TERHADAP PERAN DINAS KETENAGAKERJAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Dynka Gusti Chalia Amel, 1610115001, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, 82 halaman

ABSTRAK

Pengaturan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pertama dapat dilihat dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 dimana didalam Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri.. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pertama bagaimana konsep perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ditinjau dari segi perundang-undangan, dan yang kedua adalah Peran Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat dalam hal perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri . Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait permasalahan kemudian menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan pengambilan data. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disumpulkan antara lain : 1) Perkembangan pengaturan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pertama dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Dimana didalam UU tersebut perlindungan TKI tersebut merupakan segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan pengaturan perundang-undangan baik sebelum, selama, maupun sudah bekerja. Selanjutnya Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; 2) Peran dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat dalam hal perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga sangat penting, dimana Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam hal penyelesaian kasus- kasus yang dihadapi oleh para Pekerja Migran Indonesia tersebut, yaitu seperti memberi fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang di Deportasi, memberi fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang di PHK, hingga masalah mengenai gaji tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan juga masalah penipuan peluang kerja ke luar negeri.

347.05
EKA
p

PENANGGUHAN SERTIFIKASI TANAH ULAYAT KAUM DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Ekazman Yuliastuti, 1610111133, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 115 Halaman, 2021

ABSTRAK

Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatanya diatur oleh penghulu suku. Tanah ulayat kaum dengan status ganggam bauntuak pagang bamansiang oleh anggota kaum yang pengaturannya oleh Mamak Kepala Waris sesuai hukum adat Minangkabau. Tanah ulayat kaum yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatanya, Pasal 8 bahwa tanah ulayat boleh didaftarkan dengan hal tersebut tanah ulayat tidak sedikit menimbulkan sengketa di Pengadilan berbagai faktor terjadinya sengketa yang menyebabkan tertanguhkannya sertifikasi tanah ulaya yang didaftarkan diantaranya yaitu tumpang tindih kepemilikan dan kepentingan. Tanah ulayat kaum. Penelitian dengan judul "Penangguhan Sertifikasi Tanah Ulayat Kaum Di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman", dengan rumusan masalah. Apakah penyebab dari penangguhan sertifikasi tanah ulayat kaum di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang? Bagaimanakah akibat hukum dari penangguhan sertifikasi tanah ulayat kaum di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman? Dan bagaimanakah penyelesaian sengketa dari penangguhan sertifikasi tanah ulayat kaum oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab-akibat dari penangguhan sertifikasi tanah ulayat kaum dan untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa dari ditangguhkannya tanah ulayat kaum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari penelitian lapangan yaitu wawancara bersama Mamak Kepala Waris dari 2 (dua) kaum yang berbeda dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu berdasarkan Undang-undang dan pendapat para ahli. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa tanah ulayat kaum yang disertifikasikan dan masih dalam Penangguhan di Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, jika status tanah kaum yang disertifikasikan belum menghasilkan inkracht atau damai antara pihak yang bersengketa maka tanah kaum tersebut belum dapat didaftarkan atau tanah tersebut akan kembali mentah seperti sebelumnya.

Kata kunci : Tanah Ulayat, Sertifikasi tanah, dan Penagguhan

345
FAD
e

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN

Fadhil Andika Satria, 1710113065, 70 Halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021

ABSTRAK

Pada dasarnya Pada dasarnya efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Berbagai bentuk kendala dan tantangan bagi penyidik dalam mengungkap bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat. Bentuk kejahatan yang dimaksud adalah tindak pidana pencurian. Munculnya teknologi dan informasi yang berkembang dengan pesat menjadi salah satu tantangan bagi penyidik untuk menggunakan maupun mengolahnya dan juga dapat memberikan kemudahan untuk mengungkap sebuah kejahatan, Salah satu perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan yakni CCTV yang digunakan penyidik kepolisian sebagai sarana untuk mengungkap bentuk kejahatan pencurian dan berfungsi sebagai alat pemantau. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah : Bagaimana efektivitas penggunaan Closed Circuit Television sebagai salah satu upaya penyidik Polresta Padang untuk mengungkap tindak pidana pencurian, Apa saja kendala yang dihadapi penyidik Polresta Padang dalam penggunaan Closed Circuit Television untuk mengungkap tindak pidana pencurian, Bagaimanakah upaya penyidik Polresta Padang dalam mengatasi kendala terhadap penggunaan Closed Circuit Television untuk mengungkap tindak pidana pencurian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris), yaitu metode pendekatan masalah dengan melihat hukum positif yang dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, studi dokumen, dan penelitian pustaka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil yakni efektifitas penggunaan CCTV bagi penyidik untuk membantu dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana pencurian dan CCTV sebagai acuan untuk tindakan preventif dan tindakan represif terhadap fakta dan data terkait suatu kejahatan pencurian. Adapun kendala yang dialami penyidik menggunakan CCTV tersebut yakni, beberapa penyidik kurang memahami menggunakan CCTV, penggunaan CCTV belum aktif digunakan merata di Polresta Padang, gambar yang kurang jelas serta memori penyimpanan yang terbatas. Berbagai kendala yang dialami tersebut penyidik Polresta Padang melakukan upaya diantaranya, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak salah satunya memanggil ahli IT (information technology).

Kata Kunci : Efektivitas, Closed Circuit Television, Tindak Pidana, Pencurian, Penyidik, Penyidikan, IT (information technology)

346
FAI
p

PENCEGAHAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN MENJADI PERUMAHAN MELALUI IZIN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN AGAM

Faizatul Khairani Isman, 1710112025, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, PK VIII (Hukum Agraria Dan Sumber Daya Alam), 83 Halaman, 2021

ABSTRAK

Lahan pertanian termasuk ke dalam kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara karena menyangkut kepentingan hidup orang banyak. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga telah terang menyatakan bahwasanya "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar- besar untuk kemakmuran rakyat". Peraturan lainnya terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (selanjutnya disebut UU PLP2B). Pasal 44 ayat (1) UU PLP2B menentukan bahwa "Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan." Di Kabupaten Agam PLP2B telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 yang dilakukan secara terkoordinasi oleh dinas dan OPD terkait. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah Pengaturan pengendalian LP2B di Kabupaten Agam? 2. Bagaimanakah strategi pengendalian LP2B di Kabupaten Agam 3. Bagaimana pemberian izin pemanfaatan ruang untuk pengendalian alih fungsi LP2B menjadi perumahan di Kabupaten Agam? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa 1. pengaturan LP2B melalui Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Agam (RPJPD Agam), Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (RPJMD Agam), Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (RKPD Agam), Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2010 – 2030, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Perbup LP2B Agam). 2. Strategi pengendalian LP2B yang dilakukan oleh Pemkab Agam ialah memberikan insentif, disinsentif, mekanisme izin, proteksi, serta penyuluhan,3. Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan pada ruang yang tidak ditetapkan sebagai LP2B yang mana izin pemanfaatan ruang dimohonkan kepada Tim Khusus dari Dinas PUTR dan Tim ini memberikan output berupa rekomendasi atau tidak direkomendasikan terhadap lahan yang bersangkutan.

Kata kunci: Pengendalian, Alih Fungsi LP2B, Strategi PLP2B, dan Izin Pemanfaatan Ruang

345
FAJ
p

PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN MENURUT PERATURAN KEJAKSAAN NO. 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (Studi di Kejaksaan Negeri Pariaman)

Fajri Afriandi Pratama, 1710111099, Hukum Pidana, 80 halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021

ABSTRAK

Penghentian penuntutan merupakan upaya Penuntut Umum untuk tidak melanjutkan proses penanganan suatu perkara yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan dengan alasan tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan Pelaku, Korban, keluarga Pelaku atau keluarga Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama- sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan pada perkara tersebut oleh Tersangka Beben tetap dilaksanakan walaupun tidak memenuhi syarat yaitu kerugian yang ditimbulkan melebihi syarat sejumlah Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pelaksanaan penghentian penuntutan menurut Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, (2) Bagaimanakah Penuntut Umum mempertimbangkan keadaan atau kriteria yang bersifat kasuistik untuk menghentikan atau tidak menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif mengalami perubahan yang mana pada saat Penuntut Umum yang berwenang menangani perkara menyetujui untuk dilakukan penghentian penuntutan, maka Penuntut Umum harus melakukan expose perkara atau gelar perkara kepada Jaksa Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung. Keadaan atau kriteria yang menjadi pertimbangan bagi Penuntut Umum untuk tetap melanjutkan perkara penggelapan uang hasil penjualan heuller yaitu: (a) Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana; (b) Ancaman tindak pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun; (c) Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan (d) Adanya kemauan dari Tersangka untuk mengganti kerugian dari tindak pidana yang ditimbulkan.

Kata Kunci: Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif, Kejaksaan.

344.03
FAK
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG MY-JEK DI KOTA SOLOK

Fakhril Rafi, 1610113059, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 67 Halaman, 2020

ABSTRAK

Dalam ketentuan umum dari angkutan sewa khusus, praktiknya mengenai izin usaha dan hak serta kewajiban oleh para pihak tidak selalu sesuai dengan apa yang ditentukan. Seperti halnya kecacatan hukum yang masih dialami oleh MY-JEK sebagai transportasi online daerah. Adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : Pertama, bagaimana kedudukan hukum MYJEK sebagai transportasi berbasis aplikasi di Kota Solok, kedua, bagaimana pertanggungjawaban serta perlindungan hukum terhadap penumpang transportasi berbasis aplikasi (MY-JEK) di Kota Solok. Metode yang digunakan adalah normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan : Pertama, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjelaskan pendaftaran terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) selaku identitas pelaku usaha ditemukan tidak terdaftar pada laman Tracking NIB, Maka MY-JEK dalam izin usahanya bisa dikatakan cacat hukum karna syarat utamanya tidak terpenuhi, sedangkan kedudukan hukum dari MY-JEK itu dapat dikatakan belum berbadan hukum karna salah satu syarat untuk mendaftarkan NIB haruslah berbadan hukum. Kedua, dalam pertanggungjawaban serta perlindungan hukum yang diberikan MY-JEK terhadap konsumen berdasarkan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam aplikasi tidak memenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga kedepannya, MY-JEK harus mendaftarkan usahanya sebagai badan hukum agar memperoleh NIB serta memberikan perlindungan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

344.07
FAR
P

PENERAPAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM PEMENUHAN PENDIDIKAN BERKUALITAS PADA DAERAH 3T (TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL) DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT

Fardinal Apri Nazar, 1710112152, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VI (Hukum Internasional) 100 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program pembangunan global yang berisi 17 tujuan dan 169 target. Dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/70/1. Salah satu tujuan SDGs adalah pemenuhan pendidikan berkualitas. Indonesia telah mengadopsi program SDGs dalam Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemberlakuan otonomi daerah telah mensyaratkan bahwasanya pemenuhan pendidikan berkualitas harus merata di seluruh penjuru daerah termasuk pada daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Oleh karena itu, penelitian ini hendak melihat penerapan Sustainable Development Goals dalam pemenuhan pendidikan berkualitas pada daerah 3T (Terdepan, Terluar Dan Tertinggal) di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dengan cara mengumpulkan data-data hukum primer, sekunder dan tersier melalui wawancara, tanya jawab, kuesioner, studi lapangan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan media elektronik. Dalam tulisan ini, penulis membahas mengenai penerapan serta kendala penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam pemenuhan pendidikan berkualitas pada daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil penelitian dapat diketahui meskipun penerapan pemenuhan pendidikan berkualitas telah diupayakan, namun masih terdapat beberapa target pendidikan berkualitas yang belum diakomodir dalam dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Sustainable Development Goals Provinsi Sumatera Barat, dan RAD Kabupaten Kepulauan Mentawai serta indikator pendidikan yang belum tercapai secara maksimal. Kendala yang dihadapi terbagi atas Kendala Yuridis dan Non Yuridis. Kendala Yuridis dapat dilihat pada Dokumen RAD SDGs yang belum menyeluruh, untuk Kendala Non Yuridis terdiri atas faktor letak geografis dan geologis , aksesbilitas, terbatasnya sarana prasarana dan fasilitas penunjang pendidikan, Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah rawan bencana dan serta wabah global pandemi Covid-19.

Kata kunci: Sustainable Development Goals (SDGs), Pendidikan Berkualitas, Daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).

345
FAR
p

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DISEBABKAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (Studi Putusan Nomor 373/Pid.b/2020/PN.Pdg)

Farid Huda Pratama, 1710112117, Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 83 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian mengenai sebuah putusan yaitu Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg dimana pada putusan ini telah menyebabkan kematian pada korbannya yang dilakukan oleh seorang security pada Pelabuhan Teluk Bayur Padang. Perbuatan tersebut dipicu oleh serangan yang yang sebelumnya dilakukan oleh korban kepada saksi dan terdakwa, sehingga menyebabkan adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau noodweer excess yang dikarenakan oleh adanya keguncangan jiwa yang hebat sebagaimana diatur pada Pasal 49 ayat (2) KUHP. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces) berdasarkan Putusan No. 373/Pid.B/2020/PN.Pdg? 2) Bagaimanakah penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP sebagai Alasan Pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana dalam Putusan No. 373/Pid.B/2020/PN.Pdg Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan 1) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian kurang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Putusan Nomor: 373/Pid.B/2020/PN Pdg berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa. Dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan seharusnya hakim lebih memerhatikan dan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi diri terdakwa dan menerapkan Pasal 49 ayat (2) KUHP dalam kasus tersebut. 2)Penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP sebagai Alasan Pemaaf dalam pertanggungjawaban pidana dalam putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg dapat dikatakan tidak ada, padahal terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena merasa nyawanya terancam yang mengakibatkan kondisi diri terdakwa tersebut kacau sehingga melakukan tindak pidana tersebut.

348.3
FAU
p

PERBANDINGAN MEKANISME PENGGUNAAN HAK ANGKET OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA

Fauzia Dwinanda, 1710112007, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Tahun 2021

ABSTRAK

Mekanisme penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat telah banyak mengalami perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mulai dari sebelum adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan terakhir kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 sebelum perubahan belum mengatur mengenai hak angket secara terperinci, akan tetapi sudah ada ditemukan permasalahan-permasalahan hak angket sebelum perubahan UUD 1945 yang dalam penyelesaiannya berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, bagaimana mekanisme penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945? dan yang kedua, bagaimana kekurangan dan kelebihan dari mekanisme penggunaan hak angket sebelum dan dan sesudah perubahan UUD 1945? Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder, serta metode pengumpulan data berupa studi dokumen (kepustakaan). Hasil penelitian pada skripsi ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, mekanisme penggunaan hak angket sebelum perubahan UUD 1945 yang berpatokan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan mekanisme penggunaan hak angket sesudah perubahan UUD 1945 dalam ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang MD3. Kedua, dengan adanya perubahan UUD 1945 maka pengaturan mengenai mekanisme hak angket semakin jelas karena sudah diatur di di dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang MD3, dengan adanya perubahan tersebut maka tampak kekurangan dan kelebihan dari mekanisme penggunaan hak angket sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945.

345
FEM
f

FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI KOTA SOLOK

Femmy Salsa Noersy, 1710113013, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 66 Halaman, 2021

ABSTRAK

Tidak ada seorangpun yang menghedaki adanya suatu kejahatan dalam lingkungan masyarakatnya, karena dengan adanya kejahatan akan meresahkan, merugikan serta dapat mengancam keselamatan jiwa masyarakat. Kejahatan juga merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi, salah satunya yaitu melalui penegakan hukum. Kasus yang masih sering terjadi khususnya di Kota Solok adalah pencurian dengan pemberatan. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dapat menghalalkan berbagai cara tanpa mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku. Dengan demikian perlu dilakukan upaya penanggulangan oleh pihak kepolisian agar dapat mengurangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan khususnya di Kota Solok. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian disertai dengan pemberatan di Kota Solok? b. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kota Solok dalam menanggulangi tindak pidana pencurian disertai dengan pemberatan di Kota Solok?. Dalam skripsi ini penulis memakai metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut terbagi dua, faktor intern dan faktor ekstern. aktor intern seseorang melakukannya disebabkan karena pertama, faktor individu yaitu faktor yang timbul dari niat, keinginan, atau kesadaran diri dari pelaku. Kedua, kesempatan yaitu faktor yang disebabkan karena kelalaian dari korban yang mengakibatkan datangnya kesempatan untuk mencuri dan ketiga, faktor pendidikan yaitu kurangnya pengetahuan hukum si pelaku tentang tindak pidana. Sedangkan faktor eksternal nya adalah pertama faktor daerah adalah tempat sepi dan polisi yang jarang beraptroli menjadi tempat yang rawan terjadinya pencurian dengan pemberatan. Kedua, faktor ekonomi adalah pelaku memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dan menjadikan pelaku menghalalkan segala cara. Ketiga, pengaruh peragulan atau sosial yaitu pengaruh yang berasal dari lingkungan sekitar seperti mengajak dan menghasut. Upaya penaggulangan pencurian disertai dengan pemberatan yang dilakukan oleh Polres Solok Kota diantaranya adalah upaya preventif yaitu melakukan penyuluhan seperti himbauan dan sosialisasi, memasang spanduk-spanduk di jalan raya, kegiatan patroli yang dilakukan ditempat rawan terjadinya pencurian dengan pemberatan. Upaya represif yang bertujuan untuk mengungkap pelaku pencurian dengan pemberatan agar dapat diproses sesuai hukum dan dijatuhi hukuman sansi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Agar tercapainya penanggulangan tersebut, polisi melakukan penyamaran di tempat patroli, memasang CCTV dan melakukan pendekatan ke masyarakat.

Kata Kunci: Faktor Penyebab, Penanggulangan, Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

348.3
FEN
a

AK MEREK SEBAGAI JAMINAN UTANG DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Fenny Nindia Putri, 1610113027, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 64 Halaman, 2021

ABSTRAK

Meningkatnya kebutuhan ekonomi pada era globalisasi saat ini, diikuti dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan dalam rangka mendorong semakin majunya industri kreatif. Maka dibutuhkan alternatif pembiayaan sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pendanaan, dimana untuk memperolehnya dapat melalui pinjaman kepada lembaga keuangan dengan disertai agunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak atas merek dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang fidusia serta untuk mengetahui mengapa hak merek sebagai jaminan utang tidak diatur didalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016. Metode pendekatan yang digunakan dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan permasalahan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan: Pada saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan pertimbangan bahwa undang-undang tersebut masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan masyarakat serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional. Agar terwujudnya tujuan hukum maka undang - undang ini perlu disempurnakan dan penjaminan terhadap hak merek harus dinormakan sehingga mengakomodir praktek yang terjadi dalam masyarakat yang telah menerima hak merek sebagai jaminan utang agar efektifitasnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Adapun mengapa hak merek sebagai jaminan utang belum diatur dalam undang-undang merek yaitu karena nilai hak merek relatif tidak stabil, adanya kekhawatiran dari kreditur dalam proses pelaksanaan eksekusinya dan adanya kekhawatiran terjadinya penghapusan, pembatalan hak merek setelah dijaminkan atau perusahaan pengguna hak merek dinyatakan pailit. Namun apabila hal tersebut diatur maka akan memberikan dampak positif berupa adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pihak, memberikan rasa aman bagi masyarakat, serta dapat meningkatkan perekonomian nasional yang juga sejalan dengan tujuan Negara Republik Indonesia pada alinea ke-4 UUD 1945 dan sila ke-5 Pancasila.

Kata Kunci: Hak Merek, Jaminan Utang, Jaminan Fidusia

342.07
FID
p

PEMENUHAN HAK PILIH BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA RUMAH TAHANAN KELAS II B BATUSANGKAR DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 DI KABUPATEN TANAH DATAR

Fidela Aulia Khairi, 1710112006, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Tata Negara (PK V), 66 halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Jaminan hak memilih sangat dipengaruhi oleh sejauhmana seorang warga negara masuk ke dalam daftar pemilih, namun terdapat hambatan terkait hak pilih tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Batusangkar, pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020. Dari penghuni tahanan dan narapidana yang berjumlah 116 orang, pada tanggal 9 Desember 2020 hanya 73 orang yang dapat dimasukan dalam data pemilih pada tempat pemungutan suara setempat. Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pemenuhan Hak Pilih Tahanan dan Narapidana Rumah Tahanan Kelas II B Batusangkar dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Tanah Datar. Dari paparan diatas maka ditariklah beberapa rumusan masalah yaitu pertama pengaturan terkait hak pilih tahanan dan narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020. Kedua, pemenuhan hak pilih tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Batusangkar pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan melalui perundang- undangan dan dengan kenyataan di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab tahanan dan narapidana tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena disebabkan oleh sulitnya menelusuri data otentik tahanan dan narapidana di Rumah Tahanan. Perlu koordinasi antar lembaga yang lebih kuat dan berkesinambungan dan menambah regulasi yang dapat mempermudah proses pendataan tahanan dan narapidana ke dalam data pemilih.

Kata Kunci : Hak Pilih, Pilkada, Tahanan dan Narapidana

345
FIO
t

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYADAPAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Fiona Septy Handy, 1710112130, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV) 74 Halaman- Tahun 2021

ABSTRAK

Penyadapan merupakan tindakan yang bersinggungan dengan rights of privacy, namun rights of privacy termasuk golongan derogable rights yaitu hak yang dapat dikurangi. Pembatasan atas rights of privacy ini hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Selain itu aturan terkait penyadapan yang tersebar diberbagi undang-undang belum memberi batasan kewenangan dalam melakukan penyadapan. Permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah kedudukan hasil penyadapan pada perkara tindak pidana korupsi? 2. Bagaimanakah penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada perkara tindak pidana korupsi jika ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hasil penyadapan pada perkara korupsi dan untuk mengetahui penyadapan yang dilakukan pada tindak pidana korupsi jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1. kedudukan hasil penyadapan pada perkara korupsi terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait teknis dan mekanisme dalam melakukan penyadapan terdapat pada undang-undang Didalam pasal 12 A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK, Peratutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 36 Tentang Telekomonikasi. 2. Penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam perkara tindak pidana korupsi adalah tindakan yang bersinggungan dengan pelanggaran hak sasi manusia. Hanya saja, karena penyadapan itu tergolong dalam perspektif hak asasi manusia sebagai hak yang dapat dikurangi (derogbable right). Maka sepanjang ditetapkan dengan undang-undang tindakan penyadapan itu adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum.

343.02
RAN
p

PERUBAHAN DATA FISIK TANAH BERDASARKAN HASIL PENGUKURAN ULANG TANAH DI KOTA PAYAKUMBUH

Ranti Fortuna Pertiwi,1720122010, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 82 hlm

ABSTRAK

Dalam proses pensertipikatan tanah di Kota Payakumbuh tahun 2018 dan tahun 2019 terdapat 54 pihak yang mengajukan permohonan pengukuran ulang tanah. Permohonan pengukuran ulang tersebut adalah akibat dari perbedaan hasil pengukuran tanah yang tertulis di sertipikat dan ukuran tanah yang sesungguhnya. Perbedaan hasil pengukuran tanah menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap pemegang sertipikat. Permasalahan tersebut melahirkan rumusan masalah: 1) Bagaimana proses perubahan data fisik tanah berdasarkan pengukuran ulang tanah di Kota Payakumbuh?2) Apa kendala dan upaya BPN dalam proses pengukuran ulang tanah di kota Payakumbuh3)Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang mengalami perbedaan ukuran tanah di data fisik tanah dengan ukuran tanah sebenarnya? Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris,bersifat deskriptif analisis dengan objek kajian meliputi perbaikan peta pendaftaran tanah. Sumber data utama dalam penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan cara editing dan analisis data, berkaitan dengan perbaikan peta pendaftaran tanah. Dari hasil penelitian dan pembahasandisimpulkan bahwa Pemegang hak atas tanah dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk melakukan pengukuran ulang tanah. Kendala yang sering terjadi dalam proses pengukuran ulang tanah adalah tanda batas tanah yang hilang, sehingga perlu dilakasanakan kegiatan pengembalian tanda batas. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang memiliki perbedaan data fisik tanah yang termuat di sertipikat dengan kondisi tanah yang sebenarnya adalah perlindungan hukum preventif, yaitu diberikan hak untuk mengajukan permohonan pengukuran ulang tanah dan perbaikan data fisik tanah oleh BPN apabila benar terjadi kesalahan data.

Kata Kunci: perubahan data fisik, pendaftaran tanah, pengukuran ulang, dan kepastian hukum.

346.02
FUA
i

IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DALAM PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) SYARIAH BUKIT TINGGI

Fuaad firmansyah,1410112014, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021.

ABSTRAK

Musyarakah Mutanaqishah adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Akad ini merupakan akad yang digunakan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada perbankan syariah. Perbankan Syariah menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Salah satu perbankan syariah yang menjalankan akad tersebut adalah Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Bukit Tinggi. Oleh karena itu penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah yaitu 1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad Musyarakah Mutanaqishah dilihat dari Fatwa no 73 tentang Musyarakah Mutanaqishah dalam pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Bukit Tinggi. 3. Kriteria menentukan aset sebagai objek Musyarakah Mutanaqishah pada pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Bukit Tinggi. 3. Kendala dan keselarasan antara pengaturan dengan akad Musyarakah Mutanaqishah yang dihadapi oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dalam pelaksanaan akad Musyarakah Mutanaqishah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) dengan sifat peneltiain deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian telah sesuai dengan Fatwa No 73 tentang Musyarakah Mutanaqishah, kriteria aset sebagai objek yaitu rumah telah sesuai dengan ketentuan dari Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. Pengaturan didalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah telah diatur sesuai dengan arahan dari OJK, akan tetapi kendala yang dihadapi oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah tersebut berupa kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang perbedaan bank syariah dengan konvensional.

Kata Kunci : Musyarakah Mutanaqishsah, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah

345
GER
u

URGENSI PENGATURAN TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA PADA ERA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERMENKUHAM NOMOR 10 TAHUN 2020

Gerry Kurnia Dichi, 1610111112, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 89 halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Pada masa pandemi Covid-19 pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini dengan alasan kemanusian, melihat kondisi lapas yang kelebihan kapasitas akan menyulitkan untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga akan beresiko atas keselamatan narapidana dan anak. Kebijakan pemerintah melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 ini mendapat banyak perhatian publik, beberapa pihak menyatakan keberatan dengan kekhawatiran akan meningkatnya kriminalitas, sedangkan pihak lain justru mendukung dalam rangka upaya pencegahan dan penularan Covid-19. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti yaitu, Pertama, apakah urgensi pengaturan tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi narapidana pada era Covid-19 menurut Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Kedua, bagaimanakah pengaturan pengawasan terhadap narapidana asimilasi dan hak integrasi pada era Covid-19 menurut Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melalui studi kepustakaan yang didapatkan kemudian diolah secara sistematis dan dikaitkan dengan permasalahan. Adapun hasil penelitian ini diketahui bahwasannya pentingnya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 sebagai solusi untuk menanggulangi permasalahan kelebihan kapasitas di lapas. Kebijakan pembebasan narapidana melalui jalur asimilasi dan hak integrasi ini dapat mencegah serta menanggulangi penyebaran dan penularan Covid-19 di lapas yang kelebihan penghuni, telah berdampak untuk menekan angka kondisi kelebihan penghuni hingga 30%. Namun disamping tercapainya tujuan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tersebut dilihat dari sisi tujuan pemidanaan yang didapatkan narapidana dan anak tidak optimal dalam pelaksanaan program asimilasi dan integrasi ini. Serta pengaturan pengawasan terhadap narapidana asimilasi dan hak integrasi pada era Covid-19 dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang pelaksanaannya dilaksanakan secara daring tentu berbeda sebelum adanya pandemi, terihat pemerintah terkendala dalam implementasinya baik itu dari segi sumber daya manusia dari bapas selaku pengawas tentu dari narapidana juga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk prosesnya.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Narapidana, Asimilasi, Covid-19, Pengawasan, Pemasyarakatan.

345
HAB
p

PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA PERAMPASAN BARANG (ASET) YANG TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA EKSEKUTOR (Studi di Kejaksaan Negeri Padang)

Habiya Mursida, 1710111041, Halaman 64, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021

ABSTRAK

Banyaknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesa, menyebabkan negara mengalami kerugian. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi serta memberantas tindak pidana korupsi, seperti memperbaharui peraturan perundang-undangan yang saat ini menjadi payung hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Walaupun telah diatur secara tegas dalam undang-undang, namun upaya pemberantas korupsi ini masih belum dapat diselesaikan dengan baik. Salah satu upayanya dengan memulihan aset hasil tindak pidana korupsi yang mana saat ini masih belum efektif, terutama dalam perampasan aset-aset pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi pidana perampasan barang (aset) oleh Jaksa Eksekutor, 2) Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa Eksekutor dalam melakukan eksekusi pidana perampasan barang (aset) dalam tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dengan wawancara, studi dokumen dan penelitian pustaka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil yaitu jika perkara korupsi diputus agar dilakukan pengembalian aset berupa perampasan aset, maka jaksa selaku eksekutor kemudian melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada dan melakukan lelang terhadap barang-barang hasil tindak pidana korupsi yang sudah disita oleh Kejaksaan. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh jaksa eksekutor dalam melakukan eksekusi pidana perampasan barang (aset) dalam tindak pidana korupsi yaitu, putusan pengadilan sulit untuk dilaksanakan karena kejaksaan mengalami keterlambatan penerimaan putusan sehingga menghambat pelaksanaan eksekusi, administrasi yang belum tertata dengan baik, lamanya waktu yang dibutuhkan dalam penghitungan aset, serta dalam pelaksanaan proses lelang.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Perampasan Aset, Eksekusi, Jaksa

343.04
HAY
s

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020

Haykal, 1710111025, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 120 halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan tujuan luhur berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pengelolaan itu UUD 1945 mengamanatkan bahwa kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, dewasa ini pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyebabkan gangguan pada banyak aspek kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk stabilitas sistem perekonomian nasional. Untuk menghadapi keadaan darurat tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur kebijakan keuangan penanganan pandemi COVID-19. Namun, lahirnya undang-undang ini menyebabkan polemik dalam sistem pengelolaan keuangan negara karena dinilai memiliki karakteristik yang sangat khas dan lemah pengawasan. Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan analisis terhadap dua hal utama. Pertama, bagaimana implikasi hukum materi muatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam keadaan darurat? Kedua, bagaimana solusi pemecahan masalah terkait sistem pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020? Untuk menjawab fokus kajian, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif serta dianalisis melalui studi kepustakaan dan metode analisis data menggunakan yuridis-kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memiliki karakteristik represif serta membuka celah penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaannya. Sehingga diperlukan alternatif pilihan kebijakan pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara untuk menutup celah potensi kerugian negara akibat penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan kebijakan keuangan penanganan pandemi COVID- 19 yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Kata Kunci: Keuangan Negara, Keadaan Darurat, Pandemi COVID-19

341
HEL
p

PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK OLEH KELUARGA PEJABAT DIPLOMATIK BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK

Helmi Dewara Putra, 1610112033, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 80 Halaman, 2021

ABSTRAK

Kekebalan diplomatik adalah pembebasan seseorang terhadap tuntutan hukum atau terhadap kewajiban tertentu karena berstatus sebagai diplomat atau staf kedutaan besar suatu negara. Secara umum kekebalan diplomatik diatur dalam Pasal 20-36 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Dikenal dua kekebalan diplomatik yang melekat pada diri pejabat diplomatik, yaitu immunity yang berarti bebas dari tindakan aparat penegak hukum dalam keadaan tertentu yang dapat diperlakukan secara sah dan inviolability yang berarti ketentuan tidak dapat diganggu gugat dalam menjalankan misi diplomatik atau yang dikenal dengan hak-hak istimewa diplomat. Hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik juga diberikan secara penuh kepada istri dan anak serta anggota keluarga yang tinggal satu atap dengan pejabat diplomatik, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik ini tidak jarang disalahgunakan oleh keluarga pejabat diplomatik. Oleh karena itu masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana bentuk penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik oleh keluarga pejabat diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961, 2) Bagaimana penyelesaian terhadap kasus pelanggaran kekebalan diplomatik yang dilakukan oleh keluarga pejabat diplomatik. Metode penelitian yang digunakan adalah tipologi normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian dan pembahasan dapat menyimpulkan bahwa setiap pelanggaran hukum yang dilakukan keluarga pejabat diplomatik di negara penerima tidak dapat dilakukan tindakan hukum, sesuai dengan Pasal 29 dan 31 Konvensi Wina 1961. Penegakan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan persona non grata (Pasal 9 Konvensi Wina 1961), immunity waiver (Pasal 32 Konvensi Wina 1961) dan pertanggung jawaban negara pengirim. Semua penyelesaian ini juga bergantung dengan seberapa baik hubungan antar dua negara, kedua negara dapat menyelesaikan masalah dengan upaya politis dan perjanjian tertentu untuk menemukan keserasian hukum.

Kata kunci: Penyalahgunaan, Kekebalan diplomatik, Keluarga, Konvensi Wina 1961

348.3
HEN
p

PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Hengki Rahmad Saputra, 1710113104, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021

ABSTRAK

Keterbukaan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan merupakan hal penting yang harus diterapkan dalam pembentukannya, salah satu wujud dari keterbukaan yaitu adanya partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah sudah tidak lagi diperhatikan khusus bagi pembentuk produk hukum daerah dalam pembentukan suatu peraturan daerah. Pengaturannya sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Seringkali pelaksanaan Asas Keterbukaan terhadap proses pembentukan peraturan daerah pejabat pembentuk peraturan daerah belum sesuai dengan ketentuan yang ada misalnya tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, Bagaimana Penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? Kedua, Apa akibat hukum jika asas keterbukaan tidak terlaksana dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? Hasil penelitian ini bersifat deskriptif. Metode yang digunakan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diterapkan namun belum optimal karena mekanisme penerapan asas keterbukaan yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur dari Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah untuk ikut dalam kegiatan publik hearing belum maksimal, yang mana pada saat pemerintah dan instansi terkait mengundang masyarakat untuk melakukan publik hearing tersebut, masyarakat belum maksimal untuk memenuhi undangan kedatangan yang telah disampaikan pihak pemerintah dan instansi terkait, sehingga masyarakat masih banyak yang mengabaikannya. Kedua, akibat hukum apabila asas keterbukaan belum dapat diterapkan dalam pembentukan peraturan daerah, maka akan muncul cacat prosedural dalam pembentukan peraturan daerah. Hal ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan uji materil ke Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kekuasaan untuk menguji peraturan perundang-undangan.

346
HER
p

PERPANJANGAN HAK GUNA USAHA UNTUK USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (STUDI KASUS: PT. SAWIT ASAHAN INDAH)

Herma Desvira, 1710111073, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, 88 halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Penolakan masyarakat dari enam desa di Kecamatan Rambah Samo terhadap perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sawit Asahan Indah (PT. SAI) diawali dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembangunan plasma seluas 20% sesuai amanat Pasal 58 (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. PT. SAI mengaku telah memfasilitasi pembangunan plasma di desa-desa yang bersempadan dengan perusahaan sebagai syarat perpanjangan HGU, akan tetapi pada kenyataannya pembangunan plasma belum secara merata dilakukan karena perusahaan hanya akan memfasilitasi plasma dari lahan yang disediakan masyarakat, bukan dari lahan HGU PT. SAI. Rumusan masalah yang akan dibahas yaitu: 1) Bagaimana proses perpanjangan HGU untuk perkebunan kelapa sawit PT. SAI? 2) Bagaimana kesepakatan masyarakat 6 desa dan PT. SAI dalam pembangunan inti plasma seluas 20% sebagai syarat perpanjangan HGU PT.SAI ? 3) Bagaimana penyelesaian konflik dalam proses pengajuan perpanjangan HGU PT. SAI?. Penelitian ini dilakukan di PT. Sawit Asahan Indah, Kecamatan Rambah Samo, Rokan Hulu, Riau. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Jenis data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Perpanjangan HGU PT. SAI tidak dapat diberikan selama tuntutan masyarakat belum dipenuhi; 2) Selama beroperasi, PT.SAI telah melakukan TJSP, namun untuk pembangunan kebun masyarakat 20% dari luas HGU belum dilaksanakan secara transparan sehingga perusahaan dituntut untuk segera melaksanakannya; 3) Penyelesaian konflik dilakukan dengan cara mediasi yang hasilnya adalah mewajibkan perusahaan segera memenuhi tuntutan masyarakat dengan membangun kebun plasma dari 20% lahan HGU PT. SAI.

Kata Kunci: Kemitraan Inti-Plasma, Hak Guna Usaha, Penyelesaian Konflik.

345.08
HER
p

PELAKSANAAN PENYIDIK OLEH PENYIDIK POLRI TERHADAP ANAK YANG MENJADI PERANTARA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN MEMPERHATIKAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI TERSANGKA (Studi di Wilayah HukumPolres Kota Pariaman)

Heru Zarfi, 1710113107, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 69 halaman, 2021

ABSTRAK

Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2) dijelaskan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Meskipun telah ada pengaturan hak- hak tentang anak dalam proses penyidikan yang terlibat tindak Pidana Narkotika, namun pelakasanaan di lapangan masih belum maksinal dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai tersangka yang terlibat Tindak Pidana Narkotika. Bahkan kasus anak yang terlibat sebagai perantara Narkotika dengan memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka di Polres Kota Pariaman adalah salah satu dari kasus yang cukup memprihatinkan. Maka kurangnya pemenuhan hak-hak anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan yang menjadi titik berat penelitian ini. Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polri terhadap anak sebagai perantara dalam tindak pidana Narkotika dengan memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka di Polres Kota Pariaman?, Apa kendala penyidik dalam memeriksa anak sebagai perantara tindak pidana Narkotika dengan memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka di Polres Kota Pariaman?. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris. Pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang menjadi perantara dalam tindak pidana narkotika dengan memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, penyidik polres Kota Pariaman masih banyak mengakui kekurangan dalam hal penyidikan dengan pemenuhan hak-hak anak yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.Penyidik dalam hal ini selalu mengutamakan pemenuhan perlindungan terhadap hak-hak anak pada saat mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang menjadi perantara tindak pidana narkotika dengan memeprhatikan hak-hak anak sebagai tersangka di Polres Kota Pariaman yaitu : Pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam pemeriksaaan anak sebagai tersangka, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yaitu penyidik anak, kurangnya saran dan prasarana dalam tahap pemeriksaaan.

Kata Kunci : Anak, Penyidikan, Hak-Hak Anak, Perantara Narkotika

345
HID
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR DI KAWASAN HUTAN CAGAR ALAM MANINJAU (Studi di Kepolisian Resort Agam)

Hidayah Rahmah Sari, 1710111105, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2021

ABSTRAK

Indonesia dikaruniai dengan hutan yang luas dan kaya akan keanekaragaman hayatinya di dunia. Pemanfataan hutan yang tidak secara bertanggung jawab dapat menyebabkan rusaknya hutan itu sendiri seperti adanya pembalakan liar (illegal logging) di kawasan hutan Cagar Alam Maninjau yang berada di Kabupaten Agam hutan tersebut memiliki luas 21.891,78 hektare yang tidak berhutan lagi seluas 2.975,42 hektare akibat pembalakan liar. Perbuatan masyarakat yang merusak hutan dengan cara penebangan liar (illegal logging) bisa kita lihat tidak sejalan dengan aturan hukum terhadap suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Penyidik Polres Agam berkoordinasi bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana illegal logging berhasil mengungkap dua kasus pembalakan liar di kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau yang di proses masuk ke ranah pengadilan selama 2017, Sedangkan 2018 sebanyak dua kasus, dan pada 2019 mengungkap satu kasus dan untuk tahun 2020 tidak adanya kasus penebangan liar di kawasan hutan Cagar Alam Maninjau. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengungkap bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polres Agam terhadap tindak pidana penebangan liar di kawasan hutan Cagar Alam Maninjau dan apa saja kendala-kendala yang ditemui waktu pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Polres Agam terhadap tindak pidana penebangan liar dikawasan hutan Cagar Alam Maninjau. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis. Hasil Penelitian ini sebagai berikut : pertama Penyidik Polres Agam dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penebangan liar (illegal logging) di kawasan Hutan Cagar Alam Maninjau ketika melaksanakan penyidikan Penyidik polres Agam bergerak sesuai dengan undang- undang yang mengatur terhadap penebangan liar (illegal logging) dimana diatur dalam Undang-Undang khusus. Kedua kendala yang menjadi faktor kurang maksimalnya proses penyidikan terhadap tindak pidana penebangan liar (illegal logging) adalah sebagai berikut : 1. Faktor cuaca 2. Faktor masyarakat 3. Faktor lokasi TKP yang sulit ditempuh 4. Faktor masih kurangnya personil penyidik 5. Faktor kurangnya sarana dan prasarana.

Kata kunci : penyidikan, tindak pidana,tindak pidana penebangan liar

345
IBN
p

PERANAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BUKITTINGGI

Ibnu Abdul Khalid, 1610112091, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2021

ABSTRAK

Menyadari banyaknya kasus narapidana yang melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan di indonesia, terutama di Lapas Kelas IIA Bukittinggi, petugas diperkenankan untuk melakukan upaya penegakan hukum karena tindakan melarikan diri merupakan suatu pelanggaran tata tertib lembaga pemasyarakatan. Pasal 4 huruf c Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan bahwa Narapidana atau Tahanan dilarang melakukan upaya melarikan diri dan membantu pelarian, selanjutnya pada Pasal 8 menyebutkan bahwa Narapidana atau Tahanan yang melanggar tata tertib dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, hukumann disiplin tingkat sedang, dan hukuman disiplin tingkat berat. Meskipun aturan ini secara tegas diatur tetapi masih ada Narapidana yang melanggar hal ini. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan hukuman disiplin terhadap Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi serta bagaimana upaya petugas dalam menanggulangi kasus narapidana yang melarikan diri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan hukuman disiplin bagi narapidana melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dapat dijatuhi sanksi berupa: dimasukkan kedalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari bahkan bisa melebihi waktu tersebut dikarenakan faktor tertentu; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat serta dicatat dalam register F. Proses penangkapan narapidana melarikan diri di Lapas Kelas IIA Bukittinggi dimana petugas pemasyarakatan melakukan pencarian dan pengejaran bekerja sama dengan masyarakat dalam waktu 1 x 24 jam, tetapi jika tidak membuahkan hasil petugas akan berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kantor wilayah hukum dan hak asasi manusia RI sumatera barat dan direktorat jendral pemasyarakatan untuk penanganan lebih lanjut. Serta Lapas Kelas IIA Bukittinggi juga berkoordinasi dengan kantor imigrasi sehingga dapat dilakukan pencekalan bagi narapidana yang melarikan diri untuk keluar negeri. Pelaksanaan upaya dalam mengatasi kasus narapidana melarikan diri baik itu sebelum atau sesudah terjadinya tindakan pelarian tersebut terdapat 3 (tiga) upaya yaitu upaya pre-emtif; upaya preventif; dan upaya represif.

Kata Kunci: Hukuman Disiplin, Narapidana, Melarikan Diri.

346
ILH
p

PENERTIBAN PENGGUNAAN JARING ANGKAT DAN/ATAU BAGAN DI PERAIRAN DANAU SINGKARAK

Ilham Hidayah Manurung, 1710111046, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2021

ABSTRAK

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan, khususnya ikan bilih dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan yang merusak kelestarian sumber daya ikan. Pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) disebutkan larangan menggunakan alat penangkapan ikan yang dapat merusak pelestarian sumber daya ikan di perairan Danau Singkarak. Alat penangkapan ikan yang dimaksud, yakni jaring angkat dan/atau bagan. Namun dengan dibentuknya peraturan tersebut belum sepenuhnya mampu menghentikan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan jaring angkat dan/atau bagan yang dilakukan oleh nelayan. Permasalahan dalam penelitian ini, yakni: 1) Bagaimanakah penertiban penggunaan jaring angkat dan/atau bagan di perairan Danau Singkarak? 2) Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan penertiban penggunaan jaring angkat dan/atau bagan di perairan Danau Singkarak? Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebelum melakukan tindakan penertiban, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan himbauan dan sosialisasi kepada para nelayan untuk menghentikan penggunaan jaring angkat dan/atau bagan tersebut. Hingga pada akhirnya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan tindakan penertiban yang didahului dengan pembentukan tim terpadu penegakan hukum yang ditetapkan melalui surat keputusan dan melibatkan berbagai pihak di dalamnya. Kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya rapat koordinasi yang menentukan jadwal, alokasi personil atau petugas dan teknis penertiban. Tindakan penertiban dilakukan dengan cara memutus tali jangkar dan menarik jaring angkat dan/atau bagan yang terdapat di danau untuk dipinggirkan, lalu melepaskan jaring, memutus aliran listrik dan membongkar rangka jaring angkat dan/atau bagan. Adapun kendala yang dihadapi dalam melakukan penertiban penggunaan jaring angkat dan/atau bagan di perairan Danau Singkarak, yakni adanya perlawanan masyarakat, masa pandemi covid-19, informasi penertiban bocor, keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana.

Kata kunci: Penertiban, Jaring Angkat Dan/Atau Bagan, Danau Singkarak.

345.02
ILH
p

PERAN KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN ASET NEGARA (ASSET RECOVERY) AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Pariaman)

Ilham Akbar, 1610113035, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 66 Halaman

ABSTRAK

Kejaksaan mempunyai peranan yang sangat penting terkait dengan eksekusi putusan pengadilan dalam pengembalian aset negara (asset recovery) akibat tindak pidana korupsi hal ini sesuai dengan Pasal 1 angkat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana memberikan kewajiban kepada penegak hukum, dalam hal ini pihak kejaksaan untuk menelusuri dan melacak aset dari pelaku tindak pidana korupsi, karena masih banyak kasus korupsi yang saat ini masih belum ada titik terang tentang pengembalian uang pengganti yang dilanjutkan dengan aset negara. Masalah yang diangkat dari skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah peran Kejaksaan Negeri Pariaman terkait dengan eksekusi putusan pengadilan dalam pengembalian aset negara akibat tindak pidana korupsi? (2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Pariaman dalam pengembalian aset negara akibat tindak pidana korupsi? (3) Bagaimakah upaya Kejaksaan Negeri Pariaman dalam pengembalian aset negara akibat tindak pidana korupsi? Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Peran Kejaksaan Negeri Pariaman dilakukan dengan melakukan kegiatan operasional dan berupaya agar kerugian negara akibat kasus korupsi dapat dikembalikan ke kas negara. Kendala Kejaksaan Negeri Pariaman dalam pengembalian aset yaitu dalam hal ketersedian anggaran dan operasional, setelah ditelusuri aset tidak ditemukan dan terpidana tidak bisa membayar uang pengganti dan memilih hukuman kurungan sesuai dengan Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada umumnya terpidana korupsi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) tidak memiliki lagi harta benda untuk disita negara, penyilidikan memerlukan waktu yang lama dan kendala yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaan dalam rangka pengembalian aset negara yaitu masalah apabila terpidana meninggal dunia dan regulasi yang belum jelas. Upaya Kejaksaan Negeri Pariaman dalam pengembalian aset yaitu melakukan pendekatan kepada terdakwa atau keluarga dan melakukan kegiatan operasional dalam penelusuran dan penyitaan aset kekayaan, menjadikan gugatan keperdataan sebagai upaya alternatif pengembalian kerugian keuangan negara serta peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Jaksa.

Kata Kunci : Pengembalian aset (asset recovery), Kejaksaan Negeri Pariaman, Tindak Pidana Korupsi

345
ILH
p

PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP ANGGOTA MILITER TNI- AD YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Pengadilan Militer I-03 Padang, Sumatera Barat)

Ilham Budiman, 1610113105, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana 68 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Pada saat ini penyalahgunaan narkotika mulai merambah ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD). Terhadap tindak pidana narkotika yang telah dilakukan, maka TNI sebagai alat pertahanan Negara haruslah tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan secara khusus diperiksa melalui Peradilan Militer. Meskipun UU No 35 Tahun 2009 dan SEMA No. 7 Tahun 2009 mewajibkan penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi, namun hingga saat ini pelaksaanannya belum maksimal dikarenakan belum adanya fasilitas rumah sakit yang digunakan sebagai tempat rehabilitasi khusus bagi prajurit TNI aktif. Disamping itu, belum adanya regulasi khusus dari internal TNI menjadi penghambat bagi Oditurat Militer untuk mengesekusi terdakwa untuk melaksanakan rehabilitasi. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada skripsi ini adalah 1) Bagaimana penerapan rehabilitasi terhadap anggota militer TNI-AD yang menyalahgunakan narkotika? 2)Apakah alasan hakim pengadilan militer Padang tidak menerapkan rehabilitasi medis terhadap anggota militer TNI-AD yang menyalahgunakan narkotika. Metode penelitian dalam skripsi ini secara yuridis empiris serta penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa 1) Rehabilitasi belum dapat terlaksana karena belum adanya fasilitas rumah sakit sebagai tempat rehabilitasi khusus bagi prajurit TNI aktif. 2) Rehabilitasi tidak dapat diterapkan kepada anggota TNI-AD yang menyalahgunakan narkotika karena aturan di wilayah pengadilan militer I-03 Padang mewajibkan hakim menjatuhkan hukuman pemecatan. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan perlunya pertimbangan dari hakim untuk dapat menerapkan rehabilitasi dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan agar mencapai keadilan.

Kata kunci: Rehabilitasi, Tindak Pidana Narkotika, TNI

345
ILH
p

PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP TERPIDANA MATI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU

Ilham Hudi, 1710113102, 76 Halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas 2021

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat diberikannya pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Namun, berdasarkan perintah Pasal 5 UU No. 2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat bagi orang yang dijatuhi pidana mati (selanjutnya disebut sebagai Terpidana Mati) dan dalam praktiknya Lembaga Pemasyarakatan memberikan pembinaan terhadap terpidana mati tersebut lantaran tidak adanya kejelasan waktu tunggu (bahkan adanya kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum) terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan. Atas dasar itu penulis memfokuskan pada permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dalam memberikan pembinaan terhadap terpidana mati dalam sistem pemasyarakatan?; 2) Bagaimana bentuk pembinaan terhadap terpidana mati dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Pekanbaru?; 3) Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyakatan Kelas IIA Pekanbaru dalam proses pembinaan terhadap terpidana mati. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) dengan sifat penelitian deskriptif , jenis datanya dari data primer dengan wawancara dan studi dokumen serta data tersebut diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1) Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru hanya sebagai tempat bagi terpidana mati menjalani masa tunggunya sampai masanya ia dieksekusi sebagaimana diamanahkan Pasal 5 UU No. 2/PNPS/1964. Namun, Lembaga Pemasyarakatan mengambil kebijakan agar petugas dapat memberikan pembinaan terhadap terpidana mati di Blok Pengendalian Narkotika Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. 2) Bentuk pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap terpidana mati lebih memfokuskan pada pembinaan kepribadian yang diharapkan dapat meningkatkan keimanannya kepada Tuhan-Nya. 3) Dalam menjalankan proses pembinaan tersebut Lembaga Pemasyarakatan mengalami kendala kendala, seperti : belum adanya Peraturan yang mengatur tentang pembinaan dan lamanya masa tunggu terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan, adanya kendala biaya operasional, adanya kendala berupa kurangnya petugas yang profesional dan kurangnya sarana dan prasarana berupa Blok Pengendalian Narkotika yang masih kurang daya tampung.

Kata Kunci: Sistem Pemasyarakatan, Pembinaan, Terpidana Mati

346.08
ILH
p

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN PADA BANK NAGARI DIMASA PANDEMI COVID-19

Ilham Utama Yazid, 1710113118, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis, 70 halaman - Tahun 2021

ABSTRAK

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74 ayat (1), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan dan kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada Bank Nagari dimasa pandemi Covid-19. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada Bank Nagari dimasa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan yang ada dilapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh Bank Nagari merupakan tanggung jawab yang memberikan aspek positif terhadap para pemangku kepentingan, karyawan, masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan secara berkelanjutan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh Bank Nagari telah melaksanakan kegiatannya secara optimal namun dengan adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya perubahan dalam pelaksanaan kegiatannya yaitu lebih memfokuskan dalam penanganan wabah Covid-19 seperti membantu pemerintah daerah di Sumatera Barat, rumah sakit, kantor cabang dan masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Dalam upaya penyaluran CSR oleh Bank Nagari tidak menutup kemungkinan adanya kendala-kendala dan hambatan yang ditemukan dimasa pandemi Covid-19.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Sosial, Perusahaan

342
ILH
k

KARAKTERISTIK DAN DAMPAK PEMBATASAN PENGUJIAN NORMA UNDANG-UNDANG MELALUI PERMOHONAN YANG TIDAK DAPAT DIAJUKAN KEMBALI DI MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP GAGASAN THE LIVING CONSTITUTION

Ilhamdi Putra, 1820112008, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, 263 Halaman

ABSTRAK

Pasal 60 Ayat (1) UU MK melarang dilakukannya pengujian ganda terhadap norma undang-undang, sementara itu pengaturan Ayat (2) memberi pengecualian apabila adanya perbedaan batu uji dari pengujian sebelumnya. Norma serupa juga ditemukan pada Pasal 42 PMK Nomor 06/PMK/2005. Pembatasan pengujian norma dihadapkan dengan keberadaan MK sebagai pilar utama yang menjamin gagasan the living constitution, sehingga memunculkan dua permasalahan. Pertama, karakteristik permohonan yang tidak dapat diajukan kembali berdasarkan hukum acara Mahkamah Konstitusi, kedua, dampak permohonan yang tidak dapat diajukan kembali terhadap gagasan the living constitution. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Dari penelitian yang menggunakan teori dekonstruksi ini, didapati bahwa parameter permohonan yang tidak dapat diajukan kembali ditentukan oleh alasan permohonan Pemohon. Karena ketentuan pengecualian berupa "alasan permohonan" pada Pasal 42 Ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 lebih abstrak dibanding unsur "dasar permohonan" di Pasal 60 Ayat (2) UU MK. Sementara itu, tahapan persidangan dan sistematika putusan mengakibatkan tidak terganggunya gagasan the living constitution. Sekalipun MK memberi putusan negatif yang menolak permohonan, namun putusan itu tetap memiliki nilai positif yang diperoleh dari pertimbangan hukum. Inilah yang menjadikan MK memasuki wilayah kontemplatif pascamodernisme. Sebab kontinuitas aktualisasi konstitusi yang lahir dari pertimbangan hukum mengakibatkan MK berada pada wilayah différance untuk menunda stagnasi kepastian dan kristalisasi keadilan. Akibatnya kepastian hanyalah bentuk temporal dan keadilan harus dielaborasi terus-menerus. Inilah wujud relativitas pascamodernisme yang terkandung pada karakteristik masing-masing perkara.

Kata Kunci: Permohonan yang Tidak Dapat Diajukan Kembali, Mahkamah Konstitusi, The Living Constitution

345
IND
e

EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Indah Nadilla, 1710111004, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 86 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia. Tidak hanya merugikan kekayaan dan keuangan negara, namun korupsi juga menghilangkan legitimasi penegakan hukum dengan menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Tentu dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut tidak akan berjalan lancar jika masih terdapat pihak- pihak yang berupaya menciderai proses penegakan hukum berupa menghalangi dan merintangi proses penegakan hukum atau dikenal dengan istilah Obstruction of Justice. Namun dalam pengaturannya, Obstruction of Justice masih menyisakan masalah. Dimana, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) yang mengatur Obstruction of Justice memunculkan kerancuan dalam memahami maksud delik ini. Khususnya dalam frasa "sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung". Menjawab persoalan tersebut, maka perlu diketahui bagaimana eksistensi pengaturan Obstruction of Justice dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK dan bagaimana pula penegakan hukum pidana dan kendala yang dihadapi untuk menindak Obstruction of Justice tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa eksistensi pengaturan Obstruction of Justice perlu ditata ulang sehingga dapat ditentukan apakah suatu perbuatan tersebut dianggap sengaja untuk menghalangi proses hukum berdasarkan parameteter yang telah ditentukan. Studi ini menyarankan perlunya merevisi UU PTPK, memperkuat sinergitas antar lembaga penegak hukum, memanfaatkan undang-undang terkait korupsi yang ada, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, dan meningkatkan kesadaran publik. Upaya ini penting dilakukan sebagai pendekatan di masa depan dalam melawan korupsi.

Kata kunci : Penegakan Hukum Pidana, Obtsruction of Justice, Tindak Pidana Korupsi.

345.02
IND
p

PERANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL DALAM KEGIATAN CIPTA KONDISI UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATANStudi di Wilayah Hukum Polres Solok

Indah Fauziah Putri, 1710111062, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 72 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Semakin berkembangnya dunia kejahatan dan kriminalitas, membuat Kepolisian harus membuat suatau kemajuan khususnya dibidang Satreskrim dimana bidang itulah yang selalu menjadi pagar atau tembok utama dalam menaggulangi kejahatan. Dengan demikian maka sering kita jumpai didalam melakukan kegiatan cipta kondisi untuk menanggulangi kejahatan yangmana Aparat Satreskrim turut serta atau bergabung bersama-sama aparat Satlantas demi terciptanya keamanan dan kenyamanan di suatu daerah tertentu. Bergabungnya Satreskrim pada kegiatan cipta kondisi untuk menanggulangi kejahatan dikarenakan kejahatan yang terjadi di suatu daerah contohnya diwilayah hukum Polres Solok dari tahun ke tahun semakin meningkat khususnya di sarana transportasi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, Bagaimanakah Peranan Satuan Reserse Kriminal Polres Solok dalam Kegiatan Cipta Kondisi untuk menanggulangi Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Solok? Kedua, Apa saja Faktor Penghambat Peran Satuan Reserse Kriminal Polres Solok dalam Kegiatan Cipta Kondisi untuk menanggulangi Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Solok? Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Pendekatan yuridis sosiologis sosiologis yaitu suatu penelitian yang membandingkan fakta di lapangan dengan peraturan yang berlaku. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut; Pertama, Peranan Satuan Reserse Kriminal Polres Solok dalam Kegiatan Cipta Kondisi untuk menanggulangi Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Solok terbagi atas 3 peranan yaitu; (1) Peran Normatif yaitu peran yang dilaksanakan didasarkan asas diskresi, surat perintah kerja dari pimpinan; (2) Peran Ideal yaitu peran Satreskrim tidak diperbolehkan over kewenangan dalam operasi cipta kondisi bersama Satlantas serta (3) Peran factual yaitu Satreskrim berperan dalam penanganan kejahatan yang terjadi di lalu lintas hanya diperbolehkan ketika ada kejahatan bukan pelanggaran. Kedua, Faktor Penghambat Peran Satuan Reserse Kriminal Polres Solok dalam Kegiatan Cipta Kondisi untuk menanggulangi Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Solok terbagi atas 4 Faktor yaitu sebagai berikut; (1) Faktor Hukum, (2) Faktor Penegak Hukum, (3) Faktor Sarana dan Fasilitas, sarana baik jalan maupun penerangan jalan yang kurang baik membuat peranan Satuan Reserse Kriminal dalam penyelenggaraan operasi cipta kondisi kurang efektif serta Masyarakat dan Budaya Hukum serta (4) Faktor kurangnya simpati masyarakat dan budaya hukum atas kesadaran pentingnya membawa surat kendaraan membuat peran Satuan Reserse Kriminal pada operasi cipta kondisi kurang efektif.

Kata Kunci : Reserse Kriminal, Cipta Kondisi, Kejahatan

346
INT
p

PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA HAK MILIK TANAH DI KELURAHAN KURANJI OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG

Intania, 1710113110, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 80 Halaman, 2021

ABSTRAK

Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah Pemerintah wajib mengadakan pendaftaran tanah. Menurut Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA, kegiatan pendaftaran tanah adalah pemberian surat tanda bukti hak, berlaku sebagai alat bukti yang kuat ditandai dengan terbitnya sertipikat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan. Dalam sengketa pertanahan yang terjadi, berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Kantor Pertanahan mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa pertanahan salah satunya penyelesaian terkait sertipikat ganda. Sertipikat ganda terjadi karena satu bidang tanah memiliki dua atau lebih sertipikat di lokasi yang sama. Akibatnya terjadi tumpang tindih sertipikat hak atas tanah salah satu alasnya jelas terdapat kesalahan. Permasalahan yang akan dibahas: 1) Bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya sertipikat ganda di Kelurahan Kuranji? 2) Bagaimana penyelesaian sengketa sertipikat ganda hak milik tanah di Kelurahan Kuranji oleh Kantor Pertanahan Kota Padang? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskrif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa sertipikat ganda di Kelurahan Kuranji adalah kesalahan dari pemilik karena tidak digarap dan dibiarkan tinggal, sehingga tanah dimanfaatkan oleh pihak lain dengan mendaftarkan kembali sertipikat. Faktor dari Kantor Pertanahan belum ada peta digital saat itu pemetaan masih dilakukan secara manual, dan kurangnya tertib administrasi pada masa itu sehingga berdampak dimasa yang akan datang. 2) Kemudian dilakukan penyelesaian terhadap sengketa tersebut, kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dalam penyelesaian sengketa sertipikat ganda sudah dilaksanakan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyelesaian dimulai dengan pemanggilan kedua pihak, para pihak sepakat menyelesaikan sengketa melalui mediasi dengan menjual tanah dan membagi dua hasil penjualan sama banyak.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Sertipikat Ganda

345
IQB
i

IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIWILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG

Iqbal Faesa Pratama, 1610112087, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021

ABSTRAK

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Padang menunjukan adanya peningkatan. Sudah seharusnya anak pelaku tindak pidana menjadi perhatian khususnya pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Salah satu satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan Keadilan Restoratif. Pendekatan dengan model penghukuman yang bersifat restorative atau disebut Keadilan Restoratif saat ini lebih layak diterapkan dalam menangani pelanggar hukum usia anak. Pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah, pertama, bagaimana implementasi Keadilan Restoratif sebagai upaya dalam menegakkan keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polresta Padang. Kedua, apakah yang menjadi kendala bagi kepolisian dalam menerapkan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Padang?. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang lebih ditekankan pada penerapan hukum di lapangan, sehingga akan lebih banyak didasarkan pada pengumpulan data lapangan dengan maksud untuk mengkonstruksikan kenyataan dengan penerapannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan keadilan restoratif di Polresta Padang terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Sedangkan kendala yang dihadapi pihak kepolisian menerapkan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Padang, pertama, Identitas Tersangka: Penyidik kepolisian seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan identitas asli pelaku seperti akta kelahiran dan ijazah dari pelaku ataupun keluarga pelaku. Karena dalam proses penegakan hukum pada tahap awal harus menemukan identitas pelaku. Kedua, Perekonomian Tersangka: Jika tersangka berasal dari keluarga tidak mampu maka akan mengganggu proses implementasi keadilan retoratif. Karena selain tersangka mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada korban, tersangka harus mengembalikan kerusakan dan kerugian seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Anak, Polresta Padang

345
IVA
d

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG)

Iva Yunivon Soraya, 1610113030, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, 99 halaman

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana secara konstitusional telah disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri dan tujuan tersendiri yang mana terlihat dari penerapan konsep atau bentuk negara hukum yang dianutnya. Adanya hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian pada hidup masyarakat, dan meminimalkan terjadinya tindak pidana. Tetapi tujuan dari hukum itu tidak terlaksana dengan semestinya di Indonesia saat ini. Tindak pidana narkotika sangat marak terjadi. Pengaturan terhadap narkotika telah ada di atur didalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuannya untuk melakukan penegakan hukum agar tidak terjadi tindak pidana narkotika. Kasus tindak pidana narkotika di Indonesia saat ini sangat tinggi, hal itu memiliki dampak buruk terhadap lapas yang ada di Indonesia yaitu terjadinya over kapasitas Lapas. Pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada ayat (1) disebutkan bahwa sanksi untuk penyalahguna narkotika adalah pidana penjara, namun pada ayat 2 dan 3 di sebutkan lagi kalau hakim wajib memberikan rehabilitasi sosial atau medis terhadap penyalahguna narkotika. Namun praktek dilapangan banyaknya putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana penjara. Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam penelitian ini antara lain: 1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pengguna narkotika? 2) Bagaimana pertimbangan hakim tidak memeberikan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang? Adapun penelitian ini mengguanakan metode yuridis sosiologi (empiris) yang bersifat deskriptif, mengguanakan jenis data primer dan jenis data sekunder, seumber data didapatkan oleh penulis dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan pada tuntutan dari jaksa pentuntu umum, selain itu terdapat kelemahan-kelemahan pada undang-undang narkotika, yang mana ada ke tidak seimbangan antara pasal 127 ayat (1) dengan ayat (2),(3).

Kata Kunci: Narkotika, Rehabilitasi dan Penyalahguna Narkotika

345
IVA
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN BAGI ANAK LAKI-LAKI DI BAWAH UMUR (Studi Polres Tanah Datar)

Ivan Stevano, 1710113055, Program Kekhususan Pidana (PK IV), Fakultas HukumUniversitas Andalas, Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang berhubungan dengan seksual atau nafsu birahi. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam pasal 69 dan 69a pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah mengatur bagaimana perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum secara yuridis dan psikis terhadap anak laki-laki sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polres Tanah Datar?. 2. Faktor apa saja yang menghambat dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak laki-laki sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polres Tanah Datar?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu pendekatan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, wawancara, penelitian pustaka. Dari hasil penelitian, perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, identitas korban dirahasiakan, bantuan medis berupa Visum Et Repertum, anak korban pencabulan memperoleh segala bentuk perlindungan sesuai dengan kebutuhannya,. Perlindungan psikis berupa mendapatkan bantuan konseling, psikiater, dan rehabilitasi. Faktor yang menghambat berupa faktor aturan hukum dan peraturan perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Perlindungan Anak, Pencabulan.

343.02
FAK
p

PENGAWASAN TERHADAP IZIN TUKANG GIGI DI KOTA PADANG

Jelsita Novi, 1610111101, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VII Hukum Administrasi Negara, 59 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Tukang gigi termasuk dalam pelayanan kesehatan tradisional, yang mana keahliannya didapatkan secara turun-menurun. Pengaturan mengenai tukang gigi ini terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Berdasarkan ketentuan dimaksud pekerjaan tukang gigi hanya berupa membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Namun, dalam kenyataannya tukang gigi juga menawarkan jasa lainnya seperti pemasangan kawat gigi. Oleh karena itu, diperlukannya pengawasan terhadap izin tukang gigi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut Pasal 10 Permenkes tentang Tukang Gigi yang berwenang melakukan pengawasan adalah Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Dalam hal ini yang berwenang dalam melakukan pengawasan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang kesehatan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana pengawasan terhadap izin tukang gigi di Kota Padang? 2) Bagaimana tindak lanjut hasil pengawasan terhadap izin tukang gigi di Kota Padang? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Jenis data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang, yaitu pengawasan langsung yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun, pengawasan tidak langsung berupa penerimaan laporansecara berkala tiap 3 (tiga) bulan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang dari tukang gigi terkait, pengawasan preventif, dan pengawasan represif. 2) Tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang hanya berupa pembinaan dan saran untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kata Kunci: Pengawasan, Perizinan, Tukang Gigi

345
KAM
p

PERANAN PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENANGGULANGAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG

Kamil Farhan, 1610111074, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 59 Halaman, 2021

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu penggunaan tanpa hak dan melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, penyalahgunaan narkotika bisa juga terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, yang melibatkan narapidana. Seperti kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, pada bulan oktober 2019, petugas Lapas menemukan 5 orang narapidana, yang diketahui menggunakan narkotika jenis sabu-sabu oleh petugas lapas yang sedang melakukan konrol hunian, rumusan masalah yang akan diteli penulis pada penyusunan skripsi ini adalah, Pertama, Bagaimana peranan Petugas Lapas dalam penanggulangan kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Kelas II A Padang. Kedua, Bagaimana Koordinasi antara Petugas Lapas dengan Kepolisian dalam Penanggulangan Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Kelas II A Padang. Ketiga Apa saja Kendala yang dihadapi oleh Petugas Lapas dalam Penanggulangan Kasus Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Kelas II A Padang. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah, yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud tujuan untuk menemukan fakta. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan peranan petugas Lapas dalam Penanggulangan Kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Kelas II A Padang, s dah dijalankan sesuai SOP yang berlaku, SOP yang digunakan yaitu SOP mengenai keamanan dan ketertiban di dalam lapas, di dalam SOP tersebeut terdapat 2 upaya yaitu upaya preventif melakukan penggeledahan di pintu utama baik untuk pengunjung, dan petugas, kemudian penggeledahan khusus narapidana yang dilakukan rutin 4 kali penggeledahan dalam 1 bulan, dan program khusus rehabilitasi narkotika, serta mekakukan kontrol hunian. Dan upaya represif yaitu memisahkan narapidana yang diketahui memiliki narkotika, ditempatkan di sel pengasingan, lalu petugas menyita narkotika tersebut, dan bagi yang ditemukan melakukan penyalahgunaan narkotika akan diproses lebih lanjut oleh kepolisian. Kendala uatma yang dihadapi oleh petugas Lapas dalam Penanggulangan kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh narapidana yaitu, keterbatasan jumlah petugas, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, seperti tidak adanya alat pendeteksi narkotika, yaitu X-Ray

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan

342.07
KAT
p

PENGATURAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PADA PROSES PENDATAAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Katerina Monika,1710112055, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hukum Tata Negara, 2021

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah dan sarana untuk melaksanakan hak-hak dasar warga negara. Dibuktikan dengan adanya pemilihan kepala daerah provinsi maupun kabupaten atau kota untuk memilih gubernur, bupati dan walikota. Rakyat mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi melalui hak suara sebagai pemilih sehingga harus terdaftar sebagai pemilih serta memenuhi syarat yang diatur oleh undang- undang. Salah satu syarat tersebut adalah tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut dianggap menghilangkan hak memilih seorang warga negara, padahal kondisi terganggu jiwa atau ingatannya bukan merupakan kondisi yang permanen. Pada penulisan ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas, pertama bagaimana bentuk perlindungan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental pada proses pendataan daftar pemilih tetap dalam pemilihan kepala daerah? Kedua bagaimana pengaturan yang ideal hak pilih bagi penyandang disabilitas mental pada proses pendataan daftar pemilih tetap dalam pemilihan kepala daerah? Dalam penelitian ini ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen, dan keterangan ahli melalui wawancara dengan komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat dan ahli kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Provinsi Sumatera Barat. Dari hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas mental di Indonesia dibuktikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 yang dijadikan dasar dan legalisasi dari adanya hak pilih dalam pemilihan kepala daerah bagi penyandang disabilitas mental. Dan teknis pelaksanaan yang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum agar tersedianya daftar pemilih yang akurat. Dengan harapan negara dapat melindungi hak dasar warga negara dalam segala aspek untuk mendapatkan kepastian hukum, termasuk mengenai hak pilih dalam pemilihan kepala daerah.

345.02
KHA
a

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING (Studi Kasus Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)

Khafifah Zulva, 1710113029, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Pada praktiknya tidak semua para penegak hukum dapat menjatuhkan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada sehingga penjatuhan pidana oleh hakim tidak sesuai dengan bentuk kesalahan terdakwa. Seperti pada kasus tindak pidana korupsi oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring terhadap Pembangunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan ketujuh proyek lainnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.25.953.784.580,57 sehingga terdakwa dijatuhi denda sebesar Rp.700.000.000 dan pidana uang pengganti sebesar Rp.85.490.234.737,00. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah Pertama apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda terhadap PT. Nusa Konstruksi Enjiniring ? Kedua apakah jumlah pidana uang pengganti yang diputuskan oleh hakim terhadap PT. Nusa Konstruksi Enjiniring telah sesuai dengan konsep kerugian keuangan negara ? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan teknik pengumpulan data melalui bahan hukum kepustakaan. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah Pertama dalam putusan nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst menunjukan bahwa terdakwa tidak hanya dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun terdakwa juga dapat dikenakan Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penjatuhan pidana denda kepada terdakwa adalah pidana denda maksimum ditambah 1/3. Kedua sesuai barang bukti yang ditemukan oleh jaksa dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa menunjukan bahwa seharusnya hal tersebut tidak hanya mengarah pada Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, tetapi kepada ketujuh proyek lainnya sehingga penjatuhan pidana uang pengganti yang ditetapkan oleh hakim tidak dapat memulihkan kerugian keuangan negara berdasarkan pada objek perkara tersebut dan menikmati harta benda hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tidak menimbulkan akibat merugikan keuangan negara menjadi tidak optimal dalam penetapannya.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Putusan Hakim, Korporasi

346.01
KHA
p

PENYELESAIAN PERKARA TAKLIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A PADANG (Studi Perkara Nomor 1116/Pdt.G/2019/PA.Pdg)

Khairunnisa, 1710112071, Fakultas Hukum, 2021, 91 Halaman

ABSTRAK

Pengucapan sighat taklik talak bukanlah merupakan keharusan dalam setiap perkawinan, namun kebanyakan perkawinan orang islam di Indonesia selalu dibarengi dengan pengucapan sighat taklik talak, sekali taklik talak diucapkan maka hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum bagi seorang suami yang mengucapkannya dan tidak bisa dicabut kembali. Saat ini pengucapan sighat taklik talak dibuktikan dengan pencantuman sighat taklik talak di dalam akta pernikahan. Walaupun demikian pada kenyataannya masih banyak suami yang melanggar sighat taklik talak, seperti halnya di Kota Padang hal ini dibuktikan dari banyaknya gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami di Pengadilan Agama Kelas I A Padang, diantaranya kasus gugatan perceraian dengan Nomor Perkara 1116/Pdt.G/2019/PA.Pdg yang dalam hal ini Ibuk Y bertindak sebagai Penggugat dan Bapak AP sebagai Tergugat. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengungkap faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran taklik talak oleh pelaku pelanggar taklik talak yaitu AP, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan gugatan perceraian karena pelanggaran taklik talak. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini sebagai berikut: Pertama faktor rendahnya tingkat religiusitas, yaitu berkaitan dengan rendahnya tingkat keimanan atau religiusitas pelaku pelanggaran taklik talak yang dalam hal ini suami telah lalai dari tanggungjawabnya sebagai suami, Kedua faktor ekonomi yang dalam hal ini kurang memadainya pendapatan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang menjadi pemicu terjadinya pelanggaran taklik talak, Ketiga faktor komunikasi, yaitu kegagalan dalam membangun budaya komunikasi dalam rumah tangga yang berujung pada perselisihan dalam rumah tangga, Keempat faktor konflik atau perselisihan yang terjadi antara suami dan istri yang disebabkan oleh tiga faktor sebelumnya yaitu faktor ekonomi, komunikasi, dan rendahnya tingkat religiusitas Tergugat yang menjadi pemicu konflik rumah tangga. Selain itu Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak didasarkan kepada 3 hal yaitu satu, terbukti bahwa suami pada saat sebelum pernikahan mengucapkan sighat taklik talak, kedua, terbukti bahwa suami telah melanggar taklik talak, ketiga, terbukti bahwa istri tidak redha dengan hal tersebut dan membayar iwadl, dan dalam putusan perkara ini pertimbangan yang digunakan hakim adalah berdasarkan pertimbangan hukum filosofis, dan normatif.

Kata kunci : Sighat taklik talak

343.04
LAR
p

PENGELOLAAN PROGRAM PENSIUN KARYAWAN PT. SEMEN PADANG OLEH DANA PENSIUN SEMEN PADANG

Laras Nikita Ralvi, 1710113031, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 72 Halaman, 2020

ABSTRAK

Dana Pensiun merupakan suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Landasan hukum bagi penyelenggaraan program pensiun adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dana Pensiun bukan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi, tetapi Dana Pensiun merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun ini membawa manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat terutama bagi karyawan dan keluarganya setelah tidak lagi bekerja. PT. Semen Padang memikirkan kesejahteraan hari tua bagi karyawannya dengan cara mendirikan Dana Pensiun Semen Padang sebagai badan hukum yang mengelola program pensiun Manfaat Pasti bagi karyawan PT. Semen Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu pendekatan masalah dengan melihat apakah pengelolaan program pensiun di Dana Pensiun Semen Padang sesuai atau berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian menganalisisnya menjadi penelitian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana hubungan hukum Dana Pensiun Semen Padang dengan PT. Semen Padang, bagaimana pelaksanaan pengelolaan program pensiun karyawan PT. Semen Padang oleh Dana Pensiun Semen Padang dan apa kendala yang dihadapi dalam mengelola program pensiun tersebut, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Bentuk hubungan hukum Dana Pensiun Semen Padang dengan PT. Semen Padang dapat dilihat dari pembentukan Dana Pensiun. Dana Pensiun Semen Padang adalah badan hukum yang dibentuk oleh PT. Semen Padang selaku Pendiri untuk mengelola program pensiun karyawan PT. Semen Padang. Hak dan kewajiban baik PT. Semen Padang selaku Pendiri maupun Pengurus Dana Pensiun Semen Padang selaku pihak yang ditunjuk oleh Pendiri sebagai pengelola Dana Pensiun dituangkan dalam Peraturan Dana Pensiun Semen Padang yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan (sekarang oleh Otoritas Jasa Keuangan) sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Dana Pensiun.

Kata Kunci : Dana Pensiun, Program Pensiun

346.06
LUK
p

PENGISIAN JABATAN KEPALA RUMAH SAKIT DITINJAU DARI SEGI PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM HUKUM DAN PEMERINTAHAN

Lukman Nul Hakim, 1710112121, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 61 hlm, 2021

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menerangkan bahwa direktur atau pimpinan rumah sakit haruslah seorang tenaga medis. Hal tersebut dapat ditemukan pada Pasal 34 ayat (1) yang mengatur bahwa direktur rumah sakit harus tenaga medis yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang perumahsakitan. Hal ini diperjelas lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan. Pengertian tenaga medis yang terbaru didasarkan pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Medis, tenaga medis meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Tentunya pasal ini tidak sesuai dengan konstitusi tentang hak asasi manusia dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan hukumnya, dimana semua warga negara Indonesia berhak untuk memiliki pekerjaan yang layak tanpa memandang latar belakang profesi. Berdasarkan hal tersebut, penulis memiliki dua poin penting sebagai rumusan masalahnya yaitu: Pertama, Bagaimana pengaturan tentang pengisian jabatan kepala rumah sakit menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dilihat dari persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagai hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? dan Kedua Bagaimana praktik pemenuhan hak warga negara terkait hak persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan dalam pengisian jabatan kepala rumah sakit di Indonesia? Dalam penelitian ini penulis mengunakan metode studi kepustakaan yaitu studi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Sifat penelitiannya yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, dan analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Terhadap pasal ini sebaiknya dilakukan perbaikan atau judicial review agar terlaksananya keadilan dimata hukum dan tidak terbentuknyan sekat- sekat profesi. Praktik penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ini mengalami berbagai variasi, ada yang terlaksana berdasarkan peraturan perundang-undangan namun banyak juga yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

346.08
MAS
p

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN POLIS ASURANSI DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS PT JIWASRAYA (PERSERO)

M. Asri, 1710112103, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, 74 halaman

ABSTRAK

Dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disebutkan bahwa: "Keberadaan program penjamin polis dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi". Dalam hal ini PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami gagal bayar klaim terhadap nasabahnya atas produk Investasi JS Saving Plan, yang mana hingga akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp16,1 trilliun. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan Membentuk Lembaga Penjamin Polis, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Namun Pembentukan Lembaga Tersebut belum terealisasikan sampai saat ini. Rumusan Masalah yang timbul yaitu: 1) Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi? 2) Apa penyebab PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami Gagal Bayar Klaim Polis terhadap Pemegang Polis? 3) Bagaimana Upaya yang dilakukan Pemerintah guna mempersiapkan Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi? Penelitian ini mengunakan metode penelitian Yuridis Normatif, kemudian penelitian ini mengunakan jenis penelitian Deskriptif Evaluatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil: 1) Perlindungan Hukum serta kedudukan Pemegang Polis atau Tertanggung telah jelas diatur oleh ketentuan–ketentuan di dalam KUHPerdata, KUHD, Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun dalam kenyataannya berdasarkan data sekunder yang didapatkan pemegang polis asuransi jiwasraya belum mendapatkan perlindungan hukum dalam memenuhi hak – haknya selaku tertanggung. 2)Penyebab PT Jiwasraya (Persero) mengalami gagal bayar klaim terhadap nasabahnya, disebabkan buruknya Tata kelola Perusahaan, Kinerja Pengelolaan Aset yang rendah, serta buruknya Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan Komite Audit. 3)Upaya yang telah dilakukan Pemerintah guna mempersiapkan pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi, ialah saat ini Pemerintah tengah mematangkan dan mempersiapkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pembentukan Lembaga Penjamin Polis dan telah memasukkannya dalam PROLEGNAS 2021-2024, namun RUU itu sendiri belum diterbitkan sampai saat ini, sehingga tidak bisa diperoleh isi RUU tersebut dan tidak dilakukan penelitian lebih lanjut, kemudian guna penyelamatan perseroan dan polis nasabah PT Jiwasraya (Persero), maka Pemerintah melakukan Holding BUMN Penjaminan dan Perasuransian yaitu IFG Life.

Kata Kunci : Lembaga Penjamin Polis, Perlindungan Hukum Pemegang Polis, PT Jiwasraya (Persero).

345
MIR
p

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

M. Irdhan Dwiko Alendina, 1710111058, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 74 halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Pemilu atau pemilihan umum yaitu proses memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan tertentu. Sebagai perwujudan demokrasi, pemilihan umum harus dilaksanakan berdasarkan asas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pada setiap proses pelaksanaan pemilu hampir selalu terjadi pelanggaran dan tindak pidana pemilu, begitu juga halnya yang terjadi pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Solok. Pada pemilihan umum tersebut telah masuk laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu dimana pada proses penegakan hukumnya masih terjadi permasalahan. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Solok yang merupakan sentra penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pemilu di Kabupaten Solok melakukan penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pemilu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang penulis teliti yaitu: 1) Bagaimanakah penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pemilu pada pemilihan umum legislatif di Kabupaten Solok Tahun 2019 oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu, 2) Apakah hambatan yang dihadapi oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penyelesaian tindak pidana pemilu pada pemilihan umum legislatif di Kabupaten Solok Tahun 2019. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris serta bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan menurut UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 7 Tahun 2018 tentang Penaganan Temuan dan Laporan serta Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu serta melakukan upaya prefentif sebelum terjadinya tindak pidana pemilu, namun hal tersebut masih belum berjalan secara maksimal dikarenakan beberapa hambatan. Hambatan yang dialami oleh Sentra Gakkumdu yaitu keterbatasan kemampuan personil Gakkumdu terutama dari Bawaslu karena kurangnya pengalaman serta pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, keterbatasan personil dalam memproses penanganan tindak pidana pemilu, dalam pengumpulan bukti dimana Bawaslu tidak mempunyai kewenangan menurut Undang-Undang dalam pemanggilan saksi sehingga menimbulkan kajian yang kurang lengkap, serta batas waktu dalam proses penyelesaian tindak pidana pemilu yang singkat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu

346.01
MNA
k

KEDUDUKAN WALI NASAB YANG DINYATAKAN ADHAL BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KOTA BUKITTINGGI

M. Nauval Hafiz, 1710113044, Fakultas Hukum, 2021, 71 Halaman

ABSTRAK

Dalam suatu rencana perkawinan sering muncul masalah dimana orang tua mempelai tidak merestui dan tidak ingin menjadi wali nikah dari anak perempuannya. Dalam hal ini, wali yang menolak untuk menjadi wali nikah disebut dengan wali adhal. Apabila dalam hal yang benar-benar dipandang tidak memiliki alasan yang kuat, orang tua tidak menyetujui dan merestui perkawinan anaknya dan menolak menjadi wali seperti orang tua menolak atas dasar materi, pangkat dan jabatan serta bukan atas pertimbangan yang dibenarkan oleh syara', maka perwalian dapat dimintakan kepada wali hakim. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Bukittinggi, ada beberapa calon mempelai yang terhalang oleh persoalan dimana orang tua atau wali pemohon tidak ingin menjadi wali nikah dalam rencana pernikahan anaknya. Maka berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) alasan-alasan wali nasab tidak bersedia menikahkan anaknya sehingga dinyatakan wali adhal berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kelas 1B Bukittinggi. (2) Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali adhal terhadap wali nasab di Pengadilan Agama Kelas 1B Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis dengan metode deskriptif. Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data ini adalah metode wawancara. Analisis data yang dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif yaitu data tidak berupa angka melainkan data dianalisis berdasarkan peraturan perundang- undangan serta pendapat para ahli. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa alasan diajukannya permohonan wali adhal karena alasan-alasan yang tidak sesuai syar'a seperti faktor pendidikan, pekerjaan, masa lalu, perjodohan, ketidaksukaan terhadap pribadi calon suami pemohon. Adapun alasan yang sesuai syar'a seperti beda agama, terdapat cacat fisik pada calon suami pemohon, dan tidak sekufu tidak dapat dijadikan sebagai alasan. Alasan-alasan yang tidak sesuai syara' ini dijadikan sebagai acuan dan penguat hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan wali adhal. Pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali adhal berdasarkan pertimbangan yuridis sesuai dengan pasal 19 KHI. Sosiologis berdasarkan faktor alasan si wali dan maslahah (manfaat) serta mencegah kemudharatan (keburukan) apabila para pihak tidak segera dinikahkan. Pertimbangan filosofis dimana perkawinan itu merupakan hal yang harus disegerakan kepada orang yang telah menyatakan kehendaknya, sehingga jika tidak disegerakan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama maupun perundang-undangan.

Kata Kunci: Perkawinan, Wali Adhal, Pengadilan Agama

346
MHD
p

PELAKSANAAN WAJIB TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA TERHADAP ANGKUTAN LAUT DOMESTIK WISATA DI KELURAHAN TELUK KABUNG SELATAN KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG

Mhd. Rizki A.R. Syam Nasution, 1610112098, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 73 Halaman,2020

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Pasal 3 ayat (1) Perda Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 tentang TDUP secara jelas menyatakan bahwa pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usaha pariwisatanya kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Namun, berdasarkan fakta dilapangan ditemukan bahwa 3 (tiga) dari pelaku usaha jasa angkutan laut domestik wisata di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota Padang belum memiliki TDUP dan hal itu diperkuat juga melalui hasil wawancara dengan DPMPTSP, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang bahwasanya belum ada pelaku usaha yang memiliki TDUP di wilayah tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama bagaimana pelaksanaan wajib TDUP terhadap angkutan laut domestik wisata di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota Padang dan kedua bagaimana tindak lanjut terhadap usaha jasa angkutan laut domestik wisata yang tidak memiliki TDUP di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota Padang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni: 1). Bentuk pelaksanaan wajib TDUP terhadap angkutan laut domestik wisata di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota Padang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena belum ada sama sekali TDUP yang dimiliki pelaku usaha tersebut. 2). Tindak lanjut terhadap jasa angkutan laut domestik wisata yang tidak memiliki TDUP di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota Padang juga tidak ada diberikan sanksi administratif oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dan juga DPMPTSP Kota Padang.

Kata Kunci : Pelaksanaan wajib TDUP, Jasa angkutan laut domestik wisata.

348.3
MUH
p

PERAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN AGAM

Muhammad Eriko, 1610113053, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hukum Tata Negara, Tahun 2021, 61 Halaman

ABSTRAK

Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". gambaran miring mengenai pelaksanaan peran polisi pamong praja sudah sangat sering didengarkan dari masyarakat, tindakan represif yang terkesan arogan menjadi contoh perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ialah landasan utama dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan hukum di Kabupaten Agam, hal dan isu mengenai tindakan polisi pamong praja dalam menciptakan Kabupaten Agam yang aman, tentram, dan tertib ialah kurangnya pelaksanaan peran polisi pamong praja secara menyeluruh di Kabupaten Agam. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian mengenai pelaksanaan peran polisi pamong praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Agam. Penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber utama. Dengan pendekatan sosiologis yang melihat keadaan di masyarakat dan mengambil sumber data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam penulis menyimpulkan masih kurangnya pelaksanaan penegakan hukum di Kabuapaten Agam dan faktor yang sering mempengaruhi ialah kesadaran dan tanggung jawab dari polisi pamong praja sendiri yang berperan sebagai aparat penegak hukum.

Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kabupaten Agam

345
MAH
a

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA OLEH HAKIM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL PADA ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN. Pyh)

Mahfuz Arifein, 1710113001, 72 halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas 2021

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum, maka setiap kejahatan tidak dapat dihukum tanpa adanya aturan yang mengatur. Penegakan hukum di Indonesia tidaklah semudah membaca dan menerima bahan, konsep yang termuat dalam perundang-undangan. Seperti pada kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh. Pada kasus ini terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dengan tuntutan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 3 (tiga) bulan. Adapun rumusan masalah penelitiannya Pertama, Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul pada anak dalam putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN. Pyh? Kedua, Bagaimanakah keefektifitasan penerapan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul pada anak studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 68/ Pid.Sus/2019/PN.Pyh? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan teknik pengumpulan data melalui bahan hukum dalam penelitian (penelitian kepustakaan) dan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Pyh serta bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan hukum sekunder yang diperoleh, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah tepat dan melebihi tuntutan dengan pertimbangan pelakunya pendidik dan korbannya lebih dari satu orang yaitu 12 (dua belas orang). Penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul pada anak kurang efektif karena tidak mencapai tujuan dari pemidanaan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perbuatan Cabul, Penjatuhan Pidana, Pidana Denda

343.09
MHD
u

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMOLISIAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR BUKITTINGGI

Mhd. Faruqhi Mahmud, 74 halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021

ABSTRAK

Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha agar kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta bebas dari adanya pelanggaran norma- norma hukum. Banyaknya gangguan kamtibmas yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bukittinggi sepatutnya tidak terjadi jika program Polmas dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui program Pemolisian Masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bukittinggi dan kendala apa yang dihadapi oleh kepolisian dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui program Pemolisian Masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bukittinggi. Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara dengan pendekatan wawancara terarah. adapun upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui program pemolisian masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bukittinggi dilakukan dengan cara antara lain: setiap harinya Bhabinkamtibmas wajib melakukan patroli sekaligus menyambangi masyarakat dan bersilaturahmi dengan masyarakat, bekerja sama dengan masyarakat untuk membentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) di setiap kelurahan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bukittinggi, dan memberdayakan peran tokoh masyarakat di tengah-tengah masyarakat. Kendala yang dihadapi adalah berupa: tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda-beda, masyarakat yang tidak langsung melapor ke Bhabinkamtibmas jika terjadi pencurian, penindakan terhadap gangguan kamtibmas yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas yang tidak bisa terlalu tegas, dan masyarakat yang tidak gampang untuk menerima apa yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas.

Kata kunci: Kepolisian, Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Pemolisian Masyarakat.

345
MEM
u

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

Memusha Pudica Andreas, 1710113015, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, PK IV, (Hukum Pidana), 92 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Dalam rangka penegakan hukum, Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan juga mengatur mengenai sanksi pidana yang digunakan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku baik dilakukan oleh Wajib Pajak, petugas pajak maupun pihak ketiga. Sanksi pidana tersebut dijadikan sebagai ultimum remedium apabila sanksi administrasi tidak cukup untuk dilaksanakan. Akan tetapi, dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai kedudukan dan pertanggungjawaban korporasi sebagai salah satu Wajib Pajak dalam tindak pidana perpajakan. Sehingga, dalam penegakan hukum pidana terhadap Wajib Pajak korporasi masih banyak terjadi tumpang tindih mengenai penertibannya. Korporasi yang juga diuntungkan sebagai Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran terkadang tidak mendapatkan sanksi apapun dalam tindak pidana perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana perpajakan? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 1. Bahwa kedudukan korporasi sudah mulai diakui sebagai subjek hukum dalam ketentuan pidana di luar KUHP, begitu pula dengan kedudukan korporasi sebagai Wajib Pajak juga diakui sebagai subjek hukum tindak pidana perpajakan, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus tindak pidana pajak yang pernah diputus di pengadilan sehingga apabila terjadi tindak pidana perpajakan korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban. 2. Sistem pertanggugjawaban korporasi yang digunakan dalam tindak pidana perpajakan adalah vicarious liability. Terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada korporasi yakni apabila pengurus yang melakukan perbuatan maka pertanggungjawaban diberikan kepada pengurus, apabila korporasi yang melakukan perbuatan maka pertanggungjawaban diberikan kepada pengurus, dan apabila korporasi yang berbuat maka pertanggungjawaban diberikan kepada korporasi. Sanksi yang dapat diberikan berupa pidana penjara, kurungan dan denda yang dapat diterapkan kepada pengurus, dan sanksi pidana denda yang diterapkan kepada korporasi. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diaplikasikan sesuai dengan kondisi korporasi yang melakukan tindak pidana.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Korporasi, Tindak Pidana, Perpajakan

342.07
MEN
p

POLITIK IDENTITAS DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DALAM BINGKAI NKRI (STUDI KASUS : PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2018)

Mentari Pricillia Febe Manurung, 1710113105, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, Program Kekhususan Hukum Tata Negara.

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam kebudayaan dan agama sehingga identitas dalam diri masyarakat nya begitu sangat penting, Dalam Konstitusi Indonesia, dengan tegas memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UU 1945 ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Namun, Pasca reformasi sentimen antar golongan semakin menguat baik golongan agama maupun golongan etnis, sentimen antar golongan tersebut kemudian diakomodir dan dipergunakan para elite politik sebagai senjata dalam pemilihan umum di daerah, termasuk di Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimana Politisasi Identitas dikaitkan dengan kebebasan beragama dalam bingkai negara hukum Indonesia dan mengetahui seberapa besar politik identitas mempengaruhi kemenangan pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (ERAMAS) dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. Banyak isu-isu yang terjadi selama pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara antara lain ada isu agama, isu putra daerah, isu kesukuan namun juga ada faktor lain yaitu faktor figur dari pasangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis sederhana dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang sedang terjadi di masyarakat. Adapun lokasi penelitian yaitu di Medan, Sumatera Utara sehingga hasil dari penelitian skripsi ini adalah kaitan politik identitas dengan kebebasan beragama dan analisis terhadap faktor- faktor kemenangan pasangan ERAMAS yaitu faktor agama, putra daerah dan faktor figur. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pemilih di Sumatera Utara menggunakan politik identitas dalam emilihan kepala daerah, oleh karena itu berdasarkan analisis tersebut faktor-faktor kemenangan pasangan ERAMAS dapat dikategorikan sebagai pemilih dengan model perilaku pemilih sosiologis yaitu memilih karena ada persamaan agama, suku, dan kesamaan asal usul, serta memilih dengan model psikologi yaitu karena faktor figur dari pasangan ERAMAS tersebut.

341.48
MIL
p

PELAKSANAAN FUNGSI MEDIASI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI SUMATERA BARAT

Millennia Ramadhani Aryan, 1710111066, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021,

ABSTRAK

Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Di Indonesia termasuk di Sumatera Barat masih ada masalah pemenuhan hak – hak dan perlindungan warga Negara oleh pemerintah yang masih jauh dari harapan seperti persoalan-persoalan yang berbentuk pelarangan, intimidasi, ancaman, hingga perampasan hak - hak warga Negara. Ada dua rumusan masalah yang akan dibahas yaitu : 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi mediasi Komnas HAM Perwakilan Sumbar dalam menangani kasus pelanggaran HAM. 2) Sejauh mana efektivitas fungsi mediasi Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan HAM. Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis yang terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui pelaksanaan fungsi mediasi Komnas HAM Perwakilan Sumbar dalam penyelesaian kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder. Teknik yang di gunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data yaitu dengan mengungkapkan kenyataan – kenyataan dalam bentuk kalimat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan fungsi pramediasi, tahapan yang dilakukan oleh Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat telah sesuai dengan Pasal 12 Angka 4 Peraturan Komnas HAM Nomor 59 A/Komnas HAM/X/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi Komnas HAM dan Komnas HAM Perwakilan Sumbar masih belum efektif dalam menyelesaikan kasus – kasus yang terindikasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia karena ada keterbatasan kewenangan yang dimiliki dan minimnya alokasi anggaran. Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu agar Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam menjalankan pramediasinya tetap mempertemukan kedua belah pihak terhadap setiap kasus yang terindikasi pelanggaran HAM. Dan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM RI dapat dilakukan revisi atau penyempurnaan sehingga Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat memiliki kewenangan penuh dalam menyelesaikan kasus untuk memediasi secara penuh. Serta seharusnya Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat mengeluarkan rekomendasi yang mempunyai kekuatan hukum dan bersifat mengikat terhadap pihak-pihak yang bersengketa atau yang terindikasi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

345
MIZ
p

PENEGAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NO 6 TAHUN 2020 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TERHADAP PELAKU USAHA DI KOTA BUKITTINGGI

Mizanul Halim A.R.1610113025.Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK IV (Hukum Pidana). Halaman 60. Tahun 2021.

ABSTRAK

Kebutuhan lingkungan baik dan sehat harus didapat bagi setiap warga negara indonesia, namun pada saat ini lingkungan baik dan sehat sulit didapat karena diketahui dunia saat ini tengah mengalami permasalahan sangat serius akibat munculnya Corona Virus Disease 2019. Maka dari itu pemerintah dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian tentang penegakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 terhadap pelaku usaha di Kota Bukittinggi. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah (1) Bagaimana penegakan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 terhadap pelaku usaha di Kota Bukittinggi (2) Apasaja kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 terhadap pelaku usaha di tingkat Penyidikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan atau kenyataan di lapangan), sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai penerapan sanksi pidana menurut Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Vi us Disease 2019 terhadap pelaku usaha di Kota Bukittinggi. Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa penegakan Sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 terhadap pelaku usaha di Kota Bukittinggi baru sebatas sanksi Administratif. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negri Sipil (Satuan Polisi Pamong Praja Bukittinggi) dalam menegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalin Corona Virus Disease 2019 terhadap pelaku usaha di Kota Bukittinggi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, yang mana faktor partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum sangat penting dalam penegakan hukum tersebut.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Corona Virus Disease 2019, Adaptasi Kebiasaan Baru

346.01
MUH
e

EKSISTENSI TRADISI ADAT BAJAPUIK DAN UANG HILANG DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Muhammad Iqbal, 1610112099, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, 94 halaman

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting bagi kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Perkawinan dalam konteks adat, dilaksanakan menurut tradisi yang turun temurun dari nenek moyang. Ada banyak perihal cara perkawinan dan proses sebelum perkawinan pada masyarakat adat. Pada daerah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Perkawinan dilaksanakan dengan cara tradisi adat bajapuik dan uang hilang dalam tahapan prosesi perkawinannya. Tradisi adat bajapuik dan uang hilang merupakan tradisi yang dilakukan sebagai salah satu syarat oleh perempuan untuk menjemput laki-laki dalam bentuk uang atau benda berharga seperti emas dan lainnya. Penelitian ini dilakukan atas dasar implementasi dan bagaimana sejarah dan eksistensinya serta prosesi yang sebenarnya di lapangan, bagaimana nilai-nilai yang terkandung didalamnya, lalu bagaimana presepsi masyarakat, pro dan kontra serta bagaimana pengaruhnya terhadap pelasaknaan perkawinan. Rumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana eksistensi tradisi adat bajapuik dan uang hilang dalam pelaksanaan perkawinan adat di Kabupaten Padang Pariaman, dan bagaimana pengaruh tradisi adat bajapuik dan uang hilang terhadap pelaksanaan perkawinan adat di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini dilakukan di tiga (3) nagari berbeda yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Kenagarian Gunung Padang Alai, Kuranji Hilir dan Lubuk Alung. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan Wali Nagari, Datuak Palo Mudo, Wakil Ketua KAN, Datuak Koto Piliang, dan Staff Sekretaris KAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan tradisi adat bajapuik memiliki tahapan diantaranya, bamunggu kaciak bapadang bilah, maantaan asok, maantaan tando, penyerahan uang jemputan dan uang hilang, akad nikah, malam baiani, baralek, badantam, manjalang, dan maulang aia. Mengenai pengaruh tradisi adat bajapuik dan uang hilang, tradisi ini sangat berpengaruh bagi masyarakat pariaman karena ada beberapa nilai yang terkadung didalamnya seperti nilai sosial, ekonomi, budaya dan banyak manfaat yang diberikan terhadap keluarga yang menjalankan tradisi adat tersebut.

Kata Kunci: Perkawinan Adat, Pelaksanaan Tradisi Adat Bajapuik

345
MUH
t

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENGANIYAAN (Studi Perkara Nomor 373/Pid.B/2020/PN Padang)

Muhamad Fajri, 1710112035, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai Landasan bernegara. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa ditegakan dan ditaati oleh siapapun warga negara Indonesia. Kehidupan bermasyarakat dalam perkembangannya selalu terjadi gesekan antar warga negara baik disebabkan oleh segi ekonomi, sosial dan politik dari gesekan tersebut timbul produk Kejahatan dan Pelanggaran oleh karena itu adanya hukum Pidana yang mengatur mengenai kejahatan dan pelanggaran menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut. Dalam Hal Pembuktian hukum Pidana Keterangan alat bukti saksi selalu diutamakan dan menjadi syarat wajib dalam setiap persidangan. Akan tetapi jika tidak adanya saksi maka berakibat pada sulitnya menemukan kebenaran materil. Dalam praktiknya terdakwa bisa saja menjadi saksi apabila kurangnya keterangan saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri, dikenal dengan istilah Saksi Mahkota. Seperti dalam Perkara Nomor 373/Pid.B/2020/PN Padang yang menjadi objek kajian penulis yang mana Menggunakan saksi mahkota dikarenakan tak ada saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri dalam perkara tersebut. Keberadaan saksi mahkota tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan oleh sebab itu menjadi polemik dimana nantinya akan dipertanyakan bagaimana kedudukan saksi mahkota dan bagaimana kekutaan saksi mahkota dalam pembuktian, Peran saksi mahkota dan bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi mahkota. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif yaitu Penelitian Kepustakaan dengan Melihat Teori- teori,Konsep dan Hukum yang berlaku. Dari hasil Penelitian disimpulakan bahwa kedudukan saksi mahkota pada perkara 373/Pid.B/2020/PN Padang sama dengan saksi pada umumnya dan kekuatan saksi mahkota pada Perkara 373/Pid.B/2020/PN Padang ialah sah dikarenakan adanya kesesuaian dengan alat bukti lain. Peranan saksi mahkota dalam perkara 373/Pid.B/2020/PN Padang yaitu menjelaskan mengenai kronologis kejadian dan menjelaskan Peranan Masing-masing Pihak. Mengenai Perlindungan Hukum saksi mahkota diatur secara eksplisit dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2016 perubahan tentang Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban menyebutkan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku.

Kata Kunci : Saksi Mahkota, Pembuktian, Perlindungan Hukum

345
MUH
k

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA KORUPSI INDONESIA DAN SINGAPURA)

Muhamad Iqbal, 1710111059, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 96 halaman, 2021

ABSTRAK

Di Indonesia, masalah korupsi telah menjadi suatu persoalan nasional yang amat sukar ditanggulangi. Masalah tersebut terus berlanjut sampai saat ini, hal ini dapat dilihat dari indeks persepsi korupsi di Indonesia berdasarkan Transparency International pada tahun 2020, Indonesia mendapatkan score 37. Kemudian jika bandingkan dengan Singapura, Singapura memiliki indeks persepsi korupsi dengan score 85. Sementera itu, di Indonesia penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh tiga institusi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya tarik-ulur kewenangan antar institusi. Selanjutnya, penyidik KPK dalam melaksanakan kewenangannya berpedoman kepada KUHAP dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun penyidik Kepolisian dan Kejaksaan dalam menjalankan kewenangannya hanya berpedoman pada KUHAP. Artinya, terdapat dualisme ketentuan untuk melakukan penyidikan. Adanya dualisme hukum acara yang berlaku tersebut akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Oleh karena Singapura memiliki indeks persepsi korupsi yang lebih baik dari Indonesia, sehingga Singapura dapat dijadikan role model dalam perbaikan kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi di masa yang akan datang. Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana perbedaan kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura? 2) Bagaimana kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang lebih efektif? Penelitian ini merupakan penlitian yuridis normatif dengan metode pendekatan masalah melalui pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) Di Indonesia, penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh tiga institusi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Sedangkan di Singapura, hanya dilakukan oleh CPIB. Selanjutnya, penyidik Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Sedangkan penyidik KPK, dalam menjalankan kewenangan penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas terlebih dahulu. Di Singapura, penyidik khusus CPIB dapat menjalankan kewenangannya hanya dengan izin dari direktur CPIB, tetapi Jaksa Penuntut Umum juga dapat memerintahkan kepada penyidik khusus CPIB untuk membuka dan memblokir rekening bank tersangka atau terdakwa. 2) Kewenangan penyidik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia yang lebih efektif adalah jika kewenangan tersebut hanya dilakukan oleh satu institusi, yakni hanya dilakukan oleh KPK dan penyidik KPK harus independen dalam menjalankan kewenangannya.

Kata kunci: Kewenangan Penyidik, Tindak Pidana Korupsi, Perbandingan Hukum

344.03
MUH
t

TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGELOLA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) PASIA NAN TIGO DALAM HAL PENGADAAN FASILITAS UMUM

Muhamad Afif Akbar, 1710113067, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 65 Halaman, 2021

ABSTRAK

Rumah susun sederhana sewa atau rusunawa ialah bangunan gedung bertingkat dibangun dalam suatu lingkungan dan terbagi dalam beberapa bagian, status penguasaannya sewa yang dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai sarana hunian. Salah satunya di Kota Padang rusunawa Pasia Nan Tigo, dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewanya terdapat kendala seperti dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini ialah proses terjadinya sewa menyewa satuan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Pasia Nan Tigo antara pihak pengelola dengan pihak penyewa, hak dan kewajiban pihak pengelola dengan pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa satuan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Pasia Nan Tigo, dan tanggung jawab pihak pengelola dan pihak penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa satuan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Pasia Nan Tigo. Guna membahas permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode yuridis empiris yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang terkait dengan hukum pelaksanaannya secara langsung serta membandingkan antara norma dengan aturan yang berlaku pelaksanaannya dilapangan. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Data yang didapatkan kemudian diproses melalui proses editing untuk mengurangi kesalahan yang ada serta dianalisis secara kualitatif. Sebelum melakukan perjanjian sewa menyewa rusunawa Pasia Nan Tigo juga terdapat ketentuan melengkapi syarat administrasi, namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa penyewa yang tidak melengkapi syarat administrasi tersebut hingga pihak penyewa sudah menempati hunian rusunawa Pasia Nan Tigo. Pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2011 sendiri mengatur tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota Padang, dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa dalam surat perjanjian sewa menyewa rusunawa harus mencakup salah satunya hak, kewajiban, dan larangan para pihak. Pada hak penyewa yaitu berhak untuk mendapatkan fasilitas, sedangkan pihak pengelola berkewajiban menyediakan fasilitas tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian Sewa Menyewa, Rusunawa, Fasilitas Umum

344.09
MUH
l

LABELISASI HALAL PADA PANGAN KEMASAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK SPIRITUAL BAGI KONSUMEN MUSLIM DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM- MUI) Provinsi Sumatera Barat)

Muhammad Fadel, Linda, Neneng

ABSTRAK

Setiap Orang dalam menjalankan hubungan manusia pada saat bersamaan tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh dengan Tuhan-Nya sebagaimana maknawi dalam norma filosofis negara pancasila. Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, beragama, dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup manusia. Di Indonesia yang mayoritas beragama Islam tentunya dalam mengkonsumsi produk pangan kemasan harus berlabel halal dan itu adalah hak spiritual bagi konsumen muslim yang dijamin dan dilindungi melalui bentuk prinsip syariah. Terkait permasalahan yang menangani terkait kehalalan dan keharaman produk adalah MUI dan LPPOM-MUI. Permasalahan yang dibahas, yaitu: (1) Bagaimana bentuk perlindungan konsumen dalam pemberian labelisasi halal pada produk pangan kemasan sebagai bentuk perlindungan hak spiritual dari MUI Provinsi Sumatera Barat?, Bagaimana bentuk perlindungan konsumen dalam pemberian labelisasi halal pada produk pangan kemasan sebagai bentuk perlindungan hak spiritual dari LPPOM-MUI Provinsi Sumatera Barat?. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris yang dilakukan penelitian di lapangan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dari penelitian ini diharpkan data yang diperoleh secara jelas dari apa yang dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa: (1) bentuk perlindungan hukum konsumen pada produk pangan kemasan sebagai bentuk hak spiritual dari MUI Provinsi Sumatera Barat adalah dengan menetapkan fatwa halal terhadap produk pangan kemasan. (2) bentuk hukum perlindungan konsumen sebagai bentuk perlindungan hak spiritual pada produk pangan kemasan sebagai bentuk perlindungan hak spiritual dari LPPOM-MUI Provinsi Sumatera Barat adalah dengan mengaudit dan memberikan sertifikat halal pada produk pangan kemasan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat terutama masyarakat Muslim.

Kata Kunci: Hak Spiritual, Konsumen Muslim, Produsen, Halal.

345
MUH
k

KEDUDUKAN REKAMAN CCTV DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Muhammad Fadel Rozef, 1710113018, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia adalah pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif dimana pembuktian harus didasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Seiring dengan berkembangnya peraturan hukum di Indonesia, alat bukti yang digunakan tidak terbatas lagi dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Rekaman CCTV merupakan bagian dari informasi elektronik. Telah banyak terjadi kasus-kasus tindak pidana umum yang dapat diungkap karena adanya rekaman CCTV. Masih terdapat ketidakpastian terhadap penggunaan rekaman CCTV, apakah rekaman CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atau sebagai barang bukti. Sebagaimana diketahui, tidak adanya ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur jelas penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana kedudukan rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan? 2. Bagaimana kepastian hukum pengaturan tentang rekaman CCTV dimasa mendatang? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Penelitian ini bersifat deksriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Dari hasil penelitian, kedudukan barang bukti berupa rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti, apabila terdakwa dan saksi memberikan keterangan atas pertanyaan hakim bahwa mereka mengenal barang bukti tersebut disertai penjelasan yang berkaitan dengan barang bukti CCTV itu, maka barang bukti tersebut telah berubah menjadi keterangan saksi dan keterangan terdakwa. CCTV juga dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, jika CCTV tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Rekaman CCTV pada saat sekarang ini banyak digunakan oleh hakim dalam mengungkap suatu perkara pidana. Rekaman CCTV tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap kasus atau menunjukkan keterlibatan seseorang dengan kasus yang diinvestigasi. Berdasarkan hal tersebut rekaman CCTV seharusnya tidak hanya dijadikan sebagai perluasan dari alat bukti yang sah saja, tetapi rekaman CCTV tersebut seharusnya juga dapat menjadi bagian dari KUHAP dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: Pembuktian, CCTV, Pembunuhan.

348.3
MUH
p

PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT DALAM PENGAWASAN PENYIARAN MELALUI MEDIA TELEVISI LOKAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Muhammad Ichsan, 1610113009, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2021, 52 halaman

ABSTRAK

Dalam kehidupan manusia di dunia ini pada hakikatnya tidak akan pernah lepas dari berkomunikasi, karena dengan adanya komunikasi dapat menciptakan hubungan yang sangat erat antar manusia dengan manusia lain-nya. Dalam berkomunikasi pada dewasa ini sudah sangat banyak teknologi yang mumpuni dalam menunjang masyarakat untuk berkomunikasi dengan masyarakat lainya. Salah satu media komunikasi yang masih ramai digunakan masyarakat adalah televisi dengan menyaksikan yang disajikan oleh lembaga penyiaran diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk wilayah pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah untuk wilayah daerah. Pada pelaksanaanya, tidak sedikit lembaga penyiaran yang diberikan sanksi oleh lembaga pengawas penyiaran di Indonesia dikarenakan ditemukanya pelanggaran-pelanggaran yang diawasi secara langsung oleh Komisi Penyiaran Indonesia maupun laporan dari masyarakat yang menyaksikan tayangan tersebut. Temuan masalah yang ditemuakan oleh penulis yang pertama, Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Dalam Pengawasan Penyiaran Melalui Media Televisi Lokal Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, kedua, Mekanisme Pengawasan yang Dilakukan Komisi Penyiaran yang Dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat dalam Mengawasi Media Televisi Lokal, ketiga, Sanksi yang Diberikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Kepada Media Televisi Lokal yang Melanggar Aturan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil yang didapat dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui peran, mekanisme dan sanksi yang dilakukan dan diberikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia kepada lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan yang telah tertera dalam program perilaku penyiaran dan standar program siaran.

346.06
MUH
p

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN LINGKUNGAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA PT. STATIKA MITRA SARANA DI KECAMATAN 2 X 11 KAYUTANAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Muhammad Iqbal Angkasa, 1710111090, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, 64 Halaman

ABSTRAK

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74 ayat (1), UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pasar Modal Pasal 15 huruf b. Permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Statika Mitra Sarana di Kecamatan 2 x 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman dan bagaimana pengawasan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada PT. Statika Mitra Sarana di Kecamatan 2 x 11 Kayutanam, Kabupaten Padang Pariaman oleh Pemerintah Daerah Setempat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) Pada PT. Statika Mitra Sarana di Kecamatan 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman adalah tanggung jawab sosial perusahaan untuk senantiasa berkomitmen memberikan aspek positif terhadap para pemangku kepentingan termasuk karyawan dan keluarganya serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya secara berkelanjutan. Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility untuk masyarakat setempat di lingkungan pabrik PT. Statika Mitra Sarana di Kecamatan 2 x 11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan namun belum optimal disekitar pabrik, karena belum ada Peraturan Daerah tentang CSR. Oleh karena itu pemerintah setempat memberikan kebijakan melalui ; koordinasi, konsultasi, dan teknis. Pengawasan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) oleh Pemerintah Daerah Setempat, melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Corporate Social Responsibility dalam 1 tahun.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Sosial, Perusahaan, Komitmen, Pelaksanaan, Pengawasan.

344.03
MUH
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA DANA PENSIUN SEMEN PADANG OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Muhammad Reyhan, 1710113094, Fakultas Hukum, 83 Halaman, 2021

ABSTRAK

Pengaturan tentang perlindungan konsumen di Indonesia secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam perkembangannya, upaya perlindungan konsumen juga dilaksanakan oleh suatu lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK). Salah satu pelaku usaha jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK yaitu Dana Pensiun Semen Padang. Permasalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap peserta Dana Pensiun Semen Padang oleh Otoritas Jasa Keuangan dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta Dana Pensiun Semen Padang dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan, menelaah, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yakni: Bentuk perlindungan hukum terhadap peserta Dana Pensiun Semen Padang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dapat dibedakan menjadi 2 yaitu perlindungan hukum secara preventif yaitu OJK mengeluarkan POJK No. 1/POJK 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, OJK melakukan pengawasan secara berkala kepada Dana Pensiun Semen Padang dalam segala kegiatannya, serta transparasi informasi dalam pengelolaan dana Investasi, Dalam hal perlindungan hukum represif yaitu penyelesaian pengaduan secara internal antara peserta dan Dana Pensiun Semen Padang (Internal Dispute Resolution) dan penyelesaian sengketa melaui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (External Dispute Resolution). OJK juga dapat memfasilitasi sengketa. Kendala yang dihadapi adalah Peserta ataupun masyarakat belum memahami peran dan fungsi OJK sebagai suatu lembaga independen yang dihadirkan oleh Pemerintah untuk mengawasi dan memastikan hak-hak dari peserta di Dana Pensiun terlindungi. Peserta yang belum mengetahui prosedur dan tatacara menyampaikan keluhan ataupun pengaduan kepada Dana Pensiun maupun meminta fasilitasi penyelesaian sengketa kepada OJK.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Peserta Dana Pensiun, Otoritas Jasa Keuangan

346.06
MUH
p

PENGATURAN PROFESI AKUNTAN DALAM ASEAN MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON ACCOUNTANCY SERVICES DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Muhammad Denggano Jiwana, 1610112121, Fakultas Hukum, 2021

ABSTRAK

Era globalisasi merupakan suatu percepatan tatanan hidup masyarakat dunia dengan hampir tanpa adanya batasan yang di tandai dengan proses liberalisasi terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Bentuk liberalisasi salah satunya ialah dibidang jasa pada profesi akuntan yaitu Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services. Peraturan ini mengedepankan bagaimana mobilisasi terhadap jasa profesi akuntan untuk mendapatkan pengakuan terhadap kualifikasi profesionalitas para akuntan demi efektifnya suatu arus tenaga kerja profesional pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Indonesia memiliki kekuatan sebagai negara ASEAN dengan jumlah akuntan ke empat terbanyak di negara ASEAN, namun memiliki tantangan akan kurangnya jumlah profesi akuntan yang ada. Ancaman bagi profesi akuntan di era MEA berasal dari negara-negara tetangga Thailand, Malaysia, dan Singapura karena memiliki jumlah akuntan yang lebih banyak dari Indonesia. Rumusan masalahnya yaitu (1) Bagaimanakah pengaturan profesi akuntan dalam ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services?, (2) Bagaimanakah implementasi ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Accountancy Services dalam rangka meningkatkan profesi akuntan di Indonesia?. Metode penelitian yang di pakai adalah yuridis normatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu, MRA on Accountancy Services Pasal 4, 5, 6 dan 7 mensyaratkan adanya kualifikasi untuk memiliki sertifikat yang disebut Akuntan Publik Bersertifikat atau Chartered Professional Accountant (CPA) agar dapat diakui dan bekerja di negara-negara ASEAN.. Implementasi dari MRA on Accountancy Services ini dalam penggunaan profesi akuntan di Indonesia telah sesuai atau harmonis dengan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia, di tandai dengan dibuatnya Accountancy Monitoring Comittee Indonesia (AMCI) dan upaya peningkatan kualitas akuntan di Indonesia telah diatur oleh IAI dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing di tingkat Internasional, yakni Peraturan Pemerintah RI No. 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, UU RI No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Akuntan Beregister Negara.

Kata kunci: Profesi Akuntan, ASEAN, MRA on Accountancy Services.

345
MUH
u

UPAYA TIM KLEWANG BURU SERGAP POLRESTA PADANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG

Muhammad Levi Sutansyah, 1710113070, Fakultas Hukum Universitas andalas, 2021

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian dengan pemberatan (curat) sangat menonjol dibandingkan tindak pidana lainnya dari total angka tindak pidana yang ada di Kota Padang, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian dengan pemberatan (curat) sangat meresahkan masyarakat Kota Padang, kepolisian terutama Tim Klewang yang merupakan tim buru sergap Polresta Padang selaku penegak hukum dimana dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayogaman dan pelayanan masyarakat. Tim Klewang bertujuan menyidik, menyelidiki, dan menangkap pelaku tindak pidana yang ada di Kota Padang terutama pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian dengan pemberatan (curat) agar terwujudnya visi dari Kapolresta Padang yakni menjadikan Kota Padang zero criminal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan sekunder berupa buku, dokumen, dan hasil wawancara dengan narasumber terkait penulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Polresta Padang bentuk upaya penanggulangan oleh Tim Klewang yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan berupa melakukan patroli malam, sosialisasi kepada masyarakat, mengefektifkan peran siskamling, dan mengaktifkan media sosial. Upaya represif berupa melakukan penyelidikan, mengumpulkan keterangan saksi, penyamaran, penyidikan atau penangkapan dan melakukan penegakan hukum kepada pelaku kejahatan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Tim Klewang dalam menjalankan tugas-tugasnya yakni berupa kendala internal dan kendala eksternal, kendala internal berupa kendala sarana dan prasarana dan kendala anggaran. Kendala eskternal berupa kendala tersangka yang sulit diketahui, laporan masyarakat yang lambat untuk memberitahu Tim Klewang saat setelah kejadian, kurangnya alat bukti dari masyarakat seperti tidak adanya cctv atau kamera pengintai di tempat kejadian perkara, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu Tim Klewang mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian dengan pemberatan (curat).

Kata kunci: Penanggulangan, Tim Klewang, Tindak Pidana Pencurian, Kota Padang.

346.08
MUH
u

UPAYA HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM RANGKA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA PERBANKAN

Muhammad Oliver Djordy, 1710111013, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021

ABSTRAK

Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen, Otoritas Jasa keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, peraturan ini berisi ketentuan yang menekankan kewajiban bank terhadap nasabahnya, demi melindungi nasabah dari tindakan bank, dimana selama ini nasabah selalu diposisikan sebagai pihak lemah. Salah satu contoh kasus terkait perbankan di Provinsi Sumatera Barat adalah kasus seorang nasabah di Bank Nagari Sumatera Barat berinisial Y dibobol maling. Akibatnya uang miliknya sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) pun raib.Rumusan masalah : 1. Bagaimana upaya yang dilakuan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan?2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka melakukan perlindungan konsumen pengguna jasa perbankan dan bagaimana cara mengatasinya? pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan.Adapun hasil kesimpulan penelitian adalah : 1. Upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa perbankan yaitu sebagai berikut : a. OtoritasJasaKeuangan melakukan Pengawasan bank secara langsung (on- site supervision) maupun Pengawasan tidak langsung (off-site supervision).b.Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2021 meluncurkan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) untuk menerima pengaduan dan informasi dari masyarakat. Kendala-kendala yang ditemukan atau dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebagai berikut :a.Kendala Internal : Sumber daya manusia, Experience (pengalaman), Knowledge (pengetahuan), Konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Integrasi Pengaduan, Monitor.b.Kendala Eksternal : kompleksitasnya transaksi yang beragam, cross border, dan multi produk.

Kata Kunci : Upaya Hukum, Perlindungan Konsumen, Jasa Perbankan

343.09
MUH
p

PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MENJALANKAN ASIMILASI PADA MASA SITUASI PANDEMI COVID-19 OLEH BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I KOTA PADANG (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Padang)

Muhammad Rafli Pratama,1710111070, Fakultas Hukum Universitas Andalas,2021

ABSTRAK

Terjadinya pandemi Covid-19 yang berasal dari kota Wuhan, Cina lalu menyebar di Indonesia pada tahun 2020 berdampak ke semua aspek. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 serta Permenkumham RI Nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 serta dilakukan penyempurnaan dengan Permenkumham RI Nomor. 32 tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan dilakukan perubahan dengan Permenkumham RI no 24 tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkumham 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemerian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, namun pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi seperti yang terdapat didalam Permenkumham 32 tahun 2020 dalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi"Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dirumah dengan pembimbingan dan pengawasan bapas serta dapat melibatkan pokmas. Bahwa Asimilasi pada masa Covid-19 itu sendiri mempunyai masalah dari segi pengawasan dikarenakan ada beberapa persoalan dan kendala diantaranya terjadi pengulangan tindak pidana oleh narapidana, maka penelitian bertujuan untuk mengetahui 1)Pengawasan terhadap Narapidana yang menjalankan Asimilasi pada masa situasi pandemi Covid-19 oleh Bapas kelas I Kota Padang. 2)Kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap Narapidana yang menjalankan Asimilasi pada masa situasi pandemi covid-19 oleh Bapas Kelas I Kota Padang. Penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis sosiologis, sifat penelitian yaitu deskriptif analisis, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)pengawasan dilakukan oleh 3 macam PK seperti madya,muda,pertama dan 1 APK dengan masing-masing kategori tindak pidana yang diawasinya dilakukan dengan metode daring sesuai dengan surat edaran PAS6.PK.01.04.06-21 dalam hal Pelaksanaan Permenkumham RI Nomor 32 tahun 2020 dan pengawasan dilakukan 1x seminggu atas persetujuan internal Bapas.2)Dikarenakan pengawasan dilakukan dengan metode daring Bapas dalam halnya PK yang melakukan pengawasan terhadap Narapidana menemukan kendala seperti Nomor klien tidak aktif atau perubahan nomor hp yang tidak dikonfirmasi, kendala jaringan atau kuota, tidak ada respon atau klien tidak mengangkat telfon PK sewaktu dilakukan Pengawasan.

Kata kunci: Pengawasan Narapidana, Asimilasi Covid-19, Balai Pemasyarakatan.

344.06
MUH
p

PENGAWASAN PENERAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING PT PINANG JAYA ABADI DI UNIVERSITAS ANDALAS

Muhammad Rayhan Aditiana, 1610111007, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Tujuan Negara Republik Indonesia dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia yaitu salah satunya perlindungan Upah yang banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya penentuan Upah Minimum dengan tujuan memberikan penghidupan yang layak. Akan tetapi penerapan Upah Minimum ini harus lah diawasi penerapannya. Dan ini menjadi wewenang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan pengawasan itu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah penerapan pengawasan penerapan Upah Minimum Provinsi terhadap pekerja outsourcing PT Pinang Jaya Abadi di Universitas Andalas? 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi terhadap pekerja Outsourcing PT Pinang Jaya Abadi di Universitas Andalas? 3) Bagaimanakah tindak lanjut hasil pengawasan Upah Minimum Provinsi terhadap pekerja outsourcing PT Pinang Jaya Abadi di Universitas Andalas?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa : Pertama, terdapat perusahaan yang melanggar ketentuan Upah Minimum Provinsi, salah satunya adalah PT Pinang Jaya Abadi. Kedua, belum dilakukannya pengawasan terhadap PT Pinang Jaya Abadi dikarenakan ada beberapa faktor. Ketiga, Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan penerapan Upah Minimum Provinsi terhadap pekerja outsourcing PT Pinang Jaya Abadi adalah 1) Keterbatasan tenaga pengawas yang hanya berjumlah 19 orang pengawas sedangkan perusahaan yang diawasi ada ribuan perusahaan. 2) PT Pinang Jaya Abadi belum melakukan atau melanggar Wajib Lapor Ketenagakerjaan.

Kata Kunci : Pengawasan, Upah Minimum Provinsi, Pekerja Outsourcing

342
MUH
p

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Syahidul Akbar, 1710112030, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 95 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Pengelolaan keuangan negara pun harus sesuai juga dengan kaidah- kaidah yang baik berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam faktanya dilapangan masih banyak terjadi penyelewengan pengelolaan keuangan negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang yang menyebabkan kerugian negara oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga sangat merugikan keuangan negara dan dapat mengganggu jalannya pembangunan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah. Dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara ini ditegaskan bahwa setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh pihak yang bersalah. Selain wajib mengganti atas kerugian negara yang telah diperbuat oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain, dapat pula diberikan sanksi administratif oleh pimpinan kementerian negara/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. Jaksa Agung sebagai pimpinan Kejaksaan Republik Indoneisa selaku Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang mendapat kuasa untuk membantu Presiden dalam pengelolaan keuangan negara. Rumusan masalah yang diteliti adalah Pertama, Bagaimana prosedur pengembalian kerugian negara oleh pegawai Kejaksaan yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara di lingkungan Kejaksaan Agung RI. Kedua, Bagaimana penerapan pemberian sanksi administratif terhadap pegawai Kejaksaan RI yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara. Typologi penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang membandingkan fakta dilapangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan ketertiban dan kelancaran penyelesaian kerugian negara, Kejaksaan RI membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN). Berdasarkan penelitian, terdapat kerugian negara yang dilakukan oleh dua pegawai Kejaksaan RI dalam kurun waktu tahun 2004 – 2021. Untuk perbaikan kedepannya, diharapkan kepada Pimpinan Kejaksaan RI untuk melakukan langkah preventif dan mempertegas sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Negara, Kerugian Negara, Kejaksaan RI.

345
MUL
u

UPAYA PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PENYELENGGARA FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DALAM RANGKA PENAGIHAN HUTANG (STUDI KASUS DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)

Mulya Santika, 1710113106, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Sejatinya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (aanranding of geode naam) merupakan perbuatan yang merugikan sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, tetapi dalam pelaksanaannya fintech P2P lending atau pinjaman online dalam melakukan penagihan hutang membuat penerapan Pasal tersebut tidak sesuai harapan. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Pertama, Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara financial technology (fintech) dalam rangka penagihan hutang. Kedua, Bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara financial technology dalam rangka penagihan hutang. Typology penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang membandingkan fakta dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara financial technology (fintech) dalam rangka penagihan hutang di tingkat penyidikan dilaksanakan dengan proses acara peradilan pidana sebagaimana yang diatur KUHAP. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Metro Jakarta Utara dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara financial technology dalam rangka penagihan hutang diantaranya yaitu alat untuk membuktikan tindak pidana cyber crime tidak ada di setiap Polrestro, kesulitan menghadirkan saksi, kesulitan menghadirkan ahli, kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan pihak kepolisian, lokasi fintech tidak diketahui karena sering berpindah tempat, setiap 6 bulan fintech melakukan penggantian aplikasi. Upaya yang dilakukan penyidik Polres Metro Jakarta Utara dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik oleh penyelenggara financial technology dalam rangka penagihan hutang, diantaranya yaitu menggalang masyarakat agar memberikan informasi terkait fintech, memaksimalkan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam penegakan hukum terhadap fintech.

Kata Kunci : Penyidikan, Pencemaran Nama Baik, Financial Technology

344.06
MUT
t

TANGGUNG JAWAB JASA PENGIRIMAN JNE KOTA PADANG TERHADAP KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG DALAM PENGANGKUTAN

Muthia Jefelia Zahra,1710113091, Fakultas Hukum Universitas andalas 2021

ABSTRAK

PT.Jalur Nugraha Ekakurir memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pengiriman dan menjaga keselamatan atas barang-barang yang akan dikirim.Perjanjian pengangkutan barang adalah consensual (timbal balik) dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ketempat tujuan tertentu, dan pengirim barang membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama. Permasalahan yang dibahas yakni mengenai bentuk tanggung jawab jasa pengiriman jne dalam perjanjian pengangkutan barang apabila terjadi kerusakan dan kehilangan barang dan memahami akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam pengangkutan barang.Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris.Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah data dari studi dokumen dan wawancara yang nilainya relevan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa dalam kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak JNE semua sudah diatur didalam SSP JNE dan sesuai dengan aturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya bentuk pertanggungjawaban JNE terhadap barang yang rusak dan hilang yaitu dengan cara mengganti kerugian kepada pemilik barang secara utuh bagi pihak yang mengasuransikan barangnya atau membayar 10 kali biaya pengiriman barang yang tidak melampaui harga dari barang tersebut, Penggantian kerugian barang dibayar penuh sesuai dengan besarnya nominal barang yang tertera/dicantumkan dalam polis asuransi. Premi asuransi dibayar sendiri oleh pengirim.Dalam melaksanakan hubungan hukum dalam perjanjian pengangkutan atau pengiriman barang apabila pihak JNE melakukan wanprestasi, maka pihak perusahaan harus mengganti segala biaya kerugian, karena perusahaan melakukan kelalaian dan tidak dipenuhinya suatu kewajiban pengangkutan yang seharusnya menjaga barang kiriman agar tidak mengalami kerusakan dan kehilangan dan upaya penyelesaian wanprestasi melalui jalur kekeluargaan.

Kata Kunci : Tanggungjawab,Perjanjian,Pengangkutan

345
MUT
p

PENERAPAN PASAL 56 KUHAP TENTANG BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI TERSANGKA YANG DIANCAM PIDANA LIMA TAHUN ATAU LEBIH DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMBAR

Mutia Basmir, 1710111026, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 74 halaman, 2021

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, bantuan hukum sebagai salah satu hak yang melekat pada setiap tersangka seringkali diabaikan oleh penyidik selaku aparat penegak hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 56 KUHAP dan berbagai regulasi lainnya yang telah dikeluarkan oleh negara melalui undang-undang serta peraturan pelaksanaannnya terkait bantuan hukum menyebabkan masih terdapatnya tersangka yang tidak memperoleh bantuan hukum dan berbagai permasalahan lainnya dalam penerapan pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada tersangka. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan dikemukakan permasalahan sebagai berikut: Pertama, penerapan Pasal 56 KUHAP bagi tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Kedua, kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada tersangka. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) dan bersifat deskriptif karena penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan: Pertama, advokat atau penasihat hukum dapat didatangkan sendiri oleh tersangka atau ditunjuk oleh penyidik. Tidak semua tersangka memperoleh bantuan hukum dikarenakan adanya penyidik yang tidak memberitahukan mengenai hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum serta adanya keinginan dari tersangka untuk tidak didampingi advokat atau penasihat hukum. Kedua, terdapat beberapa kendala yang dialami penyidik dan advokat dalam upaya pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada tersangka seperti perlunya usaha yang lebih dalam memberikan keyakinan kepada tersangka akan pentingnya bantuan hukum dalam setiap proses penanganan perkara, sulitnya koordinasi antara penyidik dan advokat, serta terbatasnya dana bantuan hukum.

Kata kunci : Bantuan Hukum, Hak Tersangka, Masyarakat Tidak Mampu

346.06
MUT
t

TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA CABANG PADANG ATAS KERUGIAN DALAM PENGANGKUTAN BARANG

Mutiara Rahmi Arikhman, 1710113115, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 89 hlm, 2021

ABSTRAK

Dalam proses pengangkutan barang, PT. Pos Indonesia melalui jajarannya bertanggung jawab untuk mengirim barang tersebut untuk sampai ke tempat tujuan dengan selamat atau dalam arti tidak hilang, rusak, ataupun terlambat pengirimannya. Tanggung jawab tersebut timbul akibat perjanjian yang dibuat oleh pihak Pos dan konsumen. Namun, terkadang tetap saja ada pelaksanaan pengangkutan barang yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan hingga berakibat pada kerugian tertentu yang diderita oleh konsumen. Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 1) Bagaimana tanggung jawab PT. Pos Indonesia cabang Padang dalam hal terjadi kerugian atas pengangkutan barang? 2) Apa kendala yang dialami oleh PT. Pos Indonesia cabang Padang dalam ganti kerugian serta bagaimana cara penyelesaian kendala tersebut? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif. Temuan dalam penelitian ini yaitu 1) Pos bertanggung jawab penuh atas pengangkutan barang kecuali kesalahan terjadi akibat force majore dan kesalahan pengirim. Ganti rugi oleh pihak Pos yaitu berupa materill atau uang yang dibayarkan dengan ketentuan 10x biaya ongkos kirim maksimal Rp. 1.000.000 jika barang tidak di asuransikan, dan sebanyak nilai pertanggungan jika barang tersebut di asuransikan. 2) kendala yang dialami oleh pihak pos adalah konsumen menolak ganti rugi secara materil dan ingin diganti dengan barang yang sama, solusinya adalah negosiasi hingga mendapatkan kesepakatan. Kemudian kendala yang dialami konsumen adalah lambatnya proses ganti rugi dari pihak Pos, solusinya adalah Pos lebih memperhatikan hal ini dan mengutamakan kepuasan konsumen. Karena ganti kerugian sejatinya adalah hak dari konsumen yang dirugikan.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Ganti Kerugian dan pengangkutan barang

342
NAB
p

PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI

Nabila Hanindiaz, 1710112033, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VII), 74 Halaman, Tahun 2021.

ABSTRAK

Negara Indonesia menjamin adanya pendidikan yang layak untuk setiap warga negara. Hal ini tercantum dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Salah satu jenis pendidikan tersebut adalah Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam penyelenggaraannya PAUD memerlukan suatu pengawasan khusus. Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan PAUD menjelaskan bahwa pengawasan terhadap PAUD dilakukan berdasarkan masing-masing bidang dalam kategori PAUD. Dimana pengawasan terhadap kategori Taman Kanak-Kanak dilaksanakan oleh Pengawas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, sedangkan pada kategori PAUD Nonformal dilaksanakan oleh Penilik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya. Hal yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kerinci, 2) Bagaimana tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci terhadap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif analisis serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1) Pelaksanaan pengawasan terhadap PAUD belum terlaksana secara maksimal dikarenakan kurangnya anggota Pengawas dan Penilik di Kabupaten Kerinci, 2) Pelaksanaan tindak lanjut dilakukan tidak sesuai yang diharapkan dan hanya mendahulukan hal yang mendesak saja.

341
NAD
u

URGENSI MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION (MCN) DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DIHUKUM MATI DI ARAB SAUDI MENURUT KONVENSI WINA 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER

Nadia Tiara Syahredi Adnani, 1610112106, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VI (Hukum Internasional) 67 Halaman, Tahun 2020)

ABSTRAK

Menyadari banyaknya kasus yang terjadi yang menimpa buruh migran Indonesia, Pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa Mandatory Consular Notification (MCN) sangat dibutuhkan untuk membantu Pemerintah dalam mengetahui informasi terkait warga negaranya yang terkena masalah di wilayah negara penerima. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana urgensi Mandatory Consular Notification (MCN) dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia yang dihukum mati di Arab Saudi menurut Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler? (2) Bagaimana upaya perwakilan Indonesia di Arab Saudi dalam menindaklanjuti permohonan banding yang diterima? Penelitian ini menggunakan metoda pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mandatory Consular Notification (MCN) merupakan suatu kesepakatan timbal balik antar dua negara yang mengatur tentang penanganan permasalahan yang dihadapi oleh WNI dengan negara sahabat dalam bentuk notifikasi konsuler. Kedudukan MCN sama halnya dengan notifikasi konsuler yang tertera pada Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, akan tetapi MCN bersifat mandatory atau semakin memperkuat kewajiban negara dalam pelaksanaan notifikasi konsuler terhadap negara lainnya.

Kata Kunci: Urgensi, Mandatory Consular Notification, Pekerja Migran Indonesia, Hukuman Mati, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler

347.05
NAD
u

UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (STUDI KASUS:PEKERJAAN PEMBANGUNAN GUDANG BARANG JAMINAN PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TAPI BANDAR KOTA PADANG OLEH CV. KARYA KONTRUKSI)

Nadira Yusefina, 1710111019, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 64 halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Pembangunan konstruksi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional yang merupakan upaya untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang- undang Dasar 1945 dan Pancasila. Sebelum melaksanakan pekerjaan suatu proyek konstruksi, ada beberapa hal yang paling mendasar dan terpenting dalam merumuskan tujuan para pihak yaitu membuat suatu perjanjian. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan kemungkinan akan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Dalam keadaan demikian, berlakulah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian atau pemenuhan. Sehingga rumusan masalah yang akan diteliti adalah: 1) Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara PT. Pegadaian (PERSERO) cabang Tapi Bandar Kota Padang dengan CV. Karya Konstruksi. 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban CV. Karya Konstruksi kepada PT. Pegadaian (PERSERO) cabang Tapi Bandar Kota Padang. Penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang membandingkan fakta dilapangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pihak CV.Karya Konstruksi dan PT.Pegadaian (PERSERO) memilih penyelesaian wanprestasi melalui jalur luar pengadilan yaitu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Hal ini dilakukan sesuai dengan perjanjian kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah melakukan negosiasi. Dari pemeriksaan tim logistic & umum PT. Pegadaian (PERSERO) terdapat selisih kurang terhadap beberapa item pekerjaan dan volume pekerjaan yang dilakukan, sehingga berdampak pada biaya pekerjaan yang harus dikembaikan oleh Pihak CV. Karya Konstruksi dan harus melakukan pengembalian biaya pekerjaan pembagunan Gudang barang senilai Rp. 10.792.285,- kepada PT.Pegadaian (PERSERO) karena mutu dan volume pekerjaan tidak sesuai surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak).

Kata Kunci : Jasa Konstruksi, Kontrak Kerja Konstruksi, Wanprestasi.

344.04
NAD
p

PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI SOPIR PT. TRANEX GRAHA PRAKARSA MANDIRI

Nadya Intan Cahyani, 1710112031, Fakultas Hukum Universitas Andalas 2021

ABSTRAK

Tranex Graha Prakarsa Mandiri merupakan salah satu badan usaha dibidang jasa transportasi dan ekspedisi di Sumatera Barat yang memiliki tingkat kecelakaan kerja yang tinggi. Pada dasarnya setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, demikian yang disebut dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang perlindungan keselamatan kerja jelas mengatur tentang kewajiban pimpinan tempat kerja memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan. Sama halnya dengan Pasal 4 ayat d PP No. 88 Tahun 2019 tentang kesehatan kerja menyatakan bahwa standar kesehatan kerja dalam upaya pencegahan penyakit yaitu adanya pemeriksaan kesehatan. Namun sejak Corona Virus 19 (COVID-19) hingga sekarang, PT Tranex Graha Prakarsa Mandiri tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan badan dan sosialisasi mengenai Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) kepada sopir secara berkala maupun pada saat diterima dikarenakan tidak bolehnya kegiatan mengumpulkan massa. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yang timbul yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi sopir PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri; (2) Apa saja Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja sopir oleh PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri; (3) Bagaimana solusi dalam menghadapi kendala pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja sopir oleh PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dari data primer dan sekunder yang dikumpulkan penulis analisa dengan mempergunakan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil: (1) bahwa pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi sopir pada PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri adalah kegiatan pengecekan kesehatan rutin sekali enam bulan serta sosialisasi mengenai k3 kepada sopir, melakukan kontrol terhadap kondisi kesehatan mesin mobil setiap bulan, memberikan sarana kesejahteraan (2) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi sopir pada PT. Tranex Graha Prakarsa Mandiri yaitu situasi pandemic covid-19 yang membuat pelaksanaan cek kesehatan secara berkala tidak dilaksanakan. (3) Solusi dari kendala yang ditemukan yaitu perusahaan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan melaksanakan upaya pencegahan kecelakaan kerja dengan menyediakan alat perlindungan diri yang disediakan perusahaan.

Kata Kunci: Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Perlindungan Hukum, Sopir.

345
NAN
p

PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM UPAYA PEGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL PENCUCIAN UANG LINTAS NEGARA ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI BANTUAN TIMBAL BALIK (MUTUAL LEGAL ASSISTANCE).

Nanda Kurniawan, 1610111083, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Huku Pidana (PK IV), 81 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Kejahatan pencucian uang (money laundering) belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, masing-masing negara memiliki suatu lembaga yang berfungsi untuk memberantas tindak pidana pencucian uang, begitupun dengan negara Indonesia yang membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) yang melakukan fungsi penyelidikan dengan mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi transaksi yang dicurigai sebagai perbuatan pencucian uang dan informasi tersebut dapat menjadi petunjuk bagi penegak hukum lainnya dalam upaya pengembalian aset negara dengan bantuan timbal balik (mutual legal assistance). Berdasarkan alasan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimanakah peranan PPATK dalam upaya pengembalian aset negara melalui metode MLA. Kedua¸ apa kendala PPATK dalam upaya pengembalian aset negara melalui MLA. Ketiga, Bagaimanakah Bentuk Kerjasama antara (PPATK) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Upaya Pengembalian Aset Negara Hasil Pencucian Uang Lintas Negara Atas Tindak Pidana Korupsi. Demi menunjang hasil pebahasan di atas metode penelitian yang digunakan adalah Yurudis Sosiologis, Sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa PPATK merupakan Financial Intelligence Unit (FIU), yang berperan menerima laporan transaksi keuangan yang mencurigakan, melakukan analisis terhadap laporan transaksi keuangan dan meneruskan hasil analisis kepada penegak hukum. PPATK juga dapat membangun kerjasama bilateral untuk meningkatkan efektifitasnya dalam pertukaran informasi. Namun PPATK memiliki beberapa kendala di dalam menjalankan peran dan fungsinya seperti: Perbedaan Sistem Hukum, Double Criminality, tidak lengkapnya informasi yang didapat, Belum adanya undang- undang yang mengatur terkait perampasan aset. Lambatnya penangananan perkara, dan terbatasnya penyidik instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan sebagai penyidik. Selanjutnya PPATK juga memiliki kerjasama dengan KPK seperti permintaan dan pertukaran informasi dari KPK ke PPATK maupun sebaliknya.

Kata Kunci: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK), Tindak Pidana Pencucian Uang, Pengembalian Aset, Penelusuran Aset, Mutual Legal Assistace (MLA)

345
NAT
k

KAJIAN YURIDIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG TINDAKAN ABORSI OLEH ANAK KORBAN PERKOSAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Natalia. N, 1410112110, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 139 halaman,Tahun 2021

ABSTRAK

Tindakan aborsi merupakan berakhirnya kehamilan sebelum 20 minggu kehamilan atau berat janin di bawah 500 gram. Berdasarkan pengaturan hukum Indonesia tindakan aborsi merupakan perbuatan yang dilarang. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur pengecualian untuk kondisi tertentu yaitu jika terdapat indikasi medis dan korban perkosaan yang menimbulkan trauma psikologis. Anak yang menjadi korban perkosaan mengalami trauma yang luar biasa sehingga sulit untuk melapor. Dalam hal anak mengalami kehamilan tidak diinginkan, negara harus hadir dalam memberi perlindungan dan pemenuhan hak – hak anak. Tindakan aborsi merupakan bagian dari hak kesehatan reproduksi. Meskipun tindakan aborsi diizinkan bagi korban perkosaan, namun tindakan aborsi dibatasi secara ketat sehingga mempersulit korban dalam mengakses haknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan : 1) Kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindakan aborsi korban perkosaan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia; dan 2) Pengaturan aborsi yang lebih berkeadilan bagi anak korban perkosaan. Metode penulisan hukum yang penulis gunakan bersifat normatif, dimana penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari masalah diatas adalah :1) Kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindakan aborsi korban perkosaan saat ini belum berpihak korban. Pembatasan tindakan aborsi bagi korban dapat menyebabkan anak memilih tindakan aborsi ilegal. Sehingga anak yang merupakan korban dapat berubah status menjadi pelaku tindak pidana. Selain itu tindakan aborsi ilegal berpotensi membahayakan nyawa korban. 2) Pengaturan aborsi yang lebih berkeadilan bagi anak korban belum optimal karena tersebar dalam beberapa peraturan perundang – undangan. Masih terdapat tumpang tindih kewenangan dari lembaga – lembaga yang bergerak dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Kata kunci : tindakan aborsi, anak, korban perkosaan, pembatasan aborsi, hak kesehatan.

345
NAT
u

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERSAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG

Natanya Lianda, 1710113022, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 71 halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Perkembangan zaman melalui bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja dapat membawa negara pada kesejahteraan. Akan tetapi, tidak bisa dihindari bahwa dengan adanya perkembangan tersebut beriringan dengan meningkatnya kejahatan dan terjadinya tindak pidana didalam masyarakat baik di bidang ekonomi maupun sosial. Lingkungan rumah tangga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak terjadinya tindak pidana, misalnya kemiskinan dan padatnya rumah tangga, kenakalan dan padatnya keluarga, dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga yang menyebabkan kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan yang terjadi di dalam rumah tangga itu sendiri juga dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana dalam lingkungan rumah tangga. Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah: 1) Apakah faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Lingkungan Rumah Tangga 2) Bagaimanakah upaya-upaya untuk menanggulangi terjadinya Tindak Pidana dalam lingkungan Rumah Tangga? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu pendekatan melalui penelitian hukum dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, wawancara, penelitian pustaka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil yakni faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana KDRT yaitu faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor seksual, faktor perilaku, faktor sosial, dan faktor budaya. Upaya penanngulangan Tindak pidana KDRT yaitu upaya preventif seperti pihak kepolisian yang memberikan mediasi, dan upaya represif meliputi penegakan hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban tindak pidana KDRT.

Kata Kunci: Tindak pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga,Upaya Penanggulangan

346
NAU
k

KEWENANGAN BPSK KOTA PADANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN (Studi Putusan Nomor: 06/PTS/BPSK-PDG/ARBT/VI/2019)

Naufal Reza Syahputra, 1710113097, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 134 halaman, 2021)

ABSTRAK

Didalam kegiatan ekonomi tentu tidak terlepas dari adanya pelangaran terhadap hak para pihak yang terlibat di dalamnya hingga menimbulkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 hadir sebagai landasan yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Di dalam undang-undang tersebut menyebutkan penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. BPSK merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan diamanatkan dalam UU No. 8 Tahun 1999 untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Penyelesain sengketa di BPSK dapat ditempuh melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Rumusan masalah dalam pembuatan skrispi ini adalah Bagaimana Kewenangan BPSK Kota Padang Dalam Menyelesaikan Sengketa Pembiayaan Konsumen, Bagaimana Proses Penyelesaian Sengeketa Pembiayaan Konsumen Oleh BPSK Kota Padang dan Bagaimana Kendala-Kendala Dalam Penyelesain Sengketa Pembiayaan Konsumen Oleh BPSK Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa BPSK Kota Padang masih menyelesaikan sengketa wanprestasi pada lembaga pembiayaan konsumen berpegang pada asas kepatutan dan keadilan. Penyelesain sengketa di BPSK Kota Padang dilaksanakan dengan proses beracara yang sederhana, cepat, tidak berbelit-belit dan menggunakan ketentuan Hukum Acara Perdata pada umumnya. Penyelesain sengketa pembiayaan konsumen oleh BPSK Kota Padang tentu terdapat kendala-kendala di dalamnya. Oleh karena itu diperlukan itikad baik bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa dan dalam melaksanakan putusan BPSK Kota Padang.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, BPSK, Pembiayaan Konsumen

346.06
NAV
t

TANGGUNG JAWAB LAZADA TERHADAP KETERLAMBATAN DAN KELALAIAN PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DI KOTA PADANG

Navisha Cantika Azzahra, 1710111009, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata Murni (PK I), 75 halaman - Tahun 2020

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merubah pola hidup masyarakat salah satunya dalam bertransaksi jual beli. Pada saat ini masyarakat sering melakukan transaksi jual beli secara online atau disebut dengan E-Commerce. Hal ini tentu dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen karena dilakukan tanpa bertemunya konsumen dengan penjual. Salah satu E-Commerce yang berkembang di Indonesia adalah Lazada. Pada saat melakukan pembelian di Lazada, sering sekali terjadi kelalaian penjual yang menyebabkan kerugian bagi konsumen dan timbul rasa tidak puas saat bertransaksi di Lazada. Hal ini selain menimbulkan kerugian pada konsumen tetapi juga kepada Lazada. Rumusan masalah dalam Skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah bentuk-bentuk kelalaian penjual dalam bertransaksi jual beli online di Lazada ? 2. Bagaimanakah tanggung jawab pihak Lazada terhadap keterlambatan dan kelalaian penjual dalam perjanjian jual beli online di kota padang ?. Metode dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: 1. Bentuk kelalaian penjual yang terjadi di Lazada berupa: membatalkan secara sepihak, barang yang dikirim tidak sesuai, isi paket kosong dan barang yang dikirim rusak atau pecah karena pengemasan tidak sesuai dengan standar pengiriman. 2. Bentuk tanggung Lazada terhadap kelalaian penjual dan keterlambatan estimasi yaitu dengan meninjau kembali barang yang dibeli oleh konsumen dan meninjau kembali keterlambatan estimasi yang diterima oleh konsumen.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Perlindungan Konsumen, Perjanjian Jual beli Online.

346.02
NIS
p

PERJANJIAN WARALABA KONSULTASI PEMASARAN DAN OPERASIONAL ANTARA PT.OYO ROOMS INDONESIA DENGAN HOTEL WISMA PADATI SYARIAH DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nisa Dwiana,, 1710112024, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, 72 halaman

ABSTRAK

Berbagai sistem bisnis mulai bermunculan seiring perkembangan zaman dan teknologi, sistem bisnis yang sangat digemari saat ini adalah waralaba. Pengertian waralaba terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Waralaba memiliki beberapa bentuk salah satunya adalah waralaba format bisnis yaitu seorang pemegang waralaba memperoleh hak untuk memasarkan dan menjual produk atau pelayanan dalam suatu wilayah atau lokasi spesifik, dengan menggunakan standar operasional dan pemasaran. Waralaba format bisnis ini meliputi konsultasi pemasaran dan operasional serta investasi, jenis waralaba ini sering digunakan dibidang perhotelan, salah satunya adalah PT.OYO Rooms Indonesia. OYO akan bekerjasama dengan hotel-hotel kecil yang belum memiliki standar operasional dan manajemen hotel yang baik, dan memberikan investasi untuk penunjang perbaikan hotel agar sesuai dengan standar perhotelan dan nantinya hasil operasional hotel akan dibagi dengan OYO. Salah satu hotel kecil yang bekerjasama dengan OYO adalah Hotel Wisma Padati Syariah di Kabupaten Padang Pariaman, kerjasama ini dituangkan dalam perjanjian konsultasi pemasaran dan operasional antara OYO dengan Hotel Wisma Padati Syariah di Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan pemaparan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana bentuk perjanjian waralaba konsultasi pemasaran dan operasional antara OYO dengan Hotel Wisma Padati Syariah? 2) Bagaimana pelaksanaan perjanjian waralaba konsultasi pemasaran dan operasional antara PT.OYO Rooms Indonesia dengan Hotel Wisma Padati Syariah di Kabupaten Padang Pariaman? 3) Bagaimana penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian waralaba konsultasi pemasaran dan operasional antara PT.OYO Rooms Indonesia dengan Hotel Wisma Padati Syariah di Kabupaten Padang Pariaman? Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris dan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil yaitu: 1) Bentuk perjanjian waralaba konsultasi pemasaran dan operasional antara OYO dengan Hotel Wisma Padati Syariah adalah perjanjian waralaba format bisnis yang dibuat tertulis dan bersifat baku. 2) Pelaksanaan perjanjian ini terdapat beberapa wanprestasi mengenai dana investasi dan bagi hasil. 3) Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian ini ada 2 pilihan yaitu pertama menggunakan jalur musyawarah mufakat, dan kedua adalah jalur arbitrase, pada permasalahan di perjanjian ini para pihak memilih menggunakan jalur musyawarah mufakat yang hasil akhirnya dituangkan dalam addendum.

Kata Kunci: Perjanjian Waralaba, Konsultasi Pemasaran dan Operasional, Wanprestasi

346
NOP
p

PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI DESA HULIM KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA

Nopy Mintana Rizki Pulungan, 1710111074, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 64 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Penyerahan hak atas tanah adat kepada pemerintah merupakan suatu kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diserahkan masyarakat kepada pemerintah daerah. Penyerahan hak atas tanah adat ini terjadi di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang dimana penyerahannya diberikan masyarakat secara suka rela untuk pembangunan jalan baru. Pembukaan jalan baru dibuat dikarenakan jalan lama terkena bencana alam longsor yang menyebabkan jalan penghubung Desa Hulim dan Ulu Aer terputus. Penyerahan tanah adat ini berjalan dengan baik dikarenakan jalan tersebut dibuat untuk kepentingan bersama dan dilalui dengan jalan musyawarah yang dihadiri oleh masyarakat, tetua adat serta pemerintah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses pelepasan hak atas tanah adat ini kepada pemerintah di Desa Hulim Kecamatan Sosopan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Sifat penelitian ini bersifa deskriftif analisis, peraturan perundang-undangan serta pendapat ahli. Tekhnik pengumpulan data dari penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi Pustaka. Pada perumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini 1. faktor penyebab terjadinya pelepasan hak atas tanah adat kepada pemerintah untuk kepentingan umum di Desa Hulim Kecamatan Sosopan yaitu yang disebabkan oleh bencana longsor yang membuat tanah tersebut terputus sehingga masyarakat sepakat untuk dibuka jalan baru. 2. Proses pelepasan hak atas tanah adat kepada pemerintah di Desa Hulim Kecamatan Sosopan yaitu dengan melalui musyawarah terlebih dahulu, dimana musyawarah berjalan dengan baik antara desa Hulim dan Desa Ulu Aer yang menghasilkan kesepakatan bahwa tanah tersebut diberikan secara suka rela kepada pemerintah untuk pembangunan jalan baru. Kemudian setelah musyawarah antar desa dilanjutkan dengan musyawarah masyarakat dengan pemerintah yang menghasilkan bahwa tanah tersebut resmi diberikan masyarakat kepada pemerintah

Kata Kunci: Pelepasan, Hak Atas Tanah Adat, Kepentingan Umum

346
NOV
p

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP ATAS TANAH ULAYAT KAUM UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN STUDI DI KELURAHAN LIMAU MANIS KOTA PADANG

Novira Alyu Lestari, 1710111024, Fakultas Hukum Uiversitas Andalas, 79 halaman, 2021

ABSTRAK

Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Untuk memenuhi tuntutan pembangunan dan kebutuhan masyarakat akan pentingnya jaminan kepastian hukum atas tanahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1997, maka pendaftaran tanah merupakan suatu hal yang harus digiatkan. Salah satu cara pemerintah adalah dengan mengadakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perencanaan dan penetapan lokasi PTSL yang menunjuk Kelurahan Limau Manis sebagai lokasi pelaksanaan PTSL di Kota Padang. 2) Bagaimana pelaksanaan PTSL atas tanah ulayat di Kelurahan Limau Manis Kota Padang. 3) Bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan PTSL di Kelurahan Limau Manis. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data utama dalam penelitian ini diperoleh penulis langsung dari Kelurahan Limau Manis Kota Padang dan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. Di samping itu penulis juga melakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Sehingga data tersebut diolah dan dianalisis kemudian diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : 1) Penetapan Kecamatan Limau Manis sebagai wilayah PTSL dapat dilihat dari sistem mendekat merapat dan menyeluruh, yang mana apabila ditahun sebelumnya terdapat kelurahan yang mendapat program PTSL maka untuk tahun selanjutnya yang menjadi target program PTSL. 2) Bahwa penyelenggaraan tanah itu mengacu kepada Dalam Pasal 19 UUPA. 3) Salah satu kendala dalam program PTSL adalah tidak adanya pengakuan pihak sepadan, sehingga masih dipertanyakan kepemilikan tanah ulayat tersebut.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Sistematik Lengkap, dan Ulayat Kaum

347.05
NUR
k

KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PADANG KELAS IA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 104/PDT.G/2016/PN PDG)

Nurul Afifah, 1710112029, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata (PK I), 64 halaman, 2021

ABSTRAK

Pembuktian dalam proses peradilan perdata merupakan kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, alat bukti yang sah secara hukum acara perdata diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBg, dengan perkembangan zaman hubungan hukum juga terjadi melalui internet yang dapat mempermudah dalam berkomunikasi dan bernegoisasi untuk mencapai kesepakatan yang nantinya bisa melahirkan suatu perjanjian. Seiring dengan perkembangan zaman alat bukti elektronik tersebut bisa dijadikan sebagai suatu petunjuk terhadap suatu peristiwa, dan apabila alat bukti elektronik tersebut diajukan ke pengadilan bagaimanakah kekuatan alat bukti tersebut salah satu contoh kasus terdapat pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dengan putusan nomor: 104/Pdt.G/2016/PN Pdg yang mana salah satu alat bukti elektronik yang diajukan adalah hasil cetak e-mail. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana kekuatan hukum pembuktian dari alat bukti elektronik tersebut sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA pada putusan nomor: 104/Pdt.G/2016/PN Pdg? 2. Bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dalam memutus perkara menggunakan alat bukti elektronik dalam putusan nomor: 104/Pdt.G/2016/PN Pdg?. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: kekuatan alat bukti elektronik yang pada putusan nomor: 104/Pdt.G/2016/Pn Pdg berupa hasil cetak e-mail ini adalah bebas artinya alat bukti ini membutuhkan alat bukti lain karena disini hakim tidak terikat dengan alat buktinya, pertimbangan hakim menggunakan alat bukti elektronik ini dalam memutus perkara nomor 104/Pdt.G/2016/PN Pdg adalah secara normatif di dasari oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hasil cetak dari e-mail ini sudah dicocokan dengan aslinya oleh panitera dan diberi materai yang cukup karena itu merupakan syarat materil dari sah nya suatu alat bukti elektronik digunakan atau tidak, serta sudah adanya pengakuan dari pihak lawan terkait dengan alat bukti elektronik ini.

Kata kunci: Kekuatan, Alat Bukti Elektronik, Pengadilan Negeri Padang

343.09
NUR
p

PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN REKLAMASI TAMBANG CV TAHITI COAL DI KOTA SAWAHLUNTO

Nurul Amalia, 1610113045, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, 85 halaman

ABSTRAK

Reklamasi merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan. Reklamasi bertujuan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Sumatera Barat, diduga salah satu perusahaan tambang batubara di Kota Sawahlunto yaitu CV Tahiti Coal tidak melaksanakan kegiatan reklamasi tambang. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26/2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, reklamasi merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan tambang yang memiliki Izin Usaha Pertambangan. Dalam melakukan reklamasi tambang juga perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi tambang di perusahaan tambang. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, 1) Bagaimana Kegiatan Reklamasi Tambang Oleh CV Tahiti Coal di Kota Sawahlunto? 2) Bagaimana Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Pada Lahan Tambang CV Tahiti Coal di Kota Sawahlunto? 3) Bagaimana Tindak Lanjut dari Pengawasan Yang Telah Dilakukan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi Pada Lahan Tambang CV Tahiti Coal di Kota Sawahlunto? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Jenis data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, antara lain 1) Pelaksanaan reklamasi yang dilakukan CV Tahiti Coal tidak sejalan dengan rencana reklamasi; 2) Pemerintah lalai dalam melakukan pengawasan reklamasi tambang karena perusahaan tidak memberikan laporan kegiatan reklamasi tambang; 3) Tidak adanya tindak lanjut pengawasan pada kegiatan reklamasi tambang CV Tahiti Coal yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci : Pengawasan, Reklamasi, Tambang Batubara

341
NUR
a

ABRAKAN KAPAL DI LAUT DAN PENCEGAHANNYA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAM HUKUM NASIONAL

Nurul Hafandi, 1610111047, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 67 halaman, 2020

ABSTRAK

Laut sebagai sarana transportasi yang menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lain menjadi sangat penting secara ekonomi dilihat dari perspektif perpindahan barang dan jasa dengan kapal sebagai alat pengangkut. Namun, transportasi lewat laut tergolong beresiko tinggi dikarenakan banyak hal yang tidak di inginkan terjadi di laut. Indonesia sendiri terdapat banyak kecelakaan kapal yang terjadi dari tahun ke tahun lebih dari 30 kecelakaan kapal yang terjadi dari tahun 2002 – 2018, beberapa kecelakaan tersebut banyak memakan korban jiwa. Rumusan masalah : 1. Bagaimana pencegahan tabrakan kapal di laut menurut hukum Internasional? 2. Bagaimana penerapan hukum internasional tentang pencegahan tabrakan kapal di laut dalam hukum nasional Indonesia? Berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 220 ayat (2) UNCLOS dapat diambil kesimpulan bahwa setiap negara berhak dan berkewajiban untuk melindungi perairan mereka. Untuk menindak lanjuti ini maka PBB mengeluarkan 2 Konvensi Internasional yaitu : COLREGSs dan SOLAS. COLREGs 1972 menjelaskan aturan pencegahan tabrakan kapal yaitu sebagai berikut : (1) Aturan 5. Setiap kapal harus selalu melakukan pengamatan cermat terhadap situasi dan bahaya tubrukan. (2) Aturan 6. Setiap kapal harus selalu bergerak dengan laju aman, untuk menghindari tubrukan (3) Aturan 7, Setiap kapal harus menggunakan semua sarana untuk menentukan adanya bahaya tubrukan. (4), Aturan 8, Tindakan untuk menghindari tubrukan. Dalam SOLAS terdapat 16 Chapter yang mengatur pencegahan tabrakan kapal yaitu : Ketentuan Umum, Konstruksi, Perlindungan dari kebakaran deteksi dari kebakaran dan pemadam kebakaran, Alat-Alat keselamatan dan penempatannya, Komunikasi Radio, Keselamatan Navigasi, Pengangkutan Muatan, Pengangkutan Muatan Berbahaya, Kapal-Kapal NuklirManajemen Keselamatan Dalam Mengoperasikan Kapal, Langkah-Langkah Keselamatan Untuk Kapal Berkecepatan Tinggi, Langkah-Langkah Khusus Meningkatkan Keselamatan Maritim, Langkah-Langkah Khusus Untuk Meningkatan Keamanan Maritim, Langkah Keselamatan Tambahan Untuk Kapal Pengangkutan Muatan Curah, Verifikasi Kesesuaian, Langkah-Langkah Keselamatan Untuk Kapal-Kapal Yang Beroperasi di Perairan Kutub. Indonesia meratifikasi SOLAS pada 17 Desember 1980 dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 dan meratifikasi COLREGs dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979. Indonesia juga menerapkan peraturan tentang pencegahan tabrakan kapal dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, yaitu : Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.

Kata Kunci : Penyelesaian Hukum, Tabrakan Kapal , Laut , Hukum Internasional

344.03
OKT
t

TANGGUNG JAWAB ARTIS ENDORSE TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN DALAM KEGIATAN ENDORSEMENT MELALUI AKUN INSTAGRAM

Okta Vini Tanjung, 1610112093, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 Halaman, 2021

ABSTRAK

Teknologi dan informasi di Indonesia dari waktu ke waktu semakin berkembang pesat, hal tersebut memberikan kemudahan seperti berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan akses informasi, mempersingkat waktu dan memangkas biaya, serta proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik yang disebut sebagai electronic commerce (selanjutnya disebut dengan e-commerce). Dalam hal ini penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam kegiatan endorsement oleh artis melalui akun instagram (2) Bagaimana pertanggungjawaban artis yang melakukan endorsement melalui akun instagram terhadap konsumen yang dirugikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Jenis data sekunder yang diolah melalui editing dan koding kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen akibat endorsement artis melalui akun instagram diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar dapat dijerat dengan hukuman pidana penjara paling lama lima belas tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah. Kedudukan artis endorser dalam endorsement yaitu sebagai direct source atau sumber langsung dalam penyampaian sebuah iklan tanpa adanya bantuan dari perusahaan periklanan. (2) Artis endorser memiliki tanggungjawab yang besar karena artis endorser merupakan sumber langsung penyampaian iklan kepada konsumen, beberapa konsumen terbujuk untuk membeli produk dari pelaku usaha dikarenakan promosi yang dilakukan oleh artis tersebut sehingga menimbulkan kerugian pagi konsumen maka konsumen berhak untuk menuntut artis endorser yang bersangkutan dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawab Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sampai saat ini artis hanya dijadikan sebagai saksi, sementara konsep yang ada dalam endorsement ini berbeda, karena endorsement itu merupakan testimoni oleh artis dengan kalimat-kalimat hiperbola seolah-olah produk tersebut digunakan dan memiliki hasil yang menjadi daya tarik bagi konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Endorsement, Artis

346.06
PAD
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA APLIKASI ONLINE SHOPEE YANG DIRUGIKAN DI KOTA PADANG

Padjri Ramdan Ismail, 1710113003, 90 halaman, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2021

ABSTRAK

Transaksi jual beli yang berbasis internet telah mereformasi transaksi jual beli yang terjadi secara konvensional, dimana transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen yang semula dilakukan secara langsung menjadi transaksi tidak langsung. Salahsatu situs transaksi jual beli online yang sedang berkembang di Indonesia adalah Shopee. Pihak Pemerintah dan Pengelola situs Shopee telah menjamin hak-hak konsumen melalui Undang-Undang maupun melalui kontrak elektronik, tetapi masih terdapat kasus konsumen yang dirugikan dalam transaksi elektronik tersebut. Permasalahan yang dibahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual beli pada situs belanja online Shopee dan upaya penyelesaian terhadap konsumen yang dirugikan pada pengguna jasa aplikasi online Shopee. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah data dari studi dokumen dan wawancara yang nilainya relevan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia dapat diakomodasi dengan baik oleh UUPK dan UU ITE serta aturan - aturan hukum terkaitnya yang dibuat oleh pemerintah juga bisa mengacu pada sebuah aturan tertentu yang dibuat oleh Shopee berupa syarat layanan. Syarat layanan ini mengatur penggunaan layanan yang disediakan oleh Shopee. Perlindungan hukum kepada konsumen Shopee telah diakomodir dengan baik melalui ketentuan mengoptimalkan pelayanan, pengajuan tuntutan penggantian kerugian, mengadukan permasalahan tertentu, dan pengaturan mengenai penyelesaian sengketa konsumen. upaya penyelesaian yang disediakan Shopee terhadap konsumen yang dirugikan diantaranya menyediakan sarana pelaporan, dalam hal penjual yang tidak mengirimkan barangnya dalam jangka waktu tertentu, tanggung jawab Shopee apabila terdapat barang yang cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi, penyediaan garansi Shopee, dan penyelesaian sengketa diluar Shopee.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, E-Commerce.

348.04
PEM
a

ANALISIS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TENTANG PASAL YANG DIDAKWAKAN DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Kelas II Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Tjp

Pemi Junita, 78 halaman, Nomor BP: 1710112128, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV Hukum Pidana, Tahun 2021

ABSTRAK

Persetubuhan terhadap anak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua tentang Perlindungan Anak. Persetubuhan masuk ke dalam ranah tindak pidana kesusilaan. Banyaknya kasus yang terjadi tentang tindak pidana persetubuhan anak menjadi alasan terjadinya perubahan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan penjatuhan pidana dengan masa pidana yang lebih berat. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum sebagai pihak yang diberi wewenang untuk menuntut tersangka harus jeli dalam mempertimbangkan segala aspek yang dapat menjadi alat bukti dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mendakwa tersangka yang berujung pada ketidakadilan. Sebagaimana tindak pidana yang terjadi di Payakumbuh, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yang kurang tepat pada perkara yang diputus oleh hakim dengan putusan nomor 61/Pid.Sus/2029/PN.Tjp. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimanakah pertimbangan yang digunakan jaksa penuntut umum dalam menetapkan pasal-pasal yang digunakan dalam surat dakwaan alternatif terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang kemudian dilimpahkan ke pengadilan negeri Tanjung Pati kelas II dalam perkara nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Tjp?, b. Apakah jaksa penuntut umum tidak mempertimbangkan hasil Visum Et Repertum sebagai dasar untuk menetapkan pasal yang akan didakwakan dalam surat dakwaannya? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: pertama, berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang sah (berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa) yang didapatkan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif. Hal ini dikarenakan adanya keraguan dari jaksa penuntut umum melihat adanya beberapa pasal yang terpenuhi setiap unsur dalam pasal. Pasal tersebut yaitu pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindingan Anak serta Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Kedua, Jaksa Penuntut Umum telah mempertimbangkan hasil Visum Et Repertum sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan perbuatan terdakwa, namun tidak menjadikan hasil visum et repertum sebagai pertimbangan dengan adanya akibat dari perbuatan terdakwa terhadap korban. Berdasarkan hasil visum et repertum nomor 03/IPJ/V.3/III/2020 korban mendapat penyakit menular dari terdakwa, seharusnya jaksa penuntut umum dapat memberikan pemberatan hukuman terhadap terdakwa dengan mendakwa dengan pasal yang berbeda yautu Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan anak yang terdapat unsur penyakit menular dapat dipidana dengan hukuman yang lebih tinggi.

Kata kunci: dakwaan, anak, jaksa penuntut umum.

345.02
POP
p

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA SUAP SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan No. 36/ Pid.Sus-TPK/ 2017/Pn Pdg)

POPY DEFFIANI, 1710113084, Fakultas Hukum Universitas Andalas,72 Halaman, 2021

ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana suap telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Banyaknya terjadi kasus suap menyuap yang dilakukan terhadap jabatan seseorang menimbulkan kekhawatiran karena akan mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak tetapi, dalam Putusan No.36/Pid.Sus- TPK/2017/Pn Pdg hakim hanya membebankan pertanggungjawaban pidana kepada penerima suap saja. Berdasarkan alasan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama bagaimana konstruksi perbuatan suap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kedua apa saja kelemahan hukum yang timbul dalam Putusan No.36/Pid.Sus-TPK/2017/Pn Pdg. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: Pertama, Dilihat dari konstruksi hukum tentang tindak pidana suap tidak ada perubahan delik dan atau unsur delik terhadap pelaku suap baik pemberi maupun penerima suap, hanya saja ada penambahan seperti ancaman pidana, dan sanksinya. Kedua, Terdapat beberapa kelemahan hukum yang ada dalam putusan No.36/Pid.Sus-TPK/2017/Pn Pdg yakni, Majelis Hakim tidak menjadikan wali murid yang memberikan uang kepada terdakwa sebagai actieve omkopping padahal dalam fakta persidangan wali murid mengakui memberikan uang partisipasi kepada terdakwa. Kelemahan tersebut akan membuat si pemberi suap merasa tidak ada beban moral terhadap perbuatan yang dilakukannya. Jika dibiarkan akan menjadi kelemahan penegakan hukum dalam tindak pidana suap untuk penerimaan siswa baru, karena yang akan ditetapkan sebagai tersangka hanya pihak kepala sekolah.

Kata Kunci: Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Suap.

345
PRE
p

PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK PADANG UTARA

Presty Indah Sari. 1610113122. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK IV (Hukum Pidana).Halaman 66.Tahun 2021

ABSTRAK

Perjudian di Indonesia merupakan suatu tindak pidana yang di atur dalam KUHP Pasal 303 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak dan atau belum pasti hasilnya. Adapun masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi kecanduan yang merupakan dampak dari rasa akan memang dalam permainan berikutnya. Sehingga dapat dikatakan, bahwa pecandu judi nantinya akan bertindak diluar batas seperti menjual harta benda yang dimiliki guna dijadikan modal pada permainan-permainan selanjutnya. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian sector Padang Utara dilakukan dengan cara yakni upaya Preventif dan upaya Represif. Upaya Preventif yang mana upaya ini ditekankan untuk menghilangkan kesempatan dilakukannya kejahatan dengan cara mengerahkan seluruh elemen masyarakat yang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian. Kemudian upaya Represif merupakan tindakan yang dilakukan dengan wujud penegakan hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana guna memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam melakukan upaya-upaya tersebut Kepolisian sektor Padang Utara mempunyai kendala yang dihadapi di lapangan. Salah satunya sering bocor atau mudah diketahuinya razia yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan kurangnya kesadaran masyarakat yang masih menganggap tindak pidana perjudian merupakan hal biasa. Maka dari itu dalam penelitian ini diharap kedepannya pihak kepolisian sektor Padang Utara bisa lebih serius lagi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dan kesadaran yang serius juga diperlukan dari masyarakat setempat guna terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan khususnya Padang Utara.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Penanggulangan, Perjudian

348.3
PUP
p

PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN SEBAGAI DASAR PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK TERHADAP PERBUATAN PENIMBUNAN BARANG BERUPA ALAT PELINDUNG DIRI PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Puput Afrina, 1710112090, Fakultas Hukum Universitas Andalas.Program Kekhususan Hukum Pidana PK IV. 64 Halaman , Tahun 2021

ABSTRAK

Corona Virus Disease 2019 harus dihindari dengan menggunakan alat pelindung diri. Perbuatan penimbunan alat pelindung diri yang dilakukan pelaku usaha dalam menimbun dan menaikan harga barang sehingga terjadinya kelangkaan dan dengan ini dapat menjadikan APD sebagai barang penting selama pandemi. Perbuatan penimbunan barang penting diatur dalam ketetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, namun terdapat kekurangan pada Undang-Undang tersebut tidak secara spesifik mengkategorikan alat pelindung diri sebagai barang penting, sedangkan dalam hukum pidana adanya asas legalitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif artinya penelitian ini menggunakan analisis terhadap produk-produk hukum dan mengumpulkan data melalui studi dokumen yang berkaitan dengan bahan penelitian. Berdasarkan latar berlakang penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 29 Juncto 107 relevan sebagai dasar penyidikan oleh penyidik dalam perbuatan penimbunan barang berupa alat pelindung diri pada masa pandemi Covid-19? 2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan perbuatan penimbunan barang berupa alat pelindung diri pada masa pandemi Covid-19? Adapun hasil penelitian yaitu penggunaan terhadap Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 29 jo 107 belum secara maksimal dapat digunakan dikarenakan pengaturan terkait pengakategorian barang penting tersebut tidak secara gramatikal menyebutkan alat pelindung diri sebagai barang penting, meskipun sudah terdapat perubahan terhadap peraturan presiden yang menetapkan barang penting ini namun tidak adanya pengkategorian demikian, faktanya bahwa masih adanya kesulitan yang dialami oleh penyidik menindak pelaku perbuatan penimbunan alat pelindung diri. Pihak penyidik harus hati-hati dalam menindak lanjuti kasus tersebut karena adanya asas legalitas dalam hukum pidana yang memiliki prinsip lex scripta dan lex certa. Dengan kebijakan hukum pidana dapat dijadikan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan kepastian hukum terhadap kasus penimbunan barang berupa alat pelindung diri tersebut, yaitu dengan melakukan pembaruan dan mengkategorikan alat pelindung diri sebagai barang pentingdengan mempertimbangan dan memperhatikan berbagai hal-hal penting yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.

345
QAN
u

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Studi di Wilayah Hukum Polres Solok Kota)

Qanita Mahira Sadiq, 1710111063, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021

ABSTRAK

Tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Adanya peraturan perundang-undangan ini nyatanya tidak membuat masyarakat takut melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Polres Solok Kota menimbulkan keresahan bagi masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah. Dengan demikian perlu dilakukan upaya penanggulangan oleh pihak kepolisian agar dapat mengurangi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah hukum Polres Solok Kota. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a. bagaimana upaya kepolisian resor solok kota dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi? b. apa saja kendala kepolisian resor solok kota dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: Pertama, Kepolisian Resor Solok Kota melakukan upaya preventif berupa sosialisasi seperti memberikan himbauan kepada masyarakat dan SPBU, melakukan kegiatan patroli, Meningkatkan kinerja kepolisian khususnya Satuan Reserse Kriminal Polres Solok Kota Unit II Tindak Pidana Tertentu, sedangkan upaya represif yaitu membuat laporan polisi model A, melakukan upaya paksa penangkapan dan pemeriksaan serta membawa barang bukti yang didapatkan di TKP, berkas perkara lengkap penyidik langsung menyerahkan kepada kejaksaan, apabila berkas dinyatakan lengkap oleh JPU maka dilakukan penyerahan terdakwa dan alat bukti. Kedua kendala yang dihadapi adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang jumlah maksimum bahan bakar minyak bersubsidi yang dapat dijual secara bebas kepada masyarakat, pelaku sudah mengetahui waktu-waktu patroli polisi, tempat-tempat melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi ini berpindah-pindah, kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Kata kunci : Upaya Kepolisian, Penyalahgunaan BBM Bersubsidi.

344.03
RAH
p

PENGELOLAAN ZAKAT YANG BERSUMBER DARI BADAN USAHA BERBADAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 2011 DI KOTA PADANG

Rahmi Yesenia Susan, 1920112025, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, 125 Halaman

ABSTRAK

Pasca kemerdekaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial. Namun setelah 75 tahun merdeka Indonesia masih belum menuntaskan persoalan dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku dalam hukum Islam. Salah satu hukum Islam yang telah berlaku sebagai hukum positif Indonesia adalah menngenai zakat yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pelaksanaan zakat secara optimal seharusnya dapat membantu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang berlarut-larut. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti yaitu: 1) Apa dasar hukum adanya kewajiban zakat bagi badan usaha berbadan hukum di Indonesia 2) Bagaimana pola pendekatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang dalam mengumpulkan zakat badan usaha berbadan hukum; 3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang dalam penyaluran zakat dalam meningkatkan daya guna zakat badan usaha berbadan hukum untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan sosial; Dalam penelitian penulis melakukan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif, Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa: 1) Dasar hukum adanya kewajiban zakat nagi badan usaha berbadan hukum adalah kedudukannya sebagai subjek hukum bukan orang dan firman Allah SWT yang menyatakan bahwa dalam setiap kekayaan terdapat hak orang lain; 2) BAZNAS Kota Padang bekerjasama dengan pemerintah Kota Padang dengan menerbitkan Peraturan Daerah No 2 tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat dan melakukan beberapa pola pendekatan untuk meningkatkan jumlah muzaki badan usaha berbadan hukum yang ada di Kota Padang; 3) Dalam penyaluran zakat untuk meningkatkan daya guna zakat dari badan usaha untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan adalah BAZNAS melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui 5 program pokok yang dapat memperbaiki kehidupan perekonomian masyarakat. Beberapa program tersebut meliputi beberapa bidang yaitu: dakwah & advokasi; Padang Sehat; Pendidikan; Kemanusiaan; dan Ekonomi.

Kata kunci: Pengelolaan zakat, Badan Usaha, Keadilan dan Kesejahteraan, Badan Amil Zakat Kota Padang.

344.09
RAH
r

RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH BERMASALAH AKIBAT COVID-19 DI PEGADAIAN CABANG BISNIS MIKRO TARANDAM PADANG

Rahimul Khalid, 1710112049, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 81 halaman, 21 April 2021

ABSTRAK

Hukum Gadai dalam fikih islam disebut al-rahn berasal dari bahasa Arab “rahana-yarhanu-rahnan” berarti menetapkan sesuatu. Jadi, pengertian al-rahn secara bahasa ialah menahan/menetapkan suatu barang sebagai jaminan/pengikat utang. Pegadaian hadir sebagai alternatif solusi bagi persoalan keterbatasan modal yang merupakan permasalahan utama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam upaya pengembangan skala usahanya. Pada bulan Desember 2019, UMKM di Indonesia mengalami permasalahan akibat penyebaran wabah pneumonia yang disebab oleh virus corona terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei. Wabah ini disebut juga dengan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), Karena alasan inilah pemerintah di beberapa negara memutuskan untuk menerapkan lockdown atau isolasi total (karantina). Menyikapi hal tersebut presiden Republik Indonesia memerintahkan bahwa adanya kelonggaran dan relaksasi terhadap kredit disebut juga dengan istilah “Restrukturisasi Kredit”. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan restrukturisasi terhadap pembiayaan mikro syariah bermasalah oleh pegadaian cabang bisnis mikro Tarandam Padang?. Dalam dokumen ini penulis menggunakan metode penelitian yurudis empiris. Data utama dari penelitian ini adalah data yang diperoleh di lapangan. Di samping itu penulis juga melakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan restrukturisasi terhadap pembiayaan mikro syariah bermasalah oleh Pegadaian cabang bisnis mikro Tarandam Padang.

Kata Kunci: Gadai (al-rahn), Restrukturisasi, Covid-19

347.05
RAI
w

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH BERDASARKAN AKTA NOTARIS DI KOTA PADANG

Raisa Berliana Nadhifah, 1710112165, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 Halaman, 2020

ABSTRAK

Tanah mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Salah satu cara memperoleh tanah adalah melalui jual beli. Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa tanah sebagai benda tidak bergerak, sehingga ketika melakukan jual beli yang berpindah bukan objeknya namun hak milik atas tanah tersebut. Jual beli hak atas tanah seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang, yang daerah kerjanya meliputi daerah tempat tanah yang diperjualbelikan itu berada. Namun karena kurangnya persyaratan seperti yang disyaratkan dalam undang-undang untuk melakukan jual beli langsung, maka adanya suatu terobosan hukum dan hingga kini masih dilakukan dalam praktek jual beli tanah yaitu dengan dibuatnya akta pengikatan jual beli (PPJB) yang melahirkan hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi dan kontraprestasi sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian pengikatan jual beli. Namun pada prakteknya, terkadang adanya permasalahan hukum seperti wanprestasi dimana tidak terpenuhinya apa yang diperjanjikan para pihak yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Maka dari itu penulis menguraikan dalam rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah berdasarkan akta notaris di Kota Padang. 2) Bagaimana akibat hukum dari terjadinya wanprestasi dan upaya penyelesaian waprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bertumpu dari hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah pertama dan kedua adalah sah menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian dan juga sah menurut ketentuan Hukum Agraria. 2) Namun, terdapat wanprestasi dimana tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang tertuang dalam akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut sehingga akibat hukum dari wanprestasi pertama dan kedua adalah pembatalan perjanjian dan upaya penyelesaiannya sudah diatur dalam akta pengikatan jual beli (PPJB) yaitu musyawarah mufakat yang berakhir dengan akta pembatalan.

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Hak Atas Tanah, Akta Notaris

345.08
RAN
t

TERJADINYA PROSTITUSI TERHADAP ANAK MELALUI MEDIA ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG

Rangga Witanto Halim, 1710113078, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 75 Halaman, 2021

ABSTRAK

Adanya fenomena baru yaitu prostitusi melalui media online yang merupakan salah satu bagian dari cyber crime, membuat adanya sisi gelap dari aktivitas di dunia maya yang mengakibatkan anak-anak menjadi korbannya. Pada KUHP, hal ini diatur dalam Pasal 296 dan 506 KUHP. Sedangkan pada aturan khusus yang mengatur tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi melalui media online diantaranya yaitu pada Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yakni pada pasal 27 ayat 1. Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu: a) Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi terhadap anak melalui media online di wilayah hukum Polresta Padang? b) Apa kendala yang dihadapi oleh penyidik terhadap tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi terhadap anak melalui media online di wilayah hukum Polresta Padang?. Metode pendekatan masalah penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang melihat perundang-undangan yang ada dengan fakta di lapangan. Dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti yaitu Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi terhadap anak melalui media online oleh unit PPA Polresta Padang, telah sesuai dengan tahapan penyidikan yang telah ditetapkan yaitu laporan polisi, proses penyidikan, proses pemeriksaan, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum. Kendala diantaranya yaitu Sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi terbatas,identitas pelaku yang sering dipalsukan, kurang memadai sarana prasarana dan Kurang aktifnya saksi korban dalam pemeriksaan. Adapun saran dari penulis yakni pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana memfasilitasi terjadinya prostitusi terhadap anak melalui media online perlu lebih ditingkatkan dengan cara menambah sarana prasarana dan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi untuk kelancaran dan kepastian hukum karena praktek prostitusi yang dilakukan oleh para pelaku adalah melalui media online.

Kata kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Prostitusi, Media Online

347.05
RAN
k

KEWENANGAN BPSK TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TENTANG WANPRESTASI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 578 K/PDT.SUS.BPSK/2020

Ranggi Saputra, 1710112056, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pertada Bisnis (PK II), 99 Halamam-Tahun 2021

ABSTRAK

Norma-norma perlindungan konsumen dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang semula diharapkan oleh semua pihak dapat memberikan solusi terutama dalam penyelesaian perkara-perkara yang timbul dari pelaksanaan undang-undang tersebut, akan tetapi dalam penegakan hukumnya terjadi ketimpangan dan menimbulkan kebingungan bagi pihak yang terlibat dalam implementasinya. Kerancuan itu terjadi pada kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memeriksa dan mengadili sengketa konsumen, seperti hal nya dalam perkara yang timbul dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Susun (Apartemen Metropolitan Park), yang mana Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 578 K/Pdt.Sus-BPSK/2020, salah satu amar putusannya adalah menyatakan BPSK Kota Bekasi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana ruang lingkup kewenangan BPSK terhadap penyelesaian sengketa konsumen tentang wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Unit Rumah Susun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 578 K/Pdt.Sus-BPSK/2020 terkait ketidakwenangan BPSK terhadap penyelesaian sengketa konsumen tentang wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Unit Rumah Susun. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak memiliki kewenangan menyelesaikan perkara antara konsumen dengan pelaku usaha ketika terjadinya wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Unit Rumah Susun. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian perkara wanprestasi bukanlah ruang lingkup kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikannya. Hal tersebut dipertegas putusan- putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi). Terhadap pertimbangan hakim dalam perkara a quo sudah tepat karena kewenangan penyelesaian perkara wanprestasi merupakan kewenangan absolute Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan kesepakatan para pihak dalam PPJB untuk penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Bekasi.

Kata kunci: Wanprestasi, PPJB, BPSK, Penyelesaian Sengketa

345
RAY
p

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES AGAM

Rayhan Marevi, 1710113096, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 61 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi di Indonesia. Kejahatan terhadap satwa yang terus semakin meningkat menjadi perhatian khusus bagi penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan satwa. Pengaturannya sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (UU KSDAHE). Seringkali pelaksanaan koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri terhadap proses penyidikan yang dilakukan PPNS belum sesuai ketentuan yang ada misalnya PPNS tidak menyerahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri, ataupun bahkan ada juga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ataupun berkas perkara yang langsung diserahkan oleh PPNS kepada Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik Polri selaku korwas PPNS, serta tidak tertibnya administrasi penyidikan oleh PPNS. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, Bagaimana Penyidikan Tindak Pidana perdagangan satwa yang dilindungi oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Agam? Kedua, Apa kendala dalam Penyidikan Tindak Pidana perdagangan satwa yang dilindungi oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Agam? Hasil penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris). Pendekatan yuridis sosiologis sosiologis yaitu suatu penelitian yang membandingkan fakta di lapangan dengan peraturan yang berlaku. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut; pertama, Penyidikan Tindak Pidana perdagangan satwa yang dilindungi oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Agam ialah Koordinasi yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan bersama Penyidik Kepolisian Republik Indonesia perihal tindak pidana kehutanan terhadap satwa yang dilindungi belum optimal karena didalam mekanisme koordinasi yang terkait pada PPNS dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia didalam hal ini Kasi Korwas PPNS wajib menambahkan bantuan penyidikan kepada PPNS baik diminta atau tidak diminta. Kedua, Kendala dalam Penyidikan Tindak Pidana perdagangan satwa yang dilindungi oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Agam terbagi atas 4 faktor yaitu sebagai berikut: (1) Faktor Masyarakat, (2) Faktor Hukum, (3) Faktor Sarana dan (4) Faktor Budaya. Saran dari penulis untuk penyidik polri agar melakukan penyidikan secara maksimal dan menanggulangi kendala-kendala yang dialami oleh penyidik polri. Sehingga proses penyidikian dapat terlaksana secara optimal.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Perdagangan satwa yang dilindungi

345
REM
a

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN TINDAKAN BERUPA KEBIRI KIMIA PADA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 69/PID.SUS/2019/PN Mjk)

Remy Sandria Andeskal.1610112107.Fakultas Hukum Universitas Andalas.PK IV (Hukum Pidana). Halaman 75. Tahun 2021.

ABSTRAK

Semua anak Indonesia adalah aset bangsa. Oleh karenanya, kesejahteraan terhadap anak perlu terus ditingkatkan. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian tentang kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Muh. Aris bin Syukur terhadap seorang anak bernama Farah Bilqis Magfiroh. Muh. Aris telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Yang mengakibatkan Muh. Aris bin Syukur dijatuhi pidana tambahan, yaitu tindakan berupa kebiri kimia oleh Majelis Hakim. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah (1) apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk (2) bagaimana analisis terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan JPU dalam putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk. dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan Undang-Undang (statute approach), dimulai Analisa terhadap putusan hakim, pasal-pasal dalam peraturan yang mengatur permasalahan kemudian dikaitkan dengan kasus yang akan diteliti. Teknik pengumpulan datanya studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, penjatuhan pidana berupa tindakan kebiri kimia itu tidak relevan dengan tujuan pemidanaan karena dilakukan secara paksa atau berupa suatu hukuman (punishment) bukan merupakan suatu perawatan (treatment) bagi pelaku pedofilia. Belum jelasnya instansi atau lembaga yang melakukan eksekusi terhadap Terdakwa, dan membutuhkan biaya yang mahal dalam pelaksanaannya. Sedangkan pembuktian terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk sudah sesuai dengan system pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Putusan Hakim, Kebiri Kimia

343.62
REN
p

PENINDAKAN TERHADAP USAHA TAMBAK UDANG TIDAK BERIZIN TEMPAT USAHA DI KAMPUNG GOSONG KORONG SIMPANG NAGARI KATAPIANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

(Renci Gusri Elva SoleRena, 1710111006, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam)

ABSTRAK

Didirikannya usaha tambak udang Kampung Gosong, Korong Simpang, Nagari Katapiang, Kabupaten Padang Pariaman melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030. Karena ada usaha tambak udang yang didirikan berada pada kawasan sempadan pantai. Kawasan tersebut merupakan kawasan yang dilarang oleh pemerintah daerah untuk mendirikan segala jenis usaha usaha atau melakukan aktivitas kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dikarenakan kawasan sempadan pantai memiliki fungsi sebagai kawasan lindung. Jumlah tambak yang didirikan 16 titik tambak, 5 titik tambak lokasinya tidak berada dalam kawasan sempadan pantai dan dalam proses perizinan serta 11 titik tambak lainnya berada dalam kawasan sempadan pantai dan tidak memiliki izin. Terhadap 11 titik tambak yang berada dalam kawasan sempadan pantai, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan penindakan dan memberikan sanksi. Rumusan masalah dari penelitian ini, 1) Bagaimana penindakan terhadap usaha tambak udang tidak berizin tempat usaha di Kampung Gosong, Korong Simpang, Nagari Katapiang, Kabupaten Padang Pariaman? 2) Apa sanksi administratif yang diterapkan terhadap usaha tambak udang tidak berizin tempat usaha di Kampung Gosong, Korong Simpang, Nagari Katapiang, Kabupaten Padang Pariaman? Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Jenis data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan, antara lain: 1) Penindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah a) pembinaan; b) sosialisasi; c) teguran secara lisan; dan d) teguran secara tertulis; 2) Sanksi administratif yang diberikan adalah a) peringatan tertulis; dan b) penghentian kegiatan sementara.

Kata kunci: Penindakan, Usaha Tambak Udang, Sanksi Administratif

342
REY
p

PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 PADA PT BPR RANGKIANG AUR DENAI CABANG PAYAKUMBUH

Reynold Rehan Pratama, 1710113017, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis (PK II), 78 Halaman – Tahun 2021

ABSTRAK

Pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF), dimana salah satunya adalah dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) UUJF oleh penerima fidusia. Pada tanggal 6 Januari 2020 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 15 (2), Pasal 15 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UUJF bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, yakni terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela, maka segala mekanisme dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1.) Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 pada PT BPR Rangkiang Aur Denai Cabang Payakumbuh? 2.) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap PT Bank Perkreditan Rakyat Rangkiang Aur Denai Cabang Payakumbuh? Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis empiris atau disebut juga penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara dan studi dokumen dengan jenis data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan di PT. Bank BPR Rangkiang Aur Denai Cabang Payakumbuh didapat disimpulkan bahwa: 1.) Proses eksekusi yang dilakukan oleh PT. Bank BPR Rangkiang Aur Denai Cabang Payakumbuh pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ada kesepakatan cidera janji dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Payakumbuh melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. 2.) Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri berpengaruh terhadap waktu, biaya, dan penambahan beban baru dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan.

Kata Kunci : Eksekusi Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019.

345
REZ
t

TINJAUAN HUKUM KEABSAHAN PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA TELECONFERENCE

Reza Sri Maulani, 1710112129, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 103 halaman, 2021

ABSTRAK

Maraknya Covid-19 di Indonesia sehingga dalam rangka pencengahannya di lingkungan makamah agung, dikeluarkan suatu kebijakan bahwa persidangan perkara pidana dilakukan secara teleconference. Persidangan secara teleconference merupakan serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya. Persidangan secara teleconference tidak diatur di dalam KUHAP, KUHAP menyatakan pada hakikatnya persidangan dilakukan secara langsung dan lisan terutama dalam pemeriksaan pembuktian dengan tujuan selain menilai keterangan yang dilihat dan diteliti majelis hakim juga memperhatikan sikap dan cara mereka memberikan keterangan dapat menentukan isi dan nilai keterangan. Dalam penelitian ini rumusan masalah sehubungan dengan keabsahan pemeriksaan persidangan perkara pidana secara teleconference adalah 1) Apakah dasar hukum bagi hakim menyelenggarakan persidangan perkara pidana secara teleconference, 2) Bagaimanakah implementasi persidangan perkara pidana secara teleconference dan apa sajakah kendala dalam menyelenggarakan persidangan perkara pidana secara teleconference. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukan bahwa: 1) Dasar hukum penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara teleconference diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti : UUD RI 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,UU Sistem Peradilan Anak, UU LPSK, UU TPPO, Perma Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, SEMA Sistem Kerja di Lingkungan MA dan Badan Peradilan dibawahnya dalam Tatanan Norma Baru, dll 2) Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara teleconference yang pada prinsipnya sama dengan persidangan seperti biasa sesuai dengan ketentuan KUHAP namun ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan persidangan secara teleconference seperti faktor susah menilai keterangan, faktor terdakwa, faktor signal internet dan faktor sarana dan prasarana, dan faktor terdakwa. Diharapkan dalam penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara teleconference oleh hakim lebih diperketat lagi agar tercapai kebenaran materiil dan diharapkan kepada pemerintah untuk mengakomodasi pengaturan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara teleconference ke dalam hierarki tata hukum di Indonesia.

Kata kunci : Keabsahan, pemeriksaan persidangan, teleconference

344.09
REZ
p

PELAKSANAAN KEWARISAN DARI HARTA PENCAHARIAN BERUPA TANAH DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT MATRILINEAL MINANGKABAU DI NAGARI SITOMBOL PADANG GALUGUA, KABUPATEN PASAMAN

Rezki Kurniawan, 1610113079, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata, 73 halaman, 2021

ABSTRAK

Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang menganut falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang berarti bahwa adat bersendikan agama dan agama bersendikan kitab Allah. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Islam, tentang gugurnya hak waris jika murtad atau keluar dari agama Islam. Namun dengan dianutnya falsafah ini oleh masyarakat Minangkabau menjadikan adanya dua hukum waris yang berlaku di masyarakat, yakni hukum waris adat dan hukum waris Islam (faraidh). Beberapa daerah di Minangkabau, ada masyarakat yang menerapkan pembagian harta waris dari harta pencaharian berupa tanah, dibagi berdasarkan adat yang berlaku pada masyarakat setempat. Porsi pembagian harta diberikan berdasarkan ketentuan adat tersebut. Hal ini tentu menjadi masalah hukum yang cukup menarik untuk diteliti, karena para pemuka adat dan agama di Minangkabau pernah menetapkan sebuah ketetapan yakni membagi harta pusaka tinggi dengan ketentuan adat, dan harta pusaka rendah dan harta pencaharian dengan hukum waris Islam atau Faraidh. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua masalah, pertama, bagaimana kecendrungan pemilihan hukum kewarisan yang digunakan oleh Masyarakat Hukum Adat Matrilineal Minangkabau di Nagari Sitombol Padang Galugua dalam membagi harta pencaharian berupa tanah. Kedua, bagaimana pelaksanaan kewarisan harta pencaharian berupa tanah pada Masyarakat Hukum Adat Matrilineal Minangkabau di Nagari Sitombol Padang Galugua. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dari penelitian ini didapatkan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan waris harta pencaharian dalam masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sitombol Padang Galugua Kabupaten Pasaman. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui: Pertama, kecendrungan pemilihan hukum kewarisan dalam Masyarakat Hukum Adat Matrilineal Minangkabau pada Nagari Sitombol Padang Galugua ada dua, yaitu menggunakan Hukum Waris berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam ungkapan adat yang mereka anut, yaitu nen luung untuk lolaki, nen datar untuk podusi yang berarti bahwa harta tidak bergerak berupa kolam, diperuntukkan untuk anak laki-laki, dan harta tidak bergerak berupa tanah dan rumah diperuntukkan untuk anak perempuan dalam menentukan pembagian harta pencaharian. Kedua, pelaksanaan hukum kewarisan dalam masyarakat Nagari Sitombol Padang Galugua sebagian besar masyarakat menggunakan ketentuan adat melalui adagium adat nen luung untuk lolaki, nen datar untuk podusi yang mereka anut dalam membagi harta pencaharian tersebut.

345
RID
f

FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA POLRESTA PADANG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA MASA PANDEMI COVID-19

Ridho Perdana, 1710113076, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 80 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Pertama, Apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19. Kedua, Bagaimana upaya Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19. Ketiga, Apa saja kendala dari Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19. Tipologi penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang membandingkan fakta di lapangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid- 19 terdapat secara internal yaitu yang berasal dari diri pelaku kekerasan dan eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelaku kekerasan seperti kesulitan ekonomi yang terjadi akibat covid-19. Upaya Polresta Padang khususnya unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19 yaitu dengan cara preventif dan represif diantaranya memaksimalkan sumber daya penunjang yang tersedia, melakukan penyuluhan tentang peranan masyarakat dalam membantu tugas kepolisian, melibatkan masyarakat dalam hal pencegahan kekerasan dalam rumah tangga berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan menindak pelaku melalui proses hukum. Kendala Polresta Padang dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid 19 diantaranya keterbatasan layanan medis, korban enggan melaporkan kasus yang dialaminya karena adanya berbagai pembatasan dan kekhawatiran tertular covid-19, malu dalam melaporkan serta emosi sesaat sehingga proses penyelesaian KDRT cenderung selesai karena korban mencabut laporan.

Kata Kunci : Kepolisian, KDRT, Covid 19.

342
RIZ
a

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Rizka Ananda Alyan 1710111086, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Tata Negara, 100 Halaman, 2021

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD memiliki fungsi yang salah satunya untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Hal ini tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 athun 2014 tentang Desa. Peraturan Desa merupakan produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Pada penelitian pertama membahas tentang kewenangan legislasi BPD dalam pembentukan Peraturan Desa. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan Peraturan Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Data yang digunakan adalah bahan data primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian, di samping itu penelitian ini juga ditunjang wawancara dengan Kepala Desa dan Ketua BPD Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat untuk mendapatkan keterangan ahli serta mengklarifikasi data sekunder yang telah dikumpulkan. Dari hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa kewenangan legislasi BPD dalam pembentukan Peraturan Desa memiliki andil yang sangat penting. Karena usulan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD lebih diprioritaskan sedangkan usulan Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Hal ini didukung Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dalam pembentukan Peraturan Desa ada terdapat faktor yang mempengaruhi. Salah satunya pola hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa yang bersifat kemitraan, konsultatif, koordinatif. Kewenangan legislasi BPD yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan agar proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan kerangka NKRI. Dengan demikian perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat desa untuk memberikan pemahaman terhadap tujuan tersebut.

Kata Kunci: Kewenangan Legislasi, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa

344.09
RIZ
p

PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI KELURAHAN KOTO LALANG KECAMATAN LUBUK KILANGAN KOTA PADANG

Rizki Kumala Jati, 1710112157, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 61 halaman - Tahun 2021

ABSTRAK

Tindak pidana perzinahan pada umumnya diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang akibat maraknya terjadinya tindak pidana perzinahan mendorong niniak mamak untuk memberlakukan hukum adat yang bersifat pidana yang berpedoman kepada Undang Nan Duo Puluah Adat Minangkabau untuk menyelesaikan kasus perzinahan tersebut. Akan tetapi pidana adat yang berlaku terkait kasus perzinahan hanya diberlakukan untuk orang luar yang melakukan tindak pidana perzinaha di Kelurahan Koto Lalang dan sedangkan untuk warga setempat tidaklah diterapkan dengan sebagaimana mestinya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah a) Apakah bentuk sanksi pidana adat yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, b) Bagaimanakah tahapan musyawarah adat dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, dan c) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris/sosilogis. Penelitian ini bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yakni: 1) Bentuk-bentuk sanksi pidana adat yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, yaitu permintaan maaf dan nikahkan, membayar denda dan ganti kerugian, dan diusir keluar dari kampung. 2) Tahapan musyawarah adat dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan yang terjadi di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, yaitu diselesaikan secara Bajanjang Naiak, Batanggo Turun, dilaksanakan secara terstruktur dari yang terendah hingga yang tertinggi. 3) Penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana perzinahan di Kelurahan Koto Lalang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, yaitu kerap terjadi perbedaan perlakuan dalam hal pemberian sanksi pidana adat antara masyarakat setempat dan orang luar. Sanksi pidana adat ini diputus melalui peradilan adat (musyawarah adat) yang dilaksanakan di Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Kata Kunci: Sanksi Pidana Adat, Tindak Pidana Perzinahan

345
RIZ
p

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA DI BAWAH BATAS MINIMUM KHUSUS PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan: Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk)

Rizqiany Mutiara Adji, 1610111087, PK IV (Hukum Pidana), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 83 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu masalah krusial yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur tentang pemberatan pidana, antara lain mengenai ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati. Dengan adanya sistem pidana minimum khusus akan menjadi patokan dalam penjatuhan vonis oleh hakim. Artinya, seorang hakim dapat saja menjatuhkan vonis, baik dalam batas yang minimum maupun juga dalam batas yang maksimum. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di bawah batas minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk dan apakah putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk telah mencapai tujuan dari pemidanaan atau belum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan melakukan studi kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis yang berupaya untuk menguraikan dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas dengan mengumpulkan jenis dan sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan juga literatur-literatur serta pendapat-pendapat sarjana hukum yang berhubungan. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian data tersebut diolah, diorganisasikan, dan dikelompokkan dalam klasifikasi menurut pokok permasalahan dan pembahasan, untuk dapat dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan analisis bahwa hakim memutus berdasarkan pertimbangan yuridis yang berupa tuntutan jaksa, Undang-Undang yang berlaku serta fakta fakta yuridis dalam pengadilan dan pertimbangan non yuridis yaitu terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya dan perilaku sopan terdakwa yang tidak mempersulit selama persidangan berlangsung. Putusan hakim dianggap telah mencapai tujuan pemidaan relatif dimana mengacu pada preventif umum dimana penjatuhan pidana terhadap terdakwa Satriawan Sulaksono untuk mempertahankan ketertiban di masyarakat dengan harapan anggota masyarakat yang lainnya tidak akan melakukan tindak pidana tersebut juga.

Kata Kunci: Korupsi, Minimum Khusus, Pertimbangan Hakim.

345
ROZ
u

UPAYA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) PADANG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK

Roza Oktaviani, 1610111093, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana) 63 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Tindak Pidana pencabulan terhadap anak di atur khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diperbarui lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Adanya Peraturan Perundang-undangan ini nyatanya tidak membuat orang takut untuk melakukan tindak pidana. Banyaknya kasus pencabulan yang terjadi di kota Padang menimbulkan keresahan karena akan mengakibatkan penderitaan baik fisik maupun psikis terhadap anak sehingga dapat menganggu tumbuh dan berkembang anak. Berdasarkan alasan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang? Kedua, apakah kendala yang dihadapi oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak? Ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak? Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: Pertama, unit PPA Polresta Padang melakukan upaya preventif berupa sosialisasi mengenai tindak pidana pencabulan dan upaya represif berupa penyelidikan dan penyidikan serta rehabilitasi oleh Dinas Sosial. Kedua, kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak adalah kurangnya sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Ketiga, upaya yang dilakukan Unit PPA Polresta Padang dalam melakukan penyidikan tentang anak dapat dilakukan oleh polisi wanita dan penyidik lainnya, pemakaian ruangan pemeriksaan secara bergantian. Untuk penyelesaian permasalahan maka penulis memberikan saran: Unit PPA dapat melakukan sosialisasi secara berkala, perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, pendampingan ahli psikologi kepada anak korban pencabulan agar dapat mengembalikan psikologis anak.

Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Pencabulan, Anak di bawah umur

346.08
ROZ
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI MULTI LEVEL MARKETING PADA PT ASURANSI JIWA CENTRAL ASIA RAYA CABANG PADANG

Rozaqna Rizke Munawarah, 1510111138, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 75 Halaman , Tahun 2021

ABSTRAK

Perusahaan asuransi jiwa Central Asia Raya menjual produk asuransi jiwa CARrlink Pro dengan program 3i-Network kepada konsumen melalui agen dengan sistem Multi Level Marketing kepada konsumen. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Peyelenggaraan Kegiatan dengan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung mewajibkan perusahaan dengan metode penjualan langsung berbasis Multi Level Marketing memiliki SIUPL (Surat Izin Usaha Penjualan Lanssung), sedangkan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya tidak memiliki SIUPL. Meskipun dikemudian hari PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya memiliki SIUPL, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Peyelenggaraan Kegiatan dengan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung tidak membenarkan perusahaan asuransi untuk menggunakan metode penjualan langsung berbasis Multi Level Marketing dalam menjual produk asuransi. Berdasarkan uraian diatas yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah mengapa terjadi pelaksanaan penjualan langsung dengan sistem multi level marketing padahal melanggar peraturan dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen bila mengalami kerugian. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan normatif. Sumber data yang digunakan adalah wawancara dan serta menganalisa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa alasan terjadinya pelaksanaan penjualan langsung dengan sistem multi level marketing pada PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya padahal melanggar karena perusahaan asuransi cabang Padang mengikuti cara yang dilakukan perusahaan pusan, menigkatkan pendapatan perusahaan, dan adanya izin usaha dari OJK. Perlindumgan hukum terhadap konsumen dengan adanya mekanisme pengaduan. Disarankan OJK hendaknya membuat peraturan khusus mengenai produk asuransi yang dijual melalui sistem Multi Level Marketing dan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Cabang Padang hendaknya mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada mengenai perasuransian

Kata Kunci : Asuransi, Perlindungan Hukum, Multi Level Marketing.

343.02
RUZ
u

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG

Ruzo Ramadhana, 1710112106, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70+ iv halaman, 2021

ABSTRAK

Perbuatan main hakim sendiri masih banyak terjadi di Kota Padang. Pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh massa yang tidak dapat mengontrol emosinya dan kurangnya pengetahuan akan sanksi hukum menjadi penyebab perbuatan ini banyak terjadi di Kota Padang.Pelaku tindak pidana yang merupakan korban dari tindakan main hakim sendiri mengalami luka fisik yang ringan hingga sampai serius bahkan dibeberapa kasus berujung dengan kematian. Aparat kepolisian juga kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku main hakim sendiri karena sulit mendapatkan bukti-bukti siapa saja yang terlibat. Oleh karena itu hal ini menjadi menarik untuk diteliti mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindakan main hakim sendiri khususnya di wilayah Kota Padang. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah yaitu; apa saja penyebab terjadinya kejahatan main hakim sendiri di wilayah hukum Kota Padang, upaya Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Main Hakim Sendiri di kota padang,dan apa saja kendala yang ditemui oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana main hakim sendiri di Kota Padang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/sosiologis, dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan data primer berupa wawancara kepada pihak Poresta Kota Padang. Pembahasan dilakukan dengan cara menyimpulkan hasil observasi terhadap kasus main hakim di masyarakat dan hasil wawancara kepada pihak Polresta Padang. Dari hasil penelitian dapat diklasifikasikan apa saja faktor penyebab tindakan main hakim di Kota Padang yang menjadi penghambat dalam penanggulangannya yaitu ; sikap spontan karena emosi yang timbul melihat orang melakukan tindak pidana, ikut-ikutan melihat kejadian langsung di depan mata, dan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dari faktor tersebut, pihak Kepolisian Polresta Padang melakukan upaya penanggulangan dengan dua cara, yang pertama upaya preventif yaitu upaya pencegahan dan yang kedua upaya repesif yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya suatu kejadian dengan cara pemberian sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Kata Kunci: Kepolisian, Penanggulangan, Main Hakim Sendiri.

345
YUL
p

PERANAN NINIK MAMAK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PROSES PERADILAN ADAT (Studi : Kerapatan Adat Nagari Kinali)

Yulhardi. S, NIM 1820112032, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, 95 Halaman.

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah. permasalahan penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah peranan ninik mamak dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui proses peradilan adat di Kenagarian Kinali, 2. Apakah kategori tindak pidana yang dapat diselesaikan pada peradilan adat di Kenagarian Kinali, 3. Bagaimanakah bentuk sanksi adat yang dijatuhkan apabila ada pihak yang terbukti bersalah dalam perbuatan pidana tersebut pada Kenagarian Kinali? Metode penulisan yang digunakan Metode Yuridis Sosiologi atau Empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, jenis data yang digunakan adalah : data primer dan data sekunder, Analisi data menggunakan metode analisis kualitatif, Hasil penelitian Penyelesaiaan perkara pidana melalui Mediasi Penal terhadap tindak pidana penganiayaan pada masyarakat Adat Nagari Kinali masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa, para pelaku dan korban masih belum sepenuhnya menyetujui penyelesaian penganiayaan dengan penyelesaian secara ninik mamak. Para pihak perkara masih cenderung ingin membawa kasus ini pada jalur litigasi. Seharusnya para pihak bisa menghargai keberadaan ninik mamak dalam meyelesaian perkara pidana melalui Mediasi terhadap tindak pidana penganiayaan pada masyarakat Adat Nagari Kinali dan masyarakarat sekitar masih belum menyadari keberadaan hukum adat sebagai alternative dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat.

Kata Kunci: Peranan, Ninik Mamak, Tindak Pidana Penaniayaan, Peradilan Adat

342
SAF
p

PENGAWASAN PENGOPERASIAN JEMBATAN TIMBANG DI TANJUNG BALIK KABUPATEN 50 KOTA

Safira Lidia Dinanti, 1610111061, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, 78 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan dalam Pasal 4 huruf (b) untuk membina dan menyelenggrakan lalu lintas jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar harus menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lalu lintas dan jalan. Salah satu bentuk sarana yaitu berupa alat angkut Truk, sedangkan yang dimaksud dengan prasarana merupakan jalan serta jembatan timbang sebagai alat pengawasan dan pengamanan jalan. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor atau dikenal dengan Jembatan Timbang adalah unit kerja yang saat ini berada di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu. Dengan demikian, setelah berpindah kewenangan dari Dinas Perhubungan ke Kementerian Perhubungan dengan dikordinasikan oleh Badan Pengawasan Transportasi Darat Wilayah III Sumatera Barat selaku petugas penegak hukum, di Jembatan Timbang memiliki peraturan perundang-undang yang harus dijalankan dan ditaati oleh operator kendaraan, baik secara individual, kelompok, organisasi. Bagi yang melanggar ketentuan ini, tentu akan mendapatkan atau menerima sanksi hukum terhadap yang dilanggarnya. Seperti salah satu diantara aturan tersebut adalah penanganan ketentuan kelebihan muatan maka bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi hukum. Sehubungan dengan hal tersebut timbul beberapa permasalahan: (1)Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Pengoperasian Jembatan Timbang di Tanjung Balik Kabupaten 50 Kota, (2)Kendala yang ditemui dalam Pengawasan Pengoperasian Jembatan Timbang di Tanjung Bali Kabupaten 50 Kota. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelelitian hukum yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan jawaban bahwa prosedur penimbangan truk masuk ke lorong jembatan timbang kemudian akan di dapat hasil apakah muatan tersebut over dimensi dan di cocokkan dengan surat-surat. Karena menggunakan kemajuan teknologi e-money dan dokumen digital sehingga mempersulit pembukuan administrasi. Berdasarkan hal tersebut disarankan agar pemerintah tetap menyediakan transaksi manual karena tidak semua sopir dan pemilik truk mengerti perkembangan teknologi

Kata Kunci: Pengawasan, Jembatan Timbang, Tanjung Balik Kabupaten 50 Kota

345.08
SAN
p

PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT WOMAN CRISIS CENTER (NURANI PEREMPUAN) PADA TINGKAT PENYIDIKAN

Sandra Putri Setyani, 1610113075, Fakultas Hukum Universitas Andalas

ABSTRAK

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sejak dalam kandungan. Anak wajib dilindungi dari segala bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat karena anak adalah generasi penerus bangsa dan negara.Anak merupakan korban yang rentan mengalami tindak pidana perkosaan. Pemerintah melindungi anak dengan mengeluarkan payung hukum yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan yang diberikan salah satunya adalah rehabilitasi sosial terdapat pada Pasal 69A huruf (b). Akan tetapi anak korban perkosaan seringkali tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Pada Tingkat Penyidikan Oleh Woman Crisis Center. Rumusan masalah dalam penelitian adalah 1) Bagaimana pelaksanaan hak rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perkosaan oleh Woman Crisis Center (Nurani Perempuan), 2) Apa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak rehabilitasi sosial 3) Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak rehabilitasi sosial tersebut.Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Woman Crisis Center (Nurani Perempuan) dalam membela hak-hak perempuan terutama anak korban tindak pidana perkosaan adalah dengan melakukan program kegiatan yaitu kegiatan pencegahan, kegiatan penanganan, dan advokasi atau mendorong lahirnya kebijakan. Salah satunya yaitu pemberian rehabilitasi sosial terhadap korban. Selama proses rehabilitasi sosial , proses rehabilitasi tidak selalu mengikuti alur, hal tersebut tergantung pada kondisi korban. Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial ada beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya tenaga ahli, belum adanya anggaran dana dari pemerintah, serta keluarga korban yang tidak mendukung diberikan perlindungan terhadap korban. Upaya dalam menanggulangi kendala dengan mengupayakan penambahan tenaga ahli, untuk mengatasi kekurangan anggaran, nurani perempuan meminta bantuan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Padang agar mensupport kebutuhan korban. Penulis menyarankan agar Nurani Perempuan lebih banyak melakukan kerjasama dengan berbagai instansi di Sumatera Barat, dan kerjasama dengan berbagai pihak meningkat.

Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Hukum, Anak Korban Perkosaan

346.06
SAU
p

PENGISIAN JABATAN SEKRETARIS DAERAH DI KOTA PADANG MELALUI SELEKSI TERBUKA

Saufa Atika Ulya, 1710111032, Fakultas Hukum Unand, 2021, 66 Halaman

ABSTRAK

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara membawa perubahan terhadap Pengisian Jabatan ASN. Dimana Pengisian Jabatan tersebut dilakukan melalui seleksi terbuka dan transparan melalui sistem Merit. Hal ini dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Khususnya pada Instansi Pemerintahan Kota Padang dalam melakukan Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah melalui Seleksi Terbuka. Permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah 1.) Bagaimana Proses Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah di Kota Padang Melalui Seleksi Terbuka. 2.)Apa Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah di Kota Padang Melalui Seleksi Terbuka. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dimana teknik pegumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses Pengisian Jabatan Sekretaris Daerah di Kota Padang Melalui Seleksi Terbuka melalui tahap Pembentukan Tim Panitia Seleksi (Pansel),pengumuman dan pendaftaran, pelaksanaan seleksi, seleksi administrasi, seleksi psikologi, seleksi kompetensi, wawancara dan FGD, serta hasil akhir. Dimana dari hasil akhir belum ada transparansi dan terbuka,karena yang terjadi dilapangan hasil akhir ditentukan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Walikota, oleh karena itu belum sesuai dengan Sistem Merit dan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Selanjutnya, kendala yang ada, pertama kendala yuridis yaitu proses penseleksian belum sesuai dengan Sistem Merit dan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sedangkan kendala non yuridis yaitu sedikitnya jumlah pelamar karena hanya dibuka untuk Kota Padang saja, padahal dalam Sistem Merit berlaku untuk seluruh ASN yang ada tanpa terkecuali, lalu belum adanya sanksi tegas dari KASN kepada Pemerintah Daerah terhadap belum adanya transparansi dan terbuka hasil akhir,serta izin kepada KASN yang terlalu lama, sehingga jadwal penseleksian menjadi tertunda dan membutuhkan waktu yang lama, padahal agenda nya telah disusun terstruktur oleh Panitia Seleksi. Semoga kedepannya dalam pengisian jabatan adanya transparansi dan tidak ada hambatan dalam proses penseleksian.

Kata Kunci: pengisian jabatan, sistem merit

346.02
SES
p

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN KONTRAK WARALABA PADA DUBA KEBAB CABANG AIR TIRIS RIAU

Sessa Suci Ramadheni, 1710113077, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 64 Halaman, 2021

ABSTRAK

Kontrak berawal dari perbedaan kepentingan di antara para pihak yang saling mengikatkan diri. Dimana para pihak memiliki kedudukan yang sama karena konsep dari pada kontrak adalah setara. Salah satu contoh kontrak bisnis yang saat ini menjadi pilihan pelaku usaha yaitu kontrak waralaba atau disebut juga franchise. Waralaba merupakan peluang bisnis dimana terdapat pihak pemberi waralaba dan penerima waralaba dengan membuat suatu kesepakatan untuk saling mengikatkan diri. Dalam menerapkan sebuah kontrak tentu perlu didasari dengan asas itikad baik mulai dari sebelum terciptanya kontrak sampai berakhirnya kontrak agar tidak terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. Itikad baik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai kemauan yang baik, berkeyakinan, serta kepercayaan. Kontrak yang diteliti dalam penelitian ini adalah kontrak waralaba. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana proses pelaksanaan kontrak waralaba pada Duba Kebab cabang Air Tiris Riau, 2.) Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak waralaba Duba Kebab cabang Air Tiris Riau, dan 3.) Apa akibat hukum dari pelanggaran asas itikad baik pada kontrak waralaba. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris atau disebut juga penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan cara studi dokumen dan wawancara (interview) dengan jenis data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:1.)Pada proses pelaksanan kontrak waralaba terjadi beberapa kesalahpahaman yang mengakibatkan penundaan dalam penandatanganan kontrak serta penundaan pembukaan outlet oleh pihak kedua serta terjadi kesalahan dalam pengiriman bahan baku oleh pihak pertama. 2.) Adanya penerapan asas itikad tidak baik dalam pelaksanaan kontrak waralaba yang terjadi pada saat pihak pertama melakukan wanprestasi terhadap pihak kedua yang mana telah melakukan kelalaian terhadap pengiriman bahan baku kepada pihak kedua. 3.) Akibat hukum dari adanya pelanggaran asas itikad baik ini adalah dapat diberikan sanksi bagi pihak yang melanggar dari pada isi kontrak. Sanksi bisa berupa ganti kerugian, penggantian biaya ataupun bunga. Disini pihak yang dirugikan yaitu pihak kedua tidak meminta ganti kerugian ataupun penggantian biaya kepada pihak pertama akan tetapi pihak kedua hanya meminta pemenuhan kewajiban kepada pihak pertama.

Kata Kunci: Kontrak, Itikad Baik, Waralaba

345
SHE
t

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA SKIMMING YANG DILAKUKAN MELALUI MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) (Studi Kasus Putusan No. 282/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Sherly Rahayu Putri, 1710113008, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 84 halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Tindak pidana cybercrime telah banyak terjadi di Indonesia, yang baru baru ini terjadi adalah tidak pidana skimming yang dilakukan melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN.Mks adalah salah satu contoh kasus tindak pidana skimming yang dilakukan mealui mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana skimming yang dilakukan melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dalam putusan nomor 282/Pid.Sus/2020/PN.Mks ? 2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana skimming yang dilakukan melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dalam putusan nomor 282/Pid.Sus/2020/PN.Mks?. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang- undang. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Dokumen. Dari hasil penelitian, Penerapan Pidana dalam putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN.MKS telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah terbukti dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk memvonis para terdakwa dengan Pasal 30 Ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dasar pertimbangan hakim pada perkara Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN.Mks terdiri dari 2 (dua) yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sanksi pidana nya relatif ringan dibandingkan dengan peraturan yang seharusnya. Dan juga putusan perkara tersebut tidak sesuai dengan teori tujuan pemidanaan dan teori keadilan dalam hukum pidana.

Kata Kunci: Cyber Crime, Putusan Hakim, Skimming

346.08
SIE
p

PELAKSANAAN KLAIM ASURANSI KECELAKAAN KERJA OLEH PTSEMEN PADANG PADA BPJS KETENAGAKERJAAN PADANG

Sielvira Manda, 17101113099, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis (PK II), 60 Halaman – Tahun 2021

ABSTRAK

Pertanggungan Jiwa adalah pernjanjian timbal balik antara penutup asuransi (Tertanggung) dengan penanggung dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan dengan membayar uang premi kepada penanggung. Sedangkan penanggung, sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk penutup asuransi sebagai penikmatnya. Jenis asuransi yang akan dibahas secara lebih lanjut dalam tulisan ini adalah asuransi umum dan asuransi jiwa yang mengandung unsur sejumlah uang sebagai ganti kerugian, khususnya asuransi kecelakaan kerja. Pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan dibutuhkan suatu prosedur atau tata cara dalam proses pengajuan klaim yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. Penelitian ini dilakukan pada PT Semen Padang telah terjadi beberapa kecelakaan kerja yang mana dapat masing-masing kecelakaan tersebut dapat dikategorikan dalam First Aid, ringan dan berat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang artinya jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut ; 1. Bagaimana bentuk pelaksanaan klaim asuransi kecelakaan kerja oleh PT Semen Padang pada BPJS Ketenagakerjaan Padang? 2. Apa kendala yang menyebabkan keterlambatan pembayaran klaim kecelakaan kerja PT Semen Padang yang diajukan pada BPJS Ketenegakerjaan Padang? Adapun hasil penelitian ini yaitu Pelaksanaan klaim asuransi kecelakaan kerja terhadap korban kecelakaan kerja PT Semen Padang pada BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan Sistem pembayaran ganti kerugian (klaim) asuransi yang diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 3 Tahun 1992 sudah cukup baik dalam melakukan pelaporan klaim kasus kecelakaan kerja, dan juga BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan tunjangan apabila korban kecelakaan kerja mengalami cacat yang diakibatkan oleh kecelakaan. Tetapi masih terdapat keterlambatan pembayaran klaim kepada PT Semen Padang yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sendiri. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Asuransi Jiwa, Kecelakaan Kerja, Klaim Asuransi, BPJS Ketenagakerjaan, PT Semen Padang.

345
SIL
d

DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT PASAL 351 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Bukittinggi)

Silvia Octaviani, 1710112111, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 60 halaman, Tahun 2021.

ABSTRAK

Dalam menjatuhkan putusan hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan terhadap suatu perkara, dan dalam penjatuhan putusan tersebut tidak memungkiri hakim untuk menghasilkan putusan yang bersifat disparitas. Disparitas penjatuhan sanksi pidana merupakan adanya perbedaan putusan hakim yang dapat diperbandingkan antara tindak pidana yang memiliki kesamaan termasuk tingkat bahaya yang dihasilkan. Dimana adanya disparitas pidana dapat membawa dampak yang menjadikan masyarakat kekurangan kepercayaan kepada penegak hukum serta kurang menghargai hukum. Disparitas pidana salah satunya terjadi pada perkara tindak pidana penganiayaan. Adapun rumusan masalah yang di bahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Mengapa dapat terjadi disparitas penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana penganiayaan?. 2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh hakim untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana pada tindak pidana penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana?. Jenis penelitian yang digunakan yaitu peneltian yuridis empiris yaitu dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Bukittinggi terdapat beberapa faktor yang menyebabkan disparitas pidana tersebut seperti faktor yang berasal dari hukum atau undang-undang itu sendiri, faktor kebebasan hakim, faktor internal yang berasal dari diri hakim, faktor eksternal yaitu berasal dari diri pelaku, serta faktor hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pelaku. Adapun upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut dapat berupa merumuskan substansi hukum yang tepat, mempertimbangkan pedoman pemidanaan, melihat kembali kepada yurisprudensi yang ada sehingga lebih dapat memperbandingkan mengenai penanganan perkara yang sejenis, serta meningkatkan fungsi hakim itu sendiri.

Kata Kunci: Disparitas, Putusan Hakim, Penganiayaan

344.09
SIT
k

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM PEWARISAN DALAM MASYARAKAT ADAT DI KECAMATAN RENAH MENDALUH JAMBI

Siti Rahmah, 1610111124, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata Adat Dan Islam (PK III), 60 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan berdasarkan hukum waris di Indonesia diatur berbeda berdasarkan hukum adat, hukum islam, dan hukum perdata sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan anak angkat di ketiga sistem hukum tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Renah Mendaluh Jambi, dan memakai metode penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data yang diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan pemungka adat, masyarakat, dan orang-orang yang terlibat dalam pengangkatan anak di Kecamatan Renah Mendaluh Jambi. Alasan seseorang untuk mengangkat anak adalah karena suami istri telah lama menikah tetapi belum memiliki anak, maka diangkatlah anak untuk merawat mereka di hari tua. Dalam hukum adat ada dua macam pengangkatan anak yaitu pertama pengangkatan anak secara terang dan tunai, kedua pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai. Pengangkatan anak juga diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, Kompilasi Hukum Islam, Undang- Undang nomor 1 tahun1974 tentang perkawinan. Dari penelitian kelapangan yang saya lakukan terhadap 4 sampel dari dua desa di Kecamatan Renah Mendaluh didapatkan 4 kasus anak angkat yaitu Ernawati, Ade, Hardiman, dan Resti. Alasan orang tua tersebut mengangkat anak karena telah lama menikah dan belum memiliki keturunan maka mengambil anak angkat untuk menjaga mereka di hari tua dan ada pula anak yang diangkat berasal dari keluarga kurang mampu. Hak mewaris dan bagiannya ditentukan oleh orang tua atau keluarga angkatnya. Pengangkatan anak pada masyarakat Kecamatan Renah Mendaluh, ketentuan adatnya mengatur bahwa apabila pasangan suami istri yang akan melakukan pengangkatan anak mengakibatkan perpindahan tanggung jawab mengenai hak dan kewajiban anak angkat dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Dalam hal ini tentunya hanya berlaku untuk pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai. Pewaris anak angkat di dua desa ini adalah apabila anak angkatnya tidak mempunyai saudara angkat atau tunggal menurut adat di dua desa ini anak angkat dianggap seperti kedudukan anak kandung, dalam hal ini anak angkat berhak mewarisi ½ setengah dari harta orang tua angkatnya, akan tetapi apabila anak angkat mempunyai saudara angkat dia tidak berhak menguasai harta waris orang tua angkatnya dalam hal seperti ini tetap mengacu kepada adat Jambi seumunya.

Kata Kunci : Anak Angkat, Waris Adat, Waris Islam

344.03
STE
p

PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA PLASTIK PADA PUSAT PERBELANJAAN SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA PADANG

Steffi Zafia Furqan, 1710111065, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 74 Halaman, Tahun 2020

ABSTRAK

Salah satu cita-cita pendiri bangsa yaitu mewujudkan kesejahteran (rakyat) yang tertuang dalam alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikemukakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini tidak terkecuali ditujukan kepada masyarakat khususnya pengunjung pusat perbelanjaan dalam hal penggunaan kantong belanja plastik yang semakin banyak digunakan di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Padang. Bentuk kepedulian Pemerintah Kota Padang yaitu dikeluarkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah Pertama, Bagaimana bentuk kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam mengendalikan pencemaran lingkungan melalui pembatasan penggunaan kantong belanja plastik pada pusat perbelanjaan di Kota Padang. Kedua, Bagaimana kesadaran hukum masyarakat dalam memenuhi kebijakan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik pada pusat perbelanjaan di Kota Padang. Ketiga, Bagaimana Efektivitas pembatasan penggunaan kantong belanja plastik dalam mengendalikan pencemaran lingkungan di Kota Padang. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan kebijakan pemerintahan yang dikaitkan dengan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik pada pusat perbelanjaan di Kota Padang. Typologi penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang membandingkan fakta di lapangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan ada beberapa kebijakan Pemerintah Kota Padang yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 yaitu pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan kantong plastik, penerapan kantong belanja tidak gratis, dan pelaku usaha melakukan strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada konsumen, namun hal itu belum maksimal teralisasikan. Kesadaran hukum masyarakat masih kurang dalam memenuhi kebijakan tersebut, karena Perwako tersebut tidak mengenakan sanksi di dalamnya padahal setiap peraturan berdasarkan hukum administrasi diakhiri “Incauda Venenum”. Kebijakan pembatasan penggunaan kantong belanja plastik masih belum efektif dalam mengendalikan pencemaran lingkungan karena masyarakat masih bergantung dalam menggunakan kantong belanja plastik.

Kata Kunci : Kebijakan, Kantong Plastik, Pencemaran Lingkungan

346
SUL
p

PENGAWASAN PEREDARAN SATWA LIAR DILINDUNGI OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) SUMATERA BARAT

Sultan Haziqa, 1710112143, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 70 halaman, 2021

ABSTRAK

Balai Konsevasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memiliki salah satu fungsi yakni melakukan pengawasan peredaran satwa liar, khususnya satwa liar dilindungi. Pelaksanaan pengawasan peredaran satwa liar dilindungi oleh BKSDA Sumatera Barat bertujuan untuk melindungi satwa liar yang dilindungi dari bahaya kepunahan serta mencegah adanya perniagaan satwa yang dilindungi. Namun demikian pelaksanaan fungsi tersebut belum berjalan dengan baik melihat dari data pengamatan sementara menunjukan bahwa masih banyak terjadi perniagaan satwa liar yang dilindungi. Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pengawasan Peredaran Satwa Liar Dilindungi Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat. Selanjutnya skripsi ini akan mengkaji dua masalah yaitu: 1) Bagaimana pengawasan peredaran satwa liar dilindungi oleh BKSDA Sumatera Barat?; 2) Bagaimana tindak lanjut dari pengawasan peredaran satwa liar dilindungi oleh BKSDA Sumatera Barat? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode wawancara dan studi dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dibutuhkan berupa data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian adalah Kantor BKSDA Sumatera Barat dan Resort Konservasi Wilayah Padang. Ketentuan hukum tentang kewewangan pengawasan BKSDA Sumatera Barat diatur dalam Permen LHK Nomor: P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016. Pengawasan peredaran satwa liar dilindungi yang dilakukan oleh BKSDA Sumatera Barat terdiri dari tiga langkah yakni langkah pre-emtif, preventif dan represif. Faktor penghambat BKSDA Sumatera Barat dalam melakukan fungsi dan tugasnya yakni seperti kurangnya personil, kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta wilayah kerja yang sangat luas. Tindak lanjut dari pengawasan peredaran satwa dilindungi oleh BKSDA Sumatera Barat adalah dengan penindakan terhadap perniagaan satwa liar yang dilindungi. Penanganan perniagaan satwa liar yang dilindungi oleh BKSDA merupakan tugas dari PPNS BKSDA. Tugas PPNS adalah sebagai penyidik, yaitu melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kata Kunci: Pengawasan, Satwa liar dilindungi, BKSDA

344.09
SYA
a

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1091/PID.SUS/2018/PN.KIS TENTANG PENODAAN AGAMA MELALUI MEDIA SOSIAL

Syafinaz Salsabilla Diandra, 1710111077, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 75 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Tindak pidana penodaan terhadap agama banyak terjadi di Indonesia. Salah satunya kasus penodaan agama yang terjadi di Kabupaten Asahan yang dilakukan di media sosial. Putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN.KIS adalah salah satu contoh tindak pidana penodaan terhadap agama yang dilakukan di media sosial. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penodaan agama di media sosial pada putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN.KIS? 2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penodaan terhadap agama melalui media sosial dalam putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2019/PN.KIS?. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Dokumen. Dari hasil penelitian, Penerapan Pidana dalam putusan Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN.KIS telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah terbukti dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk memvonis Terdakwa dengan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dasar pertimbangan hakim pada perkara Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN.KIS terdiri dari 2 (dua) yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum yang sanksi pidananya relatif lebih ringan dibandingkan dengan peraturan yang seharusnya. Dan juga putusan tersebut tidak mencapai keadilan karena ada beberapa hal yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Kata Kunci : Penodaan Agama, Penodaan, Putusan Hakim, Media Sosial

344.06
SYI
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN PADA USAHA PERHOTELAN DAN USAHA RETAIL DI KOTA PADANG

Syifa Putri Ruiza, 1710112135, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 87 Halaman, 2020

ABSTRAK

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian dari usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia yang diarahkan pada tujuan meningkatkan harkat, martabat, dan kesempatan manusia. Pada Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945 dijelaskan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", sebagaimana Negara Indonesia melindungi dan menjamin setiap hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satunya dengan memberikan perlindungan terhadap pekerja atau buruh yang bertujuan untuk menjamin hak-hak pekerja/buruh, menjamin kesamaan dalam kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pekerja perempuan salah satunya, yang harus mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya dengan cara bekerja tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kerja yang diberikan Perusahaan kepada Pekerja Perempuan di Kota Padang. 2) Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum yang diberikan Perusahaan kepada Pekerja Perempuan di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang membandingkan fakta di lapangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil yakni: 1) Bentuk Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kerja yang diberikan Perusahaan yaitu adanya pembagian waktu atau shift kerja, pemberian cuti pada hak maternitas dan adanya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. 2) Pelaksanaan perlindungan hukum yang terjadi dilapangan secara garis besar sudah berjalan namun belum sepenuhnya mengikuti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti tidak adanya fasilitas angkutan antar jemput bagi pekerja perempuan yang bekerja antara Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 05.00 di Pangeran Beach Hotel Padang dan adanya pengurangan pada uang service di Pangeran Beach Hotel Padang dan Ramayana Plaza Andalas Padang apabila mengambil cuti haid/menstruasi. Hal yang menyebabkan belum terlaksana dengan baik perlindungan hukum tersebut karena adanya beberapa faktor penghambat yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Perempuan, Perjanjian Kerja

348.3
SHI
h

HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Shifa Isfahani, 1710112076, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 65 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Seiring berjalannya waktu sistem pemerintahan Indonesia yang sebelumnya pada masa orde lama dan baru tidak memperhatikan asas desentralisasi. Saat ini mulai menunjukkan perubahan dengan penerapan desentralisasi namun dalam perkembangannya dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni harmonisasi dan sinkronisasi rancangan perda oleh Kepala daerah yang sebelumnya menjadi kewenangan biro hukum pemerintahan daerah dialihkan pada instansi vertikal yakni kemenkumham. Adapun yang menjadi perumusan masalah, Pertama, bagaimana bentuk harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan? Kedua, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan pada harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan? Pertama, Perda merupakan produk hukum yang unik yang dihasilkan oleh masing-masing daerah yang bertujuan untuk memajukan daerah otonomnya. Namun dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi oleh instansi vertikal tentu membentuk pola sehingga terbentuklah perda yang seragam yang hal itu dapat mematikan kreativitas pemerintahan daerah dalam usaha menyejahterakan masyarakatnya serta mengurangi kemandirian pemerintahan daerah. Kedua, Adapun kelebihan penerapan harmonisasi dan sinkronisasi dilakukan oleh instansi vertikal tentu memperkuat sistem pengawasan karena pengawasan bukan dilakukan langsung oleh instansi yang sama dalam pembentukan peraturan daerah tersebut. Namun kekurangannya yakni pengharmonisasian dan sinkronisasi yang dilakukan pada instansi vertikal dalam hal ini membentuk suatu pola dan tentunya akan menyeragamkan antar perda-perda dan tentunya hal ini dapat mematikan kreativitas dan kemandirian pemerintahan daerah itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif. Dalam pelaksanaannya belum ada aturan pelaksana dengan adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan tentu hal ini menimbulkan kekosongan hukum.

343.04
SUH
k

KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK TURUN WARIS ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN DI KOTA PADANG

Suhartatik, 1820123022, Program Studi Magister Kenotariatan, FakultasHukumUniversitas Andalas,96 hlm,2020

ABSTRAK

Warisan atas tanah dan atau bangunan merupakan tambahan penghasilan bagi ahli waris namun dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan.Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 yaitu yang menjadi subjek pajak adalah warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak dan padaPasal 4 ayat (3) huruf b, bahwa yang tidak termasuk objek pajak adalah warisan Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor20/PJ/2015, tentang Pemberian Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan karena warisan .dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2009, tentang tata cara Pemberian Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran atau Pemugutan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan yang mensyaratkan untuk keluarnya Surat Keterangan Bebas Pajak PenghasilanWaris (SKB PPhWaris) memberikan syarat-syarat yang diminta untuk mendapatkan SKB PPh Waris. Tapi setelah syarat untuk mendapatkan SKB PPh waris dimohonkan oleh ahli waris pada KPP pratama tetap sajaujung-ujungnya penolakan SKB PPhWarisoleh KPP Pratama dengan berbagai alas an mulai dari pewaris tidak ada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai bahwa objek waris tidak terdaftar di KPP Pratama. Terlihat tidak adanya kepastian hokum dan tidak adan ya kemanfaatan bagi wajib pajak untuk mengurus SKB PPh waris karena ujung-ujungnya hanyalah penolakan dan diharuskan membayar pajak untuk turun waris.Penelitian ini memakai metode penelitian empiris dengan melihat peraturan yang ada untuk mendapatkan SKB PPh waris dan normative dengan melihat apa yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Bahwa kedudukan ahli waris dalam pemungutan pajak peralihan hak atas tanah, baik pajak BPHTB ataupun Pajak Penghasilan (PPH) waris untuk pajak tidak bias disebut sebagai subjek pajak karena objek yang diwariskan tersebut belum mendapatkan keuntungan bagi ahli waris, dana hli waris pun merasa keberatan dengan adanya 2 pajak untuk turun waris iniyang disyaratkan oleh KPP Pratama apabila ingin mendapatkan SKB PPh Waris, Pewaris sudah punya NPWP, objek yang diwariskan sudah terdaftar di KPP Pratama, pewaris adalah ahli waris yang masih sedarah/satu garis lurus, ada surat dari pemerintah setempat bahwa ahli waris mempunyai pendapatan dibawah nilai Pendapatan Tidak Kena Pajak.

Kata kunci :SKB PPh Waris, Syarat SKB PPh waris, KPP Pratama

344.09
TAT
p

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DI SUMATERA BARAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI (STUDI KENAGARIAN PAUH V KECAMATAN PAUH KOTA PADANG)

Tata Bella Nadya Rise, 1710111098, Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 81 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum dimana Indonesia menggabungkan beberapa sistem hukum dalam konstitusinya. Jauh sebelum penerapan hukum kolonial di Indonesia, nenek moyang bangsa Indonesia sudah menganut sistem hukum tersendiri. Masyarakat hukum adat dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diakui dan dijamin dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Namun terjadi perubahan dalam pemerintahan Nagari yang disebabkan oleh kebijakan dan intervensi pemerintah untuk mengatur sistem pemerintahan desa secara seragam yang dituangkan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Desa. Hal ini mengakibatkan hilangnya bentuk asli pemerintahan otonom di setiap daerah. Pemerintah Daerah Sumatera Barat sendiri berupaya untuk memadukan unsur adat dan birokrasi modern dalam satu lembaga formal yaitu Pemerintahan Nagari. Perpaduan dua konsep ini akhirnya menjadi salah satu sumber konflik. Masalahnya kombinasi kedua elemen ini tidak mudah dilaksanakan. Maka dari itu rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu yang pertama, bagaimana peraturan tentang lembaga adat menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 tentang Nagari. Kedua, bagaimana peranan Lembaga Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari di Kenagarian Pauh V Kecamatan Pauh Kota Padang. Untuk menjawab permasalahan diatas penulis melakukan penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif- Empirs. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah produk perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti serta penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat Hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 sudah mengatur tentang peran lembaga adat. Kedua, berdasarkan hasil penelitian di Kenagarian Pauh V pemberlakuan peraturan ini justru tidak terlaksana dan berjalan dengan baik, tetapi bukan berarti peran dari lembaga adat tidak ada. Peran lembaga adat di Kenagarian Pauh V terlihat dari adanya koordinasi dalam menjalankan roda pemerintahan oleh lembaga adat dengan pemerintah setempat, adanya peran Kerapatan Adat Nagari dalam mediasi sengketa, tetap dilaksanakannya upacara adat, kegiatan adat dan hal-hal yang menyangkut kebiasaan lainnya.

Kata Kunci : Nagari, Kerapatan Adat Nagari, hukum adat, peraturan daerah.

346
THA
p

PENERTIBAN PENDIRIAN BANGUNAN DI SEPANJANG AREA SEMPADAN SUNGAI IRIGASI GUNUNG NAGO KECAMATAN PAUH KOTA PADANG

Thariq Al Fayen, 1610111014, Hukum Admnistrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 77 Halaman, 2021

ABSTRAK

Berdasarkan Lampiran VI Matriks Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pemanfaatan Ruang Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030, melarang beberapa kegiatan diantaranya: semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang, seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai, didalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan; menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul. Namun, fakta dilapangan ditemukan sejumlah bangunan yang berdiri diatas area sempadan sungai tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalah yang akan diteliti adalah: 1) Bagaimana penertiban pendirian bangunan di sepanjang area sempadan Sungai Irigasi Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang? 2) Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani permasalahan penertiban pendirian bangunan yang bediri di area sempadan Sungai Irigasi Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang? Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa : Pertama, penertiban bangunan di area Sempadan Sungai Gunung Nago, Kecamatan Pauh, Kota Padang seperti yang diatur dalam Keputusan Wali Kota Padang Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Penertiban Di Kota Padang masih belum dilakukan secara maksimal dan belum ditanggapi secara serius oleh Pemerintah Kota Padang. Kedua, Upaya pemerintah terhadap permasalah ini adalah dengan melaksanakan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dengan mengadakan sosialisasi dan pengawasan bersama pihak Kecamatan, dan upaya represif dengan mengadakan pembongkaran terhadap bangunan

345
THO
t

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/Pn Pdg)

Thossy Citra Sukirwan, 1710112016, 71Halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana, 2021

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu segala sesuatu yang menyangkut dengan hubungan dan aktivitas manusia ditengah-tengah masyarakat diatur oleh suatu aturan hukum dalam menentukan kewajiban sebagai subjek hukum. Hukum merupakan tiang utama dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat maka dari itu Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kedamaian, ketentraman dan ketertiban kepada setiap warga negara. Namun pada nyatanya akan ada saja dijumpai peristiwa-peristiwa kejahatan yang menjadi penyebab terganggunya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Seperti pada perkara tindak pidana yang menyebabkan matinya orang pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg) Pada kasus ini terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan 351 ayat (3) KUHP. Dengan tuntutan pidana penjara selama 7 tahun penjara. Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Rumusan masalah penelitiannya 1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang. 2. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan teknik pengumpulan data melalui bahan hukum dalam penelitian (penelitian kepustakaan) dan putusan Pengadilan Negeri Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg). serta bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan hukum sekunder yang diperoleh, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah tepat dan benar yaitu terbukti melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kata kunci: Tindak Pidana Penganiayaan, Penganiayaan Yang Menyebabkan Mati, Pembelaan Terpaksa

345
TIF
p

PERANAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS KREDITUR DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMBAR

Tifany Dwi Aprima, 1710113020, PK IV (Hukum Pidana), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 73 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Dalam Pasal 6 ditentukan bahwa penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia dam Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan proses penyidikan yang berguna untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana termasuk melakukan kegiatan penyidikan dalam tindak pidana terkait pengalihan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia. Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan suatu tindak pidana yang telah diatur didalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah peranan penyidik dalam menangani tindak pidana dalam jaminan fidusia terkait pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur dan kendala dalam upaya penanganan kasus tindak pidana jaminan fidusia terkait pengalihan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) dengan mengumpulkan jenis dan sumber data seperti data primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan juga literatur-literatur dan juga pendapat-pendapat sarjana hukum yang berhubungan. Dalam teknik pengumpulan data digunakan antara lain studi dokumen dan wawancara. Selanjutnya dianalisis dengan metode pengolahan data dengan menggunaka metode editting dan dianalisis dengan cara kualitatif yakni menghubungkan permasalahan yang telah dikemukakan dengan teori yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam proses penyidikan, memiliki peran dalam hal menerima laporan polisi, memeriksa alat bukti seperti dokumen pembiayaan dan meminta akta jaminan fidusia pada yang dikeluarkan oleh Kemenkum dan HAM. Kendala yang dihadapi penyidik pada tindak pidana jaminan fidusia terkait pengalihan objek jaminan fidusia yaitu adanya seperti tersangka tidak ada ditempat, melarikan diri, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap ataupun identitasnya tidak jelas dan objek jaminan yang belum ditemukan.

Kata Kunci: Penyidik, Kendaraan Bermotor, Jaminan Fidusia

344.09
TRI
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTEFAK TAMBO ADAT MINANGKABAU BERDASARKAN DEKLARASI PBB TENTANG HAK MASYARAKAT ADAT (UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHT OF INDIGENOUS PEOPLES) DAN KENDALA PENERAPANNYA DI INDONESIA

Tris maitanto, 1510112066, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VI (Hukum Internasional) 44 Halaman,Tahun 2021

ABSTRAK

Tahun 1596 pertama kalinya masuk Belanda ke Nusantara. Lamanya penjajahan belanda adalah 350 tahun. Penjajahan ke Indonesia menyebabkan banyaknya dampak yang tertinggal hingga saat sekarang terutama pada benda-benda peninggalan sejarah (artefak kuno), dan dampak tersebut masih dirasakan oleh masyarakat adat Minangkabau sampai saat ini. Karna tambo adat Minangkabau dibawa oleh penjajah saat mereka pergi dari Indonesia. Tambo adat Minangkabau dijadikan sebagai pedoman kehidupan bagi masyarakat adat Minangkabau hingga saat ini. Hal tersebut bertentangan dengan deklarasi PBB yang ke- 61 yaitu tentang perlindungan hak masyarakat adat dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 pasal 13 ayat (2) tentang hak cipta. Permasalahan yang akan diteliti mengenai perlindungan artefak Tambo adat Minangkabau berdasarkan united nation declaration on the right of indigenous peoples dan kendala penerepannya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dikethaui bahwa pengaturan artefak Tambo adat miangkabau berdasarkan united nations on the right of indigenous peoples, Pemerintah dunia melindungi dan menjamin masyarakat hukum adat termasuk sejarah, Bahasa, tradisilisan, system tulisan, filsafat, dan literature yasng dimilki olehh masyarakat hukum adat. Kendala penerapan aturan ini di Indonesia yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat adat Minangkabau akan perlindungan tambo adat Minangkabau, serta tidak adanya edukasi dan perhatian dari pemerintah akan perlindungan tambo adat Mianagkabau.

Kata kunci : Hak Masyarakat Adat, United Nations declaration On The Right Of Indigenous Peoples

345
TRY
p

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA PROSES PENYIDIKAN WILAYAH POLRESTA PADANG

Trya Rizki Fauzi, 1710111028, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, 87 Halaman

ABSTRAK

Perlindungan terhadap perempuan penyandang disabilitas suatu tindak pidana sangat diperlukan, karena belum optimalnya pemahaman masyarakat pada peraturan terkait dengan disabilitas sehingga masih banyak menimbulkan kekerasan seksual di masyarakat, salah satunya korban pemerkosaan. Beberapa hak penyandang disabilitas yang tidak terlindungi pada proses penyidikan terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu pada huruf c (memberikan keterangan tanpa tekanan) dan huruf d (mendapat penerjemah). Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga terdapat hak-hak penyandang disabilitas yang tidak terlindungi, yakni huruf b (bebas dari stigma), huruf d (keadilan dan perlindungan hukum), huruf m (aksebilitas) dan huruf v (bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi). Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana, Pasal 3 mengenai prinsip penyelenggaraan pelayanan saksi dan/ atau korban pada point e, f, g dan k masih belum terpenuhi hak-hak perempuan penyandang disabilitas sebagai korban perkosaan pada proses penyidikan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas korban pemerkosaan pada proses penyidikan wilyah Polresta Padang serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan pelaksanaannya. Penelitian hukum ini bersifat empiris yang dilakukan dengan wawancara langsung dan di analisa dengan menghubungkan peraturan perundang- undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Hasil dari penelitian ni menjelaskan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas korban pemerkosaan pada proses penyidikan di wilayah Polresta Padang, Unit PPA berlandaskan pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga WCC dalam memberikan pendampingan memiliki peran dalam proses advokasi terhadap penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan. Sedangkan Lembaga HWDI dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban tindak pidana perkosaan, tidak hanya berlandaskan pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi juga mengacu pada Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Dalam pelaksanaan perlindungan terdapat kendala atau hambatan yang berbeda-beda, adanya hambatan menurut Unit PPA, Lembaga WCC dan Lembaga HWDI.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan Disabilitas, Tindak Pidana Perkosaan

344.04
ULF
p

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) AROSUKA

Ulfie Febriningsih, 1710112015, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hukum Administrasi Negara, 83 halaman, Tahun **2021**

ABSTRAK

Kebutuhan masyarakat semakin meningkat terhadap pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Arosuka yang memberikan pelayanan Kesehatan pada pasien pengguna BPJS Kesehatan, RSUD Arosuka meningkatkan pelayanan kesehatan pada pasien pengguna BPJS Kesehatan dengan mempermudah alur pengurusan persyaratan pasien BPJS Kesehatan, pembagian tugas perawat dalam perawatan kepada pasien, melengkapi sarana dan prasarana rawat inap BPJS Kesehatan. Akan tetapi upaya tersebut belum dapat mengurangi persepsi pasien terhadap kualitas pelayanan pasien pengguna BPJS Kesehatan di RSUD Arosuka. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana pelayanan kesehatan terhadap pasien pengguna BPJS Kesehatan di RSUD Arosuka? Apa faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arosuka? Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer yaitu Penilitian dilakukan di RSUD Arosuka dan dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pelayanan Kesehatan dapat dikatakan belum sepenuhnya terpenuhi, hal ini berdasarkan pada ketepatan waktu pelayanan, proses pelayanan kesehatan penggunaan sistem komputerisasi masih rendah, dalam hal menetapkan persyaratan administrasi masih terlalu kaku tetapi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Bahwa dalam proses pemenuhan hak pelayanan peserta BPJS Kesehatan di RSUD Arosuka terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat terpenuhinya hak pelayanan peserta BPJS Kesehatan di RSUD Arosuka, faktor pendukung diantaranya: Sikap kooperatif dari peserta BPJS Kesehatan di RSUD Arosuka terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Adapun faktor penghambatnya yaitu : prosedur dan mekanisme pemenuhan hak pelayanan yang kurang diketaui oleh peserta BPJS Kesehatan, Faktor Kebiasaan Masyarakat, faktor kurangnya kesadaran Peserta BPJS Kesehatan dalam memberikan laporan terkait keluhan pelayanan yang diterima, faktor internal di RSUD Arosuka, Faktor Eksternal di RSUD Arosuka.

Kata kunci: Pelayanan kesehatan, BPJS

345.02
VAN
p

PELAKSANAAN PENYIDIKAN KASUS DUGAAN KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN RSUD dr RASIDIN PADANG OLEH POLRESTA PADANG

Vania Amanda, 1710113085, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 61 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Masalah korupsi adalah masalah yang besar yang sedang dihadapi negara saat ini. Korupsi merupakan suatu penyakit dalam masyarakat dan merupakan suatu hal yang dapat menghambat jalannya pembangunan di negara kita saat ini. Oleh karena itu, korupsi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diberantas. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sebagian besar berasal dari pengadaan barang dan jasa. Dari 468 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, 50 persen atau sedikitnya 224 kasus berasal dari pengadaan barang dan jasa. Selebihnya merupakan kesalahan dalam menggunakan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan RSUD dr Rasidin Padang Oleh Polresta Padang. Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Kota Padang. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Salah satu kasus korupsi yang ditangani oleh Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Padang yaitu Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran pada RSUD dr Rasidin Padang TA 2013. Adapun kasus Posisi perkara tersebut adalah pada tahun 2013, RSUD dr. Rasidin Kota Padang dengan dirut dr. AS mendapat dana dari APBN berupa dana tugas pembantuan dari Ditjen Bina Upaya Kesehatan tahun 2013 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat penyimpangan-penyimpangan mulai dari tahap perencanaan (lelang/tender), persiapan pengadaan, pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak, serta pembayaran hasil pekerjaan yang mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 5 Milyar berdasarkan hasil audit dari BPK RI. Dalam melaksanakan proses penyidikan dalam mengungkap kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD dr Rasidin Padang, penyidik kepolisian Polresta Padang mengalami beberapa kendala, yaitu: Saksi yang berdomisili di uar Provinsi Sumatera Barat, Waktu penyidikan yang dibutuhkan bertambah, Biaya penyidikan bertambah. Upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menghadapi kendala dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan RSUD dr Rasidin Padang adalah Berkoordinasi dengan Tim Koordinasi, Supervisi dan Penindakan KPK Republik Indonesia.

Kata kunci : Pengadaan Barang dan Jasa

343.09
VAN
p

PENGAWASAN TERHADAP PENANGGULANGAN PENCEMARAN UDARA AKIBAT LIMBAH ASAP PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) OMBILIN OLEH PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

Vanya Nofera, 1710111035, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 Halaman, 2020

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pengawasan terhadap penanggulangan termasuk ke dalam pengendalian pencemaran udara yang diatur dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 41 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu Pasal 44, 45, dan Pasal 46 yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap pengendalian pencemaran udara dilaksanakan oleh Menteri yang kemudian dapat menetapkan pejabat yang berwenang dalam melakukan pengawasan. Permasalah ini terjadi di Kota Sawahlunto tepatnya di Desa Sijantang pencemaran udara terjadi akibat kebocoran filter cerobong asap dari PLTU Ombilin. Atas dasar itu penelitian ini dilakukan untuk mengemukakan permasalah Pertama bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Sawahlunto terhadap pengendalian pencemaran udara tersebut. Kedua apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Sawahlunto dalam melakukan pengawasan tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris dengan meneliti bahan kepustakaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan wawancara. Kemudian, data yang didapat dianalisis scara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian bahwa pengawasan telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto yaitu berupa pengawasan langsung dan tidak langsung secara rutin, kemudian juga melakukan pembinaan terhadap PLTU Ombilin. Pengawasan langsung dilakukan secara periodik dan dadakan, sementara pengawasan tidak langsung merupakan pelaporan dokumen oleh PLTU Ombilin kepada Dinas terkait. Kendala yang dihadapi yaitu kewenangan yang tidak sepenuhnya ada di pemerintah kota, kemudian kurangnya personil pengawas dan kurangnya kesadaran hukum dari pihak PLTU, serta masyarakat yang kurang memahami dan menyadari langkah hukum yang harus ditempuh.

Kata Kunci : Pengawasan Penanggulangan, Pencemaran Udara

343.09
VEL
p

PELAKSANAAN TUGAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR SUNGAI DI PERBATASAN BENGKONG SADAI DAN BENGKONG LAUT

Vellya Nadya Putri, 1710111021, Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 74 Halaman, 2021

ABSTRAK

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sering terjadinya pencemaran air menimbulkan dampak negatif pada manusia ataupun lingkungan hidup. Pencemaran air sungai yang terjadi di Perbatasan Bengkong Sadai dan Bengkong Laut sudah sangat memprihatinkan. Pencemaran air ini terjadi di sekitar aliran air sungai yang terletak di dekat Kantor Camat Kecamatan Bengkong. Pencemaran air ini terjadi akibat adanya limbah rumah tangga dan limbah industri yang dibuang kedalam aliran air sungai tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan penulis yaitu pertama, bagaimana pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam penanggulangan pencemaran air sungai di perbatasan Bengkong Sadai dan Bengkong Laut. Kedua, apa yang menjadi hambatan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam penanggulangan pencemaran air sungai di perbatasan Bengkong Sadai dan Bengkong Laut. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode empiris yang berdasarkan kepada penelitian dilapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis serta dengan Teknik wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam belum maksimal dalam menjalankan tugasnya untuk menanggulangi pencemaran air sungai di perbatasan Bengkong Sadai dan Bengkong Laut. Terdapatnya hambatan berupa reklamasi di bantaran sungai, tidak terkonsentrasinya penataan rumah dibantaran sungai, dan minimnya Pendidikan masyarakat dibantaran sungai. Adapun upaya yang dapat dilakukan di daerah pencemaran air adalah edukasi dan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat dan selalu memberi peringatan kepada masyarakat di bantaran sungai.

Kata Kunci: Dinas Lingkungan Hidup, Pencemaran air, tugas dan Wewenang.

342
VIK
a

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Vikkania Rahmi Andika Putri, 1710113026, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, 84 halaman

ABSTRAK

Adanya tarik ulur kewenangan Gubernur dalam sistem pemerintahan daerah antara pemerintah pusat dan daerah di bawah tiga undang-undang pemerintahan daerah pasca reformasi yang pernah berlaku. Yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tulisan ini membahas dua rumusan masalah, pertama, bagaimana kewenangan Gubernur sebagai kepala daerah otonom dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? Kedua, bagaimana kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? Untuk membahas permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pengumpulan data studi dokumen. Dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan didapat hasil sebagai berikut: Pertama, berkaitan dengan kewenangan Gubernur sebagai kepala daerah otonom yaitu terdiri dari urusan konkuren sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan ini merupakan konkretisasi dari fungsi desentralisasi yang dimiliki oleh Gubernur. Selanjutnya, sebagaimana terdapat pada Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang Kepala Daerah: (1) Mengajukan rancangan peraturan daerah; (2) Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD; (3) Menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah; (4) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat; (5) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat pada Pasal 91 Ayat (3). Sebagai wakil Pemerintah Pusat, tugas dan wewenang Gubernur diperkuat melalui Peraturan Pemerintah. Penguatan tugas dan wewenang Gubernur sebagai kepala daerah sekaligus wakil Pemerintah Pusat di wilayah provinsi juga dimaksudkan memperkuat hubungan antar tingkatan pemerintahan. Dalam pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, hubungan antara Gubernur dengan Bupati/Wali Kota bersifat bertingkat, dimana Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

346.08
VIL
p

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK KORBAN PENCURIAN DATA KARTU KREDIT (CARDING) SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA DUNIA MAYA (CYBER CRIME)

Vilda Pritipal, 1710113113, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 72 halaman, 2020

ABSTRAK

Carding (pencurian data kartu kredit) merupakan salah satu bentuk dari cyber crime (tindak pidana dunia maya) yang merupakan pelanggaran dari Pasal 30 ayat (2) dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakikat carding seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang merugikan nasabah bank sebagai korban dan harus memperoleh ganti kerugian. Sebagai contoh kasus, yakni nasabah yang menjadi korban carding masih ada yang tidak memperoleh ganti kerugian. Dalam penelitian ini rumusan masalah sehubungan dengan perlindungan hukum nasabah bank korban carding adalah 1)Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum nasabah bank korban carding sebagai bentuk cyber crime, 2) Bagaimanakah pengaturan hukum pemberian ganti kerugian bagi nasabah bank korban carding sebagai bentuk cyber crime. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: 1) Bentuk perlindungan hukum yang diperoleh nasabah bank korban carding dapat diberikan sebelum terjadinya tindak pidana dan sesudah terjadinya tindak pidana 2) Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank korban carding yang berhak untuk memperoleh ganti kerugian diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP berupa mekanisme penggabungan ganti kerugian. Diharapkan untuk adanya upaya penanggulangan terhadap carding yang sifatnya preventif sehingga masyarakat mengetahui keberadaan dan dampak dari carding sebagai bentuk cyber crime dan aparat penegak hukum hendaknya dapat bertindak lebih aktif dalam menerima laporan masyarakat serta perlu adanya fasilitas yang memadai dalam pencarian alat bukti, dengan peralatan yang memadai maka akan lebih mudah dalam penyidikan dan bisa mengurangi carding dengan menerapkan upaya penanggulangan yang bersifat represif.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Tindak Pidana Dunia Maya, Pencurian Data Kartu Kredit.

346.08
VIN
a

AKIBAT HUKUM PENGALIHAN (OVER) KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) DENGAN OBJEK HAK TANGGUNGGAN PADA PT. BANKRAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG DHARMASRAYA

Vina Adelia, NIM 1720123026, Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 2021,122 halaman

ABSTRAK

Rumah merupakan kebutuhan pokok bagi banyak orang. Beberapa bank di Indonesia menyediakan fasilitas KPR dengan bunga rendah. Ini membuat banyak masyarakat kalangan menengah bawah tertarik untuk menggunakan KPR untuk pembelian rumah. Namun, pada praktek dilapangan banyak ditemukan kasus-kasus dimana para peminjam KPR ini tidak dapat melunasi pinjaman mereka dikarenakan terjadinya penurunan pendapatan. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi peminjam maka solusi yang diambil oleh peminjam adalah dengan melakukan pengalihan (over) Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana proses dan pelaksanaan pengalihan (over) kredit pemilikan rumah dengan objek hak tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero),Tbk cabang Dharmasraya danbagaimana akibat hukum pengalihan (over) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan objek hak tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero),Tbk cabang Dharmasraya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengalihan (over) KPR di BRICabang Damasraya menggunakan pembaharuan utang (novasi subjektif pasif). Hal ini masih dibenarkan secara hukum karena debitur baru dan bank menandatangani akta pembaharuan hutang. Dengan akta ini, maka semua hutang dan kewajiban dari debitur lama pindah ke debitur baru. Aibat hukum pengalihan (over) KPR ini adalah tidak hanya hutangnya saja yang berpindah dari debitur lama ke debitur baru namun semua kewajiban yang mengikut didalamnya juga berpindah termasuk hutang pokok, bunga, beserta jaminannya. Dalam hal bank memberikan kebijakan khusus seperti memberikan diskon kepada debitur baru maka jumlah kewajiban hutang oleh debitur baru disesuaikan dengan kebijakan bank tersebut.

Kata Kunci: Pengalihan Kredit, KPR, BRI

346
WID
p

PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR AKIBAT KERAMBA JARING APUNG DI DANAU MANINJAU

Widya Fitri Rahmadani, 1610112029, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, 97 halaman

ABSTRAK

Kegiatan budidaya ikan dengan Keramba Jaring Apung (KJA) dinilai (menurunkan) kualitas perairan danau. KJA sudah ada sejak tahun 1992 dilaksanakan di Kabupaten Agam sesuai Keputusan Bupati Kabupaten Agam Nomor 154 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan dan Kawasan Interlan Kabupaten Agam. Untuk kembali terjaminnya kualitas air, maka diperlukan upaya penanggulangan. Penanggulangan merupakan salah satu bagian dari pengendalian. Pengendalian pencemaran dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana kronologi terjadinya pencemaran air akibat Keramba Jaring Apung di Danau Maninjau? 2) Bagaimana penanggulangan pencemaran air akibat Keramba Jaring Apung di Danau Maninjau? 3) Hambatan – hambatan apa yang dihadapi dalam penanggulangan pencemaran air akibat Keramba Jaring Apung di Danau Maninjau dan bagaimana cara mengatasinya? Penelitian ini dilakukan di Danau Maninjau Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Jenis data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1) Kronologi terjadinya pencemaran air akibat KJA di Danau Maninjau dimulai dengan adanya program Minapolitan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, dengan adanya program ini sebagian masyarakat beralih ke KJA karena besarnya daya tarik keuntungan ekonomi yang diperoleh baik dari segi besaran keuntungan maupun waktu. Hal tersebut membuat jumlah KJA mengalami peningkatan setiap tahun dan puncaknya pada tahun 2016 mencapai 17.226 petak. 2) Upaya penanggulangan pencemaran air di Danau Maninjau yang dilakukan oleh pengusaha KJA tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU PPLH karena kegiatan tersebut tidak dimuat dalam Pasal 53 ayat (2) UU PPLH. Penanggulangan pencemaran air yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Agam antara lain adalah berupa pemberian informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat, kegiatan tersebut sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PPLH. 3) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan pencemaran air akibat KJA di Danau Maninjau yaitu tidak ada regulasi Zonasi Perairan Danau Maninjau Maninjau, transfornasi ekonomi dan keterbatasan anggaran. Cara Mengatasinya dengan mendorong percepatan penyusunan regulasi Zonasi Perairan Danau Maninjau, pengalihan mata pencaharian, meminta bantuan dan dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian terkait.

Kata Kunci : Penanggulangan, Pencemaran, Keramba Jaring Apung

346.01
WIN
p

PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG

Wina Cantika, 1710111020, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 73 halaman, 2021

ABSTRAK

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal. Hal ini dapat dicapai dengan diterapkannya prinsip bahwa perkawinan itu untuk selamanya bukan dalam waktu tertentu saja. Maka demikian, perceraian adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh apabila tidak menemukan keharmonisan dan kerukunan lagi dalam rumah tangga. Islam menetapkan bahwa hak cerai itu ada pada suami, tetapi kenyataannya banyak pihak istri yang mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Padang. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, jumlah perkara perceraian tiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2017 terdapat sebanyak 1.403 perkara dengan cerai gugat sebanyak 1.014 sedangkan cerai talak sebanyak 389, pada tahun 2018 terdapat sebanyak 1.482 perkara dengan cerai gugat sebanyak 1.011 sedangkan cerai talak sebanyak 471, pada tahun 2019 terdapat sebanyak 1.554 dengan cerai gugat sebanyak 1.100 sedangkan cerai talak sebanyak 454 perkara. Dapat diketahui, jumlah kasus perkara cerai gugat setiap tahunnya lebih besar dari jumlah perkara cerai talak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa faktor-faktor penyebab cerai gugat di Kota Padang, 2) Apa saja saja faktor yang dominan dari sekian banyak faktor terjadinya cerai gugat di Kota Padang, 3) Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingginya kasus cerai gugat di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Kota Padang adalah krisis akhlak, poligami tidak sehat, kawin paksa, tidak adanya tanggung jawab, ekonomi, dihukum penjara, KDRT, dan perselisihan dan pertengkaran erus menerus. Faktor yang dominan terjadinya cerai gugat di Kota Padang adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, ekonomi dan KDRT. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingginya kasus cerai gugat di Kota Padang adalah dengan melakukan penasehatan perkawinan (screening) sebelum perkawinan, efektivitas mediasi kepada para pihak, memberikan nasehat-nasehat sepanjang sidang, dan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: cerai gugat, faktor penyebab cerai gugat

346.08
YAY
k

KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA LEMBAGA PERBANKAN PASCA DIBENTUKNYA LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA (LAPSPI)

Yayan Hidayat, 1610112011, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2021, 85 Halaman

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa perbankan diluar pengadilan secara non-litigasi dapat diselesaiakan melalui BPSK dan LAPSPI. Terdapatnya dua lembaga yang mempunyai fungsi dan wewenang yang sama, menyebabkan timbulnya tumpang- tindih kewenangan antara BPSK dan LAPSPI karena tidak adanya batas kewenangan yang jelas antar dua lembaga. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah pengaturan kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen, kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa perbankan pasca terbentuknya LAPSPI dan bentuk pelaksanaan penyelesaian sengketa perbankan melalui BPSK dan LAPSPI. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif bersifat preskriptif dari hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui studi pustaka (library research). Dari penelitian yang penulis temukan bahwa kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Pasal 58 pada Bab XI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pasca terbentuknya LAPSPI yang sekarang telah diganti menjadi LAPS-SJK berdasarkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. BPSK masih memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa perbankan. BPSK dan LAPS-SJK merupakan dua lembaga yang dapat menjadi pilihan bagi pihak bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya, dimana kedua belah pihak bersepakat untuk menentukan kemana sengketa mereka akan diselesaikan atau bisa disebut Klausul Pilihan Forum (choice of forum). Bentuk penyelesaian sengketa perbankan melalui BPSK berdasarkan Pasal 52 huruf A Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase sedangkan bentuk penyelesaian sengketa di LAPS-SJK berdasarkan Pasal 8 POJK Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dapat melalui mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Hasil mediasi ini berupa kesepakatan perdamaian yang dapat dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian untuk dapat dilaksanakan. Apabila mediasi tidak berhasil, para pihak dapat melanjutkannya dengan adjudikasi. Putusan adjudikasi ini bersifat final dan mengikat para pihak apabila pemohon menerima putusan adjudikasi secara keseluruhan dan dalam hal ini maka putusan adjudikasi sudah dapat dilaksanakan. Para pihak juga dapat memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa pertama dan terakhir.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, BPSK, LAPSPI

346.01
YEF
p

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPPA) KEPOLISAN DAEARAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Yefrinanda Erico, 1410112055, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 55 halaman, 2021

ABSTRAK

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sudah ada unit di kepolisian yang bertugas untuk menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dan perempuan,namun jumlah kasus masih terus meningkat, hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum tercapai secara maksimal. Bahkan kasus yang paling meningkat dalam kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Sumatera Barat adalah kekerasan seksual dalam rumah tangga yang menjadi titik berat dari penelitian ini.. Rumusan masalah : Bagaimana upaya yang dilakukan oleh unit pelayanan perempuan dan anak kepolisian daerah provinsi sumatera barat dalam menanggulangi tindak pidan kekerasan seksual dalam rumah tangga?, Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan pihak unit pelayanan perempuan dan anak kepolisian daearah provinsi sumatera barat dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual rumah tangga?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Dalam penanggulang tindak pidana kekerasan seksual dalam ruang lingkup keluarga/rumah tangga dapat dilakukan melalui berbagai upaya, diantaranya Pre-emtif, Preventif dan Represif. Upaya Pre-emtif yaitu dengan memberikan Sosialisasi kepada masyarakat, Upaya Preventif yaitu berupa upaya pencegahan dengan melakukan kegiatan patroli ke daerah-daerah untuk mengantisipasi segala bentuk tindak kejahatan.Upaya Represif yaitu bentuk penanggulangan berupa penanganan terhadap kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian,kejaksaan,pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual dalm ruang lingkup rumah tangga anak di Provinsi Sumatera Barat yaitu : pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu, kurangnya informasi yang bisa didapatkan penyidik tentang si pelaku, kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat, kendala dalam visum,kurang nya sarana dan prasarana.

348.04
YES
p

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK MELALUI TELECONFERENCE PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Yesi Puspita, 1710113019, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 61, Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) nyatanya membawa pengaruh terhadap aktivitas persidangan perkara pidana di Indonesia terutama pada tahap pembuktian. Umumnya persidangan perkara pidana dilakukan secara langung dan berhadap-hadapan secara fisik di ruang sidang pengadilan, namun akibat adanya virus tersebut menyebabkan penyelenggaraan aktivitas persidangan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk mengurangi resiko penyebaran virus agar tidak semakin meluas, maka pemerintah Indonesia memutuskan agar persidangan secara konvensional beralih menjadi persidangan secara elektronik menggunakan media teleconference. Hal tersebut juga dilakukan mengingat terbatasnya masa tahanan yang tidak dapat diperpanjang lagi serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap terdakwa maupun kepada para pencari keadilan. Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan salah satu wilayah yang telah menerapkan persidangan berbasis teleconference tersebut dengan mengikuti instruksi SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan Pedoman pada PERMA Nomor 4 Tahun 2020. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : Pertama, Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara elektronik melalui teleconference pada masa pandemi COVID- 19 di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kedua, Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara elektronik melalui teleconference pada masa pandemi COVID-19 di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Untuk menunjang hasil pembahasan dari masalah, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau disebut juga penelitian lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara elektronik melalui teleconference pada dasarnya sama dengan pemeriksaan perkara pidana dengan acara biasa pada KUHAP, namun yang membedakan terletak pada keberadaan peserta sidang yang tidak berada di ruangan yang sama dengan hakim melainkan terpisah menggunakan media elektronik. Dalam pelaksanaanya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menggunakan ketentuan yang ada pada PERMA Nomor 4 Tahun 2020 sebagai pedoman, namun nyatanya dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru seperti tidak mendukungnya kualitas signal internet dan fasilitas elektronik pendukung, kemudian kesulitan pada tahap pembuktian serta kurangnya akses masyarakat. Kata Kunci :

Kata Kunci : Persidangan, Pembuktian, Teleconference

346
YOD
t

TINJAUAN TERHADAP EKSISTENSI TANAH ULAYAT DI KECAMATAN LUBUK BEGALUNG, KOTA PADANG, SUMATERA BARAT

YODA ISLAM MEISTU, 1610113062, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Halaman 62, 2020

ABSTRAK

Tanah ulayat di Minangkabau sudah diakui di dalam hukum Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar – Dasar Agraria (UUPA) sepanjang menurut kenyataan masih ada dan sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut aturan hukum Adat Minangkabau tanah ulayat tidak boleh dijual tapi kenyataannya pada zaman sekarang penulis menemukan tanah ulayat tersebut ada yang dijual yang diperkuat juga melalui hasil wawancara penulis dengan datuak, penghulu dan niniak mamak di kantor Kerapatan Adat Nagari Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertama bagaimana eksistensi tanah ulayat di kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang dan kedua peran niniak mamak, penghulu dan KAN dalam menjaga eksistensi Tanah Ulayat di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Metode yang penulis gunakan adalah metode yuridis sosiologis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dan sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat diskriptif analitis. Berdasarkan penelitian yang dilakulan diperoleh hasil, yakni : 1). Ada 4 faktor yang menjadi penyebab terancamnya eksistensi tanah ulayat di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. 2). Secara garis besar peranan niniak mamak, penghulu dan KAN belum maksimal dalam menjaga eksistensi tanah ulayat di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang diantaranya kurangnya pengawasan, kurangnya melakukan penyuluhan, dan lain – lain.

Kata Kunci : Eksistensi, Tanah Ulayat

341
YOG
p

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN MEDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Yoga Agung Nugraha, 1610112021, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 155 Halaman, Tahun 2021

ABSTRAK

Masalah lingkungan hidup merupakan salah satu kajian internasional,banyak masalah lingkungan hidup yang terjadi dan mengancam keberlangsungan hidup manusia,salah satu contohnya ialah limbah. Limbah dapat mempengaruhi lingkungan dan kesehatan manusia,dalam penggolongan limbah terdapat jenis limbah yang masuk kedalam golongan limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 ada yang dihasilkan oleh rumah sakit yang dinamakan lagi Limbah B3 medis. Dalam melakukan pengelolaan terhadap limbahnya maka perlu diatur beberapa aturan dan pedoman untuk rumah sakit agar tidak adanya timbul masalah mengenai limbahnya,pengelolaan yang tidak sesuai dengan aturan dan pedoman tersebut tentu berpotensi menyebabkan masalah bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia,dan untuk itu perlu diteliti mengenai perilaku dan ketentuan yang di lakukan di beberapa rumah sakit. Dengan ini timbul lah rumusan masalah yaitu (1) Bagaimanakah pengaturan terhadap pengelolaan limbah medis B3 dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional,(2) Bagaimanakah implementasi dari pengelolaan limbah B3 medis di Rumah Sakit M Djamil Padang berdasarkan perspektif hukum internasional dan hukum nasional. Metode penelitian yang diapakai ialah empiris, yang melihat secara langsung perilaku pada penanganan limbah tersebut. Hasil penelitian dan pembahasannya yaitu, dalam pengelolaan Limbah B3 medis terdapat beberapa tahapan yaitu pemilahan,penyimpanan,pengangkutan,pengolahan,penguburan,dan penimbunan. Dalam tahapan pengelolaan tersebut RSUP M Djamil tidak memiliki fasilitas pengolahan seperti autoklaf dan insenerator sehingga RSUP M Djamil tidak melakukan pengolahannya sendiri dan mengharuskan RSUP M Djamil menggunakan jasa pihak ketiga. Dalam melakukan kerjasama tersebut haruslah dilakukan lelang tender terlebih dahulu, dalam jangka waktu lelang tender tersebut maka limbah yang ada di RSUP M Djamil tidak dilakukan pengolahan terhadapnya sehingga mengakibatkan penumpukan limbah sementara.

348.01
YUA
u

URGENSI KEBERADAAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA SEBAGAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL PASCA AMANDEMEN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Yuadita Audia Puteri, 1710113086, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hukum Tata Negara, 2021

ABSTRAK

Indonesia di masa orde baru menerapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai pola pembangunannya. Namun dalam kurun waktu 1999-2002, MPR mencetak sejarah yaitu dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3 MPR menetapkan UUD dan Garis-Garis Besar Haluan Negara diubah menjadi Pasal 3 ayat (1) yang menghapuskan kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN. Maka GBHN yang selama ini dijadikan panduan utama dalam merumuskan rencana pembangunan negara dihapus. Sebagai gantinya, negara membuat sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjadi panduan dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau sering dikenal dengan istilah Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Beberapa tahun terakhir wacana tentang pentingnya GBHN dan rencana untuk menghidupkan kembali GBHN kembali naik ke permukaan. Beberapa kali MPR melalui Badan Pengkajian MPR melakukan kegiatan bersama para akademisi hukum untuk mengkaji seberapa penting dikembalikannya GBHN diwujudkan. Pada penulisan ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas. Pertama, bagaimana urgensi GBHN sebagai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945? Kedua, Bagaimana Relevansi diwujudkan kembali keberadaan GBHN sebagai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengembalikan keberadaan Haluan Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hal yang urgensi. Haluan Negara dapat menjadikan pembangunan nasional sustainable demi terwujudnya tujuan negara. Haluan Negara merupakan perangkat guna menuntun penyelenggara pemerintahan negara dalam upaya mewujudkan tujuan bernegara yang mengandung prinsip-prinsip direktif guna melengkapi Pancasila mengandung prinsip-prinsip filosofis dan Konstitusi mengandung prinsip-prinsip normatif. Mengembalikan GBHN juga menemukan relevansinya karna penerapan mekanisme yang serupa dengan GBHN tidak tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut sebuah negara, apakah itu menganut sistem parlementer atau presidensial. Sebab, praktik penerapan sejenis GBHN ini ternyata dijumpai di banyak negara dengan menganut kedua sistem dimaksud.

344.04
ZAK
p

PELAYANAN PUBLIK DALAM SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU MELALUI PUBLIC SAFETY CENTER 119 KOTA PADANG PANJANG)

Zakiyatussalma, 1710112053, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 Halaman, 2021

ABSTRAK

UUD Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan unsur penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal kegawatdaruratan. Penguatan kualitas pelayanan kegawatdaruratan dilakukan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Sistem ini bertujuan memberikan pertolongan pertama pada kasus kegawatdaruratan di bidang kesehatan. Prinsip pelayanan dalam SPGDT menekankan pada time saving is life saving, dimana semakin cepat waktu yang digunakan untuk merespon setiap kejadian gawat darurat maka semakin besar kesempatan untuk menyelamatkan nyawa pasien. SPGDT diwujudkan dalam bentuk layanan Public Safety Center / Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 119 (PSC 119). Namun, dalam praktiknya ditemukan bahwa masih terdapat beberapa asas, standar pelayanan, dan komponen pelayanan publik yang belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalah yang akan diteliti adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik dalam sistem penanggulangan gawat darurat terpadu melalui PSC 119 Di Kota Padang Panjang ? 2) Apa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pelayanan publik dalam sistem penanggulangan gawat darurat terpadu melalui PSC 119 Di Kota Padang Panjang ? Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik penelitian yang yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa pelaksanaan pelayanan publik dalam sistem penannggulangan gawat darurat terpadu melalui PSC 119 Di Kota Padang Panjang belum sepenuhnya dapat menerapkan asas pelayanan yang baik yang meliputi keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, keprofesionalan, dan partisipatif. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan dalam sistem penannggulangan gawat darurat terpadu melalui PSC 119 Di Kota Padang Panjang adalah faktor hukum dan faktor pendukung lainnya yang terdiri dari faktor kesadaran para pejabat, faktor sarana dan prasarana, faktor Standar Operating Procedure (SOP), dan faktor pengembangan survey kepuasan dan pengelolaan pengaduan.

Kata kunci : Pelayanan Publik, Public Safety Center 119 Kota Padang Panjang

345
ZIK
u

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA PEREMPUAN OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPPA) Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Zikri Arahman Putra , 1710113101, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK IV), 64 halaman – Tahun 2021

ABSTRAK

Meningkatnya kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Sumatera Barat mendorong agar komponen penegak hukum yang ada di Provinsi Sumatera Barat agar lebih maksimal lagi dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Upaya penegakan hukum juga harus diberikan terhadap korban yang mengalami tindak pidana kekerasan terutama terhadap korban perempuan dan juga anak mengingat maraknya terjadi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, dibutuhkan penanggulangan terhadap tindak pidana ini. Artinya sudah menjadi suatu keharusan bagi aparat penegak hukum dan jajarannya untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap korban tindak pidana pelecehan termasuk juga pada wilayah hukum Sumatera Barat yang menjadi tanggung jawab Kepolisian Daerah Sumatera Barat. dengan rumusan masalah : 1. Apa penyebab meningkatnya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan terhadap perempuan di wilayah Sumatera Barat? 2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan kepolisian wilayah Sumatera Barat dan apa saja kendala-kendala yang ditemui kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sosiologis empiris dengan melakukan penelitian pada Polda Sumatera Barat dengan teknis wawancara serta ditambahkan dengan membandingkan dan mempelajari norma hukum. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan adalah sebagai berikut a.Preventif dengan cara mensosialisasikan kesetaraan gender di media sosial dan penyuluhan ancaman pidana b. Represif melakukan penangkapan kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Kendala yang dihdapi ialah : Korban takut dan malu, keterbatasan sumber daya kepolisian, penanganan antar aparat penegak hukum dengan masyarakat yang cenderung imparsial, budaya patriarki yang kental di masyarakat membuat setiap upaya preventif berupa himbauan atau penyuluhan tentang kesetaraan gender menjadi sulit.

Kata kunci : Tindak Pidana, Kekerasan Pada Perempuan, Penanggulangan, Unit PPA